2022
Laporan Tahunan
Annual Report

Transformasi Industri Lebih Hijau dan Bersih

Transformation towards
a Greener and Cleaner Industry

PUPUK INDONESIA
HOLDING COMPANY

Kantor Pusat | Head Office:

Jl. Taman Anggrek-Kemanggisan Jaya
Jakarta 11480, Indonesia
E-mail: info@pupuk-indonesia.com
Hotline: +62 800 100 800 1
SMS: +62 822 100 100 81
Tel.: +62 21 5365 4900
Fax.: +62 21 548 0607; 548 2455

www.pupuk-indonesia.com

PT Pupuk Indonesia
@pupuk_indonesia
pt.pupukindonesia

Transformasi Industri Lebih Hijau dan Bersih

Transformation towards
a Greener and Cleaner Industry

2022

Laporan Tahunan
Annual Report

PT Pupuk Indonesia (Persero)

Transformasi Industri Lebih Hijau dan Bersih

Transformation towards a Greener and Cleaner Industry

Tahun 2022 menjadi catatan tersendiri dalam sejarah Perusahaan, dimana Pupuk Indonesia berhasil meraih laba tertinggi sepanjang sejarah Perusahaan. Capaian ini tak lepas dari keberhasilan program transformasi yang telah dijalankan selama dua tahun terakhir. Beberapa inisiatif yang telah dilakukan, seperti sentralisasi di sejumlah bidang, peningkatan efisiensi dan digitalisasi diberbagai bidang yang terbukti berdampak positif terhadap kinerja Perusahaan.

Perusahaan juga tetap berkomitmen menjalankan tugas dari Pemerintah dalam mengamankan pasokan pupuk dalam negeri dalam rangka mendukung ketahanan pangan dengan tetap menjalankan aspek-aspek bisnis dengan baik sebagaimana diamanahkan oleh Pemegang Saham.

Selain itu, Pupuk Indonesia juga telah menjalankan komitmennya untuk Go Global melalui pembukaan kantor di Uni Emirat Arab, dan menjalankan inisiatif industri hijau melalui pengembangan amonia bersih, serta pengembangan Kawasan Industri Hijau dan keberhasilan meraih PROPER Emas untuk sejumlah anak usahanya sebagai bagian dari upaya pencapaian *Net Zero Emission* (NZE) yang dicanangkan Pemerintah Indonesia pada tahun 2060.

The year 2022 became a separate record in the Company's history, where Pupuk Indonesia managed to achieve the highest profit in the Company's history. This achievement cannot be separated from the success of the transformation program that has been carried out over the past two years. Several initiatives have been carried out, such as centralization in a number of fields, increasing efficiency and digitalization in various fields which have proven to have a positive impact on the Company's performance.

The Company also remains committed to carrying out the duties of the Government in securing domestic fertilizer supply in order to support food security by continuing to carry out business aspects properly as mandated by the Shareholders.

In addition, Pupuk Indonesia has also carried out its commitment to Go Global through opening an office in the United Arab Emirates, and carrying out green industry initiatives through the development of clean ammonia, as well as the development of Green Industrial Estates and the success of achieving Gold PROPER for a number of its subsidiaries as part of efforts to achieve Net Zero Emission (NZE) launched by the Government of Indonesia in 2060.

Daftar Isi
Table of Contents

04 Ikhtisar 2022
2022 Highlights

6 Komitmen Berkelanjutan
Continuous Commitment

8 Pencapaian 2022
2022 Achievement

10 Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights

16 Ikhtisar Saham
Stock Highlights

18 Ikhtisar Obligasi, Sukuk, atau Obligasi Konversi
Bonds, Sukuk, or Convertible Bonds Highlights

19 Informasi tentang Sumber Pendanaan Lainnya
Information Concerning Other Funding Sources

20 Kilas Peristiwa
Events Highlights

26 Laporan Management
Management Report

28 Laporan Komisaris
Report of the Board of Commissioners

40 Laporan Direksi
Report of the Board of Directors

54 Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2022 PT Pupuk Indonesia (Persero)
Statement by the Members of Directors and Members of the Board of Commissioners concerning Responsibility for the 2022 Annual Report of PT Pupuk Indonesia (Persero)

03 Profil Perusahaan
Company Profile

58 Informasi Umum dan Identitas Perusahaan
Company General Information and Identity

60 Riwayat Singkat Perusahaan
Brief Company History

64 Jejak Langkah
Milestone

66 Bidang Usaha, Produk dan Jasa, serta Pasar yang Dilayani
Line of Business, Products and Services, and Markets Served

72 Wilayah Operasional
Operational Area

78 Visi dan Misi
Vision and Mission

86 Filosofi Logo Perusahaan
Company Logo Philosophy

88 Struktur Organisasi
Organizational Structure

92 Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners Profile

100 Profil Direksi
Board of Directors Profile

108 Profil Pejabat Eksekutif
Executive Officer Profile

116 Demografi dan Pengembangan Kompetensi Karyawan
Employee Demographics and Competency Development

134 Pemegang Saham
Shareholders

135 Daftar Entitas Anak dan Entitas Asosiasi, Joint Venture (JV), dan Special Purpose Vehicle (SPV)
List of Subsidiaries and Associates, Joint Ventures (JV), and Special Purpose Vehicles (SPV)

149 Kronologi Penerbitan dan Pencatatan Saham
Chronology of Share Issuance and Listing

151 Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya
Chronology of Issuance and/or Listing of Another Securities

155 Kantor Akuntan Publik
Public Accounting Firm

156 Lembaga dan Profesi Penunjang
Supporting Institutions and Professions

158 Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certifications

163 Daftar Alamat Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Ventura Bersama, serta Informasi tentang Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan
List of Addresses of Subsidiaries, Associates, Joint Ventures, as well as Information on Branch Offices and Representative Offices

166 Informasi pada Situs Web Perusahaan
Information on the Company Website

168 Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

170 Tinjauan Perekonomian dan Industri
Economic and Industry Overview

176 Tinjauan Operasi per Segmen Usaha
Review of Operations by Business Segment

199 Aspek Pemasaran
Marketing Aspects

202 Tinjauan Keuangan dan Informasi Material Lainnya
Financial Review and Other Material Information

276 Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Human Resources Development

278 Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Human Resources Development

300 Teknologi Informasi
Information Technology

314 Riset dan Inovasi
Research and Innovation

328 Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

331 Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Commitment to Implementing Good Corporate Governance

410 Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

425 Dewan Komisaris
Board of Commissioners

440 Komisaris Independen
Independent Commissioners

443 Direksi
Board of Directors

472 Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi
Transparency of Information about the Board of Commissioners and Directors

478 Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi
Performance Assessment of the Board of Commissioners and Directors

481 Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Remuneration of the Board of Commissioners and Directors

488 Rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Gabungan
Board of Commissioners, Directors, and Joint Meetings

500 Organ Pendukung Dewan Komisaris
Supporting Organs of the Board of Commissioners

531 Komite dan Organ Pendukung Direksi
Committees and Supporting Organs of the Board of Directors

544 Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

553 Fungsi Tata Kelola & Kepatuhan
Governance & Compliance Function

559 Komunikasi Korporat
Corporate Communication

565 Audit Internal/Satuan Pengawasan Intern
Internal Audit/Internal Control Unit

588 Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

594 Manajemen Risiko
Risk Management

601 Sistem Manajemen Risiko
Risk Management System

620 Kebijakan Kompensasi Jangka Panjang: Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai dan/atau Manajemen Perseroan (MSOP/ESOP)
Long-Term Compensation Policy: Share Ownership Program by Employees and/or Management of the Company (MSOP/ESOP)

620 Perkara Penting
Legal Matters

621 Akses Informasi dan Data Perusahaan
Access to Company Information and Data

625 Pedoman Etika dan Perilaku
Ethical and Behavioral Guidelines

631 Pengendalian Gratifikasi
Gratification Control

637 Kebijakan Anti *Fraud*/Antikorupsi
Anti-Fraud/Anti-Corruption Policy

640 Informasi Pemberian Dana untuk Kegiatan Politik
Information on Funding for Political Activities

640 Etika Perusahaan dalam Berhubungan dengan Pejabat Publik
Corporate Ethhics in Dealing with Public Officials

641 Pelaporan Kekayaan Pejabat
Offical Wealth Reporting

648 Pengadaan Barang dan Jasa
Procurement of Goods and Services

652 Whistleblowing System
Whistleblowing System

668 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

670 Ikhtisar Keberlanjutan
Sustainability Highlights

673 Laporan Keuangan
Financial Reports

Ikhtisar 2022
2022 Highlights

Komitmen Berkelanjutan

Continuous Commitment

PT Pupuk Indonesia (Persero) telah memiliki peta jalan (*roadmap*) dekarbonisasi sebagai wujud komitmen Perusahaan dalam mendukung target pemerintah: *Net Zero Emission* pada tahun 2060. Inisiatif Perusahaan ini juga sejalan dengan Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-6/MBU/12/2022 tentang Pelaksanaan Program Dekarbonisasi dan Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon di Badan Usaha Milik Negara Untuk Mendukung Pencapaian Target Kontribusi Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca.

Selain *roadmap* dekarbonisasi, PI Grup juga mengembangkan *green ammonia* (yang akan diimplementasikan melalui kombinasi dengan *blue ammonia*) yang diproses dan dihasilkan dari sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Inisiatif ini dijalankan untuk mendukung komitmen PI Grup dalam mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan.

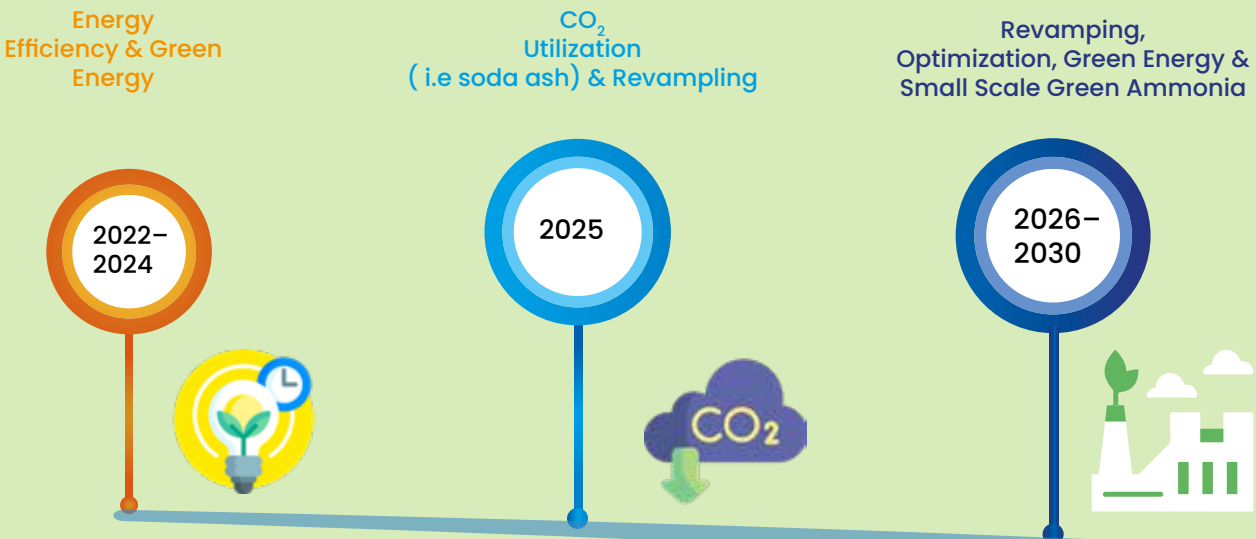

Decarbonization Program (Revamping, Soda Ash, Green Ammonia, Blue Ammonia, etc)

73%

21 Million Ton

PT Pupuk Indonesia (Persero) has a decarbonization roadmap as a form of the Company's commitment to support the government's target: Net Zero Emission by 2060. The Company's initiative is also in line with the Circular Letter of the Minister of SOEs No. SE-6/MBU/12/2022 concerning the Implementation of the Decarbonization Program and the Implementation of Carbon Economic Value in State-Owned Enterprises to Support the Achievement of National Contribution Targets and Control of Greenhouse Gas Emissions.

In addition to the decarbonization roadmap, PI Group is also developing green ammonia (which will be implemented through a combination with blue ammonia) which is processed and produced from renewable energy sources that are more environmentally friendly. This initiative is carried out to support PI Group's commitment in implementing sustainable development.

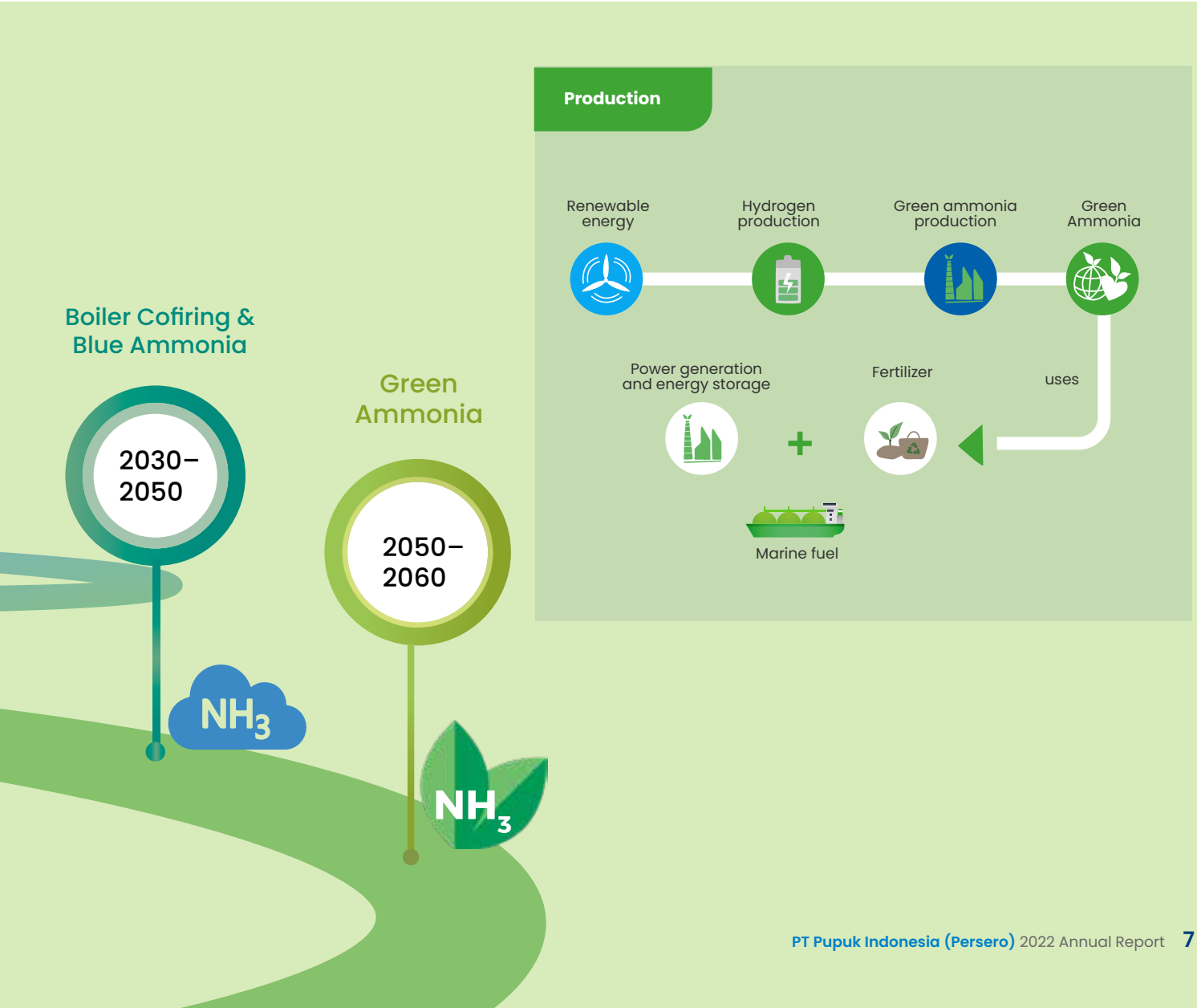

Pencapaian 2022

2022 Achievements

Dengan inisiatif strategis yang telah dijalankan sepanjang tahun 2022, Perusahaan telah berhasil meningkatkan kinerja usaha, baik dari sisi produksi, penjualan, maupun laba dimana PTPI berhasil mencapai laba tertinggi sepanjang sejarah Perusahaan yaitu sebesar Rp18,51 triliun.Selain itu, program transformasi yang telah direalisasikan juga memberikan hasil yang baik, sehingga berkontribusi pada kinerja keuangan.

With the strategic initiatives that have been carried out throughout 2022, the Company has succeeded in improving business performance, both in terms of production, sales, and profits where PTPI managed to achieve the highest profit in the Company's history of Rp18.51 trillion. In addition, the transformation program that has been realized also provides good results, thus contributing to financial performance.

Skor KPI
KPI Score

104,15%

Skor *Assessment* GCG
GCG Assessment Score

96,37

Sangat Baik I Excellent

Tingkat Kesehatan
Health Levels

Sehat AA

Total Volume Produksi Pupuk
Total Volume Fertilizer Production

11.796.218 ton

Total Volume Produksi Non Pupuk
Total Volume Non Fertilizer Production

7.066.531 ton

Total Produksi Produk Samping
Total By-Product Production

73.502 ton

Total Produksi
Total Production

18.936.251 ton

Total Volume Penjualan Pupuk PSO
Total Volume PSO Fertilizer Sales

7.406.566 ton

Total Penjualan Pupuk Non PSO
Total Non-PSO Fertilizer Sales

4.157.003 ton

Total Penjualan Non Pupuk
Total Non Fertilizer Sales

1.453.540 ton

Total Penjualan
Total Sales

13.017.109 ton

Laba Bersih Tahun Berjalan
Net Profit for the Year

Rp **18,511** triliun | trillion

EBITDA

Rp **30,78** triliun | trillion

Total Aset
Total Assets

Rp **158,720** triliun | trillion

Realisasi Program Makmur
Makmur Program Realization

271.622
hektar | hectare

Pengembangan Kiosk Komersil
Commercial Kiosks Development

350
kios | kiosks

Total Ekuitas
Total Equity

Rp **91.160**
triliun | trillion

Rasio Margin Laba Bersih
Net Profit Margin Ratio

17,82%

ROI

20,55%

Proper PI Group

4 Entitas Anak Proper Emas Gold Proper Subsidiary

1 Entitas Anak Proper Hijau Green Proper Subsidiary

Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Consolidated Statements of Financial Position

(Rp juta, kecuali dinyatakan lain) (Rp million, unless otherwise stated)

Uraian	2022	2021	2020	2019*)	2018	YoY 2021-2022 (%)	CAGR 2018-2022 (%)	Description
ASET								**ASSETS**
Jumlah Aset Lancar	77.975.094	44.174.212	38.693.988	46.528.775	57.647.384	76,52	6,23	Total Current Assets
Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	1.103.067	1.178.092	805.785	600.586	448.773	(6,37)	19,71	Investment in Associates and Joint Ventures
Aset Tetap	74.658.647	74.118.213	75.215.169	75.640.216	76.615.664	0,73	(0,52)	Fixed Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar	80.745.413	84.288.960	83.801.568	85.604.117	81.256.095	(4,20)	(0,13)	Total Non-Current Assets
Jumlah Aset	**158.720.507**	**128.463.172**	**122.495.556**	**132.132.892**	**138.903.479**	**23,55**	**2,70**	**Total Assets**
LIABILITAS DAN EKUITAS								**LIABILITIES AND EQUITY**
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	42.749.997	33.008.039	26.335.318	46.193.223	24.524.445	29,51	11,76	Total Current Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	24.810.210	23.515.157	28.797.421	20.298.270	48.352.148	5,51	(12,49)	Total Non-Current Liabilities
Jumlah Liabilitas	**67.560.207**	**56.523.196**	**55.132.739**	**66.491.493**	**72.876.593**	**19,53**	**(1,50)**	**Total Liabilities**
Jumlah Ekuitas	91.160.300	71.939.976	67.362.817	65.641.399	66.026.886	26,72	6,66	Total Equity
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	**158.720.507**	**128.463.172**	**122.495.556**	**132.132.892**	**138.903.479**	**23,55**	**2,70**	**Total Liabilities and Equity**
Modal Kerja Bersih	35.225.097	11.166.173	12.358.670	335.552	33.122.939	215,46	1,24	Net Working Capital
Investasi	3.461.120	2.113.916	1.523.501	2.289.323	4.329.971	63,73	(4,38)	Investment

*) Disajikan kembali dan direklasifikasi

*) Restated and reclassified

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

(Rp juta, kecuali dinyatakan lain) (Rp million, unless otherwise stated)

Uraian	2022	2021	2020	2019*)	2018	YoY 2021-2022 (%)	CAGR 2018-2022 (%)	Description
PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA LAINNYA								**SALES AND OTHER OPERATING INCOME**
Penjualan Produk	64.491.788	49.313.851	37.356.701	34.655.739	35.964.624	30,78	12,39	Sales of Products
Penggantian Biaya Subsidi dari Pemerintah Indonesia	36.109.067	25.258.692	25.712.148	27.875.811	28.568.585	42,96	4,80	Reimbursement of subsidy from the Government of Indonesia
Pendapatan Jasa	3.258.638	4.030.593	8.808.724	8.581.597	4.914.923	(19,15)	(7,89)	Rendering of Services
Jumlah Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan	**103.859.493**	**78.603.136**	**71.877.573**	**71.113.147**	**69.448.132**	**32,13**	**8,38**	**Total Revenue from Contract with Customers**
Beban Pokok Pendapatan	(70.288.172)	(63.469.789)	(60.755.846)	(58.139.318)	(54.477.208)	10,74	5,23	Cost of Revenues
Laba Bruto	**33.571.321**	**15.133.347**	**11.121.727**	**12.973.829**	**14.970.924**	**121,84**	**17,53**	**Gross Profit**
Beban Penjualan	(1.183.293)	(1.280.505)	(1.186.769)	(1.399.485)	(1.405.345)	(7,59)	(3,38)	Selling Expenses
Beban Umum dan Administrasi	(5.956.428)	(4.023.124)	(4.024.090)	(4.048.018)	(4.119.514)	48,05	7,65	General and Administrative Expenses
(Beban)/Pendapatan lainnya-bersih	692.906	150.180	(105.342)	252.927	(140.800)	361,38	(237,54)	(Expense)/Other income-net
Laba Operasi	**27.124.506**	**9.979.898**	**5.805.526**	**7.779.253**	**9.305.265**	**171,79**	**23,86**	**Operating Profit**
Pendapatan Keuangan	271.478	226.343	284.282	345.497	83.304	19,94	26,65	Finance Income
Biaya Keuangan	(2.243.064)	(2.047.494)	(2.975.349)	(3.563.156)	(3.456.859)	9,55	(8,29)	Finance Costs
Bagian atas (Rugi)/ Laba Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	(66.175)	296.018	236.889	65.846	(7.895)	(122,36)	52,99	Share of Net (Loss)/ Profit of Associates and Joint Ventures
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	**25.086.745**	**8.454.765**	**3.351.348**	**4.627.440**	**5.923.815**	**196,72**	**33,47**	**Profit Before Income Tax**
Beban Pajak Penghasilan	(6.576.153)	(3.320.090)	(1.025.767)	(1.634.123)	(1.710.438)	98,07	30,91	Income Tax Expense
Laba Tahun Berjalan	**18.510.592**	**5.134.675**	**2.325.581**	**2.993.317**	**4.213.377**	**260,50**	**34,45**	**Profit for the Year**
Jumlah Penghasilan/ (Rugi) Komprehensif Lain Tahun Berjalan setelah Pajak	1.480.776	46.592	(484.364)	2.971.940	(18.329)	3078,18	(340,70)	Total Other Comprehensive Income/(Loss) for the Year after Tax
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	**19.991.368**	**5.181.267**	**1.841.217**	**5.965.257**	**4.195.048**	**285,84**	**36,65**	**Total Comprehensive Income for the Year**
Total Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:								**Total Profit for the Year Attributable to:**
Pemilik Entintas Induk	18.461.812	5.321.127	2.337.259	2.947.383	4.180.476	246,95	34,59	Owner of the Parent Entity
Kepentingan Non-pengendali	48.780	(186.452)	(11.678)	45.934	32.901	(126,16)	8,19	Non-controlling interests
	18.510.592	5.134.675	2.325.581	2.993.317	4.213.377	260,50	34,45	
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:								**Total Comprehensive Income for the Year Attributable to:**
Pemilik Entintas Induk	19.942.588	5.367.719	1.852.895	5.919.323	4.162.147	271,53	36,80	Owner of the Parent Entity
Kepentingan Non-pengendali	48.780	(186.452)	(11.678)	45.934	32.901	(126,16)	8,19	Non-controlling interests
	19.991.368	5.181.267	1.841.217	5.965.257	4.195.048	285,84	36,65	
Laba per Saham yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk - Dasar dan Dilusian (dalam Rupiah penuh)	**738.472**	**212.845**	**93.490**	**117.895**	**167.219**	**246,95**	**34,59**	**Earnings per Share Attributable to Owner of the Parent Entity - Basic and Diluted (in full Rupiah)**

*) Disajikan kembali dan direklasifikasikan

*) Restated and reclassified

RASIO-RASIO KEUANGAN
Financial Ratios

Uraian	Satuan Unit	2022	2021	2020	2019*)	2018	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2022-2021	Description
PROFITABILITAS								**PROFITABILITY**
Rasio Marjin Laba Bruto	%	32,32	19,25	15,47	18,24	21,56	13,07	Gross Profit Margin Ratio
Rasio Marjin Laba Operasi	%	26,12	12,70	8,08	10,94	13,40	13,42	Operating Profit Margin Ratio
Rasio Marjin Laba Bersih	%	17,82	6,53	3,24	4,21	6,07	11,29	Net Profit Margin Ratio
Rasio Laba Terhadap Aset	%	11,66	4,00	1,90	2,27	3,03	7,66	Profit to Asset Ratio
Rasio Laba Bersih Terhadap Ekuitas	%	27,21	7,95	3,74	4,79	7,29	19,26	Net Income to Equity Ratio
Rasio Imbalan Investasi	%	20,55	11,80	8,58	8,44	9,49	8,75	Investment Return Ratio
Rasio EBITDA terhadap Pendapatan	%	29,64	18,04	13,72	15,23	17,99	11,60	EBITDA to Revenue Ratio
LIKUIDITAS								**LIQUIDITY**
Rasio Kas	%	78,27	52,88	47,11	25,92	73,64	25,39	Cash Ratio
Rasio Cepat	%	134,29	133,83	146,93	100,73	235,06	0,46	Quick Ratio
Rasio Lancar	%	182,40	91,69	102,75	70,95	158,45	90,71	Current Ratio
Rasio Modal Terhadap Aset	%	57,43	56,00	54,99	49,68	43,72	1,43	Capital to Asset Ratio
Rasio Liabilitas Terhadap Aset	%	42,57	44,00	45,01	50,32	52,47	(1,43)	Liability to Asset Ratio
SOLVABILITAS								**SOLVABILITY**
Rasio Utang Terhadap Ekuitas								Debt to Equity Ratio
Leverage	%	74,11	78,57	81,84	101,30	120,00	(4,46)	Leverage
Interest Bearing Debt	%	34,16	43,53	54,46	73,43	94,57	(9,37)	Interest Bearing Debt
Interest Bearing Debt to EBITDA	kali times	1,01	2,21	3,74	4,45	4,60	(1,20)	Interest Bearing Debt to EBITDA
Debt Service to Coverage Ratio (DSCR)	%	482,67	278,12	68,84	76,95	194,64	204,55	Debt Service to Coverage Ratio (DSCR)
Interest Coverage Ratio (ICR)	%	1.372,22	692,53	331,43	303,98	361,52	679,69	Interest Coverage Ratio (ICR)
KOLEKTIBILITAS PIUTANG								**COLLECTIBILITY OF RECEIVABLES**
Rata-rata Hari Pelunasan Piutang	hari day	14,51	22,75	28,57	32,94	48,97	(8,24)	Average Days to Settle Receivables

*) Disajikan kembali dan direklasifikasi

*) Restated and reclassified

ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Consolidated Cash Flow

(Rp juta, kecuali dinyatakan lain) (Rp million, unless otherwise stated)

Uraian	2022	2021	2020	2019*)	2018	YoY 2021-2022 (%)	CAGR 2018-2022 (%)	Description
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	22.030.176	14.517.293	16.076.203	8.605.091	4.757.544	51,75	35,87	Net Cash Flows Generated from Operating Activities
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(4.383.225)	(3.007.701)	(2.957.883)	(2.932.341)	(4.368.796)	45,73	0,07	Net Cash Flows used in Investing Activities
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(2.385.661)	(6.457.203)	(12.746.973)	(11.560.626)	5.062.705	(63,05)	(186,03)	Net Cash Flows used in Financing Activities
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	**15.261.290**	**5.052.389**	**371.347**	**(5.887.876)**	**5.451.453**	**202,06**	**22,86**	**Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents**
Efek Perubahan Nilai Kurs pada Kas dan Setara Kas	746.025	(4.602)	60.775	(197.788)	83.387	(16.310,89)	55,00	Effect of Exchange Rate Changes on Cash and Cash Equivalents
Saldo Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun	17.453.305	12.405.518	11.973.396	18.059.060	12.524.220	40,69	6,86	Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year
Saldo Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun	**33.460.620**	**17.453.305**	**12.405.518**	**11.973.396**	**18.059.060**	**91,72**	**13,13**	**Cash and Cash Equivalents at the End of the Year**

*) Disajikan kembali dan direklasifikasi

*) Restated and reclassified

IKHTISAR OPERASI DAN ORGANISASI
Overview of Operations and Organization

Uraian	Satuan Unit	2022	2021	2020	2019*)	2018	YoY 2021-2022 (%)	CAGR 2018-2022 (%)
VOLUME PRODUKSI | PRODUCTION VOLUME								
Pupuk | Fertilizer								
Urea	Ton	7.467.192	7.968.504	7.983.042	7.722.800	7.444.700	(6,29)	0,06
Non Urea	Ton	4.329.025	4.267.597	4.280.791	4.115.652	4.216.357	1,44	0,53
Total Volume Produksi Pupuk **Total Fertilizer Production**	**Ton**	**11.796.218**	**12.236.101**	**12.263.833**	**11.838.451**	**11.661.057**	**(3,59)**	**0,23**
Non Pupuk | Non Fertilizer								
Amoniak | Ammonia	Ton	5.957.455	6.149.670	6.013.016	5.906.382	5.805.664	(3,13)	0,52
Sulphuric Acid	Ton	886.688	881.200	853.111	849.510	698.796	0,62	4,88
Phosphoric Acid	Ton	222.388	191.856	218.883	270.333	248.714	15,91	(2,21)
Aluminium Fluoride	Ton	9.323	7.265	7.114	11.301	12.653	28,33	(5,93)
Lain-lain | Others	Ton	64.179	58.899	26.295	34.415	35.282	8,96	12,71
Total Volume Produksi Non Pupuk **Total Non Fertilizer Production**	**Ton**	**7.140.033**	**7.288.889**	**7.118.418**	**7.071.941**	**6.801.109**	**(2,04)**	**0,98**
Total Volume Produksi **Total Production Volume**	**Ton**	**18.936.251**	**19.524.990**	**19.382.252**	**18.910.392**	**18.462.166**	**(3,02)**	**0,51**
Rasio Konsumsi Gas | Gas Consumption Ratio								
Urea	MMBTU/ Ton	27,82	27,45	26,86	27,57	28,37	1,35	(0,39)
Amoniak | Ammonia	MMBTU/ Ton	35,77	35,51	35,1	35,92	36,38	0,73	(0,34)
VOLUME PENJUALAN | SALES VOLUME								
Pupuk | Fertilizer								
Pupuk PSO PSO Fertilizer	Ton	7.406.566	7.919.045	8.430.114	8.708.912	9.340.238	(6,47)	(4,53)
Pupuk Non PSO Non PSO Fertilizer	Ton	4.157.003	4.993.125	4.943.888	3.897.150	3.460.377	(16,75)	3,74
Total Volume Penjualan Pupuk **Total Fertilizer Sales**	**Ton**	**11.563.569**	**12.912.170**	**13.374.001**	**12.606.063**	**12.800.615**	**(10,44)**	**(2,01)**
Non Pupuk | Non Fertilizer								
Amoniak | Ammonia	Ton	1.055.915	988.317	797.905	882.938	923.268	6,84	2,72
Non Amoniak | Non Ammonia	Ton	397.625	271.693	199.31	269.024	257.383	46,35	9,09
Total Volume Penjualan Non Pupuk **Total Fertilizer Sales**	**Ton**	**1.453.540**	**1.260.010**	**997.215**	**1.151.961**	**1.180.650**	**15,36**	**4,25**
Total Volume Penjualan **Total Sales**	**Ton**	**13.017.109**	**14.172.180**	**14.371.216**	**13.758.024**	**13.981.266**	**(8,15)**	**(1,42)**
NILAI PENJUALAN DAN PENDAPATAN | SALES AND REVENUE VALUE								
Pupuk | Fertilizer								
Nilai Penjualan Pupuk PSO PSO Fertilizer Sales Value	Rp Juta Rp Million	13.236.944	13.698.647	12.348.619	13.387.374	13.216.339	(3,37)	0,03
Nilai Penjualan Pupuk Non PSO Non PSO Fertilizer Sales Value	Rp Juta Rp Million	33.953.220	25.540.111	18.641.100	14.074.052	10.521.369	32,94	26,40
Total Nilai Penjualan Pupuk **Total Fertilizer Sales Value**	**Rp Juta** **Rp Million**	**47.190.165**	**39.238.758**	**30.989.719**	**27.461.426**	**23.737.708**	**20,26**	**14,73**

Uraian	Satuan Unit	2022	2021	2020	2019*)	2018	YoY 2021-2022 (%)	CAGR 2018-2022 (%)
Non Pupuk | Non Fertilizer								
Total Nilai Penjualan Non Pupuk Total Non Fertilizer Sales Value	Rp Juta	14.404.088	7.593.314	6.366.982	6.833.445	4.808.548	89,69	24,54
Penggantian Biaya Subsidi Pemerintah Indonesia Reimbursement of Subsidiary from the Indonesian Government	Rp Juta	36.109.067	25.258.692	25.712.148	27.875.811	28.568.585	42,96	4,80
Pendapatan Jasa Rendering of Service	Rp Juta	6.156.173	6.512.371	8.808.724	8.942.465	12.333.291	(5,47)	(12,97)
Jumlah Nilai Penjualan dan Pendapatan **Total Sales and Revenue Value**	**Rp Juta**	**103.859.493**	**78.603.136**	**71.877.573**	**71.113.147**	**69.448.132**	**32,13**	**8,38**

*) Disajikan kembali dan direklasifikasi

*) Restated and reclassified

IKHTISAR ORGANISASI
Organizational Overview

Uraian	2022	2021	2020	2019	2018	Description
Jumlah Karyawan (orang)[1)]	7.538	7.853	8.336	8.892	9.661	Number of Employees (people)[1)]
Jam Kerja Aman (Jam)	58.471.948	73.560.164	57.173.988	87.483.770	46.714.507	Safe Working Hours (Hours)
Investasi Pendidikan dan Pelatihan bagi Karyawan (Rp miliar)	194.098	90,094	83,392	142,93	103,12	Investment in Education and Training for Employees (Rp Billion)
Jumlah Mitra Binaan dari Program Kemitraan (mitra)[2)]	1.301	1.030	1.002	1.286	1.307	Number of Partners Assisted by Partnership Program (partners)[2)]
Penyaluran Dana PUMK (Rp miliar)[2)]	100.961	103.475	127.287	157.67	155.994	PUMK Fund Distribution (Rp billion)[2)]
Assessment Penerapan GCG (Skor)[3)]	96,37	92,33	93,90	88,97	91,74	GCG Implementation Assessment (Score)[3)]
Kriteria Penilaian *Baldrige Excellence Framework* (BEF)[4)]	681,00	643,00	609,00	611,25	n/a[5)]	Baldrige Excellence Framework (BEF) Assessment Criteria[4)]
Tingkat Kesehatan Perusahaan (Skor)[6)]	94,00 "AA" Sehat	80,00 "A" Sehat	72,00 "A" Sehat	76,50 "A" Sehat	78,50 "A" Sehat	Company Health Level (Score)[6)]

1) Jumlah karyawan mencakup karyawan PTPI dan 10 entitas anak yang langsungberada di bawah PTPI.
2) Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara beserta perubahan pertama No. PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 dan perubahan kedua No. PER-02/MBU/7/2017 tanggal 5 Juli 2017.
3) *Asessment* penerapan GCG menggunakan metode berdasarkan Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.
4) Metode *assessment* menggunakan pendekatan *Baldrige Excellence Framework* yang dikeluarkan oleh National Institue of Standard and Technology (NIST) Amerika Serikat, sejak 2013-2019 menggunakan KPKU oleh FEB, sejak tahun 2020 menggunakan Kriteria BEF oleh IQAF.
5) *Assessment* KPKU di tahun 2018 tidak dilaksanakan berdasarkan Surat Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN No. S-198/D7.MBU/10/2017 tanggal 7 Oktober 2017 tentang Pelaksanaan *Assessment* Implementasi KPKU BUMN Tahun 2017 butir 3, maka pada tahun 2018 tidak dilaksanakan *Assessment* KPKU.
6) Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.

1) Total employees include employees of PTPI and 10 subsidiaries directly under PTPI.
2) The implementation of the Partnership and Community Development Program is in accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2015 dated July 3, 2015 concerning Partnership Programs and Community Development Programs of State-Owned Enterprises along with the first amendment No. PER-03/MBU/12/2016 dated December 16, 2016 and the second amendment No. PER-02/MBU/7/2017 dated July 5, 2017.
3) Assessment of GCG implementation using methods based on a copy of the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs.
4) The assessment method uses the Baldrige Excellence Framework approach issued by the National Institute of Standard and Technology (NIST) of the United States, since 2013-2019 using KPKU by FEB, since 2020 using BEF Criteria by IQAF.
5) KPKU Assessment in 2018 was not carried out based on the Letter of the Deputy for Business Infrastructure of the Ministry of SOEs No. S-198/D7.MBU/10/2017 dated October 7, 2017 concerning the Implementation of KPKU Implementation Assessment of SOEs in 2017 point 3, so in 2018 no KPKU Assessment was carried out.
6) Assessment of the Company's Health Level is based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. KEP-100/MBU/2002 concerning Health Level Assessment of State-Owned Enterprises.

Ikhtisar Saham
Stock Highlights

JUMLAH SAHAM
Jumlah saham PT Pupuk Indonesia (Persero) sebanyak 25.000.000 lembar saham, dengan kepemilikan 100% atau seluruhnya oleh Pemerintah Republik Indonesia.

NUMBER OF SHARES
The number of shares of PT Pupuk Indonesia (Persero) is 25,000,000 shares, with 100% ownership or entirely by the Government of the Republic of Indonesia.

PENYERTAAN MODAL NEGARA (PMN) SEBAGAI PENYERTAAN MODAL PERUSAHAAN
Sebagai entitas usaha yang mendapatkan modal dari Pemerintah Indonesia, PT Pupuk Indonesia (Persero) memiliki kewajiban untuk menyampaikan kronologi penerbitan saham sejak awal hingga posisi per 31 Desember 2022. Posisi Modal Disetor PTPI per tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp25.000.000.000.000 dengan jumlah lembar saham sebanyak 25.000.000 lembar bernilai Rp1.000.000 per lembar. Berikut kronologi penerbitan saham dari awal sampai akhir tahun buku.

STATE CAPITAL PARTICIPATION (PMN) AS COMPANY CAPITAL PARTICIPATION
As a business entity that receives capital from the Government of Indonesia, PT Pupuk Indonesia (Persero) has an obligation to submit a chronology of share issuance from the beginning to the position as of December 31, 2022. PTPI's paid-up capital position as of December 31, 2022 is Rp25,000,000,000,000 with 25,000,000 shares worth Rp1,000,000 per share. The following is the chronology of share issuance from the beginning to the end of the fiscal year.

Keterangan Description	**Tahun** Year	**Jumlah (Rp juta)** Total (Rp million)	**Akumulasi (Rp juta)** Accumulation (Rp million)	**Akta Notaris** Notarial Deed	**Nama Notaris** Notary's Name
Modal Awal Initial Capital	1970	7.000	7.000	Akta No. 4 tanggal 3 Januari 1970 Deed No. 4 dated January 3, 1970	Soeleman Ardjasasmita, S.H.
Penambahan Additional	1975	24.000	31.000	Akta No. 2 tanggal 1 April 1975 Deed No. 2 dated April 1, 1975	Soeleman Ardjasasmita, S.H.
Penambahan Additional	1976	6.000	37.000	Akta No. 62 tanggal 20 Mei 1976 Deed No. 62 dated May 20, 1976	Soeleman Ardjasasmita, S.H.
Penambahan Additional	1981	108.000	145.000	Akta No. 7 tanggal 5 Oktober 1981 Deed No. 7 dated October 5, 1981	Soeleman Ardjasasmita, S.H.
Penambahan Additional	1984	55.000	200.000	Akta No. 19 tanggal 20 Juli 1984 Deed No. 19 dated July 20, 1984	Soeleman Ardjasasmita, S.H.
Penambahan Additional	1989	870.710	1.570.710	Akta No. 4 tanggal 4 September 1989 Deed No. 4 dated September 4, 1989	Soeleman Ardjasasmita, S.H.
Penambahan Additional	1997	1.829.290	2.900.000	Akta No. 14 tanggal 12 September 1997 Deed No. 14 dated September 12, 1997	Imas Fatimah, SH
Penambahan Additional	2002	6.000	2.906.000	Akta No. 13 tanggal 5 Februari 2002 Deed No. 13 dated February 5, 2002	Imas Fatimah, SH
Penambahan Additional	2005	957.948	3.863.948	Akta No. 20 tanggal 12 September 2005 Deed No. 20 dated September 12, 2005	Fathiah Helmi, SH
Penambahan Additional	2008	390.000	4.253.948	Akta No. 6 tanggal 4 Februari 2008 Deed No. 6 dated February 4, 2008	Fathiah Helmi, SH
Penambahan Additional	2008	35.058	4.289.006	Akta No. 15 tanggal 11 Desember 2008 Deed No. 15 dated December 11, 2008	Fathiah Helmi, SH
Penambahan Additional	2011	6.321.000	10.610.006	Akta No. 7 tanggal 7 Januari 2011 Deed No. 7 dated January 7, 2011	Fathiah Helmi, SH
Penambahan Additional	2012	1.338.048	11.948.054	Akta No. 11 tanggal 19 Januari 2012 Deed No. 11 dated January 19, 2012	Lumassia, SH
Penambahan Additional	2013	951.854	12.899.908	Akta No. 14 tanggal 26 April 2013 Deed No. 14 dated April 26, 2013	Nanda Fauz Iwan, S.H.
Penambahan Additional	2018	12.100.092	25.000.000	Akta No. 3 tanggal 24 Oktober 2018 Deed No. 3 dated October 24, 2018	Lumassia, SH

INFORMASI TENTANG PENCATATAN SAHAM DAN KEPEMILIKAN SAHAM OLEH PUBLIK SERTA AKSI KORPORASI LAINNYA

Hingga 31 Desember 2022, PTPI tidak pernah melakukan Penawaran Umum Saham Perdana dan tidak memperdagangkan sahamnya kepada publik. PTPI juga tidak melakukan aksi korporasi seperti aksi pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), saham bonus, maupun penurunan nilai nominal saham.

INFORMATION ON THE LISTING OF SHARES AND SHARE OWNERSHIP BY THE PUBLIC AS WELL AS OTHER CORPORATE ACTIONS

Until December 31, 2022, PTPI never conducted an Initial Public Offering and did not trade its shares to the public. PTPI also does not carry out corporate actions such as stock splits, reverse stock mergers, bonus shares, or a decrease in the nominal value of shares.

DIVIDEN SAHAM

Realisasi pembagian Dividen tunai untuk hasil usaha tahun buku 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

SHARE DIVIDENDS

The realization of cash dividend distribution for the 2022 and 2021 financial year results is as follows:

Dividen Saham	**2022 (untuk Hasil Usaha Tahun Buku 2021)** 2022 (for Fiscal Year 2021 Operating Results)	**2021 (untuk Hasil Usaha Tahun Buku 2020)** 2021 (for Fiscal Year 2020 Operating Results)	**Peningkatan/ (Penurunan)** Increase/ (Decrease)	Share Dividend
Laba Bersih yang Diatribusikan Kepada Entitas Induk (Rp Juta)	5.321.127	2.337.259	127,67%	Net Income Attributable to Parent Entity (Rp Million)
Jumlah Dividen Kas yang Dibagikan (Rp Juta)	750.000	588.030	27,54%	Total Cash Dividends Distributed (Rp Million)
Dividen Kas per Saham (Rp)	30.000	23.521	27,55%	Cash Dividend per Share (Rp)
Rasio Pembagian Dividen (%)	14,09%	25,16%	(44,00)%	Dividend Distribution Ratio (%)
Tanggal Pengumuman	29 Juni 2022 June 29, 2022	30 Juni 2021 June 30, 2021	-	Announcement Date
Tanggal Pembayaran	• Pembayaran I: 28 Juli 2022 • Pembayaran II: 29 Agustus 2022 • Pembayaran III: 29 September 2022 • Payment I: July 28, 2022 • Payment II: August 29, 2022 • Payment III: September 29, 2022	• Pembayaran I: 29 Juli 2021 • Pembayaran II: 30 Agustus 2021 • Pembayaran III: 29 September 2021 • Payment I: July 29, 2021 • Payment II: August 30, 2021 • Payment III: September 29, 2021	-	Payment Date

Ikhtisar Obligasi, Sukuk, atau Obligasi Konversi

Bonds, Sukuk, or Convertible Bonds Highlights

PTPI telah beberapa kali menerbitkan Obligasi yang dananya digunakan seluruhnya untuk *refinancing* pinjaman perbankan dan obligasi sebelumnya. Obligasi yang masih beredar tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Selain obligasi berikut ini, PTPI tidak menerbitkan efek apa pun dalam bentuk lain.

PTPI has issued several bonds, the proceeds of which were used entirely to refinance bank loans and previous bonds. Bonds that are still outstanding in 2022 can be seen in the table below. Other than the following bonds, PTPI does not issue any securities in other forms.

OBLIGASI YANG MASIH BEREDAR HINGGA 2022
Bonds Still Outstanding until 2022

Tahun Penerbitan Issuance Year	**Nama Obligasi** Name of Bond	**Tanggal Penerbitan** Date Issued	**Nilai Obligasi** Bond Value **(Rp)**	**Tanggal Jatuh Tempo** Maturity Date	**Tingkat Suku Bunga** Interest Rate	**Peringkat** Rating	**Status Pembayaran** Payment Status	**Bursa Efek** Stock Exchange
2017	Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri B (PIHC01BCN1) PTPI Shelf Registration Bonds I, Stage I, Year 2017, Series B (PIHC01BCN1)	12 Juli 2017 July 12, 2017	2.085.000.000.000	12 Juli 2024 July 12, 2024	8,60%	Fitch AAAidn (Outlook Stable)	Aktif/Belum Lunas Active/Not Yet Paid	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
2020	Obligasi Berkelanjutan II PTPI Tahap I Seri A (PIHC02ACN1) PTPI Shelf Registration Bonds II Phase I Year 2020 Series A (PIHC02ACN1)	3 September 2020 September 3, 2020	1.146.825.000.000	3 September 2023 September 3, 2023	7,00%	Fitch AAAidn (Outlook Stable)	Aktif/Belum Lunas Active/Not Yet Paid	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
	Obligasi Berkelanjutan II PTPI Tahap I Seri B (PIHC02BCN1) PTPI Shelf Registration Bonds II Phase I Year 2020 Series B (PIHC02BCN1)	3 September 2020 September 3, 2020	857.835.000.000	3 September 2025 September 3, 2025	7,70%	Fitch AAAidn (Outlook Stable)	Aktif/Belum Lunas Active/Not Yet Paid	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
	Obligasi Berkelanjutan II PTPI Tahap I Seri C (PIHC02BCN1) PTPI Shelf Registration Bonds II Phase I Year 2020 Series C (PIHC02CCN1)	3 September 2020 September 3, 2020	431.850.000.000	3 September 2027 September 3, 2027	8,30%	Fitch AAAidn (Outlook Stable)	Aktif/Belum Lunas Active/Not Yet Paid	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
2021	Obligasi Berkelanjutan II PTPI Tahap II Seri A (PIHC02ACN2) PTPI Shelf Registration Bonds II Phase II Year 2020 Series A (PIHC02ACN2)	10 Maret 2021 March 10, 2021	350.000.000.000	10 Maret 2024 March 10, 2024	5,60%	Fitch AAAidn (Outlook Stable)	Aktif/Belum Lunas Active/Not Yet Paid	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange

Tahun Penerbitan Issuance Year	Nama Obligasi Name of Bond	Tanggal Penerbitan Date Issued	Nilai Obligasi Bond Value (Rp)	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Tingkat Suku Bunga Interest Rate	Peringkat Rating	Status Pembayaran Payment Status	Bursa Efek Stock Exchange
	Obligasi Berkelanjutan II PTPI Tahap II Seri B (PIHC02BCN2) PTPI Shelf Registration Bonds II Phase II Year 2020 Series B (PIHC02BCN2)	10 Maret 2021 March 10, 2021	1.600.000.000.000	10 Maret 2026 March 10, 2026	6,20%	Fitch AAAidn (Outlook Stable)	Aktif/Belum Lunas Active/Not Yet Paid	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
	Obligasi Berkelanjutan II PTPI Tahap II Seri C (PIHC02BCN2) PTPI Shelf Registration Bonds II Phase II Year 2020 Series C (PIHC02CCN2)	10 Maret 2021 March 10, 2021	800.000.000.000	10 Maret 2028 March 10, 2028	7,20%	Fitch AAAidn (Outlook Stable)	Aktif/Belum Lunas Active/Not Yet Paid	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
	Total		**7.271.510.000.000**					

OBLIGASI YANG TELAH DILUNASI PADA PERIODE 2021-2022
Bonds Paid Off in 2021-2022

Tahun Penerbitan Issuance Year	Nama Obligasi Name of Bond	Tanggal Penerbitan Date Issued	Nilai Obligasi Bond Value (Rp)	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Tingkat Suku Bunga Interest Rate	Peringkat Rating	Status Pembayaran Payment Status	Bursa Efek Stock Exchange
2017	Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri B (PIHC01BCN2) PTPI Shelf Registration Bonds I Phase II Year 2017 Series B (PIHC01BCN2)	9 November 2017 November 9, 2017	1.774.000.000.000	9 November 2022 November 9, 2022	7,90%	Fitch AAAidn (Outlook Stable)	Lunas sesuai Jatuh Tempo Matured	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
	Total		**1.774.000.000.000**					

Informasi tentang Sumber Pendanaan Lainnya
Information Concerning Other Funding Sources

Hingga akhir tahun 2022, PTPI tidak memiliki sumber pendanaan lainnya selain melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebagai penyertaan modal Perusahaan, penerbitan obligasi seperti yang telah disampaikan di atas, serta pinjaman perbankan.

Until the end of 2022, PTPI has no other sources of funding other than through State Equity Participation (PMN) as the Company's equity participation, bond issuance as mentioned above, and bank loans.

Kilas Peristiwa
Events Highlights

12 Januari | January

Mou Makmur BUMN
Pupuk Indonesia Bersama 6 BUMN kerja sama Program Makmur.

Mou Makmur BUMN
Pupuk Indonesia and 6 SOEs Cooperate in Makmur Program.

31 Januari | January

Penandatanganan MoU *Offtake Potash*
Penandatanganan MoU Kerja Sama *Offtake Potash* antara MIND ID dan Pupuk Indonesia

MoU Signing of Potash Offtake
MoU Signing of Potash Offtake Cooperation between MIND ID and Pupuk Indonesia

2 Februari | February

MoU Dekarbonisasi BUMN
MoU Pengembangan Pengembangan Program *Green/ Blue Hydrogen & Ammonia* Sebagai Kelanjutan Program Dekarbonisasi antara Pupuk Indonesia dengan Pertamina dan Mitsubishi Corp.

SOE Decarbonization MoU
MoU for the Development of Green/Blue Hydrogen & Ammonia Program as a Continuation of Decarbonization Program between Pupuk Indonesia, Pertamina and Mitsubishi Corp.

23 Februari | February

MoU *Green Industry Cluster* antara Pupuk Indonesia, Pertamina dan PLN
Komitmen Pupuk Indonesia dalam Mendukung *Net Zero Emission*.

MoU on Green Industry Cluster between Pupuk Indonesia, Pertamina and PLN
Pupuk Indonesia's Commitment to Support Net Zero Emission.

16 Maret | March

***Groundbreaking* Pabrik Katalis Merah Putih**
Pupuk Indonesia Dukung Sinergi Pengembangan Katalis Merah Putih.

Merah Putih Catalyst Plant Groundbreaking
Pupuk Indonesia Supports Red and White Catalyst Development Synergy.

30 Maret | March

Penandatanganan MoU Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Penandatanganan MoU Kerja Sama Investasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe antara Pupuk Iskandar Muda dan PT Energi Mega Persada

The signing of the MoU for Special Economic Zone (SEZ)
The signing of the MoU on Investment Cooperation for Arun Lhokseumawe Special Economic Zone (SEZ) between Pupuk Iskandar Muda and PT Energi Mega Persada.

3 April | April

HUT Pupuk Indonesia
1 Dekade, Makmur Bersama Indonesia.

PI Anniversary
1 Decade, Prospering with Indonesia.

28 April | April

Mudik Bersama
Pupuk Indonesia Sukseskan Program Mudik Bersama BUMN.

Commuting Together
Pupuk Indonesia Successful Program Commuting Together with SOEs.

1 Juni | June

MoU pasokan fosfat antara Pupuk Indonesia dengan JPMC di Viena Austria
Kunjungan Kerja Pupuk Indonesia ke Austria dalam Rangka Pengamanan Pasokan Bahan Baku NPK.

Raw Material MoU with JPMC in Viena Austria
Pupuk Indonesia's Working Visit to Austria to Secure the Supply of NPK Raw Materials.

16-17 Juni | June

Kunjungan Direksi dan Erick Thohir ke Petrokimia Gresik
Direksi Pupuk Indonesia Dampingi Menteri BUMN Erick Thohir di Acara Konvensi Inovasi Petrokimia Gresik (KIPG).

Directors and Erick Thohir Visit to Petrokimia Gresik
Pupuk Indonesia Directors Accompany SOE Minister Erick Thohir at Petrokimia Gresik Innovation Convention Event.

24 Juni | June

MoU Reaktivasi Rel Kereta Api Sawahlunto
Penandatanganan MOU reaktivasi jalur kereta lintas Sawahlunto-Muaro Kalaban antara Pupuk Indonesia Idngan KAI, Bio Farma dan Semen Indonesia.

MoU on Sawahlunto Railroad Reactivation
The signing of the MOU for the reactivation of the Sawahlunto-Muaro Kalaban railway line between Pupuk Indonesia and KAI, Bio Farma and Semen Indonesia.

1 Juli | July

Panen MAKMUR Tebu di Kediri
PanenTebu Program Makmur di Kediri.

MAKMUR Harvest of Sugarcane in Kediri
Harvest of Sugarcane Makmur Program in Kediri.

7 Juli | July

***Opening* Pupuk Indonesia Innovation Award**
Direksi Pupuk Indonesia Membuka Acara Pupuk Indonesia Innovation Award.

Opening Pupuk Indonesia Innovation Award
Directors of Pupuk Indonesia Open Pupuk Indonesia Innovation Award Event.

18 Juli | July

Direksi Pupuk Indonesia Meluncurkan Aplikasi Rekan
Pupuk Indonesia Resmi Meluncurkan Aplikasi Rekan di Bali.

Directors of Pupuk Indonesia Launches Rekan App
Pupuk Indonesia Officially Launches Rekan App in Bali.

15 Agustus | August

Panen Raya tebu MAKMUR di Subang
Wakil Direktur Utama Pupuk Indonesia melakukan Panen Tebu Program Makmur di Subang.

Harvest of sugarcane MAKMUR in Subang
Vice President Director of Pupuk Indonesia Conducts Sugarcane Harvesting Makmur Program in Subang.

5 September | September

***Launching Single Responsibility* PSO**
Pupuk Indonesia Luncurkan *Single Responsibility*.

Launching Single Responsibility PSO
Pupuk Indonesia Launches Single Responsibility.

5-8 **September** | September

Pupuk Indonesia *Quality Improvement* (PIQI) 2022
Pupuk Indonesia Menyelenggarakan PIQI 2022.

Pupuk Indonesia Quality Improvement PIQI 2022
Pupuk Indonesia held PIQI 2022 event.

28 **September** | September

Peluncuran *Roadmap* Riset Klaster Pupuk 2022-2031
Pupuk Indonesia meluncurkan *Roadmap* Riset Klaster Pupuk 2022-2031

Launching of Fertilizer Cluster 2022-2031 Research Roadmap
Pupuk Indonesia Launched Fertilizer Cluster 2022-2031 Research Roadmap

10 **Oktober** | October

Penandatanganan MoU dengan BNPT
Pupuk Indonesia Kolaborasi dengan BNPT Cegah Perilaku Terorisme.

MoU Signing with BNPT
Pupuk Indonesia Collaborates with BNPT to Prevent Terrorism Behavior.

12 **Oktober** | October

Peluncuran Respectful Workplace Policy (RWP)
Wujudkan Suasana Kerja Aman, Pupuk Indonesia Luncurkan Program RWP.

Launching Respectful Workplace Policy (RWP)
Creating a Safe Working Environment, Pupuk Indonesia Launches RWP Program.

17 Oktober | October

MOU Kendaraan Listrik Berbasis Baterai

Pupuk Indonesia Berkomitmen Pengembangan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai.

MOU on Battery-Based Electric Vehicles

Pupuk Indonesia Committed to Battery-Based Electric Vehicle Development.

31 Oktober | October

Peresmian Kantor Dubai

Wakil menteri BUMN I meresmikan kantor perwakilan Pupuk Indonesia di Dubai, UEA.

Inauguration of Dubai Office

SOE deputy minister I inaugurated Pupuk Indonesia's representative office in Dubai, UAE.

November | November

Kesepakatan Bersama *Blueprint* CSV PI Group

Kesepakatan Bersama *Blueprint* CSV Pupuk Indonesia Grup.

PI Group CSV Blueprint Joint Agreement

Joint Agreement on CSV Blueprint Pupuk Indonesia Group.

20 Desember | December

Reaktivasi KA MAK ITAM Sawah Lunto-Muaro Kalaban

Tingkatkan Pariwisata dan Ekonomi Nasional, Pupuk Indonesia Reaktivasi KA Mak Itam.

MAK ITAM Sawah Lunto–Muaro Kalaban Train Reactivation

Improving Tourism and National Economy, Pupuk Indonesia Reactivates Mak Itam Train.

Desember | December

Launching Pedoman Implementasi RWP

Launching Pedoman Implementasi RWP Di Lingkungan Pupuk Indonesia Group.

Launching of RWP Implementation Guidelines

Launching of RWP Implementation Guidelines within Pupuk Indonesia Group.

Laporan Manajemen

Management Report

Laporan Komisaris
Report of the Board of Commissioners

Manajemen PTPI berhasil merespons memomentum pemulihan ekonomi pasca COVID-19 dengan baik, sehingga menghasilkan kinerja yang positif.

PTPI management managed to respond well to the post-COVID-19 economic recovery momentum, resulting in positive performance.

Darmin Nasution
Komisaris Utama dan Komisaris Independen
President Commissioner and Independent Commissioner

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Our respected Shareholders and Stakeholders,

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang maha Esa atas nikmat-Nya bagi kita semua, sehingga PT Pupuk Indonesia (Persero) ("PTPI", "Perusahaan") mampu memanfaatkan peluang di tengah beragam tantangan yang dihadapi sepanjang tahun 2022. Perusahaan masih tetap menjaga reputasinya dan mempertahankan posisi sebagai pemain terkemuka di lingkungan industri pupuk di Indonesia dan regional.

Selanjutnya, Perusahaan akan tetap mempertahankan prestasi ini dengan selalu memberikan usaha terbaiknya di masa mendatang. Sejalan dengan tekad ini, jajaran Dewan Komisaris berikut Organ Pendukung Dewan Komisaris akan senantiasa memberikan dukungan penuh yang dilakukan Direksi sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam perjalanan usaha Perusahaan mencapai tujuannya.

Pada tahun 2022 Dewan Komisaris menyadari situasi setiap industri usaha banyak dipengaruhi faktor eksternal yang penuh dengan tantangan, terutama terkait perkembangan ekonomi global. Dinamika geopolitik juga menyebabkan terganggunya rantai pasok, lebih lanjut meningkatkan inflasi serta respon kenaikan suku bunga acuan, sehingga memberikan tantangan yang perlu dicermati dengan sangat hati-hati oleh Manajemen.

Adapun respons Pemerintah terhadap kondisi global tersebut, dalam pandangan Dewan Komisaris, telah dilakukan dengan sangat baik. Kebijakan yang diambil dalam usaha menstabilkan kondisi perekonomian dalam negeri membuat kegiatan industri dapat tetap berjalan dengan baik.

Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas seluruh capaian kinerja selama Tahun 2022. Beberapa hal dapat kami highlight atas capaian kinerja di Tahun 2022 antara lain capaian target *Key Perfomance Indicators* (KPI) di tingkat korporasi/kolegial sebesar 104,15%. Capaian laba tahun berjalan sampai dengan tahun 2022 secara

Let us first and foremost praise God the Almighty for His Blessings for all of us, which allowed PT Pupuk Indonesia (Persero) ("PTPI", "the Company") to turn the various challenges of fiscal year 2022 into opportunities. We've been able to reaffirm the Company's strong reputation and leading role not only in the Indonesian fertilizer industry but also across the entire region.

We've then committed the Company to keeping up this achievement and delivering even more in the future. To remain consistent with this inherent commitment of ours, we are determined to work with our supporting governance bodies to lend the Board of Directors our full support as the Company moves on its journey towards achieving its corporate goals.

We did acknowledge the enormous challenges brought about by external factors impacting virtually every industry, due particularly to global economic landscape that was developing unpredictably. We also saw geopolitical dynamics that caused disruptions in supply chains, soaring inflation, and the subsequently higher benchmark interest rate that the Management had to observe with extra care.

We were grateful that the Indonesian Government had responded well to this unfavorable global landscape. The policies they released had proven effective in stabilizing the nation's economy as industrial activities were revving up.

We would like commend what the Company accomplished in the reporting year. Let us mention some of accomplishments by first highlighting how the Board was successful in achieving 104.5% of their agreed Key Performance Indicators (KPI) target at the corporate/ collegial level. In finances, the Company delivered

konsolidasi sebesar Rp18,51 triliun atau 378,30% dari target RKAP Tahun 2022. Realisasi EBITDA sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp30,78 triliun atau 224,84% dari target RKAP Tahun 2022 dan total aset perusahaan sampai dengan akhir tahun 2022 mencapai Rp158,72 triliun atau 126,31% terhadap RKAP Tahun 2022 atau 124,88% terhadap periode yang sama tahun sebelumnya.

Rp18.51 trillion in net income or accounting for 378.30% of the 2022 RKAP target, Rp30.78 trillion in EBITDA or accounting for 224.84% of the 2022 RKAP target, and recorded Rp158.72 trillion in Total Assets or accounting for 126.31% of the 2022 RKAP or expanding 124.88% from the previous year's corresponding period.

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI TERKAIT PENGELOLAAN PERUSAHAAN: DASAR PENILAIAN DAN HASIL PENILAIAN

ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF THE BOARD OF DIRECTORS RELATED TO THE MANAGEMENT OF THE COMPANY: BASIS OF ASSESSMENT AND ASSESSMENT RESULTS

Dasar Penilaian

Dalam memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi, Dewan Komisaris sekurang-kurangnya berpegang pada pencapaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dan pemenuhan *Key Performance Indicator* (KPI) yang ditetapkan oleh Pemegang Saham. KPI tersebut menjadi panduan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pemberikan penilaian terhadap Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha.

Kendati demikian, Dewan Komisaris juga mempertimbangkan perkembangan kondisi eksternal yang dihadapi oleh manajemen. Sebab, pencapaian target yang telah ditetapkan, tetap akan dipengaruhi juga oleh perkembangan kondisi eksternal yang terjadi sepanjang tahun buku.

Assessment Basis

In making assessment of the performance of the Board of Directors, we measured at least the Company's achieved Health Level and how the Board of Directors met the Key Performance Indicators (KPIs) as had been determined by the Shareholders. We used the agreed KPIs as the key reference in overseeing and assessing how the Board of Directors ran the Company's business.

It nevertheless would be unfair if we did not mention the tough external landscape that the Management had to navigate through all year long since we do acknowledge the impacts it had had on the Company's overall target achievements.

Pengawasan Dewan Komisaris dalam Perumusan dan Implementasi Strategi Perusahaan yang Dilakukan Direksi

Kegiatan pengawasan tahun 2022 yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022 Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero). Sektor pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris sesuai dengan SK-16/S.MBU/2012, meliputi:

1. Pengawasan implementasi *Blue Print*/RJPP;
2. Pengawasan implementasi RKAP;
3. Pengawasan sistem pengendalian internal perusahaan;
4. Pengawasan manajemen risiko perusahaan;
5. Pengawasan sistem teknologi informasi perusahaan;
6. Pengawasan kebijakan dan pelaksanaan SDM (termasuk diklat dan remunerasi);
7. Pengawasan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan (termasuk usulan KAP);
8. Pengawasan kebijakan dan pelaksanaan pengadaan;
9. Pengawasan kebijakan dan pelaksanaan pemasaran;
10. Pengawasan kebijakan mutu dan layanan;

Supervision of the Board of Commissioners in the Formulation and Implementation of Corporate Strategy by the Board of Directors

We did our oversight in 2022 based on the 2022 Work Plan and Budget that we had planned in our capacity as the Board of Commissioners of PT Pupuk Indonesia (Persero). We focused on the following aspects in accordance with SK-16/S.MBU/2012:

1. The implementation of the Blue Print/RJPP;
2. The implementation of the RKAP;
3. The Company's internal control system;
4. Corporate risk management;
5. The Company's information technology systems;
6. HR policies and implementation (including training and remuneration);
7. Accounting policies and the preparation of financial reports (including KAP proposals);
8. Procurement policy and implementation;
9. Marketing policies and implementation;
10. The quality and service policies;

11. Pengawasan kebijakan dan pelaksanaan riset dan pengembangan perusahaan;
12. Pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga.

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris dibantu oleh Organ Pendukung Dewan Komisaris yang terdiri atas Komite Audit, Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Sekretaris Dewan Komisaris. Komite Audit memiliki tugas untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan pengendalian internal Perseroan melalui laporan-laporan audit internal sesuai dengan peraturan yang berlaku, memberikan rekomendasi terkait penelaahan atas informasi keuangan, aktivitas pelaksanaan manajemen risiko, dan hasil audit internal oleh Satuan Pengawasan Intern dan audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam proses penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP).

Komite GCG & PMR juga memiliki peranan penting dalam melakukan review dan pemantauan atas kebijakan atas pelaksanaan RKAP, RJPP dan atau kebijakan strategis bisnis serta memantau potensi risiko yang dihadapi perusahaan serta memantau pelaksanaan manajemen risiko di perusahaan Komite Nominasi dan Remunerasi merumuskan kebijakan nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris melalui pengawasan identifikasi setiap potensi SDM yang akan memasuki proses atas pelaksanaan nominasi dan menyelenggarakan prosedur pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

Sekretariat Dewan Komisaris selama ini telah menunjang pelaksanaan fungsi, kelancaran tugas dan tanggung jawabnya kepada Dewan Komisaris. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan di lingkungan, Mengatur teknis Rapat Komisaris dan rapat pertemuan antara Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi maupun pihak–pihak terkait (*stakeholder*) lainnya/ sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas dengan pihak lain.

Kegiatan pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi perusahaan dilakukan dalam bentuk kegiatan rapat Dewan Komisaris dengan melibatkan Direksi yang membahas berbagai topik/ masalah serta kunjungan kerja/lapangan. Selama tahun 2022, Dewan Komisaris mengadakan rapat sebanyak 62 (enam puluh dua) kali yang terdiri dari yang terdiri dari 12

11. Research and development policies and implementation;
12. Laws and regulations and agreements with third parties.

In exercising our oversight function, we were assisted by governance bodies who worked under us e.g. the Audit Committee, the GCG and Risk Management Monitoring Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Secretary to the Board of Commissioners. The Audit Committee's assistance included overseeing the Company's internal control through law-abiding internal audit reports, giving recommendations on the review of financial information, risk management implementation activities, and the results of internal audits by the Internal Audit Unit and external audits by Public Accounting Firm (KAP) while helping us with recommendations during the process of appointing a Public Accounting Firm (KAP).

The GCG & PMR Committee also played a pivotal role in reviewing and monitoring the RKAP, RJPP and or strategic business policies executions and monitoring risk exposures and risk management. The Nomination and Remuneration Committee formulated nomination and remuneration policies for both the Boards of Directors and Commissioners, identified every potential HR as they went through the nomination process and ran the procedure of determining the remuneration packages for members of the two boards.

The Board of Commissioners' Secretariat has assisted us with its functions and smooth implementation of its duties and responsibilities. The secretariat also carried out administration activities, organize technical meetings for Commissioners and meetings between Commissioners and Shareholders, Directors and other stakeholders while acting as a liaison officer for the Board of Commissioners/ Supervisory Board with other parties.

We carried out our oversight activities in the formulation and implementation of company strategy through our joint meetings where we had discussions on various topics/ issues and by paying on-the-ground visits. Throughout the reporting 2022, we convened a total of 62 (sixty two) meetings which consisted of 12 (twelve) regular internal meetings, 38 (thirty eight) ad hoc internal meetings and

(dua belas) kali rapat internal rutin Dewan Komisaris, 38 (tiga puluh delapan) kali rapat internal non rutin Dewan Komisaris dan 12 (dua belas) kali rapat Dewan Komisaris yang menyertakan Direksi. Dewan Komisaris juga telah melaksanakan 8 (delapan) kali kunjungan lapangan ke berbagai anak perusahaan sepanjang tahun 2022.

Penilaian terhadap Hasil Kinerja

Penilaian kinerja Direksi melekat pada Key Performance Indicator (KPI) korporasi yang telah disusun di awal tahun dan disepakati dengan pemegang saham sebagai kontrak manajemen. KPI bertujuan sebagai panduan bagi Direksi untuk dapat mengarahkan dan mengelola seluruh sumber daya Perusahaan secara sistematis. Bagi Dewan Komisaris, KPI berguna sebagai panduan pemantauan dalam melakukan tugas pengawasan.

Sebagai BUMN sekaligus Holding Industri Pupuk, penilaian KPI Direksi yang melekat pada KPI korporat diatur oleh Kementerian BUMN berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara. KPI Korporat sebagai KPI Kolegial Direksi ini mencakup 5 (lima) perspektif, yaitu perspektif Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia meliputi kinerja finansial, operasional, dan sosial; perspektif Inovasi Model Bisnis mencakup beberapa indikator seperti luasan lahan program Makmur, COGM Pupuk, restrukturisasi Anak Perusahaan, dan *streamlining* lini bisnis PI Group; perspektif Kepemimpinan Teknologi dengan penekanan pada implementasi *Advanced Analytics* dan *Digital Fertilizer* serta Digitalisasi Proses Rantai Pasok; perspektif Peningkatan Investasi mencakup pengembangan optimalisasi Pabrik Urea dan NPK serta pengembangan Pabrik *Adjacent Chemicals*; serta perspektif Pengembangan Talenta meliputi persentase milenial (≤42 tahun) dalam *Nominated Talent* dan perempuan dalam *Nominated Talent*.

Melalui KPI inilah Dewan Komisaris menjalankan tugas pengawasan, termasuk pencapaian KPI sebagai alat *monitoring* pencapaian kinerja Perusahaan. Berikut disampaikan pencapaian KPI Direksi untuk tahun 2022.

12 (twelve) joint meetings with the Board of Directors. We further exercised our oversight function by paying as many as 8 (eight) on-the-ground visits to a number of the Company's subsidiaries throughout 2022.

Assessment of Performance Results

Inherently, we assessed the Board of Directors' performance against the corporate Key Performance Indicator (KPI) prepared at the beginning of the year and agreed upon by the shareholders as a management contract. The KPI offered guidance to the Board of Directors in systematically directing and managing all of the Company's resources. On our end, we used the KPI as guide to monitor their activities.

As an SOE and Holding entity in the Fertilizer Industry, the Company attaches its Board of Directors' KPI assessment to corporate KPI regulated by the Ministry of SOE based on Minister of SOE Regulation No. PER-11/MBU/11/2020 concerning Management Contracts and Annual Management Contracts for Directors of EOE. Collegially, the Corporate KPI covers 5 (five) perspectives i.e. the Economic and Social Value perspective for Indonesia in financial, operational and social performances; Business Model Innovation perspective that covers certain indicators such as the land area of Makmur program, Fertilizer COGM, restructuring of Subsidiaries, and streamlining of the PI Group's business lines; Technology Leadership perspective which emphasizes Advanced Analytics and Digital Fertilizers as well as Digitalization of Supply Chain Process; Increasing Investment perspective that covers optimally developing Urea and NPK Plants as well as Adjacent Chemicals Plant; and Talent Development perspective that covers the percentage of millennial (≤42 years) in Nominated Talent and women in Nominated Talent.

It is based on this KPI that we exercised our oversight duties, including the achievement of KPIs as a means of monitoring how well the Company progressed. The following are the Board of Directors' KPI achievements for 2022.

No.	KPI	Bobot Weight (%)	Skor Score	KPI
1	Finansial, Operasional, dan Sosial	30,00	33,00	Financial, Operational, and Social
2	Inovasi Model Bisnis	20,00	20,54	Business Model Innovation
3	Kepemimpinan Teknologi	15,00	16,28	Technology Leadership
4	Peningkatan Investasi	25,00	23,33	Increased Investment
5	Pengembangan Talenta	10,00	11,00	Talent Development
	Total	**100,00**	**104,15**	**Total**

Atas pencapaian KPI tersebut, Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi atas berbagai upaya, Langkah dan kerja keras yang telah dilakukan oleh Direksi dalam rangka memenuhi target-target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 khususnya mengenai luasan lahan Makmur yang melampaui target, serta upaya digitalisasi proses rantai pasok. Dengan ini diharapkan proses rantai pasok pupuk dapat menjadi lebih efektif dan efisien.

Dewan Komisaris juga menyambut baik atas pencapaian kinerja keuangan PTPI di tahun 2022. Meningkatnya penjualan dan pendapatan usaha lainnya serta laba bersih tahun berjalan, serta arus kas dan posisi keuangan yang menguat, menjadi indikator penting bagi PTPI untuk tetap tumbuh di tengah situasi ancaman krisis pangan global.

Dewan Komisaris juga yakin bahwa Direksi akan memastikan kelanjutan beberapa pelaksanaan inisiatif strategis yang belum selesai atau yang perlu dikembangkan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA YANG DISUSUN OLEH DIREKSI

Dalam menyongsong tahun 2023, perlu adanya antisipasi dan strategi yang matang. Hal ini dikarenakan kondisi ketidakpastian global yang masih akan membayangi ditambah dengan ancaman resesi global yang dapat mempengaruhi daya beli konsumen, meskipun dampak pandemik COVID-19 diasumsikan telah pulih. Diperkirakan akan terjadinya adanya penurunan harga jual pupuk, sedangkan biaya produksi internasional tetap tinggi.

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa ada tahun 2023 Pemerintah akan melakukan pembatasan jenis pupuk subdisi dari semula ada 5 (lima) jenis (ZA, Urea, NPK, SP-36, dan pupuk organic) menjadi hanya 2 (dua) jenis

On these achieved KPIs, we would herewith like to express our appreciation to the Board of Directors for their successful efforts, steps and hard work to meet the Company's 2022 targets, especially in terms of Prosperous Land that exceeded the target in addition to other effort to digitalize supply chain process. We do hope to see a more effective and more efficient supply chain process in the entire fertilizer industry.

We would also like to applaud the achievement of PTPI's financial performance in 2022. Higher figures if sales and other operating income as well as net profit for the current year, as well as a stronger cash flow and financial position indicate that PTPI is positioned for continued growth amidst the recent threat of global food crisis.

Further, we are more than certain that the Board of Directors can resume their uncompleted strategic initiatives or ones that they have yet to develop more optimally in the future.

OUTLOOK ON BUSINESS PROSPECTS PREPARED BY THE BOARD OF DIRECTORS

It is necessary for the Board of Directors to anticipate the unexpected with well-thought strategies as the Company embarks on 2023. The cloud of global uncertainty and possible recession may affect consumer purchasing power despite growing assumption that the COVID-19 pandemic has been defeated. We expect lower selling prices of fertilizer, an unfavorable trend given that international production costs will likely remain high.

Attention should be paid though on the Government's plan to restrict subsidies in fertilizers from originally 5 (five) types (ZA, Urea, NPK, SP-36, and organic fertilizers) to only 2 (two) types (Urea and NPK). The restriction will also apply to

pupuk subisidi (Urea dan NPK). Jenis komoditas yang disasar untuk pupuk subsidi pun dibatasi, dari semula 70 komoditas menjadi hanya 9 komoditas utama saja, yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kopi, dan kakao. Untuk itu, Direksi perlu benar-benar memperkuat penjualan di sektor komersil.

commodities as the subsidized commodity will be reduced from previously 70 commodities to only 9 commodities, namely rice, corn, soybeans, chilies, shallots, garlic, sugar cane, coffee, and cocoa. This should prompt the Board of Directors to strengthen commercial sales.

Dewan Komisaris menyambut baik proyeksi kinerja PTPI tahun 2023, baik proyeksi meningkatnya produksi maupun penjualan produk pupuk dan non-pupuk, termasuk upaya PTPI untuk tetap menjaga alokasi penjualan dalam mempertahankan penjualan pupuk di sektor non subsidi tetap tinggi. Demikian pula proyeksi kinerja keuangan yang mencerminkan komitmen kuat PTPI dalam menjaga momentum pertumbuhan di tengah situasi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih ditambah dengan bayang-bayang resesi global. Dewan Komisaris sungguh berharap, proyeksi kinerja ini akan menjadi acuan bagi seluruh jajaran Perusahaan untuk dapat terus menumbuh kembangkan PTPI di masa-masa mendatang.

We read PTPI's 2023 performance projections with optimism, both in projected increases in production and sales of fertilizer and non-fertilizer products, including PTPI's efforts to maintain sales allocations in maintaining high sales of fertilizer in the non-subsidized sector. We have equally strong optimism towards the Company's projected finances which reflects it unrelenting commitment to maintaining growth momentum amidst the somewhat partly recovered economic situation and possible cloud of global recession. We do hope everyone at the Company will use this upbeat projection as they work to expand the Company's business in the future.

PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN

Dewan Komisaris bertugas dalam melakukan pengawasan, khususnya dalam memberikan masukan yang sejalan dengan aspirasi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut, Dewan Komisaris berkomitmen dalam menjaga hubungan dengan Direksi melalui kesamaan pandangan untuk mencapai visi dan misi perusahaan.

IMPLEMENTATION OF SUPERVISORY DUTIES

We are in charge of overseeing, particularly in providing input consistent with the aspirations of shareholders and all stakeholders. In carrying out this oversight function, we are committing ourselves to maintaining relations with the Board of Directors through a common perception towards the Company's stated vision and mission.

Selama 2022, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugastugas pengawasan berupa penyelenggaraan rapat, kunjungan kerja ke lapangan, pemberian rekomendasi, serta melaksanakan *review* atas kebijakan, prosedur, visi dan misi Perusahaan.

During 2022, we exercised these oversight duties by holding meetings, paying on-the-ground visits, giving recommendations, and conducting reviews of Company policies, procedures, vision and mission.

Penyelenggaraan rapat dengan Direksi dilakukan minimal sebulan sekali untuk mengevaluasi kinerja Perusahaan pada bulan sebelumnya, prognosa kinerja bulan berjalan dan rencana aksi peningkatan kinerja di periode berikutnya.

We held at least one meeting in a month with the Board of Directors to evaluate the Company's performance in the previous month, the current month's performance prognosis and device action plans for improvements for the following period.

Kinerja Perusahaan, baik dari sisi produksi maupun keuangan tidak terpisahkan dari penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/GCG). Dewan Komisaris selalu mengedepankan prinsipprinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam rangka menjamin keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.

We know we should not dissociate the Company's performance, both in terms of production and finance from the application of the principles of good corporate governance (GCG). We have always placed priority on the principles of good corporate governance in order to ensure long-term business sustainability.

Dalam pandangan Dewan Komisaris, GCG akan membantu memastikan Perusahaan dalam kondisi sehat dari segi operasional, legal dan finansial, sekaligus mempersiapkan Perusahaan untuk bersaing di tengah turbulensi eksternal yang terkadang sulit diduga. Dalam menjaga tata kelola perusahaan yang baik, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugas pengawasan maupun pemberian rekomendasi dengan mengedepankan kepentingan Perusahaan dalam jangka panjang.

PENILAIAN ATAS PELAKSANAAN GCG DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN

PT Pupuk Indonesia berkomitmen secara penuh untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten, komprehensif, dan berkesinambungan di setiap kegiatan usaha sehari-hari dan di seluruh aspek bisnis sebagai langkah untuk meningkatkan kinerja dan value Perusahaan agar mampu tumbuh dan berkesinambungan di tengah iklim bisnis yang semakin kompetitif dan dinamis.

Pupuk Indonesia menyadari bahwa penerapan tata kelola perusahaan merupakan landasan utama dalam menjalankan usaha. Melalui tata kelola perusahaan yang baik, Pupuk Indonesia dapat meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan dan menjalankan kegiatan usaha di industri perpupukan, petrokimia, agrokimia dan kimia lainnya, serta agroindustri secara sehat sekaligus menjaga kepercayaan Pemegang Saham, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya, sampai kepada peran Pupuk Indonesia sebagai entitas usaha milik negara (BUMN) yang menjadi bagian dari agen percepatan pertumbuhan perekenomian Indonesia.

Pupuk Indonesia secara konsisten menerapkan prinsip prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk menjaga keselarasan dan keseimbangan antara kepentingan Perusahaan dan para pemangku kepentingan dalam meraih kinerja yang optimal dan meningkatkan value Perusahaan. Komitmen Pupuk Indonesia dalam menerapkan dan menegakkan tata kelola perusahaan yang baik secara simbolis tertuang dalam pernyataan komitmen yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Pupuk Indonesia. Pernyataan tersebut tercantum dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Code of Corporate Governance*) PT Pupuk Indonesia (Persero).

In our view, an effective implementation of corporate governance ensures the Company will remain operationally and financially healthy and put it in a position to compete in the midst of external turbulence that often most than not develops in unpredictable way. In maintaining good corporate governance, we exercise our oversight duties and give recommendations with a priority placed on the Company's long term interests.

ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION OF GCG IN THE COMPANY

PT Pupuk Indonesia is fully committed to implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG) in a consistent, comprehensive and sustainable manner in every day-to-day business activities and in all aspects of the business a step forwards towards delivering stronger performance and values that will allow the Company to grow sustainably in the increasingly competitive and dynamic business climate.

Pupuk Indonesia realizes that the implementation of corporate governance is the main foundation on which to run the business. We are convinced that corporate governance will help Pupuk Indonesia to improve the quality of decision making and run a sound business in the fertilizer, petrochemical, agrochemical, as well as the agro and other industries while maintaining the trust of Shareholders, the public and all other stakeholders, and strengthen the Company's status as a state-owned enterprise (SOE) that plays a contributing part as one of agents that accelerate the growth of the Indonesian economy.

Pupuk Indonesia consistently applies the principles of good corporate governance to maintain harmony and balance between the interests of the Company and its stakeholders as we strive to deliver optimum performance and increase the value of the Company. Pupuk Indonesia's commitment to implementing and enforcing good corporate governance is symbolically contained in a statement of commitment signed by all members of both the Boards of Commissioners and Directors of Pupuk Indonesia. This statement is enclosed in the Guidelines for Good Corporate Governance (Code of Corporate Governance) of PT Pupuk Indonesia (Persero).

Pupuk Indonesia telah mengembangkan struktur dan sistem tata kelola perusahaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG serta *best practice* yang berlaku baik secara nasional maupun internasional. Penerapan prinsip prinsip GCG juga merupakan bagian dari kepatuhan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER 01I/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BUMN dan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) 2021.

Pupuk Indonesia has developed a corporate governance structure and system using both applicable national and international GCG principles and best practices as references. The application of GCG principles is also part of compliance as a State-Owned Enterprise (SOE) with the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER 01I/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Governance in SOEs and General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUG-KI) 2021.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN ALASAN PERUBAHAN

Pada tahun buku 2022, terjadi perusahaan pada komposisi Dewan Komisaris. Melalui Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai No. SK-253/MBU/11/2022 tanggal 4 November 2022 sebagai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), telah mengangkat Farhat Brachma sebagai Komisaris, menggantikan Bambang Widianto. Dewan Komisaris mengucapkan selamat bertugas kepada Farhat Brachma, sekaligus menyampaikan terima kasih kepada Bambang Widianto atas kontribusi dan sumbangsinya kepada Perusahaan selama menjabat.

Dengan demikian, hingga berakhirnya 2022, komposisi Dewan Komisaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND REASONS FOR THE CHANGES

In the 2022 financial year, there was a change in the composition of the Board of Commissioners. Through the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOE) No. SK-253/MBU/11/2022 dated November 4, 2022 as the General Meeting of Shareholders (GMS), has appointed Farhat Brachma as Commissioner, replacing Bambang Widianto. The Board of Commissioners would like to congratulate Farhat Brachma and thank Bambang Widianto for his contributions to the Company during his tenure.

Thus, until the end of 2022, the composition of the Company's Board of Commissioners is as follows:

Jabatan	**Nama** | Name	Position
Komisaris Utama dan Komisaris Independen	Darmin Nasution	President Commissioner and Independent Commissioner
Komisaris	Ari Dwipayana	Commissioner
Komisaris	Febrio Nathan Kacaribu	Commissioner
Komisaris	Suwandi	Commissioner
Komisaris	Anwar Sanusi	Commissioner
Komisaris	Farhat Brachma	Commissioner
Komisaris Independen	Mustoha Iskandar	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Anhar Adel	Independent Commissioner

APRESIASI

Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih kepada Pemegang Saham yang telah memberikan kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan Perusahaan. Apresiasi kepada Direksi atas komitmen dan dedikasinya dalam memanfaatkan seluruh potensi yang ada di Perusahaan sehingga mampu mencapai target-target perusahaan di Tahun 2022.

Dewan Komisaris juga menyampaikan penghargaan kepada segenap jajaran Pupuk Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah operasi dan pemasaran Perusahaan, atas ketekunan dan kerja keras selama ini untuk mendukung kinerja Perusahaan. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Pelanggan, Mitra Usaha dan segenap Pemangku Kepentingan atas kepercayaan, dukungan, peran dan kontribusi yang diberikan sehingga Pupuk Indonesia mampu mencapai kinerja positif dan terus tumbuh.

Dengan terus membangun sinergi yang kuat dan harmonis, PT Pupuk Indonesia (Persero) berkomitmen untuk menuju pencapaian visi dan misi Perusahaan serta mampu menghadapi peluang dan tantangan di masa yang akan datang.

APPRECIATION

We finally would like to express our gratitude to the Shareholders for giving us the opportunity to be part of the Company's journey. Our appreciation also goes to the Board of Directors for their commitment and dedication in unleashing all of the Company's potential that has allowed them to accomplish their stated targets in 2022.

We would also like to give appreciation to Pupuk Indonesia's employees across all levels and throughout the Company's operational and marketing areas, for their continued diligence and hard work to support the Company's performance. We know we must not forget to thank all customers, business partners and all stakeholders for their trust, support, role and contribution that enabled Pupuk Indonesia to deliver this strong performance and grow continuously.

PT Pupuk Indonesia will use the strong and harmonious synergies as a commitment to achieve its stated vision and mission and surmount whatever challenge while capturing every emerging opportunity in the future.

Jakarta, 26 April 2023
Atas Nama Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)
On behalf of the Board of Commissioner of PT Pupuk Indonesia (Persero)

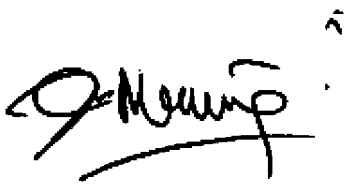

Darmin Nasution
Komisaris Utama dan Komisaris Independen
President Commissioner and Independent Commissioner

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Farhat Brachma
Komisaris
Commissioner

Ari Dwipayana
Komisaris
Commissioner

Darmin Nasution
Komisaris Utama dan Komisaris Independen
President Commissioner and Independent Commissioner

Suwandi
Komisaris
Commissioner

Anhar Adel
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Anwar Sanusi
Komisaris
Commissioner

Mustoha Iskandar
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Fabro Nathan Kacaribu
Komisaris
Commissioner

Laporan Direksi
Report of the Board of Directors

Dengan inisiatif strategis yang telah dijalankan sepanjang tahun 2022, Perusahaan telah berhasil meningkatkan kinerja usaha, baik dari sisi produksi, penjualan, maupun laba di mana PTPI berhasil mencapai laba tertinggi sepanjang sejarah Perusahaan yaitu sebesar Rp18,5 triliun.

With the strategic initiatives that have been carried out throughout 2022, the Company has succeeded in improving business performance, both in terms of production, sales, and profits where PTPI managed to achieve the highest profit in the Company's history of Rp18.5 trillion

Bakir Pasaman
Direktur Utama
President Director

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentinganyang Terhormat,

Dear Shareholders and Stakeholders,

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, PT Pupuk Indonesia (Persero) ("PTPI", "Perusahaan") dapat melalui tahun 2022 dengan capaian kinerja operasional dan keuangan yang positif. Di tengah kondisi eksternal yang bergerak dinamis, Perusahaan terus melakukan yang terbaik dengan menjaga kualitas dan kuantitas produk agar dapat memenuhi kebutuhan pasar.

Dengan inisiatif strategis yang telah dijalankan sepanjang tahun 2022, Perusahaan telah berhasil meningkatkan kinerja usaha, baik dari sisi produksi, penjualan, maupun laba dimana PTPI berhasil mencapai laba tertinggi sepanjang sejarah Perusahaan yaitu sebesar 18,4 triliun. Selain itu, program transformasi yang telah direalisasikan juga memberikan hasil yang baik, sehingga berkontribusi pada kinerja keuangan.

Di antara dampak positif tersebut terlihat pada pencapaian EBITDA *uplift* di tahun 2022 mencapai Rp1,9 triliun. Angka ini meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,0 triliun.

Perkembangan penting lain dalam kinerja Perusahaan pada tahun 2022 adalah inisiatif untuk mendorong ekosistem energi bersih di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan Klaster Industri Hijau (KIH) yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun di Lhokseumawe, Aceh.

Selain itu, pada tahun 2022 Perusahaan telah membuka kantor perwakilan di Dubai, Uni Emirat Arab (UAE). Ekspansi global ini relevan dengan inisiatif energi bersih Perusahaan melalui pengembangan amonia rendah karbon dan bersih melalui *blue ammonia* dan *green ammonia*. Kedua jenis amonia ini akan menjadi salah satu sumber energi bersih masa depan dunia, yang sejalan dengan target *Net Zero Emission* (NZE) pemerintah Indonesia pada tahun 2060.

With praise and gratitude to God Almighty, PT Pupuk Indonesia (Persero) ("PTPI", "the Company") can go through 2022 with positive operational and financial performance achievements. In the midst of dynamic external conditions, the Company continues to do its best by maintaining product quality and quantity in order to meet market needs.

With the strategic initiatives that have been carried out throughout 2022, the Company has succeeded in improving business performance, both in terms of production, sales, and profits where PTPI managed to achieve the highest profit in the Company's history of 18.4 trillion. In addition, the transformation program that has been realized also provides good results, thus contributing to financial performance.

Among the positive impacts can be seen in the achievement of EBITDA uplift in 2022 reaching Rp1.9 trillion. This figure increased when compared to the previous year which amounted to Rp1.0 trillion.

Another important development in the Company's performance in 2022 is the initiative to drive the clean energy ecosystem in Indonesia. This was done through the development of the Green Industry Cluster (KIH) located in the Arun Special Economic Zone (SEZ) in Lhokseumawe, Aceh.

In addition, in 2022 the Company has opened a representative office in Dubai, United Arab Emirates (UAE). This global expansion is relevant to the Company's clean energy initiative through the development of low-carbon and clean ammonia through blue ammonia and green ammonia. Both types of ammonia will become one of the world's future clean energy sources, which is in line with the Indonesian government's Net Zero Emission (NZE) target by 2060.

PERKEMBANGAN KONDISI EKONOMI DAN INDUSTRI

Memasuki tahun 2022, kondisi perekonomian memberikan ekspektasi positif seiring dengan pulihnya pandemi COVID-19. Kehidupan sosial kembali normal, sehingga mendukung perekonomian. Namun di tengah perjalanan, perang Rusia-Ukraina berkecamuk, sehingga berdampak serius terhadap kondisi global.

Ketegangan geopolitik tersebut menimbulkan disrupsi terhadap rantai pasok (*supply chain*) di tingkat global. Pasokan barang menyusut di tengah pemulihan yang sedang terjadi. Akibatnya, tercipta ketidakseimbangan antara tingkat permintaan dan tingkat pasokan, yang pada akhirnya melambungkan harga-harga, terutama komoditas pangan dan energi di pasar global.

Inflasi yang tinggi di banyak negara, termasuk Indonesia, tak terhindarkan. Sejumlah bank sentral, terutama Amerika Serikat, merespons dengan kenaikan suku bunga acuan. Begitu juga dengan Bank Indonesia. Kebijakan ini membuat *cost of fund* menjadi lebih mahal, yang berpotensi menekan kinerja industri.

Dalam kondisi yang dinamis tersebut, perekonomian Indonesia tetap Tangguh. Hingga akhir tahun 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi nasional tumbuh 5,31% (*year on year*/yoy). Seluruh lapangan usaha juga tumbuh positif. Untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, pada tahun 2022 tumbuh 2,25% (yoy).

DEVELOPMENT OF ECONOMIC AND INDUSTRIAL CONDITIONS

Entering 2022, economic conditions provide positive expectations along with the recovery of the Covid-19 pandemic. Social life returned to normal, supporting the economy. But on the way, the Russia-Ukraine war broke out, which had a serious impact on global conditions.

The geopolitical tensions caused disruptions to supply chains at the global level. The supply of goods is shrinking amidst the ongoing recovery. As a result, an imbalance between demand and supply was created, which in turn catapulted prices, especially of food and energy commodities in the global market.

High inflation in many countries, including Indonesia, is inevitable. A number of central banks, especially the United States, responded with interest rate hikes. The same applies to Bank Indonesia. This policy makes the cost of funds more expensive, which has the potential to suppress industry performance.

In these dynamic conditions, the Indonesian economy remains resilient. Until the end of 2022, the Central Statistics Agency (BPS) recorded that the national economy grew by 5.31% (year on year/yoy). All business fields also grew positively. For the agriculture, forestry and fisheries sector, in 2022 it grew 2.25% (yoy).

ANALISIS ATAS KINERJA PERUSAHAAN 2022

Kendala dan Tantangan yang Dihadapi

Pada tahun 2022 terdapat beberapa kendala yang dihadapi Perusahaan dalam mencapai target kinerja, di antaranya sebagai berikut:

1. Tingginya harga komoditas bahan baku pupuk NPK internasional, sehingga mempengaruhi kenaikan biaya produksi pupuk NPK.
2. Keterlambatan penyelesaian proyek yang dikerjakan oleh entitas anak pada segmen jasa konstruksi.

Dalam mengatasi kendala tersebut, Perusahaan telah melakukan beberapa upaya di antaranya sebagai berikut:

1. Melakukan pengamanan kontrak jangka panjang untuk bahan baku berbasis fosfat untuk kebutuhan produksi NPK.
2. Restrukturisasi keuangan dalam memperbaiki kondisi keuangan entitas anak sehingga proyek tersebut dapat diselesaikan.

ANALYSIS OF COMPANY PERFORMANCE 2022

Obstacles and Challenges Faced

In 2022, there were several obstacles faced by the company in achieving its performance targets, including the following:

1. The high commodity prices of international NPK fertilizer raw materials have affected the increase in NPK fertilizer production costs.
2. Delays in completion of projects undertaken by subsidiaries in the construction services segment

In overcoming these obstacles, the company has made several efforts including the following:

1. Securing long-term contracts for phosphate-based raw materials for NPK production needs
2. Financial restructuring in improving the financial condition of the subsidiary so that the project can be completed.

Strategi dan Kebijakan Strategis

Sepanjang tahun 2022, manajemen telah mengimplementasikan sejumlah strategi dan kebijakan strategi sebagai respons terhadap situasi yang berkembang, sekaligus upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Di antaranya melalui peningkatan penjualan pupuk non-subsidi ritel.

Kemudian, mendorong program Agrosolution dan Makmur. Kegiatan ini telah berhasil direalisasikan pada lahan seluas 271 ribu hektar.

Untuk mendukung rencana strategis tersebut, Perusahaan terus meningkatkan ketersediaan pupuk non-subsidi, antara lain melalui pengembangan kios komersial atau Toko Pe-i. Pada tahun 2022, Toko Pe-i telah berdiri sebanyak 350 kios di berbagai daerah.

Perusahaan akan terus mengembangkannya hingga mencapai target 1.000 kios pada tahun 2023. Program ini sangat strategis, karena akan membantu memperluas akses bagi petani terhadap pupuk non-subsidi. Inisiatif ini juga bertujuan untuk mengisi kesenjangan (*gap*) kebutuhan pupuk yang belum terakomodir dalam subsidi.

Sejalan dengan upaya peningkatan penetrasi pada produk pupuk non-subsidi, Perusahaan melakukan optimalisasi rantai pasok, produksi dan perawatan pabrik, program *cost-reduction*, penguatan strategis di bidang *human capital*, implementasi *data science*, serta penerapan digitalisasi di hampir seluruh lini bisnis dan operasional Perusahaan.

Terkait penugasan pupuk bersubsidi, Perusahaan terus mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi melalui digitalisasi. Dalam hal ini, PTPI menerapkan *Distribution Planning & Control System* (DPCS) dan *Track & Trace* untuk memantau distribusi pupuk secara *real time*. Di tingkat kios, Perusahaan telahh melakukan uji coba aplikasi digital *Retail Management System* atau REKAN di Provinsi Bali dan Aceh. Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah proses penebusan pupuk bersubsidi oleh petani.

Tidak hanya itu saja, PTPI juga terus mendorong ekosistem energi bersih di Indonesia dengan mengembangkan Klaster Industri Hijau (KIH) yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun di Lhokseumawe, Aceh. Kawasan seluas 2.600 hektar tersebut akan mengembangkan *blue ammonia, green ammonia, biomethane*, dan menjadi LNG *Hub* yang memanfaatkan potensi gas dari Blok Andaman.

Strategic Strategy and Policy

Throughout 2022, management has implemented a number of strategies and strategic policies in response to the evolving situation, as well as efforts to achieve the set targets. Among them is through increasing sales of retail non-subsidized fertilizers.

Then, it encourages the Agrosolution and Makmur programs. This activity has been successfully realized on 271 thousand hectares of land.

To support the strategic plan, the Company continues to increase the availability of non-subsidized fertilizers, among others through the development of commercial kiosks or Toko Pe-i. By 2022, Toko Pe-i will have established 350 kiosks in various regions.

The company will continue to expand it until it reaches its target of 1,000 kiosks by 2023. This program is very strategic, as it will help expand access for farmers to non-subsidized fertilizers. This initiative also aims to fill the gap in fertilizer needs that have not been accommodated under the subsidy.

In line with efforts to increase penetration in non-subsidized fertilizer products, the Company optimizes the supply chain, production and factory maintenance, cost-reduction programs, strategic strengthening in the field of human capital, implementation of data science, and implementation of digitalization in almost all lines of business and operations of the Company.

Regarding the assignment of subsidized fertilizers, the Company continues to support the government's efforts in improving the governance of subsidized fertilizer distribution through digitalization. In this case, PTPI implements Distribution Planning & Control System (DPCS) and Track & Trace to monitor fertilizer distribution in real time. At the kiosk level, the Company has tested the digital Retail Management System or REKAN application in Bali and Aceh Provinces. This application aims to simplify the redemption process of subsidized fertilizers by farmers.

Not only that, PTPI also continues to encourage the clean energy ecosystem in Indonesia by developing the Green Industry Cluster (KIH) in the Arun Special Economic Zone (SEZ) in Lhokseumawe, Aceh. The 2,600-hectare area will develop blue ammonia, green ammonia, biomethane, and become an LNG Hub that utilizes gas potential from the Andaman Block.

Dalam inisiatif ini, Perusahaan mendukung gagasan Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Aceh sebagai *hub* energi masa depan di Indonesia. Adapun bentuk dukungan Pupuk Indonesia dengan masuk sebagai anggota konsorsium yang dibentuk oleh Kementerian BUMN.

Selanjutnya, sesuai arahan Menteri BUMN Erick Thohir, Pupuk Indonesia didorong untuk dapat *Go Global* dan menjadi pemain di tingkat dunia. Hal ini mengingat Perusahaan merupakan salah satu produsen amonia dan pupuk urea terbesar di dunia.

Untuk mewujudkan hal itu, pada tahun 2022 Perusahaan telah membuka kantor perwakilan di Dubai, Uni Emirat Arab (UAE). Kantor perwakilan ini bertujuan untuk mempermudah Perusahaan dalam akses terhadap bahan baku pupuk serta pengembangan industri lainnya. Selain itu, juga berpotensi memperluas peluang kerja sama perdagangan amonia, urea, NPK, dan produk lainnya, dengan para pemasok dan mitra global.

Ekspansi global ini menjadi semakin relevan mengingat Perusahaan memiliki rencana pengembangan amonia rendah karbon dan bersih, melalui *blue ammonia* dan *green ammonia*. Kedua jenis amonia ini akan menjadi salah satu sumber energi bersih masa depan dunia, yang sejalan dengan target *Net Zero Emission* (NZE) pemerintah Indonesia pada tahun 2060.

PERAN DIREKSI DALAM PERUMUSAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS SERTA MEMASTIKAN IMPLEMENTASINYA

Direksi berperan strategis dalam mengarahkan dan memimpin upaya untuk mencapai tujuan Perusahaan. Direksi dan Dewan Komisaris bekerja sama dengan erat untuk kepentingan Perusahaan dan mempertanggungjawabkan peran dan tanggung jawabnya masing-masing kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Setiap tahun, Perusahaan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang menjadi panduan dalam kegiatan operasional bisnis pada tahun buku. Dalam penetapan RKAP tersebut, Direksi berperan aktif sejak dalam perumusannya, termasuk bersama dengan Dewan Komisaris.

Selanjutnya, kebijakan tersebut diturunkan menjadi rencana strategis setiap Direktorat di lingkungan Perusahaan serta pelaksanaan strategi di tingkat operasional untuk diimplementasikan oleh organisasi Perseroan. Pada tahap ini, Direksi berperan penting

In this initiative, the Company supports President Joko Widodo's idea to make Aceh a future energy hub in Indonesia. The form of Pupuk Indonesia's support is by entering as a member of the consortium formed by the Ministry of BUMN.

Furthermore, in accordance with the direction of SOE Minister Erick Thohir, Pupuk Indonesia is encouraged to be able to Go Global and become a player at the world level. This is because the Company is one of the largest producers of ammonia and urea fertilizer in the world.

To realize this, in 2022 the Company has opened a representative office in Dubai, United Arab Emirates (UAE). This representative office aims to facilitate the Company's access to fertilizer raw materials and other industrial development. In addition, it also has the potential to expand trade cooperation opportunities for ammonia, urea, NPK, and other products, with global suppliers and partners.

This global expansion is all the more relevant given that the Company has plans to develop low-carbon and clean ammonia, through blue ammonia and green ammonia. Both types of ammonia will become one of the world's future clean energy sources, which is in line with the Indonesian government's Net Zero Emission (NZE) target by 2060.

THE ROLE OF THE BOARD OF DIRECTORS IN FORMULATING STRATEGIC STRATEGIES AND POLICIES AND ENSURING THEIR IMPLEMENTATION

The Board of Directors plays a strategic role in directing and leading to achieve company goals. The Board of Directors and Board of Commissioners work closely together for the benefit of the company and are accountable for their respective roles and responsibilities to the shareholders through the General Meeting of Shareholders.

Every year, the Company sets the Company's Work Plan and Budget (RKAP) which guides business operations in the financial year. In determining the RKAP, the Board of Directors plays an active role in its formulation, including together with the Board of Commissioners.

Furthermore, the policy is derived into strategic plans for each Directorate within the Company as well as the implementation of strategies at the operational level to be implemented by the Company's organization. At this stage, the Board of Directors plays an important role in

dalam memberikan masukan serta persetujuan. Proses ini menunjukkan bahwa Direksi memiliki peran penting dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis yang dijalankan oleh Perusahaan.

Di tingkat, Direksi melakukan evaluasi melalui rapat berkala dengan semua jajaran organisasi Perusahaan. Proses evaluasi tersebut merupakan bagian penting dalam upaya Direksi untuk memastikan bahwa strategi dan kebijakan strategis yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan dengan baik oleh organisasi Perusahaan.

KINERJA USAHA: PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PTPI terus berupaya untuk berkontribusi maksimal kepada negara. Upaya itu, terutama dilakukan melalui pencapaian sejumlah target penting yang ditetapkan pemegang saham, dalam hal ini pemerintah Indonesia. Pencapaian tersebut terlihat dalam laporan manajemen perusahaan dengan catatan kinerja operasional (*audited*) pada tahun 2022.

KINERJA PRODUKSI

Pada tahun 2022, realisasi produksi Perusahaan mencapai 18,9 juta ton atau 96% jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Hasil produksi tersebut terdiri dari pupuk 11,8 juta ton dan non-pupuk 7,1 juta ton.

Pencapaian produksi tersebut tentunya juga disertai dengan penggunaan konsumsi bahan baku yang efisien. Perusahaan berhasil mencatatkan realisasi rasio konsumsi gas lebih efisien dari yang ditargetkan. Pencapaian ini disebabkan karena pabrik-pabrik dapat beroperasi secara optimal dengan *rate* yang tinggi.

KINERJA PENJUALAN

Perusahaan berhasil membukukan volume penjualan sebesar 13,0 juta ton atau 88% dari target yang ditetapkan. Rincian penjualan tersebut, terdiri dari pupuk bersubsidi sebanyak 7,4 juta ton, pupuk non-subsidi 4,1 juta ton, produk non-pupuk 1,5 juta ton, dan pupuk *trading* sebesar 49.163 ton.

Untuk penjualan pupuk non-subsidi *retail*, pada tahun 2022 mencapai 547 ribu ton atau 105% dari target RKAP 2022. Kemudian, pada program Agrosolution dan Makmur, Perusahaan berhasil menjual pupuk non-subsidi urea *retail* sebesar 36,5 ribu ton dan non-urea sebesar 75,4 ribu ton.

providing input and approval. This process shows that the Board of Directors has an important role in the formulation of strategic strategies and policies carried out by the Company.

At the implementation stage, the Board of Directors conducts evaluations through regular meetings with all levels of the Company's organization. The evaluation process is an important part of the Board of Directors' efforts to ensure that the strategic strategies and policies that have been established can be implemented properly by the Company's organization.

BUSINESS PERFORMANCE: COMPARISON OF TARGET AND REALIZATION

As a State-Owned Enterprise (SOE), PTPI continues to strive to contribute maximally to the country. This effort is mainly carried out through the achievement of a number of important targets set by shareholders, in this case the Indonesian government. These achievements can be seen in the company's management report with a record of operational performance (audited) in 2022.

PRODUCTION PERFORMANCE

In 2022, the Company's production realization reached 18.9 million tons or 96%. When compared to the target. The production consisted of 11.8 million tons of fertilizer and 7.1 million tons of non-fertilizer.

The production achievement was of course also accompanied by the efficient use of raw material consumption. The company managed to record the realization of a more efficient gas consumption ratio than targeted. This achievement is due to the fact that the factories can operate optimally at a high rate.

SALES PERFORMANCE

The company managed to book sales volume of 13.0 million tons or 88% of the set target. The sales breakdown consisted of 7.4 million tons of subsidized fertilizers, 4.1 million tons of non-subsidized fertilizers, 1.5 million tons of non-fertilizer products, and 49,163 tons of trading fertilizers.

For retail non-subsidized fertilizer sales, in 2022 it reached 547 thousand tons or 105% of the 2022 RKAP target. Then, in the Agrosolution and Makmur programs, the Company managed to sell non-subsidized urea retail fertilizer of 36.5 thousand tons and non-urea of 75.4 thousand tons.

KINERJA KEUANGAN

Pada tahun 2022, pencapaian EBITDA Perusahaan sebesar Rp30,8 triliun atau 224% dari RKAP yang sebesar Rp13,74 triliun. Salah satu kontributor utamanya diperoleh melalui program transformasi yang menimbulkan dampak positif bagi Perusahaan. Total EBITDA *uplift* dari program transformasi pada tahun 2022 mencapai Rp1,9 triliun. Angka ini meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1,0 triliun.

EBITDA *uplift* ini berasal dari upaya peningkatan ketersediaan pupuk non-subsidi untuk meningkatkan pelayanan, produktivitas usaha tani, hingga pendapatan para petani. Baik melalui program *retail management*, pengembangan kios komersil, hingga perluasan program Agrosolution dan Makmur.

Pencapaian EBITDA juga dikontribusikan oleh proses optimalisasi rantai pasok. Mulai dari aspek pengadaan bersama, sentralisasi penjualan dan pemasaran, penerapan digitalisasi, hingga optimalisasi aset Pupuk Indonesia Group.

Sedangkan laba bersih yang berhasil dibukukan oleh Perusahaan mencapai Rp18,5 triliun. Laba tersebut diperoleh dari kemampuan Perusahaan merealisasikan pendapatan sebesar Rp103,9 triliun atau 134,99% dari RKAP 2022 yang sebesar Rp76,9 triliun.

Perusahaan juga berhasil dalam melakukan efisiensi beban keuangan yang tercermin dari pencatatan beban keuangan Rp2,24 triliun atau 85% dari target. Efisiensi beban keuangan tersebut dikarenakan realisasi rata-rata bunga pinjaman perbankan 7,59% lebih rendah dari rencana 8%.

PROSPEK USAHA DAN TARGET 2023

Perekonomian Indonesia di tahun 2023 diperkirakan masih menghadapi tantangan tingginya ketidakpastian dan peningkatan risiko global. Risiko tersebut, utamanya dipengaruhi potensi stagflasi yang disebabkan oleh lonjakan inflasi global akibat *supply disruption* dan perlambatan perekonomian sebagai dampak tensi geopolitik.

Faktor lainnya adalah potensi krisis utang global akibat meningkatnya *cost of fund* dengan adanya kenaikan suku bunga yang berpotensi mengakibatkan arus modal keluar dari negara berkembang. Di sisi lain, potensi stagflasi diperkirakan akan menyebabkan harga komoditas termoderasi.

FINANCIAL PERFORMANCE

In 2022, the Company achieved EBITDA of Rp30.8 trillion or 224% of the RKAP of Rp13.74 trillion. One of the main contributors was obtained through the transformation program which had a positive impact on the Company. Total EBITDA uplift from the transformation program in 2022 reached Rp1.9 trillion. This figure increased when compared to the previous year of Rp1.0 trillion.

This EBITDA uplift comes from efforts to increase the availability of non-subsidized fertilizers to improve services, farm productivity, and farmers' income. Both through the retail management program, the development of commercial kiosks, and the expansion of the Agrosolution and Makmur programs.

EBITDA achievement was also contributed by the supply chain optimization process. Starting from the aspects of joint procurement, centralization of sales and marketing, implementation of digitalization, to optimization of Pupuk Indonesia Group assets.

Meanwhile, the net profit recorded by the Company reached Rp18.5 trillion. The profit was obtained from the Company's ability to realize revenue of Rp103.9 trillion or 134.99% of the 2022 RKAP of Rp76.9 trillion.

The company also succeeded in making financial expenses efficient as reflected in the recording of financial expenses of Rp2.24 Trillion or 85% of the target. The efficiency of financial expenses was due to the realization of average bank loan interest of 7.59% lower than the plan of 8%.

BUSINESS OUTLOOK AND TARGET 2023

The Indonesian economy in 2023 still faces the challenge of high uncertainty and increasing global risks. These risks are mainly influenced by the potential for stagflation caused by a surge in global inflation due to supply disruption and economic slowdown as a result of geopolitical tension.

Another factor is the potential for a global debt crisis due to the rising cost of funds with rising interest rates that could potentially result in capital outflows from developing countries. On the other hand, potential stagflation is expected to cause commodity prices to moderate.

Dampak dari konflik Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung kemungkinan mendorong harga bahan baku menjadi tinggi, setidaknya untuk periode 2022-2025. Harga produksi energi yang tinggi akan meningkatkan biaya produksi yang berpengaruh pada kinerja Perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun menengah. Dari tingkat yang tinggi di tahun 2022, harga tanaman akan turun pada tahun 2023-2024 serta secara umum tetap sama selama periode prediksi. Biaya bahan baku yang tinggi tersebut kemungkinan akan berdampak pada produksi urea di wilayah dengan biaya tinggi, yaitu Eropa dan Ukraina yang akan terus menghentikan produksi urea selama periode 2022-2035.

The impact of the ongoing Russia-Ukraine conflict will likely support high raw material prices, at least for 2022-2025. High energy production prices will increase production costs, which will have an effect in the short and medium term. From high levels in 2022, plant prices will fall in 2023-2024 and generally remain the same over the forecast period. Such high feedstock costs are likely to impact urea production in high-cost regions, namely Europe and Ukraine, which will continue to stop urea production over the 2022-2035 period.

Dengan kemungkinan tidak adanya *tonase* dari Cina dan Ukraina serta potensi gangguan dalam ekspor Rusia pada jangka pendek dan menengah, pasokan urea tampaknya akan tetap hingga relatif ketat pada tahun 2022-2025 meskipun diimbangi dengan penambahan kapasitas urea. Tiga tahun pertama dari periode prakiraan akan melihat hasil dari siklus investasi saat ini dan akan dikarakteristikan berdasarkan kapasitas lebih lanjut (tidak termasuk Cina) dengan total kapasitas 13,2 juta ton/tahun yang diharapkan dapat bertumbuh antara tahun 2022-2024, sekitar rata-rata 4,4 juta ton/tahun.

With the likely absence of tonnage from China and Ukraine and potential disruptions in Russian exports in the short and medium term, urea supply is likely to remain relatively tight in 2022-2025 albeit offset by urea capacity additions. The first three years of the forecast period will see the results of the current investment cycle and will be characterized by further capacity (excluding China) with a total capacity of 13.2 million tons/year expected to grow between 2022-2024, by an average of 4.4 million tons/year.

Dalam jangka pendek, permintaan terpengaruh dari dampak lanjutan pandemi COVID-19. Harapan saat ini adalah bahwa permintaan pertanian tidak akan terlalu terpengaruh karena di sebagian besar negara berbasis pertanian menganggap sektor pertanian merupakan sektor yang penting karena berkaitan dengan kelangsungan hidup masyarakat dan ketahanan pangan nasional. Dalam jangka panjang, permintaan untuk *fertilizer* urea diekspektasikan akan bertumbuh di beberapa negara maju karena terdapat dorongan untuk memproduksi konsumsi nitrogen yang lebih tinggi diimbangi dengan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi penyerapan nitrogen melalui aplikasi pupuk yang dikelola dengan baik dan peningkatan penggunaan produk nitrogen yang distabilkan. Di wilayah Eropa, kesepakatan '*Green Deal*' yang baru-baru ini memiliki target pengurangan 20% dalam penggunaan pupuk di tahun 2030.

In the short term, demand is affected from the continued impact of the COVID-19 pandemic. The current expectation is that agricultural demand will be less affected as most agriculture-based countries consider agriculture to be an important sector as it relates to people's survival and national food security. In the long term, demand for urea fertilizer is expected to grow in some developed countries as the drive to produce higher nitrogen consumption is matched by measures to improve nitrogen uptake efficiency through well-managed fertilizer application and increased use of stabilized nitrogen products. In the European region, the recent 'Green Deal' agreement has a target of 20% reduction in fertilizer use by 2030.

Sedangkan Cina diperkirakan akan mengalami sedikit pertumbuhan urea pertanian sebagai dampak dari inisiatif pemerintah untuk mengekang penggunaan pupuk. Di negara berkembang, terdapat potensi pertumbuhan permintaan yang lebih besar, dengan negara Afrika dan

Meanwhile, China is expected to experience slight growth in agricultural urea as a result of government initiatives to curb fertilizer use. In developing countries, there is greater potential for demand growth, with Africa and Latin America seen as having the most potential in the long term, although

Amerika Latin yang dipandang memiliki potensi paling besar pada jangka panjang, meskipun peningkatan penggunaan pupuk di kedua wilayah tersebut akan terus terhambat oleh masalah ketersediaan dan keterjangkauan.

increased fertilizer use in both regions will continue to be hampered by availability and affordability issues.

Pasar industri urea memiliki potensi pertumbuhan yang lebih besar dalam jangka panjang yang secara keseluruhan, pertumbuhan permintaan global untuk urea selama periode prediksi (2022-2035) diperkirakan sebesar 1,3% per tahun. Rinciannya, pertumbuhan 0,8% per tahun untuk pupuk urea dan 3,2% per tahun untuk urea industri. Diperkirakan dalam periode 2022-2024, terdapat antisipasi beberapa penyeimbangan kembali pasar dengan kenaikan harga dan margin secara bertahap.

The industrial urea market has greater growth potential in the long term as overall, global demand growth for urea over the forecast period (2022-2035) is estimated at 1.3% per annum, comprising a growth rate of 0.8% per annum for urea fertilizer and 3.2% per annum for industrial urea. It is anticipated that in the period 2022 to 2024, there will be some market rebalancing with gradual price and margin increases.

PTPI memperoleh penugasan (PSO) dari pemerintah untuk menyalurkan pupuk ke sektor pangan sebesar 7,86 juta ton. Perusahaan juga menyediakan kebutuhan pupuk sektor komersil sebesar 4,07 juta ton. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut PTPI merencanakan untuk memproduksi pupuk sebesar 12,3 juta ton yang terdiri dari produksi pupuk urea 8,01 juta ton dan pupuk non urea 4,30 juta ton.

PTPI obtained an assignment (PSO) from the Government to distribute fertilizer to the food sector of 7.86 million tons. PTPI also provides 4.07 million tons of commercial sector fertilizer needs. In order to meet these needs, PTPI plans to produce 12.3 million tons of fertilizer consisting of 8.01 million tons of urea fertilizer and 4.30 million tons of non-urea fertilizer.

Dengan kebijakan tersebut dan mempertimbangkan asumsi lainnya yang telah ditetapkan dalam RKAP 2023, maka PTPI diproyeksikan akan mencapai laba tahun berjalan sebesar Rp12,57 triliun.

With this policy and considering other assumptions that have been set in the 2023 RKAP, PTPI is projected to achieve a profit for the year of Rp12.57 trillion.

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perusahaan secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) untuk menjaga keselarasan dan keseimbangan antara kepentingan Perusahaan dan para pemangku kepentingan dalam meraih kinerja yang optimal dan meningkatkan nilai Perusahaan. Karena itu, Perusahaan selalu beradaptasi terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan serta praktik terbaik di industri dalam memutakhirkan penerapan GCG.

Selain itu, komitmen Perusahaan dalam menerapkan dan menegakkan GCG secara simbolis tertuang dalam pernyataan komitmen yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Pernyataan tersebut tercantum dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Code of Corporate Governance*) PT Pupuk Indonesia (Persero).

Pada tahun 2022, Perusahaan juga telah mengembangkan struktur dan sistem tata kelola perusahaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG serta *best practice*

DEVELOPMENT OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

The Company consistently applies the principles of good corporate governance (GCG) to maintain harmony and balance between the interests of the Company and its stakeholders in achieving optimal performance and increasing the value of the Company. Therefore, the Company always adapts to relevant laws and regulations as well as industry best practices in updating the implementation of GCG.

In addition, the Company's commitment to implementing and upholding GCG is symbolically stated in a commitment statement signed by all members of the Board of Commissioners and Board of Directors. The statement is contained in the Code of Corporate Governance of PT Pupuk Indonesia (Persero).

In 2022, the Company has also developed a corporate governance structure and system by taking into account GCG principles and best practices that apply both nationally

yang berlaku baik secara nasional maupun internasional. Penerapan prinsip-prinsip GCG juga merupakan bagian dari pelaksanaan kepatuhan PTPI sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap Peraturan Menteri BUMN No. PER 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN dan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) 2021.

and internationally. The implementation of GCG principles is also part of the implementation of PTPI's compliance as a State-Owned Enterprise (BUMN) with the Regulation of the Minister of BUMN No. PER 01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in BUMN and the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUG- KI) 2021.

Implementasi GCG yang konsisten dapat memberikan pengaruh positif terhadap kinerja Perusahaan. Hal ini tercermin dari pengakuan/penghargaan oleh lembaga-lembaga pemeringkat baik nasional maupun internasional yang diterima Perusahaan di tiap tahunnya. Pada tahun 2022 PTPI berhasil memperoleh penghargaan *Most Trusted Company*/Skala Nasional dalam ajang *Corporate Governance Perception Index* Tahun 2021 dan BUMN dengan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) Terbaik dalam ajang penghargaan Anugerah BUMN.

Consistent implementation of GCG can have a positive influence on the Company's performance. This is reflected in the recognition/awards by national and international rating agencies that the Company receives each year. In 2022 PTPI succeeded in obtaining the Most Trusted Company/National Scale award in the 2021 Corporate Governance Perception Index event and BUMN with the Best Corporate Governance (GCG) Implementation in the BUMN Anugerah award event.

Berdasarkan hasil asesmen Tim Asesor Independen GCG tahun 2022 yang akan disahkan pada Laporan Pelaksanaan GCG *Assessment* PTPI Tahun 2022, capaian hasil GCG *Assessment* PTPI pada tahun 2022 adalah: Skor 96,37.

Based on the assessment results of the GCG Independent Assessor Team in 2022 which will be approved in the PTPI GCG Assessment Implementation Report 2022, the achievement of PTPI's GCG Assessment results in 2022 managed to obtain a score of 96.37.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI DAN ALASAN

Hingga berakhirnya tahun buku 2022, tidak ada perubahan dalam komposisi Direksi. Namun dalam rangka penataan organisasi dan untuk lebih mengefektifkan pengurusan perusahaan, di awal tahun 2023 terdapat perubahan nomenklatur jabatan dan pengalihan tugas anggota-anggota Direksi melalui Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai No. SK-22/MBU/02/2023 tanggal 3 Februari 2023 sebagai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan demikian, komposisi Direksi adalah sebagai berikut:

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND REASONS

Until the end of the 2022 financial year, there were no changes in the composition of the Board of Directors. However, in the context of organizational structuring and to further streamline the management of the company, at the beginning of 2023 there was a change in the nomenclature of positions and the transfer of duties of members of the Board of Directors through the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOE) as No. SK-22/MBU/02/2023 dated February 3, 2023 as the General Meeting of Shareholders (GMS). Thus, the composition of the Board of Directors is as follows:

Jabatan	**Nama** | Name	Position
Direktur Utama	Bakir Pasaman	President Director
Wakil Direktur Utama	Nugroho Christijanto	Vice President Director
Direktur Produksi	Bob Indiarto	Production Director
Direktur Keuangan & Manajemen Risiko	Wono Budi Tjahyono	Finance & Risk Management Director
Direktur Transformasi Bisnis	Panji Winanteya Ruky	Business Transformation Director
Direktur Sumber Daya Manusia	Tina T. Kemala Intan	Human Capital Director
Direktur Pemasaran	Gusrizal	Marketing Director
Direktur Portofolio & Pengembangan Usaha	Jamsaton Nababan	Portfolio & Business Development Director

APRESIASI

Direksi menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Pemegang Saham serta arahan dan masukan Dewan Komisaris dalam mendukung jalannya kegiatan usaha Perusahaan. Kami juga mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kerja sama seluruh tim manajemen dan karyawan dalam meraih pencapaian kinerja yang baik untuk tahun buku 2022.

Direksi juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para pemangku kepentingan lain, baik regulator, pelanggan, mitra kerja dan pihak lainnya. Terima kasih atas dukungan yang telah diberikan, terutama untuk mengoptimalkan kinerja Perusahaan serta mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik.

APPRECIATION

The Board of Directors expresses its gratitude for the trust given by the Shareholders as well as the direction and input of the Board of Commissioners in supporting the Company's business activities. We would also like to thank the dedication and cooperation of the entire management team and employees in achieving good performance for the financial year 2022.

The Board of Directors also expresses its deepest appreciation to other stakeholders, including regulators, customers, partners and other parties. Thank you for your support, especially in optimizing the Company's performance and implementing good corporate governance.

Jakarta, 26 April 2023
Atas Nama Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero)
On behalf of the Board of Directors of PT Pupuk Indonesia (Persero)

Bakir Pasaman
Direktur Utama
President Director

Halaman ini sengaja dikosongkan

This page is intentionally left blank

Direksi
Board of Directors

Tina T. Kemala Intan
Direktur Sumber Daya Manusia
Human Capital Director

Nugroho Christijanto
Wakil Direktur Utama
Vice President Director

Bakir Pasaman
Direktur Utama
President Director

Wono Budi Tjahyono
Direktur Keuangan & Manajemen Risiko
Finance & Risk Management Director

Jamsaton Nababan
Direktur Portofolio & Pengembangan Usaha
Portfolio & Business Development Director

Gusrizal
Direktur Pemasaran
Marketing Director

Bob Indiarto
Direktur Produksi
Production Director

Panji Winanteya Ruky
Direktur Transformasi Bisnis
Business Transformation Director

Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2022 PT Pupuk Indonesia (Persero)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Pupuk Indonesia (Persero) tahun 2022 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 26 April 2023

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

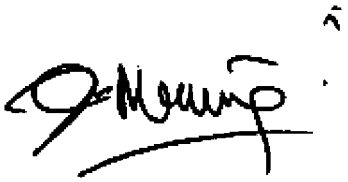

Darmin Nasution
Komisaris Utama dan Komisaris Independen
President Commissioner and Independent Commissioner

Ari Dwipayana
Komisaris
Commissioner

Febrio Nathan Kacaribu
Komisaris
Commissioner

Suwandi
Komisaris
Commissioner

Anwar Sanusi
Komisaris
Commissioner

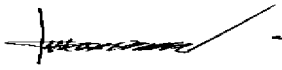

Farhat Brachma
Komisaris
Commissioner

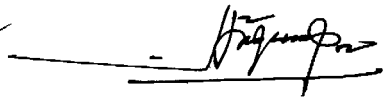

Mustoha Iskandar
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Anhar Adel
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Statement by the Members of Directors and Members of the Board of Commissioners concerning Responsibility for the 2022 Annual Report of PT Pupuk Indonesia (Persero)

We, the undersigned, testify that all information in the 2022 Annual Report of PT Pupuk Indonesia (Persero) is presented in its entirety and we are fully responsible for the correctness of the contents in the Annual Report of the Company.

This statement is here by made in all truthfulness.

Jakarta, April 26, 2023

DIREKSI
Board of Directors

Bakir Pasaman
Direktur Utama
President Director

Nugroho Christijanto
Wakil Direktur Utama
Vice President Director

Bob Indiarto
Direktur Produksi
Production Director

Wono Budi Tjahyono
Direktur Keuangan & Manajemen Risiko
Finance & Risk Management Director

Panji Winanteya Ruky
Direktur Transformasi Bisnis
Business Transformation Director

Tina T. Kemala Intan
Direktur Sumber Daya Manusia
Human Capital Director

Gusrizal
Direktur Pemasaran
Marketing Director

Jamsaton Nababan
Direktur Portofolio & Pengembangan Usaha
Portfolio & Business Development Director

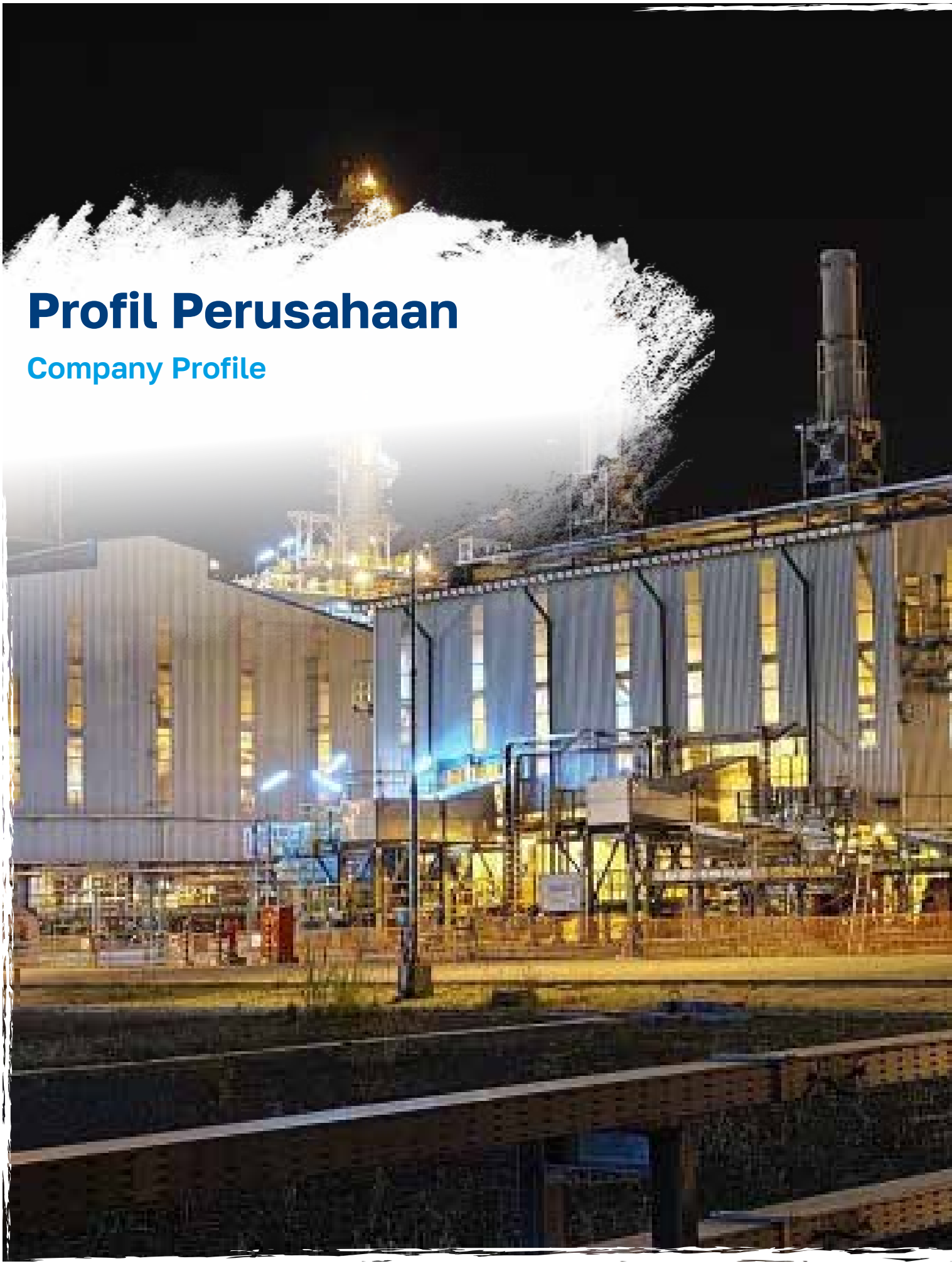

Profil Perusahaan

Company Profile

Informasi Umum dan Identitas Perusahaan

Company General Information and Identity

Nama Perusahaan
Company Name

PT Pupuk Indonesia (Persero)

Nama *Brand*
Common Name
Pupuk Indonesia

Tanggal Pendirian
Date of Establishment
3 Januari 1970
January 3, 1970

Status Perusahaan
Status of the Company
Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Emiten
Limited Liability Company, State-Owned Enterprise (SOE), Issuer

Dasar Hukum Pendirian
Legal Basis of Establishment
Akta No. 4 tanggal 3 Januari 1970 yang dibuat di hadapan Soeleman Ardjasasmita, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahaan berdasarkan Kutipan dari Daftar Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 7 Februari 1970 No. J.A.5/7/20.
Deed No. 4 dated January 3, 1970 made before Soeleman Ardjasasmita, Notary in Jakarta, which has been approved based on the Excerpt from the Register of Determinations of the Minister of Justice dated February 7, 1970 No. J.A.5/7/20.

Modal Dasar
Authorized Capital
Rp100.000.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Issued & Paid Up Capital
Rp25.000.000.000.000

Kepemilikan Saham
Share Ownership
Pemerintah Republik Indonesia, 100,00%
Goverment of the Republic of Indonesia, 100,00%

Tujuan dan Kegiatan
Objectives and Activities

Melakukan usaha pengelolaan perusahaan, perdagangan dan jasa di bidang perpupukan, petrokimia, agrokimia dan kimia lainnya serta agroindustri untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk menghasilkan keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
Conducting business of company management, trading and services in the field of fertilizers, petrochemicals, agrochemicals and other chemicals as well as agroindustry to produce goods and/or services of high quality and strong competitiveness to generate profits to increase the value of the Company by applying the principles of Limited Liability Companies.

Kode Obligasi & Peringkatnya
Bond Codes & Ratings

- **PIHC0IBCNI (AAA IDN) Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri B**
- **PIHC0IBCNII (AAA IDN) Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri B**
- **PIHC0IIACNI (AAA IDN) Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri A**
- **PIHC0IIBCNI (AAA IDN) Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri B**
- **PIHC0IICCNI(AAA IDN) Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri C**
- **PIHC0IIACNII (AAA IDN) Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Seri A**
- **PIHC0IIBCNII (AAA IDN) Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Seri B**
- **PIHC0IICCNII (AAA IDN) Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Seri C**
- PIHC0IBCNI (AAA IDN) Shelf Registration Bond I Phase I Series B
- PIHC0IBCNII (AAA IDN) Shelf Registration Bond I Phase II Series B
- PIHC0IIACNI (AAA IDN) Sustainable Bonds II Phase I Series A
- PIHC0IIBCNI (AAA IDN) Sustainable Bonds II Phase I Series B
- PIHC0IICCNI(AAA IDN) Sustainable Bonds II Phase I Series C
- PIHC0IIACNII (AAA IDN) Sustainable Bonds II Phase II Series A
- PIHC0IIBCNII (AAA IDN) Sustainable Bonds II Phase II Series B
- PIHC0IICCNII (AAA IDN) Sustainable Bonds II Phase II Series C

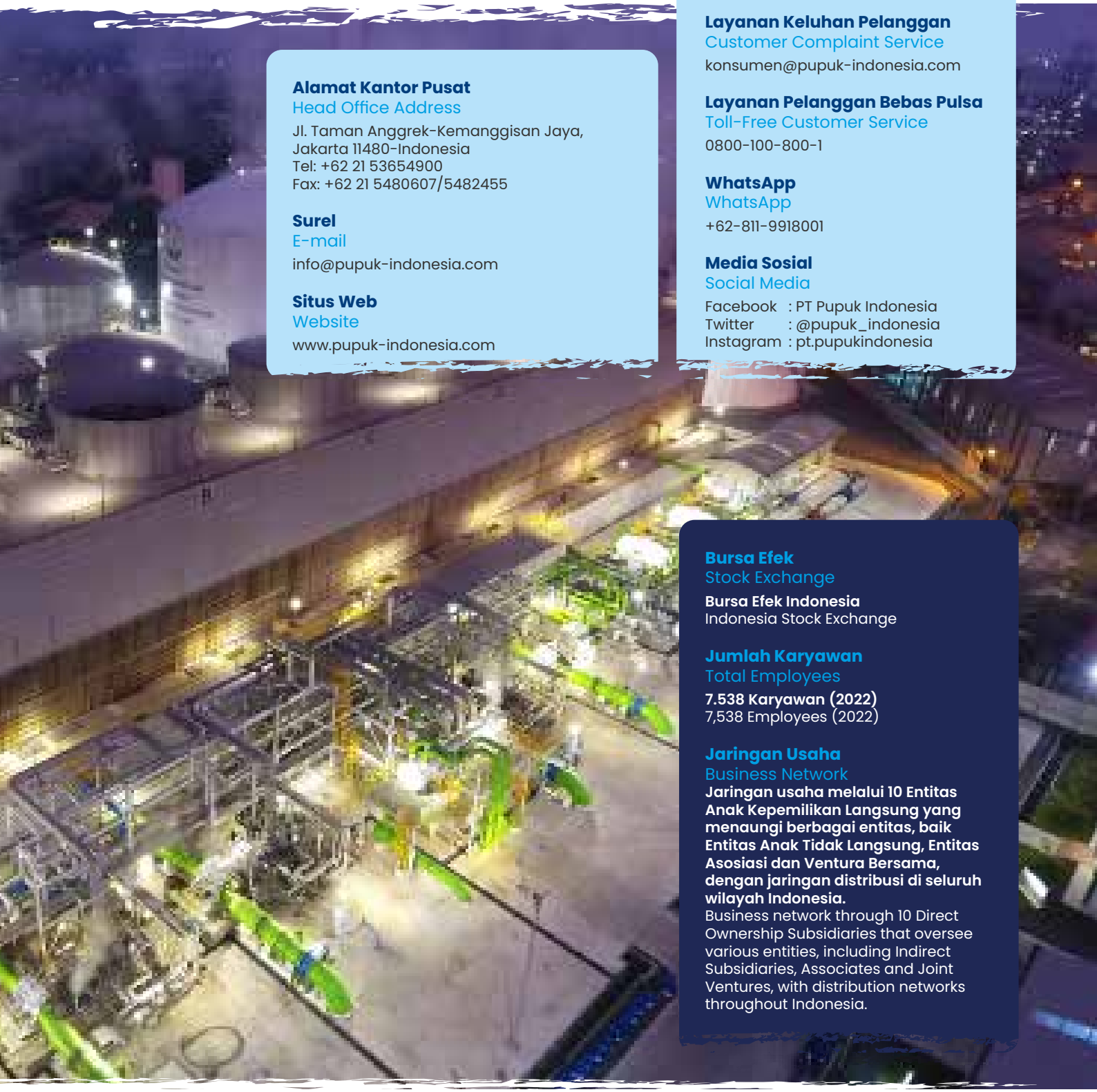

Alamat Kantor Pusat
Head Office Address
Jl. Taman Anggrek-Kemanggisan Jaya,
Jakarta 11480-Indonesia
Tel: +62 21 53654900
Fax: +62 21 5480607/5482455

Surel
E-mail
info@pupuk-indonesia.com

Situs Web
Website
www.pupuk-indonesia.com

Situs Pelaporan Digital
Digital Reporting Sites
arsr.pupuk-indonesia.com

Layanan Keluhan Pelanggan
Customer Complaint Service
konsumen@pupuk-indonesia.com

Layanan Pelanggan Bebas Pulsa
Toll-Free Customer Service
0800-100-800-1

WhatsApp
WhatsApp
+62-811-9918001

Media Sosial
Social Media
Facebook : PT Pupuk Indonesia
Twitter : @pupuk_indonesia
Instagram : pt.pupukindonesia

Bursa Efek
Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange

Jumlah Karyawan
Total Employees
7.538 Karyawan (2022)
7,538 Employees (2022)

Jaringan Usaha
Business Network
Jaringan usaha melalui 10 Entitas Anak Kepemilikan Langsung yang menaungi berbagai entitas, baik Entitas Anak Tidak Langsung, Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, dengan jaringan distribusi di seluruh wilayah Indonesia.
Business network through 10 Direct Ownership Subsidiaries that oversee various entities, including Indirect Subsidiaries, Associates and Joint Ventures, with distribution networks throughout Indonesia.

Riwayat Singkat Perusahaan

Brief Company History

Hingga akhir tahun 2022, kinerja Perusahaan didukung oleh 10 anak perusahaan yang mengoperasikan 15 pabrik urea, 14 pabrik amoniak, 17 pabrik NPK, 3 (tiga) pabrik ZA, 2 (dua) pabrik ZK, dan 1 (satu) pabrik SP di lokasi yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.

Until the end of 2022, the Company's performance is supported by 10 subsidiaries operating 15 urea plants, 14 ammonia plants, 17 NPK plants, 3 (three) ZA plants, 2 (two) ZK plants, and 1 (one) SP plant in locations spread across Java, Sumatra, and Kalimantan.

PT Pupuk Indonesia (Persero) selanjutnya disebut "Perusahaan" atau "PTPI" merupakan *holding company* BUMN yang pendiriannya memiliki sejarah panjang, yaitu sejak tahun 1959. PTPI pertama kali didirikan dengan nama PT Pupuk Sriwidjaja berdasarkan Akta No. 177 tanggal 24 Desember 1959 yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, Notaris di Jakarta dan menjadi badan hukum setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Muda Kehakiman melalui Keputusan No. J.A.5/3/19 tanggal 28 Januari 1960. Pengesahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 8 Februari 1960 dengan nomor register 320 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 7 Juni 1960, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 186 Tahun 1960.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1964 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pupuk Sriwidjaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 No. 44) didirikan Perusahaan Negara Pupuk Sriwidjaja ("PN Pusri"), dan PT Pupuk Sriwidjaja yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Pupuk Sriwidjaja No. 177 tanggal 24 Desember 1959 dibuat di hadapan Eliza Pondaag, Notaris di Jakarta tersebut dilebur kedalam PN Pusri sehingga hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta utang usaha dari PT Pupuk Sriwidjaja beralih ke PN Pusri.

PT Pupuk Indonesia (Persero) hereinafter referred to as "the Company" or "PTPI" is a state-owned holding company whose establishment has a long history, namely since 1959. PTPI was first established under the name PT Pupuk Sriwidjaja based on Deed No. 177 dated 24 December 1959 made before Eliza Pondaag, Notary in Jakarta and became a legal entity after obtaining ratification from the Junior Minister of Justice through Decree No. J.A.5/3/19 dated 28 January 1960. The ratification was registered at the Registrar's Office of the Jakarta District Court on February 8, 1960 with register number 320 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 46 dated June 7, 1960, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 186 of 1960.

Based on Government Regulation No. 20 of 1964 concerning the Establishment of Perusahaan Negara Pupuk Sriwidjaya (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1964 No. 44), Perusahaan Negara Pupuk Sriwidjaja ("PN Pusri") was established, and PT Pupuk Sriwidjaja which was established based on the Deed of Limited Liability Company of PT Pupuk Sriwidjaja No. 177 dated December 24, 1959 made before Eliza Pondaag, Notary in Jakarta was merged into PN Pusri so that the rights and obligations, equipment and assets and accounts payable of PT Pupuk Sriwidjaja were transferred to PN Pusri.

PN Pusri kemudian mengalami perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 1969 tentang Pengalihan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Negara Pupuk Sriwidjaja menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1969 No. 31). Sehubungan hal ini telah ditandatangani Akta Pendirian No. 4 tanggal 3 Januari 1970 yang dibuat di hadapan Soeleman Ardjasasmita, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Kutipan dari Daftar Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 7 Februari 1970 No. J.A.5/7/20.

PN Pusri then changed its legal form from a Public Company to a Company (Persero) based on Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 20 of 1969 concerning the Transfer of Legal Entity Form of State Company Pupuk Sriwidjaja to a Company (Persero) (Lembaga Negara Republik Indonesia Year 1969 No. 31). In connection with this, Deed of Establishment No. 4 dated January 3, 1970 was signed before Soeleman Ardjasasmita, Notary in Jakarta and has been approved by the Minister of Justice based on the Excerpt from the Register of Determinations of the Minister of Justice dated February 7, 1970 No. J.A.5/7/20.

Pada Tahun 1997, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1997 *juncto* Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja, maka PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) ditugaskan untuk menjadi Induk Perusahaan (Operation Holding) yang membawahi 6 (enam) Anak Perusahaan.

In 1997, based on Government Regulation No. 28 of 1997 in conjunction with Government Regulation No. 34 of 1998 concerning the Addition of State Capital of the Republic of Indonesia into the Share Capital of the Company (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja, PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) was assigned to become the Parent Company (Operation Holding) which oversees 6 (six) Subsidiaries.

Dalam rangka restrukturisasi/pengembangan usaha telah dilakukan pemisahan aset dengan cara *spin off*, di mana PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) mendirikan Anak Perusahaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dengan Akta Pendirian No. 14 tanggal 12 November 2010 yang dibuat di hadapan

In the context of business restructuring/development, an asset separation by way of spin off has been carried out, where PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) established a subsidiary PT Pupuk Sriwidjaja Palembang with Deed of Establishment No. 14 dated 12 November 2010 made before

Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta. Pengalihan sebagian aset PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) kepada PT Pusri Palembang dilaksanakan per 1 Januari 2011. Dengan demikian, segala kegiatan operasional PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) yang meliputi produksi, pemasaran, pengadaan, pengembangan usaha dan lain-lain diserahkan kepada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, dan PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) bertindak murni sebagai *Non-Operating Holding*.

Pada tanggal 5 April 2012, PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) berganti nama menjadi PT Pupuk Indonesia (Persero) yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta No. 3 tanggal 3 April 2012 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H, Notaris di Jakarta Selatan, dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-17695.AH.01.02.Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 5 April 2012.

Anggaran Dasar PTPI telah diubah beberapa kali, perubahan terakhir dimuat dalam Akta No. 01 tanggal 12 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Lumassia, SH, Notaris di Jakarta, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Daftar Perseroan No. AHU-0175443.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 18 Oktober 2020 sebagaimana Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-0071253.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 18 Oktober 2020 dan PT Pupuk Indonesia (Persero) berubah menjadi *activist holding*.

Sebagai *activist holding* yang menaungi jaringan usaha melalui Entitas Anak Kepemilikan Langsung dan Tidak Langsung serta Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama dengan jaringan distribusi di seluruh wilayah Indonesia, PTPI memiliki peran yang lebih aktif dalam bidang operasional, terutama untuk fungsi-fungsi strategis seperti pemasaran, pengadaan, riset, pengembangan, juga untuk fungsi SDM, IT dan beberapa fungsi lainnya.

Berdasarkan lembaga riset independen Fertecon, PTPI dan Anak Perusahaan menjadi produsen pupuk terbesar di Asia Tenggara yang memiliki peran penting dalam pembangunan pertanian nasional dan ketahanan pangan, di mana Perusahaan dan Perusahaan Anak memiliki berbagai jenis produk pupuk urea, pupuk non-urea dan industri kimia lainnya serta layanan jasa *engineering, procurement* & *construction*, perdagangan umum, distribusi, energi, dan utilitas serta pangan.

Fathiah Helmi SH, Notary in Jakarta. The transfer of some of the assets of PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) to PT Pusri Palembang was implemented as of January 1, 2011. Thus, all operational activities of PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) which include production, marketing, procurement, business development and others are handed over to PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, and PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) acts purely as a Non-Operating Holding.

On April 5, 2012, PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) changed its name to PT Pupuk Indonesia (Persero) domiciled in Jakarta based on Deed No. 3 dated April 3, 2012 made before Nanda Fauz Iwan, S.H, Notary in South Jakarta, with the area of office covering the entire territory of the Special Capital Region of Jakarta, and has received approval from the Minister of Law and Human Rights based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-17695.AH.01.02.Year 2012 concerning Approval of Amendments to the Company's Articles of Association dated April 5, 2012.

The Articles of Association of PTPI have been amended several times, the latest amendment is contained in Deed No. 01 dated October 12, 2020, made before Lumassia, SH, Notary in Jakarta, domiciled in Central Jakarta, which has been received and recorded in the Legal Entity Administration System Company Register No. AHU-0175443.AH.01.11 of 2020 dated October 18, 2020 as well as the Letter of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Directorate General of General Legal Administration No. AHU-0071253.AH.01.02 of 2020 dated October 18, 2020 and PT Pupuk Indonesia (Persero) changed to an activist holding.

As an activist holding that oversees a business network through Direct and Indirect Ownership Subsidiaries as well as Associated Entities and Joint Ventures with distribution networks throughout Indonesia, PTPI has a more active role in the operational field, especially for strategic functions such as marketing, procurement, research, development, as well as for HR, IT and several other functions.

Based on independent research institute Fertecon, PTPI and its Subsidiaries are the largest fertilizer producers in Southeast Asia that have an important role in national agricultural development and food security, where the Company and its Subsidiaries have various types of urea fertilizer products, non-urea fertilizers and other chemical industries as well as engineering, procurement & construction services, general trading, distribution, energy, and utilities and food services.

Melalui kekuatan jaringan kelompok usaha, PTPI menjadi mitra Pemerintah Indonesia dalam menyalurkan pupuk bersubsidi. Perusahaan juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan ketahanan pangan, yaitu melalui produk pupuk dan amoniak yang berkualitas.

Memasuki tahun 2021, Perusahaan resmi menetapkan pemberlakuan sentralisasi fungsi *holding* di lingkungan PI Grup sebagai bagian dari amanah Kementerian BUMN selaku pemegang saham Perusahaan untuk melakukan transformasi. Fungsi-fungsi yang dilaksanakan secara sentralisasi di holding Perusahaan antara lain mencakup fungsi pemasaran dan penjualan komersil, penelitian dan pengembangan, *supply chain* dan *cost management*, pengadaan barang dan jasa, keuangan, audit, manajemen risiko dan kepatuhan, serta manajemen talenta dan pengembangan SDM, dan juga hukum. Tujuan utama sentralisasi ini adalah untuk mendorong *Value Creation* serta menyelaraskan aktivitas fungsi-fungsi anggota PI Grup sehingga sejalan dengan *strategic direction*. Diharapkan dengan penerapan *activist holding role* ini Perusahaan akan mempunyai peran lebih aktif dalam aktivitas operasional Perusahaan.

Hingga akhir tahun 2022, kinerja Perusahaan didukung oleh 10 anak perusahaan yang mengoperasikan 14 pabrik urea, 13 pabrik amoniak, 15 pabrik NPK, 3 (tiga) pabrik ZA, 2 (dua) pabrik ZK, dan 1 (satu) pabrik SP di lokasi yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Perusahaan akan terus melakukan terobosan untuk memperkuat sinergi usaha industri pupuk dan industri pendukung lainnya melalui *rebranding*, *repositioning*, serta pengembangan usaha.

Through the strength of its business group network, PTPI is a partner of the Government of Indonesia in distributing subsidized fertilizers. The company is also an important part in realizing food security, namely through quality fertilizer and ammonia products.

Entering 2021, the Company officially stipulates the implementation of centralization of holding functions within the PI Group as part of the mandate of the Ministry of SOEs as the Company's shareholder to carry out transformation. Functions that are carried out centrally in the Company's holding include commercial marketing and sales, research and development, supply chain and cost management, procurement of goods and services, finance, audit, risk management and compliance, as well as talent management and HR development, and also law. The main purpose of this centralization is to drive Value Creation and align the activities of PI Group member functions so that they are in line with the strategic direction. It is expected that with the implementation of this activist holding role, the Company will have a more active role in the Company's operational activities.

Until the end of 2022, the Company's performance is supported by 10 subsidiaries operating 14 urea plants, 13 ammonia plants, 15 NPK plants, 3 (three) ZA plants, 2 (two) ZK plants, and 1 (one) SP plant in locations spread across Java, Sumatra, and Kalimantan. The company will continue to make breakthroughs to strengthen the business synergy of the fertilizer industry and other supporting industries through rebranding, repositioning, and business development.

Jejak Langkah
Milestone

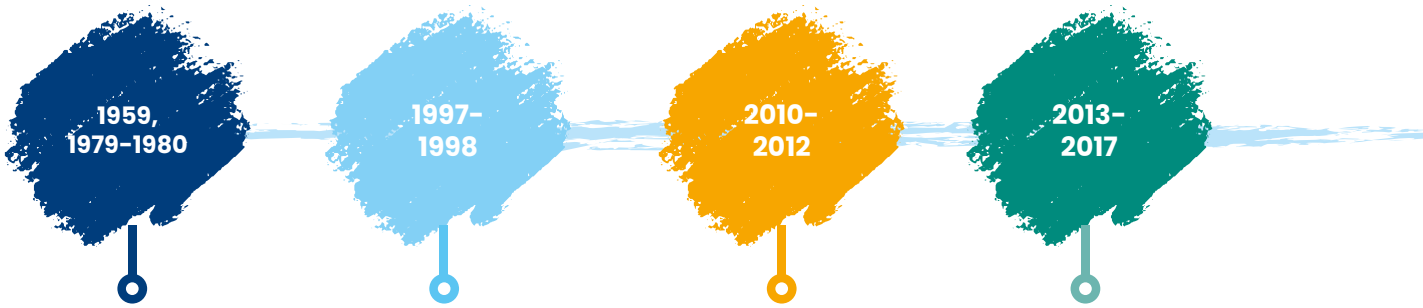

1959, 1979-1980

PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) berdiri sebagai perusahaan BUMN yang bergerak di industri pupuk sejak tahun 1959. Dalam rangka kerja sama dengan negara-negara ASEAN dibentuk perusahaan patungan:
- PT ASEAN Aceh Fertilizer (AAF), PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) menguasai 60% saham.
- Asean Bintulu Fertilizer (ABF) Sdn. Bhd., Pemerintah Indonesia menguasai 13% saham. Pemerintah menugaskan PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) untuk mewakili Pemerintah di dalam pengawasan kinerja perusahaan.

PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) was established as a state-owned company engaged in the fertilizer industry since 1959. In order to cooperate with ASEAN countries, a joint venture company was established:
- PT ASEAN Aceh Fertilizer (AAF), PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) holds a 60% stake.
- Asean Bintulu Fertilizer (ABF) Sdn. Bhd. in which the Indonesian government holds a 13% stake. The government assigned PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) to represent the government in overseeing the company's performance.

1997-1998

Diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja *juncto* Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja, PT Pupuk Indonesia (Persero) yang dahulu bernama PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) menjadi Perusahaan Induk (*Operating Holding*) yang membawahi 6 (enam) Anak Perusahaan (PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Rekayasa Industri, dan PT Mega Eltra).

The issuance of Government Regulation No. 28 of 1997 concerning the Addition of Capital Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of the Company (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja juncto Government Regulation No. 34 of 1998 concerning the Addition of Capital Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of the Company (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja, PT Pupuk Indonesia (Persero), formerly PT Pupuk Sriwidjaja (Persero), became an Operating Holding Company which oversees 6 (six) Subsidiaries (PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Rekayasa Industri, and PT Mega Eltra).

2010-2012

- PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) mendirikan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang pada tanggal 24 Desember 2010 dan berubah dari *Operating Holding* menjadi *Strategic and Investment Holding*.
- PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) berganti nama menjadi PT Pupuk Indonesia (Persero) dan selanjutnya tanggal 3 April 2012 ditetapkan sebagai hari jadi PT Pupuk Indonesia (Persero).

- PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) established PT Pupuk Sriwidjaja Palembang on December 24, 2010 and changed from Operating Holding to Strategic and Investment Holding.
- PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) changed its name to PT Pupuk Indonesia (Persero) and subsequently April 3, 2012 was designated as the anniversary of PT Pupuk Indonesia (Persero).

2013-2017

- Pada tanggal 23 Desember 2013, PT Pupuk Indonesia (Persero) mendirikan Anak Perusahaan bernama PT Pupuk Indonesia Logistik.
- Pada tanggal 18 Agustus 2014, PT Pupuk Indonesia (Persero) mendirikan Anak Perusahaan bernama PT Pupuk Indonesia Energi.
- Pada tanggal 30 April 2015, PT Pupuk Indonesia (Persero) mendirikan Anak Perusahaan bernama PT Pupuk Indonesia Pangan.
- Peresmian Pabrik PKT 5, November 2015.
- Pembangunan Pabrik NPK II PT Pupuk Kujang.
- Pembangunan Pabrik NPK Fusion I PT Pupuk Sriwidjaja Palembang di tahun 2016.
- Selesainya konstruksi Pabrik Pusri IIB di tahun 2017.

- On December 23, 2013, PT Pupuk Indonesia (Persero) established a subsidiary named PT Pupuk Indonesia Logistik.
- On August 18, 2014, PT Pupuk Indonesia (Persero) established a subsidiary named PT Pupuk Indonesia Energi.
- On April 30, 2015, PT Pupuk Indonesia (Persero) established a subsidiary named PT Pupuk Indonesia Pangan.
- Inauguration of PKT Factory 5, November 2015.
- Construction of PT Pupuk Kujang NPK II Plant.
- Construction of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang's NPK Fusion I Plant in 2016.
- -Completion of Pusri IIB Plant construction in 2017.

2018

Selesainya Konstruksi dan Produksi Urea Pertama Proyek Amurea II Petrokimia Gresik Anak Usaha PT Pupuk Indonesia (Persero) di Gresik, Jawa Timur.

Completion of Construction and First Urea Production of Amurea II Project of Petrokimia Gresik, a subsidiary of PT Pupuk Indonesia (Persero) in Gresik, East Java.

2019

Dimulainya konstruksi proyek NPK Chemical PT Pupuk Iskandar Muda.

Commencement of construction of PT Pupuk Iskandar Muda's NPK Chemical project.

2020

- PT Pupuk Indonesia (Persero) menjadi "*Activist Holding*".
- Penyelesaian pabrik pabrik CO_2 cair PT Pupuk Kujang.

- PT Pupuk Indonesia (Persero) became an "Activist Holding".
- Completion of PT Pupuk Kujang's liquid CO_2 plant.

2021

- Pupuk Indonesia menerapkan sentralisasi fungsi *Holding*.
- Peresmian Program Makmur.
- Pupuk Indonesia luncurkan penyeragaman *brand* produk ritel.
- Perubahan nama PT Pupuk Indonesia Energi ("PIE") menjadi PT Pupuk Indonesia Utilitas ("PIU").

- Pupuk Indonesia implements centralization of the Holding function.
- Inauguration of the Makmur Program.
- Pupuk Indonesia launches retail product brand uniformity.
- Change of name of PT Pupuk Indonesia Energi ("PIE") to PT Pupuk Indonesia Utilitas ("PIU").

2022

Perubahan nama PT Mega Eltra ("ME") menjadi PT Pupuk Indonesia Niaga ("PI Niaga")

Change of name of PT Mega Eltra ("ME") to PT Pupuk Indonesia Niaga ("PI Niaga").

Bidang Usaha, Produk dan Jasa, serta Pasar yang Dilayani

Line of Business, Products and Services, and Markets Served

SESUAI ANGGARAN DASAR

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir diubah melalui Akta No. 01 tanggal 12 Oktober 2020, yang dibuat Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Daftar Perseroan No. AHU-0175443.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 18 Oktober 2020, sebagaimana Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-0071253.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 18 Oktober 2020, maksud dan tujuan dari kegiatan Perusahaan adalah melakukan usaha (manajemen) perusahaan, perdagangan dan jasa di bidang perpupukan, petrokimia, agrokimia dan kimia lainnya serta agro industri untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

IN ACCORDANCE WITH THE ARTICLES OF ASSOCIATION

In accordance with the Company's Articles of Association which was last amended by Deed No. 01 dated October 12, 2020, made by Lumassia, S.H., Notary in Jakarta, domiciled in Central Jakarta, which has been received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Company Register No. AHU-0175443.AH.01.11 of 2020 dated October 18, 2020, as well as the Letter of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Directorate General of General Legal Administration No. AHU-0071253. AH.01.02 of 2020 dated October 18, 2020, the purpose and objectives of the Company's activities are to conduct business (management), trading and services in the fields of fertilizers, petrochemicals, agrochemicals and other chemicals and agro-industry to produce goods and/or services of high quality and strong competitiveness to obtain/pursue profits to increase the value of the Company by applying the principles of Limited Liability Companies.

KEGIATAN USAHA BERDASARKAN ANGGARAN DASAR DAN YANG DIJALANKAN PADA TAHUN BUKU

Untuk mencapai maksud dan tujuan seperti yang telah disampaikan di atas, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha dengan penjabaran sebagai berikut:

BUSINESS ACTIVITIES BASED ON THE ARTICLES OF ASSOCIATION AND CONDUCTED IN THE FINANCIAL YEAR

To achieve the purposes and objectives as stated above, the Company may carry out business activities with the following description:

Kegiatan Usaha berdasarkan Anggaran Dasar Business Activities Based on Articles of Association	**Telah/Belum Dijalankan** Executed/Not Executed	**Keterangan** Description
Kegiatan Usaha Utama | Main Business Activities		
Perdagangan Menyelenggarakan kegiatan distribusi dan perdagangan pada umumnya termasuk ekspor, impor, lokal dan interinsulair, bahan baku, bahan penolong/pembantu, peralatan produksi di bidang perpupukan, petrokimia, agrokimia, agroindustri dan kimia lainnya. Trade Organizing distribution and trading activities in general including exports, imports, local and interinsular, raw materials, auxiliary materials, production equipment in the fields of fertilizers, petrochemicals, agrochemicals, agro-industry and other chemicals.	✓	Kegiatan ini merupakan bisnis inti PI Grup This activity is the core business of PI Group

Kegiatan Usaha berdasarkan Anggaran Dasar Business Activities Based on Articles of Association	**Telah/Belum Dijalankan** Executed/Not Executed	**Keterangan** Description
Jasa Pengelolaan Perusahaan dan Jasa Konsultasi Manajemen. Company Management Services and Management Consulting Services.	✓	Merupakan kegiatan induk usaha produsen pupuk dalam mengelola portofolio investasi dan memberikan arahan kebijakan serta konsultasi pengelolaan Anak Usaha. This is the activity of the parent company of fertilizer producers in managing investment portfolios and providing policy direction and management consulting for its subsidiaries.
Jasa Lainnya Melaksanakan studi penelitian, pendidikan, pengembangan, desain *engineering*, pengantongan (*bagging station*), konstruksi *management*, pengoperasian pabrik, perbaikan, reparasi, pemeliharaan, konsultasi (kecuali konsultasi bidang hukum) dan jasa teknis lainnya dalam sektor industri pupuk, petrokimia, industri kimia lainnya serta jasa dalam bidang pertanian dan perkebunan. Other Services Carrying out research studies, education, development, engineering design, bagging (bagging station), construction management, plant operation, repair, repair, maintenance, consulting (except legal consulting) and other technical services in the fertilizer industry sector, petrochemicals, other chemical industries and services in agriculture and plantations.	✓	Merupakan kegiatan usaha EPC dan kegiatan untuk menjamin kelancaran operasional pabrik mulai hulu hingga hilir untuk menghasilkan produk yang bermutu tinggi. EPC business activities and activities to ensure the smooth operation of the plant from upstream to downstream to produce high quality products.
Kegiatan Usaha Penunjang | Supporting Business Activities		
Menjalankan kegiatan-kegiatan usaha dalam bidang angkutan, ekspedisi, pergudangan dan kegiatan lainnya yang merupakan sarana dan perlengkapan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan usaha tersebut. Carrying out business activities in the field of transportation, expedition, warehousing and other activities which are facilities and equipment for the smooth implementation of these business activities.	✓	Kegiatan ini dilaksanakan melalui Anak Usaha bidang Logistik. This activity is carried out through the Logistics Subsidiary.
Melaksanakan penugasan Pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik dan perundang-undangan. Carry out Government assignments in accordance with the principles of good corporate management and legislation.	✓	Merupakan kegiatan untuk menjalankan penugasan Pemerintah terutama penyediaan Pupuk Bersubsidi untuk kebutuhan Petani. An activity to carry out Government assignments, especially the provision of Subsidized Fertilizers for Farmers' needs.

Keterangan: ✓ = telah dijalankan; x = belum dijalankan
Note: ✓ = implemented; x = not yet implemented

PRODUK DAN JASA

Pupuk dan Amoniak

Segmen ini memiliki kegiatan produksi dan perdagangan produk pupuk dan amoniak yang ditopang oleh Entitas Anak, yaitu PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Kegiatan perdagangan produk pupuk mencakup penyaluran pupuk bersubsidi atau *Public Service Obligation* (PSO).

Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tanggal 1 April 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, Pemerintah Indonesia memberikan subsidi kepada PI Grup untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian meliputi pupuk jenis urea, SP-36, ZA, NPK dan jenis pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Tata cara penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban subsidi pupuk diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.02/2016 tanggal 26 April 2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk.

Besaran subsidi pupuk dihitung berdasarkan selisih antara harga pokok penjualan dengan harga eceran tertinggi. Berikut adalah produk-produk yang dipasarkan oleh PI Grup:

1. **UREA**
   Pupuk dengan kandungan N sebesar 46% dan diproduksi oleh seluruh Entitas Anak Produsen Pupuk ini dipasarkan untuk sektor subsidi maupun non-subsidi (komersil). Pupuk Urea memiliki fungsi membuat tanaman lebih hijau, mempercepat pertumbuhan tanaman dan meningkatkan kandungan protein tanaman.
2. **NPK**
   Merupakan pupuk majemuk yang memiliki kandungan N, P, K dan unsur mikro dengan komposisi yang variatif disesuikan dengan permintaan pasar. Pupuk NPK yang diproduksi oleh Entitas Anak Produsen Pupuk ini dipasarkan untuk sektor subsidi maupun non-subsidi. Pupuk NPK memiliki fungsi dapat meningkatkan hasil panen, membuat tanaman lebih hijau dan meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan hama penyakit dan kekeringan.
3. **SP-36**
   Merupakan pupuk yang diproduksi oleh PT Petrokimia Gresik dan dipasarkan untuk sektor non-subsidi. Pupuk SP-36 memiliki kandungan P sebesar 36% dan berfungsi untuk memacu pertumbuhan akar dan bunga serta masaknya buah dan biji.

PRODUCTS AND SERVICES

Fertilizer and Ammonia

This segment has production and trading activities of fertilizer and ammonia products supported by its subsidiaries, namely PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, and PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. The trading activities of fertilizer products include the distribution of subsidized fertilizers or Public Service Obligation (PSO).

In accordance with the Regulation of the Minister of Trade No. 15/M-DAG/PER/4/2013 dated 1 April 2013 on the Procurement and Distribution of Subsidized Fertilizers for the Agricultural Sector, the Government of Indonesia provides subsidies to PI Group for the needs of farmer groups and/or farmers in the agricultural sector including urea, SP-36, ZA, NPK and other types of subsidized fertilizers determined by the Ministry of Agriculture. The procedures for the provision, disbursement and accountability of fertilizer subsidies are regulated in the Minister of Finance Regulation No. 68/PMK.02/2016 dated 26 April 2016 concerning Procedures for the Provision, Disbursement and Accountability of Fertilizer Subsidy Funds.

The amount of fertilizer subsidy is calculated based on the difference between the cost of goods sold and the highest retail price. The following are the products marketed by PI Group:

1. **UREA**
   This fertilizer with an N content of 46% and produced by all Fertilizer Producing Subsidiaries is marketed to the subsidized and non-subsidized (commercial) sectors. Urea fertilizer has the function of making plants greener, accelerating plant growth and increasing plant protein content.
2. **NPK**
   It is a compound fertilizer that contains N, P, K and micro elements with a varied composition tailored to market demand. NPK fertilizers produced by the Subsidiary Fertilizer Producers are marketed for both subsidized and non-subsidized sectors. NPK fertilizer has the function of increasing crop yields, making plants greener and increasing plant resistance to pests and drought.
3. **SP-36**
   It is a fertilizer produced by PT Petrokimia Gresik and marketed for non-subsidized sectors. SP-36 fertilizer has a P content of 36% and functions to spur root and flower growth as well as fruit and seed ripening.

4. **ZA**
   Merupakan pupuk yang diproduksi PT Petrokimia Gresik dan dipasarkan untuk sektor non-subsidi. Pupuk ZA memiliki kandungan N sebesar 21% dan Sulfur 24% serta berfungsi untuk meningkatkan produksi hasil tebu, meningkatkan kualitas hasil panen, tanaman lebih sehat dan tahan terhadap hama.
5. **ZK**
   Merupakan pupuk yang diproduksi oleh PT Petrokimia Gresik. Pupuk ZK memiliki kandungan K2O sebesar 50% dan Sulfur 17% dan berfungsi untuk meningkatkan unsur hara tanah, membuat tanaman lebih tegak dan kokoh, memperbaiki warna, aroma, dan rasa.
6. **AMONIAK**
   Merupakan bahan mentah industri kimia dengan kemurnian 99,5% yang diproduksi oleh PI Grup dan dipasarkan untuk sektor dalam negeri maupun ekspor.

Produk Lainnya

Dengan menawarkan nilai yang istimewa dan kinerja yang unggul, produk-produk PI Grup telah membantu jutaan petani Indonesia untuk meningkatkan hasil dan kualitas panennya.

Jasa Konstruksi

Kegiatan usaha Jasa Konstruksi dilaksanakan oleh PT Rekayasa Industri ("Rekind"), Entitas Anak yang bergerak di bidang *Engineering, Procurement* dan *Construction* (EPC). Dengan pengalaman lebih dari 38 tahun di bidang EPC, Rekind telah membangun pabrik-pabrik skala besar di Indonesia di bidang minyak dan gas bumi (migas), kimia/petrokimia, mineral, infrastruktur dan pembangkit listrik.

Lain-lain

Kegiatan usaha pada segmen lain-lain merupakan kegiatan penunjang yang terdiri dari perdagangan umum, yaitu melalui PT Pupuk Indonesia Niaga dan PT Pupuk Indonesia Pangan, jasa pelayaran dan jasa angkutan laut oleh PT Pupuk Indonesia Logistik, serta jasa non-EPC melalui PT Pupuk Indonesia Niaga dan jasa bidang energi oleh PT Pupuk Indonesia Utilitas.

PASAR YANG DILAYANI

Produk dan jasa yang dipasarkan Perusahaan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu produk dan jasa yang dipasarkan serta didistribusikan di berbagai wilayah di Indonesia serta produk yang diekspor ke luar negeri. Sebaran pasar geografis sebagai negara tujuan ekspor yang dilakukan Perusahaan meliputi India, Filipina, Autralia, Cina, Vietnam, Thailand, Meksiko, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, serta beberapa negara lainnya.

4. **ZA**
   It is a fertilizer produced by PT Petrokimia Gresik and marketed for non-subsidized sectors. ZA fertilizer has an N content of 21% and 24% Sulfur and functions to increase sugarcane yield production, improve crop quality, healthier plants and resistance to pests.
5. **ZK**
   It is a fertilizer produced by PT Petrokimia Gresik. ZK fertilizer contains 50% K2O and 17% Sulfur and functions to increase soil nutrients, make plants more upright and sturdy, improve color, aroma, and taste.
6. **AMMONIA**
   It is a chemical industry raw material with 99.5% purity produced by PI Group and marketed for domestic and export sectors.

Other Products

By offering exceptional value and superior performance, PI Group's products have helped millions of Indonesian farmers to improve the yield and quality of their crops.

Construction Services

Construction Services business activities are carried out by PT Rekayasa Industri ("Rekind"), a subsidiary engaged in Engineering, Procurement and Construction (EPC). With more than 38 years of experience in EPC, Rekind has built large-scale factories in Indonesia in the fields of oil and gas, chemical/petrochemical, minerals, infrastructure and power generation.

Miscellaneous

Business activities in the others segment are supporting activities consisting of general trading, namely through PT Pupuk Indonesia Niaga and PT Pupuk Indonesia Pangan, shipping services and sea transportation services by PT Pupuk Indonesia Logistik, as well as non-EPC services through PT Pupuk Indonesia Niaga and energy services by PT Pupuk Indonesia Utilitas.

MARKETS SERVED

The products and services marketed by the Company are divided into 2 (two), namely products and services that are marketed and distributed in various regions in Indonesia and products that are exported abroad. The geographic market distribution as export destination countries carried out by the Company includes India, the Philippines, Australia, China, Vietnam, Thailand, Mexico, Japan, South Korea, the United States, and several other countries.

Berdasarkan pendapatan konsolidasian Perusahaan, produk yang dipasarkan pada tahun 2022 di pasar domestik mencapai 61,40% sedangkan produk ekspor sebesar 38,60% dari total pendapatan konsolidasian Perusahaan.

Based on the Company's consolidated revenue, products marketed in 2022 in the domestic market accounted for 61.40% while export products amounted to 38.60% of the Company's total consolidated revenue.

KOMPOSISI PERSEBARAN
Distribution Composition

dalam %

in %

	2022	2021	
Luar Negeri (Ekspor)	38,60	31,92	Overseas (Export)
Domestik	61,40	68,08	Domestic

Halaman ini sengaja dikosongkan

This page is intentionally left blank

Wilayah Operasional
Operational Area

PT Pupuk Iskandar Muda
Aceh Utara

1 Pabrik Urea Prill	1 Pabrik Granular
570 ribu | ton	570 ribu | ton
1 Pabrik NPK	500 ribu | ton

Jalan Medan - Banda Aceh,
Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, Aceh
Phone: (62-645) 56222
Fax: (62-645) 56095
E-mail: info@pim.co.id
Website: http://www.pim.co.id

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
Palembang

5	Pabrik Urea Prill	2.262 ribu | ton

Jalan Mayor Zen, Palembang 30118
Phone: (62-711) 712222
Fax: (62-711) 712100
E-mail:info@pusri.co.id/humas@pusri.co.id
Website: http://www.pusri.co.id

PT Rekayasa Industri
Jakarta

Jalan Kalibata Timur I No. 36 Kalibata, Jakarta 12740
Phone: (62-21) 7988700, 7988707
Fax: (62-21) 7988701, 7988702
E-mail: corpsec@rekayasa.co.id
Website: http://www.rekayasa.com

PT Pupuk Indonesia Logistik
Jakarta

Gedung Wisma Pusri 101 Jalan Letjend S Parman Kav. 101 RT/RW. 2/1 Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta 11440
Phone: (62-21) 22631881, 22631882, 22631883
Fax: (62-21) 22561904
E-mail: info@pi-logistik.com
Website: http://www.pi-logistik.com

PT Pupuk Indonesia Niaga
Jakarta

Gedung ROB-2 Lantai 3&4
Jl. Kalibata Timur I No. 36, Kalibata, Jakarta 12740
Telp: +62-21 7919 6026/7919 6027
E-mail: corcom@pi-niaga.com
Web: pi-niaga.com

PT Pupuk Indonesia Utilitas
Jakarta

Alamanda Tower Lt. 26 Jalan TB Simatupang No. 22-26 RT/RW. 1/1 Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta 12430
Phone: (62-21) 29661628, 29661629, 29661630, 29661631
Fax: (62-21) 3452609
E-mail: info@pi-energi.com
Website: http://www.pi-energi.com

PT Pupuk Kujang
Cikampek

2 Pabrik Urea Prill	2 Pabrik NPK Granular
1.140 ribu | ton	200 ribu | ton

Jalan Jenderal A. Yani No. 39,Kec. Cikampek, Kab. Karawang 41373, Jawa Barat
Phone: (62-264) 316141, 317007
Fax: (62-264) 314235
E-mail: info@pupuk-kujang.co.id
Website: http://www.pupuk-kujang.co.id

PT Pupuk Indonesia Pangan
Karawang

Jalan Rawamerta Dusun Sukamanah RT/RW. 006/003 Desa Kutawargi, Kec. Rawamerta Karawang 41382
Phone: (62-267) 6064389
Fax: (62-267) 6064556
E-mail: pemasaran@pi-pangan.com
Website: http://pi-pangan.com

Negara Tujuan Ekspor

Singapura Singapore	Jepang Japan	Uni Emirat Arab United Arab Emirates	Korea Selatan South Korea	Filipina Phillipines
Hong Kong	Swiss Switzerland	Thailand	Malaysia	India

PUPUK KALTIM

PT Pupuk Kalimantan Timur Bontang	
3 Pabrik Urea Prill	3 Pabrik Granule
1.340 ribu | ton	2.290 ribu | ton
3 Pabrik NPK	350 ribu | ton

Jl. Ir. James Simandjuntak No.1, Kel. Loktuan
Kec. Bontang Utara, Kota Bontang 75313,
Kalimantan Timur
Telp: +62-548 41202
Fax: +62-548 41626
E-mail: dof@pupukkaltim.com
Web: www.pupukkaltim.com

PETROKIMIA GRESIK

PT Petrokimia Gresik Gresik	
1 Pabrik Urea Prill	3 Pabrik ZA
460 ribu | ton	750 ribu | ton
2 Pabrik SP-36	9 Pabrik NPK
500 ribu | ton	350 ribu | ton

Jalan Jend. A. Yani, Gresik 61119, Jawa Timur
Phone: (62-31) 3981811, 3982100, 3982200
Fax: (62-31) 3981722, 3892272
E-mail: pg@petrokimia-gresik.com
Website: http://www.petrokimia-gresik.com

Wilayah Operasional Produk Urea PSO
Urea PSO Product Operational Areas

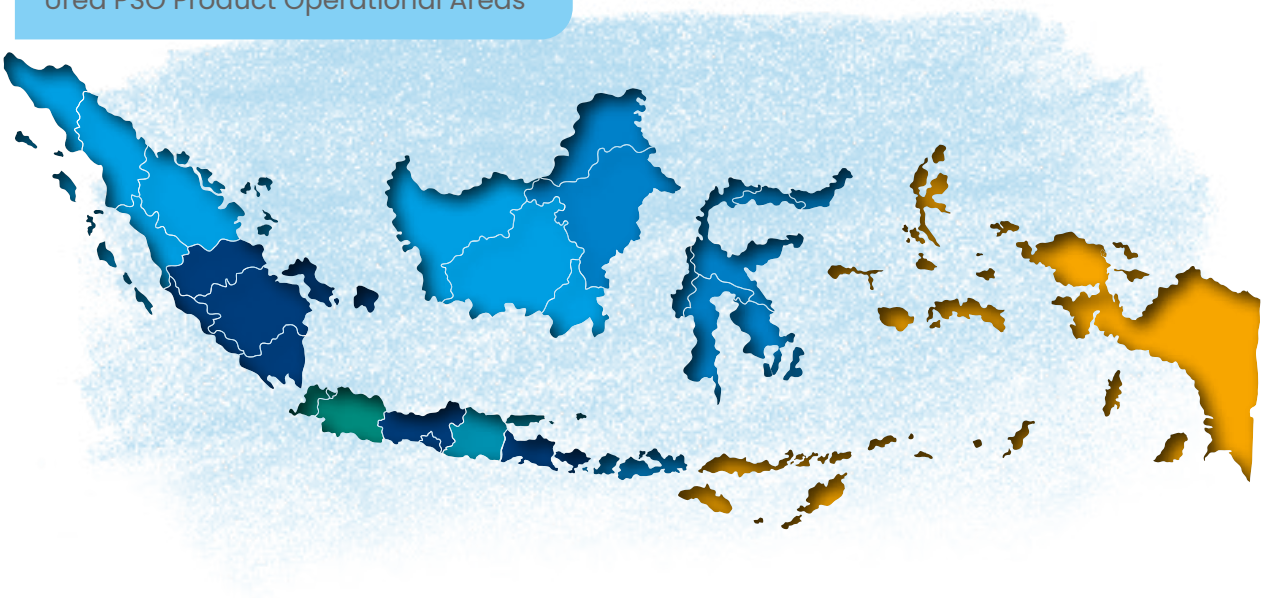

- Rayon PIM
- Rayon PSP
- Rayon PKC
- Rayon PKG
- Rayon PKT

Wilayah Operasional Produk NPK PSO
NPK PSO Product Operational Areas

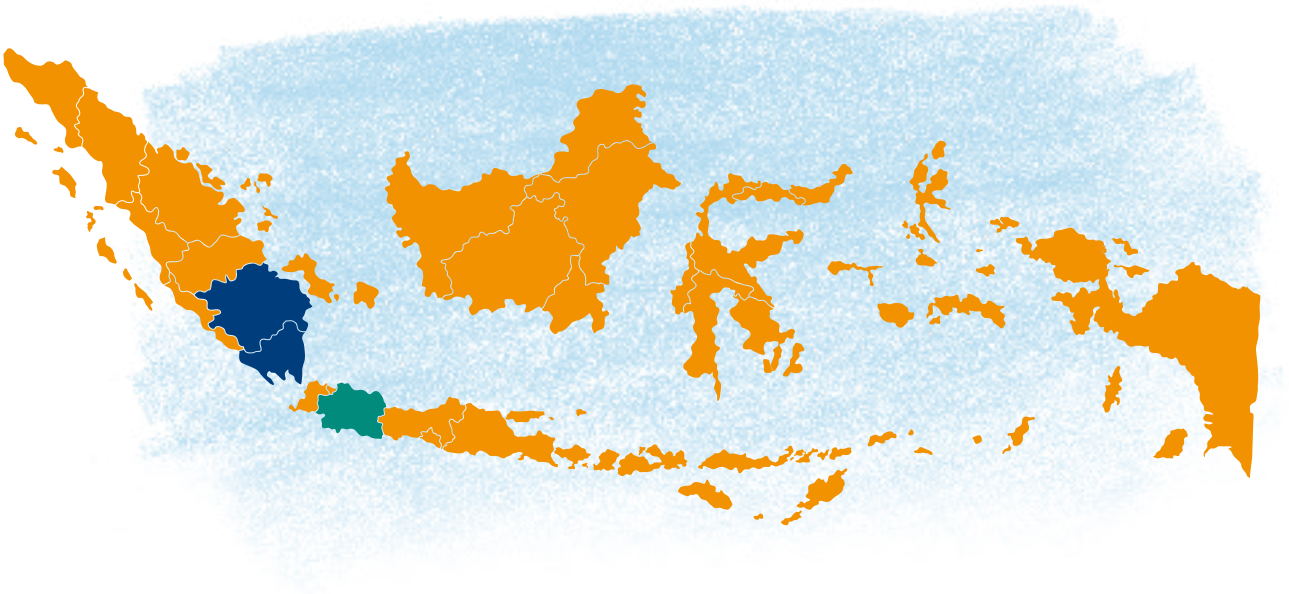

- Rayon PKG
- Rayon PSP
- Rayon PKC

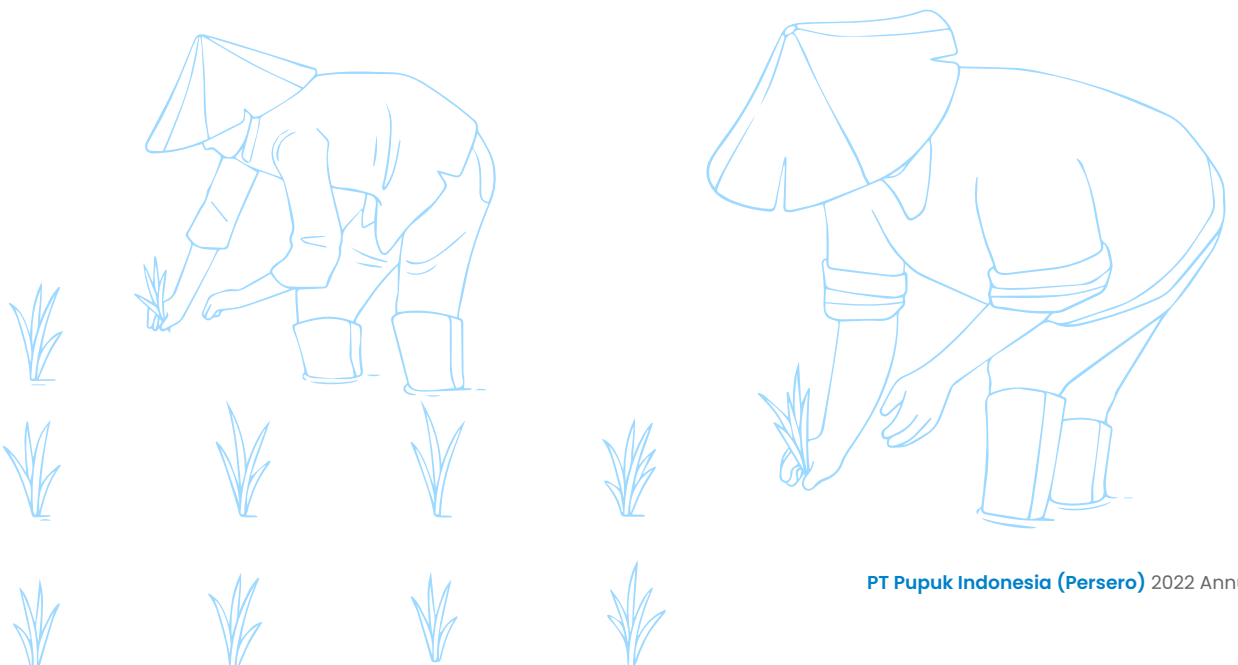

WILAYAH OPERASIONAL PRODUK KOMERSIAL DAN NON PUPUK
Operational Areas of Commercial and Non-Fertilizer Products

Nama Perusahaan Company Name	**Lokasi Pabrik/Operasi** Factory/Operation Location	**Pasar Dalam Negeri** Domestic Market	
		Pupuk Komersial Commercial Fertilizer	**Non Pupuk** Non Fertilizer
PT Pupuk Iskandar Muda	Lhokseumawe	Aceh, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara Aceh, Riau, West Sumatra, North Sumatra	–
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Palembang	Bali, Banten, Bengkulu, DI Yogyakarta, Jambi, Pulau Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kep Bangka Belitung, Kep Riau, Lampung, NTB, Papua Bali, Banten, Bengkulu, DI Yogyakarta, Jambi, Java Island, West Kalimantan, South Kalimantan, Central Kalimantan, Bangka Belitung Islands, Riau Islands, Lampung, NTB, Papua	Jawa Timur, Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara East Java, Lampung, West Sumatra, South Sumatra, North Sumatra
PT Pupuk Kujang	Cikampek	Seluruh Provinsi kecuali Bengkulu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kep Riau, Maluku, Papua, Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara All provinces except Bengkulu, South Kalimantan, North Kalimantan, Riau Islands, Maluku, Papua, West Papua, West Sulawesi, North Sulawesi	Aceh, Banten, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Pulau Jawa, Kalimantan Selatan, Kep Riau, Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara Aceh, Banten, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Java Island, South Kalimantan, Riau Islands, Lampung, Central Sulawesi, Southeast Sulawesi
PT Pupuk Kalimantan Timur	Bontang	Seluruh Provinsi kecuali Bangka Belitung, Kep Riau, Lampung, Maluku, Aceh, Banten, Bengkulu, DKI Jakarta, Jambi All Provinces except Bangka Belitung, Riau Islands, Lampung, Maluku, Aceh, Banten, Bengkulu, DKI Jakarta, Jambi	Jawa Timur, Kalimantan Timur East Java, East Kalimantan
PT Petrokimia Gresik	Gresik	Seluruh Provinsi kecuali Kep Riau All provinces except Riau Islands	DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara DI Yogyakarta, DKI Jakarta, West Java, East Java, North Sumatra

NEGARA TUJUAN EKSPOR PRODUK PI GRUP
Export Destination Countries of PI Group Products

Negara	Produk | Products					Country
	Urea	**NPS**	**ZK**	**ALF3**	**Amoniak** Ammonia	
India	368.425	26.999	-	-	99.531	India
Filipin	203.326	-	-	-	578	Philippines
Meksiko	41.100	-	-	-	-	Mexico
Amerika Serikat	30	-	-	-	-	United States of America
Korea Selatan	29.192	-	-	-	65.339	South Korea
Malaysia	66.162	-	-	-	11.803	Malaysia
Taiwan	17.922	-	-	-	-	Taiwan
Australia	373.474	-	-	-	20.836	Australia
Sri Lanka	35.804	-	-	-	-	Sri Lanka
Thailand	46.714	-	-	-	62.374	Thailand
Kolombia	5.900	-	-	-	-	Colombia
Vietnam	85.155	-	-	-	43.163	Vietnam
Afrika Selatan	3.400	-	-	-	11.200	South Africa
Chili	71.731	-	-	-	-	Chile
Timor Leste	160	-	-	-	-	Timor Leste
Jepang	1.454	-	-	-	152.637	Japan
China	40.599	-	-	-	97.478	China
Burma	37.817	-	-	-	-	Burma
Argentina	102.124	-	-	-	-	Argentina
Singapore	440	-	-	5.060	37.263	Singapore
Mozambique	61.503	-	-	-	-	Mozambique
Uruguay	39.497	-	-	-	-	Uruguay
Peru	40.509	-	-	-	-	Peru
New Zealand	1.500	-	-	-	-	New Zealand
Romania	24.971	-	-	-	-	Romania
Greece	13.500	-	-	-	-	Greece
United Kingdom	13.200	-	-	-	-	United Kingdom
Ireland	11.000	-	-	-	-	Ireland
Poland	9.211	-	-	-	-	Poland
Liberia	1.196	-	-	-	-	Liberia
Lithuania	500	-	-	-	-	Lithuania
Italy	140	-	-	-	-	Italy
Rep. of Congo	100	-	-	-	-	Rep. of Congo
Israel	100	-	-	-	-	Israel
Belgium	-	-	-	-	40.275	Belgium
Morocco	-	-	-	-	51.007	Morocco
Netherlands	-	-	-	-	12.933	Netherlands
Portugal	-	-	-	-	10.000	Portugal
Spain	-	-	-	-	5.214	Spain
Tunisia	-	-	-	-	27.493	Tunisia
UAE	-	-	2.925	-	-	Dubai

Visi dan Misi
Vision and Mission

Visi
Vision

Menjadi perusahaan nasional berkelas dunia untuk nutrisi tanaman dan solusi pertanian yang berkelanjutan serta mampu memberikan dampak ekonomi dan sosial secara nasional.

To become a sustainable world-class national company of plant nutrition and Agriculture solution and able to create national economic and social impact.

Misi
Mission

- Menyediakan produk nutrisi tanaman yang kompetitif dan solusi pertanian sesuai dengan kebutuhan konsumen melalui ekosistem pertanian yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
- Memaksimalkan *circular economy* sehingga memberikan manfaat serta nilai tambah ekonomi dan sosial untuk Indonesia.
- Mendukung program ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
- Menjalankan bisnis dengan menerapkan teknologi terkini yang mengedepankan keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan hidup dengan prinsip tata kelola yang baik dengan manajemen risiko yang efektif dan didukung oleh SDM yang profesional.
- Menciptakan *culture* yang inovatif, kolaboratif, dan *high performing* untuk menjamin perusahaan yang berkelanjutan.

- Provide competitive plant nutrition products and agriculture solution according to consumer needs through sustainable agricultural ecosystems throughout Indonesia.
- Maximizing the circular economy to provide economic and social benefits and added value for Indonesia.
- Support national food security and sovereignty programs.
- Conduct a business by applying the most up to date technology which prioritizes the work safety and environmental sustainability based on the principles of good governance with effective risk management and supported by professional human resources.
- Creating an innovative, collaborative and high performing culture to ensure a sustainable company.

Review dan Penetapan Visi dan Misi Perusahaan oleh Manajemen Kunci

Visi dan Misi PTPI ditetapkan dan diberlakukan melalui kajian secara mendalam dalam sebuah forum penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2020-2024 yang melibatkan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, jajaran PTPI, kemudian disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi melalui surat No. S-86/Kom/PIHC/XI/2020 tanggal 12 November 2020 dan disahkan oleh Pemegang Saham, dalam hal ini Menteri BUMN melalui surat No. S-1087/MBU/11/2020 tanggal 27 November 2020. Perusahaan melakukan *review* terhadap Visi dan Misi Perusahaan secara berkala setiap tahun dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan lingkungan bisnis serta tantangan yang dihadapi oleh Perusahaan.

Review and Determination of Company Vision and Mission by Key Management

PTPI's Vision and Mission were determined and enacted through an in-depth study in a forum for the preparation of the 2020-2024 Company Long Term Plan (RJPP) involving Shareholders, Board of Commissioners, Board of Directors, PTPI staff, then approved by the Board of Commissioners and Board of Directors through letter No. S-86/Kom/PIHC/XI/2020 dated November 12, 2020 and authorized by the Shareholders, in this case the Minister of BUMN through letter No. S-1087/MBU/11/2020 dated November 27, 2020. The Company periodically reviews the Company's Vision and Mission every year at the Annual General Meeting of Shareholders to ensure its relevance to the development of the business environment and the challenges faced by the Company.

NILAI-NILAI DAN PARADIGMA

PT Pupuk Indonesia (Persero) mengimplementasikan nilai-nilai utama dan paradigma Perusahaan yang mengacu pada Surat Edaran Menteri BUMN No. SE–7/MBU/07/2020 tentang Nilai-nilai Utama (*Core Value*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Ketentuan tersebut telah menetapkan nilai-nilai yang disebut AKHLAK, akronim dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif.

VALUES AND PARADIGMS

PT Pupuk Indonesia (Persero) implements the main values and paradigm of the Company which refers to the Circular Letter of the Minister of SOEs No. SE-7/MBU/07/2020 concerning the Main Values (Core Value) of Human Resources of State-Owned Enterprises. The provision has established values called AKHLAK, an acronym for Trust, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, Collaborative.

DASAR DAN TUJUAN PENERAPAN AKHLAK

Dasar Penerapan AKHLAK

Acuan yang menjadi dasar dalam implementasi nilai-nilai AKHLAK di lingkungan Perusahaan adalah:

1. Surat Edaran Menteri BUMN SE–7/MBU/07/2020 tentang Nilai-nilai Utama (*Core Value*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
2. Surat Edaran PTPI No. 08/A/KK/S22/SE/2020 perihal Implementasi Nilai–Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Menjadi Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*).
3. Panduan Tata Nilai Perusahaan PT Pupuk Indonesia Persero (2 September 2020).
4. Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/072/2020 tentang Tata Nilai Perusahaan.

BASIS AND PURPOSE OF AKHLAK IMPLEMENTATION

Basis for the Application of AKHLAK

The references that serve as the basis for the implementation of AKHLAK values within the Company are:

1. Circular Letter of the Minister of SOEs SE-7/MBU/07/2020 on Core Values of Human Resources of State-Owned Enterprises.
2. PTPI Circular Letter No. 08/A/KK/S22/SE/2020 regarding the Implementation of Core Values of Human Resources of State-Owned Enterprises into Corporate Culture.
3. PT Pupuk Indonesia Persero Corporate Values Manual (September 2, 2020).
4. Decree of the Board of Directors No. SK/DIR/072/2020 concerning Corporate Values.

5. Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/089/2020 tentang Pembentukan Tim Implementasi Budaya Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero).

Perusahaan juga telah memiliki ketetapan yang mewajibkan penerapan nilai-nilai AKHLAK di lingkungan Anak Perusahaan. Ketetapan internal itu sampaikan melalui Surat Edaran No. 08/A/KK/S22/SE/2020 perihal Implementasi Nilai-nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara menjadi Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*) tanggal 4 Agustus 2020.

TUJUAN PENERAPAN AKHLAK

Implementasi budaya "AKHLAK" di lingkungan PI Grup bertujuan untuk mendukung transformasi bisnis, sesuai arahan manajemen PT Pupuk Indonesia (Persero). Selain itu, penerapan nilai-nilai tersebut juga telah menjadi program kerja yang disusun oleh Tim Implementasi Budaya "AKHLAK" di PT Pupuk Indonesia (Persero) dalam rangka mencapai visi dan misi Perusahaan.

PROGRAM IMPLEMENTASI BUDAYA PERUSAHAAN TAHUN 2022

Sebagai wujud komitmen Perusahaan dalam merealisasikan nilai-nilai AKHLAK, sepanjang tahun 2022 telah dilaksanakan sejumlah program yang diuraikan dalam tabel di bawah ini:

5. Decree of the Board of Directors No. SK/DIR/089/2020 concerning the Establishment of the Corporate Culture Implementation Team of PT Pupuk Indonesia (Persero).

The company also has a provision that requires the implementation of AKHLAK values in the Subsidiary environment. The internal decree was conveyed through Circular Letter No. 08/A/KK/S22/SE/2020 regarding the Implementation of Core Values of Human Resources of State-Owned Enterprises into Corporate Culture dated August 4, 2020.

PURPOSE OF AKHLAK IMPLEMENTATION

The implementation of the "AKHLAK" culture within the PI Group aims to support business transformation, in accordance with the direction of PT Pupuk Indonesia (Persero) management. In addition, the implementation of these values has also become a work program prepared by the "AKHLAK" Culture Implementation Team at PT Pupuk Indonesia (Persero) in order to achieve the Company's vision and mission.

CORPORATE CULTURE IMPLEMENTATION PROGRAM 2022

As a manifestation of the Company's commitment in realizing the values of AKHLAK, throughout 2022 a number of programs have been implemented as described in the table below:

No	**Nama Program** Program Name	**Deskripsi Program** Program Description	**Waktu Pelaksanaan** Implementation Time
1	*Benchmark* Program Budaya AKHLAK	*Benchmark* Progam Budaya AKHLAK bertujuan untuk menambah wawasan Tim Pengelola Budaya Pupuk Indonesia dalam mengimplementasikan Budaya AKHLAK di beberapa perusahaan di lingkungan Kementerian BUMN. *Benchmark* Program AKHLAK Tahun 2022 telah dilaksanakan sebanyak 3 kali dengan detail sebagai berikut: a. PT PLN (Persero) dilaksanakan 6 Januari 2022 b. PT Pertamina (Persero) dilaksanakan 12 Januari 2022 c. PT Jasa Marga (Persero) dilaksanakan 20 Januari 2022	Januari 2022
	AKHLAK Cultural Program Benchmark	The AKHLAK Culture Benchmark Program aims to broaden the knowledge of Pupuk Indonesia's Culture Management Team in implementing AKHLAK Culture in several companies within the Ministry of SOEs. Benchmark The AKHLAK Program in 2022 has been carried out 3 times with the following details: a. PT PLN (Persero) held on January 6, 2022 b. PT Pertamina (Persero) held on January 12, 2022 c. PT Jasa Marga (Persero) held on January 20, 2022.	January 2022

No	Nama Program Program Name	Deskripsi Program Program Description	Waktu Pelaksanaan Implementation Time
2	*Update* AKHLAK *Culture Journey* Tahun 2020-2024	*Update Roadmap* Program Budaya AKHLAK 2020-2024 yang telah disusun. Setelah melakukan perjalanan program Budaya AKHLAK tahun 2020-2022 dan dilakukan evaluasi terkait *roadmap* Budaya AKHLAK yang telah berjalan, maka dilakukan *update* terkait beberapa program dan *milestone* program implementasi Budaya AKHLAK dan disesuaikan dengan Buku Panduan AKHLAK *Culture Journey* Kementerian BUMN.	Februari 2022
	AKHLAK Culture Journey Update 2020-2024	Update on the AKHLAK Culture Program Roadmap 2020-2024 that has been prepared. After conducting the AKHLAK Culture program journey for 2020-2022 and evaluating the AKHLAK Culture roadmap that has been running, updates were made regarding several programs and milestones of the AKHLAK Culture implementation program and adjusted to the AKHLAK Culture Journey Guidebook of the Ministry of SOEs.	February 2022
3	Program SaPa PaGi	Program SaPa PaGi (*Sharing* Pemahaman AKHLAK Padu Bersinergi) merupakan salah satu media untuk meningkatkan pemahaman AKHLAK yang dilakukan rutin setiap bulan di level unit kerja dengan membahas materi-materi AKHLAK. Program SaPa Pagi telah dilaksanakan sejak tahun 2021. Pada tahun 2022 ini dilakukan *improvement* terkait pelaksanaan SaPa PaGi yaitu dengan menambahkan kegiatan *story telling* dan evaluasi pelaksanaan program SaPa PaGi tersebut. Pelaksanaan SaPa PaGi Pupuk Indonesia Grup sepanjang tahun 2022 sebanyak 538 Kegiatan SaPa PaGi dan hasil evaluasi keterlibatan *leader* dengan skor 4,64 kategori Baik (Skala 1-5).	Maret-Desember 2022
	SaPa PaGi Program	The SaPa PaGi (Sharing Understanding of AKHLAK Padu Bersinergi) program is one of the media to increase understanding of AKHLAK which is carried out regularly every month at the work unit level by discussing AKHLAK material. The SaPa Pagi program has been implemented since 2021, in 2022 improvements were made regarding the implementation of SaPa PaGi, namely by adding story telling activities and evaluating the implementation of the SaPa PaGi program. The implementation of SaPa PaGi Pupuk Indonesia Group throughout 2022 was 538 SaPa Pagi activities and the results of the evaluation of leader involvement with a score of 4.64 in the Good category (Scale 1-5).	March-December 2022
4	Program eNPeKa	Program eNPeKa adalah program *customization* yang disusun oleh Komunitas Amoniak (*Change leader, champion, & fertilizer*) sebagai upaya tidak lanjut dari survei budaya AKHLAK tahun 2021. Program eNPeKa telah dilaksanakan sejak tahun 2021, Pada tahun 2022 dilakukan *improvement* dalam pembuatan program eNPeKa tersebut harus mendukung pencapaian target kinerja unit kerja maupun perusahaan. Realisasi tahun 2022 semua Kompartemen/Unit Kerja Pupuk Indonesia Grup membuat Program eNPeKa masing-masing Kompartemen.	Maret-Desember 2022
	eNPeKa Program	The eNPeKa program is a customization program developed by the Ammonia Community (Change leader, champion, & fertilizer) as a follow-up effort from the AKHLAK culture survey in 2021. The eNPeKa program has been implemented since 2021, in 2022 improvements were made in making the eNPeKa program must support the achievement of work unit and company performance targets. The realization in 2022 is that all Compartments/Work Units of the Pupuk Indonesia Group will create an eNPeKa program for each Compartment.	March-December 2022
5	Bimbingan Teknis Penyusunan Program eNPeKa PI Group	Bimbingan teknis program eNPeKa merupakan kegiatan untuk memonitor dan mengevaluasi terkait perjalanan program eNPeKa Tahun 2022.	Maret-Oktober 2022
	Technical Guidance for eNPeKa Program Development PI Group	The technical guidance of the eNPeKa program is an activity to monitor and evaluate related to the eNPeKa program journey in 2022.	March-October 2022

No	Nama Program Program Name	Deskripsi Program Program Description	Waktu Pelaksanaan Implementation Time
6	Program *Hi-Five* (AKHLAK *Recognition*)	Program AKHLAK *Recognition* merupakan program implementasi *core value* AKHLAK dengan memberikan apresiasi dari karyawan untuk karyawan dengan dikaitkan dengan *core value* AKHLAK. Program ini rutin dilaksanakan setiap bulan sepanjang tahun 2022 terhitung dimulai pada bulan April tahun 2022. Jumlah *recognition* yang diberikan karyawan Pupuk Indonesia Grup sepanjang tahun 2022 sebanyak 2.248 *recognition*.	April-Desember 2022
	Hi-Five Program (AKHLAK Recognition)	AKHLAK Recognition Program is an AKHLAK core value implementation program by providing appreciation from employees for employees associated with AKHLAK Core Values. This program is routinely implemented every month throughout 2022 starting in April 2022. The number of recognition given by Pupuk Indonesia Group employees throughout 2022 was 2,248 Recognition.	April-December 2022
7	Sayembara AKHLAK *Digital Comic*	Sayembara AKHLAK *Digital Comic* merupakan perlombaan membuat *digital comic* berisikan tentang nilai-nilai AKHLAK dan bertujuan untuk mempercepat pemahaman Budaya AKHLAK, memperdalam *meaning purpose* budaya AKHLAK melalui media yang efektif dan atraktif serta meningkatkan kreativitas dalam kontribusinya mendukung pencapaian implementasi budaya AKHLAK Pupuk Indonesia yang maksimal.	April-Juni 2022
	AKHLAK Digital Comic Contest	AKHLAK Digital Comic Competition is a competition to create a digital comic containing AKHLAK values and aims to accelerate the understanding of AKHLAK Culture, deepen the meaning purpose of AKHLAK culture through effective and attractive media and increase creativity in its contribution to support the achievement of maximum implementation of Pupuk Indonesia's AKHLAK culture.	April-June 2022
8	AKHLAK BUMN Muda *Talk Series* PI Grup	AKHLAK BUMN Muda *Talk Series* PI Grup merupakan *sharing session* dengan narasumber BUMN Muda (karyawan) yang menceritakan pengalaman pribadi dan sukses *story* yang mereka alami yang dikaitkan dengan nilai-nilai AKHLAK. Telah dilaksanakan AKHLAK BUMN *Talk Series* sebanyak 3 (tiga) kali.	April-Juni 2022
	AKHLAK BUMN Muda Talk Series PI Group	AKHLAK BUMN Muda Talk Series PI Group is a sharing session with young BUMN resource persons (employees) who share their personal experiences and success stories associated with AKHLAK values. AKHLAK BUMN Talk Series has been carried out 3 (three) times.	April-July 2022
9	Peringatan 2 Tahun AKHLAK BUMN #AKHLAKCultureJourney	Pupuk Indonesia ikut dalam berpartisipasi dalam semua kegiatan dalam acara Peringatan 2 Tahun AKHLAK BUMN.	Juli-November 2022
	2nd Anniversary of AKHLAK BUMN #AKHLAKCultureJourney	Pupuk Indonesia participated in all activities in the 2nd Anniversary of AKHLAK BUMN.	July-November 2022
10	Penyusunan Buku Panduan AKHLAK Journey KBUMN	Tim Implementasi Budaya Pupuk Indonesia menjadi Tim *Task Force* Penyusun Buku Panduan AKHLAK *Culture Journey* KBUMN. Buku Panduan AKHLAK *Culture Journey* diluncurkan pada tanggal 28 November 2022.	Juli-November 2022
	Preparation of KBUMN AKHLAK Journey Guidebook	Pupuk Indonesia Culture Implementation Team became the Task Force Team for the Compilation of KBUMN AKHLAK Culture Journey Guidebook. The AKHLAK Culture Journey Guidebook was launched on November 28, 2022.	July-November 2022
11	*Site Visit* Program eNPeKa Periode Juni 2022 PI Grup	*Site visit* merupakan bentuk evaluasi Program eNPeKa yang berjalan di PI Grup dengan metode penilaian *cross* Anak Perusahaan PI Grup dilaksanakan.	Juli 2022
	eNPeKa Program Site Visit June 2022 Period PI Group	Site visits are a form of evaluation of the eNPeKa Program that runs in the PI Group with a cross-assessment method per PI Group implemented.	July 2022

No	Nama Program Program Name	Deskripsi Program Program Description	Waktu Pelaksanaan Implementation Time
12	*Dashboard Monitoring* Program Budaya AKHLAK PI Grup	*Dashboard Monitoring* Program Budaya AKHLAK Tahun 2022 untuk memantau pelaksanaan Program SaPa PaGi dan eNPeKa. *Dashboard Monitoring launching* pada tanggal 20 Oktober 2022.	Agustus-Oktober 2022
	AKHLAK PI Group Cultural Program Monitoring Dashboard	AKHLAK Culture Program Monitoring Dashboard in 2022 to monitor the implementation of SaPa PaGi and eNPeKa programs. The Monitoring Dashboard was launched on October 20, 2022.	August-October 2022
13	Sayembara AKHLAK *Story Telling*	Sayembara AKHLAK *Story Telling* merupakan perlombaan membuat *story telling* yang dilengkapi *canvas story* berisikan tentang pengalaman pribadi karyawan yang dikaitkan dengan nilai-nilai AKHLAK.	Agustus-September 2022
	AKHLAK Story Telling Contest	AKHLAK Story Telling Competition is a competition to make story telling equipped with a canvas story containing personal experiences of employees related to AKHLAK values.	August-September 2022
14	Survei *Awareness* dan *Understanding* AKHLAK PI Grup	Survei *awareness* dan *understanding* untuk mengukur tingkat kesiapan dan pemahaman karyawan pada nilai-nilai AKHLAK dan merupakan rangkaian pengukuran tingkat implementasi AKHLAK pada Buku Panduan AKHLAK *Culture Journey* Kementerian BUMN.	September-Oktober 2022
	AKHLAK PI Group Awareness and Understanding Survey	Awareness and understanding survey to measure the level of readiness and understanding of employees on AKHLAK values and is a series of measurements of the level of AKHLAK implementation in the AKHLAK Culture Journey Guidebook of the Ministry of BUMN.	September-October 2022
15	Program AKHLAK Keluarga	Program AKHLAK untuk Keluarga salah satu bentuk implementasi Budaya AKHLAK kepada keluarga karyawan Pupuk Indonesia Grup.	Agustus-Desember 2022
	The AKHLAK for Family Program	The AKHLAK for Family Program is one form of implementation of AKHLAK Culture to the families of Pupuk Indonesia Group employees.	August-December 2022
16	Bedah Buku "*From Boring to Badass*"	Bedah Buku "*From Boring to Badass*" dilaksanakan tanggal 27 Oktober 2022, dengan narasumber Penulis buku *Form Boring to Badass*, Achmad S. Ruky.	Oktober 2022
	Book Review "From Boring to Badass"	Book Review "From Boring to Badass" was held on October 27, 2022, with the resource person of the author of the book Form Boring to Badass, Achmad S. Ruky.	October 2022
17	*Sharing Session* eNPeKa PI Grup	*Sharing Session* Program eNPeKa merupakan kegiatan *sharing knowledge* terkait pelaksanaan program eNPeKa yang berjalan di Pupuk Indonesia Grup. Pada *Sharing Knowledge* kali ini dilaksanakan 16 November 2022 dengan narasumber Tim Budaya Kompartemen Teknologi PT PKT.	Oktober-November 2022
	Sharing Session eNPeKa Program PI Group	Sharing Session eNPeKa Program is a knowledge sharing activity related to the implementation of the eNPeKa program that runs in Pupuk Indonesia Group. This time the Sharing Knowledge was held on November 16, 2022 with the resource person from the PT PKT Technology Compartment Culture Team.	October-November 2022
18	*Leaders Talk* AKHLAK	*Leaders Talk* AKHLAK merupakan media pembelajaran dengan mendapatkan *insight-insight* dari *leaders* (narasumber eksternal) yang membahas isu-isu terkini yang dikaitkan dengan nilai-nilai AKHLAK. Kegiatan dilaksanakan pada 13 Desember 2022 dengan narasumber Prof. Rhenald Kasali total peserta 1.415 orang.	November-Desember 2022
	Leaders Talk AKHLAK	Leaders Talk AKHLAK is a learning media by getting insights from leaders (external speakers) who discuss current issues related to AKHLAK values. The activity was held on December 13, 2022 with Prof. Rhenald Kasali and total participants 1,415 person.	November-December 2022

No	Nama Program Program Name	Deskripsi Program Program Description	Waktu Pelaksanaan Implementation Time
19	Pengukuran AKHLAK Intervensi PI Grup	Pengukuran AKHLAK intervensi untuk mengukur tingkat keberhasilan perusahaan dalam upaya agar perilaku Karyawan selaras dengan *core values* AKHLAK. Hasil Pengukuran Intervensi AKHLAK PI Grup adalah di Tingkat 2 (sesuai *tools* Buku Panduan AKHLAK *Journey* KBUMN).	November-Desember 2022
	PI Group Intervention AKHLAK Measurement	AKHLAK intervention measurement to measure the company's level of success in efforts to make Employee behavior aligned with AKHLAK core values. PI Group's AKHLAK Intervention Measurement results are at Level 2 (according to the KBUMN AKHLAK Journey Guidebook tools).	November-December 2022
20	Pengukuran *Acceptance* AKHLAK PI Grup	Pengukuran *acceptance* (penerimaan) AKHLAK untuk mengukur tingkat penerimaan karyawan terhadap *core values* AKHLAK. Hasil pengukuran *acceptance* AKHLAK PI Grup adalah 255 (Kategori penerimaan tinggi sesuai *tools* Buku Panduan AKHLAK *Journey* KBUMN).	Desember 2022
	PI Group AKHLAK Acceptance Measurement	AKHLAK acceptance measurement to measure the level of employee acceptance of AKHLAK core values. The result of the PI Group AKHLAK acceptance measurement is 255 (High acceptance category according to the KBUMN AKHLAK Journey Guidebook tools).	December 2022
21	Pengukuran Indeks Maturitas Budaya (IMB) AKHLAK PI Grup	Pengukuran untuk mengetahui tingkat penerimaan karyawan terhadap *core value* AKHLAK dalam perilaku kegiatan sehari-hari. Detail Pelaksanaan Pengukuran IMB adalah sebagai berikut: a. Pelaksanaan Pengukuran IMB menggunakan metode *Net Promoter Score* (NPS) dengan menggunakan media PISmart. b. Jumlah responden dalam pengukuran sebanyak 7.795 responden. c. Hasil Pengukuran IMB = 8,52 (target IMB tahun 2022 = 6).	Desember 2022
	Culture Maturity Index Measurement (IMB) AKHLAK PI Group	Measurement to determine the level of employee acceptance of the AKHLAK core value in the behavior of daily activities. Details of the IMB Measurement Implementation are as follows: a. Implementation of IMB Measurement using the NPS (Net Promoter Score) method using PISmart media. b. The number of respondents in the measurement was 7,795 Respondents. c. IMB Measurement Results = 8.52 (IMB target in 2022 = 6).	December 2022

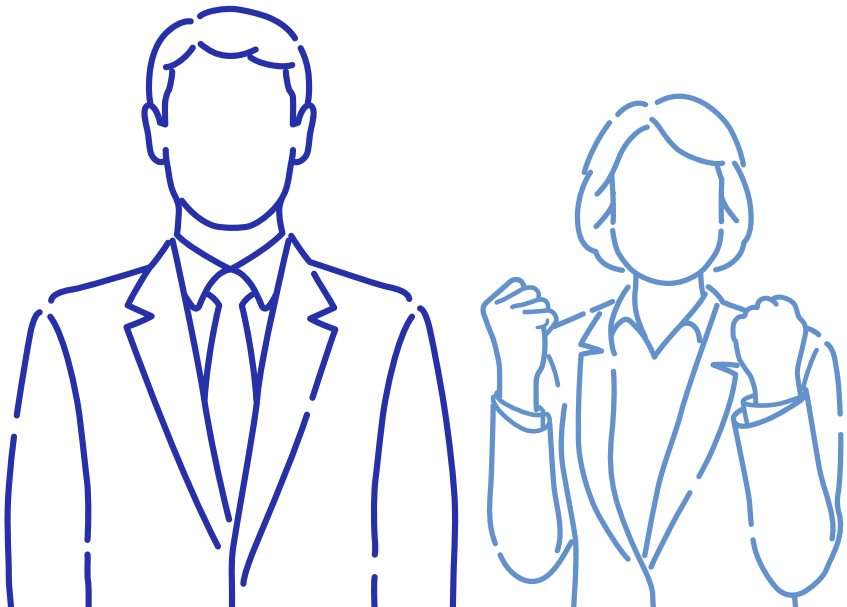

Filosofi Logo Perusahaan

Company Logo Philosophy

PUPUK INDONESIA
HOLDING COMPANY

Objektivitas
Objectivity

Objektif dari desain logo adalah memberikan *image* baru untuk Pupuk Indonesia sebagai *Holding Company*, sehingga dapat menghilangkan *image brand* sebelumnya yaitu Pusri.

The objective of the logo design is to provide a new image for Pupuk Indonesia as a Holding Company, so that it can eliminate the previous brand image of Pusri.

Bentuk
Shape

Bentuk dasar logo terinspirasi dari hal-hal yang menjadi dasar usaha Pupuk Indonesia yaitu molekul atom yang terkandung di dalam senyawa pupuk, *petrochemical* dan *energy*. Bentuk dasar logo Pupuk Indonesia diilhami dari bentuk senyawa kimia pupuk urea, yang merupakan produk utama Pupuk Indonesia. Besaran lingkaran yang ada melambangkan *main-business* dan *sub-business*. Lingkaran kosong melambangkan bisnis yang akan terus berkembang, terus berkarya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

The basic shape of the logo is inspired by the things that are the basis of Pupuk Indonesia's business, namely atomic molecules contained in fertilizer compounds, petrochemicals and energy. The basic shape of the Pupuk Indonesia logo is inspired by the shape of the chemical compound urea fertilizer, which is Pupuk Indonesia's main product. The size of the circle symbolizes the main-business and sub-business. The empty circle symbolizes a business that will continue to grow, continue to work to meet the needs of the community.

Jenis Huruf
Typeface

Huruf yang digunakan adalah huruf tanpa 'serif' yang memberi kesan modern, dinamis, dan profesional.

The fonts used are letters without 'serifs' that give a modern, dynamic and professional impression.

WARNA

Warna-warna yang mewakili unsur-unsur bisnis Pupuk Indonesia, yaitu *fertilizer, petrochemical*, dan *energy*. Warna logo diilhami dari bisnis inti Pupuk Indonesia dan filosofi yang terkandung di dalamnya.

COLOR

The colors represent Pupuk Indonesia's business elements, namely fertilizer, petrochemical, and energy. The logo colors are inspired by Pupuk Indonesia's core business and its philosophy.

Hijau
Mewakili main business Pupuk Indonesia yang bergerak di bidang agrokimia dan juga melambangkan pembaharuan.

Green
Represents Pupuk Indonesia's main business in agrochemicals and also symbolizes renewal.

Kuning
Mewakili padi yang menguning dan juga melambangkan kesuburan.

Yellow
It represents yellowing rice and also symbolizes fertility.

Oranye
Mewakili sumber daya alam, energi, dan hasil bumi yang diolah Pupuk Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dan dapat diartikan juga sebagai kesuksesan dan pencapaian bisnis.

Orange
Represents natural resources, energy, and crops processed by Indonesian Fertilizer to meet the needs of the Indonesian people and can also be interpreted as business success and achievement.

Biru Muda
Mewakili keselarasan dan keseimbangan alam.

Light Blue
Represents the harmony and balance of nature.

Biru Tua
Mewakili sifat dan sikap profesional yang diusung Pupuk Indonesia dan juga kepercayaan.

Dark Blue
Representing the professional nature and attitude that Pupuk Indonesia promotes and also trusts.

Struktur Organisasi
Organizational Structure

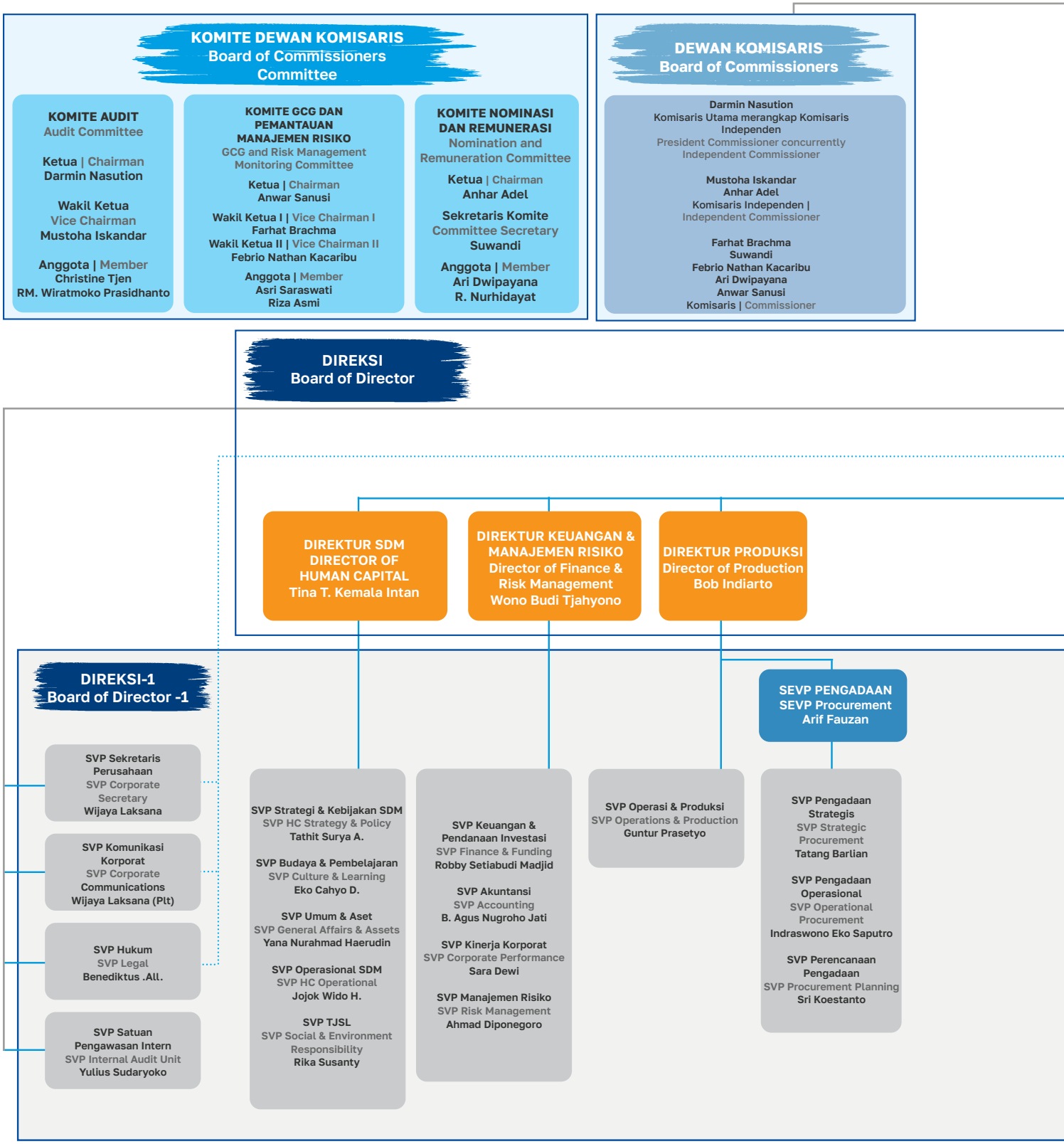

Sesuai Surat Keputusan Direksi No. 048/A/HK/P30/SK/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Struktur Organisasi PT Pupuk Indonesia (Persero).
In accordance with the Board of Directors Decree No. 048/A/HK/P30/SK/2023 dated February 28, 2023 regarding the Organizational Structure of PT Pupuk Indonesia (Persero).

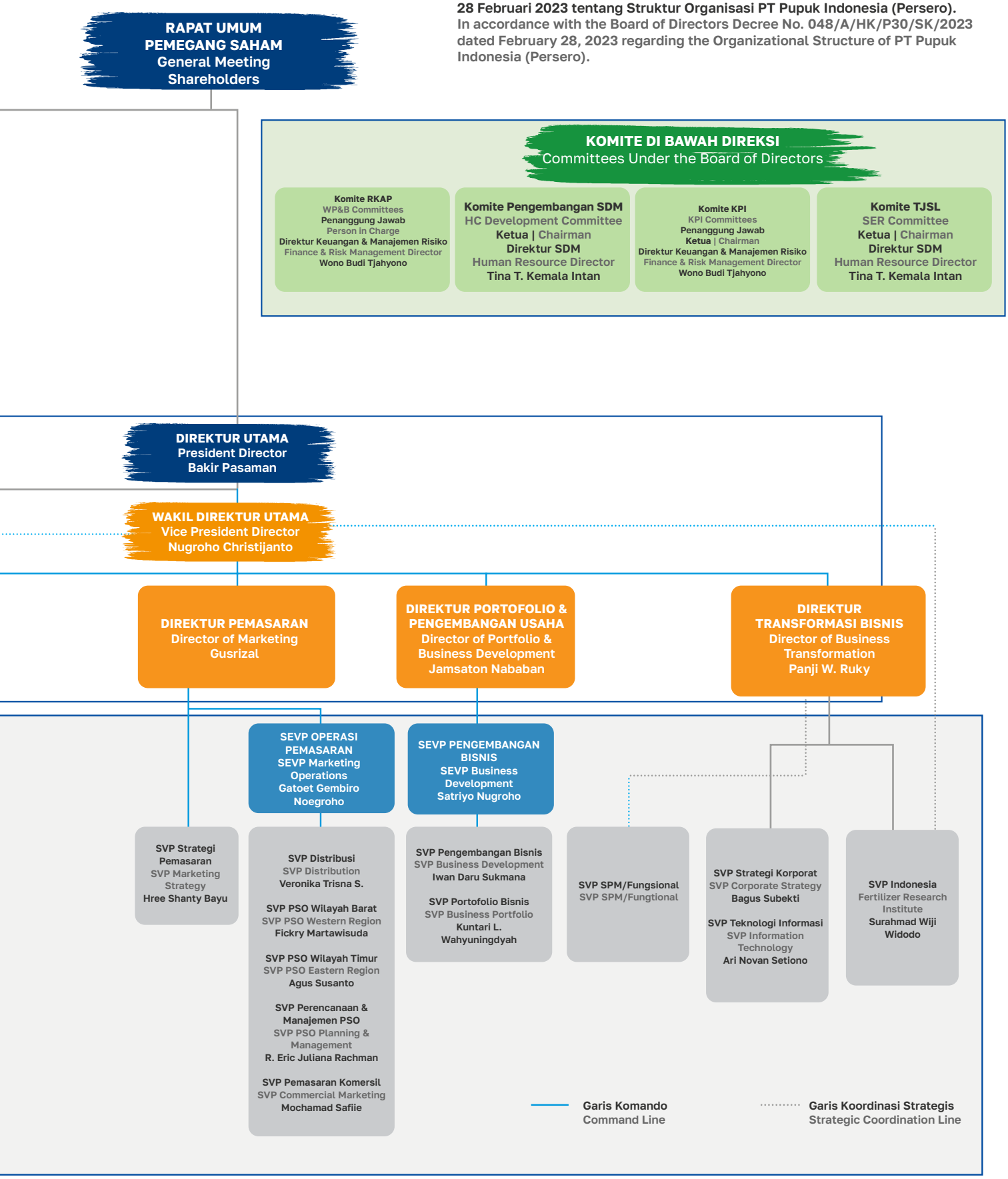

KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS
Committee under the Board of Commissioners

No	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis for Appointment	Tanggal Diangkat Date Appointment	Tanggal Berakhir End Date	Periode Period
Komite Audit I Audit Committee						
1	Darmin Nasution	Ketua Chairman	Keputusan Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 015/KEP.KOM/XI/2022 tanggal 11 November 2022 Decree of the Board of Commissioners of PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 015/KEP.KOM/XI/2022 dated November 11, 2022	11 November 2022 November 11, 2022	bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris concurrent with the term as Commissioner	Ke-1 1st
2	Mustoha Iskandar	Wakil Ketua Vice Chairman	Keputusan Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 015/KEP.KOM/XI/2022 tanggal 11 November 2022 Decree of the Board of Commissioners of PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 015/KEP.KOM/XI/2022 dated November 11, 2022	11 November 2022 November 11, 2022	bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris concurrent with the term as Commissioner	Ke-1 1st
3	Christine Tjen	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 19/KEP.KOM/XI/2020 tanggal 16 November 2020 Decree of the Board of Commissioners of PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 19/KEP.KOM/XI/2020 dated November 16, 2020	16 November 2020 November 16, 2020	15 November 2023 November 15, 2023	Ke-1 1st
4	RM Wiratmoko Prasidhanto	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 12/KEP.KOM/IX/2021 tanggal 27 September 2021 Decree of the Board of Commissioners of PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 12/KEP.KOM/IX/2021 dated September 27, 2021	27 September 2021 September 27, 2021	27 September 2024 September 27, 2024	Ke-1 1st
Komite GCG dan Pemantauan MR (PMR) I GCG and MR Monitoring Committee (PMR)						
1	Anwar Sanusi	Ketua Chairman	Keputusan Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 015/KEP.KOM/XI/2022 tanggal 11 November 2022 Decree of the Board of Commissioners of PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 015/KEP.KOM/XI/2022 dated November 11, 2022	11 November 2022 November 11, 2022	bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris concurrent with the term as Commissioner	Ke-1 1st
2	Farhat Brachma	Wakil Ketua I Vice Chairman I	Keputusan Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 015/KEP.KOM/XI/2022 tanggal 11 November 2022 Decree of the Board of Commissioners of PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 015/KEP.KOM/XI/2022 dated November 11, 2022	11 November 2022 November 11, 2022	bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris concurrent with the term as Commissioner	Ke-1 1st

No	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis for Appointment	Tanggal Diangkat Date Appointment	Tanggal Berakhir End Date	Periode Period
3	Febrio Nathan Kacaribu	Wakil Ketua II	Keputusan Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 015/KEP.KOM/XI/2022 tanggal 11 November 2022	11 November 2022	bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris	Ke-1
		Vice Chairman II	Decree of the Board of Commissioners of PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 015/KEP.KOM/XI/2022 dated November 11, 2022	November 11, 2022	concurrent with the term as Commissioner	1st
4	Asri Saraswati	Anggota	Keputusan Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 11/KEP.KOM/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022	7 Juli 2022	06 Juli 2023	Ke-2
		Member	Decree of the Board of Commissioners of PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 11/KEP.KOM/VII/2022 dated7 July 7, 2022	July 7, 2022	July 06, 2023	2nd
5	Riza Azmi	Anggota	Keputusan Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 012/KEP.KOM/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022	29 Juli 2022	28 Juli 2023	Ke-1
		Member	Decree of the Board of Commissioners of PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 012/KEP.KOM/VIII/2022 dated August 1, 2022	July 29, 2022	July 28, 2023	1st
Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) I Nomination and Remuneration Committee (NRC)						
1	Anhar Adel	Ketua	Keputusan Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 015/KEP.KOM/XI/2022 tanggal 11 November 2022	11 November 2022	bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris	Ke-1
		Chairman	Decree of the Board of Commissioners of PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 015/KEP.KOM/XI/2022 dated November 11, 2022	November 11, 2022	concurrent with the term as Commissioner	1st
2	Suwandi	Sekretaris	Keputusan Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 015/KEP.KOM/XI/2022 tanggal 11 November 2022	11 November 2022	bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris	Ke-1
		Secretary	Decree of the Board of Commissioners of PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 015/KEP.KOM/XI/2022 dated November 11, 2022	November 11, 2022	concurrent with the term as Commissioner	1st
3	Ari Dwipayana	Anggota	Keputusan Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 015/KEP.KOM/XI/2022 tanggal 11 November 2022	11 November 2022	bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris	Ke-1
		Member	Decree of the Board of Commissioners of PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 015/KEP.KOM/XI/2022 dated November 11, 2022	November 11, 2022	concurrent with the term as Commissioner	1st
4	R Nurhidayat	Anggota	Keputusan Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 007/KEP.KOM/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021	9 Juni 2021	8 Juni 2024	Ke-1
		Member	Decree of the Board of Commissioners of PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 007/KEP.KOM/VI/2021 dated June 9, 2021	June 9, 2021	June 8, 2024	1st

Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners Profile

Darmin Nasution
Komisaris Utama merangkap komisaris independen
President Commissioner concurrently independent commissioner

Masa Jabatan : 4 Agustus 2020-RUPS Tahun 2025, Periode Pertama
Term of Office : August 4, 2020-RUPS Year 2025, First Period

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia Usia 74 tahun per 31 Desember 2022 Kelahiran Mandailing Natal, 21 Desember 1948	Indonesian Citizen Age 74 years old as of December 31, 2022 Born in Mandailing Natal, December 21, 1948
Domisili | Domicile	Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia	Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Riwayat Penunjukan Appointment History	Pertama kali menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Pupuk Indonesia (Persero) pada 4 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan No. SK-262/MBU/08/2020.	He first served as President Commissioner and concurrently Independent Commissioner of PT Pupuk Indonesia (Persero) on 4 August 2020 based on Decree No. SK-262/MBU/08/2020.
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	• Ketua Komite Audit Perusahaan • Komisaris Utama PT Smartfren Telecom Tbk (2020-sekarang) • Komisaris Utama Indonesia Infrastructure Finance (2020-sekarang)	• Chairman of the Company's Audit Committee • President Commissioner of PT Smartfren Telecom Tbk (2020-present) • President Commissioner of Indonesia Infrastructure Finance (2020-present)
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Doktor Ekonomi dari Paris-Sorbone University, Prancis (1984) • Magister Ekonomi dari Paris-Sorbone University, Prancis (1977) • Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1970)	• Doctor of Economics from Paris-Sorbone University, France (1984) • Master of Economics from Paris-Sorbone University, France (1977) • Bachelor of Economics from University of Indonesia (1970)
Riwayat Pekerjaan Employment History	• Komisaris Utama PT Smartfren Telecom Tbk (2020-sekarang) • Komisaris Utama Indonesia Infrastructure Finance (2020-sekarang) • Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2015-2019) • Gubernur Bank Indonesia (2010-2013) • Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (2009-2010) • Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan (2006-2009) • Direktur Jenderal Lembaga Keuangan/Kepala Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), Kementerian Keuangan (2005-2006) • Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan (2000-2005) • Deputi Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur (1997-1999) • Deputi Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi (1995- 1996) • Deputi Menteri Negara Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan (1993-1994) • Direktur Utama Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) (1989-1993)	• President Commissioner of PT Smartfren Telecom Tbk (2020-present) • President Commissioner of Indonesia Infrastructure Finance (2020-present) • Coordinating Minister for Economic Affairs (2015-2019) • Governor of Bank Indonesia (2010-2013) • Senior Deputy Governor of Bank Indonesia (2009-2010) • Director General of Taxes, Ministry of Finance (2006-2009) • Director General of Financial Institutions/Head of the Capital Market Supervisory Agency (BAPEPAM), Ministry of Finance (2005-2006) • Director General of Financial Institutions, Ministry of Finance (2000-2005) • Deputy to the Coordinating Minister of State for Development Supervision and Administrative Reform (1997-1999) • Deputy Coordinating Minister for Production and Distribution (1995- 1996) • Deputy Minister of State for Industry and Trade (1993-1994) • President Director of the Institute for Economic and Social Research (LPEM) (1989-1993)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationships	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, Dewan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.	Has no affiliation with members of the Board of Directors, Supervisory Board and other members of the Board of Commissioners, nor with direct or indirect major and controlling shareholders.

Mustoha Iskandar

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Masa Jabatan : 4 Agustus 2020-RUPS Tahun 2025, Periode Pertama
Term of Office : August 4, 2020-RUPS Year 2025, First Period

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia Usia 62 tahun per 31 Desember 2022 Kelahiran Cirebon, 10 Agustus 1960	Indonesian Citizen Age 62 years old as of December 31, 2022 Born in Cirebon, August 10, 1960
Domisili | Domicile	Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia	Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Riwayat Penunjukan Appointment History	Pertama kali menjabat sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) pada 4 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan No. SK-262/MBU/08/2020.	He first served as Commissioner of PT Pupuk Indonesia (Persero) on 4 August 2020 based on Decree No. SK-262/MBU/08/2020.
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Wakil Ketua Komite Audit Perusahaan.	Vice Chairman of the Company's Audit Committee.
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Hukum dari Universitas Krisnadwipayana (2014) • Doktor Manajemen Bisnis dari Universitas Padjajaran (2006) • Magister Manajemen Pembangunan dari University of the Phillipines Los Banos, Filipina (1996) • Sarjana Kehutanan dari Universitas Gadjah Mada (1986) • Sarjana Muda dari Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga (1986)	• Bachelor of Law from Krisnadwipayana University (2014) • Doctor of Business Management from Padjajaran University (2006) • Masters in Development Management from the University of the Philippines Los Banos, Philippines (1996) • Bachelor of Forestry from Gadjah Mada University (1986) • Bachelor's degree from Sunan Kalijaga State Islamic Institute (1986)
Riwayat Pekerjaan Employment History	• Komisaris Independen PT Pusri Palembang (November 2016-November 2018) • Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani (Agustus-November 2016) • Direktur Utama Perum Perhutani (Oktober 2014-Agustus 2016) • Direktur Komersil Kayu Perum Perhutani (Januari-Oktober 2014) • Dosen Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Jurusan Manajemen Mata Kuliah *Strategic Management* STIE Kusuma Negara Jakarta (2011-sekarang) • Direktur Pengelolaan Sumber daya Hutan dan Pengembangan Usaha Hutan Rakyat Perum Perhutani (2011-2014) • Dosen Paruh Waktu Program Pasca Sarjana Magister Manajemen untuk Mata Kuliah *Strategic Leadership* Kwik Kian Gie School of Business Jakarta (2009-sekarang) • Direktur Utama PT Inhutani IV (Persero) (2007-2011) • Direktur Pengembangan PT Inhutani III (Persero) (2001-2007) • Direktur Produksi PT Finantara Intiga (*Joint Venture of* PT Inhutani III, Gudang Garam dan Nordic Forest Development Finlandia) (1996-1998)	• Independent Commissioner of PT Pusri Palembang (November 2016-November 2018) • Chairman of the Supervisory Board of Perum Perhutani (August-November 2016) • President Director of Perum Perhutani (October 2014-August 2016) • Commercial Timber Director of Perum Perhutani (January-October 2014) • Lecturer of Postgraduate Program of Master of Management, Department of Management, Strategic Management Subject STIE Kusuma Negara Jakarta (2011-present) • Director of Forest Resource Management and Community Forest Business Development of Perum Perhutani (2011-2014) • Part-time Lecturer of Master of Management Postgraduate Program for Strategic Leadership Course Kwik Kian Gie School of Business Jakarta (2009-present) • President Director of PT Inhutani IV (Persero) (2007-2011) • Development Director of PT Inhutani III (Persero) (2001-2007) • Production Director of PT Finantara Intiga (Joint Venture of PT Inhutani III, Gudang Garam and Nordic Forest Development Finland) (1996-1998)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationships	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, Dewan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.	Has no affiliation with members of the Board of Directors, Supervisory Board and other members of the Board of Commissioners, nor with direct or indirect major and controlling shareholders.

Anhar Adel

Komisaris independen
Independent commissioner

Masa Jabatan : 9 Januari 2020-RUPS Tahun 2024, Periode Pertama
Term of Office : January 9, 2020-RUPS Year 2024, First Period

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia Usia 64 tahun per 31 Desember 2022 Kelahiran Jakarta, 18 Oktober 1958	Indonesian Citizen Age 64 years old as of December 31, 2022 Born in Jakarta, October 18, 1958
Domisili | Domicile	Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia	Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Riwayat Penunjukan Appointment History	Pertama kali menjabat sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) pada 22 November 2019 berdasarkan Keputusan No. SK-280/MBU/11/2019 dan ditetapkan sebagai Komisaris Independen pada 9 Januari 2020 melalui Keputusan No. SK-13/MBU/01/2020	He first served as Commissioner of PT Pupuk Indonesia (Persero) on 22 November 2019 based on Decree SK-280/MBU/11/2019 and was appointed as Independent Commissioner on 9 January 2020 based on Decree No. SK-13/MBU/01/2020
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	• Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan • Staf Khusus Menteri BUMN (2019-sekarang)	• Chairman of the Company's Nomination and Remuneration Committee • Special Staff to the Minister of SOEs (2019-present)
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Sosial Politik jurusan Administrasi Negara dari Universitas Padjadjaran, Bandung (1982).	Bachelor of Social Politics majoring in Public Administration from Padjadjaran University, Bandung (1982)
Riwayat Pekerjaan Employment History	• Komisaris Utama PT Djakarta Lloyd (Persero) (2019-2020) • Staf Khusus Menteri BUMN (2019-sekarang) • Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (2007-2018) • Kepala Biro Umum, Sekretariat Utama BKPM (2005-2007).	• President Commissioner of PT Djakarta Lloyd (Persero) (2019-2020) • Special Staff to the Minister of SOEs (2019-present) • Principal Secretary of the Investment Coordinating Board (BKPM) (2007-2018) • Head of General Bureau, Main Secretariat of BKPM (2005-2007).
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationships	Memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali.	Affiliated with the controlling shareholder.

Farhat Brachma

Komisaris
Commissioner

Masa Jabatan : 4 November 2022 - RUPS Tahun 2027, Periode Pertama
Term of Office : November 4, 2022 - 2027 AGM, First Period

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia Usia 46 tahun per 31 Desember 2022 Kelahiran Plaju, 14 April 1976	Indonesian Citizen Age 46 years old as of December 31, 2022 Born in Plaju, April 14, 1976
Domisili | Domicile	Tangerang Selatan, Indonesia	Tangerang Selatan, Indonesia
Riwayat Penunjukan Appointment History	Pertama kali menjabat sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) pada 4 November 2022 berdasarkan Keputusan No. SK-253/MBU/11/2022.	He first served as Commissioner of PT Pupuk Indonesia (Persero) on November 4, 2022 based on Decree No. SK-253/MBU/11/2022.
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	• Wakil Ketua I Komite GCG dan Pemantauan Manajemen Risiko Perusahaan • Komisaris PT Pupuk Indonesia (2022-sekarang) • Direktur PT REA Kaltim Plantation (2017-sekarang) • Direktur PT Sasana Yudha Bakti (2017-sekarang) • Penasihat Senior PT Barat Selatan Makmur Investindo (2016-sekarang) • Direktur Hubungan Korporasi PT Robindo Natayara (2012-sekarang) • Direktur PT Cipta Davia Mandiri (2012-sekarang)	• First Vice Chairman of the GCG and Enterprise Risk Management Monitoring Committee • Commissioner of PT Pupuk Indonesia (2022-present) • Director of PT REA Kaltim Plantation (2017-present) • Director of PT Sasana Yudha Bakti (2017-present) • Senior Advisor of PT Barat Selatan Makmur Investindo (2016-present) • Director of Corporate Relations PT Robindo Natayara (2012-present) • Director of PT Cipta Davia Mandiri (2012-present)
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Teknik Kimia dari Universitas Islam Indonesia, Fakultas Teknologi & Industri (1994)	Bachelor of Chemical Engineering from Universitas Islam Indonesia, Faculty of Technology & Industry (1994)
Riwayat Pekerjaan Employment History	• Komisaris PT Pupuk Indonesia (2022-sekarang) • Direktur PT. REA Kaltim Plantation (2017-sekarang) • Direktur PT Sasana Yudha Bakti (2017-sekarang) • Penasihat Senior PT Barat Selatan Makmur Investindo (2016-sekarang) • Direktur Hubungan Korporasi PT Robindo Natayara (2012-sekarang) • Direktur PT Cipta Davia Mandiri (2012-sekarang) • Penasihat Senior PT REA Kaltim Plantation (2007-2017) • Direktur PT Grand Balikpapan (Owner Novotel dan Hotel Ibis Balikpapan (2005-2022)	• Commissioner of PT Pupuk Indonesia (2022-present) • Director of PT REA Kaltim Plantation (2017-present) • Director of PT Sasana Yudha Bakti (2017-present) • Senior Advisor of PT Barat Selatan Makmur Investindo (2016-present) • Director of Corporate Relations PT Robindo Natayara (2012-present) • Director of PT Cipta Davia Mandiri (2012-present) • Senior Advisor of PT REA Kaltim Plantation (2007-2017) • Director of PT Grand Balikpapan (Owner of Novotel and Hotel Ibis Balikpapan (2005-2022)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationships	Memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham Pengendali.	Has an affiliation with the Controlling shareholder.

Febrio Nathan Kacaribu

Komisaris
Commissioner

Masa Jabatan : 4 Agustus 2020-RUPS Tahun 2024, Periode Pertama
Term of Office : August 4, 2020-RUPS Year 2025, First Period

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia Usia 44 tahun per 31 Desember 2022 Kelahiran Sidikalang, 27 Februari 1978	Indonesian Citizen Age 44 years old as of December 31, 2022 Born Sidikalang, February 27, 1978
Domisili | Domicile	Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia	Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Riwayat Penunjukan Appointment History	Pertama kali menjabat sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) pada 4 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan No. SK-262/MBU/08/2020.	He first served as Commissioner of PT Pupuk Indonesia (Persero) on August 4, 2020 based on the decision No. SK-262/MBU/08/2020.
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	• Wakil Ketua II Komite GCG dan Pemantauan Manajemen Risiko Perusahaan • Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (April 2020-sekarang).	• Second Vice Chairman of the GCG and Enterprise Risk Management Monitoring Committee • Head of the Fiscal Policy Agency of the Ministry of Finance (April 2020-present).
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Doktor Bidang Ekonomi dari University of Kansas, Amerika Serikat (2014) • Magister Bidang *International & Development Economics* dari Australian National University, Australia (2005) • Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (2002)	• Doctorate in Economics from the University of Kansas, USA (2014) • Masters in International & Development Economics from Australian National University, Australia (2005) • Bachelor of Economics from University of Indonesia (2002).
Riwayat Pekerjaan Employment History	• Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (April 2020-sekarang) • Lektor (Asisten Profesor) di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2019-sekarang) • Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2015-2019) • Dosen di Department of Economics, Baylor University, Texas, Amerika Serikat (2012-2015) • Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2012-2015) • Konsultan Asia Now, Singapura (2004-2006) • Peneliti di LPEM FEB Universitas Indonesia (2005-2007)	• Head of the Fiscal Policy Agency of the Ministry of Finance (April 2020-present) • Assistant Professor at the Faculty of Economics, University of Indonesia (2019-present) • Lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia (2015-2019) • Lecturer at the Department of Economics, Baylor University, Texas, USA (2012-2015) • Lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia (2012-2015) • Asia Now Consultant, Singapore (2004-2006) • Researcher at LPEM FEB University of Indonesia (2005-2007)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationships	Memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali.	Affiliated with the controlling shareholder.

Suwandi

Komisaris
Commissioner

Masa Jabatan : 4 Agustus 2020-RUPS Tahun 2024, Periode Pertama
Term of Office : August 4, 2020-RUPS Year 2025, First Period

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia Usia 55 tahun per 31 Desember 2022 Kelahiran Bantul, 23 Maret 1967	Indonesian Citizen Age 55 years old as of December 31, 2022 Born in Bantul, March 23, 1967
Domisili | Domicile	Bogor, Jawa Barat, Indonesia	Bogor, West Java, Indonesia
Riwayat Penunjukan Appointment History	Pertama kali menjabat sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) pada 4 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan No. SK-262/MBU/08/2020.	He first served as Commissioner of PT Pupuk Indonesia (Persero) on August 4, 2020 based on the decision No. SK-262/MBU/08/2020.
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	• Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan • Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (2019-sekarang)	• Secretary of the Company's Nomination and Remuneration Committee • Director General of Food Crops, Ministry of Agriculture (2019-present)
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Doktor Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (2005) • Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (2000) • Sarjana Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (1991)	• Doctorate in Natural Resources and Environmental Management from Bogor Agricultural University (2005) • Master of Planning and Public Policy from the University of Indonesia (2000) • Bachelor of Agriculture from Bogor Agricultural University (1991)
Riwayat Pekerjaan Employment History	• Komisaris Utama PTPN VIII (Agustus 2019-Oktober 2020) • Komisaris PTPN VIII (Desember 2019-Mei 2020) • Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (2019-sekarang) • Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (2018- 2019) • Plt. Kepala Biro Humas dan Kebijakan Publik Kementerian Pertanian (2017-2018) • Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanian Kementerian Pertanian (2015-2018)	• President Commissioner of PTPN VIII (August 2019-October 2020) • Commissioner of PTPN VIII (December 2019-May 2020) • Director General of Food Crops, Ministry of Agriculture (2019-present) • Director General of Horticulture, Ministry of Agriculture (2018-2019) • Act. Head of Public Relations and Public Policy Bureau of the Ministry of Agriculture (2017-2018) • Head of the Agricultural Data and Information Center of the Ministry of Agriculture (2015-2018)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationships	Memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali	Affiliated with the controlling shareholder

Ari Dwipayana

Komisaris
Commissioner

Masa Jabatan : 4 Agustus 2020-RUPS Tahun 2024, Periode Pertama
Term of Office : August 4, 2020-RUPS Year 2025, First Period

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia Usia 50 tahun per 31 Desember 2022 Kelahiran Ubud, 24 Februari 1972	Indonesian Citizen Age 50 as of December 31, 2022 Born in Ubud, February 24, 1972
Domisili | Domicile	Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia	Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Riwayat Penunjukan Appointment History	Pertama kali menjabat sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) pada 4 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan No. SK-262/MBU/08/2020.	He first served as Commissioner of PT Pupuk Indonesia (Persero) on August 4, 2020 based on the decision No. SK-262/MBU/08/2020.
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	• Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi • Koordinator Staf Khusus Presiden RI (2019-sekarang) • Staf Pengajar Jurusan Politik dan Pemerintahan FISIPOL Universitas Gadjah Mada (1997-sekarang)	• Member of Nomination and Remuneration Committee • Coordinator of Special Staff to the President (2019-present) • Lecturer at the Department of Politics and Government FISIPOL Gadjah Mada University (1997-present)
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Doktor Ilmu Politik dari Universitas Gadjah Mada (2013) • Magister Ilmu Politik dari Universitas Gadjah Mada (2003) • Sarjana Ilmu Pemerintahan dari Universitas Gadjah Mada (1995)	• Doctor of Political Science from Gadjah Mada University (2013) • Master of Political Science from Gadjah Mada University (2003) • Bachelor of Government Science from Gadjah Mada University (1995)
Riwayat Pekerjaan Employment History	• Koordinator Staf Khusus Presiden Republik Indonesia (2019-sekarang) • Staf Khusus Presiden Republik Indonesia (2015-2019) • Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Desember 2014-September 2015) • Staf Pengajar Jurusan Politik dan Pemerintahan FISIPOL Universitas Gadjah Mada (1997-sekarang)	• Coordinator of Special Staff to the President (2019-present) • Special Staff to the President of Indonesia (2015-2019) • Special Staff to the Minister of State Secretary (December 2014-September 2015) • Lecturer at the Department of Politics and Government FISIPOL Gadjah Mada University (1997-present)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationships	Memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali.	Affiliated with the controlling shareholder.

Anwar Sanusi

Komisaris
Commissioner

Masa Jabatan : 8 Juni 2018-RUPS Tahun 2023, Periode Pertama
Term of Office : June 8, 2018-RUPS Year 2023, First Period

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia Usia 54 tahun per 31 Desember 2022 Kelahiran Ponorogo, 17 November 1968	Indonesian Citizen Age 54 as of December 31, 2022 Born in Ponorogo, November 17, 1968
Domisili | Domicile	Tangerang, Banten, Indonesia	Tangerang, Banten, Indonesia
Riwayat Penunjukan Appointment History	Pertama kali menjabat sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) pada 8 Juni 2018 berdasarkan Keputusan No. SK-193/MBU/06/2018.	He first served as Commissioner of PT Pupuk Indonesia (Persero) on June 8, 2018 based on Decree No. SK-193/MBU/06/2018.
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	• Ketua Komite GCG dan Pemantauan Manajemen Risiko • Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Agustus 2020-sekarang)	• Chairman of the GCG and Risk Management Monitoring Committee • Secretary General of the Ministry of Manpower (August 2020-present)
Riwayat Pendidikan Educational Background	• *Post Doctoral National Graduate Institute for Policy Studies* (2012) • Doktor bidang *Policy Studies* dari National Graduate Institute for Policy Studies (2007) • *Master of Policy Science National Graduate Institute for Policy Studies* (GRiPS) dari Universitas Saitama Jepang (1998) • Sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Politik dan Sosial dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (1992)	• Post Doctoral National Graduate Institute for Policy Studies (2012) • Doctorate in Policy Studies from the National Graduate Institute for Policy Studies (2007) • Master of Policy Science National Graduate Institute for Policy Studies (GRiPS) from Saitama University Japan (1998) • Bachelor of Government Science, Faculty of Political and Social Sciences from Gajah Mada University, Yogyakarta (1992)
Riwayat Pekerjaan Employment History	• Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Agustus 2020-sekarang) • Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mei 2019-Agustus 2020) • Plt. Kepala Balilatfo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (April 2017) • Kepala Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan (Mei 2014-Mei 2015) • Kepala Pusat Inovasi Kelembagaan Sumber Daya Aparatur (Januari-Mei 2014) • Kepala Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan Lembaga Administrasi Negara (Maret 2013-Januari 2014)	• Secretary General of the Ministry of Manpower (August 2020-present) • Secretary General of the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration (May 2019-August 2020) • Act. Head of Balilatfo Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration (April 2017) • Head of Center for Policy Analysis Development (May 2014-May 2015) • Head of Center for Institutional Innovation of Apparatus Resources (January-May 2014) • Head of the Center for Institutional Performance Studies of the State Administration Agency (March 2013-January 2014)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationships	Memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali	Affiliated with the controlling shareholder

Profil Direksi
Board of Directors Profile

Bakir Pasaman
Direktur Utama
President Director

Masa Jabatan : 4 Agustus 2020-RUPS Tahun 2025, Periode Pertama
Term of Office : August 4, 2020-RUPS Year 2025, First Period

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia Usia 61 tahun per 31 Desember 2022 Kelahiran Bandung, 27 Februari 1961	Indonesian Citizen Age 61 years old as of December 31, 2022 Born in Bandung, February 27, 1961
Domisili | Domicile	Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia	Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Riwayat Penunjukan Appointment History	Pertama kali menjabat sebagai Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) pada 4 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan No. SK-263/MBU/08/2020.	He first served as President Director of PT Pupuk Indonesia (Persero) on August 4, 2020 based on No. SK-263/MBU/08/2020.
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Beliau tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam/luar Perusahaan	He has no concurrent positions inside/outside the Company
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Doktor Administrasi Bisnis dari Universitas Brawijaya (2019) • Magister Hukum Bisnis dari Universitas Padjadjaran (2008) • Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya (1996) • Sarjana Teknik Kimia dari Institut Teknologi Bandung (1984)	• Doctor of Business Administration from Brawijaya University (2019) • Master of Business Law from Padjadjaran University (2008) • Master of Management from Prasetiya Mulya College of Management (1996) • Bachelor of Chemical Engineering from Bandung Institute of Technology (1984)
Riwayat Pekerjaan Employment History	• Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur (2016-2020) • Direktur Teknik dan Pengembangan PT Pupuk Kalimantan Timur (2010-2016) • *Director Comspain* XXI S.A/VP Portfolio PT Rekayasa Industri (2005-2010) • *Managing Director*/CEO PT Rekayasa Industri Malaysia Sdn Bhd(2000-2005).	• President Director of PT Pupuk Kalimantan Timur (2016-2020) • Director of Engineering and Development of PT Pupuk Kalimantan Timur (2010-2016) • Director Comspain XXI S.A/VP Portfolio PT Rekayasa Industri (2005-2010) • Managing Director/CEO of PT Rekayasa Industri Malaysia Sdn Bhd(2000-2005).
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationships	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung,	Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, nor with the majority and controlling shareholders, either directly or indirectly,

Nugroho Christijanto

Wakil Direktur Utama
Vice President Director

Masa Jabatan : 26 Oktober 2018 -RUPS Tahun 2023, Periode Pertama
Term of Office : October 26, 2018 -RUPS Year 2023, First Period

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia Usia 54 tahun per 31 Desember 2022 Kelahiran Cepu, 22 Mei 1968	Indonesian Citizen Age 54 years old as of December 31, 2022 Born in Cepu, May 22, 1968
Domisili | Domicile	Gresik, Jawa Timur, Indonesia	Gresik, East Java, Indonesia
Riwayat Penunjukan Appointment History	Pertama kali menjabat sebagai Direktur Transformasi Bisnis pada 26 Oktober 2018 berdasarkan Keputusan No. SK-281/MBU/10/2018, kemudian dialihkan sebagai Wakil Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) pada 4 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan No. SK-263/MBU/08/2020.	He first served as Director of Business Transformation on October 26, 2018 based on Decree No. SK-281/MBU/10/2018, then transferred as Deputy President Director of PT Pupuk Indonesia (Persero) on August 4, 2020 based on Decree No. SK-263/MBU/08/2020.
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Beliau tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam/luar Perusahaan	He has no concurrent positions inside/outside the Company
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Magister Bidang Manajemen Bisnis dan Administrasi teknologi dari Institut Teknologi Bandung (2004) • Sarjana Teknik Kimia dari Institut Teknologi Bandung (1992)	• Master of Business Management and Technology Administration from Bandung Institute of Technology (2004) • Bachelor of Chemical Engineering from Bandung Institute of Technology (1992)
Riwayat Pekerjaan Employment History	• Plt. Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia Logistik (2019–2021) • Direktur Transformasi Bisnis PT Pupuk Indonesia (Persero) (2018-2020) • Direktur Utama PT Petrokimia Gresik (2016-2018) • Direktur Produksi PT Petrokimia Gresik (2012-2016) • Komisaris Utama PT Petrokimia Kayaku (2012-2016)	• Act. President Commissioner of PT Pupuk Indonesia Logistik (2019-2021) • Director of Business Transformation of PT Pupuk Indonesia (Persero) (2018-2020) • President Director of PT Petrokimia Gresik (2016-2018) • Production Director of PT Petrokimia Gresik (2012-2016) • President Commissioner of PT Petrokimia Kayaku (2012-2016)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationships	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.	Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, other members of the Supervisory Board, or with the majority and controlling shareholders, either directly or indirectly.

Bob Indiarto

Direktur Produksi
Production Director

Masa Jabatan : 4 Agustus 2020-RUPS Tahun 2025, Periode Pertama
Term of Office : August 4, 2020-RUPS Year 2025, First Period

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia Usia 61 tahun per 31 Desember 2022 Kelahiran Bandung, 8 Agustus 1961	Indonesian Citizen Age 61 years old as of December 31, 2022 Born in Bandung, August 8, 1961
Domisili | Domicile	Jakarta,DKI Jakarta Indonesia	Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Riwayat Penunjukan Appointment History	Pertama kali menjabat sebagai Direktur Produksi PT Pupuk Indonesia (Persero) pada 4 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan No. SK-263/MBU/08/2020.	He first served as Production Director of PT Pupuk Indonesia (Persero) on August 4, 2020 based on No. SK-263/MBU/08/2020.
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Beliau tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam/luar Perusahaan	He has no concurrent positions inside/outside the Company
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Magister Bidang Manajemen dari Universitas Tridinanti, Palembang (2006) • Sarjana Teknik Kimia dari Universitas Gadjah Mada (1987)	• Master of Management from Tridinanti University, Palembang (2006) • Bachelor of Chemical Engineering from Gadjah Mada University (1987)
Riwayat Pekerjaan Employment History	• Direktur SDM dan Umum PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (2016-2020) • General Manajer Operasi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (2014-2016) • General Manajer Teknologi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (2013-2014) • General Manajer Operasi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (2009-2013)	• HR and General Director of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (2016-2020) • General Manager Operation of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (2014-2016) • General Manager of Technology PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (2013-2014) • General Manager Operation of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (2009-2013)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationships	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.	Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, other members of the Supervisory Board, or with the majority and controlling shareholders, either directly or indirectly.

Wono Budi Tjahyono

Direktur Keuangan & Manajemen Risiko
Finance & Risk Management Director

Masa Jabatan : 22 Desember 2021-RUPS 2026, Periode Pertama
Term of Office : December 22, 2021-RUPS 2026, First Period

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia Usia 55 tahun per 31 Desember 2022 Kelahiran Temanggung, 10 Juli 1967	Indonesian Citizen Age 55 years old as of December 31, 2022 Born in Temanggung, July 10, 1967
Domisili | Domicile	Bogor, Jawa Barat, Indonesia	Bogor, West Java, Indonesia
Riwayat Penunjukan Appointment History	Pertama kali menjabat sebagai Direktur Keuangan & Investasi PT Pupuk Indonesia (Persero) pada 22 Desember 2021 berdasarkan Keputusan No. SK-408/MBU/12/2021.	He first served as Director of Finance & Investment of PT Pupuk Indonesia (Persero) on December 22, 2021 based on Decree No. SK-408/MBU/12/2021.
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Beliau tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam/luar Perusahaan.	He has no concurrent positions inside/outside the Company.
Riwayat Pendidikan Educational Background	• *Master of Business Administration* (MBA) Universitas Gadjah Mada (2009) • Sarjana (S1) Pertanian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (1991)	• Master of Business Administration (MBA) Gadjah Mada University (2009) • Bachelor (S1) of Agriculture, National Development University "Veteran" Yogyakarta (1991)
Riwayat Pekerjaan Employment History	• *Senior Executive Vice President* PT Bank Mandiri Tbk (2021) • *Senior Vice President* PT Bank Mandiri Tbk (2016-2021) • *Vice President* PT Bank Mandiri Tbk (2010-2016)	• Senior Executive Vice President of PT Bank Mandiri Tbk (2021) • Senior Vice President of PT Bank Mandiri Tbk (2016-2021) • Vice President of PT Bank Mandiri Tbk (2010-2016)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationships	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.	Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, nor with the majority and controlling shareholders, either directly or indirectly.

Panji Winanteya Ruky

Direktur Transformasi Bisnis
Business Transformation Director

Masa Jabatan : 4 Agustus 2020- RUPS Tahun 2025, Periode Pertama
Term of Office : August 4, 2020- AGM 2025, First Period

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia Usia 46 tahun per 31 Desember 2022 Kelahiran Bandung, 8 Maret 1976	Indonesian Citizen Age 46 years old as of December 31, 2022 Born in Bandung, March 8, 1976
Domisili | Domicile	Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia	Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Riwayat Penunjukan Appointment History	Pertama kali menjabat sebagai Direktur Transformasi Bisnis PT Pupuk Indonesia (Persero) pada 4 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan No. SK-263/MBU/08/2020.	He first served as Director of Business Transformation of PT Pupuk Indonesia (Persero) on August 4, 2020 based on No. SK-263/MBU/08/2020.
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Beliau tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam/luar Perusahaan.	He has no concurrent positions inside/outside the Company.
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Magister Bidang Kebijakan Publik dari Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura (2015) • MBA Bidang Keuangan dan Manajemen Jasa Keuangan dari Rotterdam School of Management, Belanda (2003) • Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1998)	• Master of Public Policy from Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapore (2015) • MBA in Finance and Financial Services Management from Rotterdam School of Management, the Netherlands (2003) • Bachelor of Economics from University of Indonesia (1998)
Riwayat Pekerjaan Employment History	• Direktur Kemitraan dan Komunikasi Kartu Pra Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Maret 2020-Agustus 2020) • *Senior Vice President* PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (2018- 2020) • *Senior Advisor-Strategic Economic Affairs* Kantor Staf Presiden RI (2015-2018) • Direktur Senior Treasury Management Visa (2010-2014)	• Director of Partnership and Communication for Pre-Employment Card, Coordinating Ministry for Economic Affairs (March 2020-August 2020) • Senior Vice President of PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (2018-2020) • Senior Advisor-Strategic Economic Affairs of the Presidential Staff Office (2015-2018) • Senior Director of Treasury Management at Visa (2010-2014)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationships	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.	Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, nor with the majority and controlling shareholders, either directly or indirectly.

Tina T. Kemala Intan

Direktur Sumber Daya Manusia
Human Capital Director

Masa Jabatan : 22 Desember 2021-RUPS Tahun 2026, Periode Pertama
Term of Office : December 22, 2021-RUPS Year 2026, First Period

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia Usia 63 tahun per 31 Desember 2022 Kelahiran Kalijati, 23 September 1959	Indonesian Citizen Age 63 years old as of December 31, 2022 Born in Kalijati, September 23, 1959
Domisili | Domicile	Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia	Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Riwayat Penunjukan Appointment History	Pertama kali menjabat sebagai Direktur SDM, Tata Kelola, & Manajemen Risiko PT Pupuk Indonesia (Persero) pada 22 Desember 2021 berdasarkan Keputusan No. SK-408/MBU/12/2021.	He first served as Director of HR, Governance & Risk Management of PT Pupuk Indonesia (Persero) on December 22, 2021 based on decision No. SK-408/MBU/12/2021.
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam/luar Perusahaan	Does not have concurrent positions both inside and outside the Company
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Psikologi dari Universitas Padjadjaran (1985)	Bachelor of Psychology from Padjadjaran University (1985)
Riwayat Pekerjaan Employment History	• Direktur SDM dan Hukum PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (2019-2021) • Komisaris PT Angkasa Pura Solusi (2018-2019) • *Director of Human Capital, General Affair and IT* PT Angkasa Pura II (Persero) (2017-2019)	• Director of Human Resources and Law of PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (2019-2021) • Commissioner of PT Angkasa Pura Solusi (2018-2019) • Director of Human Capital, General Affair and IT PT Angkasa Pura II (Persero) (2017-2019)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationships	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.	Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, other members of the Supervisory Board, or with the majority and controlling shareholders, either directly or indirectly.

Gusrizal

Direktur Pemasaran
Marketing Director

Masa Jabatan : 20 November 2020-RUPS Tahun 2025, Periode Kedua
Term of Office : November 20, 2020-RUPS Year 2025, Second Period

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia Usia 58 tahun per 31 Desember 2022 Kelahiran Padang, 20 Januari 1964	Indonesian Citizen Age 58 years old as of December 31, 2022 Born in Padang, January 20, 1964
Domisili | Domicile	Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia	Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Riwayat Penunjukan Appointment History	Pertama kali menjabat sebagai Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero) pada 20 November 2020 berdasarkan Keputusan No. SK-377/MBU/11/2020.	He first served as Marketing Director of PT Pupuk Indonesia (Persero) on November 20, 2020 based on No. SK-377/MBU/11/2020.
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Beliau tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam/luar Perusahaan.	He has no concurrent positions inside/outside the Company.
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Master Bidang Manajemen Logistik dan Perkapalan dari World Maritime University, Swedia (1998) • Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung (1989).	• Master in Logistics and Shipping Management from World Maritime University, Sweden (1998) • Bachelor of Mechanical Engineering from Bandung Institute of Technology (1989)
Riwayat Pekerjaan Employment History	• Direktur Investasi PT Pupuk Indonesia (Persero) (2017-2020) • Komisaris Utama PT Pupuk Kujang (2016-2020) • Direktur Investasi & Pengembangan PT Pupuk Indonesia (Persero) (2016) • Direktur SDM & Umum PT Pupuk Indonesia (Persero) (2015-2016) • Direktur Utama PT Donggi Senoro LNG (2013-2015) • *SVP Corporate Investment and Business Development* PT Pertamina (Persero) (2010-2013).	• Investment Director of PT Pupuk Indonesia (Persero) (2017-2020) • President Commissioner of PT Pupuk Kujang (2016-2020) • Director of Investment & Development of PT Pupuk Indonesia (Persero) (2016) • HR & General Director of PT Pupuk Indonesia (Persero) (2015-2016) • President Director of PT Donggi Senoro LNG (2013-2015) • SVP Corporate Investment and Business Development PT Pertamina (Persero) (2010-2013).
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationships	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.	Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, other members of the Supervisory Board, or with the majority and controlling shareholders, either directly or indirectly.

Jamsaton Nababan

Direktur Portofolio & Pengembangan Usaha
Portfolio & Business Development Director

Masa Jabatan : 16 Juli 2021-RUPS Tahun 2026, Periode Pertama
Term of Office : July 16, 2021-RUPS Year 2026, First Period

Data Pribadi Personal Data	Warga Negara Indonesia Usia 60 tahun per 31 Desember 2022 Kelahiran Padang, 16 Juli 1962	Indonesian Citizen Age 60 years old as of December 31, 2022 Born in Padang, July 16, 1962
Domisili | Domicile	Bekasi, Jawa Barat, Indonesia	Bekasi, West Java, Indonesia
Riwayat Penunjukan Appointment History	Pertama kali menjabat sebagai Direktur Portofolio & Pengembangan Usaha PT Pupuk Indonesia (Persero) pada 16 Juli 2021 berdasarkan keputusan No. SK-237/MBU/07/2021	First served as Director of Portfolio & Business Development of PT Pupuk Indonesia (Persero) on July 16, 2021 based on decision No. SK-237/MBU/07/2021
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam/luar Perusahaan	Does not have concurrent positions both inside and outside the Company
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana (S1) Teknik Mesin Universitas Sumatera Utara (1987)	Bachelor (S1) Mechanical Engineering University of North Sumatra (1987)
Riwayat Pekerjaan Employment History	• *President Director* PT Pertamina EP Cepu (2017-2021) • *Development Director* PT Pertamina EP Cepu (2016-2017) • *Vice President Surface Facilities* PT Pertamina EP (2013-2016)	• President Director of PT Pertamina EP Cepu (2017-2021) • Development Director of PT Pertamina EP Cepu (2016-2017) • Vice President Surface Facilities PT Pertamina EP (2013-2016)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationships	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.	Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, other members of the Supervisory Board, or with the majority and controlling shareholders, either directly or indirectly.

Profil Pejabat Eksekutif
Executive Officer Profile

No.	Nama Karyawan Employee Name		Jabatan Position	Usia (Tahun) Age (Years Old)	Pendidikan Education	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment
Direktorat Utama | Main Directorate						
1		Wijaya Laksana	SVP Sekretaris Perusahaan SVP Corporate Secretary	45	• S2 Manajemen Komunikasi Universitas Indonesia (2012) • S2 Manajemen Universitas Gadjah Mada (2019) • Master of Communication Management University of Indonesia (2012) • Master of Management Gadjah Mada University (2019)	Surat Keputusan Direksi No. 039/A/HK/P28/SK/2023 Board of Directors Decree No. 039/A/HK/P28/SK/2023
2		Benediktus. All.	SVP Hukum SVP Legal	37	Magister Hukum, University of Adelaide (2016) Master of Laws, University of Adelaide (2016)	Surat Keputusan Direksi No. 153/A/SM/P28/SK/2022 Board of Directors Decree No. 153/A/SM/P28/SK/2022
3		Wijaya Laksana	Plt. SVP Komunikasi Korporat Act. SVP Corporate Communication	45	• S2 Manajemen Komunikasi Universitas Indonesia (2012) • S2 Manajemen Universitas Gadjah Mada (2019) • Master of Communication Management University of Indonesia (2012) • Master of Management Gadjah Mada University (2019)	Surat Keputusan Direksi No. 087/KU/E10/SK/2021 Board of Directors Decree No. 087/KU/E10/SK/2021
4		Yulius Sudaryoko	SVP Satuan Pengawasan Intern SVP Internal Audit	54	S2 *Strategic Management* Binus University (2019) S2 Strategic Management Binus University (2019)	Surat Keputusan Direksi No. 087/KU/E10/SK/2021 Board of Directors Decree No. 087/KU/E10/SK/2021
Direktorat Produksi | Directorate of Production						
1		Arif Fauzan	SEVP Pengadaan SEVP Procurement	58	Magister Teknik Institut Teknologi Sepuluh Nopember (2007) Master of Engineering Institut Teknologi Sepuluh Nopember (2007)	SPK No. 65/SPK-PIHC/XII/2021
2		Guntur Prasetyo	SVP Operasi & Produksi SVP Operations & Production	43	S1 Teknik Kimia Universitas Diponegoro (2002) S1 Chemical Engineering Universitas Diponegoro (2002)	Surat Keputusan Direksi No. 087/A/KU/E10/SK/2022 Board of Directors Decree No. 087/KU/E10/SK/2021
3		Sri Koestanto	SVP Perencanaan Pengadaan SVP Procurement Planning	54	S2 Teknik Elektro Institut Teknologi Sepuluh November (2007) Master of Electrical Engineering Institut Teknologi Sepuluh November (2007)	Surat Keputusan Direksi No. 114/KU/E10/SK/2021 Board of Directors Decree No. 087/KU/E10/SK/2021

No.	Nama Karyawan Employee Name	Jabatan Position	Usia (Tahun) Age (Years Old)	Pendidikan Education	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment
4	Tatang Barlian	SVP Pengadaan Operasional SVP Operational Procurement	55	S1 Teknik Material Institut Teknologi Bandung (2003) Bachelor of Material Engineering Institut Teknologi Bandung (2003)	Surat Keputusan Direksi No. 042/A/KU/E10/SK/2022 Board of Directors Decree No. 042/A/KU/E10/SK/2022
5	Indraswono Eko Saputro	SVP Pengadaan Strategis SVP Strategic Procurement	42	S1 Teknik Material Institut Teknologi Bandung (2003) Bachelor of Material Engineering Institut Teknologi Bandung (2003)	Surat Keputusan Direksi No. 096/A/KU/E10/SK/2021 Board of Directors Decree No. 096/A/KU/E10/SK/2021
Direktorat Keuangan & Manajemen Risiko | Directorate of Finance & Risk Management					
1	Robby Setiabudi	SVP Keuangan & Pendanaan Investasi SVP Finance & Investment Funding	43	M.Comm, University of Queensland (2011)	Surat Keputusan Direksi No. 110/A/KU/E10/SK/2021 Board of Directors Decree No. 110/A/KU/E10/SK/2021
2	Sara Dewi	SVP Kinerja Korporat SVP Corporate Performance	49	S2 *Magister Mangement* Keuangan Universitas Gadjah Mada Master of Magister Mangement Financial Universitas Gadjah Mada	Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/022/2021 Board of Directors Decree No. SK/DIR/022/2021
3	B. Agus Nugroho Jati	SVP Akuntansi SVP Accounting	50	S2 Akuntansi Manajemen Keuangan Universitas Gadjah Mada (2008) Master of Financial Management Universitas Gadjah Mada (2008)	Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/022/2021 Board of Directors Decree No. SK/DIR/022/2021
4	Ahmad Diponegoro	SVP Manajemen Risiko SVP Risk Management	47	*Master of Information Management* Tillburg University (2008) Master of Information Management Tillburg University (2008)	Surat Keputusan Direksi No. 087/KU/E10/SK/2021 Board of Directors Decree No. 087/KU/E10/SK/2021
Direktorat Transformasi Bisnis | Directorate of Business Transformation					
1	Bagus Subekti	SVP Strategi Korporat SVP Corporate Strategy	53	S1 Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung (1994) Bachelor of Chemical Engineering Institut Teknologi Bandung (1994)	Surat Keputusan Direksi No. 083/KU/E10/SK/2021 Board of Directors Decree No. 083/KU/E10/SK/2021
2	Ari Novan Setiono	SVP Teknologi Informasi SVP Information Technology	44	S2 Manajemen Universitas Gadjah Mada (2009) Master of Management Universitas Gadjah Mada (2009)	Surat Keputusan Direksi No. 193/A/HK/P28/SK/2022 Board of Directors Decree No. 193/A/HK/P28/SK/2022
3	Surahmad Wiji Widodo	SVP IFRI SVP IFRI	53	S2 Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung (2007) Master of Technical Engineering Institut Teknologi Bandung (2007)	Surat Keputusan Direksi No. 121/KU/E10/SK/2021 Board of Directors Decree No. 121/KU/E10/SK/2021

No.	Nama Karyawan Employee Name		Jabatan Position	Usia (Tahun) Age (Years Old)	Pendidikan Education	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment
Direktorat Sumber Daya Manusia | Directorate of Human Resources						
1		Eko Cahyo D.	SVP Budaya & Pembelajaran SVP Culture & Learning	35	S2 Hukum Bisnis Universitas Airlangga Surabaya (2013) Master of Business Universitas Airlangga Surabaya (2013)	Surat Keputusan Direksi No. 069/A/HK/P28/SK/2023 Board of Directors Decree No. 069/A/HK/P28/SK/2023
2		Yana Nurahmad Haerudin	SVP Umum & Aset SVP General & Assets	46	S2 SDM Universitas Singaperbangsa Karawang (2014) Master of HR Universitas Singaperbangsa Karawang (2014)	Surat Keputusan Direksi No. 195/A/HK/P28/SK/2022 Board of Directors Decree No. 195/A/HK/P28/SK/2022
3		Jojok Wido Harjoso	SVP Operasional SDM SVP HR Operational	55	S2 Manajemen Universitas Gadjah Mada (2010) Master of Management Universitas Gadjah Mada (2010)	Surat Keputusan Direksi No. 182/A/HK/P28/SK/2022 Board of Directors Decree No. 182/A/HK/P28/SK/2022
4		Tathit Surya Arjanggi	SVP Strategi & Kebijakan SDM SVP HR Strategy & Policy	44	S1 Teknik Informatika Institut Teknologi Sepuluh November (2002) Bachelor of Informatics engineering Institut Teknologi Sepuluh November (2002)	Surat Keputusan Direksi No. 182/A/HK/P28/SK/2022 Board of Directors Decree No. 182/A/HK/P28/SK/2022
5		Rika Susanty	SVP TJSL SVP TJSL	50	S2 Manajemen Bina Nusantara (2019) Master of Management Bina Nusantara (2019)	Surat Keputusan Direksi No. 196/A/HK/P28/SK/2022 Board of Directors Decree No. 196/A/HK/P28/SK/2022
Direktorat Pemasaran | Marketing Directorate						
1		Gatoet Gembiro Noegroho	SEVP Operasi Pemasaran SEVP Marketing Operations	56	S3 Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya (2021) Doctor of Business Administration Universitas Brawijaya (2021)	SPK No. 64/SPK-PIHC/XII/2021
2		Hree Shanty Bayu	SVP Strategi Pemasaran SVP Marketing Strategy	44	S1 Teknik Kimia Universitas Diponegoro (2002) Bachelor of Chemical Engineering Universitas Diponegoro (2002)	Surat Keputusan Direksi No. 083/KU/E10/SK/2021 Board of Directors Decree No. 083/KU/E10/SK/2021
3		Veronika Trisna S.	SVP Distribusi SVP Distribution	41	S2 Magister Manajemen Universitas Airlangga (2009) Master of Magister Management Universitas Airlangga (2009)	Surat Keputusan Direksi No. 069/A/HK/P28/SK/2023 Board of Directors Decree No. 069/A/HK/P28/SK/2023

No.	Nama Karyawan Employee Name	Jabatan Position	Usia (Tahun) Age (Years Old)	Pendidikan Education	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment
4	Mochamad Safiie	SVP Pemasaran Komersil SVP Commercial Marketing	54	S1 Teknik Kimia Institut Teknologi Sepuluh November (1993) Bachelor of Chemical Engineering Institut Teknologi Sepuluh November (1993)	Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/027/2021 Board of Directors Decree No. SK/DIR/027/2021
5	R. Eric Juliana Rachman	SVP Perencanaan & Manajemen PSO SVP PSO Planning & Management	43	S1 Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Padjadjaran (2003) Bachelor of Economic in Development Studies Universitas Padjadjaran (2003)	Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/024/2020 Board of Directors Decree No. SK/DIR/024/2020
6	Agus Susanto	SVP PSO Wilayah Timur SVP PSO Eastern Region	55	S1 Desain Institut Teknologi Sepuluh November (1992) Bachelor of Design Institut Teknologi Sepuluh November (1992)	Surat Keputusan Direksi No. 089/KU/E10/SK/2021 Board of Directors Decree No. 089/KU/E10/SK/2021
7	Fickry Martawisuda	SVP PSO Wilayah Barat SVP PSO Western Region	39	S2 Manajemen Universitas Singa Perbangsa (2017) Master of Management Universitas Singa Perbangsa (2017)	Surat Keputusan Direksi No. 196/A/HK/P28/SK/2022 Board of Directors Decree No. 196/A/HK/P28/SK/2022
Direktorat Portofolio & Pengembangan Usaha | Directorate of Portfolio & Business Development					
1	Satriyo Nugroho	SEVP Pengembangan Bisnis SEVP Business Development	61	Insinyur Universitas Brawijaya (2022) Engineering Universitas Brawijaya (2022)	SPK No. 59/SPK-PIHC/IX/2020
2	Kuntari L. Wahyuningdyah	SVP Portofolio Bisnis SVP Business Portfolio	49	S2 *Construction Management*, University of New South Wales (1998) S2 Construction Management, University of New South Wales (1998)	Surat Keputusan Direksi No. 087/KU/E10/SK/2021 Board of Directors Decree No. 087/KU/E10/SK/2021
3	Iwan Daru Sukmana	SVP Pengembangan SVP Development	45	S1 Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada (2003) Bachelor of Chemical Engineering Universitas Gadjah Mada (2003)	Surat Keputusan Direksi No. 129/A/KU/E10/SK/2022 Board of Directors Decree No. 129/A/KU/E10/SK/2022

PROFIL SENIOR PROJECT MANAGER (SPM)
Senior Project Manager (SPM) Profile

No.	Nama Karyawan Employee Name	Jabatan Position	Usia (Tahun) Age (Years Old)	Pendidikan Education	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment
1	Boycke Garda Aria	SPM Implementasi Product Tracking SPM Product Tracking Implementation	52	S2 Magister Teknik Universitas Mercubuana Master of Engineering Universitas Mercubuana	Surat Keputusan Direksi No. 069/A/HK/P28/SK/2023 Board of Directors Decree No. 069/A/HK/P28/SK/2023
2	Zulyan Imansyah	SPM Sales & Operating Planning SPM Sales & Operating Planning	48	S2 Magister Manajemen Universitas Tridinanti (2018) Master of Management Universitas Tridinanti (2018)	Surat Keputusan Direksi No. 118/A/KU/E10/SK/2022 Board of Directors Decree No. 118/A/KU/E10/SK/2022
3	Guntur Prasetyo	SPM SBU Operation & Maintenance SPM SBU Operation & Maintenance	43	S1 Teknik Kimia Universitas Diponegoro (2002) Degree of Chemical Engineering Universitas Diponegoro (2002)	Surat Keputusan Direksi No. 087/A/KU/E10/SK/2022 Board of Directors Decree No. 087/A/KU/E10/SK/2022
4	Ericcson Ramadhan	SPM Optimalisasi Stock & Sparepart SPM Optimization of Stock & Sparepart	40	*Master of Science*, Cranfield University (2017) Master of Science, Cranfield University (2017)	Surat Keputusan Direksi No. 097/A/KU/E10/SK/2021 Board of Directors Decree No. 097/A/KU/E10/SK/2021
5	Rachmat Hamdani	SPM CRP Produksi SPM CRP Produksi	52	Master Manajemen Universitas Sriwijaya (2016) Master of Management Universitas Sriwijaya (2016)	Surat Keputusan Direksi No. 083/KU/E10/SK/2021 Board of Directors Decree No. 083/KU/E10/SK/2021
6	Kartina Wahyu Wiyati	SPM Manajemen Piutang SPM Receivable Management	52	S2 *Marketing* Monash University (2000) Master of Marketing Monash University (2000)	Surat Keputusan Direksi No. 083/KU/E10/SK/2021 Board of Directors Decree No. 083/KU/E10/SK/2021
7	Brimadiyanto	SPM Restrukturisasi Keuangan SPM Financial Restructuring	52	S2 Magister Keuangan Universitas Indonesia (2007) Master of Finance Universitas Indonesia (2007)	Surat Keputusan Direksi No. 097/A/KU/E10/SK/2021 Board of Directors Decree No. 097/A/KU/E10/SK/2021
8	Esa Adhi Pradhana	SPM Dana Pensiun SPM Pension Fund	37	S1 Akuntansi (*Chartered* Akuntan) Universitas Islam Indonesia (2007) Degree of Accounting (Chartered Accountant) Universitas Islam Indonesia (2007)	Surat Keputusan Direksi No. 083/KU/E10/SK/2021 Board of Directors Decree No. 083/KU/E10/SK/2021
9	Budi Mulia Utama Hasibuan	SPM *Green Barrier* Kawasan Pabrik SPM Green Barrier Factory Area	51	S2 *Master of Environmental Studies* (2008) Master of Environmental Studies (2008)	Surat Keputusan Direksi No. 063/A/HL/P28/SK/2023 Board of Directors Decree No. 063/A/HL/P28/SK/2023

No.	Nama Karyawan Employee Name	Jabatan Position	Usia (Tahun) Age (Years Old)	Pendidikan Education	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment
10	Yetty Endarwati	SPM Digitalisasi & *Data Science* SPM Digitalization & Data Science	46	S1 Teknik Informatika Institut Teknologi Sepuluh November (2000) Degree of Informatics Engineering Institut Teknologi Sepuluh November (2000)	Surat Keputusan Direksi No. 005/A/KU/E10/SK/2022 Board of Directors Decree No. 005/A/KU/E10/SK/2022
11	Maslani	SPM Reformasi Subsidi Pupuk SPM Fertilizer Subsidy Reform	47	S2 Ekonomika Pembangunan Universitas Gadjah Mada (2008) Master of Development Economics Universitas Gadjah Mada (2008)	Surat Keputusan Direksi No. 110/A/KU/E10/SK/2021 Board of Directors Decree No. 110/A/KU/E10/SK/2021
12	Evy Yusnita	SPM NPK *Cost Excellence* SPM NPK Cost Excellence	50	S2 Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada (2015) Master of Management Universitas Gadjah Mada (2015)	Surat Keputusan Direksi No. 028/A/HK/P28/SK/2023 Board of Directors Decree No. 028/A/HK/P28/SK/2023
13	Lani Sukma Imtihani Djumasa	SPM Manajemen Talenta & Kinerja SPM Talent & Performance Management	39	S2 Magister Psikologi Universitas Gadjah Mada (2011) Master of Psychology Universitas Gadjah Mada (2011)	Surat Keputusan Direksi No. 046/A/KU/E10/SK/2022 Board of Directors Decree No. 046/A/KU/E10/SK/2022
14	Muh Zuhri Al-Khafidh	SPM Desain Organisasi & Perencanaan SDM SPM Organizational Deisgn & HR Planning	42	Teknik Universitas Gadjah Mada (2003) Engineering Universitas Gadjah Mada (2003)	Surat Keputusan Direksi No. 046/A/KU/E10/SK/2022 Board of Directors Decree No. 046/A/KU/E10/SK/2022
15	Olyvia Jilly	SPM Kios Komersil SPM Kiosk Commercial	37	The University of Warwick, *Master of Science* (2017) The University of Warwick, Master of Science (2017)	Surat Keputusan Direksi No. 116/A/KU/E10/SK/2021 Board of Directors Decree No. 116/A/KU/E10/SK/2021
16	Junianto Simare Mare	SPM Customer Relations SPM Customer Relations	39	S2 Agroteknologi Tanah Institut Pertanian Bogor (2012) Master of Soil Agrotechnology Institut Pertanian Bogor (2012)	Surat Keputusan Direksi No. 180/A/HK/P28/SK/2022 Board of Directors Decree No. 180/A/HK/P28/SK/2022
17	Yusuf Trudo Hdm Nainggolan	SPM Pengembangan Bisnis Luar Negeri SPM Overseas Business Development	42	S2 Manajemen Bisnis Institut Pertanian Bogor (2011) Master of Business Management Institut Pertanian Bogor (2011)	Surat Keputusan Direksi No. 135/A/KU/E10/SK/2021 Board of Directors Decree No. 135/A/KU/E10/SK/2021
18	Rangga Yuda Putra	SPM Perdagangan & Logistik SPM Trade & Logistics	39	S2 Bisnis Internasional The University of Queensland (2015) Master of Business International The University of Queensland (2015)	Surat Keputusan Direksi No. 175/A/HK/P28/SK/2022 Board of Directors Decree No. 175/A/HK/P28/SK/2022

No.	Nama Karyawan Employee Name		Jabatan Position	Usia (Tahun) Age (Years Old)	Pendidikan Education	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment
19		Iyan Fajri	SPM Agrosolution SPM Agrosolution	36	S2 Manajemen Agribisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran (2019) Master of Agribusiness Management Universitas Pembangunan Nasional Veteran (2019)	Surat Keputusan Direksi No. 193/A/HK/P28/SK/2022 Board of Directors Decree No. 193/A/HK/P28/SK/2022
20		Toto Laksono	SPM *Streamlining* Lini Bisnis PI Grup SPM Streamlining PI Group Business Line	45	S1 Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada (2002) Degree of Chemical Engineering Universitas Gadjah Mada (2002)	Surat Keputusan Direksi No. 097/A/KU/E10/SK/2022 Board of Directors Decree No. 097/A/KU/E10/SK/2022
21		M. Rozikin Busro	SPM *Green Energy, Blue & Green Ammonia* SPM Green Energy, Blue & Green Ammonia	40	S2 Magister Manajemen FEB Universitas Gadjah Mada (2022) Master of Management FEB Universitas Gadjah Mada (2022)	Surat Keputusan Direksi No. 131/A/KU/E10/SK/2022 Board of Directors Decree No. 131/A/KU/E10/SK/2022
22		Rezaril Frissandy	SPM *Retail Management* SPM Retail Management	36	S2 Magister Manajemen FEB Universitas Padjadjaran Master of Management FEB Universitas Padjadjaran	Surat Keputusan Direksi No. 069/A/HK/P28/SK/2023 Board of Directors Decree No. 069/A/HK/P28/SK/2023

Demografi dan Pengembangan Kompetensi Karyawan
Employee Demographics and Competency Development

DEMOGRAFI KARYAWAN
Hingga akhir tahun 2022, jumlah sumber daya manusia Perusahaan termasuk Entitas Anak secara langsung mencapai 7.538 orang, mengalami penurunan 3,97% dibandingkan tahun 2021 yang 7.853 orang. Penurunan ini dikarenakan ada karyawan di lingkungan PI Group yang telah memasuki masa purna bakti.

EMPLOYEE DEMOGRAPHICS
Until the end of 2022, the number of human resources of the Company including direct subsidiaries reached 7,538 people, a decrease of 3.97% compared to 2021 which was 7,853 people. This decrease is due to employees within PI Group who have entered their retirement period.

DEMOGRAFI KARYAWAN TETAP BERDASARKAN JENIS KELAMIN (ORANG)
Permanent Employee Demographics by Gender (Person)

Entitas Entity	2022				2021			
	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)
Holding								
Pupuk Indonesia	267	82	348	4.63	272	82	354	4,51
Entitas Anak | Subsidiaries								
PT Petrokimia Gresik	1.841	96	1937	25,69	1.945	94	2.039	25,97
PT Pupuk Kujang	923	86	1009	13,38	935	86	1.021	13,00
PT Pupuk Kalimantan Timur	1.188	111	1299	17,23	1.254	116	1.370	17,45
PT Pupuk Iskandar Muda	484	65	549	7,28	504	65	569	7,25
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	1668	150	1818	24,11	1.683	157	1.840	23,44
PT Rekayasa Industri	381	58	439	5,82	437	64	501	6,38
PT Pupuk Indonesia Niaga	40	27	67	0,89	47	27	74	0,94
PT Pupuk Indonesia Logistik	24	4	28	0,37	27	7	34	0,43
PT Pupuk Indonesia Utilitas	29	8	37	0,49	31	8	39	0,50
PT Pupuk Indonesia Pangan	5	2	7	0,09	8	2	10	0,13
Sub Jumlah Entitas Anak	6.583	607	7190	95,37	6.871	626	7.497	95,49
Jumlah | Total	**6.850**	**689**	**7.538**	**100,00**	**7.143**	**708**	**7.853**	**100,00**

L = Laki-laki; P = Perempuan
M = Male; F = Female

DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN (ORANG)
Employees Demographics Based on Employment Status (people)

Entitas Entity	Karyawan Tetap Permanent Employees			Karyawan Kontrak Contract Employees		
	2022	2021	Penambahan (Pengurangan) Increase (Decrease) 2021-2022	2022	2021	Penambahan (Pengurangan) Increase (Decrease) 2021-2022
Holding						
Pupuk Indonesia	348	354	-5	29	20	9
Entitas Anak | Subsidiaries						
PT Petrokimia Gresik	1.937	2.039	-102	371	361	10
PT Pupuk Kujang	1.009	1.021	-12	0	0	0
PT Pupuk Kalimantan Timur	1.299	1.370	-71	63	36	27
PT Pupuk Iskandar Muda	549	569	-20	12	12	0
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	1.818	1.840	-22	19	18	1
PT Rekayasa Industri	439	501	-62	23	24	-1
PT Pupuk Indonesia Niaga	67	74	-7	11	9	2
PT Pupuk Indonesia Logistik	28	34	-6	171	1	170
PT Pupuk Indonesia Utilitas	37	39	-2	15	16	-1
PT Pupuk Indonesia Pangan	7	10	-3	17	17	0
Sub Jumlah Entitas Anak	7.190	7.497	-307	702	494	208
Jumlah | Total	**7.538**	**7.853**	**-312**	**731**	**514**	**217**

DEMOGRAFI KARYAWAN TETAP BERDASARKAN *GRADE* JABATAN (ORANG)
Demographics of Permanent Employees by Grade of Position (people)

Entitas Entity	Band 1		Band 2		Band 3		Band 4		Band 5-7	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Holding										
Pupuk Indonesia	45	46	104	99	87	79	100	108	13	22
Entitas Anak | Subsidiaries										
PT Petrokimia Gresik	22	22	89	75	239	236	354	360	1.233	1.346
PT Pupuk Kujang	13	13	54	56	173	170	287	291	482	492
PT Pupuk Kalimantan Timur	27	29	100	103	267	228	512	521	393	488
PT Pupuk Iskandar Muda	11	10	21	16	92	83	225	205	200	255
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	20	19	100	89	369	342	448	460	881	930
PT Rekayasa Industri	36	52	153	166	241	262	9	19		2
PT Pupuk Indonesia Niaga	3	5	12	15	25	20	10	16	17	18
PT Pupuk Indonesia Logistik	2	2	5	9	8	5	6	7	7	11
PT Pupuk Indonesia Utilitas		-	5	6	3	1	12	7	17	25
PT Pupuk Indonesia Pangan		-	3	2	-	-	2	2	2	6
Sub Jumlah Entitas Anak	134	152	542	537	1.417	1.347	1.865	1.888	3.232	3.573
Jumlah | Total	**179**	**198**	**646**	**636**	**1.504**	**1.426**	**1.965**	**1.996**	**3.245**	**3.595**

DEMOGRAFI KARYAWAN TETAP BERDASARKAN USIA (ORANG)
Permanent Employee Demographics by Age (people)

Entitas Entity	> 50		> 45-50		> 40-45		> 35-40		> 30-35		> 25-30		s/d 25	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Holding														
Pupuk Indonesia	31	41	32	30	50	53	80	82	110	111	46	37		-
Entitas Anak | Subsidiaries														
PT Petrokimia Gresik	87	183	12	11	10	12	88	111	563	576	1.045	1.054	132	92
PT Pupuk Kujang	59	71	58	58	131	140	359	368	286	279	116	105	-	-
PT Pupuk Kalimantan Timur	173	239	62	68	124	134	208	220	393	400	288	271	51	38
PT Pupuk Iskandar Muda	20	37	12	12	59	69	140	139	131	128	133	134	54	50
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	61	85	91	89	223	236	368	393	534	531	526	499	15	7
PT Rekayasa Industri	98	135	81	83	72	84	112	112	73	82	3	5	-	-
PT Pupuk Indonesia Niaga	9	17	21	19	6	7	11	10	8	9	10	11	2	1
PT Pupuk Indonesia Logistik	4	7	3	4	6	5	6	6	5	10	4	2	-	-
PT Pupuk Indonesia Utilitas	-	-	-	-	4	4	2	5	13	14	13	12	5	4
PT Pupuk Indonesia Pangan		-	1	1	-	2	1	2	3	3	2	2	-	-
Sub Jumlah Entitas Anak	511	774	341	345	635	693	1.295	1.366	2.009	2.032	2.140	2.095	259	192
Jumlah | Total	**542**	**815**	**373**	**375**	**685**	**746**	**1.375**	**1.448**	**2.119**	**2.143**	**2.186**	**2.132**	**259**	**192**

DEMOGRAFI KARYAWAN TETAP BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN (ORANG)
Permanent Employee Demographics by Education Level (people)

Entitas Entity	Pasca Sarjana Postgraduate		Sarjana Bachelor		Diploma Diploma		SLTA Senior High School	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Holding								
Pupuk Indonesia	76	79	272	274	1	1	0	0
Entitas Anak | Subsidiaries								
PT Petrokimia Gresik	53	57	488	508	63	64	1.333	1.410
PT Pupuk Kujang	38	38	195	200	184	187	592	597
PT Pupuk Kalimantan Timur	66	67	298	309	180	181	755	812
PT Pupuk Iskandar Muda	16	16	163	164	109	110	261	279
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	75	77	465	451	219	226	1.059	1.086
PT Rekayasa Industri	134	150	262	305	6	7	37	39
PT Pupuk Indonesia Niaga	48	54	18	19	1	1	-	-
PT Pupuk Indonesia Logistik	22	24	4	5	2	3	-	2
PT Pupuk Indonesia Utilitas	1	2	26	27	-	-	10	10
PT Pupuk Indonesia Pangan	1	1	5	8	1	1	-	-
Sub Jumlah Entitas Anak	454	486	1.924	1.996	765	780	4.047	4.235
Jumlah | Total	**530**	**565**	**2.196**	**2.270**	**766**	**781**	**4.047**	**4.235**

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

PT Pupuk Indonesia (Persero) meyakini Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni merupakan ujung tombak dalam upaya mewujudkan visi dan misi Perusahaan. Untuk itu, PTPI menjalankan program pendidikan dan pengembangan kompetensi karyawan secara berkesinambungan agar lebih kompetitif dalam menghadapi perubahan dan perkembangan yang begitu pesat serta meningkatkan efektivitas dan produktivitas kinerja.

Perusahaan memberikan perhatian besar terhadap kualitas, profesionalitas dan efektivitas SDM dalam menjaga serta menumbuhkan loyalitas dan produktivitas SDM setiap tahun. Komitmen tersebut dibuktikan dengan penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan SDM yang dilakukan dengan mengacu pada kerangka pelatihan dan pengembangan yang mencakup seluruh aspek dan metode pengembangan bagi seluruh SDM.

Sepanjang tahun 2022, Perusahaan telah merealisasikan biaya pengembangan kompetensi sebesar Rp164,3 miliar, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 yang Rp90,1 miliar.

EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT

PT Pupuk Indonesia (Persero) believes that qualified Human Resources (HR) are the spearhead in efforts to realize the Company's vision and mission. For this reason, PTPI runs a continuous employee education and competency development program to be more competitive in the face of rapid changes and developments and to increase performance effectiveness and productivity.

The Company pays great attention to the quality, professionalism and effectiveness of HR in maintaining and growing HR loyalty and productivity every year. This commitment is evidenced by the organization of HR training and development carried out by referring to the training and development framework that covers all aspects and methods of development for all HR.

Throughout 2022, the Company has realized competency development costs of Rp164.3 billion, higher than in 2021 which was Rp90.1 billion.

REALISASI ANGGARAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
Competency Development Budget Realization

(Rp juta) (Rp million)

	2022	2021	2020	
Realisasi Anggaran	164.293	114.120	83.392	Budget Realization

REALISASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN
Realization of Employee Competency Development

No.	Nama Kegiatan Activity Name	Jenis Pelatihan Type of Training	Tujuan Pelatihan Training Objectives	Peserta berdasarkan Level Jabatan Participants by Position Level	Jumlah Total
1	*Leadership* Leadership	*Softskill* dan *hardskill* Softskill and hardskill	Menyiapkan calon *leader* dengan kemampuan *leadership* untuk jenjang karir selanjutnya. Preparing prospective leaders with leadership skills for the next career path.	All Grade	533 peserta dengan total 20 kegiatan 533 participants with a total of 20 activities
2	Manajemen Risiko dan *Governance* Risk Management and Governance	*Softskill* dan *hardskill* Softskill and hardskill	Mengidentifikasi keberadaan dan penyebab munculnya risiko dalam upaya pengembangan bisnis. Identify the existence and causes of risks in business development efforts.	All Grade	975 peserta dengan total 20 kegiatan 975 participants with a total of 20 activities
3	Budaya Perusahaan Company Culture	*Softskill* Softskill	Untuk menanamkan budaya AKHLAK demi transformasi *human capital* dan meningkatkan daya saing BUMN menjadi pemain global. To instill a culture of AKHLAK for the transformation of human capital and increase the competitiveness of SOEs to become global players.	All Grade	485 peserta dengan total 8 kegiatan 485 participants with a total of 20 activities

No.	Nama Kegiatan Activity Name	Jenis Pelatihan Type of Training	Tujuan Pelatihan Training Objectives	Peserta berdasarkan Level Jabatan Participants by Position Level	Jumlah Total
4	Teknologi Informasi Information Technology	*Softskill* dan *hardskill* Softskill and hardskill	Memberikan pemahaman secara menyeluruh tentang pentingnya peran IT dalam baik dalam mendukung layanan yang diberikan kepada *user* maupun sebagai sarana komunikasi internal perusahaan. Provides a thorough understanding of the importance of the role of IT in both supporting the services provided to users and as a means of internal corporate communication.	All Grade	326 peserta dengan total 28 kegiatan 326 participants with a total of 28 activities
5	Kesehatan dan Keselamatan Kerja Occupational Health and Safety	*Softskill* Softskill	Meningkatkan *awareness* tentang kesehatan dan keselamatan di lingkungan Perusahaan. Increase awareness of health and safety within the Company	All Grade	358 peserta dengan total 7 kegiatan 358 participants with a total of 7 activities
6	Keuangan dan Audit Finance and Audit	*Softskill* dan *hardskill* Softskill and hardskill	Meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan perusahaan sehingga dapat merencanakan dan mengendalikan keuangan perusahaan. Increase knowledge about the company's financial management so that it can plan and control the company's finances.	All Grade	67 peserta dengan total 19 kegiatan 67 participants with a total of 19 activities
7	Pemasaran dan Distribusi Marketing and Distribution	*Softskill* dan *hardskill* Softskill and hardskill	Meningkatkan kinerja *sales*, *marketing*, dan distribusi dengan optimal. Improve sales, marketing, and distribution performance optimally.	All Grade	274 peserta dengan total 15 kegiatan 274 participants with a total of 15 activities
8	Sumber Daya Manusia Human Resources	*Softskill* dan *hardskill* Softskill and hardskill	Meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan sumber daya manusia dalam Perusahaan. Improve understanding of human resource management in the Company.	All Grade	1.677 peserta dengan total 39 kegiatan 1,677 participants with a total of 39 activities
9	Sertifikasi Certification	*Hardskill* Hardskill	Memastikan kompetensi seseorang yang telah didapatkan melalui pembelajaran, pelatihan, maupun pengalaman kerja. Ensuring a person's competence that has been obtained through learning, training, and work experience.	All Grade	137 peserta dengan total 33 kegiatan 137 participants with a total of 33 activities
10	Sistem Manajemen dan Prosedur Management System and Procedures	*Hardskill* Hardskill	Meningkatkan pemahaman mengenai sistem manajemen yang paling mutakhir. Improve understanding of the most up-to-date management systems.	All Grade	51 peserta dengan total 3 kegiatan 51 participants with a total of 3 activities
11	Kegiatan Pembelajaran Lainnya Other Leaning Activities	*Softskill* dan *hardskill* Softskill and hardskill	Meningkatkan keterampilan dan kompetensi karyawan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. Improve employee skills and competencies in accordance with the needs of the Company.	All Grade	114 peserta dengan total 35 kegiatan 114 participants with a total of 35 activities

REALISASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS, KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS, SEKRETARIS PERUSAHAAN, AUDIT INTERNAL, GOVERNANSI KORPORAT, MANAJEMEN RISIKO

Realization of Competency Development of the Board of Commissioners, Board of Directors, Secretary of the Board of Commissioners, Committees under the Board of Commissioners, Corporate Secretary, Internal Audit, Corporate Governance, Risk Management

Nama Name	**Jabatan** Position	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Type of Eduction and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Materials	**Tanggal** Date	**Penyelenggara** Organizer
Dewan Komisaris | **Board of Commissioners**					
Anwar Sanusi	Komisaris Commissioner	Konferensi Conferences	Konferensi Tahunan IFA 2022 Wina, Austria IFA 2022 Annual Conference Vienna, Austria	30 Mei 2022 May 30, 2022	International Fertilizer Association
Bambang Widianto	Komisaris Commissioner	Konferensi Conferences	Konferensi Tahunan IFA 2022 Wina, Austria IFA 2022 Annual Conference Vienna, Austria	30 Mei 2022 May 30, 2022	International Fertilizer Association
Darmin Nasution	Komisaris Utama President Commissioner	Webinar	Internalisasi Pelaporan LHKPN Transparansi dan Akurasi Pelaporan LHKPN sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Internalization of LHKPN Reporting Transparency and Accuracy of LHKPN Reporting as an Effort to Prevent Corruption	21 Januari 2022 January 21, 2022	PT Pupuk Indonesia & KPK
Mustoha Iskandar	Komisaris Independen Independent Commissioner	Webinar	Webinar Proses Pembentukan dan Klasifikasi Perusahaan *Holding* Webinar on Holding Company Formation Process and Classification	15 Februari 2022 February 15, 2022	PT Pupuk Indonesia
		Pelatihan Training	Special Directorship Program	17 November 2022 November 17, 2022	Indonesia Institute for Corporate Directorship
Direksi | **Board of Directors**					
Bakir Pasaman	Direktur Utama President Director	Berbagi Sharing	*Sharing Session* "Bedah Buku Unboss" Sharing Session "Unboss Book Review"	31 Maret 2022 March 31, 2022	PT Pupuk Indonesia
		Konferensi Conferences	Konferensi Tahunan IFA 2022 Wina, Austria IFA 2022 Annual Conference Vienna, Austria	30 Mei 2022 May 30, 2022	International Fertilizer Association
Bob Indiarto	Direktur Produksi Production Director	Pelatihan Training	Special Directorship Program	17 November 2022 November 17, 2022	Indonesia Institute for Corporate Directorship
Gusrizal	Direktur Pemasaran Marketing Director	Konferensi Conferences	Konferensi Tahunan IFA 2022 Wina, Austria IFA 2022 Annual Conference Vienna, Austria	30 Mei 2022 May 30, 2022	International Fertilizer Association
		Pelatihan Training	*Training Softskills* BOD-1, BOD-2 & BOD-3 Direktorat Pemasaran Softskills Training BOD-1, BOD-2 & BOD-3 Marketing Directorate	12 Agustus 2022 August 12, 2022	PT Pupuk Indonesia
Nugroho Christijanto	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Webinar	Internalisasi Pelaporan LHKPN Transparansi dan Akurasi Pelaporan LHKPN sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Internalization of LHKPN Reporting Transparency and Accuracy of LHKPN Reporting as an Effort to Prevent Corruption	21 Januari 2022 January 21, 2022	PT Pupuk Indonesia & KPK
		Berbagi Sharing	Webinar AKHLAK BUMN Muda *Talk Series* Pupuk Indonesia Group Tema Harmonis & Loyal Webinar AKHLAK BUMN Muda Talk Series Pupuk Indonesia Group Theme Harmonious & Loyal	20 Mei 2022 May 20, 2022	PT Pupuk Indonesia

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Eduction and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
		Seminar	Fertilizer Association of India/FAI Annual Seminar 2022 in India	7 Desember 2022 December 7, 2022	Ensuring Food Security The Fertiliser Association of India
Panji Winanteya Ruky	Direktur Transformasi Bisnis Director of Business Transformation	Berbagi Sharing	Ngobrol Bareng Santai dengan BOD Pemberdayaan Potensi SDM menuju Pusri Maju 2025 *Ngobrol Bareng Santai* with the BOD Empowering HR Potential towards Pusri Maju 2025	24 Januari 2022 January 24, 2022	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
		Pelatihan Training	Pelatihan *Design Thinking* Design Thinking Training	8 Juni 2022 June 8, 2022	PT Pupuk Indonesia
		Pelatihan Training	*Training Softskills* BOD-1, BOD-2 & BOD-3 Direktorat Transformasi Bisnis Softskills Training BOD-1, BOD-2, & BOD-3 Directorate of Business Transformation	9 September 2022 September 9, 2022	PT Pupuk Indonesia
Tina T. Kemala Intan	Direktur Sumber Daya Manusia Human Resources Director	Berbagi Sharing	Paparan Ekspektasi Manajemen dengan Direktur SDM TK & Manajemen Risiko Exposure to Management Expectations with the Director of Kindergarten HR & Risk Management	17 Januari 2022 January 17, 2022	PT Pupuk Indonesia
		Berbagi Sharing	Ngobrol Bareng Santai dengan BOD Pemberdayaan Potensi SDM menuju Pusri Maju 2025 *Ngobrol Bareng Santai* with the BOD Empowering HR Potential towards Pusri Maju 2025	24 Januari 2022 January 24, 2022	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
		Sertifikasi Certification	Certified Professional Organization Development (CPOD)	5 Februari 2022 February 5, 2022	PT Howard Hermes Indonesia
		Berbagi Sharing	Sharing Session Career Wisdom "The Professionalism"	10 Maret 2022 March 10, 2022	PT Pupuk Indonesia
		Berbagi Sharing	*Sharing Session* "Bedah Buku Unboss" Sharing Session "Unboss Book Review"	31 Maret 2022 March 31, 2022	PT Pupuk Indonesia
		Berbagi Sharing	Program Motivasi dan *Treatment Softskill* "*Mindfulness*" Silaturahmi keluarga besar Direktorat SDM, TK, & MR Motivation Program and Softskill Treatment "Mindfulness" Big family gathering of Directorate of HR, TK, & MR	13 April 2022 April 13, 2022	PT Pupuk Indonesia
		Konferensi Conferences	HR Tech Festival Asia 2022 di Singapore	11 Mei 2022 May 11, 2022	HRMASIA
		Konferensi Conferences	ATD International Conference & Expo 2022 di Orlando, USA	15 Mei 2022 May 15, 2022	ATD (Association for Talent Development)
		Pelatihan Training	Training Soft Skills for Grade 1-3	22 Juli 2022 July 22, 2022	PT Pupuk Indonesia
		Pelatihan Training	Training Soft Skills for Grade 4-7	28 Juli 2022 July 28, 2022	PT Pupuk Indonesia
		Berbagi Sharing	Kegiatan AKHLAK BUMN Muda & Srikandi *Talk Series* Pupuk Indonesia Grup Tema Adaptif & Kolaboratif AKHLAK BUMN Muda & Srikandi Talk Series Pupuk Indonesia Group Activities Adaptive & Collaborative Theme	28 Juli 2022 July 28, 2022	PT Pupuk Kalimantan Timur

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Eduction and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
		Lokakarya Workshop	*Workshop* Bimbingan Teknis Dunia Usaha Berintegritas Kolaborasi KPK dan PI Workshop on Technical Guidance for Business World with Integrity Collaboration between KPK and PI	2 Agustus 2022 August 2, 2022	KPK & PIHC
		Pelatihan Training	*Workshop Stress Test* Manajemen Risiko PI Grup PI Group Risk Management Stress Test Workshop	4 Agustus 2022 August 4, 2022	PT Pupuk Indonesia
		Pelatihan Training	*Training Soft Skills* BOD-4, BOD-5 & BOD-6 Direktorat Pemasaran Soft Skills Training BOD-4, BOD-5 & BOD-6 Marketing Directorate	11 Agustus 2022 August 11, 2022	PT Pupuk Indonesia
		Pelatihan Training	*Training Soft Skills* BOD-1, BOD-2 & BOD-3 Direktorat Pemasaran Soft Skills Training BOD-1, BOD-2 & BOD-3 Marketing Directorate	12 Agustus 2022 August 12, 2022	PT Pupuk Indonesia
		Pelatihan Training	*Training Soft Skills* BOD-4, BOD-5 & TKNO Direktorat Transformasi Bisnis Soft Skills Training BOD-4, BOD-5 & TKNO Directorate of Business Transformation	26 Agustus 2022 August 26, 2022	PT Pupuk Indonesia
		Pelatihan Training	*Training Soft Skills* BOD-1, BOD-2 & BOD-3 Direktorat Transformasi Bisnis Soft Skills Training BOD-1, BOD-2 & BOD-3 Directorate of Business Transformation	9 September 2022 September 9, 2022	PT Pupuk Indonesia
		Pelatihan Training	*Anticorruption Exclusive Workshop* Doktrin *Fiduciary Duty* di Perseroan Terbatas dan Pertanggung jawaban Pribadi Direksi dan Komisaris terhadap Kerugian Perusahaan (Membangun Perlindungan Hukum di Perusahaan, Mencegah Korupsi & Kerugian Keuangan Negara di BUMN berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2022) Anticorruption Exclusive Workshop Doctrine of Fiduciary Duty in Limited Liability Companies and Personal Liability of Directors and Commissioners for Company Losses (Building Legal Protection in Companies, Preventing Corruption & State Financial Losses in SOEs based on Government Regulation No. 23 of 2022)	29 September 2022 September 29, 2022	Indonesia Training Institute & Consulting Services
		Sosialisasi Socialization	Kegiatan *Briefing Assessment Center* BOD-1 PT Pupuk Indonesia (Persero) PT Pupuk Indonesia (Persero) BOD-1 Assessment Center Briefing Activity	11 Oktober 2022 October 11, 2022	PT Pupuk Indonesia
		Berbagi Sharing	*Sharing Knowledge* Manajemen Aset Asset Management Knowledge Sharing	12 November 2022 November 12, 2022	PT Pupuk Indonesia
		Pelatihan Training	Pemutakhiran Kompetensi Kepemimpinan dan Asesmen Kompetensi untuk BOD-1 Pupuk Indonesia Grup (Lanjutan) Leadership Competency Update and Competency Assessment for BOD-1 Pupuk Indonesia Group (Continued)	14 November 2022 November 14, 2022	PT Pupuk Indonesia

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Eduction and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
		Berbagi Sharing	*Sharing Session* "Rencanakan Masa Tua Bahagia" Sharing Session "Plan for a Happy Old Age"	21 November 2022 November 21, 2022	PT PUpuk Indonesia
Wono Budi Tjahyono	Direktur Keuangan & Manajemen Risiko Director of Finances & Risk Management	Webinar	Internalisasi Pelaporan LHKPN Transparansi dan Akurasi Pelaporan LHKPN sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Internalization of LHKPN Reporting Transparency and Accuracy of LHKPN Reporting as an Effort to Prevent Corruption	21 Januari 2022 January 21, 2022	PT Pupuk Indonesia & KPK
		Konferensi Conferences	IFA Strategic Forum 2022, Washington	31 Oktober 2022 October 31, 2022	IDF Institutions
Sekretaris Dewan Komisaris | Secretary of the Board of Commissioners					
Gempita Pratiwi	Sekretaris Dewan Komisaris Secretary of the Board of Commissioners	Webinar	Internalisasi Pelaporan LHKPN Transparansi dan Akurasi Pelaporan LHKPN sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Internalization of LHKPN Reporting Transparency and Accuracy of LHKPN Reporting as an Effort to Prevent Corruption	21 Januari 2022 January 21, 2022	PT Pupuk Indonesia & KPK
		Sertifikasi Certification	Certified Risk Management Officer (CRMO)	21 Maret 2022 March 21, 2022	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko, Global Integrated Risk Management Association
		Pelatihan Training	Webinar Digital Transformation & Cyber (Session III)	13 Juni 2022 June 13, 2022	Indonesia Risk Manajemen Institute
Komite Audit | Audit Committee					
Christine Tjen	Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	Webinar	Internalisasi Pelaporan LHKPN Transparansi dan Akurasi Pelaporan LHKPN sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Internalization of LHKPN Reporting Transparency and Accuracy of LHKPN Reporting as an Effort to Prevent Corruption	21 Januari 2022 January 21, 2022	PT Pupuk Indonesia & KPK
		Konferensi Conferences	Konferensi Nasional IKAI *Leveraging the Roles of Audit Committee* IKAI National Conference Leveraging the Roles of Audit Committee	26 Januari 2022 January 26, 2022	IKAI
		Webinar	Webinar Proses Pembentukan dan Klasifikasi Perusahaan *Holding* Webinar on Holding Company Formation Process and Classification	15 Februari 2022 February 15, 2022	PT Pupuk Indonesia
		Pelatihan Training	Webinar Digital Transformation & Cyber (Session III)	13 Juni 2022 June 13, 2022	Indonesia Risk Manajemen Institute
		Lokakarya Workshop	*Workshop* Bimbingan Teknis Dunia Usaha Berintegritas Kolaborasi KPK dan PI Workshop on Technical Guidance for Business World with Integrity Collaboration between KPK and PI	2 Agustus 2022 August 2, 2022	KPK & PIHC
R.M Wiratmoko Prasidhanto	Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	Konferensi Conferences	Konferensi Nasional IKAI *Leveraging the Roles of Audit Committee* IKAI National Conference Leveraging the Roles of Audit Committee	26 Januari 2022 January 26, 2022	IKAI

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Eduction and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
		Pelatihan Training	Webinar Digital Transformation & Cyber (Session III)	13 Juni 2022 June 13, 2022	Indonesia Risk Manajemen Institute
		Lokakarya Workshop	*Workshop* Bimbingan Teknis Dunia Usaha Berintegritas Kolaborasi KPK dan PI Workshop on Technical Guidance for Business World with Integrity Collaboration between KPK and PI	2 Agustus 2022 August 2, 2022	KPK & PIHC
Komite PMR & GCG | PMR & GCG Committee					
Riza Azmi	Komisaris Anggota Komite PMR & GCG Commissioner Member of PMR & GCG	Webinar	Webinar Proses Pembentukan dan Klasifikasi Perusahaan *Holding* Webinar on Holding Company Formation Process and Classification	15 Februari 2022 February 15, 2022	PT Pupuk Indonesia
		Pelatihan Training	Webinar Digital Transformation & Cyber (Session III)	13 Juni 2022 June 13, 2022	Indonesia Risk Manajemen Institute
		Lokakarya Workshop	*Workshop* Bimbingan Teknis Dunia Usaha Berintegritas Kolaborasi KPK dan PI Workshop on Technical Guidance for Business World with Integrity Collaboration between KPK and PI	2 Agustus 2022 August 2, 2022	KPK & PIHC
Sekretaris Perusahaan | Corporate Secretary					
Tedy Nawardin*	SVP Sekretaris Perusahaan SVP Corporate Secretary	Lokakarya Workshop	*Workshop* Penyusunan *Business Plan* PI Grup BOD-1 *Batch* 2 Business Plan Preparation Workshop PI Group BOD-1 Batch 2	13 Januari 2022 January 13, 2022	PT Pupuk Indonesia
		Berbagi Sharing	Paparan Ekspektasi Manajemen dengan Direktur SDM TK & Manajemen Risiko Exposure to Management Expectations with the Director of Kindergarten HR & Risk Management	17 Januari 2022 January 17, 2022	PT Pupuk Indonesia
		Webinar	Webinar Proses Pembentukan dan Klasifikasi Perusahaan *Holding* Webinar on Holding Company Formation Process and Classification	15 Februari 2022 February 15, 2022	PT Pupuk Indonesia
		Berbagi Sharing	Sharing Session "Value Creation Through Digital Transformation"	4 Maret 2022 March 4, 2022	PT Pupuk Indonesia
		Berbagi Sharing	Webinar Online "Excellent Public Speaking and Impactfull Presentation Skills"	15 Maret 2022 March 15, 2022	PT Pupuk Indonesia
		Pelatihan Training	Webinar *Legal Compliance* & Tindak Pidana Korporasi Legal Compliance & Corporate Crime Webinar	17 Maret 2022 March 17, 2022	Indonesia Training Institute & Consulting Services (Intrinsics)
		Berbagi Sharing	Program Motivasi dan *Treatment Softskill "Mindfulness"* Silaturahmi keluarga besar Direktorat SDM, TK, & MR Motivation Program and Softskill Treatment "Mindfulness" Big family gathering of Directorate of HR, TK, & MR	13 April 2022 April 13, 2022	PT Pupuk Indonesia
		Pelatihan Training	Training Soft Skills for Grade 1-3	22 Juli 2022 July 22, 2022	PT Pupuk Indonesia
		Berbagi Sharing	Kegiatan AKHLAK BUMN Muda & Srikandi *Talk Series* Pupuk Indonesia Grup Tema Adaptif & Kolaboratif AKHLAK BUMN Muda & Srikandi Talk Series Pupuk Indonesia Group Activities Adaptive & Collaborative Theme	28 Juli 2022 July 28, 2022	PT Pupuk Kalimantan Timur

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Eduction and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
		Lokakarya Workshop	*Workshop* Bimbingan Teknis Dunia Usaha Berintegritas Kolaborasi KPK dan PI Workshop on Technical Guidance for Business World with Integrity Collaboration between KPK and PI	2 Agustus 2022 August 2, 2022	KPK & PIHC
		Sosialisasi Socialization	Kegiatan *Briefing Assessment Center* BOD-1 PT Pupuk Indonesia (Persero) PT Pupuk Indonesia (Persero) BOD-1 Assessment Center Briefing Activities	11 Oktober 2022 October 11, 2022	PT Pupuk Indonesia
		Lokakarya Workshop	Workshop Masyarakat Pembelajaran Anti Korupsi Pupuk Indonesia Group serta Distributor, Vendor dan Pembeli Tahun 2022 Pupuk Indonesia Group Anti-Corruption Learning Community Workshop and Distributors, Vendors and Buyers in 2022	15 November 2022 November 15, 2022	BPKP
		Pelatihan Training	Pemutakhiran Kompetensi Kepemimpinan dan Asesmen Kompetensi untuk BOD-1 Pupuk Indonesia Group (Lanjutan) Leadership Competency Update and Competency Assessment for BOD-1 Pupuk Indonesia Group (Continued)	14 November 2022 November 14, 2022	PT Pupuk Indonesia
		Lokakarya Workshop	*Workshop Performance Coaching* BOD-1 *Batch* 2 Tahun 2022 Performance Coaching Workshop BOD-1 Batch 2 Year 2022	18 November 2022 November 18, 2022	PT Pupuk Indonesia
		Internalisasi Internalization	Internalisasi Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan LHKPN sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Internalization of Transparency and Accountability of LHKPN Reporting as an Effort to Prevent Corruption	28 November 2022 November 28, 2022	Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
		Berbagi Sharing	Sharing Session Internal Leader's Talk AKHLAK	13 Desember 2022 December 13, 2022	PT Pupuk Indonesia
		Pelatihan Training	Pelatihan Purna Bakti Pupuk Indonesia Tahun 2022 Pupuk Indonesia's 2022 After-Service Training	19 Desember 2022 December 19, 2022	PT Pupuk Indonesia
Wijaya Laksana**	SVP Sekretaris Perusahaan SVP Corporate Secretary	Lokakarya Workshop	Persuasive Communication	14-15 Maret 2023 March 14-15, 2023	PT Pupuk Indonesia
		Pelatihan Training	Performance Coaching Practice	10 April 2023 April 10, 2023	PT Pupuk Indonesia

* Masa jabatan berakhir pada 1 Maret 2023 | Term of office ended on March 1, 2023
** Masa jabatan mulai pada 1 Maret 2023 | Term of office started on March 1, 2023

Audit Internal/Satuan Pengawasan Intern | Internal Audit/Internal Control Unit

Yulius Sudaryoko	SVP Satuan Pengawasan Intern SVP Internal Control Audit	Pelatihan Training	Pelatihan Infografis dengan Powerpoint Training on Infographics with Powerpoint	11 Maret 2022 March 11, 2022	PT Pupuk Indonesia
		Berbagi Sharing	Webinar Online "Excellent Public Speaking and Impactfull Presentation Skills"	15 Maret 2022 March 15, 2022	PT Pupuk Indonesia
		Berbagi Sharing	*Sharing Session* "Bedah Buku Unboss" Sharing Session "Unboss Book Review"	31 Maret 2022 March 31, 2022	PT Pupuk Indonesia
		Berbagi Sharing	Talkshow Digitalization and Crowdfunding in Agricultural Business	11 Juli 2022 July 11, 2022	PT Pupuk Indonesia

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Eduction and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
		Lokakarya Workshop	*Workshop* Bimbingan Teknis Dunia Usaha Berintegritas Kolaborasi KPK dan PI Workshop on Technical Guidance for Business World with Integrity Collaboration between KPK and PI	2 Agustus 2022 August 2, 2022	KPK & PIHC
		Sosialisasi Sociolization	Kegiatan *Briefing Assessment Center* BOD-1 PT Pupuk Indonesia (Persero) PT Pupuk Indonesia (Persero) BOD-1 Assessment Center Briefing Activity	11 Oktober 2022 October 11, 2022	PT Pupuk Indonesia
		Lokakarya Workshop	*Workshop* Penyusunan *Business Plan* BOD-1 *Batch* 1 Tahun 2022 Workshop on Preparation of Business Plan BOD-1 Batch 1 Year 2022	12 November 2022 November 12, 2022	PT Pupuk Indonesia
		Pelatihan Training	Pemutakhiran Kompetensi Kepemimpinan dan Asesmen Kompetensi untuk BOD-1 Pupuk Indonesia Grup (Lanjutan) Leadership Competency Update and Competency Assessment for BOD-1 Pupuk Indonesia Group (Continued)	14 November 2022 November 14, 2022	PT Pupuk Indonesia
		Lokakarya Workshop	*Workshop Performance Coaching* BOD-1 *Batch* 1 Tahun 2022 BOD-1 Performance Coaching Workshop Batch 1 Year 2022	15 November 2022 November 15, 2022	PT Pupuk Indonesia
		Internalisasi Internalization	Internalisasi Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan LHKPN sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Internalization of Transparency and Accountability of LHKPN Reporting as an Effort to Prevent Corruption	28 November 2022 November 28, 2022	Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
		Berbagi Sharing	Sharing Session Internal Leader's Talk AKHLAK	13 Desember 2022 December 13, 2022	PT Pupuk Indonesia
		Pelatihan Training	Pelatihan Purna Bakti Pupuk Indonesia Tahun 2022 Pupuk Indonesia After-Service Training in 2022	19 Desember 2022 December 19, 2022	PT Pupuk Indonesia
Manajemen Risiko | Risk Management					
Ahmad Diponegoro	SVP Manajemen Risiko	Berbagi Sharing	Paparan Ekspektasi Manajemen dengan Direktur SDM TK & Manajemen Risiko Management Expectations Exposure with Director of HR TK & Risk Management	17 Januari 2022 January 17, 2022	PT Pupuk Indonesia
		Webinar	Internalisasi Pelaporan LHKPN Transparansi dan Akurasi Pelaporan LHKPN sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Internalization of LHKPN Reporting Transparency and Accuracy of LHKPN Reporting as an Effort to Prevent Corruption	21 Januari 2022 January 21, 2022	PT Pupuk Indonesia & KPK
		Pelatihan Training	*Training* Manajemen Risiko Kredit Pupuk Indonesia Grup Credit Risk Management Training Pupuk Indonesia Group	7 Februari 2022 February 7, 2022	PT Pupuk Indonesia
		Lokakarya Workshop	*Workshop* Penyusunan *Risk Control Self Assessment* (RCSA) RTM RKAP Workshop on the Preparation of Risk Control Self Assessment (RCSA) RTM RKAP	21 Februari 2022 February 21, 2022	PT Pupuk Indonesia

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Eduction and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
		Pelatihan Training	Pelatihan Infografis dengan Powerpoint Training on Infographics with Powerpoint	11 Maret 2022 March 11, 2022	PT Pupuk Indonesia
		Pelatihan Training	Webinar Legal Compliance & Tindak Pidana Korporasi Legal Compliance & Corporate Crimes Webinar	17 Maret 2022 March 17, 2022	Indonesia Training Institute & Consulting Services (Intrinsics)
		Berbagi Sharing	Program Motivasi dan *Treatment Softskill "Mindfulness"* Silaturahmi keluarga besar Direktorat SDM, TK, & MR Motivation Program and Softskill Treatment "Mindfulness" Big family gathering of Directorate of HR, TK, & MR	13 April 2022 April 13, 2022	PT Pupuk Indonesia
		Pelatihan Training	Training Soft Skills for Grade 1-3	22 Juli 2022 July 22, 2022	PT Pupuk Indonesia
		Pelatihan Training	*Workshop Stress Test* Manajemen Risiko PI Grup PI Group Risk Management Stress Test Workshop	4 Agustus 2022 August 4, 2022	PT Pupuk Indonesia
		Sosialisasi Socialization	Kegiatan *Briefing Assessment Center* BOD-1 PT Pupuk Indonesia (Persero) PT Pupuk Indonesia (Persero) BOD-1 Assessment Center Briefing Activity	11 Oktober 2022 October 11, 2022	PT Pupuk Indonesia
		Lokakarya Workshop	*Workshop Performance Coaching* BOD-1 Batch 3 Tahun 2022 Workshop Performance Coaching BOD-1 Batch 3 of 2022	21 November 2022 November 21, 2022	PT Pupuk Indonesia
		Internalisasi Internalization	Internalisasi Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan LHKPN sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Internalization of Transparency and Accountability of LHKPN Reporting as an Effort to Prevent Corruption	28 November 2022 November 28, 2022	Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
		Lokakarya Workshop	*Workshop* Penyusunan *Business Plan* BOD-1 *Batch* 2 Tahun 2022 Workshop on the Preparation of Business Plan BOD-1 Batch 2 Year 2022	3 Desember 2022 December 3, 2022	PT PUpuk Indonesia
Tata Kelola & Kepatuhan | Governance & Compliance					
Agus Purnomo	VP Governansi Korporat	Webinar	Internalisasi Pelaporan LHKPN Transparansi dan Akurasi Pelaporan LHKPN sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Internalization of LHKPN Reporting Transparency and Accuracy of LHKPN Reporting as an Effort to Prevent Corruption	21 Januari 2022 January 21, 2022	PT Pupuk Indonesia & KPK
		Webinar	Webinar Kesehatan, Pemaparan VIRAL 2022 dan Pengundian VIRAL Desember 2021 Health Webinar, 2022 VIRAL Presentation and December 2021 VIRAL Drawing	27 Januari 2022 January 27, 2022	PT Pupuk Indonesia
		Berbagi Sharing	Sharing Session "Every Leader is a People Leader"	25 Februari 2022 February 25, 2022	PT Pupuk Indonesia

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Eduction and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
		Berbagi Sharing	Sharing Session "Value Creation Through Digital Transformation"	4 Maret 2022 March 4, 2022	PT Pupuk Indonesia
		Berbagi Sharing	Webinar AKHLAK BUMN Muda Talk Series tema Amanah & Kompeten Webinar AKHLAK SOE Young Talk Series with the theme Amanah & Kompeten	22 April 2022 April 22, 2022	PT Pupuk Indonesia
		Berbagi Sharing	Kegiatan AKHLAK BUMN Muda & Srikandi *Talk Series* Pupuk Indonesia Grup Tema Adaptif & Kolaboratif AKHLAK BUMN Muda & Srikandi Talk Series Pupuk Indonesia Group Activities Adaptive & Collaborative Theme	28 Juli 2022 July 28, 2022	PT Pupuk Kalimantan Timur
		Lokakarya Workshop	*Workshop* Bimbingan Teknis Dunia Usaha Berintegritas Kolaborasi KPK dan PI Workshop on Technical Guidance for Business World with Integrity Collaboration between KPK and PI	2 Agustus 2022 August 2, 2022	KPK & PIHC
		Pelatihan Training	*Anticorruption Exclusive Workshop* Doktrin *Fiduciary Duty* di Perseroan Terbatas dan Pertanggung jawaban Pribadi Direksi dan Komisaris terhadap Kerugian Perusahaan (Membangun Perlindungan Hukum di Perusahaan, Mencegah Korupsi & Kerugian Keuangan Negara di BUMN berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2022) Anticorruption Exclusive Workshop Doctrine of Fiduciary Duty in Limited Liability Companies and Personal Liability of Directors and Commissioners for Company Losses (Building Legal Protection in Companies, Preventing Corruption & State Financial Losses in SOEs based on Government Regulation No. 23 of 2022)	29 September 2022 September 29, 2022	Indonesia Training Institute & Consulting Services
		Pelatihan Training	Pelatihan *Online* "Memahami dan Menerapkan ISO 37002" *Whistleblowing Management System* Online Training "Understanding and Implementing ISO 37002" Whistleblowing Management System	10 Oktober 2022 October 10, 2022	VISI INTEGRITAS
		Lokakarya Workshop	*Workshop* Penyusunan *Business Plan* BOD-2 *Batch* 1 Tahun 2022 Workshop on Business Plan Preparation BOD -2 Batch 1 Year 2022	12 November 2022 November 12, 2022	PT Pupuk Indonesia
		Lokakarya Workshop	*Workshop Performance Coaching* BOD-1 & BOD-2 *Batch* tambahan Tahun 2022 Performance Coaching Workshop BOD-1 & BOD-2 Additional Batch Year 2022	25 November 2022 November 25, 2022	PT PUpuk Indonesia
		Pelatihan Training	Workshop Effective Fraud Mitigation	28 November 2022 November 28, 2022	Asia Anti Fraud Manajemen (AAFM)

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Eduction and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
		Internalisasi Internalization	Internalisasi Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan LHKPN sebagai Upaya Pencegahan Korupsi BOD-2 Internalization of Transparency and Accountability of LHKPN Reporting as an Effort to Prevent Corruption BOD-2	29 November 2022 November 29, 2022	Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
Agus Purnomo	VP Governansi Korporat	Berbagi Sharing	*Sharing Session Career Wisdom* oleh Direktur SDM, TK & Manajemen Risiko PT Pupuk Indonesia (Persero) Sharing Session Career Wisdom by Director of HR, TK & Risk Management PT Pupuk Indonesia (Persero)	26 Januari 2022 January 26, 2022	PT Pupuk Indonesia
		Berbagi Sharing	Sharing Session Career Wisdom "The Professionalism"	10 Maret 2022 March 10, 2022	PT Pupuk Indonesia
		Berbagi Sharing	*Sharing Session* "Bedah Buku Unboss" Sharing Session "Unboss Book Review"	31 Maret 2022 March 31, 2022	PT Pupuk Indonesia
		Berbagi Sharing	Program Motivasi dan *Treatment Softskill "Mindfulness"* Silaturahmi keluarga besar Direktorat SDM, TK, & MR Motivation Program and Softskill Treatment "Mindfulness" Big family gathering of Directorate of HR, TK, & MR	13 April 2022 April 13, 2022	PT Pupuk Indonesia
		Pelatihan Training	Pelatihan Penyusunan *Examiner* BEF 2022 BEF 2022 Examiner Training	20 Mei 2022 May 20, 2022	PT Pupuk Indonesia
		Pelatihan Training	Training Soft Skills for Grade 1-3	22 Juli 2022 July 22, 2022	PT Pupuk Indonesia
		Sertifikasi Certification	Pelatihan dan Sertifikasi GRC Profesional (GRCP) GRC Professional (GRCP) Training and Certification	17 Oktober 2022 October 17, 2022	PT Grajosa Resources
		Lokakarya Workshop	Workshop Masyarakat Pembelajaran Antikorupsi Pupuk Indonesia Grup serta Distributor, Vendor dan Pembeli Tahun 2022 Workshop on Anti-Corruption Learning Society Pupuk Indonesia Group and Distributors, Vendors and Buyers in 2022	15 November 2022 November 15, 2022	BPKP
		Berbagi Sharing	*Sharing Session* "Rencanakan Masa Tua Bahagia" Sharing Session "Plan for a Happy Old Age"	21 November 2022 November 21, 2022	PT PUpuk Indonesia
		Webinar	Webinar Kesehatan Infeksi Menular *Pneumonia* dan Pencegahannya Health Webinar Infectious Pneumonia and Its Prevention	1 Desember 2022 December 1, 2022	PT Pupuk Indonesia
		Berbagi Sharing	Sharing Session Internal Leader's Talk AKHLAK	13 Desember 2022 December 13, 2022	PT Pupuk Indonesia

Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM, pada tahun 2022 PI Grup melaksanakan program-program peningkatkan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia, meliputi *in house training, outplant training*, dan pelatihan sertifikasi. *Mandays* Pelatihan sampai dengan bulan Desember 2022 sejumlah 124.453 dengan rincian sebagai berikut.

In order to improve HR competencies, in 2022 PI Group implemented programs to improve the knowledge and skills of Human Resources, including in house training, out-plant training, and certification training. Training Mandays up to December 2022 amounted to 124,453 with the following details.

No.	Perusahaan Company	Realisasi *Mandays* 2022 Mandays 2022 Realization	Realisasi *Mandays* 2021 Mandays 2021 Realization	Realisasi *Mandays* 2020 Mandays 2020 Realization	Realisasi *Mandays* 2019 Mandays 2019 Realization
1	PT Pupuk Indonesia (Persero)	4.997	3.498	3.303	2.840
2	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	39.600	21.644	19.761	38.225
3	PT Pupuk Kujang	11.425	9.394	11.399	12.498
4	PT Pupuk Kalimantan Timur	24.745	18.320	29.955	24.618
5	PT Petrokimia Gresik	17.056	17.425	33.964	26.507
6	PT Pupuk Iskandar Muda	16.878	6.647	7.932	14.189
7	PT Rekayasa Industri	7.575	7.493	11.531	8.868
8	PT Pupuk Indonesia Niaga	696	635	1.119	1.199
9	PT Pupuk Indonesia Logistik	454	388	472	382
10	PT Pupuk Indonesia Utilitas	975	1.070	817	918
11	PT Pupuk Indonesia Pangan	53	74	238	165
Jumlah | Total		**124.453**	**86.588**	**120.491**	**130.409**

TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI
Domestic and Overseas Study Assignments

Perusahaan Company	2022		2021		2020	
	Dalam Negeri Domestic	Luar Negeri Overseas	Dalam Negeri Domestic	Luar Negeri Overseas	Dalam Negeri Domestic	Luar Negeri Overseas
PT Pupuk Indonesia (Persero)	4	3	8	1	5	1
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	2	1	3	-	5	2
PT Pupuk Kalimantan Timur	4	1	-	-	6	2
PT Petrokimia Gresik	8	2	8	3	6	3
PT Pupuk Kujang	3	1	5	1	7	-
PT Pupuk Iskandar Muda	1	1	3	2	6	1
PT Rekayasa Industri	-	-	-	1	4	-
Jumlah | Total	**22**	**9**	**27**	**8**	**38**	**8**

Dalam rangka peningkatan daya saing SDM, Perusahaan merealisasikannya dengan pelaksanaan sertifikasi kompetensi di era global melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Industri Pupuk Indonesia (LSP IPI). LSP IPI telah mensertifikasi karyawan internal, karyawan eksternal dan tenaga pengajar/guru. Dalam 9 (sembilan) tahun terakhir sejumlah 4.136 orang.

In order to increase the competitiveness of human resources, the Company realizes it by implementing competency certification in the global era through the Pupuk Indonesia Industry Professional Certification Institute (LSP IPI). LSP IPI has certified internal employees, external employees and teachers. In the last 9 (nine) years a total of 4,136 people.

RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN 2023

Adapun rencana pengembangan kompetensi karyawan Perusahaan tahun 2023 di antaranya sebagai berikut:

2023 EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT PLAN

The Company's employee competency development plan for 2023 includes the following:

No.	Nama Kegiatan Activity Name	Jenis Pelatihan Type of Training	Tujuan Pelatihan Training Objective	Peserta berdasarkan Level Jabatan Participant by Position LEvel	Jumlah Total
1	*Leadership* Leadership	*Softskill* dan *hardskill* Softskill and hardskill	Menyiapkan calon *leader* dengan kemampuan *leadership* untuk jenjang karir selanjutnya. Preparing prospective leaders with leadership skills for the next career path.	All Grade	5 kegiatan dengan total 74 peserta 5 participants with a total of 74 activities
2	Manajemen Risiko dan *Governance* Risk Management and Governance	*Softskill* dan *hardskill* Softskill and hardskill	Mengidentifikasi keberadaan dan penyebab munculnya risiko dalam upaya pengembangan bisnis. Identify the existence and causes of risks in business development efforts.	All Grade	7 kegiatan dengan total 22 peserta 7 participants with a total of 22 activities
3	Budaya Perusahaan Company Culture	*Softskill* Softskill	Untuk menanamkan budaya AKHLAK demi transformasi *human capital* dan meningkatkan daya saing BUMN menjadi pemain global. To instill a culture of AKHLAK for the transformation of human capital and increase the competitiveness of SOEs to become global players.	All Grade	1 kegiatan dengan total 235 peserta 1 participant with a total of 235 activities
4	Teknologi Informasi Information Technology	*Softskill* dan *hardskill* Softskill and hardskill	Memberikan pemahaman secara menyeluruh tentang pentingnya peran IT dalam baik dalam mendukung layanan yang diberikan kepada *user* maupun sebagai sarana komunikasi internal perusahaan. Provides a thorough understanding of the importance of the role of IT in both supporting the services provided to users and as a means of internal corporate communication.	All Grade	4 kegiatan dengan total 6 peserta 4 participants with a total of 6 activities
5	Kesehatan dan Keselamatan Kerja Occupational Health and Safety	*Softskill* Softskill	Meningkatkan *awareness* tentang kesehatan dan keselamatan di lingkungan Perusahaan. Increase awareness of health and safety within the Company.	All Grade	6 kegiatan dengan total 218 peserta 6 participants with a total of 218 activities
6	Keuangan dan Audit Finance and Audit	*Softskill* dan *hardskill* Softskill and hardskill	Meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan perusahaan sehingga dapat merencanakan dan mengendalikan keuangan perusahaan. Increase knowledge about the company's financial management so that it can plan and control the company's finances.	All Grade	8 kegiatan dengan total 71 peserta 8 participants with a total of 71 activities
7	Pemasaran dan Distribusi Marketing and Distribution	*Softskill* dan *hardskill* Softskill and hardskill	Meningkatkan kinerja *sales, marketing*, dan distribusi dengan optimal. Improve sales, marketing, and distribution performance optimally.	All Grade	5 kegiatan dengan total 21 peserta 5 participants with a total of 21 activities
8	Sumber Daya Manusia Human Resources	*Softskill* dan *hardskill* Softskill and hardskill	Meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan sumber daya manusia dalam Perusahaan. Improve understanding of human resource management in the Company.	All Grade	10 kegiatan dengan total 384 peserta 10 participants with a total of 384 activities
9	Sertifikasi Certification	*Hardskill* Hardskill	Memastikan kompetensi seseorang yang telah didapatkan melalui pembelajaran, pelatihan, maupun pengalaman kerja. Ensuring a person's competence that has been obtained through learning, training, and work experience.	All Grade	12 kegiatan dengan total 40 peserta 12 participants with a total of 40 activities
10	Sistem Manajemen dan Prosedur Management System and Procedures	*Hardskill* Hardskill	Meningkatkan pemahaman mengenai usaha mengelola dengan cara optimal terhadap faktor-faktor produksi atau sumber seperti manusia, tenaga kerja, mesin dan bahan baku yang ada. Improve understanding of efforts to manage in an optimal way the factors of production or sources such as humans, labor, machinery and existing raw materials.	All Grade	6 kegiatan dengan total 43 peserta 6 participants with a total of 43 activities
11	Kegiatan Pembelajaran Lainnya Other Leaning Activities	*Softskill* dan *hardskill* Softskill and hardskill	Meningkatkan ketrampilan dan kompetensi karyawan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. Improve employee skills and competencies in accordance with the needs of the Company.	All Grade	8 kegiatan dengan total 146 peserta 8 participants with a total of 146 activities

Pemegang Saham
Shareholders

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
Shareholder Composition

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid-up Capital (Rp)	(%) Kepemilikan (%) Ownership
Nilai Nominal Saham = Rp1.000.000/lembar saham Nominal Value of Shares = Rp1,000,000/shares			
Pemerintah Republik Indonesia Government of the Republic Indonesia	25.000.000	25.000.000.000.000	100,00%
Total	**25.000.000**	**25.000.000.000.000**	**100,00%**

Keseluruhan saham PT Pupuk Indonesia (Persero) dimiliki oleh Pemerintah Indonesia dengan jumlah kepemilikan saham sebanyak atau senilai Rp25.000.000.000.000.

All shares of PT Pupuk Indonesia (Persero) are owned by the Government of Indonesia with a total shareholding of Rp25,000,000,000,000.

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Share Ownership of the Board of Commissioners and Directors

Manajemen Kunci	Jumlah Total	Key Management
Secara Langsung		**Directly**
Dewan Komisaris	Nihil	Board of Commissioners
Direksi	Nihil	Board of Directors
Secara Tidak Langsung		**Indirectly**
Dewan Komisaris	Nihil	Board of Commissioners
Direksi	Nihil	Board of Directors

INFORMASI TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA/PENGENDALI

Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham utama dan pengendali sekaligus pemilik akhir dari PT Pupuk Indonesia dengan kepemilikan sebesar 100,00%. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Persero (Persero), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dan Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara beserta Lembaran Negara Republik Indonesia; Kuasa Pemegang Saham Perusahaan adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

INFORMATION ON MAJOR/CONTROLLING SHAREHOLDERS

The Government of the Republic of Indonesia is the main and controlling shareholder as well as the ultimate owner of PT Pupuk Indonesia with ownership of 100.00%. Based on Government Regulation No. 41 of 2003 concerning the Delegation of the Position, Duties and Authorities of the Minister of Finance in the Persero Company (Persero), Public Company (PERUM) and Jawatan Company (PERJAN) to the Minister of State-Owned Enterprises and Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises along with the State Gazette of the Republic of Indonesia; the Authorized Shareholder of the Company is the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN).

Daftar Entitas Anak dan Entitas Asosiasi, *Joint Venture* (JV), dan *Special Purpose Vehicle* (SPV)

List of Subsidiaries and Associates, Joint Ventures (JV), and Special Purpose Vehicles (SPV)

ENTITAS ANAK
Subsidiaries

Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Domisili Domicile	Tahun Berdiri Year Established	Status Operasi Operation Status	Kepemilikan Saham Shareholding	Jumlah aset (sebelum eliminasi) (Rp Juta) Total assets (before elimination) (Rp million)	
						2022	2021
Kepemilikan Langsung oleh PT Pupuk Indonesia **Direct Ownership by PT Pupuk Indonesia**							
PT Petrokimia Gresik ("PKG")	Pupuk dan Petrokimia Fertilizers and Petrochemicals	Gresik	1971	Beroperasi komersial sejak 1972 Commercial operation since 1972	99,99%	54.586.025	43.182.763
PT Pupuk Kujang ("PKC")	Pupuk dan Petrokimia Fertilizers and Petrochemicals	Cikampek	1975	Beroperasi komersial sejak 1975 Commercial operation since 1975	99,99%	9.461.078	9.166.614
PT Pupuk Kalimantan Timur ("PKT")	Pupuk dan Petrokimia Fertilizers and Petrochemicals	Bontang	1977	Beroperasi komersial sejak 1985 Commercial operation since 1985	99,99%	43.438.236	33.615.304
PT Pupuk Iskandar Muda ("PIM")	Pupuk dan Petrokimia Fertilizers and Petrochemicals	Aceh	1982	Beroperasi komersial sejak 1982 Commercial operation since 1982	99,99%	7.767.790	5.650.174
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang ("PSP")	Pupuk dan Petrokimia Fertilizers and Petrochemicals	Palembang	2010	Beroperasi komersial sejak 2011 Commercial operation since 2011	99,99%	25.702.954	23.922.756
PT Rekayasa Industri ("Rekind")	Konstruksi/EPC Construction/EPC	Jakarta	1981	Beroperasi komersial sejak 1981 Commercial operation since 1981	95,03%	5.565.363	7.785.388
PT Pupuk Indonesia Niaga ("PI Niaga")	Perdagangan Trading	Jakarta	1970	Beroperasi komersial sejak 1970 Commercial operation since 1970	100,00%	820.379	733.970
PT Pupuk Indonesia Logistik ("PILog")	Pengiriman Shipping	Jakarta	2013	Beroperasi komersial sejak 2013 Commercial operation since 2013	100,00%	654.434	575.383

Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Domisili Domicile	Tahun Berdiri Year Established	Status Operasi Operation Status	Kepemilikan Saham Shareholding	Jumlah aset (sebelum eliminasi) (Rp Juta) Total assets (before elimination) (Rp million)	
						2022	2021
PT Pupuk Indonesia Utilitas ("PIU")	Utilitas Utilities	Jakarta	2014	Beroperasi komersial sejak 2014 Commercial operation since 2014	100,00%	1.637.659	1.651.787
PT Pupuk Indonesia Pangan ("PIP")	Pangan Food	Jakarta	2015	Beroperasi komersial sejak 2015 Commercial operation since 2015	100,00%	194.971	194.175
Kepemilikan Tidak Langsung, melalui PT Petrokimia Gresik ("PKG") **Indirect Ownership, through PT Petrokimia Gresik ("PKG")**							
PT Petrosida Gresik	Produksi, distribusi, dan perdagangan bahan aktif pestisida serta bertindak sebagai distributor pupuk Production, distribution and trading of pesticide active ingredients and acting as a distributor of fertilizers	Gresik	1983	Beroperasi komersial sejak 1983 Commercial operation since 1983	99,99%	990.382	981.407
PT Petrokimia Kayaku	Memproduksi, memformulasi dan memasarkan pestisida Manufacture, formulate and market pesticides	Gresik	1976	Beroperasi komersial sejak 1976 Commercial operation since 1976	60,00%	975.684	886.362
Kepemilikan Tidak Langsung, melalui PT Pupuk Kujang ("PKC") **Indirect Ownership, through PT Pupuk Kujang ("PKC")**							
PT Kawasan Industri Kujang Cikampek	Pengelolaan kawasan industri Industrial estate management	Cikampek	1990	Beroperasi komersial sejak 1990 Commercial operation since 1990	96,19%	70.509	68.594
PT Sintas Kurama Perdana ("SKP")	Industri, perdagangan, jasa dan pergudangan dalam sektor industri kimia dasar Industry, trade, services and warehousing in the basic chemical industry sector	Cikampek	1986	Beroperasi komersial sejak 1988 Commercial operation since 1988	99,00%	52.337	55.466

Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Domisili Domicile	Tahun Berdiri Year Established	Status Operasi Operation Status	Kepemilikan Saham Shareholding	Jumlah aset (sebelum eliminasi) (Rp Juta) Total assets (before elimination) (Rp million)	
						2022	2021
Kepemilikan Tidak Langsung, melalui PT Pupuk Kalimantan Timur ("PKT") **Indirect Ownership, through PT Pupuk Kalimantan Timur ("PKT")**							
PT Kaltim Industrial Estate	Pengelolaan Kawasan Industri Industrial Estate Management	Bontang	1990	Beroperasi komersial sejak 1991 Commercial operation since 1991	99,99%	1.116.187	1.069.340
PT Kaltim Adhiguna Dermaga	Penyedia Tenaga Kerja, Jasa Kontraktor Labor Provider, Contractor Services	Bontang	1988	Beroperasi Operate	51 %	50.140	37.520
PT Kaltim Jasa Security	Penyedia Tenaga Kerja Labor Provider	Bontang	2002	Beroperasi Operate	70%	27.928	24.173
Kepemilikan Tidak Langsung, melalui PT Pupuk Iskandar Muda ("PIM") **Indirect Ownership, through PT Pupuk Iskandar Muda ("PIM")**							
PT PIM Prima Medika	Rumah Sakit Hospital	Lhokseumawe	2017	Beroperasi komersial sejak 2017 Commercial operation since 2017	96,00%	29.600	27.510
Kepemilikan Tidak Langsung, melalui PT Pupuk Sriwidjaja Palembang ("PSP") **Indirect Ownership, through PT Pupuk Sriwidjaja Palembang ("PSP")**							
PT Pusri Agro Lestari ("PAL")	Memproduksi, memformulasi dan memasarkan pestisida dan agrokimia lainnya Manufacture, formulate and market pesticides and other agrochemicals	Jakarta	2015	Beroperasi komersial sejak 2015 Commercial operation since 2015	51,00%	60.829	51.717
Kepemilikan Tidak Langsung, melalui PT Rekayasa Industri ("Rekind") **Indirect Ownership, through PT Rekayasa Industri ("Rekind")**							

Nama Name	**Bidang Usaha** Line of Business	**Domisili** Domicile	**Tahun Berdiri** Year Established	**Status Operasi** Operation Status	**Kepemilikan Saham** Shareholding	**Jumlah aset (sebelum eliminasi) (Rp Juta)** Total assets (before elimination) (Rp million)	
						2022	2021
PT Yasa Industri Nusantara ("YIN")	Perancangan dan perencanaan konstruksi, penyediaan dan pengawasan peralatan dan struktur baja Design and construction planning, supply and supervision of steel equipment and structures	Jakarta	1999	Beroperasi komersial sejak 1999 Commercial operation since 1999	99,67%	140.500	143.886
PT Tracon Industri	Penyedia jasa konsultasi dan perdagangan Consulting and trading services provider	Jakarta	2001	Beroperasi komersial sejak 2001 Commercial operation since 2001	80,00%	430.815	354.821
PT Rekayasa Engineering	Penyedia jasa teknik dan *engineering* Provider of engineering and technical services	Jakarta	2001	Beroperasi komersial sejak 2001 Commercial operation since 2001	80,00%	150.961	178.503
Rekind Malaysia Sdn. Bhd.	Penyedia jasa teknik perancangan dan pengadaan Provider of design and procurement engineering services	Malaysia	2014	Beroperasi komersial sejak 2014 Commercial operation since 2014	100,00%	17.634	33.989
PT Rekind Daya Mamuju	Pembangunan pembangkit tenaga listrik, penjualan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik Power plant construction, power sales and power distribution	Jakarta	2013	Beroperasi komersial sejak 2013 Commercial operation since 2013	90,00%	1.844.027	1.710.921
PT Puspetindo	Industri logam dan permesinan umum General metal and machinery industry	Gresik	1990	Beroperasi komersial sejak 1991 Commercial operation since 1991	91,38%	126.232	131.824
PT Rekayasa Cakrawala Resorces	Penyedia Tenaga Kerja Labor Provider	Jakarta	2006	Beroperasi Operate	51%	114.234	103.459
Tracon Industri Solusindo	EPC Consultant	Jakarta	2019	Beroperasi Operate	98%	11.394	8.922
Recon Sarana Utama	EPC Contractor	Jakarta	2014	Beroperasi Operate	80%	84.720	96.545

Nama Name	**Bidang Usaha** Line of Business	**Domisili** Domicile	**Tahun Berdiri** Year Established	**Status Operasi** Operation Status	**Kepemilikan Saham** Shareholding	**Jumlah aset (sebelum eliminasi) (Rp Juta)** Total assets (before elimination) (Rp million)	
						2022	**2021**
Kepemilikan Tidak Langsung, melalui PT Pupuk Indonesia Niaga ("PI Niaga") **Indirect Ownership, through PT Pupuk Indonesia Niaga ("PI Niaga")**							
PT Sigma Utama	Manufaktur Cat Paint Manufacturing	Cibinong	1980	Beroperasi komersial sejak 1982 Commercial operation since 1982	99,91%	125.841	102.079
Kepemilikan Tidak Langsung, melalui PT Pupuk Indonesia Utilitas ("PIU") **Indirect Ownership, through PT Pupuk Indonesia Utilitas ("PIU")**							
PT Kaltim Daya Mandiri ("KDM")	Produsen listrik dan utilitas Power producers and utilities	Bontang	1995	Beroperasi komersial sejak 2002 Commercial operation since 2002	95,00%	551.929	511.286

PROFIL SINGKAT ENTITAS ANAK/KEPEMILIKAN LANGSUNG OLEH PTPI

PT PETROKIMIA GRESIK ("PKG")

PKG merupakan pabrik pupuk terlengkap di Indonesia, yang pada awal berdirinya disebut Proyek Petrokimia Surabaya. Kontrak pembangunannya ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 1964, dan mulai berlaku pada tanggal 8 Desember 1964. Proyek ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, HM. Soeharto pada tanggal 10 Juli 1972, yang kemudian tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi PT Petrokimia Gresik. Dalam perjalanannya, PT Petrokimia Gresik mengalami perubahan status, pada tahun 1971 sesuai PP No. 35/1971 menjadi Perum, pada tahun 1974 sesuai PP No. 35/1974 jo PP No. 14/1975 berubah menjadi Persero. Berdasarkan PP No. 28/1997 PKG menjadi anggota Holding PTPI.

PKG saat ini menempati areal lebih dari 450 hektar di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Total produksi saat ini mencapai 8,9 juta ton/tahun, terdiri dari produk pupuk sebesar 5 (lima) juta ton/tahun, dan produk non-pupuk sebanyak 3,9 juta ton/tahun. Anak Perusahaan PTPI ini bertransformasi menuju perusahaan Solusi Agroindustri untuk mendukung tercapainya program Ketahanan Pangan Nasional, dan kemajuan dunia pertanian. Jumlah karyawan PKG per 31 Januari 2022 sebanyak 1.937 orang.

Struktur Pemegang Saham PKG adalah PTPI yang memiliki 2.393.033 lembar saham atau senilai Rp2.393.033.000.000 (99,9975%) dan Yayasan Petrokimia Gresik yang memiliki 60 lembar saham atau senilai Rp60.000.000 (0,0025%).

BRIEF PROFILE OF SUBSIDIARIES/DIRECT OWNERSHIP BY PTPI

PT PETROKIMIA GRESIK ("PKG")

PKG is the most comprehensive fertilizer plant in Indonesia, which at the beginning of its establishment was called Petrokimia Surabaya Project. The construction contract was signed on August 10, 1964, and came into effect on December 8, 1964. The project was inaugurated by the President of the Republic of Indonesia, HM. Soeharto on July 10, 1972, which was later designated as the anniversary of PT Petrokimia Gresik. In its journey, PT Petrokimia Gresik experienced a change in status, in 1971 according to PP No. 35/1971 it became a Perum, in 1974 according to PP No. 35/1974 jo PP No. 14/1975 it turned into a Persero. Based on PP No. 28/1997 PKG became a member of the PTPI Holding.

PKG currently occupies an area of more than 450 hectares in Gresik Regency, East Java. Total production currently reaches 8.9 million tons/year, consisting of fertilizer products of 5 (five) million tons/year, and non-fertilizer products of 3.9 million tons/year. This PTPI subsidiary is transforming into an Agroindustry Solutions company to support the achievement of the National Food Security program, and the advancement of the agricultural world. The number of PKG employees as of January 31, 2022 is 1,937 people.

The Shareholder Structure of PKG is PTPI which owns 2,393,033 shares or worth Rp2,393,033,000,000 (99.9975%) and Yayasan Petrokimia Gresik which owns 60 shares or worth Rp60,000,000 (0.0025%).

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM PKG PER 31 DESEMBER 2022
PKG Shareholding Composition as of December 31, 2022

PTPI	99,99%
Yayasan Petrokimia Gresik	0,01%

MANAJEMEN PKG
PKG Management

Jabatan	Nama | Name	Position
Dewan Komisaris		**Board of Commissioners**
Komisaris Utama	T. Nugroho Purwanto	President Commissioner
Komisaris Independen	Indira Chunda Thita	Independent Commissioner
Komisaris	Bin Nahadi	Commissioner
Komisaris	Noer Fajrieansyah	Commissioner
Komisaris Independen	Ammarsjah	Independent Commissioner
Komisaris	Cecep Herawan	Commissioner
Direksi		**Board of Directors**
Direktur Utama	Dwi Satriyo Annurogo	President Director
Direktur Operasi dan Produksi	Digna Jatiningsih	Director of Operations and Production
Direktur Keuangan dan Umum	Budi Wahju Soesilo	Director of Finance and General Affairs

PT PUPUK KUJANG ("PKC")

PKC resmi berdiri pada tanggal 9 Juni 1975, yang memproduksi dan memasarkan pupuk (Urea, NPK, dan Organik) serta bahan kimia lain (Amoniak). Perusahaan berlokasi di Cikampek, Provinsi Jawa Barat, dengan kepemilikan saham PTPI 99,99% dan Yayasan Kesejahteraan Warga Pupuk Kujang 0,01%.

PT PUPUK KUJANG ("PKC")

PKC was officially established on June 9, 1975, which produces and markets fertilizers (Urea, NPK, and Organic) and other chemicals (Ammonia). The company is located in Cikampek, West Java Province, with a share ownership of PTPI 99.99% and Yayasan Kesejahteraan Warga Pupuk Kujang 0.01%.

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM PKC PER 31 DESEMBER 2022
PKC Shareholding Composition as of December 31, 2022

PTPI	99,99%
Yayasan Kesejahteraan Warga Pupuk Kujang	0,01%

MANAJEMEN PKC
PKC Management

Jabatan	Nama | Name	Position
Dewan Komisaris		**Board of Commissioners**
Komisaris Utama	Sripeni Inten Cahyani	President Commissioner
Komisaris	Gati Wibawaningsih	Commissioner
Komisaris	Rachman Ferry Isfianto	Commissioner
Komisaris	Jodie Rooseto	Commissioner
Komisaris Independen	Riad Oscha Chalik	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Mahmud Nurwindu	Independent Commissioner
Direksi		**Board of Directors**
Direktur Utama	Maryadi	President Director
Direktur Operasi dan Produksi	Robert Sarjaka	Director of Operations and Production
Direktur Keuangan dan Umum	Yuni Setyaningrum	Director of Finance and General Affairs

PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR ("PKT")

PKT merupakan salah satu produsen pupuk urea dan NPK terbesar di Asia yang didirikan pada tanggal 7 Desember 1977. Berawal dari fasilitas pabrik pupuk terapung yang dikelola oleh Pertamina, kemudian berdasarkan Keputusan Presiden No. 43 tahun 1975 dan Keputusan Presiden No. 39 tahun 1976 pengelolaannya diserahkan kepada Departemen Perindustrian. Pada tahun 2012, PKT menjadi Anak Perusahaan PTPI. Hingga 31 Desember 2022, komposisi kepemilikan saham PKT adalah PTPI 99,99% dan Yayasan Kesejahteraan Hari Tua Pupuk Kaltim 0,01%.

PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR ("PKT")

PKT is one of Asia's largest producers of urea and NPK fertilizers, established on December 7, 1977. Starting from a floating fertilizer factory facility managed by Pertamina, then based on Presidential Decree No. 43 of 1975 and Presidential Decree No. 39 of 1976 the management was handed over to the Ministry of Industry. In 2012, PKT became a subsidiary of PTPI. As of December 31, 2022, PKT's shareholding composition is PTPI 99.99% and Pupuk Kaltim Old Age Welfare Foundation 0.01%.

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM PKT PER 31 DESEMBER 2022
PKT Shareholding Composition as of December 31, 2022

PTPI	99,99%
Yayasan Kesejahteraan Hari Tua Pupuk Kaltim	0,01%

MANAJEMEN PKT
PKT Management

Jabatan	Nama | Name	Position
Dewan Komisaris		**Board of Commissioners**
Komisaris Utama	Kasdi Subagyono	President Commissioner
Komisaris Independen	Sukardi Rinakit	Independent Commissioner
Komisaris	Musthofa	Commissioner
Komisaris	Sigit Hardwinarto	Commissioner
Komisaris Independen	Eka Sastra	Independent Commissioner
Komisaris	Gustaaf AC Patty	Commissioner
Direksi		**Board of Directors**
Direktur Utama	Rahmad Pribadi	President Director
Direktur Operasi dan Produksi	Hanggara Patrianta	Director of Operations and Production
Direktur Keuangan dan Umum	Qomaruzzaman	Director of Finance and General Affairs

PT PUPUK ISKANDAR MUDA ("PIM")

PIM merupakan Anak Perusahaan PTPI yang memproduksi dan memasarkan pupuk (Urea dan Organik) serta bahan kimia lain (Amoniak). PIM didirikan berdasarkan Akta Notaris Soeleman Ardjasasmita, S.H., No. 54 pada tanggal 24 Februari 1982, dan beberapa kali disempurnakan dan terakhir dengan Akta Notaris Lumassia, S.H., No. 10 tanggal 30 Agustus 2019.

PIM memiliki dua unit pabrik pupuk urea dan ammonia, yaitu pabrik PIM-1 dan PIM-2. Pabrik PIM-1 dengan kapasitas produksi Ammonia sebesar 330.000 ton per tahun dan Urea sebesar 570.000 ton per tahun, dibangun sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 1984, diresmikan pada tanggal 20 Maret 1985 dan beroperasi secara komersil sejak tanggal

PT PUPUK ISKANDAR MUDA ("PIM")

PIM is a subsidiary of PTPI that produces and markets fertilizers (Urea and Organic) and other chemicals (Ammonia). PIM was established based on Notarial Deed of Soeleman Ardjasasmita, S.H., No. 54 on February 24, 1982, and was amended several times and most recently by Notarial Deed of Lumassia, S.H., No. 10 on August 30, 2019.

PIM has two urea and ammonia fertilizer manufacturing units, namely PIM-1 and PIM-2 plants. The PIM-1 plant with ammonia production capacity of 330,000 tons per year and urea of 570,000 tons per year, was built from 1982 to 1984, inaugurated on March 20, 1985 and operated commercially since April 1, 1985. While the PIM-2 plant with

1 April 1985. Sedangkan pabrik PIM-2 dengan kapasitas produksi ammonia sebesar 396.000 ton per tahun dan Urea 570.000 ton per tahun mulai dibangun sejak tanggal 23 Maret 1999 dan beroperasi sejak tanggal 15 Agustus 2005. Kantor Pusat PIM berlokasi di Lhokseumawe, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan kepemilikan saham PTPI 99,99% dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pupuk Iskandar Muda Aceh 0,01%

Ammonia production capacity of 396,000 tons per year and Urea of 570,000 tons per year began construction on March 23, 1999 and has been operating since August 15, 2005. PIM Head Office is located in Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam Province, with share ownership of PTPI 99.99% and Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pupuk Iskandar Muda Aceh 0.01%.

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM PIM PER 31 DESEMBER 2022
PIM Shareholding Composition as of December 31, 2022

PTPI	99,99%
Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pupuk Iskandar Muda	0,01%

MANAJEMEN PIM
PIM Management

Jabatan	**Nama** | Name	Position
Dewan Komisaris		**Board of Commissioners**
Komisaris Utama	Bambang Rantam Sariwanto	President Commissioner
Komisaris	Izedrik Emir Moeis	Commissioner
Komisaris Independen	Marzuki Daud	Independent Commissioner
Direksi		**Board of Directors**
Direktur Utama	Budi Santoso Syarif	President Director
Direktur Operasi dan Produksi	Jaka Kirwanto	Director of Operations and Production
Direktur Keuangan dan Umum	Rochan Syamsul Hadi	Director of Finance and General Affairs

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG ("PSP")

PSP resmi berdiri pada tanggal 12 November 2010, yang memproduksi dan memasarkan pupuk (Urea, NPK, dan Organik) serta bahan kimia lain (Amoniak). Perusahaan berlokasi di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan kepemilikan saham PTPI 99,99% dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan PSP 0,01%.

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG ("PSP")

PSP was officially established on November 12, 2010, which produces and markets fertilizers (Urea, NPK, and Organic) and other chemicals (Ammonia). The company is located in Palembang, South Sumatra Province, with share ownership of PTPI 99.99% and PSP Employee Welfare Foundation 0.01%.

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM PSP PER 31 DESEMBER 2022
PSP Shareholding Composition as of December 31, 2022

PTPI	99,99%
Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Pupuk Siwidjaja Palembang	0,01%

MANAJEMEN PSP
PSP Management

Jabatan	Nama | Name	Position
Dewan Komisaris		**Board of Commissioners**
Komisaris Utama	Setya Utama	President Commissioner
Komisaris	Ali Jamil	Commissioner
Komisaris	Prahoro Yulijanto Nurtjahyo	Commissioner
Komisaris Independen	Amiruddin Nahrawi	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Bambang Supriyambodo	Independent Commissioner
Komisaris	Sally Salamah	Commissioner
Direksi		**Board of Directors**
Direktur Utama	Tri Wahyudi Saleh	President Director
Direktur Operasi dan Produksi	Saifullah Lasindrang	Director of Operations and Production
Direktur Keuangan dan Umum	Filius Yuliandi	Director of Finance and General Affairs

PT REKAYASA INDUSTRI ("REKIND")

Rekind resmi berdiri pada tanggal 12 Agustus 1981, yang bergerak di bidang usaha jasa Engineering, Procurement & Construction. Perusahaan berlokasi di Jakarta, dengan kepemilikan saham PTPI 90,06%, Pemerintah Indonesia 4,97% dan PKT 4,97%.

PT REKAYASA INDUSTRI ("REKIND")

Rekind was officially established on August 12, 1981, which is engaged in the Engineering, Procurement & Construction services business. The company is located in Jakarta, with share ownership of PTPI 90.06%, Government of Indonesia 4.97% and PKT 4.97%.

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM REKIND PER 31 DESEMBER 2022
REKIND Shareholding Composition as of December 31, 2022

PTPI	90,06%
Pemerintah Indonesia | Government of Indonesia	4,97%
PKT	4,97%

MANAJEMEN REKIND
REKIND Management

Jabatan	Nama | Name	Position
Dewan Komisaris		**Board of Commissioners**
Komisaris Utama	Ngakan Timur Antara	President Commissioner
Komisaris	M.M. Restu Hapsari	Commissioner
Komisaris	Doddy Rahadi	Commissioner
Direksi		**Board of Directors**
Direktur Utama	Triyani Utaminingsih	President Director
Direktur Operasi dan Teknologi/ Pengembangan	Yusairi	Director of Operations and Technology/ Development
Plt. Direktur Keuangan dan SDM	Triyani Utaminingsih	Acting Director of Finance and Human Resources

PT PUPUK INDONESIA NIAGA ("PI NIAGA")

PI Niaga merupakan salah satu anggota *holding* PTPI yang memiliki sejarah yang panjang. Semula bernama NV Electro Import, sebuah perusahaan Belanda yang bergerak di bidang usaha kelistrikan, mesin, dan peralatan tehnik. NV Electro Import didirikan pada Tahun 1940-an oleh NV Jacobson van den Berg & Co.

Pada tahun 1961, Pemerintah Indonesia menasionalisasi perusahaan tersebut menjadi PN Yuda Electro. Pada tahun yang sama, perusahaan ini digabung ke dalam PN Tulus Bhakti, dan akhirnya menjadi Divisi III dari perusahaan tersebut. Pada tahun 1964, Divisi III diubah namanya menjadi Divisi Elektro Teknik. Setahun kemudian, Divisi tersebut resmi dipisah menjadi "PN Mega Electro", yang merupakan singkatan dari "Mesin dan Gaya Electro".

Pada tahun 1970, perusahaan ini resmi diubah statusnya menjadi persero. Pada tahun 1977, perusahaan ini mendapat penyertaan modal dari pemerintah berupa aset eks PN Pembangunan Niaga, sehingga perusahaan ini resmi berekspansi ke bisnis perdagangan (trading). Untuk mencerminkan ekspansi tersebut, perusahaan inipun mengubah namanya menjadi "PT Mega Eltra".

Pada tahun 1998, Pemerintah Indonesia resmi menyerahkan mayoritas saham perusahaan ini ke Pupuk Sriwidjaja, sebagai bagian dari upaya pembentukan holding BUMN di bidang pupuk. Per 31 Desember 2022, saham ME dimiliki oleh PTPI 98,73% dan Rekind 1,27%.

Pada tanggal 22 Desember 2022, sesuai dengan keputusan pemegang saham, ME diubah namanya menjadi "PT Pupuk Indonesia Niaga" (PI Niaga).

PT PUPUK INDONESIA NIAGA ("PI NIAGA")

PI Niaga is one of the members of the PTPI holding which has a long history. Originally named NV Electro Import, a Dutch company engaged in the business of electricity, machinery and technical equipment. NV Electro Import was founded in the 1940s by NV Jacobson van den Berg & Co.

In 1961, the Indonesian government nationalized the company into PN Yuda Electro. In the same year, the company was merged into PN Tulus Bhakti, and eventually became Division III of the company. In 1964, Division III was renamed the Electro Engineering Division. A year later, the Division was officially separated into "PN Mega Electro", which stands for "Electro Machines and Styles".

In 1970, the company officially changed its status to a state-owned company. In 1977, the company received capital participation from the government in the form of assets of the former PN Pembangunan Niaga, so that the company officially expanded into the trading business. To reflect this expansion, the company changed its name to "PT Mega Eltra".

In 1998, the Indonesian government officially handed over the majority of the company's shares to Pupuk Sriwidjaja, as part of the effort to form a state-owned holding company in the fertilizer sector. As of December 31, 2022, ME shares were owned by PTPI 98.73% and Rekind 1.27%.

On December 22, 2022, in accordance with the shareholders' decision, ME was renamed as "PT Pupuk Indonesia Niaga" (PI Niaga).

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM PI NIAGA PER 31 DESEMBER 2022
PI Niaga Shareholding Composition as of December 31, 2022

PTPI	99,84%
REKIND	0,16%

MANAJEMEN PI NIAGA
PI Niaga Management

Jabatan	Nama | Name	Position
Dewan Komisaris		**Board of Commissioners**
Komisaris Utama	Eko Suseno Agung Cahyanto	President Commissioner
Komisaris Independen	Naek Parulian Washington	Independent Commissioner
Komisaris	Sandra Firmania	Commissioner
Direksi		**Board of Directors**
Direktur Utama	Hilman Taufik	President Director
Direktur Komersil dan Operasi	Indrajaya	Commercial and Operations Director
Direktur Keuangan dan SDM	Dundi Insan Perlambang	Director of Finance and HR

PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK ("PILOG")

PILOG resmi berdiri pada tanggal 23 Desember 2013, yang bergerak dalam bidang usaha jasa pelayaran dan jasa angkutan laut. Perusahaan berlokasi di Jakarta, dengan kepemilikan saham PTPI 55,77% dan PSP 44,23%.

PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK ("PILOG")

PILOG was officially established on December 23, 2013, which is engaged in the business of shipping services and sea transportation services. The company is located in Jakarta, with share ownership of PTPI 55.77% and PSP 44.23%.

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM PILOG PER 31 DESEMBER 2022
PILOG Shareholding Composition as of December 31, 2022

PTPI	55,77%
REKIND	44,23%

MANAJEMEN PILOG
PILOG Management

Jabatan	Nama | Name	Position
Dewan Komisaris		**Board of Commissioners**
Komisaris Utama	Rudi Rusli	President Commissioner
Komisaris	Dono Prasetyo	Commissioner
Direksi		**Board of Directors**
Direktur Utama	Tentaminarto Tri Februartono	President Director
Direktur Operasional	Hasanal Kemal	Director of Operations
Direktur Administrasi & Keuangan	Priyasdhika	Director of Administration & Finance

PT PUPUK INDONESIA UTILITAS ("PIU")

PIU resmi berdiri pada tanggal 1 Desember 2021 (sebelumnya bernama PT Pupuk Indonesia Energi) resmi berdiri pada tanggal 18 Agustus 2014. PT Pupuk Indonesia Utilitas bergerak dalam bidang usaha industri, perdagangan, dan jasa bidang energi. Perusahaan berlokasi di Jakarta, dengan kepemilikan saham PTPI 60,00%, PKG 10,00%, PKC 5,00%, PKT 10,00%, PIM 5,00%, PSP 7,00%, dan Rekind 3,00%.

PT PUPUK INDONESIA UTILITY ("PIU")

PIU was officially established on December 1, 2021 (previously named PT Pupuk Indonesia Energi) was officially established on August 18, 2014. PT Pupuk Indonesia Utilitas is engaged in the business of industry, trade, and energy services. The company is located in Jakarta, with share ownership of PTPI 60.00%, PKG 10.00%, PKC 5.00%, PKT 10.00%, PIM 5.00%, PSP 7.00%, and Rekind 3.00%.

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM PIU PER 31 DESEMBER 2022
PIU Shareholding Composition as of December 31, 2022

PTPI	60,00%
PKG	10,00%
PKC	5,00%
PKT	10,00%
PIM	5,00%
PSP	7,00%
REKIND	3,00%

MANAJEMEN PIU
PIU Management

Jabatan	Nama | Name	Position
Dewan Komisaris		**Board of Commissioners**
Komisaris Utama	Sumyana Sukandar	President Commissioner
Komisaris	Imam Mujahidin Fahmid	Commissioner
Komisaris	Monica Desideria	Commissioner
Direksi		**Board of Directors**
Direktur Utama	Agus Subekti	President Director
Direktur Operasi	Anis Ernani	Director of Operations
Direktur Keuangan	Nuri Kristiawan	Director of Finance

PT PUPUK INDONESIA PANGAN ("PIP")

PIP resmi berdiri pada tanggal 30 April 2015, yang bergerak dalam bidang perindustrian dan perdagangan di bidang pertanian. Perusahaan berlokasi di Jakarta, dengan kepemilikan saham PTPI 60,00%, PKG 10,00%, PKC 10,00%, PKT 10,00%, dan PSP 10,00%.

PT PUPUK INDONESIA PANGAN ("PIP")

PIP was officially established on April 30, 2015, which is engaged in industry and trade in agriculture. The company is located in Jakarta, with share ownership of PTPI 60.00%, PKG 10.00%, PKC 10.00%, PKT 10.00%, and PSP 10.00%.

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM PIP PER 31 DESEMBER 2022
PIP Shareholding Composition as of December 31, 2022

PTPI	60,00%
PKG	10,00%
PKC	10,00%
PKT	10,00%
PSP	10,00%

MANAJEMEN PIP
PIP Management

Jabatan	**Nama** | Name	Position
Dewan Komisaris		**Board of Commissioners**
Komisaris Utama	Danar Rahmanto	President Commissioner
Direksi		**Board of Directors**
Direktur Utama	Budiono	President Director
Direktur Keuangan	Sefin Martadjaja	Director of Finance

Kronologi Penerbitan dan Pencatatan Saham

Chronology of Share Issuance and Listing

Hingga akhir tahun 2022, Perusahaan tidak melakukan Penawaran Umum Saham melalui bursa efek mana pun. Sebanyak 25.000.000 lembar saham Perusahaan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Sebagai entitas usaha yang mendapatkan modal dari Pemerintah Indonesia, Perusahaan memiliki kewajiban untuk menyampaikan kronologi penerbitan saham sejak awal hingga posisi per 31 Desember 2022. Posisi Modal Disetor PT Pupuk Indonesia per tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp25 triliun dengan jumlah lembar saham sebanyak 25.000.000 lembar bernilai Rp1.000.000 per lembar. Berikut kronologi penerbitan saham dari awal sampai akhir tahun buku.

Until the end of 2022 the Company did not conduct a Public Offering of Shares through any stock exchange. A total of 25,000,000 shares of the Company are owned by the Government of Indonesia. As a business entity that obtains capital from the Government of Indonesia, the Company has an obligation to submit a chronology of share issuance from the beginning to the position as of December 31, 2022. The Paid-up Capital position of PT Pupuk Indonesia as of December 31, 2022 is Rp25 trillion with 25,000,000 shares worth Rp1,000,000 per share. The following is the chronology of share issuance from the beginning to the end of the fiscal year.

Keterangan Description	**Tahun** Year	**Jumlah (Rp juta)** Total (Rp million)	**Akumulasi (Rp juta)** Accumulation (Rp million)	**Akta Notaris** Notarial Deed	**Nama Notaris** Notary's Name	**Pengesahan** Endorsement
Modal Awal Initial Capital	1970	7.000	7.000	Akta No. 4 tanggal 3 Januari 1970 Deed No. 4 dated January 3, 1970	Soeleman Ardjasasmita, S.H.	Menteri Kehakiman No. J.A.5/7/20 Tanggal 7 Februari 1970 Minister of Justice No.J.A.5/7/20 Dated February 7, 1970
Penambahan Additional	1975	24.000	31.000	Akta No. 2 tanggal 1 April 1975 Deed No. 2 dated April 1, 1975	Soeleman Ardjasasmita, S.H.	Menteri Kehakiman No. J.A.5/132/15 Tanggal 17 April 1975 Minister of Justice No. J.A.5/132/15 Dated April 17, 1975
Penambahan Additional	1976	6.000	37.000	Akta No. 62 tanggal 20 Mei 1976 Deed No. 62 dated May 20, 1976	Soeleman Ardjasasmita, S.H.	Menteri Kehakiman No. Y.A.5/317/21 Tanggal 3 Juni 1976 Minister of Justice No. Y.A.5/317/21 Dated June 3, 1976
Penambahan Additional	1981	108.000	145.000	Akta No. 7 tanggal 5 Oktober 1981 Deed No. 7 dated October 5, 1981	Soeleman Ardjasasmita, S.H.	Menteri Kehakiman No. C2206- HT01-04. Th.83 Tanggal 12 Januari 1983 Minister of Justice No. C2206- HT01-04. Th.83 Dated January 12, 1983
Penambahan Additional	1984	55.000	200.000	Akta No. 19 tanggal 20 Juli 1984 Deed No. 19 dated July 20, 1984	Soeleman Ardjasasmita, S.H.	Menteri Kehakiman No. C2546- HT01-04. Th.85 Tanggal 2 Februari 1985 Minister of Justice No. C2546- HT01-04. Th.85 Dated February 2, 1985
Penambahan Additional	1989	870.710	1.570.710	Akta No. 4 tanggal 4 September 1989 Deed No. 4 dated September 4, 1989	Soeleman Ardjasasmita, S.H.	Menteri Kehakiman No. C2778-HT01-04.Th.90 Tanggal 16 Februari 1990 Minister of Justice No. C2778-HT01-04.Th.90 Dated February 16, 1990

Keterangan Description	Tahun Year	Jumlah (Rp juta) Total (Rp million)	Akumulasi (Rp juta) Accumulation (Rp million)	Akta Notaris Notarial Deed	Nama Notaris Notary's Name	Pengesahan Endorsement
Penambahan Additional	1997	1.829.290	2.900.000	Akta No. 14 tanggal 12 September 1997 Deed No. 14 dated September 12, 1997	Imas Fatimah, S.H.	Menteri Kehakiman No. C2-10.682-HT01-04.Th.97 Tanggal 14Oktober 1997 Minister of Justice No. C2-10.682-HT01-04.Th.97 Dated October 14, 1997
Penambahan Additional	2002	6.000	2.906.000	Akta No. 13 tanggal 5 Februari 2002 Deed No. 13 dated February 5, 2002	Imas Fatimah, S.H.	Menteri Kehakiman No. C2-05201-HT01-04.Th.2002 Tanggal 28 Maret 2002 Minister of Justice No. C2-05201-HT01-04.Th.2002 Dated March 28, 2002
Penambahan Additional	2005	957.948	3.863.948	Akta No. 20 tanggal 12 September 2005 Deed No. 20 dated September 12, 2005	Fathiah Helmi, S.H.	Menteri Kehakiman No. C229535-HT01-04.Th.2005 Tanggal 25 Oktober 2005 Minister of Justice No. C229535-HT01-04.Th.2005 Dated October 25, 2005
Penambahan Additional	2008	390.000	4.253.948	Akta No. 6 tanggal 4 Februari 2008 Deed No. 6 dated February 4, 2008	Fathiah Helmi, S.H.	Menteri Hukum & HAM No. AHUAH.01.10.3906 Tanggal 19 Februari 2008 Minister of Law & Human Rights No. AHUAH.01.10.3906 Dated February 19, 2008
Penambahan Additional	2008	35.058	4.289.006	Akta No. 15 tanggal 11 Desember 2008 Deed No. 15 dated December 11, 2008	Fathiah Helmi, S.H.	Menteri Hukum & HAM No. AHUAH.01.10.5826 Tanggal 13 Mei 2009 Minister of Law & Human Rights No. AHUAH.01.10.5826 Dated May 13, 2009
Penambahan Additional	2011	6.321.000	10.610.006	Akta No. 7 tanggal 7 Januari 2011 Deed No. 7 dated January 7, 2011	Fathiah Helmi, S.H.	Menteri Hukum & HAM No. AHU.AH.01.10.02656 Tanggal 18 Januari 2011 Minister of Law & Human Rights No. AHU. AH.01.10.02656 Dated January 18, 2011
Penambahan Additional	2012	1.338.048	11.948.054	Akta No. 11 tanggal 19 Januari 2012 Deed No. 11 dated January 19, 2012	Lumassia, S.H.	Menteri Hukum & HAM No. AHUAH.01.10.08848 Tanggal 13 Maret 2012 Minister of Law & Human Rights No. AHUAH. 01.10.08848 Dated March 13, 2012
Penambahan Additional	2013	951.854	12.899.908	Akta No. 14 tanggal 26 April 2013 Deed No. 14 dated April 26, 2013	Nanda Fauz Iwan, S.H.	Menteri Hukum & HAM No. AHUAH.01.10.17728 Tanggal 7 Mei 2013 Minister of Law & Human Rights No. AHUAH.01.10.17728 Dated May 7, 2013
Penambahan Additional	2018	12.100.092	25.000.000	Akta No. 3 tanggal 24 Oktober 2018 Deed No. 3 dated October 24, 2018	Lumassia, S.H.	Menteri Hukum & HAM No. AHUAH.01.10.24295 Tanggal 6 November 2018 Minister of Law & Human Rights No. AHUAH.01.10.24295 Dated November 6, 2018

Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya

Chronology of Issuance and/or Listing of Another Securities

Perusahaan telah menerbitkan 4 (empat) obligasi yang seluruhnya dicatat di Bursa Efek Indonesia. Rincian kronologi penerbitan obligasi disampaikan dalam tabel di bawah ini:

The Company has issued 4 (four) bonds which are all listed on the Indonesia Stock Exchange. Details of the bond issuance chronology are presented in the table below:

No.	Obligasi Bonds	Tanggal Terbit Date of Issue	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Pokok Obligasi Bond Principal (Rp)	Kode Obligasi Bond Code	Suku Bunga Interest Rate	Peringkat Rating	Status Pembayaran Payment Status
1	Obligasi I tahun 2014 - Seri A Bond I year 2014 - Series A	8 Juli 2014 July 8, 2014	8 Juli 2017 July 8, 2017	568.000.000.000	PIHC01A	9,62%	AAA (idn) dari Fitch Ratings AAA (idn) from Fitch Ratings	Telah Lunas Paid in Full
2	Obligasi I tahun 2014 - Seri B Bond I year 2014 - Series B	8 Juli 2014 July 8, 2014	8 Juli 2019 July 8, 2019	1.131.000.000.000	PIHC01B	9,95%	AAA (idn) dari Fitch Ratings AAA (idn) from Fitch Ratings	Telah Lunas Paid in Full
3	Obligasi Berkelanjutan I Tahap I - Seri A Shelf Registration Bond I Phase I - Series A	12 Juli 2017 July 12, 2017	12 Juli 2020 July 12, 2020	1.484.500.000.000	PIHC01ACN1	7,90%	AAA (idn) dari Fitch Ratings AAA (idn) from Fitch Ratings	Telah Lunas Paid in Full
4	Obligasi Berkelanjutan I Tahap I - Seri B Shelf Registration Bond I Phase I - Series B	12 Juli 2017 July 12, 2017	12 Juli 2024 July 12, 2024	2.085.000.000.000	PIHC01BCN1	8,60%	AAA (idn) dari Fitch Ratings AAA (idn) from Fitch Ratings	Aktif on
5	Obligasi Berkelanjutan I Tahap II - Seri A Shelf Registration Bond I Phase II - Series A	9 November 2017 November 9, 2017	9 November 2020 November 9, 2020	2.601.500.000.000	PIHC01ACN2	7,50%	AAA (idn) dari Fitch Ratings AAA (idn) from Fitch Ratings	Telah Lunas Paid in Full
6	Obligasi Berkelanjutan I Tahap II - Seri B Shelf Registration Bond I Phase II - Series B	9 November 2017 November 9, 2017	9 November 2022 November 9, 2022	1.774.000.000.000	PIHC01BCN2	7,90%	AAA (idn) dari Fitch Ratings AAA (idn) from Fitch Ratings	Telah Lunas Paid in Full
7	Obligasi Berkelanjutan II Tahap I - Seri A Sustainable Bonds II Phase I - Series A	3 September 2020 September 3, 2020	3 September 2023 September 3, 2023	1.146.825.000.000	PIHC02ACN1	7,00%	AAA (idn) dari Fitch Ratings AAA (idn) from Fitch Ratings	Aktif on
8	Obligasi Berkelanjutan II Tahap I - Seri B Sustainable Bonds II Phase I - Series B	3 September 2020 September 3, 2020	3 September 2025 September 3, 2025	857.835.000.000	PIHC02BCN1	7,70%	AAA (idn) dari Fitch Ratings AAA (idn) from Fitch Ratings	Aktif on
9	Obligasi Berkelanjutan II Tahap I - Seri C Sustainable Bonds II Phase I - Series C	3 September 2020 September 3, 2020	3 September 2027 September 3, 2027	431.850.000.000	PIHC02CCN1	8,30%	AAA (idn) dari Fitch Ratings AAA (idn) from Fitch Ratings	Aktif on

No.	Obligasi Bonds	Tanggal Terbit Date of Issue	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Pokok Obligasi Bond Principal (Rp)	Kode Obligasi Bond Code	Suku Bunga Interest Rate	Peringkat Rating	Status Pembayaran Payment Status
10	Obligasi Berkelanjutan II PT Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri A Sustainable Bonds II PT Pupuk Indonesia Phase II Year 2021 Series A	10 Maret 2021 March 10, 2021	10 Maret 2024 March 10, 2024	350.000.000.000	PIHC02ACN2	5,60%	AAA (idn) dari Fitch Ratings AAA (idn) from Fitch Ratings	Aktif on
11	Obligasi Berkelanjutan II PT Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri B Sustainable Bonds II PT Pupuk Indonesia Phase II Year 2021 Series B	10 Maret 2021 March 10, 2021	10 Maret 2026 March 10, 2026	1.600.000.000.000	PIHC02BCN2	6,20%	AAA (idn) dari Fitch Ratings AAA (idn) from Fitch Ratings	Aktif on
12	Obligasi Berkelanjutan II PT Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri C Sustainable Bonds II PT Pupuk Indonesia Phase II Year 2021 Series C	10 Maret 2021 March 10, 2021	10 Maret 2028 March 10, 2028	800.000.000.000	PIHC02CCN2	7,20%	AAA (idn) dari Fitch Ratings AAA (idn) from Fitch Ratings	Aktif on
	Jumlah Penerbitan Obligasi All Time			**14.830.510.000.000**				
	Jumlah Utang Obligasi per 31 Desember 2022 **Total Bonds Payable as of December 31, 2022**			**7.271.510.000.000**				

10 PEMEGANG OBLIGASI TERBESAR
10 Largest Bondholders

No.	Nama Investor Investor Name	Status Investor Investor Status	Jumlah Total (Rp)
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Bank	921.000.000.000
2	PT Bank Central Asia Tbk	Bank	900.000.000.000
3	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Bank	889.000.000.000
4	PT Bank KEB Hana Indonesia	Bank	550.000.000.000
5	PT Taspen	Badan Usaha Tetap Permanent Establishment	300.000.000.000
6	DJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua	Badan Usaha Tetap Permanent Establishment	300.000.000.000
7	Dana Pensiun Telkom	Dana Pensiun | Pension Fund	300.000.000.000
8	Dana Pensiun Bank Indonesia	Dana Pensiun | Pension Fund	215.000.000.000
9	Dana Pensiun Bank Mandiri	Dana Pensiun | Pension Fund	194.000.000.000
10	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Bank	192.000.000.000

STATUS INVESTOR PEMEGANG OBLIGASI
Investor Status Bondolders

Status Investor	Jumlah | Total (Rp)	Investor Status
Bank Domestik	3.694.000.000.000	Domestic Banks
Dana Pensiun Pension Fund	1.497.500.000.000	Pension Fund Pension Fund
Badan Usaha Non Tax Non-Tax Business Entity	700.000.000.000	Non Tax Non-Tax Business Entity
Insurance NPWP	529.000.000.000	Insurance NPWP
Mutual Fund	359.500.000.000	Mutual Fund
Yayasan NPWP NPWP Foundation	184.000.000.000	Foundation NPWP NPWP Foundation
Koperasi Cooperative	131.000.000.000	Cooperative Cooperative
Government of Indonesia	100.000.000.000	Government of Indonesia
Individual Domestic Domestic Individual	32.510.000.000	Individual Domestic Domestic Individual
Jamsostek JHT	25.000.000.000	Jamsostek JHT
Lainnya	19.000.000.000	More
Jumlah utang obligasi per 31 Desember 2022	**7.271.510.000.000**	**Total bond debt as of December 31, 2022**

REALISASI PENGGUNAAN DANA
Realization of the Use of Funds

Subjek Subject	**Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017** Shelf Registration Bond I Phase I Year 2017	**Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017** Shelf Registration Bond I Phase II Year 2017	**Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2020** Shelf Registration Bond II Phase I Year 2020	**Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021** Sustainable Bonds II Phase II Year 2021
Penggunaan Dana Use of Funds	16% *Refinancing* Obligasi I Tahun 2014 Seri A 16% Refinancing of Bonds I Year 2014 Series A	23% *Refinancing* Pinjaman Perbankan PT Pupuk Kalimantan Timur 23% Refinancing of Banking Loan PT Pupuk Kalimantan Timur	33% *Refinancing* Pinjaman Perbankan Investasi Amurea II dan *Revamping* PA PT Petrokimia Gresik 33% Refinancing Amurea II Investment Banking Loan and PA Revamping PT Petrokimia Gresik	*Refinancing* atas Kredit Investasi Perbankan Amurea II PT Petrokimia Gresik Refinancing of Amurea II Investment Banking Loan of PT Petrokimia Gresik
	84% *Refinancing* Pinjaman Perbankan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 84% Refinancing of Banking Loan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	12% *Refinancing* Pinjaman Perbankan PT Pupuk Kujang 12% Refinancing of PT Pupuk Kujang Banking Loan	26% *Refinancing* Kredit Modal Kerja Perbankan PT Pupuk Iskandar Muda 26% Refinancing of Working Capital Banking Loan PT Pupuk Iskandar Muda	*Refinancing* Kredit Modal Kerja Perbankan PT Pupuk Indonesia Logistik Refinancing of PT Pupuk Indonesia Logistik's Banking Working Capital Loan
		19% *Refinancing* Pinjaman Perbankan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 19% Refinancing of Banking Loan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	41% *Refinancing* Obligasi untuk Modal Kerja PT Rekayasa Industri 41% Bond Refinancing for Working Capital PT Rekayasa Industri	
		27% *Refinancing* Pinjaman Perbankan PT Rekayasa Industri 27% Refinancing of Banking Loan PT Rekayasa Industri		

Subjek Subject	**Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017** Shelf Registration Bond I Phase I Year 2017	**Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017** Shelf Registration Bond I Phase II Year 2017	**Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2020** Shelf Registration Bond II Phase I Year 2020	**Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021** Sustainable Bonds II Phase II Year 2021
		6% *Refinancing* Pinjaman Perbankan PT Mega Eltra 6% Refinancing of Banking Loan PT Mega Eltra		
		13% *Refinancing* Pinjaman Perbankan PT Petrokimia Gresik 13% Refinancing Banking Loan PT Petrokimia Gresik		

KEANGGOTAAN PERUSAHAAN DALAM ASOSIASI ATAU ORGANISASI
Company Membership in Associations or Organizations

Nama Organisasi/Asosiasi Organization/Association Name	**Ruang Lingkup** Scope	**Posisi Keikutsertaan** Participation Position
Asosiasi Pengusaha Pupuk Indonesia (APPI) Indonesian Fertilizer Entrepreneurs Association (APPI)	Nasional National	Ketua Presidium Chairman of the Presidium
Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Indonesian Chamber of Commerce (KADIN)	Nasional National	Anggota Member
Lembaga Sertifikasi Industri Pupuk Indonesia Indonesia Fertilizer Industry Certification Institute	Nasional National	Anggota Member
International Fertilizer Association (IFA) International Fertilizer Association (IFA)	Internasional International	Anggota Member

Kantor Akuntan Publik

Public Accounting Firm

Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	
Alamat Address	WTC 3, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Kuningan, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920	WTC 3, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Kuningan, Karet Semanggi, Setiabudi District, South Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta 12920
Rekan Partner	Toto Harsono	Toto Harsono
Tahun Audit Audit Year	Tahun Buku 2022	Financial Year 2022
Periode Penugasan Assignment Period	21 September 2022–28 Februari 2023 (*Addendum*) sampai dengan 14 April 2023	September 21, 2022–February 28, 2023 (Addendum) until April 14, 2023
Jasa yang Diberikan Services Provided	1. Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PI, Anak Perusahaan dan Cucu Perusahaan (Pupuk Indonesia Grup) Tahun Buku 2022. 2. Audit atas Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 untuk PKG, PKC, PKT, PIM, PSP dan REKIND sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) serta melakukan perikatan kompilasi untuk Laporan Keuangan Gabungan UMK PI (yang terdiri dari Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan UMK PKG, PKC, PKT, PIM, PSP dan REKIND).	1. Audit of Consolidated Financial Statements of PI, Subsidiaries and Grandchildren (Pupuk Indonesia Group) for Financial Year 2022. 2. Audit of the Financial Statements of the Implementation of the Micro and Small Enterprises (MSEs) Funding Program for the year ended December 31, 2021 for PKG, PKC, PKT, PIM, PSP and REKIND in accordance with the Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability (SAK-ETAP) and conduct a compilation engagement for the Joint Financial Statements of PI MSEs (which consists of the Financial Statements of the Implementation of the MSE Funding Program of PKG, PKC, PKT, PIM, PSP and REKIND).
Jasa Lainnya Other Services	1. Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal. 2. Reviu atas Laporan Evaluasi Kinerja Perseroan. 3. Reviu atas Laporan Penilaian Tingkat Pencapaian KPI Perseroan. 4. Reviu atas Laporan Evaluasi Status Tindak Lanjut Arahan RUPS Perseroan serta arahan Dewan Komisaris. 5. Evaluasi *Management Letter* atas pengendalian internal. 6. Melaksanakan prosedur yang disepakati atas Paket Informasi dan Struktur Korporasi untuk Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia.	1. Audit of Compliance with Laws and Regulations and Internal Control. 2. Review of the Company's Performance Evaluation Report. 3. Review of the Company's KPI Achievement Level Assessment Report. 4. Review of the Evaluation Report on the Follow-up Status of the Company's GMS Direction and the direction of the Board of Commissioners. 5. Evaluation of Management Letter on internal control. 6. Implement agreed procedures on Information Package and Corporate Structure for the Ministry of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia.
Biaya Cost	Rp20.700.000.000 (exc. PPN)	Rp20,700,000,000 (exc. VAT)

Lembaga dan Profesi Penunjang

Supporting Institutions and Professions

Nama Name	**Alamat** Address	**Jenis dan Bentuk Jasa** Types and Forms of Services	**Biaya (%)** Cost (%)	**Periode Penugasan** Assignment Period
Bank Mega	Menara Bank Mega, Lantai 16 Jl. Kapten Tendean 12-14A Jakarta 12970, Indonesia Telepon/Telephone: (021) 79175000 Faksimili/Facsimile: (021) 7990720 waliamanat@bankmega.com www.bankmega.com	Wali Amanat Penerbitan Obligasi PUB II Tahap II Tahun 2021 Trustee of PUB II Phase II Bond Issuance in 2021	0,003	2020-2027
Mandiri Sekuritas	Plaza Mandiri, Lantai 28 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190, Indonesia Telepon/Telephone: (021) 526 3445 Faksimili/Facsimile: (021) 526 3507 corsec@mandirisek.co.id MS_Prambanan@mandirisek.co.id www.mandirisekuritas.co.id	*Underwriter* Penerbitan Obligasi PUB II Tahap II Tahun 2021 Underwriter of PUB II Phase II Bond Issuance in 2021	0,032	2021
Danareksa Sekuritas	Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta 10110, Indonesia Telepon/Telephone: (021) 29555777/888 Faksimili/Facsimile: (021) 3501724/25 cs@danareksa.co.id callcenter@danareksa.co.id www.danareksasekuritas.co.id	*Underwriter* Penerbitan Obligasi PUB II Tahap II Tahun 2021 Underwriter of PUB II Phase II Bond Issuance in 2021	0,032	2021
BCA Sekuritas	Menara BCA – Grand Indonesia, Lantai 41 Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia Telepon/Telephone: (021) 2358 7222 Faksimili/Facsimile: (021) 2358 7290/7250/7300 halo@bcasekuritas.co.id cf@bcasekuritas.co.id www.bcasekuritas.co.id	*Underwriter* Penerbitan Obligasi PUB II Tahap II Tahun 2021 Underwriter of PUB II Phase II Bond Issuance in 2021	0,032	2021
BNI Sekuritas	Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 16, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910, Indonesia Telepon/Telephone: (021) 2554 3946 Faksimili/Facsimile: (021) 5793 6934 customercare@bnisekuritas.co.id www.bnisekuritas.co.id	*Underwriter* Penerbitan Obligasi PUB II Tahap II Tahun 2021 Underwriter of PUB II Phase II Bond Issuance in 2021	0,032	2021
KAP Maksum, Suyamto, dan H	Jalan Kaji No. 2B-5, Petojo Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Pusat 10130 Telepon: 021-6326436/63852854 Fax: 021-6326371 Email: kap_hms@yahoo.com	Audit Penjatahan Penerbitan Obligasi PUB II Tahap II Tahun 2021 Audit of Allotment of PUB II Phase II Bond Issuance in 2021	0,002	2021
Marsinih Martoatmodjo Iskandar Kusdihardjo Law Office	South Tower Jl. Jendral Sudirman Kav. 45-46 Lantai 24 Jakarta, Sampoerna Strategic Square 12930 Jakarta, Indonesia Telepon/Telephone: (021) 5770108 mmik_mmco@mmiklaw.co.id www.mmiklaw.co.id	Konsultan Hukum Penerbitan Obligasi PUB II Tahap II Tahun 2021 Legal Consultant for the Issuance of PUB II Phase II Bonds 2021	0,015	2021

Nama Name	Alamat Address	Jenis dan Bentuk Jasa Types and Forms of Services	Biaya (%) Cost (%)	Periode Penugasan Assignment Period
Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito	Jl. Panglima Polim V No. 11, RT. 1/RW. 6, Melawai, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12160, Indonesia Telepon/Telephone: (021) 724 4650/739 2801/720 9542 Faksimili/Facsimile: (021) 726 5090 poerbaningsih@yahoo.com	Notaris Penerbitan Obligasi PUB II Tahap II Tahun 2021 Notary Issuance of PUB II Phase II Year 2021 Bonds	0,002	2021
Fitch Rating Indonesia	DBS Bank Tower, Lantai 24, Suite 2403, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Jakarta 12940, Indonesia Telepon/Telephone: +62 21 29886800 Faksimili/Facsimile: +62 21 29886822 www.fitchratings.com/region/indonesia	Lembaga Pemeringkat Penerbitan Obligasi PUB II Tahap II Tahun 2021 Rating Agency for the Issuance of PUB II Phase II Bonds in 2021	0,027	2021
Kustodian Sentral Efek Indonesia	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53, Jakarta 12190 Indonesia Telepon/Telephone: +62 21 515 2855 Faksimili/Facsimile: +62 21 5299 1199 Bebas Pulsa 0800-186- 5734 Surel/Email: helpdesk@ksei.co.id Situs Web/Website: www.ksei.co.id	Kustodian Penerbitan Obligasi PUB II Tahap II Tahun 2021 Bentuk Jasa: Pencatatan Obligasi Custodian of Bond Issuance PUB II Phase II Year 2021 Type of Service: Bond Listing	0,00003	2021
Bursa Efek Indonesia	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53, Jakarta 12190 Indonesia Telepon/Telephone: +62 21 515 2855 Faksimili/Facsimile: +62 21 5299 1199 Bebas Pulsa 0800-186- 5734 Surel/Email: helpdesk@ksei.co.id Situs Web/Website: www.ksei.co.id	Pencatatan Penerbitan Obligasi PUB II Tahap II Tahun 2021 Bentuk Jasa: Pencatatan Obligasi Listing of PUB II Phase II Year 2021 Bond Issuance Type of Service: Bond Listing	0,0057	2021

Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certifications

Penghargaan

Awards

Best CEO Award

Direktur Utama Pupuk Indonesia Raih Penghargaan Best CEO
President Director of Pupuk Indonesia Receives Best CEO Award

Diberikan oleh | Issuer of the Awards
The Iconomics

21 April | April

ICSB Award

Pupuk Indonesia Raih Penghargaan Pembinaan UMKM di Jakarta Marketing Week 2022
Pupuk Indonesia wins MSME Development Award at Jakarta Marketing Week 2022

Diberikan oleh | Issuer of the Awards
International Council For Small Business (ICSB)

20 Mei | May

Awarding INEWS

Pupuk Indonesia Raih Penghargaan Special Award of Outstanding Performance di Ajang INews Maker Award
Pupuk Indonesia Receives Special Award of Outstanding Performance at INews Maker Award Event

Diberikan oleh | Issuer of the Awards
INews

30 Juni | June

SPS Award

Pupuk Indonesia Dinobatkan Sebagai Korporasi Terpopuler di Media Tahun 2022
Pupuk Indonesia Named Most Popular Corporation in Media in 2022

Diberikan oleh | Issuer of the Awards
Serikat Perusahaan Pers (SPS)
Press Company Union (SPS)

6 Juli | July

TJSL dan CSR Award BUMN track

Pupuk Indonesia Raih Penghargaan TJSL dan CSR Dari BUMN Track
Pupuk Indonesia Receives TJSL and CSR Award from BUMN Track

Diberikan oleh | Issuer of the Awards
BUMN Track

11 Agustus | August

Human Capital Award

Pupuk Indonesia Raih Penghargaan Human Capital
Pupuk Indonesia Receives Human Capital Award

Diberikan oleh | Issuer of the Awards
Economic Review

31 Agustus | August

Awarding Rakyat Merdeka

Tokoh Peningkatan Produktivitas Pertanian RM Award 2022 Untuk Indonesia Pulih dan Bangkit
RM Award 2022 for Respected Figure of Agriculture Productivity Improvement Award

Diberikan oleh | Issuer of the Awards
Harian Rakyat Merdeka

28 September | September

IQI PC 2022

Perwakilan Pupuk Indonesia Raih 4 Prestasi di Ajang IQPC 2022
Pupuk Indonesia Representative Achieves 4 Achievements at IQPC 2022 Event

Diberikan oleh | Issuer of the Awards
IQI

26 Oktober | October

Anugerah Cinta Award

Gunakan Produk Dalam Negeri, Pupuk Indonesia Raih Penghargaan Anugerah Cinta Indonesia
Using Domestic Products, Pupuk Indonesia Receives Anugerah Cinta Indonesia Award

Diberikan oleh | Issuer of the Awards
Harian Republika

30 Juni | June

Anugerah Humas Indonesia

Pupuk Indonesia Raih Anugerah Humas Indonesia
Pupuk Indonesia wins Indonesian Public Relations Award

Diberikan oleh | Issuer of the Awards
Humas Indonesia
Indonesian PR

28 Oktober | October

Info Bank Award

Top 200 The Next Leaders 2022
Infobank Top 100 Ceo & The Next Leaders Forum 2022

Diberikan oleh | Issuer of the Awards
Info Bank

23 November | November

Asia Sustainability Report Award

Asia Sustainability Reporting Rating 2022

Diberikan oleh | Issuer of the Awards
National Center for Sustainability Reporting (NCSR)

24 November | November

INDI 4.0 Award

Holding BUMN Pertama yang Raih Penghargaan INDI 4.0 Kategori Supply Chain Management
First SOE Holding to Receive INDI 4.0 Award in Supply Chain Management Category

Diberikan oleh | Issuer of the Awards
KIP

6 Desember | December

Indonesia Quality Award

Pupuk Indonesia Raih Penghargaan IQA Award 2022
Pupuk Indonesia wins IQA Award 2022

Diberikan oleh | Issuer of the Awards
IQA

12 Desember | December

Anugerah KIP

Capaian Pupuk Indonesia Raih Predikat BUMN Informatif
Pupuk Indonesia Achieves Informative SOE Predicate

Diberikan oleh | Issuer of the Awards
KIP

14 Desember | December

PROPER KLHK

Pupuk Indonesia Grup Raih 4 (Empat) Proper Emas dan 1 (Satu) Proper Hijau
Pupuk Indonesia Group Achieves 4 (Four) Gold Proper and 1 (One) Green Proper

Diberikan oleh | Issuer of the Awards
MOEF

14 Desember | December

Anugerah CGPI

Pupuk Indonesia Raih Predikat Most Trusted Companies 2022
Pupuk Indonesia Achieves Most Trusted Companies 2022 Predicate

Diberikan oleh | Issuer of the Awards
CGPI

20 Desember | December

Sertifikasi
Certifications

No.	Nama Sertifikat Certificate Name	Dikeluarkan oleh Issued by	Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi Date Certification Issued	Masa Berlaku Hingga Validity Until
1	ISO 9001:2015-Quality System Management Certification	PT SGS Indonesia	10 Juni 2022 June 10, 2022	10 Juni 2025 June 10, 2025
2	ISO 20000-1:2008 Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi ISO 20000-1:2008 IT Service Management System	PT URS Indonesia	13 Februari 2023 February 13, 2023	13 Februari 2026 February 13, 2026
3	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) untuk PT Pupuk Kaltim (Perusahaan telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 dan mutu produknya telah memenuhi persyaratan SNI 2803:2012) *Terbitan ketiga. Tersertifikasi sejak 27 Juli 2018 Product Certificate for the Use of SNI Mark (SPPT SNI) for PT Pupuk Kaltim (The company has implemented the Quality Management System SNI ISO 9001: 2015 and the quality of its products has met the requirements of SNI 2803: 2012) *Third edition. Certified since July 27, 2018	Kementerian Perindustrian Ministry of Industry	7 Maret 2022 March 7, 2022	10 Mei 2026 May 10, 2026
4	Sertifikat SNI 2803:2012 untuk Pupuk NPK Padat PT Petrokimia Gresik dengan merek: Phonska Pupuk Indonesia, Phonaka Plus, KEBOMAS, Phonska PG, Pelangl Agro, Petro Nitral, PeltoN1ngrat, Pul) 4Jk Kujang Cikampek, Pupuk Indonesia Holding Company Phontka Plot,PETROKIMIA GRESIK Logo PG, Pelto cane, Sipedas, Phonska Booster/BUTIRAN; Granule SNI 2803:2012 Certificate for PT Petrokomia Gresik Solid NPK Fertilizer with brands: Phonska Pupuk Indonesia, Phonaka Plus, KEBOMAS, Phonska PG, Pelangl Agro, Petro Nitral, PeltoN1ngrat, Pul) 4Jk Kujang Cikampek, Pupuk Indonesia Holding Company Phontka Plot, PETROKIMIA GRESIK Logo PG, Pelto cane, Sipedas, Phonska Booster/BUTIRAN; Granule	Pemerintah Provinsi Jawa Timur East Java Provincial Government	28 April 2022 April 28, 2022	

No.	Nama Sertifikat Certificate Name	Dikeluarkan oleh Issued by	Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi Date Certification Issued	Masa Berlaku Hingga Validity Until
5	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) untuk PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Perusahaan telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 dan mutu produknya telah memenuhi persyaratan SNI 2803:2012)	Kementerian Perindustrian	21 Juli 2021	21 Februari 2025
	Certificate of Product Use of SNI Mark (SPPT SNI) for PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (The company has implemented the Quality Management System SNI ISO 9001: 2015 and the quality of its products has met the requirements of SNI 2803: 2012)	Ministry of Industry	July 21, 2021	February 21, 2025
6	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) untuk PT Pupuk Kujang (Perusahaan telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 dan mutu produknya telah memenuhi persyaratan SNI 2803:2012.)	Kementerian Perindustrian	13 Juli 2021	13 Maret 2023
	Certificate of Product Use of SNI Mark (SPPT SNI) for PT Pupuk Kujang (The company has implemented the Quality Management System SNI ISO 9001: 2015 and the quality of its products has met the requirements of SNI 2803: 2012.)	Ministry of Industry	July 13, 2021	March 13, 2023

Daftar Alamat Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Ventura Bersama, serta Informasi tentang Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan

List of Addresses of Subsidiaries, Associates, Joint Ventures, as well as Information on Branch Offices and Representative Offices

Alamat Entitas Anak Kepemilikan Langsung | Address of Direct Ownership Subsidiaries

PT Petrokimia Gresik
Jl. Jend. A. Yani, Gresik 61119, Jawa Timur
Telp: +62-31 3981811, 3982100, 3982200
Fax: +62-31 3981722, 3982272
E-mail: pg@petrokimia-gresik.com
Web: www.petrokimia-gresik.com

PT Pupuk Kujang
Jl. Jend. A. Yani No. 39, Kec. Cikampek
Kab. Karawang 41373, Jawa Barat
Telp: +62-264 316 141, 317 007
Fax: +62-264 314 235
E-mail: info@pupuk-kujang.co.id
Web: www.pupuk-kujang.co.id

PT Pupuk Kalimantan Timur
Jl. Ir. James Simandjuntak No.1, Kel. Loktuan
Kec. Bontang Utara, Kota Bontang 75313, Kalimantan Timur
Telp: +62-548 41202
Fax: +62-548 41626
E-mail: dof@pupukkaltim.com
Web: www.pupukkaltim.com

PT Pupuk Iskandar Muda
Jl. Medan-Banda Aceh, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, Aceh
Telp: +62-645 56222
Fax: +62-645 56095
E-mail: info@pim.co.id
Web: www.pim.co.id

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
Jl. Mayor Zen, Palembang 30118
Telp: +62-711 712222
Fax: +62-711 712100
E-mail: info@pusri.co.id/humas@pusri.co.id
Web: www.pusri.co.id

PT Rekayasa Industri
Jl. Kalibata Timur I No. 36, Kalibata, Jakarta 12740
Telp: +62-21 7988700/7988707
Fax: +62-21 7988701/7988702
E-mail: corpsec@rekayasa.co.id.
Web: www.rekayasa.com

PT Pupuk Indonesia Niaga
Gedung ROB-2 Lantai 3&4
Jl. Kalibata Timur I No. 36, Kalibata, Jakarta 12740
Telp: +62-21 7919 6026/7919 6027
E-mail: corcom@pi-niaga.com
Web: pi-niaga.com

PT Pupuk Indonesia Logistik
Gedung Wisma Pusri 101, Jl. Letjend. S. Parman Kav. 101
RT/RW. 2/1 Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta 11440
Telp: +62-21 2263 1881, 2263 1882, 2263 1883
Fax: (62-21) 2256 1904
E-mail: info@pi-logistik.com, marketing@pi-logistik.com
Web: www.pi-logistik.com

PT Pupuk Indonesia Utilitas
Alamanda Tower Lt. 26
Jl. TB Simatupang No. 22-26 RT/RW. 1/1 Cilandak Barat
Kec. Cilandak, Jakarta 12430
Telp: +62-21 29661628, 29661629, 29661630, 29661631
Fax: +62-21 345 2609
E-mail: info@pi-energi.com
Web: www.pi-energi.com

PT Pupuk Indonesia Pangan
Jl. Raya Rawamerta, Dusun Sukamanah RT/RW. 006/003, Desa Kutawargi, Kec. Rawamerta, Karawang 41382
Telp: +02-67 6064389
Fax: +02-67 6064556
E-mail: pemasaran@pi-pangan.com
Web: www.pi-pangan.com

PT Petrosida Gresik
Kantor Pusat/Head Office:
Jl. KIG Raya Utara Kav. O No. 5, Kawasan Industri Gresik (KIG),
Gresik 61151, Jawa Timur-Indonesia
Telp: +62 31 3981553, 3985541-42, 3985594
Fax: +62 31 3981653
E-mail: corporate@petrosida-gresik.com
Web: www.petrosida-gresik.com

PT Petrokimia Kayaku
Kantor Pusat/Head Office:
Jl. Jendral Ahmad Yani
PO Box 107 Gresik, 61119
Jawa Timur-Indonesia
Telp: +62 31 398 1815/1831/1989
Fax: +62 31 3981830
E-mail: info@petrokayaku.com
Web: m.petrokayaku.com

PT Kawasan Industri Kujang Cikampek
Kawasan Industri Kujang Cikampek, Jl. Jend. A. Yani No. 39,
Cikampek, Jawa Barat
Telp: +62 264-313113
Fax: +62 264-313114
E-mail: info@kikc.co.id
Web: www.kikc.co.id

PT Sintas Kurama Perdana
Kawasan Industri Kujang Cikampek, Jl. Jend. A. Yani No. 39,
Kalihurip, Cikampek, Jawa Barat 41373
Telp: +62 264-313392
Fax: +62 264-313043
E-mail: sales@sintas90.co.id
Web: www.sintas90.co.id

Alamat Entitas Anak Kepemilikan Langsung | Address of Direct Ownership Subsidiaries

PT Kaltim Industrial Estate
Kantor Pusat/Head Office:
Wisma KIE, Lantai 3, Kawasan Industri Bontang, Jalan Paku Aji Kav. 79, Bontang-75313, Kalimantan Timur
Telp: +62 548 41368
E-mail: contact@kie.co.id

PT Pusri Agro Lestari
Gedung Pusri 101, Lantai 2 & 3, Jl. Let. jend. S. Parman Kav. 101 Jakarta Barat 11440

PT PIM Prima Medika
Jl. PIM Housing Komp., Tambon Tunong, Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Aceh

PT Rekind Daya Mamuju
Jalan MT. Haryono Kav. 23 Jakarta 12820
Telp: +62 21 83789152, 83785961, 83787760
Fax: +62 21 8307578

PT Puspetindo
Gedung Gresik Migas Tower Lt.2
Jl. Dr. Wahidin S.H. No.708, Kembangan, Kebomas, Gresik, Jawa Timur 61124
Telp:+62 31 99103048
E-mail: info@puspetindo.com
Web: www.puspetindo.com

PT Yasa Industri Nusantara
Jl. Kalibata Timur No.27, RT.2/RW.8, Kalibata, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740
Telp: +62 21 791 87800
Fax: +62 21 794 2030

PT Tracon Industri
Jl. Kalibata Timur No.27, RT.2/RW.8, Kalibata, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740
Telp: +62 21 797 4367
Fax: +62 21 7918 0907

PT Rekayasa Engineering
Jl. Kalibata Timur No.27, RT.2/RW.8, Kalibata, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740
Telp: +62 21 79181180
Fax: +62 21 7940984
E-mail: marketing@re.rekayasa.co.id
Web: www.rekayasaengineering.co.id

Alamat Entitas Anak Kepemilikan Tidak Langsung | Address of Indirect Ownership Subsidiaries

Rekind Malaysia Sdn. Bhd.
Suite 9-2 Lt. 9, Wisma UOA II, No. 21 Jalan Pinang 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
Telp: +60 3-2181 5251

PT Sigma Utama
Jl Lanbau No.1, Karang Asem Barat, Citereup Kabupaten Bogor 16810, Jawa Barat
Telp: +62 21 8756310
Fax: +62 21 8753042
Web: sigmautama.com

PT Kaltim Daya Mandiri
Wisma KIE Kavling 79, JL. Raya Paku Aji, Kota Bontang, Kalimantan Timur 75311
Telp: +62 548 41950

PT Kaltim Jasa Sekuriti
Wisma KIE Lantai Dasar, Jln. Paku Aji Kavling 79-Kawasan Industri Bontang-Bontang-Kalimantan Timur
Telp: +62 548 41101
Fax: +62 548 41104

PT Kaltim Adhiguna Dermaga
Kantor Pusat/Head Office:
Jalan Paku Aji Kav.79, Wisma KIE Lantai 1, Guntung, Bontang Utara, Bontang, Kalimantan Timur, Indonesia
E-mail: kaltim.adhiguna@gmail.com, kaltimadhiguna@kad.co.id
Web: kad.co.id

PT Rekayasa Cakrawala Resources
Jl. Kalibata Timur I no. 36, Jakarta Selatan 12740
Telp: +62 21 79181180 Ext. 5511/12/14
Fax: +62 21 79196204
E-mail: marketing@recare.rekayasa.co.id, recruitment@recare.
rekayasa.co.id, designschool@recare.rekayasa.co.id
Web: recare.rekayasa.com

PT Recon Sarana Utama
Jl. Kalibata Timur II No. 27 Rt. 002/08- Kel. Kalibata- Kec. Pancoran
Web: recon.co.id

PT Tracon Industri Solusindo
Kantor Pusat/Head Office: Graha Gabah Pertani 1 Floor
Jl. Raya Pasar Minggu No.1 Jakarta Selatan 12760 st
Telp: +62 21 797 4367, +62 21 7918 0907
E-mail: bisnis@tracon.rekayasa.co.id, sales@tracon.rekayasa.co.id
(Supply Chain)
Web: tracon.co.id

Alamat Entitas Asosiasi | Address of Associated Entity

PT Petronika
Prof Dr Moh Yamin Sh Jl Po Box 129,
Bedilan, Gresik, Jawa Timur 61111
Telp: +62 31 3951956
E-mail: petronika@telkom.net
Web: www.panditaindustries.com

PT Multi Nitrotama Kimia
Equity Tower 41th
Floor Suite E Sudirman Central Business
Disctrict (SCBD) Jl Jend. Sudirman Kav. 52-53 Lot 9
Jakarta 12190
Telp: (+62-21) 2903 5022 (Hunting)
Fax: (+62-21) 2903 5021

PT Clariant Kujang Catalyst
Kawasan Industri Kujang Cikampek,
Jl. Jend. A. Yani No. 39, Kalihurip, Cikampek, Jawa Barat 41373
Telp: +62 21 8370 1020, 8370 1719
Fax: +62 21 8370 0410
E-mail: info@kikc.co.id
Web: www.kikc.co.id

PT Peroksida Indonesia Pratama
Kawasan Industri Kujang Cikampek,
Jl. Jend. A. Yani No. 39, Kalihurip, Cikampek, Jawa Barat 41373
Telp: +62 2 64-313 383 ; 313 387
Fax: +62 2 64-313 386
E-mail: info@ptpip.co.id
Web: www.ptpip.co.id

PT Kaltim Amonium Nitrat
Jalan MT. Haryono Kav. 23 Jakarta 12820

PT Aneka Jasa Grhadika
Komplek Lingkungan Industri Kecil
Jl. Prof. M. Yamin SH, PO BOX 122 Tlogopojo,
Kec. Gresik, Kab. Gresik, Jawa Timur 61119
Telp: +62 31 3954726
E-mail: info@ajg.co.id
Web: www.ajg.co.id

PT Petrokopindo Cipta Selaras
Jalan Raya Romo 242, Gresik
Telp: +62 31 3984194
E-mail: admin@petrokopindo,com
Web: petrokopindo.com

Hotel Bintang Sintuk
Jl. Urea, Komplek Lapangan Golf PT Pupuk Kaltim, Bontang,
Kalimantan Timur, Indonesia
Telp: +62 21 548 26268, 392 2566
E-mail: reservation@hotelbintangsintuk,com
Web: hotelbintangsintuk.com

Alamat Ventura Bersama | Joint Venture Address

PT Petro Jordan Abadi
Jl Kig Raya Utara No.5, Roomo, Manyar,
Gresik Regency, East Java 61151
Telp: +62 31 399 1887
E-mail: admin@pja-gresik.com
Web: pja-gresik.com

PT Kalimantan Agro Nusantara
Komplek Thomas Square C-5.
Jalan Yos Sudarso II No. 17
Kec. Sengata Utara, Kabupaten Kutai Timur
Telp: +62 549 2027833

PT Kaltim Jordan Abadi
Wisma KIE Lantai 2, Jl. Ammonia Kav. 79 Bontang 75314
Kalimantan Timur
E-mail: contact@kja-bontang.com
Web: kaltimjordanabadi.com

PT Pupuk Agro Nusantara
Jl. Karya Wisata, Komplek J. Square-J. City E-38
Kec. Medan Johor, Kota Medan.

Informasi pada Situs Web Perusahaan

Information on the Company Website

Sebagai bagian dari prinsip keterbukaan dalam upaya membentuk Tata Kelola Perusahaan yang Baik, PTPI menyediakan informasi kepada *stakeholders* yang salah satunya dapat diakses setiap saat oleh semua pihak melalui situs web yang beralamat di www.pupuk- indonesia.com.

Semua informasi yang disajikan diperbarui secara berkala untuk memberikan informasi yang aktual dan terkini bagi segenap pemangku kepentingan maupun masyarakat umum.

Situs resmi Perusahaan menyajikan Informasi dalam dua Bahasa yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan telah memenuhi informasi yang wajib dimuat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8/POJK.4/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik yang telah ditetapkan pada tanggal 25 Juni 2015, antara lain:

1. Informasi Umum Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Informasi bagi Pemodal atau Investor;
3. Informasi Tata Kelola Perusahaan;
4. Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

As part of the principle of transparency in an effort to establish Good Corporate Governance, PTPI provides information to stakeholders, one of which can be accessed at any time by all parties through the website located at www.pupuk-indonesia.com.

All information presented is updated regularly to provide actual and current information for all stakeholders and the general public.

The Company's official website presents information in two languages, namely Indonesian and English and has fulfilled the information that must be contained in accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 8/POJK.4/2015 concerning the Website of Issuers or Public Companies which was established on June 25, 2015, among others:

1. General Information of Issuer or Public Company;
2. Information for Financiers or Investors;
3. Information on Corporate Governance;
4. Information on Corporate Social Responsibility.

Uraian Description	**Ketersediaan** Availability	**Link**
Informasi Umum Emiten atau Perusahaan Publik General Information of Issuer or Public Company	✓	https://www.pupuk-indonesia.com/id
Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik Brief history of the Issuer or Public Company	✓	https://www.pupuk-indonesia.com/id/profil#sekilas
Struktur Organisasi Emiten atau Perusahaan Publik Organizational Structure of Issuer or Public Company	✓	https://www.pupuk-indonesia.com/id/pojk
Struktur kepemilikan Emiten atau Perusahaan Publik Ownership structure of the Issuer or Public Company	✓	https://www.pupuk-indonesia.com/id/pemegang-saham
Struktur Grup Emiten atau Perusahaan Publik Group Structure of Issuer or Public Company	✓	https://www.pupuk-indonesia.com/id/pemegang-saham
Profil Direksi, Dewan Komisaris, Komite, Sekretaris Perusahaan Profile of Board of Directors, Board of Commissioners, Committee, Corporate Secretary	✓	https://www.pupuk-indonesia.com/id/profil#dewan-komisaris
	✓	https://www.pupuk-indonesia.com/id/pages/komite-perusahaan
	✓	https://www.pupuk-indonesia.com/id/profil#dewan-direksi
Lembaga Penunjang Pasar Modal Capital Market Supporting Institutions	✓	https://www.pupuk-indonesia.com/id/pojk
Dokumen Anggaran Dasar Articles of Association Document	✓	https://www.pupuk-indonesia.com/id/pojk
Informasi bagi Pemodal atau Investor Information for Investors	✓	https://ppid.pupuk-indonesia.com/
Prospektus Penawaran Umum Public Offering Prospectus	✓	https://www.pupuk-indonesia.com/id/pages/obligasi

Uraian Description	Ketersediaan Availability	Link
Laporan tahunan untuk periode 5 (lima) tahun buku terakhir Annual report for the period of the last 5 (five) financial years	✓	https://www.pupuk-indonesia.com/id/publikasi#laporan-tahunan
Laporan keuangan tahunan (3 tahun terakhir) Annual financial statements (last 3 years)	✓	https://www.pupuk-indonesia.com/id/laporan-keuangan
Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan Information on the General Meeting of Shareholders (GMS) at least includes the agenda materials discussed at the GMS, summary of the minutes of the GMS, and important date information, namely the date of the announcement of the GMS, the date of the invitation to the GMS, the date of the GMS, the date the summary of the minutes of the GMS is announced.	✓	https://www.pupuk-indonesia.com/informasi-rups
Informasi Obligasi Bond Information	✓	https://www.pupuk-indonesia.com/id/pages/obligasi
Informasi Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Information	✓	https://www.pupuk-indonesia.com/id/gcg
Piagam/*Charter* Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal Charter of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, and Internal Audit Unit	✓	https://www.pupuk-indonesia.com/id/gcg
Isi Kode Etik Content of Code of Conduct	✓	https://www.pupuk-indonesia.com/id/gcg
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility	✓	https://www.pupuk-indonesia.com/id/csr

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

Tinjauan Perekonomian dan Industri

Economic and Industry Overview

Bauran berbagai kebijakan dan strategi konstruktif yang diambil Pemerintah, salah satunya Program PC-PEN (Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional), berhasil menjadi kunci keberhasilan dalam mendorong laju ekonomi nasional.

The mix of various constructive policies and strategies taken by the government, one of which is the PC-PEN Program (COVID-19 Handling Program and National Economic Recovery), has succeeded in becoming the key to success in encouraging the pace of the national economy.

KONDISI EKONOMI

Pada tahun 2022, perekonomian global dihadapkan pada berbagai tantangan. Pandemi COVID-19 yang kembali muncul di Cina walaupun pada tingkatan yang lebih ringan, inflasi global yang lebih tinggi serta invasi Rusia ke Ukraina, telah mempengaruhi aktivitas ekonomi dunia secara signifikan.

Berdasarkan laporan perkembangan ekonomi Indonesia dan dunia yang dikeluarkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada triwulan IV-2022, inflasi global didorong lebih tinggi oleh tekanan permintaan dan gejolak pasokan, termasuk gangguan rantai pasok global dan ketersediaan komoditas utama. Di beberapa negara, inflasi juga dipicu depresiasi mata uang terhadap dolar AS serta kondisi pasar tenaga kerja yang ketat. Tingginya tekanan inflasi di berbagai negara tersebut direspons oleh beberapa bank sentral negara-negara maju dengan meningkatkan suku bunga yang dapat berisiko terhadap fundamental perekonomian domestik berupa arus modal keluar (*capital out flow*) serta meningkatnya inflasi dan tingkat suku bunga.

Sementara itu, invasi Rusia ke Ukraina masih berdampak pada pasar energi dan komoditas, sehingga melatarbelakangi perlambatan pertumbuhan tiga mesin pertumbuhan utama dunia yaitu Amerika Serikat, Kawasan

ECONOMIC CONDITIONS

In 2022, the global economy was faced with various challenges. The re-emergence of the Covid-19 pandemic in China, albeit at a milder level, higher global inflation and Russia's invasion of Ukraine have significantly affected world economic activity.

Based on the economic development report for Indonesia and the world issued by the National Development Planning Agency (Bappenas) in the fourth quarter of 2022, global inflation was driven higher by demand pressures and supply volatility, including global supply chain disruptions and the availability of key commodities. In some countries, inflation was also triggered by currency depreciation against the US dollar and tight labor market conditions. The high inflationary pressures in various countries were responded by several developed countries' central banks by increasing interest rates, which could risk the fundamentals of the domestic economy in the form of capital outflows and rising inflation and interest rates.

Meanwhile, Russia's invasion of Ukraine is still having an impact on energy and commodity markets, leading to a slowdown in the growth of the world's three main growth engines, namely the United States, the Euro Area and

Eropa dan Cina, sehingga turut mempengaruhi kondisi ekonomi domestik negara berkembang.

Publikasi International Monetary Fund (IMF) bertajuk "*World Economic Outlook*" edisi Januari 2023 mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2022 adalah sebesar 3,4% atau mengalami perlambatan dari tahun 2021 yang sebesar 6,2%. IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia akan menurun di tahun 2023 menjadi 2,9% dan akan naik menjadi 3,1% di tahun 2024. Perkiraan ini lebih tinggi 0,2% dibandingkan proyeksi pada bulan Oktober 2022, seiring dengan situasi ekonomi dunia yang menunjukkan tanda-tanda perbaikan.

Diiringi pengetatan kebijakan suku bunga yang mulai ditahan, berbagai lembaga internasional telah mengoreksi ke atas prediksi ekonomi tahun 2023 sehingga probabilitas resesi terus menurun. Harga komoditas utama global juga ternormalisasi pasca meredanya rantai pasok serta suhu iklim yang lebih bersahabat. Optimisme juga muncul dari Cina yang kembali membuka perbatasan dan aktivitas ekonomi pada November 2022 dari yang sebelumnya menerapkan kebijakan "*Zero Covid*".

Di tengah kondisi ekonomi global yang masih mengalami pasang surut, aktivitas ekonomi domestik menunjukan pertumbuhan ke arah yang lebih baik. Badan Pusat

China, thus affecting the domestic economic conditions of developing countries.

The January 2023 edition of the International Monetary Fund (IMF) publication titled "World Economic Outlook" revealed that world economic growth in 2022 was 3.4% or a slowdown from 2021 which amounted to 6.2%. The IMF predicts that world economic growth will decline in 2023 to 2.9% and will rise to 3.1% in 2024. This forecast is 0.2% higher than the projection in October 2022, as the world economic situation shows signs of improvement.

With interest rate policy tightening on hold, various international institutions have upwardly corrected their economic forecasts for 2023 so that the probability of recession continues to decline. Global prices of major commodities are also normalizing following the easing of supply chains as well as friendlier climate temperatures. Optimism also emerged from China, which reopened its borders and economic activities in November 2022 from the previous "Zero Covid" policy.

In the midst of global economic conditions that are still experiencing ups and downs, domestic economic activity is showing growth for the better. The Central Statistics

Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31%, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan, yaitu sebesar 19,87%.

Agency (BPS) recorded that Indonesia's economy in 2022 grew by 5.31%, higher than the achievement in 2021 which experienced a growth of 3.70%. In terms of production, the highest growth occurred in the Transportation and Warehousing Business Field, which amounted to 19.87%.

Upaya pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan pemerintah berhasil menjaga stabilitas ekonomi nasional. Bauran berbagai kebijakan dan strategi konstruktif yang diambil pemerintah, salah satunya Program PC-PEN (Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional), berhasil menjadi kunci keberhasilan dalam mendorong laju ekonomi nasional.

The government's national economic recovery efforts have succeeded in maintaining national economic stability. The mix of various constructive policies and strategies taken by the government, one of which is the PC-PEN Program (COVID-19 Handling Program and National Economic Recovery), has succeeded in becoming the key to success in encouraging the pace of the national economy.

KINERJA PEREKONOMIAN
Economic Performance

dalam % | in %

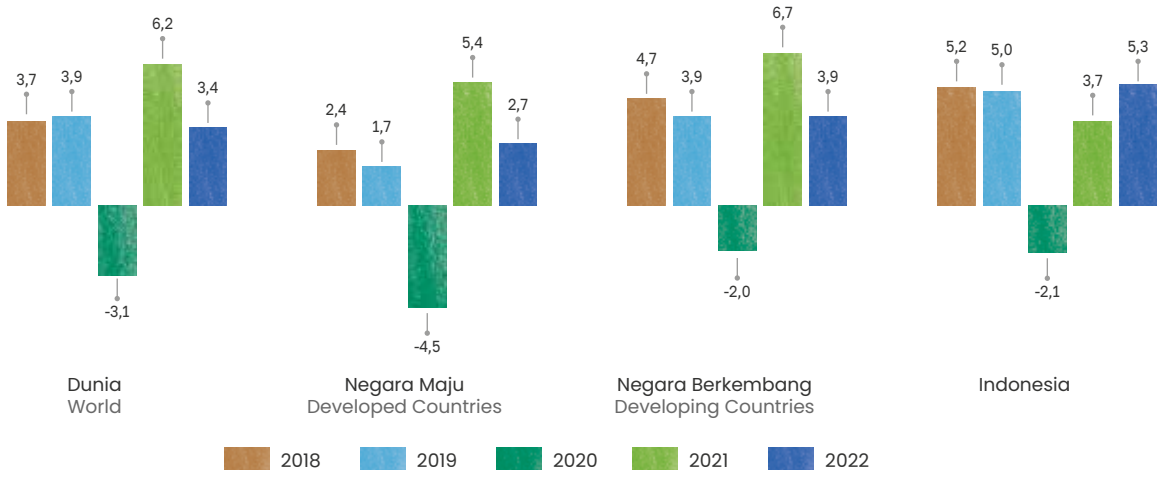

*) sumber data tahun 2021 dan 2022: IMF "*World Economic Outlook*" edisi Januari 2023 dan data Badan Pusat Statistik (BPS).
source data for 2021 and 2022: IMF "World Economic Outlook" January 2023 edition and Central Bureau of Statistics (BPS) data

KONDISI INDUSTRI PUPUK

Pada tahun 2022, terjadi invasi Rusia ke Ukraina yang berdampak pada harga bahan baku yang tinggi. Hal ini diprediksi setidaknya untuk tahun 2022-2025. Harga produksi energi yang tinggi akan meningkatkan biaya produksi yang berpengaruh pada jangka pendek maupun menengah.

Selain hal tersebut, dampak lanjutan pandemi COVID-19 diharapkan tidak akan berpengaruh pada permintaan pertanian karena di sebagian negara berbasis pertanian menganggap sektor pertanian merupakan sektor yang penting karena berkaitan dengan kelangsungan hidup masyarakat dan ketahanan pangan nasional.

FERTILIZER INDUSTRY CONDITIONS

In 2022, Russia's invasion of Ukraine resulted in high raw material prices. This is predicted for at least 2022-2025. High energy production prices will increase production costs, which will have an effect in the short and medium term.

In addition to this, the continued impact of the COVID-19 pandemic is not expected to affect agricultural demand because in some agriculture-based countries, the agricultural sector is considered an important sector because it is related to people's survival and national food security.

Kinerja PTPI secara konsolidasi dibandingkan *peers* masih cukup kompetitif dan berada di urutan ke-8 atau sama dari posisi tahun sebelumnya (yoy). Peningkatan pendapatan sebesar 26% (yoy) disebabkan tingginya penjualan komersil dengan memanfaatkan momentum harga jual yang tinggi. Kemudian, untuk kinerja laba tahun berjalan mengalami kenaikan 243% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja PTPI dari sisi nilai laba bersih tahun 2022 dibandingkan *peers* juga masih cukup kompetitif. Perusahaan berada di urutan ke-9 atau sama dari posisi tahun sebelumnya.

PTPI's performance on a consolidated basis compared to peers is still quite competitive and ranks 8th or the same from the previous year's position (yoy). The increase in revenue by 26% (yoy) was due to high commercial sales by utilizing the momentum of high selling prices. Then, for the current year's profit performance increased 243% (yoy) compared to the previous year. PTPI's performance in terms of net profit value in 2022 compared to peers is also still quite competitive. The company is in 9th place or the same as the previous year's position.

POSISI PTPI DALAM INDUSTRI PUPUK BERDASARKAN PENDAPATAN
PTPI's Position in the Fertilizer Industry Based on Revenue

(USD juta | USD million)

Peringkat Rank		Perusahaan Companies	Negara Country	Pendapatan Revenue		Pertumbuhan YoY YoY Growth (%)
2021	2022			2021	2022	
1	1	Nutrien	Kanada | Canada	27.712	37.884	37
2	2	Yara International	Norwegia | Norway	16.607	27.887	68
3	3	The Mosaic Company	Amerika Serikat United States of America	12.357	19.125	55
6	4	CF Industries	Maroko | Marocco	6.538	11.186	71
4	5	OCP Group	Amerika Serikat United States of America	9.476	10.968	16
5	6	ICL	Israel	6.955	10.115	45
7	7	PhosAgro	Rusia | Russia	5.644	7.722	37
8	8	Pupuk Indonesia	Indonesia	5.509	6.602	26
9	9	K+S Group	Jerman | Germany	3.638	6.013	65
				Rata-rata Industri | Industry Average		**46**

PI GRUP DALAM INDUSTRI PUPUK BERDASARKAN LABA BERSIH
Group PI in Fertilizer Industry by Net Profit

Peringkat Rank		Perusahaan Companies	Negara Country	Laba Bersih Net Profit		Pertumbuhan YoY Growth YoY (%)
2021	2022			2021	2022	
2	1	Nutrien	Kanada | Canada	3.179	7.687	142
6	2	CF Industries	Amerika Serikat United States of America	1.260	3.937	212
5	3	The Mosaic Company	Amerika Serikat United States of America	1.627	3.418	110
8	4	Yara International	Norwegia | Norway	384	2.782	624
3	5	OCP Group	Maroko | Marocco	1.766	2.698	53
4	6	PhosAgro	Rusia | Russia	1.741	2.505	44
7	7	ICL	Israel	832	2.219	167
1	8	K+S Group	Jerman | Germany	3.378	1.598	-53
9	9	Pupuk Indonesia	Indonesia	360	1.117	243
				Rata-rata Industri | Industry Average		**93**

ASUMSI KURS (USD/RP)
Rate Assumption (USD/Rp)

2021	2022
14.269	15.731

KEBIJAKAN DAN STRATEGI BISNIS TAHUN 2022

PT Pupuk Indonesia (Persero) menetapkan *strategy house* yang terdiri dari 21 inisiatif strategis dalam rangka transformasi perusahaan untuk mencapai visi dan misi Perusahaan. Pada tahun pelaporan, Kami berfokus pada transformasi EBITDA, transformasi digital, dan transformasi SDM sebagai berikut:

1. Memperkuat *partnership* dengan distributor dan *retailer* melalui program PADI;
2. *Commercial Transformation* melalui *optimasi Key Account Management*;
3. Retail & Distributor *Excellence* dalam meningkatkan pelayanan dan pemenuhan kepada pelanggan melalui *benefit model* dan peluncuran Kios #PastiAda;
4. *Agrosolutions* untuk membangun keterikatan pelanggan dan implementasi *digital farming*;
5. Penyelarasan portofolio anak perusahaan melalui restrukturisasi dan penataan anak perusahaan non pupuk serta *streamlining* lini bisnis;
6. Mendorong *Operation Excellence* di pabrik dengan meningkatkan reliabilitas pabrik dan menciptakan efisiensi melalui digitalisasi untuk optimalisasi proses produksi dan peningkatan *maintenance level* melalui *Strategic Business Unit*;

BUSINESS POLICY AND STRATEGY FOR 2022

PT Pupuk Indonesia (Persero) established a strategy house consisting of 21 strategic initiatives in order to transform the company to achieve the Company's vision and mission. In the reporting year, we focused on EBITDA transformation, digital transformation, and HR transformation as follows:

1. Strengthen partnerships with distributors and retailers through the PADI program;
2. Commercial Transformation through Key Account Management optimization;
3. Retail & Distributor Excellence in improving service and fulfillment to customers through benefit models and the launch of Kiosk #PastiAda;
4. Agrisolutions to build customer engagement and implement digital farming;
5. Alignment of subsidiary portfolios through restructuring and structuring of non-fertilizer subsidiaries and streamlining of business lines;
6. Drive Operation Excellence at the plant by improving plant reliability and creating efficiency through digitization for production process optimization and maintenance level improvement through the Strategic Business Unit;

7. Membangun kapabilitas digital dan *advanced analytics* pada pengadaan dan produksi serta digitalisasi kios pupuk;
8. Optimalisasi pabrik yang kurang efisien dan pengembangan kapasitas melalui pembangunan pabrik baru/*revamp*;
9. Mengembangkan produk *adjacent chemical* potensial dan strategis yang dapat memperkuat *circular economy* seperti katalis merah putih, soda *ash*, dan amonium nitrat;
10. Memperkuat organisasi melalui penguatan strategi *talent* yang lebih baik dan budaya inovasi.

Inisiatif strategis tersebut dilakukan untuk meningkatkan *engagement* dengan konsumen sehingga produk dan layanan yang Kami berikan bersifat solutif dan tepat guna sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selain itu initisiatif strategis yang dilakukan diharapkan membuat kinerja perusahaan lebih optimal.

7. Building digital and advanced analytics capabilities in procurement and production as well as digitalization of fertilizer kiosks;
8. Optimization of less efficient plants and capacity expansion through new plant construction/revamp;
9. Develop potential and strategic adjacent chemical products that can strengthen the circular economy such as red and white catalyst, soda ash, and ammonium nitrate;
10. Strengthen the organization through better talent strategy and culture of innovation.

These strategic initiatives are carried out to increase engagement with consumers so that the products and services we provide are solutive and appropriate according to consumer needs. In addition, the strategic initiatives undertaken are expected to make the company's performance more optimal.

Tinjauan Operasi per Segmen Usaha
Review of Operations by Business Segment

Penentuan segmen usaha PT Pupuk Indonesia ("PTPI", "PI Group" "Perusahaan") mengacu pada Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) 5 tentang Segmen Operasi yang tercatat dalam Laporan Keuangan teraudit. Informasi Segmen Operasi dilaporkan secara konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan operasi utama. Pengambil keputusan operasi utama, yang bertanggung jawab mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi, serta membuat keputusan strategis adalah Direksi.

Sesuai dengan kebijakan tersebut, segmen usaha PTPI sesuai dengan produk dan jasa yang dihasilkan, mencakup 3 (tiga) segmen: Segmen Pupuk dan Amoniak, Segmen Jasa Konstruksi dan Segmen Lain-lain yang disampaikan secara konsolidasi.

Segmen Pupuk dan Amoniak merupakan kontributor terbesar serta bisnis inti Perusahaan. Pada tahun 2022, kontribusinya terhadap total penjualan dan pendapatan mencapai 99,60%. Sebagai entitas usaha yang dibentuk Pemerintah Indonesia untuk menjamin distribusi dan ketersediaan pupuk bagi pasar Indonesia, pemerintah menugaskan PI Grup untuk menyalurkan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.

The determination of business segments of PT Pupuk Indonesia ("PTPI", "PI Group" "Company") refers to the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 5 on Operating Segments recorded in the audited Financial Statements. Operating Segment information is reported consistently with internal reporting provided to the chief operating decision maker. The chief operating decision maker, who is responsible for allocating resources and assessing operating segment performance, as well as making strategic decisions, is the Board of Directors.

In accordance with this policy, PTPI's business segments in accordance with the products and services produced, include 3 (three) segments: Fertilizer and Ammonia Segment, Construction Services Segment and Other Segments which are presented on a consolidated basis.

The Fertilizer and Ammonia segment is the largest contributor as well as the Company's core business. In 2022, its contribution to total sales and revenue reached 99.60%. As a business entity established by the Government of Indonesia to ensure the distribution and availability of fertilizers for the Indonesian market, the government assigned PI Group to distribute subsidized fertilizers for the agricultural sector.

KONTRIBUSI SEGMEN USAHA TERHADAP PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA LAINNYA
Contribution of Business Segments to Sales and Other Operating Income

Segmen Segment	2022		2021		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah Total (Rp juta | Rp billion)	Kontribusi Contribution (%)	Jumlah Total (Rp juta | Rp billion)	Kontribusi Contribution (%)	Jumlah Total (Rp juta | Rp billion)	Persentase Percentage (%)
Pupuk dan Amoniak Fertilizer and Ammonia	103.442.919	99,60	77.094.451	98,08	26.348.468	34,18
Jasa Konstruksi Construction Services	2.749.770	2,65	3.310.739	4,21	(560.969)	(16,94)
Lain-lain Others	12.559.199	12,09	7.333.918	9,33	5.225.281	71,25
Eliminasi* Elimination	(14.892.395)	(14,34)	(9.135.972)	(11,62)	(5.756.423)	63,01
Pendapatan Usaha Bersih **Net Revenues**	**103.859.493**	**100,00**	**78.603.136**	**100,00**	**25.256.357**	**32,13**

* Terdiri dari pupuk dan non pupuk
Consists of fertilizer and non-fertilizer

PROPORSI PENJUALAN PRODUK DAN SUBSIDI TERHADAP TOTAL PENDAPATAN
Proportion of Product Sales and Subsidies to Total Revenue

Segmen Segment	2022		2021		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah Total (Rp juta | Rp billion)	Kontribusi Contribution (%)	Jumlah Total (Rp juta | Rp billion)	Kontribusi Contribution (%)	Jumlah Total (Rp juta | Rp billion)	Persentase Percentage (%)
Penjualan Segmen Pupuk dan Amoniak serta Segmen Lain-lain Sales of Fertilizer and Ammonia Segment and Other Segments						
Penjualan Produk* Sales of Products	64.491.788	62,10	49.313.851	62,74	15.177.937	30,78
Penggantian Biaya Subsidi dari Pemerintah Indonesia Reimbursement of Subsidy from the Government of Indonesia	36.109.067	34,77	25.258.692	32,13	10.850.375	42,96
Pendapatan Jasa Rendering of Services	3.258.638	3,14	4.030.593	5,13	(771.955)	(19,15)
Jumlah Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan Total Revenue from Contract with Customers	**103.859.493**	**100,00**	**78.603.136**	**100,00**	**25.256.357**	**32,13**

* Terdiri dari pupuk dan non pupuk
Consists of fertilizer and non-fertilizer

SEGMEN PUPUK DAN AMONIAK

Segmen Pupuk dan Amoniak merupakan bisnis inti PTPI. Segmen ini memiliki kegiatan produksi dan perdagangan produk pupuk dan non-pupuk/amoniak yang ditopang oleh kelompok usaha. Adapun produk yang dihasilkan pada segmen ini adalah Pupuk Urea, NPK, SP-36, ZA, dan ZK, serta produk non pupuk berupa amoniak.

FERTILIZER AND AMMONIA SEGMENT

The Fertilizer and Ammonia segment is PTPI's core business. This segment has production and trading activities of fertilizer and non-fertilizer/ammonia products supported by business groups. The products produced in this segment are Urea, NPK, SP-36, ZA, and ZK fertilizers, as well as non-fertilizer products in the form of ammonia.

PRODUK PUPUK DAN AMONIAK PRODUKSI PI GRUP
PI Group Fertilizer and Ammonia Products

No	Produk Product	Uraian	Description
1	Urea	Pupuk dengan kandungan Nitrogen (N) sebesar 46% yang dipasarkan untuk sektor subsidi maupun non-subsidi (komersil). Pupuk Urea memiliki fungsi membuat tanaman lebih hijau, mempercepat pertumbuhan tanaman dan meningkatkan kandungan protein tanaman.	Fertilizer with a minimum Nitrogen (N) content of 46% which is marketed for both subsidized and non-subsidized (commercial) sectors. Urea fertilizer has the function of making plants greener, accelerating plant growth and increasing plant protein content.
2	NPK	Merupakan pupuk majemuk yang memiliki kandungan Nitrogen (N), Phospat (P), Kalium (K) dan unsur mikro dengan komposisi yang variatif disesuaikan dengan permintaan pasar. Pupuk NPK dipasarkan untuk sektor subsidi maupun non-subsidi. Pupuk NPK memiliki fungsi dapat meningkatkan hasil panen, membuat tanaman lebih hijau dan meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan hama penyakit dan kekeringan.	It is a compound fertilizer that contains Nitrogen (N), Phosphate (P), Potassium (K) and micro elements with a varied composition tailored to market demand. NPK fertilizers are marketed for both subsidized and non-subsidized sectors. NPK fertilizers have the function of increasing crop yields, making plants greener and increasing plant resistance to pests and drought.

No	Produk Product	Uraian	Description
3	SP-36	Merupakan pupuk yang dipasarkan untuk sektor non-subsidi. Pupuk SP-36 memiliki kandungan Phospat (P) sebesar 36% dan berfungsi untuk memacu pertumbuhan akar dan bunga serta masaknya buah dan biji.	It is a fertilizer marketed for both the subsidized and non-subsidized sectors. SP-36 fertilizer has a minimum Phosphate (P) content of 36% and functions to spur root and flower growth as well as fruit and seed ripening.
4	ZA	Merupakan pupuk yang dipasarkan untuk sektor non-subsidi. Pupuk ZA memiliki kandungan Nitrogen (N) sebesar 21% dan Sulfur 24% serta berfungsi untuk meningkatkan produksi hasil tebu, meningkatkan kualitas hasil panen, tanaman lebih sehat dan tahan terhadap hama.	It is a fertilizer marketed for both the subsidized and non-subsidized sectors. ZA fertilizer has a minimum Nitrogen (N) content of 21% and a minimum Sulfur of 24% and functions to increase sugarcane yield production, improve crop quality, healthier plants and resistance to pests.
5	ZK	Merupakan pupuk yang memiliki kandungan K2O sebesar 50% dan Sulfur 17% dan berfungsi untuk meningkatkan unsur hara tanah, membuat tanaman lebih tegak dan kokoh, memperbaiki warna, aroma, dan rasa.	It is a fertilizer that has a minimum K2O content of 50% and a minimum Sulfur of 17% and functions to increase soil nutrients, make plants more upright and sturdy, improve color, aroma, and taste.
6	Amoniak Ammonia	Merupakan bahan mentah industri kimia dengan kemurnian 99,5% yang dipasarkan untuk sektor dalam negeri maupun ekspor.	It is a chemical industry raw material with a minimum purity of 99.5% that is marketed for the domestic and export sectors.

Khusus untuk produk pupuk, Perusahaan memiliki 2 (dua) lini bisnis: yaitu pupuk bersubsidi dan non subsidi. Pupuk bersubsidi adalah penugasan dari Pemerintah.

MEKANISME PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI/ PUPUK PSO

PI Grup memiliki penugasan untuk menyalurkan dan mendistribusikan pupuk bersubsidi atau pupuk *Public Service Obligation* (PSO). Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tanggal 1 April 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Berdasarkan peraturan tersebut, kewajiban yang diemban Perusahaan adalah:

1. PI Grup Wajib menjamin ketersediaan stok pupuk bersubsidi di Lini III paling sedikit untuk kebutuhan selama 2 (dua) minggu ke depan sesuai dengan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi dalam negeri yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
2. PI Grup Wajib menjamin ketersediaan stok pupuk bersubsidi di Lini III paling sedikit untuk kebutuhan selama 3 (tiga) minggu ke depan sesuai dengan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi dalam negeri yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri pada setiap puncak musim tanam bulan November hingga bulan Januari;
3. Distributor wajib menjamin ketersediaan stok pupuk bersubsidi di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya paling sedikit untuk kebutuhan 2 (dua)

Specifically for fertilizer products, the Company has 2 (two) business lines: namely subsidized and non-subsidized fertilizers. Subsidized fertilizer is an assignment from the Government.

MECHANISM OF PROCUREMENT AND DISTRIBUTION OF SUBSIDIZED FERTILIZERS/PSO FERTILIZERS

PI Group is assigned to carry out the procurement and distribution of subsidized fertilizers or Public Service Obligation (PSO) fertilizers. The policy of procurement and distribution of subsidized fertilizers is regulated in the Regulation of the Minister of Trade No. 15/M-DAG/PER/4/2013 dated April 1, 2013 concerning Procurement and Distribution of Subsidized Fertilizers for the Agricultural Sector. There are several obligations stipulated in the regulation, including:

1. PI Group must guarantee the availability of subsidized fertilizer stock in Line III at least for the needs for the next 2 (two) weeks in accordance with the domestic subsidized fertilizer needs plan stipulated by Ministerial Regulation;
2. PI Group must guarantee the availability of subsidized fertilizer stocks at Line III for at least the needs for the next 3 (three) weeks in accordance with the domestic subsidized fertilizer needs plan stipulated by Ministerial Regulation at each peak of the planting season from November to January;
3. Distributors must ensure the availability of subsidized fertilizer stocks in the area under their responsibility for at least the needs of the next 2 (two) weeks in

minggu ke depan sesuai dengan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setempat;

4. Pengecer wajib memiliki persediaan stok pupuk bersubsidi paling sedikit untuk kebutuhan 1 (satu) minggu ke depan sesuai dengan RDKK di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

accordance with the subsidized fertilizer needs plan stipulated by the Regent/Mayor Regulation;

4. Retailers must have at least 1 (one) week's supply of subsidized fertilizer in accordance with RDKK in the area under their responsibility.

Perusahaan mengatur pengadaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi di dalam negeri untuk sektor pertanian secara nasional, mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV sesuai dengan prinsip "6 (Enam) Tepat": Tepat Jenis, Jumlah, Harga, Tempat, Waktu, dan Mutu. Mekanisme dan pola distribusi pupuk bersubsidi dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

The company is obliged to ensure the procurement and availability of subsidized fertilizer stocks in the country for the agricultural sector nationally, starting from Line I to Line IV in accordance with the "6 (Six) Right" principle: Right Type, Quantity, Price, Place, Time and Quality. The mechanism and distribution pattern of subsidized fertilizers can be seen in the chart below.

MEKANISME PENDISTRIBUSIAN DARI LINI I-LINI IV DIATUR SESUAI PERMENDAG NO. 15/M-DAG-PER-4/2013

The distribution mechanism from Line I to Line IV is regulated in accordance with MOT Regulation No. 15/M-DAG-PER-4/2013

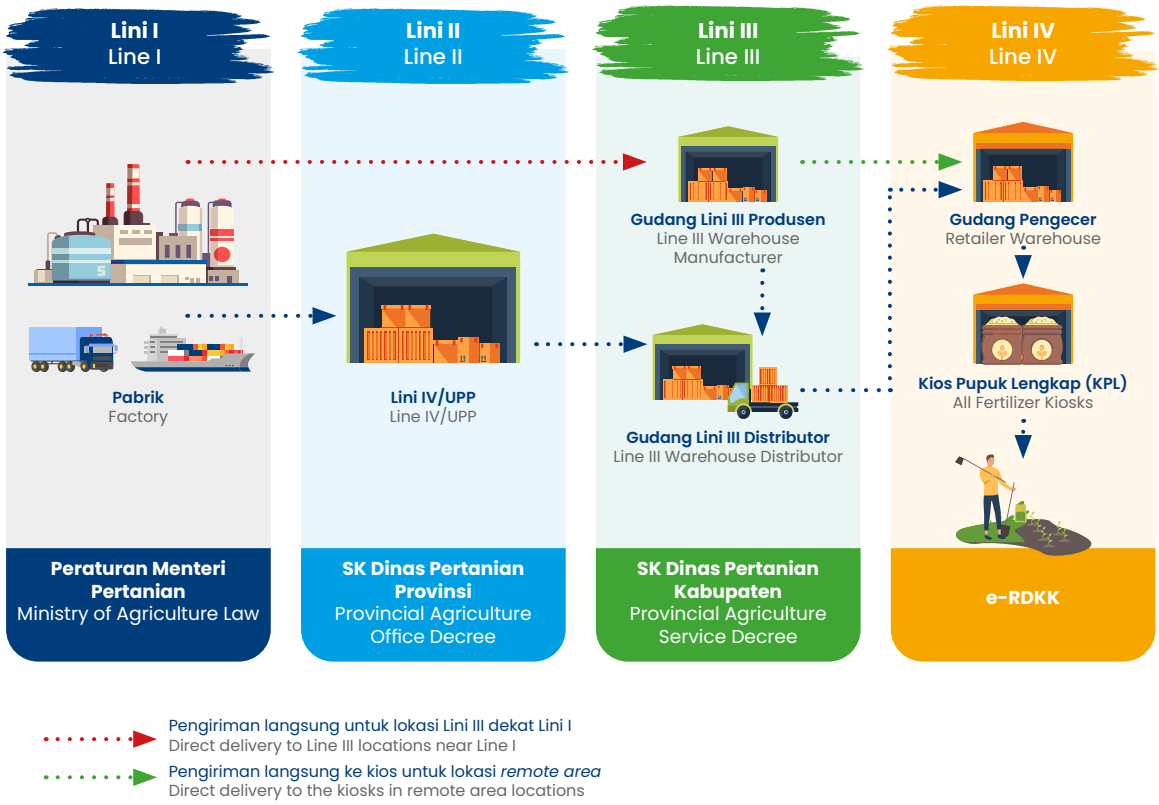

Kuantum moda transportasi PTPI dalam rangka penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

The quantum of PTPI transportation modes in the context of subsidized fertilizer distribution can be seen in the following table:

KUANTUM MODA TRANSPORTASI PI GROUP
PI Group Transportation Mode Quantum

No	Produsen Producer	Kuantum Quantum	Moda Transportasi Transportation Mode (ton)	
			Angkutan Darat Land Transportation	Angkutan Laut Sea Transportation
1	PT Petrokimia Gresik	4.309.763	3.833.040	476.723
2	PT Pupuk Iskandar Muda	845.802	660.040	185.762
3	PT Pupuk Kalimantan Timur	1.428.939	944.150	484.789
4	PT Pupuk Kujang	891.686	891.586	-
5	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	2.313.445	1.902.282	432.764
	Jumlah | Total	**9.789.536**	**8.231.098**	**1.580.037**

FOKUS DAN STRATEGI TAHUN 2022

Sebagai bisnis inti, PI Grup mengembangkan Segmen Pupuk dan Amoniak dengan fokus dan strategi sebagai berikut:

1. Pengembangan Amurea Papua Barat dengan Kapasitas Amonia 2.500 MTPD dan Urea 3.500 MTPD dengan tujuan Pengembangan industri pupuk di wilayah timur Indonesia dalam rangka meningkatkan *competitiveness* produk serta monetisasi potensi gas di Papua.
2. Pengembangan Methanol Papua Barat dengan Kapasitas 3.000 MTPD dalam rangka Pengembangan Industri Petrokimia di wilayah timur Indonesia dalam rangka monetisasi potensi gas di Papua. Skema proyek direncanakan JV dengan mitra strategis.
3. Pembangunan NPK Chemical PT Pupuk Iskandar Muda Kapasitas 500.000 MTPY sebagai Langkah untuk diversifikasi produk pupuk PT PIM sekaligus meningkatkan kapasitas produksi pupuk NPK PI group dalam rangka pemenuhan kebutuhan pasar NPK.
4. Pengembangan Produk *Adjacent Chemical*, yaitu *Soda Ash* di PKG dan PKT dengan kapasitas masing-masing 909 TPD (300.000 TPY) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
5. Pengembangan produk katalis merah putih yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan katalis dalam negeri dengan menggunakan teknologi hasil riset peneliti Institut Teknologi Bandung dengan kapasitas 800 MTPY.

FOCUS AND STRATEGY FOR 2022

As the core business, PI Group develops the Fertilizer and Ammonia Segment with the following focus and strategy:

1. West Papua Amurea Development with Ammonia Capacity of 2,500 MTPD and Urea 3,500 MTPD with the aim of developing the fertilizer industry in eastern Indonesia in order to increase product competitiveness and monetize the gas potential in Papua.
2. West Papua Methanol Development with a Capacity of 3,000 MTPD in the context of Petrochemical Industry Development in eastern Indonesia in order to monetize the potential of gas in Papua. The project scheme is planned to be a JV with strategic partners.
3. Construction of NPK Chemical PT Pupuk Iskandar Muda with a Capacity of 500,000 MTPY as a Step to diversify PT PIM's fertilizer products while increasing PI group's NPK fertilizer production capacity in order to meet NPK market needs.
4. Development of Adjacent Chemical Products namely Soda Ash at PKG and PKT with a capacity of 909 TPD each (300,000 TPY) which aims to fulfill domestic needs.
5. Development of red and white catalyst products that aim to fulfill domestic catalyst needs using technology from Bandung Institute of Technology researchers with a capacity of 800 MTPY.

6. Pusri IIIB dengan Kapasitas Amonia 1.350 MTPD dan Urea 2.750 MTPD merupakan pengembangan pabrik amurea baru di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dalam rangka mengganti pabrik lama yang sudah tidak efisien dalam rangka meningkatkan *competitiveness* produk serta monetisasi potensi gas yang cukup besar di Sumatera Selatan.
7. *Revamp Ammonia* K-II PKT dengan tujuan penghematan konsumsi gas bumi untuk meningkatkan daya saing Pabrik Kaltim-2 dan menambah profit perusahaan melalui efisiensi pemakaian gas bumi.
8. Ammonium Nitrat PT KAN-PKT kapasitas 75.000 TPY merupakan strategi diversifikasi produk dalam mengembangkan produk *adjacent chemical* untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri.
9. Implementasi Digital & *Advance Analytics* sebagai langkah strategis PI untuk membentuk tim digital dan *advanced analytics* yang inovatif pada level *holding* sehingga dapat memanfaatkan *data analytics* dalam proses pengambilan keputusan operasional perusahaan.
10. *Digital Fetilizer* merupakan sistem berbasis data *realtime* yang dikirim langsung dari *Distributed Control System* (DCS) atau pusat kendali di pabrik dengan tujuan penurunan *downtime* pabrik Amoniak & Urea di pabrik pilot sebesar 12%.
11. Implementasi Aplikasi REKAN (RMS) di 5.000 Kios Pupuk sebagai upaya digitalisasi di kios untuk memudahkan transaksi di kios untuk pupuk subsidi maupun komersil, *inventory management, monitoring* & *tracking* dan data analitik, serta menegaskan PI sebagai mitra utama bagi kios dalam berbisnis dan sebagai *Gateway* O2O untuk ekosistem BUMN dan *e-commerce*.
12. Program Makmur (*Agrosolution*) 275.000 Ha untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi pertanian untuk komoditas padi, jagung, tebu, sawit, dan kopi
13. Akuisisi tambang *potash* di luar negeri sebagai upaya PI untuk mengamankan pasokan bahan baku NPK khususnya *potash* bersama dengan BUMN lainnya yang bergerak dalam bidang pertambangan.
14. *Streamlining* Lini Bisnis PI Group dengan tujuan menghasilkan Portofolio Bisnis yang lebih terstruktur dan menjaga peningkatan/pertumbuhan profit dan penguatan bisnis yang lebih signifikan dari Anak Perusahaan, Cucu Perusahaan, dan Afiliasi sehingga dapat meningkatkan kontribusi bagi PI.
15. Pengembangan *Green Industry Cluster* dalam rangka mengembangkan kawasan industri hijau dan sebagai upaya melakukan program *decarbonisasi* di antaranya melalui pengembangan *Blue* dan *Green Ammonia*.

6. Pusri IIIB with Ammonia Capacity 1,350 MTPD and Urea 2,750 MTPD is the development of a new amurea plant at PT Pupuk Sriwidjaja Palembang in order to replace the old plant which is no longer efficient in order to increase product competitiveness and monetize the considerable gas potential in South Sumatra.
7. Revamp Ammonia K-II PKT with the aim of saving natural gas consumption to increase the competitiveness of the Kaltim-2 Plant and increase company profits through the efficiency of natural gas usage.
8. Ammonium Nitrate PT KAN-PKT 75,000 TPY capacity is a product diversification strategy in developing adjacent chemical products to meet domestic market needs.
9. Implementation of Digital & Advance Analytics as PI's strategic step to establish an innovative digital and advanced analytics team at the holding level so that it can utilize data analytics in the company's operational decision-making process.
10. Digital Fetilizer is a realtime data-based system sent directly from the Distributed Control System (DCS) or control centre at the plant with the aim of reducing Ammonia & Urea plant downtime at the pilot plant by 12%.
11. Implementation of REKAN Application (RMS) in 5,000 Fertiliser Kiosks as a digitalisation effort at kiosks to facilitate transactions at kiosks for subsidised and commercial fertilisers, inventory management, monitoring & tracking and data analytics, as well as confirming PI as the main partner for kiosks in doing business and as the O2O Gateway for the BUMN ecosystem and e-commerce.
12. Program Makmur (Agrosolution) 275,000 Ha to increase agricultural production and productivity through the application of agricultural technology for rice, maize, sugarcane, palm, and coffee commodities
13. Acquisition of potash mines overseas as PI's effort to secure the supply of NPK raw materials, especially potash, together with other SOEs engaged in mining.
14. Streamlining PI Group's Business Lines with the aim of producing a more structured Business Portfolio and maintaining a more significant increase/growth in profits and business strengthening from Subsidiaries, Grandchildren, and Affiliates so as to increase contributions to PI.
15. Development of Green Industry Cluster in order to develop a green industrial area and as an effort to carry out decarbonisation programs including through the development of Blue and Green Ammonia.

Program ini melibatkan BUMN lainnya, *offtaker* serta penyedia teknologi.

16. *Unlock Value* PT Pupuk Kalimantan Timur yaitu melakukan *unlock value* antara lain berupa kemitraan strategis, IPO, atau bentuk lainnya untuk mendapatkan pendanaan sesuai kebutuhan investasi dan pengembangan.
17. Reformasi Pupuk Subsidi dalam upaya PI bersama dengan K/L terkait untuk melakukan pembenahan dalam tata Kelola penyaluran pupuk bersubsidi.

PENGEMBANGAN KIOS KHUSUS: TOKO PE-I

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pupuk petani, PT Pupuk Indonesia (Persero) sejak awal tahun 2022 tengah menjalankan program pengembangan kios khusus yang menjual pupuk non subsidi atau komersil produksi PI Grup. Kios baru ini atau disebut Toko Pe-i juga menjadi jawaban atas masih banyaknya petani yang merasa kesulitan menjangkau atau membeli produk komersil milik perusahaan.

Program pengembangan kios komersil ini bertujuan untuk memudahkan petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk, sehingga para petani tidak hanya bergantung pada pupuk bersubsidi yang berasal dari pemerintah. Kehadiran Toko Pe-i di lokasi-lokasi strategis di seluruh Indonesia terutama di sentra pertanian dan hortikultura akan memperluas jangkauan pasar, mendekatkan diri kepada petani, sekaligus sebagai sarana edukasi dan informasi mengenai manfaat pupuk.

Kelebihan menjadi mitra Toko Pe-i adalah mendapatkan jaminan yang akan menjadi keuntungan atau nilai tambah bagi para mitra. Jaminan yang dimaksud diantaranya adalah jaminan keaslian pupuk, jaminan kualitas pupuk, dan jaminan ketersediaan pupuk. Disamping itu disiapkan juga beberapa kegiatan promosi bagi mitra yang bertujuan untuk peningkatan penjualan produk pupuk di Toko Pe-i.

Adapun kemitraan Toko Pe-i yang layak operasional per tanggal 31 Desember 2022 sebanyak 350 Unit tersebar di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan masih akan terus bertambah menuju 1.000 Toko Pe-i sampai akhir tahun 2023.

This programme involves other SOEs, offtakers and technology providers.

16. Unlock Value PT Pupuk Kalimantan Timur, namely unlocking value in the form of strategic partnerships, IPOs, or other forms to obtain funding according to investment and development needs.
17. Subsidized Fertilizer Reform in an effort by PI together with related institutions to make improvements in the governance of subsidized fertilizer distribution.

SPECIALTY KIOSK DEVELOPMENT: TOKO PE-I

In order to meet the fertilizer needs of farmers, PT Pupuk Indonesia (Persero) since the beginning of 2022 has been running a special kiosk development program that sells non-subsidized or commercial fertilizers produced by PI Group. This new kiosk or called Toko Pe-i is also the answer to the many farmers who find it difficult to reach or buy the company's commercial products.

The commercial kiosk development program aims to make it easier for farmers to meet their fertilizer needs, so that farmers do not only depend on subsidized fertilizers from the government. The presence of Toko Pe-i in strategic locations throughout Indonesia, especially in agricultural and horticultural centers, will expand market reach, get closer to farmers, as well as a means of education and information about the benefits of fertilizers.

The advantage of becoming a Toko Pe-i partner is getting guarantees that will be an advantage or added value for partners. The guarantees in question include a guarantee of fertilizer authenticity, a guarantee of fertilizer quality, and a guarantee of fertilizer availability. In addition, several promotional activities are also prepared for partners aimed at increasing sales of fertilizer products at Toko Pe-i.

The Toko Pe-i partnership that is operationally feasible as of December 31, 2022 is 350 units spread across Sumatra, Java, Bali, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Papua, and will continue to grow towards 1,000 Toko Pe-i by the end of 2023.

PETA KEMITRAAN TOKO PE-I
Toko Pe-i Partnership Map

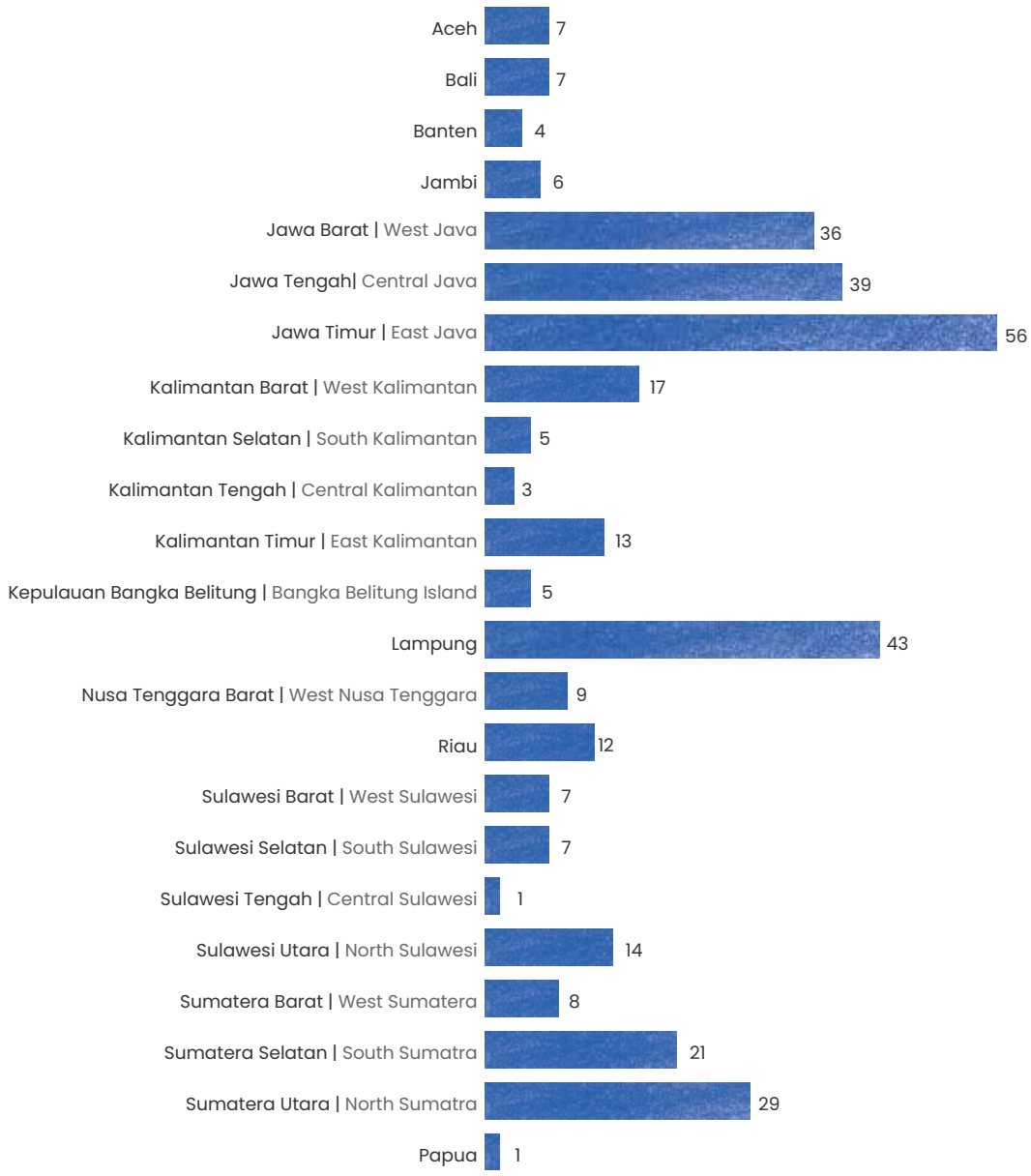

KINERJA TAHUN 2022: ASPEK PRODUKSI

Kegiatan operasional PI Grup untuk Segmen Pupuk dan Amoniak dijalankan oleh entitas anak, yaitu: PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, dan PT Pupuk Iskandar Muda.

Pada tahun 2022, realisasi tonase produksi pupuk urea mencapai 7,46 juta ton, turun 3,2% dibandingkan kinerja tahun 2021 yang sebanyak 7,96 juta ton. Penurunan produksi

PERFORMANCE IN 2022: PRODUCTION ASPECTS

PI Group's operational activities for the Fertilizer and Ammonia Segment are carried out by its subsidiaries, namely: PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, and PT Pupuk Iskandar Muda.

In 2022, the realized tonnage of urea fertilizer production reached 7.46 million tons, a decrease of 3.2% compared to the 2021 performance of 7.96 million tons. The decrease in

tersebut disebabkan jumlah pabrik yang melaksanakan *Turn Around* (TA) sebanyak 6 pabrik di tahun 2022.

Sedangkan tonase produksi pupuk NPK (termasuk DAP) tahun 2022 tercatat 3.424.685 ton, meningkat 8,06% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 3.169.211 ton.

Realisasi tonase produksi pupuk lainnya pada tahun 2022 mencapai 904.340 ton, turun sebesar 17,66% dibandingkan tahun 2021 sebesar 1.098.385 ton. Penurunan produksi tersebut disebabkan pengaturan stok pupuk SP-36 nasional, penyesuaian kebijakan penghapusan subsidi pupuk SP-36 dan pengalihan produksi pabrik PF1 menjadi pupuk NPK granulasi.

Kinerja produksi amoniak pada tahun 2022 menurun 3,13% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 6,15 juta ton pada tahun 2021 menjadi 5,96 juta ton.

production was due to the number of factories that carried out Turn Around (TA) as many as 6 factories in 2022.

Meanwhile, the tonnage of NPK fertilizer production (including DAP) in 2022 was recorded at 3,424,685 tons, an increase of 8.06% compared to 2021 which reached 3,169,211 tons.

The realization of other fertilizer production tonnage in 2022 reached 904,340 tons, a decrease of 17.66% compared to 2021 of 1,098,385 tons. The decrease in production was due to the regulation of national SP-36 fertilizer stock, policy adjustment of SP-36 fertilizer subsidy removal and the transfer of PF1 factory production to granulated NPK fertilizer.

Ammonia production performance in 2022 decreased by 3.13% compared to the previous year, from 6.15 million tons in 2021 to 5.96 million tons.

KINERJA PRODUKSI PUPUK DAN AMONIAK
Fertilizer and Ammonia Production Performance

Produksi Pupuk dan Amoniak	Realisasi 2022 2022 Realization (ton)	Realisasi 2021 2021 Realization (ton)	Target 2022 2022 Target (ton)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	Pencapaian Target 2022 2022 Target Achievement (%)	Fertilizer and Ammonia Products
	(1)	(2)	(3)	((1-2)/2))	(1/3)	
Pupuk						**Fertilizer**
Urea	7.467.192	7.968.504	8.069.200	(6,29)	92,54	Urea
NPK	3.424.685	3.169.211	2.833.500	8 ,06	120,86	NPK
Pupuk Lainnya*)	904.340	1.098.385	1.453.000	(17,67)	62,24	Other Fertilizer*)
Subtotal Produksi Pupuk	**11.796.218**	**12.236.101**	**12.355.700**	**(3,59)**	**95,47**	**Fertilizer Production Subtotal**
Non-Pupuk						**Non-Fertilizer**
Amoniak	5.957.455	6.149.670	6.092.400	(3,13)	97,79	Ammonia
Non-Amoniak**)	1.109.076	1.073.056	1.211.800	3,36	91,52	Non-Ammonia**)
Subtotal Produksi Non-Pupuk	**7.066.531**	**7.222.726**	**7.304.200**	**(2,16)**	**96,75**	**Subtotal Non-Fertilizer Production**
Produk Sampling						**Side Products**
Subtotal Produksi Produk Samping*)	**73.502**	**66.164**	**73.900**	**11,09**	**99,46**	**Subtotal by Product Production***)**
Total Produksi	**18.936.251**	**19.524.990**	**19.733.800**	**(3,02)**	**95,96**	**Total Production**

*) Terdiri dari SP-36, ZA, dan ZK
**) Terdiri dari Asam Sulfat dan Asam Fosfat
***) Terdiri dari AlF3, HCl, dan CO_2

*) Consists of SP-36, ZA and ZK
**) Consists of Sulfuric Acid and Phosphoric Acid
***) Consists of AlF3, HCl, and CO_2

PI Grup menggunakan gas bumi sebagai bahan baku utama dalam produksi pupuk urea. Energi tersebut juga dimanfaatkan sebagai sumber energi. Perusahaan

PI Group uses natural gas as the main raw material in the production of urea fertilizer. The energy is also utilized as an energy source. The company has a number of natural gas

telah memiliki sejumlah perjanjian pengadaan gas bumi dengan beberapa penyedia sebagai salah satu upaya kesinambungan dalam produksi.

procurement agreements with several providers as one of the efforts to sustain production.

Gas bumi adalah komponen utama bahan baku sehingga efisiensi konsumsi gas menjadi sangat berpengaruh pada Harga Pokok Produksi (HPP). Capaian kinerja Rasio konsumsi energi tahun 2022 seperti pada tabel berikut:

Natural gas is the main component of raw materials so that the efficiency of gas consumption is very influential on the Cost of Production (COGS). The performance achievement of the energy consumption ratio in 2022 is as shown in the following table:

KINERJA RASIO KONSUMSI GAS
Gas Consumption Ratio Performance

Produksi Pupuk dan Amoniak	Realisasi 2022 2022 Realization (MMBTU/ ton)	Realisasi 2021 2021 Realization (MMBTU/ ton)	Target 2022 2022 Target (MMBTU/ ton)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	Pencapaian Target 2022 2022 Target Achievement (%)	Fertilizer and Ammonia Production
	(1)	(2)	(3)	((1-2)/2))	(1/3)	
Urea	27,82	27,45	28,18	1,35	98,72	Urea
Amoniak	35,77	35,51	36,22	0,74	98,76	Ammonia

KINERJA TAHUN 2022: ASPEK PENJUALAN

Perusahaan membagi penjualan pupuk ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu penjualan pupuk bersubsidi atau pupuk *Public Service Obligation* (PSO) yang tata niaganya diatur regulasi pemerintah serta penjualan pupuk komersial atau non-subsidi/Non-PSO. Penyaluran pupuk bersubsidi harus memenuhi 6 (enam) prinsip utama yang sudah dicanangkan atau disebut 6T: Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Tempat, Tepat Waktu, dan Tepat Mutu. Sedangkan pupuk dan non pupuk komersil dipasarkan kepada jaringan distribusi domestik, penjualan industri dan ekspor.

2022 PERFORMANCE: SALES ASPECT

The Company divides fertilizer sales into 2 (two) categories, namely sales of subsidized fertilizers or Public Service Obligation (PSO) fertilizers whose trading procedures are regulated by government regulations and sales of commercial or non-subsidized/Non-PSO fertilizers. The distribution of subsidized fertilizers must meet 6 (six) main principles that have been launched or called 6T: Right Type, Right Amount, Right Price, Right Place, Right Time, and Right Quality. Meanwhile, commercial fertilizers and non-fertilizers are marketed to domestic distribution networks, industrial sales and exports.

VOLUME PENJUALAN PUPUK DAN AMONIAK
Sales Volume of Fertilizer and Ammonia

Produksi Pupuk dan Amoniak	Realisasi 2022 2022 Realization (ton)	Realisasi 2021 2021 Realization (ton)	Target 2022 2022 Target (ton)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	Pencapaian Target 2022 2022 Target Achievement (%)	Fertilizer and Ammonia Products
	(1)	(2)	(3)	((1-2)/2))	(1/3)	
Pupuk						**Fertilizer**
Pupuk PSO						**PSO Fertilizer**
Urea	3.890.315	3.620.209	4.232.704	7,46	91,91	Urea
NPK	2.897.488	2.702.892	2.481.914	7,20	116,74	NPK
Pupuk Lainnya*)	618.764	1.595.945	2.403.439	(61,23)	25,74	Others*)
Subtotal Produksi Pupuk PSO	**7.406.566**	**7.919.045**	**9.118.057**	**(6,47)**	**81,23**	**Subtotal Sales of PSO Fertilizer**

Produksi Pupuk dan Amoniak	Realisasi 2022 2022 Realization (ton)	Realisasi 2021 2021 Realization (ton)	Target 2022 2022 Target (ton)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	Pencapaian Target 2022 2022 Target Achievement (%)	Fertilizer and Ammonia Products
	(1)	(2)	(3)	((1-2)/2))	(1/3)	
Pupuk Non PSO						**Non PSO Fertilizer**
Urea	3.378.262	4.259.894	3.530.500	(20,70)	95,69	Urea
NPK	362.766	576.516	397.408	(37,08)	91,28	NPK
Lainnya**)	415.975	156.715	664.500	165,43	62,60	Others**)
Subtotal Penjualan Pupuk Non-PSO	**4.157.003**	**4.993.125**	**4.592.408**	**(16,75)**	**90,52**	**Subtotal Non-PSO Fertilizer Sales**
Subtotal Penjualan Pupuk	**11.563.569**	**12.912.170**	**13.710.465**	**(10,44)**	**84,34**	**Subtotal Fertilizer Sales**
Non Pupuk						**Non Fertilizer**
Amoniak						**Ammonia**
Amoniak	1.055.915	988.317	872.790	6,84	120,98	Ammonia
Subtotal Penjualan Amoniak	**1.055.915**	**988.317**	**872.790**	**6,84**	**120,98**	**Subtotal Ammonia Sales**
Non-Amoniak						**Non-Ammonia**
Asam Sulfat	323.609	196.087	157.000	65,03	206,12	Sulfuric Acid
Asam Fosfat	5.302	9.609	17.000	(44,82)	31,19	Phosphoric Acid
Lainnya***)	68.714	65.996	72.350	4,12	94,97	Others***)
Subtotal Penjualan Non-Amoniak	**397.625**	**271.693**	**246.350**	**46,35**	**161,41**	**Subtotal Non-Ammonia Sales**
Subtotal Penjualan Non-Pupuk	**1.453.540**	**1.260.010**	**1.119.140**	**15,36**	**129,88**	**Subtotal Non-Fertilizer Sales**
Total Volume Penjualan	**13.017.109**	**14.172.180**	**14.829.605**	**(8,15)**	**87,78**	**Total Sales Volume**

*) Terdiri dari SP-36, ZA, dan ZK
**) Terdiri dari Asam Sulfat dan Asam Fosfat
***) Terdiri dari AlF3, HCl, dan CO_2

*) Consists of SP-36, ZA and ZK
**) Consists of Sulfuric Acid and Phosphoric Acid
***) Consists of AlF3, HCl, and CO_2

Pupuk Bersubsidi/Pupuk PSO

Untuk sektor PSO, pupuk yang disalurkan oleh PI Grup meliputi urea, ZA, SP-36, NPK serta organik. Sepanjang tahun 2022, Perusahaan telah menyalurkan pupuk urea PSO sebanyak 3,89 Juta ton, lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 sebesar 3,62 juta ton. Penyaluran pupuk NPK PSO sebanyak 2,89 Juta ton, lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 sebesar 2,70 juta ton.

Penyaluran pupuk PSO lainnya tahun 2022 sebesar 618 ribu juta ton, turun dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 1,59 juta ton. Penurunan ini disebabkan karena adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah pada Juli 2022 melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 10 tahun 2022, adapun beberapa perubahan antara lain: (1) perubahan jenis pupuk yang di subsidi menjadi 2 (dua) jenis pupuk yaitu Urea dan NPK, dan (2) pengurangan jumlah komoditi yang di subsidi menjadi hanya komoditi padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, kopi rakyat, tebu dan kakao.

Subsidized Fertilizer/PSO Fertilizer

For the PSO sector, fertilizers distributed by PI Group include urea, ZA, SP-36, NPK and organic. Throughout 2022, the Company has distributed 3.89 million tons of urea PSO fertilizer, higher than in 2021 of 3.62 million tons. The distribution of NPK PSO fertilizer was 2.89 million tons, higher than in 2021 of 2.70 million tons.

The distribution of other PSO fertilizers in 2022 amounted to 618 thousand million tons, a decrease compared to 2021 which reached 1.59 million tons. This decrease is due to a change in policy from the Government in July 2022 through Regulation of the Minister of Agriculture No. 10 of 2022, as for some changes, among others: (1) changes in the types of fertilizers subsidized to 2 (two) types of fertilizers, namely Urea and NPK, and (2) reduction in the number of commodities subsidized to only the commodities of rice, corn, soybeans, onions, garlic, chili, people's coffee, sugarcane, and cocoa.

KINERJA PENJUALAN PUPUK PSO
PSO Fertilizer Sales Performance

(ton) (ton)

	2022	2021	2020	2019	2018	
Urea PSO	3.890.315	3.620.209	3.921.178	3.719.397	4.100.528	Urea PSO
NPK PSO	2.897.488	2.702.892	2.592.052	2.411.728	2.658.688	NPK PSO
Pupuk Lainnya	618.764	1.595.945	1.916.884	2.577.788	2.581.022	Other Fertilizers

Dari sisi nilai, total penjualan pupuk PSO tahun 2022 mencapai Rp13,24 triliun menurun 3,35% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp13,70 triliun.

Penggantian biaya subsidi dari pemerintah tahun 2022 mencapai Rp36,11 triliun atau meningkat 42,96% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp25,26 triliun, hal ini utamanya disebabkan oleh kenaikan pendapatan NPK subsidi dari 5,07 juta ton pada tahun 2021 menjadi 5,40 juta ton di tahun 2022.

In terms of value, the total PSO fertilizer sales in 2022 reached Rp13.24 trillion, a decrease of 3.35% compared to 2021 which amounted to Rp13.70 trillion.

Reimbursement of subsidy costs from the government in 2022 reached Rp36.11 trillion or an increase of 42.96% compared to Rp25.26 trillion in 2021, this was mainly due to an increase in subsidized NPK revenue from 5.07 million tons in 2021 to 5.40 million tons in 2022.

NILAI PENJUALAN PUPUK PSO
Sales Value of PSO Fertilizer

(Rp juta) (Rp million)

	2022	2021	2020	2019	2018	
Penjualan Pupuk PSO	13.236.944	13.698.647	12.321.730	13.387.374	13.216.339	PSO Fertilizer Sales
Penggantian Biaya Subsidi dari Pemerintah Indonesia	36.109.067	25.258.692	25.712.148	27.875.811	28.568.585	Reimbursement of Subsidy from the Government of Indonesia Income

Pupuk Non Subsidi /Non-PSO

Pada sektor Non-PSO, tonase penjualan pupuk di tahun 2022 mengalami penurunan 15,7% dibandingkan tonase penjualan pupuk di tahun 2021, yaitu dari 4,16 juta ton menjadi 4,94 juta ton. Penurunan ini terutama karena penurunan penjualan pupuk urea dan NPK komersil dalam negeri dibandingkan tahun sebelumnya.

Tonase penjualan pupuk urea tahun 2022 sebesar 3,38 juta ton, mengalami penurunan 20,6% dibandingkan tahun 2021 sebesar 4,26 juta ton. Sementara tonase penjualan pupuk NPK mengalami penurunan sebesar 37%, yaitu dari 577 ribu ton di tahun 2021 menjadi 363 ribu ton di tahun 2022. Namun demikian, tonase penjualan pupuk lainnya mengalami kenaikan 165%, dari 157 ribu ton di tahun 2021 menjadi 416 ribu ton di tahun 2022 terutama karena naiknya penyaluran pupuk ZA dan SP-36 dibandingkan tahun 2021.

Non-Subsidized /Non-PSO Fertilizer

In the Non-PSO sector, the tonnage of fertilizer sales in 2022 decreased by 15.7% compared to the tonnage of fertilizer sales in 2021, from 4.16 million tons to 4.94 million tons. This decrease was mainly due to a decline in domestic sales of commercial urea and NPK fertilizers compared to the previous year.

Sales tonnage of urea fertilizer in 2022 amounted to 3.38 million tons, a decrease of 20.6% compared to 2021 of 4.26 million tons. Meanwhile, the sales tonnage of NPK fertilizer decreased by 37%, from 577 thousand tons in 2021 to 363 thousand tons in 2022. However, the sales tonnage of other fertilizers increased by 165%, from 157 thousand tons in 2021 to 416 thousand tons in 2022 mainly due to the increase in the distribution of ZA and SP-36 fertilizers compared to 2021.

KINERJA PENJUALAN PUPUK NON-PSO
Non-PSO Fertilizer Sales Performance

(ton) (ton)

	2022	2021	2020	2019	2018	
Urea Non-PSO	3.378.262	4.259.894	4.292.128	3.366.802	3.025.715	Non-PSO Urea
NPK Non-PSO	362.766	576.516	567.259	476.704	358.364	Non-PSO NPK
Pupuk Non-PSO Lainnya*)	415.975	156.715	84.501	53.644	76.298	Other Non-PSO Fertilizer*)

*) Terdiri dari SP-36, ZA, KCL, Organik dan lainnya

* Consists of SP-36, ZA, KCL, Organic and others

Peningkatan tonase penjualan berdampak pada penambahan nilai penjualan pupuk Non-PSO secara keseluruhan yang mengalami kenaikan 32,92%, yaitu dari Rp25,54 triliun di tahun 2021 menjadi Rp33,95 triliun di tahun 2022. Peningkatan nilai penjualan pupuk Non PSO terutama disebabkan karena tingginya harga jual yang dimanfaatkan dengan optimalnya penjualan pupuk Non-PSO.

The increase in sales tonnage had an impact on the increase in the overall sales value of Non-PSO fertilizers, which increased by 32.92%, from Rp25.54 trillion in 2021 to Rp33.95 trillion in 2022. The increase in the sales value of Non PSO fertilizers was mainly due to the high selling price that was utilized by the optimal sales of Non PSO fertilizers.

KINERJA PENJUALAN PUPUK NON-PSO
Sales Value of Non-PSO Fertilizer

(Rp juta) (Rp million)

	2022	2021	2020	2019	2018	
Urea Non-PSO	33.953.220	25.540.111	19.079.112	14.074.052	10.521.369	Non-PSO Fertilizer

Amoniak dan Non-Amoniak

Realisasi volume penjualan amoniak pada tahun 2022 mencapai 1.055.915 ton, naik 6,84% dari volume penjualan pada tahun sebelumnya sebanyak 988.317 ton. Kenaikan ini dikarenakan tingginya permintaan pasar amoniak. Sedangkan realisasi volume penjualan non-amoniak pada tahun 2022 mencapai 397.625 ton, naik 46,35% dari volume penjualan pada tahun sebelumnya sebanyak 271.693 ton.

Dalam kondisi tersebut, Perusahaan lebih mengoptimalkan amoniak untuk dijual di sektor Non-PSO yang memberikan margin lebih baik. Sedangkan tonase penjualan non-amoniak mengalami kenaikan 46,32% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 272 ribu ton di tahun 2021 menjadi 398 ribu ton di tahun 2022.

Ammonia and Non-Ammonia

The realization of ammonia sales volume in 2022 reached 1,055,915 tons, up 6.84% from the sales volume in the previous year of 988,317 tons. This increase is due to the high market demand for ammonia. While the realization of non-ammonia sales volume in 2022 reached 397,625 tons, up 46.35% from the sales volume in the previous year of 271,693 tons.

Under these conditions, the Company optimizes ammonia to be sold in the Non-PSO sector which provides better margins. Meanwhile, non-ammonia sales tonnage increased by 46.32% compared to the previous year, from 272 thousand tons in 2021 to 398 thousand tons in 2022.

KINERJA PENJUALAN AMONIAK DAN NON-AMONIAK
Ammonia and Non-Ammonia Sales Performance

(ton) (ton)

	2022	2021	2020	2019	2018	
Amoniak	1.055.915	988.317	793.373	882.938	923.268	Ammonia
Non-Amoniak*)	397.625	271.693	191.435	269.024	257.383	Non-Ammonia*)

*) Terdiri dari Asam Sulfat, Asam Fosfat, Alumunium Flourida dan lainnya

Consists of Sulfuric Acid, Phosphoric Acid, Aluminum Fluoride and others

Nilai penjualan amoniak pun mengalami kenaikan sebesar 80%, mencapai Rp13,40 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp7,11 triliun. Kenaikan pendapatan tersebut sejalan dengan meningkatnya realisasi volume penjualan dan tingginya harga jual amoniak di pasar internasional maupun domestik. Sama halnya dengan amoniak, nilai penjualan non amoniak mengalami kenaikan sebesar 68% mencapai Rp809,10 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp481,53 miliar.

(keterangan: Penjualan non amoniak terdiri dari asam fosfat, asam sulfat, alumunium florida, asam klorida, CO_2 cair).

Ammonia sales value also increased by 80%, reaching Rp13.40 trillion from the previous year of Rp7.11 trillion. The increase in revenue was in line with the increase in sales volume realization and the high selling price of ammonia in the international and domestic markets. Similar to ammonia, non-ammonia sales value increased by 68% to reach Rp809.10 billion from the previous year of Rp481.53 billion.

(Description: Non-ammonia sales consist of phosphoric acid, sulfuric acid, florid aluminum, hydrochloric acid, liquid CO_2).

KINERJA PENJUALAN AMONIAK DAN NON-AMONIAK
Ammonia and Non-Ammonia Sales Value

(Rp juta) (Rp million)

	2022	2021	2020	2019	2018	
Amoniak	13.400.838	7.111.788	3.121.110	4.479.536	3.445.955	Ammonia
Non-Amoniak*)	1.003.250	481.526	571.688	2.353.909	1.362.593	Non-Ammonia*)

*) Terdiri dari asam sulfat, asam fosfat, alumunium florida, dan lainnya

*) Consist of sulfuric acid, phosphoric acid, florid aluminum, and others

Profitabilitas Segmen Pupuk dan Amoniak

Pada tahun 2022, total laba tahun berjalan untuk Segmen Pupuk dan Amoniak yang berhasil dibukukan oleh Perusahaan sebesar Rp23,06 triliun, mengalami kenaikan signifikan hingga 138,71% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai Rp9,66 triliun. Hal ini terutama disebabkan karena tingginya harga jual pupuk dan amoniak di pasar global.

Laporan kinerja profitabilitas untuk Segmen Pupuk dan Amoniak belum memperhitungkan eliminasi antar segmen. Rincian kinerja profitabilitas disampaikan dalam tabel di bawah ini.

Profitability of Fertilizer and Ammonia Segment

In 2022, the total profit for the year for the Fertilizer and Ammonia Segment recorded by the Company was Rp23.06 trillion, a significant increase of 138.71% compared to 2021 which reached Rp9.66 trillion. This was mainly due to the high selling price of fertilizers and ammonia in the global market.

The profitability performance report for the Fertilizer and Ammonia Segment does not take into account inter-segment eliminations. Details of profitability performance are presented in the table below.

KINERJA PROFITABILITAS SEGMEN PUPUK DAN AMONIAK
Profitability Performance of Fertilizer and Ammonia Segment

Kinerja Keuangan dan Profitabilitas	2022 (Rp juta | Rp million)	2021 (Rp juta | Rp million)	Kenaikan (Penurunan)		Finance and Profitability Nominal Performance
			Nominal (Rp juta | Rp million)	Persentase Percentage (%)	
Pendapatan					**Revenues**
Pendapatan Eksternal	101.934.797	75.815.808	26.118.989	34,45	External Revenues
Pendapatan antar Segmen	1.508.122	1.278.643	229.479	17,95	Inter-segment Revenues
Pendapatan Bersih	103.442.919	77.094.451	26.348.468	34,18	Net Income

Kinerja Keuangan dan Profitabilitas	2022 (Rp juta | Rp million)	2021 (Rp juta | Rp million)	Kenaikan (Penurunan)		Finance and Profitability Nominal Performance
			Nominal (Rp juta | Rp million)	Persentase Percentage (%)	
Laba Usaha					**Operating Income**
Beban Pokok Pendapatan	(67.731.757)	(58.241.456)	(9.490.301)	16,29	Cost of Revenues
Beban Penjualan	(2.204.364)	(2.046.532)	(157.832)	7,71	Selling Expenses
Beban Umum dan Administrasi	(2.978.813)	(2.486.927)	(491.886)	19,78	General and Administrative Expenses
Pendapatan Lainnya – Bersih	248.005	97.079	150.926	155,47	Other Income - Net
Pendapatan Keuangan	192.774	117.650	75.124	63,85	Finance Income
Beban Keuangan	(1.626.689)	(1.733.295)	106.606	(6,15)	Finance Cost
Bagian atas Rugi Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	178.121	83.447	94.674	113,45	Share of Net Loss of Associates and Joint Ventures
Laba sebelum Pajak	29.520.196	12.884.417	16.635.779	129,12	Profit before Income Tax
Beban Pajak Penghasilan	(6.456.129)	(3.222.486)	(3.233.643)	100,35	Income Tax Expenses
Laba Tahun Berjalan	23.064.067	9.661.931	13.402.136	138,71	Profit for the Year
Laporan Posisi Keuangan					**Statement of Financial Position**
Aset Segmen	140.725.243	115.537.608	25.187.635	21,80	Segment Assets
Liabilitas Segmen	53.906.755	45.413.830	8.492.925	18,70	Segment Liabilities
Pengeluaran Modal	4.150.366	3.206.631	943.735	29,43	Capital Expenditures

Rencana Pengembangan Tahun 2023

PI Grup telah menyiapkan rencana pengembangan untuk Segmen Pupuk dan Amoniak di tahun 2023. Rencana strategis tersebut akan fokus pada kelanjutan program kerja tahun 2022 dan beberapa program baru, yaitu:

1. Optimalisasi pabrik yang kurang efisien melalui digitalisasi/*revamp* dan/atau pembangunan pabrik baru serta mendorong pengurangan emisi karbon. Beberapa rencana investasi pengembangan yang dilakukan antara lain:
   - Pembangunan pabrik Pusri IIIB.
   - Pembangunan NPK Chemical PIM.
   - Pembangunan pabrik Amonia Urea di Papua Barat.
   - *Revamping* pabrik Amurea Kaltim II PKT.
2. Memperkuat *Circular Economy* serta mendorong pengurangan emisi karbon dengan melakukan pembangunan pabrik *Soda Ash* di Gresik maupun di Bontang.
3. Pengembangan produk *adjacent Chemical* yang potensial dan diversifikasi produk yang dituangkan dalam rencana sebagai berikut:
   - Pembangunan pabrik NPK Nitrat di PKC.
   - Pembangunan pabrik NPK Nitrat di PKT.

Development Plan Year 2023

PI Group has prepared a development plan for the Fertilizer and Ammonia Segment in 2023. The strategic plan will focus on the continuation of the 2022 work program and several new programs, namely:

1. Optimization of less efficient plants through digitalization/revamp and/or construction of new plants and encouraging carbon emission reduction. Some of the development investment plans include:
   - Pusri IIIB plant construction.
   - Construction of NPK Chemical PIM .
   - Construction of Ammonia Urea plant in West Papua.
   - Revamping PKT's Kaltim II Amurea plant.
2. Strengthen Circular Economy and encourage carbon emission reduction by constructing Soda Ash plant in Gresik and Bontang.
3. Development of potential adjacent Chemical products and product diversification as outlined in the following plan:
   - Construction of NPK Nitrate plant in PKC.
   - Construction of NPK Nitrate plant in PKT.

- Pembangunan pabrik Phonska V di PKG.
- Pembangunan pabrik Cikampek Nitrogen & *Oxygen Plant.*
- Pembangunan pabrik *Dry Ice.*

SEGMEN JASA KONSTRUKSI

Segmen Jasa Konstruksi dilaksanakan oleh PT Rekayasa Industri (Rekind), entitas anak yang bergerak di bidang *Engineering, Procurement*, dan *Construction* (EPC). Dengan pengalaman lebih dari 38 tahun di bidang EPC, Rekind telah membangun pabrik-pabrik skala besar di Indonesia, yaitu di sektor minyak dan gas bumi (migas), kimia/petrokimia, mineral, infrastruktur dan pembangkit listrik. Secara umum, bisnis konstruksi Rekind berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun (*multi years*). Dengan demikian, kontrak kerja yang diperoleh baru tercatat sebagai pendapatan pada tahun-tahun berikutnya.

Fokus dan Strategi Tahun 2022

Segmen Jasa Konstruksi dilaksanakan oleh PT Rekayasa Industri (Rekind) pada tahun 2022 berfokus untuk penyelesaian kajian restrukturisasi perusahaan yang bertujuan untuk peningkatan kesehatan perusahaan dan memberikan nilai tambah maupun efisiensi bagi perusahaan. Kajian restrukturisasi melalui 3 (tiga) fase, yaitu:

- Fase *Diagnostic Analytics* - Atas keadaan saat ini meliputi *market sizing* dan kompetisi pasar EPC; *Best Practice* dan *Benchmark*; *Internal Diagnostics.*
- Fase *Business Plan* – Membuat perencanaan model bisnis EPC yang meliputi *Strategic Initiatives* & *Quick Wins; Input to Financial Projection; Overall Business Plan*.
- Fase *Assistance* – Mendampingi Rekind melakukan restrukturisasi kepada kreditur dan penawaran ke potensial investor.

Kinerja 2022

Kinerja segmen Jasa Konstruksi tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Hal ini terlihat dari penurunan nilai pendapatan sebesar 49,55% sebagai dampak dari timbulnya *Liquidated Damage* (LD) akibat keterlambatan penyelesaian proyek.

Kendati demikian, nilai perolehan kontrak baru tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 41,69% dari perolehan kontrak baru di tahun 2021 yang utamanya merupakan perolehan kontrak baru di anak perusahaan.

- Construction of Phonska V plant at PKG.
- Construction of Cikampek Nitrogen & Oxygen Plant.
- Construction of Dry Ice plant.

CONSTRUCTION SERVICES SEGMENT

The Construction Services segment is carried out by PT Rekayasa Industri (Rekind), a subsidiary engaged in Engineering, Procurement and Construction (EPC). With more than 38 years of experience in the EPC field, Rekind has built large-scale factories in Indonesia, namely in the oil and gas, chemical/petrochemical, mineral, infrastructure and power plant sectors. In general, Rekind's construction business has a term of more than 1 (one) year (multi-year). Thus, the work contracts obtained are only recorded as revenue in the following years.

Focus and Strategy for 2022

The Construction Services segment carried out by PT Rekayasa Industri (Rekind) in 2022 focuses on completing the company's restructuring study aimed at improving the company's health and providing added value and efficiency for the company. The restructuring review went through 3 (three) phases, namely:

- Diagnostic Analytics Phase - on the current situation including market sizing and EPC market competition; Best Practice and Benchmark; Internal Diagnostics.
- Business Plan Phase - Planning the EPC business model which includes Strategic Initiatives & Quick Wins; Input to Financial Projection; Overall Business Plan.
- Phase Assistance - Assisted Rekind in restructuring to Creditors and offering to Potential Investors.

2022 Performance

The performance of the Construction Services segment in 2022 has decreased compared to 2021. This can be seen from the decrease in revenue value by 49.55% as a result of the incurrence of Liquidated Damage (LD) due to delays in project completion.

Nevertheless, the value of new contract acquisition in 2022 increased by 41.69% from the acquisition of new contracts in 2021, which was mainly the acquisition of new contracts in subsidiaries.

Perolehan Kontrak Baru	Realisasi 2022 2022 Realization (Rp juta | Rp million)	Realisasi 2021 2021 Realization (Rp juta | Rp million)	Target 2022 2022 Target (Rp juta | Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	Pencapaian Target 2022 2022 Target Achievement (%)	New Contracts Obtained
	(1)	(2)	(3)	((1-2)/2))	(1/3)	
Refinery, Oil & Gas	800.177	586.059	528.750	36,54	151,33	Refinery, Oil & Gas
Power, Mineral, Fertilizer & Overseas	239.363	242.194	1.281.125	(1,17)	18,68	Power, Minerals, Fertilizer & Overseas
Entitas lain di bawah Rekind	1.400.441	893.752	45.092	56,69	3105,74	Other entities under Rekind
Jumlah Perolehan Kontrak Baru	**2.439.981**	**1.722.005**	**1.854.967**	**41,69**	**131,54**	**Total New Contract Acquisition**

Profitabilitas Segmen Jasa Konstruksi

Segmen Jasa Konstruksi pada tahun 2022 mencatatkan pencapaian pendapatan yang lebih rendah dibandingkan tahun 2021. Penurunan kinerja keuangan tersebut utamanya disebabkan karena pengadaan material proyek dan proses konstruksi yang mengalami keterlambatan sehingga menimbulkan LD atau pun denda.

Sepanjang tahun 2022, Segmen Jasa Konstruksi membukukan pendapatan Rp2,75 triliun, turun 16,94% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp3,33 triliun serta kerugian sebesar Rp1,45 triliun yang mengalami penurunan kerugian sebesar 61,50% dibandingkan tahun 2021 sebesar minus Rp3,72 triliun.

Laporan kinerja profitabilitas untuk segmen Jasa Konstruksi belum memperhitungkan eliminasi antar segmen. Rincian profitabilitas Segmen Jasa Konstruksi disampaikan dalam tabel di bawah ini.

Construction Services Segment Profitability

The Construction Services segment in 2022 recorded lower revenue achievement compared to 2021. The decline in financial performance was mainly due to the procurement of project materials and construction processes that experienced delays, resulting in LD or fines.

Throughout 2022, the Construction Services Segment posted revenue of Rp2.75 trillion, a decrease of 16.94% compared to 2021 of Rp3.33 trillion and a loss of Rp1.45 trillion which experienced a 61.50% decrease in losses compared to 2021 of minus Rp3.72 trillion.

The profitability performance report for the Construction Services segment does not take into account inter-segment eliminations. Details of the profitability of the Construction Services Segment are presented in the table below.

KINERJA PROFITABILITAS SEGMEN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Segment Profitability Performance

Kinerja Keuangan dan Profitabilitas	2022 (Rp juta | Rp million)	2021 (Rp juta | Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		Finance and Profitability Nominal Performance
			Nominal (Rp juta | Rp million)	Persentase Percentage (%)	
Pendapatan					**Revenues**
Pendapatan Eksternal	2.372.505	3.296.040	(923.535)	(28,02)	External Revenues
Pendapatan antar Segmen	377.265	14.699	362.566	2.466,60	Inter-segment Revenues
Pendapatan Bersih	2.749.770	3.310.739	(560.969)	(16,94)	Net Income
Laba/(Rugi) Usaha					**Operating Profit/(Loss)**
Beban Pokok Pendapatan	(3.228.441)	(6.659.990)	3.431.549	(51,52)	Cost of Revenues
Beban Penjualan	(2.206)	(3.165)	959	(30,30)	Selling Expenses
Beban Umum dan Administrasi	(380.656)	(455.803)	75.147	(16,49)	General and Administrative Expenses

Kinerja Keuangan dan Profitabilitas	2022 (Rp juta | Rp million)	2021 (Rp juta | Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		Finance and Profitability Nominal Performance
			Nominal (Rp juta | Rp million)	Persentase Percentage (%)	
Pendapatan Lainnya – Bersih	225.004	54.050	170.954	316,29	Other Income - Net
Pendapatan Keuangan	7.711	3.376	4.335	128,41	Finance Income
Beban Keuangan	(515.595)	(174.040)	(498.191)	2.862,51	Finance Cost
Bagian atas (Rugi)/Laba Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	(230.430)	225.078	(455.508)	(202,38)	Share of Net (Loss)/Income of Associates and Joint Ventures
Rugi sebelum Pajak	(1.374.843)	(3.699.755)	2.324.912	(62,84)	Loss before Income Tax
Beban Pajak Penghasilan	(54.416)	(12.373)	(42.043)	339,80	Income Tax Expense
Rugi Tahun Berjalan	(1.429.259)	(3.712.128)	2.282.869	(61,50)	Loss for the Year
Laporan Posisi Keuangan					**Statement of Financial Position**
Aset Segmen	5.862.695	7.785.388	(1.922.693)	(24,70)	Segment Assets
Liabilitas Segmen	12.844.342	13.415.576	(571.234)	(4,26)	Segment Liabilities
Pengeluaran Modal	16.835	13.609	3.226	23,70	Capital Expenditures

Rencana Pengembangan Tahun 2023

Rencana pengembangan tahun 2023 akan fokus pada program restrukturisasi Rekind di antaranya stabilisasi arus keuangan dan *turn around* dan mengubah model bisnis (Jangka Panjang).

SEGMEN LAINNYA

Segmen Lainnya terdiri dari bidang perdagangan umum yang dijalankan melalui PT Pupuk Indonesia Niaga (PIN) dan PT Pupuk Indonesia Pangan (PIP); jasa pelayaran dan jasa angkutan laut oleh PT Pupuk Indonesia Logistik (PILog); serta jasa non EPC melalui ME dan jasa bidang utilitas oleh PT Pupuk Indonesia Utilitas (PIU).

Fokus dan Strategi 2022

Strategi bisnis pada tahun 2022 berfokus pada peningkatan kinerja perusahaan melalui strategi restrukturisasi perusahaan dan sinergi yang memberikan nilai tambah maupun efisiensi bagi perusahaan.

Bidang perdagangan umum yang dijalankan melalui PT Pupuk Indonesia Niaga (PIN) menjalankan strategi penguatan bisnis trading pupuk impor, terutama pupuk tunggal yang tidak diproduksi PT PI Grup dan melakukan ekspansi bisnis NPK dengan skema *low risk* dan *light asset* melalui maklon NPK dengan produsen NPK swasta. Sedangkan PT Pupuk Indonesia Pangan (PIP) menjalankan strategi ekspansi pasar ke sektor *retail*, *modern trade*, *private label* dan pasar institusi.

Development Plan 2023

The 2023 development plan will focus on Rekind's restructuring programme including financial flow stabilization and turn around and changing the business model (Long Term).

OTHER SEGMENT

The Other segment consists of general trading through PT Pupuk Indonesia Niaga (PIN) and PT Pupuk Indonesia Pangan (PIP); shipping and sea freight services by PT Pupuk Indonesia Logistik (PILog); and non-EPC services through ME and utility services by PT Pupuk Indonesia Utilitas (PIU).

Focus and Strategy for 2022

The business strategy in 2022 focuses on improving the company's performance through corporate restructuring strategies and synergies that provide added value and efficiency for the company.

The general trading sector run through PT Pupuk Indonesia Niaga (PIN) carries out a strategy of strengthening the import fertilizer trading business, especially single fertilizers not produced by PT PI Group and expanding the NPK business with a low risk and light asset scheme through NPK cloning with private NPK producers. While PT Pupuk Indonesia Pangan (PIP) carries out market expansion strategies to the retail sector, modern trade, private label and institutional markets.

Jasa pelayaran dan jasa angkutan laut oleh PT Pupuk Indonesia Logistik (PILog) berfokus pada peningkatan pelayanan *end to end logistic* melalui program *Port to Door Service* (PTDS) dan bertranformasi menjadi perusahaan *one stop logistic company* melalui skema *light asset* model.

Jasa Non EPC melalui PIN dalam proses pengembangan yang menjadikan tidak hanya melaksanakan perdagangan cat tetapi juga menyediakan layanan jasa pengecatan (aplikator).

Jasa Bidang Utilitas melalui PT Pupuk Indonesia Utilitas (PIU) pada tahun 2022 memiliki beberapa program kegiatan untuk menunjuang kinerja perusahaan, diantaranya melaksanakan bisnis jasa *utility management* untuk pengelolaan utilitas di Anak Perusahaan Pupuk di PT Pupuk Indonesia (Persero) (PI), melakukan pengembangan usaha dengan membangun pabrik baru untuk mendukung diversifikasi usaha di Anak Perusahaan PI.

Kinerja 2022

Jasa pelayaran dan jasa angkutan laut dijalankan oleh PILog yang merupakan entitas anak PI Grup yang berdiri sejak tahun 2014. PILog memiliki 9 (sembilan) armada kapal laut dengan total kapasitas angkut sebanyak 79,90 ribu MT per tahun yang digunakan untuk mengangkut produk-produk utama PI Grup, seperti pupuk, amoniak dan produk lainnya seperti LPG. Selain memiliki armada sendiri, PILog menyewa kapal laut kepada pihak ketiga.

Sepanjang tahun 2022, realisasi tonase angkutan pupuk sebanyak 871,98 ribu ton, naik 18,79% dibandingkan tahun 2021 sebanyak 734,04 ribu ton. Angkutan amoniak pada tahun 2022 berhasil mencatatkan kenaikan 17,05% dibandingkan tahun 2021 yaitu dari 225,13 ribu ton menjadi 263,52 ribu ton. Namun demikian, untuk angkutan lainnya turun 68,27% dibandingkan tahun yaitu 273,67 ribu ton menjadi 86,83 ribu ton.

Shipping services and sea freight services by PT Pupuk Indonesia Logistik (PILog) focuses on improving end to end logistics services through the Port to Door Service (PTDS) programme and transforming into a one stop logistics company through a light asset model scheme.

Non EPC Services through PIN is in the process of development which makes it not only carry out paint trading but also provide painting services (applicator).

Utility Services through PT Pupuk Indonesia Utilitas (PIU) in 2022 has several activity programmes to support the company's performance, including implementing utility management services business for utility management in Pupuk Subsidiaries at PT Pupuk Indonesia (Persero) (PI), Conducting business development by building new plants to support business diversification in PI Subsidiaries.

2022 Performance

Shipping services and sea transportation services are carried out by PILog which is a subsidiary of PI Group which was established in 2014. PILog has 9 (nine) ships with a total transport capacity of 79.90 thousand MT per year which are used to transport PI Group's main products, such as fertilizers, ammonia and other products such as LPG. In addition to having its own fleet, PILog leases sea vessels to third parties.

Throughout 2022, the realization of fertilizer transportation tonnage was 871.98 thousand tons, up 18.79% compared to 2021 of 734.04 thousand tons. Ammonia transportation in 2022 managed to record an increase of 17.05% compared to 2021, from 225.13 thousand tons to 263.52 thousand tons. However, other transportation decreased by 68.27% compared to the year, namely 273.67 thousand tons to 86.83 thousand tons.

KINERJA TONASE ANGKUTAN LAUT
Sea Transportation Tonnage Performance

(ton) (ton)

	2022	2021	2020	2019	2018	
Fertilizer Urea	871.982	734.046	935.538	1.003.573	813.106	Urea Fertilizer
Amoniak	263.520	225.131	117.265	94.925	391.320	Ammonia
Angkutan Lainnya*)	86.829	273.666	255.382	305.961	279.583	Other Transportation*)

*) Terdiri dari angkutan DAP/KCL, *Clay* serta PTDS

*) Consists of DAP/KCL, Clay and PTDS transportation

KINERJA VOLUME PERDAGANGAN
Trading Volume Performance

(ton) (ton)

	2022	2021	2020	2019	2018	
Pupuk PSO	150.639	140.989	166.531	148.091	185.298	PSO Fertilizer
Pupuk Non PSO	317.138	219.009	120.551	77.086	120.828	Non PSO Fertilizer
Produk Lainnya*)	127.356	78.942	67.106	158.792	119.281	Other Products*)

*) Terdiri dari angkutan herbisida, pewarna pupuk, semen, batu bara, dan lain-lain

*) Consists of transportation of herbicides, fertilizer dyes, cement, coal, etc.

Realisasi tonase perdagangan pupuk PSO yang dilakukan oleh Perusahaan melalui PT Pupuk Indonesia Niaga (PIN) dan PT Pupuk Indonesia Pangan (PIP) pada tahun 2022 sebanyak 150,64 ribu ton, naik 6,84% dibandingkan tahun 2021 yaitu 140,99 ribu ton. Tonase perdagangan pupuk non-PSO meningkat 44,81% dari 219,01 ribu ton pada tahun 2021 menjadi 317,14 ribu ton pada tahun 2022.

The realization of PSO fertilizer trade tonnage carried out by the Company through PT Pupuk Indonesia Niaga (PIN) and PT Pupuk Indonesia Pangan (PIP) in 2022 was 150.64 thousand tons, an increase of 6.84% compared to 2021 which was 140.99 thousand tons. Non-PSO fertilizer trade tonnage increased by 44.81% from 219.01 thousand tons in 2021 to 317.14 thousand tons in 2022.

KUANTUM PENJUALAN LISTRIK
Electricity Sales Quantum

(kWh) (kWh)

	2022	2021	2020	2019	2018	
Listrik (kWh)	230.729.407	271.275.345	274.708.509	251.606.351	233.172.825	Electricity (kWh)
Integrasi Listrik (kWh)	214.617.740	168.983.936	211.713.783	210.582.942	241.790.998	Electricity Integration (kWh)

Di bidang jasa utilitas, melalui Pupuk Indonesia Utilitas (PIU), kuantum penjualan listrik tahun 2022 mencapai 230,73 juta kWh, turun 14,95% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 271,28 juta kWh. Namun demikian, kuantum penjualan integrasi listrik tahun 2022 mencapai 214,62 juta kWh, naik 27,00% dibandingkan tahun 2021 sebesar 168,98 juta kWh.

In the field of utility services through Pupuk Indonesia Utilitas (PIU), the quantum of electricity sales in 2022 reached 230.73 million kWh, down 14.95% compared to 2021 which amounted to 271.28 million kWh. However, the quantum of electricity integration sales in 2022 reached 214.62 million kWh, up 27.00% compared to 2021 of 168.98 million kWh.

KUANTUM PENJUALAN NON LISTRIK
Quantum of Non Electricity Sales

	2022	2021	2020	2019	2018	
Steam (Ton)	1.298.950	1.319.018	1.304.994	1.232.175	1.113.204	Steam (Ton)
Nitrogen (Nm_3)	6.192.111	6.380.614	6.460.846	6.151.940	4.771.400	Nitrogen (Nm_3)
Batu Bara (Ton)	160.084	82.658	338.427	298.323	203.032	Coal (Ton)

Untuk penjualan non-listrik berupa *steam*, pada tahun 2022 mencapai 1,30 juta ton, turun 1,52% dibandingkan tahun 2021 sebesar 1,32 juta ton. Penurunan ini terutama disebabkan permintaan suplai produk dari *user* yang cenderung rendah

For non-electric sales in the form of steam, in 2022 it reached 1.30 million tons, down 1.52% compared to 2021 of 1.32 million tons. This decrease was mainly due to lower demand for product supply from users.

Sedangkan nitrogen mencapai 6,19 juta Nm_3, turun 2,95% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 6,38 juta Nm_3. Penurunan ini terutama disebabkan permintaan suplai produk dari *user* yang cenderung rendah.

Meanwhile, nitrogen reached 6.19 million Nm_3, down 2.95% compared to 2021 which amounted to 6.38 million Nm_3. This decrease was mainly due to lower demand for product supply from users.

Sementara penjualan batu bara mencapai 160,08 ribu ton, naik 93,67% dibandingkan tahun 2021 sebesar 82,66 ribu ton.

Meanwhile, coal sales reached 160.08 thousand tons, up 93.67% compared to 82.66 thousand tons in 2021.

Profitabilitas Segmen Lainnya

Segmen Lainnya pada tahun 2022 mencatatkan pendapatan bersih sebesar Rp12,56 triliun, mengalami kenaikan 71,25% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp7,33 triliun.

Laporan kinerja profitabilitas untuk Segmen lainnya belum memperhitungkan eliminasi antar segmen. Rincian kinerja profitabilitas disampaikan dalam tabel di bawah ini.

Profitability of Other Segments

Other Segments in 2022 recorded a net income of Rp12.56 trillion, an increase of 71.25% compared to 2021 of Rp7.33 trillion.

The profitability performance report for the Other Segments does not take into account inter-segment eliminations. Details of profitability performance are presented in the table below.

KINERJA PROFITABILITAS SEGMEN LAINNYA
Profitability Performance of Other Segments

Kinerja Keuangan dan Profitabilitas	2022 (Rp juta | Rp million)	2021 (Rp juta | Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		Financial Performance and Profitability
			Nominal (Rp juta | Rp million)	Persentase Percentage (%)	
Pendapatan					**Revenues**
Pendapatan Eksternal	3.122.929	1.970.750	1.152.179	58,46	External Revenues
Pendapatan antar Segmen	9.436.270	5.363.168	4.073.102	75,95	Inter-segment Revenues
Pendapatan Bersih	12.559.199	7.333.918	5.225.281	71,25	Net Income
Laba/(Rugi) Usaha					**Operating Profit/(Loss)**
Beban Pokok Pendapatan	(4.427.686)	(2.687.499)	(1.740.187)	64,75	Cost of Revenues
Beban Penjualan	(19.311)	(10.860)	(8.451)	77,82	Selling Expenses
Beban Umum dan Administrasi	(2.270.454)	(1.155.169)	(1.115.285)	96,55	General and Administrative Expenses
Pendapatan Lainnya – Bersih	60.593	35.064	25.529	72,81	Other Income - Net
Pendapatan Keuangan	710.871	719.202	(8.331)	(1,16)	Finance Income
Beban Keuangan	(783.220)	(698.190)	(8.503)	12,18	Financial Expenses
Laba sebelum Pajak	5.829.992	3.536.466	2.293.526	64,85	Profit before Income Tax
Beban Pajak Penghasilan	(65.608)	(85.231)	19.623	(23,02)	Income Tax Expense
Laba Tahun Berjalan	5.764.384	3.451.235	2.313.149	67,02	Profit for the Year
Laporan Posisi Keuangan					**Statement of Financial Position**
Aset Segmen	48.420.656	45.302.140	3.118.516	6,88	Segment Assets
Liabilitas Segmen	10.708.506	11.549.016	(840.510)	(7,28)	Segment Liabilities
Pengeluaran Modal	1.089.874	327.571	762.303	232,71	Capital Expenditures

Rencana Pengembangan Tahun 2023

Segmen Perdagangan Umum melalui PIN dan PIP akan tetap fokus pada kegiatan restrukturisasi perusahaan yang telah dijalankan pada tahun 2022 dan ekspansi yang dilakukan ke luar PI Grup.

Segmen Jasa Logistik akan melakukan implementasi sistem *track* & *trace* dan melakukan kerja sama dengan mitra strategis untuk optimalisasi pengapalan dan peningkatan layanan pengangkutan.

Segmen Jasa Utilitas akan melakukan beberapa pengembangan, di antaranya melanjutkan program yang sudah dimulai dari tahun 2022. Pengembangan ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui sumber pendapatan baru dan diversifikasi usaha,

Seluruh segmen lain-lain pada tahun 2023 akan fokus pada pelaksanaan *streamlining* lini bisnis PI Grup yaitu penyederhanaan dalam ekosistem PI Grup dari 64 Perusahaan menjadi 31 Perusahaan. Beberapa anak perusahaan eksisting akan ditunjuk menjadi *sub holding* di antaranya PIN, PIP, PIU, sedangkan PILog akan menjadi anggota *sub holding trading* & *distribution*.

Development Plan for 2023

The General Trading segment through PIN and PIP will continue to focus on corporate restructuring activities that have been carried out in 2022 and expansion outside the PI Group.

The Logistics Services segment will implement a track & trace system and collaborate with strategic partners to optimize shipping and improve freight services.

The Utility Services segment will carry out several developments including continuing the programme that has started from 2022. This development aims to improve the company's performance through new revenue sources and business diversification.

All other segments in 2023 will focus on streamlining PI Group's business lines, namely simplification in the PI Group ecosystem from 64 companies to 31 companies. Several existing subsidiaries will be appointed as sub-holdings including PIN, PIP, PIU, while PILog will become a member of the trading & distribution sub-holding.

Aspek Pemasaran
Marketing Aspects

KEBIJAKAN PEMASARAN

Kebijakan pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero) ("Perusahaan") pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Sentralisasi bidang pemasaran dimulai bulan Januari 2021 yang meliputi fungsi penjualan *Public Service Obligation* (PSO), penjualan komersil, logistik, dan strategi pemasaran.
2. Sentralisasi mendorong optimalisasi dan harmonisasi produk, pendapatan, dan laba baik untuk Pupuk Indonesia maupun anak perusahaan.
3. Pembentukan unit *project management* untuk merespons isu strategis Perusahaan yang bersifat spesifik (SPM).
4. Prioritas pemenuhan kebutuhan produk:
   a. PSO sebagai pemenuhan penugasan dari Kementerian Pertanian.
   b. Retail untuk memenuhi kebutuhan petani yang tidak diakomodir di sektor PSO.
   c. Korporasi/Industri dalam negeri.
   d. Ekspor.
5. Sinergi di antara BUMN dan antar-anak perusahaan.

STRATEGI PEMASARAN

Strategi pemasaran yang diterapkan pada tahun 2022 difokuskan pada upaya mencapai target penjualan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemasaran melalui strategi pemasaran, yang direalisasikan melalui:

1. Pembentukan region penjualan PSO yang mengakomodir rayon penyaluran anak perusahaan.
2. *Agrosolution* sebagai program untuk meningkatkan produktivitas panen dan kesejahteraan petani melalui pendampingan intensif dari hulu sampai hilir, yang meliputi akses permodalan, asuransi pertanian, kawalan budidaya, pengembangan organisasi petani, dan *off taker* hasil panen.
3. *Retail Management* sebagai program penguatan dan pengembangan pasar retail untuk persiapan perubahan kebijakan PSO.
4. Implementasi *Supply Chain Control Tower* untuk mengoptimalkan alokasi produksi & penjualan masing-masing anak perusahaan.
5. Reposisi Gudang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan gudang anak perusahaan.
6. *Single Responsibility* fungsi logistik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses distribusi produk.
7. Sinergi perencanaan dan evaluasi penjualan untuk optimalisasi penjualan dan pendapatan anak perusahaan.

MARKETING POLICY

The marketing policy of PT Pupuk Indonesia (Persero) (the "Company") in 2022 is as follows:

1. The centralization of marketing will begin in January 2021, covering Public Service Obligation (PSO) sales, commercial sales, logistics, and marketing strategy functions.
2. Centralization encourages optimization and harmonization of products, revenues, and profits for both Pupuk Indonesia and its subsidiaries.
3. Establishment of a project management unit to respond to specific strategic issues of the Company (SPM).
4. Prioritization of product needs:
   a. PSO as a fulfillment of assignment from the Ministry of Agriculture.
   b. Retail to meet the needs of farmers who are not accommodated in the PSO sector.
   c. Corporations/Industries in the country.
   d. Export.
5. Synergies among SOEs and between subsidiaries.

MARKETING STRATEGY

The marketing strategy implemented in 2022 is focused on achieving sales targets, increasing marketing effectiveness and efficiency through marketing strategies, which are realized through:

1. Establishment of PSO sales regions that accommodate the distribution rayons of subsidiaries.
2. Agrosolution is a program to increase crop productivity and farmers' welfare through intensive assistance from upstream to downstream, which includes access to capital, agricultural insurance, cultivation control, development of farmer organizations, and off takers of crops.
3. Retail Management as a retail market strengthening and development program in preparation for PSO policy changes.
4. Implementation of Supply Chain Control Tower to optimize production & sales allocation of each subsidiary.
5. Warehouse repositioning to improve the effectiveness and efficiency of subsidiary warehouse management.
6. Single Responsibility logistics function to improve the effectiveness and efficiency of the product distribution process.
7. Sales planning and evaluation synergy for sales and revenue optimization of subsidiaries.

8. Sinergi komunikasi pemasaran untuk penyeragaman pesan promosi serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi fungsi pemasaran.
9. *Single Pricing* Urea & Amoniak Anak Perusahaan untuk menyeragamkan harga jual produk urea dan amoniak seluruh anak perusahaan agar menunjang strategi penjualan perusahaan.
10. Penentuan *layering* harga per sektor. Strategi ini sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri akibat kenaikan harga internasional demi mendukung ketahanan pangan nasional.
11. Implementasi *single branding* sebagai inisiatif strategi untuk memperkuat *brand awareness* produk dan meningkatkan *engagement* konsumen. Untuk hal ini, PI Grup melakukan implementasi *single branding* untuk produk pupuk urea dengan merek PIHC Nitrea dan pupuk NPK formula 16-16-16.
12. Optimalisasi media sosial dilakukan mengingat kondisi pembatasan sosial karena dampak dari pandemi COVID-19 sehingga membuat Perusahaan harus beradaptasi untuk mengubah pendekatan kepada konsumen melalui edukasi dengan *account* "Sahabat Petani" di YouTube, Instagram, dan Facebook. Strategi tersebut dilaksanakan berdasarkan hasil survei pasar, di mana konsumsi internet di level petani sebagai konsumen terbesar relatif meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
13. Meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dalam rangka meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, Perusahaan menyediakan layanan uji tanah yang bertujuan untuk membuat rekomendasi pemupukan spesifik lokasi. Saat ini Pupuk Indonesia memiliki 24 unit Mobil Uji Tanah yang tersebar di seluruh Indonesia.

REALISASI KEGIATAN PEMASARAN

Sepanjang tahun 2022, kegiatan pemasaran yang telah direalisasikan, antara lain:

1. Per tanggal 1 Desember 2022 terdapat perubahan jumlah wilayah penjualan menjadi 7 (tujuh) wilayah.
2. Bantuan luas lahan tahun 2022 mencapai 271.622 hektar Proyek Agrosolution dengan total penjualan non subsidi 111.898 ton.
3. Pengembangan *benefit* model untuk distributor dan kios.
4. Rayonisasi wilayah penjualan ritel anak perusahaan.
5. Perencanaan produksi dan penjualan setiap bulan untuk 3 (tiga) bulan ke depan bersama anak perusahaan, unit penjualan, unit distribusi, unit produksi, dan unit pengadaan.

8. Marketing communication synergy to homogenize promotional messages and improve the effectiveness and efficiency of marketing functions.
9. Single Pricing of Urea & Ammonia Subsidiaries To homogenize the selling price of urea and ammonia products across anper in order to support the company's sales strategy.
10. Determination of price layering per sector. This strategy is urgently needed to maintain domestic price stability due to international price increases in order to support national food security.
11. Implementation of single branding as a strategic initiative to strengthen product brand awareness and increase consumer engagement. For this reason, PI Group implemented single branding for urea fertilizer products under the PIHC Nitrea brand and NPK fertilizer formula 16-16-16.
12. Social media optimization was carried out considering the condition of social restrictions due to the impact of the COVID-19 pandemic, which made the Company have to adapt to changing the approach to consumers through education with the "Sahabat Petani" account on YouTube, Instagram and Facebook. The strategy was implemented based on the results of a market survey, where internet consumption at the farmer level as the largest consumer has relatively increased compared to the previous year.
13. Improving customer satisfaction and loyalty In order to improve customer satisfaction and loyalty, the Company provides soil test services aimed at making location-specific fertilization recommendations. Currently Pupuk Indonesia has 24 units of Soil Test Cars spread throughout Indonesia.

REALIZATION OF MARKETING ACTIVITIES

Throughout 2022, marketing activities that have been realized include:

1. As of December 1, 2022, there is a change in the number of sales regions to 7 (seven) regions.
2. Land area assistance for 2022 reached 271,622 hectares of Agrosolution Project with total non-subsidized sales of 111,898 tons.
3. Development of a benefit model for sales channels.
4. Rayonization of subsidiaries' retail sales regions
5. Monthly production and sales planning for the next 3 (three) months with subsidiaries, sales units, distribution units, production units, and procurement units.

6. Koordinasi rutin untuk menetapkan *adjustment* terkait perubahan kondisi penjualan, distribusi, produksi, dan pengadaan.
7. Penggunaan gudang bersama oleh anak perusahaan di wilayah penyaluran PSO dan penjualan retail yang beririsan.
8. Penyesuaian/penghentian kontrak gudang berdasarkan hasil evaluasi utilisasi gudang.
9. Pembentukan 6 (enam) unit distribusi wilayah yang bertanggung jawab dalam pengiriman produk seluruh anak perusahaan.
10. Melakukan *launching* urea dan NPK dengan merek PIHC Nitrea dan PIHC Phonska Plus 16-16-16.
11. Meningkatkan *awareness* produk PI Grup, yakni dengan melakukan 1.020 demplot, 3.694 sosialisasi, 40 *sponsorship*, 37 pameran, 113 publikasi, 20 temu pelanggan, dan 42 *billboard*.
12. *Monitoring* suara pelanggan, tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan terhadap produk Perusahaan. Hingga akhir bulan Desember 2022, terdapat 2.763 suara pelanggan yang masuk.

6. Regular coordination to determine adjustments related to changes in sales, distribution, production, and procurement conditions.
7. Use of shared warehouses by subsidiaries in areas where PSO distribution and retail sales overlap.
8. Adjustment/termination of warehouse contract based on warehouse utilization evaluation results.
9. Establishment of 6 (six) regional distribution units that are responsible for shipping products of all subsidiaries.
10. Launching Single Branding Urea and NPK products under the brand name PIHC Nitrea and PIHC Phonska Plus 16-16-16.
11. Increase awareness of PI Group products, namely by conducting 1,020 demonstration plots, 3,694 socializations, 40 sponsorships, 37 exhibitions, 113 publications, 20 customer meetings, 42 billboards.
12. Monitoring customer voice, level of satisfaction and customer loyalty to the Company's products. For Customer Service Unit activities in December 2022, customer interactions were recorded at 2,763 incomings.

PANGSA PASAR

1. Urea
   Pangsa pasar dalam negeri untuk pupuk urea pada tahun 2022 adalah sebesar 99% atau sama dengan tahun 2021.
2. NPK
   Pangsa pasar dalam negeri untuk pupuk NPK pada tahun 2022 adalah sebesar 41% dibandingkan dengan tahun 2021.
3. Amoniak
   Pangsa pasar produsen dalam negeri untuk amoniak pada tahun 2022 adalah sebesar 306.791 ton atau 82% atau mengalami peningkatan 3% dibandingkan dengan tahun 2021.

MARKET SHARE

1. Urea
   The domestic market share for urea fertilizer in 2022 is 99% or the same as in 2021.
2. NPK
   The domestic market share for NPK fertilizer in 2022 is 41% or an increase of 5% compared to 2021.
3. Ammonia
   The market share of domestic producers for ammonia in 2022 is 306,791 tons or 82% or an increase in market share of 3% when compared to 2021.

Tinjauan Keuangan dan Informasi Material Lainnya
Financial Review and Other Material Information

STANDAR PENYAJIAN INFORMASI DAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

Uraian kinerja keuangan PT Pupuk Indonesia (Persero) ("PI Grup", "Perusahaan") pada laporan tahunan ini mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan. Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan pasar modal yang berlaku.

INFORMATION PRESENTATION STANDARDS AND CONFORMITY TO FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

The description of the financial performance of PT Pupuk Indonesia (Persero) ("PI Group", "Company") in this annual report refers to the Consolidated Financial Statements for the years ended December 31, 2022 and 31 December 2021 which have been audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan. The Company's Consolidated Financial Statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, namely the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK), which includes Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board (DSAK) of the Indonesian Institute of Accountants and applicable capital market regulations.

KINERJA KEUANGAN

FINANCIAL PERFORMANCE

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Consolidated Statements of Financial Position

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	2022 (Rp juta | Rp million)	2021 (Rp juta | Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		Consolidated Statements of Financial Position
			Nominal (Rp juta | Rp million)	Persentase Percentage (%)	
Aset					**Assets**
Aset Lancar	77.975.094	44.174.212	33.800.882	76,52	Current Assets
Aset Tidak Lancar	80.745.413	84.288.960	(3.543.547)	(4,20)	Non-current Assets
Jumlah Aset	158.720.507	128.463.172	30.257.335	23,55	Total Assets
Liabilitas dan Ekuitas					**Liabilities and Equity**
Liabilitas					**Liabilities**
Liabilitas Jangka Pendek	42.749.997	33.008.039	9.741.958	29,51	Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang	24.810.210	23.515.157	1.295.053	5,51	Non-current Liabilities
Jumlah Liabilitas	67.560.207	56.523.196	11.037.011	19,53	Total Liabilities
Jumlah Ekuitas	91.160.300	71.939.976	19.220.324	26,72	Total Equity
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	158.720.507	128.463.172	30.257.335	23,55	Total Liabilities and Equity

Aset

Assets

JUMLAH ASET 2018-2022
Total Assets 2018-2022

Rp juta | Rp million

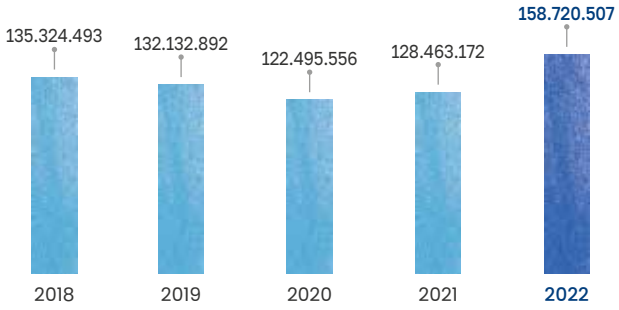

JUMLAH ASET 2021-2022
Total Assets 2021-2022

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	2022 (Rp juta | Rp million)	2021 (Rp juta | Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		Consolidated Statements of Financial Position
			Nominal (Rp juta | Rp million)	Persentase Percentage (%)	
Aset					**Assets**
Aset Lancar	77.975.094	44.174.212	33.800.882	76,52	Current Assets
Aset Tidak Lancar	80.745.413	84.288.960	(3.543.547)	(4,20)	Non-current Assets
Jumlah Aset	158.720.507	128.463.172	30.257.335	23,55	Total Assets

Pada tahun 2022, Perusahaan membukukan aset senilai Rp158,72 triliun, lebih tinggi 23,55% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp128,46 triliun. Kenaikan aset ini, didorong oleh pertumbuhan aset lancar yang mencapai 76,52% dibandingkan tahun sebelumnya.

In 2022, the Company booked assets worth Rp158.72 trillion, 23.55% higher than in 2021 which amounted to Rp128.46 trillion. This increase in assets was driven by the growth of current assets which reached 76.52% compared to the previous year.

ASET LANCAR
Current Assets

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	2022 (Rp juta | Rp million)	2021 (Rp juta | Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		Consolidated Statements of Financial Position
			Nominal (Rp juta | Rp million)	Persentase Percentage (%)	
Kas dan Setara Kas	33.460.620	17.453.305	16.007.315	91,72	Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha	2.693.522	3.324.666	(631.144)	(18,98)	Trade Receivables
Piutang Subsidi dari Pemerintah Indonesia	15.395.033	2.822.427	12.572.606	445,45	Subsidy Receivables from the Government of Indonesia
Piutang Subsidi yang Belum Ditagih	686.625	981.471	(294.846)	(30,04)	Unbilled Subsidy Receivables
Piutang Lainnya	482.777	621.397	(138.620)	(22,31)	Other Receivables

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	2022 (Rp juta | Rp million)	2021 (Rp juta | Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		Consolidated Statements of Financial Position
			Nominal (Rp juta | Rp million)	Persentase Percentage (%)	
Pekerjaan dalam Penyelesaian Kontrak Konstruksi–dari Pelanggan	914.203	1.543.717	(629.514)	(40,78)	Construction Contract Work in Progress-due from Customers
Persediaan	20.567.169	13.910.126	6.657.043	47,86	Inventories
Uang Muka dan Beban Dibayar di Muka	758.068	1.001.193	(243.125)	(24,28)	Advances and Prepayments
Pajak Dibayar di Muka	1.386.796	1.346.453	40.343	3,00	Prepaid Taxes
Aset Lancar Lainnya	1.630.281	1.169.457	460.824	39,40	Other Current Assets
Jumlah Aset Lancar	**77.975.094**	**44.174.212**	**33.800.882**	**76,52**	**Total Current Assets**

ASET LANCAR 2018-2022
Current Assets 2018-2022
Rp juta | Rp million

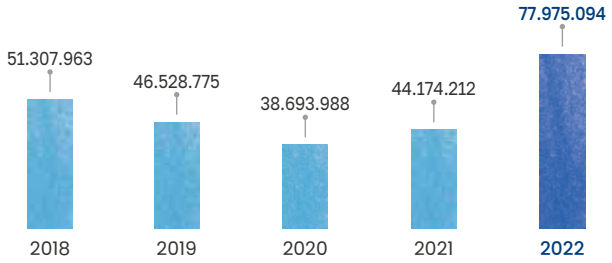

Jumlah aset lancar pada tahun 2022 mencapai Rp77,97 triliun, tumbuh 76,52% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp44,17 triliun. Kenaikan ini, terutama dikontribusikan oleh kas dan setara kas serta piutang subsidi dari Pemerintah Indonesia, yang masing-masing naik 91,72% dan 445,45%.

Total current assets in 2022 reached Rp77.97 trillion, growing 76.52% compared to Rp44.17 trillion in 2021. This increase was mainly contributed by cash and cash equivalents and subsidy receivables from the Government of Indonesia, which increased by 91.72% and 445.45% respectively.

Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas merupakan komponen terbesar dalam aset lancar, dengan kontribusi sebesar 42,91%. Pada tahun 2022, total kas dan setara kas sebesar Rp33,46 triliun, naik 91,72% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp17,45 triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan tingginya penerimaan kas dari pelanggan.

Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents are the largest component in current assets, with a contribution of 42.91%. In 2022, total cash and cash equivalents amounted to Rp33.46 trillion, growing 91.72% compared to 2021 which amounted to Rp17.45 trillion. This increase was mainly due to higher cash receipts from customers.

Piutang Usaha

Piutang usaha-bersih merupakan piutang usaha setelah dikurangi cadangan penurunan nilai. Pada tahun 2021, total piutang usaha bersih sebesar Rp2,69 triliun, turun 18,98% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai Rp3,32 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan membaiknya kualitas penagihan piutang usaha.

Trade Receivables

Trade receivables-net represent trade receivables net of allowance for impairment. In 2021, total net trade receivables amounted to Rp2.69 trillion, a decrease of 18.98% compared to 2021 which reached Rp3.32 trillion. This decrease was mainly due to improved collection quality of trade receivables.

Grup menerapkan cadangan kerugian ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa.

The Group applies lifetime expected loss allowance to all trade receivables. To measure expected credit losses, trade receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and time to maturity.

Piutang Subsidi dari Pemerintah Indonesia

Piutang subsidi merupakan saldo piutang subsidi dari Pemerintah Indonesia atas penyaluran pupuk urea, NPK, SP36, ZA, dan pupuk organik bersubsidi. Bagian lancar piutang subsidi Perusahaan tahun 2022 sebesar Rp15,40 triliun. Dibandingkan dengan posisi tahun 2021, yaitu sebesar Rp2,82 triliun, terjadi kenaikan 445,45%. Peningkatan ini terutama disebabkan timbulnya piutang subsidi atas penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2022 yang menambah saldo piutang subsidi dari Pemerintah Indonesia-tidak lancar per tanggal 31 Desember 2022.

Subsidy Receivables from the Government of Indonesia

Subsidy receivables represent the balance of subsidy receivables from the Government of Indonesia for the distribution of subsidized urea, NPK, SP36, ZA, and organic fertilizers. The current portion of the Company's subsidy receivables in 2022 amounted to Rp15.40 trillion. Compared to the position in 2021, which amounted to Rp2.82 trillion, there was an increase of 445.45%. This increase was mainly due to the emergence of subsidy receivables for the distribution of subsidized fertilizers in 2022 which increased the balance of subsidy receivables from the Government of Indonesia-non-current as of December 31, 2022.

Pekerjaan dalam Penyelesaian Kontrak Konstruksi-dari Pelanggan

Pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi-dari pelanggan adalah bagian dari kontrak aset yang diakui sehubungan dengan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Total nilai pekerjaan tersebut pada tahun 2022 mencapai Rp914,20 miliar, turun 40,78% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp1,54 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan telah selesainya pekerjaan jasa konstruksi oleh Rekind sebagai anak usaha PTPI.

Construction Contract Work in Progress-due from Customers

Construction contract work in progress-from customers is part of contract assets recognized in connection with revenue from contracts with customers. The total value of such work in 2022 reached Rp914.20 billion, a decrease of 40.78% compared to 2021 which amounted to Rp1.54 trillion. This decrease was mainly due to the completion of construction service work by Rekind as a subsidiary of PTPI.

Persediaan

Jumlah Persediaan di tahun 2022 sebesar Rp20,57 triliun. Dibandingkan dengan posisi tahun 2021 yang Rp13,91 triliun, terjadi kenaikan 47,86%. Kenaikan ini terutama disebabkan karena lebih tingginya persediaan barang untuk pemenuhan stok pupuk bersubsidi.

Inventories

Total inventories in 2022 amounted to Rp20.57 trillion. Compared to the 2021 position of Rp13.91 trillion, there was an increase of 47.86%. This increase was mainly due to higher inventories of goods to fulfill subsidized fertilizer stocks.

Uang Muka dan Beban Dibayar di Muka

Jumlah Uang muka dan beban dibayar di muka tahun 2022 tercatat Rp758,07 triliun, turun 24,28% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp1,00 triliun.

Advances and Prepayments

Total advances and prepaid expenses in 2022 were recorded at Rp758.07 trillion, down 24.28% compared to 2021 which amounted to Rp1.00 trillion.

Pajak Dibayar di Muka

Jumlah Pajak dibayar di muka hingga akhir tahun 2022 mencapai Rp1,39 triliun. Dibandingkan tahun 2021, yaitu sebesar Rp1,35 triliun, terjadi kenaikan 3,00%.

Prepaid Taxes

Total prepaid taxes by the end of 2022 reached Rp1.39 trillion. Compared to 2021, which amounted to Rp1.35 trillion, there was an increase of 3.00%.

ASET TIDAK LANCAR
Non-Current Assets

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	2022 (Rp juta | Rp million)	2021 (Rp juta | Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		Consolidated Statements of Financial Position
			Nominal (Rp juta | Rp million)	Persentase Percentage (%)	
Piutang Lainnya-Tidak Lancar	339.971	358.198	(18,227)	(5,09)	Other Receivables-Non-current
Piutang Subsidi dari Pemerintah Indonesia-Tidak Lancar	-	3.057.789	(3,057,789)	(100,00)	Subsidy Receivables from the Government of Indonesia - Non-current
Pajak Dibayar di Muka-Jangka Panjang	318.443	1.824.723	(1,506,280)	(82,55)	Prepaid Taxes-Non-current
Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	1.103.067	1.178.092	(75,025)	(6,37)	Investment in Associates and Joint Ventures
Properti Investasi	1.519.458	888.788	630,670	70,96	Investment Properties
Aset Tetap	74.658.647	74.118.213	540,434	0,73	Fixed Assets
Aset Pajak Tangguhan	174.908	112.797	62,111	55,06	Deferred Tax Assets
Aset Imbalan Pascakerja	552.538	767.115	(214,577)	(27,97)	Post-employment Benefits Assets
Aset Tidak Lancar Lainnya	2.078.381	1.983.245	95,136	4,80	Other Non-Current Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar	**80.745.413**	**84.288.960**	**(3,543,547)**	**(4,20)**	**Total Non-Current Assets**

ASET TIDAK LANCAR 2018-2022
Non-Current Assets 2018-2022

Rp juta | Rp million

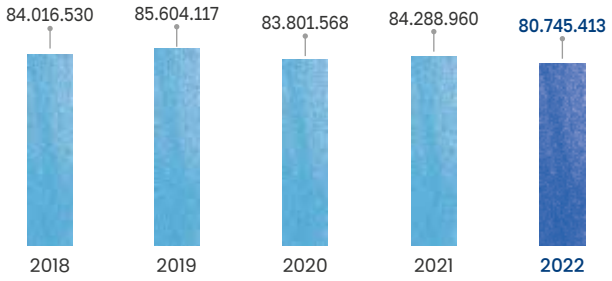

Jumlah aset tidak lancar tahun 2022 sebesar Rp80,75 triliun, lebih rendah 4,20% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp84,29 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan adanya pembayaran piutang subsidi atas kurang bayar tahun 2021, di mana pada tahun tersebut posisi piutang subsidi dari pemerintah Indonesia-tidak lancar sebesar Rp3,06 triliun menjadi Rp0 di tahun 2022.

Total non-current assets in 2022 amounted to Rp80.75 trillion, 4.20% lower than in 2021 which amounted to Rp84.29 trillion. This decrease was mainly due to the payment of subsidy receivables for underpayments in 2021, where in that year the position of subsidy receivables from the Indonesian government-non-current amounted to Rp3.06 trillion to Rp0 in 2022.

Piutang Lainnya-Tidak lancar

Jumlah piutang lainnya-tidak lancar tahun 2022 sebesar Rp339,97 miliar, lebih rendah 5,09% dari tahun 2021 yang mencapai Rp358,20 miliar.

Other Receivables-Non-current

Total other receivables-non-current in 2022 amounted to Rp339.97 billion, 5.09% lower than 2021 which reached Rp358.20 billion.

Piutang Subsidi dari Pemerintah Indonesia-Tidak lancar

Jumlah piutang subsidi dari Pemerintah Indonesia-tidak lancar pada tahun 2022 adalah nihil. Sementara tahun 2021 mencapai Rp3,06 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan adanya pembayaran piutang subsidi atas kurang bayar tahun 2021.

Subsidy Receivable from the Government of Indonesia-Non-current

The amount of subsidy receivable from the Government of Indonesia-non-current in 2022 is nil. While in 2021 it reached Rp3.06 trillion. This decrease is mainly due to the payment of subsidy receivables for underpayments in 2021.

Pajak Dibayar di Muka-Jangka Panjang

Jumlah pajak dibayar di muka-jangka panjang pada tahun 2022 sebesar Rp318,44 miliar. Dibandingkan tahun 2021 yang mencapai Rp1,82 triliun, terjadi penurunan 82,55%. Penurunan ini terutama disebabkan menurunnya pajak lainnya berupa PPN sebesar 99,64% atau setara Rp1,35 triliun.

Prepaid Taxes-Non-current

Total prepaid taxes-non-current in 2022 amounted to Rp318.44 billion. Compared to 2021 which reached Rp1.82 trillion, there was a decrease of 82.55%. This decrease was mainly due to a decrease in other taxes in the form of VAT by 99.64% or equivalent to Rp1.35 trillion.

Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Entitas asosiasi adalah seluruh entitas, di mana PI Grup memiliki pengaruh signifikan. Akan tetapi bukan pengendalian. Biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas. Sesuai metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat pada biaya, dan nilai tercatat akan meningkat atau menurun untuk mengakui bagian investor atas laba rugi. Investasi PI Grup pada entitas asosiasi juga termasuk *goodwill* yang diidentifikasi ketika akuisisi.

Realisasi investasi tersebut pada tahun 2022 mencapai Rp1,10 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai Rp1,18 triliun, mengalami penurunan 6,37%.

Investment in Associates and Joint Ventures

Associates are all entities over which PI Group has significant influence. But not control. Usually through ownership of voting rights between 20% and 50%. Investments in associates are accounted for using the equity method. Under the equity method, investments are initially recorded at cost, and the carrying amount will increase or decrease to recognize the investor's share of profit or loss. PI Group's investments in associates also include goodwill identified on acquisition.

The investment realization in 2022 reached Rp1.10 trillion. When compared to 2021 which reached Rp1.18 trillion, it decreased by 6.37%.

Properti Investasi

Nilai properti investasi Perusahaan hingga akhir tahun 2022 sebesar Rp1,52 triliun, naik 70,96% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp888,79 miliar.

Investment Properties

The value of the Company's investment properties by the end of 2022 amounted to Rp1.52 trillion, increase 70.96% compared to 2021 which amounted to Rp888.79 billion.

Aset Tetap

Jumlah aset tetap Perusahaan tahun 2022 mencapai Rp74,66 triliun. Dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp74,12 triliun, ada kenaikan 0,73%.

Fixed Assets

The total fixed assets of the Company in 2022 reached Rp74.66 trillion. Compared to 2021 which amounted to Rp74.12 trillion, there was an increase of 0.73%.

PERKEMBANGAN NILAI ASET TETAP 2018-2022
Development of Fixed Asset Value 2018-2022

Rp juta | Rp million

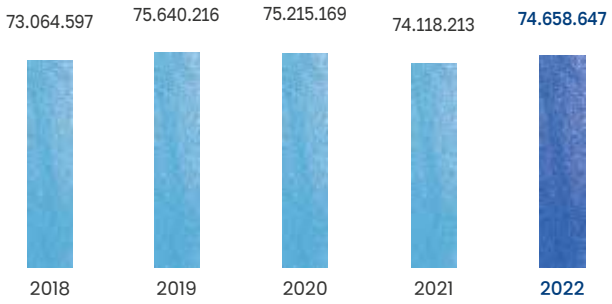

Aset tetap terdiri dari tanah, bangunan dan prasarana, pabrik dan peralatan, mesin bengkel kerja, kendaraan dan alat berat, perlengkapan kantor dan rumah, kapal, lokomotif, dan gerbong, aset penyangga, aset hak guna, serta aset dalam penyelesaian. Aset tetap dihitung berdasarkan biaya perolehannya dan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Pada tanggal 31 Desember 2022, aset tetap PI Grup telah diasuransikan terhadap risiko gempa bumi, kebakaran dan risiko lainnya (semua risiko) dengan nilai pertanggungan sebesar Rp17,51 juta dan USD3,63 miliar. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Property and equipment consist of land, buildings and infrastructure, plant and equipment, workshop machinery, vehicles and heavy equipment, office and house equipment, ships, locomotives and wagons, buffer assets, right-of-use assets and construction in progress. Fixed assets are calculated based on their acquisition cost and reduced by accumulated depreciation.

As of December 31, 2022, the Group's PI property and equipment are insured against earthquake, fire and other risks (all risks) with sum insured amounting to Rp17.51 million and USD3.63 billion. Management believes that the sum insured is adequate to cover possible losses on the insured assets.

Aset Pajak Tangguhan

Jumlah aset pajak tangguhan pada tahun 2022 sekitar Rp174,91 miliar, naik 55,06% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp112,80 miliar.

Deferred Tax Assets

Total deferred tax assets in 2022 were around Rp174.91 billion, a 55.06% increase compared to 2021 which amounted to Rp112.80 billion.

Aset Imbalan Pascakerja

Jumlah aset imbalan pascakerja tahun 2022 sebesar Rp552,54 miliar, menurun 27,97% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp767,12 miliar.

Post-employment Benefits Assets

Total post-employment benefits assets in 2022 amounted to Rp552.54 billion, a decrease of 27.97% compared to 2021 which amounted to Rp767.12 billion.

Aset Tidak Tancar Lainnya

Jumlah aset tidak lancar lainnya hingga akhir tahun 2022 sekitar Rp2,08 triliun, lebih tinggi 4,80% dari tahun 2021 yang sebesar Rp1,98 triliun.

Other Non-current Assets

The total amount of other non-current assets by the end of 2022 was around Rp2.08 trillion, 4.80% higher than in 2021 which amounted to Rp1.98 trillion.

LIABILITAS

LIABILITIES

JUMLAH LIABILITAS 2018-2022
Total Liabilities 2018-2022

Rp juta | Rp million

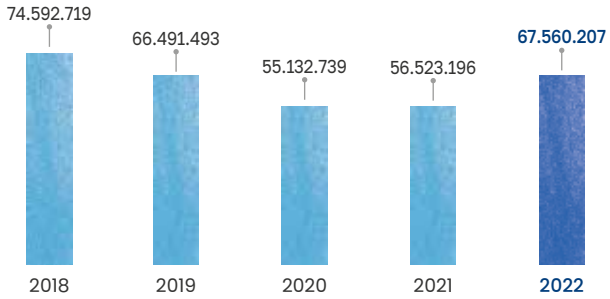

JUMLAH LIABILITAS 2021-2022
Total Liabilities 2021-2022

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	2022 (Rp juta | Rp million)	2021 (Rp juta | Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		Consolidated Statements of Financial Position
			Nominal (Rp juta | Rp million)	Persentase Percentage (%)	
Liabilitas Jangka Pendek	42.749.997	33.008.039	9.741.958	29,51	Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang	24.810.210	23.515.157	1.295.053	5,51	Non-Current Liabilities
Jumlah Liabilitas	67.560.207	56.523.196	11.037.011	19,53	Total Liabilities

Jumlah liabilitas Perusahaan pada tahun 2022 sebesar Rp67,56 triliun, lebih tinggi 19,53% dibandingkan tahun 2021 yang sebear Rp56,52 triliun. Peningkatan tersebut, terutama dikontribusikan oleh kenaikan liabilitas jangka pendek yang tumbuh 29,51%, sehingga menjadi Rp42,75 triliun.

The Company's total liabilities in 2022 amounted to Rp67.56 trillion, 19.53% higher than in 2021 which amounted to Rp56.52 trillion. The increase was mainly contributed by the increase in short-term liabilities which grew by 29.51% to Rp42.75 trillion.

LIABILITAS JANGKA PENDEK
Total Current Liabilities

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	2022 (Rp juta | Rp million)	2021 (Rp juta | Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		Consolidated Statements of Financial Position
			Nominal (Rp juta | Rp million)	Persentase Percentage (%)	
Pinjaman Bank Jangka Pendek	5.780.006	7.308.865	(1.528.859)	(20,92)	Short-term Bank Loans
Utang Usaha	9.148.195	6.101.227	3.046.968	49,94	Trade Payable
Utang Subsidi kepada Pemerintah Indonesia	–	95.627	(95.627)	(100,00)	Subsidy Debt to the Government of Indonesia
Utang Bruto kepada Pelanggan untuk Pekerjaan Kontrak Konstruksi	28.122	2.210	25.912	1172,49	Amounts Due to Customers for Construction Contract Work
Utang Lainnya	1.600.290	1.642.704	(42.414)	(2,58)	Other Payables
Utang Salam	1.186.705	–	1.186.705	100,00	Salam Payables
Utang Pajak	4.678.410	2.529.054	2.149.356	84,99	Taxes Payables
Liabilitas yang Masih Harus Dibayar	8.466.812	6.985.668	1.481.144	21,20	Accrued Liabilities
Provisi	3.672.074	2.033.414	1.638.660	80,59	Provisions
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek	4.586.554	2.100.570	2.485.984	118,35	Short-term Employment Benefit Liabilities
Bagian Lancar Liabilitas Jangka Panjang:					Current Maturities of Non-Current Borrowings:
Pinjaman Bank dan Lainnya	2.392.385	2.360.195	32.190	1,36	Bank and Other Loans
Utang Obligasi	1.146.854	1.773.765	(626.911)	(35,34)	Bonds Payable
Liabilitas Sewa	63.590	74.740	(11.150)	(14,92)	Lease Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**42.749.997**	**33.008.039**	**9.741.958**	**29,51**	**Total Current Liabilities**

Liabilitas Jangka Pendek
Pada tahun 2022, jumlah liabilitas jangka pendek Perusahaan sebesar Rp42,75 triliun, lebih tinggi 29,51% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp33,01 triliun. Kenaikan tersebut, terutama dikontribusikan oleh penambahan utang usaha, utang pajak, labilitas yang harus dibayar, serta provisi.

Current Liabilities
In 2022, the Company's total current liabilities amounted to Rp42.75 trillion, 29.51% higher than in 2021 which amounted to Rp33.01 trillion. The increase was mainly contributed by the addition of trade payables, tax payables, accrued liabilities, and provisions.

LIABILITAS JANGKA PENDEK 2018-2022
Current Liabilities 2018-2022

Rp juta | Rp million

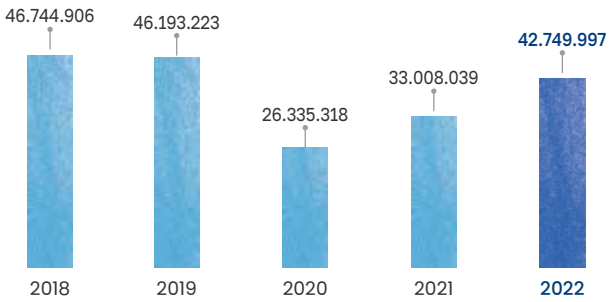

Pinjaman Bank Jangka Pendek

Pinjaman bank jangka pendek merupakan salah satu komponen terbesar dalam liabilitas jangka pendek. Pinjaman bank jangka pendek pada tahun 2022 mencapai Rp5,78 triliun, turun 20,92% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp7,31 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan telah dibayarnya pinjaman bank yang jatuh tempo di tahun 2022 sebesar Rp8,53 triliun.

Utang Usaha

Jumlah Utang usaha Perusahaan tahun 2022 mencapai Rp9,15 triliun. Dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp6,10 triliun, terjadi penambahan 49,94%.

Utang Subsidi kepada Pemerintah Indonesia

Utang subsidi merupakan kelebihan pembayaran piutang subsidi oleh Kementerian Pertanian dikarenakan perbedaan harga pupuk subsidi per ton antara Kementerian Pertanian dengan hasil audit BPK-RI. Pada tahun 2022, nilai utang subsidi tersebut nihil, sementara pada tahun 2021 sebesar Rp95,63 miliar,

Utang Bruto kepada Pelanggan untuk Pekerjaan Kontrak Konstruksi

Jumlah utang bruto kepada pelanggan untuk pekerjaan kontrak konstruksi pada tahun 2022 sebesar Rp28,12 miliar, naik 1.172,49% dibandingkan tahun 2021 yang Rp2,21 miliar.

Utang lainnya

Jumlah utang lainnya hingga akhir tahun 2022 sebesar Rp1,60 triliun, turun 2,58% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp1,64 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan liabilitas kontrak-pihak ketiga sebesar 39,32% atau setara Rp332,32 miliar.

Utang Pajak

Jumlah utang pajak Perusahaan pada tahun 2022 mencapai Rp4,68 triliun. Dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp2,53 triliun, ada peningkatan 84,99%. Kenaikan ini terutama disebabkan meningkatnya utang pajak penghasilan badan sebesar 112,38% atau setara dengan Rp2,11 triliun.

Liabilitas yang Masih Harus Dibayar

Jumlah liabilitas yang masih harus dibayar pada 2022 sebesar Rp8,47 triliun, lebih tinggi 21,20% dibandingkan tahun 2021, yaitu sebesar Rp6,99 triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan meningkatnya liabilitas yang masih harus dibayar berupa biaya bahan baku non gas sebesar 65,76% atau setara Rp1,16 triliun serta biaya bahan bakar dan gas alam naik sebesar 39,46% atau setara Rp741,57 miliar.

Short-term Bank Loan

Short-term bank loans are one of the largest components in current liabilities. Short-term bank loans in 2022 reached Rp5.78 trillion, decrease of 20.92% compared to 2021 which amounted to Rp7.31 trillion. This decrease was mainly due to the payment of bank loans that matured in 2022 amounting to Rp8.53 trillion.

Trade Payables

The Company's total trade payable in 2022 reached Rp9.15 trillion. Compared to 2021 which amounted to Rp6.10 trillion, there was an increase of 49.94%.

Subsidy payable to the Government of Indonesia

Subsidy payable is an overpayment of subsidy receivables by the Ministry of Agriculture due to differences in the price of subsidized fertilizer per ton between the Ministry of Agriculture and the BPK-RI audit results. In 2022, the value of the subsidy debt is nil, while in 2021 it amounted to Rp95.63 billion,

Amounts Due to Customers for Construction Contract Work

Total amounts due to customers for construction contract work in 2022 amounted to Rp28.12 billion, up 1,172.49% compared to Rp2.21 billion in 2021.

Other payables

Total other payables by the end of 2022 amounted to Rp1.60 trillion, a decrease of 2.58% compared to 2021 which amounted to Rp1.64 trillion. This decrease was mainly due to a decrease in contract liabilities-third parties by 39.32% or equivalent to Rp332.32 billion.

Taxes Payable

The Company's total taxes payable in 2022 reached Rp4.68 trillion. Compared to 2021 which amounted to Rp2.53 trillion, there was an increase of 84.99%. This increase was mainly due to an increase in corporate income tax payable of 112.38% or equivalent to Rp2.11 trillion.

Accrued Liabilities

Total accrued liabilities in 2022 amounted to Rp8.47 trillion, 21.20% higher than in 2021, which amounted to Rp6.99 trillion. This increase was mainly due to an increase in accrued liabilities in the form of non-gas raw material costs by 65.76% or equivalent to Rp1.16 trillion and fuel and natural gas costs increased by 39.46% or equivalent to Rp741.57 billion.

Provisi
Provisi per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp3,67 triliun, meningkat 80,59% atau setara dengan Rp1,64 triliun dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp2,03 triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya provisi atas kurang bayar pengadaan gas bumi di tahun 2022 sebesar Rp1,80 triliun.

Bagian Lancar dari Pinjaman Jangka Panjang: Pinjaman Bank dan Lainnya
Bagian lancar pinjaman bank dan lainnya pada tahun 2022 sebesar Rp2,39 triliun, lebih tinggi 1,36% dari tahun 2021 yang sebesar Rp2,36 triliun.

Bagian Lancar dari Pinjaman Jangka Panjang: Utang Obligasi
Utang obligasi jatuh tempo tahun 2022 sebesar Rp1,15 triliun. Dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp1,77 triliun, terjadi penurunan 35,34%.

Bagian Lancar dari Pinjaman Jangka Panjang: Liabilitas Sewa
Liabilitas sewa tahun 2022 mencapai Rp63,59 miliar, turun 14,92% dibandingkan tahun 2021, yaitu sebesar Rp74,74 miliar.

Provisions
Provisions as of December 31, 2022, amounted to Rp3.67 trillion, an increase of 80.59% or equivalent to Rp1.64 trillion compared to 2021 of Rp2.03 trillion. This increase was mainly due to provisions for underpayment of natural gas procurement in 2022 amounting to Rp1.80 trillion.

Current Maturities of Non-Current Borrowings: Bank and Other Loans
The current portion of bank and other loans in 2022 amounted to Rp2.39 trillion, 1.36% higher than 2021 which amounted to Rp2.36 trillion.

Current Maturities of Non-Current Borrowings: Bonds Payable
Bonds payable due in 2022 amounted to Rp1.15 trillion. Compared to 2021 which amounted to Rp1.77 trillion, there was a 35.34% decrease.

Current maturities of Non-Current Borrowings: Lease Liabilities
Rental liabilities in 2022 reached Rp63.59 billion, a decrease of 14.92% compared to 2021, which amounted to Rp74.74 billion.

LIABILITAS JANGKA PANJANG
Non-Current Liabilities

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	2022 (Rp juta | Rp million)	2021 (Rp juta | Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		Consolidated Statements of Financial Position
			Nominal (Rp juta | Rp million)	Persentase Percentage (%)	
Pinjaman Jangka Panjang:					Non-Current Borrowings:
Pinjaman Bank dan Lainnya	15.700.671	12.611.995	3.088.676	24,49	Bank and Other Loans
Utang Obligasi	6.119.680	7.264.168	(1.144.488)	(15,76)	Bonds Payable
Liabilitas Sewa	75.565	69.682	5.883	8,44	Lease Liabilities
Liabilitas Imbalan Pascakerja	2.184.401	2.764.102	(579.701)	(20,97)	Post-employment Benefits Liabilities
Liabilitas Pajak Tangguhan	708.330	738.299	(29.969)	(4,60)	Deferred Tax Liabilities
Liabilitas Tidak Lancar Lainnya	21.563	66.911	(45.348)	(67,77)	Other non-current liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**24.810.210**	**23.515.157**	**1.295.053**	**5,51**	**Total Non-Current Liabilities**

Liabilitas jangka panjang Perusahaan tahun 2022 sebesar Rp24,81 triliun, lebih tinggi 5,51% dari tahun 2021 yang sebesar Rp23,52. Perubahan ini, terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pinjaman bank jangka panjang dan lainnya yang tumbuh 24,49%.

The Company's long-term liabilities in 2022 amounted to Rp24.81 trillion, 5.51% higher than in 2021 which amounted to Rp23.52. This change was mainly due to an increase in long-term bank loans and others, which grew 24.49%.

LIABILITAS JANGKA PANJANG 2018-2022
Non-Current Liabilities 2018-2022

Rp juta | Rp million

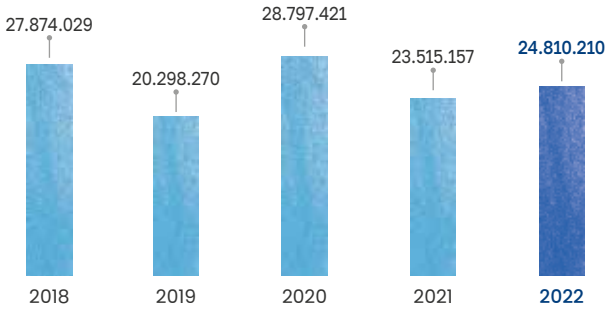

Pinjaman Jangka Panjang-Pinjaman Bank dan Lainnya

Pinjaman bank jangka panjang dan lainnya pada tahun 2022 sebesar Rp15,70 triliun, mengalami kenaikan 24,49% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp12,61 triliun.

Non-Current Borrowings-Bank and Other Loans

Long-term bank loans and others in 2022 amounted to Rp15.70 trillion, an increase of 24.49% compared to 2021 which amounted to Rp12.61 trillion.

Pinjaman Jangka Panjang-Setelah Dikurangi Bagian lancar: Utang Obligasi

Utang obligasi tahun 2022 sebear Rp6,12 triliun. Dibandingkan posisi tahun 2021 yang sebesar Rp7,26 triliun, terjadi penurunan 15,76%. Penurunan ini terutama disebabkan perusahaan melakukan pelunasan atas Obligasi Berkelanjutan I PTPI Tahap II Tahun 2017 sebesar Rp1,77 triliun.

Non-Current Borrowings-Net of Current Portion: Bonds Payable

Bonds payable in 2022 amounted to Rp6.12 trillion. Compared to the 2021 position of Rp7.26 trillion, there was an decrease of 15.76%. This decrease was mainly due to the company's repayment of PTPI Sustainable Bonds I Phase II Year 2017 amounting to Rp1.77 trillion.

Pinjaman Jangka Panjang-Liabilitas Sewa

Liabilitas sewa tahun 2022 sebesar Rp75,57 miliar, naik 8,44% dibandingkan tahun 2021 yang sebear Rp69,68 miliar.

Non-Current Borrowings-Lease Liabilities

Rental liabilities in 2022 amounted to Rp75.57 billion, increase 8.44% compared to Rp69.68 billion in 2021.

Liabilitas Imbalan Pascakerja

Liabilitas imbalan pascakerja hingga akhir tahun 2022 sebesar Rp2,18 triliun. Dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp2,76 triliun, terjadi penurunan 20,97%. Manajemen berkeyakinan bahwa perkiraan liabilitas dan imbalan kerja karyawan yang diberikan dari keseluruhan program pensiun Grup, yang didasarkan pada estimasi perhitungan aktuaris, telah melebihi kewajiban minimal yang ditentukan oleh UU Cipta Kerja.

Post-employment Benefits Liabilities

Post-employment benefits liabilities by the end of 2022 amounted to Rp2.18 trillion. Compared to 2021 which amounted to Rp2.76 trillion, there was a decrease of 20.97%. Management believes that the estimated liabilities and employee benefits provided from the Group's overall pension plan, which are based on estimated actuarial calculations, exceed the minimum liabilities prescribed by the Job Creation Law.

Liabilitas Pajak Tangguhan

Liabilitas pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan yang terutang untuk periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer kena pajak. Pada tahun 2022, posisinya mencapai Rp708,33 miliar, turun 4,06% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp738,30 miliar.

Deferred Tax Liabilities

Deferred tax liabilities represent the amount of income tax payable for future periods as a result of taxable temporary differences. In 2022, the position reached Rp708.33 billion, a decrease of 4.06% compared to 2021 which amounted to Rp738.30 billion.

Liabilitas Tidak Lancar Lainnya

Liabilitas tidak lancar lainnya hingga akhir tahun buku 2022 sebesar Rp21,56 miliar, turun 67,77% dibandingkan tahun 2021, yaitu sebesar Rp66,91 miliar.

Other Non-current Liabilities

Other non-current liabilities by the end of fiscal year 2022 amounted to Rp21.56 billion, a decrease of 67.77% compared to 2021, which amounted to Rp66.91 billion.

EKUITAS

Jumlah ekuitas Perusahaan pada tahun 2022 sebesar Rp91,16 triliun, naik 26,72% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp71,94 triliun. Kenaikan ini, terutama ditopang oleh penambahan pada saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, dengan kenaikan 636,44%.

EQUITY

Total the Company's equity in 2022 amounted to Rp91.16 trillion, an increase of 26.72% compared to 2021 which amounted to Rp71.94 trillion. This increase was mainly supported by the addition of unappropriated retained earnings, with an increase of 636.44%.

JUMLAH EKUITAS 2018-2022
Total Equity 2018-2022

Rp juta | Rp million

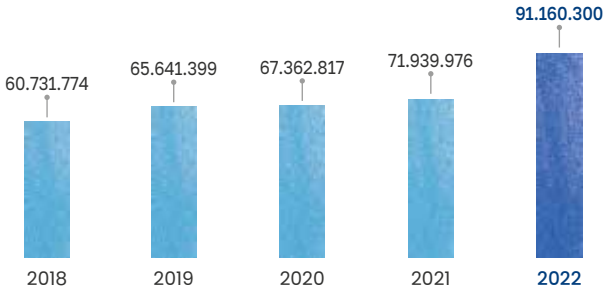

EKUITAS 2021-2022
2021-2022 Equity

Ekuitas	2022 (Rp juta | Rp million)	2021 (Rp juta | Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		Equity
			Nominal (Rp juta | Rp million)	Persentase Percentage (%)	
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk					Equity Attributable to Owners of the Parent Entity
Modal Saham	25.000.000	25.000.000	–	–	Share Capital
Saldo Laba:					Appropriated:
Ditentukan Penggunaannya	20.615.244	16.044.117	4.571.127	28,49	Unappropriated
Belum Ditentukan Penggunaannya	15.205.418	2.064.733	13.140.685	636,44	Not Yet Designated for Use
Komponen Ekuitas Lainnya	30.286.202	28.805.426	1.480.776	5,14	Other Components of Equity
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	91.106.864	71.914.276	19.192.588	26,69	Total Equity Attributable to Owners of the Parent Entity
Kepentingan non-pengendali	53.436	25.700	27.736	107,92	Non-controlling Interests
Jumlah Ekuitas	**91.160.300**	**71.939.976**	**19.220.324**	**26,72**	**Total Equity**

Kinerja ekuitas dipengaruhi oleh ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, yang terdiri dari modal saham, saldo laba baik yang dicadangkan maupun belum dicadangkan, penghasilan komprehensif lain serta ekuitas yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali.

Equity performance is affected by equity attributable to owners of the parent, which consists of share capital, retained earnings, other comprehensive income and equity attributable to non-controlling interests.

Nilai ekuitas tahun 2022 sebesar Rp91,16 triliun, naik 26,72% dibandingkan posisi tahun 2021. Sementara ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik entitas induk naik 26,69% dibandingkan tahun sebelumnya serta yang Diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali mengalami kenaikan sebesar 107,92%.

The value of equity in 2022 amounted to Rp91.16 trillion, an increase of 26.72% compared to the position in 2021. Meanwhile, equity attributable to Owners of the parent entity increased by 26.69% compared to the previous year and that attributable to non-controlling interests increased by 107.92%.

Modal Saham

Modal saham Perusahaan per tanggal 31 Desember tahun 2022 sebesar Rp25 triliun. Tidak terdapat perubahan modal saham sepanjang tahun 2022.

Share Capital

The Company's share capital as of December 31, 2022 is Rp25 trillion. There is no change in share capital throughout 2022.

Saldo Laba

Saldo laba terdiri dari saldo laba yang dicadangkan dan saldo laba yang belum dicadangkan.

- Saldo laba yang ditentukan penggunaannya tahun 2022 sebesar Rp20,62 triliun, naik 28,49% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp16,04 triliun.
- Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya tahun 2022 sebesar Rp15,21 triliun, lebih tinggi 636,44% dibandingkan tahun 2021, yaitu sebesar Rp2,06 triliun.

Retained Earnings

Retained earnings consist of reserved retained earnings and unreserved retained earnings.

- Appropriated retained earnings in 2022 amounted to Rp20.62 trillion, a 28.49% nail compared to 2021 which amounted to Rp16.04 trillion.
- Unappropriated retained earning in 2022 amounted to Rp15.21 trillion, 636.44% higher than in 2021, which amounted to Rp2.06 trillion.

Komponen Ekuitas Lainnya

Komponen ekuitas lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp30,29 triliun, meningkat 5,14% dibandingkan tahun 2021, yaitu sebesar Rp28,81 triliun.

Other Components of Equity

Other components of equity as of December 31, 2022 amounted to Rp30.29 trillion, an increase of 5.14% compared to 2021, which amounted to Rp28.81 trillion.

Kepentingan Non-Pengendali

Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun 2022 sebesar Rp91,11 triliun, naik 26,69% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp71,91 triliun.

Non-controlling Interest

Total equity attributable to owners of the parent entity in 2022 amounted to Rp91.11 trillion, Nail 26.69% compared to 2021 which amounted to Rp71.91 trillion.

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-Pengendali

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali tahun 2022 sebesar Rp53,44 miliar, naik 107,92% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp25,70 miliar.

Equity Attributable to Non-Controlling Interests

Equity attributable to non-controlling interests in 2022 amounted to Rp53.44 billion, up 107.92% compared to Rp25.70 billion in 2021.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Laba tahun berjalan Perusahaan pada tahun 2022 mencapai Rp18,51 triliun, naik 260,50% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp5,13 triliun. Kenaikan ini terjadi seiring dengan peningkatan penjualan dan pendapatan usaha lainnya yang sebesar 32,13%.

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

The Company's profit for the year 2022 reached Rp18.51 trillion, up 260.50% compared to Rp5.13 trillion in 2021. This increase occurred in line with the 32.13% increase in sales and other operating income.

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	2022 (Rp juta | Rp million)	2021 (Rp juta | Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		Consolidated Profit or Loss and Other Comprehensive Income
			Nominal (Rp juta | Rp million)	Persentase Percentage (%)	
Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan	103.859.493	78.603.136	25.256.357	32,13	Revenue from Contract with Customers
Beban Pokok Pendapatan	(70.288.172)	(63.469.789)	(6.818.383)	10,74	Cost of Revenues
Laba Bruto	**33.571.321**	**15.133.347**	**18.437.974**	**121,84**	**Gross Profit**
Beban Penjualan	(1.183.293)	(1.280.505)	97.212	(7,59)	Selling Expenses
Beban Umum dan Administrasi	(5.956.428)	(4.023.124)	(1.933.304)	48,05	General and Administrative Expenses
Pendapatan Lainnya-Bersih	692.906	150.180	542.726	361,38	Other Income-Net
Laba Operasi	**27.124.506**	**9.979.898**	**17.144.608**	**171,79**	**Operating Profit**
Pendapatan Keuangan	271.478	226.343	45.135	19,94	Finance Income
Biaya Keuangan	(2.243.064)	(2.047.494)	(195.570)	9,55	Finance Costs
Bagian atas (Rugi)/Laba Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	(66.175)	296.018	(362.193)	(122,36)	Share of Net (Loss)/Profit of Associates and Joint Ventures
Laba sebelum Pajak Penghasilan	**25.086.745**	**8.454.765**	**16.631.980**	**196,72**	**Profit before Income Tax**
Beban Pajak Penghasilan	(6.576.153)	(3.320.090)	(3.256.063)	98,07	Income Tax Expenses
Laba Tahun Berjalan	**18.510.592**	**5.134.675**	**13.375.917**	**260,50**	**Profit for the Year**
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan setelah Pajak	1.480.776	46.592	1.434.184	3.078,18	Total Other Comprehensive Income for the Year after Tax
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	19.991.368	5.181.267	14.810.101	285,84	Total Comprehensive Income for the Year
Total Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:					**Total Profit for the Year Attributable to:**
Pemilik Entitas Induk	18.461.812	5.321.127	13.140.685	246,95	Owner of the Parent Entity
Kepentingan Non-pengendali	48.780	(186.452)	235.232	(126,16)	Non-controlling interests
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:					**Total Comprehensive Income for the Year Attributable to:**
Pemilik Entitas Induk	19.942.588	5.367.719	14.574.869	271,53	Owner of the Parent Entity
Kepentingan Non-pengendali	48.780	(186.452)	235.232	(126,16)	Non-controlling interests
Laba per Saham yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk - Dasar dan Dilusian (dalam Rupiah penuh)	**738.472**	**212.845**	**525.627**	**246,95**	**Earnings per Share Attributable to Owner of the Parent Entity - Basic and Diluted (in full Rupiah)**

Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

Seperti yang telah diuraikan pada bagian Tinjauan Operasi per Segmen Usaha, Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya Perusahaan diperoleh dari 3 (tiga) segmen usaha,

Revenue from Contract with Customers

As described in the section Overview of Operations by Business Segment, the Company's Sales and Other Operating Revenues are derived from 3 (three) business

yaitu segmen pupuk dan amoniak, jasa konstruksi, dan segmen lainnya.

Pada tahun 2022, penjualan dan pendapatan usaha lainnya mencapai Rp103,86 triliun, meningkat 32,13% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp78,60 triliun. Kenaikan ini terutama didukung oleh pendapatan dari segmen pupuk dan amoniak yang tumbuh 34,18%, sehingga menjadi Rp103,44 triliun.

segments, namely fertilizer and ammonia segment, construction services, and other segment.

In 2022, sales and other operating income reached Rp103.86 trillion, an increase of 32.13% compared to Rp78.60 trillion in 2021. This increase was mainly supported by revenue from the fertilizer and ammonia segment which grew 34.18%, to Rp103.44 trillion.

Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya Berdasarkan Segmen	**2022**		**2021**		**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)		Sales and Other Operating Income by Segment
	Jumlah Total **(Rp juta |** Rp million**)**	**Kontribusi** Contribution **(%)**	**Jumlah** Total **(Rp juta |** Rp million**)**	**Kontribusi** Contribution **(%)**	**Nominal (Rp juta |** Rp million**)**	**Persentase** Percentage **(%)**	
Pendapatan dari Segmen Pupuk dan Amoniak	103.442.919	87,11	77.094.451	87,87	26.348.468	34,18	Revenue from Fertilizer and Ammonia Segment
Pendapatan dari Segmen Jasa Konstruksi	2.749.770	2,32	3.310.739	3,77	(560.969)	(16,94)	Revenue from Construction Services Segment
Pendapatan dari Segmen Lainnya	12.559.199	10,58	7.333.918	8,36	5.225.281	71,25	Revenue from Other Segments
Jumlah Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya sebelum Eliminasi	**118.751.888**	**100,00**	**87.739.108**	**100,00**	**31.012.780**	**35,35**	**Total Sales and Other Operating Income before Elimination**
Eliminasi	(14.892.395)	-	(9.135.972)	-	(5.756.423)	63,01	Elimination
Jumlah Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya	**103.859.493**	**-**	**78.603.136**	**-**	**25.256.357**	**32,13**	**Total Sales and Other Operating Income**

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa segmen pupuk dan amoniak berkontribusi 87,11% terhadap jumlah penjualan dan pendapatan lainnya. Sementara segmen jasa konstruksi berkontribusi sebesar 2,32%. Di sisi lain, pendapatan dari segmen lainnya berkontribusi sebesar 10,58% terhadap jumlah penjualan dan pendapatan usaha lainnya.

Di samping itu, Perusahaan mendapatkan subsidi pupuk dari Pemerintah Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/M-DAG/PER/4/2013. Tata cara penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban subsidi pupuk diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.02/2016.

From the table above, it can be seen that the fertilizer and ammonia segment contributed 87,11% to total sales and other income. While the construction services segment contributed 2.32%. On the other hand, revenue from other segments contributed 10.58% to total sales and other operating income.

In addition, the Company receives fertilizer subsidies from the Government of Indonesia based on Minister of Trade Regulation No. 15/M-DAG/PER/4/2013. The procedures for the provision, disbursement and accountability of fertilizer subsidies are regulated in the Minister of Finance Regulation No. 68/ PMK.02/2016.

Penjualan dan Pendapatan Lainnya	2022 (Rp juta | Rp million)	2021 (Rp juta | Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		Sales and Other Income
			Nominal (Rp juta | Rp million)	Persentase Percentage (%)	
Penjualan Segmen Pupuk dan Amoniak serta Segmen Lainnya					**Sales of Fertilizer and Ammonia Segment and Other Segments**
Penjualan Produk	64.491.788	49.313.851	15.177.937	30,78	Product Sales
Penggantian Biaya Subsidi dari Pemerintah	36.109.067	25.258.692	10.850.375	42,96	Reimbursement of Government Subsidized Costs
Pendapatan Jasa	3.258.638	4.030.593	(771.955)	(19,15)	Service Revenue
Jumlah Penjualan dan Pendapatan Lainnya	**103.859.493**	**78.603.136**	**25.256.357**	**32,13**	**Total Sales and Other Income**

PERKEMBANGAN JUMLAH PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA LAINNYA 2018-2022
Development of Total Sales and Other Business Income 2018-2022

Rp juta | Rp million

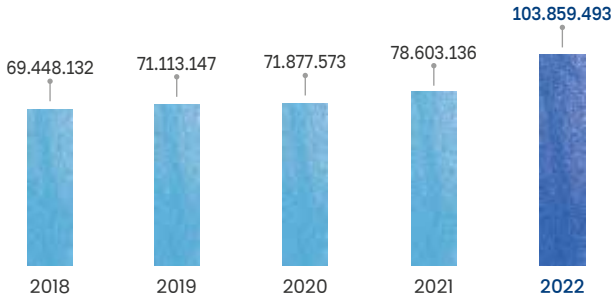

PERKEMBANGAN BESARAN SUBSIDI DARI PEMERINTAH 2018-2022
Development of Government Subsidy Amount 2018-2022

Rp juta | Rp million

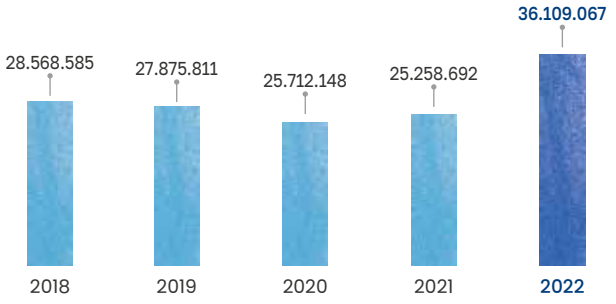

PENJUALAN PRODUK
Product Sales

Penjualan Produk	2022 (Rp juta | Rp million)	2021 (Rp juta | Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		Product Sales
			Nominal (Rp juta | Rp million)	Persentase Percentage (%)	
Penjualan Pupuk Subsidi	13.352.337	13.693.290	(340.953)	(2,49)	Subsidized Fertilizer Sales
Penjualan Pupuk Non-Subsidi	33.667.340	24.878.782	8.788.540	35,33	Sales of Non-Subsidized Fertilizer
Penjualan Non-Pupuk	17.151.207	10.497.032	6.654.175	63,39	Non-Fertilizer Sales
Penjualan Produk Lainnya	320.904	244.747	76.157	31,12	Sales of Other Products
Jumlah Penjualan Produk	**64.491.788**	**49.313.851**	**15.177.937**	**30,78**	**Total Product Sales**

Seperti yang dapat dilihat pada tabel di atas, nilai penjualan pupuk tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 21,90% atau setara Rp8,45 triliun dibandingkan tahun 2021. Sedangkan penjualan non pupuk tumbuh 63,69%, setara dengan Rp6,65 triliun. Sementara penjualan produk lainnya naik 31,12% atau setara dengan Rp76,16 miliar.

As can be seen in the table above, the value of fertilizer sales in 2022 increased by 21.90% or equivalent to Rp8.45 trillion compared to 2021. Meanwhile, non-fertilizer sales grew by 63.69%, equivalent to Rp6.65 trillion. While sales of other products increased by 31.12% or equivalent to Rp76.16 billion.

PENGGANTIAN BIAYA SUBSIDI DARI PEMERINTAH INDONESIA
Reimbursement of Subsidized Costs from the Indonesian Government

Penggantian Biaya Subsidi dari Pemerintah Indonesia	2022 (Rp juta | Rp million)	2021 (Rp juta | Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		Reimbursement of Subsidized Costs from the Indonesian Government
			Nominal (Rp juta | Rp million)	Persentase Percentage (%)	
Subsidi Pupuk:					**Subsidy of Fertilizer:**
Urea	11.861.398	10.193.563	1.667.835	16,36	Urea
NPK	22.319.851	11.000.486	11.319.365	102,90	NPK
SP-36	1.067.121	1.416.033	(348.912)	(24,64)	SP-36
ZA	807.713	1.583.586	(775.873)	(48,99)	ZA
Organik	261.975	509.883	(247.908)	(48,62)	Organic
NPK Kakao	85.855	53.651	32.204	60,02	NPK Cocoa
Subtotal	36.403.913	24.757.202	11.646.711	47,04	Subtotal

Penggantian Biaya Subsidi dari Pemerintah Indonesia	2022 (Rp juta | Rp million)	2021 (Rp juta | Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		Reimbursement of Subsidized Costs from the Indonesian Government
			Nominal (Rp juta | Rp million)	Persentase Percentage (%)	
Penyesuaian Piutang Subsidi dari Pemerintah, yang Belum Ditagih - Bersih setelah Penyesuaian Tahun Sebelumnya	(294.846)	501.490	(796.336)	(158,79)	Adjustment of Unbilled Subsidy Receivable from the Government - Net of Prior Year Adjustment
Jumlah Penggantian Biaya Subsidi dari Pemerintah Indonesia	**36.109.067**	**25.258.692**	**10.850.375**	**42,96**	**Total Reimbursement of Subsidy from the Government of Indonesia**

Penggantian biaya subsidi dari pemerintah tahun 2022 mencapai Rp36,11 triliun, naik 42,96% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp25,26 triliun. Kenaikan ini terutama akibat adanya penambahan pada subsidi NPK yang tumbuh 102,90%.

Reimbursement of subsidy costs from the government in 2022 reached Rp36.11 trillion, up 42.96% compared to 2021 which amounted to Rp25.26 trillion. This increase was mainly due to an increase in NPK subsidies which grew by 102.90%.

PENDAPATAN JASA
Service Revenue

Pendapatan Jasa	2022 (Rp juta | Rp million)	2021 (Rp juta | Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		Service Revenue
			Nominal (Rp juta | Rp million)	Persentase Percentage (%)	
Pendapatan Konstruksi	1.380.921	2.423.648	-1.585.307	-53,45	Construction Revenue
Jasa Konstruksi Pabrik dan Rantai Pasokan	818.817	566.723	252.094	44,48	Plant Services and Supply Chain
Jasa Operasi dan Pemeliharaan	318.639	245.014	73.625	30,05	Operation and Maintenance Services
Pendapatan dari Transaksi Tenaga Listrik	196.946	119.715	77.231	64,51	Revenue from Electronic Power Transactions
Pendapatan Keuangan Dari Perjanjian Konsesi Jasa	122.709	132.913	-10.204	-7,68	Finance Income from Service Concession Arrangement
Lainnya	420.606	542.580	-121.974	-22,48	Others

Pendapatan jasa tahun 2022 sebesar Rp3,26 triliun, turun 19,15% atau setara Rp771,96 triliun. Penurunan tersebut, utamanya berasal dari penurunan pendapatan konstruksi 43,02% atau setara dengan Rp1,04 triliun dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp2,42 triliun.

Service revenue in 2022 amounted to Rp3.26 trillion, down 19.15% or equivalent to Rp771.96 trillion. The decline mainly came from a 43.02% decrease in construction revenue or equivalent to Rp1.04 trillion compared to Rp2.42 trillion in 2021.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan terdiri dari beban manufaktur (biaya produksi, persediaan barang jadi, barang dalam proses) dan beban non-manufaktur. Beban pokok pendapatan Perusahaan per akun dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Cost of Revenues

Cost of revenues consists of manufacturing expenses (production cost, finished goods inventory, work in process) and non-manufacturing expenses. The Company's cost of revenue by account can be seen in the table below:

Beban Pokok Pendapatan	2022 (Rp juta | Rp million)	2021 (Rp juta | Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		Cost of Revenue
			Nominal (Rp juta | Rp million)	Persentase Percentage (%)	
Bahan Baku yang Digunakan	54.264.268	42.883.940	11.380.328	26,54	Raw Materials Used
Beban Penyusutan	4.169.064	4.112.455	56.609	1,38	Depreciation Expenses
Biaya Tenaga Kerja Langsung	3.420.247	3.267.898	152.349	4,66	Direct Labour
Perbaikan dan Pemeliharaan	988.661	980.305	8.356	0,85	Repairs and Maintenance
Biaya *Overhead* Lainnya	3.103.487	3.416.216	(312.729)	(9,15)	Other Overhead Costs
Jumlah Biaya Produksi	**65.945.727**	**54.660.814**	**11.284.913**	**20,65**	**Total Production Costs**
Persediaan Barang Jadi dan Barang Dalam Proses:					**Finished Goods and Work in Progress Inventories:**
Awal Tahun	8.149.802	7.845.646	304.156	3,88	Beginning of the Year
Akhir Tahun	(10.883.698)	(8.149.802)	(2.733.896)	33,55	End of the Year
	63.211.831	54.356.658	8.855.173	16,29	
Beban Non-Manufaktur					**Non-Manufacturing Expenses**
Jasa Konstruksi	1.853.252	6.086.695	(4.233.443)	(69,55)	Construction Services
Perdagangan	3.331.145	1.794.178	1.536.967	85,66	Trade
Properti dan Jasa Kawasan Industri	134.850	131.729	3.121	2,37	Properties and Services Industrial Estate
Listrik, *Steam,* dan Utilitas	819.910	510.584	309.326	60,58	Electricity, Steam, and Utilities
Lain-lain	937.184	589.945	347.239	58,86	Miscellaneous
Jumlah Beban Non-Manufaktur	**7.076.341**	**9.113.131**	**(2.036.790)**	**(22,35)**	**Total Cost of Non-Manufacturing**
Jumlah Beban Pokok Pendapatan	**70.288.172**	**63.469.789**	**6.818.383**	**10,74**	**Total Cost of Revenues**

Beban pokok pendapatan tahun 2022 sebesar Rp70,29 triliun. Dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp63,47 triliun, terjadi peningkatan 10,74%. Beban manufaktur pada tahun buku 2022 meningkat 16,29% dibandingkan tahun sebelumnya atau setara Rp8,86 triliun. Peningkatan terutama disebabkan oleh dan adanya dampak penerapan PSAK 72. Beban non manufaktur menurun 22,35%, yang utamanya disebabkan penurunan biaya jasa konstruksi dari Rp6,09 triliun di tahun 2021 menjadi Rp1,85 triliun di tahun 2022.

Cost of revenues in 2022 amounted to Rp70.29 trillion. Compared to 2021 which amounted to Rp63.47 trillion, there was an increase of 10.74%. Manufacturing expenses in fiscal year 2022 increased by 16.29% compared to the previous year or equivalent to Rp8.86 trillion. Non-manufacturing expenses decreased by 22.35%, which was mainly due to a decrease in construction services costs from Rp6.09 trillion in 2021 to Rp1.85 trillion in 2022.

Laba Bruto

Laba bruto didapatkan dari akun penjualan dan pendapatan usaha lainnya yang diakumulasikan dengan beban pokok pendapatan. Perusahaan mencatat laba bruto tahun 2022 sebesar Rp33,57 triliun, naik 121,84 dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp15,13 triliun.

Gross Profit

Gross profit is derived from the sales and other operating income account accumulated with cost of revenue. The company recorded gross profit for the year 2022 amounted to Rp33.57 trillion, an increase of 121.84 compared to 2021 which amounted to Rp15.13 trillion.

PERKEMBANGAN LABA BRUTO 2018-2022
Gross Profit Development 2018-2022
Rp juta | Rp million

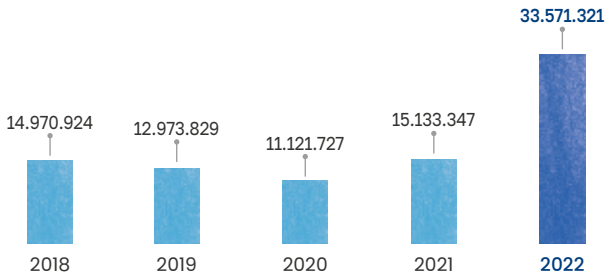

Beban Penjualan

Beban penjualan per akun dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Selling Expenses

Selling expenses per account can be seen in the table below:

Beban Penjualan	2022 (Rp juta | Rp million)	2021 (Rp juta | Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		Selling Expenses
			Nominal (Rp juta | Rp million)	Persentase Percentage (%)	
Gaji, Upah dan Kesejahteraan	592.173	559.551	32.622	5,83	Salary, Wages and Welfare
Biaya Jasa	120.026	160.294	(40.268)	(25,12)	Service Fee
Beban Sewa	69.394	140.982	(71.588)	(50,78)	Rental Expenses
Beban Promosi dan pemasaran	146.126	117.512	28.614	24,35	Promotion and marketing expenses
Beban Penyusutan	59.042	110.086	(51.044)	(46,37)	Depreciation Expense
Beban Perlengkapan dan Operasional Kantor	42.415	35.107	7.308	20,82	Office Supplies and Operating Expenses
Beban Perjalanan Dinas	34.241	23.664	10.577	44,70	Office Travel Expenses
Beban Pemeliharaan	7.230	18.673	(11.443)	(61,28)	Maintenance Expenses
Beban Penelitian	15.692	16.062	370	(2,30)	Research Load
Beban Unit Pelayanan dan Utilitas	4.645	11.690	(7.045)	(60,27)	Service Unit and Utility Charges
Beban Asuransi	18.614	10.990	7.624	69,37	Insurance Expenses
Beban Lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000)	73.695	75.894	(2.199)	(2,90)	Other Expenses (each below Rp10,000)
Jumlah Beban Penjualan	**1.183.293**	**1.280.505**	**(97.212)**	**(7,59)**	**Total Selling Expenses**

Beban penjualan tahun 2022 mencapai Rp1.18 triliun, lebih rendah 7,59% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp1,28 triliun. Penurunan ini utamanya disebabkan beban penyusutan turun 46,37% atau setara Rp51,04 miliar dan beban sewa turun 50,78% atau setara Rp71,59 miliar.

Selling expenses in 2022 reached Rp1.18 trillion, 7.59% lower than in 2021 which amounted to Rp1.28 trillion. This decrease was mainly due to depreciation expenses decreasing by 46.37% or equivalent to Rp51.04 billion and rental expenses decreasing by 50.78% or equivalent to Rp71.59 billion.

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi perusahaan per akun dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

General and Administrative Expenses

The company's general and administrative expenses by account can be seen in the table below:

Beban Umum dan Administrasi	2022 (Rp juta | Rp million)	2021 (Rp juta | Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		General and Administrative Expenses
			Nominal (Rp juta | Rp million)	Persentase Percentage (%)	
Gaji, Upah dan Kesejahteraan	3.482.254	2.047.088	1.435.166	70,11	Salary, Wages and Welfare
Beban Jasa	627.672	521.498	106.174	20,36	Service Charges
Beban Pajak	307.060	312.576	(5.516)	(1,76)	Tax Expenses
Beban Unit Pelayanan dan Utilitas	253.865	215.461	38.404	17,82	Service Unit and Utility Expenses
Beban Penyusutan	120.079	127.317	(7.238)	(5,69)	Depreciation Expenses
Beban Bina Wilayah	144.273	141.113	3.160	2,24	Regional Development Expenses
Beban Pemeliharaan	95.171	129.485	(34.314)	(26,50)	Maintenance Expenses
Beban Sewa	143.748	109.145	34.603	31,70	Rent Expenses
Beban Promosi dan Pemasaran	160.970	109.896	51.074	46,47	Promotion and Marketing Expenses
Beban Perlengkapan dan Operasional Kantor	101.473	101.061	412	0,41	Supply and Office Operating Expenses
Beban Pelatihan	115.064	52.906	62.158	117,49	Training Expenses
Biaya Perjalanan Dinas	103.553	47.604	55.949	117,53	Travel Expenses
Beban Penelitian	45.407	43.462	1.945	4,48	Research Expenses
Penambahan/(Pembalikan) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang-Bersih	39.529	(55.399)	94.928	(171,35)	Addition/(Reversal) of Allowance for Impairment Losses of Receivables-Net
Beban Lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000)	216.310	119.911	96.399	80,39	Other Expenses (each below Rp10.000)
Jumlah Beban Umum dan Administrasi	**5.956.428**	**4.023.124**	**1.933.304**	**48,05**	**Total General and Administrative Expenses**

Beban umum dan administrasi tahun 2022 sebesar Rp5,96 triliun, naik 48,05% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp4,02 triliun. Kenaikan ini disebabkan realisasi gaji, upah dan kesejahteraan naik sebesar 70,11% atau setara Rp1,44 triliun.

General and administrative expenses in 2022 amounted to Rp5.96 trillion, up 48.05% compared to 2021 which amounted to Rp4.02 trillion. This increase was due to the realization of salaries, wages and welfare increased by 70.11% or equivalent to Rp1.44 trillion.

Pendapatan Lainnya-Bersih

Pendapatan lainnya-bersih tahun 2022 sebesar Rp692,91 miliar, lebih tinggi 361,38% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp150,18 miliar. Pada tahun 2022 membukukan pendapatan lainnya-bersih terutama disebabkan adanya laba selisih kurs sebesar Rp589,65 miliar.

Other Income -Net

Other income - net in 2022 amounted to Rp692.91 billion, 361.38% higher than in 2021 which amounted to Rp150.18 billion. In 2022, other income-net was mainly due to foreign exchange gain of Rp589.65 billion.

Laba Operasi

Laba operasi didapatkan dari akun laba bruto yang diakumulasikan dengan beban umum dan administrasi, beban penjualan, serta (beban) pendapatan lainnya - bersih.

Laba operasi tahun 2022 mencapai Rp27,12 triliun, naik 171,79% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp9,98 triliun.

Operating Profit

Operating profit is derived from gross profit account accumulated with general and administrative expenses, selling expenses, and other income (expense) - net.

Operating profit in 2022 reached Rp27.12 trillion, up 171.79% compared to Rp9.98 trillion in 2021.

PERKEMBANGAN LABA USAHA 2018-2022
Development of Operating Profit 2018-2022

Rp juta | Rp million

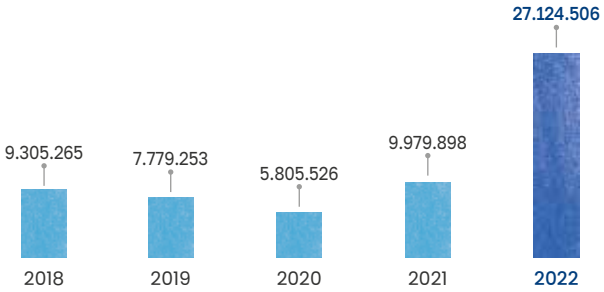

Pendapatan Keuangan

Pendapatan keuangan Perusahaan pada tahun 2022 sebesar Rp271,48 miliar, lebih tinggi 19,94% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp226,34 miliar.

Finance Income

The Company's financial income in 2022 amounted to Rp271.48 billion, 19.94% higher than in 2021 which amounted to Rp226.34 billion.

BIAYA KEUANGAN
Finance Costs

Biaya Keuangan	2022 (Rp juta | Rp million)	2021 (Rp juta | Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		Finance Costs
			Nominal (Rp juta | Rp million)	Persentase Percentage (%)	
Pinjaman Bank jangka pendek	744.257	769.174	(24.917)	(3,24)	Short-term bank loans
Utang Obligasi	667.995	648.074	19.921	3,07	Bonds Payable
Pinjaman Jangka Panjang	412.744	523.759	(111.015)	(21,20)	Long-term Loan
Biaya Bank dan Pinjaman	64.518	76.685	(12.167)	(15,87)	Bank and Loan Fees
Kerugian/(Keuntungan) Selisih kurs atas Pinjaman	353.550	29.802	323.748	1.086,33	Foreign exchange loss/ (Gain) on Borrowings
Jumlah Biaya Keuangan	**2.243.064**	**2.047.494**	**195.570**	**9,55**	**Total Finance Cost**

Biaya keuangan yang dikeluarkan Perusahaan pada tahun 2022 mencapai Rp2,24 triliun, naik 9,55% dibandingkan tahun 2021 yang Rp2,05 triliun. Kenaikan ini disebabkan adanya rugi selisih kurs sebesar Rp353,55 miliar.

Finance costs incurred by the Company in 2022 reached Rp2.24 trillion, up 9.55% compared to Rp2.05 trillion in 2021. This increase was due to foreign exchange losses of Rp353.55 billion.

Bagian atas (Rugi)/Laba Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Bagian atas rugi bersih dari entitas asosiasi dan ventura bersama pada tahun 2022 mencapai Rp66,18 miliar. Sementara pada tahun 2021 yang diterima Perusahaan adalah bagian laba, yaitu sebesar Rp296,02 miliar. Dengan demikian, terjadi penurunan 122,36%.

Laba sebelum Pajak Penghasilan

Perusahaan memperoleh laba sebelum pajak penghasilan pada tahun 2022 sebesar Rp25,09 triliun. Dibandingkan dengan realisasi yang 2021 sebesar Rp8,45 triliun, terjadi peningkatan 196,72%.

Beban Pajak Penghasilan

Total beban pajak penghasilan Perusahaan pada tahun 2022 mencapai Rp6,58 triliun, naik 98,07% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp3,32 triliun. Kenaikan ini seiring dengan peningkatan laba sebelum pajak sebesar 196,72% atau setara Rp16,63 triliun.

Laba Tahun Berjalan

Jumlah laba tahun berjalan yang diperoleh Perusahaan di tahun 2022 mencapai Rp18,51 triliun. Dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp5,13 triliun, terjadi kenaikan sebesar 260,50%. Kenaikan ini terutama disebabkan disebabkan pencapaian sebagai berikut:

1. Realisasi volume penjualan produk non pupuk mencapai 129,88% dari RKAP.
2. Realisasi beban keuangan mencapai Rp2,24 triliun atau 85,04% dari RKAP. Hal ini disebabkan realisasi rata-rata bunga pinjaman perbankan 7,59% atau lebih rendah dari yang direncanakan yaitu sebesar 8,00%.
3. Adanya kenaikan margin keuntungan dari penjualan produk komersil.
4. Realisasi pendapatan keuangan mencapai Rp271,48 miliar atau 206,08% dari RKAP yang merupakan realisasi pendapatan bunga.

Share of Net (Loss)/Income of Associates and Joint Ventures

The share of net loss from associates and joint ventures in 2022 amounted to Rp66.18 billion. While in 2021 the Company received a share of profit, which amounted to Rp296.02 billion. Thus, there was a 122.36% decrease.

Profit before Income Tax

The company obtained profit before income tax in 2022 of Rp25.09 trillion. Compared to the realization in 2021 of Rp8.45 trillion, there was an increase of 196.72%.

Income Tax Expenses

The Company's total income tax expense in 2022 reached Rp6.58 trillion, up 98.07% compared to Rp3.32 trillion in 2021. This increase is in line with the increase in profit before tax by 196.72% or equivalent to Rp16.63 trillion.

Profit for the Year

The total profit for the year earned by the Company in 2022 reached Rp18.51 trillion. Compared to 2021 which amounted to Rp5.13 trillion, there was an increase of 260.50%. This increase was mainly due to the following achievements:

1. Sales volume realization of non-fertilizer products reached 129.88% of the RKAP.
2. The realization of financial expenses reached Rp2.24 trillion or 85.04% of the RKAP. This is due to the realization of average bank loan interest of 7.59% or lower than planned at 8.00%.
3. An increase in profit margin from the sale of commercial products.
4. The realization of financial income reached Rp271.48 billion or 206.08% of the RKAP which is the realization of interest income.

PERKEMBANGAN LABA TAHUN BERJALAN 2018-2022
Current Year Profit Development 2018-2022

Rp juta | Rp million

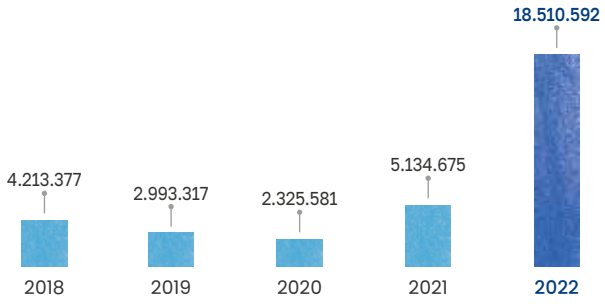

Penghasilan/(Rugi) Komprehensif Lain

Penghasilan/(rugi) Komprehensif lain per akun dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Other Comprehensive Income/(Loss)

Other Comprehensive Income/(loss) by account can be seen in the table below:

Penghasilan/(Rugi) Komprehensif Lain	2022 (Rp juta | Rp million)	2021 (Rp juta | Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		Other Comprehensive Income/(Loss)
			Nominal (Rp juta | Rp million)	Persentase Percentage (%)	
Pos yang akan Direklasifikasi ke Laba Rugi:					**Items that will be Reclassified to Profit or Loss:**
Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan Entitas Anak	65.447	9.078	56.369	620,94	Difference in Foreign Currency Arising from Translation of the Financial Statements of Subsidiaries
Pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi:					**Items that will not be Reclassified to Profit or Loss:**
Keuntungan/(Kerugian) Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti	155.944	(64.188)	220.132	(342,95)	Remeasurement Gain/(Loss) on Defined Benefit Plans
Lainnya	1.784	32.584	(30.800)	(94,52)	More
(Beban)/Manfaat Pajak Penghasilan Terkait	(34.308)	69.118	(103.426)	(149,64)	Related Income Tax (Expense)/Benefit
	1.415.329	37.514	1.377.815	3.672,80	
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan setelah Pajak	1.480.776	46.592	1.434.184	3.078,18	Total Other Comprehensive Income for the Year After Taxes

Total penghasilan komprehensif tahun berjalan didapatkan dari akun laba tahun berjalan yang diakumulasikan dengan laba (rugi) komprehensif lain setelah pajak. Pada tahun 2022, nilainya mencapai Rp1,48 triliun, meningkat 3.078,18% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp46,59 miliar.

Total comprehensive income for the year is obtained from the profit account for the year accumulated with other comprehensive income (loss) after tax. In 2022, the value reached Rp1.48 trillion, an increase of 3,078.18% compared to 2021 which amounted to Rp46.59 billion.

PERKEMBANGAN TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 2018-2022
Development of Total Comprehensive Income for the Year 2018-2022

Rp juta | Rp million

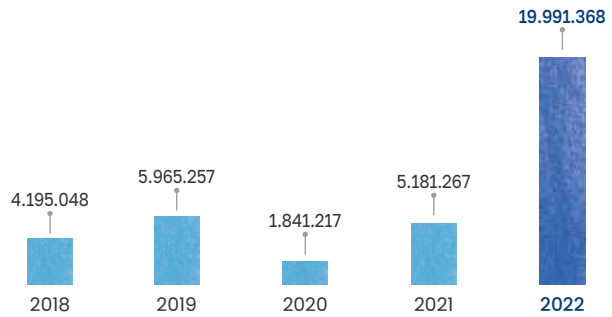

Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk

Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada Pemilik entitas induk pada tahun 2022 mencapai Rp18,46 triliun. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, yaitu Rp5,32 triliun, terjadi kenaikan 246,95%.

Profit for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity

Profit for the year attributable to Owners of the parent entity in 2022 reached Rp18.46 trillion. When compared to the realization in 2021, which was Rp5.32 trillion, there was an increase of 246.95%.

LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK 2018-2022
Profit for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity 2018-2022

Rp juta | Rp million

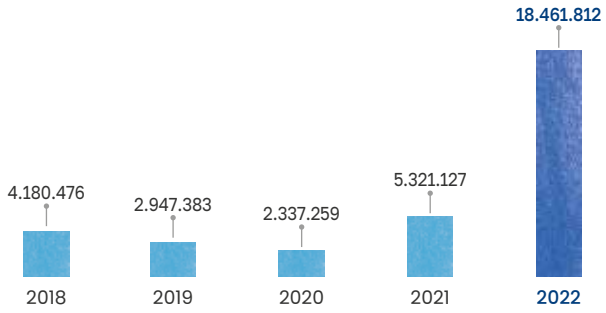

Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-Pengendali

Untuk laba tahun berjalan yang Diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali, pada tahun 2022 nilainya sebesar Rp48,78 miliar, meningkat 126,16%.

Profit for the Year Attributable to Non-Controlling Interests

For profit for the year attributable to non-controlling interests, in 2022 the value was Rp48.78 billion, an increase of 126.16%.

PERKEMBANGAN LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA KEPENTINGAN NON-PENGENDALI 2018-2022
Development of Profit for the Year Attributable to Non-Controlling Interests 2018-2022

Rp juta | Rp million

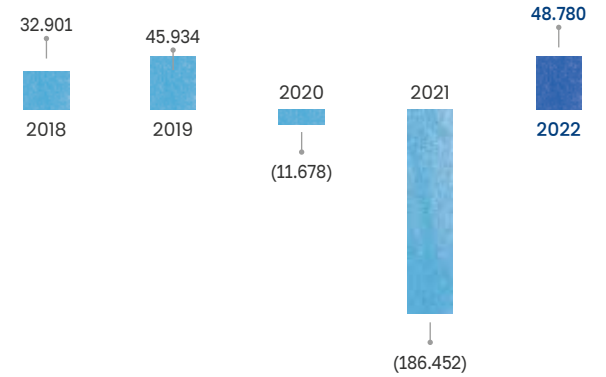

Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk

Penghasilan Komprehensif yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada tahun 2022 mencapai Rp19,94 triliun. Dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp5,37 triliun, ada kenaikan 271,53%.

Total Comprehensive Income for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity

Comprehensive Income attributable to owners of the parent entity in 2022 reached Rp19.94 trillion. Compared to 2021 which amounted to Rp5.37 trillion, there was an increase of 271.53%.

PERKEMBANGAN TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK 2018-2022

Development of Total Comprehensive Income for the Year Attributable to Owners of the Parent 2018-2022

Rp juta | Rp million

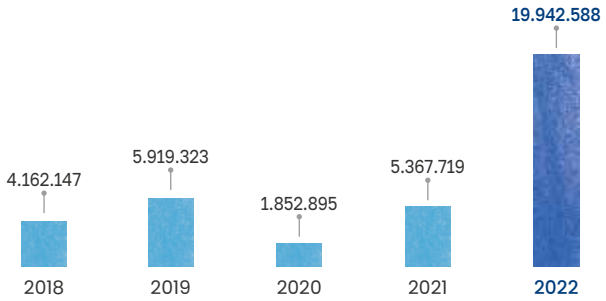

Penghasilan Komprehensif yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali pada tahun 2022 mencapai Rp48,78 miliar. Dibandingkan dengan tahun 2021 yang negatif sebesar Rp186,45 miliar, ada kenaikan 126,16%.

Comprehensive Income attributable to non-controlling interests in 2022 reached Rp48.78 billion. Compared to 2021 which was negative at Rp186.45 billion, there was an increase of 126.16%.

PERKEMBANGAN TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA KEPENTINGAN NON-PENGENDALI 2018-2022

Development of Total Comprehensive Income for the Year Attributable to Non-Controlling Interests 2018-2022

Rp juta | Rp million

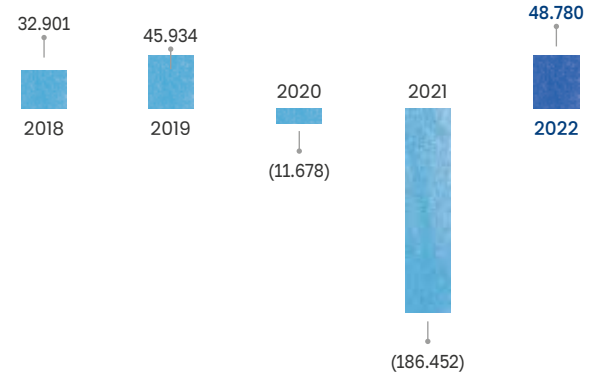

Laba per Saham yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk - Dasar dan Dilusian (dalam rupiah penuh)

Laba/rugi bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun berjalan.

Untuk tujuan penghitungan laba per saham dilusian, Perusahaan menyesuaikan laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar, atas dampak dari seluruh instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

Berikut disampaikan perhitungan laba per saham-dasar dan dilusian tahun 2022 dan 2021:

Earnings per Share Attributable to Owner of the Parent Entity - Basic and Diluted (in full rupiah)

Basic net income/loss per share is calculated by dividing the profit for the year attributable to owners of the parent by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

For the purpose of computing diluted earnings per share, the Company adjusts the profit or loss attributable to common shareholders of the parent and the weighted average number of shares outstanding, for the effects of all dilutive potential common share instruments.

The calculation of earnings per share-basic and diluted for 2022 and 2021 is presented below:

Biaya Keuangan	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		Finance Costs
			Nominal	Persentase Percentage (%)	
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk (Rp Juta)	18.461.812	5.321.127	13.140.685	246,95	Profit for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity (Rp Million)
Jumlah Rata-rata Tertimbang Saham Biasa yang Beredar (Lembar Saham)	25.000.000	25.000.000	–	–	Weighted Average Number of Common Shares Outstanding (Shares)
Jumlah Laba per Saham-Dasar dan Dilusian (Rupiah Penuh/ Lembar Saham)	738.472	212.845	525.627	246,95	Total Earnings per Share-Basic and Diluted (Full Rupiah/Share)

Laba per saham-dasar dan dilusian tahun 2022 sebesar Rp738.472 per lembar saham, meningkat 246,95% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp212.845 per lembar saham.

Earnings per share-basic and diluted in 2022 amounted to Rp738,472 per share, an increase of 246.95% compared to 2021 which amounted to Rp212,845 per share.

PERKEMBANGAN LABA PER SAHAM-DASAR 2018-2022
Earnings per Share Development-Basic 2018-2022

Rp juta | Rp million

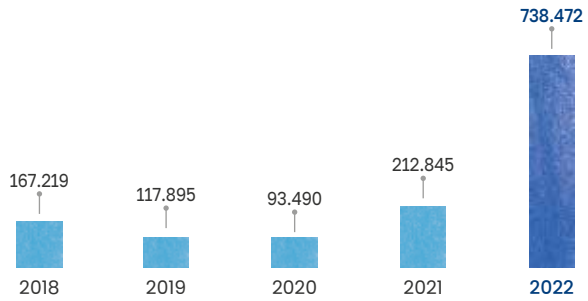

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Kas merupakan salah satu kelompok aset yang sifatnya paling likuid, sehingga semakin besar nilainya maka semakin baik kondisi keuangan perusahaan. Sedangkan laporan arus kas adalah laporan keuangan yang berisi tentang penerimaan dan pengeluaran kas dalam sebuah perusahaan pada waktu dan periode tertentu. Laporan arus kas dikelompokkan menjadi tiga kegiatan penting yaitu: kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS

Cash is one of the most liquid asset groups, so the greater the value, the better the company's financial condition. While the cash flow statement is a financial report that contains cash receipts and disbursements in a company at a certain time and period. The cash flow statement is grouped into three important activities, namely: operating, investing and financing activities.

Arus Kas Konsolidasian	2022 (Rp juta | Rp million)	2021 (Rp juta | Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		Consolidated Cash Flow
			Nominal (Rp juta | Rp million)	Persentase Percentage (%)	
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	22.030.176	14.517.293	7.512.883	51,75	Net Cash Flows Generated from Operating Activities
Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(4.383.225)	(3.007.701)	(1.375.524)	45,73	Net Cash Flows Used in Investing Activities
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(2.385.661)	(6.457.203)	4.071.542	(63,05)	Net Cash Flows Used in Financing Activities
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas	**15.261.290**	**5.052.389**	**10.208.901**	**202,06**	**Net Increase in Cash and Cash Equivalents**
Efek Perubahan Nilai Kurs pada Kas dan Setara Kas	746.025	(4.602)	750.627	(16,310,89)	Effect of Exchange Rates Changes on Cash and Cash Equivalents
Saldo Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun	**17.453.305**	**12.405.518**	**5.047.787**	**40,69**	**Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year**
Saldo Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun	**33.460.620**	**17.453.305**	**16.007.315**	**91,72**	**Cash and Cash Equivalents at the End of the Year**

Pada akhir tahun 2022, Perusahaan mencatatkan kas dan setara kas sebesar Rp33,46 triliun, meningkat 91,72% atau setara dengan Rp16,01 triliun dibandingkan akhir tahun 2021 yang sebesar Rp17,45 triliun. Kenaikan ini, terutama karena tingginya arus kas bersih dari aktivitas operasi.

Kinerja arus kas Perusahaan tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

At the end of 2022, the Company recorded cash and cash equivalents of Rp33.46 trillion, an increase of 91.72% or equivalent to Rp16.01 trillion compared to the end of 2021 which amounted to Rp17.45 trillion. This increase was mainly due to higher net cash flow from operating activities.

The Company's cash flow performance in 2022 compared to 2021 is as follows:

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Cash Flow from Operating Activities

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 2021-2022
Cash Flows from Operating Activities 2021-2022

Arus Kas dari Aktivitas Operasi	2022 (Rp juta | Rp million)	2021 (Rp juta | Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		Cash Flow from Operating Activities
			Nominal (Rp juta | Rp million)	Persentase Percentage (%)	
Penerimaan dari Pelanggan	68.983.630	55.744.116	13.239.514	23,75	Receipts from Customers
Penerimaan Subsidi Pupuk dari Pemerintah Indonesia	26.593.545	24.463.583	2.129.962	8,71	Receipt of Fertilizers Subsidy from the Government of Indonesia
Penerimaan Pendapatan Keuangan	269.119	228.471	40.648	17,79	Receipt from Finance Income
Penerimaan Restitusi Pajak	363.318	512.368	(149.050)	(29,09)	Receipt from Tax Restitutions
Pembayaran Kelebihan Subsidi kepada Pemerintah Indonesia	(95.627)	(126.633)	31.006	(24,48)	Payment of Excess Subsidy from the Government of Indonesia
Pembayaran kepada Pemasok	(61.967.833)	(57.329.334)	(4.638.499)	8,09	Payment to Suppliers
Pembayaran Bunga Biaya Transaksi Utang Obligasi	(2.292.250)	(2.019.442)	(272.808)	13,51	Payment of Interest and Bonds Payable Transaction Cost
Pembayaran Kepada Karyawan	(5.217.870)	(5.718.966)	501.096	(8,76)	Payment to Employees
Pembayaran Pajak Penghasilan Badan	(4.605.856)	(1.236.870)	(3.368.986)	272,38	Payment of corporate income tax
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	**22.030.176**	**14.517.293**	**7.512.883**	**51,75**	**Net Cash Flows Generated from Operating Activities**

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi tahun 2022 mencapai Rp22,03 triliun, meningkat 51,75% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp14,52 triliun. Kenaikan itu, terutama karena adanya peningkatan pada penerimaan kas dari pelanggan yang tumbuh 23,75% dan penerimaan subsidi pupuk dari Pemerintah Indonesia yang tumbuh 8,71%.

Net cash flow generated from operating activities in 2022 reached Rp22.03 trillion, an increase of 51.75% compared to Rp14.52 trillion in 2021. The increase was mainly due to an increase in cash receipts from customers which grew by 23.75% and receipts of fertilizer subsidies from the Government of Indonesia which grew by 8.71%.

Penerimaan dari Pelanggan

Penerimaan kas dari pelanggan tahun 2022 sebesar Rp68,98 triliun, meningkat 23,75% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp55,74 triliun. Kenaikan ini selaras dengan tingginya nilai penjualan sektor komersil.

Receipts from Customers

Cash receipts from customers in 2022 amounted to Rp68.98 trillion, an increase of 23,75% compared to Rp55.74 trillion in 2021. This increase is in line with the high sales value of the commercial sector.

Penerimaan Subsidi Pupuk dari Pemerintah Indonesia

Penerimaan subsidi pupuk dari Pemerintah Indonesia tahun 2022 sebesar Rp26,59 triliun, naik 8,71% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp24,46 triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan telah diterimanya pembayaran piutang subsidi atas kurang bayar tahun 2021.

Penerimaan Pendapatan Keuangan

Penerimaan pendapatan keuangan tahun 2022 sebesar Rp269,12 miliar, naik 17,79% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp228,47 miliar.

Penerimaan Restitusi Pajak

Penerimaan restitusi pajak tahun 2022 sebesar Rp363,32 miliar, turun 29,09% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp512,37 miliar.

Pembayaran Kelebihan Subsidi kepada Pemerintah Indonesia

Pembayaran kelebihan subsidi kepada Pemerintah Indonesia tahun 2022 sebesar Rp95,63 miliar, turun 24,48% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp126,63 miliar.

Pembayaran kepada Pemasok

Pembayaran kepada pemasok tahun 2022 mencapai Rp61,97 triliun, meningkat 8,09% dibandingkan tahun 2021, yaitu sebesar Rp57,33 triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan tingginya bahan baku pembuatan pupuk NPK.

Pembayaran Bunga Biaya Transaksi Utang Obligasi

Pembayaran bunga dan biaya transaksi utang obligasi tahun 2022 sebesar Rp2,29 triliun, naik 13,51% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp2,02 triliun.

Pembayaran kepada Karyawan

Pembayaran kepada karyawan tahun 2022 mencapai Rp5,22 triliun, turun 8,76% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp5,72 triliun.

Pembayaran Pajak Penghasilan Badan

Pembayaran pajak penghasilan badan tahun 2022 sebesar Rp4,61 triliun, naik 272,38% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp1,24 triliun.

Receipt of Fertilizers Subsidy from the Government of Indonesia

Fertilizer subsidy receipts from the Government of Indonesia in 2022 amounted to Rp26.59 trillion, an increase of 8.71% compared to 2021 of Rp24.46 trillion. This increase is mainly due to the receipt of payment of subsidy receivables for underpayments in 2021.

Receipt from Finance Income

Receipt of financial income in 2022 amounted to Rp269.12 billion, up 17.79% compared to 2021 of Rp228.47 billion.

Receipt from Tax Restitutions

Tax refund revenue in 2022 amounted to Rp363.32 billion, down 29.09% compared to Rp512.37 billion in 2021.

Payment of Excess Subsidy to the Government of Indonesia

Payment of excess subsidies to the Government of Indonesia in 2022 amounted to Rp95.63 billion, a decrease of 24.48% compared to 2021 of Rp126.63 billion.

Payment to Suppliers

Payments to suppliers in 2022 reached Rp61.97 trillion, an increase of 8.09% compared to 2021, which amounted to Rp57.33 trillion. This increase is mainly due to the high raw materials for making NPK fertilizer.

Payment of Interest and Bonds Payable Transaction Cost

Interest payments and transaction costs for bond debt in 2022 amounted to Rp2.29 trillion, up 13.51% compared to Rp2.02 trillion in 2021.

Payment to Employees

Payments to employees in 2022 reached Rp5.22 trillion, down 8.76% compared to Rp5.72 trillion in 2021.

Payment of corporate income tax

Corporate income tax payments in 2022 amounted to Rp4.61 trillion, up 272.38% compared to Rp1.24 trillion in 2021.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Cash Flow from Investing Activities

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI 2021-2022
Cash Flows from Investing Activities 2021-2022

Arus Kas dari Aktivitas Investasi	2022 (Rp juta | Rp million)	2021 (Rp juta | Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		Cash Flow from Investing Activities
			Nominal (Rp juta | Rp million)	Persentase Percentage (%)	
Penerimaan Dividen dari Entitas Asosiasi	6.860	8.397	(1.537)	(18,30)	Receipts of Dividend from Associates
Pembelian Aset Tetap	(4.439.792)	(2.999.502)	(1.440.290)	48,02	Purchase of Fixed Assets
Penambahan Kepemilikan pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	(35.057)	(25.160)	(9.897)	39,34	Additional Ownership in Associates and Joint Ventures
Penerimaan atas Penjualan Aset Tetap	84.764	8.564	76.200	889,77	Receipt from Sale of Fixed Assets
Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	**(4.383.225)**	**(3.007.701)**	**(1.375.524)**	**45,73**	**Net Cash Flows Used in Investing Activities**

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2022 mencapai Rp4,38 triliun, meningkat 45,73% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp3,01 triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pembelian aset tetap yang naik 48,02% atau setara dengan Rp1,44 triliun.

Net cash flows used for investing activities in 2022 reached Rp4.38 trillion, an increase of 45.73% compared to Rp3.01 trillion in 2021. This increase was mainly due to the purchase of fixed assets which increased by 48.02% or equivalent to Rp1.44 trillion.

Penerimaan Dividen dari Entitas Asosiasi

Penerimaan Dividen dari Entitas Asosiasi tahun 2022 sebesar Rp6,86 miliar, turun 18,31% atau setara dengan Rp1,54 miliar dibandingkan Penerimaan Dividen dari Entitas Asosiasi tahun 2021 sebesar Rp8,40 miliar.

Received of Dividend from Associates

Dividend Income from Associates in 2022 amounted to Rp6.86 billion, a decrease of 18.31% or equivalent to Rp1.54 billion compared to Dividend Income from Associates in 2021 of Rp8.40 billion.

Pembelian Aset Tetap

Pembelian Aset Tetap tahun 2022 sebesar Rp4,44 triliun, meningkat 48,02% atau setara dengan Rp1,44 triliun dibandingkan Pembelian Aset Tetap tahun 2021 sebesar Rp3,00 triliun.

Purchase of Fixed Assets

Purchase of Fixed Assets in 2022 amounted to Rp4.44 trillion, an increase of 48.02% or equivalent to Rp1.44 trillion compared to Purchase of Fixed Assets in 2021 of Rp3.00 trillion.

Penambahan Kepemilikan pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Penambahan Kepemilikan pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tahun 2022 sebesar Rp35,06 miliar, naik 39,34% atau setara dengan Rp89,90 miliar dibandingkan Penambahan Kepemilikan pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tahun 2021 sebesar Rp25,16 miliar.

Addition of Ownership in Associates and Joint Ventures

Additional Ownership in Associates and Joint Ventures in 2022 amounted to Rp35.06 billion, an increase of 39.34% or equivalent to Rp89.90 billion compared to Additional Ownership in Associates and Joint Ventures in 2021 of Rp25.16 billion.

Penerimaan Atas Penjualan Aset Tetap

Hasil Penjualan Aset Tetap tahun 2022 sebesar Rp84,76 miliar, naik 889,77% atau setara dengan Rp76,20 miliar dibandingkan Hasil Penjualan Aset Tetap tahun 2021 sebesar Rp8,56 miliar.

Receipt on Sale of Fixed Assets

Proceeds from Sales of Fixed Assets in 2022 amounted to Rp84.76 billion, an increase of 889.77% or equivalent to Rp76.20 billion compared to Proceeds from Sales of Fixed Assets in 2021 of Rp8.56 billion.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Cash Flow from Financing Activities

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN 2021-2022
Cash Flow from Financing Activities 2021-2022

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	2022 (Rp juta | Rp million)	2021 (Rp juta | Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		Cash Flow from Financing Activities
			Nominal (Rp juta | Rp million)	Persentase Percentage (%)	
Penerimaan Pinjaman Bank Jangka Pendek	5.368.369	14.684.012	-9.315.643	-63,44	Proceeds from Short-term Bank Loans
Pembayaran Pinjaman Bank Jangka Pendek	(8.534.976)	(15.952.372)	7.417.396	-46,50	Repayment of Short-term Bank Loans
Penerimaan Pinjaman Jangka Panjang	5.766.416	2.680.676	3.085.740	115,11	Proceeds from Non-current Borrowings
Pembayaran Pinjaman Jangka Panjang	(3.378.589)	(9.801.879)	6.423.290	-65,53	Repayments of Non-current Borrowings
Penerimaan Utang Salam	2.659.119	-	2.659.119		
Pembayaran Utang Salam	(1.472.414)	-	(1.472.414)		
Pembayaran Dividen kepada Entitas Non-Pengendali	(21.044)	(16.078)	(4.966)	30,89	Payment of Dividends to Non-controlling Interest
Penerimaan dari Penerbitan Obligasi	-	2.750.000	(2.750.000)	-100,00	Proceeds from Bonds Issuance
Pembayaran Utang Obligasi	(1.774.000)	-			Repayments of Bonds Payable
Pembayaran Liabilitas Sewa	(248.542)	(213.532)	(35.010)	16,40	Repayments of Lease Liabilities
Pembayaran Dividen Kas	(750.000)	(588.030)	(161.970)	27,54	Payment of Cash Dividend
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	**(2.385.661)**	**(6.457.203)**	**4.071.542**	**-63,05**	**Net Cash Flows Used in Financing Activities**

Arus Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Pendanaan tahun 2022 sebesar Rp2,39 triliun, turun 63,05% atau setara dengan Rp4,07 triliun dibandingkan Arus Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Pendanaan tahun 2021 sebesar Rp6,46 triliun.

Net Cash Flow used in Financing Activities in 2022 amounted to Rp2.39 trillion, a decrease of 63.05% or equivalent to Rp4.07 trillion compared to Net Cash Flow used in Financing Activities in 2021 of Rp6.46 trillion.

Penerimaan Pinjaman Bank Jangka Pendek

Penerimaan Pinjaman Bank Jangka Pendek tahun 2022 sebesar Rp5,37 triliun, turun 63,44% atau setara dengan Rp9,32 triliun dibandingkan Penerimaan Pinjaman Bank Jangka Pendek tahun 2021 sebesar Rp14,68 triliun

Proceeds from Short-term Bank Loans

Receipt of Short-Term Bank Loans in 2022 amounted to Rp5.37 trillion, a decrease of 63.44% or equivalent to Rp9.32 trillion compared to Receipt of Short-Term Bank Loans in 2021 of Rp14.68 trillion.

Pembayaran Pinjaman Bank Jangka Pendek

Pembayaran Pinjaman Bank Jangka Pendek tahun 2022 sebesar Rp8,53 triliun, turun 46,50% atau setara dengan Rp7,42 triliun dibandingkan Pembayaran Pinjaman Bank Jangka Pendek tahun 2021 sebesar Rp15,95 triliun.

Repayment of Short-term Bank Loans

Payment of Short-Term Bank Loans in 2022 amounted to Rp8.53 trillion, a decrease of 46.50% or equivalent to Rp7.42 trillion compared to Payment of Short-Term Bank Loans in 2021 of Rp15.95 trillion.

Penerimaan Pinjaman Jangka Panjang

Penerimaan Pinjaman Jangka Panjang tahun 2022 sebesar Rp5,77 triliun, naik 115,11% atau setara dengan Rp3,09 triliun dibandingkan Penerimaan Pinjaman Jangka Panjang tahun 2021 sebesar Rp2,68 triliun.

Pembayaran Pinjaman Jangka Panjang

Pembayaran Pinjaman Jangka Panjang tahun 2022 sebesar Rp3,38 miliar, turun 65,53% atau setara dengan Rp6,42 triliun dibandingkan Pembayaran Pinjaman Jangka Panjang tahun 2021 sebesar Rp9,80 triliun.

Pembayaran Dividen kepada Entitas Non-Pengendali

Pembayaran Dividen Kepada Entitas Non-Pengendali tahun 2022 sebesar Rp21,04 miliar, meningkat 30,89% atau setara dengan Rp4,97 miliar dibandingkan Pembayaran Dividen Kepada Entitas Non-Pengendali tahun 2021 sebesar Rp16,08 miliar.

Penerimaan dari Penerbitan Obligasi

Tidak terdapat penerimaan dari penerbitan obligasi tahun 2022, namun pada tahun 2021 terdapat penerimaan dari penerbitan obligasi sebesar Rp2,75 triliun.

Pembayaran Utang Obligasi

Pembayaran Utang Obligasi tahun 2022 sebesar Rp1,77 triliun, namun pada tahun 2021 tidak terdapat pembayaran utang obligasi.

Pembayaran Liabilitas Sewa

Pembayaran Liabilitas Sewa tahun 2022 sebesar Rp248,54 miliar, meningkat 16,40% atau setara dengan Rp35,01 miliar dibandingkan Pembayaran Liabilitas Sewa tahun 2021 sebesar Rp213,53 miliar.

Pembayaran Dividen Kas

Pembayaran Dividen Kas tahun 2022 sebesar Rp750 miliar, naik 27,54% atau setara dengan Rp161,97 miliar dibandingkan Pembayaran Dividen Kas tahun 2021 sebesar Rp588,03 miliar.

Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas

Dengan akumulasi pada Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Arus Kas dari Aktivitas Investasi, serta Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan seperti yang telah diuraikan di atas, Kas dan Setara Kas di sepanjang tahun 2022 mengalami kenaikan 202,06% atau sebesar Rp10,21 triliun. Dengan memperhitungkan Efek Perubahan Nilai Kurs pada Kas dan Setara Kas sebesar Rp746,03 miliar, Kas dan Setara Kas di akhir tahun 2022 sebesar Rp33,46 triliun.

Proceeds from Non-current Borrowings

Revenue from Long-Term Loans in 2022 amounted to Rp5.77 trillion, an increase of 115.11% or equivalent to Rp3.09 trillion compared to Revenue from Long-Term Loans in 2021 of Rp2.68 trillion.

Repayments of Non-current Borrowings

Long-Term Loan Payments in 2022 amounted to Rp3.38 billion, a decrease of 65.53% or equivalent to Rp6.42 trillion compared to Long-Term Loan Payments in 2021 of Rp9.80 trillion.

Payment of Dividends to Non-controlling Interest

Dividend Payment to Non-Controlling Entities in 2022 amounted to Rp21.04 billion, an increase of 30.89% or equivalent to Rp4.97 billion compared to Dividend Payment to Non-Controlling Entities in 2021 of Rp16.08 billion.

Proceeds from Bonds Issuance

There is no revenue from bond issuance in 2022, but in 2021 there is revenue from bond issuance amounting to Rp2.75 trillion.

Bond Debt Payment

Bond Debt Payment in 2022 amounted to Rp1.77 trillion, but in 2021 there were no bond debt payments.

Repayments of Lease Liabilities

Rental Liability Payment in 2022 amounted to Rp248.54 billion, an increase of 16.40% or equivalent to Rp35.01 billion compared to Rental Liability Payment in 2021 of Rp213.53 billion.

Payment of Cash Dividend

The 2022 Cash Dividend Payment amounted to Rp750 billion, an increase of 27.54% or equivalent to Rp161.97 billion compared to the 2021 Cash Dividend Payment of Rp588.03 billion.

Net Increase in Cash and Cash Equivalents

With the accumulation of Cash Flow from Operating Activities, Cash Flow from Investing Activities, and Cash Flow from Financing Activities as described above, Cash and Cash Equivalents throughout 2022 increased by 202.06% or Rp10.21 trillion. By taking into account the Effects of Changes in Exchange Rates on Cash and Cash Equivalents of Rp746.03 billion, Cash and Cash Equivalents at the end of 2022 amounted to Rp33.46 trillion.

Perkembangan Kas dan Setara Kas Perusahaan dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

The development of the Company's Cash and Cash Equivalents can be seen in the chart below.

PERKEMBANGAN KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN
Development of Cash and Cash Equivalents End of Year 2018-2022

Rp juta | Rp million

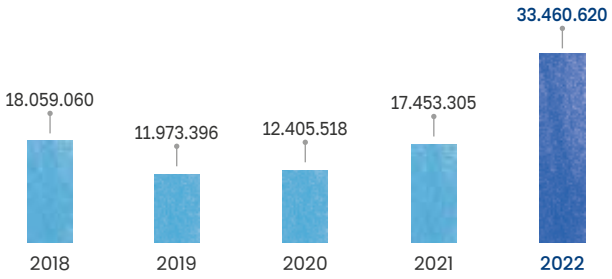

KEMAMPUAN PERUSAHAAN MENGHASILKAN LABA

Kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan laba dapat diukur dengan menggunakan rasio proftabilitas yaitu melalui rasio Marjin Laba Bruto atau *Gross Proft Margin* (GPM), Marjin Laba Usaha atau *Operating Profit Margin* (OPM), Marjin Laba Bersih atau *Net Proft Margin* (NPM), Tingkat Imbalan Kepada Pemegang Saham atau *Return on Equity* (ROE), dan Tingkat Imbalan Investasi atau *Return on Investment* (ROI).

THE COMPANY'S ABILITY TO GENERATE PROFIT

The company's ability to generate profits can be measured using profitability ratios, namely through the Gross Profit Margin (GPM), Operating Profit Margin (OPM), Net Profit Margin (NPM), Rate of Return to Shareholders or Return on Equity (ROE), and Rate of Return on Investment (ROI).

Marjin Laba Bruto

GPM digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih.

Gross Profit Margin

GPM is used to measure the percentage of gross profit on net sales.

Perihal	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		Subject
			Nominal	Persentase Percentage (%)	
Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya (Rp Juta)	103.859.493	78.603.136	25.256.357	32,13	Sales and Other Business Income (Rp Million)
Laba Bruto (Rp Juta)	33.571.321	15.133.347	18.437.974	121,84	Gross Profit (Rp Million)
Marjin Laba Bruto (%)	32,32	19,25	13,07	67,90	Gross Profit Margin (%)

Pada tahun 2022 GPM Perusahaan mencapai 32,32%, meningkat 13,07% dibandingkan tahun 2021 sebesar 19,25%. Kenaikan tersebut disebabkan perusahaan mampu mengoptimalkan penjualan urea komersil dan amoniak yang didukung harga jual yang tinggi.

In 2022 the Company's GPM reached 32.32%, an increase of 13.07% compared to 2021 of 19.25%. The increase was due to the company being able to optimize sales of commercial urea and ammonia supported by high selling prices.

Marjin Laba Usaha

OPM digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan untuk mengendalikan biaya operasional dalam hubungannya dengan penjualan.

Operating Profit Margin

OPM is used to measure the Company's ability to control operating costs in relation to sales.

Perihal	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		Subject
			Nominal	Persentase Percentage (%)	
Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya (Rp Juta)	103.859.493	78.603.136	25.256.357	32,13	Sales and Other Business Income (Rp Million)
Laba Operasi (Rp Juta)	27.124.506	9.979.898	17.144.608	171,79	Operating Profit (Rp Million)
Marjin Laba Operasi (%)	26,12	12,70	13,42	105,67	Operating Profit Margin (%)

Pada tahun 2022, nilai OPM Perusahaan mencapai 26,12%, terdapat kenaikan 13,42% dibandingkan tahun 2021 sebesar 12,70%.

In 2022, the Company's OPM value reached 26.12%, an increase of 13.42% compared to 2021 of 12.70%.

Marjin Laba Bersih

NPM digunakan untuk mengukur besaran keuntungan bersih yang diperoleh Perusahaan dari hasil penjualan.

Net Profit Margin

NPM is used to measure the amount of net profit earned by the Company from sales.

Perihal	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		Subject
			Nominal	Persentase Percentage (%)	
Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya (Rp Juta)	103.859.493	78.603.136	25.256.357	32,13	Sales and Other Business Income (Rp Million)
Laba Tahun Berjalan (Rp Juta)	18.510.592	5.134.675	13.375.917	260,50	Profit for the Year (Rp Million)
Marjin Laba Bersih (%)	17,82	6,53	11,29	172,89	Net Profit Margin (%)

Pada tahun 2022, rasio NPM mencapai 17,82%, meningkat 11,29% dibandingkan tahun 2021 sebesar 6,53%. Kenaikan tersebut disebabkan perusahaan mampu mengoptimalkan penjualan sektor komersil di dukung dengan harga jual yang tinggi serta perusahaan mampu menekan biaya keuangan.

In 2022, the NPM ratio reached 17.82%, an increase of 11.29% compared to 2021 of 6.53%. The increase was due to the company being able to optimize commercial sector sales supported by high selling prices and the company being able to reduce financial costs.

Tingkat Imbalan Aset

ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam mengoptimalkan profitabilitas beradasarkan aset yang dimilikinya.

Asset Reward Rate

ROA is a ratio used to measure the company's ability to optimize profitability based on its assets.

Perihal	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		Subject
			Nominal	Persentase Percentage (%)	
Total Aset (Rp juta)	158.720.507	128.463.172	30.257.335	23,55	Total Assets (Rp million)
Laba Tahun Berjalan (Rp juta)	18.510.592	5.134.675	13.375.917	260,50	Profit for the Year (Rp million)
Tingkat Imbalan Aset (%)	11,66	4,00	7,66	191,50	Asset Return Rate (%)

Pada tahun 2022, nilai ROA Perusahaan mencapai 11,66%, meningkat 7,67% dibandingkan tahun 2021 sebesar 4,00%. Kenaikan ini terutama disebabkan meningkatnya laba tahun berjalan sebesar 260,50%.

In 2022, the Company's ROA value reached 11.66%, an increase of 7.67% compared to 2021 of 4.00%. This increase was mainly due to the increase in profit for the year by 260.50%.

Tingkat Imbalan kepada Pemegang Saham atau *Return on Equity* (ROE)

ROE merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur penghasilan yang tersedia bagi pemilik Perusahaan atas modal yang diinvestasikan di dalam Perusahaan.

Rate of Return to Shareholders or Return on Equity (ROE)

ROE is a ratio used to measure the income available to the owners of the Company on the capital invested in the Company.

RUMUS ROE
ROE Formula

Perihal	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		Subject
			Nominal	Persentase Percentage (%)	
Laba Tahun Berjalan (Rp juta)	18.510.592	5.134.675	13.375.917	260,50	Profit for the Year (Rp million)
Modal Sendiri (Rp juta)	68.025.615	64.596.489	3.429.126	5,31	Own Capital (Rp million)
Tingkat Imbalan Kepada Pemegang Saham (%)	27,21	7,95	19,26	342,26	Rate of Return to Shareholders (%)

Pada tahun 2022, nilai ROE Perusahaan mencapai 27,21%, meningkat 19,26% dibandingkan tahun 2021 sebesar 7,95%. Kenaikan ini terutama disebabkan karena meningkatnya laba tahun berjalan sebesar 260,50%.

In 2022, the Company's ROE value reached 27.21%, an increase of 19.26% compared to 2021 of 7.95%. This increase was mainly due to the increase in profit for the year by 260.50%.

Tingkat Imbalan Investasi atau *Return on Investment* (ROI)

ROI merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan pada aset yang digunakan untuk operasi Perusahaan dalam rangka menghasilkan keuntungan.

Rate of Return on Investment (ROI)

ROI is a ratio used to measure the Company's ability with all funds invested in assets used for the Company's operations in order to generate profits.

RUMUS ROI
ROI Formula

Perihal	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		Subject
			Nominal	Persentase Percentage (%)	
EBITDA (Rp Juta)	31.677.994	14.900.374	16.777.620	112,60	EBITDA (Rp Million)
Capital Employed (Rp Juta)	154.149.850	126.280.060	27.869.790	22,07	Capital Employed (Rp Million)
Tingkat Imbalan Investasi (%)	20,55	11,80	8,75	174,15	Investment Return Rate (%)

Pada tahun 2022, nilai ROI Perusahaan mencapai 20,55%, meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 11,80%. Kenaikan disebabkan EBITDA yang meningkat sebesar 112,60% dari tahun 2021.

In 2022, the Company's ROI value reached 20.55%, an increase compared to 2021 of 11.80%. The increase was due to EBITDA which increased by 112.60% from 2021.

GROSS PROFIT MARGIN (GPM)
Gross Profit MarGin

dalam % | in %

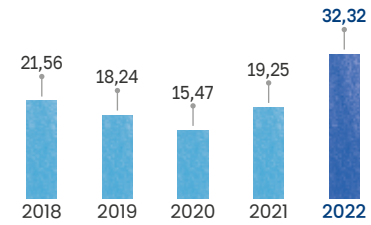

OPERATING PROFIT MARGIN (OPM)
Operating Profit Margin

dalam % | in %

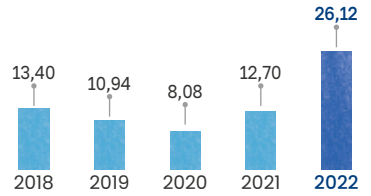

NET PROFIT MARGIN (NPM)
Net Profit margin

dalam % | in %

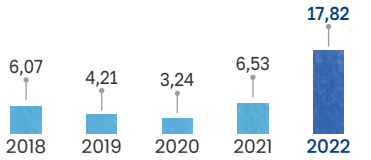

RETURN ON ASSET (ROA)
Return on Asset

dalam % | in %

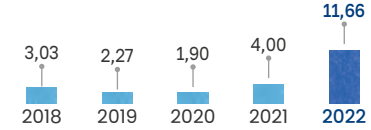

RETURN ON EQUITY (ROE)
Return on Equity

dalam % | in %

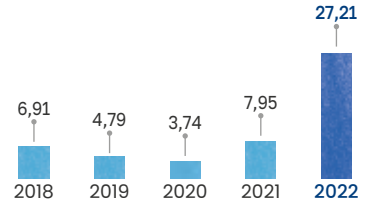

RETURN ON INVESTMENT (ROI)
Return on Investment

dalam % | in %

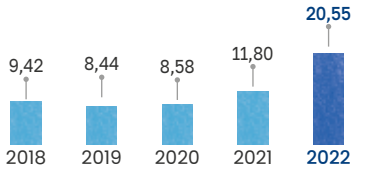

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dapat diukur dengan menggunakan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek; semakin tinggi rasio likuiditas mengindikasikan bahwa Perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek yang akan jatuh tempo.

ABILITY TO REPAY DEBT

The Company's ability to meet its obligations can be measured using liquidity ratios and solvency ratios. The liquidity ratio is a ratio to measure the Company's ability to pay short-term obligations; the higher the liquidity ratio indicates that the Company is able to meet short-term obligations that will mature.

Sedangkan rasio solvabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan Perusahaan membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk rasio solvabilitas, khususnya rasio utang (*interest bearing & leverage*) terhadap modal sendiri, semakin rendah menunjukkan adanya perbaikan kemampuan Perusahaan untuk melunasi kewajibannya.

While the solvency ratio is a ratio that measures the Company's ability to pay all of its obligations both short and long term. For solvency ratios, especially the ratio of debt (interest bearing & leverage) to equity, the lower it is, the better the Company's ability to pay off its obligations.

Rasio Likuiditas: Mengukur Kemampuan Membayar Kewajiban Jangka Pendek

Liquidity Ratio: Measuring the Ability to Pay Short-Term Obligations

Rasio Kas = Kas dan Setara Kas / Liabilitas Jangka Pendek	Rasio Cepat = (Aset Lancar — Persediaan) / Liabilitas Jangka Pendek	Rasio Lancar = Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek
Cash Ratio = Cash and Cash Equivalents / Short-Term Liabilities	Quick Ratio = (Current Assets — Inventories) / Short Term Liabilities	Current Ratio = Current Assets / Current Liabilities

RASIO LIKUIDITAS: KEMAMPUAN PERUSAHAAN MEMBAYAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Liquidity Ratio: The Company's Ability to Pay Short-Term Obligations

Perihal	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		Subject
			Nominal	Persentase Percentage (%)	
Kas dan Setara Kas (Rp juta)	33.460.620	17.453.305	16.007.315	91,72	Cash and Cash Equivalents (Rp million)
Persediaan (Rp juta)	20.567.169	13.910.126	6.657.043	47,86	Inventory (Rp million)
Aset Lancar (Rp juta)	77.975.094	44.174.212	33.800.882	76,52	Current Assets (Rp million)
Liabilitas Jangka Pendek (Rp juta)	42.749.997	33.008.039	9.741.958	29,51	Short-term Liabilities (Rp million)
Rasio Likuiditas:					Liquidity Ratio:
Rasio Lancar (%)	182,40	133,83	48,57	136,29	Current Ratio (%)
Rasio Cepat (%)	134,29	91,69	42,60	146,46	Quick Ratio (%)
Rasio Kas (%)	78,27	52,88	25,39	148,01	Cash Ratio (%)

RASIO LANCAR
Current Ratio

dalam % | in %

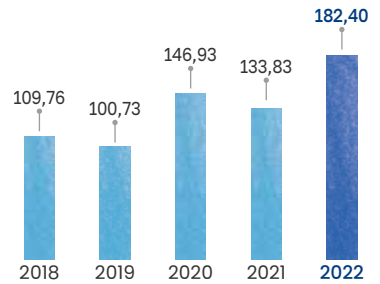

RASIO CEPAT
Quick Ratio

dalam % | in %

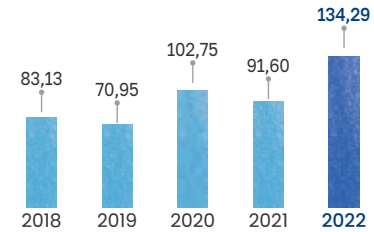

RASIO KAS
Cash Ratio

dalam % | in %

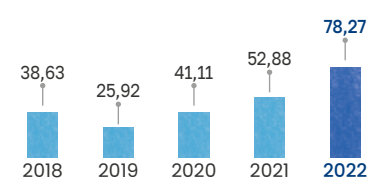

Rasio Solvabilitas: Mengukur Kemampuan Membayar Kewajiban Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Solvabilitas merupakan ukuran kemampuan dalam membayar seluruh utang atau beban keuangan yang dimiliki Perusahaan, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Perusahaan mengukur rasio solvabilitas melalui perhitungan tingkat rasio utang (*Leverage and Interest Bearing*) terhadap modal sendiri, *Debt Service to Coverage Ratio* (DSCR), dan *Interest Coverage Ratio* (ICR).

Solvency Ratio: Measuring the Ability to Pay Short-Term and Long-Term Obligations

Solvency is a measure of the ability to pay all debts or financial expenses owned by the Company, both short-term and long-term liabilities. The company measures the solvency ratio through the calculation of the ratio of debt (Leverage and Interest Bearing) to equity, Debt Service to Coverage Ratio (DSCR), and Interest Coverage Ratio (ICR).

Debt to Equity Ratio (DER) = Total Liabilitas / Total Ekuitas	*Interest Bearing Debt* = Total Pinjaman Berbunga / Total Ekuitas	*Debt Service to Coverage Ratio* (DSCR) = EBITDA / (Bagian Lancar atas Pinjaman Jangka Panjang tahun sebelumnya + Beban Keuangan)	*Interest Coverage Ratio* (ICR) = EBITDA / Beban Keuangan
Debt to Equity Ratio (DER) = Total Liabilities / Total Equity	Interest Bearing Debt = Total Interest Bearing Debt / Total Equity	Debt Service to Coverage Ratio (DSCR) = EBITDA / (Current Portion of Previous Year's Long Term Loan + Financial Expenses)	Interest Coverage Ratio (ICR) = EBITDA / Finance Charges

RASIO SOLVABILITAS: KEMAMPUAN PERUSAHAAN MEMBAYAR SELURUH KEWAJIBAN
Solvency Ratio: The Company's Ability to Pay All Obligations

Perihal	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		Subject
			Nominal	Persentase Percentage (%)	
Rasio Solvabilitas					Solvency Ratio
Leverage (%)	74,11	78,57	(4,46)	94,32	Leverage (%)
Interest Bearing Debt (%)	34,16	43,53	(9,37)	78,47	Interest Bearing Debt (%)
Interest Bearing Debt to EBITDA (Kali)	1,01	2,20	(1,20)	45,90	Interest Bearing Debt to EBITDA (Times)
Debt Service to Coverage Ratio (DSCR) (%)	482,67	278,12	204,55	173,54	Debt Service to Coverage Ratio (DSCR) (%)
Interest Coverage Ratio (ICR) (%)	1372,22	692,53	679,69	198,14	Interest Coverage Ratio (ICR) (%)

LEVERAGE
Leverage
dalam % | in %

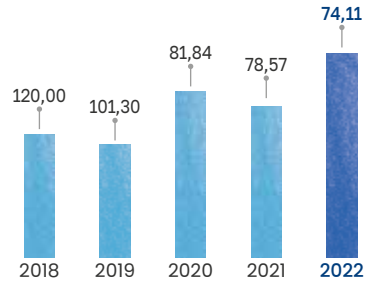

INTEREST BEARING DEBT
Interest Bearing Debt
dalam % | in %

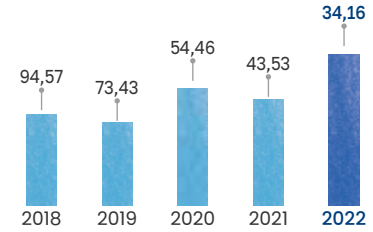

INTEREST COVERAGE RATIO (ICR)
Interest Coverage Ratio (ICR)
dalam % | in %

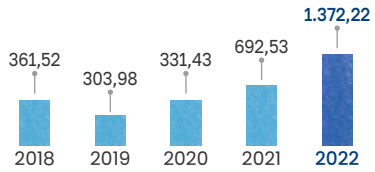

INTEREST BEARING DEBT TO EBITDA
Interest Bearing Debt to EBITDA
dalam % | in %

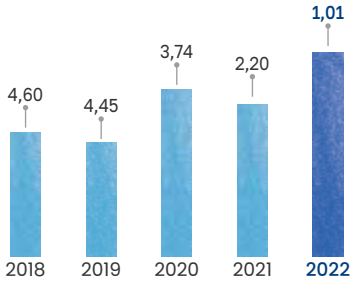

DEBT SERVICE TO COVERAGE RATIO (DSCR)
Debt Service to Coverage Ratio (DSCR)
dalam % | in %

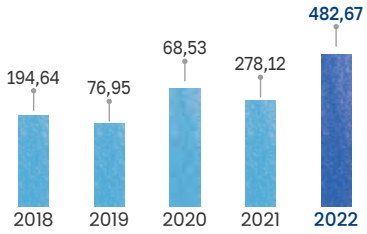

KEMAMPUAN MEMBAYAR EFEK YANG DITERBITKAN

Berdasarkan peringkat utang yang diterbitkan oleh Fitch Ratings Indonesia pada tahun 2022, seluruh surat utang perusahaan mendapatkan rating AAA idn (*Outlook: Stable*), hal ini mencerminkan tidak ada masalah atas kemampuan perusahaan dalam membayar kembali atas efek-efek yang diterbitkan.

ABILITY TO PAY FOR SECURITIES ISSUED

Based on the debt rating issued by Fitch Ratings Indonesia in 2022, all of the company's debt securities received a rating of AAA idn (Outlook: Stable), this reflects no problems with the company's ability to repay the securities issued.

PERKEMBANGAN PERINGKAT EFEK
Securities Rating Development

Jenis Surat Utang	Types of Notes	2022	2021	Perubahan Changes
Obligasi Berkelanjutan II PT Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 - Seri A	Sustainable Bonds II PT Pupuk Indonesia Phase II Year 2021 - Series A	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	–
Obligasi Berkelanjutan II PT Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 - Seri B	Sustainable Bonds II PT Pupuk Indonesia Phase II Year 2021 - Series B	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	–
Obligasi Berkelanjutan II PT Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 - Seri C	Sustainable Bonds II PT Pupuk Indonesia Phase II Year 2021 - Series C	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	–
Obligasi Berkelanjutan I PT Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2017 Seri A (PIHC01ACN1)	PT Pupuk Indonesia Sustainable Bonds I Phase I Year 2017 Series A (PIHC01ACN1)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	–

Jenis Surat Utang	Types of Notes	2022	2021	Perubahan Changes
Obligasi Berkelanjutan I PT Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2017 Seri B (PIHC01BCN1)	PT Pupuk Indonesia Sustainable Bonds I Phase I Year 2017 Series B (PIHC01BCN1)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	–
Obligasi Berkelanjutan I PT Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2017 Seri A (PIHC01ACN2)	Shelf Registration Bonds I PT Pupuk Indonesia Phase II Year 2017 Series A (PIHC01ACN2)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	–
Obligasi Berkelanjutan I PT Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2017 Seri B (PIHC01BCN2)	Sustainable Bonds I PT Pupuk Indonesia Phase II Year 2017 Series B (PIHC01BCN2)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	–
Obligasi Berkelanjutan II PT Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2020 Seri A (PIHC02ACN1)	Sustainable Bonds II PT Pupuk Indonesia Phase I Year 2020 Series A (PIHC02ACN1)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	–
Obligasi Berkelanjutan II PT Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2020 Seri B (PIHC02BCN1)	Sustainable Bonds II PT Pupuk Indonesia Phase I Year 2020 Series B (PIHC02BCN1)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	–
Obligasi Berkelanjutan II PT Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2020 Seri C (PIHC02CCN1)	Sustainable Bonds II PT Pupuk Indonesia Phase I Year 2020 Series C (PIHC02CCN1)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	Fitch: AAA idn (Outlook: Stable)	–

Peringkat nasional AAA idn menunjukan peringkat tertinggi yang diberikan Fitch Ratings pada skala peringkat nasional untuk Indonesia. Peringkat ini diberikan kepada emiten atau surat utang dengan ekspektasi risiko gagal bayar yang terendah relatif terhadap emiten atau surat utang lainnya di Indonesia.

The national rating of AAA idn represents the highest rating assigned by Fitch Ratings on the national rating scale for Indonesia. This rating is assigned to issuers or debt securities with the lowest expected default risk relative to other issuers or debt securities in Indonesia.

TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Kemampuan perusahaan untuk menagih piutang-piutang yang dimiliki tercermin pada tingkat kolektibiltas piutang atau *Collection Period*. Nilai *Collection Period* yang semakin kecil maka semakin baik, artinya kemampuan Perusahaan dalam menagih piutang-piutangnya semakin cepat.

COLLECTABILITY OF RECEIVABLES

The company's ability to collect its receivables is reflected in the level of collectibility of receivables or Collection Period. The smaller the Collection Period value, the better, meaning that the Company's ability to collect its receivables is getting faster.

RASIO TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG
Accounts Receivable Collectability Ratio

Perihal	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		Subject
			Nominal	Persentase Percentage (%)	
Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya tidak termasuk Penggantian Biaya dari Pemerintah Indonesia (Rp juta)	67.750.426	53.344.444	14.405.982	27,01	Sales and Other Operating Income excluding Reimbursement from Government of Indonesia (Rp million)
Piutang Usaha (Rp juta)	2.693.522	3.324.666	(631.144)	(18,98)	Accounts Receivable (Rp million)
Rata-rata Hari Pelunasan Piutang (*Collection Period*) (hari)	14,51	22,75	(8,24)	63,78	Average Days to Settle Receivables (Collection Period) (days)

Perusahaan memiliki kebijakan batasan kredit bagi debitur sesuai dengan kemampuan masing-masing pelanggan. Kemampuan tersebut dievaluasi secara periodik untuk menentukan kualitas kredit yang diperkirakan mampu dipenuhi oleh debitur, sehingga Perusahaan terhindar dari risiko gagal bayar debitur.

The Company has a credit limit policy for debtors in accordance with the ability of each customer. The ability is evaluated periodically to determine the credit quality that is expected to be fulfilled by the debtor, so that the Company avoids the risk of debtor default.

Collection Period tahun 2022 sebesar 14,51 hari, mengalami perbaikan dibandingkan dengan *Collection Period* tahun 2021 sebesar 22,75 hari. Hal ini menunjukkan meningkatnya kemampuan Perusahaan untuk memperoleh kas dari hasil penagihan piutang kepada pelanggan.

Collection Period in 2022 amounted to 14.51 days, an improvement compared to Collection Period in 2021 of 22.75 days. This shows the increasing ability of the Company to obtain cash from the collection of receivables to customers.

PERKEMBANGAN *COLLECTION PERIOD* TAHUN 2018-2022
Collection Period Development 2018-2022

hari | day

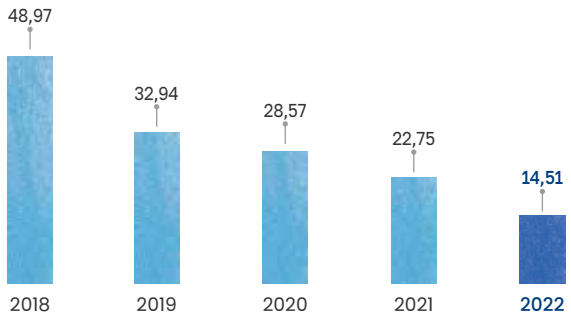

Piutang Usaha tahun 2022 sebesar Rp2,69 triliun, turun 18,98% atau setara dengan Rp631,14 miliar dibandingkan Piutang Usaha tahun 2021 sebesar Rp3,32 triliun. Berikut disampaikan rincian umur piutang usaha Perusahaan yang mencerminkan piutang jangka pendek, menengah dan piutang jangka panjang.

Accounts Receivable in 2022 amounted to Rp2.69 trillion, a decrease of 18.98% or equivalent to Rp631.14 billion compared to Accounts Receivable in 2021 of Rp3.32 trillion. The following is a breakdown of the age of the Company's accounts receivable which reflects short-term, medium-term and long-term receivables.

UMUR PIUTANG USAHA
Age of Accounts Receivable

Umur Piutang Usaha	2022 (Rp juta | Rp million)	2021 (Rp juta | Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		Age of Accounts Receivable
			Nominal (Rp juta | Rp million)	Persentase Percentage (%)	
Lancar	2.018.809	2.533.230	(514.421)	(20,31)	Current
Jatuh Tempo:					Maturity
1–90 Hari	560.561	500.675	59.886	11,96	1–90 Days
91–120 Hari	70.440	51.676	18.764	36,31	91–120 Days
121–365 Hari	66.616	186.495	(119.879)	(64,28)	121–365 Days
> 365 Hari	690.210	750.970	(60.760)	(8,09)	> 365 Days
Sub Jumlah	3.406.636	4.023.046	(616.410)	(15,32)	Sub Amount
Cadangan Penurunan Nilai	(713.114)	(698.380)	(14.734)	2,11	Impairment Provision
Jumlah Piutang Usaha-Bersih	2.693.522	3.324.666	(631.144)	(18,98)	Total Accounts Receivable-Net

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai piutang secara individual dilakukan untuk pelanggan yang telah mengalami kesulitan pembayaran sesuai dengan periode yang telah ditentukan dan pelanggan yang umumnya memiliki peringkat kredit.

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai piutang secara kolektif dilakukan untuk pelanggan yang secara nilai tidak signifikan dan ada kemungkinan gagal bayar. Perhitungan ini mempertimbangkan tren pembayaran piutang yang dilakukan oleh konsumen, informasi yang relevan tentang kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi.

Berdasarkan hasil penelaahan atas piutang masing-masing dan kolektif pelanggan pada akhir tahun, manajemen Grup berkeyakinan bahwa nilai provisi atas penurunan nilai telah memadai untuk menutup potensi kerugian atas piutang usaha tidak tertagih.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Kebijakan Struktur Modal

Kebijakan pengelolaan struktur modal PI Grup mempertimbangkan rencana bisnis jangka panjang dengan memaksimalkan pinjaman jangka panjang dari kreditur dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha serta ekspansi Perusahaan. Sedangkan untuk kebutuhan modal kerja, Perusahaan menggunakan pinjaman jangka pendek dari kreditur secara proporsional serta memaksimalkan penerbitan obligasi untuk restrukturisasi pinjaman. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga komposisi *debt to equity ratio* agar tidak melampaui syarat/*covenant* yang ditetapkan oleh kreditur. Kebijakan Perusahaan di bidang struktur modal ini diharapkan mampu menjaga kondisi keuangan yang sehat sehingga dapat mendanai kebutuhan permodalan jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk dalam hal pembayaran kembali pinjaman-pinjamannya.

Rincian Struktur Modal

Pada tahun 2022, Perusahaan dan entitas anak masih menjalankan strategi mempertahankan rasio total liabilitas terhadap ekuitas (*Leverage and Debt*/EBITDA) masing-masing maksimum 3 kali dan 4 kali. Untuk realisasi total *Leverage* dan *Debt*/EBITDA per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar 0,74 kali (*Leverage*) dan 1,01 kali (*Debt*/EBITDA).

The calculation of allowance for impairment losses on individual receivables is carried out for customers who have experienced payment difficulties in accordance with the predetermined period and customers who generally have a credit rating.

Collective calculation of allowance for impairment losses on receivables is performed for customers that are insignificant in value and are likely to default. This calculation considers the trend of receivable payments made by customers, relevant information about past events, current conditions and estimates of economic conditions.

Based on the review of individual and collective receivables at the end of the year, the Group's management believes that the amount of provision for impairment is adequate to cover potential losses on uncollectible trade receivables.

CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT'S POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

Capital Structure Policy

PI Group's capital structure management policy considers long-term business plans by maximizing long-term loans from creditors in order to maintain business continuity and expansion of the Company. As for working capital needs, the Company uses short-term loans from creditors proportionally and maximizes bond issuance for loan restructuring. This policy is intended to maintain the composition of the debt to equity ratio so as not to exceed the terms/covenants set by creditors. The Company's policy in the field of capital structure is expected to be able to maintain a healthy financial condition so that it can fund short-term and long-term capital needs, including in terms of repayment of its loans.

Capital Structure Details

In 2022, the Company and its subsidiaries still carry out the strategy of maintaining the ratio of total liabilities to equity (Leverage and Debt/EBITDA) at a maximum of 3 times and 4 times, respectively. The realization of total Leverage and Debt/EBITDA as of December 31, 2022 was 0.74 times (Leverage) and 1.01 times (Debt/EBITDA), respectively.

RASIO STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN DAN PERUBAHANNYA
The Company's Capital Structure Ratio and its Changes

Perihal	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	Subject
Leverage (kali)	0,74	0,79	(0,05)	Leverage (times)
Debt/EBITDA (kali)	1,01	2,26	(1,25)	Debt/EBITDA (times)

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Ikatan material investasi barang modal bertujuan untuk menjamin terealisasinya proyek-proyek pengembangan dan peningkatan kapasitas produksi guna menunjang penguatan bisnis Perusahaan di masa mendatang.

Pada tahun 2022, Perusahaan memiliki ikatan yang material untuk investasi barang modal yang bukan dalam bentuk pendanaan dengan uraian sebagai berikut:

MATERIAL TIES FOR INVESTMENT IN CAPITAL GOODS

Material bonds for investment in capital goods aim to ensure the realization of development projects and increase production capacity to support the strengthening of the Company's business in the future.

As of 2022, the Company has material commitments for investment in capital goods that are not in the form of funding with the following description:

REALISASI IKATAN MATERIAL INVESTASI BARANG MODAL
Capital Goods Investment Material Bond Realization

Jenis Perikatan/Nama Proyek Type of Engagement/ Project Name	Pihak yang Melakukan Perikatan (Kontraktor/ Vendor) Contracting Party (Contractor/Vendor)	Nilai Investasi (Rp Juta) Investment Value (Rp Million)	Mata Uang Currency	Sumber Dana Funding Source	Upaya Melindungi Risiko Mata Uang Asing Efforts to Hedge Foreign Currency Risk
Pembangunan Pabrik NPK *Chemical* PIM Kapasitas 500.000 ton per Tahun Construction of PIM Chemical NPK Plant with a Capacity of 500,000 Tons per Year	PT Pembangunan Perumahan (Persero)	1.473.000	Rupiah	Rp1.199.000 Juta (Pinjaman) Rp274.000 Juta (Modal Sendiri) Rp1,199,000 Million (Loan) Rp274,000 Million (Own Capital)	Tidak diperlukan upaya lindung nilai No hedging required
Pembangunan Pabrik Phonska V Kapasitas 600.000 ton per Tahun Construction of Phonska V Plant with Capacity of 600,000 Tons per Year	1. PT Weltes Energi Nusantara 2. PT Aneka Jasa Grhadika 3. PT Nindya Karya 4. PT Petrokopindo Cipta Selaras 5. Swakelola Kompartemen Jasa Pelayanan Pabrik 6. PT Nindya Karya dan PT Petro Karya Niaga	559.123	Rupiah	Rp492.348 Juta (Pinjaman) Rp156.479 Juta (Modal Sendiri) Rp492,348 Million (Loan) Rp156,479 Million (Own Capital)	Tidak diperlukan upaya lindung nilai No hedging required
Pembangunan Gudang Urea Ekspor PG Kapasitas 20.000 ton Construction of a 20,000 Tons Export PG Urea Warehouse	PT Weltes Energi Nusantara	137.819	Rupiah	Rp137.819 (Modal Sendiri) (Own Capital)	Tidak diperlukan upaya lindung nilai No hedging required

Jenis Perikatan/Nama Proyek Type of Engagement/ Project Name	Pihak yang Melakukan Perikatan (Kontraktor/ Vendor) Contracting Party (Contractor/Vendor)	Nilai Investasi (Rp Juta) Investment Value (Rp Million)	Mata Uang Currency	Sumber Dana Funding Source	Upaya Melindungi Risiko Mata Uang Asing Efforts to Hedge Foreign Currency Risk
Pembangunan Gudang Bahan Baku NPK Curah PKT Kapasitas 45.000 Ton Construction of PKT Bulk NPK Raw Material Warehouse with a Capacity of 45,000 Tons	PT Nindya Karya	180.622	Rupiah	Rp180.622 (Modal Sendiri) (Own Capital)	Tidak diperlukan upaya lindung nilai No hedging required
Penyiapan Lahan Industri Tahap-2 PKT Seluas 16 Hektar PKT Phase-2 Industrial Land Preparation of 16 Hectares	KSO PT Wijaya Karya – Pelayaran Fortuna Nusantara	373.784	Rupiah	Rp373.784 (Modal Sendiri) (Own Capital)	Tidak diperlukan upaya lindung nilai No hedging required

REALISASI INVESTASI BARANG MODAL

Berikut disampaikan jenis dan nilai investasi barang modal dan penyertaan modal yang direalisasikan pada tahun 2022.

CAPITAL GOODS INVESTMENT REALIZATION

The following presents the type and value of investment in capital goods and equity participation realized in 2022.

No.	Jenis Investasi Barang Modal Types of Capital Goods Investment	Nilai (Rp Juta) Value (Rp Million)	Tujuan Destination
1	Pembangunan pabrik NPK *Chemical* PIM kapasitas 500.000 ton per tahun Construction of PIM Chemical NPK plant with a Capacity of 500,000 tons per year	434.153	Peningkatan kapasitas produksi pupuk NPK Increased production capacity of NPK fertilizer
2	Pembangunan pabrik Phonska V kapasitas 600.000 ton per tahun Construction of Phonska V plant with capacity of 600,000 ton per year	68.248	Peningkatan kapasitas produksi pupuk NPK Increased production capacity of NPK fertilizer
3.	Pembangunan gudang urea ekspor PG kapasitas 20.000 ton Construction of a 20,000 ton export PG urea warehouse	45.959	Fasilitas infrastruktur untuk mengakomodasi meningkatknya volume ekspor produk Urea Infrastructure facilities to accommodate the increasing export volume of Urea products
4	Pembangunan gudang bahan baku NPK curah PKT kapasitas 45.000 ton Construction of PKT bulk NPK raw material warehouse with a capacity of 45,000 tons	14.305	Peningkatan kapasitas penyimpanan bahan baku NPK Increased storage capacity of NPK raw materials
5.	Penyiapan lahan industri tahap-2 PKT seluas 16 hektar PKT phase-2 industrial land preparation of 16 hectares	123.722	Perluasan kawasan industri Industrial estate expansion

Tujuan dari ikatan material investasi barang modal adalah untuk menjamin terealisasinya proyek-proyek pengembangan Perusahaan untuk menunjang penguatan bisnis di masa mendatang.

The purpose of the material bonds for investment in capital goods is to ensure the realization of the Company's development projects to support the strengthening of the business in the future.

Investasi barang modal Perusahaan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp940,92 miliar atau meningkat sebesar 59,33% atau Rp350,37 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya progres proyek pabrik NPK *Chemical*

The Company's investment in capital goods in 2022 was realized at Rp940.92 billion, an increase of 59.33% or Rp350.37 billion. The increase was mainly due to the progress of the PIM NPK Chemical plant project with a

PIM Kapasitas 500.000 ton per tahun sebesar Rp434,15 miliar dan Penyiapan Lahan Industri Tahap-2 PKT seluas 16 hektar sebesar Rp123,72 miliar.

capacity of 500,000 tons per year amounting to Rp434.15 billion and PKT Phase-2 Industrial Land Preparation of 16 hectares amounting to Rp123.72 billion.

Perihal	2022 (Rp juta | Rp million)	2021 (Rp juta | Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		Subject
			Nominal (Rp juta | Rp million)	Persentase Percentage (%)	
Realisasi Investasi Barang Modal	940.917	590.550	350.367	59,33	Capital Goods Investment Realization

DAMPAK NILAI MATA UANG ASING BAGI KINERJA PERUSAHAAN

PI Grup menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing yang terutama timbul dari aset dan liabilitas moneter yang diakui dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang fungsional entitas yang bersangkutan. Sebagian dari risiko ini dikelola menggunakan nilai natural yang berasal dari aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing yang sama.

Pada tanggal 31 Desember 2022, jika rupiah melemah/menguat sebesar 10% terhadap dolar AS dengan semua variabel konstan, laba sebelum pajak tahun berjalan akan menjadi lebih rendah atau lebih tinggi sebesar Rp10.564 miliar, terutama yang timbul sebagai akibat keuntungan/kerugian selisih kurs atas penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

THE IMPACT OF FOREIGN CURRENCY ON COMPANY PERFORMANCE

The PI Group's are exposed to foreign exchange risk arising primarily from monetary assets and liabilities recognized in currencies different from the functional currency of the entity concerned. Part of this risk is managed using natural values derived from monetary assets and liabilities denominated in the same foreign currency.

As of December 31, 2022 if the rupiah weakens/strengthens by 10% against the US dollar with all variables held constant, profit before tax for the year would be lower or higher by Rp10,564 billion, mainly due to foreign exchange gains/losses on translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies.

DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENDAPATAN DAN KINERJA PERUSAHAAN

Bisnis komoditas seperti Urea dan Amoniak sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar. Pada tahun 2022 harga jual urea dalam negeri sebesar Rp7,81 juta/ton dan urea ekspor sebesar USD626/ton. Untuk harga jual amoniak dalam negeri Rp12,15 juta/ton dan amoiak ekspor USD873/ton. Harga jual urea maupun amoniak tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup besar dibandingkan harga jual tahun 2021. Apabila harga jual tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021, dengan volume penjualan urea dan amoniak pada tahun 2022 sebesar 3,38 juta ton dan 1,06 juta ton, maka pada tahun 2022 PTPI mengalami peningkatan nilai penjualan Urea dan Amoniak sebesar Rp13,86 triliun.

THE IMPACT OF PRICE CHANGES ON REVENUE AND COMPANY PERFORMANCE

Commodity businesses such as Urea and Ammonia are highly influenced by market price fluctuations. In 2022 the selling price of domestic urea was Rp7.81 million/ton and export urea was USD626/ton. The domestic selling price of ammonia is Rp12.15 million/ton and export ammonia is USD873/ton. The selling price of urea and ammonia in 2022 experienced a considerable increase compared to the selling price in 2021. If the selling price in 2022 is compared to 2021, with the sales volume of urea and ammonia in 2022 of 3.38 million tons and 1.06 million tons, then in 2022 PTPI will experience an increase in the sales value of Urea and Ammonia of Rp13.86 trillion.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Pada tanggal 11 Januari 2023, PI Grup melakukan pembayaran atas pinjaman bank jangka Panjang kepada Bank Oke sebesar Rp45,798 triliun.

INFORMATION AND MATERIAL FACTS THAT OCCURRED AFTER THE DATE OF THE ACCOUNTANT'S REPORT

On January 11, 2023, the PI Group made a payment on its long-term bank loan to Bank Oke amounting to Rp45.798 trillion.

Pada tanggal 8 Februari 2023, PKT mengadakan pokok-pokok PJBG dengan No. 020.23/23/LTRHOA/GOKPL/LGL dan 11225/SP-BTG/2023 dengan Genting Oil Kasuri Pte. Ltd., untuk pembelian gas bumi di WK Kasuri dengan jangka waktu 17 tahun berturut-turut sejak gas bumi pertama dikirimkan.

On February 8, 2023, PKT entered into GSPAs No. 020.23/23/LTRHOA/GOKPL/LGL and 11225/SP-BTG/2023 with Genting Oil Kasuri Pte. Ltd. for the purchase of natural gas in WK Kasuri for a period of 17 consecutive years from the first delivery of natural gas.

PENCAPAIAN TARGET TAHUN 2022

TARGET ACHIEVEMENT IN 2022

Produksi

Produksi pupuk dan non-pupuk pada tahun 2022 mencapai 18,94 juta ton atau 95,96% dari target tahun 2022. Produksi belum mencapai target disebabkan selama tahun 2022 terdapat beberapa pabrik yang mengalami perbaikan serta adanya kendala pemenuhan pasokan gas. Namun demikian, rasio konsumsi bahan baku gas bumi lebih efisien dibandingkan rencana.

Production

Fertilizer and non-fertilizer production in 2022 reached 18.94 million tons or 95.96% of the 2022 target. Production has not reached the target because during 2022 there were several factories that underwent repairs and there were obstacles in fulfilling gas supply. However, the consumption ratio of natural gas raw materials is more efficient than the plan.

Perihal	**Realisasi 2022** 2022 Realization **(ton)**	**Target 2022** 2022 Target **(ton)**	**Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2022** Achievement of Realization against 2022 Target **(%)**	Subject
	1	2	(1:2)	
Pupuk				**Fertilizer**
Urea	7.467.192	8.069.200	92,54	Urea
SP-36	172.878	420.000	41,16	SP-36
ZA	718.270	770.000	93,28	ZA
NPK	3.424.685	3.083.500	111,06	NPK
ZK	13.192	13.000	101,48	ZK
Subtotal Produksi Pupuk	**11.796.218**	**12.355.700**	**95,47**	**Fertilizer Production Subtotal**
Non Pupuk				**Non Fertilizer**
Amoniak	5.957.455	6.092.400	97,79	Ammonia
Asam Sulfat	886.688	852.500	104,01	Sulfuric Acid
Asam Fosfat	222.388	359.300	61,89	Phosphoric Acid
Subtotal Produksi Non-Pupuk	7.066.531	7.304.200	96,75	Subtotal Non-fertilizer Production
Produk Samping[*)]	**73.502**	**73.900**	**99,46**	**Side Products**[*)]
Total Produksi	**18.936.251**	**19.733.800**	**95,96**	**Total Production**

[*)] Terdiri dari CO_2 Cair, Dry Ice, HCL, dan Alumunium Fluorida

[*)] Consists of Liquid CO_2, Dry Ice, HCL, and Aluminum Fluoride

PEMASARAN DAN PENJUALAN
Marketing and Sales

Perihal	**Realisasi 2022** 2022 Realization **(Rp juta | Rp million)**	**Target 2022** 2022 Target **(Rp juta | Rp million)**	**Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2022** Achievement of Realization against 2022 Target **(%)**	Subject
	1	2	(1:2)	
Pupuk				**Fertilizer**
Pupuk PSO				**PSO Fertilizer**
Urea	3.890.315	4.232.704	91,91	Urea
SP-36	164.428	541.201	30,38	SP-36
ZA	220.489	823.475	26,78	ZA
NPK	2.897.488	2.481.914	116,74	NPK
Organik	233.847	1.038.763	22,51	ZK
Subtotal Penjualan Pupuk PSO	**7.406.566**	**9.118.057**	**81,23**	**Subtotal PSO Fertilizer Sales**
Pupuk Non-PSO				**Non-PSO Fertilizer**
Pupuk Non-PSO Dalam Negeri				**Domestic Non-PSO Fertilizer**
Urea	1.630.406	1.914.500	85,16	Urea
SP-36	95.708	10.000	957,08	SP-36
ZA	84.559	28.000	302,00	ZA
NPK	316.396	266.000	118,95	NPK
Lain-lain*)	202.991	178.000	114,04	Others*)
Subtotal Penjualan Pupuk Non-PSO Dalam Negeri	**2.330.060**	**2.396.500**	**97,23**	**Subtotal Domestic Non-PSO Fertilizer Sales**
Pupuk Non-PSO Luar Negeri				**Foreign Non-PSO Fertilizer**
Urea	1.747.855	1.616.000	108,16	Urea
ZK	2.925	5.000	58,50	ZK
NPK	26.999	-	-	NPK
Subtotal Penjualan Pupuk Non-PSO Luar Negeri	**1.777.780**	**1.621.000**	**109,67**	**Subtotal Overseas Non-PSO Fertilizer Sales**
Pupuk Non-PSO Trading				**Trading Non-PSO Fertilizer**
NPK	19.371	131.408	14,74	NPK
KCL	29.782	275.000	10,83	KCL
Lainnya**)	10	168.500	0,01	Others*)
Subtotal Penjualan Pupuk Non-PSO Trading	**49.163**	**574.908**	**8,55**	**Subtotal Non-PSO Fertilizer Sales Trading**
Subtotal Penjualan Pupuk	**11.563.569**	**13.710.465**	**84,34**	**Subtotal**
Non-Pupuk				**Non-Fertilizer**
Amoniak				**Ammonia**
Dalam Negeri	306.791	184.100	166,64	Domestic
Luar Negeri	749.123	688.690	108,78	Foreign
Subtotal Penjualan Amoniak	**1.055.915**	**872.790**	**120,98**	**Subtotal Ammonia Sales**

Perihal	Realisasi 2022 2022 Realization (Rp juta | Rp million)	Target 2022 2022 Target (Rp juta | Rp million)	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2022 Achievement of Realization against 2022 Target (%)	Subject
	1	2	(1:2)	
Non-Pupuk Non-Amoniak				**Non-Fertilizer Non-Ammonia**
Asam Sulfat	323.609	157.000	206,12	Sulfuric Acid
Asam Fosfat	5.302	17.000	31,19	Phosphoric Acid
Lainnya[***)]	68.714	72.350	94,97	Other[***)]
Subtotal Penjualan Non-Pupuk Non-Amoniak	**397.625**	**246.350**	**161,41**	**Subtotal Non-Fertilizer Non-Ammonia Sales**
Jumlah Volume Penjualan	**13.017.109**	**14.829.605**	**87,78**	**Total Sales Volume**

Total volume penjualan tahun 2022 mencapai 13,02 juta ton atau 87,78% dari target tahun 2022. Belum tercapainya target penjualan antara lain disebabkan adanya pengurangan jenis pupuk bersubsidi dari 5 produk menjadi 2 produk mulai Juli 2022, selain itu juga terdapat perubahan alokasi pupuk bersubsidi dari 9 juta ton (awal tahun 2022) menjadi 7,78 juta ton.

Total sales volume in 2022 reached 13.02 million tons or 87.78% of the 2022 target. The unachieved sales target is partly due to the reduction of subsidized fertilizer types from 5 products to 2 products starting July 2022, as well as changes in the allocation of subsidized fertilizers from 9 million tons (beginning of 2022) to 7.78 million tons.

LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

Perihal	Realisasi 2022 2022 Realization (Rp juta | Rp million)	Target 2022 2022 Target (Rp juta | Rp million)	Pencapaian Realisasi terhadap Target 2022 Achievement of Realization against 2022 Target (%)	Subject
	1	2	(1:2)	
Pendapatan	67.750.426	48.730.616	139,03	Revenue
Penggantian Biaya Subsidi dari Pemerintah Indonesia	36.109.067	28.207.072	128,01	Reimbursement of subsidy from the Government Indonesia
Jumlah Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan	103.859.493	76.937.688	134,99	Total Revenue from Contract with Customers
Beban Pokok Pendapatan	(70.288.172)	(62.191.451)	113,02	Cost of Revenue
Laba Bruto	33.571.321	14.746.237	227,66	Gross Profit
Beban Penjualan	(1.183.293)	(1.581.144)	74,84	Selling Expenses
Beban Umum dan Administrasi	(5.956.428)	(3.879.437)	153,54	General and Administrative Expenses
Pendapatan Lainnya-Bersih	692.906	261.800	264,67	Other Income-Net
Laba Operasi	27.124.506	9.547.456	284,10	Operating Profit
Pendapatan Keuangan	271.478	131.734	206,08	Finance Income

Perihal	**Realisasi 2022** 2022 Realization **(Rp juta |** Rp million)	**Target 2022** 2022 Target **(Rp juta |** Rp million)	**Pencapaian Realisasi terhadap Target 2022** Achievement of Realization against 2022 Target **(%)**	Subject
	1	2	(1:2)	
Biaya Keuangan	(2.243.064)	(2.637.668)	85,04	Finance Costs
Bagian atas (Rugi)/Laba Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	(66.175)	53.906	(122,76)	Share of Net (Loss)/Profit of Associates and Joint Ventures
Laba sebelum Pajak Penghasilan	25.086.745	7.095.428	353,56	Profit before Income Tax
Beban Pajak Penghasilan	(6.576.153)	(2.202.325)	298,60	Income Tax Expenses
Laba Tahun Berjalan	18.510.592	4.893.103	378,30	Profit for the Year
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan setelah Pajak	1.480.776	-	-	Total Other Comprehensive Income for the Year after Tax
Penghasilan Komprehensif	19.991.368	4.893.103	408,56	Comprehensive Income
Laba Tahun Berjalan yang Diatribusikan kepada:				**Profit for the Year Attributable to:**
Pemilik Entitas Induk	18.461.812	4.853.363	380,39	Owner of the Parent Entity
Kepentingan Non-pengendali	48.780	39.740	122,75	Non-controlling interest
	18.510.592	4.893.103	378,30	
Laba Komprehensif yang Diatribusikan kepada:				**Comprehensive Income Attributable to:**
Pemilik Entitas Induk	19.942.588	4.853.363	410,90	Owner of the Parent Entity
Kepentingan Non-pengendali	48.780	39.740	122,75	Non-controlling interest
	19.991.368	4.893.103	408,56	

Pada tahun 2022 perusahaan membukukan laba tahun berjalan Rp18,51 triliun atau 378,30% dari rencana tahun 2022 Rp4,89 triliun. Tercapainya target laba tahun berjalan terutama disebabkan:

1. Realisasi volume penjualan produk non pupuk mencapai 129,88% dari RKAP.
2. Realisasi beban keuangan mencapai Rp2,24 triliun atau 85,04% dari RKAP. Hal ini disebabkan realisasi rata-rata bunga pinjaman perbankan 7,59% atau lebih rendah dari yang direncanakan yaitu sebesar 8,00%.
3. Adanya kenaikan margin keuntungan dari penjualan produk komersil.
4. Realisasi pendapatan keuangan mencapai Rp271,48 miliar atau 206,08% dari RKAP yang merupakan realisasi pendapatan bunga.

In 2022 the company booked a profit for the year of Rp18.51 trillion or 378.30% of the 2022 plan of Rp4.89 trillion. The achievement of the current year profit target was mainly due to:

1. Sales volume realization of non-fertilizer products reached 129.88% of the RKAP.
2. The realization of financial expenses reached Rp2.24 trillion or 85.04% of the RKAP. This is due to the realization of average bank loan interest of 7.59% or lower than planned at 8.00%.
3. An increase in profit margin from the sale of commercial products.
4. The realization of financial income reached Rp271.48 billion or 206.08% of the RKAP which is the realization of interest income.

POSISI KEUANGAN
Financial Position

Perihal	Realisasi 2022 2022 Realization	Target 2022 2022 Target	Pencapaian Realisasi terhadap Target 2022 Achievement of Realization against 2022 Target (%)	Subject
	1	2	(1:2)	
Aset				**Assets**
Aset Lancar	77.975.094	36.119.246	215,88	Current Assets
Aset Tidak Lancar	80.745.413	89.541.924	90,18	Non-current Assets
Jumlah Aset	**158.720.507**	**125.661.171**	**126,31**	**Total Assets**
Liabilitas dan Ekuitas				**Liabilities and Equity**
Liabilitas				**Liabilities**
Liabilitas Jangka Pendek	42.749.997	27.941.437	153,00	Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang	24.810.210	23.184.833	107,01	Non-Current Liabilities
Jumlah Liabilitas	**67.560.207**	**51.126.271**	**132,14**	**Total Liabilities**
Ekuitas				**Equity**
Jumlah Ekuitas	**91.160.300**	**74.534.900**	**122,31**	**Total Equity**
Jumlah Ekuitas dan Liabilitas	**158.720.507**	**128.463.172**	**126,31**	**Total Equity and Liabilities**

Total aset tahun 2022 tercatat lebih tinggi dari target utamanya disebabkan tingginya kas dan setara kas karena tingginya penerimaan kas dari pelanggan, selain itu juga karena piutang PSO lebih tinggi dari target karena timbulnya piutang subsidi atas penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2022 yang menambah saldo piutang subsidi dari Pemerintah Indonesia-tidak lancar per 31 Desember 2022.

Total assets in 2022 recorded higher than the target mainly due to higher cash and cash equivalents due to higher cash receipts from customers, in addition to higher PSO receivables than the target due to the emergence of subsidy receivables for the distribution of subsidized fertilizers in 2022 which increased the balance of subsidy receivables from the Government of Indonesia-non-current as of December 31, 2022.

STRUKTUR MODAL
Capital Structure

Perihal	Realisasi 2022 2022 Realization	Target 2022 2022 Target	Pencapaian Realisasi terhadap Target 2022 Achievement of Realization against 2022 Target (%)	Subject
	1	2	(1:2)	
Total Liabilitas Berbasis Bunga (*Interest Bearing Debt*)	31.139.596	30.916.119	100,72	Total Interest Bearing Debt
Total Ekuitas	91.160.300	74.534.900	122,31	Total Equity
Jumlah Sumber Permodalan	**122.299.896**	**105.451.019**	**115,98**	**Total Capital Source**

Struktur modal Perusahaan didominasi oleh ekuitas atau permodalan sendiri, yang menunjukkan struktur modal Perusahaan memiliki fondasi yang kuat. Hal ini juga terlihat dari membaiknya *debt to equity ratio* (DER) dan *interest bearing debt to* EBITDA yang menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam mengelola utang dan permodalannya.

The Company's capital structure is dominated by equity or own capital, which shows that the Company's capital structure has a strong foundation. This can also be seen from the improvement of debt to equity ratio (DER) and interest bearing debt to EBITDA which shows the Company's ability to manage its debt and capital.

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
Human Resource Management

Perihal	**Realisasi 2022** 2022 Realization	**Target 2022** 2022 Target	**Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2022** Achievement of Realization against 2022 Target **(%)**	Subject
	1	**2**	**(1:2)**	
Jumlah Karyawan (Orang)	7.538	7.624	98,87	Number of Employees (People)
Biaya Pelatihan dan Pendidikan (Rp Juta)	194.098	213.359	90,97	Training and Education Costs (Rp Million)

Jumlah karyawan tahun 2022 sebanyak 7.538 orang atau 98,87% dari target. Sedangkan biaya pelatihan dan pendidikan mencapai Rp194,098 Miliar atau 90,97% dari target.

The number of employees in 2022 was 7,538 people or 98.87% of the target. Meanwhile, training and education costs reached Rp194.098 billion or 90.97% of the target.

Proyeksi Kinerja dan Rencana Strategis Tahun 2023

Pada tahun buku 2023, Perusahaan telah mencanangkan proyeksi yang ingin dicapai berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2023 yang telah disetujui Pemegang Saham. Proyeksi yang tertuang dalam RKAP ini disusun berdasarkan kondisi usaha tahun 2022 dan hasil asesmen Perusahaan atas kondisi bisnis periode berikutnya.

Projected Performance and Strategic Plan Year 2023

In the 2023 financial year, the Company has set a projection to be achieved based on the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2023 which has been approved by the Shareholders. The projections contained in this RKAP were prepared based on business conditions in 2022 and the results of the Company's assessment of business conditions in the following period.

PRODUKSI
Production

Perihal	**Realisasi 2022** 2022 Realization **(ton)**	**Proyeksi 2023** 2023 Projection **(ton)**	**Perbandingan Proyeksi 2023 terhadap Realisasi 2022** Comparison of 2023 Projection to 2022 Realization **(%)**	Subject
	1	**2**	**(2:1)**	
Pupuk	11.796.218	12.304.975	104,31	Fertilizer
Non-Pupuk*	7.140.033	7.143.280	100,05	Non-Fertilizer*
Jumlah	**18.936.251**	**19.448.255**	**102,70**	**Total**

* Terdiri dari Amoniak, Asam Fosfat, ALF3 dan Produk Samping Lainnya

*Consists of Ammonia, Phosphoric Acid, ALF3 and Other By-products

Total produksi tahun 2023 diproyeksikan meningkat terutama disebabkan peningkatan produksi urea, NPK dan amoniak.

Total production in 2023 is projected to increase mainly due to increased production of urea, NPK and ammonia.

PEMASARAN DAN PENJUALAN
Marketing and Sales

Perihal	Realisasi 2022 2022 Realization (ton)	Proyeksi 2023 2023 Projection (ton)	Perbandingan Proyeksi 2023 terhadap Realisasi 2022 Comparison of 2023 Projection to 2022 Realization (%)	Subject
	1	2	(2:1)	
Pupuk	11.563.569	11.930.844	103,18	Fertilizer
Non-Pupuk*	1.453.540	1.116.325	76,80	Non-Fertilizer*
Jumlah	13.017.109	13.047.169	100,23	Total

* Terdiri dari Amoniak, Asam Fosfat, ALF3 dan Produk Samping Lainnya

*Consists of Ammonia, Phosphoric Acid, ALF3 and Other By-products

Total penjualan tahun 2023 di proyeksikan meningkat terutama disebabkan peningkatan penjualan pupuk PSO dan pupuk non-PSO dalam negeri.

Total sales in 2023 are projected to increase mainly due to an increase in domestic sales of PSO and non-PSO fertilizers.

LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

PROFIT (LOSS) AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Pos Aku	Realisasi 2022 2022 Realization (ton)	Proyeksi 2023 2023 Projection (ton)	Perbandingan Proyeksi 2023 terhadap Realisasi 2022 Comparison of 2023 Projection to 2022 Realization (%)	Subject
	1	2	(2:1)	
Pendapatan	67.750.426	56.175.563	82,92	Revenue
Penggantian Biaya Subsidi dari Pemerintah Indonesia	36.109.067	33.821.644	93,67	Reimbursement of subsidy from the Government of Indonesia
Jumlah Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan	103.859.493	89.997.207	86,65	Total Revenue from Contract with Customers
Beban Pokok Pendapatan	(70.288.172)	(64.920.450)	92,36	Cost of Revenue
Laba Bruto	33.571.321	25.076.757	37,01	Gross Profit
Beban Usaha	(6.446.815)	(6.572.263)	101,95	Operating Expenses
Laba Operasi	27.124.506	18.504.494	68,22	Operating Profit
Biaya Keuangan	(2.243.064)	(2.413.121)	107,58	Financial Costs
Pendapatan dan Beban Lain-lain	205.303	649.491	316,36	Other Income and Expenses
Laba sebelum Pajak Penghasilan	25.086.745	16.740.864	66,73	Profit before Income Tax
Beban Pajak Penghasilan	(6.576.153)	(4.173.769)	63,47	Income Tax Expense
Laba Tahun Berjalan	18.510.592	12.567.095	67,89	Profit for the Year

Laba tahun berjalan tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp12,57 triliun atau lebih rendah 32,11% dari realisasi tahun 2023. Penurunan tersebut disebabkan adanya penyesuaian jenis pupuk sektor subsidi serta besar alokasi untuk tahun 2023. Selain itu, asumsi harga jual urea dan amoniak tahun 2023 lebih rendah dibandingkan rata-rata realisasi harga jual tahun 2022 seiring dengan tren harga jual komoditas yang cenderung melandai.

Profit for the year 2023 is projected at Rp12.57 trillion or 32.11% lower than the realization in 2023. The decrease is due to the adjustment of the type of fertilizer in the subsidized sector and the amount of allocation for 2023. In addition, the assumption of urea and ammonia selling prices in 2023 is lower than the average realization of selling prices in 2022 in line with the trend of commodity selling prices which tend to slope.

Posisi Keuangan

Financial Position

Pos Aku	**Realisasi 2022** 2022 Realization **(Rp juta | Rp million)**	**Proyeksi 2023** 2023 Projection **(Rp juta | Rp million)**	**Perbandingan Proyeksi 2023 terhadap Realisasi 2022** Comparison of 2023 Projection to 2022 Realization **(%)**	Subject
	1	2	(2:1)	
ASET				**ASSETS**
Aset Lancar	77.975.094	67.085.488	86,03	Current Assets
Aset Tidak Lancar	80.745.413	93.364.164	115,63	Non-current Assets
Jumlah Aset	**158.720.507**	**160.449.652**	**101,09**	**Total Assets**
LIABILITAS DAN EKUITAS				**LIABILITIES AND EQUITY**
Liabilitas				**Liabilities**
Liabilitas Jangka Pendek	42.749.997	49.052.200	114,74	Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang	24.810.210	13.544.512	54,59	Non-current Liabilities
Jumlah Liabilitas	**67.560.207**	**62.596.712**	**92,65**	**Total Liabilities**
Ekuitas				**Equity**
Jumlah Ekuitas	91.160.300	97.852.940	107,34	Total Equity
Jumlah Ekuitas dan Liabilitas	**158.720.507**	**160.449.652**	**101,09**	**Total Equity and Liabilities**

Posisi keuangan proyeksi tahun 2023 mencapai Rp160,45 triliun atau 101,09% dari realisasi tahun 2022. Hal ini utamanya disebabkan adanya peningkatan liabilitas jangka pendek.

The projected financial position in 2023 reached Rp160.45 trillion or 101.09% of the realization in 2022. This is mainly due to an increase in short-term liabilities.

Struktur Modal

Capital Structure

Perihal	**Realisasi 2022** 2022 Realization **(Rp juta | Rp million)**	**Proyeksi 2023** 2023 Projection **(Rp juta | Rp million)**	**Perbandingan Proyeksi 2023 terhadap Realisasi 2022** Comparison of 2023 Projection to 2022 Realization **(%)**	Subject
	1	2	(2:1)	
Total Liabilitas Berbasis Bunga (*Interest Bearing Debt*)	31.139.596	27.510.087	88,34	Total Interest-Bearing Liabilities Debt)
Total Ekuitas	91.160.300	97.852.940	107,34	Total Equity
Jumlah Sumber Permodalan	**122.299.896**	**125.363.027**	**102,50**	**Total Capital Source**

Jumlah sumber permodalan proyeksi tahun 2023 mencapai Rp125,36 triliun atau 102,50% dari total realisasi tahun 2022.

The total capital resources projected in 2023 reached Rp125.36 trillion or 102.50% of the total realization in 2022.

Pembayaran Obligasi (Bunga)

Bond Payment (Interest)

Perihal	Realisasi 2022 2022 Realization (Rp juta | Rp million)	Proyeksi 2023 2023 Projection (Rp juta | Rp million)	Perbandingan Proyeksi 2023 terhadap Realisasi 2022 Comparison of 2023 Projection to 2022 Realization (%)	Subject
	1	2	(2:1)	
Obligasi PUB I Tahap I Seri B Tahun 2017	179.310.000.000	179.310.000.000	-	PUB Bonds I Phase I Series B Year 2017
Obligasi PUB I Tahap II Seri B Tahun 2017	140.146.000.000	-	-	PUB Bonds I Phase II Series B Year 2017
Obligasi PUB II Tahap I Seri A Tahun 2020	80.277.750.000	60.208.312.500	75	PUB II Phase I Series A Bonds 2020
Obligasi PUB II Tahap I Seri B Tahun 2020	66.053.295.000	66.053.295.000	-	PUB II Phase I Series B Bonds 2020
Obligasi PUB II Tahap I Seri C Tahun 2020	35.843.550.000	35.843.550.000	-	PUB II Phase I Series C Bonds 2020
Obligasi PUB II Tahap II Seri A Tahun 2021	19.600.000.000	19.600.000.000	-	PUB II Phase II Series A Bonds 2021
Obligasi PUB II Tahap II Seri B Tahun 2021	99.200.000.000	99.200.000.000	-	PUB II Phase II Series B Bonds 2021
Obligasi PUB II Tahap II Seri C Tahun 2021	57.600.000.000	57.600.000.000	-	PUB II Phase II Series C Bonds 2021

Penjelasan:

- Tidak ada Pembayaran Bunga Obligasi PUB I Tahap II Seri B Tahun 2017 di tahun 2023, hal ini dikarenakan Obligasi tersebut telah lunas pada 9 November 2022
- Angka Obligasi PUB II Tahap I Seri A Tahun 2020 berbeda dikarenakan Obligasi tersebut akan lunas pada 3 September Tahun 2023

Explanation:

- There is no interest payment for PUB I Phase II Series B Bonds 2017 in 2023, this is because the bonds have been paid off on November 9, 2022.
- The figure for PUB II Phase I Series A Bonds in 2020 is different because the Bonds will be paid off on September 3, 2023.

Pembayaran Obligasi (Pokok)

Human Resource Management

Perihal	Realisasi 2022 2022 Realization	Proyeksi 2023 2023 Projection	Perbandingan Proyeksi 2023 terhadap Realisasi 2022 Comparison of 2023 Projection to 2022 Realization (%)	Subject
	1	2	(2:1)	
Obligasi PUB I Tahap I Seri B Tahun 2017	-	-	-	PUB Bonds I Phase I Series B Year 2017
Obligasi PUB I Tahap II Seri B Tahun 2017	1.774.000.000.000	-	-	PUB Bonds I Phase II Series B Year 2017

Perihal	Realisasi 2022 2022 Realization	Proyeksi 2023 2023 Projection	Perbandingan Proyeksi 2023 terhadap Realisasi 2022 Comparison of 2023 Projection to 2022 Realization (%)	Subject
	1	2	(2:1)	
Obligasi PUB II Tahap I Seri A Tahun 2020	-	1.146.825.000.000	-	PUB II Phase I Series A Bonds 2020
Obligasi PUB II Tahap I Seri B Tahun 2020	-	-	-	PUB II Phase I Series B Bonds 2020
Obligasi PUB II Tahap I Seri C Tahun 2020	-	-	-	PUB II Phase I Series C Bonds 2020
Obligasi PUB II Tahap II Seri A Tahun 2021	-	-	-	PUB II Phase II Series A Bonds 2021
Obligasi PUB II Tahap II Seri B Tahun 2021	-	-	-	PUB II Phase II Series B Bonds 2021
Obligasi PUB II Tahap II Seri C Tahun 2021	-	-	-	PUB II Phase II Series C Bonds 2021

Penjelasan:
- Pada Tahun 2022 hanya melunasi Pokok Obligasi PUB I Tahap II Seri B Tahun 2017 pada 9 November 2022 sebesar Rp1.774.000.000.000
- Pada Tahun 2023 hanya melunasi Pokok Obligasi PUB II Tahap I Seri A Tahun 2020 pada 3 September 2023 sebesar Rp1.146.825.000.000

Explanation:
- In 2022, only the principal repayment of PUB I Phase II Series B Bonds 2017 on November 9, 2022 amounting to Rp1,774,000,000,000.
- In 2023, only the principal repayment of PUB II Phase I Series A 2020 Bonds on September 3, 2023 amounting to Rp1,146,825,000,000.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Human Resource Management

Perihal	Realisasi 2022 2022 Realization (ton)	Proyeksi 2023 2023 Projection (ton)	Perbandingan Proyeksi 2023 terhadap Realisasi 2022 Comparison of 2023 Projection to 2022 Realization (%)	Subject
	1	2	(2:1)	
Jumlah Karyawan (orang)	7.538	7.407	98,26	Number of Employees (people)
Biaya Pelatihan (Rp Juta)	194.098	255.883	131,83	Training Cost (Rp Million)

Untuk tahun depan, Perusahaan telah menetapkan sejumlah target di bidang sumber daya manusia. Untuk jumlah karyawan 2023 ditargetkan lebih rendah atau sekitar 98,26% dari total karyawan tahun 2022.

Sedangkan untuk biaya pelatihan, proyeksi tahun 2023 yang telah ditetapkan mencapai Rp255,9 miliar atau 131,83% dari realisasi tahun 2022.

Penetapan target-target di bidang SDM ini disesuaikan dengan RKAP yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.

For next year, the Company has set a number of targets in the area of human resources. The number of employees in 2023 is targeted to be lower or around 98.26% of the total employees in 2022.

As for training costs, the projection for 2023 that has been set reaches Rp255.9 billion or 131.83% of the realization in 2022.

The determination of targets in the HR sector is adjusted to the RKAP set by the Company. In the medium and long

Dalam jangka menengah dan panjang diharapkan dapat menunjang pencapaian visi dan misi Perusahaan.

PROSPEK USAHA DAN PROYEKSI KINERJA TAHUN 2023

Prospek Usaha Tahun 2023

Selama masa pandemi COVID-19, sektor pertanian tetap tumbuh dan membantu meredam dampak dari musibah tersebut. Sektor ini menjadi satu dari tiga sektor usaha yang dapat tumbuh positif dan membantu sebagian besar penduduk untuk tetap bertahan hidup selama pandemi. Pada tahun 2022, sektor pertanian diperkirakan tumbuh menguat yang umumnya ditentukan oleh faktor cuaca. Hal tersebut menjadi alasan perlambatan pertumbuhan sektor pertanian pada tahun 2021 menjadi 1,8%. Di tahun 2022, sektor pertanian diperkirakan tumbuh berkisar 1,1%-1,4%.

Sedangkan kinerja sub sektor kehutanan dan perikanan masih tertahan karena dampak melambatnya logistik yang terjadi di tahun 2021. Di sisi lain, sub sektor perkebunan khususnya kelapa sawit, dapat ekspansif karena kenaikan permintaan olahan dalam pemenuhan kebutuhan ekspor.

Dampak dari konflik Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung kemungkinan akan mendukung harga bahan baku yang tinggi, setidaknya untuk tahun 2022-2025. Harga produksi energi yang tinggi akan meningkatkan biaya produksi yang berpengaruh pada jangka pendek maupun menengah. Dari tingkat yang tinggi di tahun 2022, harga tanaman akan turun pada tahun 2023-2024 serta secara umum tetap sama selama periode prediksi. Biaya bahan baku yang tinggi tersebut kemungkinan akan berdampak pada produksi urea di wilayah dengan biaya tinggi, yaitu Eropa dan Ukraina yang akan terus menghentikan produksi urea selama periode 2022-2035.

Dengan kemungkinan tidak adanya tonase dari Cina dan Ukraina serta potensi gangguan dalam ekspor Rusia pada jangak pendek dan menengah, pasokan urea tampaknya akan tetap hingga relatif ketat pada tahun 2022-2025 meskipun diimbangi dengan penambahan kapasitas urea. Tiga tahun pertama dari periode prakiraan akan melihat hasil dari siklus investasi saat ini dan akan dikarakteristikkan berdasarkan kapasitas lebih lanjut (tidak termasuk Cina) dengan total kapasitas 13,2 juta ton/tahun yang diharapkan dapat bertumbuh antara tahun 2022-2024, sekitar rata-rata 4,4 juta ton/tahun.

term, it is expected to support the achievement of the Company's vision and mission.

BUSINESS OUTLOOK AND PROJECTED PERFORMANCE IN 2023

Business Outlook 2023

During the COVID-19 pandemic, the agriculture sector continued to grow and helped cushion the impact of the disaster. It was one of the three business sectors that managed to grow positively and helped most of the population to survive during the pandemic. In 2022, the agriculture sector is expected to grow stronger, largely determined by weather factors. This is the reason for the slowdown in agriculture growth in 2021 to 1.8%. In 2022, the agriculture sector is expected to grow in the range of 1.1%-1.4%.

Meanwhile, the performance of the forestry and fisheries sub-sectors is still restrained due to the impact of slowing logistics that occurred in 2021. On the other hand, the plantation sub-sector, especially palm oil, can expand due to an increase in demand for processed products to fulfill export needs.

The impact of the ongoing Russia-Ukraine conflict will likely support high raw material prices, at least for 2022-2025. High energy production prices will increase production costs, which will have an effect in the short and medium term. From high levels in 2022, plant prices will fall in 2023-2024 and generally remain the same over the forecast period. Such high feedstock costs are likely to impact urea production in high-cost regions, namely Europe and Ukraine, which will continue to stop urea production during the 2022-2035 period.

With the likely absence of tonnage from China and Ukraine and potential disruptions in Russian exports in the short and medium term, urea supply is likely to remain relatively tight in 2022-2025 albeit offset by urea capacity additions. The first three years of the forecast period will see the results of the current investment cycle and will be characterized by further capacity (excluding China) with a total capacity of 13.2 million tons/year expected to grow between 2022-2024, by an average of 4.4 million tons/year.

GRAFIK UREA *SUPPLY/DEMAND OUTLOOK–GLOBAL BALANCE*
Urea Supply/Demand Outlook-Global Balance Chart

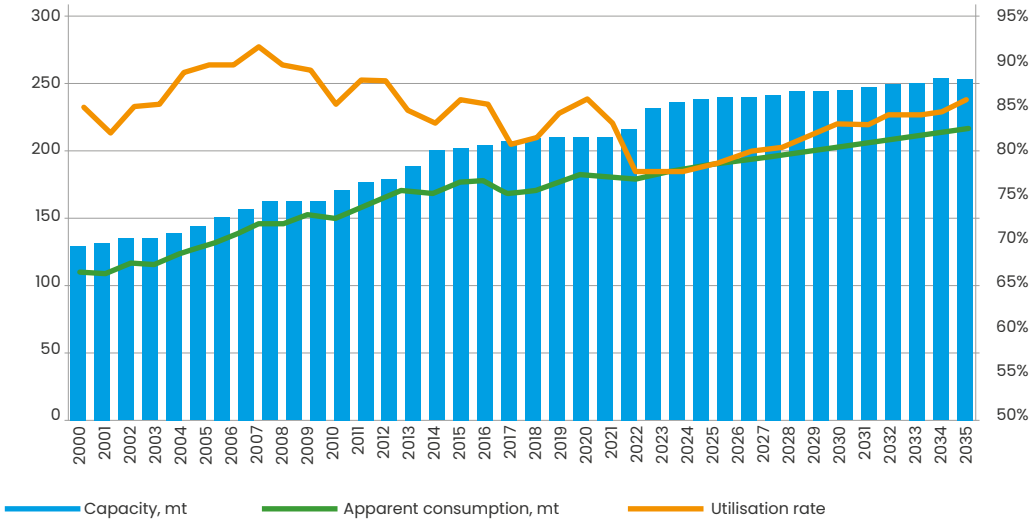

Sumber: Fertecon Outlook Januari 2022
Source: Fertecon Outlook January 2022

GRAFIK *DEMAND OUTLOOK* 2021-2023, *MILLION TONNES*
Chart Demand Outlook 2021-2023, Million Tonnes

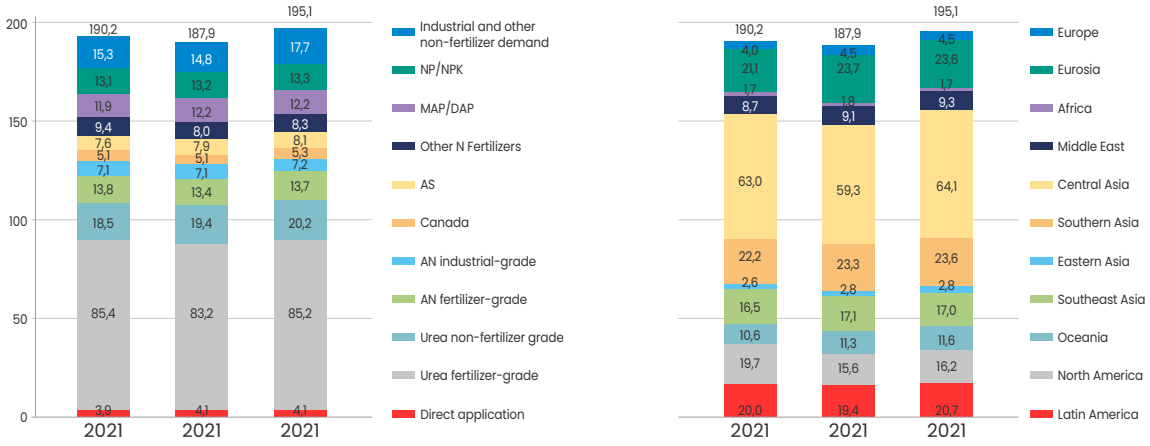

Sumber: Fertecon Ammonia Outlook Mei 2022
Source: Fertecon Ammonia Outlook May 2022

Total permintaan untuk amoniak diestimasikan tumbuh, dari 191,8 juta ton di tahun 2021 menjadi 193,3 juta ton di tahun 2022 dan 197,6 juta ton di tahun 2023. Permintaan pupuk untuk amoniak mencapai 146,2 juta ton pada tahun 2021. Pada tahun 2022 permintaan amoniak untuk pupuk diperkirakan turun sebesar 0,8%, menjadi 145,1 juta ton yang mencerminkan respons permintaan terhadap harga yang meroket, setelah peningkatan >2% pada tahun 2020.

Total demand for ammonia is estimated to grow, from 191.8 million tons in 2021 to 193.3 million tons in 2022 and 197.6 million tons in 2023. Fertilizer demand for ammonia reached 146.2 million tons in 2021. In 2022 ammonia demand for fertilizer is expected to decline by 0.8%, to 145.1 million tonnes reflecting the demand response to skyrocketing prices, after an increase of >2% in 2020. Non-fertilizer demand for ammonia reached 41.1 million tons in

Non permintaan pupuk untuk amoniak mencapai 41,1 juta ton pada tahun 2021. Segmen ini terus tumbuh sebesar 6,3% menjadi 43,7 juta ton pada tahun 2022, dan sebesar 3,9% menjadi 45,5 Mt pada tahun 2023, mencerminkan pemulihan pasca-Covid.

Harga komoditas amoniak menunjukkan tren pertumbuhan harga yang sesuai dengan prakiraan untuk harga bahan baku/energi (termasuk minyak Brent dan gas alam TTF). Fluktuasi siklus tersebut berkaitan dengan penilaian siklus permintaan dan penawaran dengan mempertimbangkan penurunan permintaan akibat krisis tahun 2020 dan pemulihan ekonomi setelahnya.

Sebagai sektor yang tetap tumbuh positif di tahun 2022, sektor pertanian harus mampu meningkatkan Output produksinya di tengah berbagai tantangan struktural yang masih ada. Tantangan tersebut meliputi faktor alam yang mengakibatkan turunnya produktivitas akibat banjir, kekeringan, serta serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), kondisi geopolitik dunia yang tidak stabil, sehingga memengaruhi produksi dan rantai pasokan pangan global. Tantangan lainnya sektor pertanian dan perikanan yang dihadapkan pada kondisi pandemi COVID-19 yang mengancam ketersediaan pangan masyarakat.

Maka dari itu, Pemerintah menaruh perhatian pada sektor ini untuk memastikan penyediaan pangan yang memadai dan dapat mendorong peningkatan produktivitas. Pengembangan konsep kelompok usaha (*Grup of Enterprises*) dan *food estate* diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi petani sehingga dapat merasakan hasil yang lebih tinggi. Di sisi lain, peningkatan proses mekanisasi dan penggunaan teknologi dapat terus ditingkatkan untuk mendorong efisiensi produk.

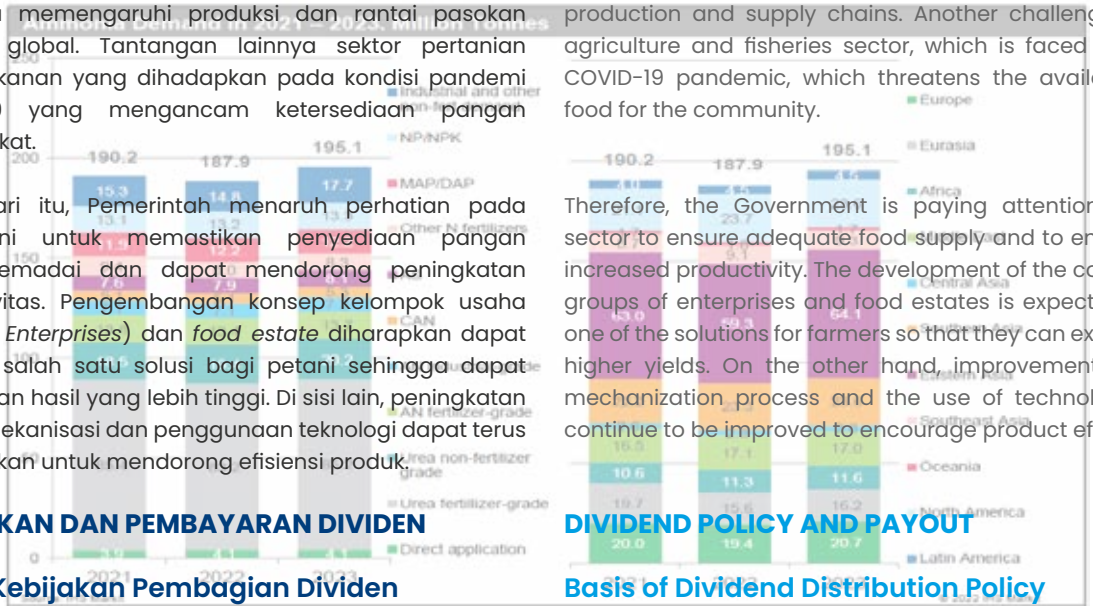

KEBIJAKAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN

Dasar Kebijakan Pembagian Dividen

Manajemen mengusulkan dividen berdasarkan kinerja Perusahaan selama periode tertentu kepada Pemegang Saham. Selanjutnya, Pemegang Saham berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memutuskan dividen yang harus dibayarkan PT Pupuk Indonesia (Persero). Dividen hanya dapat dibagikan jika Perusahaan memiliki saldo laba ditahan yang positif.

Pembagian Dividen Tahun 2022 dan Historikalnya

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pupuk Indonesia (Persero) tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan

2021. The segment continued to grow by 6.3% to 43.7 million tons in 2022, and by 3.9% to 45.5 Mt in 2023, reflecting the post-Covid recovery.

Ammonia commodity prices show a price growth trend in line with forecasts for feedstock/energy prices (including Brent oil and TTF natural gas). The cyclical fluctuations are related to the assessment of the supply and demand cycle taking into account the decline in demand due to the 2020 crisis and the economic recovery thereafter.

As a sector that continues to grow positively in 2022, the agricultural sector must be able to increase its production output amidst various structural challenges that remain. These challenges include natural factors that result in decreased productivity due to floods, droughts, and attacks by plant disrupting organisms (OPT), unstable world geopolitical conditions that affect global food production and supply chains. Another challenge is the agriculture and fisheries sector, which is faced with the COVID-19 pandemic, which threatens the availability of food for the community.

Therefore, the Government is paying attention to this sector to ensure adequate food supply and to encourage increased productivity. The development of the concept of groups of enterprises and food estates is expected to be one of the solutions for farmers so that they can experience higher yields. On the other hand, improvements in the mechanization process and the use of technology can continue to be improved to encourage product efficiency.

DIVIDEND POLICY AND PAYOUT

Basis of Dividend Distribution Policy

Management proposes dividends based on the Company's performance over a certain period to Shareholders. Furthermore, Shareholders based on the General Meeting of Shareholders (GMS) decide the dividends to be paid by PT Pupuk Indonesia (Persero). Dividends can only be distributed if the Company has a positive retained earnings balance.

Dividend Distribution in 2022 and its History

Based on the decision of the General Meeting of Shareholders (GMS) of PT Pupuk Indonesia (Persero) regarding the Approval of the Annual Report and Ratification

Tahun Buku 2021, pemegang saham menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2021 yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan sebesar Rp5.321.127 juta (lima triliun tiga ratus dua puluh satu miliar seratus dua puluh tujuh juta rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

of the Financial Statements for the 2021 Financial Year, the shareholders approved the determination of the use of net profit for the 2021 financial year attributable to Owners of the Company's Parent Entity of Rp5,321,127 million (five trillion three hundred twenty one billion one hundred twenty seven million rupiah), with the following composition:

laba Bersih yang Diatribusikan Kepada Entitas Induk tahun 2021 (Rp Juta)	5.321.127	Net Income Attributable to Parent Entity in 2021 (Rp Million)
Dividen kas yang dibagikan (jumlah dividen yang didistribusikan) (Rp Juta)	750.000	Cash dividends distributed (total dividends distributed) (Rp Million)
Rasio pembayaran dividen (persentase laba bersih yang diatribusikan kepada entitas induk tahun 2021 yang dibagikan sebagai dividen) (%)	14,09	Dividend payout ratio (percentage of net profit attributable to the parent entity in 2021 distributed as dividends) (%)
Nilai dividen kas per lembar saham (Rp)	30.000	Cash dividend value per share (Rp)
Tanggal pengumuman	29 Juni 2022 June 29, 2022	Date of announcement
Tanggal pembayaran	28 Juli 2022 July 28, 2022 29 Agustus 2022 August 29, 2022 29 September 2022 September 29, 2022	Payment date

Pembagian dan Pembayaran Dividen tahun 2018 hingga 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Dividend Distribution and Payment from 2018 to 2022 can be seen in the table below.

Tahun Pembagian Year of Sharing	**Tahun Buku Dividen** Dividend Year	**Tanggal Pengumuman** Announcement Date	**Tanggal Pembayaran** Payment Date	**Dividen Kas yang Dibagikan (Rp Juta)** Cash Dividends Distributed (Rp Million)	**Dividen per Lembar Saham (Rp/lembar saham)** Dividend per Share (Rp/share)	**Rasio Pembagian Dividen** Dividend Distribution Ratio **(%)**
2022	2021	29 Juni 2022 June 29, 2022	28 Juli 2022 29 Agustus 2022 29 September 2022 July 28, 2022 August 29, 2022 September 29, 2022	750.000	30.000	14,09
2021	2020	30 Juni 2021 June 30, 2021	29 Juli 2021 30 Agustus 2021 29 September 2021 July 29, 2021 August 30, 2021 September 29, 2021	588.030	23.521	25,16
2020	2019	4 Agustus 2020 August 4, 2020	2 September 2020 2 Oktober 2020 2 November 2020 September 2, 2020 October 2, 2020 November 2, 2020	973.500	38.940	26,73

Tahun Pembagian Year of Sharing	Tahun Buku Dividen Dividend Year	Tanggal Pengumuman Announcement Date	Tanggal Pembayaran Payment Date	Dividen Kas yang Dibagikan (Rp Juta) Cash Dividends Distributed (Rp Million)	Dividen per Lembar Saham (Rp/lembar saham) Dividend per Share (Rp/share)	Rasio Pembagian Dividen Dividend Distribution Ratio (%)
2019	2018	16 Mei 2019 May 16, 2019	14 Juni 2019 16 Juli 2019 16 Agustus 2019 June 14, 2019 July 16, 2019 August 16, 2019	1.045.119	41.805	25,00
2018	2017	8 Mei 2018 May 8, 2018	8 Juni 2018 6 Juli 2018 8 Agustus 2018 June 8, 2018 July 6, 2018 August 8, 2018	768.850	59.601	25,00

PAJAK DAN KONTRIBUSINYA BAGI NEGARA

Pajak yang dibayarkan Perusahaan setiap tahun adalah Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan), Pajak Penghasilan Karyawan (PPh Karyawan), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta pajak lainnya. Berikut disampaikan besaran pajak yang dibayarkan Perusahaan di tahun 2021 dan 2022.

TAX AND ITS CONTRIBUTION TO THE STATE

The taxes paid by the Company every year are Corporate Income Tax (PPh Badan), Employee Income Tax (PPh Karyawan), Value Added Tax (PPN) and other taxes. The following is the amount of tax paid by the Company in 2021 and 2022.

Perihal	2022 (Rp juta | Rp million)	2021 (Rp juta | Rp million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		Subject
			Nominal (Rp juta | Rp million)	Persentase Percentage (%)	
Pajak Bumi dan Bangunan	91.202	76.543	14.659	19,15	Land and Building Tax
Pajak dan Retribusi Daerah	70.264	48.719	21.545	44,22	Local Taxes and Levies
Pajak Penghasilan*	5.346.611	1.996.314	3.350.297	167,82	Income Tax*
PPN**	2.372.449	4.001.541	(1.629.093)	-40,71	VAT**
Bea dan Pajak Lainnya	333.655	156.653	177.002	112,99	Other Duties and Taxes
Jumlah	**7.067.898**	**6.279.771**	**1.934.410**	**30,80**	**Total**

*) Terdiri dari PPh Wajib Pungut dan PPh Wajib Bayar
**) Terdiri dari Kurang Bayar PPN Masa, PPN dipungut oleh WAPU

*) Consists of Income Tax Collector and Income Tax Payer.
**) Consists of Period VAT Underpayment, VAT collected by WAPU

Pembayaran pajak kepada negara pada tahun 2022 meningkat 30,8% atau setara dengan Rp1,934 miliar dibandingkan pembayaran pajak tahun 2021. Upaya Pengendalian Perpajakan tahun 2022 PI Grup dilakukan melalui peningkatan Aspek *Tax Compliance* dan Integrasi Data Perpajakan.

Tax payments to the state in 2022 increased by 30.8% or equivalent to Rp1.934 billion compared to tax payments in 2021. PI Group's 2022 Tax Control Efforts are carried out through improving Tax Compliance Aspects and Tax Data Integration.

PERKEMBANGAN DIVIDEN KAS YANG DIBAGIKAN TAHUN 2018-2022
Development of Cash Dividends Distributed in 2018-2022

Rp juta | Rp million

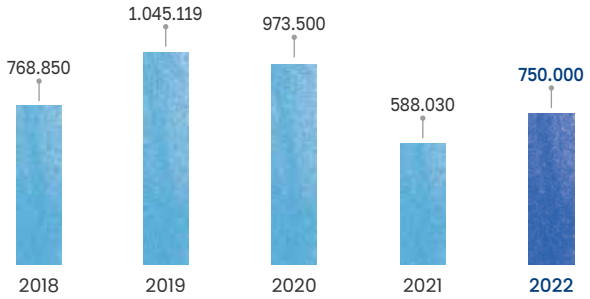

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Informasi tentang Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham

Hingga akhir tahun 2022 Perusahaan tidak melaksanakan penawaran umum saham perdana. Dengan demikian tidak terdapat informasi terkait realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham.

Informasi tentang Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi

REALIZATION OF THE USE OF PROCEEDS FROM THE PUBLIC OFFERING

Information on the Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering of Shares

Until the end of 2022, the Company did not conduct an initial public offering of shares. Therefore, there is no information related to the realization of the use of proceeds from the public offering.

Information on the Realization of the Use of Proceeds from the Bond Public Offering

Subjek Subject	**Obligasi Berkelanjutan 1 Tahap I Tahun 2017** Shelf Registration Bond 1 Phase I Year 2017	**Obligasi Berkelanjutan 1 Tahap II Tahun 2017** Shelf Registration Bond 1 Phase II Year 2017	**Obligasi Berkelanjutan 2 Tahap 1** Shelf Registration Bond 2 Phase 1	**Obligasi Berkelanjutan 2 Tahap** Shelf Registration Bond 2 Phase
Penggunaan Dana Use of Funds	16% *refinancing* Obligasi I Tahun 2014 Seri A 16% refinancing of Bonds I Year 2014 Series A	23% *refinancing* pinjaman perbankan PT Pupuk Kalimantan Timur 23% refinancing of bank loan PT Pupuk Kalimantan Timur	33% *refinancing* Perbankan KI Amurea II dan *Revamping* PA PT Petrokimia Gresik 33% refinancing of KI Amurea II Banking and PT Petrokimia Gresik PA Revamping	*Refinancing* atas KI Perbankan Amurea II PT Petrokimia Gresik Refinancing of Amurea II Banking KI of PT Petrokimia Gresik
	84% *refinancing* pinjaman perbankan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 84% refinancing of bank loan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	12% *refinancing* pinjaman perbankan PT Pupuk Kujang 12% refinancing of PT Pupuk Kujang's bank loan	26% *refinancing* Kredit Perbankan Modal Kerja PT Pupuk Iskandar Muda 26% refinancing of Working Capital Banking Loans PT Pupuk Iskandar Muda	*Refinancing* Pinjaman Perbankan PT Pupuk Indonesia Logistik Refinancing of PT Pupuk Indonesia Logistik's Banking Loan
		19% *refinancing* pinjaman perbankan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 19% refinancing of bank loan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	41% *refinancing* Pinjaman Modal Kerja PT Rekayasa Industri yang berasal dari Obligasi Berkelanjutan I Tahap II 41% refinancing of PT Rekayasa Industri's Working Capital Loan from Shelf Registration Bond I Phase II	

Subjek Subject	Obligasi Berkelanjutan 1 Tahap I Tahun 2017 Shelf Registration Bond 1 Phase I Year 2017	Obligasi Berkelanjutan 1 Tahap II Tahun 2017 Shelf Registration Bond 1 Phase II Year 2017	Obligasi Berkelanjutan 2 Tahap 1 Shelf Registration Bond 2 Phase 1	Obligasi Berkelanjutan 2 Tahap Shelf Registration Bond 2 Phase
		6% *refinancing* pinjaman 6% loan refinancing		
		13% *refinancing* pinjaman perbankan PT Petrokimia Gresik 13% bank loan refinancing PT Petrokimia Gresik		

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI USAHA, AKUISISI, DAN/ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

Sepanjang tahun 2022, Perusahaan tidak melakukan kegiatan yang bersifat material di bidang investasi, ekspansi, akuisisi, maupun restrukturisasi utang atau modal.

MATERIAL INFORMATION REGARDING INVESTMENT, BUSINESS EXPANSION, ACQUISITION, AND/OR DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING

Throughout 2022, the Company did not carry out any material activities in the fields of investment, expansion, acquisition, or debt or capital restructuring.

INFORMASI TRANSAKSI AFILIASI, TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI, SERTA TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

INFORMATION ON AFFILIATED TRANSACTIONS, TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES, AND TRANSACTIONS THAT CONTAIN CONFLICTS OF INTEREST

Ketentuan Pihak Berelasi

Related Party Provisions

Nama Name	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction
Pemerintah Indonesia The Government of Indonesia	Pemegang Saham Utama Ultimate Parent	Dividen, piutang dan penggantian biaya subsidi Dividend, receivables and reimbursement of subsidy
Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, Bank Syariah Indonesia	Entitas di bawah kendali Pemerintah Entities controlled by the Government	Penempatan giro, penempatan deposito berjangka yang tidak dibatasi penggunaannya, penempatan kas yang dibatasi penggunaannya, fasilitas *Non Cash loan*, fasilitas *Bill Purchasing Line*, fasilitas Kredit Modal Kerja, fasilitas *Supply Chain Financing*, fasilitas *Treasury Line* Placement of current accounts, placement of unrestricted time deposits, placement of restricted cash, Non Cash Loan facility, Bill Purchasing Line facility, Working Capital Loans facility, Supply Chain Financing Facility, Treasury Line facility

Nama Name	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction
PT Adhi Karya (Persero), PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Bhanda Graha Reksa (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Fokus Jasa Mitra, PT Graha Sarana Gresik, PT Iglas (Persero), PT Industri Gula Glenmore, PT Krakatau Engineering, PT Perkebunan Nusantara (Persero) dan entitas anak, PT Perta Arun Gas, PT Pertagas Niaga, PT Pertamina (Persero) dan entitas anak, PT Pertani (Persero), PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT Petro Graha Medika, PT Sang Hyang Seri, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan entitas anak, PT Trans Pacific Petrochemical Indotama, Yayasan Petrokimia Gresik, Koperasi Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik, Perum Bulog, Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur, Dana Pensiun Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") BNI, DPLK BRI, Tabungan Hari Tua ("YTHT") PIM, BRI Life, PT Pembangunan Perumahan, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero), PT Wijaya Karya (Persero), PT Pertamina Hulu Sanga Sanga, PT Pertamina Shipping International, PT Kaltim Medika Utama	Entitas di bawah kendali Pemerintah Entities controlled by the Government	Penjualan pupuk subsidi, penjualan pupuk non-subsidi, pendapatan jasa EPC, pendapatan jasa non-EPC, pendapatan jasa, penjualan produk non-pupuk, pembelian bahan baku, sewa, jasa pemeliharaan mekanik, pemakaian listrik, jasa pengangkutan gas dan pengelola aset program manfaat pasti. Subsidy fertilizer sales, non-subsidy fertilizer sales, revenue from EPC, revenue from non-EPC, rendering of services, non-fertilizer sales, purchase of raw material, rental, mechanic maintenance, electricities, gas transportation services and defined benefit plan asset manager.
PT Aneka Jasa Grhadika, MNK, PT Petrocentral, PT Gresik Cipta Sejahtera (Persero), PT Petrokopindo Cipta Selaras.	Entitas asosiasi Associates entity	Penjualan pupuk non-subsidi, penjualan non-pupuk, sewa dan pembelian non-bahan baku. Non-subsidy fertilizer sales, non-fertiliser sales, rental and purchase of non-raw materials.
PT Kaltim Jordan Abadi, PT Petro Jordan Abadi ("PJA"), RDMP Balikpapan JO	Ventura Bersama Joint Ventures	Penjualan non-pupuk, piutang usaha dan utang usaha. Non-fertilizer sales, trade receivables and trade payables.

Penjelasan Mengenai Kewajaran Transaksi

Kewajaran seluruh transaksi yang dilakukan Perusahaan dengan Pihak-pihak Berelasi telah diungkapkan pada laporan keuangan, dan telah sesuai dengan standar PSAK 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Semua transaksi dengan pihak yang berelasi, dilakukan dengan tingkat harga, persyaratan dan kondisi normal sebagaimana yang dilakukan dengan pihak ketiga dan telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan.

Explanation of Transaction Fairness

The fairness of all transactions entered into by the Company with Related Parties has been disclosed in the financial statements, and is in accordance with the standards of PSAK 7 concerning "Related Party Disclosures". All transactions with related parties are conducted at normal prices, terms and conditions as those with third parties and have been disclosed in the Company's consolidated financial statements.

Alasan Dilakukannya Transaksi

Seperti halnya transaksi dengan pihak ketiga, transaksi Perusahaan dengan Pihak Berelasi dilakukan sejalan dengan kebutuhan pengembangan operasional dan bisnis Perusahaan, serta prinsip saling membutuhkan antara Perusahaan dengan Pihak Berelasi.

Reason for Transaction

As with transactions with third parties, the Company's transactions with Related Parties are carried out in line with the Company's operational and business development needs, as well as the principle of mutual need between the Company and Related Parties.

Realisasi Saldo dan Transaksi Transaksi Pihak Berelasi

Balance Realization and Related Party Transactions

Saldo Pihak Berelasi dalam Aset	2022 Rp Juta Rp Million	2021 Rp Juta Rp Million	Persentase dari Jumlah Aset Percentage of Total Assets 2022 %	Persentase dari Jumlah Aset Percentage of Total Assets 2021 %	Related Party Balance in Assets
Kas dan Setara Kas	32.292.780	17.453.305	20,34	13,59	Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha-Bersih	544.004	851.990	0,34	0,66	Trade Receivable-Net
Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja	653.579	1.303.488	0,41	1,01	Gross Receivables to Employers
Total Aset dari Pihak-pihak Berelasi	33.490.363	19.608.783	21,100	15,26	Total Assets of Related Parties
Total Aset	158.720.507	128.463.172			Total Assets

Total saldo pihak berelasi dalam aset tahun 2022 sebesar Rp33,49 triliun atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp19,60 triliun. Meningkatnya saldo pihak berelasi dalam aset tahun 2022 terutama disebabkan lebih tingginya nilai kas dan setara kas, terutama yang berasal dari peningkatan penerimaan kas dari pelanggan.

The total balance of related parties in assets in 2022 amounted to Rp33.49 trillion or higher than in 2021 of Rp19.60 trillion. The increase in the balance of related parties in assets in 2022 was mainly due to the higher value of cash and cash equivalents, mainly from an increase in cash receipts from customers.

Saldo Pihak Berelasi dalam Liabilitas	2022 Rp Juta Rp Million	2021 Rp Juta Rp Million	Persentase dari Jumlah Aset Percentage of Total Assets 2022 %	Persentase dari Jumlah Aset Percentage of Total Assets 2021 %	Related Party Balance in Liabilities
Utang Usaha	1.383.595	279.646	2,05	0,49	Accounts Payable
Pekerjaan dalam Penyelesaian Kontrak Konstruksi dari Pelanggan	26.454	-	0,04	-	Construction Contract Work in Progress - Due from Customers
Total Liabilitas dari Pihak-Pihak Berelasi	**1.410.049**	**279.646**	**2,08**	**0,49**	**Total Liabilities from Related Parties**
Total Liabilitas	**67.560.207**	**56.523.196**			**Total Liabilities**

Total saldo pihak berelasi dalam liabilitas tahun 2022 sebesar Rp1,41 triliun atau lebih rendah dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp279,65 miliar lebih tingginya saldo pihak berelasi dalam liabilitas tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 terutama disebabkan meningkatnya utang usaha sebagai dampak dari naiknya harga bahan baku produk NPK.

The total balance of related parties in liabilities in 2022 amounted to Rp1.41 trillion or lower than in 2021 of Rp279.65 billion. The higher balance of related parties in liabilities in 2022 compared to 2021 was mainly due to the increase in trade payables as a result of the increase in raw material prices for NPK products.

Transaksi Pihak Berelasi dalam Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya	2022 Rp Juta Rp Million	2021 Rp Juta Rp Million	Persentase dari Jumlah Aset Percentage of Total Assets 2022 %	2021 %	Related Party Transactions in Sales and Other Business Income
Penjualan Produk	2.751.196	1.998.444	2,65	2,54	Sales of Products
Pengganti Biaya Subsidi	36.109.067	25.258.692	34,77	32,13	Reimbursement of subsidy from the Government of Indonesia
Pendapatan Jasa	2.073.564	2.700.542	2,00	3,44	Rendering of Services
Total Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya dari Pihak-Pihak Berelasi	**40.933.827**	**29.957.678**	**39,41**	**38,11**	**Total Sales and Other Operating Income from Related Parties**
Total Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya	**103.859.493**	**78.603.136**			**Total Sales and Other Operating Income**

Total penjualan dan pendapatan usaha lainnya dari pihak-pihak berelasi tahun 2022 sebesar Rp40,93 triliun naik 36,64% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai Rp29,96 triliun. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan penjualan kepada pihak berelasi domestik serta adanya kenaikan penggantian biaya subsidi kepada Pemerintah RI.

Total sales and other operating revenues from related parties in 2022 amounted to Rp40.93 trillion, up 36.64% compared to 2021 which reached Rp29.96 trillion. The increase was mainly influenced by an increase in sales to domestic related parties and an increase in reimbursement of subsidy costs to the Government of Indonesia.

Transaksi Pihak Berelasi dalam Beban Pokok Pendapatan	2022 Rp Juta Rp Million	2021 Rp Juta Rp Million	Persentase dari Jumlah Aset Percentage of Total Assets 2022 %	2021 %	Related Party Transactions in Cost of Revenue
Pembelian Barang dan Jasa dari Pihak Berelasi	27.667.391	22.339.337	39,36	35,20	Purchase of Goods and Services from Related Parties
Total Beban Pokok Pendapatan dari Pihak-pihak Berelasi	**27.667.391**	**22.339.337**	**39,36**	**35,20**	**Total Cost of Revenue from Related Parties**
Total Beban Pokok Pendapatan	**70.288.172**	**63.469.789**			**Total Cost of Revenue**

Total pembelian barang dan jasa dari pihak berelasi pada tahun 2022 sebesar Rp27,67 Triliun, meningkat 23,85% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai Rp22,34 trilun. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan harga beli bahan baku produk pupuk, baik gas maupun non gas yang lebih tinggi dari tahun 2021 dan tarif jasa seperti tarif angkutan dan logistik untuk kebutuhan operasional perusahaan.

Total purchases of goods and services from related parties in 2022 amounted to Rp27.67 trillion, an increase of 23.85% compared to 2021 which reached Rp22.34 trillion. The increase was mainly due to an increase in the purchase price of raw materials for fertilizer products, both gas and non-gas, which was higher than in 2021 and service rates such as transportation and logistics rates for the company's operational needs.

Perihal	2022 Rp Juta Rp Million	2021 Rp Juta Rp Million	Persentase dari Jumlah Aset Percentage of Total Assets 2022 %	 2021 %	Subject
Gaji dan Imbalan Kerja					**Salaries and Employee Benefits**
Dewan Komisaris	15.227	14.164	0,25	0,35	Board of Commissioners
Direksi	30.031	24.878	0,50	0,61	Directors
Total Personel Manajemen Kunci	**45.308**	**39.042**	**0,76**	**0,97**	**Total Key Management Personnel**
Total Beban Administrasi dan Umum	**5.956.428**	**4.023.124**			**Total Administration and General Expenses**

Kebijakan Perusahaan Terkait Mekanisme *Review* atas Transaksi serta Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Seluruh transaksi pihak berelasi/afiliasi merupakan transaksi afiliasi yang dilakukan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Sebagaimana telah disampaikan dalam Laporan Keuangan Teraudit tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC), Perusahaan telah mengungkapkan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan pada PSAK No. 7 (Revisi 2015).

Tidak terdapat transaksi material terkait transaksi pihak berelasi yang terjadi di tahun 2022. PTPI bukan merupakan perusahaan yang memperdagangkan ekuitasnya kepada umum, seluruh saham PTPI dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Dengan demikian seluruh transaksi telah diketahui oleh pemegang saham.

Company Policy Related to Review Mechanism of Transactions and Fulfillment of Related Rules and Regulations

All related party/affiliate transactions are affiliated transactions that are carried out in the context of generating business income and are carried out routinely, repeatedly, and/or continuously. As presented in the Audited Financial Statements for the fiscal year 2022 audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC), the Company has disclosed transactions with related parties as defined in PSAK No. 7 (Revised 2015).

There were no material transactions related to related party transactions that occurred in 2022. PTPI is not a company that trades its equity to the public, all PTPI shares are owned by the Republic of Indonesia. Therefore, all transactions are known by the shareholders.

Pernyataan Direksi bahwa Transaksi telah Memenuhi Prosedur Memadai dan Sesuai Praktik Bisnis yang Berlaku Umum

Direksi memandang bahwa transaksi dengan pihak berelasi/terafiliasi telah memenuhi prosedur memadai serta sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum. Seluruh transaksi pada tahun 2022 dilakukan dengan memperhatikan praktik bisnis yang berlaku umum dan prinsip *arm's length* (prinsip transaksi yang wajar).

Selain itu, seluruh transaksi dengan Pihak Berelasi tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang independent. Transaksi tersebut juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Statement of the Board of Directors that the Transaction has Fulfilled Adequate Procedures and in accordance with Generally Accepted Business Practices

The Board of Directors considers that transactions with related/affiliated parties have fulfilled adequate procedures and are in accordance with generally accepted business practices. All transactions in 2022 were carried out with due observance of generally accepted business practices and the arm's length principle.

In addition, all transactions with related parties have been audited by an independent public accounting firm. The transactions are also in accordance with the prevailing laws and regulations.

Rujukan di Laporan Keuangan

Pengungkapan terkait dengan transaksi afiliasi ini juga diuraikan pada Laporan Keuangan yang telah diaudit seperti terdapat dalam Laporan Tahunan ini pada halaman 264.

References in Financial Statements

Disclosures related to this affiliated transaction are also described in the audited Financial Statements as contained in this Annual Report on page 264.

INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN YANG BERSIFAT LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

Sepanjang tahun 2022, tidak terdapat informasi keuangan yang dilaporkan mengandung kejadian bersifat luar biasa dan jarang terjadi.

FINANCIAL INFORMATION CONTAINING EXTRAORDINARY AND INFREQUENT EVENTS

During 2022, there was no financial information reported that contained extraordinary and infrequent events.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH TERHADAP PERUSAHAAN

CHANGES IN LAWS AND REGULATIONS THAT AFFECT THE COMPANY

Nomor dan Nama Peraturan dan/atau Perundang-undangan yang Diberlakukan Number and Name of Regulations and/or Legislation Enacted	**Penjelasan atas Peraturan dan/atau Perundang-undangan yang Diberlakukan** Explanation of Enacted Laws and/or Regulations	**Dampak terhadap Perusahaan** Impact on the Company
Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Regulation of the Minister of Agriculture No. 10 Year 2022 on the Procedures for Determining the Allocation and Highest Retail Price of Subsidized Fertilizers in the Agricultural Sector.	- Perubahan jenis pupuk bersubsidi menjadi 2 (dua) jenis pupuk yaitu UREA dan NPK. - Perubahan komoditi penerima pupuk bersubsidi menjadi 9 (sembilan) komoditi yaitu padi, jagung kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, kakao, kopi, dan tebu rakyat. - Changes in the type of subsidized fertilizer into 2 (two) types of fertilizer, namely UREA and NPK. - Changes in commodities receiving subsidized fertilizers to 9 (nine) commodities, namely Rice, Soybean Corn, Onion, Garlic, Chili, Cocoa, Coffee, and Sugarcane.	Tidak dapat menyalurkan pupuk bersubsidi dari jenis SP-36, ZA, Organik, Organik Cair yang telah diproduksi sebelum terbitnya aturan tersebut. Cannot distribute subsidized fertilizers of the SP-36, ZA, Organic, Liquid Organic types that have been produced before the issuance of the regulation.

Nomor dan Nama Peraturan dan/atau Perundang-undangan yang Diberlakukan Number and Name of Regulations and/or Legislation Enacted	**Penjelasan atas Peraturan dan/atau Perundang-undangan yang Diberlakukan** Explanation of Enacted Laws and/or Regulations	**Dampak terhadap Perusahaan** Impact on the Company
Keputusan Menteri Pertanian No. 771/KPTS/SR.320/M/12/2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022 *juncto* Keputusan Menteri Pertanian No. 05/KPTS/RC.210/B/09/2022 tentang Realokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022 *juncto* Keputusan Menteri Pertanian No. 06/KPTS/RC.210/B/09/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian No. 05/KPTS/RC.210/B/09/2022 *juncto* Keputusan Menteri Pertanian No. 08/KPTS/RC.210/B/12/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pertanian No. 05/KPTS/RC.210/B/09/2022. Decree of the Minister of Agriculture No. 771/KPTS/SR.320/M/12/2021 concerning the Determination of Allocation and Highest Retail Price of Subsidized Fertilizers for the Agricultural Sector for Fiscal Year 2022 juncto Decree of the Minister of Agriculture No. 05/KPTS/RC.210/B/09/2022 concerning Reallocation of Subsidized Fertilizers for the Agricultural Sector for Fiscal Year 2022 juncto Decree of the Minister of Agriculture No. 06/KPTS/RC.210/B/09/2022 concerning Second Amendment to Decree of the Minister of Agriculture No. 05/KPTS/RC.210/B/09/2022/B/09/2022 concerning Amendments to the Decree of the Minister of Agriculture No. 05/KPTS/RC.210/B/09/2022 juncto Decree of the Minister of Agriculture No. 08/KPTS/RC.210/B/12/2022 concerning the Second Amendment to the Decree of the Minister of Agriculture No. 05/KPTS/RC.210/B/09/2022.	Mengatur syarat penebusan pupuk, alokasi, HET. Regulate fertilizer redemption requirements, allocation, price ceiling.	Serapan petani sesuai dengan kebutuhan petani per wilayah per provinsi. Farmer uptake in accordance with farmer needs per region per province.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN DAMPAKNYA BAGI LAPORAN KEUANGAN

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES AND THEIR IMPACT ON FINANCIAL STATEMENTS

Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Signifikan	Summary of Significant Accounting Policies
a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian	a. Basis of preparation of the consolidated financial statements
Perubahan pada PSAK dan ISAK	Changes to the SFAS and IFAS
Penerapan dari standar, interpretasi, amandemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2022 yang tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi entitas dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya:	The adoption of the following standards, interpretations, amendments and annual improvements which are effective from January 1, 2022 did not result in substantial changes to the entity's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior years:
- Amandemen PSAK 22: Bisnis Kombinasi tentang referensi ke kerangka konseptual - Amandemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya memenuhi kontrak - Penyesuaian tahunan PSAK 69: Agrikultur - Penyesuaian tahunan PSAK 71: Instrumen Keuangan - Penyesuaian tahunan PSAK 73: Sewa	- Amendment of SFAS 22: Business Combination regarding reference to the conceptual framework - Amendment of SFAS 57: Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets on Onerous Contracts - Cost of fulfilling contracts - Annual improvements of SFAS 69: Agriculture - Annual improvements of SFAS 71: Financial Instruments - Annual improvements of PSAK 73: Leases
Standar dan interpretasi standar akuntansi baru tertentu telah dikeluarkan tetapi tidak wajib diterapkan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan belum diterapkan secara dini oleh Grup adalah sebagai berikut:	Certain new standards, amendments and interpretations have been published that are not mandatory for the year ended December 31, 2022 and have not been early adopted by the Group are as set out below:

Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Signifikan	Summary of Significant Accounting Policies
- Amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan - Klasifikasi Kewajiban Lancar atau Tidak Lancar - Amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan - Pengungkapan Kebijakan Akuntansi - Amandemen PSAK 16: Aset Tetap tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan - Amandemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan - Definisi Estimasi Akuntansi - Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan - Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal - PSAK 74: Kontrak Asuransi - Amandemen PSAK 74: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 - Informasi Komparatif - Amandemen PSAK 73: Sewa tentang jual dan sewa balik - Revisi PSAK 107: Akuntansi Ijarah - Amandemen dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2023, kecuali PSAK 74 dan amandemen PSAK 74 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, tetapi penerapan dini diperkenankan.	- Amendment of SFAS 1: Presentation of Financial Statements - Classification of Liabilities as Current or Non-Current - Amendment of SFAS 1: Presentation of Financial Statements - Disclosure of Accounting Policies - Amendment of SFAS 16: Fixed Assets regarding proceeds before intended use - Amendment of SFAS 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors - Definition of Accounting Estimates - Amendment of SFAS 46: Income Taxes - Deferred Tax related to Assets and Liabilities Arising from Single Transaction - SFAS 74: Insurance Contracts - Amendment of SFAS 74: Insurance Contracts regarding Initial Application of SFAS 74 and SFAS 71 - Comparative Information - Amendment of SFAS 73: Leases regarding sale and lease back - Revision to SFAS 107: Ijarah Accounting - Amendments and annual improvements to the above accounting standards are effective from January 1, 2023, except for SFAS 74 and amendments of SFAS 74 which are effective from January 1, 2025, but early adoption is permitted.
Pada tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Grup sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan amandemen terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.	As at the issuance date of these consolidated financial statements, the Group is evaluating the potential impact of these new standards and amendments on the Group's consolidated financial statements.

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

Sebagai BUMN, Perusahaan memiliki perangkat untuk melakukan pengukuran Tingkat Kesehatan Perusahaan yang mengacu pada Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara. Tingkat kesehatan Perusahaan diukur melalui beberapa indikator, yakni aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi.

COMPANY HEALTH LEVEL

As an SOE, the Company has a tool to measure the Company's Health Level which refers to the Decree of the Minister of SOEs No. KEP- 100/MBU/2002 dated June 4, 2002 concerning Health Level Assessment of State-Owned Enterprises. The Company's health level is measured through several indicators, namely financial aspects, operational aspects, and administrative aspects.

No.	Uraian	Bobot Weight	Realisasi Realization		Description
			2022	2021	
Aspek Keuangan					**Financial Aspects**
1	ROE	20,00	20,00	12,00	ROE
2	ROI	15,00	15,00	9,00	ROI
3	*Cash Ratio*	5,00	5,00	5,00	Cash Ratio
4	*Current Ratio*	5,00	5,00	5,00	Current Ratio
5	*Collection Period* (hari)	5,00	5,00	5,00	Collection Period (days)
6	Perputaran Persediaan (hari)	5,00	4,50	4,50	Inventory Turnover (days)
7	Perputaran Total Aset	5,00	3,00	3,00	Total Asset Turnover
8	Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Aset	10,00	8,50	8,50	Ratio of Total Own Capital to Total Assets
	Total Aspek Keuangan	**70,00**	**66,00**	**52,00**	**Total Financial Aspects**

No.	Uraian	Bobot Weight	Realisasi Realization		Description
			2022	2021	
Aspek Operasional					**Operational Aspects**
1	Pencapaian Produksi	5,00	4,00	5,00	Production Achievement
2	Pencapaian Efisiensi Bahan Baku Gas	5,00	4,00	4,00	Achievement of Raw Gas Efficiency
3	Produktivitas Tenaga Kerja	5,00	5,00	5,00	Labor Productivity
	Total Aspek Operasional	**15,00**	**13,00**	**14,00**	**Total Operational Aspects**
Aspek Administrasi					**Administrative Aspects**
1	Laporan Audit	3,00	3,00	2,00	Audit Report
2	Rancangan RKAP	3,00	3,00	3,00	Draft RKAP
3	Laporan Periodik	3,00	3,00	3,00	Periodic Report
4	Kinerja PKBL				PKBL Performance
	Efektivitas Penyaluran dana	3,00	3,00	3,00	Effectiveness of Fund Distribution
	Kolektabilitas Penyaluran Pinjaman	3,00	3,00	3,00	Loan Collectability
	Total Aspek Administrasi	**15,00**	**15,00**	**14,00**	**Total Administration Aspect**
	Total Skor	**100,00**	**94,00**	**80,00**	**Total Score**
	Kategori		"AA"	"A"	Category
	Tingkat Kesehatan		"Sehat" "Healthy"	"Sehat" "Healthy"	Health Level

Secara keseluruhan, realisasi skor tingkat Kesehatan Perusahaan pada tahun 2022 adalah sebesar 90,00 dengan kualifikasi "AA" dan Sehat. Pencapaian skor tingkat kesehatan tahun 2022 lebih tinggi dari capaian tahun 2021 sebesar 80,00, terutama disebabkan karena tingginya capaian laba tahun 2022 dibandingkan dengan tahun2021 sehingga mampu meningkatkan rasio ROE dan ROI.

Overall, the realization of the Company's Health level score in 2022 was 90.00 with the qualification "AA" and Healthy. The achievement of the health level score in 2022 is higher than the achievement in 2021 of 80.00, mainly due to the high achievement of profit in 2022 compared to 2021 so as to increase the ROE and ROI ratios.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan di Tahun 2022

Mengacu pada perkembangan tahun buku 2022, ada sejumlah isu yang berpotensi mempengaruhi kinerja Perusahaan. Di antaranya adalah:

1. Tingginya harga komoditas internasional sehingga harga bahan baku non gas menjadi volatil;
2. Denda atas keterlambatan proyek Rekind;
3. Kondisi pandemi COVID-19 yang belum pulih sepenuhnya berpotensi mempengaruhi kinerja PI Grup, terutama pada segmen Jasa.

BUSINESS CONTINUITY INFORMATION

Matters that have the Potential to Significantly Affect the Company's Business Continuity in 2022

Referring to the development of the 2022 financial year, there are a number of issues that could potentially affect the Company's performance. Among them are:

1. High international commodity prices have made the price of non-gas raw materials volatile;
2. Penalty for delay in Rekind project;
3. The COVID-19 pandemic condition that has not fully recovered has the potential to affect the PI Group's performance, especially in the Services segment.

Assessment Manajemen atas Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan

Mengacu pada kondisi tahun 2022, peningkatan harga komoditas internasional berdampak pada harga bahan baku NPK yang tinggi. Kendati demikian perusahaan melakukan upaya untuk mengatasi hal tersebut dengan cara melakukan pengamanan kontrak jangka panjang untuk bahan baku berbasis fosfat untuk kebutuhan produksi NPK.

Pada saat bersamaan, pada segmen usaha di bidang jasa terdapat keterlambatan atas project Rekind yang berdampak pada timbulnya denda yang cukup signifikan. Dengan kondisi tersebut, Perusahaan berupaya melakukan Restrukturisasi Keuangan untuk memperbaiki kondisi keuangan Rekind sehingga proyek tersebut dapat diselesaikan.

Kondisi pemulihan pasca pandemi COVID-19 dan dinamika politik dan ekonomi global membuat perusahaan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengantisipasi lonjakan harga dan keterbatasan pasokan bahan baku. Perusahaan tetap optimistis dengan kemampuan kelangsungan usaha ke depan. Keyakinan itu, antara lain didukung oleh sumber daya manusia yang dimiliki Perusahaan serta kemampuan operasi yang *excellent*. Karena itulah, Perusahaan tidak melihat adanya dampak yang signifikan dan material yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha.

Asumsi yang Digunakan Manajemen dalam Melakukan *Assessment* atas Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan

Dalam melakukan *assessment* atas pontensi tantangan yang akan dialami, Perusahaan menggunakan sejumlah asumsi, baik dari internal maupun eksternal. Hal ini juga menjadi acuan yang digunakan pada rencana kerja 2023. Asumsi dimaksud adalah:

1. Perkembangan kurs rupiah, khususnya terhadap dolar Amerika Serikat;
2. Peraturan Pemerintah yang mengatur harga gas industri pupuk;
3. Harga amoniak dan urea sesuai asumsi yang digunakan dalam RKAP 2023 dan RJP 2023-2025;
4. Hasil pemeringkatan Perusahaan dan surat utang Pupuk Indonesia tahun 2022 dengan predikat: AAA";
5. Penyaluran pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan pemerintah;
6. Rencana produksi dan penjualan sesuai dengan RKAP 2023;

Management Assessment of Matters that have the Potential to Significantly Affect the Company's Business Continuity

Referring to the conditions in 2022, the increase in international commodity prices has an impact on the high price of NPK raw materials. However, the company made efforts to overcome this by securing long-term contracts for phosphate-based raw materials for NPK production needs.

At the same time, in the services business segment there was a delay in Rekind's project which resulted in a significant fine. Under these conditions, the Company seeks to conduct Financial Restructuring to improve Rekind's financial condition so that the project can be completed.

The recovery condition after the COVID-19 pandemic and the global political and economic dynamics have made the company apply the precautionary principle in anticipating price spikes and limited supply of raw materials. The Company remains optimistic about its ability to continue its business going forward. This confidence is supported, among others, by the Company's human resources and excellent operating capabilities. Therefore, the Company does not foresee any significant and material impact that may affect its business continuity.

Assumptions Used by Management in Assessing Matters that have the Potential to Significantly Affect the Company's Business Continuity

In assessing the potential challenges that will be experienced, the Company uses a number of assumptions, both internal and external. This is also the reference used in the 2023 work plan.

The assumptions are:

1. The development of the rupiah exchange rate, particularly against the US dollar;
2. Government regulations governing fertilizer industry gas prices;
3. Ammonia and urea prices are in line with the assumptions used in the 2023 RKAP and 2023-2025 RJP;
4. The results of the rating of the Company and Pupuk Indonesia's debt securities in 2022 with the predicate: AAA";
5. Distribution of subsidized fertilizer according to the allocation set by the government;
6. Production and sales plan in accordance with 2023 RKAP;

7. Rencana pengembangan di sektor pupuk (Pusri IIIB dan NPK *Chemical* PIM) serta diversifikasi produk Petrochemical (Pabrik *Soda Ash* PKG dan PKT).

PETA JALAN USAHA: RENCANA PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG

PT Pupuk Indonesia (Persero) telah Menyusun rencana pengembangan jangka panjang dalam bentuk roadmap Perusahaan. Secara garis besar, gambaran peta jalan tersebut digambarkan melalui grafis di bawah ini:

7. Development plans in the fertilizer sector (Pusri IIIB and NPK Chemical PIM) and Petrochemical product diversification (Soda Ash Plant PKG and PKT).

BUSINESS ROADMAP: LONG-TERM DEVELOPMENT PLAN

PT Pupuk Indonesia (Persero) has developed a long-term development plan in the form of a Company roadmap. Broadly speaking, the roadmap is depicted in the graphic below:

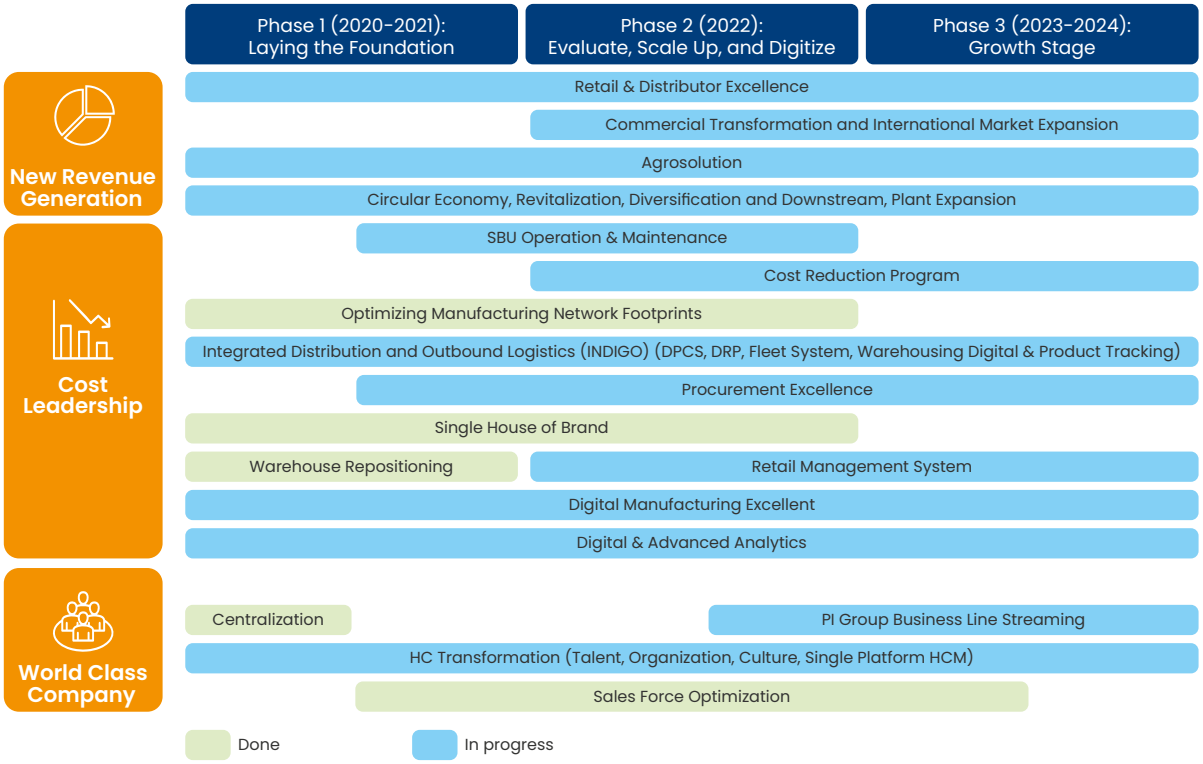

Halaman ini sengaja dikosongkan

This page is intentionally left blank

Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Human Resources Development

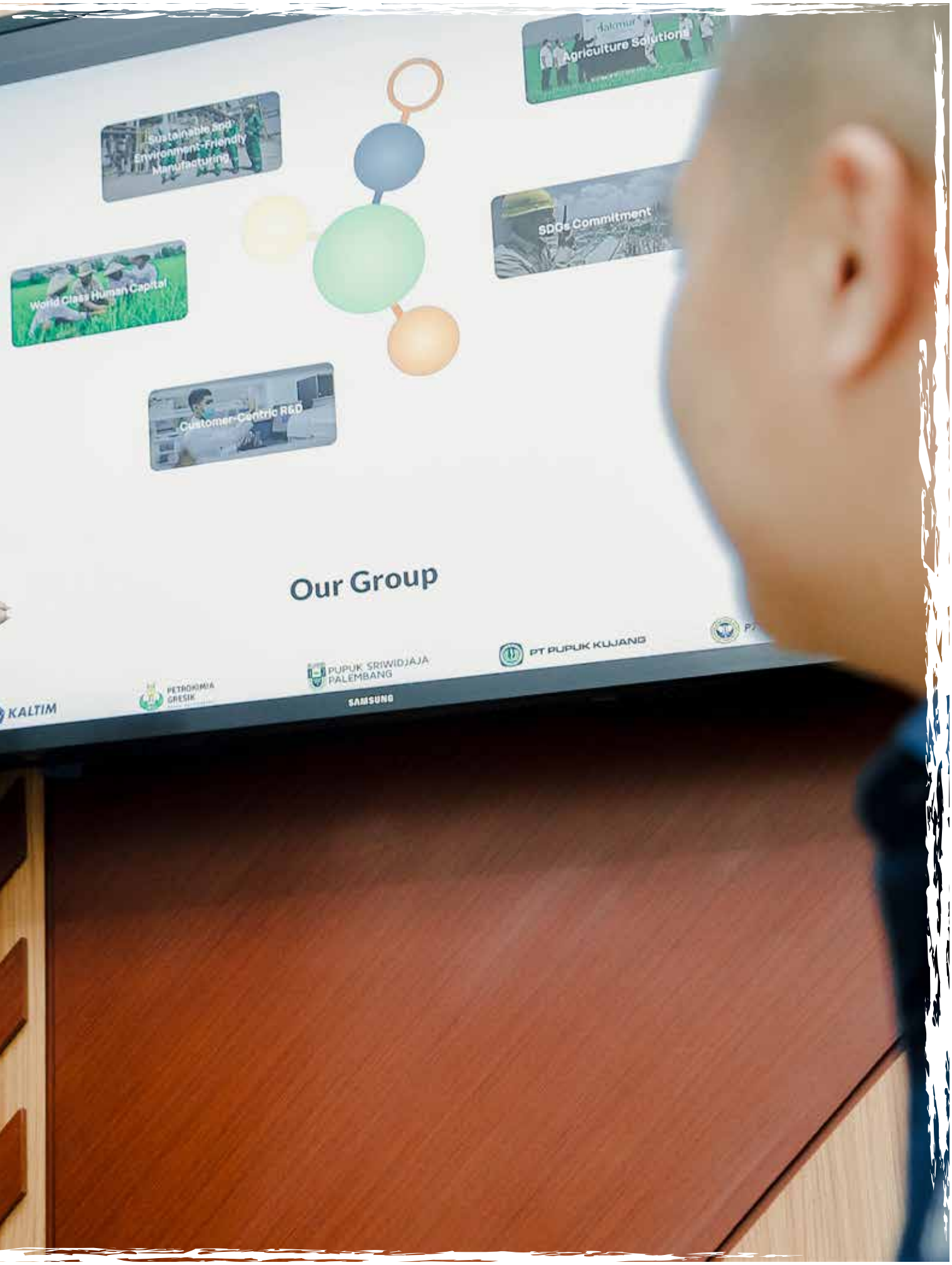
Agriculture Solutions
Sustainable and Environment-Friendly Manufacturing
SDGs Commitment
World Class Human Capital
Customer-Centric R&D
Our Group
PT PUPUK KUJANG
PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG
PETROKIMIA GRESIK
KALTIM
SAMSUNG

Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Human Resources Development

Strategi pengelolaan SDM di Perusahaan mengusung satu tema besar yaitu "*HR Transformation towards Human Experience Management (HXM) and World Class Talent*" yang tertuang dalam *Human Capital Management Grand Strategy & Roadmap* Pupuk Indonesia Group 2022-2027.

The HR management strategy in the Company carries one big theme, namely "HR Transformation towards Human Experience Management (HXM) and World Class Talent" as stated in the Human Capital Management Grand Strategy & Roadmap Pupuk Indonesia Group 2022-2027.

PT Pupuk Indonesia (Persero) ("PTPI", "Perusahaan") memandang bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset yang sangat penting dalam mendukung kinerja usaha Perusahaan secara berkesinambungan. PTPI berkomitmen untuk mengelola SDM secara tepat dan berkesinambungan sehingga mampu melahirkan talenta yang unggul dan berkualitas. Dengan demikian, SDM akan mendukung Perusahaan memenangkan persaingan di tengah lingkungan bisnis yang dinamis.

Dalam jangka panjang, kehadiran SDM yang unggul dan berkualitas tersebut akan mendukung pencapaian visi dan misi Perusahaan. Saat ini, PTPI telah memasukkan perencanaan di bidang SDM terintegrasi dengan rencana Perusahaan secara umum, termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan arah pembangunan bisnis Perusahaan dalam jangka panjang.

PTPI selalu melakukan kaji ulang terhadap kebijakan SDM setiap tahun. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan di lingkungan industri, sekaligus menciptakan keselarasan dengan rencana dan strategis Perusahaan, baik untuk jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Selain itu, Perusahaan terus melakukan upaya peninjauan ulang terhadap kebijakan di bidang SDM agar tercipta panduan pengelolaan SDM yang terkini dan selaras dengan visi, misi, sasaran, dan strategi Perusahaan. Inisiatif ini dijalankan guna mendukung program transformasi SDM yang sedang berlangsung di lingkungan Perusahaan

PT Pupuk Indonesia (Persero) ("PTPI", "the Company") views that Human Resources (HR) is a very important asset in supporting the Company's sustainable business performance. PTPI is committed to managing human resources appropriately and continuously so as to be able to produce superior and quality talents. Thus, HR will support the Company to win the competition in the midst of a dynamic business environment.

In the long run, the presence of superior and qualified human resources will support the achievement of the Company's vision and mission. Currently, PTPI has included HR planning integrated with the Company's plans in general, including the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and the direction of the Company's business development in the long term.

PTPI always conducts a review of HR policies every year. The aim is to adjust to developments in the industrial environment, while creating alignment with the Company's plans and strategies, both for the short, medium and long term.

In addition, the Company continues to make efforts to review HR policies in order to create HR management guidelines that are up-to-date and in line with the Company's vision, mission, goals and strategies. This initiative is carried out to support the ongoing HR transformation programme within the Company

untuk menstandardisasi dan mengimplementasi seluruh model operasi, proses, sistem, termasuk kebijakan-kebijakan yang berlaku di seluruh entitas PI Group.

STRUKTUR ORGANISASI SDM

Organisasi Pengelolaan dan Pengembangan SDM PTPI dilaksanakan oleh Direktorat SDM. Direktorat ini dibantu oleh Kompartemen Strategi & Kebijakan SDM, Kompartemen Operasional SDM, dan Kompartemen Budaya & Pembelajaran. Rinciannya disampaikan dalam gambar struktur organisasi di bawah ini.

to standardize and implement all operating models, processes, systems, including policies that apply across all PI Group entities.

HR ORGANIZATION STRUCTURE

PTPI's HR Management and Development organization is implemented by the Directorate of HR. This directorate is assisted by the HR Strategy & Policy Compartment, the HR Operations Compartment, and the Culture & Learning Compartment. The details are presented in the organizational structure picture below.

KOMPARTEMEN STRATEGI & KEBIJAKAN SDM

Kompartemen Strategi & Kebijakan SDM memiliki tanggung jawab dalam mendukung transformasi SDM dengan fokus utama untuk menyelaraskan pengelolaan SDM di Pupuk Indonesia Group sesuai dengan visi, misi, sasaran, dan strategi perusahaan. Kompartemen Strategi & Kebijakan SDM dipimpin oleh Tathit Surya Arjanggi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 182/A/HK/P28/SK/2022 tanggal 19 Desember 2022.

Tugas pokok Kompartemen Strategi & Kebijakan SDM diuraikan sebagai berikut.

1. Mengoordinasikan penyusunan rancangan kebijakan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang merupakan rencana strategis PI Group di Bidang Strategi & Kebijakan SDM.
2. Menyusun target kerja dan anggaran untuk mendukung pencapaian Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) di bidang Strategi & Kebijakan SDM PI Group sebagai acuan sasaran dan kegiatan yang dapat dievaluasi dan dipertanggungjawabkan.
3. Menyusun program strategi SDM sesuai strategi bisnis perusahaan.
4. Menyusun, melakukan sosialisasi, dan melakukan evaluasi kebijakan/pedoman SDM di lingkup PI Group.
5. Mengoordinasikan terkait implementasi strategi & kebijakan SDM di lingkup PI Group.
6. Menyusun rekomendasi untuk pelaksanaan transformasi SDM di tahun berikutnya.
7. Mengoordinasikan pengelolaan aktiva tetap, inventaris, dan peralatan kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya sehingga tetap terjaga dengan baik.
8. Mengoordinasikan pengelolaan aktiva tetap, inventaris, dan peralatan kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya sehingga tetap terjaga dengan baik.
9. Turut serta aktif dalam pelaksanaan sistem manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Sistem Manajemen Risiko, Kepatuhan Anti Penyuapan, *Good Corporate Governance* (GCG), *Total Quality Management* (TQM), dan *Corporate Social Responsibilty* (CSR) di area unit kerjanya untuk mencapai standar K3 dan standar mutu dalam rangka melakukan perbaikan yang berkelanjutan.

Kompartemen Operasional SDM

Kompartemen Operasional SDM memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan SDM mulai dari perencanaan kebutuhan karyawan hingga program pensiun karyawan. Pada tahun 2022, Kompartemen SDM dipimpin oleh Jojok Wido Harjoso yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/005/2021 tanggal 7 Januari 2021.

HR STRATEGY & POLICY COMPARTMENT

The HR Strategy & Policy Department has the responsibility of supporting HR transformation with the main focus of aligning HR management in Pupuk Indonesia Group in accordance with the company's vision, mission, goals and strategies. The HR Strategy & Policy Department is led by Tathit Surya Arjanggi who was appointed based on the Board of Directors Decree No. 182/A/HK/P28/SK/2022 dated December 19, 2022.

The main tasks of the HR Strategy & Policy Department are described as follows.

1. Coordinate the preparation of the draft policy of te Company's Long Term Plan (RJPP) which is PI Group's strategic plan in the field of HR Strategy & Policy.
2. Developing work targets and budgets to support the achievement of the Company Budget Work Plan (RKAP) in the field of PI Group HR Strategy & Policy as a reference for targets and activities that can be evaluated and accounted for.
3. Develop HR strategy programmes in accordance with the company's business strategy.
4. Develop, socialite, and evaluate HR policies/guidelines within PI Group.
5. Coordinate the implementation of HR strategies & policies within PI Group.
6. Develop recommendations for the implementation of HR transformation in the following year.
7. Coordinate the management of fixed assets, inventory, and work equipment under his responsibility so that they are well maintained.
8. Coordinate the management of fixed assets, inventory, and work equipment under his responsibility so that they are well maintained.
9. Actively participate in the implementation of the Occupational Health and Safety (OHS) management system, Risk Management System, Anti-Bribery Compliance, Good Corporate Governance (GCG), TQM Total Quality Management (TQM), and Corporate Social Responsibility(CSR) in the work unit area to achieve OHS and quality standards in order to make continuous improvements.

HR Operations Compartment

The HR Operations Department is responsible for HR management from planning employee needs to employee retirement programmes. In 2022, the HR Department was led by Jojok Wido Harjoso who was appointed based on the Board of Directors Decree No. SK/DIR/005/2021 dated January 7, 2021.

Secara garis besar, Kompartemen SDM mendukung program transformasi organisasi yang sejalan dengan *masterplan* Perusahaan. Hal itu dilakukan dengan memusatkan beberapa fungsi bisnis ke Pupuk Indonesia Holding.

Melalui strategi itu, PTPI sebagai Entitas Induk memiliki peran lebih aktif dalam aktivitas operasional Perusahaan. SDM perusahaan yang unggul merupakan salah satu penggerak utama untuk mencapai visi dan misi perusahaan serta target kinerja yang telah ditetapkan oleh Pemegang Saham.

Rincian tugas pokok Kompartemen Operasional SDM yang uraiannya disampaikan di bawah ini:

1. Merencanakan rancangan dan kebijakan rencana jangka panjang (RJP) yang merupakan rencana strategis PTPI di bidang Operasional SDM agar sesuai dengan rencana strategis Perusahaan.
2. Merencanakan rancangan rencana kerja tahunan (RKAP) bidang SDM baik internal maupun anggota *holding* sebagai acuan kegiatan dan sasaran kerja yang dapat dievaluasi dan dipertanggungjawabkan, untuk mendukung tercapainya target perusahaan yang ditetapkan pemegang saham.
3. Merencanakan kebijakan perancangan (struktur) organisasi korporasi dan Anak Perusahaan yang efektif dan efisien, berorientasi pada produktivitas dan nilai tambah bagi pemegang saham agar visi dan misi perusahaan tercapai.
4. Merencanakan kebijakan perancangan (struktur) organisasi korporasi dan Anak Perusahaan yang efektif dan efisien, berorientasi pada produktivitas dan nilai tambah bagi pemegang saham agar visi dan misi perusahaan tercapai.
5. Merencanakan kebijakan pengelompokan fungsi-fungsi organisasi yang harmonis dan terstandar yang disesuaikan dengan kompetensi bidang PI Group sehingga memungkinkan dilakukannya lintas karir karyawan di antara PI Group.
6. Merencanakan kebijakan program pembangunan SDM di PI Group yang kompetitif sehingga mampu menjawab tantangan profesional untuk jangka panjang bagi pemegang saham.
7. Merencanakan, mengelola dan mengoordinasikan kebijakan dan standardisasi program pengembangan SDM berbasis kompetensi di PI Grup secara optimal yang meliputi: struktur organisasi, sistem rekrutmen dan seleksi, pengembangan dan peningkatan kompetensi, profesionalisme karyawan, remunerasi/kompensasi, apresiasi dan penilaian prestasi kerja serta sistem informasi SDM di korporasi.

Broadly speaking, the HR Department supports the organizational transformation programme in line with the Company's masterplan. This is done by centralizing some business functions to Pupuk Indonesia Holding.

Through this strategy, PTPI as the Parent Entity has a more active role in the Company's operational activities. The company's excellent human resources are one of the main drivers to achieve the company's vision and mission as well as the performance targets set by the Shareholders.

Details of the main tasks of the HR Operations Compartment are described below:

1. Planning the design and policy of the long-term plan (RJP) which is PTPI's strategic plan in the field of HR Operations in accordance with the Company's strategic plan.
2. Planning the draft annual work plan (RKAP) in the field of HR, both internal and holding members as a reference for activities and work targets that can be evaluated and accounted for, to support the achievement of company targets set by shareholders.
3. Planning the design policy (structure) of corporate organizations and subsidiaries that are effective and efficient, oriented towards productivity and added value for shareholders so that the company's vision and mission are achieved.
4. Planning policies for the design (structure) of corporate organizations and subsidiaries that are effective and efficient, oriented towards productivity and added value for shareholders so that the company's vision and mission are achieved.
5. Planning a harmonious and standardized grouping policy of organizational functions that are tailored to the competencies of the PI Group field so as to enable cross-career employees among PI Group.
6. Planning a competitive HR development programme policy in PI Group so as to be able to answer professional challenges for the long term for shareholders.
7. Plan, manage and coordinate policies and standardization of competency-based HR development programs in PI Group optimally which include: organizational structure, recruitment and selection system, competency development and improvement, employee professionalism, remuneration/compensation, appreciation and performance appraisal and HR information system in the corporation.

8. Merencanakan kebijakan harmonisasi program-program Pascakerja PI Group di antaranya meliputi Program Dana Pensiun, Prokespen dan Tabungan Hari Tua, agar kesejahteraan karyawan pensiunan tetap terjamin.
9. Merencanakan kebijakan efisiensi biaya-biaya administrasi personalia/ketenagakerjaan di PI Group untuk menghasilkan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kerja setinggi-tingginya dalam pencapaian tujuan korporasi.
10. Merencanakan dan mengendalikan pengelolaan biaya personalia/ketenagakerjaan di Anak Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku dan sasaran yang telah ditetapkan oleh pemegang saham.
11. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Rapat-rapat Pokja khususnya di bidang SDM dengan Anak Perusahaan, sehingga terjalin forum komunikasi yang efektif.
12. Bertanggung jawab atas pengelolaan aktiva tetap, inventaris dan peralatan kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya sehingga tetap terjaga dengan baik.
13. Bertanggung jawab terhadap pembinaan dan peningkatan kompetensi dan kemampuan serta sikap kerja karyawan di Unit Kerjanya berdasarkan Peraturan Perusahaan dan *job description* agar diperoleh SDM berkualitas.
14. Turut serta secara aktif dalam pelaksanaan sistem manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Sistem Manajemen Risiko, Kepatuhan Anti Penyuapan, *Good Corporate Governance* (GCG), *Total Quality Management* (TQM), dan *Corporate Social Governance* (CSR) di area unit kerjanya untuk mencapai standar K3 dan standar mutu dalam rangka melakukan perbaikan yang berkelanjutan.

Kompartemen Budaya & Pembelajaran

Kompartemen Budaya & Pembelajaran memiliki tanggung jawab terhadap pengembangan SDM mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program pengembangan melalui pendidikan atau pelatihan SDM. Pada tahun 2022, Kompartemen Budaya & Pembelajaran dikepalai oleh Budi Mulia Utama Hasibuan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 138/A/KU/E10/SK/2022 tanggal 1 Oktober 2022.

Tugas pokok yang dibebankan kepada Kompartemen Budaya & Pembelajaran diuraikan sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan penyusunan rancangan kebijakan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang merupakan rencana strategis PI Group di Bidang Budaya & Pembelajaran.

8. Planning policies for the harmonization of PI Group's post-employment programs, including the Pension Fund Program, Prokespen and Old Age Savings, so that the welfare of retired employees is guaranteed.
9. Planning the efficiency policy of personnel/labour administration costs in PI Group to produce the highest possible effectiveness, efficiency and work productivity in achieving corporate goals.
10. Planning and controlling the management of personnel/labour costs in subsidiaries in accordance with applicable regulations and targets set by shareholders.
11. Planning and coordinating the implementation of Working Group Meetings, especially in the field of HR with Subsidiaries, so that an effective communication forum is established.
12. Responsible for the management of fixed assets, inventory and work equipment under his responsibility so that they are well maintained.
13. Responsible for fostering and improving the competence, ability and work attitude of employees in the Work Unit based on Company Regulations and Job Description in order to obtain quality human resources.
14. Actively participate in the implementation of the Occupational Health and Safety (OHS) management system, Risk Management System, Anti-Bribery Compliance, Good Corporate Governance (GCG), Total Quality Management (TQM), and Corporate Social Governance (CSR) in the area of his/her work unit to achieve OHS standards and quality standards in order to make continuous improvements.

Culture & Learning Compartment

The Culture & Learning Compartment is responsible for HR development from planning to implementing development programmes through HR education or training. In 2022, the Culture & Learning Department was headed by Budi Mulia Utama Hasibuan who was appointed based on Board of Directors Decree No. 138/A/KU/E10/SK/2022 dated October 1, 2022.

The main tasks assigned to the Culture & Learning Compartment are outlined as follows:

1. Coordinate the preparation of the draft policy of the Company's Long Term Plan (RJPP) which is PI Group's strategic plan in the Culture & Learning Sector.

2. Mengoordinasikan penyusunan rancangan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan di bidang Budaya & Pembelajaran PI Group sebagai acuan sasaran dan kegiatan yang dapat dievaluasi dan dipertanggungjawabkan.
3. Mengoordinasikan perumusan kegiatan bidang Budaya & Pembelajaran di PI Group.
4. Mengoordinasikan implementasi kebijakan Budaya & Pembelajaran di PI Group.
5. Mengoordinasikan implementasi sistem manajemen pengetahuan yang ada di PI Group.
6. Mengoordinasikan pengembangan kegiatan sertifikasi profesi SDM di PI Group.
7. Mengoordinasikan kegiatan evaluasi kebijakan, program kerja, dan kegiatan Bidang Budaya & Pembelajaran di PI Group.
8. Bertanggung jawab atas pengelolaan aktiva tetap, inventaris, dan peralatan kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya sehingga tetap terjaga dengan baik.
9. Bertanggung jawab terhadap pembinaan dan peningkatan kompetensi dan kemampuan, serta sikap kerja karyawan di unit kerjanya berdasarkan peraturan Perusahaan dan *job description* agar diperoleh SDM berkualitas.
10. Turut serta secara aktif dalam pelaksanaan sistem manajemen terintegrasi meliputi pengendalian risiko, kepatuhan, anti penyuapan, mutu dan tanggung jawab sosial di area unit kerjanya untuk mencapai standar sistem manajemen dalam rangka perbaikan yang berkelanjutan.

STRATEGI PENGELOLAAN SDM

Strategi pengelolaan SDM di Perusahaan mengusung satu tema besar yaitu *"HR Transformation towards Human Experience Management (HXM) and World Class Talent"* yang tertuang dalam *Human Capital Management Grand Strategy & Roadmap* Pupuk Indonesia Group 2022-2027. Tema ini memiliki makna bahwa transformasi SDM akan didasarkan kepada *Human Experience Management* (HXM) dengan mengedepankan pengalaman dan kepuasan karyawan sebagai landasan utama untuk menuju kualitas karyawan yang mendunia. Perjalanan untuk mencapai mimpi yang diharapkan tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) fase besar, yaitu:

2. Coordinate the preparation of the draft Annual Company Budget Work Plan (RKAP) in the PI Group Culture & Learning sector as a reference for targets and activities that can be evaluated and accounted for.
3. Coordinate the formulation of Culture & Learning activities in PI Group.
4. Coordinate the implementation of Culture & Learning policies in PI Group.
5. Coordinating the implementation of the knowledge management system in PI Group.
6. Coordinating the development of HR professional certification activities at PI Group.
7. Coordinating the evaluation of policies, work programmes and activities of the Culture & Learning Division at PI Group.
8. Responsible for the management of fixed assets, inventory and work equipment under his responsibility so that they are well maintained.
9. Responsible for fostering and improving the competence and abilities, as well as the work attitude of employees in the Work Unit based on Company Regulations and job descriptions in order to obtain quality human resources.
10. Actively participate in the implementation of an integrated management system covering risk control, compliance, anti-bribery, quality and social responsibility in his/her work unit area to achieve management system standards for continuous improvement.

PEOPLE MANAGEMENT STRATEGY

The HR management strategy in the Company carries one big theme, namely "HR Transformation towards Human Experience Management (HXM) and World Class Talent" as stated in the Human Capital Management Grand Strategy & Roadmap Pupuk Indonesia Group 2022-2027. This theme means that HR transformation will be based on Human Experience Management (HXM) by prioritizing employee experience and satisfaction as the main foundation towards global employee quality. The journey to achieve the dream is divided into 3 (three) major phases, namely:

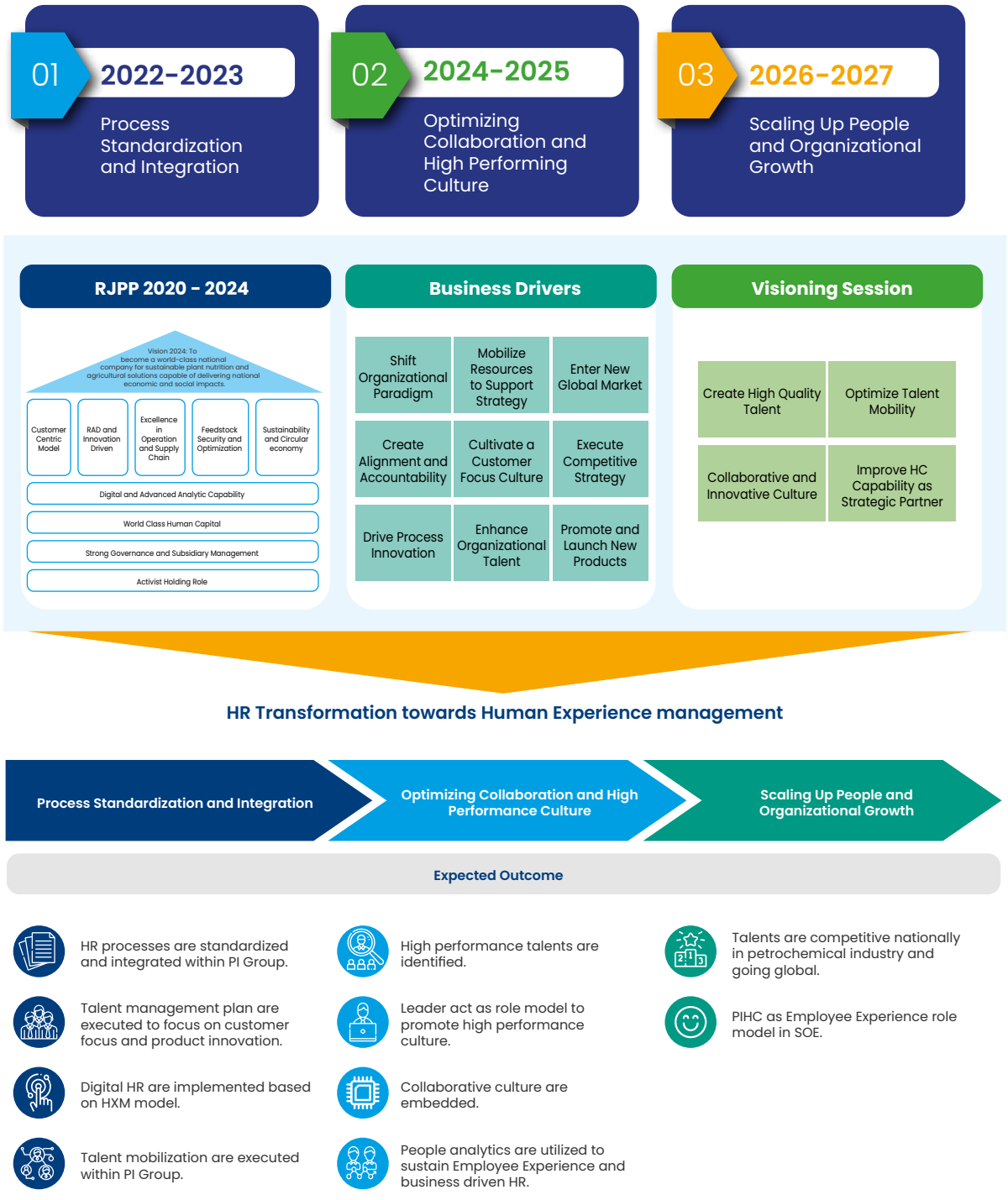

Pengelolaan SDM di tahun 2022 berada pada fase 1, yaitu berfokus kepada aktivitas standardisasi dan integrasi kesisteman model operasi, proses, kebijakan, dan sistem yang digunakan dalam mengelola SDM di seluruh entitas PI Group. *Output* yang diharapkan dalam fase ini adalah

HR management in 2022 is in phase 1, which focuses on standardization activities and system integration of operating models, processes, policies and systems used in managing HR across PI Group entities. The expected output in this phase is that the integrated HR management

standar proses pengelolaan SDM yang saling terintegrasi telah terdigitalisasi dan rencana pengembangan serta mobilisasi karyawan terimplementasi sesuai dengan kebutuhan organisasi di masa mendatang.

MANAJEMEN TALENTA

Pengelolaan talenta PTPI dilakukan terintegrasi melalui pemenuhan kebutuhan dan motivasi karyawan dengan mempertahankan karyawan di dalam perusahaan. Proses pengelolaan talenta terdiri dari empat ruang lingkup dalam *framework* sebagai berikut

A. *Talent Acquisition*

Pelaksanaan akuisisi karyawan baru di lingkungan Perusahaan melalui persyaratan dan tahapan seleksi yang pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan. Proses *talent acquisition* tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan reguler dan *Talent Pool* di Perusahaan sesuai dengan *Framework Talent Acquisition* di PI Group, yaitu:

process standards have been digitized and employee development and mobilization plans are implemented in accordance with future organizational needs.

TALENT MANAGEMENT

PTPI's talent management is integrated through fulfilling employee needs and motivation by retaining employees within the company. The talent management process consists of four scopes in the framework as follows

A. Talent Acquisition

Implementation of new employee acquisition within the Company through requirements and selection stages whose implementation refers to the provisions and regulations applicable in the Company. The talent acquisition process is carried out to fulfill the regular needs and Talent Pool in the Company in accordance with the Talent Acquisition Framework in PI Group, namely:

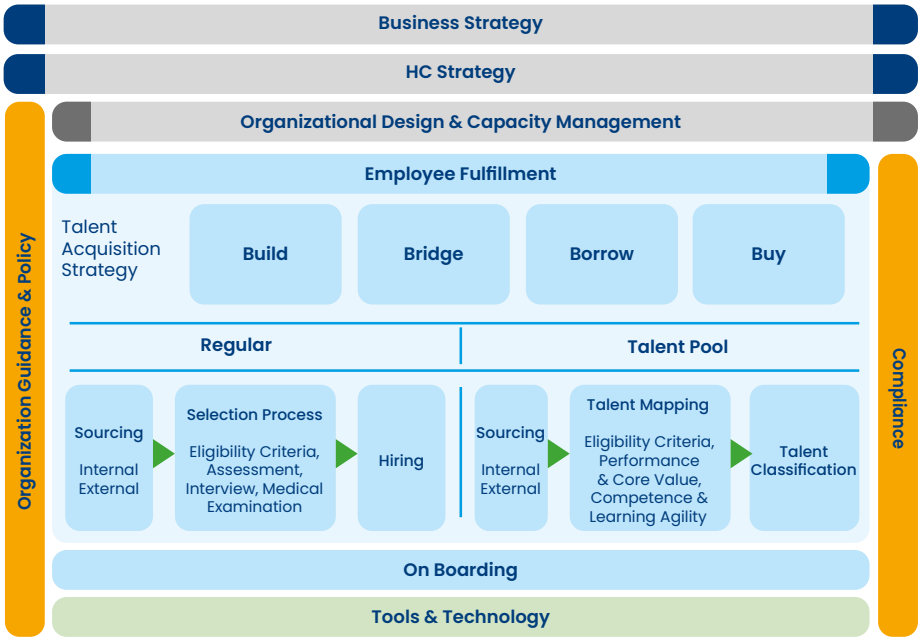

Pada tahun 2022, realisasi jumlah rekrutmen baru sebanyak 11 orang. Dalam pelaksanaannya, PTPI bekerja sama dengan Forum Human Capital Indonesia (FHCI) dalam Program Rekrutmen Bersama BUMN. Rekrutmen tersebut bersifat terbuka untuk setiap pelamar yang memenuhi persyaratan kebutuhan jabatan di PTPI.

In 2022, the realization of the number of new recruits was 11 people. In its implementation, PTPI collaborates with the Indonesian Human Capital Forum (FHCI) in the Joint SOE Recruitment Programme. The recruitment is open to every applicant who meets the requirements of the position needs at PTPI.

B. *Talent Development*

Pengembangan talenta di PTPI melalui serangkaian proses mengacu kepada ketentuan dan peraturan Perusahaan yang berlaku. Proses *talent development* disusun dengan harapan dapat meningkatkan kompetensi dan kapabilitas karyawan sesuai dengan visi perusahaan. Rangkaian proses tersebut disebutkan sebagaimana terlampir.

B. *Talent Development*

Talent development at PTPI goes through a series of processes referring to the applicable provisions and regulations of the Company. The talent development process is structured with the hope of increasing employee competence and capability in accordance with the company's vision. The series of processes are mentioned as attached.

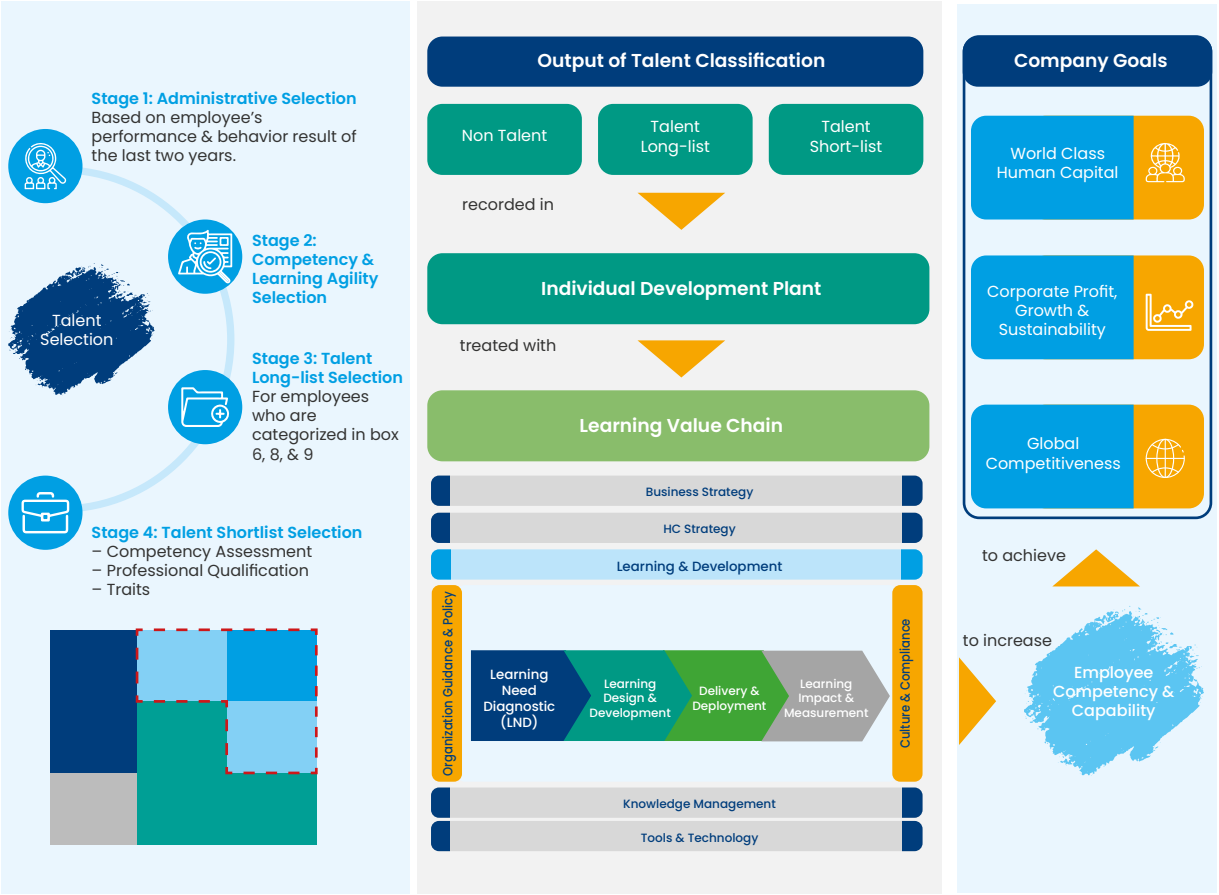

C. *Talent Mobility*

Lingkup *talent mobility* di lingkungan Perusahaan terdiri dari *Career Planning, Career Development,* dan *Career Counseling*. Ketiga lingkup tersebut telah disusun dalam *Framework* Sistem Manajemen Karir yang didesain sebagai acuan rencana pengembangan SDM Perusahaan. *Framework* Manajemen Karir disampaikan sebagai berikut:

C. *Talent Mobility*

The scope of talent mobility within the Company consists of Career Planning, Career Development and Career Counseling. The three scopes have been compiled in the Career Management System Framework which is designed as a reference for the Company's HR development plan. The Career Management Framework is presented as follows:

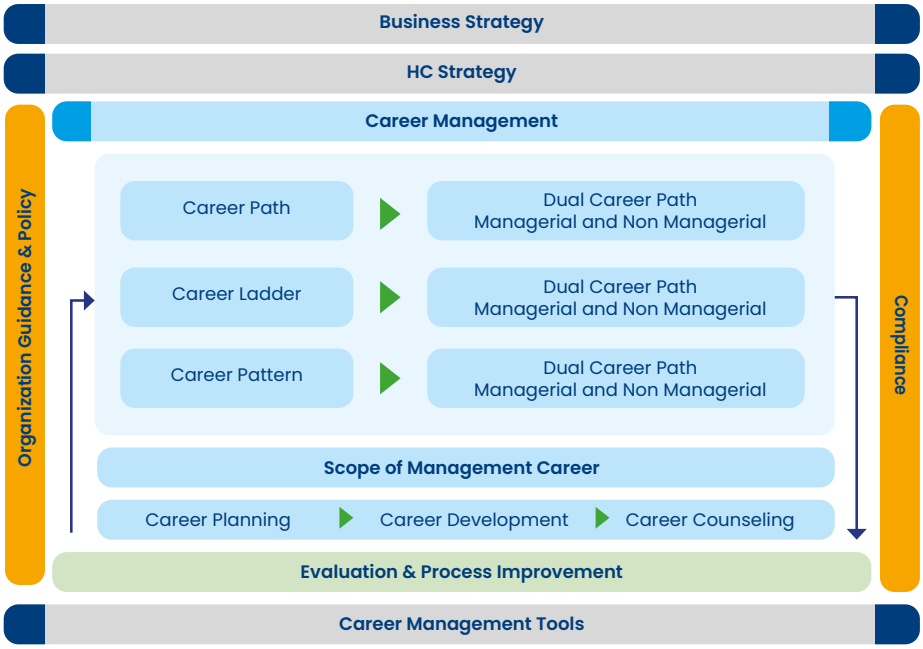

Melalui manajemen karir yang jelas, Perusahaan dapat mempertahankan SDM terbaik yang dimilikinya. Sistem manajemen karir yang didesain juga sangat mengakomodasi karyawan dalam menentukan arah karirnya serta membantu Perusahaan dalam melaksanakan proses pengembangan karir secara konsisten. Pada akhirnya, sistem tersebut memberikan manfaat bagi pencapaian cita-cita Perusahaan. Selain itu, manajemen karir juga menggambarkan posisi-posisi yang diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan Perusahaan.

Selain tuntutan kebutuhan organisasi untuk menyediakan kader yang memiliki kompetensi yang sesuai, manajemen karir sangat dibutuhkan oleh karyawan sebab karir merupakan indikator proses pengembangan diri bagi mereka. Bagi Tim SDM, manajemen karir juga sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk menciptakan iklim kerja yang nyaman yang diharapkan dapat meningkatkan keterikatan tinggi antara karyawan dengan Perusahaan.

D. *Talent Retention*

Talent retentiton di PTPI diturunkan ke dalam 4 (empat) strategi, yaitu:

1. *Corporate Culture*
2. *Talent Development*
3. *Talent Mobility*
4. *Compensation & Benefit*

Through clear career management, the Company can retain its best human resources. The career management system designed also greatly accommodates employees in determining their career direction and helps the Company in carrying out the career development process consistently. In the end, the system provides benefits for the achievement of the Company's goals. In addition, career management also describes the positions required in order to achieve the Company's goals.

In addition to the organization's need to provide cadres with appropriate competencies, career management is needed by employees because it is an indicator of the self-development process for them. For the HR Team, career management is also needed as an effort to create a comfortable working climate that is expected to increase the high attachment between employees and the Company.

D. *Talent Retention*

Talent retentiton at PTPI is derived into 4 (four) strategies, namely:

1. Corporate Culture
2. Talent Development
3. Talent Mobility
4. Compensation & Benefit

TINGKAT *TURNOVER* KARYAWAN

PTPI beserta entitas anak atau PI Group berupaya menciptakan lingkungan kerja yang profesional, nyaman, sekaligus bersifat kekeluargaan agar dapat menjadi tempat kerja idaman bagi karyawan dan calon karyawan. Upaya tersebut juga merupakan bagian dari strategi Perusahaan untuk mengelola tingkat *turnover*.

Dalam mewujudkan komitmen tersebut, Perusahaan melakukan *review* secara berkala terkait kebijakan remunerasi dan paket *benefit* bagi karyawan serta hal-hal lain berkenaan dengan pengelolaan tenaga kerja. Selain hal-hal bersifat materi, perbaikan senantiasa dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan menyenangkan bagi karyawan. Manajemen meyakini, lingkungan kerja yang baik akan menurunkan tingkat kecenderungan *turnover* karyawan.

Adapun tingkat *turnover* karyawan PTPI di tahun 2022 dibanding tahun 2021 adalah sebagaimana terlampir pada tabel di bawah ini.

EMPLOYEE TURNOVER RATE

PTPI and its subsidiaries or PI Group strive to create a work environment that is professional, comfortable, as well as family-like in order to become a dream workplace for employees and prospective employees. This effort is also part of the Company's strategy to manage the turnover rate.

In realizing this commitment, the Company periodically reviews remuneration policies and benefit packages for employees as well as other matters relating to workforce management. In addition to material matters, improvements are always made in order to create a conducive and pleasant working environment for employees. Management believes that a good working environment will reduce the level of employee turnover tendency.

The turnover rate of PTPI employees in 2022 compared to 2021 is as attached in the table below.

(orang) (person)

Uraian	2022	2021	Description
Pensiun	6	5	Retire
Meninggal Dunia	0	2	Deceased
Mengundurkan diri atas permintaan sendiri	0	0	Resigned at own request
Diberhentikan	0	0	Dismissed
Jumlah karyawan yang keluar	6	7	Number of resigned employees
Total karyawan di akhir tahun	**348**	**354**	**Total employees at end of year**

SISTEM MANAJEMEN KINERJA

Sistem Manajemen Kinerja PI Group disusun untuk mengatur kegiatan pengelolaan kinerja di PI Group yang terdiri dari tahapan penyusunan target dan indikator kinerja, *monitoring*, dan evaluasi capaian kinerja secara periodik, penilaian kinerja individu dan penilaian kompetensi secara tahunan, serta pemberian reward atas capaian kinerja. Siklus manajemen kinerja di PI Group tertuang dalam *framework* sebagai berikut.

PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM

PI Group's Performance Management System is structured to regulate performance management activities in PI Group which consists of the stages of preparing targets and performance indicators, monitoring and evaluating performance achievements periodically, assessing individual performance and assessing competence on an annual basis, and rewarding performance achievements. The performance management cycle at PI Group is contained in the following framework.

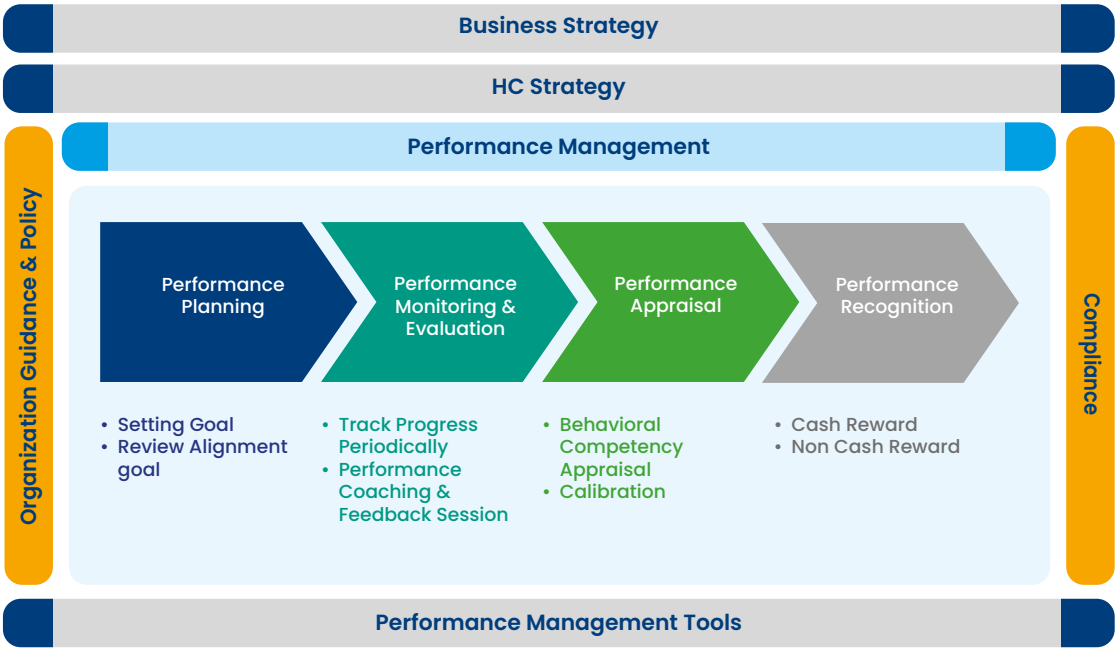

Pelaksanaan siklus tersebut didukung oleh aplikasi *Human Capital Information System Single Platform* PI Group guna meningkatkan produktivitas kerja dan menciptakan iklim kompetitif untuk mencapai visi dan misi Perusahaan.

SURVEI KEPUASAN DAN KETERIKATAN KARYAWAN

Sebagai upaya Perusahaan untuk dapat terus memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan, dalam hal ini karyawan, PTPI melakukan survei kepuasan dan keterkaitan karyawan. Pengukuran tingkat kepuasan ini merupakan aspek penting untuk mengetahui tingkat pelayanan yang telah diberikan sekaligus mendapatkan umpan balik untuk mengembangkan suatu sistem penyediaan pelayanan yang tanggap terhadap kebutuhan karyawan.

Survei tersebut juga bertujuan untuk memastikan pemenuhan persyaratan dan harapan utama para karyawan. Hasil survei memastikan seberapa baik PTPI memenuhi persyaratan dan harapan pekerja untuk pengembangan karir, kesejahteraan, serta keamanan dan keselamatan lingkungan kerja bagi karyawan.

The implementation of the cycle is supported by PI Group's Human Capital Information System Single Platform application to improve work productivity and create a competitive climate to achieve the Company's vision and mission.

EMPLOYEE SATISFACTION AND ENGAGEMENT SURVEY

As an effort of the Company to be able to continue to meet the expectations of all stakeholders, in this case employees, PTPI conducts employee satisfaction and engagement surveys. This satisfaction level measurement is an important aspect to determine the level of service that has been provided as well as to obtain feedback to develop a service delivery system that is responsive to employee needs.

The survey also aims to ensure the fulfillment of key requirements and expectations of employees. The survey results confirm how well PTPI fulfills the requirements and expectations of workers for career development, welfare, and security and safety of the work environment for employees.

No.	Perusahaan Company	Jumlah Karyawan Number of Employees	Indeks Kepuasan Satisfaction Index	Indeks Keterikatan Attachment Index
1	PTPI	306	83,48%	86,36%
2	PT Pupuk Petrokimia Gresik	2.267	83,66%	87,35%
3	PT Pupuk Kujang	406	81,45%	79,19%
4	PT Pupuk Kalimantan Timur	310	83,01%	86,49%
5	PT Pupuk Iskandar Muda	504	82,69%	86,96%
6	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	400	73,00%	82,00%
7	PT Rekayasa Industri	528	73,85%	81,55%
8	PT Pupuk Indonesia Niaga	75	81,50%	79,60%
9	PT Pupuk Indonesia Logistik	33	90,93%	90,96%
10	PT Pupuk Indonesia Utilitas	40	86,42%	87,72%
11	PT Pupuk Indonesia Pangan	31	81,48%	–
	Total PI Group	**4.900**		
	Rata-rata PI Group PI Group Average		81,42%	84,81%

Khusus untuk PTPI, pencapaian indeks kepuasan dan keterkaitan karyawan di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Specifically for PTPI, the achievement of the employee satisfaction and linkage index in 2022 is as follows:

Pengukuran	Struktural Structural		Fungsional Functional		Measurement
	Indeks Index	Kategori Category	Indeks Index	Kategori Category	
Indeks Keterikatan Karyawan	86,27%	Sangat tinggi Very high	86,68%	Sangat tinggi Very high	Employee Engagement Index
Indeks Kepuasan Karyawan	83,64%	Sangat tinggi Very high	82,91%	Sangat tinggi Very high	Employee Satisfaction Index

Nilai Indeks Keterikatan pada karyawan struktural berada pada kategori sangat tinggi dengan indeks tertinggi berada pada faktor *company pride*. Sedangkan nilai Indeks Keterikatan pada karyawan fungsional sangat tinggi dengan indeks tertinggi berada pada faktor *Job Clarity*.

The value of the Attachment Index for structural employees is in the very high category with the highest index being the company pride factor. While the value of the Attachment Index for functional employees is very high with the highest index being the Job Clarity factor.

Nilai Indeks Kepuasan pada karyawan struktural dan karyawan fungsional berada pada kategori sangat tinggi. Indeks tertinggi kepuasan pada karyawan struktural dan fungsional berada pada faktor jaminan kesehatan.

The Satisfaction Index value for structural employees and functional employees is in the very high category. The highest index of satisfaction in structural and functional employees is in the health insurance factor.

TABEL PENGUKURAN SURVEI KEPUASAN DAN KETERIKATAN KARYAWAN BERDASARKAN DIREKTORAT
Employee Satisfaction and Engagement Survey Measurement Table by Directorate

Pengukuran Indicator	Struktural Structural		Fungsional Functional	
	Indeks Keterikatan Attachment Index	Indeks Kepuasan Satisfaction Index	Indeks Keterikatan Attachment Index	Indeks Kepuasan Satisfaction Index
Direktorat Utama Main Directorate	84,85%	81,53%	89,06%	92,50%
Direktorat Wadirut Directorate of Vice President	-	-	85,81%	88,26%
Direktorat Produksi Directorate of Production	86,67%	82,52%	88,96%	87,46%
Direktorat Keuangan & Investasi Directorate of Finance & Investment	83,78%	81,57%	90,94%	85,89%
Direktorat Transformasi Bisnis Directorate of Business Transformation	87,16%	85,08%	85,71%	79,20%
Direktorat SDM, Tata Kelola & Manajemen Risiko Directorate of HR, Governance & Risk Management	86,18%	84,57%	85,38%	81,99%
Direktorat Pemasaran Directorate of Marketing	88,31%	85,83%	88,85%	84,56%
Direktorat Portofolio & Pengembangan Usaha Directorate of Portfolio & Business Development	84,62%	83,08%	98,44%	98,61%

Nilai indeks keterikatan tertinggi secara keseluruhan adalah Direktorat Pemasaran (88,35%). Jika melihat karyawan struktural dan fungsional, maka indeks keterikatan tertinggi karyawan struktural berada di Direktorat Pemasaran dan karyawan fungsional di Direktorat Portofolio & Pengembangan Usaha.

Nilai indeks kepuasan tertinggi secara keseluruhan adalah Direktorat Wakil Direktur Utama (88,26%). Jika melihat karyawan struktural dan fungsional, maka indeks kepuasan tertinggi karyawan struktural berada di Direktorat Pemasaran dan karyawan fungsional di Direktorat Portofolio & Pengembangan Usaha.

The highest overall engagement index value is the Marketing Directorate (88.35%). When looking at structural and functional employees, the highest engagement index for structural employees is in the Marketing Directorate and functional employees in the Portfolio & Business Development Directorate.

The highest overall satisfaction index value is the Directorate of Deputy President Director (88.26%). When looking at structural and functional employees, the highest satisfaction index is for structural employees in the Marketing Directorate and functional employees in the Portfolio & Business Development Directorate.

TABEL PENGUKURAN SURVEI KEPUASAN DAN KETERIKATAN KARYAWAN BERDASARKAN GENERASI
Employee Satisfaction and Engagement Survey Measurement Table by Generation

Pengukuran	Indeks Keterikatan Attachment Index	Indeks Kepuasan Satisfaction Index	Measurement
Gen X (Lahir 1965-1980)	89,81%	86,14%	Gen X (Born 1965-1980)
Gen Y (Lahir 1981-1996)	84,60%	82,51%	Gen Y (Born 1981-1996)
Gen Z (Lahir 1997-2012)	89,88%	88,86%	Gen Z (Born 1997-2012)

Karyawan generasi Z memiliki indeks keterikatan dan indeks kepuasan yang paling tinggi dibandingkan karyawan generasi X dan generasi Y. Indeks keterikatan tertinggi untuk generasi X dan Y berada pada faktor *Company Pride*. Sedangkan indeks keterikatan tertinggi generasi Z ada pada faktor *Compensation*.

Nilai indeks kepuasan karyawan tertinggi karyawan generasi X adalah faktor Pengakuan, sedangkan karyawan generasi Y dan Z adalah faktor Jaminan Kesehatan.

Generation Z employees have the highest engagement index and satisfaction index compared to generation X and generation Y employees. The highest engagement index for generation X and Y is in the Company Pride factor. While the highest attachment index for generation Z is on the Compensation factor.

The highest employee satisfaction index value for generation X employees is the Recognition factor, while generation Y and Z employees are the Health Insurance factor.

REALISASI PROGRAM PENGELOLAAN SDM TAHUN 2022

Pada tahun 2022, realisasi dari pengembangan dan pengelolaan SDM diuraikan dalam tabel di bawah ini.

REALISATION OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PROGRAMME IN 2022

In 2022, the realisation of HR development and management is outlined in the table below.

PROGRAM PENGEMBANGAN & PENGELOLAAN SDM TAHUN 2022
HR Development & Management Program 2022

No.	Sasaran Strategis Strategic Objectives	Program Kegiatan Activity Programme	Realisasi Realisation
1.	Menciptakan kultur perusahaan yang kolaboratif dan *high performing* Creating a collaborative and high performing company culture	*Review* Kamus *Soft Competency*	• Tersedianya kamus kompetensi perilaku PT PI Grup yang baru sesuai Surat Edaran No. 16/A/KK/E10/SE/2022 tanggal 19 Juli 2022 perihal Penyampaian Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 078/A/KU/E10/SK/2022 tentang Kamus Kompetensi Perilaku Pupuk Indonesia Grup, termasuk telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan di PT PI Grup. • Pelaksanaan Sosialisasi Kamus Kompetensi Perilaku PI Group kepada seluruh karyawan PI Group.
		Soft Competency Dictionary Review	• The availability of the new PT PI Group behavioural competency dictionary in accordance with Circular Letter No. 16/A/KK/E10/SE/2022 dated 19 July 2022 regarding the Submission of the Decree of the Board of Directors of PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 078/A/KU/E10/SK/2022 concerning the Pupuk Indonesia Group Behavioural Competency Dictionary, including having been socialised to all employees in the PT PI Group. • Implementation of the PI Group Behavioural Competency Dictionary Socialisation to all PI Group employees.

No.	Sasaran Strategis Strategic Objectives	Program Kegiatan Activity Programme	Realisasi Realisation
		Review Kamus *Hard Competency*	• *Kick Off Meeting* untuk *Review Job Familly, Function, & Technical Competencies* dilaksanakan tanggal 25 Agustus 2022. • Telah ditetapkan *Job Family & Job Function* PI Group pada bulan September 2022. Terdapat 15 *Job Family* dan 54 *Job Function*. • Telah tersedianya *draft* Laporan Final Kamus *Hard Competency* untuk ditetapkan oleh Direksi.
		Hard Competency Dictionary Review	• Kick Off Meeting for Job Family, Function, & Technical Competencies Review was held on 25 August 2022. • PI Group Job Family & Job Function has been determined in September 2022. There are 15 Job Family and 54 Job Function. • A draft of the Hard Competency Dictionary Final Report is available to be determined by the Board of Directors.
		Melakukan efisiensi biaya SDM dengan memperhatikan *best practice* dan standar industri serta efektivitas biaya SDM untuk mendorong produktivitas	• Sudah dilakukan efisiensi biaya SDM dengan menerapkan moratorium rekrutmen karyawan tetap. • Menerapkan kenaikan komponen gaji pokok berdasarkan kinerja masing-masing karyawan. • Memberikan insentif kinerja triwulan berdasarkan kinerja perusahaan dan unit kerja sehingga mendorong Karyawan untuk mencapai target kinerja.
		Conduct HR cost efficiency by taking into account best practices and industry standards as well as HR cost effectiveness to drive productivity	• HR cost efficiency has been achieved by implementing a moratorium on recruitment of permanent employees. • Implemented an increase in the basic salary component based on the performance of each employee. • Providing quarterly Performance Incentives based on company and work unit performance to encourage employees to achieve performance targets.
2.	Penyempurnaan program manajemen talenta dan manajemen karier PI Grup Enhancement of PI Group's Talent Management and Career management programme	Implementasi standardisasi manajemen talenta di PTPI Grup.	• Penetapan Pedoman HCM *Framework* yang diberlakukan kepada PI dan PI Group. • Penyempurnaan kebijakan manajemen talenta di PI Group dalam PI-SDM-PD-011 tentang Pedoman Manajemen Talenta dan Manajemen Suksesi.
		Implementation of talent management standardization at PTPI Group.	• Establishment of HCM Framework Guidelines that apply to PI and PI Group. • Enhancement of talent management policy in PI Group in PI-SDM-PD-011 on Talent Management and Succession Management Guidelines.
		Pelaksanaan *Program Top Talent Millenial* dan Perempuan dalam *Nominated Talent*.	Telah dilaksanakan Program *Talent Selection* untuk Program *Top Talent Millenial* dan Perempuan dalam *Nominated Talent* untuk disampaikan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi PTPI.
		Implementation of the Top Talent Millennial and Women in Nominated Talent Program.	A talent selection programme for the Millennial Top Talent Programme and Women in Nominated Talent has been implemented to be submitted to the Nomination and Remuneration Committee of PTPI.
		Program *Employee Exchange* PI Grup	Pelaksanaan Program *Employee Exchange* sesuai dengan kebutuhan perusahaan
		Program Employee Exchange PI Group	Implementation of Employee Exchange Program in accordance with company needs

No.	Sasaran Strategis Strategic Objectives	Program Kegiatan Activity Programme	Realisasi Realisation
		Implementasi strandardisasi manajemen kinerja (KPI Individu karyawan yang sejalan dengan KPI Korporat). Implementation of performance management standardization (Individual employee KPIs in line with Corporate KPIs).	• Penyusunan Pedoman *Performance Management System* (PI-SDM-PD-015 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja). • Penyusunan KPI Individu BOD-2 yang diturunkan dari KPI BOD-1 bersama konsultan DDI dalam memastikan KPI Individu telah selaras dengan KPI Korporat. • Pengembangan HC *Single Platform* modul *Performance Management System.* • Preparation of Performance Management System Guidelines (PI-SDM-PD-015 on Performance Management System Guidelines). • Preparation of BOD-2 Individual KPIs derived from BOD-1 KPIs with DDI consultants in ensuring Individual KPIs are aligned with Corporate KPIs. • Development of HC Single Platform Performance Management System module.
		Pemenuhan data Pengurus BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan Perusahaan Afiliasi Terkonsolidasi BUMN serta *Talent Pool* pada portal *Human Capital* BUMN Fulfillment of data on SOE Management, SOE Subsidiaries, and SOE Consolidated Affiliated Companies and Talent Pool on the SOE Human Capital portal	Menetapkan PIC Data Pengurus Grup BUMN PT Pupuk Indonesia (Persero) sesuai SK Direksi No. 057/A/KU/E10/SK/2022 dan telah dilakukan *update data talent* dan data pengurus di portal HC BUMN. Establish PT Pupuk Indonesia (Persero) BUMN Group Management Data PIC in accordance with Board of Directors Decree No. 057/A/KU/E10/SK/2022 and have updated talent data and management data on the BUMN HC portal.
3.	Harmonisasi dan Standardisasi Remunerasi PT PI Grup PT PI Group Remuneration Harmonisation and Standardisation	Evaluasi struktur remunerasi berdasarkan *leveling* jabatan PT PI. Evaluation of remuneration structure based on PT PI's position leveling.	Telah dilakukan pemetaan atas komponen Kompensasi & *Benefit* seluruh Anak Perusahaan PI Grup Mapping of the Compensation & Benefit components of the entire PI Group Subsidiaries has been conducted.
		Implementasi kenaikan Gaji Pokok berdasarkan penilaian Kinerja (KPI) dan Penilaian 360 di seluruh Anak Perusahaan. Implementation of Base Salary increase based on Performance Appraisal (KPI) and 360 Assessment in all Subsidiaries.	Telah dikirimkan surat kenaikan cola merit ke Anak Perusahaan PTPI yang mendapatkan kenaikan. A cola merit increase letter has been sent to PTPI Subsidiaries who received the increase.
4.	Memperkerjakan penyandang disabilitas di lingkungan PT PI Employing people with disabilities in PT PI's environment	Mempersiapkan blue print pemenuhan amanat Undang-undang No. 8 Tahun 2016 dalam hal mempekerjakan minimal 2% dari penyandang disabilitas. Prepare a blue print to fulfil the mandate of Law No. 8/2016 in terms of employing at least 2% of people with disabilities.	Perusahaan mempersiapkan program rekrutmen untuk penyandang disabilitas di PI Grup sesuai dengan kebutuhan perusahaan. The company prepares recruitment programmes for people with disabilities at PI Grup according to the company's needs.
		Melakukan proses rekrutmen secara mandiri atau rekrutmen bersama bagi para penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan rekrutmen di PI Grup Conduct an independent recruitment process or joint recruitment for persons with disabilities in accordance with the recruitment provisions in PI Group	Sampai dengan tahun 2021 PI Grup mempekerjakan sebanyak 19 orang disabilitas sebagian besar di bidang administrasi dan ada pula di bagian pelabuhan/ operasional As of 2021 PI Group employs 19 people with disabilities mostly in administration and some in the port/ operational section.

RENCANA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SDM KE DEPAN

Untuk tahun 2023, Perusahaan telah menyiapkan sejumlah rencana strategis terkait dengan pengembangan dan pengelolaan SDM. Uraiannya adalah sebagai berikut:

FUTURE HR MANAGEMENT AND DEVELOPMENT PLAN

For 2023, the Company has prepared a number of strategic plans related to HR development and management. The description is as follows:

PROGRAM PENGEMBANGAN & PENGELOLAAN SDM TAHUN 2023
HR Development & Management Program 2023

No.	Sasaran Strategis Strategic Target	Program Kegiatan	Activity Program
1	Implementasi *Talent Management* di PI Grup (Induk dan Anak Perusahaan). Implementation of Talent Management at PI Group (Parent and Subsidiaries).	Menyusun kebijakan dan pedoman *Talent Development, Career Path*, dan *Job Grading* di PI Grup.	Develop policies and guidelines for Talent Development, Career Path, and Job Grading at PI Group.
		Sosialisasi kebijakan dan pedoman *Talent Development, Career Path*, dan *Job Grading* ke pihak terkait di PI Grup.	Socialisation of Talent Development, Career Path, and Job Grading policies and guidelines to relevant parties in PT PI Group.
		Review prosedur *Talent Development, Career Path*, dan *Job Grading* di PI Grup	Review of Talent Development, Career Path, and Job Grading procedures at PI Group
		Menyusun kebijakan pedoman *Talent Mobility* PI Grup.	Develop PT PI Group's Talent Mobility guideline policy.
		Sosialisasi kebijakan dan pedoman *Talent Mobility* PI Grup.	Socialisation of PT PI Group's Talent Mobility policies and guidelines.
		Review prosedur *Talent Mobility* PI Grup.	Review of Talent Mobility procedures at PI Group.
2	Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas Implementation and fulfillment of the rights of persons with disabilities	Melakukan proses rekrutmen secara mandiri atau rekrutmen bersama bagi para penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan rekrutmen di PT PI Grup.	Conduct an independent recruitment process or joint recruitment for persons with disabilities in accordance with the recruitment provisions in PT PI Group.
3	Pemenuhan data pada portal *Human Capital* BUMN Data fulfillment on SOE Human Capital portal	Menetapkan PIC Data Pengurus Grup BUMN PT Pupuk Indonesia (Persero) sehingga pemenuhan data Pengurus BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan Perusahaan Afiliasi terkonsolidasi BUMN serta *Talent Pool* pada portal *Human Capital* BUMN.	Establish PT Pupuk Indonesia (Persero) SOE Group Management Data PIC so as to fulfil the data of SOE Management, SOE Subsidiaries, and consolidated SOE Affiliated Companies and Talent Pool on the SOE Human Capital portal.
		Melakukan *monitoring* pemenuhan data pada portal *Human Capital* BUMN di PI Grup.	Monitoring the fulfillment of data on the SOE Human Capital portal at PI Group
4	Standardisasi Proses dan Integrasi Pengelolaan SDM PI Grup Process Standardisation and Integration of PI Group HR Management	Menyusun standar kebijakan dan prosedur untuk seluruh pilar SDM di PI Grup, di antaranya kebijakan penyusunan struktur organisasi, rekrutmen, manajemen kinerja, pengembangan pegawai, karier/ manajemen talenta, hubungan industrial, kompensasi & *benefit*, dan HCIS.	Develop standard policies and procedures for all HR pillars in PI Group, including: policies on organizational structure, recruitment, performance management, employee development, career/talent management, industrial relations, compensation & benefits, and HCIS.
		Menyusun profil dan kamus kompetensi teknis yang meliputi seluruh fungsi yang ada di PI Grup	Develop a profile and dictionary of technical competences covering all functions in PI Group.
		Melakukan standardisasi dan sosialisasi terhadap komponen-komponen di dalam remunerasi di seluruh entitas PI Grup	Standardize and socialize the components of remuneration across all PI Group entities.

No.	Sasaran Strategis Strategic Target	Program Kegiatan	Activity Program
		Membuat alat ukur berbasis kompetensi yang terstandar untuk proses rekrutmen dan seleksi agar mencapai kualitas kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan di seluruh Anak Perusahaan maupun *Holding*.	Create a standardized competency-based measurement tool for the recruitment and selection process in order to achieve the quality of candidates that meet the needs of the company across Subsidiaries and Holding.
		Melakukan kajian terhadap struktur organisasi tim SDM *Holding* dan Anak Perusahaan serta pembagian peran yang jelas dalam mengelola SDM. Menyusun rencana penerapan HRBP dan *Shared Service.*	Conduct a review of the organizational structure of the Holding and Subsidiary HR teams and a clear division of roles in managing HR. Develop a plan to implement HRBP and Shared Service.
		Melakukan pembaruan Peraturan Perusahaan (PP) serta menyusun tata kelola peran LKS bipartit dalam berhubungan dengan serikat pekerja. Selain itu, melakukan standardisasi terhadap komponen-komponen yang diatur di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan.	Updating Company Regulations (PP) and developing governance of the role of the bipartite LKS in dealing with trade unions. In addition, standardize the components stipulated in Collective Labor Agreements (CLAs) so that they are in accordance with the provisions of laws and regulations on labor.
		Membentuk tata kelola sistem SDM berdasarkan asas *availability, reliability, maintainability*, dan *supportability*.	Establish HR system governance based on the principles of availability, reliability, maintainability, and supportability, intainability, dan supportability.
		Melakukan implementasi HCIS *Single* Platform dengan tujuan untuk menyelaraskan proses-proses SDM mengintegrasikan sistem SDM antar perusahaan di dalam PI Grup.	Implementing HCIS Single Platform with the aim of harmonising HR processes and integrating HR systems between companies within PI Group.
		Mempersiapkan infrastruktur HCIS melalui pembuatan HC *dashboard* dengan *data real time* yang bertujuan untuk melakukan analisis terhadap kinerja dan pola perilaku pegawai.	Preparing HCIS infrastructure through the creation of HC dashboards with real time data aimed at analysing employee performance and behaviour patterns.
		Menciptakan *Learning Galaxy* dengan melakukan pengembangan dari *Learning Management System* (LMS) menjadi *Learning Experience Platform* (LXP).	Creating Learning Galaxy by developing from Learning Management System (LMS) to Learning Experience Platform (LXP).
		Menyusun program pengembangan bagi pegawai yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam hal *customer focus* (*external*), *product development/innovation, Operational excellence, Renewable Energy*.	Developed a development programme for employees that aims to improve employee capabilities in terms of: customer focus (external), product development/innovation, Operational excellence, Renewable Energy.
		Menyusun dan mengimplementasikan pengembangan terkait asesmen kompetensi teknis pada seluruh SME di semua fungsi.	Develop and implement developments related to technical competency assessment across SMEs in all functions.
		Menyusun proses *talent selection* dan mengidentifikasi dokumen/data yang diperlukan di dalam proses *talent selection*. Melakukan identifikasi terhadap pegawai-pegawai yang masuk ke dalam klasifikasi *top talent.*	Developed the talent selection process and identified the documents/data required in the talent selection process. Identify employees who are included in the top talent classification.

No.	Sasaran Strategis Strategic Target	Program Kegiatan	Activity Program
		Menyusun dan menyelaraskan jenjang karier yang berlandaskan kepada kompetensi kepada seluruh entitas di PI Grup untuk mempermudah mobilisasi pegawai. Menyusun program-program rotasi pegawai antar entitas.	Develop and align career paths based on competence for all entities in the PI Group to facilitate employee mobilization. Develop employee rotation programmes between entities.
		Meningkatkan kapabilitas *leader* agar mampu melaksanakan *performance cycle* dan memberdayakan pegawai-pegawai yang ada di bawahnya.	Improve the capability of leaders to be able to implement the performance cycle and empower the employees under them.
		Melakukan integrasi dan penyelarasan sistem *reward* yang dikaitkan dengan KPI individu serta menyiapkan program pengembangan yang sesuai untuk karyawan yang tidak perform.	Integrate and align the reward system with individual KPIs and prepare appropriate development programmes for non-performing employees.
		Menyusun dan mengimplementasikan program pengembangan untuk meningkatkan kapabilitas Tim SDM PI Grup, termasuk dalam pelaksanaan HXM dan *data analytics*.	Develop and implement development programmes to enhance the capability of PI Group's HR Team, including the implementation of HXM and data analytics.
		Mengidentifikasi posisi kritis dalam PI Grup dan mengembangkan rencana tindakan atau rencana suksesi untuk mempersiapkan pegawai dalam mengisi posisi-posisi kritis.	Identify critical positions within PI Group and develop action plans or succession plans to prepare employees to fill critical positions.
		Berpartisipasi dalam Program Digital Talent BUMN dengan menugaskan karyawan dengan pencapaian target kesertaan minimal sebanyak 12% dari jumlah keseluruhan SDM (organik dan non-organik) perusahaan, termasuk anak dan cucu perusahaan pada tahun 2023.	Participate in the SOE Digital Talent Programme by assigning employees with a minimum participation target of 12% of the company's total human resources (organic and non-organic), including subsidiaries and grandchildren by 2023.
		Melakukan restrukturisasi organisasi secara bertahap dari model hierarki menuju *network based* yang berlandaskan kepada prinsip *agile organizations*.	Gradually restructuring the organization from a hierarchical to a network-based model based on the principles of agile organizations.
		Melakukan kajian pemetaan terhadap pekerjaan atau peran yang dapat dikerjakan oleh pegawai organik, non-organik, dan pegawai alih daya.	Conduct a mapping study of jobs or roles that can be done by organic, non-organic, and outsourced employees.
		Menyusun standardisasi metode dan proses dalam menyusun analisis beban kerja sebagai acuan dalam menentukan jumlah kebutuhan pegawai.	Develop standardized methods and processes in preparing workload analysis as a reference in determining the number of employee needs
		Menyusun rencana pemenuhan kebutuhan pegawai, baik dari pegawai yang berstatus PKWT, PKWTT, maupun pegawai alih daya.	Develop a plan to fulfill employee needs, both from employees with the status of PKWT, PKWTT, and outsourced employees.
		Melanjutkan implementasi program-program budaya organisasi yang tertuang pada AKHLAK *Journey* PI Grup dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan program berupa pelaksanaan survei, salah satunya *Culture Values Assessment* (CVA) yang menggunakan *Barrett Model*.	Continuing the implementation of the organizational culture programs contained in the AKHLAK Journey of PI Group and evaluating the implementation of the program in the form of conducting surveys, one of which is the Culture Values Assessment (CVA) using the Barrett Model.

No.	Sasaran Strategis Strategic Target	Program Kegiatan	Activity Program
		Menyusun survei *employee experience* untuk menilai pengalaman bekerja (*work experience*) pegawai yang terdiri dari gairah/semangat bekerja, inovasi, dan produktivitas.	Developed an employee experience survey to assess employees' work experience consisting of passion, innovation, and productivity.
		Mengembangkan strategi *employee relation* yang bertujuan untuk meningkatkan keterikatan antar pegawai dan mengoptimalkan produktivitas, performa kerja, dan pengembangan pemimpin masa depan di dalam organisasi.	Develop an employee relations strategy that aims to increase engagement among employees and optimize productivity, work performance, and the development of future leaders within the organization.
5	Implementasi Pedoman Umum Investasi Dana Pensiun (Dapen) di Lingkungan PI Grup Implementation of the General Guidelines for Pension Fund Investments (Dapen) within PI Group	Sosialisasi Pedoman Umum Investasi Dana Pensiun di Lingkungan PI Grup.	Socialisation of the General Guidelines for Pension Fund Investments within the PI Group.
		Melaksanakan milestone Implementasi Pedoman Umum Investasi Dana Pensiun di Lingkungan PI Grup.	Implementation milestone of the General Guidelines for Pension Fund Investment within the PI Group.
		2023 – Dapen Kujang PPIP & Dapen PKT Grup.	2023 – Pension Fund Kujang PPIP & Pension Fund PKT Group.
6	Implementasi Pedoman Umum Pengelolaan Risiko Dana Pensiun dengan menggunakan Sistem Deteksi Dini Risiko (SDDR) Implementation of the General Guidelines for Pension Fund Risk Management using the Early Detection System for Risk (SDDR)	Sosialisasi Pedoman Umum Pengelolaan Risiko Dana Pensiun dengan menggunakan Sistem Deteksi Dini Risiko (SDDR).	Socialization of the General Guidelines for Pension Fund Risk Management using the Early Detection System for Risk (SDDR).
		Melaksanakan *milestone* Pedoman Umum Pengelolaan Risiko Dana Pensiun dengan menggunakan Sistem Deteksi Dini Risiko (SDDR).	Implementing the milestone of the General Guidelines for Pension Fund Risk Management using the Early Detection System for Risk (SDDR).
		2023 – Dapen PPIP Pusri & Dapen Kujang PPIP	2023 - Pension Fund PPIP Pusri & Pension Fund Kujang PPIP
7	Penyelesaian permasalahan investasi Reksadana Lautandhana di Dapen PPIP PKC Resolution of Lautandhana Mutual Fund investment issues in PKC's PPIP Provident Fund	Pengumpulan dan data klarifikasi data, dokumen dan bahan-bahan dari Dapen PPIP PKC.	Collection and clarification of data, documents and materials from Pension Fund PPIP PKC.

No.	**Sasaran Strategis** Strategic Target	**Program Kegiatan**	Activity Program
8	Perbaikan pengelolaan dan kinerja Dana Pensiun PPIP Pusri secara Berkesinambungan Continuous improvement in the management and performance of PPIP Pusri Pension Fund	• Menyusun *Roadmap* Penyehatan Dapensri. • Menyusun kajian atas skenario penempatan dana dan perhitungan mortalitas yang sesuai pada program dana pensiun. • Menyusun kajian risiko yang mencakup Identifikasi dan Mitigasi risiko atas investasi yang dilakukan oleh pengelola dana pensiun. • Sosialisasi kepada peserta atas program iuran pasti. • Konstruksi hukum atas kerja sama pengelolaan dana pensiun.	• Develop a roadmap for the restructuring of the pension fund. • Develop a study on the appropriate fund placement scenario and mortality calculation in the pension fund programme. • Develop a risk assessment that includes identification and mitigation of risks on investments made by pension fund managers. • Socialization to participants on defined contribution plans. • Legal construction of pension fund management cooperation.
9	*Sharing Session* Dana Pensiun dan Stand Promosi dalam rangka meningkatkan *awareness* dan edukasi karyawan dalam rangka persiapan pensiun. Pension Fund Sharing Session and Promotion Stand in order to increase awareness and educate employees in preparation for retirement.	*Brainstorming Sharing Session* Dana Pensiun dan *Stand* Promosi dengan Unit Kerja terkait.	Brainstorming Sharing Session on Pension Fund and Promotion Stand with related Work Units.
		Melaksanakan *Sharing Session* Dana Pensiun dan *Stand* Promosi dilaksanakan secara periodik.	Conducting Pension Fund Sharing Sessions and Promotion Stands on a periodic basis.

Teknologi Informasi
Information Technology

PTPI memiliki komitmen untuk mengembangkan TI sebagai sarana meningkatkan efisiensi dalam rantai produksi hingga pengembangan bisnis dari hulu hingga hilir. Untuk mewujudkan hal tersebut, Perusahaan menetapkan strategi sentralisasi TI di lingkungan PI Group.

PTPI is committed to developing IT as a means of improving efficiency in the production chain to business development from upstream to downstream. To make this happen, the Company has established an IT centralisation strategy within the PI Group.

PT Pupuk Indonesia (Persero) ("PTPI", "Perusahaan") menyadari pentingnya peran teknologi informasi (TI) dalam mendukung kegiatan usaha Perusahaan. Bagi PTPI, keberadaan TI sangat vital dalam mewujudkan sasaran strategis Perusahaan, terutama membantu dalam proses bisnis dan menunjang usaha yang dijalankan oleh Perusahaan.

Karena itulah, PTPI memiliki komitmen untuk mengembangkan TI sebagai sarana meningkatkan efisiensi dalam rantai produksi hingga pengembangan bisnis dari hulu hingga hilir. Untuk mewujudkan hal tersebut, Perusahaan menetapkan strategi sentralisasi TI di lingkungan PI Group.

Pemusatan tersebut meliputi seluruh sumber daya dalam pembentukan tim digital dan *advanced analytic* yang terpusat di PI Group. Strategi ini tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan Tahun 2020-2024.

PT Pupuk Indonesia (Persero) ("PTPI", "the Company") realizes the important role of information technology (IT) in supporting the Company's business activities. For PTPI, the existence of IT is vital in realizing the Company's strategic goals, especially assisting in business processes and supporting the business carried out by the Company.

Therefore, PTPI is committed to developing IT as a means of increasing efDiciency in the production chain to business development from upstream to downstream. To make this happen, the Company established an IT centralization strategy within the PI Group.

The centralization includes all resources in the formation of a digital and advanced analytics team centralized in PI Group. This strategy is contained in the Company's Long-Term Plan 2020-2024.

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA TI PERUSAHAAN

Secara struktural, pengelolaan TI di lingkungan Perusahaan dijalankan oleh Direktorat Transformasi Bisnis melalui Kompartemen Teknologi Informasi, seperti tercermin melalui struktur organisasi di bawah ini.

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE COMPANY'S IT MANAGER

Structurally, IT management within the Company is carried out by the Directorate of Business Transformation through the Information Technology Compartment, as reflected in the organizational structure below.

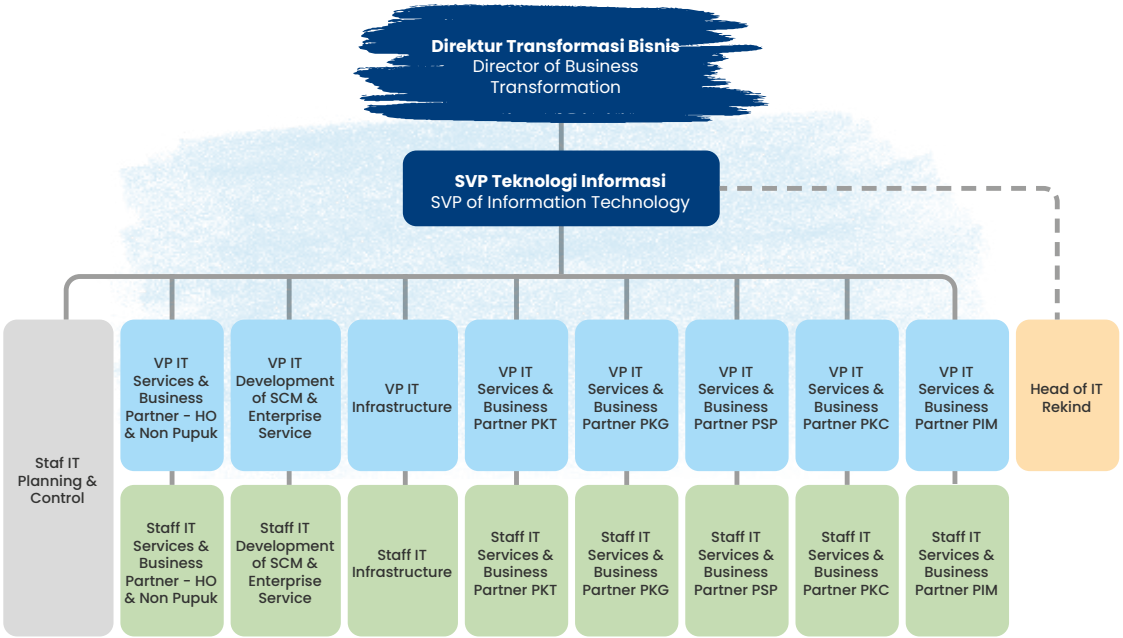

Mengacu pada struktur organisasi tersebut, tanggung jawab pengelolaan TI Perusahaan dijalankan oleh Kompartemen TI yang dipimpin oleh Senior Vice President dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Transformasi Bisnis.

Kompartemen TI merupakan sebuah divisi di Perusahaan yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengoordinasikan, mengarahkan dan mengevaluasi kebijakan dan arahan strategis TI, pengembangan dan implementasi solusi TI, serta pengelolaan operasional dan layanan TI dalam mendukung pencapaian target, strategi dan kebutuhan bisnis korporasi.

Per tanggal 1 Mei 2022, Kompartemen TI dikepalai oleh Ari Novan selaku penanggung jawab pengelolaan dan pengembangan TI PTPI.

TUGAS POKOK KOMPARTEMEN TEKNOLOGI INFORMASI

Ruang lingkup kerja yang dijalankan oleh Kompartemen Teknologi Informasi antara lain:

1. Mengelola Penerapan Tata Kelola TI di PTPI dan Entitas Anak.
2. Mengelola Pengembangan dan Operasional Sistem SAP untuk PTPI dan Entitas Anak.
3. Mengelola Pengembangan Sistem Aplikasi.
4. Mengelola Pengoperasian Infrastruktur dan Pelayanan TI untuk pengguna Layanan TI di PTPI.

Sedangkan tugas dan tanggung jawab Kompartemen TI, antara lain:

1. Mengelola, mengevaluasi dan memastikan penyusunan Master Plan TI, program kerja dan portofolio TI sesuai dengan target, strategi dan kebutuhan bisnis Perusahaan;
2. Mengelola, mengevaluasi dan memastikan tersedianya solusi TI yang dapat diandalkan, guna mendukung penyediaan informasi yang tepat, cepat dan terintegrasi dan dapat memberikan nilai tambah bagi Perusahaan;
3. Mengelola, mengevaluasi, dan memastikan pelaksanaan pengembangan sistem informasi berjalan dengan efektif, efisien, dan berkualitas;
4. Mengelola, mengevaluasi, dan memastikan pengelolaan perubahan (*change management*) pada sistem informasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Mengelola, mengevaluasi dan memastikan kegiatan operasional layanan TI dilakukan dengan efektif untuk menjamin ketersediaan, keamanan, keandalan, dan keakuratan layanan TI;

Referring to the organizational structure, the Company's IT management responsibilities are carried out by the IT Compartment led by a Senior Vice President and directly responsible to the Director of Business Transformation.

The IT Compartment is a division in the Company that is responsible for planning, coordinating, directing and evaluating IT policies and strategic directions, development and implementation of IT solutions, as well as managing IT operations and services in supporting the achievement of targets, strategies and corporate business needs.

As of May 1, 2022, the IT Compartment is headed by Ari Novan as the person in charge of PTPI IT management and development.

MAIN TASKS OF THE INFORMATION TECHNOLOGY COMPARTMENT

The scope of work carried out by the Information Technology Compartment includes:

1. Managing IT Governance Implementation at PTPI and Subsidiaries.
2. Manage SAP System Development and Operations for PTPI and Subsidiaries.
3. Managing Application System Development.
4. Manage the Operation of IT Infrastructure and Services for IT Service users at PTPI.

The duties and responsibilities of the IT Compartment include:

1. Manage, evaluate and ensure the preparation of IT Master Plan, work program and IT portfolio in accordance with the Company's targets, strategies and business needs;
2. Manage, evaluate and ensure the availability of reliable IT solutions, in order to support the provision of precise, fast and integrated information and can provide added value to the Company;
3. Manage, evaluate, and ensure the implementation of information system development runs effectively, efDiciently, and with quality;
4. Manage, evaluate, and ensure change management in information systems runs in accordance with applicable regulations;
5. Manage, evaluate and ensure IT service operational activities are carried out effectively to ensure the availability, security, reliability and accuracy of IT services;

6. Mengelola, mengevaluasi dan memastikan proses manajemen risiko TI yang andal dalam pelaksanaan program kerja dan proses operasional TI;
7. Mengawasi dan mengevaluasi seluruh proses kerja Unit Kerja TI agar sejalan dengan pedoman dan prosedur yang ditentukan dalam mendukung pengembangan proses bisnis Perusahaan;
8. Mengelola, mengevaluasi dan memastikan bahwa seluruh aset TI, termasuk lisensi, yang digunakan untuk penyampaian layanan TI dikelola sesuai dengan hukum dan peraturan serta kewajiban kontraktual yang berlaku;
9. Menyusun, mengelola dan memastikan terlaksananya pedoman strategis dan operasional TI sebagai acuan dalam pelaksanaan proses dan pola kerja di Unit Kerja TI;
10. Melaporkan kepada manajemen puncak mengenai kinerja dan peluang untuk peningkatan terhadap manajemen TI dan terhadap layanan TI.

6. Manage, evaluate and ensure a reliable IT risk management process in the implementation of IT work programs and operational processes;
7. Supervise and evaluate the entire work process of the IT Work Unit to be in line with the speciDied guidelines and procedures in supporting the development of the Company's business processes;
8. Manage, evaluate and ensure that all IT assets, including licenses, used for IT service delivery are managed in accordance with applicable laws and regulations and contractual obligations;
9. Develop, manage and ensure the implementation of IT strategic and operational guidelines as a reference in the implementation of processes and work patterns in the IT Work Unit;
10. Report to top management on performance and opportunities for improvement against IT management and against IT services.

SDM DAN SERTIFIKASI DI BIDANG TI

Hingga akhir tahun 2022, jumlah pegawai Kompartemen TI sebanyak 73 orang yang terdiri dari 26 orang di TI Pusat, 14 orang di Petrokimia Gresik, 8 orang di Pupuk Kujang, 11 orang di Pupuk Kaltim, 5 orang di Pupuk Iskandar Muda, 13 orang di Pupuk Sriwidjaja Palembang, dan 7 orang di Rekayasa Industri.

Dalam menjalankan fungsinya, Kompartemen TI Perusahaan didukung oleh SDM yang berpengalaman dan memiliki sertifikasi di bidangnya. Berikut jumlah sertifikasi SDM di bidang TI.

HR AND CERTIFICATION IN IT

Until the end of 2022, the number of IT Compartment employees is 73 people consisting of 26 people in Central IT, 14 people in Petrokimia Gresik, 8 people in Pupuk Kujang, 11 people in Pupuk Kaltim, 5 people in Pupuk Iskandar Muda, 13 people in Pupuk Sriwidjaja Palembang, and 7 people in Rekayasa Industri.

In carrying out its functions, the Company's IT Compartment is supported by experienced and certified human resources. The following is the number of HR certifications in the IT field.

Sertifikasi	Jumlah Karyawan Number of Employees	Certification
ITIL Foundation Certification	1	ITIL Foundation Certification
CCNA (Cisco Certified Network Associate)	3	CCNA (Cisco Certified Network Associate)
CEH (Certified Ethical Hacker)	2	CEH (Certified Ethical Hacker)
Development Consultant SAP NetWeaver '04 – Application Development Focus ABAP	1	Development Consultant SAP NetWeaver '04 - Application Development Focus ABAP
MTCNA (Mikrotik Certified Network Associate)	1	MTCNA (Mikrotik Certified Network Associate)
Data Protection Officer	1	Data Protection Officer
BNSP Skema Pengembang Web Pratama	1	BNSP Primary Web Developer Scheme
Certificate Network Defender (CND)	2	Certificate Network Defender (CND)
NSE Certified	1	NSE Certified
Chief Information Officer	2	Chief Information Officer
ISMS Lead to Implement ISO 27001	1	ISMS Lead to Implement ISO 27001
COBIT 2019 Foundation	5	COBIT 2019 Foundation
Comptia Security +	4	Comptia Security+

Sertifikasi	Jumlah Karyawan Number of Employees	Certification
Big Data Analyst with TÜV Rheinland Certified Qualification	3	Big Data Analyst with TÜV Rheinland Certified Qualification
AWS Certified Cloud Practitioner	2	AWS Certified Cloud Practitioner
AWS Certified Solutions Architect – Associate	1	AWS Certified Solutions Architect - Associate
DevOps Foundation Certification	6	DevOps Foundation Certification
Continuous Testing Foundation (CTF)SM Certification	3	Continuous Testing Foundation (CTF)SM Certification
Offensif Security Certified Professional (OSCP)	1	Offensive Security Certified Professional (OSCP)
EPI Certified Data Center Professional (CDCP)	1	EPI Certified Data Center Professional (CDCP)
Master Project Manager (MPM)	1	Master Project Manager (MPM)
Certified Assosiate in Project Management (CAPM)	1	Certified Associate in Project Management (CAPM)
BNSP Skema PWP (Pengembang Web Pratama)	1	BNSP PWP Scheme (Primary Web Developer)
ISO 27001 Foundation	2	ISO 27001 Foundation
MTA: Windows Server Administration Fundamentals	1	MTA: Windows Server Administration Fundamentals

PENGEMBANGAN SDM TI

Perusahaan senantiasa melaksanakan pengembangan dan peningkatan kompetensi dari SDM TI. Berikut disampaikan pelaksanaan program eksternal selain program internal pada tahun 2022 diuraikan dalam tabel di bawah ini.

IT WORKFORCE DEVELOPMENT

The company always carries out the development and improvement of the competence of IT human resources. The implementation of external programs in addition to internal programs in 2022 is described in the table below.

No.	Nama Pelatihan Training Name	Penyelenggara Organizer	Waktu Pelaksanaan Time	Peserta Participants
1	Webinar AKHLAK Memahami 6 konsep dasar dalam AKHLAK	Ari Ginanjar ACT Consulting	Januari January	1
2	Pelatihan Big Data Analyst	PT Tuv Nord Indonesia	Januari January	1
3	Pelatihan Penggunaan Aplikasi TEMAN PUSRI	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Januari January	1
4	Training Project Management (4.0)	Inixindo Yogyakarta	Januari January	1
5	Workshop Penyusunan Business Plan Pi Group BOD - 2 Batch 4	PT Pupuk Indonesia	Januari January	1
6	Paparan Ekspektasi Manajemen with Direktur SDM TK & Manajemen Risiko	PT Pupuk Indonesia	Januari January	4
7	Webinar Opening Bulan K3 Nasional 2022 (Healthy Lifestyle and Effective Weight Loss) dr. Christopher Andrian, M.Gizi, Sp.GK	PT Pupuk Kalimantan Timur	Januari January	7
8	Internalisasi Pelaporan LHKPN Transparansi dan Akurasi Pelaporan LHKPN sebagai Upaya Pencegahan Korupsi	PT Pupuk Indonesia & KPK	Januari January	9
9	Ngobrol Bareng Santai with BOD Pemberdayaan Potensi SDM menuju Pusri Maju 2025	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Januari January	5
10	Academy Data Science Full Syack Developer	Algoritma Data Science Academy	Januari January	2

No.	Nama Pelatihan Training Name	Penyelenggara Organizer	Waktu Pelaksanaan Time	Peserta Participants
11	How to Be Social? Memupuk Pengetahuan Bersosial Media Di Era Digital (Ndoro Kakung)	PT Pupuk Kalimantan Timur	Januari January	1
12	Online Classroom Talent Management	Kubik Coaching	Januari January	1
13	Pelatihan ERM Fundamental ISO 31000 & Simulasi SIMRISK	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Januari January	1
14	Pelatihan Managerial & Leadership Eselon V Tahun 2022	PT Alfa Dayasindo	Januari January	2
15	Pelatihan Shapping The Future Of Indonesia Through Digitalization	Economic Review	Januari January	1
16	Pelatihan TQM For Facilitator	Wahana Kendali Mutu	Januari January	1
17	Program Making Digital Talent-BUMN Innovation Management	Amoeba by Indonesia Telecomunication Digital Resea	Januari January	1
18	Roadshow Gerakan Nasional 1000 Startup Digital Tahun 2022	KOMINFO RI	Januari January	9
19	Workshop BluePrint Modul (CS,FI,CO,MM&SD) SAP SBU O&M di PI Group	PT Pupuk Indonesia	Januari January	1
20	Workshop Tindak Lanjut OFI Hasil Asesmen IQAF 2021	Indonesian Quality Awards Foundation (IQAF)	Januari January	1
21	Sharing Session Career Wisdom oleh Direktur SDM, TK & Manajemen Risiko PT Pupuk Indonesia (Persero)	PT Pupuk Indonesia	Januari January	13
22	Webinar Kesehatan, Pemaparan VIRAL 2022 dan Pengundian VIRAL Desember 2021	PT Pupuk Indonesia	Januari January	7
23	Workshop Tindak Lanjut OFI Asesmen BEF 2021	PT Pupuk Indonesia	Januari January	1
24	Sharing Session Bpk. Robby Saputra dari PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) "Membangun Customer Service"	PT Pupuk Indonesia	Januari January	11
25	Sharing Session dari Bpk. Achmad Sirrul Atho dengan tema "Pengelolaan Diklat"	PT Pupuk Indonesia	Januari January	1
26	Sharing Session bersama Bapak Muhammad Ikrar dengan tema "Learning & Development Framework, Value Chain, Knowledge Management & Inno	PT Pupuk Indonesia	Februari February	1
27	Sharing Session with Bapak Atyoko Utomo PT Angkasapura dengan tema "Organization Development"	PT Pupuk Indonesia	Februari February	1
28	Sharing Session bersama Ibu Dhea Novanda dari PT Semen Indonesia (Persero) dengan tema "Learning & Development Management"	PT Pupuk Indonesia	Februari February	1
29	Workshop SMKI dan Indeks KAMI Sektor Industri	Badan Siber dan Sandi Negara	Februari February	1
30	Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengawasan Kearsipan	PT Pupuk Indonesia	Februari February	1
31	Webinar Product Knowledge PKT 2022	PT Pupuk Kalimantan Timur	Februari February	2
32	Webinar Stepping Into Well-Being & Maintaining It	Riliv	Februari February	3
33	Soft Skills Needed In The Workplace (PMMB)	PT Pupuk Indonesia	Februari February	1
34	Webinar Emerging Leaders Talk	PT Pupuk Kalimantan Timur	Februari February	1

No.	Nama Pelatihan Training Name	Penyelenggara Organizer	Waktu Pelaksanaan Time	Peserta Participants
35	Sharing Session "Every Leader is a People Leader"	PT Pupuk Indonesia	Februari February	14
36	Sharing Session "Value Creation Through Digital Transformation"	PT Pupuk Indonesia	Maret March	14
37	Webinar Bijak Kelola Sampah untuk Bumi yang Lebih Indah dan Launching Dropbox Pupuk Indonesia	PT Pupuk Indonesia	Maret March	7
38	Sharing Session Career Wisdom "The Professionalisme"	PT Pupuk Indonesia	Maret March	10
39	Webinar Online "Excellent Public Speaking and Impactfull Presentation Skills"	PT Pupuk Indonesia	Maret March	2
40	Training HR Analytics (4.0)	National University of Singapore	Maret March	1
41	PELATIHAN BUILDING SERVICE CULTURE	Indonesia Contact Center Association	Maret March	7
42	Refreshment Training on ISO 37001 Anti-Bribery Management System	PT BSI Group Indonesia	Maret March	1
43	Workshop Management Risiko & Cyber Security Maturity Sektor Industri dan Jasa Konstruksi	Badan Siber dan Sandi Negara	Maret March	1
44	EMERGING LEADERS TALK 2	PT Pupuk Kalimantan Timur	Maret March	1
45	Webinar Memahami Data Integrity Sebagai Fondasi Manajemen Risiko Terpadu	CRMS	Maret March	2
46	Sharing Session "Bedah Buku Unboss"	PT Pupuk Indonesia	Maret March	11
47	PELATIHAN MANAGERIAL & LEADERSHIP ESELON III Tahun 2022 - Batch 2	PT WAHANA TATAR WIRAKELOLA	April	1
48	Program Motivasi dan Treatment Softskill "Mindfulness" Silaturahmi keluarga besar Direktorat SDM, TK, & MR	PT Pupuk Indonesia	April	1
49	Webinar Managing Work-life Harmony to Boost Employee Wellbeing & Productivity	PT Pupuk Kalimantan Timur	April	2
50	Webinar Menelisik Pasar Modal dari Kacamata Investor Relations	PT Pupuk Kalimantan Timur	April	2
51	Pelatihan Infografis dengan Powerpoint tahap II	PT Pupuk Indonesia	April	2
52	Webinar AKHLAK BUMN Muda Talk Series tema Amanah & Kompeten	PT Pupuk Indonesia	April	10
53	Pembimbing PKL	PT Pupuk Kalimantan Timur	April	2
54	Review Pelatihan Managerial & Leadership Eselon III	PT WAHANA TATAR WIRAKELOLA	Mei May	1
55	Pelatihan Penyusunan Examiner BEF 2022	PT Pupuk Indonesia	Mei May	1
56	Webinar AKHLAK BUMN Muda Talk Series Pupuk Indonesia Group Tema Harmonis & Loyal	PT Pupuk Indonesia	Mei May	14
57	PELATIHAN UAT IMPLEMENTASI SAP SBU O&M DI PUPUK INDONESIA	PUPUK INDONESIA	Mei May	1
58	Learn &Share Mindfulness & Happiness	PT Pupuk Indonesia	Mei May	14
59	Training & Certified COBIT 2019 30-31 Mei 2022 4.0	Inixindo Bandung	Mei May	1

No.	Nama Pelatihan Training Name	Penyelenggara Organizer	Waktu Pelaksanaan Time	Peserta Participants
60	Enrichment Tenaga Penjualan PSO Wilayah Barat Tahun 2022 Batch I	PT Pupuk Indonesia	Juni June	1
61	COBIT Foundation Certificate	Information Systems Audit and Control Association (ISACA)	Juni June	1
62	Workshop Tindak Lanjut OFI Hasil Asesmen IQAF 2021	IQAF	Juni June	1
63	Design Thinking Fundamentals	Corporate Innovation Asia	Juni June	1
64	Pelatihan Design Thinking	PT Pupuk Indonesia	Juni June	8
65	Emerging Leaders Talk - Seluk Beluk Investasi Rutin Bangunan Sarana & Engineering Services	PT Pupuk Kalimantan Timur	Juni June	4
66	Awareness ISO 27001 SMKI "Preventing Cyber Threats With ISO 27001 In The Digital Era"	Multimatics	Juni June	5
67	Indonesia HR Summit 2022	IHRS	Juni June	2
68	Training SAP Basis Administrator With DB2 Database	SAP Basis	Juni June	1
69	Sharing Knowledge Supply Chain Visibility Enhancement	IFFLI	Juni June	3
70	Webinar Gaya Hidup Minimalis dan Minim Sampa & Kick Off VIRAL Fit Squad Pupuk Indonesia Grup	PT Pupuk Idonesia	Juni June	5
71	Sosialisasi GCG & MR Bagi Seluruh Karyawan Non Organik	PT Pupuk Kalimantan Timur	Juli July	1
72	Talkshow Digitalization and Crowdfunding in Agricultural Business	PT Pupuk Indonesia	Juli July	10
73	Pembimbing PKL	PT Pupuk Kalimantan Timur	Juli July	1
74	Certified Associate in Project Management (CAPM) dan CAPM Exam	INIXINDO	Juli July	1
75	Pelatihan Instalasi dan Sistem E-KPI Individu	PT Pupuk Kaltim	Juli July	3
76	Kegiatan AKHLAK BUMN Muda & Srikandi Talk Series Pupuk Indonesia Group Tema Adaptif & Kolaboratif	PT Pupuk Kalimantan Timur	Juli July	17
77	Workshop Aplikasi Teman Pusri - Shipping	PT PUPUK SRIWIDJAJA	Juli July	3
78	Workshop Bimbingan Teknis Dunia Usaha Berintegritas Kolaborasi KPK dan PI	KPK & PIHC	Agustus August	23
79	Seminar Kesehatan - Say Goodbye to Low Backpain - dr. Ibrahim Agung, Sp.KFR-K		Agustus August	2
80	Training Mastering Agile Project Management (SCRUM)	Andalan	Agustus August	2
81	Training Soft Skills BOD-4, BOD-5 & TKNO Direktorat Transformasi Bisnis	PT Pupuk Indonesia	Agustus August	10
82	Webinar Mindfulness: Ways To Be Happy and More Productive	PT Riliv Psikologi Indonesia	Agustus August	4
83	Workshop Identifikasi Critical Incident Finding AKHLAK untuk Keluarga Pupuk Indonesia Group (Batch 2)	PT Pupuk Indonesia	September	1
84	Training Soft Skills BOD-1, BOD-2 & BOD-3 Direktorat Transformasi Bisnis	PT Pupuk Indonesia	September	9

No.	Nama Pelatihan Training Name	Penyelenggara Organizer	Waktu Pelaksanaan Time	Peserta Participants
85	Emerging Leader Talk 6 - Melek Hukum: Sebelum Masalah Menjemput	PT Pupuk Kalimantan Timur	September	1
86	Training Certified Network Defender (CND)	Inixindo Bandung	September	1
87	Kegiatan Briefing Assessment Center BOD-1 PT Pupuk Indonesia (Persero)	PT Pupuk Indonesia	Oktober October	1
88	Workshop dan Pembekalan Champion Asesmen Baldridge Excellence Framework (BEF) Pupuk indonesia	PT Pupuk Indonesia	Oktober October	2
89	EMERGING LEADERS TALK Ada Apa dengan MBP Corporation?	PT Pupuk Kalimantan Timur	Oktober October	3
90	Sosialisasi & Simulasi Tabletop BCMS	Konsultan Centria	November	5
91	Leadership Development Program Grade 3 2022 batch 1	ACT Consulting	November	1
92	Training Soft Skill Personal Development oleh Tina T. Kemala Intan	PT Pupuk Kalimantan Timur	November	6
93	Pelatihan LDP Band 4 Batch 3	ACT Consulting	November	1
94	Pelatihan Introduction To Pass 99 Integrated Management System	PT BSI Indonesia	November	2
95	Pelatihan IT Sistem Management	PT Mitratex	Desember December	19
96	Training Auditor Internal ISO/IEC 20000-1:2018	PT Mitratex	Desember December	19

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Perusahaan telah menyusun pedoman strategis TI untuk mengatur agar pengembangan dan penerapan TI selaras dengan strategis bisnis Perusahaan. Tata kelola TI juga mencakup penanganan gangguan, keamanan serta pemulihan bencana demi memastikan senua risiko utama dapat diidentifikasi dan dikelola. Seluruh perkembangannya dilaporkan pada Direksi. Dengan demikian, keberadaan TI dapat memberikan dukungan secara optimal dan nilai tambah bagi Perusahaan. Selain itu, pendayagunaan sumber daya TI dalam proses perencanaan, pengadaan dan pengembangan di Perusahaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Pedoman strategis tersebut memberikan panduan tata cara dalam melaksanakan pengelolaan TI yang meliputi:

1. Peran TI di dalam Perusahaan;
2. Perencanaan TI;
3. Kerangka Kerja Proses dan Organisasi TI;
4. Pengelolaan Investasi TI;
5. Pengelolaan Sumber Daya TI;
6. Pengelolaan Proyek TI; dan
7. Penanganan Kebutuhan & Identifikasi Solusi.

INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE

The Company has developed IT strategic guidelines to regulate the development and implementation of IT in line with the Company's business strategy. IT governance also covers intrusion management, security and disaster recovery to ensure all key risks are identified and managed. All progress is reported to the Board of Directors. Thus, the existence of IT can provide optimal support and added value to the Company. In addition, the utilization of IT resources in the planning, procurement and development process in the Company can be done effectively and efficiently.

The strategic guidelines provide guidance on how to carry out IT management which includes:

1. The Role of IT in the Company;
2. IT planning;
3. IT Process and Organization Framework;
4. IT Investment Management;
5. IT Resource Management;
6. IT Project Management; and
7. Assessment needs & Solution Identification.

ROADMAP TEKNOLOGI INFORMASI

Perusahaan telah menetapkan *roadmap* pengembangan TI yang tertuang dalam *Master Plan* TI PI Grup Tahun 2020-2024. *Roadmap* tersebut terbagi atas 3 (tiga) portofolio, yaitu:

1. *Business Application*
2. *Technology & Infrastructure*
3. *IT Operating Model & Governance*

INFORMATION TECHNOLOGY ROADMAP

The Company has established an IT development roadmap which is contained in the PI Group IT Master Plan 2020-2024. The roadmap is divided into 3 (three) portfolios, namely:

1. Business Application
2. Technology & Infrastructure
3. IT Operating Model & Governance

PENCAPAIAN TAHUN 2022

Sepanjang tahun 2022, pencapaian yang telah direalisasikan oleh Kompartemen TI diuraikan dalam tabel di bawah ini.

ACHIEVEMENT YEAR 2022

Throughout 2022, the achievements realized by the IT Compartment are outlined in the table below.

No.	Kelompok Inisiatif	Nama Inisiatif	Uraian	Description
1	Business Application	Pengembangan *Salesman* App Salesman App Development	Pengembangan aplikasi yang digunakan *salesman* di seluruh wilayah pemasaran Pupuk Indonesia yang memiliki kapabilitas untuk: a. *Task management* dan *routing salesman* (*tracking salesman activity*) b. Evaluasi pencapaian KPI dan target salesman c. *Reporting* terkait kondisi pasar (*market intelligence*)	Development of an application used by salesmen in all Pupuk Indonesia marketing areas that has the capability to: a. Task management and salesman routing (tracking salesman activity) b. Evaluation of KPI achievement and salesman targets c. Reporting on market conditions (market intelligence)
		Pengembangan Aplikasi Program Makmur (i-Farms) Application Development of the Prosperous Program (i- Farms)	Pengembangan aplikasi penunjang program Makmur untuk modul: a. Modul Pendaftaran Petani & Lahan b. Modul Budidaya Tanaman c. Modul Integrasi Ekosistem d. Modul *Event Reporting & Dashboard*	Development of a supporting application for the Makmur program for the: a. Farmer & Land Registration Module b. Crop Cultivation Module c. Ecosystem Integration Module d. Event Reporting & Dashboard Module
		Pengembangan Digitalisasi *Trading Operation* Development of Digitalization of Trading Operation	Pengembangan sistem untuk mendukung operasional *trading* dan *data analytic* untuk mendapatkan harga pembelian dan penjualan yang lebih kompetitif.	System development to support trading operations and data analytics to obtain more competitive buying and selling prices.
		Implementasi *Warehouse Management* Warehouse Management Implementation	Implementasi & *Roll-Out* SAP Modul *Warehouse Management* di PI Grup untuk memberikan dukungan kinerja pengelolaan pergudangan (*spare part*)	Implementation & Roll-Out of SAP Warehouse Management Module in PI Group to provide support for warehousing management performance (spare parts)
		Implementasi SAP SBU O&M PI Group Implementation of SAP SBU O&M PI Group	Implementasi ERP SAP untuk SBU O&M di 5 (Lima) Anak Perusahaan (PKT, PKG, PSP, PKC & PIM) yaitu 5 modul yang terintegrasi (CS, FI, CO, MM, SD) untuk menjalankan proses bisnis SBU O&M dan dapat dipantau oleh PI maupun Anak Perusahaan.	Implementation of SAP ERP for SBU O&M in 5 (Five) Subsidiaries (PKT, PKG, PSP, PKC & PIM), namely 5 integrated modules (CS, FI, CO, MM, SD) to run SBU O&M business processes and can be monitored by PI and Subsidiary.
		Implementasi PSAK 71 Implementation of PSAK 71	Pengembangan sistem yang digunakan dalam perhitungan PSAK 71 sampai dengan level cucu perusahaan.	Development of the system used in the calculation of PSAK 71 up to the level of the company's grandchildren.

No.	Kelompok Inisiatif	Nama Inisiatif	Uraian	Description
		Simulasi Perhitungan COGM Ammonia & Urea Ammonia & Urea COGM Calculation Simulation	Potensi efisiensi COGM Ammonia dan Urea di PT Petrokimia Gresik melalui optimasi biaya utilitas berdasarkan data historis realisasi produksi 6 bulan terakhir.	Potential COGM efDiciencyof Ammonia and Urea at PT Petrokimia Gresik through utility cost optimization based on historical data of production realization in the last 6 months.
		Safety Stock Calculation Tools	Perhitungan optimum *nilai safety stock, reorder point, reorder size*, nilai maksimum dan minimum berdasarkan perhitungan statistik.	Optimal calculation of safety stock value, reorder point, reorder size, maximum and minimum values based on statistical calculations.
		Prediksi Harga Bahan Baku Raw Material Price Prediction	Permodelan prediksi harga bahan baku (DAP & KCl) sebagai bahan acuan penentuan strategi perusahaan dalam optimasi harga penjualan.	Modeling of raw material price predictions (DAP & KCl) as a reference material for determining company strategy in
		Optimasi S&OP S&OP Optimization	Simulasi profitabilitas setiap produk dengan membandingkan skenario yang direncanakan dalam proses penjualan dan operasi produksi.	Simulate the profitability of each product by comparing the planned scenarios in the sales process and production operations.
		Pengembangan *Dashboard* Operasional Development of Operational Dashboard	Penyelesaian *development dashboard* operasional, antara lain: *Monitoring* S&OP, Program Makmur, *Performance Cockpit* KBUMN, *Early Warning Lead Time, Monitoring* Bahan Baku, Survei Gudang.	Completion of operational dashboard development, including: S&OP Monitoring, Prosperous Program, KBUMN Performance Cockpit, Early Warning Lead Time, Raw Material Monitoring, Warehouse Survey.
		Ekosistem Rekan/*Retail Management System* Partner Ecosystem/Retail Management System	Rekan merupakan Ekosistem Digital yang dikembangkan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) dalam upaya membangun sistem yang terintegrasikan dari hulu ke hilir. Dengan melibatkan *stakeholder* terkait untuk turut andil dalam proses bisnis PT Pupuk Indonesia. Dengan harapan Ekosistem Digital yang dibangun dapat mengatasi permasalahan yang melibatkan mitra bisnis terkait dalam kegiatan bisnisnya.	Partner is a Digital Ecosystem developed by PT Pupuk Indonesia (Persero) in an effort to build an integrated system from upstream to downstream. By involving relevant stakeholders to take part in PT Pupuk Indonesia's business processes. With the hope that the Digital Ecosystem that is built can overcome issues involving related business partners in its business activities.
		Indigo Outbound Logistic	*Indigo Outbound Logistic* merupakan ekosistem yang berisikan beberapa aplikasi yang mendukung dalam pemantauan pendistribusian pupuk di Pupuk Indonesia di sektor Lini 1 hingga sektor lini 4 (konsumen distributor/ kios/petani) untuk memastikan produk pupuk tersalurkan dengan tepat sasaran. Terdiri dari: • *Sistem Port Management* • *Fleet Management* • *Truck Tracking* • *Vessel Tracking*	Indigo Outbound Logistic is an ecosystem that contains several applications that support the monitoring of fertilizer distribution at Pupuk Indonesia in the 1st line sector to the 4th line sector (distributor consumers/kiosks/farmers) to ensure fertilizer products are distributed on target. Consists of: • Port Management System • Fleet Management • Truck Tracking • Vessel Tracking
2	Technology & Infrastructure	Optimalisasi Infrastruktur Infrastructure Optimization	Pemenuhan kebutuhan sarana infrastruktur untuk operasional data/koneksi, aplikasi-aplikasi/ sistem baru dan sarana kerja pengolah data perusahaan yang mendukung peningkatan layanan TI.	Fulfillment of infrastructure needs for data operations/connections, new applications/systems and corporate data processing work facilities that support improved IT services.

No.	Kelompok Inisiatif	Nama Inisiatif	Uraian	Description
3	IT Operating Model & Governance	Sertifikasi ISO/IEC 20000-1:2018 ISO/IEC 20000-1:2018 Certification	Sertifikasi ISO/IEC 20000-1:2018 mengenai Sistem Manajemen Layanan TI dengan ruang lingkup sistem ERP.	ISO/IEC 20000-1:2018 certification regarding IT Service Management System with the scope of ERP system.
		Redesain User Access Matrix	*Update* desain hak akses pada sistem ERP sebagai pendukung operasional bisnis perusahaan sesuai dengan struktur organisasi terkini.	Update the design of access rights to the ERP system to support the company's business operations in accordance with the current organizational structure.
		Enterprise Architecture	Melakukan penyusunan dan penggambaran metamodel *enterprise architecture* untuk PI Holding.	Prepare and describe the enterprise architecture metamodel for PI Holding.

INVESTASI TEKNOLOGI INFORMASI

Sepanjang tahun 2022, Kompartemen TI telah merealisasikan investasi sebesar Rp58 miliar. Anggaran tersebut dipergunakan untuk:

1. Implementasi dan *Enhancement System*.
2. *Upgrade* dan optimalisasi infrastruktur jaringan, *server* dan *storage*.
3. Pembelian lisensi *software*.

RENCANA PENGEMBANGAN TI 2023

Pada tahun 2023, Perusahaan telah menetapkan rencana pengembangan di bidang TI, yang antara lain mencakup:

Business Application

1. *Enhancement* REKAN yang terintegrasi dengan sistem internal dan eksternal (himbara & fintech):
   a. *Monitoring* Kios Pupuk Lengkap (KPL): Banyak kios terduplikasi, sehingga diharapkan teridentifikasi dengan REKAN.
   b. *Monitoring* dokumen Penagihan: ketika sudah disalurkan dari REKAN, ada dokumen penagihan (*Roll out*).
   c. *Monitoring* realisasi penyaluran pupuk bersubsidi ke distributor (F5): termasuk penyaluran distributor ke kios (*minor enhancement*).
2. *Warehouse Management System* sampai dengan Lini I, II, dan III
   Monitoring stok dan FIFO serta pengaturan *layout* gudang pupuk di Lini I, II, dan III.
3. Integrasi REKAN & Ifarm
   Mempercepat implementasi digitalisasi program makmur (IFARMS RMS).
4. Implementasi ekosistem *Retail Integrated Distribution and Outbound Logistic* (Indigo) *Track and Trace* Calon Petani Calon Lahan Peta *Arcgis Desktop Advanced*.
5. Implementasi SISTRO

INFORMATION TECHNOLOGY INVESTMENT

Throughout 2022, the IT Compartment has realized an investment of Rp58 billion. The budget was used for:

1. System Implementation and Enhancement.
2. Upgrade and optimization of network, server and storage infrastructure.
3. Purchase of software license.

IT DEVELOPMENT PLAN 2023

By 2023, the Company has established a development plan in the IT field, which includes:

Business Application

1. Enhancement of REKAN that is integrated with internal and external systems (himbara & fintech):
   a. Complete Fertilizer Kiosk (KPL) Monitoring: Many kiosks are duplicated, so it is expected to be identiDied with REKAN.
   b. Billing document monitoring: when it is disbursed from REKAN, there is a billing document (Roll out).
   c. Monitoring the realization of subsidized fertilizer distribution to distributors (F5): including distributor distribution to kiosks (minor enhancement).
2. Warehouse Management System to Line I, II, and III
   Stock and FIFO monitoring and layout of fertilizer warehouses in Line I, II, and III.
3. REKAN & Ifarm Integration
   Accelerate the implementation of the digitalization of the prosperous program (IFARMS RMS).
4. Implementation of Retail Integrated Distribution and Outbound Logistics (Indigo) ecosystem Track and Trace Prospective Farmers Prospective Land Maps Arcgis Desktop Advanced.
5. SISTRO Implementation

6. Sistem Registrasi Tahap II (Dimas Non Subsidi)
   Customer produk lain serta *customer-customer* yang ada di PIN dan Cucu Perusahaan dari 5 Anak Perusahaan Produsen dapat melakukan registrasi sehingga dapat memiliki *data based customer* yang valid.
7. Pengembangan sistem denda keterlambatan
   Pengembangan sistem denda keterlambatan pengambilan pupuk bersubsidi di gudang lini III Produsen oleh Distributor dan penerbitan tagihan otomasi yang terintegrasi dengan WCM & SAP dalam memenuhi rekomendasi BPK RI.
8. Sistem Analisis Strategis Perencanaan dan Pengaturan Pupuk Bersubsidi berbasis Data History 5 tahun.
   Data yang digunakan adalah realisasi F5 (Penembusan Distributor), F6 (Penyaluran kepada Petani), dan data produksi masing-masing pabrik, serta data *history* alokasi dan kebutuhan masing-masing wilayah.
9. HCIS *Single Platform*: Administrasi & Operasional SDM
   Sistem administrasi dan operasional SDM:
   - Modul *Travel Management.*
   - Modul administrasi perubahan data pribadi.
   - Modul pengajuan izin dan cuti.

TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR

1. *Bandwitdh Management*/IAM
   Melakukan instalasi *bandwidth management* dengan fungsi sebagai berikut:
   a. Menjamin dan memberikan garansi kelangsungan kegiatan operasional yang menggunakan internet.
   b. Mengelola alokasi atau kuota *bandwidth* sesuai dengan fungsi dan area yang berkepentingan, sehingga dapat meningkatkan aktivitas operasional.
   c. Mengurangi penyalahgunaan internet yang dapat mempengaruhi aktivitas operasional.
   d. Meningkatkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengatur aktivitas pengguna internet sampai ke level *end user* dan jenis aplikasi.
   e. Mendapatkan pelaporan audit/*internal report center* dari penggunaan *bandwidth* secara menyeluruh dan mendalam dari masing-masing aktivitas internet.
2. Peremajaan Infrastruktur
   Meningkatkan reliabilitas dan aksesibilitas jaringan komputer melalui peremajaan perangkat *network* dengan peningkatan kapasitas *bandwith* jaringan *backbone*.
3. *Server and EUC Optimization*

6. Phase II Registration System (Dimas Non-Subsidized)
   Other product customers as well as existing customers in PIN and Cucu Perusahaan from 5 Subsidiaries Manufacturers can register so that they can have a valid customer data base.
7. Development of a late fee system
   Development of a penalty system for late collection of subsidized fertilizers at the Producer's line III warehouse by Distributors and issuance of automation bills integrated with WCM & SAP in fulfilling BPK RI recommendations.
8. Strategic Analysis System for Planning and Regulating Subsidized Fertilizers based on 5-year Data History
   The data used is the realization of F5 (Distributor Penembusan), F6 (Distribution to Farmers), and production data for each factory, as well as historical data on allocations and needs for each region.
9. HCIS Single Platform: HR Administration & Operations
   HR administrative and operational systems:
   - Travel Management Module.
   - Personal data change administration module.
   - Permission and leave application module.

TECHNOLOGY & INFRASTRUCTURE

1. Bandwidth Management/IAM
   Perform bandwidth management installation including the following functions:
   a. Guarantee and provide guarantees for the continuity of operational activities that use the internet
   b. Manage bandwidth allocation or quota according to functions and areas of interest, so as to improve operational activities.
   c. Reduce internet abuse that can affect operational activities
   d. Improve the ability to identify and regulate internet user activities down to the end user level and application type
   e. Obtain audit/internal report center reporting of bandwidth usage thoroughly and in-depth from each internet activity.

2. Infrastructure Rejuvenation
   Improve the reliability and accessibility of computer networks through the rejuvenation of Network devices with increased bandwidth capacity of the backbone network.
3. Server and EUC Optimization

Melakukan *upgrade* perangkat *network, server,* dan *end user computing* untuk mendukung proses bisnis perusahaan.

4. Migrasi Data Center
   a. Melakukan diskusi dengan vendor penyedia *public cloud* (i.e. Google, Amazon, Microsoft) dan *private cloud* (i.e. Telkom, Biznet) untuk mendapatkan *future design* DC yang sesuai kebutuhan PI Grup dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap tuntutan bisnis.
   b. Melakukan *Proof of Concept* (PoC) terkait migrasi *existing environment* menuju ke salah satu *environment* yang berpotensi digunakan (OpenStack) dengan melakukan migrasi *database* dari Unix ke Linux dan migrasi aplikasi ke arah *container orchestration* (Kubernetes).
   c. Mengajukan proposal ke manajemen terkait opsi migrasi data center (teknologi, risiko, *timeline*, anggaran).
   d. Melakukan migrasi data center sesuai keputusan dan arahan manajemen.

IMPROVING IT OPERATING MODEL & GOVERNANCE

1. Implementasi ISO 27001
   Implementasi standar ISO terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi.
2. *User Access Control*
   Implementasi *user access matrix* sesuai dengan struktur organisasi terkini.
3. *Enterprise Architecture* (EA) *modelling Implementation*
   Implementasi sistem enterprise arsitektur untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis dari perusahaan.

Upgrading network devices, servers and end user computing to support the company's business processes.

4. Data Center Migration
   a. Conduct discussions with vendors of public cloud (i.e. Google, Amazon, Microsoft) and private cloud (i.e. Telkom, Biznet) to get a future design DC that suits PI Group's needs and has the ability to adapt to business demands.
   b. Conduct Proof of Concept (PoC) related to migrating the existing environment to one of the potential environments (OpenStack) by migrating the database from Unix to Linux and migrating applications towards container orchestration (Kubernetes).
   c. Submit proposals to management regarding data center migration options (technology, risk, timeline, budget).
   d. Performed data center migration in accordance with management decisions and directives.

IMPROVING IT OPERATING MODEL & GOVERNANCE

1. ISO 27001 Implementation
   Implementation of ISO Standards related to Information Security Management Systems.
2. User Access Control
   Implementation of user access matrix in accordance with the current organizational structure.
3. Enterprise Architecture (EA) modeling Implementation
   Implementation of enterprise architecture system to improve the effectiveness and efficiency of the company's business.

Riset dan Inovasi
Research and Innovation

Dalam rangka meningkatkan keahlian dan pengetahuan tentang industri pupuk, pertanian serta wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait, Kompartemen IFRI melaksanakan pengembangan kompetensi untuk terus meningkatkan peran riset dalam mendukung kinerja Perusahaan

In order to improve expertise and knowledge of the fertilizer industry, agriculture and related science and technology insights, the IFRI Compartment carries out competency development to continuously improve the role of research in supporting the Company's performance.

Riset merupakan elemen penting dalam mendukung kinerja usaha PT Pupuk Indonesia (Persero) ("PTPI", "Perusahaan") yang berkesinambungan. Untuk itu, riset yang dilakukan bersama mitra strategis diarahkan untuk mendukung Perusahaan serta entitas anak (PI Grup) merespons perkembangan pasar.

Perusahaan meyakini bahwa riset mampu memberikan nilai tambah, baik pada PTPI secara individual maupun kelompok usaha. Hal itu ditunjukkan melalui temuan riset terkait adanya ruang yang besar bagi pengembangan PI Grup.

Perusahaan melakukan riset secara sistematis, terperinci, terencana, mengikuti konsep ilmiah dengan metodologi paling tepat yang didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di bidangnya. Fokus riset Perusahaan untuk mendapatkan, menyempurnakan, dan memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan bahan baku/penunjang, proses/teknologi, produk, pasar, lingkungan dan sarana penunjang lainnya. Upaya tersebut dilakukan secara konsolidasi untuk pertumbuhan dan pengembangan bisnis Perusahaan.

Research is an important element in supporting the sustainable business performance of PT Pupuk Indonesia (Persero) ("PTPI", "the Company"). For this reason, research conducted with strategic partners is directed to support the Company and its subsidiaries (PI Group) to respond to market developments.

The company believes that research can provide added value, both to PTPI individually and the business group. This is shown through research findings related to the large space for the development of PI Group.

The Company conducts research in a systematic, detailed, planned manner, following scientific concepts with the most appropriate methodology supported by Human Resources (HR) who are competent in their fields. The focus of the Company's research is to obtain, refine and solve problems related to raw materials/support, process/technology, products, markets, environment and other supporting facilities. These efforts are carried out in a consolidated manner for the growth and development of the Company's business.

STRUKTUR ORGANISASI FUNGSI RISET

Riset Perusahaan dikelola oleh Kompartemen Indonesia *Fertilizer Research Institute* (IFRI) yang berada di bawah Direktur Transformasi Bisnis. IFRI membawahi Departemen Perencanaan Riset dan kelompok fungsional seperti Riset Produk, Riset Teknologi dan Riset Kebijakan Pupuk.

RESEARCH FUNCTION ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Corporate Research is managed by the Indonesia Fertilizer Research Institute (IFRI) Compartment under the Director of Business Transformation. IFRI oversees the Research Planning Department and functional groups such as Product Research, Technology Research and Fertilizer Policy Research.

Struktur Organisasi Fungsi Riset

Research Function Organizational Structure

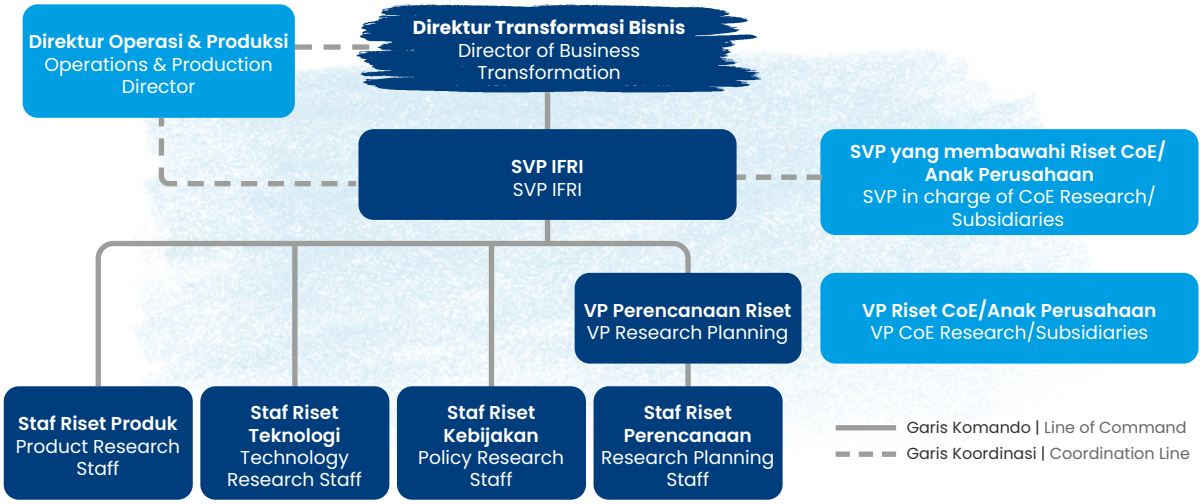

Center of Excellence	**Fokus Bidang/Keunggulan** | Focus Area/Excellence	
	Umum General	**Spesifik** Specific
PT Petrokimia Gresik	• Produk dan layanan terkait komoditas pangan dan hortikultura • Pemanfaatan limbah industri pupuk	• *Precision Farming* Komoditas Pangan • Produk efisien P dan K • Pupuk organik • Pupuk untuk pertanian organik • Dekomposisi biomassa pertanian
	• Products and services related to food and horticultural commodities • Utilization of fertilizer industry waste	• Precision Farming of Food Commodities • P and K efficient products • Organic fertilizer • Fertilizer for organic farming • Decomposition of agricultural biomass
PT Pupuk Kujang	• Produk dan layanan terkait komoditas pangan dan hortikultura • Pemanfaatan limbah industri pupuk	• *Advanced biofertilizer* • *Smart farming basis greenhouse* • *Controlled-release fertilizer* • *Water-soluble Fertilizer*
	• Products and services related to food and horticultural commodities • Utilization of fertilizer industry waste	• Advanced biofertilizer • Smart farming basis greenhouse • Controlled-release fertilizer • Water-soluble Fertilizer
PT Pupuk Kaltim	• Produk dan layanan terkait komoditas perkebunan • Pemanfaatan limbah industri pupuk	• *Precision Farming* Komoditas Sawit • Produk untuk lahan gambut dan reklamasi tambang • *Blue Ammonia Technology* • Dekomposisi biomassa pertanian
	• Products and services related to plantation commodities • Utilization of fertilizer industry waste	• Precision Farming of Palm Commodities • Products for peat-land and mine reclamation • Blue Ammonia Technology • Decomposition of agricultural biomass
PT Pupuk Iskandar Muda	• Implementasi produk dan layanan PI Grup • Pemanfaatan limbah industri pupuk	• *Smart farming basis open field* • *Green/Blue Ammonia Technology*
	• Implementation of PI Group products and services • Utilization of fertilizer industry waste	• Smart farming basis open field • Green/Blue Ammonia Technology
PT Pusri Palembang	• Produk dan layanan terkait komoditas perkebunan • Pemanfaatan limbah industri pupuk	• *Precision Farming* Komoditas Tebu • *Nanofertilizer* • Biostimulan • *Smart farming* basis *open field* • Pupuk dengan *Nitrogen stabilizer*
	• Products and services related to plantation commodities • Utilization of fertilizer industry waste	• Precision Farming of Sugarcane Commodities • Nanofertilizer • Biostimulants • Smart farming base open field • Fertilizer with Nitrogen stabilizer
PT Rekayasa Industri	• *Up-scale* teknologi Proses Agrokimia dan Petrokimia • Teknologi Produksi *Advanced Fertilizer*	
	• Up-scale Agrochemical and Petrochemical Process technology • Advanced Fertilizer Production Technology (CRF, SRF, Chemical)	
PT PI Utilitas	• Teknologi utilitas pabrik pupuk • Teknologi *Carbon Capture Utility & Storage*	
	• Fertilizer plant utility technology • Carbon Capture Utility & Storage Technology	

Struktur organisasi fungsi riset saat ini dipimpin *Senior Vice President* yang dijabat oleh Surahmad Wiji Widodo yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 083/KU/E10/SK/2021 tanggal 5 Agustus 2021. Profil SVP IFRI selaku penanggung jawab pengelolaan dan pengembangan riset di lingkup Perusahaan disajikan di bawah ini.

The organizational structure of the research function is currently led by a Senior Vice President, Surahmad Wiji Widodo, who was appointed based on Board of Directors Decree No. 083/KU/E10/SK/2021 dated August 5, 2021. The profile of SVP IFRI as the person in charge of managing and developing research within the Company is presented below.

Surahmad Wiji Widodo

SVP IFRI

Surahmad Wiji Widodo

SVP IFRI

Warga Negara | Citizen	Indonesia	Indonesian
Usia | Age	52 tahun	52 years old
Tempat, Tanggal, Lahir Place, Date of Birth	Samarinda, 8 Januari 1970	Samarinda, January 8, 1970
Periode Jabatan Position Period	Menjabat terhitung sejak 5 Agustus 2021	Served since August 5, 2021
Bergabung di Perusahaan Joining a Company	24 Januari 2012	January 24, 2012
Domisili | Domicile	Bogor, Jawa Barat	Bogor, West Java
Pendidikan | Education	• Magister Teknik Kimia dari ITB (2007) • Sarjana Teknik Kimia dari UGM (1994)	• Master of Chemical Engineering from ITB (2007) • Bachelor of Chemical Engineering from UGM (1994)
Pengalaman Kerja Work Experience	• VP Perencanaan Riset (2020-2021) • VP Riset Produk (2016-2020) • Manajer Riset dan Teknologi (2015–2016)	• VP Research Planning (2020-2021) • VP Product Research (2016-2020) • Research and Technology Manager (2015- 2016)

FUNGSI UTAMA IFRI

Secara umum, fungsi utama yang dijalankan IFRI adalah mengoordinasikan, mengarahkan, mengevaluasi, merumuskan sasaran dan mengelola seluruh kegiatan riset di lingkungan Perusahaan dan *Center of Excellence* (Anak Perusahaan). Tujuan dari pelaksanaan fungsi tersebut dalam rangka menunjang penelitian dan kajian dalam bidang riset produk, riset teknologi serta riset kebijakan pupuk yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Adapun inisiatif strategis yang menjadi sasaran utama dari IFRI adalah:

1. Mengembangkan *Customer Centric* R&D dan produk yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi tanaman;
2. Mengembangkan solusi pertanian (*Agrosolution*) sebagai upaya dalam menciptakan keterikatan dengan konsumen;
3. Mendukung *yield productivity* dan keamanan pangan melalui *set-up* dari *research institute* dan melakukan riset pasar & advokasi *policy development;*
4. Memperkuat R&D *Operating Model* dan organisasi yang solid.

IFRI MAIN FUNCTIONS

In general, the main function of IFRI is to coordinate, direct, evaluate, formulate goals and manage all research activities within the Company and the Center of Excellence (Subsidiaries). The purpose of implementing this function is to support research and studies in the field of product research, technology research and fertilizer policy research that can improve the company's competitiveness. The strategic initiatives that are the main targets of IFRI are:

1. Develop Customer Centric R&D and products that meet the nutritional needs of plants;
2. Developing agrosolutions as an effort to create customer engagement;
3. Supporting yield productivity and food safety through the set-up of research institutes and conducting market research & advocacy policy development;
4. Strengthened R&D Operating Model and solid organization.

SDM RISET

Pada tahun 2022, jumlah SDM riset sebanyak 56 personel, yang terbagi menjadi 9 personel di IFRI (*holding*) dan 47 orang di COE (entitas Anak Perusahaan). SDM tersebut berasal dari berbagai bidang keilmuan, antara lain pertanian, teknik kimia, teknik mesin, manajemen, bioteknologi dan keilmuan lainnya dengan jenjang pendidikan sarjana hingga doktor. Adapun rincian SDM riset diuraikan pada tabel di bawah ini:

RESEARCH HR

In 2022, the number of research human resources is 56 personnel, divided into 9 personnel at IFRI (holding company) and 47 people at COE (subsidiary entity). The human resources come from various scientific fields, including agriculture, chemical engineering, mechanical engineering, management, biotechnology and other sciences with undergraduate to doctoral education levels. The details of research human resources are described in the table below:

No.	Keahlian	Pendidikan | Education			Expertise
		Sarjana Bachelor	Magister Master	Doktor Doctorate	
	Holding				**Holding**
1	Pertanian/Agroteknologi	1			Agriculture/Agrotechnology
2	Teknik Kimia	1	2		Chemical Engineering
3	Teknik Mesin			1	Mechanical Engineering
4	Manajemen/Ekonomi		3		Management/Economics
5	Bioteknologi		1		Biotechnology
	CoE/Anak Perusahaan				**CoE/Subsidiaries**
1	Pertanian/Agroteknologi	11	3		Agriculture/Agrotechnology
2	Sosial Ekonomi/Agribisnis	2			Socio-Economics/Agribusiness
3	Kimia/Mesin/Teknik	6	2		Chemistry/Machinery/Engineering
4	Biologi/Mikrobiologi/Bioteknologi	6	4		Biology/Microbiology/Biotechnology
5	Manajemen dan kelimuan lain	7	5	1	Management and other subjects
	Jumlah Total Personel PI Grup	**34**	**20**	**2**	**Total Number of Group PI Personnel**

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI TAHUN 2022

Dalam rangka meningkatkan keahlian dan pengetahuan tentang industri pupuk, pertanian serta wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait, Kompartemen IFRI melaksanakan pengembangan kompetensi untuk terus meningkatkan peran riset dalam mendukung kinerja Perusahaan. Hal ini dilaksanakan baik secara *outplant training* maupun *inhouse training*. Berikut program peningkatan kompetensi yang dilaksanakan Kompartemen IFRI sepanjang tahun 2022.

COMPETENCY IMPROVEMENT PROGRAM 2022

In order to improve expertise and knowledge of the fertilizer industry, agriculture and related science and technology insights, the IFRI Compartment carries out competency development to continuously improve the role of research in supporting the Company's performance. This is carried out both through outplant training and inhouse training. The following is the competency improvement program implemented by the IFRI Compartment throughout 2022.

No.	Pelatihan Training	Penyelenggara Organizer	Waktu Pelaksanaan Time Implementation	Peserta Participants
1	Pemberdayaan Potensi SDM Empowerment of HR Potential	Pupuk Indonesia - Pusri Palembang	Januari January	1
2	Career Wisdom	Pupuk Indonesia	Januari January	5

No.	**Pelatihan** Training	**Penyelenggara** Organizer	**Waktu Pelaksanaan** Time Implementation	**Peserta** Participants
3	Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengawasan Kearsipan Technical Guidance (Bimtek) for Archives Supervision	Pupuk Indonesia - Arsip Nasional Republik Indonesia	Februari February	1
4	Every Leader is a People Leader	Pupuk Indonesia - Citilink Indonesia	Februari February	6
5	Value Creation Through Digital Transformation	Pupuk Indonesia - CIAS	Maret March	6
6	The Professionalisme	PT Pupuk Indonesia	Maret March	5
7	Infografis dengan Powerpoint Infographics with Powerpoint	Pupuk Indonesia - Semen Indonesia	Maret March	4
8	Excellent Public Speaking and Impactfull Presentation Skills	PT Pupuk Indonesia	Maret March	1
9	Bedah Buku Unboss Unboss Book Review	Pupuk Indonesia - SEA Google	Maret March	6
10	AKHLAK BUMN Muda *Talk Series* Tema Amanah & Kompeten AKHLAK SOE Young Talk Series Theme Amanah & Competent	Pupuk Indonesia	April	2
11	AKHLAK BUMN Muda *Talk Series* Tema Harmonis & Loyal AKHLAK SOE Young Talk Series Theme Harmonious & Loyal	Pupuk Indonesia	Mei May	3
12	Learn & Share Mindfulness & Happiness	Pupuk Indonesia	Mei May	6
13	Design Thinking	Pupuk Indonesia	Juni June	4
14	Evidence in Public Policy	Uni of Oxford	April-Juni April-June	1
15	Digitalization and Crowdfunding in Agricultural Business	Pupuk Indonesia	Juli July	5
16	AKHLAK BUMN Muda & Srikandi *Talk Series* Tema Adaptif & Kolaboratif AKHLAK SOE Muda & Srikandi Talk Series Adaptive & Collaborative Theme	Pupuk Indonesia	Juli July	6
17	*Workshop* Bimbingan Teknis Dunia Usaha Berintegritas Technical Guidance Workshop for Business World with Integrity	KPK & PIHC	Agustus August	7
18	New Product Development Professional (NPDP)	PPM Manajemen	Agustus August	9
19	Training Soft Skills	Pupuk Indonesia	Agustus August	7
20	Briefing Assessment Center	Pupuk Indonesia	Oktober October	1
21	Kompetensi Kepemimpinan dan Asesmen Kompetensi Leadership Competency and Competency Assessment	Pupuk Indonesia	November	1
22	Pembelajaran Antikorupsi Anti-Corruption Learning	Pupuk Indonesia - BPKP	November	3
23	Performance Coaching	Pupuk Indonesia - DDI	November	3

No.	Pelatihan Training	Penyelenggara Organizer	Waktu Pelaksanaan Time Implementation	Peserta Participants
24	Internalisasi Transparansi dan Akuntabilitas LHKPN Internalization of LHKPN Transparency and Accountability	Pupuk Indonesia - KPK	November	8
25	Remote Pilot Certification	APDI - DKPPU	November	1
26	Sustainable Agri-Food Systems	Uni of Adelaide	Juli-Desember July-December	1
27	Business Plan Workshop	Pupuk Indonesia - UI	Desember December	2
28	Fertilizer Association of India/FAI Annual Seminar 2022	FAI	Desember December	2
29	Internal Leader's Talk AKHLAK	Pupuk Indonesia	Desember December	5
30	Workshop dan Finalisasi RCSA Non RTM	PT Central Pesona Palace	Desember December	4
31	Design Thinking & Bussiness Model Canvas - Agile innovation	Wahana Kendali Mutu	Desember	2

STRATEGI RISET

Perusahaan memiliki acuan strategi dalam pengembangan riset yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan produk berdasarkan kebutuhan petani yang disesuaikan dengan tren pasar yang prospektif.
2. Penelitian dan pengembangan produk yang bersifat *advanced* seperti *micronutrient, controlled release, water soluble, biostimulan*, dan lain-lain.
3. Pengembangan dan implementasi teknologi yang mendukung konsep *good agricultural practice* dan *precision farming* mulai dari persiapan lahan hingga panen.
4. Pelaksanaan sentralisasi fungsi riset dengan membentuk *Center of Excellence* sesuai dengan pengalaman, kompetensi serta potensi pasar masing-masing anak perusahaan.
5. Kolaborasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan riset dengan pihak eksternal seperti lembaga penelitian, perguruan tinggi maupun mitra-mitra potensial lain yang sesuai dengan sasaran Perusahaan.
6. Sinergi dengan tim pemasaran maupun produksi untuk memperoleh *feedback* dan *market insight* yang diperlukan dalam inisiasi riset.
7. Pengembangan teknologi dalam upaya peningkatan efisiensi produksi maupun kualitas produk serta teknologi prospektif yang mendukung penurunan tingkat emisi karbon perusahaan sesuai target NDC Pemerintah Indonesia.
8. Aktif memberikan rekomendasi maupun kajian terhadap regulasi/kebijakan kepada *stakeholder* maupun pihak-pihak yang terkait.

RESEARCH STRATEGY

The company has a strategic reference in research development that aims to increase the value of the company, which is described as follows:

1. Product development based on farmers' needs adjusted to prospective market trends.
2. Research and development of advanced products such as micronutrient, controlled release, water soluble, biostimulant, etc.
3. Development and implementation of technologies that support the concept of good agricultural practice and precision farming from land preparation to harvest.
4. Centralization of the research function by establishing a Center of Excellence in accordance with the experience, competence and market potential of each subsidiary.
5. Active collaboration in the implementation of research activities with external parties such as research institutions, universities and other potential partners in accordance with the Company's goals.
6. Synergize with marketing and production teams to obtain feedback and market insights needed for research initiation.
7. Technology development in an effort to improve production efficiency and product quality as well as prospective technologies that support the reduction of the company's carbon emission levels in accordance with the Government of Indonesia's NDC target.
8. Actively provide recommendations and studies on regulations/policies to stakeholders and related parties.

STRATEGI KOLABORASI RISET PUPUK INDONESIA

PUPUK INDONESIA'S RESEARCH COLLABORATION STRATEGY

PENCAPAIAN TAHUN 2022

Rincian pencapaian IFRI sepanjang tahun 2022 diuraikan dalam tabel di bawah ini:

ACHIEVEMENT IN 2022

Details of IFRI's achievements throughout 2022 are outlined in the table below:

Program Kegiatan Activity Program	Realisasi	Realization	Status
Controlled release fertilizer	• Karakter *coater* terbaik kombinasi *polyol* dan *isocyanate* • 2 standar parameter kualitas CRF dan 3 formula pupuk CRF	• The best coater character is the combination of polyol and isocyanate. • 2 standard CRF quality parameters and 3 CRF fertilizer formulas	Sedang berlangsung On going
Advance Biofertilizer	• Formula dengan populasi mikroba 1 x 10^8 CFU/mL • Karakter fungsi fisiologis dan uji kompabilitas tanaman	• Formula with microbial population 1 x 10^8 CFU/mL • Physiological function characters and plant compatibility tests	Sedang berlangsung On going
Mikroba Pengikat Nitrogen	• Mikroba hasil identifikasi dan seleksi • Karakter dan analisis ekspresi gen	• Microbes identified and selected • Character and gene expression analysis	Sedang berlangsung On going
Studi Teknologi NPK	Desain hasil simulasi granulator terbaik rekomendasi perbaikan kualitas NPK eksisting	Design simulation results of the best granulator recommended for improvement of existing NPK quality	Sedang berlangsung On going
Nutrient uptake	Profil identifikasi serapan hara N, P dan K pada tanaman di 19 titik lokasi pengujian.	Identification profile of N, P and K nutrient uptake in plants at 19 test sites.	Sedang berlangsung On going

Program Kegiatan Activity Program	**Realisasi**	Realization	**Status**
Sistem rekomendasi pemupukan	• Model prediksi dan *prototype* sistem rekomendasi pemupukan padi (PreciRice) • Peningkatan produktivitas tanaman 21% hasil implementasi di Subang, Purworejo dan Sragen	• Prediction model and prototype of rice fertilization recommendation system (PreciRice) • 21% increase in crop productivity from implementation in Subang, Purworejo and Sragen	Sedang berlangsung On going
Kajian kebijakan dan riset pasar (antropologi) Policy studies and market research (anthropology)	• Kajian dan rekomendasi kebijakan basis survei di 14 lokasi bersama UGM dengan fokus "Perspektif dan Tingkat Kesiapan Petani Indonesia terhadap *Sustainable Agriculture*". • *Field work* di Bali, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara bersama UGM dengan hasil kajian antropologi untuk Membangun *Engagement* dengan Komunitas Petani Kunci menuju Perusahaan *Customer Centric.*	– Studies and policy recommendations based on surveys in 14 locations with UGM with a focus on "Perspectives and Readiness Level of Indonesian Farmers towards Sustainable Agriculture". – Field work in Bali, West Java, East Java and North Sumatra with UGM with the results of anthropological studies to Build Engagement with Key Farmer Communities towards Customer Centric Companies	Selesai Finish
White Paper, Policy Brief, & Briefing Notes	9 dokumen *Briefing Notes*, dengan topik: • Trilema Ketahanan Pangan – Produktivitas Tanaman – Perubahan Iklim (T20-G20) • Peran Perempuan dalam Pertanian dan Pengarusutamaan Gender dalam Program Makmur • Reformulasi NPK Efisien Fosfat dan Kalium, Antara Keterbatasan Anggaran Subsidi, Status Hara Lahan, dan Kompatibilitas Teknologi Produksi. • Nanoteknologi dalam Nutrisi Tanaman • Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Industri: Implementasi CCS untuk *hard-to-abate Industry*. • Budi Daya Padi Sawah Rendah Karbon: Membangun citra nilai berkelanjutan melalui Program Makmur – Agrosolution • Akselerasi Program Makmur dalam mendukung Pertanian Berkelanjutan • Antropologi "Petani Menjaga Asa Berkelanjutan". • Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Riset Antropologi secara Mandiri.	9 Briefing Notes documents, with topics: • Food Security - Crop Productivity - Climate Change Trilemma (T20-G20) • Women's Role in Agriculture and Gender Mainstreaming in Prosperous Programs • Phosphate and Potassium Efficient NPK Reformulation, Between Subsidy Budget Limitations, Land Nutrient Status, and Production Technology Compatibility. • Nanotechnology in Plant Nutrition • Climate Change Mitigation in Industrial Sector: CCS Implementation for Hard-to-abate Industry. • Low Carbon Rice Cultivation: Building a sustainable value image through the Makmur Program - Agrosolution • Acceleration of the Makmur Program in support of Sustainable Agriculture • Anthropology "Farmers Maintain Sustainable Asa". • Guidelines and Technical Guidelines for the Independent Conduct of Anthropological Research.	Selesai Finish
Roadmap Riset Klaster Pupuk Fertilizer Cluster Research Roadmap	*Roadmap* Riset Klaster Pupuk 2022-2031, *launching* 28 September 2022, ditandatangani Kementerian BUMN dan BOD PI Grup	Fertilizer Cluster Research Roadmap 2022-2031, launched 28 September 2022, signed by the Ministry of SOEs and the BOD of PI Group	Selesai Finish
Penurunan tingkat emisi karbon PI Grup sesuai target NDC Pemerintah Indonesia Reduction of PT PI Group's carbon emission levels in line with the Government of Indonesia's NDC target	• *Baseline* emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di *sub holding* (PIM, PSP, PKC, PKG, PKT dan PIU) • *Roadmap* penurunan emisi karbon serta target emisi dan tata waktu pencapaian NDC 2030 dan NZE 2060. • Hasil perhitungan MACC dan PDD inisiatif penurunan GRK PI Grup.	• Greenhouse Gas (GHG) emission baseline in sub holding (PIM, PSP, PKC, PKG, PKT and PIU) • Carbon emission reduction roadmap, emission targets and timeline for achieving the 2030 NDC and 2060 NZE. • MACC and PDD calculation results of PI Group's GHG reduction initiative.	Selesai Finish

ROADMAP RISET KLASTER PUPUK 2022-2031 PI GRUP

FERTILIZER CLUSTER RESEARCH ROADMAP 2022-2031 PI GROUP

Indonesia *Fertilizer Research Institute* (IFRI) sebagai pilar utama yang memadukan riset terkait produk, teknologi dan kebijakan di Pupuk Indonesia Grup, telah merilis roadmap riset kluster pupuk tahun 2022-2031 pada 28 September 2022. Penandatanganan *roadmap* dilakukan oleh Kementerian BUMN bersama Direksi Pupuk Indonesia dan seluruh anak perusahaan.

Roadmap tersebut menjadi arah dan panduan bagi perusahaan dalam mengembangkan bisnis secara berkelanjutan serta bertujuan untuk:

1. Membangun dan mempertajam *alignment* antara riset dengan kebutuhan bisnis perusahaan.
2. Memperkuat sinergi transformasi bisnis Perusahaan yang bersifat *long-term* dan berkelanjutan.
3. Membantu pengambilan keputusan terkait riset oleh *top management*.

Indonesia Fertilizer Research Institute (IFRI) as the main pillar that integrates research related to products, technology and policies in Pupuk Indonesia Group, has released the fertilizer cluster research roadmap for 2022-2031 on 28 September 2022. The roadmap was signed by the Ministry of SOEs together with the Board of Directors of Pupuk Indonesia and all subsidiaries.

The roadmap serves as a direction and guide for the company in developing its business in a sustainable manner and aims to:

1. Build and sharpen the alignment between research and the company's business needs.
2. Strengthening the synergy of the Company's long-term and sustainable business transformation.
3. Assist top management in making research-related decisions.

Adapun fokus utama riset yang telah ditetapkan, mencakup *Precision Agriculture, Enhanced Efficiency Fertilizer, Advanced Biofertilizer*, dan *Sustainable Industry*. Riset ini diharapkan mampu menjawab tantangan bisnis dan ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. Dari 3 (tiga) prinsip utama R&D Pupuk Indonesia Group, yaitu *Increase Profitability, Improve Productivity*, dan *Lead in Sustainability*, produk inovasi yang dihasilkan dapat memiliki dampak bisnis yang signifikan terhadap 3Ps (*People, Planet, Profit*).

The main research focuses include Precision Agriculture, Enhanced Efficiency Fertilizer, Advanced Biofertilizer, and Sustainable Industry. This research is expected to be able to answer business challenges and national food security in a sustainable manner. From the 3 (three) main principles of Pupuk Indonesia Group R&D, namely Increase Profitability, Improve Productivity, and Lead in Sustainability, the resulting innovative products can have a significant business impact on 3Ps (People, Planet, Profit).

BIAYA DAN KOMERSIALISASI RISET TAHUN 2022

Biaya Riset

Pada tahun 2022, Perusahaan telah merealisasikan biaya riset sebesar Rp23,6 miliar untuk kegiatan penelitian dan kerja sama mitra, seperti lembaga riset maupun perguruan tinggi. Rincian realisasi biaya tersebut adalah Rp14,4 miliar dikelola *holding* dan Rp9,3 miliar dikelola anak perusahaan (*Center of Excellence*).

Komersialisasi Riset

Pada tahun 2022, nilai komersialisasi produk hasil riset yang telah dilakukan mencapai Rp626 miliar. Komersialisasi riset tersebut merupakan nilai penjualan produk perusahaan yang dihasilkan dari kegiatan riset yang meliputi produk pupuk, produk hayati, dan lainnya.

RESEARCH COST AND COMMERCIALIZATION IN 2022

Research Costs

In 2022, the Company has realized research costs of Rp23.6 billion for research activities and cooperation with partners, such as research institutions and universities. The details of the cost realization are Rp14.4 billion managed by the holding company and Rp9.3 billion managed by subsidiaries (Center of Excellence).

Commercialization of Research

By 2022, the commercialization value of research products that have been carried out will reach Rp626 billion. The commercialization of research is the sales value of the company's products resulting from research activities, which include fertilizer products, biological products, and others.

RENCANA PENGEMBANGAN RISET 2023

Rencana strategis pengembangan riset yang telah disiapkan untuk dilaksanakan dalam tahun 2023, disampaikan dalam tabel di bawah ini:

RESEARCH DEVELOPMENT PLAN 2023

The strategic plan for research development that has been prepared to be implemented in 2023 is presented in the table below:

No.	Program Kerja Work Program	Keterangan	Description
1	Enhanced Efficiency and Future Fertilizer	Melakukan riset produk seperti *Controlled Release Fertilizer*, Mikroba Endofit, *Advanced Biofertilizer*, *Nano Fertilizer*, *Water Soluble Fertilizer,* dan produk potensial lainnya	Conduct product research such as Controlled Release Fertilizer, Endophytic Microbes, Advanced Biofertilizer, Nano Fertilizer, Water Soluble Fertilizer and other potential products.
2	Precision Farming	Pengembangan *tools* dan pemodelan rekomendasi pemupukan spesifik tanaman dan lokasi yang berbasis citra satelit maupun kamera multispektral serta riset lain yang mendukung seperti nu*trient uptake* dan *good agriculture practice*.	Development of tools and modeling of crop- and location- specific fertilizer recommendations based on satellite imagery and multispectral cameras as well as other supporting research such as nutrient uptake and good agriculture practice.
3	Dekarbonisasi Decarbonization	Mendukung program dekarbonisasi PI Grup dengan melakukan studi *co-firing biomass*, riset emisi GRK *Scope* 3, kajian *green technology*, serta kajian regulasi *clean ammonia*.	Support PI Group's decarbonization program by conducting biomass co-firing studies, Scope 3 GHG emissions research, green technology studies, and clean ammonia regulation studies.

No.	Program Kerja Work Program	Keterangan	Description
4	Pengembangan R&D *operating model* dan organisasi yang solid Development of R&D operating model and solid organization	Implementasi *roadmap* riset kluster pupuk, *enhancement* aplikasi SMART, pembaruan Dokumen Sistem Manajemen, penerapan kebijakan fokus riset di CoE, kajian pasar, dan validasi *product to market fit*.	Implementation of fertilizer cluster research roadmap, SMART application enhancement, Management System Document update, implementation of research focus policy in CoE, market study and validation of product to market fit.

INOVASI UNGGULAN: PRECIRICE

FEATURED INNOVATION: PRECIRICE

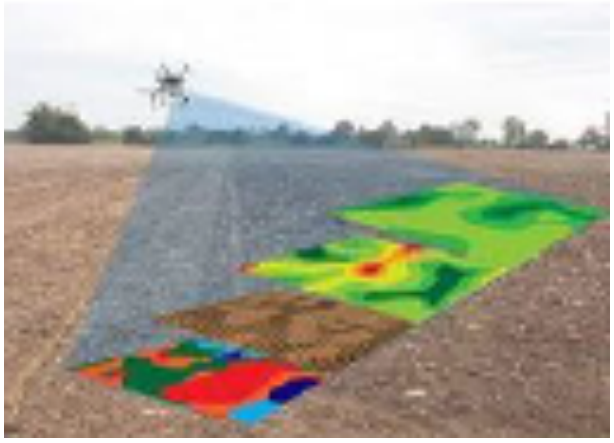

PreciRice (*Precision Agriculture Platform for Rice*) merupakan inovasi teknologi pertanian yang dikembangkan oleh Indonesia *Fertilizer Research Institute* PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk mendukung sistem pertanian presisi yang lebih efisien dan berkelanjutan. PreciRice memanfaatkan teknologi kamera multispektral yang diaplikasikan pada *drone* untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta mengolah data spasial dan temporal lahan padi guna menghasilkan rekomendasi pemupukan yang tepat sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan berpotensi meningkatkan efisiensi pemupukan dan usaha tani yang lebih menguntungkan.

PreciRice (Precision Agriculture Platform for Rice) is an agricultural technology innovation developed by the Indonesia Fertilizer Research Institute of PT Pupuk Indonesia (Persero) to support a more efficient and sustainable precision agriculture system. PreciRice utilizes multispectral camera technology applied to drones to identify, analyze, and process spatial and temporal data of rice fields to produce appropriate fertilization recommendations so as to increase productivity and potentially increase fertilizer efficiency and more profitable farming.

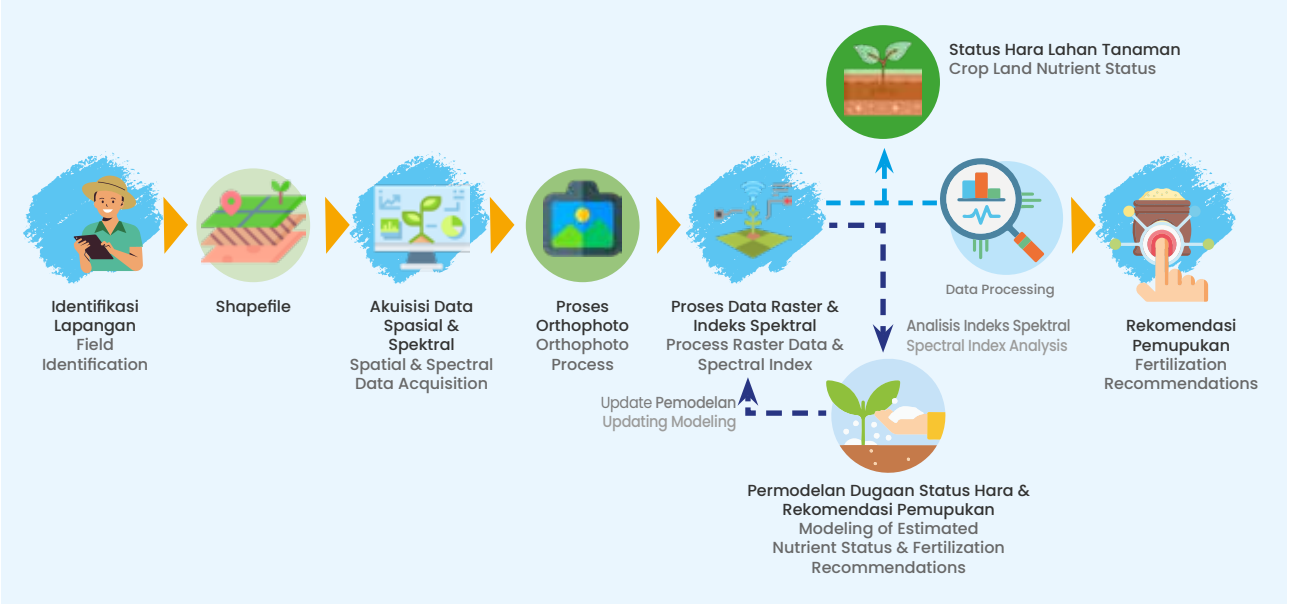

PreciRice mampu memberikan informasi kondisi unsur hara makro lahan padi lebih cepat daripada analisa tanah konvensional di laboratorium. Selain itu, dapat ditampilkan dalam bentuk peta digital lahan.

Rekomendasi pemupukan juga dapat diakses secara detail, dari sisi jumlah dan jenis pupuknya. Pada tahun 2022, sistem telah diuji di 3 (tiga) *pilot project* lahan padi (Subang, Sragen, Purworejo) dan menunjukkan peningkatan produktivitas tanaman padi hingga 21%. Adapun tingkat akurasi yang telah dicapai saat ini pada lahan mineral untuk hara Nitrogen, Phosphor dan Kalium mencapai >85%. Rencana pengembangan di tahun 2023 adalah validasi model prediksi hara dan sistem rekomendasi pemupukan secara bertahap hingga 5.000 hektar.

PreciRice is able to provide information on the macronutrient conditions of rice fields faster than conventional soil analysis in the laboratory. In addition, it can be displayed in the form of a digital map of the land.

Fertilizer recommendations can also be accessed in detail, in terms of the amount and type of fertilizer. In 2022, the system was tested in 3 (three) pilot projects in rice fields (Subang, Sragen, Purworejo) and showed an increase in rice productivity of up to 21%. The accuracy level that has been achieved to date on mineral soil for Nitrogen, Phosphor and Potassium nutrients reaches >85%. The development plan in 2023 is to validate the nutrient prediction model and fertilizer recommendation system gradually up to 5,000 hectares.

PENCAPAIAN INOVASI IFRI TAHUN 2022
IFRI Innovation Achievement in 2022

No.	Kompetisi Competition	Uraian Description	Predikat Predicate	Gambar Image
1	Pupuk Indonesia Innovation Award 2022	Transformasi Digital – Pemanfaatan Teknologi Kamera Multispektral untuk Implementasi *Precision Farming* pada Pertanian Padi di Pulau Jawa Digital Transformation - Utilization of Multispectral Camera Technology for Precision Farming Implementation in Rice Farming in Java Island	Grand Champion & Best Booth	
2	Pupuk Indonesia Quality Improvement 2022	Transformasi Digital – Pemanfaatan Teknologi Kamera Multispektral untuk Implementasi *Precision Farming* pada Pertanian Padi di Pulau Jawa Digital Transformation - Utilization of Multispectral Camera Technology for Precision Farming Implementation in Rice Farming in Java Island	Runner Up – PI Agile II	
3	Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional XXVI XXVI National Quality and Productivity Meeting	Transformasi Digital – Pemanfaatan Teknologi Kamera Multispektral untuk Implementasi *Precision Farming* pada Pertanian Padi di Pulau Jawa Digital Transformation - Utilization of Multispectral Camera Technology for the Implementation of Precision Farming on Rice Farming in Java Island	*Diamond* dan *Best Performance* (Predikat tertinggi) Diamond and Best Performance (Highest predicate)	
4	International Quality & Productivity Convention 2022	Increasing Urea Efficiency up to 20% and Reducing up to 50% Green House Gas Emission with Nitrogen Stabilizer Application	*Excellent* (Predikat tertinggi) Excellent (Highest predicate)	

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

PTPI telah mengembangkan struktur dan sistem tata kelola perusahaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG serta *best practice* yang berlaku baik secara nasional maupun internasional.

PTPI has developed a corporate governance structure and system by taking into account GCG principles and best practices that apply both nationally and internationally.

CAPAIAN PENILAIAN GCG TAHUN 2022
GCG Implementation Achievement in 2022

96,371
"Sangat Baik"
"Excellent"

Penilaian GCG dengan Parameter SK-16 Kementerian BUMN
GCG Assessment with SK-16 Parameters Ministry of SOEs

85,28
"Sangat Tepercaya"
"Most Trusted"

Penilaian GCG dengan Parameter *Corporate Governance Perception Index*
GCG Assessment with Corporate Governance Perception Index Parameters

PENGAKUAN EKSTERNAL
Pengakuan dari pihak eksternal atas penerapan GCG di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero), antara lain diwujudkan melalui penghargaan yang diberikan. Berikut, penghargaan yang diterima Perusahaan sepanjang tahun 2022:

EXTERNAL RECOGNITION
Recognition from external parties for the implementation of GCG within PT Pupuk Indonesia (Persero), among others, is realized through the awards given. The following are the awards received by the Company throughout 2022:

No	Tanggal Perolehan Date of Acquisition	Nama Penghargaan Award Name	Ajang Penghargaan Award Event	Lembaga Pemberi Penghargaan Awarding Institution
A.	**Skala Internasional | International Scale**			
	24 November 2022 November 24, 2022	Laporan Keberlanjutan Peringkat Platinum	The Sustainability Reporting Rating 2021	National Center for Sustainability Reporting (NCSR)
B.	**Skala Nasional | National Scale**			
	15 Maret 2023 March 15, 2023	Tata Kelola Perusahaan (GCG) BUMN Terbaik 1	Anugerah BUMN 2023	BUMN Track

Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Commitment to Implementing Good Corporate Governance

PT Pupuk Indonesia (Persero), disebut juga PTPI atau Perusahaan, berkomitmen secara penuh untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten, komprehensif, dan berkesinambungan di setiap kegiatan usaha sehari-hari dan di seluruh aspek bisnis sebagai langkah untuk meningkatkan kinerja dan *value* Perusahaan agar mampu tumbuh dan berkesinambungan di tengah iklim bisnis yang semakin kompetitif dan dinamis.

PTPI menyadari bahwa penerapan tata kelola perusahaan merupakan landasan utama dalam menjalankan usaha. Melalui tata kelola perusahaan yang baik, PTPI dapat meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan dan menjalankan kegiatan usaha di industri perpupukan, petrokimia, agrokimia dan kimia lainnya, serta agroindustri sercara sehat sekaligus menjaga kepercayaan Pemegang Saham, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya, sampai kepada peran PTPI sebagai entitas usaha milik negara (BUMN) yang menjadi bagian dari agen percepatan pertumbuhan perekenomian Indonesia.

PT Pupuk Indonesia (Persero), also known as PTPI or the Company, is fully committed to implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG) consistently, comprehensively and continuously in every daily business activity and in all aspects of the business as a step to improve the performance and value of the Company in order to grow and be sustainable in the midst of an increasingly competitive and dynamic business climate.

PTPI realizes that the implementation of corporate governance is the main foundation in running a business. Through good corporate governance, PTPI can improve the quality of decision making and carry out business activities in the fertilizer, petrochemical, agrochemical and other chemical, and agroindustry industries in a healthy manner while maintaining the trust of Shareholders, the community, and all other stakeholders, up to PTPI's role as a state-owned business entity (BUMN) which is part of the agent of accelerating Indonesia's economic growth.

PTPI secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk menjaga keselarasan dan keseimbangan antara kepentingan Perusahaan dan para pemangku kepentingan dalam meraih kinerja yang optimal dan meningkatkan *value* Perusahaan.

PTPI consistently applies the principles of good corporate governance to maintain harmony and balance between the interests of the Company and stakeholders in achieving optimal performance and increasing the Company's value.

Komitmen PTPI dalam menerapkan dan menegakkan tata kelola perusahaan yang baik secara simbolis tertuang dalam pernyataan komitmen yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi PTPI. Pernyataan tersebut tercantum dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Code of Corporate Governance*) PT Pupuk Indonesia (Persero).

PTPI's commitment to implementing and upholding good corporate governance is symbolically stated in a commitment statement signed by all members of the PTPI Board of Commissioners and Directors. The statement is contained in the Code of Corporate Governance of PT Pupuk Indonesia (Persero).

Komitmen penerapan GCG merupakan target mutlak untuk dipenuhi oleh PTPI, yang dalam implementasinya dicapai melalui penguatan infrastruktur, proses, dan sistem yang dimiliki secara berkesinambungan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan GCG.

Commitment to GCG implementation is an absolute target to be met by PTPI, which in its implementation is achieved through continuous strengthening of infrastructure, processes and systems to support the effectiveness of GCG implementation.

PTPI telah mengembangkan struktur dan sistem tata kelola perusahaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG serta best practice yang berlaku baik secara nasional maupun internasional. Penerapan prinsip-prinsip GCG juga merupakan bagian dari kepatuhan PTPI sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)* pada Badan Usaha Milik Negara *juncto* No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)* pada Badan Usaha Milik Negara dan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) 2021.

PTPI has developed a corporate governance structure and system by taking into account GCG principles and best practices that apply both nationally and internationally. The implementation of GCG principles is also part of PTPI's compliance as a State-Owned Enterprise (BUMN) with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, in conjunction with No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises and the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUG-KI) 2021.

HUBUNGAN PERUSAHAAN DENGAN PEMEGANG SAHAM DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
Company Relations with Shareholders and Stakeholders

Bad Corporate Governance

Good Corporate Governance

PERNYATAAN KOMITMEN PENERAPAN GCG DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

Statement of Commitment to GCG Implementation Board of Commissioners and Directors of PT Pupuk Indonesia (Persero)

HIGHLIGHT AKTIVITAS GCG 2022

GCG Activities Highlights in 2022

Bulan Month	Aktivitas	Activities
Januari January	1. Penandatanganan Pakta Integritas Awal Tahun 2022 melalui aplikasi PIONIR https://pionir.pupuk-indonesia.com oleh seluruh Insan Perusahaan yang didalamnya memuat komitmen terkait anti KKN selama periode 1 Januari sd 31 Maret 2022. 2. Internalisasi Pelaporan LHKPN Tahun 2021 PI Group tanggal 21 Januari 2022 dengan Narasumber KPK RI dengan Tema "Transparansi dan Akurasi Pelaporan LHKPN sebagai Upaya Pencegahan Korupsi. 3. Sosialisasi dalam Klinikal Risiko Fraud melalui zoom meeting kepada Risk Officer/PIC risiko fraud Unit Kerja pada tanggal 26 sd 28 Januari 2022 dan pada tanggal 6 sd 7 Juni 2022 4. Kick Off Meeting GCG Assessment Pupuk Indonesia Group Tahun 2021 yang dilaksanakan pada 19 Januari 2022 5. Pelaksanaan GCG Assessment Tahun 2022 oleh BPKP Pusat selama bulan Januari sd Maret 2022	1. The signing of the Integrity Pact at the beginning of 2022 through the PIONIR https://pionir.pupuk-indonesia.com application by all Company personnel which contains commitments related to anti-corruption during the period January 1 to March 31, 2022. 2. Internalization of PI Group's 2021 LHKPN Reporting on January 21, 2022 with KPK RI resource person with the theme "Transparency and Accuracy of LHKPN Reporting as an Effort to Prevent Corruption". 3. Socialization in Fraud Risk Clinical through zoom meetings to Risk Officers/PICs of Work Unit fraud risk on January 26 to 28, 2022 and on June 6 to 7, 2022. 4. Kick Off Meeting GCG Assessment Pupuk Indonesia Group in 2021 which was held on January 19, 2022 5. Implementation of GCG Assessment in 2022 by the Central BPKP during January to March 2022
Februari February	Sosialisasi dan bimbingan teknis e-LHKPN secara internal oleh Departemen Tata Kelola & Kepatuhan dilakukan secara berkala melalui tatap muka, zoom meeting, maupun chat via whatsapp kepada seluruh Wajib Lapor selama periode 1 Januari sd 31 Maret 2022	Socialization and technical guidance on e-LHKPN internally by the Governance & Compliance Department is carried out periodically through face-to-face, zoom meetings, and chat via whatsapp to all Mandatory Reporters during the period January 1 to March 31, 2022.

Bulan Month	Aktivitas	Activities
Maret March	1. *Monitoring* dan evaluasi WBS terintegrasi PI dan KPK pada tanggal 4 Maret 2022. 2. Pelaksanaan GCG *Assessment* Tahun 2022 oleh BPKP Pusat selama bulan Januari sd Maret 2022. 3. Pengesahan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*), Dokumen No. PI-SEK-PD-011 Rev.2 tanggal 29 Maret 2022. 4. Quality Assurance untuk seluruh Aspek Pemegang Saham Anak Perusahaan dan pelaksanaan Asesmen di Anak Perusahaan tanggal 7-11 Maret 2022.	1. Monitoring and evaluation of WBS integrated with PI and KPK on March 4, 2022. 2. Implementation of GCG Assessment in 2022 by the Central BPKP during January to March 2022. 3. Ratification of Whistleblowing System Guidelines, Document No. PI-SEK-PD-011 Rev.2 dated March 29, 2022. 4. Quality Assurance for all aspects of Subsidiary Shareholders and the implementation of Assessments in Subsidiaries dated March 7 to 11, 2022.
April April	1. Pelatihan "Peluit Integritas Pembelajaran Interaktif untuk Pengelolaan *Whistleblowing System* Pengaduan Korupsi Tahun 2022, bersama KPK RI tanggal 4-8 April 2022. 2. Penyampaian imbauan PT Pupuk Indonesia (Persero) tentang Pengendalian Gratifikasi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1443 H kepada seluruh *stakeholder* Perusahaan 3. *Exit Meeting* dilaksanakan secara *online* dengan dihadiri oleh Seluruh Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Perusahaan pada tanggal 8 April 2022.	1. Training "Integrity Whistle Interactive Learning for the Management of Corruption Complaint Reporting System in 2022, with KPK RI on April 4-8, 2022. 2. Submission of the Appeal of PT Pupuk Indonesia (Persero) regarding Gratification Control in the framework of Eid al-Fitr 1443 H to all stakeholders of the Company. 3. Exit Meeting which was held online with the attendance of the entire Board of Commissioners, Directors, and Company Officials on April 8, 2022.
Mei May	1. Pelaksanaan *Kick Off* Pengembangan *Single Platform* WBS terintegrasi PI Group pada tanggal 24 Mei 2022. 2. Pelaksanaan *benchmark* terkait dengan pengelolaan Aplikasi WBS KPK RI pada tanggal 27 Mei 2022, yang bertujuan untuk mendapatkan referensi dalam rangka pengembangan WBS Multi Company PI Group. 3. Audit Sistem Manajemen Internal SMAP pada tanggal 11-19 Mei 2022 dengan lingkup 25 (dua puluh lima) Kompartemen di PT Pupuk Indonesia (Persero).	1. Kick Off of PI Group's integrated WBS Single Platform Development on May 24, 2022. 2. Implementation of benchmarks related to the management of the KPK RI WBS Application on May 27, 2022, which aims to obtain references in the context of developing PI Group's Multi Company WBS. 3. SMAP Internal Management System Audit on May 11-19, 2022 with a scope of 25 (twenty five) Compartments at PT Pupuk Indonesia (Persero).
Juni June	1. Gtalk "Manajemen Risiko dan Identifikasi Titik Rawan Praktik Gratifikasi" tanggal 22 Juni 2022. 2. Pengesahan Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat, Dokumen No. PI-SEK-PD-010 Rev. 2 Tanggal 8 Juni 2022. 3. Pelaksanaan Klinikal Pengelolaan Risiko *Fraud* dan Implementasi Uji Kelayakan SMAP oleh seluruh Unit Kerja pada tanggal 26-28 Januari 2022 dan 6-7 Juni 2022. 4. Rapat Tinjauan Manajemen telah dilakukan pada tanggal 28 Juni 2022. 5. Persetujuan izin prinsip oleh Direktur Utama untuk pelaksanaan sertifikasi Sistem Manajemen Kepatuhan ISO 37301:2021 di Perseroan pada tanggal 21 Juni 2022.	1. Gtalk "Risk Management and Identification of Vulnerable Points for Gratification Practices" on June 22, 2022. 2. Ratification of Guidelines for Reporting Official Assets, Document Number PI-SEK-PD-010 Rev. 2 dated June 8, 2022. 3. Clinical Implementation of Fraud Risk Management and Implementation of SMAP Feasibility Test by all Work Units on January 26-28, 2022 and June 6-7, 2022. 4. Management Review Meeting was conducted on June 28, 2022. 5. Approval in principle by the President Director for the implementation of ISO 37301:2021 Compliance Management System certification in the Company on June 21, 2022.

Bulan Month	Aktivitas	Activities
Juli July	1. Realisasi Program Pengendalian Gratifikasi PI Group Semester I-2022 telah dikirimkan ke KPK tanggal 2 Juli 2022. 2. Rapat Koordinasi Finalisasi KAK dan RAB dengan BPKP tanggal 4 Juli 2022. 3. Rapat Koordinasi Persiapan FCS dengan Anak Perusahaan tanggal 8 Juli 2022. 4. Pengesahan KAK dan RAB FCS serta penyampaian ke Anak Perusahaan tanggal 27 JUli 2022. 5. Persiapan kegiatan Bimbingan Teknis Dunia Usaha Berintegritas bekerja sama dengan KPK RI.	1. The realization of PI Group's Gratification Control Program Semester I-2022 was sent to KPK on July 2, 2022. 2. Finalization of KAK and RAB Coordination Meeting with BPKP on July 4, 2022. 3. FCS Preparation Coordination Meeting with Subsidiaries on July 8, 2022. 4. Ratification of KAK and RAB FCS and submission to Subsidiaries on July 27, 2022. 5. Preparation of Technical Guidance activities for Business World with Integrity in collaboration with KPK RI.
Agustus August	1. Bimbingan Teknis Dunia Usaha Berintegritas bekerja sama dengan KPK RI dengan peserta Dewan Komisaris, Organ Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat *Grade* I, perwakilan pejabat *Grade* II dan III PI Grup berrsamaan dengan *Launching* Ketentuan Baru Pelaporan Kekayaan Pejabat yang dilakukan tanggal 2 Agustus 2022. 2. *Kick Off Meeting* Pengembangan *Fraud Control System* Pupuk Indonesia Group bersama dengan BPKP Pusat dan Perwakilan pada tanggal 10 Agustus 2022. 3. Penilaian Dokumen atas pelaksanan *Corporate Governance Perception Index* Tahun Kinerja 2021, pada tanggal 29 Agustus 2022. 4. *Sharing session* Sertifikasi SNI ISO 37001:2016 SMAP untuk 3 (tiga) Anak Perusahaan: (PIN, PILOG, PIP) (12 Agustus 2022). 5. Uji Coba Pengembangan SIAP GCG oleh seluruh PIC SIAP GCG (29 Agustus 2022).	1. Technical Guidance on Business World with Integrity in collaboration with KPK RI with participants from the Board of Commissioners, Decommissioning Organs, Board of Directors, Grade I Officials, representatives of Grade II and III officials of PI Group in conjunction with the Launching of New Provisions for Official Wealth Reporting conducted on August 2, 2022. 2. Kick Off Meeting of Fraud Control System Development of Pupuk Indonesia Group together with BPKP Headquarters and Representatives on August 10, 2022. 3. Document Assessment of the implementation of the Corporate Governance Perception Index for the 2021 Performance Year, on August 29, 2022. 4. Sharing session for SNI ISO 37001: 2016 SMAP Certification for 3 (three) Subsidiaries: (PIN, PILOG, PIP) (August 12, 2022). 5. GCG SIAP Development Trial by all GCG SIAP PICs (August 29, 2022).
September September	1. Reviu Pengelolaan Risiko *Fraud* oleh BPKP (26-30 September 2022). 2. Uji Coba Sistem WBS dan proses tindak lanjut aduan (19 September 2022). 3. Pengesahan Prosedur Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) Dokumen No. PI-SEK-PR-013 Rev.2 Tanggal 26 September 2022. 4. Pengesahan Prosedur Pemberian Penghargaan atas Pelaporan Pelanggaran melalui WBS Nomor Dokumen PI-SEK-PR- 020 Rev. 0 Tanggal 26 September 2022. 5. Pelaksanaan Aanwijzing Pengadaan Jasa Konsultan tanggal 8 September 2022 SMK.	1. Fraud Risk Management Review by BPKP (September 26-30, 2022). 2. Trial of WBS System and complaint follow-up process (September 19, 2022). 3. Ratification of Whistleblowing System (WBS) Management Procedure Document No. PI-SEK-PR-013 Rev.2 Dated September 26, 2022. 4. Ratification of Procedures for Awarding Violation Reporting through WBS Document Number PI-SEK-PR- 020 Rev. 0 Dated September 26, 2022. 5. Implementation of Aanwijzing Procurement of Consultant Services on September 8, 2022 SMK.
Oktober October	1. Pelaksanaan kegiatan Observasi Program *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) Tahun 2020 PT Pupuk Indonesia (Persero) tanggal 6 Oktober 2022. 2. Penyampaian Laporan Monev PPG PI dan Anak Perusahaan kepada KPK melalui aplikasi GOL-KPK (30 Oktober 2022). 3. Pelaksanaan Monev Semester II-2022 dengan KPK (12 Oktober 2022). 4. FGD *Performance Criteria of Technical Competencies Job Family: Governance-Risk-Compliance* (25 Oktober 2022). 5. *Sharing Session* Sistem *Online* Kepatuhan Internal PT Pupuk Kalimantan Timur (SIOKI) (28 Oktober 2022).	1. Implementation of the 2020 Corporate Governance Perception Index (CGPI) Program Observation activities of PT Pupuk Indonesia (Persero) on October 6, 2022. 2. Submission of Monev Report of PPG PI and Subsidiaries to KPK through GOL-KPK application (October 30, 2022). 3. Implementation of Monev Semester II 2022 with KPK (October 12, 2022). 4. FGD Performance Criteria of Technical Competencies Job Family: Governance-Risk-Compliance (October 25, 2022). 5. Sharing Session of PT Pupuk Kalimantan Timur's Internal Compliance Online System (SIOKI) (October 28, 2022).

Bulan Month	Aktivitas	Activities
November November	1. Rapat Koordinasi Bidang Tata Kelola dan Kepatuhan Pupuk Indonesia Group "*Enhanching Governance and Compliance in The Multiverse Era of TUNA* (*Turbulent, Uncertain, Novel, Ambiguous*) di Semarang pada tanggal 2-4 November 2022. 2. *Workshop* Masyarakat Pembelajar Antikorupsi yang bekerja sama dengan BPKP Pusat dengan peserta *Risk Officer* PI dan Perwakilan Anak Perusahaan Perwakilan *Stakeholder* Eksternal (*Vendor*, Pembeli, Distributor, dan Rekanan Lainnya) dilaksanakan pada tanggal 15 November 2022. 3. Internalisasi Pelaporan LHKPN Tahun 2022 PI Group dengan Tema "Transparansi dan Akurasi Pelaporan LHKPN sebagai Upaya Pencegahan Korupsi dengan Narasumber KPK RI dan peserta seluruh Wajib Lapor PI Grup Band 1-3 pada tanggal 28-30 November 2022. 4. Pelaksanaan Sosialisasi Anti *Fraud* pada saat *Vendor Gathering* tanggal 21 November 2022 dengan penyampaian konten terkait dengan anti *fraud*. 5. Rapat Koordinasi Kerja Sama dengan Bassel Institue dalam *Corporate Governance* (10 November 2022).	1. Coordination Meeting on Governance and Compliance of Pupuk Indonesia Group "Enhanching Governance and Compliance in The Multiverse Era of TUNA (Turbulent, Uncertain, Novel, Ambiguous) in Semarang on November 2-4, 2022. 2. Workshop on Anti-Corruption Community of Learners in collaboration with the Central BPKP with participants of PI Risk Officer and Representatives of Subsidiary External Stakeholder Representatives (Vendors, Buyers, Distributors, and Other Partners) held on November 15, 2022. 3. Internalization of PI Group's 2022 LHKPN Reporting with the theme "Transparency and Accuracy of LHKPN Reporting as an Effort to Prevent Corruption with KPK RI resource persons and participants of all PI Group Mandatory Reporters Band 1-3 on November 28-30, 2022. 4. Implementation of Anti Fraud Socialization during Vendor Gathering on November 21, 2022 with the delivery of content related to anti fraud. 5. Cooperation Coordination Meeting with Bassel Institute on Corporate Governance (November 10, 2022).
Desember December	1. Pelaksanaan Program Pengenalan Perusahaan bagi Dewan Komisaris yang baru menjabat pada bulan Desember 2022. 2. Keikutsertaan Perusahaan pada kegiatan ASEAN Risk Award Tahun 2022 yang kegiatan *awarding*-nya diselenggarakan pada bulan Desember 2022. 3. Keikutsertaan Perusahaan dalam Pameran Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2022 yang dikoordinasikan oleh KPK pada tanggal 10-11 Desember 2022. 4. *Kick off Meeting* GCG *Assessment* PI Grup Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Konsultan Independen, PT Sinergi Daya Prima pada tanggal 23 Desember 2022.	1. Implementation of the Company Introduction Program for the new Board of Commissioners who took office in December 2022. 2. The Company's participation in the ASEAN Risk Award in 2022 which awarding activities will be held in December 2022. 3. The Company's participation in the 2022 World Anti-Corruption Day (HAKORDIA) Commemoration Exhibition coordinated by KPK on December 10-11, 2022. 4. Kick off Meeting GCG Assessment PI Group in 2022 conducted by Independent Consultant, PT Sinergi Daya Prima on December 23, 2022.

TUJUAN PENERAPAN GCG

Penerapan GCG diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi Perusahaan dan para pemangku kepentingan. Sejalan dengan prinsip tersebut, tujuan penerapan GCG di lingkungan PTPI adalah:

1. Mendorong terciptanya mekanisme pengambilan keputusan manajemen yang *proper and prudent* melalui mekanisme *check and balance* sesuai dengan fungsi masing-masing organ Perusahaan.
2. Memaksimalkan nilai Perusahaan dalam bentuk peningkatan kinerja (*high performance*) secara citra Perusahaan yang baik (*good corporate image*).
3. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan, dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perusahaan.

PURPOSE OF IMPLEMENTING GCG

The implementation of GCG is expected to provide added value to the Company and its stakeholders. In line with this principle, the objectives of implementing GCG within PTPI are:

1. Encourage the creation of a proper and prudent management decision-making mechanism through a check and balance mechanism in accordance with the functions of each organ of the Company.
2. Maximizing the value of the Company in the form of high performance in a good corporate image.
3. Encouraging professional, transparent, and efficient management of the Company as well as empowering the functions and increasing the independence of the Company's organs.

4. Mendorong organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi dengan nilai etika/moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap *stakeholders*.
5. Mendorong pengelolaan sumber daya dan risiko Perusahaan secara lebih efisien dan efektif.
6. Mengurangi potensi benturan kepentingan organ Perusahaan dan pekerja dalam menjalankan bisnis Perusahaan.
7. Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif terhadap pencapaian tujuan Perusahaan.

4. Encouraging the Company's organs in making decisions and carrying out actions based on high ethical/moral values and compliance with applicable laws and regulations, as well as awareness of the Company's social responsibility to stakeholders.
5. Encourage more efficient and effective management of the Company's resources and risks.
6. Reducing potential conflicts of interest of Company organs and employees in conducting the Company's business.
7. Creating a business environment that is conducive to the achievement of the Company's objectives.

DASAR HUKUM PENERAPAN GCG

1. Undang-Undang Republik Indonesia meliputi:
   a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
   b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas.
   c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
   d. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
   e. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
   f. Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
   g. Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
   h. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia meliputi:

   a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2005 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
   b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

LEGAL BASIS FOR THE IMPLEMENTATION OF GCG

1. Laws of the Republic of Indonesia include:
   a. Law of the Republic of Indonesia No. 19 Year 2003 on State-Owned Enterprises,
   b. Law of the Republic of Indonesia No. 40 Year 2007 on Limited Liability Companies.
   c. Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2008 concerning Electronic Transaction.
   d. Law of the Republic of Indonesia No. 5 Year 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.
   e. Law of the Republic of Indonesia No. 17 Year 2003 on State Finance.
   f. Law of the Republic of Indonesia No. 31 Year 1999 in conjunction with Law No. 20 Year 2001 on the Crime of Corruption.
   g. Law of the Republic of Indonesia No. 43 of 2009 concerning Archives.
   h. Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 1997 concerning Company Documents.
2. Government Regulations of the Republic of Indonesia include:
   a. Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 45 Year 2005 dated October 25, 2005 on the Establishment, Management, Supervision and Dissolution of State-Owned Enterprises.
   b. Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 44 of 2005 concerning Procedures for Participation and Administration of State Capital in State-Owned Enterprises and Limited Liability Companies juncto Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 72 of 2016 dated December 30, 2016 concerning Amendments to Government Regulation No. 44 of 2005 concerning Procedures for Participation and Administration of State Capital in State-Owned Enterprises and Limited Liability Companies.

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

3. Peraturan Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi meliputi:
   a. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.
   b. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-102/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Negara.
   c. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara;
   d. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, juncto PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
   e. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER- 12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juncto Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-06/MBU/04/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER- 12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
   f. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-21/MBU/2012 tentang Pedoman Penerapan Akuntabilitas Keuangan Badan Usaha Milik Negara;
   g. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara *juncto* PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

c. Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 28 of 2012 concerning the Implementation of Law No. 43 of 2009 concerning Archives.

3. Ministerial, Agency, Institution, or Commission regulations include:
   a. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. KEP-101/MBU/2002 concerning the Preparation of Work Plans and Budgets of State-Owned Enterprises.
   b. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. KEP-102/MBU/2002 on the Preparation of the Long-Term Plan of State-Owned Enterprises.
   c. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-05/MBU/2006 dated December 20, 2006 concerning Audit Committee for State-Owned Enterprises;
   d. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, in conjunction with PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 on Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.
   e. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER- 12/MBU/2012 concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises (SOEs) in conjunction with Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-06/MBU/04/2021 concerning Amendments to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises;
   f. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-21/MBU/2012 concerning Guidelines for the Implementation of Financial Accountability of State-Owned Enterprises;
   g. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/02/2015 on Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises in conjunction with PER-10/MBU/10/2020 on Amendments to PER-02/MBU/02/2015 on Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

h. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

i. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara.

j. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

k. Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara;

l. Surat Edaran BUMN No. SE-7/MBU/07/2020 tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

m. Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) No. 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Jabatan Rangkap Sesuai Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

n. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia No. 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara, Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara *juncto* Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia No. 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara, Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

o. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia No. 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

p. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) 2021 yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG).

q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

4. Anggaran Dasar Perseroan dan perubahannya.

5. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 08/KEP.KOM/V/2020 dan No. 023/A/TR/A22/SK/2020 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris

h. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-03/MBU/02/2015 concerning Requirements and Procedures for the Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of State-Owned Enterprises.

i. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-11/MBU/11/2020 concerning Management Contracts and Annual Management Contracts of Directors of State-Owned Enterprises.

j. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-05/MBU/04/2021 concerning Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises.

k. Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 on Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises;

l. SOE Circular Letter No. SE-7/MBU/07/2020 concerning Core Values of Human Resources of State-Owned Enterprises.

m. Regulation of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) No. 7 of 2009 concerning Guidelines for Concurrent Positions in accordance with the Provisions of Article 26 of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.

n. Regulation of the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia No. 07 of 2016 concerning Procedures, Registration, Announcement, and Examination of State Organizer's Asset Reports juncto Regulation of the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia No. 2 of 2020 concerning Amendments to Regulation of the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia No. 07 of 2016 concerning Procedures, Registration, Announcement, and Examination of State Organizer's Asset Reports.

o. Regulation of the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia No. 2 of 2019 concerning Gratification Reporting.

p. General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUG-KI) 2021 issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG).

q. Circular Letter of the Financial Services Authority No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Public Company Governance.

4. The Company's Articles of Association and its amendments.

5. Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 08/KEP.KOM/V/2020 and No. 023/A/TR/A22/SK/2020 on the Mechanism for Organizing Board of Commissioners

yang Menyertakan Direksi dan Rapat Komite Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi.

6. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Code of Corporate Governance*).
7. Piagam Satuan Pengawasan Intern Perusahaan.

KERANGKA KERJA GCG PTPI

Komitmen PTPI dalam menerapkan GCG diwujudkan dalam Kerangka Kerja GCG atau *Corporate Governance Framework*. *Governance Framework* menjadi landasan utama penerapan GCG di PTPI. *Governance Framework* PTPI terdiri dari *Governance Commitment, Governance Principle, Governance Structure*, dan *Governance Process*. Keselarasan aspek-aspek tersebut menghasilkan efektivitas tata kelola atau *governance outcome* yang sesuai dengan harapan Perusahaan maupun seluruh pemangku kepentingan.

Meetings that Include the Board of Directors and Board of Commissioners Committee Meetings that Include the Board of Directors.
6. Code of Corporate Governance.
7. Charter of the Company's Internal Audit Unit.

PTPI GCG FRAMEWORK

PTPI's commitment in implementing GCG is realized in the GCG Framework or Corporate Governance Framework. The Governance Framework is the main foundation for the implementation of GCG at PTPI. PTPI's Governance Framework consists of Governance Commitment, Governance Principle, Governance Structure, and Governance Process. The alignment of these aspects results in governance effectiveness or governance outcomes that are in accordance with the expectations of the Company and all stakeholders.

KERANGKA KERJA GCG PTPI
PTPI Governance Framework

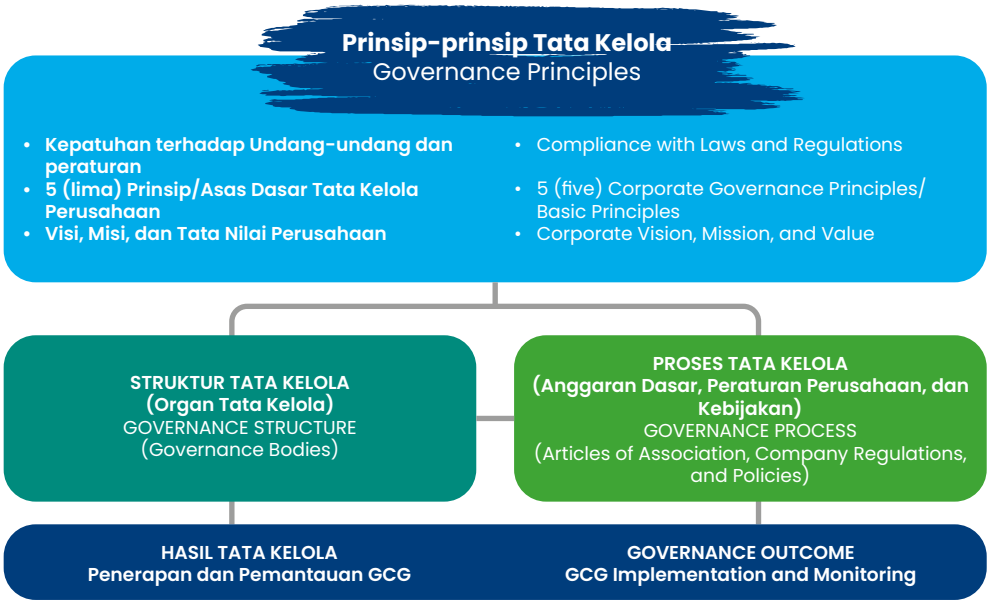

PENERAPAN DAN PENEGAKAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA KELOMPOK USAHA PI GRUP

Sebagai wujud komitmen Perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola secara konsisten dan komprehensif, PTPI sebagai entitas usaha yang memiliki peran sebagai Induk (*Holding*) BUMN Pupuk yang memiliki entitas anak usaha, terus berupaya menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip tata kelola, baik di lingkungan *holding* maupun entitas anak. PTPI telah menetapkan prinsip pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola, baik di lingkungan *holding* maupun entitas anak.

IMPLEMENTATION AND ENFORCEMENT OF PTPI BUSINESS GROUP GOVERNANCE PRINCIPLES

As a manifestation of the Company's commitment in applying the principles of governance consistently and comprehensively, PTPI as a business entity that has a role as the Parent (Holding) of BUMN Fertilizer which has subsidiary entities, continues to strive to implement and enforce the principles of governance, both in the holding environment and subsidiaries. PTPI has established the principles of implementing business activities based on the principles of governance, both within the holding and subsidiaries.

DESAIN TATA KELOLA KELOMPOK USAHA PTPI
PTPI Business Group Governance Design

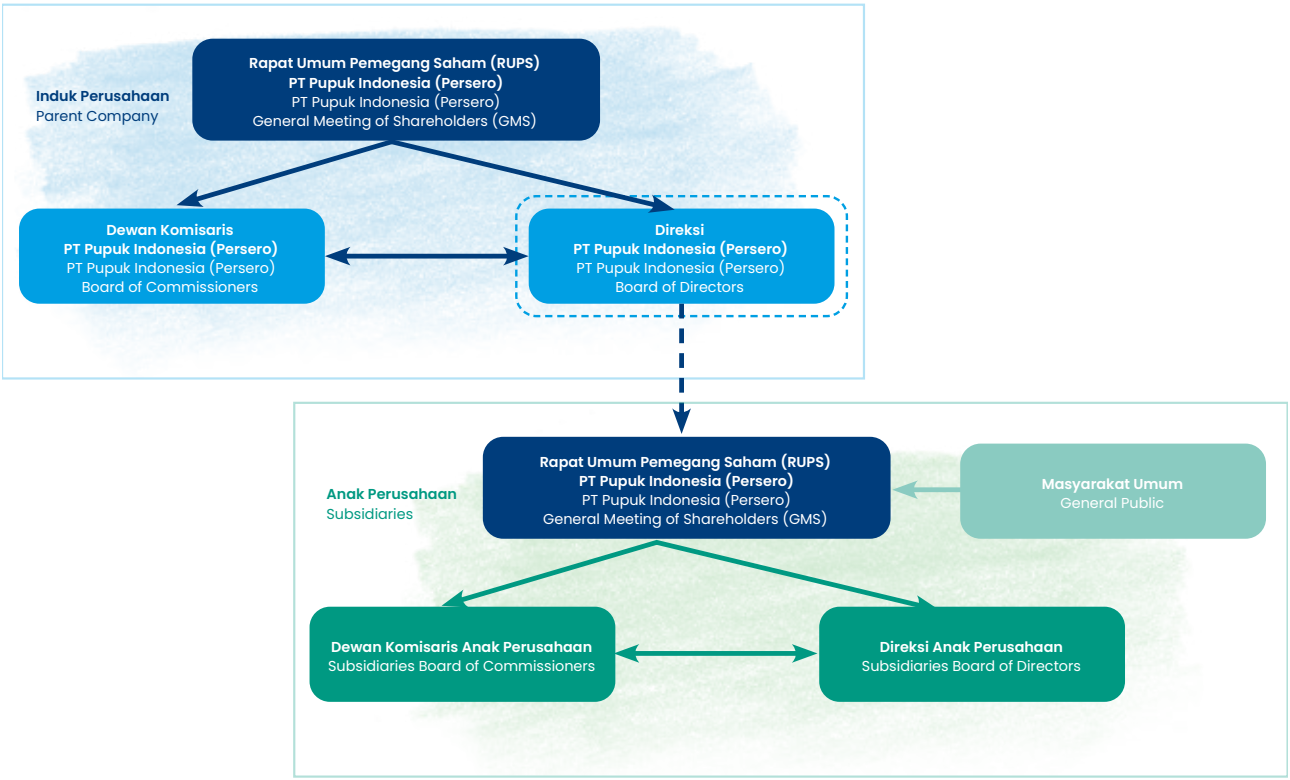

Prinsip yang Diterapkan dalam Struktur Perusahaan

Pengelolaan Induk dan Anak Perusahaan harus memperhatikan prinsip GCG sebagai berikut:

1. Keterbukaan (*Transparency*)
   a. Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai Induk dan Anak Perusahaan bagi *stakeholders* yang mempunyai kepentingan terhadap Induk dan Anak Perusahaan, berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
   b. Menjamin adanya keterbukaan dan objektivitas dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan untuk menjalankan pengelolaan Induk dan Anak Perusahaan.
   c. Mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya informasi yang dipersyaratkan oleh Anggaran Dasar Induk dan Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga hal-hal yang penting dan mempengaruhi pengambilan keputusan para *stakeholders*.

Principles Applied in Company Structure

The management of the Parent and Subsidiaries must pay attention to the following GCG principles:

1. Transparency
   a. Transparency in carrying out the decision-making process and openness in disclosing material and relevant information regarding the Parent and Subsidiaries for stakeholders who have an interest in the Parent and Subsidiaries, based on applicable rules and regulations.
   b. Ensure transparency and objectivity in carrying out the decision-making process to carry out the management of the Parent and Subsidiaries.
   c. Taking the initiative to disclose not only information required by the Parent and Subsidiary's Articles of Association and applicable laws and regulations, but also matters that are important and affect the decision-making of stakeholders.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)
   Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ di Induk dan Anak Perusahaan sehingga pengelolaan Induk dan Anak Perusahaan terlaksana secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholders* Induk dan Anak Perusahaan.
3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)
   Kesesuaian dalam pengelolaan Induk dan Anak Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
4. Kemandirian (*Independency*)
   Pengelolaan Induk dan Anak Perusahaan dilakukan secara profesional berlandaskan kode etik tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dengan mempertimbangkan pengelolaan risiko.
5. Kewajaran (*Fairness*)
   Keseimbangan antara hak dan kewajiban pengelolaan Induk dan Anak Perusahaan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Prinsip Tata Kelola Usaha PI Grup

Prinsip tata kelola kelompok usaha yang tergabung dalam PI Grup dibagi berdasarkan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh organ utama dan organ pendukung di masing-masing entitas. Adapun prinsip tata kelola kelompok usaha PI Grup, sebagai berikut:

1. Prinsip Hubungan Korporasi antara Perusahaan dan Anak Perusahaan serta antar Anak Perusahaan mengutamakan kepentingan Perusahaan secara keseluruhan, dengan didasarkan atas prinsip sinergi serta memperhatikan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam rangka mencapai hasil yang terbaik untuk Perusahaan dan Anak Perusahaan.
2. Interaksi dan koordinasi antara Direksi Perusahaan dengan dan antar Anak Perusahaan untuk hal-hal yang belum tercakup dalam Pedoman Tata Kelola Kelompok Usaha (*Code of Group Governance*), atau tidak terkait dengan pengambilan keputusan ditetapkan oleh Direksi Perusahaan selaku Pemegang Saham Anak Perusahaan. Interaksi dan koordinasi tersebut dibuat secara tertulis dan secara tegas menyatakan peran Perusahaan selaku Pemegang Saham Anak Perusahaan dan peran Anak Perusahaan.
3. Perusahaan dan Anak Perusahaan akan bertindak berdasarkan praktik-praktik terbaik pada industri yang terkait, dengan mematuhi seluruh peraturan perundangan yang berlaku, Anggaran Dasar

2. Accountability
   Clarity of functions, implementation and accountability of organs in the Parent and Subsidiaries so that the management of the Parent and Subsidiaries is carried out effectively, efficiently, and can be accounted for to the stakeholders of the Parent and Subsidiaries.
3. Responsibility
   Conformity in the management of the Parent and Subsidiaries to the prevailing laws and regulations and sound corporate principles.
4. Independency
   The management of the Parent and Subsidiaries is carried out professionally based on a code of ethics without conflict of interest and influence/pressure from any party that is not in accordance with applicable laws and regulations and sound corporate principles by considering risk management.
5. Fairness
   Balance between the rights and obligations of the Parent and Subsidiary management in accordance with applicable rules and regulations.

PI Group Business Governance Principles

The principles of governance of the business groups incorporated in the PI Group are divided based on the business activities carried out by the main organs and supporting organs in each entity. The principles of governance of the PI Group are as follows:

1. The principle of Corporate Relations between the Company and its Subsidiaries and between Subsidiaries prioritizes the interests of the Company as a whole, based on the principle of synergy and taking into account the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition in order to achieve the best results for the Company and its Subsidiaries.
2. Interaction and coordination between the Board of Directors of the Company and and among Subsidiaries for matters that have not been covered in the Code of Group Governance, or are not related to decision-making are determined by the Board of Directors of the Company as a Subsidiary Shareholder. Such interaction and coordination is made in writing and expressly states the role of the Company as the Shareholder of the Subsidiary and the role of the Subsidiary.
3. The Company and its Subsidiaries will act based on best practices in the relevant industry, by complying with all applicable laws and regulations, the Articles of Association of the Company and its Subsidiaries, as

Perusahaan dan Anak Perusahaan, serta memenuhi persyaratan-persyaratan dari *stakeholders* yang dapat berpengaruh kepada operasi Perusahaan dan Anak Perusahaan.

Hirarki Struktur Kelompok Usaha PTPI

1. Perusahaan adalah Perusahaan yang mempunyai kepemilikan saham mayoritas secara langsung pada Anak Perusahaan (kecuali Anak Perusahaan yang bersifat terbuka (Tbk) yang memungkinkan Perusahaan untuk memiliki kendali atas Anak Perusahaan secara langsung sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Anak Perusahaan berperan melaksanakan kegiatan operasional sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dan merupakan kepanjangan tangan dari Perusahaan sebagai Induk Perusahaan.
3. Perusahaan selaku Perusahaan mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan mengoordinir, menyelenggarakan dan/atau mensinergikan fungsi untuk Anak Perusahaan berdasarkan perjanjian dengan/kuasa dari Anak Perusahaan dan/atau tanpa perjanjian dengan/kuasa terkait dengan hal-hal yang menyangkut hubungan yang ada antar Perusahaan dalam kelompok usaha PI Grup, serta melakukan pengawasan dan evaluasi atas operasional bisnis Anak Perusahaan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pihak-pihak yang Memegang Peranan dalam Struktur Kelompok Usaha PI Grup

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan
   RUPS Perusahaan sebagai Organ Perusahaan yang memegang segala kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi Perusahaan atau Dewan Komisaris Perusahaan. Perusahaan sebagai Perusahaan yang merupakan BUMN yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia bertindak selaku RUPS Perusahaan.
2. Dewan Komisaris Perusahaan
   a. Dewan Komisaris Perusahaan sebagai Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi Perusahaan dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan serta memberikan saran dan pendapat kepada RUPS Perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
   b. Dalam pendekatan satu kesatuan ekonomi, Dewan Komisaris Perusahaan memiliki kewenangan untuk mengetahui segala kebijakan dan tindakan Perusahaan dalam pengelolaan Anak Perusahaan

well as fulfilling the requirements of stakeholders that may affect the operations of the Company and its Subsidiaries.

PTPI Business Group Structure Hierarchy

1. The Company is the Company that has a direct majority shareholding in its Subsidiaries (except for subsidiaries that are publicly listed) which allows the Company to have direct control over the Subsidiaries in accordance with the prevailing rules and regulations.
2. Subsidiaries play a role in carrying out operational activities in accordance with predetermined targets and are an extension of the Company as the Parent Company.
3. The Company as the Company has the authority to set policies and coordinate, organize and/or synergize functions for Subsidiaries based on agreements with/by proxies from Subsidiaries and/or without agreements with/by proxies related to matters concerning existing relationships between Companies in the PI Group, as well as supervise and evaluate the business operations of Subsidiaries in accordance with applicable rules and regulations.

Parties that Play a Role in the Group Structure of the PI Group

1. General Meeting of Shareholders (GMS) of the Company
   The Company's GMS is the Company's organ that holds all authority that is not given to the Company's Board of Directors or Board of Commissioners. The Company is a state-owned enterprise whose shares are wholly owned by the Republic of Indonesia, therefore the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia acts as the Company's GMS.
2. Board of Commissioners of the Company
   a. The Company's Board of Commissioners as the Company's Organ in charge of supervising and providing advice to the Company's Board of Directors in carrying out the Company's management activities and providing advice and opinions to the Company's GMS in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association.
   b. In the approach of one economic unit, the Board of Commissioners of the Company has the authority to know all policies and actions of the Company in the management of the Subsidiary through the Board

melalui Direksi Perusahaan selaku Pemegang Saham Anak Perusahaan.

c. Dewan Komisaris Perusahaan juga berkewajiban untuk selalu mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan dan kewajiban-kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan, dan keputusan RUPS Perusahaan.

d. Dewan Komisaris Perusahaan mempunyai kewajiban untuk memberikan rekomendasi pada RUPS Perusahaan, saran dan nasihat kepada Direksi Perusahaan serta memberikan persetujuan terhadap usulan Direksi Perusahaan sesuai dengan batas-batas yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan serta keputusan RUPS Perusahaan.

e. Mempertimbangkan prinsip independensi/ kemandirian, maka tugas, wewenang, dan kewajiban yang melekat pada Dewan Komisaris Perusahaan, tidak dapat diberlakukan sebagai tugas, wewenang dan kewajiban pada Anak Perusahaan sebagai entitas hukum yang terpisah (*separate legal entity*).

3. Direksi Perusahaan

a. Direksi Perusahaan sebagai Organ Perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang penuh terhadap pengurusan jalannya Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan.

b. Direksi Perusahaan mempunyai tugas melakukan pengurusan Perusahaan dan mewakili Perusahaan. Dalam melaksanakan tugas pengurusan, Direksi Perusahaan mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan pengurusan Perusahaan dan mengatur ketentuan-ketentuan kepegawaian Perusahaan.

c. Dalam melaksanakan tugas mewakili Perusahaan, Direksi Perusahaan mempunyai kewenangan untuk mengatur penyerahan kekuasaan Direksi Perusahaan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan. Serta mengatur penyerahan kekuasaan Direksi Perusahaan kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain sesuai ketentuan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan.

d. Mempertimbangkan prinsip independensi/ kemandirian, tugas, wewenang dan kewajiban

of Directors of the Company as the Shareholder of the Subsidiary.

c. The Company's Board of Commissioners is also obliged to keep abreast of the Company's activities and other obligations in the context of its supervisory and advisory duties to the extent that they do not conflict with the laws and regulations, the Company's Articles of Association, and the resolutions of the Company's GMS.

d. The Company's Board of Commissioners has the obligation to provide recommendations to the Company's GMS, advice and counsel to the Company's Board of Directors and to approve the proposals of the Company's Board of Directors in accordance with the limits set forth in the Company's Articles of Association and the resolutions of the Company's GMS.

e. Considering the principle of independence, the duties, powers and obligations attached to the Company's Board of Commissioners cannot be applied to the duties, powers and obligations of the Subsidiary as a separate legal entity.

3. Company Directors

a. The Board of Directors of the Company as an Organ of the Company has full duties and responsibilities for the management of the Company for the interests and purposes of the Company, in accordance with applicable laws and regulations and the Company's Articles of Association.

b. The Board of Directors of the Company has the task of managing the Company and representing the Company. In carrying out its management duties, the Company's Board of Directors has the authority to determine the Company's management policies and regulate the Company's personnel provisions.

c. In carrying out the task of representing the Company, the Board of Directors of the Company has the authority to regulate the transfer of power of the Board of Directors of the Company to one or several members of the Board of Directors to make decisions on behalf of the Board of Directors of the Company in accordance with applicable regulations and the Company's Articles of Association. As well as regulate the transfer of power of the Board of Directors of the Company to a person or several employees of the Company either individually or jointly or to other persons in accordance with the applicable provisions and the Articles of Association of the Company.

d. Considering the principle of independence, the duties, authorities and obligations attached to the

yang melekat pada Direksi Perusahaan tidak dapat diberlakukan sebagai tugas, wewenang dan kewajiban pada Anak Perusahaan sebagai entitas hukum yang terpisah (*separate legal entity*).

4. Perusahaan selaku Pemegang Saham dari Anak Perusahaan.
   a. Perusahaan selaku Pemegang Saham mayoritas di Anak Perusahaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung tentang perkembangan usaha Anak Perusahaan.
   b. Perusahaan selaku Pemegang Saham mayoritas di Anak Perusahaan dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS Anak Perusahaan dengan syarat semua Pemegang Saham Anak Perusahaan dengan hak suara menyetujui secara tertulis dan menandatangani usul yang bersangkutan.
   c. Perusahaan selaku Pemegang Saham untuk Anak Perusahaan yang bersifat terbuka (Tbk) maka memiliki hak dan kewajiban sebagaimana pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di Otoritas Jasa Keuangan.
5. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Anak Perusahaan
   a. RUPS Anak Perusahaan sebagai Organ Anak Perusahaan yang memegang segala kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi Anak Perusahaan atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan.
   b. Anak Perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Perusahaan, maka Direksi Perusahaan bertindak selaku RUPS Anak Perusahaan.
   c. RUPS Anak Perusahaan memiliki kewenangan memberikan persetujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Anak Perusahaan.
   d. Anak Perusahaan yang bersifat terbuka (Tbk), maka RUPS Anak Perusahaan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di Otoritas Jasa Keuangan.
6. Dewan Komisaris Anak Perusahaan
   a. Dewan Komisaris Anak Perusahaan, sebagai Organ Anak Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi Anak Perusahaan dalam menjalankan kegiatan pengurusan Anak Perusahaan serta memberikan saran dan pendapat kepada RUPS Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Anak Perusahaan.
   b. Dewan Komisaris Anak Perusahaan juga berkewajiban untuk selalu mengikuti perkembangan kegiatan Anak Perusahaan dan

Company's Board of Directors cannot be applied as duties, authorities and obligations to the Subsidiary as a separate legal entity.

4. The Company as Shareholder of the Subsidiary.
   a. The Company as the majority shareholder in the Subsidiary has the right to obtain information either directly or indirectly about the business development of the Subsidiary.
   b. The Company as the majority Shareholder in the Subsidiary may adopt binding resolutions outside the GMS of the Subsidiary provided that all Shareholders of the Subsidiary with voting rights agree in writing and sign the relevant proposal.
   c. The Company as a Shareholder for a subsidiary that is publicly listed (Tbk) has the rights and obligations as in the applicable rules and regulations of the Financial Services Authority.
5. General Meeting of Shareholders (GMS) of Subsidiaries
   a. GMS of the Subsidiary as the Organ of the Subsidiary that holds all authority that is not given to the Board of Directors of the Subsidiary or the Board of Commissioners of the Subsidiary.
   b. Subsidiaries whose majority shares are owned by the Company, the Board of Directors of the Company acts as the GMS of the Subsidiaries.
   c. The GMS of the Subsidiary has the authority to give approval as stipulated in the Articles of Association of the Subsidiary.
   d. Subsidiaries that are publicly listed (Tbk), the GMS of Subsidiaries refers to the rules and regulations applicable in the Financial Services Authority.
6. Board of Commissioners of Subsidiaries
   a. The Board of Commissioners of the Subsidiary, as an organ of the Subsidiary, is tasked with supervising and providing advice to the Board of Directors of the Subsidiary in carrying out the management activities of the Subsidiary and providing advice and opinions to the GMS of the Subsidiary in accordance with the provisions in the Articles of Association of the Subsidiary.
   b. The Board of Commissioners of the Subsidiary is also obliged to keep abreast of the development of the Subsidiary's activities and other obligations

kewajiban-kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, Anggaran Dasar Anak Perusahaan, dan keputusan RUPS Anak Perusahaan.

c. Dewan Komisaris Anak Perusahaan mempunyai kewajiban untuk memberikan rekomendasi pada RUPS Anak Perusahaan, saran dan nasihat kepada Direksi Anak Perusahaan serta memberikan persetujuan terhadap usulan Direksi Anak Perusahaan sesuai dengan batas-batas yang diatur dalam Anggaran Dasar Anak Perusahaan serta keputusan RUPS Anak Perusahaan.

7. Direksi Anak Perusahaan
   a. Direksi Anak Perusahaan sebagai Organ Anak Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Anak Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Anak Perusahaan serta mewakili Anak Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan.

   b. Direksi Anak Perusahaan sebagai pelaksana strategi Perusahaan di Anak Perusahaan sesuai arahan Direksi Perusahaan selaku Pemegang Saham Anak Perusahaan.

   c. Direksi Anak Perusahaan yang bersifat terbuka (Tbk) melaksanakan strategi Perusahaan di Anak Perusahaan sesuai arahan Direksi Perusahaan selaku Pemegang Saham Anak Perusahaan serta memperhatikan arahan dari Pemegang Saham lainnya sebagaimana pada peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

8. Masyarakat Umum
   Untuk Anak Perusahaan yang bersifat terbuka (Tbk), yang menjual sahamnya kepada masyarakat umum, maka wajib memenuhi hak dan kewajiban Pemegang Saham lainnya dalam hal ini masyarakat umum sesuai peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Hubungan Organ Entitas Induk dengan Organ Entitas Anak

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Anak Perusahaan
   a. Pada RUPS Anak Perusahaan, Direksi Perusahaan mewakili Perusahaan sebagai Pemegang Saham Mayoritas.
   b. Keputusan-keputusan Direksi Perusahaan pada RUPS Anak Perusahaan merupakan keputusan yang diambil oleh Direksi Perusahaan berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam Anggaran

in the context of its supervisory and advisory duties to the extent not in conflict with the prevailing regulations, the Subsidiary's Articles of Association, and the resolutions of the Subsidiary's GMS.

c. The Board of Commissioners of the Subsidiary has the obligation to provide recommendations to the GMS of the Subsidiary, advice and counsel to the Board of Directors of the Subsidiary and to approve the proposals of the Board of Directors of the Subsidiary in accordance with the limits set forth in the Articles of Association of the Subsidiary and the resolutions of the GMS of the Subsidiary.

7. Directors of Subsidiaries
   a. The Board of Directors of the Subsidiary as an organ of the Subsidiary is authorized and fully responsible for the management of the Subsidiary, in accordance with the purposes and objectives of the Subsidiary and represents the Subsidiary, both inside and outside the court in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Subsidiary.
   b. The Board of Directors of the Subsidiary as the executor of the Company's strategy in the Subsidiary in accordance with the direction of the Board of Directors of the Company as the Shareholder of the Subsidiary.
   c. The Board of Directors of the Subsidiary which is publicly listed (Tbk) implements the Company's strategy in the Subsidiary in accordance with the direction of the Board of Directors of the Company as the Shareholder of the Subsidiary as well as taking into account the direction of other Shareholders in accordance with the rules and regulations of the Financial Services Authority.

8. General Public
   For subsidiaries that are public (Tbk), which sell their shares to the general public, they are obliged to fulfill the rights and obligations of other shareholders, in this case the general public, in accordance with the rules and regulations of the Financial Services Authority.

Relationship between Parent Entity Organ and Subsidiary Organ

1. General Meeting of Shareholders (GMS) of Subsidiaries
   a. At the GMS of the Subsidiary, the Board of Directors of the Company represents the Company as the Majority Shareholder.
   b. The decisions of the Company's Board of Directors at the GMS of the Subsidiary are decisions made by the Company's Board of Directors based on the mechanism stipulated in the Articles of Association

Dasar Anak Perusahaan dan keputusan RUPS Anak Perusahaan.

c. Perusahaan diwakili oleh Direktur Utama atau Direksi Perusahaan yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan selaku RUPS Anak Perusahaan.

d. RUPS Anak Perusahaan yang bersifat terbuka (Tbk) mengacu pada peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

2. Direksi Perusahaan
   a. Direksi Perusahaan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan secara keseluruhan, termasuk sebagai Pemegang Saham mayoritas Anak Perusahaan dan Pemegang Saham Anak Perusahaan yang bersifat terbuka (Tbk).
   b. Direktur Perusahaan dan/atau pegawai Perusahaan yang ditugaskan sebagai Dewan Komisaris Anak Perusahaan atau perangkatnya, menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi Anak Perusahaan dalam upaya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Direktur dan/atau pegawai Perusahaan tersebut mempertanggungjawabkan penugasan yang diembannya kepada Direksi Perusahaan.
   c. Fungsi pendukung Perusahaan lainnya, sesuai bidang tugasnya, melaksanakan komunikasi, koordinasi, dan/atau penyelenggaraan dalam upaya terciptanya sinergi baik dalam tahap pengambilan keputusan/perencanaan maupun tahap implementasi di Perusahaan dan Anak Perusahaan.
   d. Masing-masing fungsi pendukung dimaksud bertanggung jawab kepada Direksi Perusahaan.
3. Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan
   a. Direksi Perusahaan memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
   b. Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan dipilih dan diusulkan oleh Direksi Perusahaan selaku Pemegang Saham Anak Perusahaan sesuai Anggaran Dasar Anak Perusahaan.
   c. Pengusulan Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perusahaan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan, yang hanya dapat dilakukan oleh Direksi Perusahaan setelah mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris Perusahaan dan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan.

of the Subsidiary and the resolutions of the GMS of the Subsidiary.

c. The Company is represented by the President Director or Directors of the Company appointed in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company as the GMS of the Subsidiary.

d. The GMS of public subsidiaries (Tbk) refers to the rules and regulations of the Financial Services Authority.

2. Company Directors
   a. The Board of Directors of the Company is fully responsible for the overall management of the Company, including as the majority shareholder of the Company's subsidiaries and shareholder of the Company's public subsidiaries.
   b. The Company's directors and/or employees who are assigned as the Board of Commissioners of the Subsidiary or its apparatus, perform supervisory and advisory duties to the Subsidiary's Board of Directors in an effort to achieve the predetermined goals. Such directors and/or employees of the Company shall be accountable for their assignments to the Board of Directors of the Company.
   c. Other Company support functions, in accordance with their duties, carry out communication, coordination, and/or organization in an effort to create synergy both in the decision/planning stage and the implementation stage in the Company and its Subsidiaries.
   d. Each of these supporting functions is responsible to the Board of Directors of the Company.
3. Board of Commissioners and Directors of Subsidiaries
   a. The Company's Board of Directors has the authority to appoint and dismiss the Board of Commissioners and Directors of Subsidiaries in accordance with applicable regulations.
   b. The Board of Commissioners and Board of Directors of the Subsidiary are elected and proposed by the Board of Directors of the Company as the Shareholders of the Subsidiary in accordance with the Articles of Association of the Subsidiary.
   c. The nomination of the Board of Commissioners and Board of Directors of Subsidiaries that make a significant contribution to the Company and/or have strategic value as determined by the Company's General Meeting of Shareholders, which can only be done by the Company's Board of Directors after receiving a written response from the Company's Board of Commissioners and approval from the Company's General Meeting of Shareholders.

PENERAPAN *CORPORATE GOVERNANCE* SECARA BERKELANJUTAN

Untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG, diperlukan adanya upaya yang secara terus-menerus dan terarah serta secara konsisten berkelanjutan diterapkan oleh seluruh Organ Perusahaan. Siklus penerapan GCG secara berkelanjutan tercermin dalam bagan berikut:

IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE IN A SUSTAINABLE MANNER

To improve the quality of GCG implementation, continuous and directed efforts are required and consistently implemented by all organs of the Company. The cycle of GCG implementation in a sustainable manner is reflected in the following chart:

PENINGKATAN KUALITAS PENERAPAN GCG DI PTPI SECARA BERKELANJUTAN
Continuous Improvement of the Quality of GCG Implementation at PTPI

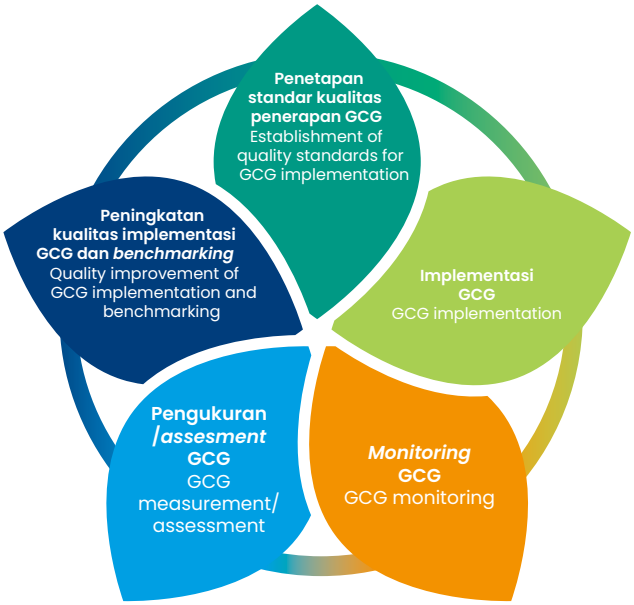

Siklus peningkatan kualitas implementasi penerapan GCG, meliputi:

1. Penetapan standar kualitas penerapan GCG;
2. Implementasi GCG;
3. *Monitoring* GCG;
4. Pengukuran/*assessment* GCG;
5. Peningkatan kualitas implementasi GCG dan *benchmarking*.

The cycle of improving the quality of GCG implementation includes:

1. Establishment of quality standards for GCG implementation;
2. GCG implementation;
3. GCG monitoring;
4. GCG measurement/assessment;
5. Quality improvement of GCG implementation and benchmarking.

Penetapan Standar Kualitas Penerapan GCG

Standar implementasi GCG dibutuhkan sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi Perusahaan. Acuan dasar tersebut meliputi kriteria yang akan dicapai dari berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG. Standar implementasi juga dimaksudkan untuk memacu Perseroan untuk meningkatkan kualitas implementasi GCG. Standar tersebut dirumuskan berdasarkan peraturan terkait, masukan dari *stakeholders*, hasil *assessment* dan *benchmarking*.

Establishment of Quality Standards for GCG Implementation

GCG implementation standards are needed as a basic reference in order to realize the vision and carry out the mission of the Company. The basic reference includes criteria to be achieved from various aspects related to GCG implementation. The implementation standards are also intended to spur the Company to improve the quality of GCG implementation. The standards are formulated based on relevant regulations, input from stakeholders, assessment results and benchmarking.

Standar implementasi GCG di PTPI khususnya mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN dan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Standar penerapan GCG tersebut meliputi:

1. Aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan.
2. Aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal.
3. Aspek Dewan Komisaris.
4. Aspek Direksi.
5. Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi.
6. Aspek lainnya yang antara lain meliputi pelaporan keberlanjutan dan kemampuan Perseroan sebagai *benchmark* dalam bidangnya.

Internalisasi dari berbagai peraturan perundang-undangan dan pedoman tersebut ke dalam kebijakan internal Perusahaan merupakan komitmen dari Dewan Komisaris dan Direksi beserta seluruh Insan Perusahaan dan PI Grup.

Komitmen ini ditunjukkan dari Visi, Misi, dan Tata Nilai Perusahaan. Visi Perusahaan yang kemudian diwujudkan dalam Misi Perusahaan dengan didasarkan pada Tata Nilai Perusahaan. Dalam mewujudkan Visi dan menjalankan Misi, Perusahaan senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran/*fairness*.

Berdasarkan prinsip-prinsip GCG, Perusahaan mengembangkan struktur GCG yang meliputi organ utama dan organ pendukung guna menjalankan mekanisme GCG sesuai peraturan perundang-undangan serta *best practices* yang ada. Dengan mendasarkan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip GCG, diharapkan akan tercipta kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

Kepatuhan terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan

Penerbitan *roadmap* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di tahun 2014 memiliki dampak yang besar bagi perkembangan GCG di lingkup dunia usaha. Penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan penyampaian informasi yang wajar menjadi bahasan yang dapat menjadi pegangan bagi entitas usaha, khususnya bagi perusahaan terbuka. Demikian pula dengan hak Pemegang Saham tanpa terkecuali, khususnya Pemegang Saham minoritas yang harus menjadi perhatian emiten atau perusahaan terbuka.

GCG implementation standards at PTPI specifically refer to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs and the Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs. The GCG implementation standards include:

1. Aspects of Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance.
2. Shareholder and GMS/Capital Owner Aspects.
3. Board of Commissioners aspect.
4. Board of Directors aspect.
5. Aspects of Disclosure and Transparency.
6. Other aspects include sustainability reporting and the Company's ability to serve as a benchmark in its field.

The internalization of these various laws and regulations and guidelines into the Company's internal policies is a commitment of the Board of Commissioners and Directors along with all Company and PI Group personnel.

This commitment is shown in the Company's Vision, Mission, and Values. The Company's Vision is then realized in the Company's Mission based on the Company's Code of Values. In realizing the Vision and carrying out the Mission, the Company always adheres to the principles of GCG, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.

Based on GCG principles, the Company has developed a GCG structure that includes main organs and supporting organs to carry out GCG mechanisms in accordance with existing laws and regulations and best practices. By basing its business activities on GCG principles, it is expected to create long-term business sustainability.

Compliance with Corporate Governance Guidelines

The issuance of the roadmap by the Financial Services Authority (OJK) in 2014 had a major impact on the development of GCG in the business world. The emphasis on transparency, accountability, and fair information disclosure is a discussion that can be a guide for business entities, especially for public companies. Similarly, the rights of shareholders without exception, especially minority shareholders, must be a concern for issuers or public companies.

OJK telah merilis peraturan No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, yang dijabarkan dalam Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Pedoman ini berguna untuk mendorong penerapan praktik GCG.

Namun demikian, secara umum, dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Perusahaan masih mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, *juncto* PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara karena status Perusahaan saat ini bukan merupakan perusahaan terbuka.

OJK has released regulation No. 21/POJK.04/2015 dated November 16, 2015 on the Implementation of Public Company Governance Guidelines, which is elaborated in OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 dated November 17, 2015 on Public Company Governance Guidelines. These guidelines are useful to encourage the implementation of GCG practices.

However, in general, in the implementation of good corporate governance, the Company still refers to the provisions contained in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, juncto PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises because the Company's current status is not a public company.

Implementasi GCG

Prinsip-prinsip GCG serta Komitmen Perusahaan dalam Penerapannya

Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) telah menerbitkan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 sebagai pedoman untuk praktik governansi korporat berstandar global, yang direkomendasikan terutama untuk korporasi yang terdaftar di pasar modal dan mengelola dana masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip governansi korporat yang baik berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan para investor dan pemangku kepentingan, menurunkan biaya modal, memperkuat pasar modal dan sektor jasa keuangan, memperluas lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

PUGKI 2021 terdiri dari delapan prinsip yang dibagi dalam tiga kelompok prinsip: (1) Kelompok prinsip pertama yang mengatur fungsi pengurusan dan pengawasan korporasi, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris, (2) Kelompok prinsip kedua yang mengatur proses dan keluaran yang dihasilkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris, (3) Kelompok prinsip ketiga yang mengatur pemilik sumber daya, yang terutama akan menerima manfaat dari pelaksanaan governansi korporat. Prinsip kelompok pertama disajikan dalam Prinsip 1 sampai dengan 3. Prinsip kelompok kedua disajikan dalam Prinsip 4 sampai dengan 6. Prinsip kelompok ketiga disajikan dalam Prinsip 7 dan 8.

GCG implementation

GCG Principles and the Company's Commitment to Their Implementation

The National Committee on Governance Policy (KNKG) has published the Indonesian Corporate Governance General Guidelines (PUGKI) 2021 as a guideline for global standard corporate governance practices, which is recommended especially for corporations listed on the capital market and managing public funds. The implementation of good corporate governance principles plays an important role in increasing investor and stakeholder confidence, lowering the cost of capital, strengthening the capital market and financial services sector, expanding employment and promoting economic growth in line with the principles of sustainable development.

PUGKI 2021 consists of eight principles divided into three groups of principles: (1) The first group of principles regulates the management and supervisory functions of the corporation, namely the Board of Directors and the Board of Commissioners, (2) The second group of principles regulates the processes and outputs produced by the Board of Directors and the Board of Commissioners, (3) The third group of principles regulates the owners of resources, who will primarily receive benefits from the implementation of corporate governance. The first group of principles is presented in Principles 1 through 3. The second group of principles is presented in Principles 4 through 6. The third group of principles is presented in Principles 7 and 8.

Penerapan prinsip dan rekomendasi PUGKI 2021 di PT Pupuk Indonesia (Persero) pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

The implementation of PUGKI 2021 principles and recommendations at PT Pupuk Indonesia (Persero) in 2022 is as follows:

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation		**Implementasi di Pupuk Indonesia** Implementation at Pupuk Indonesia
Prinsip 1: Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Principle 1: Roles and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners	1.1 Peran dan Tanggung Jawab Direksi 1.1 Roles and Responsibilities of the Board of Directors	1.1.1 Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi sebagai berikut: a. berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang; b. beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis; c. berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan; serta d. berkemampuan dalam bertahan dan bertumbuh (*corporate resilience*) 1.1.1 To achieve sustainable value creation, the Board of Directors exercises its leadership role and seeks to achieve the following governance outcomes: a. competitive and focused on long-term performance; b. ethical and responsible in conducting business; c. contributing positively to society and the environment; and d. corporate resilience. 1.1.2 Direksi harus memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah korporasi konsisten dengan tujuan jangka panjang, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif. 1.1.2 The Board of Directors shall ensure that the mission, vision, goals, objectives, strategies, and annual and medium-term plans of the corporation are consistent with long-term goals, by effectively utilizing innovation and technology. 1.1.3 Direksi memastikan bahwa korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. 1.1.3 The Board of Directors ensures that the corporation implements an appropriate and effective risk management and internal control system that is aligned with the vision, mission, goals, objectives, and strategies of the corporation and complies with applicable laws and standards. 1.1.4 Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi. 1.1.4 The Board of Directors ensures the integrity of the corporation's accounting and financial reporting systems and the timely and accurate disclosure of all material information regarding the corporation.	1. PTPI telah menetapkan Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) yang memuat peran dan tugas Dewan Komisaris dan Direksi. Direksi telah menunjuk seorang Direktur SDM, Tata Kelola dan Manajemen Risiko yang dibantu oleh SVP Sekretaris Perusahaan sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan governansi. Untuk menjalankan tugas pengawasan dan penasihatan atas penerapan governansi, Dewan Komisaris telah memiliki Komite *Good Corporate Governance* dan Pemantauan Manajemen Risiko (Komite GCG-PMR) untuk membantu tugas Dewan Komisaris. PTPI has established a Board Manual that contains the roles and duties of the Board of Commissioners and Board of Directors. The Board of Directors has appointed a Director of HR, Governance and Risk Management assisted by the SVP Corporate Secretary as the person in charge of implementing and monitoring governance. To carry out supervisory and advisory duties on the implementation of governance, the Board of Commissioners has a Good Corporate Governance and Risk Management Monitoring Committee (GCG-PMR Committee) to assist the duties of the Board of Commissioners. 2. PTPI telah menetapkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) yang memuat Visi, Misi, Tata Nilai, dan Kebijakan Perseroan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dengan mentaati ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan perkembangan terkini dari kegiatan bisnis. PTPI has established a Code of Corporate Governance that contains the Company's Vision, Mission, Values, and Policies which serve as a reference in the implementation of activities by complying with the provisions of the Articles of Association and applicable laws and regulations and considering the latest developments in business activities.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Implementasi di Pupuk Indonesia Implementation at Pupuk Indonesia
	1.1.5 Direksi memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya. 1.1.5 The Board of Directors ensures that sustainability reporting has been prepared as appropriate. 1.1.6 Direksi membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi korporasi. 1.1.6 The Board of Directors establishes a framework for corporate information technology (IT) governance that is aligned with the needs and priorities of the corporation's business, drives business opportunities and performance, strengthens risk management, and supports corporate goals and strategies. 1.1.7 Bagi korporasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, Direksi perlu memastikan kewenangan dan ketersediaan perangkat pendukung yang memadai agar Dewan Pengawas Syariah dapat menjalankan perannya dengan efektif. 1 .1.7 For corporations that carry out business activities based on Sharia principles, the Board of Directors needs to ensure adequate authority and availability of supporting tools so that the Sharia Supervisory Board can carry out its role effectively. 1.1.8 Piagam Direksi secara periodik ditinjau. Piagam mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual dapat diatur di Piagam Direksi atau dengan surat keputusan Direksi. 1.1.8 The Charter of the Board of Directors is periodically reviewed. The Charter includes, among others, the division of roles of individual Directors can be regulated in the Board of Directors Charter or by a resolution of the Board of Directors. 1.1.9 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. 11.1.9 The Board of Directors has a policy regarding the resignation of members of the Board of Directors if they are involved in financial crimes and proven to have committed misconduct.	3. PTPI telah menetapkan Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi. Direksi PTPI telah mengarahkan, mengkoordinir, mengawasi, dan bertanggung jawab untuk menetapkan arah dan kebijakan bidang manajemen risiko PTPI dan Anak Perusahaan untuk mendukung kelancaran bisnis perusahaan baik jangka pendek maupun jangka Panjang. Direksi PTPI juga telah menetapkan rancangan sistem pengendalian intern berdasarkan Prosedur Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Perusahaan (SPIP). PTPI telah melakukan evaluasi/penilaian atas efektivitas pengendalian intern di Perusahaan. PTPI has established Integrated Risk Management Guidelines. The Board of Directors of PTPI has directed, coordinated, supervised, and is responsible for setting the direction and policy of the risk management field of PTPI and its Subsidiaries to support the smooth running of the company's business both short and long term. PTPI's Board of Directors has also established an internal control system design based on the Evaluation Procedure for the Implementation of the Company's Internal Control System (SPIP). PTPI has conducted an evaluation/assessment of the effectiveness of internal control in the Company. 4. Direksi PTPI telah memberi sertifikasi terhadap laporan keuangan tahunan dalam Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Konsolidasian. *Cascading* atas sertifikasi terhadap Laporan Keuangan kepada tingkatan di bawah Direksi yang menjadi entitas akuntansi dan pelaporan atas Laporan Keuangan yang akan dikonsolidasikan. PTPI's Board of Directors has certified the annual financial statements in the Board of Directors' Statement of Responsibility for the Consolidated Financial Statements. Cascading of certification of Financial Statements to levels below the Board of Directors that become accounting and reporting entities for Financial Statements that will be consolidated. 5. PTPI telah memiliki kebijakan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan serta pembinaan usaha kecil berdasarkan Pedoman Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). PTPI telah memiliki unit yang bertugas melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan yaitu SVP Umum dan TJSL. PTPI memiliki indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pengelolaan PKBL atau CSR. PTPI has a policy on corporate social and environmental responsibility and small business development based on the Partnership and Community Development Program (PKBL) Guidelines. PTPI has a unit in charge of implementing the Company's social and environmental responsibilities, namely SVP General and TJSL. PTPI has performance indicators to measure the success of PKBL or CSR management.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Implementasi di Pupuk Indonesia Implementation at Pupuk Indonesia
		6. PTPI telah memiliki IT *Master Plan* dan menerapkan sistem teknologi informasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan perencanaan TI yang matang mencakup sumber daya manusia, struktur organisasi pengelolaan dan tingkat layanan yang diberikan TI. Tingkat kesesuaian penerapan TI saat ini telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. PTPI has an IT Master Plan and implements information technology systems in accordance with established policies and in accordance with mature IT planning including human resources, management organizational structure and the level of services provided by IT. The level of suitability of current IT implementation is in accordance with company needs. 7. PTPI tidak menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Namun demikian, PTPI telah menetapkan garis koordinasi organ pendukung Direksi dengan organ pendukung Dewan Komisaris untuk memastikan ketersediaan informasi bagi Dewan Komsaris dalam menjalankan perannya secara efektif. PTPI does not carry out business activities based on sharia principles. However, PTPI has established a coordination line between the supporting organs of the Board of Directors and the supporting organs of the Board of Commissioners to ensure the availability of information for the Board of Commissioners in carrying out its role effectively. 8. Pembidangan tugas anggota Direksi PTPI ditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS, dimana telah terdapat nomenklatur masing-masing anggota Direksi. Pemegang Saham telah menetapkan pembagian tugas Direksi berdasarkan nomenklatur pada saat pengangkatan. The duties of the members of the Board of Directors of PTPI are determined based on the GMS Resolution, where there is a nomenclature for each member of the Board of Directors. Shareholders have determined the division of duties of the Board of Directors based on the nomenclature at the time of appointment. 9. Dalam Anggaran Dasar telah ditetapkan kebijakan terkait pemberhentian anggota Direksi, salah satunya apabila terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau Negara, atau mengundurkan diri. The Articles of Association stipulate policies related to the dismissal of members of the Board of Directors, one of which is if they are involved in actions that are detrimental to the Company and/or the State, or resign.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation		Implementasi di Pupuk Indonesia Implementation at Pupuk Indonesia
	1.2 Penilaian kinerja Direksi dan Anggotanya 1.2 Performance assessment of the Board of Directors and its members	1.2.1 Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu Direktur. 1.2.1 The Board of Commissioners conducts an annual formal evaluation objectively and independently to determine the effectiveness of the Board of Directors and each individual Director. 1.2.2 Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya. 1.2.2 The Board of Commissioners, with consideration from the Nomination and Remuneration Committee, is responsible for determining the performance evaluation criteria and assessing the performance of the President Director and other members of the Board of Directors.	1. Dewan Komisaris telah menilai kinerja Direksi secara kolegial dan individu Direksi, dan melaporkannya kepada Pemegang Saham. The Board of Commissioners has assessed the performance of the Board of Directors collegially and individually, and reported it to the Shareholders. 2. Kewajiban Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja Direksi telah tercantum dalam Anggaran Dasar, Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan *Board Manual*. Kriteria penilaian kinerja Direksi oleh Dewan Komisaris tercantum dalam Keputusan Dewan Komisaris tentang Kebijakan dan Kriteria Penilaian Kinerja Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia. The obligation of the Board of Commissioners to assess the performance of the Board of Directors is stated in the Articles of Association, Corporate Governance Guidelines and Board Manual. The criteria for assessing the performance of the Board of Directors by the Board of Commissioners are stated in the Decree of the Board of Commissioners on the Policy and Criteria for Performance Assessment of the Board of Directors of PT Pupuk Indonesia.
	1.3 Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 1.3 Roles and Responsibilities of the Board of Commissioners	1.3.1 Dewan Komisaris mereviu strategi korporasi paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga mereviu, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek korporasi. Dewan Komisaris memberikan advis dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi korporasi, diatur dalam anggaran dasar korporasi. 1.3.1 The Board of Commissioners reviews the corporate strategy at least annually and approves the mission, vision and corporate strategy formulated by the Board of Directors. The Board of Commissioners also reviews, advises and approves the business plan and long-term financial plan and short-term financial plan of the corporation. The Board of Commissioners advises and monitors the Board of Directors on the management of their implementation. The Board of Directors and the Board of Commissioners are involved in decisions that are very important to the corporation, regulated in the articles of association of the corporation. 1.3.2 Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris harus diungkapkan dalam laporan tahunan. 1.3.2 The type of decision that requires the approval of the Board of Commissioners must be disclosed in the annual report.	1. Dewan Komisaris telah memberikan telaah atas rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang disampaikan Direksi. Kebijakan mengenai mekanisme pemberian persetujuan atau tanggapan/pendapat atas RJPP oleh Dewan Komisaris telah diatur dalam Anggaran Dasar, Pedoman Tata Kelola Perusahaan, dan *Board Manual*. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris Tahun 2022 telah mencantumkan Program Kegiatan Pengawasan, salah satunya pengawasan implementasi *Blue Print*/RJPP. The Board of Commissioners has reviewed the draft Company Long Term Plan (RJPP) submitted by the Board of Directors. Policies regarding the mechanism for granting approval or responses/opinions on the RJPP by the Board of Commissioners have been regulated in the Articles of Association, Corporate Governance Guidelines, and Board Manual. The 2022 Work Plan and Budget (RKA) of the Board of Commissioners has included a Supervisory Activity Program, one of which supervises the implementation of the Blue Print/RJPP. 2. Mekanisme bagi Dewan Komisaris mengenai pemberian persetujuan terhadap tindakan Direksi yang memerlukan rekomendasi/persetujuan Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual*. The mechanism for the Board of Commissioners to approve actions of the Board of Directors that require the recommendation/approval of the Board of Commissioners is set out in the Articles of Association and Board Manual.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Implementasi di Pupuk Indonesia Implementation at Pupuk Indonesia
	1.3.3 Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh RUPS pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, unsur nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan jender. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan. 1.3.3 Taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee, the BOC proposes to, and to be decided by the GMS the appointment and/or dismissal of members of the BOD and members of the BOC. In proposing the above, the Board of Commissioners pays attention to diversity, nondiscriminatory elements and provides equal opportunities without distinguishing ethnicity, religion, race, intergroup and gender. The Board of Commissioners ensures that the nomination and election process for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners is formal and transparent. 1.3.4 Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama. 1.3.4 The Board of Commissioners or the Committee carrying out the nomination function develops a succession policy in the nomination process for members of the Board of Directors. Each year the Board of Commissioners reviews the report on the implementation of the development and succession plan submitted by the President Director. 1.3.5 Dewan Komisaris a) mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi, besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang korporasi dan pemegang saham; b) secara berkala mereviu sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. 1.3.5 The Board of Commissioners a) proposes to the GMS, which may be preceded by a proposal from the Committee carrying out the remuneration function, the amount of remuneration for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners that is aligned with sustainable corporate development and the long-term interests of the corporation and shareholders; b) periodically reviews the remuneration system of the Board of Directors and the Board of Commissioners.	3. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan evaluasi terhadap Direksi yang sedang menjabat dengan menunjuk Konsultan Independen. Dewan Komisaris menyampaikan Matriks Rekapitulasi *Selected Talent BUMN, Nominated Talent* BUMN dan *Nominated Talent* lingkup Klaster BUMN Industri Pupuk kepada Menteri BUMN. The Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee has evaluated the incumbent Directors by appointing an Independent Consultant. The Board of Commissioners submitted the Matrix of BUMN Selected Talent Recapitulation, BUMN Nominated Talent and Nominated Talent within the Fertilizer Industry BUMN Cluster to the Minister of BUMN. 4. Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan pembahasan data talent dalam rapat. Selanjutnya dengan memperhatikan *data talent* dan hasil rapat Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris menyampaikan kepada Direksi rencana validasi *Top 20% Talent* BOD-1 oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. The Nomination and Remuneration Committee has discussed the talent data in the meeting. Furthermore, taking into account the talent data and the results of the Nomination and Remuneration Committee meeting, the Board of Commissioners conveyed to the Board of Directors the plan to validate the Top 20% Talent BOD-1 by the Nomination and Remuneration Committee. 5. Dewan Komisaris telah mengusulkan remunerasi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi. Dewan Komisaris memberikan tanggapan atas Usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris dan Usulan Penetapan Tantiem Kinerja Usaha yang diusulkan oleh Direktur Utama. Selanjutnya Dewan Komisaris menyampaikan usulan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris dan Usulan Penetapan Tantiem Kinerja Usaha kepada Menteri BUMN selaku RUPS PTPI. The Board of Commissioners has proposed the remuneration of the Board of Directors in accordance with applicable regulations and the performance assessment of the Board of Directors. The Board of Commissioners provides a response to the proposed remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners and the Proposed Determination of Business Performance Tantiem proposed by the President Director. Furthermore, the Board of Commissioners submits the proposed Remuneration Proposal of the Board of Directors and the Board of Commissioners and the proposed Determination of Business Performance Tantiem to the Minister of BUMN as the GMS of PTPI.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Implementasi di Pupuk Indonesia Implementation at Pupuk Indonesia
	1.3.6 Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan. 1.3.6 The Board of Commissioners oversees the effectiveness of corporate governance policies and their implementation and proposes changes if necessary. 1.3.7 Dewan Komisaris memantau dan mengarahkan agar korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku. 1.3.7 The Board of Commissioners monitors and directs that the corporation implements appropriate and effective risk management and internal control systems that are aligned with the goals, objectives and strategies of the corporation and comply with applicable laws and regulations, codes of conduct and standards. 1.3.8 Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal. 1.3.8 The Board of Commissioners monitors and directs that the integrity of the corporate accounting and financial reporting system is achieved, as well as the independence of the internal and external audit functions. 1.3.9 Dewan Komisaris memantau, mereviu dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Korporasi serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian korporasi. 1.3.9 The BOC monitors, reviews and approves the Corporation's annual report and sustainability report and ensures their integrity, and oversees the corporate disclosure and communication process. 1.3.10 Piagam Dewan Komisaris secara periodik ditinjau. 1.3.10 The BOC Charter is periodically reviewed. 1.3.11 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. 1.3.11 The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if involved in financial crimes and proven wrongdoing.	6. Dewan Komisaris telah melaksanakan pemantauan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, melalui pemantauan tindak lanut rekomendasi atas *Area of Improvement* (AoI) hasil asesmen penerapan GCG dan telaah atas draft Keputusan Menteri BUMN tentang Pedoman Tata Kelola Risiko Berkesinambungan BUMN. The Board of Commissioners has monitored the principles of corporate governance, through monitoring the follow-up of recommendations on Areas of Improvement (AoI) from the GCG implementation assessment results and reviewing the draft Decree of the Minister of SOEs on Guidelines for SOE Sustainable Risk Governance. 7. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan melalui Rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi, dan melalui Surat Dewan Komisaris kepada Direksi. Komite CGG-PMR telah melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan manajemen risiko dan menyampaikan hasil evaluasi kepada Dewan Komisaris. The Board of Commissioners has supervised and advised on the Company's risk management policies and implementation through Board of Commissioners Meetings, Board of Commissioners Meetings that Include the Board of Directors, and through Board of Commissioners Letters to the Board of Directors. The CGG-PMR Committee has evaluated the effectiveness of risk management implementation and submitted the evaluation results to the Board of Commissioners.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Implementasi di Pupuk Indonesia Implementation at Pupuk Indonesia
	1.3.12 Komisaris independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, obyektif, aktif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior. 1.3.12 Independent Commissioners are strongly encouraged to contribute to honest, objective, active and constructive discussions at BOC meetings. In addition, there should also be opportunities for the BOC to meet with the BOD and senior management. 1.3.13 Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. 1.3.13 The President Commissioner acts as the coordinator of the BOC and ensures its effectiveness. The President Commissioner encourages a culture of openness and constructive dialog that allows a wide range of views to be expressed, including coordinating the setting of appropriate board meeting agendas and ensuring sufficient time is available to discuss all agendas.	8. Dewan Komisaris telah memberikan arahan tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Dewan Komisaris dibantu Komite Audit telah melakukan penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal melalui pemantauan kesesuaian penyelesaian progress audit dengan rencana kerjanya, menelaah kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar profesi akuntan publik dan menelaah hasil audit eksternal dan kualitas rekomendasi audit eksternal. Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit internal melalui penelaahan atas efektivitas pemantauan tindak lanjut hasil audit SPI dan auditor eksternal; penelaahan atas kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit internal; kelengkapan atribut temuan dan kualitas rekomendasi hasil audit internal; dan telaah rencana kerja pengawasan dan pelaksanaannya; serta manajemen fungsi SPI. The Board of Commissioners has provided guidance on accounting policies and the preparation of Financial Statements in accordance with applicable accounting standards in Indonesia. The Board of Commissioners, assisted by the Audit Committee, has assessed the effectiveness of the external audit implementation through monitoring the suitability of the completion of the audit progress with the work plan, reviewing the suitability of the audit implementation with the professional standards of public accountants and reviewing the external audit results and the quality of external audit recommendations. The Board of Commissioners through the Audit Committee has assessed the effectiveness of internal audit implementation through reviewing the effectiveness of monitoring the follow-up of SPI and external auditor audit results; reviewing the suitability of audit implementation with internal audit standards; completeness of findings attributes and quality of internal audit recommendations; and reviewing the supervisory work plan and its implementation; as well as the management of the SPI function. 9. Dewan Komisaris telah memberikan pernyataan bertanggung jawab atas kebenaran seluruh informasi dalam Laporan Tahunan Perusahaan dengan menandatanganin surat pernyataan bersama anggota Dewan Komisaris dan Direksi. The Board of Commissioners has provided a statement of responsibility for the accuracy of all information in the Company's Annual Report by signing a joint statement letter with members of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Implementasi di Pupuk Indonesia Implementation at Pupuk Indonesia
		10. Komite Dewan Komisaris telah memiliki Piagam dan Dewan komisaris telah melakukan peninjauan atas Piagam tersebut secara periodik. The Board of Commissioners Committee has a Charter and the Board of Commissioners has reviewed the Charter periodically. 11. Dalam Anggaran Dasar telah ditetapkan kebijakan terkait pemberhentian anggota Dewan Komisaris, salah satunya apabila telibat tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau Negara, atau mengundurkan diri. The Articles of Association stipulate policies related to the dismissal of members of the Board of Commissioners, one of which is if they are involved in actions that are detrimental to the Company and/or the State, or resign. 12. Dewan Komisaris telah memiliki 3 (tiga) orang Komisaris Independen atau 37,5% dari jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 8 (delapan) orang. Komisaris Independen berperan aktif dalam Rapat Internal Dewan Komisaris maupun Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi dengan tingkat kehadiran 91,67%. The Board of Commissioners has 3 (three) Independent Commissioners or 37.5% of the total 8 (eight) members of the Board of Commissioners. Independent Commissioners play an active role in Internal Meetings of the Board of Commissioners and Meetings of the Board of Commissioners that Include the Board of Directors with an attendance rate of 91.67%. 13. Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit, telah berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris. Komisaris Utama berperan aktif dalam memimpin Rapat Dewan Komisaris maupun Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi. Dalam Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi, Direksi dapat mengikutsertakan BOD-1 untuk memberikan kesempatan Dewan Komisaris bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior. The President Commissioner, who concurrently serves as Independent Commissioner and Chairman of the Audit Committee, has acted as coordinator of the Board of Commissioners. The President Commissioner plays an active role in chairing Board of Commissioners Meetings and Board of Commissioners Meetings that include the Board of Directors. In Board of Commissioners Meetings that include the BOD, the BOD may include the BOD-1 to allow the BOC to meet with the BOD and senior management.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation		Implementasi di Pupuk Indonesia Implementation at Pupuk Indonesia
	1.4 Pembentukan Komite 1.4 Establishment of the Committee	1.4.1 Korporasi memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite GCG dan Pemantauan Manajemen Risiko. 1.4.1 The Corporation has committees under the Board of Commissioners consisting of at least: Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Risk Management Monitoring Committee. 1.4.2 Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen. 1.4.2 The Board of Commissioners ensures that the members of the Audit Committee are entirely independent and other committees formed by the Board of Commissioners have a majority of independent parties, and all committee members are competent, committed, and have sufficient authority to carry out their roles effectively and independently. 1.4.3 Untuk memastikan pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan obyektif dan independen, Komisaris Utama tidak boleh menjadi ketua Komite Audit, kecuali dalam keadaan luar biasa yang harus dijelaskan dalam laporan tahunan. 1.4.3 To ensure objective and independent monitoring of the Audit Committee's duties, the President Commissioner may not be the chairman of the Audit Committee, except in exceptional circumstances which must be explained in the annual report.	1. Dewan Komisaris telah memiliki 3 (tiga) Komite, yaitu: Komite Audit, Komite Good Corporate Governance dan Pemantauan Manajemen Risiko (Komite GCG dan PMR), serta Komite Nominasi dan Remunerasi (Komite NR). The Board of Commissioners has 3 (three) Committees, namely: Audit Committee, Good Corporate Governance and Risk Management Monitoring Committee (GCG and PMR Committee), and Nomination and Remuneration Committee (NR Committee). 2. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa mayoritas anggota Komite dari pihak independent (Komite Audit 100%, Komite GCG-PMR 40%, Komite NR 50%), serta memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya. The Board of Commissioners has ensured that the majority of Committee members are independent (Audit Committee 100%, GCG-PMR Committee 40%, NR Committee 50%), and are competent, committed, and have sufficient authority to carry out their roles. 3. Komisaris Utama merupakan Komisaris Independen dan merangkap sebagai Ketua Komite Audit. The President Commissioner is an Independent Commissioner and concurrently serves as Chairman of the Audit Committee.
	1.5 Penilaian Kinerja-Dewan Komisaris dan Anggotanya 1.5 Performance Appraisal-the Board of Commissioners and its Members	1.5.1 Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komitenya, dan setiap individu Komisaris. 1.5.1 The BOC conducts a formal annual objective evaluation to determine the effectiveness of the Board, its committees, and each individual Commissioner.	Dewan Komisaris telah melakukan pengukuran dan penilaian kinerja Dewan Komisaris. Dewan Komisaris telah mengevaluasi pencapaian kinerja anggota Dewan Komisaris dan dituangkan dalam Tanggapan atas Laporan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris secara triwulanan yang disampaikan kepada Menteri BUMN selaku Pemegang Saham. The Board of Commissioners has measured and assessed the performance of the Board of Commissioners. The Board of Commissioners has evaluated the performance achievements of the members of the Board of Commissioners and outlined in the Response to the Management Report and Implementation of Duties of the Board of Commissioners on a quarterly basis submitted to the Minister of SOEs as the Shareholder.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation		Implementasi di Pupuk Indonesia Implementation at Pupuk Indonesia
	1.6 Benturan Kepentingan 1.6 Conflict of Interest	1.6.1 Anggota Direksi yang mempunyai rangkap jabatan di luar korporasi, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Seorang Komisaris memberi tahu Dewan Komisaris dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru sebagai Direktur atau Komisaris dari korporasi terbuka, jabatan Direktur lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan. 1.6.1 Members of the Board of Directors who hold concurrent positions outside the corporation must obtain approval from the Board of Commissioners. A Commissioner informs the Board of Commissioners and the chairman of the committee that carries out the nomination function, before accepting a new appointment as a Director or Commissioner of a publicly listed corporation, other Directorships or other positions with significant time commitments. 1.6.2 Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris atau afiliasi Komisaris yang bersangkutan. 1.6.2 The BOC monitors and manages potential conflicts of interest of management, members of the BOD, BOC and shareholders, including misuse of corporate assets and abuse in related party transactions. Commissioners who have conflicts of interest do not participate in monitoring and decision-making on potential conflicts of interest involving the Commissioner or an affiliate of the Commissioner concerned.	1. Pengaturan mengenai rangkap jabatan terlah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Pasal 10 ayat (34). Selama tahun 2022, tidak terdapat anggota Direksi yang merangkap jabatan yang menimbulkan benturan kepentingan. Arrangements regarding concurrent positions are stipulated in the Articles of Association Article 10 paragraph (34). During 2022, there were no members of the Board of Directors who held concurrent positions that caused conflicts of interest. 2. Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan benturan kepentingan dan melaksanakan secara konsisten kebijakan tersebut. Ketentuan terkait dengan benturan kepentingan tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan, Pedoman Tata Kelola Perusahaan, *Board Manual*, Pedoman Etika dan Perilaku dan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan. Dewan Komisaris telah menandatangani Pakta Integritas, yang salah satunya terkait benturan kepentingan, bahwa: "Selama menjabat sebagai Komisaris, tidak akan memanfaatkan posisi saya pada perusahaan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kerabat, maupun golongan tertentu, dan tidak memiliki benturan kepentingan maupun rangkap jabatan yang bertentangan dengan pengangkatan sebagai Komisaris pada perusahaan ini, sesuai peraturan di bidang Badan Usaha Milik Negara." The Board of Commissioners has a conflict of interest policy and consistently implements the policy. Provisions related to conflict of interest are stated in the Company's Articles of Association, Corporate Governance Guidelines, Board Manual, Code of Ethics and Conduct and Conflict of Interest Handling Guidelines. The Board of Commissioners has signed an Integrity Pact, one of which relates to conflicts of interest, that: "During my tenure as Commissioner, I will not utilize my position in this company, either directly or indirectly, for personal, family and relative interests, or certain groups, and have no conflict of interest or concurrent positions that conflict with my appointment as Commissioner in this company, in accordance with the regulations in the field of State-Owned Enterprises."

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation		Implementasi di Pupuk Indonesia Implementation at Pupuk Indonesia
	1.7 Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris 1.7 Competency Improvement for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners	1.7.1 Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik dan operasi korporasi, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Direksi melalui sekretaris korporasi mendukung semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbarui dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di Dewan. 1.7.1 The BOC ensures that members of the BOD and BOC understand their roles and responsibilities, the characteristics and operations of the corporation, relevant laws and standards and other applicable obligations. The Board of Directors through the corporate secretary supports all Board members in updating and refreshing their skills and knowledge required to perform their roles on the Board.	Dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Board Manual telah diatur mengenai Program Pengenalan dan Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan. The Corporate Governance Guidelines and Board Manual have regulated the Introduction and Competency Improvement Program for the Board of Commissioners and Directors. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors have conducted training programs in order to improve their competencies as needed.
Prinsip 2: Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Principle 2: Composition and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners	2.1 Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris 2.1 Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners	2.1.1 Dalam menentukan kandidat calon Direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. 2.1.1 In determining Director candidates, the BOC through the Nomination and Remuneration Committee does not rely solely on recommendations from the BOC, management or majority shareholders. The BOC through the Nomination and Remuneration Committee may use independent sources to determine qualified candidates. 2.1.2 Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi. 2.1.2 The Board of Commissioners ensures that the criteria in selecting members of the Board of Directors include at least the knowledge, skills and expertise required to appropriately fulfill the role of the Board of Directors and pay attention to the fulfillment of the diversity of the Board of Directors. 2.1.3 Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada, Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan. 2.1.3 The corporate policy on diversity in the Board of Directors and Board of Commissioners is disclosed in the Annual Report.	1. Pada tahun 2022, tidak terdapat perubahan susunan Anggota Direksi, sehingga Dewan Komisaris tidak mengusulkan calon Anggota Direksi kepada Pemegang Saham. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan evaluasi terhadap Direksi yang sedang menjabat dengan menunjuk Konsultan Independen. Dewan Komisaris menyampaikan Matriks Rekapitulasi *Selected Talent* BUMN, *Nominated Talent* BUMN dan *Nominated Talent* lingkup Klaster BUMN Industri Pupuk kepada Menteri BUMN. In 2022, there was no change in the composition of the Board of Directors, so the Board of Commissioners did not propose candidates for the Board of Directors to the Shareholders. The Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee has evaluated the incumbent Directors by appointing an Independent Consultant. The Board of Commissioners submitted the Matrix of BUMN Selected Talent Recapitulation, BUMN Nominated Talent and Nominated Talent within the Fertilizer Industry BUMN Cluster to the Minister of BUMN.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Implementasi di Pupuk Indonesia Implementation at Pupuk Indonesia
	2.1.4. Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. Dewan Komisaris menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. 2.1.4. The BOC ensures that the policies and procedures for selection and nomination of Commissioners are clear and transparent so as to produce the desired composition of the Board. The BOC uses independent sources to determine qualified candidates.	2. Dewan Komisaris belum memiliki kebijakan nominasi calon anggota Direksi. Kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mengacu pada Peraturan Menteri BUMN tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi telah menunjuk Konsultan Independen untuk melakukan evaluasi terhadap Direksi yang sedang menjabat. Berdasarkan RUPS pengangkatan anggota Direksi, dapat disimpulkan bahwa jumlah anggota Direksi sebanyak 8 (delapan) orang telah sesuai dengan kebutuhan, anggota Direksi memiliki latar belakang pendidikan/ pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis usaha perusahaan, serta seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman yang sesuai dengan pembidangan tugas anggota Direksi. The Board of Commissioners does not yet have a nomination policy for candidates for the Board of Directors. The criteria for selecting members of the Board of Directors refer to the Regulation of the Minister of SOEs on the Requirements and Procedures for Appointing and Dismissing Members of the Board of Directors of SOEs. The Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee has appointed an Independent Consultant to evaluate the incumbent Board of Directors. Based on the GMS of the appointment of members of the Board of Directors, it can be concluded that the number of members of the Board of Directors of 8 (eight) people is in accordance with the needs, members of the Board of Directors have educational backgrounds/knowledge and/or experience in accordance with the type of business of the company, and all members of the Board of Directors have experience in accordance with the duties of members of the Board of Directors.
	2.1.5. Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi. 2.1.5. The Board of Commissioners/Committee performing the nomination function establishes nomination procedures and criteria that are consistent with the Board of Commissioners' skill matrix approved by the Board of Commissioners and ensures that candidate profiles meet the requirements set out in the skill matrix and nomination criteria.	
	2.1.6. Komposisi Dewan Komisaris harus dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan gender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris. 2.1.6. The composition of the BOC should be such that its members as a group reflect the diversity in terms of skills, expertise, knowledge, experience, age, cultural background and gender required to properly fulfill the role of the BOC.	
	2.1.7. Untuk memampukan Dewan Komisaris dalam memberikan advis dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran-peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen yang cukup jumlahnya, dengan masa jabatan yang dibatasi dan terdapat pengungkapan Jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris serta independensi mereka dari sudut pandang korporasi. 2.1.7. To enable the BOC to provide independent advice and supervision to the BOD and for roles where there is a potential conflict of interest, the BOC consists of a sufficient number of Independent Commissioners, with term limits and disclosure of the term of membership of the BOC and their independence from a corporate perspective.	3. Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan pada bagian Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi. The diversity of the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors has been disclosed in the Annual Report in the Transparency of Information about the Board of Commissioners and the Board of Directors section.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Implementasi di Pupuk Indonesia Implementation at Pupuk Indonesia
	2.1.8. Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. 2.1.8. To facilitate the effective functioning of the BOD and BOC and to enhance investor and stakeholder confidence, the Nomination and Remuneration Committee ensures that there is a formal, rigorous and transparent process for the appointment and removal of BOD and BOC members.	4. Kriteria dalam menyeleksi anggota Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Menteri BUMN tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris BUMN. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan sesuai Peraturan Menteri BUMN selaku RUPS. Komposisi Dewan Komisaris telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan jumlah anggota Dewan Komisaris sama dengan jumlah anggota Direksi sebanyak 8 (delapan) orang dan jumlah Komisaris Independen sebanyak 3 (tiga) orang atau 37,5% dari jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 8 (delapan) orang. The criteria for selecting members of the Board of Commissioners refer to the Regulation of the Minister of SOEs on the Requirements and Procedures for the Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners of SOEs. The appointment of members of the Board of Commissioners has been carried out a fit and proper test in accordance with the Regulation of the Minister of SOEs as the GMS. The composition of the Board of Commissioners is in accordance with applicable regulations with the number of members of the Board of Commissioners equal to the number of members of the Board of Directors of 8 (eight) people and the number of Independent Commissioners of 3 (three) people or 37.5% of the total number of members of the Board of Commissioners of 8 (eight) people. 5. Dewan Komisaris atau Komite Nominasi dan Remunerasi belum memiliki prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris. Kriteria dalam menyeleksi anggota Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Menteri BUMN tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris BUMN. The Board of Commissioners or Nomination and Remuneration Committee does not yet have nomination procedures and criteria that are consistent with the Board of Commissioners' skill matrix. The criteria for selecting members of the Board of Commissioners refer to the Regulation of the Minister of SOEs on the Requirements and Procedures for the Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners of SOEs.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Implementasi di Pupuk Indonesia Implementation at Pupuk Indonesia
		6. Komposisi Dewan Komisaris telah mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, dan latar belakang budaya yang dibutuhkan untuk memenuhi peran Dewan Komisaris secara tepat. (Lihat bagian Jumlah, Komposisi, dan Susunan Dewan Komisaris). The composition of the Board of Commissioners reflects the diversity in terms of skills, expertise, knowledge, experience, age, and cultural background required to properly fulfill the role of the Board of Commissioners. (See the Number, Composition and Composition of the Board of Commissioners section). 7. Dewan Komisaris memiliki Komisaris Independen sebanyak 3 (tiga) orang atau 37,5% dari jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 8 (delapan) orang. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Informasi jangka waktu dan independensi anggota Dewan Komisaris telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan.n Komisaris menyampaikan Matriks Rekapitulasi *Selected Talent* BUMN, *Nominated Talent* BUMN dan *Nominated Talent* lingkup Klaster BUMN Industri Pupuk kepada Menteri BUMN. The Board of Commissioners has 3 (three) Independent Commissioners or 37.5% of the total 8 (eight) members of the Board of Commissioners. The term of office of members of the Board of Commissioners is set at 5 (five) years and may be reappointed for 1 (one) term of office. Information on the term of office and independence of members of the Board of Commissioners has been disclosed in the Annual Report.n The Board of Commissioners submits the Matrix of SOE Selected Talent Recapitulation, BUMN Nominated Talent and Nominated Talent within the Fertilizer Industry SOE Cluster to the Minister of SOE. 8. Komite Nominasi dan Remunerasi aktif dalam rapat pembahasan Top 20% Talenta BOD-1 (*Selected Talent*). Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan evaluasi terhadap Direksi yang sedang menjabat dengan menunjuk Konsultan Independen. Selanjutnya Dewan Komisaris menyampaikan Matriks Rekapitulasi *Selected Talent* BUMN, *Nominated Talent* BUMN dan *Nominated Talent* lingkup Klaster BUMN Industri Pupuk kepada Menteri BUMN. The Nomination and Remuneration Committee is active in the Top 20% BOD-1 Talent (Selected Talent) discussion meeting. The Nomination and Remuneration Committee has conducted an evaluation of the incumbent BOD by appointing an Independent Consultant. Furthermore, the Board of Commissioners submitted a Matrix of SOE Selected Talent Recapitulation, SOE Nominated Talent and Nominated Talent within the Fertilizer Industry SOE Cluster to the Minister of SOE.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation		Implementasi di Pupuk Indonesia Implementation at Pupuk Indonesia
	2.2 Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris 2.2 Remuneration of Directors and Board of Commissioners	2.2.1. Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Direksi harus diusulkan, dapat dengan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. 2.2.1. The remuneration policy for members of the BOD consists of a remuneration structure that is oriented towards sustainable corporate development and encourages the achievement of long-term goals. The remuneration of the BOD shall be proposed, possibly through the Nomination and Remuneration Committee, by the BOC to be decided by the GMS. The amount of remuneration proposed to the GMS is determined by considering the role of each member of the BOD and the economic situation and corporate performance. 2.2.2. Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Jumlah remunerasi yang diusulkan Dewan Komisaris kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. Di samping itu juga harus dipertimbangkan posisinya sebagai Komisaris Utama dan ketua serta keanggotaannya dalam komite-komite. 2.2.2. The remuneration policy for members of the Board of Commissioners consists of a remuneration structure that is oriented towards sustainable corporate development and encourages the achievement of long-term goals. The amount of remuneration proposed by the Board of Commissioners to the GMS is determined by considering the role of each member of the Board of Commissioners and the economic situation and corporate performance. In addition, it must also consider his position as President Commissioner and chairman and his membership in committees.	1. Kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengusulan remunerasi Direksi tercantum dalam Anggaran Dasar, Pedoman Tata Kelola Perusahaan, dan Kebijakan Pengawasan dan Pengembangan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris telah mengusulkan remunerasi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi. Besaran gaji dan tantiem/insentif kinerja bagi Wakil Direktur Utama sebesar 90% dari Direktur Utama dan bagi anggota Direksi lainnya sebesar 85% dari Direktur Utama. Selanjutnya, RUPS menetapkan remunerasi Direksi dalam keputusan RUPS. The Board of Commissioners' policy on proposing the remuneration of the Board of Directors is stated in the Articles of Association, Corporate Governance Guidelines, and the Board of Commissioners' Supervision and Development Policy. The Board of Commissioners has proposed the remuneration of the Board of Directors in accordance with applicable regulations and the performance assessment of the Board of Directors. The amount of salary and tantiem/performance incentive for the Deputy President Director is 90% of the President Director and for other members of the Board of Directors is 85% of the President Director. Furthermore, the GMS determines the remuneration of the Board of Directors in the GMS resolution.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Implementasi di Pupuk Indonesia Implementation at Pupuk Indonesia
	2.2.3. Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi Direktur dan Komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. 2.2.3. To ensure that remuneration packages are determined based on the achievements, qualifications and competencies of Directors and Commissioners by taking into account the performance of corporate operations, individual performance and market conditions, the Nomination and Remuneration Committee ensures that there is a fair and transparent procedure for determining the remuneration policy for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.	2. Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris meliputi honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif kinerja (di mana dalam Tantiem tersebut dapat diberikan tambahan berupa Penghargaan Jangka Panjang/*Long Term Incentive*) dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, serta kondisi dan kemampuan perusahaan. Besaran honorarium dan tantiem/insentif kinerja bagi Komisaris Utama sebesar 45% dari Direktur Utama dan bagi anggota Dewan Komisaris sebesar 90% dari Komisaris Utama. Dewan Komisaris menyampaikan Usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris dan Usulan Tantiem Kinerja kepada Menteri BUMN selaku RUPS. Selanjutnya, RUPS menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dalam keputusan RUPS. The remuneration policy for members of the Board of Commissioners includes honorarium, allowances, facilities and tantiem/performance incentive (where in the Tantiem can be given additionally in the form of Long Term Incentive) by considering business scale factors, business complexity factors, inflation rates, and the conditions and capabilities of the company. The amount of honorarium and tantiem/performance incentive for the President Commissioner is 45% of the President Director and for members of the Board of Commissioners is 90% of the President Commissioner. The Board of Commissioners submits the Proposed Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners and the Proposed Performance Tantiem to the Minister of SOEs as the GMS. Furthermore, the GMS determines the remuneration of the Board of Commissioners in the GMS resolution. 3. Dewan Komisaris telah menetapkan Kebijakan Pengawasan dan Pengembangan Dewan Komisaris. Namun demikian, Komite Nominasi dan Remunerasi belum memiliki prosedur untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. The Board of Commissioners has established a Board of Commissioners Supervision and Development Policy. However, the Nomination and Remuneration Committee does not yet have a procedure for determining the remuneration policy for members of the Board of Directors and Board of Commissioners.

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation		**Implementasi di Pupuk Indonesia** Implementation at Pupuk Indonesia
Prinsip 3: Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris Principle 3: Working Relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners	3.1 Sifat Hubungan Kerja 3.1 Nature of Employment Relationship	3.1.1 Terdapat diskusi yang terbuka antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta di antara para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris. Namun, tetap penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia. 3.1.1 There are open discussions between the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. However, it is still important to maintain the confidentiality of information to avoid leakage of confidential information. 3.1.2 Sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, Direksi bekerja sama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya. 3.1.2 In accordance with their respective duties and roles, the BOD cooperates with the BOC in formulating the corporate mission, vision and strategy and regularly discusses their implementation. 3.1.3 Sekretaris Korporasi memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris, mendorong implementasi praktik governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. 3.1.3 The Corporate Secretary has an important role in supporting the effectiveness of the working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners, encouraging the implementation of good corporate governance practices, including effective communication with shareholders and other stakeholders.	1. PTPI menerapkan prinsip transparansi yang meliputi keterbukaan informasi dengan tidak mengurangi kewajiban perusahaan untuk melindungi informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PTPI applies the principle of transparency which includes information disclosure without reducing the company's obligation to protect confidential information in accordance with the Articles of Association and applicable laws and regulations. 2. Visi dan Misi ditetapkan dan diberlakukan melalui kajian secara mendalam dalam sebuah forum penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2020-2024 yang melibatkan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, jajaran PTPI, kemudian disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi serta disahkan oleh Menteri BUMN selaku Pemegang Saham. Vision and Mission are determined and enacted through in-depth study in a forum for the preparation of the 2020-2024 Company Long Term Plan (RJPP) involving Shareholders, Board of Commissioners, Board of Directors, PTPI staff, then approved by the Board of Commissioners and Board of Directors and ratified by the Minister of BUMN as the Shareholder.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Implementasi di Pupuk Indonesia Implementation at Pupuk Indonesia
		3. Sekretaris Perusahaan telah menjalankan fungsinya melalui: a. pemberian informasi kinerja kepada pemangku kepentingan, b. pelaporan kepada Dewan Komisaris, c. penyampaian laporan manajemen triwulanan dan semesteran kepada Menteri BUMN selaku Pemegang Saham, d. penyampaian Laporan Tahunan kepada Pemegang Saham pada saat undangan RUPS Tahunan disampaikan kepada Pemegang Saham, e. penyampaian informasi meteriil dan relevan melalui *website* perusahaan, f. koordinasi penyediaan bahan *Press Release* kepada publik melalui perusahaan, g. menjalankan tugas sebagai pejabat penghubung (*Liasion Officer*), h. penyimpanan Berita Acara RUPS, i. penyelenggaraan program pengenalan perusahaan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru diangkat, j. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama. The Corporate Secretary has carried out its functions through: a. providing performance information to stakeholders, b. reporting to the Board of Commissioners, c. submission of quarterly and semesterly management reports to the Minister of SOEs as Shareholders, d. submission of the Annual Report to the Shareholders when the invitation to the Annual GMS is delivered to the Shareholders, e. submission of material and relevant information through the company's website, f. coordinating the provision of Press Release materials to the public through the company's website, g. performing duties as a liaison officer, h. keeping the Minutes of the GMS, i. organizing a company introduction program for newly appointed members of the Board of Directors and Board of Commissioners, j. reporting the implementation of duties to the President Director.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation		Implementasi di Pupuk Indonesia Implementation at Pupuk Indonesia
	3.2 Akses informasi Dewan Komisaris 3.2 Access to information on the Board of Commissioners	3.2.1 Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris sendiri memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai. Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan korporasi. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan. 3.2.1 The BOD is responsible for ensuring that the BOC has access to accurate, relevant and timely information. The BOC itself ensures that it obtains adequate information. The BOD provides information to the BOC regularly, without delay and in a comprehensive manner on all issues relevant to the corporation. The BOC may at any time request the BOD to provide additional information.	Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memperoleh akses informasi baik dalam bentuk laporan yang disampaikan oleh Direksi seperti Laporan Manjemen Bulanan maupun penjelasan Direksi atas segala permasalahan menyangkut pengelolaan Perusahaan dalamRapat Dewan Komisaris dan Direksi, melihat dokumen Perusahaan serta mengetahui kebijakan dan tindakan yang akan dan telah dilakukan oleh Direksi. Dewan Komisaris tidak mengalami kendala dalam mengakses informasi Perusahaan. Direksi memastikan bahwa Dewan Komisaris berhak mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu, hal ini tertuang dalam Pedoman GCG dan *Board Manual* Perusahaan. In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners has access to information both in the form of reports submitted by the Board of Directors such as the Monthly Management Report as well as explanations from the Board of Directors on all issues concerning the management of the Company in the Board of Commissioners and Board of Directors Meetings, viewing Company documents and knowing the policies and actions that will and have been taken by the Board of Directors. The Board of Commissioners does not experience any obstacles in accessing the Company's information. The Board of Directors ensures that the Board of Commissioners has the right to access accurate, relevant and timely information, as stipulated in the Company's GCG Guidelines and Board Manual.
	3.3 Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur 3.3 Responsibility of the Board of Directors and Board of Commissioners for the Impact of Structure	3.3.1 Dampak struktur kepemilikan terhadap korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi korporasi. 3.3.1 Impact of ownership structure on the corporation. The Board of Directors and the Board of Commissioners consider their responsibilities in the context of the corporation's shareholding structure and inter-shareholder relationships that may impact the management and operation of the corporation.	Direksi dan Dewan Komisaris telah menyampaikan Daftar Khusus mengenai kepemilikan sahamnya pada Perusahaan yang telah ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan Pakta Integritas. The Board of Directors and the Board of Commissioners have submitted a Special Register regarding their share ownership in the Company which has been signed together with the signing of the Integrity Pact.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation		Implementasi di Pupuk Indonesia Implementation at Pupuk Indonesia
Prinsip 4: Perilaku Etis dan Bertanggung jawab Principle 4: Ethical and Responsible Behavior	4.1 Pedoman Etika dan Perilaku 4.1 Code of Ethics and Conduct	4.1.1 Pernyataan ini dituangkan dalam Pedoman Perilaku dan Etika Usaha yang harus secara jelas mengungkapkan harapan korporasi bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan akan: a. Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi; b. Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi; c. Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian; d. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korporasi dan operasinya; e. Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika korporasi; f. Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apa pun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik korporasi atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi korporasi; g. Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki korporasi, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi korporasi dan pelanggannya; h. Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi; i. Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/ memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan; j. Menghormati perbedaan pendapat dan hak-hak setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan; k. Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya. 4.1.2 Direksi menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, antikorupsi, antikecurangan (*antifraud*), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti suap, antikorupsi, antikecurangan atau standar terkait lainnya.	Pernyataan ini telah dituangkan dalam Pedoman Etika dan Perilaku, Bab III Komitmen, Etika, Kerja dan Tata Perilaku Insan Perusahaan, huruf A. Komitmen Insan Perusahaan: a. Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi (#1); b. Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi (#2); c. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korporasi dan operasinya (#3); d. Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika korporasi (#4); e. Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apa pun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik korporasi atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi korporasi (#5); f. Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki korporasi, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi korporasi dan pelanggannya (#6); g. Tidak memanfaatkan jabatanya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi (#7). Pernyataan ini dituangkan dalam bagian lain dalam Pedoman Etika dan Perilaku dengan kalimat senada atau sedikit berbeda sebagai berikut: a. Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian; Setiap karyawan harus menjunjung tinggi standar kerja tanpa terkecuali dan sedapat mungkin bertindak objektif dan independen dalam segenap kegiatan sehari-hari. b. Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/ memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan. Insan Perusahaan dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Implementasi di Pupuk Indonesia Implementation at Pupuk Indonesia
	4.1.1 This statement is set forth in the Code of Conduct and Business Ethics which must clearly express the corporation's expectation that each member of the Board of Directors and Board of Commissioners and employees will: a. Act in the best interests of the corporation; b. Act honestly and with high standards of integrity; c. Be independent and act based on complete information, in good faith, with due diligence and prudence; d. Comply with laws and regulations applicable to the corporation and its operations; e. Avoid actions that violate laws and regulations or unethical actions based on the corporation's ethical guidelines; f. Not engaging or participating in any activity that would create a conflict of interest with the best interests of the corporation or that would negatively impact the reputation of the corporation; g. Not taking advantage of property or information that applies to the corporation and its operations. Not taking advantage of property or information owned by the corporation, other asset holdings or its customers for personal interests or that cause harm to the corporation and its customers. h. Not utilizing his position or opportunities generated by his position for personal gain; i. Avoiding the act of requesting or receiving from third parties payments, gratuities or other benefits for himself or for others that cause conflicts of interest/provide benefits to third parties in violation of statutory regulations; j. Respect differences of opinion and the rights of each member of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees; k. Ensuring complete, fair, accurate, timely, and understandable disclosure in reports and documents submitted by the corporation to regulators and in other public communications. 4.1.2 The Board of Directors establishes policies and practices on anti-money laundering and terrorism financing, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, involvement in politics with reference to national or international standards regarding anti-money laundering, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud or other related standards.	This statement has been set forth in the Code of Ethics and Conduct, Chapter III Commitment, Ethics, Work and Code of Conduct for Company Personnel, letter A. Commitment of Company Personnel: a. Act in the best interest of the corporation (#1); b. Act honestly and with a high standard of integrity (#2); c. Comply with laws and regulations applicable to the corporation and its operations (#3); d. Avoiding actions that violate laws and regulations or unethical actions based on corporate ethical guidelines (#4); e. Not engage or participate in any activity that would create a conflict of interest with the best interests of the corporation or that would negatively impact the reputation of the corporation (#5); f. Not take advantage of property or information owned by the corporation, other asset holdings or its customers for personal gain or that causes harm to the corporation and its customers (#6); g. Not take advantage of his/her position or the opportunities generated by his/her position for personal gain (#7). This statement is set out in other sections of the Code of Ethics and Conduct with similar or slightly different sentences as follows: a. Be independent and act on the basis of complete information, in good faith, with due diligence and care: Every employee must uphold high standards of work without exception and act objectively and independently as much as possible in all daily activities. b. Avoiding the act of requesting or receiving from third parties payments, gratuities or other benefits for themselves or for others that cause conflicts of interest/provide benefits to third parties in violation of laws and regulations. Company personnel are prohibited from giving or offering, or accepting, directly or indirectly, anything of value to or from a customer or a Government official in order to influence or in return for what they have done and other actions, in accordance with the provisions of laws and regulations.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Implementasi di Pupuk Indonesia Implementation at Pupuk Indonesia
		c. Menghormati perbedaan pendapat dan hak-hak setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan; Melibatkan dan mempertimbangkan masukan dari bawahan dalam proses pengambilan keputusan serta menghargai dan menerima perbedaan pendapat dan kritik yang membangun. c. Respect the different opinions and rights of each member of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees; Involve and consider input from subordinates in the decision-making process and appreciate and accept dissenting opinions and constructive criticism. d. Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya. Penjelasan mengenai pengungkapan atau penggunaan informasi Perseroan yang bersifat rahasia berupa ucapan maupun tulisan ke atau oleh pihak manapun, baik perorangan, Perseroan, asosiasi, atau badan hukum lainnya, hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk Perseroan. d. Ensure complete, fair, accurate, timely, and understandable disclosure in reports and documents submitted by the corporation to regulators and in other public communications. Explanation of the disclosure or use of confidential Company information in the form of speech or writing to or by any party, whether individuals, the Company, associations, or other legal entities, can only be done by officials appointed by the Company.
4.2 Nilai-nilai dan Budaya Organisasi 4.2 Values and Organizational Culture	4.2.1 Korporasi mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilai-nilai korporasi 4.2.1 The corporation articulates, fosters and expresses corporate culture and values	Nilai-nilai yang dianut Perusahaan sesuai dengan nilai-nilai utama yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN dan telah dituangkan dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan, yaitu: Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (disingkat AKHLAK). Nilai-nilai tersebut diartikulasikan untuk memudahkan Insan Perusahaan memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam segenap kegiatan sehari-hari. The values adopted by the Company are in accordance with the main values set by the Ministry of SOEs and have been outlined in the Corporate Governance Guidelines, namely: Amanah, Kompeten, Harmonious, Loyal, Adaptive and Collaborative (AKHLAK for short). These values are articulated to make it easier for Company personnel to understand and apply these values in all daily activities.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation		Implementasi di Pupuk Indonesia Implementation at Pupuk Indonesia
	4.3 Penegakan dan Komunikasi Pedoman Etika, Nilai-nilai dan Budaya 4.3 Enforcement and Communication of Ethical Guidelines, Values and Culture	4.3.1 Pedoman perilaku dan kode etik korporasi dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan, diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan. 4.3.1 The corporate code of conduct and code of ethics are effectively communicated to the Board of Directors, Board of Commissioners, and all employees, integrated into corporate strategy and operations including risk management systems and remuneration structures, and enforced.	Pedoman Etika (*Code of Conduct*) telah disosialisasikan Perusahaan melalui survei pemahaman Pedoman Perusahaan serta dimasukkan ke dalam website perusahaan sehingga Insan Perusahaan dapat mengakses pedoman tersebut setiap saat. Setiap awal tahun perusahaan juga memastikan bahwa Insan perusahaan menandatangani Pakta Integritas, dimana salah satunya terkait pemahaman Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) perusahaan. Hal ini merupakan salah satu bentuk penegakan Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) dan nilai-nilai perusahaan. The Code of Conduct has been socialized by the Company through a survey on the understanding of the Company's Code and included in the Company's website so that Company personnel can access the Code at any time. At the beginning of each year, the Company also ensures that its personnel sign an Integrity Pact, one of which is related to understanding the Company's Code of Conduct. This is a form of enforcement of the Code of Conduct and company values.
Prinsip 5: Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan Principle 5: Risk Management, Internal Control and Compliance	5.1 Pengendalian Internal dan Kepatuhan 5.1 Internal Control and Compliance	5.1.1 Direksi melakukan reviu secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil reviu kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan Korporasi. 5.1.1 The Board of Directors periodically reviews the appropriateness of the design and operational effectiveness of the Corporation's systems of governance, risk management, internal control and compliance and reports the implementation and results of the review to the shareholders through the Corporation's annual report.	Penilaian atas penerapan GCG, pengelolaan risiko, pengendalian internal, dan kepatuhan perusahaan telah dilaksanakan setiap tahun. Pelaksanaan dan hasil penilaian dilaporkan kepada Pemegang Saham melalui Laporan Tahunan. Assessment of GCG implementation, risk management, internal control, and corporate compliance is conducted annually. The implementation and results of the assessment are reported to the Shareholders through the Annual Report.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation		Implementasi di Pupuk Indonesia Implementation at Pupuk Indonesia
	5.2. Manajemen Risiko 5.2. Risk Management	5.2.1. Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dalam diskusi di rapat Dewan Komisaris dan Direksi. 5.2.1. Strategy and risk are integrated, disclosed transparently, incorporated into the implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as in discussions at Board of Commissioners and Board of Directors meetings. 5.2.2. Komite GCG dan Pemantauan Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi. 5.2.2. The Risk Management Oversight Committee assists the Board of Commissioners by creating a transparent, focused and independent mechanism for overseeing corporate risk management.	1. Manajemen risiko terintegrasi telah diungkapkan secara transparan dalam Laporan Tahunan. Direksi telah menetapkan satu Direktur sebagai penanggung jawab penerapan manajemen risiko, yaitu: Direktur SDM, Tata Kelola dan Manajemen Risiko, yang kemudian beralih menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, dan dibantu oleh SVP Manajemen Risiko. Dewan Komisaris melalui Komite GCG-PMR telah memberikan arahan tentang manajemen risiko perusahaan dan termasuk dalam RKA Dewan Komisaris. Penerapan manajemen risiko juga dibahas secara rutin dalam Rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Integrated risk management has been transparently disclosed in the Annual Report. The Board of Directors has appointed one Director as the person in charge of risk management implementation, namely: Director of HR, Governance and Risk Management, who later transitioned into Director of Finance and Risk Management, and assisted by SVP Risk Management. The Board of Commissioners through the GCG-PMR Committee has provided direction on corporate risk management and is included in the RKA of the Board of Commissioners. The implementation of risk management is also discussed regularly in the Board of Commissioners and Board of Directors Meetings. 2. Komite GCG-PMR secara aktif membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan manajemen risiko perusahaan melalui Rapat Komite Dewan Komisaris yang dilaksanakan setiap bulan. The GCG-PMR Committee actively assists the Board of Commissioners in the supervision of the company's risk management through the Board of Commissioners Committee Meetings held every month.
	5.3. Integrasi Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan 5.3. Integration of Governance, Risk Management and Compliance	5.3.1 Direksi membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya. 5.3.1 The Board of Directors establishes an integrated system of governance, risk management, and compliance (GRC), by handling various uncertainties in an integrated manner and with high integrity, to ensure that the corporation can achieve its objectives. 5.3.2 Direksi memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. 5.3.2 The Board of Directors ensures that the section in charge of the compliance function does not concurrently carry out functions that have the potential to cause conflicts of interest.	1. Perusahaan sedang membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN yang berlaku. The Company is building an integrated governance, risk management and compliance (GRC) system in accordance with the prevailing Regulation of the Minister of SOEs. 2. Fungsi kepatuhan saat ini adalah independen, tidak merangkap dengan fungsi yang lainnya yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. The current compliance function is independent, not concurrent with other functions that could potentially lead to conflicts of interest.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation		Implementasi di Pupuk Indonesia Implementation at Pupuk Indonesia
	5.4. Audit Internal 5.4. Internal Audit	5.4.1 Dewan Komisaris melalui Komite Audit memantau dan memastikan bahwa fungsi audit internal membantu korporasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat. 5.4.1 The Board of Commissioners through the Audit Committee monitors and ensures that the internal audit function assists the Corporation to achieve its objectives by bringing an objective and disciplined approach to evaluating and improving the effectiveness of risk management, internal control, and corporate governance.	Dalam Piagam Komite Audit, dinyatakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komite Audit antara lain: a. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor. b. Memberikan rekomendasi mengeni penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya. In the Audit Committee Charter, the duties, authorities, and obligations of the Audit Committee are stated, among others: a. Assist the Board of Commissioners to ensure the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of the implementation of the duties of the external auditor and internal auditor. b. Providing recommendations on the improvement of the management control system and its implementation.
Prinsip 6: Pengungkapan dan Transparansi Principle 6: Disclosure and Transparency	6.1 Kebijakan Pengungkapan 6.1 Disclosure Policy	6.1.1 Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia korporasi 6.1.1 The corporation has disclosure and transparency policies and procedures that ensure disclosure of material information and safeguard sensitive information and corporate secrets. 6.1.2 Hak pemegang saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang korporasi harus dipenuhi. 6.1.2 The right of shareholders to obtain on a regular and timely basis relevant material information about the corporation must be fulfilled.	1. Perusahaan telah memiliki kebijakan mengenai keterbukaan informasi yaitu: Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Bab V Kebijakan Pokok Tata Kelola Perusahaan Huruf S Rangkap Jabatan Butir 5 tentang Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi) serta Pedoman Etika dan Perilaku (Bab III Komitmen, Etika Kerja dan Tata Perilaku Insan Perusahaan Huruf C.10. Perlindungan Informasi Perusahaan dan *Intagible Asset*). The Company has a policy regarding information disclosure, namely: Corporate Governance Guidelines (Chapter V Basic Policies of Corporate Governance Letter S Concurrent Position Item 5 on Information Disclosure and Confidentiality) and Code of Ethics and Behavior (Chapter III Commitment, Work Ethics and Code of Conduct for Company Personnel Letter C.10. Protection of Company Information and Intangible Assets). 2. Direksi melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris melalui Laporan Manajemen Triwulanan dan Semesteran, Laporan Manajemen Tahunan, dan Laporan Tahunan. The Board of Directors reports relevant information to Shareholders and the Board of Commissioners through Quarterly and Semesterly Management Reports, Annual Management Reports, and Annual Reports.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation		Implementasi di Pupuk Indonesia Implementation at Pupuk Indonesia
	6.2 Laporan Keuangan dan Keberlanjutan 6.2 Financial Statements and Sustainability	6.2.1 Korporasi mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat. 6.2.1 The Corporation discloses systems and procedures to ensure that interim financial statements that are not materially audited or reviewed by external auditors are accurate, complete, and provide investors with appropriate information to make informed investment decisions. 6.2.2 Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal. 6.2.2 The Audit Committee ensures the quality of financial statement audits conducted by the external auditor. This includes recommending the appointment, reappointment and, if necessary, dismissal and remuneration of the external auditor. 6.2.3 Laporan keberlanjutan harus disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional. 6.2.3 Sustainability reports shall be prepared and disclosed accurately and in accordance with national or international sustainability reporting frameworks. 6.2.4 Korporasi menerbitkan laporan tahunan secara terintegrasi yang menempatkan kinerja historis ke dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek korporasi di masa depan, sehingga membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan. 6.2.4 The Corporation publishes an integrated annual report that puts historical performance into context and describes the risks, opportunities and future prospects of the corporation, thereby helping shareholders and stakeholders understand the strategic objectives of the corporation and its progress in creating sustainable value.	1. PTPI telah memiliki Pedoman Akuntansi sebagai acuan untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat dan lengkap dan memberikan informasi yang tepat bagi pemangku kepentingan. Direksi PTPI menandatangani Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang menyatakan laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. PTPI has an Accounting Manual as a reference to present accurate and complete financial statements and provide appropriate information for stakeholders. The Board of Directors of PTPI signed a Statement of Responsibility for the Consolidated Financial Statements stating that the financial statements have been prepared and presented in accordance with applicable Financial Accounting Standards in Indonesia. 2. Komite Audit melakukan evaluasi kinerja Kantor Akuntan Publik (KAP) selaku auditor eksternal yang melaksanakan audit laporan keuangan perusahaan dan memberikan rekomendasi penunjukan KAP untuk tahun buku berikutnya. Biaya jasa KAP diusulkan dan dibahas bersama dengan seluruh anggota Tim Pengadaan Bersama dalam kegiatan klarifikasi dan negosiasi pengadaan jasa KAP, dimana perusahaan diwakili oleh Dewan Komisaris, Komite Audit dan SPI. The Audit Committee evaluates the performance of the Public Accounting Firm (KAP) as the external auditor conducting the audit of the company's financial statements and provides recommendations for the appointment of KAP for the next fiscal year. The cost of KAP services is proposed and discussed together with all members of the Joint Procurement Team in the clarification and negotiation activities for the procurement of KAP services, where the company is represented by the Board of Commissioners, Audit Committee and SPI. 3. Perusahaan telah menerbitkan Laporan Keberlanjutan sebagai informasi kepada para investor, pemangku kepentingan, serta masyarakat luas mengenai upaya keberlanjutan secara terkini dan transparan. Kinerja program keberlanjutan dilaksanakan selaras dengan tata kelola yang baik serta visi misi perusahaan. The Company has published a Sustainability Report to inform investors, stakeholders, and the wider community about sustainability efforts in an up-to-date and transparent manner. Sustainability program performance is implemented in line with good governance and the company's vision and mission.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation		Implementasi di Pupuk Indonesia Implementation at Pupuk Indonesia
			4. Perusahaan telah menerbitkan Laporan Tahunan yang memuat kinerja operasional dan keuangan, laporan manajemen, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen, pengelolaan sumber daya manusia, fungsi penunjang bisnis, tata Kelola perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan, dan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal. The company has published an Annual Report that contains operational and financial performance, management report, company profile, management analysis and discussion, human resource management, business support functions, corporate governance, corporate social responsibility, and financial statements that have been audited by an external auditor.
	6.3 Diseminasi Informasi 6.3 Information Dissemination	6.3.1 Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna. 6.3.1 Information dissemination channels should provide equal, timely and relatively inexpensive access to information relevant to users.	PTPI telah menyediakan akses informasi dan data perusahaan kepada publik dan internal perusahaan, yaitu: a. Situs Web www.pupuk-indonesia.com. b. Sosial Media (Facebook, Twitter, Instagram). c. Laporan Tahunan (*Annual Report*). d. Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*). e. Hubungan Media. f. Media internal lainnya: Majalah Sintesa, portal intranet, *e-mail blast*, TV Lobby, aplikasi Digital Office (DOF), *Townhall Meeting*. g. Media komunikasi dengan pelanggan: media luar ruang, sponsorship, sosialisasi, pameran. PTPI has provided access to company information and data to the public and internal companies, namely: a. Website www.pupuk-indonesia.com. b. Social Media (Facebook, Twitter, Instagram). c. Annual Report. d. Sustainability Report. e. Media Relations. f. Other internal media: Sintesa Magazine, intranet portal, e-mail blast, TV Lobby, Digital Office (DOF) application, Townhall Meeting. g. Communication media with customers: outdoor media, sponsorship, socialization, exhibitions.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation		Implementasi di Pupuk Indonesia Implementation at Pupuk Indonesia
Prinsip 7: Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham Principle 7: Protection of Shareholder Rights	7.1 Hak Pemegang Saham 7.1 Shareholder Rights	7.1.1 Korporasi memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor. 7.1.1 The corporation has a communication policy that facilitates and encourages shareholder or investor participation. 7.1.2 Korporasi yang merupakan entitas induk memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas anak dan entitas sepengendali yang di dalamnya investasi korporasi adalah signifikan. 7.1.2 Corporations that are parent entities ensure that their corporate governance policies apply to subsidiaries and entities under common control in which the corporation has a significant investment. 7.1.3 Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambil alihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya. 7.1.3 The corporation has rules and procedures governing acquisitions, takeovers and extraordinary transactions such as mergers and sales of substantial corporate assets to ensure transactions occur transparently and at arm's length and protect the rights of all shareholders according to class.	1. PTPI telah memiliki Pedoman Umum Komunikasi yang menfasilitasi dan mendorong partisipasi para pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham dan investor. PTPI has a General Communication Manual that facilitates and encourages the participation of stakeholders, including shareholders and investors. 2. PTPI sebagai entitas induk telah menetapkan Pedoman Tata Kelola Kelompok Usaha (*Code of Group Governance*) sebagai panduan dalam pelaksanaan sistem, struktur, dan pengaturan Anak Perusahaan. Pedoman ini mengatur tentang prinsip, struktur, sinergi dan ruang lingkup hubungan antara induk dan Anak Perusahaan, baik hubungan bersifat strategis maupun fungsional. PTPI as the parent entity has established the Code of Group Governance as a guide in the implementation of the system, structure, and regulation of Subsidiaries. This Code regulates the principles, structure, synergy and scope of relationships between the parent and Subsidiaries, both strategic and functional relationships. 3. PTPI telah menetapkan pengaturan mengenai transaksi penting yang memerlukan persetujuan Pemegang Saham/RUPS mengacu pada Anggaran Dasar Pasal 11 ayat 10-13. PTPI has established arrangements regarding important transactions that require Shareholder/RUPS approval referring to Article 11 paragraphs 10-13 of the Articles of Association.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation		Implementasi di Pupuk Indonesia Implementation at Pupuk Indonesia
	7.2 Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham 7.2 Fair Treatment of Shareholders	7.2.1 Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan: a. semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan setara. b. pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memeroleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya. 7.2.1 The corporation has rules and procedures that ensure: a. all shareholders of the same series in a class of shares shall be treated equally. b. disclosure of such rules and procedures as well as disclosure of the capital structure and arrangements that allow certain shareholders to obtain influence or control disproportionate to their shareholding. 7.2.2 Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham. 7.2.2 The corporation has rules and procedures that ensure related party transactions are approved and executed in a manner that ensures conflicts of interest are appropriately managed, and protects the interests of the corporation and its shareholders. 7.2.3 Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. Korporasi memiliki aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh Direktur, Komisaris dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapa pun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/belum tersedia di pasar. 7.2.3 The Corporation has and discloses policies to prevent insider trading. The Corporation has clear rules regarding any trading in the corporation's shares by Directors, Commissioners and insiders to ensure that no one may benefit directly or indirectly from information that is not/not yet available in the market.	1. PTPI memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) yang menerapkan prinsip Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness and Equality*). Seluruh Pemegang Saham termasuk Pemegang Saham minoritas harus diperlakukan setara (*equal treatment*). Seluruh Pemegang Saham harus diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan perhatian bila hak-haknya dilanggar. PTPI has a Code of Corporate Governance that applies the principles of Fairness and Equality. All Shareholders including minority Shareholders must be treated equally (equal treatment). All Shareholders must be given the same opportunity to get attention if their rights are violated. 2. PTPI memiliki Pedoman Pengendalian Benturan Kepentingan untuk memberikan keyakinan benturan kepentingan dikelola dengan tepat dan melindungi kepentingan perusahaan dan pemegang saham. PTPI has Conflict of Interest Control Guidelines to provide assurance that conflicts of interest are managed appropriately and protect the interests of the company and shareholders. entang insider trading. 3. PTPI memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) yang memberikan tanggung jawab kepada Direksi, manajemen dan karyawan untuk menjaga informasi kerahasiaan perusahaan (terutama informasi internal yang tidak seharusnya diungkapkan kepada publik) dari tujuan untuk memperoleh keuntungan sendiri atau kepentingan orang lain serta untuk mentaati peraturan hukum dan kebijakan tentang *insider trading*. PTPI has a Code of Corporate Governance that assigns responsibility to the Board of Directors, management and employees to safeguard the company's confidential information (especially internal information that should not be disclosed to the public) from the purpose of obtaining personal gain or the interests of others and to comply with legal regulations and policies regarding insider trading.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation		Implementasi di Pupuk Indonesia Implementation at Pupuk Indonesia
	7.3 Rapat Umum Pemegang Saham 7.3 General Meeting of Shareholders	7.3.1 Korporasi melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS selengkap dan sedini mungkin (paling lambat 28 hari sebelum RUPS) untuk memberikan waktu dan materi yang cukup bagi pemegang saham untuk mempelajari dengan baik agenda rapat. Undangan rapat dan seluruh informasi RUPS diungkapkan melalui sarana elektronik seperti melalui situs web korporasi. 7.3.1 The corporation makes a call for the GMS with the agenda and materials for the GMS as complete and early as possible (at least 28 days before the GMS) to provide sufficient time and materials for shareholders to properly study the meeting agenda. The meeting invitation and all GMS information are disclosed through electronic means such as through the corporation's website. 7.3.2 Korporasi memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS. 7.3.2 The corporation has and discloses rules and procedures that facilitate shareholders in participating and voting effectively at the AGM. 7.3.3 Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. 7.3.3 Shareholders participate effectively in determining the appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners. 7.3.4 Korporasi memastikan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal di RUPS. 7.3.4 The corporation ensures transparency and accountability of the external auditor at the GMS. 7.3.5 Penyampaian hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS secara lengkap diumumkan ke publik pada hari kerja berikutnya. 7.3.5 Submission of voting results and a complete summary of the GMS minutes are made public on the next business day.	1. PTPI memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) yang menetapkan pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan melalui surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. PTPI has a Code of Corporate Governance which stipulates that the invitation to the GMS must be made no later than 14 days before the date of the GMS, excluding the date of the invitation and the date of the GMS. The invitation to the General Meeting of Shareholders is made by registered mail and/or by advertisement in a newspaper. 2. PTPI memiliki Anggaran Dasar Perusahaan yang menetapkan Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. PTPI has Articles of Association of the Company which stipulates that Shareholders, either personally or represented by power of attorney, are entitled to attend the GMS and exercise their voting rights in accordance with the number of shares they own. 3. Pemegang Saham telah menetapkan pedoman pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, menetapkan pengangkatan dan komposisi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta menetapkan pembagian tugas berdasarkan nomenklatur pada saat pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan keputusan RUPS. Shareholders have set guidelines for the appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners, determine the appointment and composition of members of the Board of Directors and Board of Commissioners, and determine the division of duties based on nomenclature at the time of appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners based on GMS resolutions.

Prinsip Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Implementasi di Pupuk Indonesia** Implementation at Pupuk Indonesia
		4. Kebijakan penunjukan calon auditor eksternal dan/atau penunjukan kembali auditor eksternal tercantum dalam Anggaran Dasar. Perusahaan memiliki Prosedur Pengadaan Bersama Jasa Kantor Akuntan Publik. Dewan Komisaris telah melakukan proses evaluasi atas penunjukan Auditor Eksternal dan mengajukan kepada Menteri BUMN sebagai Pemegang Saham. Penetapan Auditor Eksternal dilakukan oleh Pemegang Saham berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Kinerja. The policy on the appointment of prospective external auditors and/or reappointment of external auditors is stated in the Articles of Association. The Company has a Joint Procurement Procedure for Public Accounting Firm Services. The Board of Commissioners has conducted an evaluation process for the appointment of the External Auditor and submitted it to the Minister of SOEs as the Shareholder. The appointment of the External Auditor is carried out by the Shareholders based on the Deed of Minutes of the Performance GMS. 5. PTPI sudah menyampaikan hasil keputusan RUPS Luar Biasa terkait pengangkatan Dewan Komisaris PI yang diumumkan ke publik, 2 (dua) hari kerja berikutnya. PTPI has submitted the results of the Extraordinary GMS decision regarding the appointment of the PI Board of Commissioners announced to the public, 2 (two) working days later.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation		Implementasi di Pupuk Indonesia Implementation at Pupuk Indonesia
Prinsip 8: Penghargaan terhadap Pemangku Kepentingan Principle 8: Respect for Stakeholders	8.1 Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci (*Stakeholder Engagement*) 8.1 Key stakeholder Engagement	8.1.1 Korporasi melalui Sekretaris Korporasi melaksanakan komunikasi yang regular, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci serta melibatkan mereka untuk memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak korporasi terhadap mereka. 8.1.1 The Corporation through the Corporate Secretary conducts regular, transparent and effective communication with key stakeholders and engages them to understand their expectations and grievances and the impact of the Corporation on them.	PTPI telah melakukan identifikasi pemangku kepentingan dalam kegiatan komunikasi di perusahaan meliputi pemangku kepentingan internal dan eksternal. Komunikasi dilakukan melalui media komunikasi resmi yang dimiliki perusahaan untuk berkomunikasi dengan anak perusahaan, pemangku kepentingan internal, dan pemangku kepentingan eksternal. Media komunikasi sesuai Blueprint Strategi Komunikasi PTPI meliputi: *paid media* (iklan, sponsor, *blocking time*, kerja sama media/institusi), *earned media* (*press release/tour/conference*, *media briefing/visit/gathering*), *shared media* (media sosial, kegiatan bersama), dan *owned media* (*website, e-mail*, majalah internal, media komunikasi digital internal, pameran, poster, media luar ruang). PTPI juga menyediakan Layanan Pelanggan, Informasi Produk, dan Pengaduan Bebas Pulsa (*call center*, telepon, WhatApps, *e-mail*) dan melakukan Survei Kepuasan Pelanggan yang bekerja sama dengan konsultan. PTPI has identified stakeholders in communication activities in the company including internal and external stakeholders. Communication is carried out through official communication media owned by the company to communicate with subsidiaries, internal stakeholders, and external stakeholders. Communication media according to PTPI's Communication Strategy Blueprint includes: paid media (advertising, sponsorship, blocking time, media/institutional cooperation), earned media (press release/tour/conference, media briefing/visit/gathering), shared media (social media, joint activities), and owned media (website, e-mail, internal magazine, internal digital communication media, exhibitions, posters, outdoor media). PTPI also provides Toll-Free Product Information and Complaint Customer Service (call center, telephone, WhatApps, e-mail) and conducts Customer Satisfaction Surveys in collaboration with consultants.
	8.2 Integrasi Keberlanjutan dalam Model Bisnis 8.2 Integration of Sustainability in the Business Model	8.2.1 Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, akuntabel dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya, termasuk antara lain dalam pengembangan dan implementasi strategi korporasi, rencana bisnis, rencana aksi utama dan manajemen risiko. 8.2.1 The BOC together with the BOD are responsible, accountable and transparent for sustainability governance, including setting corporate sustainability strategies, priorities and targets. The BOD and BOC incorporate sustainability considerations when carrying out their roles, including among others in the development and implementation of corporate strategies, business plans, key action plans and risk management.	PTPI telah melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta pembinaan usaha kecil untuk mendukung keberlanjutan operasi perusahaan. PTPI telah memiliki kebijakan dan menetapkan unit kerja yang melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. PTPI juga telah memiliki indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pengelolaan tanggung jawab sosial dan pembinaan usaha kecil, serta teah melakukan evaluasi atas pencapaian indikator keberhasilan dengan target-targetnya. PTPI has implemented social and environmental responsibilities, as well as fostering small businesses to support the sustainability of the company's operations. PTPI has a policy and established a work unit that implements corporate social and environmental responsibility. PTPI also has performance indicators to measure the success of social responsibility management and small business development, and has evaluated the achievement of success indicators with targets.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation		Implementasi di Pupuk Indonesia Implementation at Pupuk Indonesia
	8.3 Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan 8.3 Protection of Stakeholders	8.3.1 Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan. 8.3.1 The Board of Directors ensures and discloses that the corporation's operations reflect the application of high ethical, social and environmental responsibility standards throughout the corporation and ensures that appropriate policies and procedures are in place to respect and comply with the rights of stakeholders. 8.3.2 Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan. 8.3.2 Directors encourage employees to work in the long-term interests of the corporation and promote sustainability.	1. PTPI memiliki kebijakan tentang tanggung jawab korporasi kepada para pemangku kepentingan, meliputi: Pedoman Etika dan Perilaku (Bab II Etika Usaha, antara lain berisi etika perusahaan dengan pelanggan, mitra usaha, pesaing, kreditur/investor, penyedia barang dan jasa, masyarakat dan lingkungan), Pedoman Pengelolaan Suara Pelanggan, Prosedur Pengelolaan Rekanan, Pedoman Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup. PTPI has a policy on corporate responsibility to stakeholders, including: Code of Ethics and Behavior (Chapter II Business Ethics, among others containing company ethics with customers, business partners, competitors, creditors/investors, providers of goods and services, communities and the environment), Customer Voice Management Guidelines, Associate Management Procedures, Guidelines for Occupational Safety, Health and the Environment. 2. PTPI memiliki kebijakan pemberian insentif kepada karyawan berdasarkan grade sesuai dengan keputusan Direksi. PTPI memiliki jumlah karyawan yang memadai dan memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang memadai. Program pengelolaan dan pengembangan SDM mempertimbangkan unsur keberagaman, non diskriminatif dan memberi kesempatan yang sama bagi seluruh karyawan. PTPI has a policy of providing incentives to employees based on grade in accordance with the decision of the Board of Directors. PTPI has an adequate number of employees who have adequate knowledge, skills and experience. HR management and development programs consider elements of diversity, non-discrimination and provide equal opportunities for all employees.

Monitoring GCG

Penanggung Jawab Penerapan GCG

Sesuai Surat Keputusan Direksi PTPI No. SK/DIR/004/2021 tanggal 7 Januari 2021 perihal Penyempurnaan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/065/2020 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/062/2020, telah ditetapkan Departemen Governansi Korporat berada di bawah Kompartemen Sekretaris Perusahaan, yang berada di bawah komando Direktur Utama dan di bawah koordinasi Wakil Direktur Utama yang bertanggung jawab dalam penerapan GCG di PTPI.

Departemen Governansi Korporat telah terisi 1 (satu) orang VP dan 4 (empat) orang staf. Adapun struktur organisasi Departemen Governansi Korporat sebagai berikut:

GCG Monitoring

Person in Charge of GCG Implementation

In accordance with the Decree of the Board of Directors of PTPI No. SK/DIR/004/2021 dated January 7, 2021 regarding the Refinement of the Decree of the Board of Directors No. SK/DIR/065/2020 regarding the Refinement of the Decree of the Board of Directors No. SK/DIR/062/2020, it has been determined that the Corporate Governance Department is under the Corporate Secretary Compartment, which is under the command of the President Director and under the coordination of the Vice President Director who is responsible for implementing GCG at PTPI.

The Corporate Governance Department has been filled with 1 (one) VP and 4 (four) staff. The organizational structure of the Corporate Governance Department as follows:

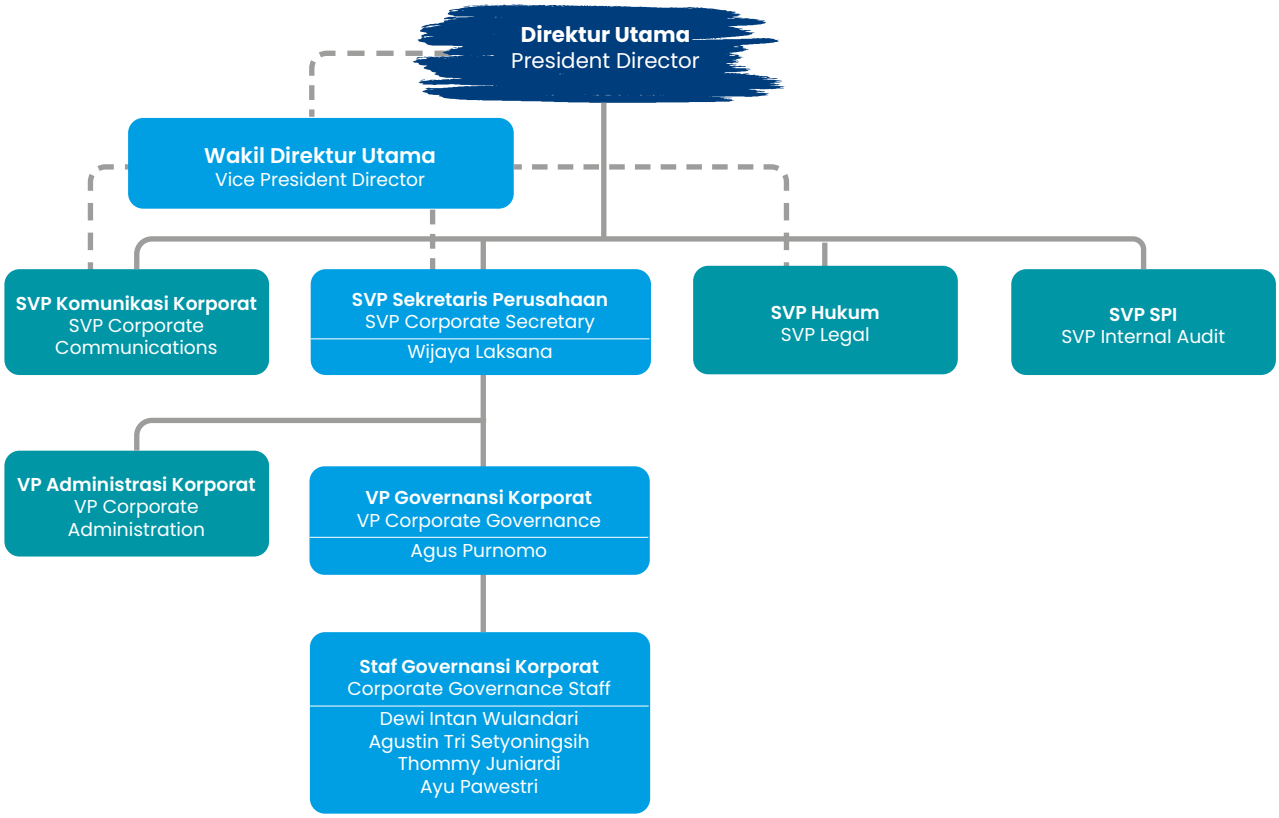

Berkenaan dengan *monitoring* penerapan GCG di PTPI, laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Penerapan GCG Mingguan (*Weekly Report*);
2. Laporan Kinerja Penerapan GCG Bulanan;
3. Laporan Kinerja Penerapan GCG Triwulanan;
4. Laporan Kinerja Penerapan GCG Semesteran/Tahunan.

Pengukuran/*Assessment* Penerapan GCG

Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran atas hasil kualitas penerapan tata kelola, Perusahaan memiliki mekanisme *assessment* atau penilaian penerapan GCG secara periodik. Dalam melakukan penilaian penerapan GCG, Perusahaan menggunakan 2 (dua) model penilaian, yaitu:

1. Penilaian Penerapan GCG Berlandaskan Kebijakan BUMN

   Sebagai BUMN, Perusahaan melakukan penilaian penerapan GCG dengan menggunakan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.

With regard to monitoring the implementation of GCG in PTPI, the report on the implementation of duties and responsibilities is as follows:

1. Weekly GCG Implementation Performance Report (Weekly Report);
2. Monthly GCG Implementation Performance Report;
3. Quarterly GCG Implementation Performance Report;
4. Semesterly/Annual GCG Implementation Performance Report.

GCG Measurement/Assessment

To determine and obtain an overview of the quality results of the implementation of governance, the Company has an assessment mechanism or periodic assessment of GCG implementation. In assessing the implementation of GCG, the Company uses 2 (two) assessment models, namely:

1. Assessment of GCG Implementation Based on SOE Policy

   As an SOE, the Company assesses the implementation of GCG using the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs.

2. Penilaian Penerapan GCG melalui program Lembaga Riset/Pemeringkat
   Dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan, Manajemen Perusahaan berkepentingan untuk dapat melihat sejauh mana penerapan prinsip-prinsip GCG dilaksanakan secara menyeluruh pada proses bisnis Perusahaan. Guna menunjang hal tersebut diperlukan suatu pengukuran GCG tambahan yang dapat memberikan hasil dari sudut pandang lain di luar penilaian yang telah dilaksanakan sesuai Indikator/Parameter yang diterbitkan oleh Kementerian BUMN. Hal ini dilakukan agar hasil penilaian tambahan tersebut dapat menjadi pembanding, sekaligus sebagai *assurance* atas hasil penilaian satu sama lain. Sejak tahun 2018, Perusahaan telah melaksanakan penilaian GCG tambahan melalui program yang diselenggarakan oleh Lembaga Riset/ Pemeringkat. Penilaian penerapan GCG tersebut dilakukan melalui program *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) oleh pihak independen, yaitu *The Indonesia Institute of Corporate Governance* (IICG) yang bekerja sama dengan Majalah SWA.

2. Assessment of GCG Implementation through Research/ Rating Institute program
   In order to increase the company's value in a sustainable manner, the Company's Management has an interest in being able to see the extent to which the implementation of GCG principles is carried out thoroughly in the Company's business processes. In order to support this, an additional GCG measurement is needed that can provide results from another perspective outside the assessment that has been carried out according to the Indicators/Parameters issued by the Ministry of SOEs. This is done so that the results of the additional assessment can serve as a comparison, as well as assurance of the results of each other's assessments. Since 2018, the Company has carried out additional GCG assessments through programs organized by Research/Rating Institutions. The assessment of GCG implementation is carried out through the Corporate Governance Perception Index (CGPI) program by an independent party, namely The Indonesia Institute of Corporate Governance (IICG) in collaboration with SWA Magazine.

PENILAIAN PENERAPAN GCG PTPI
PTPI GCG Implementation Assessment

Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs	**Corporate Governance Perception Index (CGPI)**

Penilaian berdasarkan Kebijakan Kementerian BUMN

Dasar dan Kriteria Penilaian

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan melakukan penilaian terhadap penerapan GCG sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penilaian Penerapan GCG (*assessment*) dilakukan secara berkala oleh Perusahaan setiap 2 (dua) tahun sekali oleh *assessor* eksternal, dengan diselingi oleh *self-assessment* yang dilakukan oleh *assessor* internal Perusahaan setiap tahun berikutnya.
2. Evaluasi (*review*), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di Perusahaan yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud pada

Assessment Based on Ministry of SOE Policy

Basis and Criteria for Assessment

Based on Article 44 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER- 01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs, the Company conducted an assessment of the implementation of GCG as follows:

1. The implementation of GCG Implementation Assessment (assessment) is carried out periodically by the Company every 2 (two) years by external assessors, interspersed with self-assessment conducted by the Company's internal assessors every following year.
2. Evaluation (review), which is a program to describe the follow-up to the implementation and application of GCG in the Company carried out in the following year after the assessment as referred to in the first point,

poin pertama, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.

which includes evaluation of the assessment results and follow-up on recommendations for improvement.

Metode pengukuran penerapan GCG di lingkungan Perusahaan mengacu pada Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Metode penilaian dan evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang terdiri dari 6 (enam) aspek dengan bobot yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK16/S.MBU/2012.

The method of measuring the implementation of GCG within the Company refers to a copy of the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs Number SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs.. This assessment and evaluation method is carried out using a measuring instrument consisting of 6 (six) aspects with predetermined weights as stipulated in the Copy of the Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK16/S.MBU/2012.

6 ASPEK *ASSESSMENT* GCG
(Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S. MBU/2012)

6 GCG Assessment Aspects
(Secretary of the Ministry of SOEs Decree No. SK-16/S. MBU/2012)

Aspek Aspects	Uraian	Description
1	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan	Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance
2	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal	Shareholders and GMS/Capital Owners
3	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas	Board of Commissioners/Supervisory Board
4	Direksi	Board of Directors
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	Information Disclosure and Transparency
6	Aspek Lainnya	Other Aspects

Pihak yang Menilai
Sesuai dengan ketentuan dalam PER-01/MBU/2011 di mana penilaian terhadap penerapan GCG di Perusahaan agar dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun, dan dilakukan evaluasi untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG. Pada tahun 2022 kegiatan Penilaian Penerapan GCG dilaksanakan oleh Konsultan Penilaian Independen yaitu PT Sinergi Daya Prima (SDP) yang ditetapkan melalui proses pengadaan sebagaimana ditetapkan dalam Surat VP Pengadaan Jasa No. 24630/A/PL/F22/ET/2022 tanggal 15 Desember 2022 perihal Penunjukkan Pemenang Pengadaan Jasa Konsultan GCG *Assessment* Pupuk Indonesia Group Tahun 2022.

Assessing Party
In accordance with the provisions in PER-01/MBU/2011 where an assessment of the implementation of GCG in the Company is to be carried out periodically every 2 (two) years, and an evaluation is carried out to describe the follow-up to the implementation and implementation of GCG. In 2022, the GCG Implementation Assessment activities were carried out by an Independent Consultant, PT Sinergi Daya Prima (SDP), which was determined through a procurement process as stipulated in the VP of Services Procurement Letter No. 24630/A/PL/F22/ET/2022 dated December 15, 2022 regarding the Appointment of the Winner of Procurement of GCG Assessment Consultant Services Pupuk Indonesia Group in 2022.

Hasil Penilaian
Penilaian atas penerapan GCG tahun 2022 yang diberikan oleh Tim Asesor GCG Penilai Independen PT Sinergi Daya Prima (SDP) termuat dalam Laporan Hasil *Assessment* GCG No. 007/Lap.GCG/SDP/04/2023 tanggal 4 April 2023 adalah sebagai berikut:

Assessment Results
The assessment of GCG implementation in 2022 provided by the Independent GCG Assessor Team of PT Sinergi Daya Prima (SDP) contained in GCG Assessment Report No. 007/Lap.GCG/SDP/04/2023 dated April, 4 2023 is as follows:

No.	Aspek Pengujian Test Aspect	Nilai Maksimum Maximum Score	Skor Capaian PT Pupuk Indonesia (Persero) Achievement Score of PT Pupuk Indonesia (Persero)	Tingkat Pemenuhan PT Pupuk Indonesia (Persero) Fulfillment Level of PT Pupuk Indonesia (Persero)	Penjelasan Explanation
1	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan Commitment to Sustainable Good Corporate Governance Implementation	7	6,728	96,22%	Sangat Baik Excellent
2	Pemegang Saham dan RUPS Shareholders and GMS	9	8,839	98,22%	Sangat Baik Excellent
3	Dewan Komisaris Board of Commissioners	35	33,954	97,01%	Sangat Baik Excellent
4	Direksi Board of Directors	35	33,911	96,89%	Sangat Baik Excellent
5	Pengungkapan informasi dan transparansi Information disclosures and transparency	9	8,811	98,11%	Sangat Baik Excellent
6	Aspek lainnya Other aspects	5	4,107	82,14%	Sangat Baik Excellent
	Total	**100**	**96,371**	**96,37%**	**Sangat Baik Excellent**

Pelaksanaan penilaian GCG Perusahaan menunjukkan hasil dengan predikat "Sangat Baik" mencakup 6 (enam) aspek yang di ukur seperti yang telah diuraikan di atas, dengan capaian skor sebesar 96,371.

The implementation of the Company's GCG assessment resulted in a predicate of "Very Good" covering 6 (six) aspects measured as described above, with a score of 96.371.

Sebagai perbandingan, berikut skor hasil GCG *assessment* dari tahun 2019 sampai tahun 2022 Perusahaan:

In comparison, the following are the scores of GCG assessment results from 2019 to 2022 of the Company:

2019		2020		2021		2022		Δ	
Penilaian Eksternal External Assessment		Penilaian Eksternal External Assessment		Penilaian Eksternal External Assessment		Penilaian Eksternal External Assessment		2022	2022
(BPKP)		(PT SDP)		(BPKP)		(PT SDP)		vs	Vs
Skor Score	Predikat Predicate	Skor Score	Predikat Predicate	Skor Score	Predikat Predicate	Skor Score	Predikat Predicate	2021	2020
88,97	Sangat Baik Excellent	93,90	Sangat Baik Excellent	92,325	Sangat Baik Excellent	96,37%	Sangat Baik Excellent	Meningkat Improved	Meningkat Improved

Dilihat dari skor GCG yang dicapai Perusahaan, maka di tahun 2022 Perusahaan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan perolehan tahun 2021. Peningkatan skor GCG PT Pupuk Indonesia (Persero) dari tahun 2021 ke tahun 2022 adalah 4,045 poin atau 4%.

Considering the GCG score achieved by the Company, in 2022 the Company improved compared to the acquisition in 2021. The increase in PT Pupuk Indonesia (Persero)'s GCG score from 2021 to 2022 is 4.045 points or 4%.

Tahun Year	Jenis Penilaian Type of Assessment	Penilaian Assessment	Skor Penilaian GCG | GCG Assessment Score						Skor Akhir Final Score	Kategori Category
			Aspek I Aspect I	Aspek II Aspect II	Aspek III Aspect III	Aspek IV Aspect IV	Aspek V Aspect V	Aspek VI Aspect VI		
			Komitmen Commitment	Pemegang Saham Shareholders	Dewan Komisaris BOC	Direksi BOD	Pengungkapan Informasi Information Disclosure	Aspek Lainnya Others Aspect		
2022	Penilaian Eksternal External Assessment	PT Sinergi Daya Prima	6,728	8,839	33,954	33,911	8,831	4,107	96,370	Sangat Baik Excellent
2021	Penilaian Eksternal External Assessment	BPKP	6,601	8,330	32,483	32,394	8,767	3,750	92,325	Sangat Baik Excellent
2020	Penilaian Eksternal External Assessment	PT Sinergi Daya Prima	92,47	94,44	92,37	95,75	99,77	82,15	93,90	Sangat Baik Excellent
2019	Penilaian Eksternal External Assessment	BPKP	92,49	85,43	88,25	90,03	96,22	75,00	88,97	Sangat Baik Excellent
2018	Penilaian Mandiri Self Assessment	PI Group	97,86	94,00	91,97	92,06	91,89	75,00	91,74	Sangat Baik Excellent
2017	Penilaian Eksternal External Assessment	BPKP	95,29	87,56	89,63	90,34	86,11	75,00	88,79	Sangat Baik Excellent
2016	Penilaian Mandiri Self Assessment	PI Group	91,57	90,89	90,34	88,66	98,11	37,40	87,94	Sangat Baik Excellent
2015	Penilaian Eksternal External Assessment	BPKP	91,00	90,56	88,97	83,49	97,00	-	83,61	Sangat Baik Excellent
2014	Penilaian Mandiri Self Assessment	PI Group	94,14	82,22	84,57	83,51	85,78	-	80,55	Baik Good
2013	Penilaian Eksternal External Assessment	BPKP	77,86	81,22	80,06	80,51	83,44	-	76,47	Baik Good

PENILAIAN PENERAPAN GCG ANAK PERUSAHAAN/ENTITAS ANAK
Assessment of GCG Implementation of Subsidiaries/Subsidiary Entities

No.	Perusahaan Company	Skor Evaluasi Penerapan GCG Tahun 2022 GCG Implementation Evaluation Score in 2022	Predikat Predicate
1	PT Petrokimia Gresik	97,349	Sangat Baik | Excellent
2	PT Pupuk Kujang	95,257	Sangat Baik | Excellent
3	PT Pupuk Kalimantan Timur	95,544	Sangat Baik | Excellent
4	PT Pupuk Iskandar Muda	94,226	Sangat Baik | Excellent
5	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	95,500	Sangat Baik | Excellent
6	PT Rekayasa Industri	84,430	Baik | Good

No.	Perusahaan Company	Skor Evaluasi Penerapan GCG Tahun 2022 GCG Implementation Evaluation Score in 2022	Predikat Predicate
7	PT Pupuk Indonesia Niaga	87,700	Sangat Baik | Excellent
8	PT Pupuk Indonesia Logistik	86,370	Sangat Baik | Excellent
9	PT Pupuk Indonesia Utilitas	88,400	Sangat Baik | Excellent
10	PT Pupuk Indonesia Pangan	80,240	Baik | Good

AREA PENGEMBANGAN DAN REALISASI PERUSAHAAN

Realisasi Rekomendasi/*Area of Improvement* (AoI) Pengembangan hasil GCG *Assessment* tahun 2022.

COMPANY DEVELOPMENT AND REALIZATION AREAS

Realization of Recommendations/Area of Improvement (AoI) Development of GCG Assessment results in 2022.

Rekomendasi Pengembangan Development Recommendations	Realisasi	Realization	Status
Aspek 1: Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan Aspect 1: Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	1. Memastikan seluruh karyawan telah menandatangani Pernyataan Kepatuhan sampai batas waktu yang telah ditentukan. 2. Meningkatkan tingkat pemahaman yang baik terhadap Pedoman Tata Kelola yang Baik dan Pedoman Perilaku oleh karyawan Perusahaan	1. Ensure that all employees have signed the Compliance Statement by the specified deadline. 2. Increase the level of understanding of the Good Governance Guidelines and Code of Conduct by the Company's employees.	Terbuka Open
Aspek 2: Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Aspect 2: Shareholders and GMS/Capital Owners	1. Menetapkan jumlah maksimum jabatan anggota Dewan Komisaris yang boleh dirangkap oleh setiap anggota Dewan Komisaris Perusahaan. 2. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi (individu) melalui RUPS Tahunan dan mencantumkannya dalam keputusan RUPS.	1. Determine the maximum number of Board of Commissioners positions that may be held concurrently by each member of the Company's Board of Commissioners. 2. Conduct performance appraisal of members of the Board of Directors (individuals) through the Annual GMS and include it in the GMS decision.	Terbuka Open
Aspek 3: Dewan Komisaris/Dewan Pengawas	1. Menyampaikan laporan perjalanan dinas luar negeri sesuai ketentuan Surat Edaran Menteri BUMN No. SE08/MBU/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, yaitu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan perjalanan dinas. 2. Melakukan pembahasan dan menyampaikan saran penyelesaian atas harapan, permasalahan dan keluhan dari *stakeholders* kepada Direksi. 3. Melengkapi Rencana Kerja Dewan Komisaris dengan pembahasan terhadap transaksi atau tindakan Direksi yang memerlukan rekomendasi/persetujuan Dewan Komisaris.	1. Submit reports on foreign official travel in accordance with the provisions of Circular Letter of the Minister of SOEs No. SE08/MBU/12/2015 dated December 23, 2015 concerning Overseas Service Travel for Directors and Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs, which is no later than 14 (fourteen) days after the implementation of official travel. 2. Discussing and submitting suggestions for resolving expectations, problems and complaints from stakeholders to the Board of Directors. 3. Completing the Board of Commissioners Work Plan with a discussion of transactions or actions of the Board of Directors that require the recommendation/approval of the Board of Commissioners.	Terbuka Open

Rekomendasi Pengembangan Development Recommendations	**Realisasi**	Realization	**Status**
	4. Menyusun mekanisme nominasi calon anggota Direksi Perusahaan dengan dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi yang mencakup antara lain kriteria, seleksi dan penetapan oleh Dewan Komisaris. 5. Melengkapi Mekanisme dan Tata Tertib Penyelenggaraan Rapat dengan Etika rapat. 6. Melakukan pemanggilan rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Board Manual Perusahaan. 7. Memberikan persetujuan atas program kerja masing-masing Komite dan mencantumkannya dalam dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahunan. 8. Melengkapi rencana kerja Komite GCG dan PMR dengan evaluasi kinerja Komite GCG dan PMR secara *self-assessment*. 9. Menandatangani Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi oleh seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang hadir dalam rapat sesuai ketentuan Piagam Komite Praktiknya, Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi belum sepenuhnya ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang hadir dalam rapat tersebut.	4. Develop a nomination mechanism for candidates for the Company's Board of Directors with the assistance of the Nomination and Remuneration Committee which includes, among others, criteria, selection and determination by the Board of Commissioners. 5. Completing the Mechanism and Rules of Procedure for Organizing Meetings with meeting ethics. 6. Calling meetings of the Board of Commissioners in accordance with the provisions of the Company's Board Manual. 7. Approve the work program of each Committee and include it in the Annual Board of Commissioners Work Plan and Budget. 8. Completing the GCG and PMR Committee's work plan with a self-assessment of the GCG and PMR Committee's performance. 9. Signing the Minutes of the Nomination and Remuneration Committee Meeting by all members of the Nomination and Remuneration Committee present at the meeting in accordance with the provisions of the Committee Charter In practice, the Minutes of the Nomination and Remuneration Committee Meeting have not been fully signed by all members of the Nomination and Remuneration Committee present at the meeting.	
Aspek 4: Direksi Aspect 4: The Board of Directors	1. Memastikan Laporan Perjalanan Dinas ke luar negeri, disampaikan kepada Menteri BUMN dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan perjalanan dinas, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SE Kementerian BUMN No. SE-08/MBU/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, Huruf E Angka 2 Poin e, bahwa dalam perencanaan dan pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri wajib mentaati ketentuan-ketentuan, salah satunya yaitu setelah melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan perjalanan dinas Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN wajib melaporkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada Menteri BUMN dengan melampirkan isian sebagaimana lampiran surat edaran ini serta bahan atau dokumen pendukung lain yang relevan sebagai bagian tak terpisahkan atas laporan perjalanan dinas.	1. Ensure that reports on overseas official travel are submitted to the Minister of SOEs within 14 (fourteen) days after the implementation of official travel, in accordance with the provisions contained in the SE of the Ministry of SOEs No. SE-08/MBU/12/2015 dated December 23, 2015 concerning Overseas Service Travel for Directors and Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs, Letter E Point 2 Point e, that in the planning and implementation of official travel abroad must comply with the provisions, one of which is that after traveling abroad, within 14 (fourteen) days after the implementation of official travel, the Board of Directors, Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs must report the implementation of official travel to the Minister of SOEs by attaching the contents as attached to this circular letter and other relevant supporting materials or documents as an integral part of the official travel report.	Terbuka Open

Rekomendasi Pengembangan Development Recommendations	**Realisasi**	Realization	**Status**
	2. Menyampaikan permohonan persetujuan RJPP kepada Pemegang Saham, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam keputusan Menteri BUMN No. KEP-102/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang BUMN Pasal 9, bahwa dalam waktu 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya Rencana Jangka Panjang, Direksi wajib menyampaikan rancangan Rencana Jangka Panjang periode berikutnya. 3. Menegaskan dalam Pedoman Umum Pelaksanaan Barang dan Jasa terkait Kerahasiaan nilai total HPS. 4. Menindaklanjuti temuan audit atas pengadaan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan 5. Memastikan penandatanganan Pakta Integritas oleh anggota Direksi dilaksanakan pada saat awal pengangkatan dan diperbaharui setiap awal tahun 6. Memastikan Daftar Kepemilikan Saham di Perusahaan dan perusahaan lain oleh anggota Direksi beserta keluarganya diperbarui secara berkala setiap awal tahun. 7. Melengkapi Pedoman Penyelenggaraan Rapat Direksi, Pedoman Tata Kelola Perusahaan, dan Board Manual terkait pengaturan Tata Tertib rapat yang menjelaskan Etika Rapat. 8. Mempertimbangkan untuk menambah tenaga auditor sesuai dengan beban kerja dan kebutuhan Perusahaan. 9. Menyampaikan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Tahun 2022 kepada Dewan Komisaris secara formal yaitu disertai dengan surat untuk meminta pertimbangan dan saran-saran. 10. Menyampaikan permohonan persetujuan RJPP kepada Pemegang Saham, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 11. Melengkapi surat panggilan RUPS dengan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perusahaan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.	2. Submit a request for approval of the RJPP to the Shareholders, in accordance with the provisions contained in the decision of the Minister of SOEs No. KEP-102/MBU/2002 dated June 4, 2002 concerning the Preparation of SOE Long-Term Plans Article 9, that within 60 (sixty) days before the end of the Long-Term Plan, the Board of Directors must submit a draft of the Long-Term Plan for the next period. 3. Affirming in the General Guidelines for the Implementation of Goods and Services related to the Confidentiality of the total value of HPS. 4. Follow up audit findings on procurement in accordance with the stipulated provisions. 5. Ensure the signing of Integrity Pact by members of the Board of Directors is carried out at the beginning of appointment and renewed at the beginning of each year. 6. Ensure that the List of Share Ownership in the Company and other companies by members of the Board of Directors and their families is updated regularly at the beginning of each year. 7. Complete the Guidelines for Organizing Meetings of the Board of Directors, Corporate Governance Guidelines, and Board Manual related to the arrangement of the Rules of Procedure for meetings that explain the Ethics of Meetings. 8. Consider adding auditors in accordance with the workload and needs of the Company. 9. Submitting the Annual Audit Work Program (PKPT) for 2022 to the Board of Commissioners formally, namely accompanied by a letter to request consideration and suggestions. 10. Submitting requests for RJPP approval to the Shareholders, in accordance with applicable regulations. 11. Complete the GMS summons with a notification that the materials to be discussed at the GMS are available at the Company's office from the date of the GMS summons until the date the GMS is held.	Terbuka Open
Aspek 5: Pengungkapan Informasi dan Transparansi Aspect 5: Disclosure and Transparency	1. Melengkapi Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dengan penjelasan mengenai pihak-pihak yang dapat memberikan dan/atau menyampaikan informasi publik serta prosedur pengungkapan informasi Perusahaan kepada *stakeholders*. 2. Melengkapi Laporan Tahunan dengan informasi mengenai: a. Biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai komitmen Perusahaan terhadap perlindungan konsumen. b. Pengembangan seni budaya beserta biayanya.	1. Complete the Public Information Management Guidelines with an explanation of the parties that can provide and/or convey public information as well as the procedure for disclosing Company information to stakeholders. 2. Complete the Annual Report with information regarding: a. Costs incurred related to corporate social responsibility, especially regarding the Company's commitment to consumer protection. b. Cultural arts development and its costs.	Terbuka Open
Aspek Lainnya Other Aspects	Tidak ada	None	

Penilaian Melalui Program Lembaga Riset/ Pemeringkat

Sejak tahun 2018, Perusahaan bersama 3 (tiga) Entitas Anak Perusahaan yaitu PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang meningkatkan level penilaian penerapan GCG melalui inisiasi penilaian tambahan terhadap penerapan GCG melalui keikutsertaan dalam program riset dan pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diselenggarakan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) yang bekerja sama dengan Majalah SWA. Pada penilaian kinerja tahun 2021 yang dilaksankan pada tahun 2022 PT Pupuk Kujang juga ikut dalam pelaksanaan penilaian tersebut.

Metode Penilaian

Metode penilaian CGPI terdiri dari 3 (tiga) tahapan penilaian yang meliputi *self assessment*, sistem dokumentasi, dan observasi.

1. *Self Assessment*
   Merupakan penilaian mandiri oleh perusahaan mengenai kualitas pelaksanaan GCG di lingkup perusahaan. Pada tahapan *self assessment* perusahaan menetapkan responden sesuai yang dipersyaratkan untuk mengisi kuesioner penilaian GCG. Daftar responden terdiri dari 2 (dua) kategori responden yakni responden internal dan responden eksternal.
2. Sistem Dokumentasi
   a. Kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan penilaian dengan menyerahkan berbagai dokumen yang telah dimiliki perusahaan dalam pelaksanaan GCG dan dokumen lainnya terkait dengan tema penilaian;
   b. Pengisian data perusahaan (data isian) yang menyajikan dokumen tentang informasi-informasi dasar perusahaan.
3. Observasi
   Tahapan akhir penilaian berupa peninjauan langsung oleh tim penilaian CGPI untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan serangkaian program pelaksanaan GCG dan upaya manajemen terkait dengan tema penilaian. Tahapan observasi dilakukan melalui klarifikasi instrumen penilaian melalui paparan eksekutif dan diskusi organ perusahaan.

Assessment through Research/Rating Agency Programs

Since 2018, the Company together with 3 (three) Subsidiaries, namely PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, and PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, have increased the level of assessment of GCG implementation through the initiation of additional assessment of GCG implementation through participation in the Corporate Governance Perception Index (CGPI) research and rating program organized by The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) in collaboration with SWA Magazine. In the 2021 performance assessment which will be carried out in 2022, PT Pupuk Kujang will also participate in the implementation of the assessment.

Assessment Method

The CGPI assessment method consists of 3 (three) stages of assessment which include self-assessment, documentation system, and observation.

1. Self Assessment
   It is a self-assessment by the company regarding the quality of GCG implementation within the company. At the self-assessment stage, the company determines the respondents as required to fill out the GCG assessment questionnaire. The list of respondents consists of 2 (two) categories of respondents, namely internal respondents and external respondents.
2. Documentation System
   a. Completeness of documents to fulfill the assessment requirements by submitting various documents that the company has in implementing GCG and other documents related to the assessment theme;
   b. Company data entry (data fill) that provides documents on basic company information.
3. Observation
   The final stage of the assessment is a direct review by the CGPI assessment team to ensure that the implementation process of a series of GCG implementation programs and management efforts related to the assessment theme. The observation stage is carried out through clarification of the assessment instrument through executive exposure and discussion of company organs.

Aspek dan indikator penilaian CGPI terdiri dari:

1. Aspek Struktur Tata Kelola
   Penilaian atas kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan dalam mengelola perusahaan dalam rangka menciptakan nilai bagi para Pemangku Kepentingan sesuai dengan prinsip Tata Kelola.
2. Aspek Proses Tata Kelola
   Penilaian terhadap efektivitas sistem dan mekanisme yang dimiliki perusahaan dalam mengelola perusahaan guna menciptakan nilai bagi para Pemangku Kepentingan sesuai dengan prinsip Tata Kelola.
3. Aspek Hasil Tata Kelola
   Hasil Tata Kelola menggambarkan penilaian terhadap luaran, kualitas luaran, dampak dan manfaat yang dimiliki perusahaan dari proses tata kelola perusahaan yang menciptakan nilai bagi para Pemangku Kepentingan sesuai dengan prinsip Tata Kelola. Hasil penilaian CGPI berupa rentang skor yang dicapai oleh perusahaan peserta dengan kategorisasi atas tingkat kualitas implementasi GCG yang menggunakan istilah "Tepercaya".

CGPI assessment aspects and indicators consist of:

1. Aspects of Governance Structure
   Assessment of the adequacy of the corporate governance structure and infrastructure in managing the company in order to create value for Stakeholders in accordance with the principles of Governance.
2. Governance Process Aspects
   Assessment of the effectiveness of systems and mechanisms owned by the company in managing the company to create value for Stakeholders in accordance with the principles of Governance.
3. Outcome Aspects of Governance
   Governance results describe the assessment of the output, quality of output, impact and benefits that the company has from the corporate governance process that creates value for Stakeholders in accordance with the principles of Governance. The CGPI assessment results are in the form of a range of scores achieved by participating companies with categorization of the quality level of GCG implementation using the term "Trusted".

ASPEK PENILAIAN CGPI
CGPI Assessment Aspect

Rentang Skor Penilaian CGPI | CGPI Assessment Score Range	
55–69	"Cukup Tepercaya" | "Simply Trusted"
70–84	"Tepercaya" | "Trusted"
85–100	"Sangat Tepercaya" | "Most Trusted"

Pihak yang Menilai

The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) yang bekerja sama dengan Majalah SWA.

Assessing Party

The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) in collaboration with SWA Magazine.

Hasil Penilaian **Assessment Results**

SKOR PENILAIAN MASING-MASING KRITERIA
Assessment Score for Each Criterion

Aspek Penilaian	Bobot Weight	Skor Penilaian Assessment Score			Assessment Aspect
		2022	2021	2020	
Aspek Struktur Tata Kelola	34,73	23,84	30,28	22,73	Aspects of Governance Structure
Aspek Proses Tata Kelola	32,13	32,55	30,71	30,17	Governance Process Aspects
Aspek Hasil Tata Kelola	33,14	28,89	24,15	30,47	Outcome Aspects of Governance
Skor Akhir	100,00	85,28	85,15	83,37	Final Score

PERKEMBANGAN HASIL PENILAIAN CGPI PI GROUP
Development of CGPI PI Group Assessment Results

Tahun Year	Skor Capaian | Achievement Score				
	Aspek Struktur Tata Kelola Aspects of Governance Structure	Aspek Proses Tata Kelola Governance Process Aspects	Aspek Hasil Tata Kelola Governance Outcome Aspects	Skor Akhir Final Score	Kategori Category
Perusahaan (*Holding*) | Company (Holding)					
2022	23,84	32,55	28,89	85,28	Sangat Terpercaya Most Trusted
2021	30,28	30,71	24,15	85,15	Sangat Tepercaya Most Trusted
2020	22,73	30,17	30,47	83,37	Tepercaya Trusted
2019	28,61	26,54	27,17	82,32	Tepercaya Trusted
2018	21,10	34,56	24,99	80,65	Tepercaya Trusted
Entitas Anak | Subsidiary					
PT Petrokimia Gresik					
2022	23,95	32,52	28,78	85,25	Sangat Terpercaya Most Trusted
2021	30,47	30,52	24,13	85,12	Sangat Terpercaya Most Trusted
2020	Tidak ikut serta dalam penilaian CGPI Tahun 2019 Did not participate in 2019 CPGI				
2019	29,39	27,34	27,97	84,70	Tepercaya Trusted
2018	21,63	36,03	26,12	83,78	Tepercaya Trusted
PT Pupuk Kalimantan Timur					
2022	24,52	33,43	29,66	87,61	Sangat Tepercaya Most Trusted
2021	30,70	31,43	24,76	86,89	Sangat Tepercaya Most Trusted

Tahun Year	Skor Capaian | Achievement Score				
	Aspek Struktur Tata Kelola Aspects of Governance Structure	**Aspek Proses Tata Kelola** Governance Process Aspects	**Aspek Hasil Tata Kelola** Governance Outcome Aspects	**Skor Akhir** Final Score	**Kategori** Category
2020	23,57	31,48	31,67	86,72	Sangat Tepercaya Most Trusted
2019	30,06	27,48	28,17	85,71	Sangat Tepercaya Most Trusted
2018	21,70	36,52	26,55	84,77	Tepercaya Trusted
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang					
2022	23,78	32,46	28,77	85,01	Sangat Tepercaya Most Trusted
2021	29,77	30,36	23,79	83,92	Tepercaya Trusted
2020	Tidak ikut serta dalam penilaian CGPI Tahun 2019 Did not participate in 2019 CPGI				
2019	28,91	26,93	27,16	83,00	Tepercaya Trusted
2018	21,23	35,64	25,13	82,00	Tepercaya Trusted
PT Pupuk Kujang					
2022	22,80	31,46	27,91	82,17	Tepercaya Trusted

Peningkatan Kualitas Implementasi GCG dan *Benchmarking*

Sosialisasi dan Internalisasi Prinsip-prinsip GCG

Untuk memberikan pemahaman mengenai penerapan GCG kepada seluruh Insan Perusahaan, secara periodik Perusahaan melakukan sosialisasi terkait penerapan prinsip-prinsip GCG dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyampaian Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Karyawan baik yang disampaikan secara langsung berbentuk buku, *e-mail* perusahaan, maupun melalui media lainnya yang digunakan oleh Perusahaan.
2. Sosialisasi Pedoman Tata Kelola Perusahaan pada *website* perusahaan yang dapat diakses oleh publik.
3. Pemutaran video penerapan prinsip-prinsip GCG pada setiap acara perusahaan baik internal maupun yang mengundang pihak eksternal.
4. Sosialisasi prinsip-prinsip GCG melalui berbagai media seperti *standing banner*, poster, *desktop* laptop/PC kantor, TV kantor, Majalah SPIN, media sosial Perusahaan, dan lain-lain.

Quality Improvement of GCG Implementation and Benchmarking

Socialization and Internalization of GCG Principles

To provide an understanding of the implementation of GCG to all Company personnel, the Company periodically conducts socialization related to the implementation of GCG principles by conducting the following activities:

1. Submission of Good Corporate Governance Guidelines to the Board of Commissioners, Board of Directors, and all Employees either directly delivered in the form of books, company e-mail, or through other media used by the Company.
2. Socialization of Corporate Governance Guidelines on the company's website that can be accessed by the public.
3. Video screening of the implementation of GCG principles at every company event, both internal and inviting external parties.
4. Socialization of GCG principles through various media such as standing banners, posters, office desktop laptops/PCs, office TV, SPIN Magazine, Company social media, etc.

5. Penandatangan Pakta Integritas melalui aplikasi PIONIR (Pakta Integritas *Online* Terintegrasi) yang diakses melalui *link* https://pionir.pupuk-indonesia. com/.
6. Sosialisasi Kebijakan dan Komitmen Anti Penyuapan PT Pupuk Indonesia (Persero) kepada *Stakeholders*.

5. Signing the Integrity Pact through the PIONIR application (Integrated Online Integrity Pact) which is accessed through the link https://pionir.pupuk-indonesia. com/.
6. Socialization of PT Pupuk Indonesia (Persero) Anti-Bribery Policy and Commitment to Stakeholders.

Peta Jalan dan Rencana Pengembangan GCG

Sebagai upaya pengembangan berkelanjutan serta sejalan dengan pengesahan *Roadmap* GCG 2020-2024, maka Perusahaan menetapkan sasaran, strategi, kebijakan terkait dengan pengembangan Manajemen Kepatuhan untuk Tahun 2020-2024 yang didalamnya meliputi implementasi GCG.

Perkembangan Penerapan GCG berdasarkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan Tahun 2020-2024 sebagaimana pada tabel berikut:

GCG Roadmap and Development Plan

As a continuous development effort and in line with the ratification of the GCG Roadmap 2020-2024, the Company sets goals, strategies, policies related to the development of Compliance Management for 2020-2024 which includes GCG implementation.

The development of GCG Implementation based on the Company's Long-Term Plan 2020-2024 as in the following table:

No.	Sasaran Target	Strategi Strategy	Kebijakan Policy
1	Terbangunnya Kapabilitas Organisasi dan SDM Manajemen Kepatuhan	Membangun Kapabilitas Organisasi dan SDM Manajemen Kepatuhan melalui kerja sama dengan lembaga sertifikasi Manajemen Kepatuhan yang mumpuni	Penguatan kebijakan Manajemen Kepatuhan yang mendukung perkembangan organisasi.
			Pengembangan kompetensi SDM Manajemen Kepatuhan PI Group bekerja sama dengan lembaga sertifikasi Manajemen Kepatuhan yang mumpuni.
	Establishment of Organizational Capability and Human Resources for Compliance Management	Building the Capability of Compliance Management Organization and Human Resources through cooperation with qualified Compliance Management certification bodies.	Strengthening Compliance Management policies that support organizational development.
			PI Group's Compliance Management HR competency development in collaboration with a qualified Compliance Management certification organization.
2	Terselenggaranya manajemen Kepatuhan berbasis teknologi informasi yang semakin efektif	Membangun Manajemen Kepatuhan berbasis teknologi informasi dengan mengadopsi pengetahuan dan praktik terbaik (*best practice*)	Pengembangan Manajemen Kepatuhan yang komprehensif dan mutakhir.
			Pengelolaan Manajemen Kepatuhan berbasis teknologi informasi yang mampu mencegah dan merespons penyimpangan dalam operasional bisnis Perusahaan.
	Implementation of more effective information technology-based compliance management	Building information technology-based Compliance Management by adopting knowledge and best practices.	Development of a comprehensive and up-to-date Compliance Management.
			Information technology-based Compliance Management capable of preventing and responding to irregularities in the Company's business operations.

No.	Sasaran Target	Strategi Strategy	Kebijakan Policy
3	Terbangunnya budaya Kepatuhan perusahaan yang berkelanjutan	Meningkatkan budaya kepatuhan secara berkelanjutan	Penyusunan peraturan pembangunan budaya Kepatuhan yang tepat.
			Penerapan budaya Kepatuhan yang berkelanjutan
		Mengukur efektivitas penerapan Sistem Manajemen Kepatuhan dengan menggunakan metode yang tepat dan melibatkan Asesor yang mumpuni. Pemantauan, pelaporan, dan pengukuran penerapan sistem manajemen kepatuhan PI Group secara periodik	Pemantauan, pelaporan, dan pengukuran penerapan sistem manajemen kepatuhan PI Group secara periodik
	Establishment of a sustainable corporate compliance culture	Continuously improve compliance culture	Formulation of appropriate Compliance culture building regulations.
			Continuous implementation of Compliance culture
		Measuring the effectiveness of the implementation of the Compliance Management System using appropriate methods and involving qualified assessors. Monitoring, reporting, and measuring the implementation of PI Group's compliance management system periodically.	Monitoring, reporting, and measuring the implementation of PI Group's compliance management system periodically

STRUKTUR DAN PROSES TATA KELOLA PERUSAHAAN

Struktur tata kelola merupakan organ atau perangkat yang dimiliki oleh Perusahaan, baik yang dibentuk karena kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maupun karena kebutuhan internal dalam rangka meningkatkan penerapan GCG. Sedangkan proses tata kelola merupakan rangkaian proses, kebiasaan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengelolaan Perusahaan secara keseluruhan. Proses tersebut mencakup peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan, prosedur tetap, piagam, dokumen, hingga pemberlakuan aturan yang mengatur hubungan antar organ atau perangkat.

Struktur tata kelola perusahaan terdiri atas organ-organ utama yang memiliki peran dalam menunjang pengelolaan Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola. Sebagai badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan dan diatur sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, struktur tata kelola Perseroan terdiri atas tiga organ utama yakni Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi. Masing-masing memiliki peran penting dalam penerapan GCG sesuai dengan fungsi, tugas dan tanggung jawab masing-masing. Oleh karena itu, ketiga organ-organ tersebut harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai Perusahaan.

CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE AND PROCESSES

The governance structure is an organ or device owned by the Company, either formed due to compliance with applicable laws and regulations, or due to internal needs in order to improve the implementation of GCG. Meanwhile, the governance process is a series of processes, habits, rules and institutions that affect the overall management of the Company. The process includes rules and regulations applicable to the Company, fixed procedures, charters, documents, and the enactment of rules governing the relationship between organs or devices.

The corporate governance structure consists of the main organs that have a role in supporting the management of the Company in accordance with the principles of governance. As a business entity in the form of a Limited Liability Company established and regulated in accordance with Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the Company's governance structure consists of three main organs, namely the General Meeting of Shareholders, the Board of Commissioners and the Board of Directors. Each has an important role in the implementation of GCG in accordance with their respective functions, duties and responsibilities. Therefore, the three organs must have the same perception of the Company's vision, mission and values.

Sistem kepengurusan Perseroan Terbatas di Indonesia menganut model 2 (dua) badan atau *two tier system*: Dewan Komisaris dan Direksi dengan kewenangan dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam peraturan dan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

The management system of Limited Liability Companies in Indonesia adheres to the two tier system: Board of Commissioners and Board of Directors with clear authorities and responsibilities according to their respective functions as mandated in the laws and regulations as well as the Articles of Association.

Struktur Tata Kelola Perusahaan PTPI
PTPI Corporate Governance Structure

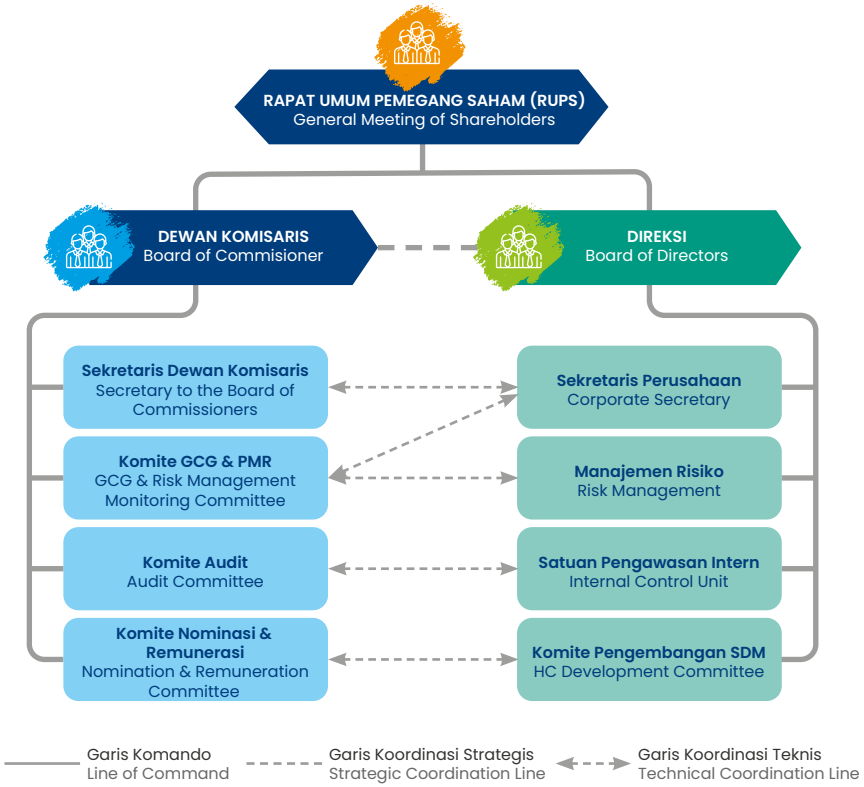

Dalam mendukung peran organ utama tata kelola, Perusahaan memiliki organ pendukung Dewan Komisaris, yakni Sekretaris Dewan Komisaris, Komite GCG dan Pemantauan Manajemen Risiko, dan Komite Audit. Untuk Direksi, didukung oleh organ pendukung, yaitu Sekretaris Perusahaan, Manajemen Risiko, dan Satuan Pengawasan Intern.

In supporting the role of the main governance organ, the Company has supporting organs for the Board of Commissioners, namely the Secretary of the Board of Commissioners, the GCG and Risk Management Monitoring Committee, and the Audit Committee. For the Board of Directors, it is supported by supporting organs, namely the Corporate Secretary, Risk Management, and Internal Audit Unit.

Agar struktur tata kelola dapat berjalan dengan baik dan memiliki batasan tanggung jawab masing-masing, diperlukan proses tata kelola yang dioperasikan melalui perangkat kebijakan atau *soft structure*. Hal itu mencakup peraturan dan perundang-undangan yang telah dijelaskan sebelumnya, dan serangkaian aturan internal yang diharapkan dapat menciptakan lingkungan organisasi Perusahaan berbasis pengelolaan yang akuntabel.

In order for the governance structure to run well and have limits to their respective responsibilities, a governance process is needed that is operated through policy tools or soft structures. It includes the rules and regulations described earlier, and a series of internal rules that are expected to create the Company's organizational environment based on accountable management.

Perusahaan menetapkan beberapa kebijakan terkait dengan penerapan GCG, antara lain Pedoman Tata Kelola Perusahaan, Pedoman Etika dan Perilaku, Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, Pedoman Tata Kelola Kelompok Usaha perusahaan, Pedoman Fungsional, Prosedur, Instruksi Kerja dan kebijakan-kebijakan lainnya untuk mendukung penerapan tata kelola secara berkesinambungan dan konsisten. Kebijakan-kebijakan ini secara berkala dimutakhirkan agar selaras dengan perkembangan bisnis Perusahaan serta perubahan peraturan perundang-undangan.

The Company establishes several policies related to the implementation of GCG, including the Corporate Governance Guidelines, Ethics and Behavior Guidelines, Board of Commissioners and Directors Work Guidelines, Corporate Group Governance Guidelines, Functional Guidelines, Procedures, Work Instructions and other policies to support the implementation of governance in a sustainable and consistent manner. These policies are regularly updated to align with the Company's business development and changes in laws and regulations.

PERANGKAT KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
Corporate Governance Policy Tools

No	Soft Structure GCG	Pertama Diterbitkan First Published	Terakhir Dimutakhirkan Last Updated
1	Anggaran Dasar Perusahaan Company Articles of Association	3 Januari 1970 January 3, 1970	12 Oktober 2020 October 12, 2020
2	Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) Code of Corporate Governance	5 November 2012 November 5, 2012	16 Februari 2022 February 16, 2022
3	Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) Code of Conduct	5 November 2012 November 5, 2012	16 Desember 2021 December 16, 2021
4	Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) Board of Commissioners and Board of Directors Work Guidelines (Board Manual)	5 November 2012 November 5, 2012	16 Februari 2021 February 16, 2021
5	Pedoman Tata Kelola Kelompok Usaha (*Code of Group Governance*) Code of Group Governance	2 Juli 2012 July 2, 2012	30 Desember 2021 December 30, 2021
6	Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Guidelines for Reporting Official Assets	23 September 2015 September 23, 2015	22 November 2021 November 22, 2021
7	Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) Whistle Blowing System Guidelines	23 Desember 2013 December 23, 2013	14 Agustus 2019 August 14, 2019
8	Pedoman Pengendalian Gratifikasi Gratuity Control Guidelines	30 Juni 2015 June 30, 2015	22 November 2021 November 22, 2021
9	Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Guidelines for Handling Conflicts of Interest	30 September 2015 September 30, 2015	27 Desember 2021 December 27, 2021
10	Pedoman Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management Guidelines	14 Agustus 2019 August 14, 2019	9 Desember 2021 December 9, 2021

No	Soft Structure GCG	Pertama Diterbitkan First Published	Terakhir Dimutakhirkan Last Updated
11	Pedoman Sistem Manajemen Kepatuhan (*Compliance Management System*) Compliance Management System Guidelines	30 Desember 2021 December 30, 2021	-
12	Pedoman Sistem Pengendalian *Fraud* (*Fraud Control System*) Fraud Control System Guidelines	28 April 2021 April 28, 2021	-
13	Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi Integrated Risk Management Guidelines	4 Februari 2013 February 4, 2013	8 September 2017 September 8, 2017
14	Pedoman Umum Audit Internal General Internal Audit Guidelines	Agustus 2015 Agustus 2015	24 Februari 2021 February 24, 2021
15	Pedoman Audit Internal Berbasis Risiko Risk-based Internal Audit Guidelines	29 Desember 2017 December 29, 2017	-
16	Pedoman Audit Operasional Operational Audit Guidelines	29 Desember 2017 December 29, 2017	-
17	Pedoman Sistem Pengendalian Internal Perusahaan Company Internal Control System Guidelines	23 Februari 2016 February 23, 2016	29 Desember 2017 December 29, 2017
18	Pedoman Sistem Pengendalian Internal Perusahaan Guidelines for the Company's Internal Control System	23 Februari 2016 February 23, 2016	29 Desember 2017 December 29, 2017
15	Pedoman Sistem Manajemen Terintegrasi (*Company Manual*) Integrated Management System Guidelines (Company Manual)	8 September 2017 September 8, 2017	8 September 2017 September 8, 2017
16	Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi Integrated Risk Management Guidelines	8 September 2017 September 8, 2017	8 September 2017 September 8, 2017
17	Pedoman Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha Business Continuity Management System Guidelines	23 Juni 2022 June 23, 2022	-
18	Prosedur Pelaporan Kejadian *Fraud* kepada Penegak Hukum Procedures for Reporting Fraud Incidents to Law Enforcement Officers	21 April 2021 April 21, 2021	-
19	Prosedur Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Official's Assets Reporting Procedure	25 November 2021 November 25, 2021	-
20	Prosedur Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) Whistleblowing System Management Procedures	8 September 2017 September 8, 2017	26 September 2022 September 26, 2022
21	Prosedur Pengelolaan Risiko *Fraud* Fraud Risk Management Procedures	14 Agustus 2019 August 14, 2019	28 Desember 2021 December 28, 2021
22	Prosedur Pengelolaan Laporan Gratifikasi Gratification Report Management Procedure	8 September 2017 September 8, 2017	25 November 2021 November 25, 2021
23	Prosedur Pemberian Penghargaan atas Pelaporan Pelanggaran Melalui WBS Procedure for Awarding the Reporting of Violations through WBS	26 September 2022 September 26, 2022	-

No	Soft Structure GCG	Pertama Diterbitkan First Published	Terakhir Dimutakhirkan Last Updated
24	Prosedur Pelaksanaan GCG *Self Assessment* GCG Self Assessment Implementation Procedure	8 September 2017 September 8, 2017	-
25	Prosedur Audit Internal Internal Audit Procedure	29 Desember 2017 December 29, 2017	24 Feburari 2021 February 24, 2021
26	Prosedur Audit Khusus Special Audit Procedure	29 Desember 2017 December 29, 2017	24 Feburari 2021 February 24, 2021
27	Prosedur Penerapan Sistem Deteksi Dini Risiko (SDDR) Procedure for Implementation of Early Risk Detection System (SDDR)	8 September 2017 September 8, 2017	6 Januari 2023 January 6, 2023
28	Prosedur Penyusunan Kajian Risiko Aksi Korporasi Procedure for Preparation of Corporate Action Risk Assessment	8 September 2017 September 8, 2017	16 Maret 2022 March 16, 2022
29	Prosedur Penyusunan, Pelaporan, dan Reviu Risiko Utama Procedure for Preparation, Reporting, and Review of Major Risks	8 September 2017 September 8, 2017	22 April 2022 April 22, 2022
30	Prosedur Penyusunan, Pelaporan, dan Reviu RCSA Non Risiko Utama Procedure for Preparation, Reporting, and Review of RCSA Non-Major Risks	10 Oktober 2028 October 10, 2028	6 April 2022 April 6, 2022
31	Instruksi Kerja Analisis Kriteria Dampak dan Kemungkinan Risiko Work Instruction for Risk Impact and Likelihood Criteria Analysis	27 September 2018 September 27, 2018	-
32	Instruksi Kerja Penyusunan Indikator Risiko Utama (*Key Risk Indicator*) Key Risk Indicator Preparation Work Instruction	2 November 2017 November 2, 2017	6 Januari 2023 January 6, 2023
33	Instruksi Kerja Penilaian Efektivitas atas *Existing Control* (*Existing Control Test Of Effectiveneness*) Existing Control Test of Effectiveneness Work Instruction	1 Februari 2023 February 1, 2023	-
34	Instruksi Kerja Opsi Perlakuan Risiko (*Risk Treatment Options*) Risk Treatment Options Work Instruction	1 Februari 2023 February 1, 2023	-
35	Instruksi Kerja Analisis Kriteria Dampak dan Kemungkinan, dan Opsi Perlakuan Risiko *Upside Risk* Work Instruction for Impact and Likelihood Criteria Analysis, and Upside Risk Treatment Options	1 Februari 2023 February 1, 2023	-
36	Kebijakan dan Komitmen Anti Penyuapan Anti-Bribery Policy and Commitment	5 Juli 2019 July 5, 2019	18 Januari 2022 Jannuary 18, 2022
37	Kebijakan Mutu Perusahaan Company Quality Policy	1 Agustus 2019 August 1, 2019	–
38	Piagam Satuan Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) Internal Audit Charter	29 April 2015 April 29, 2015	12 Desember 2018 December 12, 2018
39	Piagam Komite Audit Audit Committee Charter	23 Oktober 2014 October 23, 2014	20 Desember 2019 December 20, 2019
40	Piagam Komite GCG dan Pemantauan Manajemen Risiko (PMR) Charter of GCG and Risk Management Monitoring (PMR) Committee	23 Februari 2015 February 23, 2015	20 Desember 2019 December 20, 2019

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 40/2007 dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri BUMN bertindak selaku RUPS Persero dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh Negara.

General Meeting of Shareholders (GMS) is an organ of the Company that has authority not granted to the Board of Directors or the Board of Commissioners within the limits set forth in Law No. 40/2007 and/or the Company's Articles of Association.

Based on Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises (SOEs), the Minister of SOEs acts as the GMS of the Persero in the event that all shares of the Persero are owned by the State.

PEMEGANG SAHAM UTAMA/PENGENDALI

MAJOR/CONTROLLING SHAREHOLDERS

PEMEGANG SAHAM PTPI (HINGGA ENTITAS PEMILIK AKHIR) PER 31 DESEMBER 2022
PTPI Shareholders (Up to the Ultimate Owning Entity) as of December 31, 2021

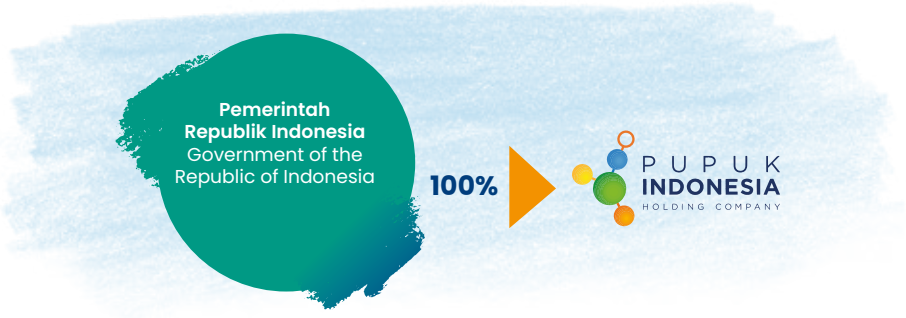

JENIS-JENIS RUPS

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan terdapat 2 (dua) jenis RUPS di Perusahaan, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya.

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan diadakan untuk membahas laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perusahaan. Pelaksanaannya paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku. Dalam RUPS Tahunan dibahas laporan Direksi mengenai perhitungan tahunan, laporan tahunan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan, rencana penggunaan laba dan besarnya dividen yang dibayarkan, permintaan penunjukkan Akuntan Publik, serta hal lainnya demi kepentingan Perusahaan.

TYPES OF RUPS

Based on the Company's Articles of Association, there are 2 (two) types of GMS in the Company, namely Annual GMS and Other GMS.

Annual General Meeting

The Annual General Meeting of Shareholders (AGM) is held to discuss the Company's annual report and annual accounts. The implementation is no later than 6 (six) months after the financial year. The Annual GMS discusses the Board of Directors' report on the annual accounts, the annual report on the condition and course of the Company, the plan for the use of profit and the amount of dividends paid, the request for appointment of a Public Accountant, and other matters in the interest of the Company.

RUPS Lainnya

RUPS Lainnya biasa disebut RUPS luar Biasa (RUPSLB) dapat diadakan sewaktu-waktu jika dipandang perlu oleh Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang saham untuk menetapkan hal-hal yang tidak dilakukan dalam RUPS Tahunan.

RUPS Tahunan dan RUPSLB memiliki wewenang tertinggi dalam struktur tata kelola perusahaan sekaligus merupakan forum utama bagi Pemegang Saham untuk menggunakan hak dan wewenangnya terhadap manajemen Perusahaan. Penyelenggaraan RUPS berdasarkan kebijakan, peraturan, surat keputusan, serta anggaran dasar Perusahaan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
4. Anggaran Dasar Perusahaan.

KETERBUKAAN INFORMASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI RUPS KEPADA PEMEGANG SAHAM

Perusahaan menyediakan informasi bagi publik dan khususnya Pemegang Saham yang dapat dilakukan melalui sejumlah media, antara lain:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan media penyampaian laporan dan informasi yang memungkinkan Pemegang Saham berpartisipasi dalam pengambilan keputusan;
2. Media Elektronik, yaitu situs informasi dengan alamat www.pupuk-Indonesia.com;
3. Media Sosial Perusahaan, yaitu dengan alamat:
   a. Twitter : @pupuk_indonesia
   b. Instagram : pt.pupukindonesia
   c. Facebook : @Pupuk.Indonesia
4. Laporan Tahunan, yaitu sarana informasi yang dipublikasikan sebagai laporan kinerja pada setiap tahun buku.

PENYELENGGARAAN RUPS TAHUN BUKU 2022

RUPS Tahunan

1. RUPS Tahunan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2022.

Other GMS

Other GMS commonly called Extraordinary GMS (EGMS) can be held at any time if deemed necessary by the Board of Directors, Board of Commissioners or shareholders to determine matters that are not carried out in the Annual GMS.

The AGM and EGM have the highest authority in the corporate governance structure as well as being the main forum for Shareholders to exercise their rights and authority over the Company's management. The organization of the GMS is based on policies, regulations, resolutions, and the Company's articles of association which are described as follows:

1. Law No. 19 Year 2003 on State-Owned Enterprises;
2. Law No. 40 Year 2007 on Limited Liability Companies;
3. Government Regulation No. 45 Year 2005 on the Establishment, Management, Supervision and Dissolution of State-Owned Enterprises;
4. Company Articles of Association.

INFORMATION DISCLOSURE AND SUBMISSION OF GMS INFORMATION TO SHAREHOLDERS

The Company provides information to the public and especially Shareholders which can be done through a number of media, among others:

1. The General Meeting of Shareholders (GMS) is a medium for submitting reports and information that allows Shareholders to participate in decision-making;
2. Electronic Media, i.e. an information website with the address www.pupuk-Indonesia.com;
3. Corporate Social Media, i.e. with address:
   a. Twitter: @pupuk_indonesia
   b. Instagram: pt.pupukindonesia
   c. Facebook: @Pupuk.Indonesia
4. Annual Report, an information tool published as a performance report for each fiscal year.

ORGANIZATION OF GMS FOR FINANCIAL YEAR 2022

Annual General Meeting

1. Annual GMS Approval of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for Financial Year 2022.

Hari/Tanggal | Day/Date	27 Januari 2022	January 27, 2022
Waktu | Time	Pukul 15:27 WIB–15:55 WIB	3:27 PM–3:55 PM
Tempat | Place	Lobby lounge, 1st floor Bimasena The Dharmawangsa Hotel, Jalan Brawidjaya Raya No. 26, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Lobby lounge, 1st floor Bimasena The Dharmawangsa Hotel, Jalan Brawidjaya Raya No. 26, Kebayoran Baru, South Jakarta.
Kehadiran | Attendance	Kuasa Pemegang Saham Pemerintah Negara Republik Indonesia: a. Wakil Menteri BUMN I, Pahala Nugraha Mansury b. Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk Kementerian BUMN, Zuryati Simbolon Dewan Komisaris: a. Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, Darmin Nasution b. Komisaris Independen, Anhar Adel c. Komisaris Independen, Mustoha Iskandar d. Komisaris, Anwar Sanusi e. Komisaris, Bambang Widianto f. Komisaris, Suwandi g. Komisaris, Febrio Nathan Kacaribu melalui video konferensi h. Komisaris, Ari Dwipayana melalui video konferensi Direksi: a. Direktur Utama, Bakir Pasaman b. Wakil Direktur Utama, Nugroho Christijanto c. Direktur Produksi, Bob Indiarto d. Direktur Keuangan dan Investasi, Wono Budi Tjahyono e. Direktur Transformasi Bisnis, Panji Winanteya Ruky f. Direktur SDM, Tata Kelola, dan Manajemen Risiko, Tina T. Kemala Intan g. Direktur Pemasaran, Gusrizal h. Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha, Jamsaton Nababan	Authorized Shareholder of the Government of the Republic of Indonesia: a. Deputy Minister of SOEs I, Pahala Nugraha Mansury b. Assistant Deputy for Food and Fertilizer Industry of the Ministry of SOEs, Zuryati Simbolon Board of Commissioners: a. President Commissioner and Independent Commissioner, Darmin Nasution b. Independent Commissioner, Anhar Adel c. Independent Commissioner, Mustoha Iskandar d. Commissioner, Anwar Sanusi e. Commissioner, Bambang Widianto f. Commissioner, Suwandi g. Commissioner, Febrio Nathan Kacaribu via video conference h. Commissioner, Ari Dwipayana via video conference Directors: a. President Director, Bakir Pasaman b. Vice President Director, Nugroho Christijanto c. Production Director, Bob Indiarto d. Director of Finance and Investment, Wono Budi Tjahyono e. Director of Business Transformation, Panji Winanteya Ruky f. Director of HR, Governance and Risk Management, Tina T. Kemala Intan g. Marketing Director, Gusrizal h. Director of Portfolio and Business Development, Jamsaton Nababan
Pihak Independen dalam Penghitungan Suara Independent Party in Vote Counting	Notaris	Notary

Hasil Keputusan RUPS telah dituangkan melalui Akta Notaris No. 07 tanggal 27 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H., notaris di Jakarta, Jakarta Pusat. Rincian hasilnya adalah sebagai berikut:

The results of the GMS Resolution have been set forth in Notarial Deed No. 07 Dated January 27, 2022 made before Lumassia, S.H., a notary in Jakarta, Central Jakarta. The details of the results are as follows:

Agenda	Keputusan Resolution
Mata Acara 1: Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 dan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) Tahun 2022 Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2022 dan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) Tahun 2022. **Agenda Item 1:** Ratification of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2022 and the Work Plan and Budget for the Social and Environmental Responsibility Program (RKA TJSL) for 2022.	Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2022 dan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) Tahun 2022. Ratified the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2022 and the Work Plan and Budget for the Social and Environmental Responsibility Program (RKA TJSL) for 2022. **Proyeksi Kinerja Keuangan Tahun 2022** **Projected Financial Performance in 2022**

Keterangan Description	RKAP 2022 2022 RKAP (Rp miliar | Rp billion)
Pendapatan | Revenue	76.938
COGS*	(58.069)
Laba Kotor | Gross Profit	18.879
Laba Bersih | Net Profit	4.893
Total Aset | Total Assets	125.661
Liabilitas | Liabilities	51.126
Ekuitas | Equity	74.535
Total Liabilitas dan Ekuitas | Total Liabilities and Equity	**125.661**
Kas dan Setara Kas | Cash and Cash Equivalent	11.128
Total Investasi | Total Investment	**4.989**

* COGS setelah dikurangi depresiasi | COGS net of depreciation

Realisasi:
Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 07 tanggal 27 Januari 2022.

Realization:
It has been realized through Notarial Deed No. 07 Dated 27 January 2022.

Mata Acara 2: Persetujuan Indikator Aspek Operasional Tahun 2022 untuk menghitung tingkat Kesehatan perusahaan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-100/MBU/2022, tanggal 4 Juni 2002 **Agenda Item 2:** Approval of Operational Aspect Indicators for 2022 to calculate the company's Health level Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. KEP-100/MBU/2022, dated June 4, 2002.	Menyetujui Indikator Aspek Operasional Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) untuk menghintung Tingkat Kesehatan Perusahaan berdasarkan keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 (empat) bulan Juni tahun 2002 (dua ribu dua). Approve the Operational Aspect Indicators for the year 2022 (two thousand twenty-two) to calculate the Company's Health Level based on the decision of the Minister of State-Owned Enterprises No. KEP-100/MBU/2002 dated June 4 (four) of 2002 (two thousand two). **Indikator Aspek Operasional Tahun 2022** **Operational Aspect Indicators in 2022**

Keterangan Description	Skor Score
Aspek Operasional | Operational Aspects	
1. Pencapaian Produksi Production Achievement	5,00
2. Efisiensi Pemakaian Bahan Baku Raw Material Usage Efficiency	5,00
3. Produktivitas Tenaga Kerja Labor Productivity	5,00
Sub Total Aspek Operasional **Sub Total Operational Aspects**	**15,00**

Agenda	Keputusan Resolution
Realisasi: Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 07 tanggal 27 Januari 2022. **Realization:** It has been realized through Notarial Deed No. 07 Dated 27 January 2022.	
Mata Acara 3: Penetapan Kontrak Manajemen antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2022 **Agenda Item 3:** Determination of the Management Contract between the Board of Directors and the Board of Commissioners with Shareholders in 2022	Menetapkan Kontrak Manajemen antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2022. Establish the Management Contract between the Board of Directors and the Board of Commissioners with Shareholders for 2022.
Realisasi: Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 07 tanggal 27 Januari 2022. **Realization:** It has been realized through Notarial Deed No. 07 Dated 27 January 2022.	
Mata Acara 4: Penetapan Kontrak Manajemen Tahun 2022 antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham **Agenda Item 4:** Determination of the 2022 Management Contract between the Board of Commissioners and Shareholders	Menetapkan Kontrak Manajemen Tahun 2022 antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham. Establish the 2022 Management Contract between the Board of Commissioners and Shareholders.
Realisasi: Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 07 tanggal 27 Januari 2022. **Realization:** It has been realized through Notarial Deed No. 07 Dated 27 January 2022.	
Mata Acara 5: Penetapan Penugasan Pemerintah (PSO) mulai Keputusan Menteri Pertanian untuk penyaluran pupuk bersubsidi Tahun 2022 **Agenda Item 5:** Determination of Government Assignment (PSO) starting from the Decree of the Minister of Agriculture for the distribution of subsidized fertilizers in 2022	Menetapkan Pemerintah (PSO) mulai Keputusan Menteri Pertanian untuk penyaluran pupuk bersubsidi Tahun 2022 Establish the Government (PSO) from the Decree of the Minister of Agriculture for the distribution of subsidized fertilizers in 2022
Realisasi: Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 07 tanggal 27 Januari 2022. **Realization:** It has been realized through Notarial Deed No. 07 Dated 27 January 2022.	

2. RUPS Tahunan Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2021.

2. Annual GMS Approval of the Annual Report for the Financial Year 2021.

Hari/Tanggal | Day/Date	29 Juni 2022	June 29, 2022
Waktu | Time	Pukul 13.24 WIB–14.00 WIB	1.24 PM–2.00 PM
Tempat | Place	Gedung Kementerian BUMN lantai 21 Jalan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta Pusat	Ministry of SOEs Building 21st floor Jalan Merdeka Selatan No. 13, Central Jakarta
Kehadiran | Attendance	Kuasa Pemegang Saham Pemerintah Negara Republik Indonesia: a. Wakil Menteri BUMN I, Pahala Nugraha Mansury b. Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk Kementerian BUMN, Zuryati Simbolon Dewan Komisaris: a. Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, Darmin Nasution b. Komisaris Independen, Anhar Adel c. Komisaris Independen, Mustoha Iskandar d. Komisaris, Anwar Sanusi e. Komisaris, Bambang Widianto f. Komisaris, Suwandi g. Komisaris, Febrio Nathan Kacaribu melalui video konferensi h. Komisaris, Ari Dwipayana melalui video konferensi Direksi: a. Direktur Utama, Bakir Pasaman b. Wakil Direktur Utama, Nugroho Christijanto c. Direktur Produksi, Bob Indiarto d. Direktur Keuangan dan Investasi, Wono Budi Tjahyono e. Direktur Transformasi Bisnis, Panji Winanteya Ruky f. Direktur SDM, Tata Kelola, dan Manajemen Risiko, Tina T. Kemala Intan g. Direktur Pemasaran, Gusrizal h. Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha, Jamsaton Nababan	Authorized Shareholder of the Government of the Republic of Indonesia: a. Deputy Minister of SOEs I, Pahala Nugraha Mansury b. Assistant Deputy for Food and Fertilizer Industry at the Ministry of SOEs, Zuryati Simbolon Board of Commissioners: a. President Commissioner and Independent Commissioner, Darmin Nasution b. Independent Commissioner, Anhar Adel c. Independent Commissioner, Mustoha Iskandar d. Commissioner, Anwar Sanusi e. Commissioner, Bambang Widianto f. Commissioner, Suwandi g. Commissioner, Febrio Nathan Kacaribu via video conference h. Commissioner, Ari Dwipayana via video conference Directors: a. President Director, Bakir Pasaman b. Vice President Director, Nugroho Christijanto c. Production Director, Bob Indiarto d. Director of Finance and Investment, Wono Budi Tjahyono e. Director of Business Transformation, Panji Winanteya Ruky f. Director of HR, Governance and Risk Management, Tina T. Kemala Intan g. Marketing Director, Gusrizal h. Director of Portfolio and Business Development, Jamsaton Nababan
Pihak Independen dalam Penghitungan Suara **Independent Party in Vote Counting**	Notaris	Notary

Hasil Keputusan RUPS telah dituangkan melalui Akta Notaris No. 07 tanggal 29 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H., notaris di Jakarta, Jakarta Pusat. Rincian hasilnya adalah sebagai berikut:

The results of the GMS Resolution have been set forth in Notarial Deed No. 07 Dated June 29, 2022 made before Lumassia, S.H., a notary in Jakarta, Central Jakarta. The details of the results are as follows:

Agenda	Keputusan Resolution
Mata Acara 1: Persetujuan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya perseoan selama tahun buku 2021 termasuk di dalamnya Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris dan Pengesahan laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan Tahun Buku 2021 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris perseroan atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021	1. Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2021. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 yang berakhir pada 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya No. 00705/2.1025/AU.1/05/1122-2/1/IV/2022 tanggal 21 April 2022 dengan opini "**Wajar, Dalam Semua Hal yang Material**", posisi keuangan konsolidasian PT Pupuk Indonesia (Persero) dan entitas anak tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dilakukan selama Tahun Buku Tahun 2021, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Tahunan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Agenda Item 1: Approval of the Annual Report regarding the condition and course of the company during the financial year 2021, including the Board of Commissioners' Report on the Implementation of Duties and Ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company for the Financial Year 2021, as well as granting full release and discharge (*volledig acquit et de charge*) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the company for the management and supervision actions that have been carried out during the Financial Year 2021.	1. To approve the Annual Report on the condition and course of the Company during the Financial Year 2021, including the Report on the Implementation of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners during the Financial Year 2021. 2. Ratify the Company's Consolidated Financial Statements for the 2021 Financial Year ended December 31, 2021 which have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan as contained in its report No. 00705/2.1025/AU.1/05/1122-2/1/IV/2022 dated April 21, 2022 with the opinion "**Fair, In All Material Matters**", the consolidated financial position of PT Pupuk Indonesia (Persero) and its subsidiaries as of December 31, 2021, and the consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, as well as granting full release and discharge (*volledig acquit et de charge*) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervisory actions of the Company that have been carried out during the 2021 Financial Year, as long as such actions do not constitute a criminal offense and/or violate applicable legal provisions and procedures and are recorded in the Company's Annual Report and do not conflict with the provisions of laws and regulations.

Realisasi:
Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 07 tanggal 29 Juni 2022.
Realization:
It has been realized through Notarial Deed No. 07 Dated June 29, 2022.

Agenda	Keputusan Resolution
Mata Acara 2: Persetujuan Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Tahun Buku 2021 serta Pengesahan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2021 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*vollegid acwuit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris perseroan atas Tindakan pengurusan dan pengawasan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021	Menyetujui Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Tahun Buku 2021 serta Mengesahkan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya No. N20220513004/DC2/THA/2022 tanggal 13 Mei 2022, dengan opini "**Wajar, Dalam Semua Hal yang Material**", posisi keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Pupuk Indonesia (Persero) dan entitas anaknya tanggak 31 Desember 2021, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku Tahun 2021, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Agenda Item 2: Approval of the Annual Report of the Social and Environmental Responsibility Program for the 2021 Financial Year and Ratification of the Financial Statements and Implementation of the Micro and Small Business Funding Program for the 2021 Financial Year, as well as granting full release and discharge (*vollegid acwuit et de charge*) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the company for the management and supervision actions of the Social and Environmental Responsibility Program that have been carried out during the 2021 Financial Year.	Approved the Annual Report of the Social and Environmental Responsibility (CSR) Program for the 2021 Financial Year and Endorsed the Financial Report and Implementation of the Micro and Small Business Funding Program for the 2021 Financial Year which has been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan as contained in its report No. N20220513004/DC2/THA/2022 dated May 13, 2022, with an opinion of "**Fair, In All Material Matters**", the financial position of the Micro and Small Business Funding Program of PT Pupuk Indonesia (Persero) and its subsidiaries as of December 31, 2021, and its activities and cash flows for the year then ended, in accordance with the Financial Accounting Standards of Entities Without Public Accountability in Indonesia, as well as granting full release and discharge (*volledig acquit et de charge*) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision of the Social and Environmental Responsibility Program for the Financial Year 2021, as long as such actions do not constitute a criminal offense and/or violate applicable legal provisions and procedures and are recorded in the Annual Report of the Company's Social and Environmental Responsibility Program and do not conflict with the provisions of laws and regulations.
Realisasi: Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 07 tanggal 29 Juni 2022. **Realization:** It has been realized through Notarial Deed No. 07 Dated June 29, 2022.	
Mata Acara 3: Penetapan Penggunaan Laba Bersih Konsolidasian perseroan Tahun Buku 2021	1. Menyetujui penetapan pengunaan laba bersih Tahun Buku 2021 yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan sebesar Rp5.321.127 juta (lima triliun tiga ratus dua puluh satu miliar seratus dua puluh tujuh juta rupiah) sebagai berikut: a. sebesar 14,09% (empat belas koma nol sembilan persen) atau Rp750.000 juta (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai kepada Pemegang Saham; b. sebesar 85,91% (delapan puluh lima koma sembilan satu persen) atau Rp4.571.127 juta (empat triliun lima ratus tujuh puluh satu miliar seratus dua puluh tujuh juta rupiah) ditetapkan sebagai cadangan perseroan. 2. Dividen sebesar Rp750.000 juta (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah) agar disetor kepada rekening bendahara umum negara selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal keputusan ini dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
Agenda Item 3: Determination on the Use of the Company's Consolidated Net Income for the Financial Year 2021	1. Approved the determination of the use of net profit for the Financial Year 2021 attributable to Owners of the Company of Rp5,321,127 million (five trillion three hundred twenty one billion one hundred twenty seven million rupiah) as follows: a. 14.09% (fourteen point zero nine percent) or Rp750,000 million (seven hundred fifty billion rupiah) is designated as cash dividend to the Shareholders; b. 85.91% (eighty five point nine one percent) or Rp4,571,127 million (four trillion five hundred seventy one billion one hundred twenty seven million rupiah) is designated as the company's reserve. 2. Dividends amounting to Rp750,000 million (seven hundred fifty billion rupiah) shall be deposited to the state general treasury account no later than 1 (one) month after the date of this decision and shall be implemented in accordance with the provisions and laws and regulations.

Agenda	Keputusan Resolution
Realisasi: Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 07 tanggal 29 Juni 2022. **Realization:** It has been realized through Notarial Deed No. 07 Dated June 29, 2022.	
Mata Acara 4: Penetapan Gaji/Honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris perseroan atas kinerja Tahun Buku 2021	Penetapan Gaji/Honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022 serta tantiem/insentif kinerja/ insentif khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja Tahun Buku 2021, akan ditetapkan secara tersendiri.
Agenda Item 4: Determination of salary/honorarium, facilities and other benefits for Board of Directors and Board of Commissioners for the financial year 2021.	Determination of Salary/Honorarium and other facilities and benefits for Directors and Board of Commissioners of the Company for the Financial Year 2022 as well as tantiem/performance incentive/special incentive for Directors and Board of Commissioners for the performance of the Financial Year 2021, will be determined separately.
Realisasi: Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 07 tanggal 29 Juni 2022. **Realization:** It has been realized through Notarial Deed No. 07 Dated June 29, 2022.	
Mata Acara 5: Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan keuangan Konsolidasian perseroan Tahun Buku 2022 serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022	1. Menunjuk Kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2022 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan. 3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit atau persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantr Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022, termasuk menetapkan imbalam jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.
Agenda Item 5: Appointment of Public Accounting Firm (KAP) to audit the company's Consolidated financial statements for the fiscal year 2022 as well as the financial statements and implementation of the Micro and Small Enterprises Program (PUMK) for the fiscal year 2022.	1. Re-appointing Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan as the Public Accounting Firm that will audit the Company's Consolidated Financial Statements as well as the Financial Statements and Implementation of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the Financial Year 2022. 2. To authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accountant Firm to audit the Consolidated Financial Statements of the Company for the remaining period of the Financial Year 2022 for the purpose and interest of the Company. 3. To authorize the Company's Board of Commissioners to determine the audit fees or other requirements for the Public Accounting Firm, as well as to appoint a replacement Public Accounting Firm in the event that the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, for any reason, is unable to complete the audit of the Company's Consolidated Financial Statements as well as the Financial Statements and Implementation of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the Financial Year 2022, including determining the audit fees and other requirements for the replacement Public Accounting Firm.
Realisasi: Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 07 tanggal 29 Juni 2022. **Realization:** It has been realized through Notarial Deed No. 07 Dated June 29, 2022.	

RUPS Luar Biasa

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia No. SK-253/MBU/11/2022 tanggal 4 November 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia, memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Bambang Widianto sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 4 November 2022.
2. Mengangkat Bapak Farhat Brachma sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 4 November 2022.

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Extraordinary GMS

Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia No. SK-253/MBU/11/2022 dated November 4, 2022 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia, decided:

1. Honorably discharged Mr. Bambang Widianto as Commissioner of the Company effective as of November 4, 2022.
2. To appoint Mr. Farhat Brachma as Commissioner of the Company with effect from November 4, 2022.

Therefore, the composition of the Company's Board of Commissioners is as follows:

Jabatan	Nama | Name	Position
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Darmin Nasution	President Commissioner and Independent Commissioner
Komisaris Independen	Mustoha Iskandar	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Anhar Adel	Independent Commissioner
Komisaris	Anwar Sanusi	Commissioner
Komisaris	Suwandi	Commissioner
Komisaris	Ari Dwipayana	Commissioner
Komisaris	Febrio Nathan Kacaribu	Commissioner
Komisaris	Farhat Brachma	Commissioner

RUPS TAHUN SEBELUMNYA

PREVIOUS YEAR GMS

RUPS Tahunan

RUPS Tahunan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2021

Annual General Meeting

Annual GMS Approval of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for the 2021 Financial Year

Hari/Tanggal | Day/Date	29 Januari 2021	January 29, 2021
Waktu | Time	Pukul 15.22 WIB–15.54 WIB	3.22 PM–3.54 PM
Tempat | Place	Gedung PUSRI Lt. 8 Jl. Taman Anggrek Kemanggisan Jaya, Jakarta Virtual : ID Meeting 319246662	PUSRI Building 8th Floor Jl. Taman Anggrek Kemanggisan Jaya, Jakarta Virtual: Meeting ID 319246662

Kehadiran | Attendance	Kuasa Pemegang Saham Pemerintah Republik Indonesia: Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk Kementerian BUMN, Zuryati Simbolon Dewan Komisaris: a. Komisaris Utama : Darmin Nasution b. Komisaris Independen : Mustoha Iskandar c. Komisaris : Anwar Sanusi d. Komisaris : Bambang Widianto e. Komisaris : Suwandi f. Komisaris : Febrio Nathan Kacaribu g. Komisaris : Ari Dwipayana Ketidakhadiran: Komisaris Independen: Anhar Adel dikuasakan kepada Anwar Sanusi Direksi a. Direktur Utama: Bakir Pasaman b. Wakil Direktur Utama : Nugroho Christijanto melalui video konferensi c. Direktur Keuangan dan Investasi : Eko Taufik Wibowo d. Direktur SDM & Tata Kelola : Winardi e. Direktur Transformasi Bisnis : Panji Winanteya Ruki f. Direktur Pemasaran : Gusrizal Ketidakhadiran: Direktur Produksi: Bob Indiarto dikuasakan kepada Direktur Keuangan dan Investasi	Authorized Shareholder of the Government of the Republic of Indonesia: Assistant Deputy for Food and Fertilizer Industry of the Ministry of SOEs, Zuryati Simbolon Board of Commissioners: a. President Commissioner: Darmin Nasution b. Independent Commissioner: Mustoha Iskandar c. Commissioner : Anwar Sanusi d. Commissioner : Bambang Widianto e. Commissioner : Suwandi f. Commissioner : Febrio Nathan Kacaribu g. Commissioner : Ari Dwipayana Absence: Independent Commissioner: Anhar Adel is authorized to Anwar Sanusi Directors a. President Director: Bakir Pasaman b. Vice President Director: Nugroho Christijanto via video conference c. Director of Finance and Investment: Eko Taufik Wibowo d. HR & Governance Director: Winardi e. Director of Business Transformation: Panji Winanteya Ruki f. Marketing Director: Gusrizal Absence: Production Director: Bob Indiarto is authorized to the Director of Finance and Investment.
Pihak Independen dalam Penghitungan Suara **Independent Party in Vote Counting**	Notaris	Notary

KEPUTUSAN DAN REALISASI HASIL RUPS
Resolutions and Realization of GMS Results

Keputusan | Decision	**Realisasi |** Realization
Keputusan Mata Acara 1: Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021 PTPI dan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) Tahun 2021.	Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 03 tanggal 29 Januari 2021.
Agenda Decision 1: Ratified PTPI's 2021 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) and 2021 Social and Environmental Responsibility Program Work Plan and Budget (RKA TJSL).	It has been realized through Notarial Deed No. 03 dated January 29, 2021.
Keputusan Mata Acara 2: Menetapkan Indikator Aspek Operasional untuk pengukuran Tingkat Kesehatan PTPI Tahun 2021.	Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 03 tanggal 29 Januari 2021.
Decision on Agenda Item 2: Establish Operational Aspect Indicators for measuring PTPI Health Level in 2021.	It has been realized through Notarial Deed No. 03 dated January 29, 2021.

Keputusan | Decision	**Realisasi** | Realization
Keputusan Mata Acara 3: Menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen (*Key Performance Indicator*) antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan pemegang saham Tahun 2021.	Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 03 tanggal 29 Januari 2021.
Decision on Agenda Item 3: Approved and ratified the Management Contract (Key Performance Indicator) between the Board of Directors and the Board of Commissioners.	It has been realized through Notarial Deed No. 03 dated January 29, 2021.
Keputusan Mata Acara 4: Menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen (*Key Performance Indicator*) antara Dewan Komisaris dengan pemegang saham Tahun 2021.	Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 03 tanggal 29 Januari 2021.
Decision of Agenda Item 4: Approved and ratified the Management Contract (Key Performance Indicator) between the Board of Commissioners and shareholders for 2021.	It has been realized through Notarial Deed No. 03 dated January 29, 2021.
Keputusan Mata Acara 5: Menetapkan Penetapan penugasan pemerintah (*Public Service Obligation*) melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021.	Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 03 tanggal 29 Januari 2021.
Decision of Agenda Item 5: Establishing the stipulation of government assignment (Public Service Obligation) through Regulation of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia Number 49 of 2020 concerning Allocation and Highest Retail Price of Subsidized Fertilizers for the Agricultural Sector in the Year of 20202021 Budget.	It has been realized through Notarial Deed No. 03 dated January 29, 2021.

RUPS Tahunan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2020

Annual GMS Approval of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for the 2020 Financial Year

Hari/Tanggal | Day/Date	30 Juni 2021	June 30, 2021
Waktu | Time	Pukul 14:00 WIB sampai dengan selesai	2.00 PM to finish
Tempat | Place	Jl. Taman Patra III No. 4 Kuningan Setiabudi, Jakatya Selatan-DKI Jakarta Virtual: Meeting ID 395 991 6617	Jl. Taman Patra III No. 4 Kuningan Setiabudi, Jakatya Selatan-DKI Jakarta Virtual: Meeting ID 395 991 6617

Kehadiran | Attendance	Kuasa Pemegang Saham Pemerintah Republik Indonesia a. Wakil Menteri BUMN I, Pahala Nugaraha Mansury b. Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan Rachman Ferry Isfianto Dewan Komisaris: a. Komisaris Utama: Darmin Nasution b. Komisaris Independen: Mustoha Iskandar c. Komisaris: Anwar Sanusi d. Komisaris: Bambang Widianto e. Komisaris: Suwandi f. Komisaris Febrio Nathan Kacaribu g. Komisaris: Ari Dwipayana h. Komisaris Independen: Anhar Adel Direksi a. Direktur Utama: Bakir Pasaman b. Wakil Direktur Utama: Nugroho Christijanto melalui video konferensi c. Direktur Keuangan dan Investasi: Eko Taufik Wibowo d. Direktur SDM & Tata Kelola: Winardi e. Direktur Transformasi Bisnis: Panji Winanteya Ruki f. Direktur Pemasaran: Gusrizal g. Direktur Produksi: Bob Indarto	Authorized Shareholder Government of the Republic of Indonesia a. Deputy Minister of SOE I, Pahala Nugaraha Mansury b. Assistant Deputy for Plantation and Forestry Industry Rachman Ferry Isfianto Board of Commissioners: a. President Commissioner: Darmin Nasution b. Independent Commissioner: Mustoha Iskandar c. Commissioner: Anwar Sanusi d. Commissioner: Bambang Widianto e. Commissioner: Suwandi f. Commissioner Febrio Nathan Kacaribu g. Commissioner: Ari Dwipayana h. Independent Commissioner: Anhar Adel Directors a. President Director: Bakir Pasaman b. Vice President Director: Nugroho Christijanto via video conference c. Director of Finance and Investment: Eko Taufik Wibowo d. HR & Governance Director: Winardi e. Director of Business Transformation: Panji Winanteya Ruki f. Marketing Director: Gusrizal g. Production Director: Bob Indarto
Pihak Independen dalam Penghitungan Suara **Independent Party in Vote Counting**	Notaris	Notary

KEPUTUSAN DAN REALISASI HASIL RUPS
Resolutions and Realization of GMS Results

Keputusan Decision	**Realisasi/Tindak Lanjut** Realization/Follow-up
Keputusan Mata Acara 1: • Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan • jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020. • Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020 yang berakhir pada 31 Desember 2020. Persetujuan Penyajian Kembali (*restatement*) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode sebelumnya untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan Laporan Posisi Keuangan pada 1 Januari 2019/31 Desember 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya No. 00994/2.1025/AU.1/05/1122-1/1/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material", posisi keuangan konsolidasian PTPI dan entitas anak tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 02 tanggal 26 Agustus 2021.

Keputusan Decision	Realisasi/Tindak Lanjut Realization/Follow-up
Agenda Decision 1: • Approved the Annual Report on the state of affairs and • the course of the Company during the Financial Year 2020 including the Report on the Implementation of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners during the Financial Year 2020. • Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year 2020 ended on December 31, 2020. Approval of the restatement of the Company's previous Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2019 and the Statement of Financial Position as of January 1, 2019/December 31, 2018, which have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan as contained in its report Number: 00994/2.1025/AU.1/05/1122-1/1/V/2021 dated May 31, 2021 with the opinion "fair, in all material respects", the consolidated financial position of PTPI and subsidiaries as of December 31, 2020, as well as the consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, at the same time granting full release and discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision of the Company that has been carried out during the 2020 Financial Year, as long as such actions do not constitute a criminal offense and/or violate applicable legal provisions and procedures and are recorded in the Company's Financial Statements and do not conflict with the provisions of laws and regulations.	It has been realized through Notarial Deed No. 02 dated August 26, 2021.
Keputusan Mata Acara 2: Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Tahunan PKBL Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Keuangan PKBL yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya No. N20210609008/DC2/THA/2021 tanggal 9 Juni 2021, dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material", neraca Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PTPI tanggal 31 Desember 2020, serta laporan aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, serta memberikan pelunasan dan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*)kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan dan pengurusan PKBL Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan tersebut merupakan tindak pidana dan/atau pelanggaran ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 02 tanggal 26 Agustus 2021.
Decision on Agenda Item 2: Approve and Ratify the PKBL Annual Report for the 2020 Fiscal Year including the PKBL Financial Statements audited by the Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan as contained in its report Number: N20210609008/DC2/THA/2021 dated June 9, 2021, with an opinion of "fair, in all material respects", the balance sheet of PTPI's Partnership and Community Development Program (PKBL) dated December 31, 2020, and its activity and cash flow statements for the year then ended, in accordance with the Financial Accounting Standards of Entities Without Public Accountability in Indonesia, as well as providing release and responsibility (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the actions and management of PKBL for the 2020 Financial Year, to the extent that such actions constitute criminal acts and/or violations of applicable legal provisions and procedures and are recorded in the Annual Report of the Company's Partnership and Community Development Program and do not conflict with the provisions of laws and regulations.	It has been realized through Notarial Deed No. 02 dated August 26, 2021.
Keputusan Mata Acara 3: Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Tahun Buku 2019 yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk Perseroan.	Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 02 Tanggal 26 Agustus 2021.
Decision on Agenda Item 3: Approved the determination of the use of net profit of the Financial Year 2019 attributable to owners of the Company.	It has been realized through Notarial Deed No. 02 dated August 26, 2021.
Keputusan Mata Acara 4: Penetapan Gaji/Honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021 serta tantiem/insentif untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja Tahun Buku 2020, akan ditetapkan secara tersendiri.	Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 02 Tanggal 26 Agustus 2021.
Decision on Agenda Item 4: Determination of Salary/Honorarium and other facilities and benefits for Directors and Board of Commissioners of the Company for the Financial Year 2021, as well as tantiem/incentive for Directors and Board of Commissioners for the performance of the Financial Year 2020, will be determined separately.	It has been realized through Notarial Deed No. 02 dated August 26, 2021.

Keputusan Decision	Realisasi/Tindak Lanjut Realization/Follow-up
Keputusan Mata Acara 5: • Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk Tahun mengaudit Laporan Keuangan Buku 2021. • Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2021 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan. • Memberikan kuasa kepada Komisaris Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit atau persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, karena kuasa kepada Dewan Kantor Akuntan Publik sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk Tahun Buku 2021, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.	Sudah terealisasi melalui Akta Notaris No. 02 Tanggal 26 Agustus 2021.
Decision of Agenda Item 5: • Re-appointing Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan as the Public Accounting Firm that will consolidate the Company and the Financial Statements of the Implementation of the Micro and Small Business Funding Program (UMK) for the year of auditing the 2021 Financial Statements. • To authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accountant Firm to audit the Consolidated Financial Statements of the Company for the remaining period of the Financial Year 2021 for the purposes and interests of the Company. • To authorize the Company's Commissioners to determine the audit fees or other requirements for the Public Accounting Firm, as well as to appoint a replacement in the event that the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, due to the power of attorney to the Board of the Public Accounting Firm for any reason, is unable to complete the audit of the Company's Consolidated Financial Statements and Financial Statements on the Implementation of the Micro and Small Enterprise Funding Program (UMK) for the 2021 Financial Year, including determining the audit fees and other requirements for the replacement Public Accounting Firm.	It has been realized through Notarial Deed No. 02 dated August 26, 2021.

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Keberadaan Dewan Komisaris tersebut, terutama mengacu pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris dibantu oleh organ pendukung Dewan Komisaris, yaitu Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite GCG dan Pemantauan Manajemen Risiko, serta Komite Nominasi & Remunerasi.

KRITERIA DEWAN KOMISARIS

Seluruh anggota Dewan Komisaris Perusahaan harus melalui proses Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan dinyatakan lulus. Proses tersebut untuk memastikan bahwa Komisaris Perusahaan memiliki integritas, kompetensi, reputasi dan pengalaman serta keahlian yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing.

Persyaratan formal Anggota Dewan Komisaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan/Perum dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan; dan
5. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.

SUKSESI: NOMINASI DAN PENGUSULAN, PENGANGKATAN SERTA PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan. Pengangkatan Dewan Komisaris diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar, Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015

The Board of Commissioners is a corporate organ that is collectively responsible for supervising and advising the Board of Directors and ensuring that the Company implements GCG at all levels of the organization. The existence of the Board of Commissioners primarily refers to Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises. In carrying out its duties, the Board of Commissioners is assisted by the supporting organs of the Board of Commissioners, namely the Secretary of the Board of Commissioners, the Audit Committee, the GCG and Risk Management Monitoring Committee, and the Nomination & Remuneration Committee.

BOARD OF COMMISSIONERS CRITERIA

All members of the Company's Board of Commissioners must go through the Fit and Proper Test process and pass. The process is to ensure that the Company's Commissioners have the integrity, competence, reputation and experience and expertise required to carry out their respective functions and duties.

The formal requirements of the Company's Board of Commissioners are as follows:

1. Natural person;
2. Capable of performing legal acts;
3. Never declared bankrupt within 5 (five) years prior to nomination;
4. Never been a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a Company/Perum to be declared bankrupt within 5 (five) years prior to nomination; and
5. Never been convicted of a criminal offense that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector within 5 (five) years prior to nomination.

SUCCESSION: NOMINATION AND PROPOSALS, APPOINTMENT AND DISMISSAL OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS through a transparent process. The appointment of the Board of Commissioners is governed by the provisions of the Articles of Association, Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises, Regulation of the Minister

sebagaimana diubah dengan PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan berdasarkan pada prinsip-prinsip profesionalisme dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

of State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/02/2015 as amended by PER-10/MBU/10/2020 on Amendments to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/02/2015 on Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises and based on the principles of professionalism and Good Corporate Governance.

Anggota Dewan Komisaris PTPI wajib memenuhi persyaratan, kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Persyaratan kemampuan mencakup memahami masalah manajemen yang berkaitan dengan fungsi salah satu manajemen, mempunyai pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan, serta memiliki waktu yang cukup dalam menjalankan tugas.

Members of the Board of Commissioners of PTPI must fulfill the requirements, ability and appropriateness as stipulated in the Company's Articles of Association. Ability requirements include understanding management issues related to the function of one of the management, having sufficient knowledge in the Company's business field, and having sufficient time to carry out duties.

Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal pelantikan atau tanggal yang ditetapkan dalam Keputusan RUPS. Calon Anggota Dewan Komisaris terpilih menandatangani surat pernyataan/pakta integritas yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik dan bersedia diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan alasan apa pun yang dinilai tepat oleh RUPS, dan tidak menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

The appointment of a Member of the Board of Commissioners is effective as of the date of inauguration or the date stipulated in the GMS Resolution. Candidates for elected members of the Board of Commissioners sign a statement letter/integrity pact containing the ability to carry out their duties properly and are willing to be dismissed at any time based on any reason deemed appropriate by the GMS, and not to sue or file legal proceedings in connection with the dismissal.

Beberapa tahapan seleksi calon anggota Dewan Komisaris sebelum diusulkan oleh Pemegang Saham yang memiliki wewenang untuk mengusulkan Dewan Komisaris dalam RUPS, dijabarkan sebagai berikut:

1. Penjaringan sumber bakal calon dilakukan oleh Kementerian BUMN (Menteri, Sekretaris, Deputi Teknis, dan/atau Deputi mencari bakal calon dari berbagai sumber);
2. Evaluasi persyaratan formal dan persyaratan lain dilakukan oleh Deputi Teknis;
3. Penilaian pemenuhan persyaratan materiel oleh tim yang dibentuk Kementerian BUMN;
4. Penetapan Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri BUMN/Keputusan RUPS.

Several stages of selection of candidates for the Board of Commissioners before being proposed by Shareholders who have the authority to propose the Board of Commissioners in the GMS, are described as follows:

1. Sourcing of candidates is done by the Ministry of SOEs (the Minister, Secretary, Technical Deputy, and/or Deputy seek candidates from various sources);
2. Evaluation of formal and other requirements is conducted by the Technical Deputy;
3. Assessment of the fulfillment of material requirements by a team formed by the Ministry of SOEs;
4. The appointment of the Board of Commissioners is based on the Decree of the Minister of SOEs/Decision of the GMS.

PROSES PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners Appointment Process

Proses Process	Pelaksana Executive
Penjaringan oleh Kementerian BUMN Screening by the Ministry of SOEs	Menteri, Sekretaris Kementerian, Deputi Teknis Minister, Secretary of Ministry, Technical Deputy
Evaluasi Persyaratan Formal Evaluation of Formal Requirements	Deputi Teknis Technical Deputy
Penilaian pemenuhan Persyaratan Materiel Assessment of fulfillment of Materiel Requirements	Tim yang dibentuk oleh Menteri The team formed by the Minister
Penetapan Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Determination Based on Decree of the Minister of SOEs	Menteri Minister
Keputusan RUPS GMS Resolution	Pemegang Saham Shareholders

Anggota Dewan Komisaris Perusahaan dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sewaktu-waktu dilakukan apabila yang bersangkutan, antara lain:
1. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
2. Melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;
3. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau negara;
4. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN;
5. Telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa oleh pihak yang berwenang dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau keuangan negara;
6. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
7. Mengundurkan diri.

Selain alasan pemberhentian tersebut, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh Menteri atau RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Menteri atau RUPS demi kepentingan dan tujuan BUMN, di antaranya:
1. dalam rangka restrukturisasi perusahaan;
2. memasuki masa usia pensiun dari Aparatur Sipil Negara, bagi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang merupakan penugasan dari Kementerian Teknis atau Instansi Pemerintah lain.

Keputusan pemberhentian dengan alasan selain dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengundurkan diri, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. Penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan dengan keputusan RUPS secara fisik dan keputusan seluruh Pemegang Saham di luar RUPS (Sirkuler).

Members of the Company's Board of Commissioners may be dismissed at any time by the GMS by stating the reasons. Dismissal at any time is carried out if the person concerned, among others:
1. Unable to perform their duties properly;
2. Violating the provisions of the articles of association and/or laws and regulations;
3. Engage in actions that are detrimental to SOEs and/or the state;
4. Taking actions that violate ethics and/or propriety that should be respected as members of the Board of Commissioners and Supervisory Board of SOEs;
5. Has been named as a suspect or defendant by the competent authority in actions that harm SOEs and/or state finances;
6. Declared guilty by a court decision that has permanent legal force; or
7. Resigned.

In addition to the reasons for dismissal, members of the Board of Commissioners can be dismissed by the Minister or GMS based on other reasons deemed appropriate by the Minister or GMS for the interests and objectives of BUMN, including:
1. in order to restructure the company;
2. entering retirement age from the State Civil Apparatus, for members of the Board of Commissioners/Supervisory Board who are assigned by the Technical Ministry or other Government Agencies.

Dismissal decisions for reasons other than being found guilty by a court decision that has permanent legal force and resignation, are taken after the person concerned is given the opportunity to defend himself. Determination of the dismissal of a member of the Board of Commissioners can be made by a physical GMS decision and a decision of all Shareholders outside the GMS (Circular).

MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya. Masa jabatan tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Walaupun demikian, ketentuan itu dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir. Setelah masa jabatannya berakhir, Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain:
1. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
2. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
3. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan.

TERM OF OFFICE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Members of the Board of Commissioners are appointed for a period commencing from the closing of the GMS or the date determined by the GMS appointing them and ending at the closing of the 5th (fifth) Annual GMS after the date of their appointment. The term of office may not exceed a period of 5 (five) years, with due observance of the articles of association and laws and regulations in the Capital Market sector.

However, this provision does not diminish the right of the GMS to dismiss a member of the Board of Commissioners at any time before his/her term of office ends. After his/her term of office ends, the Board of Commissioners may be reappointed by the GMS for 1 (one) term of office.

The dismissal of a member of the Board of Commissioners is carried out if based on the facts, the member of the Board of Commissioners concerned, among others:
1. Unable to perform their duties properly;
2. Not implementing the provisions of laws and regulations and/or the provisions of the Articles of Association;
3. Engage in actions that are detrimental to the Company.

JUMLAH, KOMPOSISI, DAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS TAHUN 2022

Di tahun 2022, terdapat perubahan komposisi dan pergantian susunan keanggotaan Dewan Komisaris.

NUMBER, COMPOSITION AND COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN 2022

In 2022, there were changes in the composition and rotation of the Board of Commissioners.

Kronologi Perubahan Susunan Dewan Komisaris di Sepanjang Tahun 2022

Chronology of changes in the composition of the Board of Commissioners throughout 2022

PERIODE 1 JANUARI-4 NOVEMBER 2022
Period January 1-November 4, 2022

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Darmin Nasution	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently Independent Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-262/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Decree of the Minister of SOEs as GMS No.SK-262/MBU/08/2020 dated August 4, 2020	4 Agustus 2020 hingga RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2025 August 4, 2020 to the AGM to be held in 2025	Ke-1 1st
Mustoha Iskandar	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-262/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Decree of the Minister of SOEs as GMS No.SK-262/MBU/08/2020 dated August 4, 2020	4 Agustus 2020 hingga RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2025 August 4, 2020 to the AGM to be held in 2025	Ke-1 1st

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Anhar Adel	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-280/MBU/11/2019 tanggal 22 November 2019 Decree of the Minister of SOEs No.SK-280/MBU/11/2019 dated November 22, 2019	22 November 2019–9 Januari 2020 November 22, 2019 to January 9, 2020	Ke-1 1st
	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-13/MBU/01/2020 tanggal 9 Januari 2020 Decree of the Minister of SOEs as GMS No.SK-13/MBU/01/2020 dated January 9, 2020	9 Januari 2020 hingga RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2024 January 9, 2020 until the AGM to be held in 2024	
Bambang Widianto	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-262/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Decree of the Minister of SOEs as GMS No.SK-262/MBU/08/2020 dated August 4, 2020	4 Agustus 2020 hingga 4 November 2022 August 4, 2020 until November, 4 2022	Ke-1 1st
Febrio Nathan Kacaribu	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-262/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Decree of the Minister of SOEs as GMS No.SK-262/MBU/08/2020 dated August 4, 2020	4 Agustus 2020 hingga RUPS yang diselenggarakan di tahun 2022 August 4, 2020 until the AGM held in 2022	Ke-1 1st
Suwandi	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-262/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Decree of the Minister of SOEs as GMS No.SK-262/MBU/08/2020 dated August 4, 2020	4 Agustus 2020 hingga RUPS yang diselenggarakan di tahun 2022 August 4, 2020 until the AGM held in 2022	Ke-1 1st
Ari Dwipayana	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-262/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Decree of the Minister of SOEs as GMS No.SK-262/MBU/08/2020 dated August 4, 2020	4 Agustus 2020 hingga RUPS yang diselenggarakan di tahun 2022 August 4, 2020 until the AGM held in 2022	Ke-1 1st
Anwar Sanusi	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-193/MBU/06/2018 tanggal 8 Juni 2018 Decree of the Minister of SOEs as GMS No.SK-193/MBU/06/2018 dated June 8, 2018	8 Juni 2018 hingga RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2023 June 8, 2018 until the AGM to be held in 2023	Ke-1 1st

PERIODE 4 NOVEMBER–31 DESEMBER 2022
Period November 4–December 31, 2022

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Darmin Nasution	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently Independent Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-262/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Decree of the Minister of SOEs as GMS No.SK-262/MBU/08/2020 dated August 4, 2020	4 Agustus 2020 hingga RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2025 August 4, 2020 to the AGM to be held in 2025	Ke-1 1st

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Mustoha Iskandar	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-262/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Decree of the Minister of SOEs as GMS No.SK-262/MBU/08/2020 dated August 4, 2020	4 Agustus 2020 hingga RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2025 August 4, 2020 to the AGM to be held in 2025	Ke-1 1st
Anhar Adel	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-280/MBU/11/2019 tanggal 22 November 2019 Decree of the Minister of SOEs No.SK-280/MBU/11/2019 dated November 22, 2019	22 November 2019–9 Januari 2020 November 22, 2019 to January 9, 2020	Ke-1 1st
	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-13/MBU/01/2020 tanggal 9 Januari 2020 Decree of the Minister of SOEs as GMS No.SK-13/MBU/01/2020 dated January 9, 2020	9 Januari 2020 hingga RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2024 January 9, 2020 until the AGM to be held in 2024	
Farhat Brachma	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-253/MBU/11/2022 Decree of the Minister of SOEs Acting as GMS No. SK-253/MBU/11/2022	4 November 2022 hingga RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2027 November 4, 2022 to the AGM to be held in 2027	Ke-1 1st
Febrio Nathan Kacaribu	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-262/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Decree of the Minister of SOEs as GMS No.SK-262/MBU/08/2020 dated August 4, 2020	4 Agustus 2020 hingga RUPS yang diselenggarakan di tahun 2022 August 4, 2020 to the AGM to be held in 2025	Ke-1 1st
Suwandi	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-262/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Decree of the Minister of SOEs as GMS No.SK-262/MBU/08/2020 dated August 4, 2020	4 Agustus 2020 hingga RUPS yang diselenggarakan di tahun 2022 August 4, 2020 to the AGM to be held in 2025	Ke-1 1st
Ari Dwipayana	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-262/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Decree of the Minister of SOEs as GMS No.SK-262/MBU/08/2020 dated August 4, 2020	4 Agustus 2020 hingga RUPS yang diselenggarakan di tahun 2022 August 4, 2020 to the AGM to be held in 2025	Ke-1 1st
Anwar Sanusi	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-193/MBU/06/2018 tanggal 8 Juni 2018 Decree of the Minister of SOEs as GMS No.SK-193/MBU/06/2018 dated June 8, 2018	8 Juni 2018 hingga RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2023 June 8, 2018 until the AGM to be held in 2023	Ke-1 1st

INDEPENDENSI

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris bertindak secara independen dan terbebas dari kepentingan pihak mana pun. Independensi Dewan Komisaris Perusahaan, terutama mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

INDEPENDENCE

In carrying out its functions, the Board of Commissioners acts independently and is free from the interests of any party. The independence of the Company's Board of Commissioners primarily refers to the Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

Aspek Independensi Independence Aspect	Darmin Nasution	Anhar Adel	Mustoha Iskandar	Anwar Sanusi	Farhat Brachma	Suwandi	Febrio Nathan Kacaribu	Ari Dwipayana
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the activities of the Company within the last 6 (six) months.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan. Has no direct or indirect shares in the Company.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama. Has no affiliation with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors or Major Shareholders.	✓	Staf Khusus Menteri BUMN (2019–sekarang) Special Staff to the Minister of SOEs (2019–present)	✓	Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenaga-kerjaan Secretary General of the Ministry of Manpower	Staf Ahli Wakil Presiden (2019–sekarang) Expert Staff to the Vice President (2019–present)	Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Director General of Food Crops, Ministry of Agriculture	Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (2020–sekarang) Head of Fiscal Policy Agency Ministry of Finance (2020–present)	Koordinator Staf Khusus Presiden RI (2019–sekarang) Coordinator of Special Staff to the President (2019–present)
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. Has no direct or indirect business relationship related to the Company's business activities.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

BOARD MANUAL: PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris mengacu pada *Board Manual*, yakni pedoman anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan peran jabatannya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-

BOARD MANUAL: BOARD OF COMMISSIONERS MANUAL

In carrying out its functions, the Board of Commissioners refers to the Board Manual, which is a guideline for members of the Board of Commissioners in carrying out their roles in accordance with the articles of association and prevailing

undangan yang berlaku. *Board Manual* pertama kali disahkan dan diterbitkan pada tanggal 5 November 2012.

Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Perusahaan, *Board Manual* telah dimutakhirkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PTPI No. 001/KEP.KOM/II/2022 dan No. 012.2/A/KU/A24/SK/2022 tanggal 16 Februari 2022 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Pupuk Indonesia (Persero).

Adapun *Board Manual* yang mengatur tentang Dewan Komisaris, antara lain:
1. Fungsi Dewan Komisaris.
2. Konsep Umum Pengawasan Dewan Komisaris.
3. Persyaratan Dewan Komisaris.
4. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris.
5. Kewajiban Dewan Komisaris.
6. Rangkap Jabatan.
7. Etika Jabatan Anggota Dewan Komisaris.
8. Program Pengenalan dan Peningkatan Kompetensi.
9. Rapat Dewan Komisaris dan Mekanisme Pengambilan Keputusan.
10. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, KEWAJIBAN DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan *Board Manual*, tugas, tanggung jawab, wewenang serta kewajiban Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai PTPI maupun usaha PTPI yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berwenang untuk:
1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perusahaan;

laws and regulations. The Board Manual was first approved and published on November 5, 2012.

In accordance with the development and needs of the Company, the Board Manual has been updated based on the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PTPI No. 001/KEP.KOM/II/2022 and No. 012.2/A/KU/A24/SK/2022 dated February 16, 2022 concerning the Board Manual of PT Pupuk Indonesia (Persero).

The Board Manual that regulates the Board of Commissioners, among others:
1. Functions of the Board of Commissioners.
2. General Concept of Board of Commissioners Supervision.
3. Board of Commissioners Requirements.
4. Duties and Authorities of the Board of Commissioners.
5. Obligations of the Board of Commissioners .
6. Dual Position.
7. Position Ethics of Members of the Board of Commissioners.
8. Introduction and Competency Improvement Program.
9. Board of Commissioners Meeting and Decision Making Mechanism.
10. Board of Commissioners Performance Assessment.

DUTIES, RESPONSIBILITIES, OBLIGATIONS AND AUTHORITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Based on the Board Manual, the duties, responsibilities, authorities and obligations of the Board of Commissioners are as follows:

Duties of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners is tasked with supervising the management policy, the course of management in general both regarding PTPI and PTPI's business carried out by the Board of Directors and providing advice to the Board of Directors including supervision of the implementation of the Company's Long Term Plan, Work Plan and Budget as well as the provisions of the Articles of Association and Decisions of the General Meeting of Shareholders, as well as applicable laws and regulations, for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company.

Authority of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners is authorized to:
1. Seeing books, letters, and other documents, checking cash for verification purposes and other securities and checking the Company's assets;

2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;

6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;
7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini;

8. Membentuk Komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan;
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu;
10. Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;

11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
13. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawasan Intern.

Kewajiban Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berkewajiban untuk:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan;
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;

3. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJP dan RKAP;
4. Memastikan bahwa penyusunan rencana perusahaan terdapat kesinambungan dan RKAP merupakan penjabaran dari RJPP;

2. Entering the grounds, buildings, and offices used by the Company;
3. Request explanations from the Board of Directors and/or other officials regarding all issues concerning the management of the Company;
4. Knowing all policies and actions that have been and will be carried out by the Board of Directors;
5. Request the Board of Directors and/or other officials under the Board of Directors with the knowledge of the Board of Directors to attend Board of Commissioners meetings;
6. Appoint and dismiss the Secretary of the BOC, if deemed necessary;
7. Temporarily suspend members of the Board of Directors in accordance with the provisions of these articles of association;
8. Establish other Committees in addition to the Audit Committee, if deemed necessary by taking into account the company's capabilities;
9. Use experts for certain matters and for a certain period of time at the Company's expense, if deemed necessary;
10. Perform management actions of the Company in certain circumstances for a certain period of time in accordance with the provisions of the Articles of Association;
11. Attend Board of Directors meetings and provide views on matters discussed;
12. Carry out other supervisory authority as long as it does not conflict with laws and regulations, articles of association, and/or resolutions of the General Meeting of Shareholders; and
13. Approve the appointment and dismissal of the Corporate Secretary and/or Head of the Internal Audit Unit.

Obligations of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners is obliged to:

1. Provide advice to the Board of Directors in carrying out the management of the Company;
2. Examining and reviewing and signing the Company's Long-Term Plan and the Company's Work Plan and Budget prepared by the Board of Directors, in accordance with the provisions of these Articles of Association;
3. Provide opinions and advice to the General Meeting of Shareholders regarding the Company's Long Term Plan and the Company's Work Plan and Budget regarding the reasons for the Board of Commissioners to sign the RJP and RKAP;
4. Ensure that the preparation of the company's plan is sustainable and the RKAP is an elaboration of the RJPP;

5. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan;
6. Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan;
7. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
8. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
9. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris;
10. Mengusulkan *Key Performance Indicators* (KPI) Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
11. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
12. Membentuk Komite Audit;
13. Mengusulkan Akuntan Publik kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
14. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
15. Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan tersebut dan perusahaan lain;
16. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
17. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
18. Menyampaikan laporan triwulanan perkembangan realisasi Indikator Pencapaian Kinerja kepada para Pemegang Saham/Menteri;
19. Membuat dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat;
20. Setelah Berakhirnya Masa Jabatan Komisaris, Anggota Dewan Komisaris yang tidak lagi menjabat wajib untuk:
    a. Mengembalikan seluruh dokumentasi yang berhubungan dengan jabatan yang diemban sebelumnya kepada Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender.
    b. Apabila Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan meninggal dunia sewaktu menjabat, maka ahli waris Anggota Dewan Komisaris tersebut wajib mengembalikan dokumentasi sesuai dengan butir a tersebut di atas.

5. Following the development of the Company's activities, providing opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding any issues deemed important for the management of the Company;
6. Report immediately to the General Meeting of Shareholders if there are symptoms of declining Company performance;
7. Examining and reviewing periodic reports and annual reports prepared by the Board of Directors and signing the annual report;
8. Provide explanations, opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the Annual Report, if requested;
9. Prepare the Annual Work Plan and Budget of the Board of Commissioners;
10. Propose Key Performance Indicators (KPI) of the Board of Commissioners to the General Meeting of Shareholders;
11. Develop an annual work program and include it in the Company's Work Plan and Budget;
12. Establish an Audit Committee;
13. Propose a Public Accountant to the General Meeting of Shareholders;
14. Prepare minutes of the Board of Commissioners meetings and keep copies;
15. Report to the Company regarding his/her and/or his/her family's share ownership in the company and other companies;
16. Provide a report on the supervisory duties that have been carried out during the past fiscal year to the General Meeting of Shareholders;
17. Carry out other obligations in the context of supervisory and advisory duties, as long as they do not conflict with laws and regulations, articles of association, and/or resolutions of the General Meeting of Shareholders;
18. Submit quarterly reports on the progress of realization of Performance Achievement Indicators to Shareholders/Ministers;
19. Prepare and submit the Official's Asset Report;
20. After the Expiration of the Commissioner's Term of Office, a member of the Board of Commissioners who is no longer in office is obliged to:
    a. Return all documentation related to the position held previously to the Company no later than 30 (thirty) calendar days.
    b. If the Member of the Board of Commissioners concerned dies while in office, the heirs of the Member of the Board of Commissioners must return the documentation in accordance with item a above.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus:

1. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
2. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Pembagian Tugas antara Dewan Komisaris

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan dan berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN masing-masing No. SK-83/MBU/06/2015 tanggal 4 Juni 2015, No. SK-70/MBU/03/2016 tanggal 29 Maret 2016, No. SK-160/MBU/07/2016 tanggal 26 Juli 2016 dan No. SK-193/MBU/06/2018 tanggal 8 Juni 2018, maka dalam rangka meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan yang lebih baik, disepakati pembagian tugas Dewan Komisaris sesuai Keputusan Dewan Komisaris No. 02/KEP.KOM/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia.

Pembagian tugas dilakukan agar masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat lebih mendalam mengetahui kinerja dari masing-masing Entitas Anak yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja Perusahaan secara konsolidasi. Untuk tahun 2022, pembagian tugas mengacu pada Keputusan Dewan Komisaris No. 015/KEP.KOM/XI/2022 tanggal 11 November 2022.

In carrying out their duties, each member of the Board of Commissioners must:

1. Comply with the Articles of Association and laws and regulations as well as the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness.
2. Be in good faith, prudent and responsible in carrying out supervisory and advisory duties to the Board of Directors for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company.

Division of Duties between the Board of Commissioners

Based on the Company's Articles of Association and based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-83/MBU/06/2015 dated June 4, 2015, No. SK-70/MBU/03/2016 dated March 29, 2016, No. SK-160/MBU/07/2016 dated July 26, 2016 and No. SK-193/MBU/06/2018 dated June 8, 2018, in order to improve the effectiveness of a better supervisory function, it was agreed to divide the duties of the Board of Commissioners in accordance with the Decree of the Board of Commissioners No. 02/KEP.KOM/VII/2018 dated July 4, 2018 concerning the Division of Duties of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Pupuk Indonesia.

The division of duties is carried out so that each member of the Board of Commissioners can more deeply know the performance of each Subsidiary which will indirectly affect the Company's performance on a consolidated basis. For 2022, the division of duties refers to the Decision of the Board of Commissioners No. 015/KEP.KOM/XI/2022 dated November 11, 2022.

PEMBAGIAN TUGAS MASING-MASING DEWAN KOMISARIS
Division of Duties of Each Board of Commissioners

Dewan Komisaris Board of Commissioners	**Tugas**	Tasks
Darmin Nasution Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	Melakukan koordinasi seluruh pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, serta merangkap sebagai Ketua Komite Audit.	Coordinating the entire implementation of the duties of the Board of Commissioners, and concurrently serving as Chairman of the Audit Committee.
Mustoha Iskandar Komisaris Independen Independent Commissioner	• Wakil Ketua Komite Audit. • Pengawasan serta pemberian saran dan rekomendasi konsolidasian PT Pupuk Indonesia (Persero) khususnya Bidang Transformasi Bisnis serta terhadap Anak Perusahaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.	• Vice Chairman of the Audit Committee. • Supervision and provision of advice and recommendations on the consolidation of PT Pupuk Indonesia (Persero), especially the Business Transformation Division and its subsidiary PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Tugas	Tasks
Anwar Sanusi Komisaris Commissioner	• Ketua Komite Pemantauan GCG dan PMR. • Pengawasan serta pemberian saran dan rekomendasi konsolidasian PT Pupuk Indonesia (Persero) khususnya Bidang Tata Kelola serta terhadap 2 (dua) Anak Perusahaan, yaitu: 1. PT Pupuk Indonesia Logistik; 2. PT Pupuk Indonesia Utilitas.	• Chairman of the GCG and PMR Monitoring Committee. • Supervision and provision of advice and recommendations on the consolidation of PT Pupuk Indonesia (Persero), especially in the field of Governance and on 2 (two) Subsidiaries, namely: 1. PT Pupuk Indonesia Logistik; 2. PT Pupuk Indonesia Utilitas.
Farhat Brachma Komisaris Commissioner	• Wakil Ketua I Komite Pemantauan GCG dan PMR. • Pengawasan serta pemberian saran dan rekomendasi konsolidasian PTPI khususnya Bidang Investasi serta terhadap Anak Perusahaan yaitu PT Pupuk Kujang.	• First Vice Chairman of the GCG and PMR Monitoring Committee. • Supervision and provision of advice and recommendations on the consolidation of PTPI, especially in the Investment Sector and on its subsidiary, PT Pupuk Kujang.
Febrio Nathan Kacaribu Komisaris Commissioner	• Wakil Ketua II Komite Pemantauan GCG dan PMR. • Pengawasan serta pemberian saran dan rekomendasi konsolidasian PTPI khususnya Bidang Keuangan serta terhadap Anak Perusahaan, yaitu PT Rekayasa Industri.	• Second Vice Chairman of the GCG and PMR Monitoring Committee. • Supervision and provision of advice and recommendations on the consolidation of PTPI, especially in the Financial Sector and on its subsidiary, PT Rekayasa Industri.
Anhar Adel Komisaris Independen Independent Commissioner	• Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi. • Pengawasan serta pemberian saran dan rekomendasi konsolidasian PTPI khususnya Bidang Produksi serta terhadap Anak Perusahaan yaitu PT Pupuk Petrokimia Gresik.	• Chairman of the Nomination and Remuneration Committee. • Supervision and provision of advice and recommendations on the consolidation of PTPI, especially in the Production Sector and on its subsidiary, PT Pupuk Petrokimia Gresik.
Suwandi Komisaris Commissioner	• Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi. • Pengawasan serta pemberian saran dan rekomendasi konsolidasian PTPI khususnya Bidang Pemasaran serta terhadap 2 (dua) Anak Perusahaan yaitu: 1. PT Pupuk Indonesia Pangan; 2. PT Pupuk Iskandar Muda	• Secretary of Nomination and Remuneration Committee. • Supervision and provision of advice and recommendations on the consolidation of PTPI, especially the Marketing Sector and on 2 (two) Subsidiaries, namely: 1. PT Pupuk Indonesia Food; 2. PT Pupuk Iskandar Muda
Ari Dwipayana Komisaris Commissioner	• Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. • Pengawasan serta pemberian saran dan rekomendasi konsolidasian PT Pupuk Indonesia (Persero) khususnya Bidang Sumber Daya Manusia serta terhadap 2 (dua) Anak Perusahaan yaitu: 1. PT Pupuk Kalimantan Timur; 2. PT Pupuk Indonesia Niaga.	• Member of Nomination and Remuneration Committee. • Supervision and provision of advice and recommendations on the consolidation of PT Pupuk Indonesia (Persero), especially in the field of Human Resources and 2 (two) Subsidiaries, namely: 1. PT Pupuk Kalimantan Timur; 2. PT Pupuk Indonesia Niaga.

PROGRAM ORIENTASI BAGI KOMISARIS BARU

PTPI telah memiliki mekanisme program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru untuk memastikan bahwa anggota Dewan Komisaris dapat secepatnya memberikan kontribusi terhadap kinerja Perusahaan. Program pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke unit bisnis, fasilitas Perusahaan, pengkajian dokumen Perusahaan atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan kebutuhan.

Sehubungan dengan pengangkatan Dewan Komisaris baru pada tahun 2022 yaitu Bapak Farhat Brachma, maka Perusahaan telah melakukan program pengenalan

ORIENTATION PROGRAM FOR NEW COMMISSIONERS

PTPI has an orientation program mechanism for new members of the BOC to ensure that members of the BOC can immediately contribute to the Company's performance. The Company introduction program can be in the form of presentations, meetings, visits to business units, Company facilities, review of Company documents or other programs deemed appropriate to the needs.

In connection with the appointment of a new Board of Commissioners in 2022, namely Mr. Farhat Brachma, the Company has conducted a Company introduction

Perusahaan kepada Dewan Komisaris baru pada tanggal 8 Desember 2022 secara *online*.

PELATIHAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Kebijakan

Perusahaan memfasilitasi program pengembangan kompetensi bagi Dewan Komisaris untuk menambah wawasan dan pengetahuan Dewan Komisaris khususnya terkait fungsi pengawasannya.

Realisasi

Pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi Dewan Komisaris disampaikan pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS TAHUN 2022

Sepanjang Tahun 2022, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan program kerja yang telah disusun di awal tahun. Adapun pelaksanaan program kerja di tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

program to the new Board of Commissioners on 8 December 2022 online.

TRAINING AND COMPETENCY IMPROVEMENT FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

Policy

The Company facilitates competency development programs for the Board of Commissioners to broaden the knowledge of the Board of Commissioners, especially in relation to its supervisory function.

Realization

The implementation of the Board of Commissioners' competency improvement activities is presented in the Company Profile chapter of this Annual Report.

IMPLEMENTATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS' DUTIES IN 2022

Throughout 2022, the Board of Commissioners has carried out its duties and responsibilities in accordance with the work program that was prepared at the beginning of the year. The implementation of the work program in 2022 can be seen in the table below.

No.	Program	**Kegiatan |** Activity
1	Pengawasan Dewan Komisaris	1. Pengawasan di Bidang Keuangan; 2. Pengawasan di Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; 3. Pengawasan di Bidang Produksi dan Teknik 4. Pengawasan di Bidang Investasi 5. Pengawasan di Bidang SDM 6. Pengawasan di Bidang Pemasaran 7. Pengawasan di Bidang Hukum dan Hubungan Kerjasama 8. Pengawasan di Bidang Tata Kelola dan GCG 9. Pengawasan di Bidang Transformasi Bisnis 10. Pengawasan di Bidang Pengembangan Usaha dan Portofolio 1. Oversight on Finance; 2. Supervision in Social and Environmental Responsibility; 3. Supervision on Production and Engineering 4. Supervision on Investment 5. Supervision in Human Resources 6. Supervision in Marketing 7. Supervision of Legal and Cooperation 8. Supervision in Governance and GCG 9. Supervision on Business Transformation 10. Supervision on Business Development and Portfolio
2	Kegiatan Rutin	1. Rapat Internal Dewan Komisaris; 2. Rapat Dewan Komisaris yang menyertakan Direksi; 3. Rapat bersama dengan Pemegang Saham (RUPS). 1. Internal Meeting of the Board of Commissioners; 2. Board of Commissioners meetings that include the Board of Directors; 3. Joint meeting with Shareholders (GMS).

No.	Program	Kegiatan | Activity
3	Kegiatan Non Rutin	1. Pertemuan dengan Dewan Komisaris Anak Perusahaan; 2. Kunjungan kerja ke wilayah operasional; 3. Perjalanan dinas luar negeri; 4. Pendidikan dan pelatihan; 5. Melaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD); 6. Mengikuti forum yang diselenggarakan oleh *International Fertilizer Association* (IFA); 7. Penyusunan Kajian Awal atas Isu Strategis yang dihadapi Perusahaan; 8. Program suksesi kandidat calon direksi perusahaan; 9. Lain-lain. 1. Meeting with the Board of Commissioners of Subsidiaries; 2. Working visit to operational areas; 3. Overseas business trips; 4. Education and training; 5. Carrying out Focus Group Discussion (FGD) activities; 6. Participating in forums organized by the International Fertilizer Association (IFA); 7. Preparation of Initial Study on Strategic Issues faced by the Company; 8. Succession program for candidates for the company's board of directors; 9. Others.

PENILAIAN KINERJA ORGAN DAN KOMITE PENDUKUNG DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dasar Penilaian

Dasar penilaian terhadap organ di bawah Dewan Komisaris adalah pelaksanaan tugas, baik dalam bentuk rapat untuk menyampaikan rekomendasi, pembahasan materi tertentu, maupun kegiatan reguler yang telah melekat pada fungsi. Selain itu, organ-organ tersebut juga melaksanakan penugasan lain yang berkenaan dengan fungsi Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris juga menjadikan rencana kerja organ di bawahnya sebagai dasar penilaian kinerja. Karena itu, evaluasi dan pemantauan pelaksanaan rencana kerja tersebut selalu dilakukan secara berkala.

Penilaian Kinerja Sekretaris Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Sekretaris Dewan Komisaris di Tahun 2022 diwujudkan melalui pelaksanaan rapat Dewan Komisaris sebanyak 62 kali rapat yang terdiri dari rapat rutin kinerja bulanan maupun rapat non-rutin; membantu konsep surat/korespondensi Dewan Komisaris sebanyak 78 surat, menjadi penghubung (*liaison officer*) bagi Dewan Komisaris; serta memberikan informasi yang dibutuhkan Dewan Komisaris secara berkala maupun sewaktu-waktu.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF ORGANS AND SUPPORTING COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

Assessment Basis

The basis for assessing the organs under the Board of Commissioners is the implementation of duties, both in the form of meetings to submit recommendations, discussion of certain materials, and regular activities that have been attached to the function. In addition, these organs also carry out other assignments related to the functions of the Board of Commissioners.

The Board of Commissioners also uses the work plans of its subordinate organs as a basis for performance assessment. Therefore, evaluation and monitoring of the implementation of the work plan is always carried out regularly.

Penilaian Kinerja Sekretaris Dewan Komisaris

Performance assessment of the Secretary to the board of commissioners The Secretary to the Board of Commissioners performance appraisal in 2022 was realized through the convening of 62 Board of Commissioners' meetings consisting of regular monthly performance meetings and non-routine meetings; assisting in drafting 78 Board of Commissioners' letters/correspondence, and serving as a liaison officer for the Board of Commissioners; and providing information needed by the Board of Commissioners on a regular basis or at any time.

Atas pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Sekretaris Dewan Komisaris sepanjang tahun buku 2022, Dewan Komisaris memberikan penilaian: "Sangat Baik"

Penilaian Kinerja Komite Audit

Penilaian kinerja Komite Audit di tahun 2022 direalisasikan melalui program kerja yang telah direncanakan di awal tahun. Di sepanjang tahun 2022, Komite Audit telah melakukan penelaahan Laporan Hasil Pemeriksaan Satuan Pengawasan Internal; pengawasan kinerja Kantor Akuntan Publik (KAP); telaah capaian kinerja Perusahaan; perjalanan dinas dalam rangka meninjau langsung lapangan; serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Atas pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Komite Audit sepanjang tahun buku 2022, Dewan Komisaris memberikan penilaian: "Sangat Baik".

Penilaian Kinerja Komite GCG dan Pemantauan Manajemen Risiko

Penilaian kinerja Komite GCG dan Pemantauan Manajemen Risiko diwujudkan melalui pelaksanaan program yang direncanakan di awal tahun. Komite ini juga telah melakukan pengawasan atas implementasi RKAP dan RJPP, sistem pengendalian internal Perusahaan, manajemen risiko, sistem teknologi informasi, pengelolaan SDM, pengadaan, mutu dan layanan, pemantauan pengurusan Perusahaan dalam rangka kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG, evaluasi atas Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) dan KPI individu Direksi, serta perjalanan dinas dalam rangka meninjau langsung lapangan. Atas pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Komite GCG dan Pemantauan Manajemen Risiko sepanjang tahun buku 2022, Dewan Komisaris memberikan penilaian: "Sangat Baik".

Penilaian Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Penilaian kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi diwujudkan dengan kontribusinya terkait dengan pengembangan talenta di lingkungan Perusahaan. Komite tersebut merupakan *Talent Committee* untuk Direksi dan BOD-1 yang rekomendasinya disampaikan kepada Menteri BUMN melalui Deputi SDM, Teknologi dan Informasi. Sepanjang tahun 2022, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan mandat yang diberikan, sehingga memberikan kontribusi besar bagi kesinambungan Perusahaan. Karena itu, Dewan Komisaris memberikan penilaian: "Sangat Baik".

For the implementation of the duties carried out by the Secretary to the Board of Commissioners throughout fiscal year 2022 , the Board of Commissioners gives an "Excellent" assessment.

Audit Committee Performance Assessment

The performance assessment of the Audit Committee in 2022 was realized through the work program planned at the beginning of the year. Throughout 2022, the Audit Committee reviewed the Internal Audit Unit Inspection Reports; supervied the performance of the Public Accounting Firm (KAP); reviewed of the Company's performance achievements; conducted official trips to have direct field observation; and provided recommendations to the Board of Commissioners regarding their areas of responsibility. For the implementation of the duties carried out by the Audit Committee throughout fiscal year 2022, the Board of Commissioners gives an "Excellent" assessment.

GCG and Risk Management Monitoring Committee Performance Assessment

The performance appraisal of the GCG and Risk Management Monitoring Committee was realized through the implementation of the program planned at the beginning of the year. The Committee has also supervised the execution of the Company's WP&B and RJPP, internal control system, risk management, IT systems HC management, procurement, quality and service, monitoring the Company's management to adhere to GCG principles, evaluation on Superior Performance Assessment Criteria (KPKU) and individual KPIs of the Board of Directors, and conducted official trips to have direct field observation. For the implementation of the duties carried out by the GCG and Risk Management Monitoring Committee throughout fiscal year 2022, the Board of Commissioners gives an "Excellent" assessment.

Nomination and Remuneration Committee Performance Assessment

The performance appraisal of the Nomination and Remuneration Committee was realized by its contribution to talent development within the Company. The committee acts as a Talent Committee for the Board of Directors and BOD-1 whose recommendations are submitted to the Minister of SOEs through the Deputy for HC, Technology and Information. Throughout 2022, the Nomination and Remuneration Committee has carried out its mandate, thus making a major contribution to the sustainability of the Company. Therefore, the Board of Commissioners gives an "Excellent" assessment.

Komisaris Independen
Independent Commissioners

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau dengan perusahaan yang mungkin menghalangi atau menghambat posisinya untuk bertindak independen sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Independent Commissioners are members of the Board of Commissioners who do not have financial, management, share ownership and/or family relationships with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or controlling shareholders or with companies that may hinder or inhibit their position to act independently in accordance with GCG principles.

Keberadaan Komisaris Independen bertujuan untuk menciptakan iklim yang lebih objektif dan independen serta menjaga "*fairness*". Komisaris Independen diharapkan mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan Pemegang Saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan Pemegang Saham minoritas termasuk Pemegang Saham publik dan Pemangku Kepentingan lainnya.

The existence of Independent Commissioners aims to create a more objective and independent climate and maintain "fairness". Independent Commissioners are expected to provide a balance between the interests of majority shareholders and the protection of the interests of minority shareholders, including public shareholders and other stakeholders.

Pengangkatan Komisaris Independen diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

The appointment of Independent Commissioners is regulated in OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

KRITERIA PENENTUAN KOMISARIS INDEPENDEN

Keberadaan Komisaris Independen di Perusahaan senantiasa menjamin mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun kriteria penentuan Komisaris Independen Perusahaan sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yaitu:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan pada periode berikutnya;
2. Tidak mempunyai saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung;
3. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama Perusahaan;
4. Tidak mempunyai hubungan usaha dengan Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung.

CRITERIA FOR DETERMINING INDEPENDENT COMMISSIONERS

The existence of an Independent Commissioner in the Company always ensures that the supervisory mechanism runs effectively and in accordance with laws and regulations. The criteria for determining the Company's Independent Commissioner are in accordance with POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, namely:

1. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Company within the last 6 (six) months, except for reappointment as Independent Commissioner of the Company in the following period;
2. Does not own any shares of the Company either directly or indirectly;
3. Has no affiliation with the Commissioners, Directors and Major Shareholders of the Company;
4. Has no business relationship with the Company either directly or indirectly.

Komisaris Independen PTPI telah memenuhi kriteria independensi sebagaimana disebutkan di atas. Kepatuhan tersebut juga telah dinyatakan oleh masing-masing Komisaris Independen dengan menandatangani surat pernyataan yang diperbarui setiap tahun.

PTPI's Independent Commissioners have met the independence criteria as mentioned above. Such compliance has also been stated by each Independent Commissioner by signing a statement letter which is renewed annually.

KOMPOSISI DAN KEANGGOTAAN KOMISARIS INDEPENDEN DALAM SUSUNAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN

COMPOSITION AND MEMBERSHIP OF INDEPENDENT COMMISSIONERS IN THE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY

KOMPOSISI KOMISARIS INDEPENDEN
Composition of Independent Commissioners

Nama Name	Dasar Pengangkatan Basis for Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Darmin Nasution	SK-262/MBU/08/2020	4 Agustus 2020-RUPS Tahun 2025 August 4, 2020-AGM 2025	Ke-1 1st
Mustoha Iskandar	SK-262/MBU/08/2020	4 Agustus 2020-RUPS Tahun 2025 August 4, 2020-AGM 2025	Ke-1 1st
Anhar Adel	SK-13/MBU/01/2020	9 Januari 2020-RUPS Tahun 2024 January 9, 2020- AGM 2024	Ke-1 1st

INDEPENDENSI KOMISARIS INDEPENDEN

Dalam menjalankan fungsinya, Komisaris Independen terbebas dari kepentingan pihak mana pun. Pernyataan independensi tersebut disampaikan melalui tabel di bawah ini.

INDEPENDENCE OF INDEPENDENT COMMISSIONERS

In carrying out its functions, the Independent Commissioner is free from the interests of any party. The statement of independence is presented in the table below.

Aspek Independesi Independence Aspect	Darmin Nasution	Mustoha Iskandar	Anhar Adel
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau kegiatan Perusahaan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control or activities of the Company within the last 6 (six) months.	✓	✓	✓
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan. Has no direct or indirect shares in the Company.	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama. Has no affiliation with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors or Major Shareholders.	✓	✓	Staf Khusus Menteri BUMN (2019–sekarang) Special Staff to the Minister of SOEs
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. Has no direct or indirect business relationship related to the Company's business activities.	✓	✓	✓

Surat Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Independence Statement Letter of Independent Commissioner

PAKTA INTEGRITAS
PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

Dalam rangka turut berupaya mewujudkan DUNIA USAHA yang BERSIH, TRANSPARAN, dan PROFESIONAL

menyatakan sebagai berikut:

1. Tanggap mengemban amanah dan memegang teguh prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang meliputi Transparansi, Kemandirian, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban dan Kewajaran dalam setiap pengambilan keputusan dan tindakan.
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ke-3 (tiga), baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan sesama Anggota Direksi atau pun dengan Anggota Dewan Komisaris maupun Direksi Perusahaan.
3. Tanggap menyelesaikan tugas serta amanat sebagai Ketua Komite Nominasi & Remunerasi yang ditugaskan oleh Pemegang Saham dan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan, serta Kontrak Manajemen yang telah saya tandatangani.
4. Selama menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi & Remunerasi, tidak akan memanfaatkan pos/ saya pada perusahaan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kerabat, maupun golongan tertentu, dan tidak memiliki hubungan kepentingan maupun rangkap jabatan yang bertentangan dengan pengangkatan sebagai Ketua Komite Nominasi & Remunerasi pada perusahaan ini sesuai peraturan di bidang Badan Usaha Milik Negara.
5. Selama menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi & Remunerasi, akan menggunakan setiap manfaat yang diperoleh dari kewenangan dan fasilitas yang diberikan dan dibebankan oleh Perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Komite Nominasi & Remunerasi dan memperhatikan ketentuan serta kebijakan yang berlaku di Perusahaan.
6. Apabila berdasarkan penilaian Dewan Komisaris, saya tidak menjaga kinerja yang ditetapkan dan atau tidak memenuhi pakta integritas ini, maka saya bersedia menerima konsekuensi akibat hal tersebut dan menerima sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, apabila ditemukan terjadinya pelanggaran terhadap hal-hal sebagaimana termaktub dalam surat pernyataan ini.

Jakarta, 29 Maret 2022

Yang Menyatakan : Komisaris Independen	Yang Menyatakan : Komisaris Independen	Yang Menyatakan : Komisaris Independen	Menyetujui : Komisaris Utama
Darmin Nasution	**Anhar Adal**	**Mustofa Iskandar**	**Darmin Nasution**

• Amanah • Kompeten • Harmonis • Loyal • Adaptif • Kolaboratif

Direksi
Board of Directors

Direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.

Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS. Hal ini mencerminkan wujud akuntabilitas pengelolaan Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Kinerja Direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS. Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Internal Audit, auditor eksternal dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

KRITERIA DAN PERSYARATAN DIREKSI

Direksi merupakan jabatan strategis di lingkungan Perusahaan yang akan menciptakan keunggulan pengelolaan dan daya saing Perusahaan. Dengan demikian, posisi Direksi membutuhkan kelengkapan persyaratan dan kompetensi tertentu. Di lingkungan Perusahaan, terdapat 3 (tiga) jenis persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota Direksi. Persyaratan tersebut adalah:

Persyaratan Formal

Direksi Perusahaan adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan pernah:

1. Dinyatakan pailit;
2. Menjadi Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit;
3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, Perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

The Board of Directors is an organ of the company that is authorized and fully responsible for the management of the company for the benefit of the Company, in accordance with the purposes and objectives of the Company as well as representing the Company both inside and outside the court in accordance with the articles of association and applicable laws and regulations, the Articles of Association and the resolutions of the GMS.

The Board of Directors is accountable for the implementation of its duties to the Shareholders through the GMS. This reflects the accountability of the Company's management in accordance with GCG principles. The performance of the Board of Directors is evaluated by the Board of Commissioners and reported to the GMS. The Board of Directors follows up on audit findings and recommendations from Internal Audit, external auditors and/or the results of supervision by other authorities.

CRITERIA AND REQUIREMENTS OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is a strategic position within the Company that will create management excellence and competitiveness of the Company. Thus, the position of the Board of Directors requires certain requirements and competencies. Within the Company, there are 3 (three) types of requirements that must be met by prospective members of the Board of Directors. These requirements are:

Formal Requirements

The Directors of the Company are natural persons who are capable of performing legal acts, except within 5 (five) years before the appointment:

1. Declared bankrupt;
2. Being a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners/Supervisory Board who is found guilty of causing a BUMN and/or Company to be declared bankrupt;
3. Convicted of a criminal offense that is detrimental to state finances, state-owned enterprises, companies, and/or those related to the financial sector.

Persyaratan Material

Persyaratan material Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu:

1. Keahlian;
2. Integritas;
3. Kepemimpinan;
4. Pengalaman;
5. Jujur;
6. Perilaku yang baik; dan
7. Dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.

Persyaratan Lain

Persyaratan lain Direksi BUMN adalah sebagai berikut:

1. Bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/ anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat 1, dan DPRD Tingkat II;
2. Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah;
3. Tidak menjabat sebagai Direksi pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut;
4. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya; dan
5. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Direksi BUMN, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter.

Anggota Direksi Perusahaan dilarang memangku jabatan rangkap dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Anggota Direksi pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Swasta;
2. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
4. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
5. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Material Requirements

Material requirements of the Board of Directors of State-Owned Enterprises (SOEs), namely:

1. Expertise;
2. Integrity;
3. Leadership;
4. Experience;
5. Honestly;
6. Good behavior; and
7. High dedication to advancing and developing the company.

Other Requirements

Other requirements of SOE Directors are as follows:

1. Not a political party administrator and/or legislative candidate and/or legislative member. Legislative candidates or legislative members consist of candidates/members of the DPR, DPD, DPRD Level 1, and DPRD Level II;
2. Not a candidate for head/deputy head of the region and/or head/deputy head of the region;
3. Not serving as Directors of the BUMN concerned for 2 (two) consecutive periods;
4. Have dedication and devote full time to their duties; and
5. Physically and mentally healthy (not currently suffering from an illness that can hinder the implementation of duties as Directors of BUMN, as evidenced by a medical certificate from a doctor.

Members of the Company's Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions with the following provisions:

1. Member of the Board of Directors of BUMN, Regionally-Owned Enterprises (BUMD), and Privately-Owned Enterprises;
2. Member of the Board of Commissioners/Supervisory Board of BUMN;
3. Other structural and functional positions in central and/ or regional government agencies/institutions;
4. Other positions in accordance with the provisions in the laws and regulations, political party administrators and/or legislative candidates/members and/or candidates for Regional Head/Deputy Regional Head;
5. Other positions that may create a conflict of interest.

SUKSESI: NOMINASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan melalui RUPS sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Pengangkatan Direksi dilakukan jika persyaratan formal, lainnya dan materiel sesuai dengan ketentuan yang ada.

Rincian tentang suksesi Direksi dapat dilihat pada bagian Fungsi Nominasi dan Remunerasi dalam bab ini.

Succession: Nomination, Appointment and Removal of Directors

The appointment and dismissal of members of the Board of Directors is carried out through the GMS in accordance with applicable laws and regulations, the Company's Articles of Association and Regulation of the Minister of SOEs No. PER-11/MBU/07/2021 on Requirements, Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of State-Owned Enterprises. The appointment of the Board of Directors is made if the formal, other and material requirements are in accordance with the existing provisions.

Details on the succession of Directors can be found in the Nomination and Remuneration Function section of this chapter.

MASA JABATAN DIREKSI

Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya. Syarat yang menyertainya adalah tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, namun tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.

Setelah masa jabatannya berakhir, Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

BOARD OF DIRECTORS TERM OF OFFICE

Members of the Board of Directors are appointed for a period commencing from the closing or the date determined by the GMS appointing them and ending at the closing of the 5th (fifth) Annual GMS after the date of their appointment. The accompanying condition is not to exceed a period of 5 (five) years, with due observance of laws and regulations, but without prejudice to the right of the GMS to dismiss the members of the Board of Directors at any time before their term of office expires.

After their term of office expires, such Directors may be reappointed by the GMS for 1 (one) term of office, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, with due observance of the laws and regulations in the Capital Market sector and without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time.

JUMLAH, KOMPOSISI, DAN SUSUNAN DIREKSI TAHUN 2022

Penetapan Direksi Perusahaan merupakan wewenang Pemegang Saham. Komposisi Direksi Perusahaan harus disesuaikan dengan tingkat kompleksitas Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha, yang antara lain tercermin dalam struktur organisasi. Sehingga pengambilan keputusan yang dilakukan Direksi akan lebih efektif, tepat dan cepat untuk mencapai tujuan-tujuan Perusahaan.

Sepanjang tahun 2022, tidak ada perubahan pada komposisi Direksi.

NUMBER, COMPOSITION AND COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2022

The appointment of the Company's Board of Directors is the authority of the Shareholders. The composition of the Company's Board of Directors must be adjusted to the level of complexity of the Company in carrying out business activities, which among others is reflected in the organizational structure. So that the decision making by the Board of Directors will be more effective, precise and fast to achieve the Company's goals.

During 2022, there were no changes to the composition of the Board of Directors.

SUSUNAN DIREKSI PER 31 DESEMBER 2022
Composition of the Board of Directors as of December 31, 2022

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Bakir Pasaman	Direktur Utama President Director	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-263/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-263/MBU/08/2020 dated August 4, 2020	4 Agustus 2020 hingga RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2025 August 4, 2020 to the AGM to be held in 2025	Ke-1 1st
Nugroho Christijanto	Direktur Transformasi Bisnis Director of Business Transformation	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-281/MBU/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-281/MBU/10/2018 dated October 26, 2018	26 Oktober 2018–4 Agustus 2020 October 26, 2018–August 4, 2020	Ke-1 1st
	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-263/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-263/MBU/08/2020 dated August 4, 2020	4 Agustus 2020 hingga RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2023 August 4, 2020 until the AGM to be held in 2023	Ke-1 1st
Tina T. Kemala Intan	Direktur SDM, Tata Kelola, dan Manajemen Risiko* Director of HR, Governance and Risk Management*	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-408/MBU/12/2021 tanggal 22 Desember 2021 Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-408/MBU/12/2021 dated December 22, 2021	22 Desember 2021 hingga RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2026 December 22, 2021 to AGM to be held in 2026	Ke-1 1st
Gusrizal	Direktur Pemasaran Marketing Director	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-377/MBU/11/2020 tanggal 11 November 2020 Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-377/MBU/11/2020 dated November 11, 2020	20 November 2020 hingga RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2025 November 20, 2020 until the AGM to be held in 2025	Ke-2 2nd
Bob Indiarto	Direktur Produksi Production Director	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-263/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-263/MBU/08/2020 dated August 4, 2020	4 Agustus 2020 hingga RUPS yang diselenggarakan di tahun 2022 August 4, 2020 to the AGM to be held in 2025	Ke-1 1st
Panji Winanteya Ruky	Direktur Transformasi Bisnis Director of Business Transformation	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-262/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-263/MBU/08/2020 dated August 4, 2020	4 Agustus 2020 hingga RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2025 August 4, 2020 to the AGM to be held in 2025	Ke-1 1st
Wono Budi Tjahyono	Direktur Keuangan & Investasi* Director of Finance & Investment*	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-408/MBU/12/2021 tanggal 22 Desember 2021 Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-408/MBU/12/2021 dated December 22, 2021	22 Desember 2021 hingga RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2026 December 22, 2021 to AGM to be held in 2026	Ke-1 1st

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Jamsaton Nababan	Direktur Portofolio & Pengembangan Usaha Director of Portfolio & Business Development	Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-237/MBU/07/2021 tanggal 16 Juli 2021 Decree of the Minister of SOEs as GMS No. SK-237/MBU/07/2021 dated July 16, 2021	16 Juli 2021 hingga RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2026 July 16, 2021 until the AGM to be held in 2026	Ke-1 1st

*) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-22/MBU/02/2023 tanggal 3 Februari 2023, Pemegang Saham mengubah nomenklatur Direktorat SDM, Tata Kelola & Manajemen Risiko menjadi Direktorat SDM dan Direktorat Keuangan & Investasi menjadi Direktorat Keuangan & Manajemen Risiko
*) Based on the Decree of Minister of SOE as the GMS No. SK-22/MBU/02/2023 dated February 3, 2023, Shareholders changed the nomenclature of Directorate of Human Capital, Governance and Risk Management to become Directorate of Human Capital and Directorate of Finance & Investment to become Directorate of Finance and Risk Management

INDEPENDENSI DIREKSI

Dalam menjalankan fungsinya, Direksi bertindak secara independen dan terbebas dari kepentingan pihak mana pun. Independensi Direksi Perusahaan dapat dilihat dari kepemilikan saham dan rangkap jabatannya, di mana tidak terdapat anggota Direksi yang memiliki saham di Perusahaan dan perusahaan lain yang berhubungan dengan Perusahaan, serta tidak merangkap jabatan di perusahaan yang memiliki hubungan usaha dengan Perusahaan.

INDEPENDENCE OF THE BOARD OF DIRECTORS

In carrying out its functions, the Board of Directors acts independently and is free from the interests of any party. The independence of the Company's Board of Directors can be seen from share ownership and concurrent positions, where there are no members of the Board of Directors who own shares in the Company and other companies related to the Company, and do not hold concurrent positions in companies that have business relationships with the Company.

PERNYATAAN INDEPENDENSI DIREKSI
Statement of Independence of the Board of Directors

Aspek Independesi Indepence Aspect	Bakir Pasaman	Nugroho Christijanto	Tina T. Kemala Intan	Gusrizal	Bob Indiarto	Panji Winanteya Ruky	Wono Budi Tjahyono	Jamsaton Nababan
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau kegiatan Perusahaan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the activities of the Company within the last 6 (six) months.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan. Has no direct or indirect shares in the Company.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Aspek Independesi Indepence Aspect	Bakir Pasaman	Nugroho Christijanto	Tina T. Kemala Intan	Gusrizal	Bob Indiarto	Panji Winanteya Ruky	Wono Budi Tjahyono	Jamsaton Nababan
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama. Has no affiliation with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors or Major Shareholders.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. Has no direct or indirect business relationship related to the Company's business activities.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

BOARD MANUAL: PEDOMAN KERJA DIREKSI

Perusahaan memiliki Pedoman Kerja (*Board Manual*) Direksi yang digunakan sebagai pedoman umum bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) dalam menjalankan fungsi dan peran jabatannya sebagai pengemban amanat Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman tersebut pertama kali disahkan dan diterbitkan pada tanggal 5 November 2012.

Pada tahun 2017 telah dilakukan pemutakhiran/revisi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Perusahaan. Board Manual yang baru tersebut saat ini sudah disahkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 001/KEP.KOM/II/2022 dan No. 012.2/A/KU/A24/SK/2022 tanggal 16 Februari 2022 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Pupuk Indonesia (Persero)

Adapun *Board Manual* yang mengatur tentang Direksi, antara lain:
1. Fungsi Direksi;
2. Persyaratan Direksi;
3. Tugas dan Wewenang Direksi;
4. Tata Laksana Kewenangan Direksi;
5. Kewajiban Direksi;
6. Rangkap Jabatan;

BOARD MANUAL: BOARD OF DIRECTORS MANUAL

The Company has a Board Manual which is used as a general guideline for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pupuk Indonesia (Persero) in carrying out their functions and roles as the Company's mandate bearers in accordance with the Articles of Association and applicable laws and regulations. The manual was first approved and published on November 5, 2012.

In 2017 an update/revision was made in accordance with the development and needs of the Company. The new Board Manual has now been approved through the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 001/KEP.KOM/II/2022 and No. 012.2/A/KU/A24/SK/2022 dated February 16, 2022 concerning the Board Manual of PT Pupuk Indonesia (Persero).

The Board Manual that regulates the Board of Directors, among others:
1. Function of the Board of Directors;
2. Requirements of the Board of Directors;
3. Duties and Authorities of the Board of Directors;
4. Management of the Authority of the Board of Directors;
5. Liability of Directors;
6. Dual Position;

7. Etika Jabatan Anggota Direksi;
8. Program Pengenalan dan Peningkatan Kompetensi;
9. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP);
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
11. Rapat Direksi dan Mekanisme Pengambilan Keputusan;
12. Penilaian Kinerja Direksi.

TUGAS DIREKSI

Tugas yang menjadi kewajiban Direksi sesuai dengan yang tercantum dalam *Board Manual* adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1), Direksi berwenang untuk:
   a. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan dan Anak Perusahaan.
   b. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
   c. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seseorang atau beberapa orang pekerja Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
   d. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham.
   e. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   f. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan Kepala Satuan Pengawasan Intern berdasarkan mekanisme internal Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris.

7. Ethics of the Board of Directors;
8. Competency Recognition and Enhancement Program;
9. Company Long Term Plan (RJPP);
10. Company Work Plan and Budget (RKAP);
11. Board of Directors Meeting and Decision Making Mechanism;
12. Performance Assessment of the Board of Directors.

BOARD OF DIRECTORS DUTIES

The duties of the Board of Directors as stated in the Board Manual are as follows:

1. The Board of Directors is tasked with carrying out all actions related to the management of the Company for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company and representing the Company both inside and outside the Court on all matters and all events with restrictions as stipulated in the laws and regulations, Articles of Association and/or Resolutions of the General Meeting of Shareholders.
2. In carrying out the duties as referred to in point (1), the Board of Directors is authorized to:
   a. Determine the management policy of the Company and its subsidiaries.
   b. Regulates the transfer of power of the Board of Directors to a person or several members of the Board of Directors to make decisions on behalf of the Board of Directors or represent the Company in and out of court.
   c. Regulates the transfer of power of the Board of Directors to a person or several employees of the Company either individually or jointly or to other persons, to represent the Company in and out of court.
   d. Regulate the provisions regarding the Company's employment including the determination of salaries, pensions or old age pensions and other income for the Company's employees based on applicable laws and regulations, provided that the determination of salaries, pensions or old age pensions and other income for employees that exceed the obligations stipulated by laws and regulations, must obtain prior approval from the General Meeting of Shareholders.
   e. Appoint and dismiss the Company's employees based on the Company's personnel regulations and prevailing laws and regulations.
   f. Appoint and dismiss the Corporate Secretary and Head of Internal Audit based on the Company's internal mechanism with the approval of the Board of Commissioners.

g. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain, dan/atau pihak lain dengan Perusahaan serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
h. Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Entitas Anak dan/atau perusahaan patungan.
i. Menetapkan kebijakan terhadap Entitas Anak dalam bidang yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, pada bidang-bidang antara lain sebagai berikut:
   i. Pemasaran dan penjualan;
   ii. Penelitian dan pengembangan;
   iii. *Supply chain management* dan *cost management*;
   iv. Pengadaan barang dan/atau jasa;
   v. *Finance* dan audit serta manajemen risiko dan kepatuhan;
   vi. Manajemen talenta dan pengembangan sumber daya manusia yang terintegrasi;
   vii. Hukum;
   viii. Bidang lainnya.

g. Perform all actions and other deeds regarding the management and ownership of the Company's assets, binding the Company with other parties, and/or other parties with the Company and representing the Company in and out of court on all matters and all events, with restrictions as stipulated in the laws and regulations, Articles of Association and/or Resolutions of the General Meeting of Shareholders.

h. Appoint and dismiss members of the Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries and/or joint ventures.
i. Establish policies towards the Subsidiaries in the areas set out in the Articles of Association, in areas including the following:
   i. Marketing and sales;
   ii. Research and development;
   iii. Supply chain management and cost management;
   iv. Procurement of goods and/or services;
   v. Finance and audit as well as risk management and compliance;
   vi. Integrated talent management and human resource development;
   vii. Law;
   viii Other fields.

KEWAJIBAN DIREKSI

Kewajiban Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan Ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
2. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Menyampaikan usulan KPI Direksi secara kolegial kepada RUPS/Menteri untuk ditetapkan bersamaan dengan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
4. Menjabarkan KPI Direksi secara kolegial menjadi KPI Direksi secara individual dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.
5. Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

OBLIGATIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS

The obligations of the Board of Directors as stipulated in the Company's Articles of Association and applicable provisions are as follows:

1. To endeavor and ensure the implementation of the Company's business and activities in accordance with its purposes and objectives and business activities.
2. Prepare in due time the Company's Long-Term Plan, the Company's Work Plan and Budget, and amendments thereto and submit them to the Board of Commissioners and Shareholders for ratification by the General Meeting of Shareholders.
3. Submitting the proposal for the KPI of the Board of Directors collegially to the GMS/Minister to be determined together with the submission of the Company's Work Plan and Budget.
4. To translate the KPIs of the Board of Directors on a collegial basis into individual KPIs of the Board of Directors and submit to the Board of Commissioners for approval.
5. Provide an explanation to the General Meeting of Shareholders regarding the Company's Long-Term Plan and the Company's Work Plan and Budget.

6. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi.
7. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perusahaan, serta dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Dokumen Perusahaan.
8. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
9. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetujui dan disahkan, serta laporan mengenai hak-hak Perusahaan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapusbukuan piutang.
10. Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan.
11. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia;
13. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada butir 4 dan 5, dan dokumen Perusahaan lainnya.
14. Menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan dokumen berupa: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan serta dokumen Perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud pada butir 11.
15. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.
16. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham.

6. Preparing the Register of Shareholders, Special Register, Minutes of General Meeting of Shareholders, and Minutes of Board of Directors Meeting.
7. Prepare an Annual Report as a form of accountability for the management of the Company, as well as the Company's financial documents as referred to in the law on Company Documents.
8. Prepare Financial Statements based on Financial Accounting Standards and submit to the Public Accountant for audit.
9. Submitting the Annual Report including the Financial Statements to the General Meeting of Shareholders for approval and ratification, as well as a report on the Company's rights that are not recorded in the books, among others as a result of writing off receivables.
10. Provide an explanation to the General Meeting of Shareholders regarding the Annual Report.
11. Submit the Balance Sheet and Income Statement that has been authorized by the General Meeting of Shareholders to the Minister in charge of Law and Human Rights in accordance with the provisions of laws and regulations.
12. Submit a report on changes in the composition of Shareholders, Board of Directors, and Board of Commissioners to the Minister in charge of Law and Human Rights;
13. Maintaining the Register of Shareholders, Special Register, Minutes of the General Meeting of Shareholders, Minutes of the Board of Commissioners Meeting and Minutes of the Board of Directors Meeting, Annual Report and financial documents of the Company as referred to in point 4 and 5, and other Company documents.
14. Keeping at the domicile of the Company documents in the form of: Register of Shareholders, Special Register, Minutes of General Meeting of Shareholders, Minutes of Board of Commissioners Meeting and Minutes of Board of Directors Meeting, Annual Report and financial documents of the Company as well as other Company documents as referred to in point 11.
15. Set up an accounting system in accordance with Financial Accounting Standards and based on the principles of internal control, especially the functions of management, recording, storage, and supervision.
16. Provide periodic reports in accordance with the manner and time in accordance with applicable regulations, as well as other reports whenever requested by the Board of Commissioners and/or Shareholders.

17. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya.
18. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham.
19. Menyusun dan menetapkan *blue print* organisasi Perusahaan.
20. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. Membuat dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat.
22. Setelah Berakhirnya Masa Jabatan, Anggota Direksi yang bersangkutan wajib:
    a. Mengembalikan seluruh dokumentasi yang berhubungan dengan jabatan yang diemban sebelumnya kepada Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender.
    b. Apabila Anggota Direksi meninggal dunia selama menjabat, maka ahli waris Anggota Direksi tersebut wajib mengembalikan dokumentasi sesuai dengan butir a tersebut di atas.

Kewajiban Direksi lainnya adalah sebagai berikut:
1. Menyusun GCG *Manual* di antaranya dapat memuat *Board Manual*, Pedoman Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Pengawasan Intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan, tata Kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (*Code of Conduct*).
2. Salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG.
3. Menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan dan/atau Perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris), serta gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perseroan dan Anak Perusahaan/ Perusahaan patungan Perseroan, untuk dimuat dalam Laporan Tahunan BUMN.
4. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya) pada Perseroan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.
5. Memastikan bahwa aset dan lokasi usaha serta fasilitas lainnya memenuhi peraturan perundang-undangan berkenaan dengan Kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan.

17. Prepare the Company's organizational structure complete with details and duties.
18. Provide explanations on all matters asked or requested by members of the Board of Commissioners and Shareholders.
19. Develop and establish the Company's organizational blue print.
20. Carry out other obligations in accordance with the provisions stipulated in the Articles of Association and those stipulated by the General Meeting of Shareholders based on laws and regulations.
21. Prepare and submit the Official's Asset Report.

22. After the expiration of the term of office, the relevant member of the Board of Directors must:
    a. Return all documentation related to the position held previously to the Company no later than 30 (thirty) calendar days.

    b. If the Member of the Board of Directors dies during his/her term of office, the heirs of the Member of the Board of Directors must return the documentation in accordance with item a above.

Other obligations of the Board of Directors are as follows:
1. The GCG Manual may include the Board Manual, Risk Management Guidelines, Internal Control System, Internal Audit System, reporting mechanism for suspected irregularities in the SOE concerned, information technology governance, and Code of Conduct.

2. A member of the Board of Directors is appointed by the Board of Directors Meeting as the person in charge of GCG implementation and monitoring.
3. Submit information regarding the identity, main occupations, positions of the Board of Commissioners in Subsidiaries/Joint Venture Companies and/or other Companies, including meetings held in a fiscal year (internal meetings and joint meetings with the Board of Commissioners), as well as salaries, facilities, and/ or other benefits received from the Company and Subsidiaries/Joint Venture Companies of the Company, to be included in the SOE Annual Report.

4. Reporting to the Company regarding his/her and/or his/her family's (wife/husband and children) share ownership in the Company and other companies, including any changes.
5. Ensure that assets and business locations and other facilities comply with laws and regulations regarding occupational health and safety and environmental preservation.

PEMBAGIAN LINGKUP TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi melakukan pembagian tugasnya secara masing-masing yang bertujuan agar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi berjalan efektif dan efisien. Adapun untuk tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi No. 082/KU/E10/SK/2021 tanggal 5 Agustus 2021, sebagai berikut:

DIVISION OF THE SCOPE OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

In carrying out its duties, the Board of Directors carries out its respective division of duties which aims to ensure that the implementation of the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors is effective and efficient. The duties and responsibilities of each member of the Board of Directors are determined based on Board of Directors Decree No. 082/KU/E10/SK/2021 dated August 5, 2021, as follows:

PEMBAGIAN TUGAS MASING-MASING DIREKSI
Division of Duties of Each Director

Direksi Board of Directors	**Tugas**	Tasks
Bakir Pasaman Direktur Utama President Director	• Mengoordinasi tugas-tugas yang dilakukan oleh dan merupakan tanggung jawab dari Wakil Direktur Utama, Direktur Produksi, Direktur Keuangan dan Investasi, Direktur SDM & Tata Kelola, Direktur Pemasaran, dan Direktur Transformasi Bisnis dalam menjalankan tugas pengurusan Perseroan sesuai dengan ketentuan *Job Description* (uraian jabatan), Anggaran Dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. • Menetapkan dan memutuskan arah dan kebijakan strategis setiap bidang serta menetapkan visi, misi dan nilai-nilai korporasi bagi Anak Perusahaan Perseroan ("Anak Perusahaan"), serta *general guideline* untuk memenuhi kepentingan seluruh *stakeholder*. • Mengarahkan, menetapkan, dan mengendalikan Sistem Management Terpadu untuk menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh manajemen Anak Perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. • Menjamin terlaksananya kelangsungan usaha perusahaan untuk mengoptimalkan tingkat pendapatan dan laba perusahaan serta menghasilkan manfaat (benefit) bagi seluruh *stakeholders* perusahaan, sesuai dengan visi, misi, rencana, dan strategi perusahaan. • Mengarahkan dan menetapkan sistem pengendalian internal untuk memastikan jalannya kegiatan operasional dan pencapaian kinerja perusahaan sesuai dengan kebijakan dan peraturan dan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan.	• Coordinate the tasks performed by and are the responsibility of the Vice President Director, Production Director, Finance and Investment Director, HR & Governance Director, Marketing Director, and Business Transformation Director in carrying out the Company's management duties in accordance with the provisions of the Job Description, Articles of Association and/or resolutions of the General Meeting of Shareholders. • Determining and deciding the strategic direction and policy of each field as well as establishing the vision, mission and corporate values for the Company's Subsidiaries ("Subsidiaries"), as well as general guidelines to fulfill the interests of all stakeholders. • Directing, establishing, and controlling the Integrated Management System to serve as a guideline and reference for all Subsidiary management in achieving the company's objectives. • Ensure the continuity of the company's business to optimize the level of revenue and profit of the company and generate benefits for all stakeholders of the company, in accordance with the vision, mission, plans and strategies of the company. • Directing and establishing the internal control system to ensure the operation and achievement of the company's performance in accordance with policies and laws and regulations, the Articles of Association and the Company's Long Term Plan and Budget Work Plan.

Direksi Board of Directors	Tugas	Tasks
	• Mengarahkan, menetapkan, dan mengendalikan kebijakan dalam pengembangan program *community development*, agar sesuai dengan kebijakan dan keputusan pemerintah, visi, misi, dan strategi perusahaan.	• Direct, establish, and control policies in the development of community development programs, in order to be in accordance with government policies and decisions, the company's vision, mission and strategy.
	• Mengarahkan dan menetapkan kebijakan bidang manajemen sumber daya manusia dan pengembangan organisasi sesuai perkembangan dan kebutuhan Anak Perusahaan untuk mendukung pencapaian visi, misi dan target perusahaan.	• Direct and establish policies in the field of human resource management and organizational development in accordance with the development and needs of Subsidiaries to support the achievement of the company's vision, mission and targets.
	• Menetapkan Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, asumsi dan parameter anggaran Korporasi dan Anak Perusahaan, sehingga visi dan misi perusahaan tercapai.	• Establish the Long-Term Plan, Corporate Work Plan and Budget, assumptions and budget parameters of the Corporation and Subsidiaries, so that the vision and mission of the company are achieved.
	• Menetapkan arah dan kebijakan, serta standardisasi & harmonisasi bidang Keuangan, Pemasaran, Logistik dan Distribusi, Investasi, Penelitian dan Pengembangan, Produksi & Pemeliharaan, Perhitungan *overhead cost*, Pengadaan, Pengelolaan Aset, SDM, dan Pengembangan *Human Capital Management* bagi Anak Perusahaan agar berjalan sesuai dengan strategi untuk mencapai target-target perusahaan yang telah ditetapkan.	• Establish direction and policies, as well as standardization & harmonization in the fields of Finance, Marketing, Logistics and Distribution, Investment, Research and Development, Production & Maintenance, Overhead Cost Calculation, Procurement, Asset Management, Human Resources, and Human Capital Management Development for Subsidiaries to run in accordance with the strategy to achieve the company's targets that have been set.
	• Menentukan arah dan kebijakan program-program peningkatan *capital expenditure* untuk mendukung pengembangan Anak Perusahaan pada taraf yang optimal guna efisiensi perusahaan.	• Determine the direction and policy of capital expenditure improvement programs to support the development of subsidiaries at an optimal level for corporate efficiency.
	• Menetapkan arah dan kebijakan penetapan *Statement of Corporate Intent, Key Performance Indicator* (KPI) bagi Anak Perusahaan serta besaran dividen Anak Perusahaan agar tercipta keadilan dan sinergi yang baik bagi seluruh *Holding*.	• Establish the direction and policy of determining the Statement of Corporate Intent, Key Performance Indicator (KPI) for Subsidiaries and the amount of dividends of Subsidiaries in order to create fairness and good synergy for the entire Holding.
	• Melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Holding maupun Anak Perusahaan untuk menjamin terpenuhinya seluruh kepentingan stakeholders Perusahaan.	• Conduct the General Meeting of Shareholders (GMS) of Holding and Subsidiaries to ensure the fulfillment of all interests of the Company's stakeholders.
	• Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta oleh anggota dewan komisaris dan para pemegang saham serta laporan tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.	• Provide explanations on all matters asked or requested by members of the board of commissioners and shareholders as well as the annual report to the General Meeting of Shareholders.
	• Membuat laporan tahunan serta laporan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.	• Prepare annual reports and other reports in accordance with applicable regulations.
	• Menjalin dan membina hubungan yang baik dan harmonis dengan instansi pemerintahan dan asosiasi profesi yang berkaitan dengan kegiatan usaha utama perusahaan di bidang industri pupuk untuk memastikan keselarasan rencana kerja dan program-program strategis Perusahaan.	• Establish and maintain good and harmonious relationships with government agencies and professional associations related to the Company's main business activities in the fertilizer industry to ensure the alignment of the Company's work plans and strategic programs.
	• Koordinasi dan integrasi program-program Korporasi Holding dan Anak Perusahaan untuk memastikan keselarasan rencana kerja dan program-program strategis Perusahaan.	• Coordination and integration of Corporate Holding and Subsidiary programs to ensure alignment of work plans and strategic programs of the Company.

Direksi Board of Directors	Tugas	Tasks
	• Melakukan supervisi dan membawahi unit kerja sebagai berikut: Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawasan Intern, dan Komunikasi Korporat.	• Supervises and oversees the following work units: Corporate Secretary, Internal Audit, and Corporate Communications.
Nugroho Christijanto Wakil Direktur Utama	• Membantu Direktur Utama dalam menetapkan dan memutuskan arah dan kebijakan strategis setiap bidang serta menetapkan visi, misi dan nilai – nilai korporasi bagi anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) ("Anak Perusahaan"), serta *general guideline* untuk memenuhi kepentingan seluruh *stakeholder*. • Membantu Direktur Utama dalam mengarahkan, menetapkan, dan mengendalikan Sistem Manajemen Terpadu untuk menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh manajemen Anak Perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. • Membantu Direktur Utama dalam pelaksanaan kelangsungan usaha perusahaan untuk mengoptimalkan tingkat pendapatan dan laba perusahaan serta menghasilkan manfaat (*benefit*) bagi seluruh *stakeholders* perusahaan, sesuai dengan visi, misi, rencana dan strategi perusahaan. • Membantu Direktur Utama dalam mengarahkan dan menetapkan kebijakan bidang manajemen sumber daya manusia dan pengembangan organisasi sesuai perkembangan dan kebutuhan Anak Perusahaan untuk mendukung pencapaian visi, misi dan target perusahaan. • Membantu Direktur Utama dalam menetapkan Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, asumsi dan parameter anggaran Korporasi dan Anak Perusahaan, sehingga visi dan misi perusahaan tercapai. • Membantu Direktur Utama dalam menetapkan arah dan kebijakan, serta standardisasi & harmonisasi bidang Keuangan, Pemasaran, Logistik dan Distribusi, Investasi, Penelitian dan Pengembangan, Produksi & Pemeliharaan, Perhitungan *overhead cost*, Pengadaan, Pengelolaan Aset, SDM dan Pengembangan Human Capital Management bagi Anak Perusahaan agar berjalan sesuai dengan strategi untuk mencapai target-target perusahaan yang telah ditetapkan.	• Assist the President Director in setting and deciding the strategic direction and policies of each field as well as establishing the vision, mission and corporate values for subsidiaries of PT Pupuk Indonesia (Persero) ("Subsidiaries"), as well as general guidelines to meet the interests of all stakeholders. • Assist the President Director in directing, establishing, and controlling the Integrated Management System to serve as a guideline and reference for all Subsidiary management in achieving corporate goals. • Assisting the President Director in the implementation of the company's business continuity to optimize the company's revenue and profit levels and generate benefits for all company stakeholders, in accordance with the company's vision, mission, plans and strategies. • Assist the President Director in directing and establishing policies in the field of human resource management and organizational development in accordance with the development and needs of Subsidiaries to support the achievement of the company's vision, mission and targets. • Assist the President Director in establishing the Long Term Plan, Work Plan and Corporate Budget, assumptions and budget parameters of the Corporation and Subsidiaries, so that the vision and mission of the company are achieved. • Assist the President Director in setting direction and policies, as well as standardization & harmonization in the fields of Finance, Marketing, Logistics and Distribution, Investment, Research and Development, Production & Maintenance, Overhead Cost Calculation, Procurement, Asset Management, Human Resources and Human Capital Management Development for Subsidiaries to run in accordance with the strategy to achieve the company's targets that have been set.

Direksi Board of Directors	Tugas	Tasks
	• Membantu Direktur Utama dalam menentukan arah dan kebijakan program-program peningkatan *capital expenditure* untuk mendukung pengembangan Anak Perusahaan pada taraf yang optimal guna efisiensi perusahaan.	• Assist the President Director in determining the direction and policy of capital expenditure improvement programs to support the development of subsidiaries at an optimal level for company efficiency.
	• Membantu Direktur Utama dalam menetapkan arah dan kebijakan penetapan *Statement of Corporate Intent, Key Performance Indicator* (KPI) bagi Anak Perusahaan serta besaran dividen Anak Perusahaan agar tercipta keadilan dan sinergi yang baik bagi seluruh PT Pupuk Indonesia (Persero) ("Perseroan").	• Assisting the President Director in determining the direction and policy of determining the Statement of Corporate Intent, Key Performance Indicator (KPI) for Subsidiaries and the amount of dividends of Subsidiaries in order to create fairness and good synergy for all PT Pupuk Indonesia (Persero) ("Company").
	• Membantu Direktur Utama dalam melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan maupun Anak Perusahaan untuk menjamin terpenuhinya seluruh kepentingan *stakeholders* perusahaan.	• Assist the President Director in conducting the General Meeting of Shareholders (GMS) of the Company and its Subsidiaries to ensure the fulfillment of all interests of the company's stakeholders.
	• Membantu Direktur Utama dalam memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris dan para pemegang saham serta laporan tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.	• Assist the President Director in providing explanations on all matters asked or requested by members of the Board of Commissioners and shareholders as well as the annual report to the General Meeting of Shareholders.
	• Membantu Direktur Utama dalam membuat laporan tahunan serta laporan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.	• Assist the President Director in preparing annual reports and other reports in accordance with applicable regulations.
	• Membantu Direktur Utama dalam menjalin dan membina hubungan yang baik dan harmonis dengan instansi pemerintahan dan asosiasi profesi yang berkaitan dengan kegiatan usaha utama perusahaan di bidang industri pupuk untuk memastikan keselarasan rencana kerja dan program-program strategis perusahaan.	• Assist the President Director in establishing and maintaining good and harmonious relationships with government agencies and professional associations related to the company's main business activities in the fertilizer industry to ensure the alignment of the company's work plans and strategic programs.
	• Membantu Direktur Utama dalam pelaksanaan Koordinasi dan integrasi program-program Korporasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk memastikan keselarasan rencana kerja dan program-program strategis perusahaan.	• Assist the President Director in the implementation of Coordination and integration of Corporate programs of the Company and its Subsidiaries to ensure the alignment of work plans and strategic programs of the company.
	• Mewakili Perseroan dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan penugasan dari Direktur Utama.	• Represent the Company and carry out other duties in accordance with the assignment of the President Director.

Direksi Board of Directors	**Tugas**	Tasks
Tina T. Kemala Intan Direktur SDM	• Mengarahkan, mengoordinasi, mengawasi, dan bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaan di bawah Direktorat SDM PT Pupuk Indonesia (Persero) ("Perseroan") dan Anak Perusahaan di bidang *Human Capital, Learning & Development Center*, serta *Corporate Services* & PKBL sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKAP maupun rencana jangka panjang sesuai ketentuan yang berlaku. • Mengarahkan, mengoordinasi, mengawasi, dan bertanggung jawab untuk menetapkan arah dan kebijakan *Human Capital* bagi PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan untuk memastikan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang efektif dan efisien serta berorientasi pada produktivitas dan nilai tambah bagi pemegang saham. • Mengarahkan, mengoordinasi, mengawasi, dan bertanggung jawab untuk menetapkan arah dan kebijakan Bidang *Corporate Service* & PKBL bagi PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran bisnis perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. • Mengarahkan, mengoordinasi, mengawasi, dan bertanggung jawab untuk menetapkan arah dan kebijakan Bidang *Learning & Development Center* bagi PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan untuk memastikan proses pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan kebutuhan pengembangan perusahaan untuk mendukung kelancaran bisnis perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang.	• Direct, coordinate, supervise, and be responsible for the tasks and work under the Directorate of HC of PT Pupuk Indonesia (Persero) ("Company") and Subsidiaries in the fields of Human Capital, Learning & Development Center, and Corporate Services & PKBL in accordance with the provisions set out in the RKAP and long-term plans in accordance with applicable regulations. • Directing, coordinating, supervising, and responsible for setting the direction and policy of Human Capital for PT Pupuk Indonesia (Persero) and its subsidiaries to ensure effective and efficient management of Human Resources oriented towards productivity and added value for shareholders. • Directing, coordinating, supervising, and being responsible for setting the direction and policies of the Corporate Service & PKBL Field for PT Pupuk Indonesia (Persero) and its Subsidiaries in accordance with applicable regulations to support the smooth running of the company's business both short and long term. • Directing, coordinating, supervising, and being responsible for setting the direction and policies of the Learning & Development Center for PT Pupuk Indonesia (Persero) and Subsidiaries to ensure the Human Resources development process is in accordance with the company's development needs to support the smooth running of the company's business both short and long term.
Gusrizal Direktur Pemasaran	• Mengarahkan, mengoordinasi, mengawasi, dan bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaan di bawah Direktorat Pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero) di bidang *Strategic Marketing, Logistic Optimation, PSO Management*, dan Pemasaran Komersil sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKAP maupun rencana jangka panjang serta ketentuan Pemerintah. • Mengarahkan, mengoordinasi, mengawasi, dan bertanggung jawab untuk menetapkan arah dan kebijakan di bidang *Strategic Marketing, Logistic Optimation, PSO Management*, dan Pemasaran Komersil PT Pupuk Indonesia (Persero) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran bisnis perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang.	• Direct, coordinate, supervise, and be responsible for the tasks and work under the Marketing Directorate of PT Pupuk Indonesia (Persero) in the fields of Strategic Marketing, Logistic Optimization, PSO Management, and Commercial Marketing in accordance with the provisions set out in the RKAP and long-term plans and government regulations. • Directing, coordinating, supervising, and being responsible for setting directions and policies in the field of Strategic Marketing, Logistic Optimization, PSO Management, and Commercial Marketing of PT Pupuk Indonesia (Persero) in accordance with applicable regulations to support the smooth running of the company's business both short and long term.

Direksi Board of Directors	**Tugas**	Tasks
Bob Indiarto Direktur Produksi	• Mengarahkan, mengoordinasi, mengawasi, dan bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaan di bawah Direktorat Produksi PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan di bidang Produksi dan Pengadaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKAP maupun Rencana Jangka Panjang serta ketentuan pemerintah. • Mengarahkan, mengoordinasi, mengawasi, dan bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaan di bidang Operasi dan Produksi di lingkungan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran bisnis perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. • Mengarahkan, mengoordinasi, mengawasi, dan bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaan di bidang Pengadaan yang mencakup perencanaan pengadaan, pengadaan strategis dan pengadaan operasional di PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran bisnis perusahaan baik jangka pendek maupun jangka Panjang.	• Direct, coordinate, supervise, and be responsible for the tasks and work under the Production Directorate of PT Pupuk Indonesia (Persero) and Subsidiaries in the field of Production and Procurement in accordance with the provisions set out in the RKAP and Long Term Plan and government regulations. • Direct, coordinate, supervise, and be responsible for tasks and work in the field of Operations and Production within the Company and its Subsidiaries to increase productivity and efficiency in accordance with applicable regulations to support the smooth running of the company's business both short and long term. • Direct, coordinate, supervise, and be responsible for tasks and work in the field of Procurement which includes procurement planning, strategic procurement and operational procurement at PT Pupuk Indonesia (Persero) and Subsidiaries in accordance with applicable procedures and regulations to support the smooth running of the company's business both short and long term.

Direksi Board of Directors	Tugas	Tasks
Panji Winanteya Ruky Direktur Transformasi Bisnis	• Mengarahkan, mengoordinasi, mengawasi, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan pekerjaan di bawah Direktorat Transformasi Bisnis PT Pupuk Indonesia (Persero) di bidang Riset, Perencanaan Strategis, Pengelolaan Transformasi Bisnis, Sistem Manajemen Terpadu dan Inovasi, TI serta *project-project Ad Hoc* Transformasi Bisnis untuk Perseroan dan Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKAP maupun rencana jangka panjang serta ketentuan pemerintah.	• Direct, coordinate, supervise, and be responsible for the implementation of tasks and work under the Directorate of Business Transformation of PT Pupuk Indonesia (Persero) in the fields of Research, Strategic Planning, Business Transformation Management, Integrated Management Systems and Innovation, IT and Ad Hoc Business Transformation projects for the Company and its Subsidiaries in accordance with the provisions set out in the RKAP and long-term plans and government regulations.
	• Mengarahkan, mengoordinasi, mengawasi, dan bertanggung jawab untuk menyusun dan menetapkan arah dan kebijakan di bidang TI PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan yang mencakup bidang Perencanaan Strategis dan Tata Kelola TI, Pengembangan TI, Operasional dan Layanan TI sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran bisnis perusahaan baik jangka pendek maupun jangka Panjang.	• Directing, coordinating, supervising, and being responsible for preparing and setting directions and policies in the IT field of PT Pupuk Indonesia (Persero) and its Subsidiaries which include the fields of Strategic Planning and IT Governance, IT Development, IT Operations and Services in accordance with applicable regulations to support the smooth running of the company's business both short and long term.
	• Mengarahkan, mengoordinasi, mengawasi, dan bertanggung jawab untuk menyusun dan menetapkan arah dan kebijakan di bidang Perencanaan Strategis, Pengelolaan Transformasi Bisnis, Sistem Manajemen Terpadu dan Inovasi PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan yang mencakup bidang akuntansi umum dan KPI dan akuntansi biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran bisnis perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang.	• Directing, coordinating, supervising, and being responsible for preparing and setting directions and policies in the field of Strategic Planning, Business Transformation Management, Integrated Management Systems and Innovation of PT Pupuk Indonesia (Persero) and Subsidiaries in accordance with applicable regulations to support the smooth running of the company's business both short and long term.
	• Mengarahkan, mengoordinasi, mengawasi, dan bertanggung jawab untuk menyusun dan menetapkan arah dan kebijakan di bidang Riset mencakup Perencanaan Riset, Riset Teknologi, Riset Produk, serta Riset Kebijakan Pupuk PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran bisnis perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang.	• Directing, coordinating, supervising, and being responsible for preparing and setting directions and policies in the field of Research including Research Planning, Technology Research, Product Research, and Fertilizer Policy Research of PT Pupuk Indonesia (Persero) and its Subsidiaries in accordance with applicable regulations to support the smooth running of the company's business both short and long term.
	• Mengoordinasikan penyusunan arah dan kebijakan *Project-Project Ad-Hoc* Transformasi Bisnis yang dilaksanakan oleh Senior Project Manager ("SPM") untuk PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan.	• Coordinate the preparation of directions and policies for Business Transformation Ad-Hoc Projects carried out by Senior Project Managers ("SPM") for PT Pupuk Indonesia (Persero) and its subsidiaries.

Direksi Board of Directors	**Tugas**	Tasks
Wono Budi Tjahyono Direktur Keuangan & Manajemen Risiko	• Mengarahkan, mengoordinasi, mengawasi, dan bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaan di bawah Direktorat Keuangan & Investasi PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan di bidang Keuangan dan Perbendaharaan, Akuntansi dan Kinerja Korporat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKAP maupun rencana jangka panjang serta ketentuan pemerintah.	• Direct, coordinate, supervise, and be responsible for the tasks and work under the Directorate of Finance & Investment of PT Pupuk Indonesia (Persero) and Subsidiaries in the fields of Finance and Treasury, Accounting and Corporate Performance in accordance with the provisions set out in the RKAP and long-term plans and government regulations.
	• Mengarahkan, mengoordinasi, mengawasi, dan bertanggung jawab untuk menetapkan arah dan kebijakan di bidang Keuangan dan Pendanaan Investasi PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan yang mencakup bidang perbankan dan perbendaharaan, asuransi dan perpajakan, dan verifikasi dan penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran bisnis perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang.	• Directing, coordinating, supervising, and being responsible for setting directions and policies in the field of Finance and Investment Funding of PT Pupuk Indonesia (Persero) and Subsidiaries which include banking and treasury, insurance and taxation, and verification and collection in accordance with applicable regulations to support the smooth running of the company's business both short and long term.
	• Mengarahkan, mengoordinasi, mengawasi, dan bertanggung jawab untuk menetapkan arah dan kebijakan di bidang Akuntansi PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan yang mencakup bidang akuntansi umum dan KPI dan akuntansi biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran bisnis perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang.	• Directing, coordinating, supervising, and being responsible for setting directions and policies in the field of Accounting of PT Pupuk Indonesia (Persero) and Subsidiaries which include general accounting and KPI and cost accounting in accordance with applicable regulations to support the smooth running of the company's business both short and long term.
	• Mengarahkan, mengoordinasi, mengawasi, dan bertanggung jawab untuk menetapkan arah dan kebijakan di bidang Kinerja Korporat PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan yang mencakup bidang pengelolaan, anggaran, pelaporan dan analisis kinerja, serta *Key Performance Indicators* (KPI) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran bisnis perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang.	• Directing, coordinating, supervising, and being responsible for setting directions and policies in the field of Corporate Performance of PT Pupuk Indonesia (Persero) and Subsidiaries which include budget management, performance reporting and analysis, and Key Performance Indicators (KPI) in accordance with applicable regulations to support the smooth running of the company's business both short and long term.

Direksi Board of Directors	Tugas	Tasks
Jamsaton Nababan Direktur Portofolio & Pengembangan Usaha	• Mengarahkan, mengoordinasi, mengawasi dan bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaan di bawah Direktorat Portofolio & Pengembangan Usaha PT Pupuk Indonesia (Persero) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKAP maupun rencana jangka panjang serta ketentuan pemerintah.	• Direct, coordinate, supervise and be responsible for the tasks and work under the Directorate of Portfolio & Business Development of PT Pupuk Indonesia (Persero) in accordance with the provisions set out in the RKAP and long-term plans and government regulations.
	• Mengarahkan, mengoordinasikan, mengawasi dan bertanggung jawab terhadap Proyek-proyek dan Pengembangan Bisnis (investasi pengembangan dan investasi penyertaan) yang menjadi tanggung jawab SEVP Pengembangan Bisnis sesuai dengan *job description* (uraian jabatan), setelah rencana investasi pengembangan dan investasi penyertaan tersebut disetujui oleh Direktur Keuangan & Investasi.	• Direct, coordinate, supervise and be responsible for Projects and Business Development (development investment and investment participation) which are the responsibility of SEVP Business Development in accordance with the job description, after the development investment plan and investment participation are approved by the Director of Finance & Investment.
	• Mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan arah dan kebijakan di bidang Pengembangan PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan sesuai kewenangan Direksi yang mencakup bidang pelaksanaan investasi rutin, pelaksanaan investasi pengembangan, dan pengelolaan investasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran bisnis perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang.	• Coordinate and supervise the implementation of directions and policies in the field of Development of PT Pupuk Indonesia (Persero) and Subsidiaries in accordance with the authority of the Board of Directors which includes the implementation of routine investment, implementation of development investment, and investment management in accordance with applicable regulations to support the smooth running of the company's business both short and long term.
	• Mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan arah dan kebijakan di bidang Portofolio Bisnis PTPI dan Anak Perusahaan sesuai kewenangan Direksi yang mencakup bidang restrukturisasi Anak Perusahaan, dan Afiliasi serta sinergi dan kinerja portofolio afiliasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran bisnis perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang.	• Coordinate and supervise the implementation of directions and policies in the field of Business Portfolio of PTPI and Subsidiaries in accordance with the authority of the Board of Directors which includes the restructuring of Subsidiaries and Affiliates as well as synergies and performance of affiliated portfolios in accordance with applicable regulations to support the smooth running of the company's business both short and long term.

PROGRAM ORIENTASI BAGI DIREKSI

Perusahaan memiliki mekanisme program orientasi bagi anggota Direksi yang baru untuk memastikan bahwa anggota Direksi dapat secepatnya memberikan kontribusi terhadap kinerja Perusahaan. Panduan pelaksanaan program pengenalan bagi anggota Direksi baru telah diatur dalam *Code of Corporate Governance* Perusahaan yang menyatakan bahwa anggota Komisaris dan Direksi yang baru ditunjuk wajib diberikan program pengenalan mengenai Perusahaan dan dilakukan sesegera mungkin setelah pengangkatannya. Program Pengenalan bagi anggota Direksi yang baru mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG;
- Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek

ORIENTATION PROGRAM FOR DIRECTORS

The Company has an orientation program mechanism for new members of the Board of Directors to ensure that they can immediately contribute to the Company's performance. The guidelines for the implementation of the induction program for new members of the Board of Directors have been set out in the Company's Code of Corporate Governance which states that newly appointed members of the Board of Commissioners and Board of Directors must be given an induction program about the Company and carried out as soon as possible after their appointment. The introduction program for new members of the Board of Directors includes the following:

- Implementation of GCG principles;
- An overview of the Company with regard to its purpose, nature and scope of activities, financial and operating performance, strategy, short-term and long-term

dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
- Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
- Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan;
- Penjelasan mengenai *Stakeholders* utama Perusahaan dan tanggung jawab sosial Perusahaan;

business plans, competitive position, risks and other strategic issues;
- Information relating to delegated authority, internal and external audit, internal control systems and policies, including the Audit Committee;
- Information on the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors and matters that are not allowed;
- Understanding of the ethical principles and norms that apply in the Company.

Program pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke unit bisnis, fasilitas Perusahaan, pengkajian dokumen Perusahaan atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan kebutuhan.

The Company introduction program can be in the form of presentations, meetings, visits to business units, Company facilities, review of Company documents or other programs deemed appropriate to the needs.

Untuk tahun 2022, tidak ada pelaksanaan orientasi bagi anggota Direksi baru, mengingat tidak ada perubahan pada komposisi Direksi.

For 2022, there will be no orientation for new Directors, as there is no change in the composition of the Board of Directors.

PELATIHAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI DIREKSI

Kebijakan

Perusahaan memfasilitasi program pengembangan kompetensi bagi Direksi untuk menambah wawasan dan pengetahuan Direksi khususnya terkait pengelolaan Perusahaan serta kepemimpinan.

Realisasi

Pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi Direksi disampaikan pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

TRAINING AND COMPETENCY IMPROVEMENT FOR DIRECTORS

Policy

The Company facilitates competency development programs for the Board of Directors to broaden their knowledge, especially in relation to the management of the Company and leadership.

Realization

The implementation of competency improvement activities for the Board of Directors is presented in the Company Profile chapter of this Annual Report.

PELAKSANAAN TUGAS TAHUN 2022
Task Implementation Year 2022

No	Bidang Field	Program Kegiatan	Program Activity
1	Produksi Production	• Melakukan *Plant Audit* • Melaksanakan program *Maintenance Excellence* • Implementasi *Digital Fertilizer* (*Upgrade* penilaian KPI Pemeliharaan dan *rollout* Fase 1 di Pusri IB, PKG 1A, PKT 1A dan STG PSP) yang terbagi dalam 4 fase • Implementasi rekomendasi dari *self-assessment* PSM • Integrasi CEMS Urea Anper Pupuk ke SISPEK • Sertifikasi *Environmental Product Declaration* (EPD) untuk Anper Pupuk • Pencapaian PROPER Emas 2 Anper, Hijau 2 Anper & Biru	• Conduct Plant Audit • Implement Maintenance Excellence program • Implementation of Digital Fertilizer (Maintenance KPI assessment upgrade and Phase 1 rollout at Pusri IB, PKG 1A, PKT 1A and STG PSP) divided into 4 phases • Implementation of recommendations from PSM self-assessment • Urea Anper Fertilizer CEMS Integration to SISPEK • Environmental Product Declaration (EPD) Certification for Anper Fertilizer • PROPER Achievements Gold 2 Anper, Green 2 Anper & Blue

No	Bidang Field	Program Kegiatan	Program Activity
2	Pengadaan Procurement	• Penyusunan *Roadmap Procurement Excellence* PTPI • Melakukan penyusunan parameter kataloging jasa & melakukan kataloging jasa atau *service* di PI Grup secara bertahap • Peningkatan nilai transaksi menggunakan PADI UMKM • Rencana/*step-step* dari Program Kerja: 1. *Business Understanding*, 2. *Data Understanding*, 3. *Data Preparation*, 4. *Modelling* & *Evaluation*, 5. *Deployment* (Produksi & Pengadaan) • Koordinasi dengan Pengadaan Holding dalam Pemanfaatan Pengadaan Bersama yang PI Grup dalam memperoleh kontinuitas produk dan harga yang paling kompetitif	• Preparation of PTPI Procurement Excellence Roadmap • Conducting the preparation of service cataloging parameters & conducting service cataloging or services in PI Group in stages. • Increased transaction value using PADI UMKM • Plan/steps of the Work Program: 1. Business Understanding, 2. Data Understanding, 3. Data Preparation, 4. Modeling & Evaluation, 5. Deployment (Production & Procurement) • Coordination with Procurement Holding in Utilizing Joint Procurement that PI Group in obtaining product continuity and the most competitive price
3	Distribusi Distribution	• Penggunaan sarana distribusi (gudang) bersama di Jawa dan Sumatera maupun seluruh Indonesia • Penyediaan *Check Weigher* tahap (*recording* timbangan) di lini II/DC • Implementasi SISTRO dan Petroport • Pengembangan sistem *product tracking, fleet* & *transport management* untuk meningkatkan ketepatan waktu dan sasaran distribusi • Digitalisasi Pergudangan sehingga dapat terintegrasi dan ter-*monitoring* secara *realtime*	• Use of shared distribution facilities (warehouses) in Java and Sumatra as well as throughout Indonesia • Provision of Check Weigher stage (recording scales) in line II/DC • SISTRO and Petroport Implementation • Development of product tracking, fleet & transport management systems to improve timeliness and distribution targets • Digitalization of Warehousing so that it can be integrated and monitored in real time
4	Pemasaran Marketing	• *Commercial Transformation* (KAM 1,46 juta ton) serta harmonisasi harga dan rayonisasi • Pemutakhiran *Web commerce* (WCM) Komersil B2B • Meningkatkan sinergi dengan klaster industri lainnya dan pendekatan KAM kepada pelanggan besar • Optimasi program sinergi dan *circular economy* anak perusahaan sehingga memberikan nilai tambah dan efisiensi bagi perusahaan • Implementasi *Retail Management* dengan penjualan pupuk 523.500 ton • *Performance based Benefit Model* berupa *royalty point, cash back*, bonus/insentif dan *extra margin* bagi distributor/kios • Program *launch* kios #PastiAda 1.800 kios untuk memastikan ketersediaan produk di *retailer* • Implementasi Program Makmur di 250.000 Ha setara dengan penjualan pupuk non subsidi sebesar 125.000 ton, melalui sinergi kerja dengan BUMN seperti PTPN, RNI dan Perhutani untuk peningkatan produktivitas pada beberapa komoditas strategis seperti padi, jagung, tebu, sawit dan kopi • Koordinasi dengan Pemasaran *Holding* dalam pemanfaatan jaringan distribusi dan pelanggan yang dimiliki oleh PI Grup	• Commercial Transformation (KAM 1.46 million tons) as well as price harmonization and rayonization • B2B Commercial Web commerce (WCM) Update • Enhance synergy with other industry clusters and KAM approach to large customers • Optimization of synergy and circular economy programs of subsidiaries so as to provide added value and efficiency for the company • Implementation of Retail Management with fertilizer sales of 523,500 tons • Performance based Benefit Model in the form of royalty points, cash back, bonuses/ incentives and extra margins for distributors/ kiosks • Kiosk launch program #PastiAda 1,800 kiosks to ensure product availability at retailers • Implementation of the Makmur Program in 250,000 Ha is equivalent to the sale of 125,000 tons of non-subsidized fertilizers, through synergies with SOEs such as PTPN, RNI and Perhutani to increase productivity in several strategic commodities such as rice, corn, sugar cane, palm oil and coffee • Coordination with Holding Marketing in utilizing the distribution network and customers owned by PI Group

No	Bidang Field	Program Kegiatan	Program Activity
5	Pengembangan Bisnis Business Development	• Detail kajian pelaksanaan klasterisasi, struktur bisnis dan *roadmap* implementasi dari aspek *financial*, legal, dan pajak dengan target penyelesaian akhir Q2 2022 • Keputusan skema klasterisasi terbaik dengan target Q3 2022 • Penawaran dan sosialisasi dengan *stakeholder*/mitra pemegang saham terkait dengan target Q3 2022 • Pelaksanaan valuasi saham/*due diligence*/ kajian lainnya dengan target Q4 2022 • Negosiasi dengan mitra pemegang saham dengan target Q4 2022 • Terbentuknya 5 klasterisasi dengan 12 entitas dilikuidasi/divestasi sehingga total dari 62 perusahaan menjadi 52 perusahaan • Penguatan struktur permodalan Anper non pupuk yang disertai dengan kajian kelayakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku • Pelaksanaan sinergi anper • Optimalisasi pabrik yang kurang efisien dan pengembangan kapasitas melalui digitalisasi/*revamp* dan/atau pembangunan pabrik baru • Pembangunan Soda Ash PKG Kaltim Amonium Nitrat, Katalis Merah Putih	• Detailed study of clusterization implementation, business structure and implementation roadmap from financial, legal, and tax aspects with a target completion date of Q2 2022. • Best clustering scheme decision with target Q3 2022 • Bidding and socialization with stakeholders/ shareholder partners related to Q3 2022 target • Implementation of share valuation/due diligence/other studies with target Q4 2022 • Negotiation with shareholder partner with target Q4 2022 • The formation of 5 clusters with 12 entities liquidated/divested, bringing the total from 62 companies to 52 • Strengthening Anper's non-fertilizer capital structure accompanied by a feasibility study in accordance with applicable regulations • Implementation of anper synergy • Optimization of less efficient plants and capacity expansion through digitalization/ revamp and/or construction of new plants • Development of East Kalimantan PKG Soda Ash Ammonium Nitrate, Red and White Catalysts
6	Riset Research	• *Controlled release fertilizer* • *Advance Biofertilizer* • Mikroba Pengikat N • Studi Teknologi NPK • *Nutrient Uptake* • Sistem rekomendasi pemupukan • Riset dalam Penyusunan Kajian Perspektif dan Tingkat Kesiapan Petani Indonesia terhadap *Sustainable Agriculture* • Riset Antropologi untuk Membangun *Engagement* dengan Komunitas Petani Kunci menuju Perusahaan *Custom Centric* • *White Paper, Policy Brief*, dan *Briefing Notes* • *Roadmap* Riset Klaster Pupuk • Menentukan *baseline* emisi karbon • Identifikasi program yang berpotensi menurunkan emisi karbon • *Benchmarking* implementasi teknologi penurunan emisi karbon • Menyusun program prioritas dekarbonisasi berbasis *Marginal Abatement Cost Curve* (MACC) • Menyusun *roadmap* dan target penurunan emisi karbon hingga tahun 2060	• Controlled release fertilizer • Advance Biofertilizer • N-fixing Microbes • NPK Technology Study • Nutrient Uptake • Fertilizer recommendation system • Research in the Preparation of a Study on Perspectives and Readiness Levels of Indonesian Farmers for Sustainable Agriculture • Anthropological Research to Build Engagement with Farmer Communities Key to a Custom Centric Company • White Paper, Policy Brief, and Briefing Notes • Fertilizer Cluster Research Roadmap • Determine carbon emission baseline • Identify programs that have the potential to reduce carbon emissions • Benchmarking of carbon emission reduction technology implementation • Develop a decarbonization priority program based on the Marginal Abatement Cost Curve (MACC). • Develop roadmap and carbon emission reduction target until 2060

No	Bidang Field	Program Kegiatan	Program Activity
7	Sumber Daya Manusia (SDM) Human Capital (HC)	• *Review* Kamus *Soft Competency* • *Review* Kamus *Hard Competency* • Melakukan efisiensi biaya SDM dengan memperhatikan *best practice* dan standar industri serta efektivitas biaya SDM untuk mendorong produktivitas • Implementasi standardisasi manajemen talenta di PI Grup • Pelaksanaan Program *Top Talent Millenial* dan Perempuan dalam *Nominated Talent* • Program *employee exchange* PI Grup • Implementasi strandardisasi manajemen kinerja (KPI Individu karyawan yang sejalan dengan KPI Korporat) • Pemenuhan data Pengurus BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan Perusahaan Afiliasi Terkonsolidasi BUMN serta *Talent Pool* pada portal *Human Capital* BUMN • Evaluasi struktur remunerasi berdasarkan *levelling* jabatan PTPI • Implementasi kenaikan Gaji Pokok berdasarkan penilaian Kinerja (KPI) dan Penilaian 360 di seluruh Anak Perusahaan • Mempersiapkan *blue print* pemenuhan amanat Undang-undang No. 8 Tahun 2016 dalam hal mempekerjakan minimal 2% dari penyandang disabilitas • Melakukan proses rekrutmen secara mandiri atau rekrutmen bersama bagi para penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan rekrutmen di PI Grup	• Review of Soft Competency Dictionary • Hard Competency Dictionary Review • Conduct HR cost efficiency by taking into account best practices and industry standards as well as HR cost effectiveness to drive productivity. • Implementation of talent management standardization in PI Group • Implementation of Top Talent Millennial and Women in Nominated Talent Program • PI Group employee exchange program • Implementation of performance management standardization (Individual employee KPIs in line with Corporate KPIs) • Fulfillment of data on BUMN Management, BUMN Subsidiaries, and BUMN Consolidated Affiliated Companies and Talent Pool on the BUMN Human Capital portal • Evaluation of remuneration structure based on PTPI position levelling • Implementation of Base Salary increase based on Performance Assessment (KPI) and 360 Assessment in all Subsidiaries • Prepare a blue print to fulfill the mandate of Law No. 8/2016 in terms of employing at least 2% of people with disabilities. • Conduct an independent recruitment process or joint recruitment for persons with disabilities in accordance with the recruitment provisions in PI Group.
8	Manajemen Risiko Risk Management	• Lanjutan Pengembangan *Business Continuity Management* (BCM) yaitu tahapan Pengembangan *Business Continuity Plan* (BCP) di PT PI • Pengembangan *Business Continuity Management* (BCM) di 6 Anak Perusahaan • Menyelenggarakan penilaian tingkat maturitas manajemen risiko di PT PI Grup • Melaporkan kinerja pengelolaan Risiko Utama secara periodik melalui Laporan Manajemen Triwulanan	• Continued Development of Business Continuity Management (BCM), namely the stages of developing a Business Continuity Plan (BCP) at PT PI • Development of Business Continuity Management (BCM) in 6 Subsidiaries • Organizing risk management maturity level assessments at PT PI Group • Reporting the performance of Key Risk management periodically through the Quarterly Management Report.
9	Keuangan dan Akuntansi Finance and Accounting	• Implementasi aplikasi PSAK 71 yang terintegrasi dengan SAP dan aplikasi pendukung di luar SAP • Penyusunan kebijakan rekonsiliasi fiskal Anper produsen pupuk. Pengembangan Aplikasi Integrasi Data Perpajakan *Host to Host* PPN • Melaksanakan *Focus Grup Discussion* lingkungan Grup bersama dengan instansi pemerintah perumus kebijakan pemberian insentif fiskal • *Monitoring* Proses Pengajuan dan Pemanfaatan Fasilitas Insentif Fiskal • Pengembangan Aplikasi *Vendor Invoice Management* (VIM) Fase 2 • Menerbitkan sisa obligasi berkelanjutan II pada tahun 2022 • Menerbitkan obligasi baru dan/atau sukuk dan/atau instrumen pasar modal lainnya untuk membantu optimalisasi *capital structure* PI Grup	• Implementation of PSAK 71 applications that are integrated with SAP and supporting applications outside SAP • Preparation of Anper fiscal reconciliation policy for fertilizer producers. Development of Host to Host VAT Tax Data Integration Application • Conducting Focus Group Discussions on the Group's environment together with government agencies formulating fiscal incentive policies • Monitoring the Process of Submission and Utilization of Fiscal Incentive Facilities • Development of Vendor Invoice Management (VIM) Application Phase 2 • Issuing the remaining sustainable bonds II in 2022 • Issuing new bonds and/or sukuk and/or other capital market instruments to help optimize the Group's PI capital structure

No	Bidang Field	Program Kegiatan	Program Activity
		• Penjajakan opsi *buyback* obligasi (pelunasan dipercepat) seri tertentu berdasarkan kebutuhan PT PI dan anak perusahaan • Melakukan *annual rating* dari *independent rating agency* • Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan *stakeholder* bidang keuangan antara lain: Investor, perbankan, OJK, KSEI, Wali Amanat, IDX, dll • Pengelolaan Fasilitas KMK PI Grup • Negosiasi dengan perbankan terkait *term & condition* yang *favourable* bagi PI Grup • Memberikan masukan dan *review* atas rencana investasi anak perusahaan, khususnya struktur pendanaan • Koordinasi terpusat untuk pendanaan proyek investasi • Persiapan dari berbagai aspek untuk mendorong *Unlock Value* Pupuk Kalimantan Timur. Opsi pelaksanaan IPO menyelaraskan kajian *unlock value* dan kondisi pasar • Melakukan kajian secara internal dan/atau eksternal untuk mendukung program kerja bidang keuangan • Membantu memperbaiki kondisi keuangan Rekind dalam rangka restrukturisasi • Membantu memperbaiki kondisi keuangan Anak Perusahaan secara umum • Penyelesaian Sistem *Host to Host*. (*outgoing payment* dengan 3 perbankan) • Sikronisasi sistem *Host to Host*, SAP dengan *vendor invoice management* • Melaksanakan *monitoring* dan mitigasi risiko fluktuasi kurs dengan opsi *natural Hedging* dan *Hedging* perbankan • Penyusunan aplikasi pelaporan pinjaman & *financial covenant* • *Monitoring* berkala terkait kesehatan keuangan (*financial covenant*) anak perusahaan • Koordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait optimalisasi DIPA tahun 2022 • Koordinasi dengan Kemenkeu terkait penerbitan revisi DIPA tahun 2022 • Koordinasi dengan Tim TI dan SPM terkait untuk pembuatan sistem • Pengadaan bersama asuransi PI Grup • Mengembangkan sistem informasi terintegrasi antar perusahaan di PI Grup untuk kegiatan penyusunan dan pengendalian anggaran serta proyeksi keuangan • Lanjutan pengembangan *enterprise performance management system* melalui KPI *Review* dan *Refinement* serta lanjutan Digitalisasi KPI hingga Unit Kerja PI Grup • Mendukung program pengembangan sistem perusahaan dan KBUMN • Penyempurnaan Pedoman Pengelolaan KPI PI Group sesuai dengan 5 (lima) prioritas strategis Kementerian BUMN khususnya di level korporasi PI Group	• Exploration of bond buyback options (accelerated repayment) of certain series based on the needs of PT PI and its subsidiaries. • Conduct annual rating from independent rating agency • Communicate and coordinate with financial stakeholders, among others: Investors, banks, OJK, KSEI, Trustee, IDX, etc. • KMK PI Group Facility Management • Negotiation with banks on favorable terms & conditions for PI Group. • Provide input and review of subsidiaries' investment plans, especially the funding structure. • Centralized coordination for investment project funding • Preparation from various aspects to encourage Unlock Value Pupuk Kalimantan Timur. IPO implementation options harmonize unlock value studies and market conditions • Conduct internal and/or external studies to support the finance work program • Helped improve Rekind's financial condition in the context of restructuring • Helping to improve the general financial condition of the Subsidiary • Host to Host System Settlement. (outgoing payment with 3 banks) • Host to Host system synchronization, SAP with vendor invoice management • Implement monitoring and mitigation of exchange rate fluctuation risk with natural hedging and banking hedging options. • Development of loan & financial covenant reporting application • Periodic monitoring of the financial health (financial covenants) of subsidiaries • Coordination with the Ministry of Agriculture regarding the optimization of DIPA in 2022 • Coordination with Kemenkeuter regarding the issuance of revised DIPA for 2022 • Coordination with IT Team and related SPM for system creation • PI Group insurance co-procurement • Develop an integrated information system between companies in PI Group for budget preparation and control activities as well as financial projections. • Continued development of enterprise performance management system through KPI Review and Refinement and continued Digitalization of KPIs to PI Group Work Unit. • Support company and KBUMN system development programs • Improvement of PI Group KPI Management Guidelines in accordance with the 5 (five) strategic priorities of the Ministry of SOEs, especially at the PI Group corporate level.

No	Bidang Field	Program Kegiatan	Program Activity
		• Mengembangkan *performance dashboard* untuk evaluasi dan pengambilan keputusan manajemen • Pemberian Uang Muka dan Pelunasan atas Pembelian Aset Tanah dan Gedung Kalibata PT Rekayasa Industri dalam rangka Restrukturisasi PT Rekayasa Industri • pelaksanaan *bridging facility* pinjaman bank ke PT Rekayasa Industri dalam rangka restrukturisasi dan penyelesaian proyek Jambaran Tiung Biru (JTB) dengan menyediakan jaminan deposito kepada bank • Pemberian dukungan dalam mencari alternatif-alternatif instrumen pendanaan yang kompetitif dalam menunjang *trading* yang ditugaskan	• Developed performance dashboard for evaluation and management decision making • Provision of Advances and Repayment of Purchase of Land and Kalibata Building Assets of PT Rekayasa Industri in the context of Restructuring PT Rekayasa Industri • implementation of bridging facility of bank loan to PT Rekayasa Industri for restructuring and completion of Jambaran Tiung Biru (JTB) project by providing deposit guarantee to the bank. • Provision of support in seeking alternative competitive funding instruments in support of assigned trades
10	Teknologi Informasi Information Technology	• Peningkatan Kapasitas Server & Infrastruktur • Pengembangan sistem untuk mendukung transformasi bisnis perusahaan • Pengembangan Sistem untuk mendukung Program Strategis Perusahaan • Optimalisasi ERP • Asesmen dan penyusunan *Roadmap* Transformasi Industri 4.0 • Lanjutan Implementasi *Data Science* • Peningkatan IT *Maturity* PTPI berbasis Cobit 2019 • *Assessment* Indeks KAMI (Keamanan Informasi) berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001	• Server Capacity & Infrastructure Improvement • System development to support the company's business transformation • System Development to support the Company's Strategic Programs • ERP Optimization • Assessment and preparation of Industry 4.0 Transformation Roadmap • Continued Data Science Implementation • PTPI IT Maturity Improvement based on Cobit 2019 • Assessment of OUR Index (Information Security) based on SNI ISO/IEC 27001 criteria
11	Sekretariat, Hukum, dan Tata Kelola Secretariat, Legal and Governance	• Pengembangan aplikasi *Digital Office* Lanjutan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Kesekretariatan • Pengelolaan arsip/dokumen perusahaan • Mengembangkan Sistem Manajemen Kepatuhan SNI ISO 37301:2021 • Menyelenggarakan GCG *Assessment* PI Grup dengan melibatkan Asesor Eksternal (Eksternal *Assessment*) • Melaksanakan Evaluasi atas Implementasi *Fraud Control System* (FCS) PI Grup • Melaksanakan Audit Sistem Manajemen Internal (ASMI) dan *Surveillance* SNI ISO 37001:2016 SMAP • Melaporkan pengembangan penanganan kasus hukum perusahaan dalam Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan	• Development of Advanced Digital Office applications to support the implementation of Secretarial activities • Management of company archives/documents • Developing SNI ISO 37301:2021 Compliance Management System • Organizing GCG Assessment PI Group by involving External Assessors (External Assessment) • Evaluating the Implementation of PI Group's Fraud Control System (FCS) • Carry out Internal Management System Audit (ASMI) and Surveillance SNI ISO 37001: 2016 SMAP • Report on the development of the company's legal case handling in the Quarterly and Annual Management Report

No	Bidang Field	Program Kegiatan	Program Activity
12	Komunikasi Korporat Corporate Communication	• Melakukan kegiatan *media engagement* secara rutin untuk meningkatkan pengetahuan media tentang perusahaan • Melakukan kerja sama pemberitaan dengan media-media *top tier* • Melakukan *expose corporate action* perusahaan • Melakukan kegiatan *agenda setting* dengan perkembangan isu • Pemanfaatan karyawan sebagai sosial media *ranger* Perusahaan • Melakukan kolaborasi konten dengan KOL serta kolaborasi konten media sosial secara berkala sesuai perkembangan isu • Penyusun kanal komunikasi digital untuk pemberitaan PT PI Grup • Menyelenggarakan program internal PI Grup untuk *employee branding* • Melakukan koordinasi rutin dengan *stakeholder* dalam rangka membina hubungan baik dan mengetahui harapan *stakeholder* • Melakukan kegiatan promosi bersama, baik dalam bentuk *above the line* maupun *below the line*	• Conduct regular media engagement activities to increase media knowledge about the company • Conduct news cooperation with top tier media • Exposing the company's corporate actions • Conduct agenda setting activities with issue development • Utilization of employees as the Company's social media ranger • Conduct content collaboration with KOL and social media content collaboration periodically according to the development of issues • Compilation of digital communication channels for PT PI Group's news coverage • Organized PI Group's internal program for employee branding. • Conduct regular coordination with stakeholders in order to foster good relations and know stakeholder expectations. • Conduct joint promotional activities, both in the form of above the line and below the line
13	Perencanaan Strategis Strategic Planning	• Mengoordinasikan dan menyusun rancangan rencana strategis perusahaan dan anak perusahaan untuk mendukung pencapaian target perusahaan mengacu pada RJPP yang telah ditetapkan Kementerian BUMN • Melakukan identifikasi dan kajian mengenai inisiatif strategis yang memerlukan implementasi program kerja baru ataupun lanjutan • Melakukan identifikasi dan perencanaan terhadap penyelesaian isu-isu yang muncul sebagai dampak transformasi bisnis perusahaan • Menyusun *Project charter* untuk *Project-Project ad hoc* yang baru	• Coordinate and draft strategic plans for the company and its subsidiaries to support the achievement of company targets referring to the RJPP set by the Ministry of SOEs. • Identify and review strategic initiatives that require the implementation of new or continued work programs. • Identify and plan for the resolution of issues that arise as a result of the company's business transformation. • Develop Project charters for new ad hoc Projects
14	Pengelolaan Transformasi Bisnis Business Transformation Management	• *Continuous monitoring* dan *activist* PMO *Ad Hoc* transformasi bisnis PT PI Grup	• Continuous monitoring and activist PMO Ad Hoc business transformation PT PI Group

No	Bidang Field	Program Kegiatan	Program Activity
15	Sistem Manajemen Terpadu & Inovasi Integrated Management System & Innovation	• Pelatihan Metode Inovasi • *Sharing knowledge* inovasi • *Benchmark* inovasi • Pembentukan tim inovasi di 25 (dua puluh lima) kompartemen • Konvensi Inovasi PTPI • Konvensi Inovasi PI Grup • Mengirimkan Tim Inovasi ke Konvensi Inovasi Nasional • Mengirimkan Tim Inovasi ke Konvensi Inovasi Internasional • Evaluasi perubahan proses bisnis dan ketentuan eksternal lainnya • Audit Sistem Manajemen Mutu Internal • Rapat Tinjauan Manajemen • Audit Sistem Manajemen Mutu oleh Lembaga Sertifikasi • *Assessment* Sistem Manajemen Anak Perusahaan • Rekomendasi Perbaikan Sistem Manajemen • *Monitoring* tindak lanjut rekomendasi • Pelatihan *Baldrige Excellence Framework* • Penyusunan Dokumen Aplikasi BEF • Pelaksanaan Asesmen Kinerja Unggul • Tindaklanjut OFI (*Opportunities for Improvement*) hasil asesmen ke AFI (*Action For Improvement*)	• Innovation Method Training • Sharing knowledge of innovation • Benchmark innovation • Establishment of innovation teams in 25 (twenty five) compartments • PTPI Innovation Convention • PI Group Innovation Convention • Submitting an Innovation Team to the National Innovation Convention • Sending an Innovation Team to an International Innovation Convention • Evaluation of business process changes and other external requirements • Internal Quality Management System Audit • Management Review Meeting • Quality Management System Audit by Certification Body • Assessment of Subsidiary Management System • Management System Improvement Recommendations • Monitoring the follow-up of recommendations • Baldrige Excellence Framework Training • Preparation of BEF Application Document • Implementation of the Superior Performance Assessment • Follow-up OFI (Opportunities for Improvement) assessment results to AFI (Action For Improvement)
16	Satuan Pengawasan Intern Internal Audit Unit	• Optimalisasi *Audit Management System* (AMS) • *Joint Audit* atas proses bisnis Pupuk Indonesia Grup yang memiliki risiko tinggi secara konsolidasi • Melaporkan dalam Laporan Manajemen Semesteran mengenai tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPKP, dan KAP • Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan berdasarkan Pedoman *Subsidiary Governance* dan Pedoman/ Prosedur di Unit Kerja • Berkoordinasi dengan Unit Kerja TKK & MR dalam pengembangan *Fraud Control Plan* (FCP), dan WBS terintegrasi	• Optimization of Audit Management System (AMS) • Joint Audit of Pupuk Indonesia Group's high-risk business processes on a consolidated basis • Reporting in the Semi-Annual Management Report on the follow-up of recommendations from BPK, BPKP, and KAP audit results. • Evaluate the implementation of Corporate Governance based on Subsidiary Governance Guidelines and Guidelines/ Procedures in the Work Unit. • Coordinate with TKK & MR Work Unit in the development of Fraud Control Plan (FCP), and integrated WBS.

PENILAIAN KINERJA KOMITE PENDUKUNG DIREKSI

Direksi dibantu oleh 3 (tiga) komite dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Perusahaan, yaitu Komite Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Komite KPI dan Komite Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dipimpin oleh Direktur yang sesuai dengan bidangnya. Direksi melakukan penilaian terhadap komite-komite di bawah Direksi berdasarkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan, yaitu partisipasi kehadiran dalam rapat yang diadakan.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF BOARD OF DIRECTORS COMMITTEES

The Board of Directors is assisted by 3 (three) committees in carrying out its duties and responsibilities in managing the Company, namely the Company's Work Plan and Budget (RKAP) Committee, KPI Committee and the Human Resources Development Committee, which are led by Directors in accordance with their fields. The Board of Directors conducts an assessment of the committees under the Board of Directors based on the implementation of the duties and responsibilities that have been determined, namely attendance participation in meetings held.

Direksi menilai bahwa di tahun 2022, pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan rapat yang dilakukan oleh komite-komite tersebut telah berjalan dengan baik dan efektif. Hasil rapat komite dapat membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

The Board of Directors considers that in 2022, the implementation of duties, responsibilities and meetings conducted by these committees has run well and effectively. The results of committee meetings can assist the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors.

PENILAIAN DAN DASAR PENILAIAN ATAS KINERJA ORGAN PENDUKUNG DIREKSI

Direksi secara berkala juga melakukan penilaian atas kinerja organ pendukung Direksi, yaitu Sekretaris Perusahaan dan Audit Internal. Penilaian kedua organ pendukung Direksi tersebut berdasarkan *Key Performance Indicators* (KPI) yang telah ditetapkan. Evaluasi dan penilaian juga dilakukan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawasan Intern

PERFORMANCE ASSESSMENT OF BOARD OF DIRECTORS SUPPORTING ORGANS

The Board of Directors also periodically assesses the performance of the Board of Directors' supporting organs, namely the Corporate Secretary and Internal Audit. The assessment of the two supporting organs of the Board of Directors is based on the Key Performance Indicators (KPI) that have been determined. Evaluation and assessment are also carried out based on the results of the implementation of the duties and responsibilities of the Corporate Secretary and Internal Audit.

PENILAIAN KINERJA SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan membantu Direksi dalam memperlancar hubungan atau menjembatani kepentingan antara Perusahaan dengan pihak eksternal atau stakeholders sebagai Pejabat Penghubung, melaksanakan fungsi implementasi GCG, komunikasi korporat, serta administrasi dokumen kebijakan dan notulensi rapat guna turut menjaga citra Perusahaan dan mewakili Direksi dalam setiap kegiatan komunikasi eksternal. Sekretaris Perusahaan dipimpin oleh SVP Sekretaris Perusahaan yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011.

Di sepanjang tahun 2022, berdasarkan KPI dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi menilai bahwa Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Adapun aspek KPI Sekretaris Perusahaan, sebagai berikut:

CORPORATE SECRETARY PERFORMANCE ASSESSMENT

The Corporate Secretary assists the Board of Directors in facilitating relationships or bridging interests between the Company and external parties or stakeholders as a Liaison Officer, carrying out GCG implementation functions, corporate communications, as well as administration of policy documents and meeting minutes to help maintain the Company's image and represent the Board of Directors in any external communication activities. The Corporate Secretary is led by SVP Corporate Secretary who is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners in accordance with the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-01/MBU/2011.

Throughout 2022, based on the KPIs and the implementation of its duties and responsibilities, the Board of Directors assessed that the Corporate Secretary has performed its duties and responsibilities well. The KPI aspects of the Corporate Secretary are as follows:

KPI SEKRETARIS PERUSAHAAN
Company Secretary KPIs

Perspektif BSC BSC Perspective	No	Key Performance Indicators (KPI)	
Financial	1	*Cost Leadership* a. Realisasi Biaya Rutin b. Gap Biaya Strategis	Cost Leadership a. Routine Cost Realization b. Strategic Cost Gap
	2	Pemulihan Provisi Piutang Usaha PI Group	Recovery of PI Group Accounts Receivable Provision
Customer	3	Internal Customer Satisfaction Index (ICSI)	Internal Customer Satisfaction Index (ICSI)
	4	Skor Asesmen GCG PI Group a. PI Holding b. Anak Perusahaan PI Group	PI Group GCG Assessment Score a. PI Holding b. PI Group Subsidiary
	5	Penanganan Permasalahan Hukum PI Group	PI Group Legal Issues Handling
Internal Business Process	6	Pencapaian Program Kerja Kompartemen	Achievement of Compartment Work Program
	7	Pelaksanaan RUPS Tahunan PI Group	Implementation of PI Group AGM
	8	Pemenuhan SLA Reviu Dokumen Legal	SLA Fulfillment Legal Document Review
Learning & Growth	9	Pengembangan *Employee Excellence* a. Peningkatan Kompetensi Inti b. Peningkatan *Employee Engagement Index*	Employee Excellence Development a. Core Competency Improvement b. Improved Employee Engagement Index

PENILAIAN KINERJA SATUAN PENGAWASAN INTERN

Satuan Pengawasan Intern (SPI) membantu Direksi dalam melaksanakan audit internal Perusahaan guna menilai efektivitas sistem pengendalian internal, pengelolaan risiko dan proses tata kelola Perusahaan serta memberikan saran perbaikan. SPI dipimpin oleh SVP Satuan Pengawasan Intern yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011.

Di sepanjang tahun 2022, berdasarkan KPI dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi menilai bahwa SPI telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Adapun aspek KPI SPI, sebagai berikut:

INTERNAL AUDIT PERFORMANCE ASSESSMENT

The Internal Audit Unit (SPI) assists the Board of Directors in conducting internal audits of the Company to assess the effectiveness of the Company's internal control system, risk management and governance processes and provide suggestions for improvement. SPI is led by the SVP of Internal Audit who is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners in accordance with the Regulation of the Minister of SOEs: PER-01/MBU/2011.

Throughout 2022, based on the KPIs and the implementation of its duties and responsibilities, the Board of Directors assessed that SPI has carried out its duties and responsibilities well. The KPI aspects of SPI are as follows:

Perspektif BSC BSC Perspective	No	Key Performance Indicators (KPI)	
Financial	1	*Cost Leadership* a. Realisasi Biaya Rutin terhadap RKAP b. Gap Biaya Strategis terhadap RKAP	Cost Leadership a. Routine Cost Realization against RKAP b. Strategic Cost Gap against RKAP
	2	Nilai Koreksi Audit Negatif terhadap Laba	Negative Audit Correction Value to Earnings

Perspektif BSC BSC Perspective	No	Key Performance Indicators (KPI)	
Customer	3	*Internal Customer Satisfaction Index* (ICSI)	Internal Customer Satisfaction Index (ICSI)
	4	Laporan Keuangan *Audited*	Audited Financial Statements
	5	Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit Eksternal	Completion of Follow-up on External Audit Findings
Internal Business Process	6	Pencapaian Program Kerja Kompartemen	Achievement of Compartment Work Program
	7	Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit Internal	Completion of Follow-up of Internal Audit Findings
	8	Penyelesaian Isu Strategis PI Group	PI Group Strategic Issue Resolution
Learning & Growth	9	Pengembangan *Employee Excellence* a. Peningkatan Kompetensi Inti b. Peningkatan *Employee Engagement Index*	Employee Excellence Development a. Core Behavior Competency Improvement b. Improved Employee Engagement Index

Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi

Transparency of Information about the Board of Commissioners and Directors

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan mengacu pada kebijakan *Board Manual*, yang telah mengatur kriteria bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Secara umum, kebijakan tersebut mendorong terpilihnya orang-orang dari latar belakang yang beragam untuk mengisi posisi manajemen, eksekutif, dan karyawan.

Pemegang Saham menetapkan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dengan memerhatikan unsur keberagaman, baik dari sisi pendidikan, pengalaman kerja dan usia. Penetapan komposisi ini juga memperhatikan kebutuhan Perusahaan, khususnya bidang usaha bagi setiap Direksi. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang baik.

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan per 31 Desember 2022 dijabarkan sebagai berikut:

DIVERSITY OF BOARD COMPOSITION

The diversity of the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors refers to the Board Manual policy, which has set criteria for members of the Board of Commissioners and Board of Directors.

In general, the policy encourages the selection of people from diverse backgrounds to fill management, executive and employee positions.

The Shareholders determine the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors by taking into account the elements of diversity, both in terms of education, work experience and age. The determination of this composition also takes into account the needs of the Company, especially the business field for each Director. All members of the Board of Commissioners and Board of Directors have integrity, competence and good reputation.

The diversity of the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as of December 31, 2022 is described as follows:

Nama Name	Kewarganegaraan Citizenship	Gender	Usia Age	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Profesional Professional Experience	Keahlian Expertise
Dewan Komisaris | Board of Commissioners						
Darmin Nasution	Indonesia	Laki-laki Male	74	Doktor Ilmu Ekonomi Doctor of Economics	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Coordinating Minister for Economic Affairs	Ekonomi Makro dan Moneter Macro-economics and Monetary
Farhat Brachma	Indonesia	Laki-laki Male	46	Sarjana Teknik Kimia Bachelor of Chemical Engineering	Staf Ahli Wakil Presiden RI Expert Staff to the Vice President of the Republic of Indonesia	Teknik Kimia Chemical Engineering
Suwandi	Indonesia	Laki-laki Male	63	Doktor Pengelolaan SDA dan Lingkungan Doctor of Natural Resources and Environmental Management	Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Director General of Food Crops, Ministry of Agriculture	Manajemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan Natural Resources and Environmental Management
Febrio Nathan Kacaribu	Indonesia	Laki-laki Male	44	Doktor Ilmu Ekonomi Doctor of Economics	Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Head of the Fiscal Policy Agency of the Ministry of Finance	Kebijakan dan Pengelolaan Fiskal Fiscal Policy and Management
Ari Dwipayana	Indonesia	Laki-laki Male	50	Doktor Ilmu Politik Doctor of Political Science	Staf Khusus Presiden RI Special Staff to the President of the Republic of Indonesia	Kebijakan Politik dan Sosial Political and Social Policy
Mustoha Iskandar	Indonesia	Laki-laki Male	62	Doktor Manajemen Bisnis Doctor of Business Management	Direktur Utama Perum Perhutani President Director of Perum Perhutani	Manajemen Perusahaan Company Management
Anhar Adel	Indonesia	Laki-laki Male	63	Sarjana Administrasi Negara Bachelor of Public Administration	Sekretaris Utama BKPM Principal Secretary of BKPM	Administrasi Negara State Administration
Anwar Sanusi	Indonesia	Laki-laki Male	54	Doktor Studi Kebijakan dari National Graduate Institute for Po Doctor of Policy Studies from the National Graduate Institute for Po	Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Secretary General of the Ministry of Manpower	Strategi dan Ilmu Kebijakan Strategy and Policy Science
Direksi | Board of Directors						
Bakir Pasaman	Indonesia	Laki-laki Male	61	Doktoral Administrasi Bisnis Doctoral of Business Administration	Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur President Director of PT Pupuk Kalimantan Timur	Administrasi Bisnis Business Administration

Nama Name	**Kewarganegaraan** Citizenship	**Gender**	**Usia** Age	**Latar Belakang Pendidikan** Educational Background	**Pengalaman Profesional** Professional Experience	**Keahlian** Expertise
Nugroho Christijanto	Indonesia	Laki-laki Male	54	Magister Manajemen Bisnis dan Administrasi Teknologi Master of Business Management and Technology Administration	Plt. Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia Logistik Acting. President Commissioner of PT Pupuk Indonesia Logistik	Manajemen Bisnis dan Administrasi Teknologi Business Management and Technology Administration
Tina T Kemala Intan	Indonesia	Perempuan Female	63	Sarjana Psikologi Bachelor of Psychology	Direktur SDM dan Hukum PT Semen Indonesia (Persero) Tbk HR and Legal Director of PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Manajemen Sumber Daya Manusia Human Resource Management
Gusrizal	Indonesia	Laki-laki Male	58	Master Manajemen Logistik dan Perkapalan Master of Logistics and Shipping Management	Direktur Investasi PT Pupuk Indonesia Investment Director of PT Pupuk Indonesia	Manajemen Management
Bob Indiarto	Indonesia	Laki-laki Male	61	Magister Manajemen Master of Management	Direktur SDM dan Umum PT Pupuk Sriwidjaja Palembang HR and General Director of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Manajemen Produksi Production Management
Panji W. Ruky	Indonesia	Laki-laki Male	46	Magister Kebijakan Publik Master of Public Policy	Direktur Kemitraan dan Komunikasi Kartu Pra Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Director of Partnership and Communication for Pre-Employment Card, Coordinating Ministry for Economic Affairs	Kebijakan Publik Public Policy
Wono Budi Tjahyono	Indonesia	Laki-laki Male	55	Master of Business Administration Master of Business Administration	Senior Vice President PT Bank Mandiri Senior Vice President PT Bank Mandiri	Administrasi Bisnis Business Administration
Jamsaton Nababan	Indonesia	Laki-laki Male	60	Sarjana Teknik Mesin Bachelor of Mechanical Engineering	President Director PT Pertamina EP Cepu President Director of PT Pertamina EP Cepu	Teknik Engineering

PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

DISCLOSURE OF AFFILIATIONS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Affiliation Relationship between Board of Commissioners and Board of Directors

Nama Name	**Hubungan Keuangan dengan:** Financial Relationship with:			**Hubungan Keluarga dengan:** Family Relationship with:		
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	**Direksi** Board of Directors	**Pemerintah Republik Indonesia (Pemegang Saham Utama/ Pengendali Perusahaan)** Government of the Republic of Indonesia (Major Shareholder/ Controlling Company)	**Dewan Komisaris** Board of Commissioners	**Direksi** Board of Directors	**Pemerintah Republik Indonesia (Pemegang Saham Utama/ Pengendali Perusahaan)** Government of the Republic of Indonesia (Major Shareholder/ Controlling Company)
Dewan Komisaris | Board of Commissioners						
Darmin Nasution	x	x	x	x	x	x
Farhat Brachma	x	x	x	x	x	x
Suwandi	x	x	x	x	x	x
Febrio Nathan Kacaribu	x	x	x	x	x	x
Ari Dwipayana	x	x	x	x	x	x
Mustoha Iskandar	x	x	x	x	x	x
Anhar Adel	x	x	x	x	x	x
Anwar Sanusi	x	x	x	x	x	x
Direksi | Board of Directors						
Bakir Pasaman	x	x	x	x	x	x
Nugroho Christijanto	x	x	x	x	x	x
Tina T Kemala Intan	x	x	x	x	x	x
Gusrizal	x	x	x	x	x	x
Bob Indiarto	x	x	x	x	x	x
Panji W. Ruky	x	x	x	x	x	x
Wono Budi Tjahyono	x	x	x	x	x	x
Jamsaton Nababan	x	x	x	x	x	x

RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Dual Position of the Board of Commissioners and Directors

Nama Name	Hubungan Keuangan dengan: Financial Relationship with:		
	Sebagai Anggota Dewan Komisaris As Member of the Board of Commissioners	**Sebagai Anggota Direksi** As Member of the Board of Directors	**Jabatan Lain** Other Position
Dewan Komisaris | Board of Commissioners			
Darmin Nasution	✓	x	• Komisaris Utama PT Smartfren Telecom Tbk (2020-sekarang) • Komisaris Utama Indonesia Infrastructure Finance (2020-sekarang) • President Commissioner of PT Smartfren Telecom Tbk (2020-present) • President Commissioner of Indonesia Infrastructure Finance (2020-present)
Farhat Brachma	✓	✓	• Direktur PT REA Kaltim Plantation • Direktur PT Sasana Yudha Bakti • Penasihat Senior PT Barat Selatan Makmur Investindo • Direktur Hubungan Korporasi PT Robindo Natayara • Direktur PT Cipta Davia Mandiri • Staf Ahli Wakil Presiden RI • Director of PT REA Kaltim Plantation • Director of PT Sasana Yudha Bakti • Senior Advisor of PT Barat Selatan Makmur Investindo • Director of Corporate Relations PT Robindo Natayara • Director of PT Cipta Davia Mandiri • Expert Staff to the Vice President of the Republic of Indonesia
Suwandi	x	✓	Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Head of the Fiscal Policy Agency of the Ministry of Finance
Febrio Nathan Kacaribu	x	x	Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Coordinator of the President's Special Staff
Ari Dwipayana	x	x	Koordinator Staf Khusus Presiden RI Coordinator of the President's Special Staff
Mustoha Iskandar	x	x	x
Anhar Adel	x	x	Staf Khusus Menteri BUMN Special Staff to the Minister of SOEs
Anwar Sanusi	x	x	Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Secretary General of the Ministry of Manpower

Nama Name	Hubungan Keuangan dengan: Financial Relationship with:		
	Sebagai Anggota Dewan Komisaris As Member of the Board of Commissioners	**Sebagai Anggota Direksi** As Member of the Board of Directors	**Jabatan Lain** Other Position
Direksi | Board of Directors			
Bakir Pasaman	x	x	x
Nugroho Christijanto	x	x	x
Tina T. Kemala Intan	x	x	x
Gusrizal	x	x	x
Bob Indiarto	x	x	x
Panji W. Ruky	x	x	x
Wono Budi Tjahyono	x	x	x
Jamsaton Nababan	x	x	x

PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM
Share Ownership Disclosure

Nama Name	Kepemilikan Saham | Shareholding		
	Perusahaan Company	**Entitas Anak dan Afiliasi** Subsidiaries and Affiliates	**Perusahaan Lain (lebih dari 5%)** Other Companies (More than 5%)
Dewan Komisaris | Board of Commissioners			
Darmin Nasution	Nihil	Nihil	Nihil
Farhat Brachma	Nihil	Nihil	Nihil
Suwandi	Nihil	Nihil	Nihil
Febrio Nathan Kacaribu	Nihil	Nihil	Nihil
Ari Dwipayana	Nihil	Nihil	Nihil
Mustoha Iskandar	Nihil	Nihil	Nihil
Anhar Adel	Nihil	Nihil	Nihil
Anwar Sanusi	Nihil	Nihil	Nihil
Direksi | Board of Directors			
Bakir Pasaman	Nihil	Nihil	Nihil
Nugroho Christijanto	Nihil	Nihil	Nihil
Tina T. Kemala Intan	Nihil	Nihil	Nihil
Gusrizal	Nihil	Nihil	Nihil
Bob Indiarto	Nihil	Nihil	Nihil
Panji W. Ruky	Nihil	Nihil	Nihil
Wono Budi Tjahyono	Nihil	Nihil	Nihil
Jamsaton Nababan	Nihil	Nihil	Nihil

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Performance Assessment of the Board of Commissioners and Directors

PENILAIAN DEWAN KOMISARIS

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian Dewan Komisaris dilakukan melalui metode *self-assessment* sebagaimana Keputusan Dewan Komisaris No. 07/KEP.KOM/XI/2018 tanggal 2 November 2018 tentang Penetapan Piagam Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero).

Kriteria Penilaian

Dewan Komisaris pada tahun 2018 telah melakukan penyempurnaan Pedoman Dewan Komisaris sesuai Keputusan No. 07/KEP.KOM/XI/2018 tanggal 2 November 2018 tentang Penetapan Piagam Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero), yang salah satunya mengatur tentang pelaksanaan *self-assessment* kinerja Individu Dewan Komisaris. Implementasi atas kebijakan tersebut dimulai pada tahun 2020.

Dewan Komisaris dengan Keputusannya No. 17/KEP. KOM/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 telah menetapkan Kebijakan Pengukuran dan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan PTPI. Adapun kriteria penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

BOARD OF COMMISSIONERS ASSESSMENT

Party Conducting the Assessment

The assessment of the Board of Commissioners is carried out through the self-assessment method as per the Decree of the Board of Commissioners Number 07/KEP.KOM/XI/2018 dated November 2, 2018 concerning the Determination of the Charter of the Board of Commissioners of PT Pupuk Indonesia (Persero).

Assessment Criteria

The Board of Commissioners in 2018 has improved the Board of Commissioners Charter in accordance with Decree No. 07/KEP.KOM/XI/2018 dated November 2, 2018 concerning the Determination of the Charter of the Board of Commissioners of PT Pupuk Indonesia (Persero), one of which regulates the implementation of self-assessment of the performance of the individual Board of Commissioners. Implementation of the policy began in 2020.

The Board of Commissioners with its Decree No. 17/KEP. KOM/X/2020 dated October 5, 2020 has established a Policy for Measuring and Assessing the Performance of the Board of Commissioners of the PTPI Company. The assessment criteria are as follows:

No	Kegiatan	Activities
1	Pencapaian KPI Dewan Komisaris	KPI Achievement of the Board of Commissioners
2	Tingkat Kehadiran: • Rapat Internal • Rapat Gabungan yang menyertakan Direksi	Attendance Rate • Internal Meetings • Joint Meetings that include Directors
3	Pengawasan terhadap kepengurusan Perusahaan atas implementasi rencana dan kebijakan (keuangan, investasi, operasional, SDM, hukum, IT dan tata kelola) sesuai RKAP dan *master plan* PTPI	Supervision of the management of the Company on the implementation of plans and policies (finance, investment, operations, human resources, law, IT and governance) in accordance with the RKAP and PTPI Master plan.
4	Penugasan tertentu (pengawasan pengelolaan Anak Perusahaan sesuai SK Penugasan Dewan Komisaris	Certain assignments (supervision of the management of Subsidiaries in accordance with the Assignment Decree of the Board of Commissioners)
5	Komitmen dalam memajukan kepentingan Perusahaan	Commitment in advancing the interests of the Company
6	Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perusahaan	Adherence to applicable laws and regulations and Company policies

Hasil Penilaian

Di tahun 2022, pencapaian nilai KPI Dewan Komisaris diperoleh skor 100. Adapun rincian hasil penilaian tersebut disampaikan dalam tabel di bawah ini.

Assessment Result

In 2022, the Board of Commissioners performance assessment results stood at a score of 98,4. The details of the assessment result are presented in the following table.

No	Kegiatan	Target	Bobot Weight	Realisasi Tahun 2022 2022 Realization	Nilai Value
1	**ASPEK PENGAWASAN DAN PEMBERIAN NASIHAT** SUPERVISORY AND ADVISORY ASPECTS		**70**		**70,00**
	a. Rapat Dewan Komisaris yang menyertakan Direksi Meetings of the Board of Commissioners that include the Board of Director	12 kali | times	10	12 kali | times	10,00
	b. Rapat Internal Dewan Komisaris Internal Meeting of the Board of Commissioners	12 kali | times	10	12 kali | times	10,00
	c. Pengawasan terhadap nilai ekonomi dan sosial Supervision of economic and social value	3 kali | times	10	3 kali | times	10,00
	d. Pengawasan terhadap inovasi model bisnis Oversight of business model innovation	3 kali | times	10	3 kali | times	10,00
	e. Kepemimpinan teknologi Technological leadership	3 kali | times	10	3 kali | times	10,00
	f. Peningkatan investasi Increased Investment	3 kali | times	10	3 kali | times	10,00
	g. Pengembangan talenta Talent development	3 kali | times	10	4 kali | times	10,00
2	**ASPEK PELAPORAN | REPORTING ASPECTS**		**20**		**20,00**
	a. Menyusun dan menyampaikan program kerja tahunan Prepare and submit annual work program	1 kali | times	5	1 kali | times	5,00
	b. Menyusun laporan/pendapat/saran kepada Pemegang Saham Prepare reports/opinions/suggestions to Shareholders	4 kali | times	5	4 kali | times	5,00
	c. Menyampaikan tanggapan Dewan Komisaris atas permohonan Direksi Deliver the Board of Commissioners' response to the Board of Directors	100%	10	100%	10,00
3	**ASPEK DINAMIS/LAIN-LAIN | DYNAMICS/OTHER ASPECTS**		**10**		**10,00**
	a. Peninjauan/kunjungan lapangan Review/field visit	6 kali | times	5	8 kali | times	5,00
	b. Peningkatan kompetensi dan pengetahuan Competency and knowledge improvement	2 kali | times	5	2 kali | times	5,00
	TOTAL		**100**		**100,00**

PENILAIAN DIREKSI

Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian untuk Direksi, terutama berdasarkan pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah ditetapkan. Ada lima perspektif, yaitu:

1. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia
2. Inovasi Model Bisnis
3. Kepemimpinan Teknologi
4. Pengembangan Investasi
5. Pengembangan Talenta

BOARD OF DIRECTORS ASSESSMENT

Assessment Criteria

The assessment criteria for the Board of Directors are primarily based on the achievement of the Key Performance Indicator (KPI) that has been set. There are five perspectives, namely:

1. Economic and Social Value for Indonesia
2. Business Model Innovation
3. Technology Leadership
4. Investment Development
5. Talent Development

Hasil Penilaian

Assessment Results

No	KPI	Satuan Unit	Bobot Weight (%)	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement		
					Target	(%)	Skor Score
Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia | Economic and Social Value for Indonesia							
Finansial | Financial							
1	EBITDA	Rp miliar | Rp billion	5,00	30.714	13.744	110,00	5,50
2	Gap ROIC to WACC	%	5,00	11,66	1,26	110,00	5,50
3	Sustainable Financial Position						
	• Interest Bearing Debt to EBITDA	Kali (x) | Times (x)	5,00	1,01	2,25	110,00	5,50
	• Interest Bearing Debt to Invested Capital	%	5,00	25,46	29,32	110,00	5,50
Operasional | Operational							
4	Nilai Penjualan *Key Account Management* (KAM) Key Account Management (KAM) Sales Value	Rp miliar | Rp billion	5,00	13.214	6.978	110,00	5,50
Sosial | Social							
5	Nilai Transaksi Distributor dan UMKM – Program PADI Transaction Value of Distributors and MSMEs - PADI Program	Rp miliar | Rp billion	5,00	438	231	110,00	5,50
	Subtotal		**30,00**				**33,00**
Inovasi Model Bisnis | Business Model Innovation							
6	Luasan Lahan Program Makmur Land Area of Prosperous Program	hektar | hectare	5,00	271.622	250.000	108,65	5,43
7	COGM Pupuk						
	a. COGM Urea	Rp/ton	3,00	3.553.932	3.375.109	94,97	2,85
	b. COGM NPK	Rp/ton	2,00	8.236.001	8.490.827	103,09	2,06
8	Restrukturisasi Anak Perusahaan Subsidiary Restructuring						
	• Restrukturisasi Rekind Rekind Restructuring	%	5,00	100,00	100,00	100,00	5,00
		Waktu Time		Des | Dec 2022	Des | Dec 2022		
	• Kontribusi EBITDA Anper Non Pupuk Non-Fertilizer EBITDA Contribution	Rp miliar | Rp billion	2,00	416	371	110,00	2,20
9	*Streamlining* Lini Bisnis PI Group PI Group Business Line Streamlining	%	3,00	100,00	100,00	100,00	3,00
	Subtotal		**20,00**				**20,54**

No	KPI	Satuan Unit	Bobot Weight (%)	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement		
					Target	(%)	Skor Score
Kepemimpinan Teknologi | Technology Leadership							
10	Implementasi *Advanced Analytics* dan *Digital Fertilizer* Implementation of Advanced Analytics and Digital Fertilizer						
	• Pemanfaatan *data science* dan *analytics* di bidang Produksi & Pengadaan Utilization of data science and analytics in the field of Production & Procurement	%	3,00	102,50	100,00	102,50	3,08
		Waktu Time		Okt | Oct 2022	Okt | Oct 2022		
	• Penurunan *Downtime* Pabrik Amonia dan Urea Ammonia and Urea Plant Downtime Reduction	%	4,00	58,35	12,96	110,00	4,40
11	Digitalisasi Proses Rantai Pasok Digitalization of Supply Chain Processes						
	• Roll Out Retail Management System Full Feature	Jumlah Kios Number of Kiosks	4,00	9.398	5.000	110,00	4,40
	• Nilai *Gross Merchandise Value* (GMV) Gross Merchandise Value (GMV)	Rp miliar | Rp billion	4,00	2.164	1.855	110,00	4,40
	Subtotal		**15,00**				**16,28**
Peningkatan Investasi | Increased Investment							
12	Pengembangan Optimalisasi Pabrik Urea dan NPK Urea and NPK Plant Optimization Development	%	15,00	87,85	100,00	87,85	13,18
13	Pengembangan Pabrik *Adjacent Chemicals* Adjacent Chemicals Plant Development						
	Subtotal		**25,00**				**23,33**
Pengembangan Talenta | Talent Development							
14	Milenial (≤ 42 tahun) dalam *Nominated Talent* Millennial (≤ 42 years old) in Nominated Talent	%	5,00	22,22	5,00	110,00	5,50
15	Perempuan dalam *Nominated Talent* Women in Nominated Talent	%	5,00	13,89	10,00	110,00	5,50
	Subtotal		**10,00**				**11,00**
	Total		**100,00**				**104,15**

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remuneration of the Board of Commissioners and Directors

Kebijakan penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi di lingkungan Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN disertai perubahannya yaitu yang terakhir Peraturan Menteri BUMN No. PER-13/MBU/09/2021 tanggal 24 September 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN serta Surat Keputusan Menteri BUMN No. SR-37/Wk1. MBU.D/07/2022 Tanggal 26 Juli 2022 Perihal Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) Tahun 2022.

The policy for determining the remuneration of the Board of Commissioners and Directors within the Company refers to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of SOEs and its amendments, namely the latest Regulation of the Minister of SOEs No. PER-13/MBU/09/2021 dated September 24, 2021 concerning the Sixth Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board of SOEs and Decree of the Minister of SOEs No. SR-37/Wk1.MBU.D/07/2022 dated July 26, 2022 Regarding Determination of Income of Directors and Board of Commissioners of PT Pupuk Indonesia (Persero) in 2022.

PROSEDUR PENGUSULAN HINGGA PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Proses penetapan remunerasi berdasarkan hasil kajian yang memperhatikan sejumlah indikator, yakni hasil kinerja keuangan Perusahaan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, kewajaran dengan *peer group*, dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perusahaan.

Perusahaan memberikan penghargaan yang layak berupa penghasilan yang memberikan motivasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas kontribusinya terhadap Perusahaan. Pemberian remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi tidak hanya didasarkan kepada *Key Performance Indicator* (KPI) tahunan, tetapi juga pencapaian jangka pendek maupun panjang sebagai hasil dari sistem yang telah dibangun.

Persetujuan pemberian remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh RUPS. Berdasarkan peraturan BUMN, Pemegang Saham menetapkan penyesuaian remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan pertimbangan:

1. Faktor Skala Usaha;
2. Faktor Kompleksitas Usaha;
3. Tingkat Inflasi;
4. Kondisi dan Kemampuan Perusahaan.

PROCEDURES FOR PROPOSING TO DETERMINING REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The process of determining remuneration is based on the results of a study that takes into account a number of indicators, namely the Company's financial performance results and the fulfillment of reserves as stipulated in the applicable laws and regulations, fairness with peer groups, and consideration of the Company's long-term goals and strategies.

The Company provides appropriate rewards in the form of income that motivates the Board of Commissioners and Directors for their contribution to the Company. The remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors is not only based on the annual Key Performance Indicator (KPI), but also short and long term achievements as a result of the system that has been built.

Approval of the remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors is determined by the GMS. Based on BUMN regulations, the Shareholders determine the adjustment of the remuneration of the Board of Commissioners and Directors with consideration:

1. Scale factor;
2. Business Complexity Factor;
3. Inflation Rate;
4. Company Condition and Capability.

Apabila perhitungan honorarium dengan memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan honorarium lebih rendah dari pada tahun sebelumnya, maka honorarium yang dipakai adalah sama dengan honorarium tahun sebelumnya. Adapun mekanisme pemberian kompensasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris melakukan penelaahan atas kompensasi yang diberikan di pasar untuk pekerjaan yang bersangkutan pada perusahaan lainnya dengan bidang usaha dan status yang sama;
2. Dengan memperhitungkan kinerja usaha Perusahaan dan kontribusi masing-masing individu, kemudian dilakukan pembahasan oleh Dewan Komisaris untuk menyiapkan rekomendasi;
3. Usulan remunerasi anggota Dewan Komisaris disampaikan kepada Pemegang Saham untuk pembahasan dan persetujuan dalam RUPS;
4. RUPS memberikan persetujuan dan menetapkan remunerasi Dewan Komisaris. Skema Pemberian Remunerasi Dewan Komisaris Perusahaan sebagai berikut:

If the calculation of honorarium takes into account factors that cause the honorarium to be lower than the previous year, then the honorarium used is the same as the previous year's honorarium. The compensation mechanism for the Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:

1. The Board of Commissioners reviews the compensation given in the market for the job in question in other companies with the same line of business and status;
2. Taking into account the Company's business performance and each individual's contribution, the Board of Commissioners then discusses the recommendations;
3. The proposed remuneration of members of the Board of Commissioners is submitted to the Shareholders for discussion and approval at the GMS;
4. The GMS approves and determines the remuneration of the Board of Commissioners. The Remuneration Scheme of the Company's Board of Commissioners is as follows:

PROSEDUR PENGUSULAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI HINGGA PENETAPAN OLEH RUPS

Procedures for Proposing the Board of Commissioners and the Board of Directors Remuneration up to the GMS Resolution

STRUKTUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN beserta perubahannya. Berdasarkan peraturan tersebut, komponen penghasilan Dewan Komisaris terdiri dari:

REMUNERATION STRUCTURE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

The remuneration structure of the Board of Commissioners and Board of Directors refers to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014 on Guidelines for Determining the Income of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of SOEs and its amendments. Based on the regulation, the Board of Commissioners' income components consist of:

KOMPONEN DAN STRUKTUR REMUNERASI
Remuneration Components and Structure

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Gaji/Honor | **Salary/Honor**	
Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan karena kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut: • Perhitungan gaji Komisaris Utama sebesar 45% dari gaji Direktur Utama. • Perhitungan gaji Komisaris sebesar 90% dari gaji Komisaris Utama.	Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan karena kedudukannya sebagai anggota Direksi perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut: • Gaji Direktur Utama ditetapkan Menggunakan Pedoman Kementerian BUMN. • Perhitungan gaji Wakil Direktur Utama sebesar 95% dari gaji Direktur Utama. • Perhitungan gaji Direktur lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama.
Fixed income in the form of money received every month because of his position as a member of the company's board of commissioners, with the following provisions: • The calculation of the President Commissioner's salary is 45% of the President Director's salary; • The Commissioner's salary calculation is 90% of the President Commissioner's salary.	Fixed income in the form of money received every month because of his position as a member of the Board of Directors of the company, with the following provisions: • The President Director's salary is determined using the Ministry of SOE Guidelines; • The Vice President Director's salary calculation is 95% of the President Director's salary; • Other Director's salary calculation is 85% of the President Director's salary.
Tunjangan | **Allowances**	
Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota dewan komisaris selain honorarium, yang dapat berupa: • Tunjangan hari raya, diberikan paling banyak 1 (satu) kali honorarium di setiap tahunnya. • Tunjangan transportasi diberikan 20% dari honorarium per bulan. • Asuransi purna jabatan, diberikan dengan ketentuan premi yang ditanggung perusahaan paling banyak 25% dari honorarium per tahun.	Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota direksi selain gaji, yang dapat berupa: • Tunjangan hari raya, diberikan paling banyak 1 (satu) kali gaji di setiap tahunnya. • Tunjangan perumahan diberikan sebesar Rp27.500.000 per bulan apabila perusahaan tidak menyediakan rumah jabatan. • Asuransi purna jabatan, diberikan dengan ketentuan premi yang ditanggung perusahaan paling banyak 25% dari gaji per tahun.
Income in the form of money or that can be valued in money received at a certain time by members of the board of commissioners other than honorarium, which can be in the form of: • Holiday allowance, given at a maximum of 1 (one) time honorarium in each year; • Transportation allowance is 20% of the monthly honorarium; • After-service insurance, provided that the premium borne by the company is at most 25% of the honorarium per year.	Income in the form of money or that can be valued in money received at a certain time by members of the board of directors other than salary, which can be in the form of: • Holiday allowance, given at a maximum of 1 (one) time salary in each year; • The housing allowance is Rp27,500,000 per month if the company does not provide a house of office; • After-service insurance, provided that the premium borne by the company is at most 25% of the salary per year.
Fasilitas | **Facilities**	
Penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dapat berupa: • Fasilitas kesehatan, diberikan dalam bentuk penggantian biaya pengobatan (*at cost*). • Fasilitas bantuan hukum, diberikan jika diperlukan, dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan perusahaan.	Penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Direksi dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dapat berupa: • Fasilitas kendaraan, diberikan sebanyak 1 (satu) unit kendaraan dinas beserta biaya pemeliharaan dan operasional dengan spesifikasi dan standar sesuai faktor jabatan. • Fasilitas kesehatan, diberikan dalam bentuk penggantian biaya pengobatan (*at cost*). • Fasilitas bantuan hukum, diberikan jika diperlukan, dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan perusahaan.

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Income in the form of facilities and/or benefits and/or guarantees used/utilized by members of the Board of Commissioners in the context of carrying out their duties, authorities, obligations and responsibilities based on statutory regulations, which can be in the form of: • Health facilities, provided in the form of reimbursement of medical expenses (at cost); • Legal assistance facilities, provided if necessary, in the event of actions/deeds for and on behalf of his position relating to the company.	Income in the form of facilities and/or benefits and/or guarantees used/utilized by members of the Board of Directors in the context of carrying out their duties, authorities, obligations and responsibilities based on statutory regulations, which can be in the form of: • Vehicle facilities, given as much as 1 (one) unit of official vehicle along with maintenance and operational costs with specifications and standards according to job factors; • Health facilities, provided in the form of reimbursement of medical expenses (at cost); • Legal assistance facilities, provided if necessary, in the event of actions/deeds for and on behalf of his position relating to the company.
Tantiem	
• Tantiem adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris apabila memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian. Perusahaan dapat memberikan tantiem kepada anggota Dewan Komisaris berdasarkan penetapan RUPS dalam pengesahan laporan tahunan apabila realisasi pencapaian *key performance indicators* melebihi 100%. • Insentif kinerja adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris. • Perhitungan tantiem/insentif kinerja bagi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: a. Perhitungan tantiem/insentif kinerja komisaris Utama sebesar 45% dari tantiem/insentif kinerja Direktur utama. b. Perhitungan komisaris lainnya sebesar 90% dari tantiem/insentif kinerja Komisaris Utama.	• Tantiem yaitu penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi BUMN apabila memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian. • Tantiem dapat diberikan sebagai tambahan berupa penghargaan jangka panjang (*long term incentive/lti*). Perusahaan dapat memberikan tantiem kepada anggota direksi berdasarkan penetapan RUPS dalam pengesahaan laporan tahunan apabila realisasi pencapaian *key performance indicators* melebihi 100%. • Insentif kinerja, yaitu penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota direksi apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian; • Perhitungan tantiem/insentif kinerja bagi direksi adalah sebagai berikut: a. Tantiem/insentif kinerja Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman Kementerian BUMN; b. Perhitungan tantiem/insentif kinerja Wakil Direktur Utama sebesar 90% tantiem/insentif kinerja gaji Direktur Utama c. Perhitungan tantiem/insentif kinerja Direktur lainnya sebesar 85% tantiem/insentif kinerja gaji Direktur Utama
• Tantiem is an income that is an award given to members of the Board of Commissioners if they earn profit and do not experience accumulated losses. The Company may provide tantiem to members of the Board of Commissioners based on the determination of the GMS in the ratification of the annual report if the realization of the achievement of key performance indicators exceeds 100%; • Performance incentive is an income that is a reward given to members of the Board of Commissioners; • The calculation of tantiem/performance incentive for the Board of Commissioners is as follows: a. Calculation of tantiem/performance incentive for the President Commissioner is 45% of the tantiem/performance incentive for the President Director; b. Calculation of other commissioners amounting to 90% of the tantiem/performance incentive of the President Commissioner	• Tantiem is income that is an award given to members of the Board of Directors of BUMN if they earn profits and do not experience accumulated losses. • Tantiem can be given as an additional long term incentive (LTI). The Company may grant tantiem to members of the board of directors based on the determination of the GMS in the approval of the annual report if the realization of the achievement of key performance indicators exceeds 100%; • Performance incentive, which is income that is an award given to members of the board of directors in the event of improved performance even though they are still experiencing losses or accumulated losses; - The calculation of tantiem/performance incentive for directors is as follows: a. Tantiem/performance incentive for the President Director is determined using the guidelines of the Ministry of SOEs; b. Calculation of tantiem/performance incentive of Deputy President Director at 90% of tantiem/performance incentive of President Director's salary c. The calculation of tantiem/performance incentive for other Directors is 85% of the tantiem/performance incentive of the President Director's salary

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Pajak atas Hanorarium, Tunjangan, dan Fasilitas | Tax on Honorarium, Allowances and Facilities	
Ditanggung dan menjadi beban Perusahaan. Sedangkan pajak atas tantiem/insentif Kinerja bagi Dewan Komisaris ditanggung dan menjadi beban masing-masing anggota Dewan Komisaris. Covered and become the burden of the Company. Meanwhile, the tax on tantiem/performance incentive for the Board of Commissioners is borne by each member of the Board of Commissioners.	Ditanggung dan menjadi beban Perusahaan. Sedangkan pajak atas tantiem/insentif Kinerja bagi Direksi ditanggung dan menjadi beban masing-masing Direksi. Covered and become the burden of the Company. Meanwhile, tax on tantiem/performance incentive for the Board of Directors shall be borne and burdened by each Director.

KEBIJAKAN DASAR TERKAIT INDIKATOR PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha dan skala usaha dari emiten atau perusahaan publik sejenis;
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perusahaan;
3. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
4. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel;
5. Kesesuaian peraturan dan perundang-undangan di bidang perpajakan dan ketenagakerjaan;
6. Asas keterbukaan, keseimbangan internal serta kompetitif dengan perusahaan lain di luar Perusahaan.

Penetapan remunerasi Direktur Utama sebagai acuan dalam perhitungan Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya didasarkan pada pencapaian kinerja Perusahaan, yaitu:

1. Pencapaian pendapatan Perusahaan;
2. Peningkatan aktiva Perusahaan;
3. Pencapaian laba Perusahaan;
4. Peningkatan EBITDA margin;
5. Peningkatan skor KPI dari periode sebelumnya.

BASIC POLICY RELATED TO INDICATORS FOR DETERMINING REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The structure, policy, and amount of remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors must consider the following matters:

1. Remuneration applicable in the industry in accordance with the business activities and business scale of the issuer or similar public company;
2. The duties, responsibilities and authorities of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners are linked to the achievement of the Company's objectives and performance;
3. Performance targets or performance of each member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
4. Balance of allowances between fixed and variable;
5. Compliance with tax and labor laws and regulations;
6. The principle of openness, internal balance and competitiveness with other companies outside the Company.

The determination of the remuneration of the President Director as a reference in the calculation of the Board of Commissioners and other members of the Board of Directors is based on the achievement of the Company's performance, namely:

1. Achievement of the Company's revenue;
2. Increase in Company assets;
3. Achievement of Company profit;
4. Improved EBITDA margin;
5. Improvement in KPI scores from the previous period.

PERHITUNGAN BESARAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI (SESUAI PERATURAN MENTERI NEGARA BUMN NO. PER-01/MBU/05/2019)
Basic Policy related to Indicators for Determining Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors

Jabatan Position	Besaran	Magnitude
Direktur Utama President Director	100% (ditetapkan dengan menggunakan pedoman Kementerian BUMN)	100% (determined using Ministry of SOE guidelines)
Wakil Direktur Utama Vice President Director	Sebesar 95% dari Gaji/Tantiem/Insentif Kinerja Direktur Utama	95% of Salary/Tantiem/Performance Incentive of President Director
Direktur Bidang Sumber Daya Manusia Director of Human Resources	Sebesar 90% dari Gaji/Tantiem/Insentif Kinerja Direktur Utama	90% of Salary/Tantiem/Performance Incentive of President Director
Direksi Lainnya Other Director	Sebesar 85% dari Gaji/Tantiem/Insentif Kinerja Direktur Utama	85% of Salary/Tantiem/Performance Incentive of President Director
Komisaris Utama President Commissioner	Sebesar 45% dari Gaji/Tantiem/Insentif Kinerja Direktur Utama	45% of Salary/Tantiem/Performance Incentive of President Director
Komisaris Lainnya Other Commissioners	Sebesar 90% dari Honorarium/Tantiem/Insentif Kinerja Komisaris Utama	90% of Honorarium/Tantiem/Performance Incentive of President Commissioner

PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TAHUN 2022

Penetapan remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun buku ditetapkan sesuai dengan Surat Kementerian BUMN No. SR-37/Wk1.MBU.D/07/2022 Tanggal 26 Juli 2022 Perihal Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) Tahun 2022.

DETERMINATION OF REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS IN 2022

The determination of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors in the fiscal year was determined in accordance with the Letter of the Ministry of SOEs No. SR-37/Wk1.MBU.D/07/2022 Dated July 26, 2022 Regarding the Determination of the Income of the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Pupuk Indonesia (Persero) in 2022.

REALISASI REMUNERASI DEWAN KOMISARIS TAHUN 2022
Board of Commissioners Remuneration Realization in 2022

(dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in rupiah, unless otherwise stated)

Uraian	Komisaris Utama President Commissioner	Anggota Komisaris Commissioner Member	Description
Masa Menjabat Tahun 2022			**Term of Office 2022**
Penghasilan per Bulan:			Income Per Month:
Honorarium	135.450.000	121.905.000	Honorarium
Tunjangan Transportasi	27.090.000	24.381.000	Transportation Allowance
Jumlah Penghasilan per Bulan	162.540.000	146.286.000	Total Income Per Month
Jumlah Penghasilan per Tahun	1.625.400.000	1.462.860.000	Total Income Per Year
Tunjangan Hari Raya	135.450.000	121.905.000	Holiday Allowance
Asuransi Purna Jabatan	406.350.000	365.715.000	Post-retirement Insurance
Fasilitas Kesehatan	Asuransi Kesehatan | Health Insurance		Health Facilities
Fasilitas Kendaraan	–	–	Vehicle Facilities
Fasilitas Bantuan Hukum	adcost		Legal Aid Facility

(dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in rupiah, unless otherwise stated)

Uraian	Komisaris Utama President Commissioner	Anggota Komisaris Commissioner Member	Description
Pajak Remunerasi	Ditanggung Perusahaan Covered by the Company		Remuneration Tax
Tantiem/Insentif Kinerja 2021	5.699.216.430	5.129.294.787	Tantiem/Performance Incentive 2021
Jumlah remunerasi Tahun 2022	**8.191.496.430**	**7.372.346.787**	**Total remuneration in 2022**

REALISASI REMUNERASI DIREKSI TAHUN 2022
Realization of Directors' Remuneration in 2022

(dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in rupiah, unless otherwise stated)

Uraian	Direktur Utama President Director	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Direktur Director	Description
Masa Menjabat Tahun 2022				**Term of Office 2022**
Penghasilan per Bulan:				Income Per Month:
Honorarium	301.000.000	270.900.000	255.850.000	Salary
Tunjangan Transportasi	27.500.000	27.500.000	27.500.000	Housing Allowance
Jumlah Penghasilan per Bulan	328.500.000	298.400.000	283.350.000	Total Income per Month
Jumlah Penghasilan per Tahun	3.942.000.000	3.580.800.000	3.400.200.000	Total Income per Year
Tunjangan Hari Raya	301.000.000	270.900.000	255.850.000	Holiday Allowance
Asuransi Purna Jabatan	903.000.000	812.700.000	767.550.000	Post-retirement Insurance
Fasilitas Kesehatan	Asuransi Kesehatan Health Insurance			Health Facilities
Fasilitas Kendaraan	1 Unit kendaraaan maks. Kapasitas 3.500 cc 1 Unit of vehicle max. Capacity 3,500 cc			Vehicle Facilities
Fasilitas Bantuan Hukum	adcost			Legal Aid Facility
Pajak Remunerasi	Ditanggung Perusahaan Covered by the Company			Remuneration Tax
Tantiem/Insentif Kinerja 2021	12.664.925.399	11.398.432.859	10.765.186.589	Tantiem/Performance Incentive 2021
Jumlah remunerasi Tahun 2022	**18.467.925.399**	**16.659.632.859**	**15.755.486.589**	**Total Remuneration in 2022**

REKAPITULASI REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TAHUN 2022
Recapitulation of Board of Commissioners and Directors Remuneration in 2022

Uraian	Jumlah | Total (Rp)	Description
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris	15.563.843.217	Total Remuneration of the Board of Commissioners
Jumlah Remunerasi Direksi	50.883.044.847	Total Directors' Remuneration
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2022	66.446.888.064	Total Remuneration of the Board of Commissioners and Directors in 2022

RASIO GAJI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN KARYAWAN
Salary Ratio of Board of Commissioners, Directors, and Employees

Uraian	2022	2021	Description
Direktur Utama terhadap Wakil Direktur Utama	1:0,90	1:0,90	President Director to Vice President Director
Direktur Utama terhadap Direktur Lainnya	1:0,85	1:0,85	President Director to Other Directors
Komisaris Utama terhadap Anggota Dewan Komisaris	1:0,90	1:0,9	President Commissioner to Members of the Board of Commissioners
Direktur Utama terhadap Komisaris Utama	1:0,45	1:0,45	President Director to President Commissioner
Direktur Utama terhadap Karyawan tertinggi	1:0,24	1:0,28	President Director to the highest employee
Direktur Utama terhadap Karyawan terendah	1:0,03	1:0,04	President Director to the lowest Employee
Karyawan Tertinggi terhadap Karyawan Terendah	1:0,12	1:0,15	Highest Employee to Lowest Employee
Karyawan Terendah terhadap Upah Minimum Regional (UMP) Rata-rata	1:1,89	1:2,63	Lowest Employee to Average Regional Minimum Wage (UMP)

Rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Gabungan
Board of Commissioners, Directors, and Joint Meetings

KEBIJAKAN RAPAT
Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit setiap 1 (satu) bulan sekali atau sesuai kebutuhan Perusahaan. Setiap rapat Dewan Komisaris, kecuali ditentukan lain, harus dihadiri oleh Sekretaris Dewan Komisaris. Keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara setuju terbanyak. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat.

Selain rapat internal, Dewan Komisaris juga dapat melakukan rapat gabungan dengan mengundang Direksi sebagai bentuk koordinasi dalam rangka membahas laporan periodik Direksi dan membahas kondisi dan prospek usaha serta kebijakan nasional yang berdampak pada kinerja Perusahaan. Pada kesempatan itu, Dewan Komisaris memberikan tanggapan.

Direksi secara rutin mengadakan Rapat Internal Direksi. Seluruh rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama terkecuali karena suatu dan lain hal Direktur Utama berhalangan hadir dan menunjuk salah seorang Direksi untuk memimpin Rapat Direksi.

MEETING POLICY
The BOC holds meetings at least once every 1 (one) month or as needed by the Company. Every meeting of the BOC, unless otherwise specified, must be attended by the Secretary of the BOC. Decisions of the Board of Commissioners Meeting are made based on deliberation for consensus. In the event that deliberation for consensus is not reached, the decision shall be made based on a majority affirmative vote. The BOC may also make valid and binding decisions without holding a meeting.

In addition to internal meetings, the Board of Commissioners may also conduct joint meetings by inviting the Board of Directors as a form of coordination in order to discuss the periodic reports of the Board of Directors and discuss business conditions and prospects as well as national policies that have an impact on the Company's performance. On that occasion, the Board of Commissioners provided feedback.

The Board of Directors regularly holds Internal Board of Directors Meetings. All BOD meetings are chaired by the President Director unless for some reason the President Director is unable to attend and appoints one of the Directors to chair the BOD Meeting.

Bagi setiap anggota Direksi yang telah menerima pemberitahuan rapat secara tertulis wajib menghadiri panggilan rapat dimaksud kecuali karena sesuatu dan lain hal yang bersangkutan berhalangan hadir. Bila karena sesuatu dan lain hal anggota Direksi berhalangan hadir maka yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Utama atau Direktur yang menandatangani undangan rapat, selanjutnya yang bersangkutan dapat mewakilkan kehadirannya kepada pihak lain sesuai dengan aturan Anggaran Dasar.

For each member of the Board of Directors who has received a written notice of meeting must attend the meeting invitation unless for some reason he/she is unable to attend. If for any reason a member of the Board of Directors is unable to attend, the person concerned must notify in writing the President Director or Director who signs the invitation to the meeting, then the person concerned may represent his presence to other parties in accordance with the rules of the Articles of Association.

Setiap keputusan yang diambil dalam rapat Direksi harus dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila hal ini tidak tercapai, maka keputusan harus diambil berdasarkan suara terbanyak dan apabila suara setuju dan tidak setuju berimbang, maka Direktur Utama/Ketua rapat yang menentukan. Adapun untuk penyampaian informasi akan diadakannya Rapat Internal Direksi, Perusahaan akan memberitahukan secara tertulis dan disampaikan kepada anggota Direksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat dilaksanakan dan di dalam panggilan rapat tersebut mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.

Any decision made in a meeting of the Board of Directors shall be by way of deliberation to reach a consensus. If this is not achieved, then the decision must be made based on a majority vote and if the votes for and against are balanced, the President Director/Chairman of the meeting shall decide. As for the delivery of information on the holding of an Internal Meeting of the Board of Directors, the Company will notify in writing and submitted to members of the Board of Directors no later than 3 (three) days before the meeting is held and the meeting call includes the agenda, date, time and place of the meeting.

REALISASI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2022, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 53 (lima puluh tiga) kali rapat yang terdiri dari 12 (dua belas) rapat internal rutin, 38 (tiga puluh delapan) kali rapat internal non rutin, dan 3 (tiga) RUPS, sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

BOARD OF COMMISSIONERS MEETING REALIZATION

During 2022, the Board of Commissioners held 53 (fifty three) meetings, consist of 12 (twelve) internal routin meetings, 38 (thirty eight) internal non routin meetings and 3 (three) GMS of the Company as presented the table below:

FREKUENSI KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS PADA RAPAT INTERNAL RUTIN DAN RUPS
Frequency of Attendance of the Board of Commissioners at Internal Routin Meetings & GMS

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Jumlah Rapat* Number of Meetings*	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran % Attendance
Darmin Nasution	15	14	93
Bambang Widianto**	13	13	100
Farhat Brachma***	2	2	100
Suwandi	15	15	100
Febrio Nathan Kacaribu	15	4	27
Ari Dwipayana	15	14	93
Mustoha Iskandar	15	15	100
Anhar Adel	15	14	93
Anwar Sanusi	15	15	100
Rata-rata | Average	**15**	**12**	**90**

*) Termasuk kehadiran di RUPS | Includes attendance at the GMS
**) Masa jabatan berakhir pada 4 November 2022 | Tenure ends on November 4, 2022
***) Masa jabatan dimulai sejak 4 November 2022 | Service term starts from November 4, 2022

AGENDA RAPAT INTERNAL RUTIN DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners Internal Routin Meeting Agenda

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda	
26 Januari 2022 January 26, 2022	1. Pembahasan tindak lanjut *pending matters* dan kinerja Perusahaan bulan November 2021; 2. Pembahasan kinerja perusahaan bulan Desember 2021; 3. Pembahasan revisi *draft* RKAP tahun 2022; 4. Pembahasan *Progress Updating Talent Pool* Kementerian BUMN; dan 5. Pembahasan isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion on follow-up of pending matters and the Company's performance November 2021; 2. Discussion of company performance in December 2021; 3. Discussion of the revised draft RKAP for 2022; 4. Discussion on Progress of Updating Ministry Talent Pool SOEs; and 5. Discussion of other strategic issues.
24 Februari 2022 February 24, 2022	1. Pembahasan tindak lanjut *pending matters* dan kinerja Perusahaan bulan Desember 2021; 2. Pembahasan kinerja perusahaan bulan Januari 2022; 3. Finalisasi penilaian Komite dan Sekretaris Dewan Komisaris Tahun 2021; dan 4. Pembahasan isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion on follow-up of pending matters and the Company's performance December 2021; 2. Discussion of company performance in January 2022; 3. Finalize the assessment of Committees and Secretary of the Board of Commissioners 2021; and 4. Discussion of other strategic issues.
29 Maret 2022 March 29, 2022	1. Pembahasan tindak lanjut *pending matters* dan kinerja Perusahaan bulan Januari 2022; 2. Pembahasan kinerja perusahaan bulan Februari 2022; 3. Usulan KPI Individu Direksi Tahun 2022; 4. Laporan Pegawasan Dewan Komisaris Tahun 2021; dan 5. Pembahasan isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion on follow-up of pending matters and the Company's performance January 2022; 2. Discussion of company performance in February 2022; 3. Proposed KPIs for Individual Directors in 2022; 4. Board of Commissioners Supervision Report for 2021; and 5. Discussion of other strategic issues.
22 April 2022 April 22, 2022	1. Pembahasan tindak lanjut *pending matters* dan kinerja Perusahaan bulan Februari 2022; 2. Pembahasan kinerja Perusahaan bulan Maret 2022; 3. Laporan Kunjungan Kerja ke PT PI Logistik; dan 4. Pembahasan isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion on follow-up of Pending Matters and Company Performance February 2022; 2. Discussion of Company Performance in March 2022; 3. Working Visit Report to PT PI Logistics; and 4. Discussion of other strategic issues.
25 Mei 2022 May 25, 2022	1. Pembahasan tindak lanjut *pending matters* dan kinerja Perusahaan bulan Maret 2022 yang belum *closed*; 2. Pembahasan kinerja Perusahaan hingga bulan April 2022; 3. Persiapan RUPS Audit Tahun 2021; 4. Laporan Kunjungan Kerja ke PT PI Logistik dan Mega Eltra; dan 5. Pembahasan isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion on Follow-up of Pending Matters and Company Performance March 2022 which has not yet closed; 2. Discussion on the Company's performance up to April 2022; 3. Preparation for the 2021 Audit GMS; 4. Report on Working Visit to PT PI Logistics and Mega Eltra; and 5. Discussion of other strategic issues.
24 Juni 2022 June 24, 2022	1. Pembahasan tindak lanjut *pending matters* dan kinerja Perusahaan bulan April 2022; 2. Pembahasan kinerja Perusahaan bulan Mei 2022; 3. Laporan hasil kunjungan ke PIU; dan 4. Pembahasan isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion on follow-up of Pending Matters and Company Performance April 2022; 2. Discussion of Company Performance in May 2022; 3. Report on the Results of Visit to PIU; and 4. Discussion of other Strategic Issues.
26 Juli 2022 July 26, 2022	1. Pembahasan tindak lanjut *pending matters* dan kinerja Perusahaan bulan Mei 2022; 2. Pembahasan kinerja perusahaan bulan Juni 2022; 3. Pembahasan Laporan Pengawasan Dekom hingga Semester I Tahun 2022; dan 4. Pembahasan isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion on follow-up of pending matters and the Company's performance May 2022; 2. Discussion of company performance in June 2022; 3. Discussion of the Board of Commissioners Supervision Report up to Semester 1 Year 2022; and 4. Discussion of other strategic issues.

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda	
24 Agustus 2022 August 24, 2022	1. Pembahasan tindak lanjut *pending matters* bulan Juni 2022 yang belum selesai; dan 2. Pembahasan kinerja Perusahaan dan isu strategis bulan Juli 2022.	1. Discussion on the follow-up of the Pending Matrix in June 2022 which has not yet been finalized completed; and 2. Discussion of Company Performance and Strategic Issues in July 2022.
26 September 2022 September 26, 2022	1. Pembahasan tindak lanjut *pending matters* dan kinerja Perusahaan bulan Juli 2022; 2. Pembahasan kinerja perusahaan bulan Agustus 2022; 3. Laporan Kerusakan Pabrik Kaltim 5; 4. Penjelasan tentang aksi demo pensiunan PKT; 5. Laporan hasil kunjungan ke PKG; dan 6. Pembahasan isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion on follow-up of pending matters and the Company's performance July 2022; 2. Discussion of company performance in August 2022; 3. Kaltim Factory Damage Report 5; 4. An explanation of the CCP retiree rally; 5. Report on the results of the visit to PKG; and 6. Discussion of other strategic issues.
27 Oktober 2022 October 27, 2022	1. Pembahasan tindak lanjut *pending matters* dan kinerja Perusahaan bulan September 2022; 2. Pembahasan usulan revisi RKAP Tahun 2022; 3. Pembahasan RKA Dewan Komisaris Tahun 2023; 4. Laporan hasil kunjungan ke PKC; dan 5. Pembahasan isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion on follow-up of pending matters and the Company's performance September 2022; 2. Discussion on the proposed revision of the 2022 RKAP; 3. Discussion of the RKA of the Board of Commissioners for 2023; 4. Report on the results of the visit to CCP; and 5. Discussion of other strategic issues.
22 November 2022 November 22, 2022	1. Pembahasan tindak lanjut *pending matters* hasil rapat kinerja bulan September 2022 dan kinerja Perusahaan bulan Oktober 2022 (termasuk di dalamnya *template monthly monitoring Wamen* BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan utang usaha); 2. Pemaparan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pupuk Indonesia (Persero) Tahun 2023 (yang telah disesuaikan Aspirasi Pemegang Saham); dan 3. Isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion of follow-up/pending matters of performance meeting results September 2022 and Company Performance in October 2022 (including monthly monitoring template Deputy Minister for SOEs I and the progress of realization of accounts receivable position and accounts payable); 2. Presentation of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) PT Pupuk Indonesia (Persero) Year 2023 (which has already been approved) customized Shareholder Aspirations); and 3. Other Strategic Issues.
22 Desember 2022 December 22, 2022	1. Pembahasan tindak lanjut *pending matters* bulan Oktober 2022 dan kinerja Perusahaan bulan November 2022; dan 2. Pembahasan isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion on the follow-up of pending matters in October 2022 and the Company's performance in November 2022; and 2. Discussion of other strategic issues.

REALISASI RAPAT DIREKSI

Selama tahun 2022, Direksi telah menyelenggarakan 36 (tiga puluh enam) kali rapat internal dan 3 (tiga) RUPS Perusahaan sebagaimana tersaji pada table di bawah ini:

REALIZATION OF BOARD OF DIRECTORS MEETING

During 2022, the Board of Directors held 36 (thirty six) internal meetings and 3 (three) GMS of the Company as presented in the table below:

FREKUENSI KEHADIRAN DIREKSI PADA RAPAT INTERNAL
Frequency of Attendance of Directors at Internal Meetings

Direksi Board of Directors	Jumlah Rapat* Number of Meetings*	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran % Attendance
Bakir Pasaman	39	37	94,87
Nugroho Christijanto	39	35	89,74
Bob Indiarto	39	37	94,87
Wono Budi Tjahyono	39	38	97,44
Panji Winanteya. Ruky	39	37	94,87

Direksi Board of Directors	Jumlah Rapat* Number of Meetings*	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran % Attendance
Tina T. Kemala Intan	39	38	97,44
Gusrizal	39	37	94,87
Jamsaton Nababan	39	38	97,44
Rata-rata | Average	**39**	**37,12**	**95,19**

*) Termasuk kehadiran di RUPS | Includes attendance at the GMS

AGENDA RAPAT DIREKSI
Board of Directors Meeting Agenda

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda	
1 Januari 2022 January 1, 2022	1. Pembelian Aset Milik PT Rekayasa Industri/ Rekind Berupa Tanah dan Bangunan di Kalibata. 2. Perpanjangan Fasilitas Kredit Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) Bank Mandiri untuk Rekind sebesar USD41 juta.	1. Purchase of Assets Owned by PT Rekayasa Industri/Rekind in the Form of Land and Building in Kalibata. 2. Extension of Bank Mandiri's Special Transaction Loan (PTK) Credit Facility for Rekind amounting to USD41 million.
3 Januari 2022 January 3, 2022	1. Pembelian Aset Milik PT Rekayasa Industri/ Rekind Berupa Tanah dan Bangunan di Kalibata. 2. Perpanjangan Fasilitas Kredit Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) Bank Mandiri untuk Rekind sebesar USD41 juta.	1. Purchase of Assets Owned by PT Rekayasa Industri/Rekind in the Form of Land and Building in Kalibata. 2. Extension of Bank Mandiri's Special Transaction Loan (PTK) Credit Facility for Rekind amounting to USD41 million.
10 Januari 2022 January 10, 2022	1. Tindaklanjut Arahan Wamen I BUMN Terkait Penyelesaian Proyek JTB. 2. Harga Pasokan Ammonia PKT ke PKG	1. Follow-up of Deputy Minister I of SOEs on the completion of the JTB Project. 2. PKT to PKG Ammonia Supply Price.
18 Januari 2022 January 18, 2022	1. Penyelesaian Proyek JTB dan Restrukturisasi Utang Rekind. 2. Isu Strategis Perusahaan	1. JTB Project Completion and Rekind Debt Restructuring. 2. Company Strategic Issues.
27 Januari 2022 January 27, 2022	1. Persiapan RUPS RKAP Pupuk Indonesia Tahun 2022. 2. Persiapan Bahan Rapat Gabungan Dewan Komisaris-Direksi. 3. Isu Strategis Perusahaan	1. Preparation for the GMS of Pupuk Indonesia's 2022 RKAP. 2. Preparation of Materials for the Joint Meeting of Dekom-Direction. 3. Company Strategic Issues.
5 Februari 2022 February 5, 2022	1. *Update* Penyelesaian Proyek Jambaran Tiung Biru (JTB). 2. Keikutsertaan Pupuk Indonesia di G20. 3. Raker Subsidi Pupuk.	1. Update on Jambaran Tiung Biru (JTB) Project Completion. 2. Pupuk Indonesia's participation in the G20. 3. Fertilizer Subsidy Meeting.
16 Februari 2022 February 16, 2022	1. Pengelolaan *Website* Perusahaan. 2. Hasil Rapat BUMN Pangan bersama Menteri BUMN. 3. Bahan Rapat Gabungan Komisi IV, VI, dan VII. 4. Proposal HUT PI. 5. *Update* Progres NPA untuk Mendukung Penyelesaian Proyek JTB.	1. Company Website Management. 2. Results of the SOE Food Meeting with the Minister of SOEs. 3. Materials of the Joint Meeting of Commission IV, VI, and VII. 4. PI Anniversary Proposal. 5. Update on NPA Progress to Support JTB Project Completion.

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda	
22 Februari 2022 February 22, 2022	Isu Strategis Perusahaan: 1. Laporan Hasil Pertemuan dengan PT PKT dan SKK Migas. 2. Laporan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. 3. Laporan Progres Pinjaman *Bridging* Proyek JTB PT Rekayasa Industri. 4. Laporan Hasil Rapat Koordinasi dengan Kemenko Bidang Perekonomian. 5. Program HC *Alignment* dan Tindaklanjut Hasil *Assessment* BPKP perihal Manajemen Risiko terhadap Portofolio Manajemen 6. *Branding* Pupuk NPK Spesifik 7. Tender Asuransi Kesehatan	Corporate Strategic Issues: 1. Meeting Report with PT PKT and SKK Migas. 2. Report on the Working Visit of Commission VII DPR RI to PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. 3. PT Rekayasa Industri JTB Project Bridging Loan Progress Report. 4. Report on the Coordination Meeting with the Coordinating Ministry for Economic Affairs. 5. HC Alignment Program and Follow-up of BPKP Assessment Results regarding Risk Management to Management Portfolio 6. Specific NPK Fertilizer Branding 7. Health Insurance Tender
1 Maret 2022 March 1, 2022	1. Fasilitas NPA sebagai *Bridging* dari *Bridging Facility* Proyek JTB. 2. Isu Strategis Perusahaan: - Persiapan Pembahasan Proyek JTB dengan Wamen I BUMN dan Menteri ESDM. - Evaluasi Kinerja SPM. - Pengelolaan Manajemen Risiko. - Bidang Pemasaran (Dampak ketentuan ODOL dan Perusahaan PPN, Kontrak Berjangka Waktu, Angkutan Kapal Pupuk PKT). - Pengadaan Bahan Baku KCL. - Dampak Penerapan *Joint Cost*.	1. NPA Facility as Bridging of JTB Project Bridging Facility. 2. Company Strategic Issues: - Preparation for JTB Project Discussion with Deputy Minister of SOEs and Minister of Energy and Mineral Resources. - SPM Performance Evaluation. - Risk Management. - Marketing (Impact of ODOL and VAT Company provisions, Term Contract, PKT Fertilizer Ship Transportation). - Procurement of KCL Raw Materials. - Impact of Joint Cost Implementation.
20 Maret 2022 March 20, 2022	1. Pemberian Insentif Kinerja PI Tahun 2022	1. Incentivizing PI Performance in 2022
27 Maret 2022 March 27, 2022	1. *Support Letter* ke Rekind untuk Keperluan Penyelesaian Audit oleh KAP Tahun Buku 2021	1. Support Letter to Rekind for the Purpose of Completion of Audit by KAP for Financial Year 2021
4 April 2022 April 4, 2022	1. *Going Concern* Rekind 2. Laporan Kegiatan FGD HET Pupuk Non Subsidi 3. Isu Strategis Perusahaan: a. Direktur Pemasaran: - Terkait kendala operasional PIM - Terkait kendala produksi di Anper dan ketersediaan stok - Terkait komitmen PKG - Penggunaan Urea *Sweeping* b. Direktur Keuangan & Investasi: - Rencana *supporting letter* tidak jadi diberikan kepada Rekind - Terkait Saham Dwiwarna c. Direktur Transformasi Bisnis: Terkait rencana pelaksanaan kerjasama antara PI dan Bank Syariah untuk implementasi Kartu Tani d. Direktur SDM, TK & MR: Proses promosi jabatan	1. Going Concern Rekind 2. FGD Report on HET of Non-Subsidized Fertilizer 3. Company Strategic Issues: a. Marketing Director: - Regarding PIM operational constraints - Regarding production constraints at Anper and stock availability - Regarding PKG commitment - Urea Sweeping Usage b. Finance & Investment Director: - Supporting letter plan not given to Rekind - Related Dwiwarna Shares c. Director of Business Transformation: Regarding the plan to implement cooperation between PI and Sharia Bank for the implementation of the Tani Card. d. Director of HR, TK & MR: Promotion process

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda	
9 April 2022 April 9, 2022	1. Isu Strategis: a. Persiapan Rapat Kerja Komisi IV DPR RI b. Surat Kementan Perihal Permintaan Data dari BPK c. Reaktivasi PIM 1 d. Proyek Petrokimia di Papua Barat e. Persiapan RDP Komisi VII DPR RI f. Proyek Potash khususnya terkait spesifikasi bahan baku 2. Isu *Going Concern* Rekind pada Audit KAP Tahun Buku 2021 3. Tindak Lanjut Permohonan Rekind: Pencairan NPA *Underlying* Restitusi Pajak 4. Perpanjangan Fasilitas Pinjaman Bersama Bank Mandiri untuk Rekind 5. Penambahan Volume Pupuk Subsidi untuk Bantuan Langsung Petani (BLP) 6. Struktur Organisasi SPM	1. Strategic Issues: a. Preparation of Working Meeting of Commission IV DPR RI b. Ministry of Agriculture Letter Regarding Data Request from BPK c. PIM 1 Reactivation d. Petrochemical Project in West Papua e. Preparation for the hearing of Commission VII DPR RI f. Potash project especially related to raw material specifications 2. Rekind's Going Concern Issue in KAP Audit for Financial Year 2021 3. Follow-up of Rekind Request: Disbursement of NPA Underlying Tax Restitution 4. Extension of Bank Mandiri Joint Loan Facility for Rekind 5. Addition of Subsidized Fertilizer Volume for Direct Farmer Assistance (BLP) 6. SPM Organizational Structure
12 Mei 2022 May 12, 2022	1. Usulan Pedoman Manajemen SDM Single Platform Pupuk Indonesia Group	1. Proposal for Single Platform HR Management Guidelines Pupuk Indonesia Group
27 Mei 2022 May 27, 2022	1. *Pending Matters* Persiapan Rapat Gabungan Dewan Komisaris-Direksi PI 2. Kinerja Perusahaan	1. Pending Matters Preparation of Joint Meeting of Dekom-Direksi PI 2. Company Performance
8 Juni 2022 June 8, 2022	1. Pembahasan mengenai Dukungan atas PT Rekayasa Industri (Rekind) *Potential Project*	1. Discussion on Support for PT Rekayasa Industri (Rekind) Potential Project
15 Juni 2022 June 15, 2022	1. Implementasi PP No 23/2022 dan Sinkronisasi Peraturan Perusahaan 2. Tindak Lanjut Permohonan Rekind untuk *waiver cash collateral* atas penerbitan *performance bond* CO Proyek JTB 3. Presentasi Proposal Final Restrukturisasi Rekind dari Mansek 4. Keikutsertaan Pameran G20 5. Program Peningkatan Pangan Nasional 6. Usulan revisi alokasi subsidi rekomendasi panja 7. Rencana kenaikan *fee* distributor dan kios 8. *Update* rencana *launching* kios komersil 9. Sponsorship Angkat Besi dan Reaktivasi Kereta Api 10. *Agenda setting* pemberitaan pupuk dan kinerja BUMN	1. Implementation of PP No 23/2022 and Synchronization of Company Regulations 2. Follow-up on Rekind's request for waiver of cash collateral for the issuance of performance bond for JTB Project CO. 3. Final Restructuring Proposal Presentation of Rekind from Mansek 4. G20 Exhibition Participation 5. National Food Improvement Program 6. Proposed revision of subsidy allocation recommended by the committee 7. Plan to increase distributor and kiosk fees 8. Update on commercial kiosk launch plan 9. Sponsorship of Weightlifting and Railway Reactivation 10. Agenda setting of fertilizer news and SOE performance
16 Juni 2022 June 16, 2022	1. Usulan penetapan deviden Anper atas Kinerja Tahun 2021 2. Kalibrasi Penilaian Kinerja Karyawan PI Group Tahun 2021	1. Proposed determination of Anper dividend on 2021 Performance 2. PI Group Employee Performance Appraisal Calibration in 2021
12 Juli 2022 July 12, 2022	1. Permohonan Perpanjangan *Performance Bond* PT Rekayasa Industri (Rekind) Untuk Proyek PLTU Lombok 2. Dukungan Pemberian *Performance Bond* untuk Proyek-proyek Baru Rekind di Tahun 2022 3. Pengalokasian Tambahan Penjualan NPK	1. Application for Extension of Performance Bond of PT Rekayasa Industri (Rekind) for Lombok PLTU Project 2. Performance Bond Support for Rekind's New Projects in 2022 3. Additional Allocation of NPK Sales
21 Juli 2022 July 21, 2022	1. Pengajuan Penggunaan Deposito *Joint Account* PI Pangan	1. Application for Use of PI Pangan Joint Account Deposit

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda	
21 Juli 2022 July 21, 2022	1. Permohonan *Retention Bond* Proyek Lombok dan Permohonan Penundaan Pembayaran Pinjaman Pemegang Saham (PPS) PT Rekind 2. Permohonan Insentif dari Pilog 3. *Update* Draft Usulan Kementan untuk Revisi Alokasi Tahun 2022 4. Isu Strategis Perusahaan: a. Perembesan Pupuk Retail ke Industri b. Kerja sama *offtake* untuk proyek *soda ash* c. Import bahan baku gas d. Penyaluran Pupuk Bersubsidi	1. Request for Retention Bond for Lombok Project and Request for Postponement of Payment of Shareholder Loan (PPS) of PT Rekind 2. Incentive Request from Pilog 3. Update on MOA's Draft Proposal for Revised Allocation Year 2022 4. Company Strategic Issues: a. Retail Fertilizer Seepage to Industry b. Offtake cooperation for soda ash project c. Import of gas feedstock d. Distribution of Subsidized Fertilizers
27 Juli 2022 July 27, 2022	1. *Over Firing* Pabrik 5 PKT dan Penyusunan Laporan *Security* dan *Affordability* kepada Presiden 2. Penetapan COLA dan Merit PI Group 3. *Kick off* Digitalisasi Subsidi Pupuk 4. Kluster Pupuk Pangan *Innovation Forum*	1. Over Firing of 5 PKT Plant and Preparation of Security and Affordability Report to the President 2. COLA and Merit PI Group Determination 3. Kick off Digitization of Fertilizer Subsidy 4. Food Fertilizer Cluster Innovation Forum
3 Agustus 2022 August 3, 2022	1. *Update* Kondisi perbaikan Pabrik Amoniak Kaltim 5 2. *Update* Hasil Kajian S&OP Dari Aspek Finansial 3. NPK Bersubsidi PIM	1. Update on the state of repair of East Kalimantan Ammonia Plant 5 2. Update on S&OP Study Results from Financial Aspects 3. PIM Subsidized NPK
23 Agustus 2022 August 23, 2022	1. Usulan Revisi RKAP Tahun 2022 2. Rancangan RKAP 2023 PT Pupuk Indonesia (Persero)	1. Proposed Revision of RKAP Year 2022 2. Draft RKAP 2023 PT Pupuk Indonesia (Persero)
29 Agustus 2022 August 29, 2022	1. Paparan Konsultan tentang *streamlining* anak, cucu, dan cicit perusahaan. 2. Permohonan persetujuan penambahan nilai: *performance bond,retention bond* proyek JTB dan perpanjangan waktu.	1. Consultant's presentation on streamlining the company's children, grandchildren, and great-grandchildren. 2. Request for approval to increase the value of: performance bond, retention bond for JTB project and time extension.
1 September 2022 September 1, 2022	1. Revisi RKAP Tahun 2022 dan Rancangan RKAP 2023 PT Pupuk Indonesia 2. *Website* Perusahaan	1. Revision of RKAP 2022 and Draft RKAP 2023 PT Pupuk Indonesia 2. Company Website
13 September 2022 September 13, 2022	1. Kajian *Streamlining* Anak Perusahaan dan Afiliasi 2. Kios Komersil	1. Subsidiary and Affiliate Streamlining Study 2. Commercial Kiosk
20 September 2022 September 20, 2022	1. Rencana Penetapan Alokasi Subsidi Pupuk Subsidi Tahun 2023 dari Kementan 2. Pedoman Alokasi Biaya untuk Perhitungan HPP subsidi sebagai Tindak Lanjut LHP BPK 3. Persetujuan Perpanjangan *Performance Bond* Proyek Rekind SPLM Soetta 4. HoA dengan MDI terkait Agri Fund Pengadaan Sepatu Olahraga Karyawan	1. Ministry of Agriculture's 2023 Fertilizer Subsidy Allocation Plan 2. Cost Allocation Guidelines for Subsidy COGS Calculation as a Follow-up to the BPK LHP 3. Approval of Performance Bond Extension for Rekind SPLM Soetta Project 4. HoA with MDI on Agri Fund for Employee Sport Shoes Procurement
25 September 2022 September 25, 2022	1. Persiapan Rapat Gabungan: Penjelasan Kebakaran di Kaltim-5 dan pencegahannya 2. Penjelasan Demo Pensiunan PKT 3. Persiapan Rapat Gabungan: Piutang Usaha 4. Persiapan Rapat Gabungan: Disparitas Harga Jual Urea 2022 5. Pengembangan Bisnis Pupuk Indonesia di Dubai	1. Joint Meeting Preparation: Explanation of Fire in Kaltim-5 and its prevention 2. CCP Retiree Demo Explanation 3. Joint Meeting Preparation: Accounts Receivable 4. Joint Meeting Preparation: Urea Selling Price Disparity 2022 5. Business Development of Pupuk Indonesia in Dubai.
12 Oktober 2022 October 12, 2022	*Progress Streamlining* Pupuk Indonesia Grup	Streamlining Pupuk Indonesia Group Progress

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda	
22 Oktober 2022 October 22, 2022	1. Presentasi DDI tentang HCM *Grand Strategy & Roadmap* 2. Revisi RKAP 2022 dan Usulan RKAP 2023 3. Rayonisasi PSO 2023 4. Pemenuhan pasokan NPK Kakao 5. *Product Tracking and Trace* 6. Penentuan Risiko Utama dan Penetapan *Risk Appetite* RKAP 2023 7. *Single Branding* 8. Progres Proyek-proyek Pengembangan 9. Kondisi Pabrik-pabrik yg sedang dalam perbaikan 10. Rencana Penarikan Sisa Dividen Kinerja tahun buku 2021 dari PKT	1. DDI presentation on HCM Grand Strategy & Roadmap 2. Revised 2022 RKAP and Proposed 2023 RKAP 3. PSO Rayonization 2023 4. Cocoa NPK supply fulfillment 5. Product Tracking and Trace 6. Determination of Main Risks and Establishment of Risk Appetite RKAP 2023 7. Single Branding 8. Progress of Development Projects 9. Condition of factories under repair 10. Plan to Withdraw the Remaining Performance Dividend for the financial year 2021 from PKT
27 Oktober 2022 October 27, 2022	1. Progres *Streamlining* Pupuk Indonesia Grup 2. Kios Komersil	1. Pupuk Indonesia Group Streamlining Progress 2. Commercial Kiosk
24 November 2022 November 24, 2022	Kinerja Anak Perusahaan Produsen Pupuk	Performance of Fertilizer Producer Subsidiaries
5 Desember 2022 December 5, 2022	1. Persetujuan asumsi harga jual untuk RKAP 2023 2. Revisi RKAP 2022 sebagai tindaklanjut arahan Pak Wamen dan isu-isunya 3. Permohonan Rekind untuk pinjaman NPA sebagai pelunasan utang MUFG 4. Rayonisasi PSO 2023 5. Persetujuan terkait jual beli aset lahan dan kantor Rekind Kalibata 6. Persiapan proyek methanol Papua Barat 7. Progres *streamlining* lini bisnis PI hingga bulan November 2022 8. Usulan perubahan struktur organisasi PKT terkait IPO	1. Approval of selling price assumptions for 2023 RKAP 2. Revision of the 2022 RKAP as a follow-up to Mr. Wamen's direction and issues 3. Rekind's request for NPA loan as MUFG debt repayment 4. PSO Rayonization 2023 5. Approval of the sale and purchase of Rekind kalibata land and office assets. 6. West papua methanol project preparation 7. PI business line streamlining progress until November 2022 8. Proposed changes to PKT's organizational structure related to IPO
12 Desember 2022 December 12, 2022	*Streamlining* Pupuk Indonesia Grup	Streamlining Pupuk Indonesia Group
18 Desember 2022 December 18, 2022	Upaya Peningkatan Kerja Rekind	Rekind's Performance Improvement

REALISASI RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Selama tahun 2022, Dewan Komisaris dan Direksi telah menyelenggarakan 12 (dua belas) kali rapat gabungan sebagaimana tersaji pada table di bawah ini:

REALIZATION OF JOINT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

During 2022, the Board of Directors and the Board of commissioners held 12 (twelve) joint meetings as presented in the table below:

Peserta Participants	Jumlah Rapat* Number of Meetings*	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran % Attendance
Dewan Komisaris I Board of Commissioners			
Darmin Nasution	12	11	92
Bambang Widianto*	10	8	80
Farhat Brachma**	2	1	50
Suwandi	12	11	92
Febrio Nathan Kacaribu	12	4	33
Ari Dwipayana	12	8	66
Mustoha Iskandar	12	12	100

Peserta Participants	Jumlah Rapat* Number of Meetings*	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran % Attendance
Anhar Adel	12	11	92
Anwar Sanusi	12	10	83
Direksi I Board of Directors			
Achmad Bakir Pasaman	12	11	92
Nugroho Christijanto	12	10	83
Bob Indiarto	12	12	100
Wono Budi Tjahyono	12	12	100
Panji Winanteya Ruky	12	11	92
Tina T. Kemala Intan	12	12	100
Gusrizal	12	11	92
Jamsaton Nababan	12	11	92

*) Masa jabatan berakhir pada 4 November 2022 | Tenure ends on November 4, 2022
**) Masa jabatan dimulai sejak 4 November 2022 | Service term starts from November 4, 2022

AGENDA RAPAT GABUNGAN
Joint Meeting Agenda

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda	
28 Januari 2022 January 28, 2022	1. Tindak lanjut hasil terkait kinerja bulan November 2021 2. Kinerja Perusahaan bulan Desember 2021 3. Progres implementasi PaDi 4. Isu-isu strategis lainnya	1. Follow-up on November 2021 performance-related results 2. Company Performance in December 2021 3. PaDi Implementation Progress 4. Other Strategic Issues
25 Februari 2022 February 25, 2022	1. Tindak lanjut hasil terkait kinerja bulan Desember 2021 2. Kinerja Perusahaan bulan Januari 2022 3. Pembahasan usulan KPI individu Direksi tahun 2022 4. Isu-isu strategis lainnya	1. Follow-up of performance-related results in December 2021 2. Company Performance in January 2022 3. Discussion on the proposed individual KPIs of the Board of Directors for 2022 4. Other strategic issues
31 Maret 2022 March 31, 2022	1. Tindak lanjut hasil terkait kinerja bulan Januari 2022 2. Kinerja perusahaan bulan Februari 2022 3. Pembahasan rencana restrukturisasi PT Rekind 4. Isu-isu strategis lainnya	1. Follow-up of performance-related results in January 2022 2. Company performance in February 2022 3. Discussion of PT Rekind's restructuring plan 4. Other strategic issues
25 April 2022 April 25, 2022	1. Tindak lanjut hasil terkait kinerja bulan Februari 2022 2. Kinerja perusahaan bulan Maret 2022 3. Isu-isu strategis lainnya	1. Follow-up of performance-related results in February 2022 2. Company performance in March 2022 3. Other strategic issues
27 Mei 2022 May 27, 2022	1. Tindak lanjut hasil terkait kinerja bulan Maret 2022 2. Kinerja perusahaan bulan April 2022 3. Persiapan RUPS Audit tahun buku 2021 4. Isu-isu strategis lainnya	1. Follow-up of performance-related results in March 2022 2. Company performance in April 2022 3. Preparation for the Audit GMS for the 2021 financial year 4. Other strategic issues
30 Juni 2022 June 30, 2022	1. Tindak lanjut hasil terkait kinerja bulan April 2022 2. Kinerja perusahaan bulan Mei 2022 3. Isu-isu strategis lainnya	1. Follow-up of performance-related results in April 2022 2. Company performance in May 2022 3. Other strategic issues

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda	
28 Juli 2022 July 28, 2022	1. Tindak lanjut hasil terkait kinerja bulan Mei 2022 2. Kinerja perusahaan bulan Juni 2022 3. Isu-isu strategis lainnya	1. Follow-up of performance-related results in May 2022 2. Company performance in June 2022 3. Other strategic issues
30 Agustus 2022 August 30, 2022	1. Tindak lanjut hasil terkait kinerja bulan Juni 2022 2. Kinerja perusahaan bulan Juli 2022 3. Hal-hal yang disampaikan oleh Direksi 4. Isu-isu strategis lainnya	1. Follow-up of performance-related results in June 2022 2. Company performance in July 2022 3. Matters presented by the Board of Directors 4. Other strategic issues
29 September 2022 September 29, 2022	1. Tindak lanjut hasil terkait kinerja bulan Juli 2022 2. Kinerja perusahaan bulan Agustus 2022 3. Hal-hal yang disampaikan oleh Direksi 4. Isu-isu strategis lainnya	1. Follow-up of performance-related results in July 2022 2. Company performance in August 2022 3. Matters presented by the Board of Directors 4. Other strategic issues
31 Oktober 2022 October 31, 2022	1. Tindak lanjut hasil terkait kinerja bulan Agustus 2022 2. Kinerja perusahaan bulan September 2022 3. Hal-hal yang disampaikan oleh Direksi 4. Finalisasi revisi RKAP tahun 2022 5. Isu-isu strategis lainnya	1. Follow-up of performance-related results in August 2022 2. Company performance in September 2022 3. Matters presented by the Board of Directors 4. Finalize the revised 2022 RKAP 5. Other Strategic Issues
30 November 2022 November 30, 2022	1. Tindak lanjut hasil terkait kinerja bulan September 2022 2. Kinerja perusahaan bulan Oktober 2022 3. Hal-hal yang disampaikan oleh Direksi 4. Isu-isu strategis lainnya	1. Follow-up of performance-related results in September 2022 2. Company performance in October 2022 3. Matters presented by the Board of Directors 4. Other strategic issues
23 Desember 2022 December 23, 2022	1. Tindak lanjut hasil terkait kinerja bulan Oktober 2022 2. Kinerja perusahaan bulan November 2022 3. Hal-hal yang disampaikan oleh Direksi 4. Isu-isu strategis lainnya	1. Follow-up of performance-related results in October 2022 2. Company performance in November 2022 3. Matters presented by the Board of Directors 4. Other strategic issues

Organ Pendukung Dewan Komisaris

Supporting Organs of the Board of Commissioners

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya, Dewan Komisaris dibantu oleh organ pendukung di bawah Dewan Komisaris yang terdiri atas 4 (empat) organ, yaitu Komite Audit, Komite GCG dan Pemantauan Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Sekretariat Dewan Komisaris. Di samping itu, Dewan Komisaris menjalankan fungsi remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

In carrying out its management duties, the Board of Commissioners is assisted by supporting organs under the Board of Commissioners consisting of 4 (four) organs, namely the Audit Committee, GCG and Risk Management Monitoring Committee, Nomination and Remuneration Committee, and Board of Commissioners Secretariat. In addition, the Board of Commissioners carries out the remuneration function for the Board of Commissioners and Board of Directors.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sekretaris Dewan Komisaris memimpin Sekretariat Dewan Komisaris untuk membantu kelancaran kegiatan administrasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

SECRETARY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Secretary of the Board of Commissioners leads the Secretariat of the Board of Commissioners to assist in the smooth administration of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners.

Ketentuan Masa Jabatan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, masa jabatan Sekretaris Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris maksimum 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun.

Term of Office Provisions

In accordance with the provisions of Article 5 of the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises, the term of office of the Secretary of the Board of Commissioners is determined by the Board of Commissioners for a maximum of 3 (three) years and may be reappointed for a maximum of 2 (two) years.

Pejabat Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris dijabat oleh Gempita Pratiwi. Beliau menjabat sejak 31 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 04/KEP.KOM/I/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero).

Secretary of the Board of Commissioners

The Secretary of the Board of Commissioners is Gempita Pratiwi. She has served since January 31, 2020 based on the Decree of the Board of Commissioners No. 04/KEP.KOM/I/2020 dated January 31, 2020 concerning the Dismissal and Appointment of the Secretary of the Board of Commissioners of PT Pupuk Indonesia (Persero).

Gempita Pratiwi

Periode Jabatan Position Period	Ke-2	Second
Warga Negara | Citizen	Indonesia	Indonesian
Usia | Age	35 tahun	35 years old
Tempat, Tanggal, Lahir Place, Date of Birth	Palembang, 17 Juli 1987	Palembang, July 17, 1987
Domisili | Domicile	Jakarta	Jakarta
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Keputusan Dewan Komisaris No. 04/KEP. KOM/I/2020 yang diperbarui dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.002/KEP/KOM/II/2023.	Decree of the Board of Commissioners No. 04/KEP. KOM/I/2020 which was updated with Board of Commissioners Decree No.002/KEP/KOM/II/2023.

Pendidikan | Education	S2	S2
Pengalaman Kerja **Work Experience**	- Staf Dewan Komisaris/Dewan Pengawas PT Perkebunan Nusantara IX - Sekretaris Dekom/Dewas PT Djakarta Lloyd	- Staff of the Board of Commissioners/Supervisory Board of PT Perkebunan Nusantara IX - Secretary of Dekom/Dewas of PT Djakarta Lloyd

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Rincian tugas yang diemban oleh Sekretaris Dewan Komisaris disampaikan dalam uraian di bawah ini:

1. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. Mengoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris;
4. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.

Rincian realisasi pengembangan kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris disampaikan pada bab "Profil Perusahaan" yang terdapat dalam laporan tahunan ini.

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2022

Penilaian kinerja Sekretaris Dewan Komisaris di Tahun 2022 diwujudkan melalui pelaksanaan rapat Dewan Komisaris sebanyak 62 kali rapat yang terdiri dari rapat rutin kinerja bulanan maupun rapat non-rutin; membantu konsep surat/korespondensi Dewan Komisaris sebanyak 78 surat, menjadi penghubung (*liaison officer*) bagi Dewan Komisaris; serta memberikan informasi yang dibutuhkan Dewan Komisaris secara berkala maupun sewaktu-waktu.

KOMITE AUDIT

Dewan Komisaris membentuk Komite Audit untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam mendorong diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik, terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai, meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan, serta mengkaji ruang lingkup, ketepatan, kemandirian dan objektivitas akuntan publik. Pembentukan Komite Audit mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, serta Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Duties and Responsibilities of the Secretary of the Board of Commissioners

Details of the duties carried out by the Secretary of the Board of Commissioners are presented in the description below:

1. Ensure that the Board of Commissioners complies with laws and regulations and implements GCG principles;
2. Provide information required by the Board of Commissioners periodically and/or at any time if requested;
3. Coordinate Committee members, if necessary, in order to facilitate the duties of the Board of Commissioners;
4. As a liaison officer of the Board of Commissioners with other parties.

Details of the realization of the competency development of the Secretary of the Board of Commissioners are presented in the "Company Profile" chapter contained in this annual report.

Report on the Implementation of Duties 2022

The performance assessment of the Secretary of the Board of Commissioners in 2022 was realized through the implementation of 62 meetings of the Board of Commissioners consisting of routine monthly performance meetings and non-routine meetings; assisting the draft of 78 letters/correspondence of the Board of Commissioners, becoming a liaison officer for the Board of Commissioners; and providing information needed by the Board of Commissioners periodically or at any time.

AUDIT COMMITTEE

The Board of Commissioners established the Audit Committee to assist the duties of the Board of Commissioners in encouraging the implementation of good corporate governance, the establishment of an adequate internal control structure, improving the quality of financial disclosure and reporting, and reviewing the scope, accuracy, independence and objectivity of public accountants. The establishment of the Audit Committee refers to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-12/MBU/2012 on the Supporting Organ of the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs, as well as OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015 on the Establishment and Implementation of the Audit Committee.

Kualifikasi Komite Audit

Untuk dapat menjadi anggota Komite Audit khususnya dari pihak independen, seseorang wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang baik, profesional, dan mempunyai pengetahuan, serta pengalaman kerja yang cukup di bidang keuangan/akuntansi/teknis dan/atau pengawasan/pemeriksaan.
2. Mampu berkomunikasi secara efektif.
3. Dapat menyediakan waktu untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Tidak memiliki benturan kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perseroan.
5. Anggota Komite Audit yang berasal dari luar perusahaan (bukan anggota Dewan Komisaris) tidak boleh merangkap jabatan sebagai:
   a. Anggota Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan dan Cucu Perusahaan PI Group.
   b. Anggota Komite Audit pada Anak Perusahaan dan Cucu Perusahaan PI Group.
   c. Anggota Komite Audit pada BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN lain.
   d. Jabatan lainnya yang dilarang untuk dirangkap berdasarkan kebijakan internal perusahaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

Audit Committee Qualifications

To be a member of the Audit Committee, especially from an independent party, a person must fulfill the following requirements:

1. Have good integrity, professionalism, and have sufficient knowledge and work experience in the field of finance/accounting/technical and/or supervision/examination.
2. Able to communicate effectively.
3. Can make time to complete their tasks and responsibilities.
4. Has no personal conflicts of interest that could have a negative impact and conflict of interest on the Company.
5. Audit Committee members who come from outside the company (not members of the Board of Commissioners) may not hold concurrent positions as:
   a. Member of the Board of Commissioners of PI Group's Subsidiaries and Grandchildren.
   b. Member of the Audit Committee of PI Group's Subsidiaries and Grandchildren.
   c. Member of Audit Committee in BUMN and/or other BUMN subsidiaries.
   d. Other positions that are prohibited to be held concurrently based on the company's internal policies and/or applicable laws and regulations.

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui surat keputusan. Pemberhentian anggota Komite Audit dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya dan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

Appointment and Dismissal

The appointment and dismissal of Audit Committee members is carried out by the Board of Commissioners through a decision letter. Dismissal of Audit Committee members can be carried out if the person concerned ends his/her membership term and based on the decision of the Board of Commissioners, is dismissed because he/she does not meet the predetermined performance and/or is incompetent in carrying out his/her duties.

Ketentuan Masa Jabatan

Ketentuan masa jabatan anggota Komite Audit diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, pada Pasal 20 yang menyatakan, "Masa jabatan anggota komite lain yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu".

Term of Office Provisions

The terms of office of the Audit Committee members are regulated in the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012 concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs, in Article 20 which states, "The term of office of other committee members who are not members of the Board of Commissioners/Supervisory Board of the Company is a maximum of 3 (three) years and can be extended once for 2 (two) years, without prejudice to the right of the Board of Commissioners/Supervisory Board to dismiss them at any time".

Jumlah, Komposisi, dan Susunan Komite Audit Tahun 2022

Number, Composition, and Composition of Audit Committee in 2022

SUSUNAN KOMITE AUDIT
Composition of the Audit Committee

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Darmin Nasution	Ketua Komite Audit Chairman of the Audit Committee	Keputusan Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 015/KEP.KOM/XI/2022 tanggal 11 November 2022 Decree of the Board of Commissioners of PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 015/KEP.KOM/XI/2022 dated 11 November 2022	11 November 2022 - bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris November 11, 2022 - concurrent with the term as Commissioner	Ke-1 1st
Mustoha Iskandar	Wakil Ketua Komite Audit Vice Chairman of the Audit Committee	Keputusan Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 015/KEP.KOM/XI/2022 tanggal 11 November 2022 Decree of the Board of Commissioners of PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 015/KEP.KOM/XI/2022 dated 11 November 2022	11 November 2022 - bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris November 11, 2022 - concurrent with the term as Commissioner	Ke-1 1st
Christine Tjen	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris No. 19/KEP.KOM/XI/2020 tanggal 16 November 2020 Decree of the Board of Commissioners No. 19/KEP. KOM/XI/2020 dated November 16, 2020	16 November 2020-15 November 2023 November 16, 2020-November 15, 2023	Ke-1 1st
RM. Wiratmoko Prasidhanto	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 12/KEP.KOM/IX/2021 tanggal 27 September 2021 Decree of the Board of Commissioners of PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 12/KEP.KOM/IX/2021 dated 27 September 2021	27 September 2021 -27 September 2024 September 27, 2021-September 27, 2024	Ke-1 1st

Profil Ketua dan Anggota Komite Audit

Darmin Nasution
Ketua Komite Audit

Rincian profil disampaikan secara pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Bab "Profil Perusahaan" pada Laporan Tahunan ini.

Mustoha Iskandar
Wakil Ketua Komite Audit

Rincian profil disampaikan secara pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Bab "Profil Perusahaan" pada Laporan Tahunan ini.

Christine Tjen
Anggota Komite Audit

Profile of the Chairman and Members of the Audit Committee

Darmin Nasution
Chairman of the Audit Committee

Details of the profile are provided in the "Profile of the Board of Commissioners" section in the "Company Profile" chapter of this Annual Report.

Mustoha Iskandar
Vice Chairman of the Audit Committee

Details of the profile are provided in the "Profile of the Board of Commissioners" section in the "Company Profile" chapter of this Annual Report.

Christine Tjen
Audit Committee Member

Warga Negara | Citizen	Indonesia	Indonesian
Usia | Age	44 tahun	44 years old
Tempat, Tanggal, Lahir **Place, Date of Birth**	Tangerang, 3 Agustus 1978	Tangerang, August 3, 1978
Domisili | Domicile	Jakarta	Jakarta
Pendidikan | Education	• University of Sydney, Sydney NSW Master of International Taxation (2006) • University of Indonesia, Depok, Indonesia Bachelor in Accounting (2000)	• University of Sydney, Sydney NSW Master of International Taxation (2006) • University of Indonesia, Depok, Indonesia Bachelor in Accounting (2000)
Sertifikasi Profesi **Professional Certificate**	CA dan CACP	CA and CACP
Pengalaman Kerja **Work Experience**	• Coordinator at Tax Education and Research Center FEB UI Periode: November 2018-Sekarang; • Associate Director for Administration and Finance LPEM FEB UI Period: January 2015-Sekarang; • Risk Management Committee PT Perusahaan Pariwisata Indonesia (Persero)/ITDC Maret 2016-2020.	• Coordinator at Tax Education and Research Center FEB UI Period: November 2018-Present; • Associate Director for Administration and Finance LPEM FEB UI Period: January 2015-Present; • Risk Management Committee PT Perusahaan Pariwisata Indonesia (Persero)/ITDC Maret 2016-2020.

RM. Wiratmoko Prasidhanto
Anggota Komite Audit

RM. Wiratmoko Prasidhanto
Audit Committee Member

Warga Negara | Citizen	Indonesia	Indonesian
Usia | Age	40 tahun	40 years old
Tempat, Tanggal, Lahir **Place, Date of Birth**	Yogyakarta, 20 Agustus 1982	Yogyakarta, August 20, 1982
Domisili | Domicile	Jakarta	Jakarta
Pendidikan | Education	• S1 – Akuntasi Universitas Indonesia (2009); • D3 – Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2003);	• S1 - Accounting University of Indonesia (2009); • D3 - Accounting State College of Accountancy (2003);
Sertifikasi Profesi **Professional Certificate**	CACP	CACP
Pengalaman Kerja **Work Experience**	Kementerian BUMN a. Penata Kelola Perusahaan Negara Muda pada Subkoordinator MR-1 (Desember 2020–sekarang); • Sekretaris Dewan Komisaris PT Pupuk Kalimantan Timur (Juni 2018–Agustus 2021).	Ministry of SOEs a. Junior State Corporate Manager at Subcoordinator MR-1 (December 2020–present); • Secretary of the Board of Commissioners of PT Pupuk Kalimantan Timur (June 2018–August 2021).

Independensi Komite Audit

Independensi adalah syarat menjadi Komite Audit. Seorang anggota Komite Audit harus independen, objektif dan profesional sebagaimana diatur dalam Audit *Committee Charter* yang diperbaharui secara berkala menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain tercantum dalam *Audit Committee*

Audit Committee Independence

Independence is a requirement for the Audit Committee. A member of the Audit Committee must be independent, objective and professional as stipulated in the Audit Committee Charter which is updated regularly in accordance with the prevailing laws and regulations. In addition to being stated in the Audit Committee

Charter, anggota Komite di bawah Dewan Komisaris menandatangani pernyataan independensi Komite Audit.

Charter, members of the Committee under the Board of Commissioners sign a statement of independence of the Audit Committee.

Pengungkapan Independensi Komite Audit

Disclosure of Audit Committee Independence

Aspek Independesi Independence Aspect	Darmin Nasution	Mustoha Iskandar	Christine Tjen	RM. Wiratmoko Prasidhanto
Memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has a financial relationship with the Board of Commissioners and Directors	x	x	x	x
Memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, Entitas Anak maupun Entitas Afiliasi Has a management relationship in the Company, Subsidiaries or Affiliated Entities	x	x	x	x
Memiliki saham Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung Own shares of the Company, either directly or indirectly	x	x	x	x
Memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Having a family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors and/or fellow Committee members	x	x	x	x
Menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan Pemerintah Serving as an administrator of political parties, officials and the Government	x	x	x	x

PAKTA INTEGRITAS
PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

Pedoman Kerja: Piagam Komite Audit

Dewan Komisaris telah menetapkan pedoman kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas Komite Audit yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 014/KEP.KOM/XI/2021 tentang Piagam Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia tanggal 5 Desember 2019 sebagai acuan

Work Guidelines: Audit Committee Charter

The Board of Commissioners has established work guidelines to support the implementation of the Audit Committee's duties which have been determined based on Decree 014/KEP.KOM/XI/2021 concerning the Audit Committee Charter of PT Pupuk Indonesia Company (Persero) dated December 5, 2019 as a reference for the

Komite Audit dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang memenuhi ketentuan *Good Corporate Governance*. Kebijakan ini merupakan pedoman untuk mengikat dan mengatur Anggota Komite Audit dalam melaksanakan dan menjalankan aktivitas.

Pada tahun 2022, Perusahaan telah melakukan pemutakhiran atas Piagam Komite Audit.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris. Secara rinci, tugas Komite Audit adalah:

1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal;
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
4. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan;
5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya;
6. Memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku;
7. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan dan kepatuhan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat Perusahaan dengan pihak ketiga;
8. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan auditor eksternal yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbal jasa;
9. Melakukan penelaahan atas saran, permasalahan atau keluhan stakeholders yang disampaikan secara langsung kepada Dewan Komisaris;
10. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan lain sesuai dengan permintaan Dewan Komisaris.

Audit Committee in carrying out its duties and functions that meet the provisions of Good Corporate Governance. This policy is a guideline to bind and regulate Audit Committee Members in carrying out and carrying out activities.

In 2022, the Company has updated the Audit Committee Charter.

Duties and Responsibilities

The Audit Committee is tasked with providing opinions to the Board of Commissioners on reports or matters submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners, identifying matters that require the attention of the Board of Commissioners, and carrying out other tasks related to the duties of the Board of Commissioners. In detail, the duties of the Audit Committee are:

1. Assist the Board of Commissioners to ensure the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of the implementation of the duties of the external auditor and internal auditor;
2. Assessing the implementation of activities and audit results carried out by the Internal Audit Unit and external auditors;
3. Provide recommendations on improving the management control system and its implementation;
4. Ensure that satisfactory evaluation procedures are in place for all information released by the Company;
5. Identify matters that require the attention of the Board of Commissioners and other duties of the Board of Commissioners;
6. Ensure financial statements are fairly presented in accordance with applicable accounting principles;
7. Reviewing compliance with laws and regulations related to the Company's activities and compliance with all agreements and commitments made by the Company with third parties;
8. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of external auditors based on independence, scope of assignment, and fees;
9. Reviewing suggestions, problems or complaints of stakeholders submitted directly to the Board of Commissioners;
10. Carry out other supervisory duties as requested by the Board of Commissioners.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit berwenang untuk mengakses catatan atau informasi karyawan, dana, aset, serta sumber daya Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Rincian realisasi pengembangan kompetensi Komite Audit disampaikan dalam bab Profil Perusahaan yang terdapat di Laporan Tahunan ini.

Rapat Komite Audit

Sepanjang tahun 2022, Komite Audit telah menyelenggarakan 27 kali rapat dengan rekapitulasi kehadiran sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

Rekapitulasi Kehadiran Komite Audit pada Rapat Tahun 2022

In carrying out its duties, the Audit Committee is authorized to access records or information on employees, funds, assets, and other Company resources related to the performance of its duties.

Audit Committee Competency Development

Details of the realization of the Audit Committee competency development are presented in the Company Profile chapter contained in this Annual Report.

Audit Committee Meeting

Throughout 2022, the Audit Committee held 27 meetings with a recapitulation of attendance as presented in the table below.

Recapitulation of Audit Committee Attendance at Meetings in 2022

Nama Name	**Jumlah Rapat** Number of Meeting	**Jumlah Kehadiran** Number of Attendance	**% Kehadiran** Attendance %
Darmin Nasution	27	26	96%
Mustoha Iskandar	27	26	96%
Christine Tjen	27	27	100%
RM. Wiratmoko Prasidhanto	27	27	100%
Rata-rata	**27**	**27**	**98%**

Agenda Rapat Komite Audit

Audit Committee Meeting Agenda

Tanggal Rapat Date of Meeting	**Agenda**	
7 Januari 2022 January 7, 2022	1. Pembahasan progres temuan-temuan Audit SPI; dan 2. Perkembangan pekerjaan pengawasan Internal oleh SPI.	1. Discussion of the progress of SPI Audit findings; and 2. Progress of Internal control work by SPI.
21 Januari 2022 January 21, 2022	1. Pembahasan tindak lanjut/*pending matters* hasil rapat kinerja bulan November 2021; 2. Pembahasan kinerja Perusahaan bulan Desember 2021 (termasuk di dalamnya *template monthly monitoring* Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan utang usaha); 3. Progres Audit tahun buku 2021; 4. Rencana Program Strategis *Agrosolution*-Makmur tahun 2022; dan 5. Isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion of follow-up/pending matters from the November 2021 performance meeting results; 2. Discussion of the Company's performance in December 2021 (including the monthly monitoring template of the Deputy Minister for SOEs I and the progress of realizing the position of trade receivables and trade payables); 3. Audit progress for the 2021 fiscal year; 4. Agrosolution-Makmur Strategic Program Plan for 2022; and 5. Other strategic issues.
4 Februari 2022 February 4, 2022	1. Pembahasan progres temuan-temuan Audit SPI; dan 2. Perkembangan pekerjaan pengawasan Internal oleh SPI.	1. Discussion of the progress of SPI Audit findings; and 2. Progress of Internal control work by SPI.

Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda	
21 Februari 2022 February 21, 2022	1. Pembahasan tindak lanjut/*pending matters* hasil rapat kinerja bulan Desember 2021; 2. Pembahasan kinerja Perusahaan bulan Januari 2022 (termasuk di dalamnya *template monthly monitoring* Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan utang usaha); 3. Progres Audit Tahun Buku 2021 oleh KAP; dan 4. Isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion of follow-up/pending matters from the December 2021 performance meeting results; 2. Discussion of the Company's performance in January 2022 (including the monthly monitoring template of the Deputy Minister of SOEs I and the progress of realization of the position of trade receivables and trade payables); 3. Audit progress for the 2021 fiscal year by KAP; and 4. Other strategic issues.
9 Maret 2022 March 9, 2022	1. Pembahasan progres temuan-temuan Audit SPI; dan 2. Perkembangan pekerjaan pengawasan Internal oleh SPI.	1. Discussion of the progress of SPI Audit findings; and 2. Progress of Internal control work by SPI.
21 Maret 2022 March 21, 2022	1. Pembahasan tindak lanjut/*pending matters* hasil rapat kinerja bulan Januari 2022; 2. Pembahasan kinerja Perusahaan bulan Februari 2022 (termasuk di dalamnya *template monthly monitoring* Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan utang usaha); 3. Progres Audit Tahun Buku 2021 oleh KAP; 4. Progres pengembangan pabrik Urea dan NPK; dan 5. Isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion of follow-up/pending matters from the January 2022 performance meeting results; 2. Discussion of the Company's performance in February 2022 (including the monthly monitoring template of the Deputy Minister for SOEs I and the progress of realization of trade receivables and trade payables); 3. Audit progress for the 2021 fiscal year by KAP; 4. Progress on the development of the Urea and NPK plants; and 5. Other strategic issues.
8 April 2022 April 8, 2022	1. Pembahasan progres temuan-temuan Audit SPI; dan 2. Perkembangan pekerjaan pengawasan Internal oleh SPI.	1. Discussion of the progress of SPI Audit findings; and 2. Progress of Internal control work by SPI.
18 April 2022 April 18, 2022	1. Pembahasan tindak lanjut/*pending matters* hasil rapat kinerja bulan Februari 2022; 2. Pembahasan kinerja Perusahaan bulan Maret 2022 (termasuk di dalamnya *template monthly monitoring* Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan utang usaha); 3. Perkembangan harga beli gas PKT ke PT Pertamina (Persero); dan 4. Isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion of follow-up/pending matters from the February 2022 performance meeting results; 2. Discussion of the Company's performance in March 2022 (including the monthly monitoring template of the Deputy Minister for SOEs I and the progress of realization of trade receivables and trade payables); 3. Development of PKT's gas purchase price to PT Pertamina (Persero); and 4. Other strategic issues.
11 Mei 2022 May 11, 2022	1. Pembahasan progres temuan-temuan Audit SPI; dan 2. Perkembangan pekerjaan pengawasan Internal oleh SPI.	1. Discussion of the progress of SPI Audit findings; and 2. Progress of Internal control work by SPI.
19 Mei 2022 May 19, 2022	1. Pembahasan tindak lanjut/*pending matters* hasil rapat kinerja bulan Maret 2022; 2. Pembahasan kinerja Perusahaan bulan April 2022 (termasuk di dalamnya *template monthly monitoring* Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan utang usaha); 3. Isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion of follow-up/pending matters from the March 2022 performance meeting results; 2. Discussion of the Company's performance in April 2022 (including the monthly monitoring template of the Deputy Minister for SOEs I and the progress of realization of trade receivables and trade payables); 3. Other strategic issues.
15 Juni 2022 June 15, 2022	1. Pembahasan progres temuan-temuan Audit SPI; dan 2. Perkembangan pekerjaan pengawasan Internal oleh SPI.	1. Discussion of the progress of SPI Audit findings; and 2. Progress of Internal control work by SPI.

Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda	
20 Juni 2022 June 20, 2022	1. Pembahasan tindak lanjut/*pending matters* hasil rapat kinerja bulan April 2022; 2. Pembahasan kinerja Perusahaan bulan Mei 2022 (termasuk di dalamnya *template monthly monitoring* Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan utang usaha) 3. *Update* capaian progres pelaksanaan *Capital Expenditure* (Capex); dan 4. Isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion of follow-up/pending matters from the April 2022 performance meeting results; 2. Discussion of the Company's performance in May 2022 (including the monthly monitoring template of the Deputy Minister for SOEs I and the progress of realization of trade receivables and trade payables); 3. Update on Capital Expenditure (Capex) implementation progress; and 4. Other strategic issues.
11 Juli 2022 July 11, 2022	1. Pembahasan progres temuan-temuan Audit SPI; dan 2. Perkembangan pekerjaan pengawasan Internal oleh SPI; dan 3. Isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion of the progress of SPI Audit findings; and 2. Progress of Internal control work by SPI. 3. Other strategic issues.
19 Juli 2022 July 19, 2022	1. Pembahasan tindak lanjut/*pending matters* hasil rapat kinerja bulan Mei 2022; 2. Pembahasan kinerja Perusahaan bulan Juni 2022 (termasuk di dalamnya *template monthly monitoring* Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan utang usaha) 3. Paparan terkait data kenaikan biaya modal kerja dari piutang subsidi 2021 dan 2022; dan 4. Isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion of follow-up/pending matters from the May 2022 performance meeting results; 2. Discussion of the Company's performance in June 2022 (including the monthly monitoring template of the Deputy Minister for SOEs I and the progress of realization of trade receivables and trade payables); 3. Exposure to working capital cost increase data from 2021 and 2022 subsidy receivables; and 4. Other strategic issues.
9 Agustus 2022 August 9, 2022	1. Pembahasan progres temuan-temuan Audit SPI; dan 2. Perkembangan pekerjaan pengawasan Internal oleh SPI; dan 3. Isu-isu strategis lainnya. (Persiapan Pengadaan KAP Tahun Buku 2022).	1. Discussion of the progress of SPI Audit findings; and 2. Progress of Internal control work by SPI. 3. Other strategic issues.
22 Agustus 2022 August 22, 2022	1. Pembahasan tindak lanjut/*pending matters* hasil rapat kinerja bulan Juni 2022; 2. Pembahasan kinerja Perusahaan bulan Juli 2022 (termasuk di dalamnya *template monthly monitoring* Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan utang usaha); 3. Progres MoU dengan Genting Oil untuk Proyek Amurea Papua Barat; dan 4. Isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion of follow-up/pending matters from the June 2022 performance meeting results; 2. Discussion of the Company's performance in July 2022 (including the monthly monitoring template of the Deputy Minister for SOEs I and the progress of realization of trade receivables and trade payables); 3. Progress of MoU with Genting Oil for West Papua Amurea Project; and 4. Other strategic issues.
2 September 2022 September 2, 2022	Klarifikasi & negosiasi pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan tahun buku 2022	Clarification & negotiation on the procurement of services for the Public Accountant Office of PT Pupuk Indonesia (Persero) and Subsidiaries for the fiscal year 2022.
7 September 2022 September 7, 2022	Klarifikasi & negosiasi lanjutan pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan tahun buku 2022	Clarification & further negotiation on the procurement of services for the Public Accountant Office of PT Pupuk Indonesia (Persero) and Subsidiaries for the fiscal year 2022.
22 September 2022 September 22, 2022	1. Pembahasan Tindak lanjut/*pending matters* hasil rapat kinerja bulan Juni 2022; 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Juli 2022 (termasuk di dalamnya *template monthly monitoring* Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan utang usaha); 3. Progres MoU dengan Genting Oil untuk Proyek Amurea Papua Barat; dan 4. Isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion of follow-up/pending matters from the June 2022 performance meeting results; 2. Discussion of the Company's performance in July 2022 (including the monthly monitoring template of the Deputy Minister for SOEs I and the progress of realization of trade receivables and trade payables); 3. Progress of MoU with Genting Oil for West Papua Amurea Project; and 4. Other strategic issues.

Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda	
26 September 2022 September 26, 2022	1. Pembahasan progres temuan-temuan Audit SPI; dan 2. Perkembangan pekerjaan pengawasan Internal oleh SPI; dan 3. Isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion of the progress of SPI Audit findings; and 2. Progress of Internal control work by SPI. 3. Other strategic issues.
10 Oktober 2022 October 10, 2022	1. Pembahasan progres temuan-temuan Audit SPI; dan 2. Perkembangan pekerjaan pengawasan Internal oleh SPI; dan 3. Isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion of the progress of SPI Audit findings; and 2. Progress of Internal control work by SPI. 3. Other strategic issues.
19 Oktober 2022 October 19, 2022	1. Pembahasan tindak lanjut/*pending matters* hasil rapat kinerja bulan Agustus 2022; 2. Pembahasan kinerja Perusahaan bulan September 2022 (termasuk di dalamnya *template monthly monitoring* Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan utang usaha); 3. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pupuk Indonesia (Persero) tahun 2023; 4. Usulan revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pupuk Indonesia (Persero) tahun 2022; dan 5. Isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion of follow-up/pending matters from the August 2022 performance meeting results; 2. Discussion of the Company's performance in September 2022 (including the monthly monitoring template of the Deputy Minister for SOEs I and the progress of realization of trade receivables and trade payables); 3. Draft Company Work Plan and Budget (RKAP) of PT Pupuk Indonesia (Persero) in 2023; 4. Proposed revision of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) of PT Pupuk Indonesia (Persero) for 2022; and 5. Other strategic issues.
9 November 2022 November 9, 2022	1. Pembahasan progres temuan-temuan Audit SPI; dan 2. Perkembangan pekerjaan pengawasan Internal oleh SPI; dan 3. Isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion of the progress of SPI Audit findings; and 2. Progress of Internal control work by SPI. 3. Other strategic issues.
16 November 2022 November 16, 2022	1. Pembahasan tindak lanjut/*pending matters* hasil rapat kinerja bulan September 2022; 2. Pembahasan kinerja Perusahaan bulan Oktober 2022 (termasuk di dalamnya *template monthly monitoring* Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan utang usaha); 3. Pemaparan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pupuk Indonesia (Persero) tahun 2023 (yang telah disesuaikan aspirasi Pemegang Saham); dan 4. Isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion of follow-up/pending matters from the September 2022 performance meeting results; 2. Discussion of the Company's performance in October 2022 (including the monthly monitoring template of the Deputy Minister for SOEs I and the progress of realization of trade receivables and trade payables); 3. Presentation of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) of PT Pupuk Indonesia (Persero) for 2023 (which has been adjusted by the Shareholders' aspirations); and 4. Other strategic issues.
8 Desember 2022 December 8, 2022	1. Pembahasan progres temuan-temuan Audit SPI; dan 2. Perkembangan pekerjaan pengawasan Internal oleh SPI; dan 3. Isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion of the progress of SPI Audit findings; and 2. Progress of Internal control work by SPI. 3. Other strategic issues.
19 Desember 2022 December 19, 2022	1. Pembahasan tindak lanjut/*pending matters* hasil rapat kinerja bulan Oktober 2022; 2. Pembahasan kinerja Perusahaan bulan November 2022 (termasuk di dalamnya *template monthly monitoring* Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan utang usaha); dan 4. Isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion of follow-up/pending matters from the October 2022 performance meeting results; 2. Discussion of the Company's performance in November 2022 (including the monthly monitoring template of the Deputy Minister for SOEs I and the progress of realization of trade receivables and trade payables); 3. Other strategic issues.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite Audit pada 2022

Sepanjang tahun 2022, Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris dengan rincian sebagai berikut:

Brief Report on the Implementation of Duties and Activities of the Audit Committee in 2022

Throughout 2022, the Audit Committee has carried out its duties and responsibilities which have been reported to the Board of Commissioners with the following details

No.	Program Kegiatan	Activity Program
1	Evaluasi Rencana Jangka Panjang Perusahaan	Evaluation of the Company's Long-Term Plan
2	Evaluasi atau Analisis terhadap Laporan Manajemen Triwulanan PT Pupuk Indonesia Tahun 2022	Evaluation or Analysis of PT Pupuk Indonesia's Quarterly Management Report for 2022
3	Evaluasi Kinerja Perusahaan yang menakankan pada *Compliance* pada Keputusan RUPS mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan atau RKAP Tahun 2022	Evaluation of Company Performance that emphasizes Compliance with the GMS Decree regarding the Company's Work Plan and Budget or RKAP for 2022
4	Evaluasi Perubahan Lingkungan Strategis dan Permasalahan Perusahaan	Evaluation of Changes in the Strategic Environment and Company Problems
5	Evaluasi Saran, Harapan, Permasalahan, dan Keluhan dari *Stakeholder*	Evaluation of Suggestions, Expectations, Problems, and Complaints from Stakeholders
6	Evaluasi dan Analisis Fungsi SPI, Penguatan Pengendalian Internal Perusahaan	Evaluation and Analysis of the SPI Function, Strengthening the Company's Internal Control
7	Evaluasi atau Analisis terhadap Kebijakan Akuntansi, Laporan Keuangan *Unaudited* Tahun 2022 dan *Audited* Tahun 2021 PT PIHC Grup	Evaluation or Analysis of Accounting Policies, Evaluation and Analysis of Accounting Policies, Unaudited Financial Statements for 2022 and Audited Financial Statements for 2021 of PT PIHC Group
8	Evaluasi dan Analisis Kepatuhan Direksi terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Evaluation and Analysis of the Board of Directors' Compliance with Laws and Regulations
9	Evaluasi dan Telaahan atas Usulan Permohonan Persetujuan atau Rekomendasi Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar	Evaluation and Review of the Proposed Request for Approval or Recommendation of the Board of Commissioners in accordance with the Articles of Association
10	Kegiatan Pendampingan Audit KAP atas Laporan Manajemen PT Pupuk Indonesia (Persero) Tahun 2021	Assistance Activities for KAP Audit of PT Pupuk Indonesia (Persero) Management Report for 2021
11	Evaluasi dan Analisis Pengelolaan Anak Perusahaan	Evaluation and Analysis of Subsidiary Management
12	Melaksanakan Penugasan Dewan Komisaris	Carrying out Assignments of the Board of Commissioners
13	Kegiatan Koordinasi Komite Dewan Komisaris dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya berupa: Rapat Internal Dewan Komisaris dan Rapat Komite dengan Direksi	Coordination Activities of the Board of Commissioners Committee in the context of Implementing its Duties and Functions in the form of: Internal Meetings of the Board of Commissioners and Committee Meetings with the Board of Directors
14	Kunjungan Kerja ke Anak Perusahaan atau Proyek-Proyek yang Dikerjakan Anak Perusahaan dan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Working Visits to Subsidiaries or Projects undertaken by Subsidiaries and PT Pupuk Indonesia (Persero)
15	Penilaian Kinerja Komite Audit	Performance Assessment of the Audit Committee
16	Evaluasi dan Analisis atas Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan atau RKAP Tahun 2023	Evaluation and Analysis of the Proposed Work Plan and Budget of the Company or RKAP for 2023
17	Kegiatan Evaluasi Usulan Calon Auditor atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2022	Evaluation of Proposed Auditor Candidates for the Financial Statements for the Financial Year 2022

KOMITE GCG DAN PEMANTAUAN MANAJEMEN RISIKO

Kualifikasi Anggota Komite GCG dan Pemantauan Manajemen Risiko

Anggota Komite GCG dan Pemantauan Manajemen Risiko wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan. Persyaratan kemampuan adalah profesional dalam bidang GCG dan manajemen risiko sehingga tidak mengganggu objektivitas pendapatnya terhadap masalah yang dihadapi, dan membuat surat pernyataan bebas dari *conflict of interest* apabila diperlukan.

Anggota Komite GCG dan Pemantauan Manajemen Risiko juga harus memiliki sifat dan perilaku terpuji serta memenuhi persyaratan kepatutan, antara lain: memiliki integritas yang baik, pengetahuan yang memadai tentang bisnis Perusahaan, pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan dan bidang lainnya yang relevan, jujur, independen (tidak ada *conflict of interest*), objektif dan profesional serta dapat dipercaya dan memiliki komitmen terhadap tugasnya.

Standar kompetensi yang ditunjukkan oleh anggota Komite GCG dan Pemantauan Manajemen Risiko, antara lain melalui sertifikasi:
1. ISO 31000, *International Risk Standard*, ERM Fundamentals;
2. *Certification in Risk Management Assurance* (CRMA).

Pengangkatan dan Pemberhentian

Komite GCG dan Pemantauan Manajemen Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris melalui surat keputusan. Pemberhentian dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya dan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

Ketentuan Masa Jabatan

Ketentuan masa jabatan anggota Komite GCG dan Pemantauan Manajemen Risiko diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, pada Pasal 20 yang menyatakan, "Masa jabatan anggota komite lain yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu".

GCG AND RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

Qualifications of GCG and Risk Management Monitoring Committee Members

Members of the GCG and Risk Management Oversight Committee are required to meet the fit and proper requirements. Proficiency requirements are professionals in the field of GCG and risk management so as not to interfere with the objectivity of their opinions on the issues at hand, and make a statement letter free of conflict of interest if needed.

Members of the GCG and Risk Management Monitoring Committee must also have commendable character and behavior and meet the requirements of propriety, among others: have good integrity, adequate knowledge of the Company's business, sufficient work experience in the field of supervision/examination and other relevant fields, honest, independent (no conflict of interest), objective and professional as well as trustworthy and committed to their duties.

Competency standards demonstrated by members of the GCG Committee and Risk Management Monitor, among others, through certification:
1. ISO 31000, International Risk Standard, ERM Fundamentals;
2. Certification in Risk Management Assurance (CRMA).

Appointment and Dismissal

The GCG and Risk Management Monitoring Committees are appointed and dismissed by the Board of Commissioners through a resolution. Dismissal can be carried out if the person concerned ends his/her membership term and based on the decision of the Board of Commissioners, is dismissed because he/she does not meet the predetermined performance and/or is incompetent in carrying out his/her duties.

Term of Office Provisions

The term of office of members of the GCG and Risk Management Monitoring Committee is regulated in the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012 concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs, in Article 20 which states, "The term of office of members of other committees who are not members of the Board of Commissioners/Supervisory Board of the Company is a maximum of 3 (three) years and can be extended once for 2 (two) years, without prejudice to the right of the Board of Commissioners/Supervisory Board to dismiss them at any time".

Jumlah, Komposisi dan Susunan Komite GCG dan Pemantauan Manajemen Risiko Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, tidak terdapat perubahan atau pergantian pada komposisi dan susunan Komite GCG dan Pemantauan Manajemen Risiko. Adapun rincian susunan Komite GCG dan Pemantauan Manajemen Risiko per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Number, Composition and Composition of GCG and Risk Management Monitoring Committee in 2022

Throughout 2022, there were no changes or substitutions in the composition and composition of the GCG and Risk Management Monitoring Committee. The details of the composition of the GCG and Risk Management Monitoring Committee as of December 31, 2022 can be seen in the table below.

SUSUNAN KOMITE GCG DAN PEMANTAUAN MANAJEMEN RISIKO
Composition of the GCG and Risk Management Monitoring Committee

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Anwar Sanusi	Ketua Chairman	Keputusan Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 015/KEP.KOM/XI/2022 tanggal 11 November 2022 Decree of the Board of Commissioners of PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 015/KEP.KOM/XI/2022 dated 11 November 2022	11 November 2022 - bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris November 11, 2022-exhaustion of the Board of Commissioners' term of office	Ke-1 1st
Bambang Widianto*	Wakil Ketua I Vice Chairman I	Keputusan Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) No.03/KEP.KOM/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 Decree of the Board of Commissioners of PT Pupuk Indonesia (Persero) No.03/KEP.KOM/III/2021 dated 5 March 2021	5 Maret 2021-4 November 2022 March 5, 2021-November 4, 2022	Ke-1 1st
Farhat Brachma**	Wakil Ketua I Vice Chairman I	Keputusan Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 015/KEP.KOM/XI/2022 tanggal 11 November 2022 Decree of the Board of Commissioners of PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 015/KEP.KOM/XI/2022 dated 11 November 2022	11 November 2022 - bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris November 11, 2022-exhaustion of the Board of Commissioners' term of office	Ke-1 1st
Febrio Nathan Kacaribu	Wakil Ketua II Vice Chairman II	Keputusan Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 015/KEP.KOM/XI/2022 tanggal 11 November 2022 Decree of the Board of Commissioners of PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 015/KEP.KOM/XI/2022 dated 11 November 2022	11 November 2022 - bersamaan dengan masa jabatan sebagai Komisaris November 11, 2022-exhaustion of the Board of Commissioners' term of office	Ke-1 1st
Asri Saraswati	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 11/KEP.KOM/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022 Decree of the Board of Commissioners of PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 11/KEP.KOM/VII/2022 dated 07 July 2022	7 Juli 2022–6 Juli 2023 July 7, 2022–July 6, 2023	Ke-2 2nd
Riza Azmi	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 12/KEP.KOM/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 Decree of the Board of Commissioners of PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 12/KEP.KOM/VIII/2022 dated 01 August 2022	29 Juli 2022–28 Juli 2023 July 29, 2022–July 28, 2023	Ke-1 1st

*) Mulai menjabat sejak 11 November 2022
*) Terms of Office started November 11, 2022

Profil Ketua dan Anggota Komite GCG dan Pemantauan Risiko

Anwar Sanusi
Ketua Komite

Rincian profil disampaikan secara pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Bab "Profil Perusahaan" pada Laporan Tahunan ini.

Farhat Brachma
Wakil Ketua I

Rincian profil disampaikan secara pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Bab "Profil Perusahaan" pada Laporan Tahunan ini.

Febrio Nathan Kacaribu
Wakil Ketua 2

Rincian profil disampaikan secara pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Bab "Profil Perusahaan" pada Laporan Tahunan ini.

Asri Saraswati
Anggota Komite GCG dan Pemantauan Manajemen Risiko

Profile of Chairman and Members of GCG and Risk Monitoring Committee

Anwar Sanusi
Committee Chair

Details of the profile are provided in the "Profile of the Board of Commissioners" section in the "Company Profile" chapter of this Annual Report.

Farhat Brachma
Vice Chairman I

Details of the profile are provided in the "Profile of the Board of Commissioners" section in the "Company Profile" chapter of this Annual Report.

Febrio Nathan Kacaribu
Vice Chairman 2

Details of the profile are provided in the "Profile of the Board of Commissioners" section in the "Company Profile" chapter of this Annual Report.

Asri Saraswati
Member of GCG and Risk Management Monitoring Committee.

Warga Negara | Citizen	Indonesia	Indonesian
Usia | Age	64 tahun	64 years old
Tempat, Tanggal, Lahir **Place, Date of Birth**	Jakarta, 31 Agustus 1958	Jakarta, August 31, 1958
Domisili | Domicile	Depok, Jawa Barat	Depok, West Java
Pendidikan | Education	Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia (1985)	Bachelor of Economics, University of Indonesia (1985).
Sertifikasi Profesi **Professional Certificate**	QRMP	QRMP
Pengalaman Kerja **Work Experience**	• Komite Audit PT BNI Life Insurance (2011- 2015); • Special Advis Direksi PT BNI Asset Management (2011-2013); • Division Head of Capital & Money Market Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI) 2005-2008; • Investment Director PT Pentasena Arthatama (Investment Management Company) (1996- 2003).	• Audit Committee of PT BNI Life Insurance (2011-2015); • Special Advisor to the Board of Directors of PT BNI Asset Management (2011-2013); • Division Head of Capital & Money Market Bank Employee Welfare Foundation Indonesia (YKKBI) 2005-2008; • Investment Director of PT Pentasena Arthatama (Investment Management Company) (1996-2003).

Riza Azmi
Anggota Komite GCG dan Pemantauan Manajemen Risiko

Riza Azmi
Member of GCG and Risk Management Monitoring Committee.

Warga Negara | Citizen	Indonesia	Indonesian
Usia | Age	39 tahun	39 years old
Tempat, Tanggal, Lahir **Place, Date of Birth**	Medan, 8 Mei 1983	Medan, May 8, 1983
Domisili | Domicile	Bogor, Jawa Barat	Bogor, West Java
Pendidikan | Education	• Master of Arts in Economics, Georgia State University (2013) • Master of Science in Economics, Gadjah Mada University (2013) • Sarjana Sains Terapan, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2009)	• Master of Arts in Economics, Georgia State University (2013) • Master of Science in Economics, Gadjah Mada University (2013) • Bachelor of Applied Science, State College of Accountancy (2009)
Sertifikasi Profesi **Professional Certificate**	CRMP, QRMP, dan CP3P	CRMP, QRMP, and CP3P
Pengalaman Kerja **Work Experience**	• Kepala Seksi Risiko Dukungan dan Jaminan pada Penugasan Pemerintah, Kementerian Keuangan (2021–sekarang) • Kepala Seksi Risiko Pinjaman pada BUMN, Kementerian Keuangan (2015–2021)	• Head of Support and Assurance Risk Section on Government Assignment, Ministry of Finance, Indonesia Finance (2021-present) • Head of Loan Risk Section for SOEs, Ministry of Finance (2015-2021)

Independensi Komite GCG dan Pemataun Risiko

Independensi adalah syarat menjadi Komite GCG dan Pemataun Risiko. Anggota Komite GCG dan Pemataun Manajemen Risiko harus bersikap independen, objektif dan profesional sebagaimana diatur dalam *Charter* Komite GCG dan Pemataun Manajemen Risiko yang diperbarui secara berkala untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain tercantum dalam *Charter*, Komite Kebijakan Risiko juga menandatangani pernyataan independensi. Seluruh anggota Komite tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan tentang pelaksanaan GCG.

Independence of GCG and Risk Monitoring Committee

Independence is a requirement of the GCG and Risk Management Monitoring Committee. Members of the GCG and Risk Management Oversight Committee must be independent, objective and professional as stipulated in the Charter of the GCG and Risk Management Oversight Committee which is updated regularly to conform to the prevailing laws and regulations.

In addition to the Charter, the Risk Policy Committee also signed a statement of independence. All Committee members do not hold concurrent positions that are prohibited by regulations on the implementation of GCG.

Pengungkapan Independensi Komite GCG dan Pemataun Risiko

Disclosure of Independence of GCG and Risk Monitoring Committee

Aspek Independesi Independence Aspect	Anwar Sanusi	Farhat Brachma	Febrio Nathan Kacaribu	Riza Azmi	Asri Saraswati
Memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has a financial relationship with the Board of Commissioners and Directors	x	x	x	x	x
Memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, Entitas Anak maupun Entitas Afiliasi Has a management relationship in the Company, Subsidiaries or Affiliated Entities	x	x	x	x	x

Aspek Independesi Independence Aspect	Anwar Sanusi	Farhat Brachma	Febrio Nathan Kacaribu	Riza Azmi	Asri Saraswati
Memiliki saham Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung Own shares of the Company, either directly or indirectly	x	x	x	x	x
Memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Having a family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors and/or fellow Committee members	x	x	x	x	x
Menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan Pemerintah 'Serving as an administrator of political parties, officials and the Government	x	x	x	x	x

Pedoman Kerja: Piagam Komite GCG dan Pemantauan Manajemen Risiko

Dewan Komisaris telah menetapkan pedoman kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas Komite GCG dan Pemantauan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 015/KEP.KOM/XI/2021 tentang Piagam Komite *Good Corporate Governance* dan Pemantauan Manajemen Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia tanggal 5 November 2021 sebagai acuan Komite GCG dan Pemantauan Manajemen Risiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang memenuhi ketentuan *Good Corporate Governance*. Kebijakan ini merupakan pedoman untuk mengikat dan mengatur Anggota Komite GCG dan Pemantauan Manajemen Risiko dalam melaksanakan dan menjalankan aktivitas.

Tugas dan Tanggung Jawab

Sesuai Piagam Komite GCG dan Pemantauan Manajemen Risiko, Komite GCG dan Pemantauan Manajemen Risiko bertugas untuk:

1. Komite GCG dan PMR bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan atas Perseroan dan memberikan nasihat dalam penerapan GCG dan Manajemen Risiko kepada Direksi dan Manajemen;

2. Melakukan fungsi pengawasan (*oversight roles*) dalam perspektif *corporate governance* dan manajemen risiko terhadap hal-hal berikut ini:
   a. Kinerja Operasional – meninjau pelaksanaan kegiatan dan kinerja operasional yang relevan dengan ruang lingkup penerapan manajemen risiko dan GCG, sebagaimana yang diterapkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan tahunan.
   b. Manajemen Risiko – melakukan pemantauan dan pengkajian terhadap proses manajemen

Work Guidelines: GCG and Risk Management Monitoring Committee Charter

The Board of Commissioners has established a work guideline to support the implementation of the duties of the GCG and Risk Management Monitoring Committee which has been stipulated based on the Decree of the Board of Commissioners No. 015/KEP.KOM/XI/2021 concerning the Charter of the Good Corporate Governance and Risk Management Monitoring Committee of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia dated November 5, 2021 as a reference for the GCG and Risk Management Monitoring Committee in carrying out its duties and functions that meet the provisions of Good Corporate Governance. This policy is a guideline to bind and regulate the GCG and Risk Management Monitoring Committee Members in carrying out and carrying out activities.

Duties and Responsibilities

In accordance with the GCG and Risk Management Monitoring Committee Charter, the GCG and Risk Management Monitoring Committee is responsible for:

1. The GCG and PMR Committee is tasked with assisting the Board of Commissioners in carrying out its supervisory functions and duties over the Company and providing advice on the implementation of GCG and Risk Management to the Board of Directors and Management;
2. Perform oversight roles from a corporate governance and risk management perspective on the following matters:
   a. Operational Performance - review the implementation of operational activities and performance relevant to the scope of risk management and GCG implementation, as implemented in the annual company work plan and budget.
   b. Risk Management - monitors and assesses the risk management process, monitors the conformity of

risiko, memantau kesesuaian praktik manajemen risiko dengan kebijakannya, serta memastikan diterapkannya prinsip, fungsi dan pelaksanaan yang berhubungan dengan kebijakan atas pengelolaan Manajemen Risiko perusahaan. Efektivitas pengelolaan manajemen risiko, berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

i. Terlaksananya fungsi pengawasan manajemen risiko yang kuat;
ii. Terbangunnya budaya manajemen risiko sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya *fraud* dan praktik-praktik bisnis yang tidak sehat; dan
iii. Teridentifikasinya hal-hal berkaitan dengan manajemen risiko yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

c. Unit Kerja – meninjau dan mengawasi rencana kerja dan kegiatan unit kerja di manajemen yaitu Unit Tata Kelola dan Kepatuhan serta Unit Manajemen Risiko, serta memberikan nasihat pada saat diperlukan.
d. *Corporate Governance*-Meninjau kecukupan pemantauan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan etika usaha serta memastikan tidak adanya benturan kepentingan.

risk management practices with its policies, and ensures the application of principles, functions and practices related to policies on the management of the company's Risk Management. The effectiveness of risk management is related to the following matters:

i. Implementation of a strong risk management oversight function;
ii. Establishment of a risk management culture so as to reduce the possibility of fraud and unhealthy business practices; and
iii. Identification of matters relating to risk management that require the attention of the Board of Commissioners.

c. Work Units - review and supervise the work plans and activities of the work units in management, namely the Governance and Compliance Unit and the Risk Management Unit, and provide advice when necessary.
d. Corporate Governance - Reviewing the adequacy of monitoring compliance with applicable laws and regulations, and business ethics and ensuring there are no conflicts of interest.

Pengembangan Kompetensi Komite GCG dan Pemantauan Manajemen Risiko

Perusahaan mengikutsertakan Anggota Komite GCG dan Pemantauan Manajemen Risiko dalam kegiatan pengembangan kompetensi yang dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan dengan pendanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perusahaan. Rincian pelaksanaan kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Komite GCG dan Pemantauan Manajemen Risiko di sepanjang tahun 2022 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Rapat Komite GCG dan Pemantauan Manajemen Risiko

Pelaksanaan rapat Komite GCG dan Pemantauan Manajemen Risiko dapat diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat Komite GCG dan Pemantauan Manajemen Risiko dapat mengambil keputusan apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 66% atau 2 orang (termasuk Ketua) dari jumlah anggota 3 (termasuk Ketua). Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.

Competency Development of GCG Committee and Risk Management Monitor

The Company includes members of the GCG and Risk Management Monitoring Committee in competency development activities carried out through various training and education with funding fully the responsibility of the Company. Details of the implementation of training and competency improvement activities participated in by the GCG and Risk Management Monitoring Committee throughout 2022 can be seen in the Company Profile chapter in this Annual Report.

GCG and Risk Management Monitoring Committee Meeting

GCG and Risk Management Monitoring Committee meetings may be held at least 1 (one) time in 1 (one) month. GCG and Risk Management Oversight Committee meetings can make decisions if attended by at least 66% or 2 people (including the Chairman) out of 3 members (including the Chairman). Committee meeting decisions are made based on deliberation to reach consensus. In the event that no consensus is reached, the decision is made by majority vote.

Rapat Komite GCG dan Pemantauan Manajemen Risiko dipimpin oleh Ketua Komite GCG & Pemantauan Manajemen Risiko yang ditunjuk oleh ketua Komite GCG dan Pemantauan Manajemen Risiko. Setiap rapat Komite GCG dan Pemantauan Manajemen Risiko dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite GCG dan Pemantauan Manajemen Risiko yang hadir. Perbedaan pendapat dalam rapat dicantumkan dalam risalah rapat.

Sepanjang tahun 2022, Komite GCG dan Pemantauan Manajemen Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 27 kali. Rinciannya disampaikan dalam tabel di bawah ini.

The GCG and Risk Management Monitoring Committee meetings are chaired by the Chairman of the GCG & Risk Management Monitoring Committee appointed by the chairman of the GCG and Risk Management Monitoring Committee. Each meeting of the GCG and Risk Management Oversight Committee is set forth in the minutes of meeting signed by all members of the GCG and Risk Management Oversight Committee present. Dissenting opinions in the meeting are included in the minutes of the meeting.

Throughout 2022, the GCG and Risk Management Monitoring Committee held 27 meetings. The details are presented in the table below.

Rekapitulasi Kehadiran Komite GCG dan Pemantauan Manajemen Risiko pada Rapat Tahun 2022

Recapitulation of Attendance of GCG and Risk Management Monitoring Committee at Meetings in 2022

Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	% Kehadiran Attendance %
Anwar Sanusi	27	26	96%
Bambang Widianto	23	23	100%
Febrio Nathan Kacaribu	27	22	81%
Asri Saraswati	27	27	100%
Riza Azmi	27	27	100%
Farhat Brachma*	4	4	100%
Rata-rata | Average	**27**	**22**	**95%**

Agenda Rapat Komite GCG dan Pemantauan Manajemen Risiko

GCG Committee Meeting Agenda and Risk Management Monitoring

Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda	
18 Januari 2022 January 18, 2022	*Regular Meeting* Komite GCG dan PMR bulan Januari	Regular Meeting of GCG and PMR Committee in January
21 Januari 2022 January 21, 2022	1. Pembahasan tindak lanjut/*pending matters* hasil rapat kinerja bulan November 2021; 2. Pembahasan kinerja Perusahaan bulan Desember 2021 (termasuk di dalamnya *template monthly monitoring* Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan utang usaha); 3. Progres Audit tahun buku 2021; 4. Rencana Program Strategis *Agrosolution*-Makmur tahun 2022; dan 5. Isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion of follow-up/pending matters from the November 2021 performance meeting results; 2. Discussion of the Company's performance in December 2021 (including the monthly monitoring template of the Deputy Minister for SOEs I and the progress of realizing the position of trade receivables and trade payables); 3. Audit progress for the 2021 fiscal year; 4. Agrosolution-Makmur Strategic Program Plan for 2022; and 5. Other strategic issues.
14 Februari 2022 February 14, 2022	*Regular Meeting* Komite GCG dan PMR bulan Februari	Regular Meeting of GCG and PMR Committee in February

Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda	
21 Februari 2022 February 21, 2022	1. Pembahasan tindak lanjut/*pending matters* hasil rapat kinerja bulan Desember 2021; 2. Pembahasan kinerja Perusahaan bulan Januari 2022 (termasuk di dalamnya *template monthly monitoring* Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan utang usaha); 3. Progres Audit tahun buku 2021 oleh KAP; dan 4. Isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion of follow-up/pending matters from the December 2021 performance meeting results; 2. Discussion of the Company's performance in January 2022 (including the monthly monitoring template of the Deputy Minister for SOEs I and the progress of realizing the position of trade receivables and trade payables); 3. Audit progress for the 2021 fiscal year by KAP; and 4. Other strategic issues.
22 Februari 2022 February 22, 2022	1. Pembahasan tindak lanjut/*pending matters* hasil rapat kinerja bulan Desember 2021; 2. Pembahasan kinerja Perusahaan bulan Januari 2022 (termasuk di dalamnya *template monthly monitoring* Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan utang usaha); 3. Progres Audit tahun buku 2021 oleh KAP; dan 4. Isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion of follow-up/pending matters from the December 2021 performance meeting results; 2. Discussion of the Company's performance in January 2022 (including the monthly monitoring template of the Deputy Minister for SOEs I and the progress of realizing the position of trade receivables and trade payables); 3. Audit progress for the 2021 fiscal year by KAP; and 4. Other strategic issues.
18 Maret 2022 March 18, 2022	1. *Regular Meeting* Komite GCG dan PMR bulan Maret; 2. Pembahasan RTM *downtime* pabrik: paparan Direktorat Produksi dan Bidang Investasi terkait dengan risiko *downtime* pabrik; 3. *Update GCG Asessment* oleh BPKP; 4. Pembahasan status RTM bulan Maret 2022 dan *risk maturity level* 2021.	1. Regular Meeting of GCG and PMR Committee in March; 2. Discussion of plant downtime RTM: exposure of Production Directorate and Investment Division related to plant downtime risk; 3. GCG assessment update by BPKP; 4. Discussion of March 2022 RTM status and 2021 risk maturity level.
21 Maret 2022 March 21, 2022	1. Pembahasan tindak lanjut/*pending matters* hasil rapat kinerja bulan Januari 2022; 2. Pembahasan kinerja Perusahaan bulan Februari 2022 (termasuk di dalamnya *template monthly monitoring* Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan utang usaha); 3. Progres Audit tahun buku 2021 oleh KAP; 4. Progres pengembangan pabrik Urea dan NPK; dan 5. Isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion of follow-up / pending matters from the January 2022 performance meeting results; 2. Discussion of the Company's performance in February 2022 (including the monthly monitoring template of the Deputy Minister for SOEs I and the progress of realizing the position of trade receivables and trade payables); 3. Audit progress for the 2021 financial year by KAP; 4. Progress on the development of the Urea and NPK plants; and 5. Other strategic issues.
14 April 2022 April 14, 2022	1. *Regular Meeting* Komite GCG dan PMR bulan April; 2. Pembahasan progres kinerja dan rencana kerja *Risk Management*; dan 3. Pembahasan progres kinerja dan rencana kerja Riset.	1. Regular Meeting of GCG and PMR Committee in April; 2. Discussion of performance progress and Risk Management work plan; and 3. Discussion of performance progress and Research work plan.
18 April 2022 April 18, 2022	1. Pembahasan tindak lanjut/*pending matters* hasil rapat kinerja bulan Februari 2022; 2. Pembahasan kinerja Perusahaan bulan Maret 2022 (termasuk di dalamnya *template monthly monitoring* Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan utang usaha); 3. Perkembangan harga beli gas PKT ke PT Pertamina (Persero); dan 4. Isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion of follow-up/pending matters from the February 2022 performance meeting results; 2. Discussion of the Company's performance in March 2022 (including the monthly monitoring template of Deputy Minister of SOEs I and the progress of realization of trade receivables and trade payables); 3. Development of PKT gas purchase price to PT Pertamina (Persero); and 4. Other strategic issues.
11 Mei 2022 May 11, 2022	1. Pembahasan progres temuan-temuan Audit SPI; dan 2. Perkembangan pekerjaan Pengawasan Internal oleh SPI.	1. Discussion of the progress of SPI Audit findings; and 2. Progress of Internal Audit work by SPI.

Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda	
19 Mei 2022 May 19, 2022	1. Pembahasan tindak lanjut/*pending matters* hasil rapat kinerja bulan Maret 2022; 2. Pembahasan kinerja Perusahaan bulan April 2022 (termasuk di dalamnya *template monthly monitoring* Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan utang usaha); 3. Isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion of follow-up/pending matters from the March 2022 performance meeting results; 2. Discussion of the Company's performance in April 2022 (including the monthly monitoring template of Deputy Minister of SOEs I and the progress of realization of trade receivables and trade payables); 3. Other strategic issues.
15 Juni 2022 June 15, 2022	1. Pembahasan progres temuan-temuan Audit SPI; dan 2. Perkembangan pekerjaan Pengawasan Internal oleh SPI.	1. Discussion of the progress of SPI Audit findings; and 2. Progress of Internal Audit work by SPI.
20 Juni 2022 June 20, 2022	1. Pembahasan tindak lanjut/*pending matters* hasil rapat kinerja bulan April 2022; 2. Pembahasan kinerja Perusahaan bulan Mei 2022 (termasuk di dalamnya *template monthly monitoring* Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan utang usaha); 3. *Update* capaian progres pelaksanaan *Capital Expenditure* (Capex); dan 4. Isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion of follow-up/pending matters from the April 2022 performance meeting results; 2. Discussion of the Company's performance in May 2022 (including the monthly monitoring template of the Deputy Minister for SOEs I and the progress of realization of trade receivables and trade payables); 3. Update on the progress of Capital Expenditure (CapEx) implementation; and 4. Other strategic issues.
11 Juli 2022 July 11, 2022	1. Pembahasan progres temuan-temuan Audit SPI; 2. Perkembangan pekerjaan Pengawasan Internal oleh SPI; dan 3. Isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion of the progress of SPI Audit findings; 2. Progress of Internal Control work by SPI; and 3. Other strategic issues.
19 Juli 2022 July 19, 2022	1. Pembahasan tindak lanjut/*pending matters* hasil rapat kinerja bulan Mei 2022; 2. Pembahasan kinerja Perusahaan bulan Juni 2022 (termasuk di dalamnya *template monthly monitoring* Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan utang usaha); 3. Paparan terkait data kenaikan biaya modal kerja dari piutang subsidi 2021 dan 2022; dan 4. Isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion of follow-up/pending matters from the May 2022 performance meeting results; 2. Discussion of the Company's performance in June 2022 (including the monthly monitoring template of the Deputy Minister for SOEs I and the progress of realization of the position of trade receivables and trade payables); 3. Presentation related to data on the increase in working capital costs from 2021 and 2022 subsidy receivables; and 4. Other strategic issues.
9 Agustus 2022 August 9, 2022	1. Pembahasan progres temuan-temuan Audit SPI; 2. Perkembangan pekerjaan Pengawasan Internal oleh SPI; dan 3. Isu-isu strategis lainnya (persiapan pengadaan KAP tahun buku 2022).	1. Discussion of the progress of SPI Audit findings; 2. Progress of Internal Audit work by SPI; and 3. Other strategic issues (preparation for KAP procurement for the 2022 fiscal year).
22 Agustus 2022 August 22, 2022	1. Pembahasan tindak lanjut/*pending matters* hasil rapat kinerja bulan Juni 2022; 2. Pembahasan kinerja Perusahaan bulan Juli 2022 (termasuk di dalamnya *template monthly monitoring* Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan utang usaha); 3. Progres MoU dengan Genting Oil untuk Proyek Amurea Papua Barat; dan 4. Isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion of follow-up/pending matters from the June 2022 performance meeting results; 2. Discussion of the Company's performance in July 2022 (including the monthly monitoring template of Deputy Minister of SOEs I and the progress of realization of trade receivables and trade payables); 3. MoU progress with Genting Oil for the West Papua Amurea Project; and 4. Other strategic issues.
2 September 2022 September 2, 2022	Klarifikasi & Negosiasi Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2022.	Clarification & Negotiation of Procurement of Public Accountant Office Services of PT Pupuk Indonesia (Persero) and Subsidiaries for the Financial Year 2022.
7 September 2022 September 7, 2022	Klarifikasi & Negosiasi Lanjutan Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2022.	Clarification & Further Negotiation of Procurement of Public Accountant Office Services of PT Pupuk Indonesia (Persero) and Subsidiaries for the Financial Year 2022

Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda	
22 September 2022 September 22, 2022	1. Pembahasan tindak lanjut/*pending matters* hasil rapat kinerja bulan Juni 2022; 2. Pembahasan kinerja Perusahaan bulan Juli 2022 (termasuk di dalamnya *template monthly monitoring* Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan utang usaha); 3. Progres MoU dengan Genting Oil untuk Proyek Amurea Papua Barat; dan 4. Isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion of follow-up/pending matters from the June 2022 performance meeting results; 2. Discussion of the Company's performance in July 2022 (including the monthly monitoring template of Deputy Minister of SOEs I and the progress of realization of trade receivables and trade payables); 3. MoU progress with Genting Oil for the West Papua Amurea Project; and 4. Other strategic issues.
26 September 2022 September 26, 2022	1. Pembahasan progres temuan-temuan Audit SPI; 2. Perkembangan pekerjaan Pengawasan Internal oleh SPI; dan 3. Isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion of the progress of SPI Audit findings; 2. Progress of Internal Control work by SPI; and 3. Other strategic issues.
10 Oktober 2022 October 10, 2022	1. Pembahasan progres temuan-temuan Audit SPI; 2. Perkembangan pekerjaan Pengawasan Internal oleh SPI; dan 3. Isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion of the progress of SPI Audit findings; 2. Progress of Internal Control work by SPI; and 3. Other strategic issues.
19 Oktober 2022 October 19, 2022	1. Pembahasan tindak lanjut/*pending matters* hasil rapat kinerja bulan Agustus 2022; 2. Pembahasan kinerja Perusahaan bulan September 2022 (termasuk di dalamnya *template monthly monitoring* Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan utang usaha); 3. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pupuk Indonesia (Persero) tahun 2023; 4. Usulan revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pupuk Indonesia (Persero) tahun 2022; dan 5. Isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion of follow-up / pending matters from the August 2022 performance meeting results; 2. Discussion of the Company's performance in September 2022 (including the monthly monitoring template of the Deputy Minister of SOEs I and the progress of realization of the position of trade receivables and trade payables); 3. Draft Work Plan and Budget (RKAP) of PT Pupuk Indonesia (Persero) in 2023; 4. Proposed revision of the Work Plan and Budget (RKAP) of PT Pupuk Indonesia (Persero) in 2022; and 5. Other strategic issues.
9 November 2022 November 9, 2022	1. Pembahasan progres temuan-temuan Audit SPI; 2. Perkembangan pekerjaan Pengawasan Internal oleh SPI; dan 3. Isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion of the progress of SPI Audit findings; 2. Progress of Internal Control work by SPI; and 3. Other strategic issues.
16 November 2022 November 16, 2022	1. Pembahasan tindak lanjut/*pending matters* hasil rapat kinerja bulan September 2022; 2. Pembahasan kinerja Perusahaan bulan Oktober 2022 (termasuk di dalamnya *template monthly monitoring* Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan utang usaha); 3. Pemaparan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pupuk Indonesia (Persero) tahun 2023 (yang telah disesuaikan aspirasi Pemegang Saham); 4. Isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion of follow-up / pending matters from the September 2022 performance meeting results; 2. Discussion of the Company's performance in October 2022 (including the monthly monitoring template of the Deputy Minister for SOEs I and the progress of realizing the position of trade receivables and trade payables); 3. Presentation of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) of PT Pupuk Indonesia (Persero) for 2023 (which has been adjusted to the aspirations of Shareholders); 4. Other strategic issues.
8 Desember 2022 December 8, 2022	1. Pembahasan progres temuan-temuan Audit SPI; 2. Perkembangan pekerjaan Pengawasan Internal oleh SPI; dan 3. Isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion of the progress of SPI Audit findings; 2. Progress of Internal Control work by SPI; and 3. Other strategic issues.

Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda	
19 Desember 2022 December 19, 2022	1. Pembahasan tindak lanjut/*pending matters* hasil rapat kinerja bulan Oktober 2022; 2. Pembahasan kinerja Perusahaan bulan November 2022 (termasuk di dalamnya *template monthly monitoring* Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan utang usaha); dan 3. Isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion of follow-up/pending matters from the October 2022 performance meeting results; 2. Discussion of the Company's performance in November 2022 (including the monthly monitoring template of Deputy Minister of SOEs I and the progress of realization of trade receivables and trade payables); and 3. Other strategic issues.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite GCG dan Pemantauan Manajemen Risiko pada 2022

Sepanjang tahun 2022, Komite GCG dan Pemantauan Manajemen Risiko telah merealisasikan pelaksanaan tugas melalui sejumlah kegiatan, yang rinciannya disampaikan dalam tabel di bawah ini.

Brief Report on the Implementation of Duties and Activities of the GCG and Risk Management Monitoring Committee in 2022

Throughout 2022, the GCG and Risk Management Monitoring Committee has realized the implementation of its duties through a number of activities, the details of which are presented in the table below.

No.	Program	
1	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Komite.	Preparation of the Committee Program Implementation Report.
2	Evaluasi Atas Kinerja Konsolidasi PT Pupuk Indonesia (Persero) hingga Desember 2021.	Evaluation of the Consolidated Performance of PT Pupuk Indonesia (Persero) until December 2021.
3	Evaluasi Laporan Manajemen Konsolidasi PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Laporan Manajemen PT Pupuk Indonesia (Persero) Entitas Induk Tahun 2021 (*Unaudited*).	Evaluation of the Consolidated Management Report of PT Pupuk Indonesia (Persero) and the Management Report of PT Pupuk Indonesia (Persero) Parent Entity for 2021 (Unaudited).
4	Evaluasi/*Monitoring* Pelaksanaan RKAP 2022, yang menekankan pada aspek *Governance, Risk Managed* dan *Compliance* (GRC).	Evaluation/Monitoring of the Implementation of the 2022 RKAP, which emphasizes aspects of Governance, Risk Managed and Compliance (GRC).
5	Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) PT Pupuk Indonesia (Persero) tahun 2022.	Evaluation of the Implementation of Governance (GCG) of PT Pupuk Indonesia (Persero) in 2022.
6	Pemantauan Manajemen Risiko	Risk Management Monitoring.
7	Kegiatan Kunjungan Kerja Ke Anak Perusahaan Atau Proyek-Proyek yang Dikerjakan Anak Perusahaan dan PTPI.	Work Visit Activities to Subsidiaries or Projects undertaken by Subsidiaries and PTPI.
8	Evaluasi/Kajian atas Usulan Permohonan Persetujuan atau Tanggapan Dewan Komisaris yang Disampaikan Direksi untuk Aksi Korporasi Tertentu, sesuai Anggaran Dasar.	Evaluation/Review of Proposed Requests for Approval or Response from the Board of Commissioners submitted by the Board of Directors for Certain Corporate Actions, in accordance with the Articles of Association.
9	Melaksanakan Penugasan dari Dewan Komisaris.	Carrying out Assignments from the Board of Commissioners.
10	Koordinasi Komite Dewan Komisaris dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya berupa: Rapat Internal Dewan Komisaris dan Rapat Komite dengan Direksi, Rapat dengan unit-unit kerja terkait dan rapat-rapat lainnya.	Coordination of the Board of Commissioners Committee in the context of Implementing its Duties and Functions in the form of: Internal Meetings of the Board of Commissioners and Committee Meetings with the Board of Directors, Meetings with related work units and other meetings.

KOMITE NOMINASI & REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, sesuai arahan yang tertuang dalam Surat Kementerian BUMN No. S-254/MBU/04/2020 pada tanggal 17 April 2020 perihal

NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE

The Nomination and Remuneration Committee was formed and is responsible to the Board of Commissioners to assist the implementation of the duties of the Board of Commissioners, in accordance with the directives contained in the Letter of the Ministry of SOEs No. S-254/

Talent & Succession Management Direksi BUMN. Pada angka 3 huruf c disebutkan:

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas agar segera membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) atau nomenklatur lain yang disamakan fungsinya dengan memperluas peran sebagai *Talent Committee* untuk Eksekutif BUMN (Direksi dan BOD-1) dengan format susunan sebagai berikut:

1. Ketua: Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawasan/ Komisaris Independen;
2. Sekretaris: Ditetapkan melalui keputusan rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
3. Anggota: Ditetapkan melalui keputusan rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Kualifikasi Anggota Komite Nominasi & Remunerasi

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Nominasi & Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 06/KEP.KOM/IV/2020 tanggal 22 April 2020. Pada tahun 2022, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Nominasi & Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 06/KEP.KOM/IV/2020 tanggal 22 April 2020. Pada tahun 2021, terjadi perubahan komposisi Anggota Komite Nominasi & Remunerasi, sehingga diperbaharui kembali melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 03/KEP.KOM/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 serta pengangkatan Anggota Komite Nominasi & Remunerasi melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 007/KEP.KOM/VI/2021 tanggal 9 Juli 2021 dan No. 011/KEP.KOM/IX/2021 tanggal 27 September 2021.

Pengangkatan dan Pemberhentian

Anggota Komite Nominasi & Remunerasi diangkat dan diberhentikan melalui Rapat Dewan Komisaris untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali pada periode berikutnya. Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

Ketentuan Masa Jabatan

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak lebih lama dari

MBU/04/2020 on April 17, 2020 regarding Talent & Succession Management of Directors of SOEs. In point 3 letter c, it is stated:

The Board of Commissioners/Supervisory Board to immediately establish a Nomination and Remuneration Committee (KNR) or other similar nomenclature by expanding its role as a Talent Committee for SOE Executives (Directors and BOD-1) with the following composition format:

1. Chairman: President Commissioner/Chairman of the Supervisory Board/Independent Commissioner;
2. Secretary: Determined by resolution of the Board of Commissioners/Supervisory Board meeting;
3. Member: Determined by resolution of the Board of Commissioners/Supervisory Board meeting.

Qualifications of Nomination & Remuneration Committee Members

The Board of Commissioners has established a Nomination & Remuneration Committee based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 06/KEP.KOM/IV/2020 dated April 22, 2020. In 2022, The Board of Commissioners established the Nomination & Remuneration Committee based on the PT Pupuk Indonesia (Persero) Board of Commissioners Decree No. 06/KEP.KOM/IV/2020 dated April 22, 2020. In 2021, there was a change in the Nomination & Remuneration Committee Members composition, so it was renewed through Board of Commissioners Decree No. 03/KEP.KOM/III/2021 dated March 5, 2021 and appointed members of the Nomination & Remuneration Committee through the Board of Commissioners Decree No. 007/KEP.KOM/VI/2021 dated July 9, 2021 and No. 011/KEP.KOM/IX/2021 dated September 27, 2021.

Appointment and Dismissal

Members of the Nomination & Remuneration Committee are appointed and dismissed through the Board of Commissioners Meeting for a certain term of office and may be reappointed for the following period. Replacement of Nomination and Remuneration Committee members who are not from the Board of Commissioners is carried out no later than 60 days after the Nomination and Remuneration Committee member in question can no longer carry out his/her functions.

Term of Office Provisions

In accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 on the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies, the term of office of the members of the Nomination and

masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Kendati demikian, Dewan Komisaris memiliki hak, dari waktu ke waktu, untuk mengganti mereka.

Remuneration Committee shall not exceed the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association. Nevertheless, the Board of Commissioners has the right, from time to time, to replace them.

Jumlah, Komposisi dan Susunan Komite Nominasi & Remunerasi Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, tidak terdapat perubahan atau pergantian pada komposisi dan susunan Komite Nominasi & Remunerasi. Adapun rincian susunan Komite Nominasi & Remunerasi per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Total, Composition and Composition of the Nomination & Remuneration Committee for 2022

Throughout 2022, there were no changes or substitutions in the composition and composition of the Nomination & Remuneration Committee. The details of the composition of the Nomination & Remuneration Committee as of December 31, 2022 can be seen in the table below.

SUSUNAN KOMITE NOMINASI & REMUNERASI
Composition of Nomination & Remuneration Committee

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Anhar Adel	Ketua Chairman	Keputusan Dewan Komisaris No.08/KEP. KOM/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 dan diperbarui melalui Keputusan Dewan Komisaris No.03/KEP.KOM/III/2021 Board of Commissioners Decree No.08/KEP. KOM/ VIII/2020 dated August 14, 2020 and updated through Board of Commissioners Decree No.03/KEP.KOM/ III/2021	14 Agustus 2020- mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris August 14, 2020- following the term of office as Commissioner	Ke-1 1st
Suwandi	Sekretaris Secretary	Keputusan Dewan Komisaris No.08/KEP. KOM/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 dan diperbarui melalui Keputusan Dewan Komisaris No.03/KEP KOM/III/2021 Board of Commissioners Decree No.08/KEP. KOM/ VIII/2020 dated August 14, 2020 and updated through Board of Commissioners Decree No.03/KEP KOM/ III/2021	14 Agustus 2020- mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris August 14, 2020- following the term of office as Commissioner	Ke-1 1st
Ari Dwipayana	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris No.08/KEP. KOM/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 dan diperbarui melalui Keputusan Dewan Komisaris No.03/KEP KOM/III/2021 Board of Commissioners Decree No.08/KEP. KOM/ VIII/2020 dated August 14, 2020 and updated through Board of Commissioners Decree No.03/KEP KOM/ III/2021	14 Agustus 2020- mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris August 14, 2020- following the term of office as Commissioner	Ke-1 1st
R. Nurhidayat	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris No.007/KEP. KOM/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021 Board of Commissioners Decree No.007/ KEP.KOM/ VI/2021 dated June 9, 2021	9 Juni 2021–8 Juni 2024 June 9, 2021–June 8, 2021	Ke-2 2nd

Profil Ketua dan Anggota Komite Nominasi & Remunerasi

Rincian profil Ketua dan Anggota Komite Nominasi & Remunerasi disampaikan secara pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Bab "Profil Perusahaan" pada Laporan Tahunan ini.

Profile of Chairman and Members of Nomination & Remuneration Committee

Details of the profile of the Chairman and Members of the Nomination & Remuneration Committee are provided in the "Profile of the Board of Commissioners" section in the "Company Profile" chapter of this Annual Report.

R. Nurhidayat
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

R. Nurhidayat
Member of Nomination and Remuneration Committee

Warga Negara | Citizen	Indonesia	Indonesian
Usia | Age	49 tahun	49 years old
Tempat, Tanggal, Lahir Place, Date of Birth	Pekalongan, 2 Maret 1973	Pekalongan, March 2, 1973
Domisili | Domicile	Bogor, Jawa Barat	Bogor, West Java
Pendidikan | Education	Magister Ekonomika Pembangunan Universitas Gadjah Mada (2012)	Master of Economic Development, Gadjah Mada University (2012)
Sertifikasi Profesi Professional Certificate	CRMP dan QRMP, CA	CRMP and QRMP, CA
Pengalaman Kerja Work Experience	• Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi pada Dewan Komisaris PT Pelindo II (Persero) (2020–sekarang) • Peneliti Ahli Madya pada Badan Kebijakan Fiskal (BKF) - Kementerian Keuangan (2020–sekarang) • Anggota Komite Audit pada Dewan Komisaris PT Pelindo II (Persero) (2021) • Anggota Komite Manajemen Pemantau Manajemen Risiko pada Dewan Komisaris PT Pelindo II (Persero) (2017–2020) • Direktur Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan Pusat Investasi Pemerintah, Kementerian Keuangan (2018–2019)	• Member of the Nomination and Remuneration Committee of the Board of Commissioners of PT Pelindo II (Persero) (2020–present) • Associate Expert Researcher at the Fiscal Policy Agency (BKF) - Ministry of Finance (2020–present) • Member of the Audit Committee of the Board of Commissioners of PT Pelindo II (Persero) (2021) • Member of the Risk Management Committee of the Board of Commissioners of PT Pelindo II (Persero) (2017–2020) • Director of Funding and Financing Cooperation of the Investment Centre Ministry of Finance (2018–2019)

Independensi Komite Nominasi & Remunerasi

Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tela memenuhi semua kriteria independensi. Sesuai dengan amanat regulasi, Komite juga mampu menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Perusahaan serta tidak dapat dipengaruh oleh pihak mana pun.

Independence of Nomination & Remuneration Committee

All members of the Nomination and Remuneration Committee have met all independence criteria. In accordance with the regulatory mandate, the Committee is also able to carry out its duties independently, uphold the interests of the Company and cannot be influenced by any party.

Pengungkapan Independensi Komite Nominasi & Remunerasi

Disclosure of Independence of Nomination & Remuneration Committee

Aspek Independesi Independence Aspect	Anhar Adel	Suwandi	Ari Dwipayana	R. Nurhidayat
Memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has a financial relationship with the Board of Commissioners and Directors	x	x	x	x
Memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, Entitas Anak maupun Entitas Afiliasi Has a management relationship in the Company, Subsidiaries or Affiliated Entities	x	x	x	x

Aspek Independesi Independence Aspect	Anhar Adel	Suwandi	Ari Dwipayana	R. Nurhidayat
Memiliki saham Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung Own shares of the Company, either directly or indirectly	x	x	x	x
Memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Having a family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors and/or fellow Committee members	x	x	x	x
Menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan Pemerintah Serving as an administrator of political parties, officials and the Government	x	x	x	x

Pedoman Kerja: Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-10/MI3U/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 perihal Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Dewan Komisaris telah menetapkan pedoman kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 008/KEP.KOM/VII/2021 tentang Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia tanggal 8 Juli 2021 sebagai acuan Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang memenuhi ketentuan *Good Corporate Governance*. Kebijakan ini merupakan pedoman untuk mengikat dan mengatur Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam melaksanakan dan menjalankan aktivitas.

Di antara isi piagam yang menjadi pegangan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah:
1. Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Nominasi dan Remunerasi;
2. Tugas dan Fungsi;
3. Hubungan dengan Dewan Komisaris;
4. Masa Jabatan;
5. Persyaratan Keanggotaan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang:
1. Komite Nominasi dan Remunerasi berperan membantu Dewan Komisaris dan bertugas untuk:

Work Guidelines: Nomination and Remuneration Committee Charter

The implementation of the duties and functions of the Nomination and Remuneration Committee refers to the prevailing laws and regulations, including the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-10/MI3U/2012 on the Supporting Organ of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises and the Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 regarding the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.

The Board of Commissioners has established a work guideline to support the implementation of the duties of the Nomination and Remuneration Committee which has been determined based on the Decree of the Board of Commissioners No. 008/KEP.KOM/VII/2021 concerning the Charter of the Nomination and Remuneration Committee of the Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia dated July 8, 2021 as a reference for the Nomination and Remuneration Committee in carrying out its duties and functions that meet the provisions of Good Corporate Governance. This policy is a guideline to bind and regulate the Nomination and Remuneration Committee Members in carrying out and carrying out activities.

Among the contents of the charter that guides the Nomination and Remuneration Committee are:
1. Appointment and Dismissal of Nomination and Remuneration Committee;
2. Duties and Functions;
3. Relationship with the Board of Commissioners;
4. Term of Office;
5. Membership Requirements.

Duties and Responsibilities The Nomination and Remuneration Committee has duties and responsibilities at least:
1. The Nomination and Remuneration Committee assists the Board of Commissioners and is responsible for:

a. Menyusun konsep dan analisis yang berhubungan dengan fungsi komite remunerasi dan nominasi.

b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait kebijakan, kriteria dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam proses nominasi yang sesuai dengan rencana strategis perusahaan dan kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota dewan Komisaris.

2. Melakukan *review* secara berkala atas Sistem Pengelolaan Talenta (*Talent Management System*) perusahaan serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya.
3. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur Pengklasifikasian Talenta (*Talent Classification*) yang dilakukan oleh Direksi.
4. Melakukan evaluasi terhadap kriteria yang digunakan dalam proses *talent classification* yang dilakukan oleh Direksi.
5. Melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris (*Selected Talent*), untuk menghasilkan daftar Talenta yang akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS/Menteri (*Nominated* Talent).
6. Melakukan evaluasi terhadap Calon Wakil Perseroan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris perusahaan anak, sebelum diajukan kepada RUPS/Menteri.
7. Melakukan evaluasi atas usulan *Key Performance Indicators* Individu anggota Direksi.
8. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
9. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun.
10. Menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
11. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai kebijakan remunerasi, struktur remunerasi, dan besaran remunerasi bagi Dewan komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
12. Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi perusahaan.
13. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan permintaan Dewan Komisaris.

a. Prepare concepts and analysis related to the functions of the remuneration and nomination committee.
b. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding policies, criteria and qualifications required in the nomination process in accordance with the company's strategic plan and performance evaluation policies for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.

2. Conduct periodic reviews of the company's Talent Management System as well as monitoring and evaluation of its implementation.
3. Evaluate the Talent Classification system and procedures carried out by the Board of Directors.
4. Evaluate the criteria used in the talent classification process conducted by the Board of Directors.
5. Validate and calibrate the talents proposed by the Board of Directors to the Board of Commissioners (Selected Talent), to produce a list of talents to be nominated by the Board of Commissioners to the GMS/Minister (Nominated Talent).
6. Evaluate the Company's Representative Candidates who will be proposed as members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners of subsidiaries, before being submitted to the GMS/Minister.
7. Evaluate the proposed Key Performance Indicators of Individual members of the Board of Directors.
8. Prepare a proposal for an individual performance evaluation system for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
9. Assessing the performance of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners based on the benchmarks that have been prepared.
10. Prepare proposals for development programs for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
11. Evaluate the remuneration policy and provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the remuneration policy, remuneration structure, and amount of remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors to be submitted to the GMS.
12. Evaluate the Board of Directors' proposal regarding the company's organizational structure.
13. Carry out other duties as requested by the Board of Commissioners.

Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi

Dewan Komisaris memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk melakukan *review* terhadap setiap aktivitas dalam lingkup tugasnya, dan setiap saat dapat mencari serta meminta informasi yang dibutuhkan dari:

1. Direksi;
2. Setiap pegawai (dan seluruh pegawai diarahkan bekerja sama untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi);
3. Pihak yang menjalankan fungsi pengelolaan sumber daya manusia dan remunerasi;
4. Manajemen; dan
5. Pihak-pihak yang terkait.

Authority of Nomination and Remuneration Committee

The Board of Commissioners authorizes the Nomination and Remuneration Committee to review any activity within the scope of its duties, and at any time may seek and request the required information from:

1. Directors;
2. Each employee (and all employees are directed to work together to fulfill what is required by the Nomination and Remuneration Committee);
3. The party that carries out the function of human resource management and remuneration;
4. Management; and
5. Related parties.

Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi & Remunerasi

Perusahaan mengikutsertakan Anggota Komite Nominasi & Remunerasi dalam kegiatan pengembangan kompetensi yang dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan dengan pendanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perusahaan. Daftar kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Komite Nominasi & Remunerasi di sepanjang tahun 2022 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Competency Development of Nomination & Remuneration Committee

The Company includes Nomination & Remuneration Committee Members in competency development activities carried out through various training and education with funding fully the responsibility of the Company. The list of training and competency improvement activities attended by the Nomination & Remuneration Committee throughout 2022 can be seen in the Company Profile chapter in this annual report.

Rapat Komite Nominasi & Remunerasi

Pelaksanaan rapat Komite Nominasi & Remunerasi dapat diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat komite dapat mengambil keputusan apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 66% atau 2 orang (termasuk Ketua) dari jumlah anggota 3 (termasuk Ketua). Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah

Sepanjang tahun 2022, Komite Nominasi & Remunerasi telah menyelenggarakan 20 kali rapat dengan rekapitulasi kehadiran sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

Nomination & Remuneration Committee Meeting

Nomination & Remuneration Committee meetings can be held at least 1 (one) time in 1 (one) month. Committee meetings can make decisions if at least 66% or 2 people (including the Chairman) of the total 3 members (including the Chairman) attend. Decisions of committee meetings are made based on deliberation to reach consensus. In the event that deliberation to reach consensus does not occur, decision making is carried out by majority vote.

Throughout 2022, the Nomination & Remuneration Committee held 20 meetings with a recapitulation of attendance as presented in the table below.

Rekapitulasi Kehadiran Komite Nominasi & Remunerasi pada Rapat Tahun 2022

Recapitulation of Attendance of GCG and Risk Management Monitoring Committee in Meetings in 2022

Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	% Kehadiran Attendance %
Anhar Adel	20	20	100%
Suwandi	20	20	100%
Ari Dwipayana	20	18	90%
R. Nurhidayat	20	20	100%
Rata-rata Average	**20**	**20**	**98%**

Agenda Rapat Komite Nominasi & Remunerasi

Nomination & Remuneration Committee Meeting Agenda

Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda	
11 Januari 2022 January 11, 2022	*Regular Meeting* KNR-Januari 2022	KNR Regular Meeting-January 2022
21 Januari 2022 January 21, 2022	1. Pembahasan tindak lanjut/*pending matters* hasil rapat kinerja bulan November 2021; 2. Pembahasan kinerja Perusahaan bulan Desember 2021 (termasuk di dalamnya *template monthly monitoring* Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan utang usaha); 3. Progres Audit tahun buku 2021; 4. Rencana Program Strategis *Agrosolution*-Makmur tahun 2022; dan 5. Isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion of follow-up/pending matters from the November 2021 performance meeting results; 2. Discussion of the Company's performance in December 2021 (including the monthly monitoring template of the Deputy Minister for SOEs I and the progress of realizing the position of trade receivables and trade payables); 3. Audit progress for the 2021 fiscal year; 4. Agrosolution-Makmur Strategic Program Plan for 2022; and 5. Other strategic issues.
15 Februari 2022 February 15, 2022	1. Pembahasan rekapitulasi dan penilaian akhir hasil validasi *Top Talent* BOD Anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero); 2. Pembahasan rekapitulasi dan penilaian akhir hasil validasi calon BOD-1 PIHC; 3. Pembahasan hasil evaluasi Direksi Eksisting PT Pupuk Indonesia (Persero).	1. Discussion on the recapitulation and final assessment of the validation results of Top Talent BOD Subsidiaries of PT Pupuk Indonesia (Persero); 2. Discussion on the recapitulation and final assessment of the validation results of the PIHC BOD-1 candidate; 3. Discussion of the evaluation results of the Existing Directors of PT Pupuk Indonesia (Persero).
21 Februari 2022 February 21, 2022	1. Pembahasan tindak lanjut/*pending matters* hasil rapat kinerja bulan Desember 2021; 2. Pembahasan kinerja Perusahaan bulan Januari 2022 (termasuk di dalamnya *template monthly monitoring* Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan utang usaha); 3. Progres Audit tahun buku 2021 oleh KAP; dan 4. Isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion of follow-up/pending matters from the December 2021 performance meeting results; 2. Discussion of the Company's performance in January 2022 (including the monthly monitoring template of the Deputy Minister for SOEs I and the progress of realizing the position of trade receivables and trade payables); 3. Audit progress for the 2021 fiscal year by KAP; and 4. Other strategic issues.

Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda	
22 Februari 2022 February 22, 2022	1. Pembahasan tindak lanjut/*pending matters* hasil rapat kinerja bulan Desember 2021; 2. Pembahasan kinerja Perusahaan bulan Januari 2022 (termasuk di dalamnya *template monthly monitoring* Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan utang usaha); 3. Progres Audit tahun buku 2021 oleh KAP; dan 4. Isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion of follow-up/pending matters from the December 2021 performance meeting results; 2. Discussion of the Company's performance in January 2022 (including the monthly monitoring template of the Deputy Minister for SOEs I and the progress of realizing the position of trade receivables and trade payables); 3. Audit progress for the 2021 fiscal year by KAP; and 4. Other strategic issues.
21 Maret 2022 March 21, 2022	1. Pembahasan tindak lanjut/*pending matters* hasil rapat kinerja bulan Januari 2022; 2. Pembahasan kinerja Perusahaan bulan Februari 2022 (termasuk di dalamnya *template monthly monitoring* Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan utang usaha); 3. Progres Audit tahun buku 2021 oleh KAP; 4. Progres pengembangan Pabrik Urea dan NPK; dan 5. Isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion of follow-up / pending matters from the January 2022 performance meeting results; 2. Discussion of the Company's performance in February 2022 (including the monthly monitoring template of the Deputy Minister for SOEs I and the progress of realizing the position of trade receivables and trade payables); 3. Audit progress for the 2021 fiscal year by KAP; 4. Progress on the development of the Urea and NPK Plants; and 5. Other strategic issues.
1 April 2022 April 1, 2022	Pembahasan usulan KPI Individu Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) tahun 2022.	Discussion of the proposed KPIs for Individual Directors of PT Pupuk Indonesia (Persero) in 2022.
4 April 2022 April 4, 2022	Pembahasan usulan KPI Individu Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) tahun 2022 lanjutan.	Discussion of the proposed KPIs for Individual Directors of PT Pupuk Indonesia (Persero) in 2022 continued.
18 April 2022 April 18, 2022	1. Pembahasan tindak lanjut/*pending matters* hasil rapat kinerja bulan Februari 2022; 2. Pembahasan kinerja Perusahaan bulan Maret 2022 (termasuk di dalamnya *template monthly monitoring* Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan utang usaha); 3. Perkembangan harga beli gas PKT ke PT Pertamina (Persero); dan 4. Isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion of follow-up/pending matters from the February 2022 performance meeting results; 2. Discussion of the Company's performance in March 2022 (including the monthly monitoring template of Deputy Minister of SOEs I and the progress of realization of trade receivables and trade payables); 3. Development of PKT gas purchase price to PT Pertamina (Persero); and 4. Other strategic issues.
19 Mei 2022 May 19, 2022	1. Pembahasan tindak lanjut/*pending matters* hasil rapat kinerja bulan Maret 2022; 2. Pembahasan kinerja Perusahaan bulan April 2022 (termasuk di dalamnya *template monthly monitoring* Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan utang usaha); 3. Isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion of follow-up/pending matters from the March 2022 performance meeting results; 2. Discussion of the Company's performance in April 2022 (including the monthly monitoring template of the Deputy Minister for SOEs I and the progress of realization of the position of trade receivables and trade payables); 3. Other strategic issues.
21 Mei 2022 May 21, 2022	Pembahasan KPI Individu Direksi.	Discussion of Individual KPIs of Directors.
31 Mei 2022 May 31, 2022	Pembahasan usulan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2022.	Discussion on the proposed remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors for 2022.
20 Juni 2022 June 20, 2022	1. Pembahasan tindak lanjut/*pending matters* hasil rapat kinerja bulan April 2022; 2. Pembahasan kinerja Perusahaan bulan Mei 2022 (termasuk di dalamnya *template monthly monitoring* Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan utang usaha); 3. *Update* capaian progres pelaksanaan *Capital Expenditure* (Capex); dan 4. Isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion of follow-up/pending matters from the April 2022 performance meeting results; 2. Discussion of the Company's performance in May 2022 (including the monthly monitoring template of the Deputy Minister for SOEs I and the progress of realization of trade receivables and trade payables); 3. Update on the progress of Capital Expenditure (CapEx) implementation; and 4. Other strategic issues.

Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda	
19 Juli 2022 July 19, 2022	1. Pembahasan tindak lanjut/*pending matters* hasil rapat kinerja bulan Mei 2022; 2. Pembahasan kinerja Perusahaan bulan Juni 2022 (termasuk di dalamnya *template monthly monitoring* Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan utang usaha); 3. Paparan terkait data kenaikan biaya modal kerja dari piutang subsidi 2021 dan 2022; dan 4. Isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion of follow-up/pending matters from the May 2022 performance meeting results; 2. Discussion of the Company's performance in June 2022 (including the monthly monitoring template of the Deputy Minister for SOEs I and the progress of realization of the position of trade receivables and trade payables); 3. Presentation related to data on the increase in working capital costs from 2021 and 2022 subsidy receivables; and 4. Other strategic issues.
22 Agustus 2022 August 22, 2022	1. Pembahasan tindak lanjut/*pending matters* hasil rapat kinerja bulan Juni 2022; 2. Pembahasan kinerja Perusahaan bulan Juli 2022 (termasuk di dalamnya *template monthly monitoring* Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan utang usaha); 3. Progres MoU dengan Genting Oil untuk Proyek Amurea Papua Barat; dan 4. Isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion of follow-up/pending matters from the June 2022 performance meeting results; 2. Discussion of the Company's performance in July 2022 (including the monthly monitoring template of Deputy Minister of SOEs I and the progress of realization of trade receivables and trade payables); 3. MoU progress with Genting Oil for the West Papua Amurea Project; and 4. Other strategic issues.
20 September 2022 September 20, 2022	1. Pembahasan tindak lanjut/*pending matters* hasil rapat kinerja bulan Juni 2022; 2. Pembahasan kinerja Perusahaan bulan Juli 2022 (termasuk di dalamnya *template monthly monitoring* Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan utang usaha); 3. Progres MoU dengan Genting Oil untuk Proyek Amurea Papua Barat; dan 4. Isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion of follow-up/pending matters from the June 2022 performance meeting results; 2. Discussion of the Company's performance in July 2022 (including the monthly monitoring template of Deputy Minister of SOEs I and the progress of realization of trade receivables and trade payables); 3. MoU progress with Genting Oil for the West Papua Amurea Project; and 4. Other strategic issues.
19 Oktober 2022 October 19, 2022	1. Pembahasan tindak lanjut/*pending matters* hasil rapat kinerja bulan Agustus 2022; 2. Pembahasan kinerja Perusahaan bulan September 2022 (termasuk di dalamnya *template monthly monitoring* Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan utang usaha); 3. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pupuk Indonesia (Persero) tahun 2023; 4. Usulan revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pupuk Indonesia (Persero) tahun 2022; dan 5. Isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion of follow-up / pending matters from the August 2022 performance meeting results; 2. Discussion of the Company's performance in September 2022 (including the monthly monitoring template of the Deputy Minister of SOEs I and the progress of realization of the position of trade receivables and trade payables); 3. Draft Work Plan and Budget (RKAP) of PT Pupuk Indonesia (Persero) in 2023; 4. Proposed revision of the Work Plan and Budget (RKAP) of PT Pupuk Indonesia (Persero) in 2022; and 5. Other strategic issues.
16 November 2022 November 16, 2022	1. Pembahasan tindak lanjut/*pending matters* hasil rapat kinerja bulan September 2022; 2. Pembahasan kinerja Perusahaan bulan Oktober 2022 (termasuk di dalamnya *template monthly monitoring* Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan utang usaha); 3. Pemaparan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pupuk Indonesia (Persero) Tahun 2023 (yang telah disesuaikan Aspirasi Pemegang Saham); 4. Isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion of follow-up / pending matters from the September 2022 performance meeting results; 2. Discussion of the Company's performance in October 2022 (including the monthly monitoring template of the Deputy Minister of SOEs I and the progress of realizing the position of trade receivables and trade payables); 3. Presentation of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) of PT Pupuk Indonesia (Persero) for 2023 (which has been adjusted to Shareholder Aspirations); 4. Other strategic issues.

Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda	
16 November 2022 November 16, 2022	1. Pembahasan tindak lanjut/*pending matters* hasil rapat kinerja bulan September 2022; 2. Pembahasan kinerja Perusahaan bulan Oktober 2022 (termasuk di dalamnya *template monthly monitoring* Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan utang usaha); 3. Pemaparan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pupuk Indonesia (Persero) Tahun 2023 (yang telah disesuaikan Aspirasi Pemegang Saham); 4. Isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion of follow-up / pending matters from the September 2022 performance meeting results; 2. Discussion of the Company's performance in October 2022 (including the monthly monitoring template of the Deputy Minister of SOEs I and the progress of realizing the position of trade receivables and trade payables); 3. Presentation of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) of PT Pupuk Indonesia (Persero) for 2023 (which has been adjusted to Shareholder Aspirations); 4. Other strategic issues.
19 Desember 2022 December 19, 2022	1. Pembahasan tindak lanjut/*pending matters* hasil rapat kinerja bulan Oktober 2022; 2. Pembahasan kinerja Perusahaan bulan November 2022 (termasuk di dalamnya *template monthly monitoring* Wamen BUMN I dan progres realisasi posisi piutang usaha dan utang usaha); dan 3. Isu-isu strategis lainnya.	1. Discussion of follow-up/pending matters from the October 2022 performance meeting results; 2. Discussion of the Company's performance in November 2022 (including the monthly monitoring template of the Deputy Minister for SOEs I and the progress of realization of the position of trade receivables and trade payables); and 3. Other strategic issues.

Rincian Pelaksanaan Tugas Tahun 2022 / Details of Task Implementation in 2022

No	Program	
1	*Review* atas *Talent Management System* PT Pupuk Indonesia (Persero) yang meliputi 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu: a. Melakukan *review* yang dilakukan setiap tahun atas sistem pengelolaan talenta (*Talent Management System*) PT Pupuk Indonesia (Persero). b. Evaluasi terhadap sistem dan prosedur Pengklasifikasian Talenta (*Talent Classification*) yang dilakukan oleh Direksi. c. Evaluasi terhadap kriteria yang digunakan dalam proses *talent classification* yang dilakukan oleh Direksi.	Review of the Talent Management System of PT Pupuk Indonesia (Persero) which includes 3 (three) sub-activities, namely: a. Conduct an annual review of the talent management system of PT Pupuk Indonesia (Persero). b. Evaluation of the Talent Classification system and procedures carried out by the Board of Directors. c. Evaluation of the criteria used in the talent process. Evaluation of the criteria used in the talent classification process carried out by the Board of Directors.
2	Melakukan Validasi dan Kalibrasi *Selected Talent*, yang meliputi 2 (dua) sub kegiatan, yaitu: a. Validasi dan kalibrasi atas Talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris (*Selected Talent*). b. *Selected talent* menjadi *nominated talent* untuk selanjutnya direkomendasikan kepada RUPS	Validating and Calibrating Selected Talent, which includes 2 (two) sub-activities, namely: a. Validation and calibration of the talents proposed by the Board of Directors to the Board of Commissioners (Selected Talent). b. Selected talent becomes nominated talent to be recommended to the GMS.
3	Evaluasi Calon Wakil Perseroan pada Anak Perusahaan.	Evaluation of Candidates for Representatives of the Company in Subsidiaries.
4	*Review Key Performance Indicators* Individu Anggota Direksi	Review of Individual Key Performance Indicators of Members of the Board of Directors
5	Evaluasi Usulan Kontrak Kinerja/KPI Kolegial Direksi.	Evaluation of Proposed Performance Contracts/Collegial KPIs of the Board of Directors.
6	Penyiapan Usulan Sistem Evaluasi Kinerja Individu BOD dan BOC	Preparation of Proposed Individual Performance Evaluation System for BOD and BOC
7	Penyiapan Usulan Program Pengembangan bagi BOD dan BOC	Preparation of Proposed Development Programs for BOD and BOC
8	Evaluasi Kebijakan Remunerasi	Evaluation of Remuneration Policies
9	Evaluasi Usulan Penyesuaian Struktur Organisasi BOD-1	Evaluation of Proposed Adjustments to the Organizational Structure of BOD-1

No	Program	
10	Kegiatan Rutin berupa: Mengikuti Rapat Internal Dewan Komisaris dan Rapat Komite Dewan Komisaris	Routine Activities in the form of: Attending Internal Meetings of the Board of Commissioners and Board of Commissioners Committee Meetings
11	Kegiatan Penilaian Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi berupa *Self Assessment* yang membandingkan rencana dengan realisasi program kerja serta Penilaian kinerja anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai Organ Pendukung Dewan Komisaris	Performance Assessment of the Nomination and Remuneration Committee in the form of Self Assessment comparing the plan with the realization of the work program and Performance Assessment of Nomination and Remuneration Committee members as Supporting Organs of the Board of Commissioners
12	Melaksanakan Tugas Lainnya yang diberikan dalam Rapat Dewan Komisaris	Carrying out Other Tasks assigned in the Board of Commissioners Meeting
13	Peningkatan Kapasitas Anggota Komite	Capacity Building of Committee Members
14	Kegiatan Non Rutin: Kunjungan Dinas ke Anak Perusahaan	Non-Routine Activities: Service Visits to Subsidiaries

Kebijakan dan Prosedur Nominasi serta Suksesi Direksi

Pelaksanaan suksesi Direksi dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, profesionalisme serta kompetensi. Tujuan dari kebijakan itu adalah dalam rangka menjaga kesinambungan proses regenerasi kepemimpinan, sehingga dapat menjamin keberlanjutan bisnis serta tujuan jangka panjang Perusahaan. Kendati demikian, sebagai BUMN yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, maka keputusannya diambil oleh pemerintah.

Kebijakan suksesi Direksi mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara; serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 mengatur prosesnya adalah sebagai berikut:

Sumber talenta calon Direksi berasal dari:
1. Talenta Kementerian BUMN yang terdiri atas pejabat eselon I, eselon II dan eselon III serta pejabat fungsional sekurang-kurangnya setara eselon III;
2. Talenta BUMN terdiri atas:
   a. Direksi BUMN;
   b. Pejabat satu tingkat di bawah Direksi BUMN; dan/atau
   c. Direksi pada anak perusahaan BUMN/perusahaan patungan BUMN yang berkontribusi signifikan dan/atau bernilai strategis bagi BUMN.
3. Talenta Eksternal.

Board of Directors Nomination and Succession Policies and Procedures

The implementation of the succession of the Board of Directors is based on the principles of good governance, professionalism and competence. The purpose of the policy is to maintain the continuity of the leadership regeneration process, so as to ensure business sustainability and the Company's long-term goals. However, as an SOE whose shares are wholly owned by the state, the decision is made by the government.

The succession policy of the Board of Directors refers to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-11/MBU/07/2021 on Requirements, Appointment Procedures, and Dismissal of Members of the Board of Directors of State-Owned Enterprises; and OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

Regulation of the Minister of SOEs No. PER-11/MBU/07/2021 regulates the process as follows:

The source of talent for prospective Directors comes from:
1. Talents of the Ministry of SOEs consisting of echelon I, echelon II and echelon III officials and functional officials at least equivalent to echelon III;
2. SOE talents consist of:
   a. Directors of SOEs;
   b. Officials one level below the Board of Directors of BUMN; and/or
   c. Directors of subsidiaries of SOEs/joint ventures of SOEs that contribute significantly and/or have strategic value to SOEs.
3. External Talent.

Mekanisme dan Prosedur Pengangkatan

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/07/2021, tata cara pengangkatan Direksi adalah sebagai berikut:

A. Penentuan Kandidat

1. Bagi kandidat yang diusulkan oleh Komite Suksesi dapat ditetapkan menjadi anggota Direksi.
2. Pemilihan Kandidat di luar usulan Komite Suksesi untuk menjadi anggota Direksi, dapat dilakukan sepanjang:
   a. Kandidat yang berasal dari BUMN dan Kementerian BUMN merupakan talenta yang berada di dalam *Talent Pool* Kementerian BUMN; dan/atau
   b. Kandidat yang berasal dari eksternal merupakan talenta yang memenuhi persyaratan formal, materiil dan lainnya sebagai anggota Direksi BUMN sebagaimana dipersyaratkan.

B. Pengunduran Diri dari Jabatan yang Dilarang

1. Sebelum ditetapkan menjadi anggota Direksi, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Direksi (jika ada).

2. Dalam hal yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka jabatannya sebagai anggota Direksi BUMN berakhir pada batas waktu tersebut.

C. Keputusan Pengangkatan/Penetapan

1. Pengangkatan oleh Keputusan Menteri
   - Dalam hal keputusan pengangkatan dilakukan dengan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler, maka setelah Keputusan ditetapkan, Deputi memproses penyerahan Surat Keputusan kepada anggota Direksi terpilih.
   - Dalam proses penyerahan Surat Keputusan, Deputi dibantu oleh pejabat Eselon II yang bertanggung jawab di bidang hukum, Asisten Deputi dan Asisten Deputi Sektor.
   - Setelah penyerahan Surat Keputusan dilakukan, seluruh dokumen diserahkan kepada Deputi untuk diadministrasikan.

Appointment Mechanism and Procedure

In accordance with the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-11/MBU/07/2021, the procedure for appointment of the Board of Directors is as follows:

A. Candidate Selection

1. Candidates proposed by the Succession Committee may be appointed to the Board of Directors.
2. The election of candidates other than those proposed by the Succession Committee to the Board of Directors may be conducted to the extent that:
   a. Candidates who come from SOEs and the Ministry of SOEs are talents who are in the Talent Pool of the Ministry of SOEs; and/or
   b. External candidates are talents who meet the formal, material and other requirements as members of the Board of Directors of SOEs as required.

B. Resignation from Prohibited Position

1. Before being appointed as a member of the Board of Directors, the person concerned must sign a statement of resignation from other positions that are prohibited to be concurrent with the position of a member of the Board of Directors as of the time the person concerned is appointed as a member of the Board of Directors (if any).
2. In the event that the person concerned does not resign within the period as stipulated in the laws and regulations, his/her position as a member of the Board of Directors of the SOE shall end at the deadline.

C. Appointment Decree/Decree

1. Appointment by Ministerial Decree
   - In the event that the appointment decision is made by a Ministerial Decree or a circular decision of all shareholders, then after the Decree is stipulated, the Deputy processes the delivery of the Decree to the elected members of the Board of Directors.
   - In the process of handing over the Decree, the Deputy is assisted by Echelon II officials responsible for law, Assistant Deputies and Assistant Deputy Sectors.
   - After the submission of the Decree, all documents are submitted to the Deputy for administration.

2. Pengangkatan oleh RUPS
   - Dalam hal pengangkatan akan ditetapkan dalam RUPS, penyampaian hasil UKK kepada Menteri disertai dengan surat penetapan calon dan surat kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS. Setelah RUPS dilaksanakan, seluruh dokumen diserahkan kepada Deputi untuk diadministrasikan.
   - Deputi mengadministrasikan semua dokumen terkait dengan pengangkatan anggota Direksi.
   - Kandidat yang telah dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan harus menandatangani Kontrak Manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.

D. Penandatanganan Surat Penyataan

1. Anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik dan bersedia diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan Menteri/RUPS.
2. Direksi yang diangkat kembali harus menandatangani Kontrak Manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.
3. Anggota Direksi mulai menjabat secara efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri/RUPS/seluruh pemegang saham secara sirkuler.
4. Format surat pernyataan yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Direksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

E. Keadaan Mendesak

1. Apabila menurut penilaian Menteri terdapat keadaan mendesak, Menteri dapat melakukan pengangkatan anggota Direksi sementara, tanpa proses UKK.
2. Dalam hal anggota Direksi sementara ditetapkan menjadi definitif, maka masa jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi sementara, diperhitungkan untuk menentukan masa jabatan definitifnya.

2. Appointment by GMS
   - In the event that the appointment will be determined at the GMS, the submission of the results of the UKK to the Minister is accompanied by a letter of determination of the candidate and a power of attorney to attend and make decisions at the GMS. After the GMS is held, all documents are submitted to the Deputy for administration.
   - The Deputy administers all documents related to the appointment of members of the Board of Directors.
   - Candidates who have passed the Fit and Proper Test must sign the Management Contract prior to their appointment as members of the Board of Directors.

D. Signing the Letter of Declaration

1. Elected members of the Board of Directors sign a statement letter containing the ability to carry out their duties properly and are willing to be dismissed at any time based on the Minister's/RUPS consideration.
2. Directors who are reappointed must sign a Management Contract before their appointment as a member of the Board of Directors is confirmed.
3. Members of the Board of Directors take office effectively as of the date stipulated in the Ministerial Decree/RUPS/shareholders circular.
4. The format of the statement letter relating to the appointment and dismissal of the Board of Directors is as stated in Appendix III which is an integral part of this Ministerial Regulation.

E. Urgent Circumstances

1. If in the Minister's judgment there is an urgent situation, the Minister may make temporary appointments to the Board of Directors, without the UKK process.
2. In the event that a temporary member of the Board of Directors is determined to be definitive, the term of office as a temporary member of the Board of Directors shall be taken into account to determine his/her definitive term of office.

SKEMA DAN MEKANISME SUKSESI DIREKSI: PENGUSULAN HINGGA PENETAPAN
Scheme and Mechanism of Board of Directors Succession: Proposed to Determined

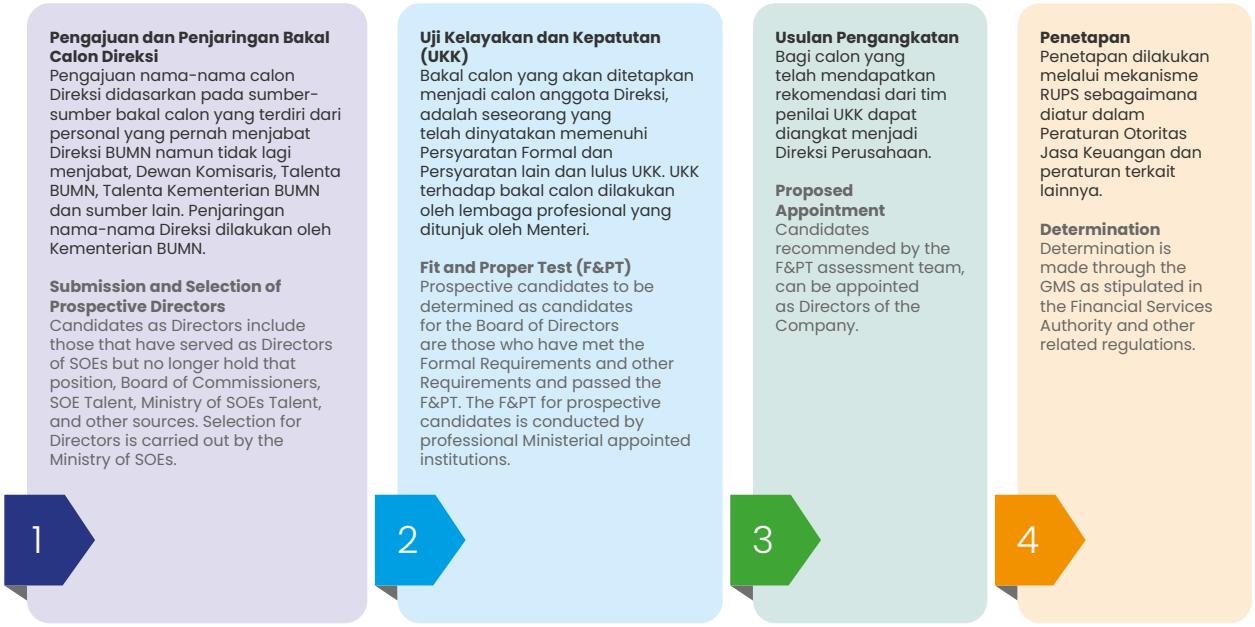

Komite dan Organ Pendukung Direksi

Committees and Supporting Organs of the Board of Directors

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan Perusahaan, Direksi dibantu oleh Komite Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Sekretaris Perusahaan, Komunikasi Korporat, Komite Pengembangan SDM, dan Audit Internal.

In carrying out its duties and responsibilities in managing the Company, the Board of Directors is assisted by the Company's Work Plan and Budget Committee (RKAP), Corporate Secretary, Corporate Communications, HR Development Committee, and Internal Audit.

KOMITE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)

Komite Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) merupakan organ pendukung yang diangkat oleh Direksi untuk membantu tugas Direksi dalam menyiapkan dan menyusun RKAP Perusahaan dan anak Perusahaan atau PI Grup sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 094/A/KU/B30/SK/2022 tanggal 29 Juli 2022 tentang Komite Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pupuk Indonesia (Persero) Group.

COMPANY WORK PLAN AND BUDGET (RKAP) COMMITTEE

The Corporate Work Plan and Budget Committee (RKAP) is a supporting organ appointed by the Board of Directors to assist the duties of the Board of Directors in preparing and compiling the RKAP of the Company and its subsidiaries or PI Group in accordance with the Decree of the Board of Directors No. 094/A/KU/B30/SK/2022 dated July 29, 2022 concerning the Corporate Work Plan and Budget Committee (RKAP) of PT Pupuk Indonesia (Persero) Group.

Struktur dan Keanggotaan Komite RKAP

Struktur dan keanggotaan Komite RKAP berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 094/A/KU/B30/SK/2022 tanggal 29

Structure and Membership of the RKAP Committee

The structure and membership of the RKAP Committee based on the Decree of the Board of Directors No. 094/A/

Juli 2022 tentang Komite Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pupuk Indonesia (Persero) Group adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi Komite RKAP

Struktur dan keanggotaan Komite RKAP berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 094/A/KU/B30/SK/2022 tanggal 29 Juli 2022 tentang Komite Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pupuk Indonesia (Persero) Group adalah sebagai berikut:

KU/B30/SK/2022 dated July 29, 2022 concerning the Committee for the Work Plan and Budget (RKAP) of PT Pupuk Indonesia (Persero) Group is as follows:

Organizational Structure of RKAP Committee

The structure and membership of the RKAP Committee based on the Decree of the Board of Directors No. 094/A/KU/B30/SK/2022 dated July 29, 2022 concerning the Committee for the Work Plan and Budget (RKAP) of PT Pupuk Indonesia (Persero) Group is as follows:

TABEL KEANGGOTAAN KOMITE RKAP
RKAP Committee Membership Table

Jabatan Position	**Dijabat oleh:** Served by:
Pengarah Director	• Direktur Utama | President Director • Wakil Direktur Utama | Vice President Director • Direktur Produksi | Production Director • Direktur SDM, Tata Kelola & Manajemen Risiko | Director of HR, Governance & Risk Management • Direktur Transformasi Bisnis | Director of Business Transformation • Direktur Pemasaran | Marketing Director • Direktur Portofolio & Pengembangan Usaha | Director of Portfolio & Business Development
Penanggung Jawab | Person in Charge	Direktur Keuangan & Investasi | Director of Finance & Investment
Ketua | Chair	SVP Kinerja Korporat | SVP Corporate Performance
Sekretaris | Secretary	VP Anggaran | VP Budget
Penanggung Jawab Bidang | SVP Field Responsibility:	
Kesekretariatan, Hukum dan GCG | Secretariat, Legal, and GCG	SVP Sekretaris Perusahaan | Corporate Secretary
Portofolio Bisnis | Business Portfolio	SVP Portofolio Bisnis | SVP Business Portfolio
Pengembangan Korporat | Corporate Development	SVP Pengembangan | SVP Development
Operasi & Produksi | Operations & Production	SVP Operasi & Produksi | SVP Operations & Production
Pengadaan | Procurement	SVP Perencanaan Pengadaan | SVP Procurement Planning
Keuangan & Investasi | Finance & Invetment	SVP Keuangan & Pendanaan Investasi | SVP Finance & Investment Funding
Inisiatif Strategis & Transformasi Bisnis | Strategic Initiatives & Business Transformation	SVP Strategi Korporat | SVP Corporate Strategy
SDM | HR	SVP Sumber Daya Manusia | SVP Human Resources SPM Manajemen Talenta & Kinerja | SPM Talent & Performance Management
Strategi Pemasaran | Marketing Strategy	SVP Strategi Pemasaran | SVP Marketing Strategy
Manajemen PSO | PSO Management	SVP Perencanaan & Manajemen PSO | SVP PSO Planning & Management
Pemasaran Komersil | Commercial Marketing	SVP Pemasaran Komersil | SVP Commercial Marketing
Distribusi | Distributon	SVP Distribusi | SVP Distribution
Supply Chain Management | Supply Chain Management	SPM Inbound & Outbound Control Tower | SPM Inbound & Outbound Control Tower
Risiko RKAP | RKSP Risk	SVP Manajemen Risiko | SVP Risk Management

Tugas dan Tanggung Jawab Komite RKAP

Pengarah
Memberikan arahan dan menetapkan kebijakan ser-ta rencana kerja pelaksanaan penyusunan RKAP kepada Komite RKAP.

Penanggung Jawab
Bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh kegiatan Komite RKAP dan memastikan bahwa kegiatan tersebut telah sesuai dengan prinsip ketaatan pada ketentuan/ prosedur yang berlaku di perusahaan, transparansi serta efektivitas proses untuk mendukung penyusunan RKAP.

Ketua
1. Bertanggung jawab dalam memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi seluruh kegiatan Komite RKAP, termasuk pelaksanaan rapat-rapat dan tugas-tugas Komite RKAP.
2. Memastikan bahwa persiapan dan pelaksanaan penyusunan RKAP PI Group dilaksanakan dan berjalan dengan baik.
3. Melaporkan RKAP PI Group yang telah disusun kepada Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) cq. Direktur Keuangan dan Investasi PT Pupuk Indonesia (Persero).

Wakil Ketua
1. Bertanggung jawab dalam Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi seluruh kegiatan penyusunan RKAP khususnya program kerja dan risiko perusahaan yang diajukan oleh penanggungjawab bidang.
2. Melaporkan perkembangan penyusunan RKAP kepada Ketua Komite RKAP.

Sekretaris
Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi untuk mendukung persiapan dan pelaksanaan penyusunan RKAP di lingkungan PTPI.

Penanggung Jawab Bidang
1. Bertanggung jawab dalam menyiapkan, menyusun dan mengkoordinir SVP dan SPM PI Group terkait sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya untuk penyusunan usulan prognosa pencapaian tahun berjalan, asumsi penyusunan RKAP serta arahan-arahan bersifat strategis di PI Group sesuai dengan bidangnya masing-masing, untuk selanjutnya menjadi dasar penyusunan RKAP Anak Perusahaan dan RKAP Konsolidasian.

Duties and Responsibilities of the RKAP Committee

Director
Provide direction and establish policies as well as work plans for the implementation of RKAP preparation to the RKAP Committee.

Person in Charge
Responsible for the implementation of all RKAP Committee activities and ensuring that these activities are in accordance with the principles of compliance with applicable provisions/procedures in the company, transparency and effectiveness of the process to support the preparation of RKAP.

Chair
1. Responsible for leading, planning, coordinating and evaluating all RKAP Committee activities, including the implementation of RKAP Committee meetings and tasks.
2. Ensure that the preparation and implementation of PI Group's RKAP preparation is carried out and running well.
3. Report the PI Group RKAP that has been prepared to the Board of Directors of PT Pupuk Indonesia (Persero) cq. Director of Finance and Investment of PT Pupuk Indonesia (Persero).

Vice Chairman
1. Responsible for leading, planning, coordinating, and evaluating all RKAP preparation activities, especially work programs and company risks proposed by the person in charge of the field.
2. Report the progress of RKAP preparation to the Chairman of the RKAP Committee.

Secretary
Responsible for carrying out administrative tasks to support the preparation and implementation of RKAP preparation within PTPI.

Field Responsible
1. Responsible for preparing, compiling and coordinating the relevant SVPs and SPMs of PI Group in accordance with the scope of their responsibilities for the preparation of proposals for the prognosis of the current year's achievements, assumptions for the preparation of the RKAP and strategic directions in PI Group in accordance with their respective fields, to then become the basis for the preparation of the Subsidiaries' RKAP and Consolidated RKAP.

2. Melakukan *review* sesuai dengan bidangnya masing-masing atas target-target tahun penyusunan RKAP sesuai dengan *timeline* dalam RJPP dan Transformasi Bisnis.
3. Menyiapkan dan menyusun risiko strategis utama sesuai dengan bidangnya masing-masing dalam penyusunan RKAP, untuk selanjutnya menjadi dasar dalam pembuatan RKAP berbasis risiko.
4. Memastikan bahwa persiapan kebutuhan terkait masing-masing bidang untuk penyusunan RKAP dilaksanakan dengan baik.
5. Menyampaikan perkembangan penyusunan RKAP pada masing-masing bidang kepada Ketua.

Pelaksanaan Tugas Komite RKAP

Pada Tahun 2022, Komite RKAP telah melaksanakan program kerja sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RKAP Tahun 2023
2. Pembahasan inisiatif strategis serta milestone tahun 2023
3. Melakukan *review* atas usulan RKAP Tahun 2023 Anak Perusahaan
4. Finalisasi asumsi RKAP Tahun 2023
5. Memberikan keputusan dan arahan untuk RKAP Tahun 2023 kepada Anak Perusahaan

Rapat Komite RKAP

Sepanjang tahun 2022, Komite RKAP telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali. Agenda yang menjadi Pembahasan diuraikan dalam tabel di bawah.

2. Conduct reviews in accordance with their respective fields on the targets of the RKAP preparation year in accordance with the timeline in RJPP and Business Transformation.
3. Prepare and compile the main strategic risks in accordance with their respective fields in the preparation of RKAP, which will then become the basis for making risk-based RKAP.
4. Ensure that the preparation of needs related to each field for the preparation of RKAP is carried out properly.
5. Submitting the progress of the preparation of the RKAP in each field to the Chairperson

Implementation of RKAP Committee Duties

In 2022, the RKAP Committee has carried out the following work program:

1. Preparation of RKAP Year 2023
2. Discussion of strategic initiatives and milestones for 2023
3. Reviewing the proposed 2023 RKAP of Subsidiaries
4. Finalization of 2023 RKAP assumptions
5. Provide decisions and directions for RKAP Year 2023 to Subsidiaries

RKAP Committee Meeting

Throughout 2022, the RKAP Committee has held 6 (six) meetings. The agenda for discussion is outlined in the table below.

TABEL RAPAT KOMITE RKAP
RKAP Committee Meeting Table

No	Agenda	Agenda
1	Rapat Persiapan Penyusunan RKAP Revisi Tahun 2022 dan RKAP Tahun 2023	Preparation Meeting for the Preparation of Revised RKAP Year 2022 and RKAP Year 2023
2	Rapat Penyusunan RKAP Revisi Tahun 2022 dan RKAP Tahun 2023	Meeting on Preparation of Revised RKAP Year 2022 and RKAP Year 2023
3	Rapat Pembahasan Tindaklanjut Penerbitan Kepmentan No. 734/KPTS/SR.320/M/09/2022 terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) tahun 2023	Meeting to Discuss the Follow-up of the Issuance of Ministerial Decree Number 734/KPTS/SR.320/M/09/2022 on the Work Plan and Budget (RKAP) for 2023
4	Pembahasan Rancangan RKAP Tahun 2023 Bidang SDM	Discussion of the Draft RKAP Year 2023 for the HR Sector
5	Rapat Persiapan Pembahasan Lanjutan RKAP 2023 bersama ke masa depan Industri Pangan dan Pupuk KBUMN	Preparatory Meeting for Further Discussion of RKAP 2023 with the Head of Food and Fertilizer Industry KBUMN
6	Rapat Teknis Tahun 2023 Anak Perusahaan	Technical Meeting Year 2023 Subsidiaries

KOMITE *KEY PERFORMANCE INDICATORS* (KPI)

Komite Komite *Key Performance Indicators* (KPI) merupakan organ pendukung yang diangkat oleh Direksi untuk membantu tugas Direksi dalam menyiapkan dan menyusun KPI Perusahaan dan Anak Perusahaan atau PI Grup sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 041/A/KU/B30/SK/2022 tanggal 08 April 2022 tentang Komite *Key Performance Indicators* (KPI) PT Pupuk Indonesia (Persero) Group.

Struktur dan Keanggotaan Komite KPI

Struktur dan keanggotaan Komite KPI berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 041/A/KU/B30/SK/2022 tanggal 08 April 2022 tentang Komite *Key Performance Indicators* (KPI) PT Pupuk Indonesia (Persero) Group adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi Komite KPI

Struktur dan keanggotaan Komite KPI berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 041/A/KU/B30/SK/2022 tanggal 08 April 2022 tentang Komite *Key Performance Indicators* (KPI) PT Pupuk Indonesia (Persero) Group adalah sebagai berikut:

KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) COMMITTEE

The Key Performance Indicators (KPI) Committee is a supporting organ appointed by the Board of Directors to assist the duties of the Board of Directors in preparing and compiling the KPIs of the Company and its Subsidiaries or Group PIs in accordance with the Decree of the Board of Directors No. 041/A/KU/B30/SK/2022 dated April 08, 2022 concerning the Key Performance Indicators (KPI) Committee of PT Pupuk Indonesia (Persero) Group.

KPI Committee Structure and Membership

The structure and membership of the KPI Committee based on the Decree of the Board of Directors No. 041/A/KU/B30/SK/2022 dated April 08, 2022 concerning the Key Performance Indicators (KPI) Committee of PT Pupuk Indonesia (Persero) Group is as follows:

Organizational Structure of KPI Committee

The structure and membership of the KPI Committee based on the Decree of the Board of Directors No. 041/A/KU/B30/SK/2022 dated April 08, 2022 concerning the Key Performance Indicators (KPI) Committee of PT Pupuk Indonesia (Persero) Group is as follows:

TABEL KEANGGOTAAN KOMITE KPI
KPI Committee Membership Table

Jabatan	Position	Dijabat oleh	Served by
Penasihat	Advisor	• Direktur Utama • Wakil Direktur Utama	• President Director • Vice President Director
Ketua I	Chairman I	Direktur Keuangan & Investasi	Director of Finance & Investment
Ketua II	Chairman II	Direktur Transformasi Bisnis	Director of Business Transformation
Ketua III	Chairman III	Direktur SDM, Tata Kelola, dan Manajemen Risiko	Director of HR, Governance and Risk Management
Sekretaris I	Secretary I	SVP Kinerja Korporat	SVP Corporate Performance
Sekretaris II	Secretary II	SVP Strategi Korporat	SVP Corporate Strategy
Sekretaris III	Secretary III	SVP Manajemen Talenta dan Kinerja	SVP Talent and Performance Management

Tugas dan Tanggung Jawab Komite KPI

Penasehat

Memberikan arah kebijakan, masukan, nasehat dan pertimbangan–pertimbangan dalam suatu ide atau program dalam proses bisnis KPI di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) Group.

Duties and Responsibilities of the KPI Committee

Advisor

Provide policy direction, input, advice and considerations in an idea or program in the KPI business process within PT Pupuk Indonesia (Persero) Group.

Ketua
Mengarahkan, mengawasi, dan bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan serta rencana kerja pelaksanaan proses bisnis KPI di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) Group.

Sekretaris I
Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas – tugas administrasi untuk mendukung persiapan dan pelaksanaan proses bisnis KPI Level Korporasi, Direktorat dan Kompartemen di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) Group.

Sekretaris II
Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas – tugas administrasi untuk mendukung persiapan dan pelaksanaan proses bisnis KPI *Senior Project Manager* (SPM) di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) Group.

Sekretaris III
Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas – tugas administrasi untuk mendukung persiapan dan pelaksanaan proses bisnis KPI Level Individu Karyawan di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) Group.

Pelaksanaan Tugas Komite KPI
Pada Tahun 2022, Komite KPI telah melaksanakan program kerja sebagai berikut:
1. Persiapan penyusunan KPI Kompartemen Tahun 2022
2. Memberikan keputusan dan arahan untuk Cascading KPI Direksi Kolegial dan Individu Direksi PI Group Tahun 2023

Rapat Komite KPI
Sepanjang tahun 2022, Komite KPI telah mengadakan rapat sebanyak 2 kali. Agenda yang menjadi Pembahasan diuraikan dalam tabel di bawah.

Chair
Direct, supervise, and be responsible for establishing policies and work plans for the implementation of KPI business processes within PT Pupuk Indonesia (Persero) Group.

Secretary I
Responsible for carrying out administrative tasks to support the preparation and implementation of KPI business processes at the Corporate, Directorate and Compartment levels within PT Pupuk Indonesia (Persero) Group.

Secretary II
Responsible for carrying out administrative tasks to support the preparation and implementation of KPI Senior Project Manager (SPM) business processes within PT Pupuk Indonesia (Persero) Group.

Secretary III
Responsible for carrying out administrative tasks to support the preparation and implementation of the Employee Individual Level KPI business process within PT Pupuk Indonesia (Persero) Group.

Implementation of KPI Committee Duties
In 2022, the KPI Committee has implemented the following work program:
1. Preparation of the 2022 Compartment KPIs
2. Provide decision and direction for the Cascading of KPIs of Collegial Directors and Individual Directors of PI Group in 2023.

KPI Committee Meeting
Throughout 2022, the KPI Committee has held 2 (two) meetings. The agenda for discussion is outlined in the table below.

TABEL RAPAT KOMITE KPI
KPI Committee Meeting Table

No.	Agenda	Agenda
1	*Workshop Cascading & Alignment* KPI Kompartemen Tahun 2022	Compartment KPI Cascading & Alignment Workshop in 2022
2	*Workshop Cascading & Alignment* KPI Direksi Kolegial PI Group Tahun 2023	PI Group Collegial Directors KPI Cascading & Alignment Workshop Year 2023

KOMITE PENGEMBANGAN SDM

Komite Pengembangan SDM merupakan organ pendukung yang diangkat oleh Direksi untuk membantu tugas Direksi dalam pengelolaan program pengembangan Sumber Daya Manusia di Perusahaan agar sesuai dengan kompetensi Pembentukan dan pengangkatan keanggotaan Komite Pengembangan SDM dilaksanakan oleh Direksi melalu Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/081/2018 tangga 26 November 2018 tentang Komite Pengembangan Sumber Daya Manusia PTPI.

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT COMMITTEE

The HR Development Committee is a supporting organ appointed by the Board of Directors to assist the duties of the Board of Directors in managing the Human Resources development program in the Company in accordance with competencies. The establishment and appointment of the HR Development Committee membership is carried out by the Board of Directors through the Board of Directors Decree Number SK/DIR/081/2018 dated November 26, 2018 concerning PTPI Human Resources Development Committee.

Susunan Anggota Komite Pengembangan SDM

Keanggotaan Komite Pengembangan SDM terdiri dari dua level, yaitu Level Utama dan Level Madya.

Composition of HR Development Committee Members

The membership of the HR Development Committee consists of two levels, namely Main Level and Intermediate Level.

LEVEL UTAMA

MAIN LEVEL

TABEL SUSUNAN ANGGOTA KOMITE PENGEMBANGAN SDM LEVEL UTAMA
Table of HR Development Committee Members at Main Level

Jabatan Position	Dijabat oleh	Served by
Ketua | Chair	Direktur SDM dan Tata Kelola	Director of HR and Governance
Sekretaris | Secretary	SVP SDM	SVP HR
Anggota | Member	Direksi	Directors

Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Komite SDM Level Utama

1. Menerima usulan dan mencari informasi bakal calon pejabat *Grade* 1 dan *Grade* 2 dari sumber internal dan sumber reliable lainnya.
2. Melakukan penilaian terhadap kandidat *Senior Vice President* dan Pejabat *Grade* 1 setingkat lainnya di perusahaan untuk diputuskan melalui Rapat Komite Pengembangan SDM dengan mengacu pada kompetensi para calon kandidat yang diusulkan dan kebutuhan kompetensi jabatan sesuai dengan arah pengembangan perusahaan.
3. Melakukan penilaian terhadap kandidat *Vice President* dan Pejabat *Grade* 2 setingkat lainnya di perusahaan untuk diputuskan melalui Rapat Komite Pengembangan SDM dengan mengacu pada kompetensi dan kontribusi para calon I kandidat yang diusulkan melalui program pengembangan Sumber Daya Manusia dan sesuai dengan arah pengembangan perusahaan.
4. Melakukan evaluasi penilaian, dalam hal penilaian dilakukan oleh Lembaga Profesional.

Main Duties and Responsibilities of Main Level HR Committee

1. Receive proposals and seek information on candidates for Grade 1 and Grade 2 officials from internal sources and other reliable sources.
2. Conduct an assessment of candidates for Senior Vice President and other Grade 1-level Officers in the company to be decided through the HR Development Committee Meeting with reference to the competencies of the proposed candidates and the competency needs of the position in accordance with the direction of the company's development.
3. Conducting an assessment of candidates for Vice President and other Grade 2-level Officers in the company to be decided through the HR Development Committee Meeting by referring to the competence and contribution of the proposed candidates through the Human Resources development program and in accordance with the company's development direction.
4. Evaluate the assessment, in the event that the assessment is conducted by a Professional Institution.

5. Membahas program Rotasi, Mutasi, dan Promosi karyawan *Grade* 1 dan *Grade* 2 internal perusahaan berdasarkan sistem pengembangan Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi.
6. Melakukan penilaian dan wawancara dan I atau evaluasi untuk penetapan dan pengisian formasi I penggantian pejabat dengan mempertimbangkan kebutuhan jabatan dan kebutuhan perusahaan.
7. Mengevaluasi keberhasilan dan kinerja kerja pejabat-pejabat *Grade* 1 dan *Grade* 2 di internal perusahaan.
8. Membahas masalah pengelolaan Sumber Daya Manusia (baik operasional maupun strategis).
9. Memberikan arahan strategi di bidang Sumber Daya Manusia, membuat kebijakan umum di bidang Sumber Daya Manusia termasuk perubahan-perubahannya dan mengusulkan kepada Direktur Utama untuk penetapannya.
10. Menetapkan sistem yang dapat mendorong karyawan memiliki budaya perusahaan, etos dan budaya kerja yang baik.
11. Bertanggungjawab kepada Direktur Utama PT PI.
12. Bertanggung jawab atas pengelolaan program pengembangan SDM *Grade* 1 dan 2 di Perusahaan.

Tugas & Wewenang Ketua Komite Pengembangan SDM Level Utama

1. Menyerahkan Daftar Bakal Calon Pejabat *Grade* 1 dan setingkat lainnya di internal Perusahaan kepada Direktur Utama untuk memperoleh persetujuan.
2. Menyerahkan Daftar Bakal Calon Pejabat *Grade* 2 dan setingkat lainnya di internal perusahaan kepada Direktur Utama untuk memperoleh persetujuan.
3. Menyiapkan hasil evaluasi akhir yang telah ditetapkan oleh Tim guna disampaikan kepada Direktur Utama PTPI.
4. Menyampaikan hasil evaluasi akhir penilaian untuk disampaikan kepada Direktur Utama guna mendapatkan penetapan.
5. Melakukan tugas dan wewenang sesuai Tugas Pokok & Tanggung Jawab Komite SDM Level Utama.
6. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang selaku Ketua Komite Pengembangan SDM Level Utama.

Tugas & Wewenang Anggota Komite Pengembangan SDM Level Utama

1. Melakukan penilaian terhadap bakal calon Pejabat Grade 1 & 2 di internal perusahaan sesuai dengan tugas dan wewenang utama Komite PSDM Level Utama.

5. Discussed the company's internal Grade 1 and Grade 2 employee Rotation, Mutation, and Promotion program based on a competency-based Human Resources development system.
6. Conduct assessments and interviews and I or evaluations for the determination and filling of formations I replacement of officials by considering the needs of the position and the needs of the company.
7. Evaluate the success and work performance of Grade 1 and Grade 2 officers within the company.
8. Discusses Human Resource management issues (both operational and strategic).
9. Provide strategic direction in the field of Human Resources, make general policies in the field of Human Resources including changes and propose to the President Director for determination.
10. Establish a system that can encourage employees to have a good corporate culture, ethos and work culture.
11. Responsible to the President Director of PT PI.
12. Responsible for the management of Grade 1 and 2 HR development programs in the Company.

Duties & Authorities of Head of HR Development Committee Main Level

1. Submit the List of Candidates for Grade 1 and other equivalent level Officers within the Company to the President Director for approval.
2. Submit a List of Candidates for Grade 2 Officers and other levels within the company to the President Director for approval.
3. Prepare the final evaluation results that have been determined by the Team to be submitted to the President Director of PTPI.
4. Submitting the results of the final evaluation of the assessment to be submitted to the President Director for determination.
5. Perform duties and authorities in accordance with the Main Duties & Responsibilities of the Main Level HR Committee.
6. Responsible for the implementation of duties, responsibilities and authorities as Chairman of the Main Level HR Development Committee.

Duties & Authorities of Main Level HR Development Committee Members

1. Conducting assessments of candidates for Grade 1 & 2 Officers within the company in accordance with the main duties and authorities of the Main Level PSDM Committee.

2. Melakukan tugas dan wewenang sesuai Tugas Pokok & Tanggung Jawab Komite Pengembangan SDM Level Utama.
3. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang selaku anggota Komite PSDM level utama.

Tugas & Wewenang Sekretaris Komite Pengembangan SDM Level Utama

1. Menyiapkan bahan rapat untuk pembahasan di Komite Pengembangan SDM Level Utama.
2. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan hasil pembahasan Komite Pengembangan SDM Level Utama.
3. Bertanggungjawab kepada Ketua Komite Pengembangan SDM Level Utama.
4. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang selaku Sekretaris Komite PSDM level utama.

2. Perform duties and authorities in accordance with the Main Duties & Responsibilities of the Main Level HR Development Committee.
3. Responsible for the implementation of duties, responsibilities and authorities as a member of the main level PSDM Committee.

Duties & Authorities of Secretary of HR Development Committee Main Level

1. Prepare meeting materials for discussion at the Main Level HR Development Committee.
2. Administer and document the results of the Main Level HR Development Committee discussions.
3. Responsible to the Chairman of the Main Level HR Development Committee.
4. Responsible for the implementation of duties, responsibilities and authorities as Secretary of the main level PSDM Committee.

LEVEL MADYA

ADVANCED LEVEL

TABEL SUSUNAN ANGGOTA KOMITE PENGEMBANGAN SDM LEVEL MADYA
Table of Middle Level HR Development Committee Members

Jabatan Position	Dijabat oleh	Served by
Ketua | Chair	*Senior Vice President* Sumber Daya Manusia	Senior Vice President Human Resources
Sekretaris | Secretary	VP Fungsi SDM	VP HR Function
Anggota | Member	Seluruh SVP dan SPM	All SVPs and SPMs

Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Komite SDM Level Madya

1. Menerima usulan dan mencari informasi bakal calon untuk mengisi jabatan di posisi *Grade* 3, 4 dan 5 dari sumber internal dan sumber reliable lainnya.
2. Melakukan penilaian terhadap kandidat untuk mengisi jabatan posisi *Grade* 3, 4, dan 5 di perusahaan untuk diputuskan melalui Rapat Komite Pengembangan SDM dengan mengacu pada kompetensi para calon I kandidat yang diusulkan dan kebutuhan kompetensi jabatan sesuai dengan arah pengembangan Perusahaan.
3. Membahas program Rotasi, Mutasi, dan Promosi karyawan *Grade* 3, 4, dan 5 di internal Perusahaan berdasarkan sistem pengembangan Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi.
4. Melakukan penilaian dan wawancara dan I atau evaluasi untuk penetapan dan pengisian formasi I

Principal Duties and Responsibilities of the Middle Level HR Committee

1. Receive suggestions and seek information on candidates to fill Grade 3, 4 and 5 positions from internal sources and other reliable sources.
2. Assessing candidates to fill Grade 3, 4, and 5 positions in the company to be decided through the HR Development Committee Meeting with reference to the competencies of the proposed candidates and the competency needs of the position in accordance with the direction of the Company's development.
3. Discussed the Rotation, Mutation, and Promotion program for Grade 3, 4, and 5 employees within the Company based on the competency-based Human Resources development system.
4. Conduct assessments and interviews and I or evaluations for the determination and filling of

penggantian pejabat dengan mempertimbangkan kebutuhan jabatan dan kebutuhan perusahaan.
5. Mengevaluasi keberhasilan dan kinerja kerja pejabat-pejabat *Grade* 3, 4, dan 5 di internal perusahaan.
6. Membahas masalah pengelolaan Sumber Daya Manusia (baik operasional maupun strategis) sesuai kewenangannya.
7. Menyiapkan dan mengusulkan sistem yang dapat mendorong karyawan memiliki budaya perusahaan, etos dan budaya kerja yang baik, dan kemudian diusulkan kepada Direktur SDM & Tata Kelola untuk penetapan.
8. Melakukan evaluasi penilaian, dalam hal penilaian dilakukan oleh Lembaga Profesional
9. Mengevaluasi peraturan-peraturan perusahaan dan pelaksanaannya yang terkait dengan ketenagakerjaan serta memberikan alternatif usulan penyempurnaan kepada Direktur SDM & Tata Kelola.
10. Membahas dan mengevaluasi pemetaan kompetensi saat ini dan kompetensi yang dibutuhkan di masa yang akan datang dan mengusulkannya kepada Direktur SDM & Tata Kelola untuk penetapannya.
11. Menggagas penerapan human capital management dalam membentuk tim kerja lintas fungsional di lingkungan perusahaan.
12. Melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab lain yang mungkin diberikan oleh Direksi kepada Komite SDM level Madya.
13. Bertanggung jawab atas pengelolaan program pengembangan SDM *Grade* 3, 4, dan 5 di perusahaan.

Tugas dan Wewenang Ketua Komite Pengembangan SDM Level Madya

1. Menyerahkan daftar usulan Rotasi, Mutasi dan Promosi Karyawan *Grade* 3, 4, 5 dan setingkat lainnya di internal perusahaan kepada Direktur SDM & Tata Kelola dan selanjutnya dimintakan persetujuan Direktur Utama.
2. Menyiapkan hasil evaluasi akhir yang telah ditetapkan oleh Tim guna disampaikan kepada Direktur SDM & Tata Kelola dan selanjutnya dimintakan persetujuan Direktur Utama.
3. Menyampaikan hasil evaluasi akhir penilaian untuk disampaikan kepada Direktur SDM & Tata Kelola dan selanjutnya dimintakan persetujuan Direktur Utama.
4. Melakukan tugas dan wewenang sesuai Tugas Pokok & Tanggung Jawab Komite SDM Level Madya.
5. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang selaku ketua komite Pengembangan SDM level madya.

formations I replacement of officials by considering the needs of the position and the needs of the company.
5. Evaluate the success and work performance of Grade 3, 4 and 5 officers within the company.
6. Discuss Human Resources management issues (both operational and strategic) according to their authority.
7. Prepare and propose a system that can encourage employees to have a good corporate culture, ethos and work culture, and then proposed to the Director of HR & Governance for determination.
8. Evaluating the assessment, in the event that the assessment is carried out by a Professional Institution
9. Evaluate company regulations and their implementation related to employment and provide alternative proposals for improvement to the Director of HR & Governance.
10. Discuss and evaluate the mapping of current competencies and competencies needed in the future and propose it to the Director of HR & Governance for determination.
11. Initiated the implementation of human capital management in forming cross-functional work teams within the company.
12. Carry out other duties and responsibilities that may be assigned by the Board of Directors to the mid-level HR Committee.
13. Responsible for the management of Grade 3, 4, and 5 HR development programs in the company.

Duties and Authorities of the Chairperson of the Middle Level HR Development Committee

1. Submit a list of proposals for Rotation, Mutation and Promotion of Grade 3, 4, 5 Employees and other levels within the company to the Director of HR & Governance and then seek approval from the President Director.
2. Prepare the final evaluation results that have been determined by the Team to be submitted to the HR & Governance Director and subsequently requested for approval by the President Director.
3. Submitting the results of the final evaluation of the assessment to be submitted to the Director of HR & Governance and subsequently requested for approval by the President Director.
4. Perform duties and authorities in accordance with the Main Duties & Responsibilities of the Middle Level HR Committee.
5. Responsible for the implementation of duties, responsibilities and authorities as the chairman of the mid-level HR Development committee.

Tugas dan Wewenang Anggota Komite Pengembangan SDM Level Madya

1. Melakukan penilaian terhadap usulan Rotasi, Mutasi dan Promosi Karyawan *Grade* 3, 4, 5 di internal perusahaan sesuai dengan tugas dan wewenang utama Komite PSDM Level Madya.
2. Melakukan tugas dan wewenang sesuai Tugas Pokok & Tanggung Jawab Komite SDM Level Madya.
3. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang selaku anggota Komite Pengembangan SDM Level Madya.

Duties and Authorities of Middle Level HR Development Committee Members

1. Conduct an assessment of the proposed Rotation, Mutation and Promotion of Grade 3, 4, 5 Employees within the company in accordance with the main duties and authorities of the Middle Level PSDM Committee.
2. Perform duties and authorities in accordance with the Main Duties & Responsibilities of the Middle Level HR Committee.
3. Responsible for the implementation of duties, responsibilities, and authorities as a member of the Middle Level HR Development Committee.

Tugas dan Wewenang Sekretaris Komite Pengembangan SDM Level Madya

1. Menyiapkan bahan rapat untuk pembahasan di Komite Pengembangan SDM Level Madya.
2. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan hasil pembahasan Komite Pengembangan SDM Level Madya.
3. Bertanggungjawab kepada Ketua Komite Pengembangan SDM Level Madya.
4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang selaku Sekretaris Komite Pengembangan SDM Level Madya.

Duties and Authorities of the Secretary of the Middle Level HR Development Committee

1. Prepare meeting materials for discussion at the Middle Level HR Development Committee.
2. Administering and documenting the results of the Middle Level HR Development Committee discussions.
3. Responsible to the Chairman of the Middle Level HR Development Committee.
4. Responsible for the implementation of duties, responsibilities, and authorities as Secretary of the Middle Level HR Development Committee.

Pelaksanaan Tugas Komite Pengembangan SDM

Rapat Komite Pengembangan SDM

Sepanjang tahun 2022, Komite Pengembangan SDM telah mengadakan rapat sebanyak 10 kali. Agenda yang menjadi Pembahasan diuraikan dalam tabel di bawah.

Implementation of HR Development Committee Duties

HR Development Committee Meeting

Throughout 2022, the HR Development Committee met 10 times. The agenda for discussion is outlined in the table below.

TABEL RAPAT KOMITE PENGEMBANGAN SDM
The HC Committee Meeting Table

No	Tanggal Date	Agenda	Agenda
1	2 Februari 2022 February 2, 2022	Program *selected talent* PI Grup	PI Group selected talent program
2	22 Februari 2022 February 22, 2022	Program asuransi kesehatan	Health insurance program
3	20 Maret 2022 March 20, 2022	Pemberian *reward* kinerja tahun 2022	Performance reward in 2022
4	4 April 2022 April 4, 2022	Pengisian jabatan strategis di Perusahaan	Filling strategic positions in the Company
5	9 April 2022 April 9, 2022	Struktur organisasi *Senior Project Manager*	Senior Project Manager organizational structure
6	12 Mei 2022 May 12, 2022	Usulan pedoman bidang SDM dan *single platform* PI Grup	Proposed HR guidelines and PI Group single platform

No	Tanggal Date	Agenda	Agenda
7	16 Juni 2022 June 16, 2022	*Performance Management System*	Performance Management System
8	27 Juli 2022 July 27, 2022	Program COLA dan Merit PI Grup	PI Group COLA and Merit program
9	1 Agustus 2022 August 1, 2022	1. Program Penugasan Karyawan PI Grup 2. Program *Talent Selection* PI Grup	1. PI Group Employee Assignment Program 2. PI Group Talent Selection Program
10	22 Oktober 222 October 22, 2022	Program HCM *Grand Strategy*	HCM Grand Strategy Program

Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan organ pendukung yang diangkat oleh Direksi sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 053/A/KU/E30/SK/2022 tanggal 10 Mei 2022 tentang Komite Tim Komite TJSL PT Pupuk Indonesia (Persero) Group.

Social and Environmental Responsibility (SER) Committee

The Social and Environmental Responsibility (SER) Committee is a supporting organ appointed by the Board of Directors accordance with the Decree of the Board of Directors No. 053/A/KU/E30/SK/2022 dated May, 10 2022 concerning Social and Environmental Responsibility (SER) Committee of PT Pupuk Indonesia (Persero) Group.

Struktur dan Keanggotaan Komite TJSL
Organizational Structure of SER Committee

Jabatan Position	Dijabat oleh	Served by
Ketua | Chair	Direktur Sumber Daya Manusia	Human Capital Director
Sekretaris | Secretary	SVP TJSL	SVP SER
Anggota | Member	1. Direktur Keuangan dan Umum Anak Perusahaan Produsen Pupuk 2. Direktur Keuangan dan Umum PT Rekayasa Industri	1. Finance and General Director of Subsidiaries of a Fertilizer Producer 2. Finance and General Director of PT Rekayasa Industri

Tugas dan Tanggung Jawab Komite TJSL

1. Menerima usulan dan memberikan saran dan arahan strategis terkait program strategis.
2. Melakukan pengawasan dan evaluasi pada setiap konsolidasi kegiatan yang telah dilaporkan pada Laporan Bulanan kegiatan TJSL
3. Membahas program strategis TJSL PT Pupuk Indonesia (Persero) Group sehingga program tersebut tepat sasaran dan dapat memberikan nilai tambah bagi PT Pupuk Indonesia (Persero) Group
4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan program TJSL PT Pupuk Indonesia (Persero) Group
5. Bertanggung jawab atas pengelolaan program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang TJSL PT Pupuk Indonesia (Persero) Group

Duties and Responsibilities of the TJSL Committee

1. Receive proposals and provide strategic advice and direction related to strategic programs.
2. Supervise and evaluate each consolidated activity that has been reported in the Monthly Report of SER activities.
3. Discuss the SER strategic program of PT Pupuk Indonesia (Persero) Group so that the program is right on target and can provide added value to PT Pupuk Indonesia (Persero) Group.
4. Responsible for the implementation of PT Pupuk Indonesia (Persero) Group's SER program.
5. Responsible for the management of the SER Human Resources (HR) development program of PT Pupuk Indonesia (Persero) Group.

Pelaksanaan Tugas Komite TJSL

- Tingkat Kolektabilitas pengembalian dana pinjaman tahun 2022 menghasilkan *score* 3 atau dengan penilaian predikat "sangat baik".
- Tingkat efektivitas penyaluran dana pinjaman tahun 2022 menghasilkan *score* 3 atau dengan penilaian predikat " baik".

Rencana Kerja Komite TJSL Tahun 2023

Dana TJSL digunakan untuk program-program pengembangan masyarakat dan dikaitkan dengan pilar dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) meliputi 4 Pilar, yakni: Pilar Sosial, Pilar Ekonomi, Pilar Lingkungan, dan Pilar Hukum dan Tata Kelola serta mendukung 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Implementation of SER Committee Duties

- The level of collectability of loan refunds in 2022 resulted in a score of 3 or with a predicate assessment of "very good".
- The level of effectiveness of the distribution of loan funds in 2022 resulted in a score of 3 or with a predicate assessment of "good".

SER Committee Work Plan for 2023

SER funds are used for community development programs and are linked to the pillars and Sustainable Development Goals (SDGs) including 4 Pillars, namely: Social Pillar, Economic Pillar, Environmental Pillar, and Legal and Governance Pillar and supports 17 Sustainable Development Goals (SDGs).

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) mempunyai peranan penting dalam memperlancar hubungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi dan merupakan pihak penghubung yang menjembatani kepentingan antara Perusahaan dengan pihak eksternal atau stakeholders. Keberadaan Sekretaris Perusahaan juga diharapkan terlaksananya pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam membantu Direksi, Sekretaris Perusahaan memiliki fungsi utama sebagai Pejabat Penghubung, implementasi GCG, komunikasi korporat, serta administrasi dokumen kebijakan dan notulensi rapat. Melalui berbagai kegiatan yang berhubungan dengan publik, Sekretaris Perusahaan turut menjaga citra Perusahaan dan mewakili Direksi dalam setiap kegiatan komunikasi eksternal, khususnya dengan pihak regulator, investor, dan para Pemangku Kepentingan lainnya.

Persyaratan dan tata cara pengangkatan Sekretaris Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

The Corporate Secretary has an important role in facilitating the relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors and is a liaison party that bridges the interests between the Company and external parties or stakeholders. The existence of the Corporate Secretary is also expected to fulfill the provisions of applicable laws and regulations.

In assisting the Board of Directors, the Corporate Secretary has the main function as a Liaison Officer, GCG implementation, corporate communications, as well as administration of policy documents and meeting minutes. Through various activities related to the public, the Corporate Secretary helps maintain the Company's image and represents the Board of Directors in every external communication activity, especially with regulators, investors, and other Stakeholders.

The requirements and procedures for the appointment of the Corporate Secretary refer to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011, and the Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 on the Corporate Secretary of Issuers or Public Companies.

PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direksi serta diangkat dan diberhentikan melalui Keputusan Direksi berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Sesuai Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014, Perusahaan wajib melaporkan pergantian atau pemberhentian dan pengangkatan pejabat Sekretaris Perusahaan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia.

PARTIES APPOINTING AND DISMISSING THE CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary is directly responsible to the Board of Directors and is appointed and dismissed through a Decree of the Board of Directors based on the Company's internal mechanism with the approval of the Board of Commissioners.

In accordance with OJK Regulation No. 35/POJK.04/2014, the Company is required to report the change or dismissal and appointment of the Corporate Secretary to OJK and the Indonesia Stock Exchange.

PEJABAT SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Wijaya Laksana berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 039/A/HK/P28/SK/2023 tentang Penunjukkan Pejabat di Lingkungan PTPI.

CORPORATE SECRETARY OFFICER

The Corporate Secretary is held by Wijaya Laksana based on the Decree of the Board of Directors No. 039/A/HK/P28/SK/2023 concerning the Appointment of Officials within PTPI.

Wijaya Laksana

SVP Sekretaris Perusahaan

Warga Negara | Citizen	Indonesia	Indonesian
Usia | Age	46 tahun	46 years old
Tempat, Tanggal, Lahir Place, Date of Birth	Magelang, 12 Agustus 1976	Magelang, August 12, 1976
Domisili | Domicile	Jakarta	Jakarta
Dasar Pengangkatan | Basis for Appointment	Surat Keputusan Direksi No. 039/A/HK/P28/SK/2023	Board of Directors Decree Number 039/A/HK/P28/SK/2023
Pendidikan | Education	• Magister Manajemen Komunikasi dari Universitas Indonesia (2012) • Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (2021)	• Master of Communication Management from University of Indonesia (2012) • Bachelor of Communication Science Padjadjaran University (2021)
Pengalaman Kerja Work Experience	• SVP Sekretaris Perusahaan PTPI (1 Maret 2023–sekarang) • SVP Komunikasi Korporat PTPI (1 April 2016-28 Februari 2023) • Manajer Humas & Kesekretariatan (7 Desember 2015–31 Maret Mar 2016)	• SVP Corporate Secretary PTPI (March 1, 2023-present) • SVP Corporate Communications PTPI (April 1, 2016 - February 28, 2023) • PR & Secretarial Manager (December 7, 2015-March 31, 2016)
Hubungan Afiliasi | Affiliate Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Utama/Pengendali.	Has no affiliation, either with the Board of Directors, Board of Commissioners, or Majority/Controlling Shareholders.

ORGANISASI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Cakupan fungsi Sekretaris Perusahaan dan koordinasi di antara organ digambarkan dalam struktur organisasi di bawah ini.

COMPANY SECRETARY ORGANIZATION

The scope of functions of the Corporate Secretary and coordination among the organs are depicted in the organizational structure below.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIS PERUSAHAAN PER 28 FEBRUARI 2023
Organizational Structure of Corporate Secretary as of February 28, 2023

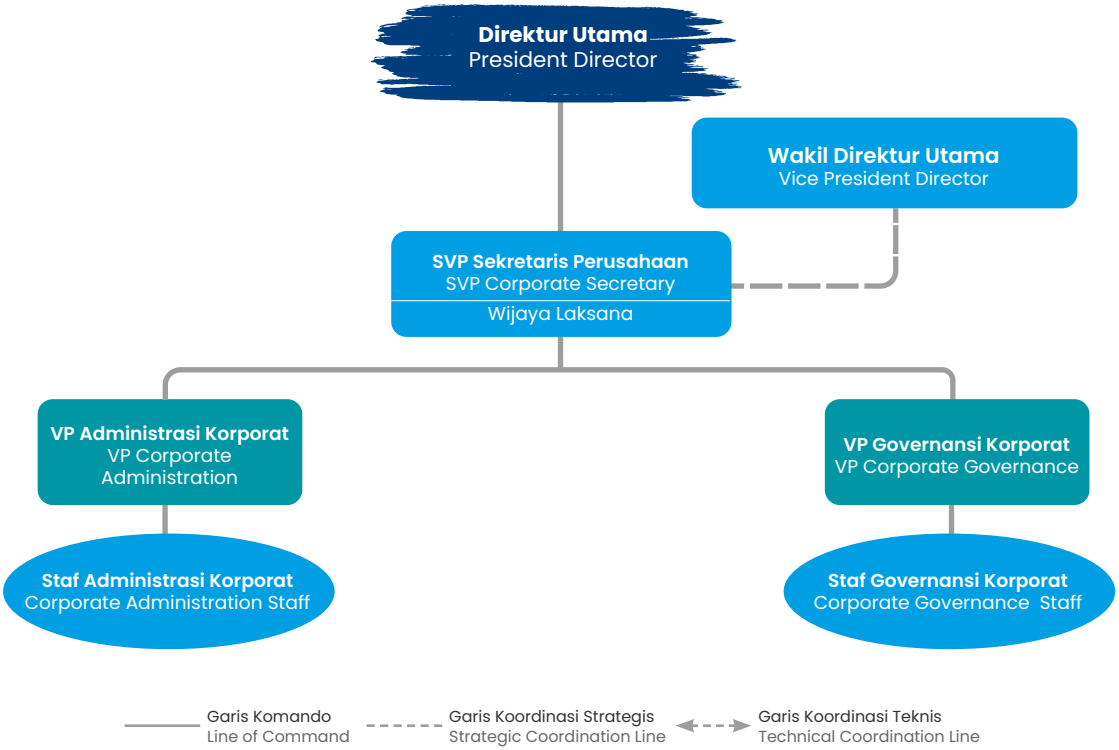

Secara struktural, Sekretaris Perusahaan berada satu tingkat di bawah Direksi yang membawahi VP Administrasi Korporat serta VP Governansi Korporat. Sekretaris Perusahaan diharapkan dapat membantu Direksi dalam menjalankan hubungan yang baik antara Perusahaan sebagai emiten dengan regulator dan lembaga-lembaga penunjang pasar modal, kalangan investor, masyarakat luas dan Pemangku Kepentingan pada umumnya, dan sebagai pengelola informasi yang terkait dengan lingkungan bisnis Perusahaan.

Struktur organisasi Sekretaris Perusahaan ditetapkan sesuai Keputusan Direksi Surat Keputusan Direksi No. 181/A/HK/E10/SK/2022, jumlah karyawan yang tergabung dalam unit Sekretaris Perusahaan sebanyak 17 orang.

Structurally, the Corporate Secretary is one level below the Board of Directors which oversees the VP of Corporate Law, VP of Business Law, VP of Secretariat and VP of Governance & Compliance. The Corporate Secretary is expected to assist the Board of Directors in carrying out good relations between the Company as an issuer with regulators and capital market supporting institutions, investors, the wider community and Stakeholders in general, and as a manager of information related to the Company's business environment.

The organizational structure of the Corporate Secretary is determined in accordance with the Decree of the Board of Directors No. 181/A/HK/E10/SK/2022, the number of employees who are members of the Corporate Secretary unit is 17 people.

Fungsi	Jumlah Total	Function
Administrasi Korporat	12	Corporate Administration
Governansi Korporat	5	Corporate Governance
Jumlah	**17**	**Total**

FUNGSI DAN TUGAS POKOK SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/080/2019 tanggal 20 Desember 2019, fungsi dan tugas pokok Sekretaris Perusahaan PTPI, yaitu:

1. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama;
2. Mengoordinasikan dan melaksanakan tugas-tugas bidang hukum secara korporat, serta kearsipan dokumen hukum korporat;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas dan kaitannya dengan penyiapan administrasi/ dokumentasi penyelenggaraan RUPS, Rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Rapat Direksi Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan penyiapan administrasi/dokumen penyelenggaraan RUPS Anggota Holding;
4. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas dalam kaitannya dengan *investor relations* dan *corporate communications*, meliputi persiapan Laporan Tahunan Perusahaan, *Corporate Identity*, *website* termasuk SIPortal BUMN Pupuk, *media relations, sponsorship donations*, dan lain-lain;
5. Mengoordinasikan kegiatan Sekretaris Perusahaan Anggota Holding dalam rangka pelaksanaan kegiatan sinergi & harmonisasi Holding;
6. Mengoordinasikan perencanaan dan pengendalian untuk mengantisipasi kemungkinan risiko dan peristiwa (*events*) antara lain *Legal Risk, Operational Risk*, dan *Financial Risk* yang potensial dapat terjadi di Korporasi *Holding* dan Anggota *Holding*;
7. Mengoordinasikan pengendalian potensi risiko terhadap penyaluran dana (bantuan, investasi, dan lain sebagainya) yang dilakukan unit-unit kerja; kemungkinan/potensi/indikasi penyimpangan yang akan timbul pada unitunit kerja dan efektivitas program-program efisiensi Korporasi *Holding* dan Anggota *Holding*.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Perusahaan mengikutsertakan Sekretaris Perusahaan dalam kegiatan pengembangan kompetensi yang dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan dengan pendanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perusahaan. Daftar kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Sekretaris Perusahaan di sepanjang tahun 2022 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Functions and Main Duties of the Corporate Secretary

In accordance with the Decree of the Board of Directors No. SK/DIR/080/2019 dated December 20, 2019, the main functions and duties of the Corporate Secretary of PTPI, namely:

1. The Corporate Secretary reports directly to the President Director;
2. Coordinate and carry out tasks in the field of corporate law, as well as archiving corporate legal documents;
3. Coordinate the implementation of tasks and related to the preparation of administration/documentation of the GMS, Board of Commissioners and Board of Directors Meetings. Meetings of the Company's Board of Directors in accordance with the Company's Articles of Association and preparation of administration/ documentation of the GMS of Holding Members;
4. Coordinate the implementation of tasks in relation to investor relations and corporate communications, including the preparation of the Company's Annual Report, Corporate Identity, website including SIPortal BUMN Pupuk, media relations, sponsorship donations, and others;
5. Coordinate the activities of the Corporate Secretaries of Holding Members in the context of implementing Holding synergy & harmonization activities;
6. Coordinate planning and control to anticipate possible risks and events, including Legal Risk, Operational Risk, and Financial Risk that can potentially occur in the Holding Corporation and Holding Members;
7. Coordinating the control of potential risks to the distribution of funds (assistance, investment, etc.) carried out by work units; the possibility/potential/ indication of irregularities that will arise in work units and the effectiveness of the efficiency programs of the Holding Corporation and Holding Members.

COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

The Company includes the Corporate Secretary in competency development activities carried out through various training and education with funding fully the responsibility of the Company. The list of training and competency improvement activities followed by the Corporate Secretary throughout 2022 can be seen in the Company Profile chapter in this annual report.

PELAKSANAAN TUGAS TAHUN 2022

TASK IMPLEMENTATION YEAR 2022

No	Sasaran Strategis Strategic Objectives	Program Kegiatan Program Activities	Realisasi	Realization
1	Memastikan administrasi perkantoran/ kesekretariatan dan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Perusahaan berjalan dengan baik Ensure office administration/ secretarial and archival organization within the Company is running well.	Pengembangan aplikasi Digital Office Lanjutan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Kesekretariatan (pengajuan: Pengembangan aplikasi pendukung pelaksanaan kegiatan Kesekretariatan) Development of Advanced Digital Office applications to support the implementation of Secretarial activities (submission: Development of applications supporting the implementation of Secretarial activities)	1. Dalam rangka upgrading DOF Eksisting, telah dilaksanakan koordinasi bersama TI untuk pengerjaan change request; 2. Dalam rangka implementasi DOF di Pupuk Indonesia Grup, telah dilaksanakan koordinasi bersama TI untuk instalasi versi *Development* di PT KIE dan PT Kalianusa, pendampingan pra implementasi, sosialisasi dan simulasi, serta migrasi dan finalisasi dari *Development* ke *Production* di Cucu Perusahaan Tracon Industri; 3. Dalam rangka pengembangan DOF Versi 2 Modul Manajemen Arsip Aktif & Inaktif, telah dilaksanakan s.d. selesainya proses *Development, User Acceptance Test* (UAT) dan *Go Live* di PI; 4. Dalam rangka implementasi Aplikasi Transkripsi Rapat, telah dilaksanakan penyusunan *timeline* dan koordinasi guna finalisasi Rencana Kerja & Syarat-Syarat (RKS) serta Daftar Usulan Rekanan (DUR), analisis *cost & benefit*, klarifikasi anggaran, proses pengadaan, penunjukan hingga *kick off meeting* dan UAT dengan penyedia; 5. Dalam rangka pengembangan Aplikasi Manajemen Rapat, telah dilaksanakan penyusunan *timeline*, finalisasi *Business Requirement Design* (BRD), koordinasi integrasi sistem dengan *vendor, benchmark*, & konfirmasi penentuan ruang rapat bersama; 6. Dalam rangka pengembangan Aplikasi Pelaporan Elektronik Terintegrasi ("Central Data") PI Grup, telah dilaksanakan penyusunan *timeline*, finalisasi BRD, kompilasi kebutuhan data Unit Kerja, finalisasi kebutuhan format pelaporan, & *benchmark* dengan OJK; 7. Dalam rangka pengembangan Aplikasi Pengelolaan Data Strategis Perusahaan (*Central Data*), telah dilaksanakan implementasi di internal Kompartemen Sekretaris Perusahaan; 8. Penyelenggaraan FGD Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen ("DSM") DOF pada tanggal 26 Desember 2022 & Klinik Kesekretariatan pada tanggal 26 Desember 2022.	1. In order to upgrade the Existing DOF, coordination with IT has been carried out to work on change requests; 2. In order to implement DOF in Pupuk Indonesia Group, coordination with IT has been carried out for the installation of the Development version at PT KIE and PT Kalianusa, pre-implementation assistance, socialization and simulation, as well as migration and finalization from Development to Production at the Grandson Company Tracon Industri; 3. In order to develop DOF Version 2 Active & Inactive Archive Management Module, the Development, User Acceptance Test (UAT) and Go Live processes have been carried out until the completion of the PI; 4. In the context of implementing the Meeting Transcription Application, timeline preparation and coordination have been carried out to finalize the Work Plan & Terms & Conditions (RKS) and the List of Proposed Partners (DUR), cost & benefit analysis, budget clarification, procurement process, appointment to kick off meeting and UAT with the provider; 5. In order to develop the Meeting Management Application, timeline preparation, finalization of Business Requirement Design ("BRD"), coordination of system integration with vendors, benchmarking, & confirmation of the determination of shared meeting rooms have been carried out; 6. In order to develop the PI Group Integrated Electronic Reporting Application ("Central Data"), a timeline has been prepared, BRD finalized, compilation of Work Unit data requirements, finalization of reporting format requirements, & benchmarking with OJK; 7. In order to develop the Company's Strategic Data Management Application (Central Data), implementation has been carried out in the internal Corporate Secretary Compartment; 8. Organizing FGD for the Preparation of DOF Management System Document ("DSM") on December 26, 2022 & Secretarial Clinic on December 26, 2022.

No	Sasaran Strategis Strategic Objectives	Program Kegiatan Program Activities	Realisasi	Realization
		Pengelolaan arsip/ dokumen perusahaan Management of company archives/ documents	1. Pengelolaan arsip dinamis vital dan aktif dilaksanakan oleh masing-masing Unit Kerja terkait selaku Unit Pengolah; 2. Pengelolaan arsip vital yang dilakukan oleh Dep. Administrasi Korporat (Komp. Sekretaris Perusahaan) bersama dengan Dep. Hukum Korporasi (Komp. Hukum) berupa arsip dokumentasi RUPS PI Grup, yaitu Risalah RUPS, Keputusan Pemegang Saham, dan/atau Akta Notaris terkait; 3. Pemeliharaan arsip aktif Perusahaan yang terbit di Tahun 2020–Triwulan II/ 2022; 4. Pengelolaan arsip dinamis inaktif secara bertahap dilaksanakan oleh Unit Kearsipan, s.d. Triwulan IV/ 2022 telah dilaksanakan antara lain: 5. Pembenahan: 37.903 arsip, 6. Alih media: 346.859 lembar arsip; 7. Revisi & penyusunan atas DSM Pengelolaan Arsip, yaitu Instruksi Kerja (IK) Penyediaan Stempel Perusahaan No. PI-SEK-IK-002 telah terbit pada tanggal 23 Maret 2022 & Prosedur Tata Naskah Dinas/TND No. PI-SEK-PR-008 (Rev. 1) telah terbit pada tanggal 31 Maret 2022; 8. Revisi & penyusunan atas DSM/ Prosedur Penyusunan *Annual Report & Sustainability Report* No. PI-SEK-PR-006 telah terbit pada tanggal 11 Agustus 2022 serta Pedoman Penyusunan *Annual Report & Sustainability Report* No. PI-SEK-PD-003 telah terbit pada tanggal 5 September 2022; 9. Penyelenggaraan & partisipasi dalam Bimbingan Teknis Pengawasan Kearsipan bekerja sama dengan ANRI pada tanggal 15–16 Februari 2022; 10. Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kearsipan di lingkungan PI Grup (Rekind) pada tanggal 22 Februari 2022; 11. Penyampaian ketentuan Pelaksanaan Penyusutan Arsip di lingkungan PI Grup; 12. Koordinasi & penyelesaian pelaksanaan harmonisasi klasifikasi arsip;	1. The management of vital and active dynamic archives is carried out by each relevant Work Unit as the Processing Unit; 2. Vital archive management carried out by Dep. Corporate Administration (Comp. Corporate Secretary) together with Dep. Corporate Law (Komp. Hukum) in the form of archives documenting PI Group's GMS, namely GMS Minutes, Shareholder Decisions, and/or related Notarial Deeds; 3. Maintenance of the Company's active archives published in 2020 - Quarter II / 2022; 4. The management of inactive dynamic archives is gradually carried out by the Archives Unit, up to Quarter IV / 2022 has been carried out, among others: 5. Revamping: 37,903 archives, 6. Media transfer: 346,859 archives; 7. Revision & drafting of Records Management DSM, namely Work Instruction (IK) for the Provision of Company Seals No. PI-SEK-IK-002 issued on March 23, 2022 & Procedures for Office Manuscripts/ TND No. PI-SEK-PR-008 (Rev. 1) issued on March 31, 2022; 8. Revision & preparation of DSM/ Procedure for Preparation of Annual Report & Sustainability Report No. PI-SEK-PR-006 was issued on August 11, 2022 and Guidelines for Preparation of Annual Report & Sustainability Report No. PI-SEK-PD-003 was issued on September 5, 2022; 9. Organizing & participating in the Technical Guidance on Archival Supervision in collaboration with ANRI on February 15-16, 2022; 10. Implementation of Archives Development activities within the PI Group (Rekind) on February 22, 2022; 11. Submission of provisions for the Implementation of Archive Depreciation within the PI Group; 12. Coordination & completion of archive classification harmonization implementation;

No	Sasaran Strategis Strategic Objectives	Program Kegiatan Program Activities	Realisasi	Realization
			13. Koordinasi & penyiapan pelaksanaan Pre Akreditasi Kearsipan di Tahun 2023; 14. Koordinasi, penyusunan, penatausahaan, penandatanganan/ validasi (sirkuler), pendistribusian, penyimpanan (pendokumentasian), dan/ atau pemeliharaan Risalah Rapat Direksi yang telah diselenggarakan s.d. Triwulan IV/2022 sesuai ketentuan yang berlaku; 15. Koordinasi & penyelesaian pelaksanaan realokasi Ruang Arsip/ *Record Center*; 16. Penyelenggaraan FGD Bidang Kesekretariatan PI Grup pada tanggal 21 April 2022 & *Kick Off Meeting* Pembinaan Kesekretariatan PI Grup pada tanggal 6 Desember 2022; 17. Klinik Kesekretariatan pada tanggal 26 Desember 2022 guna sosialisasi persiapan Pengawasan/Pre Akreditasi Kearsipan; 18. Koordinasi dengan Komp. Budaya & Pembelajaran dalam rangka pelaksanaan Program Pelatihan Sekretaris & Pelaksana Kesekretariatan.	13. Coordination & preparation for the implementation of Archives Pre-Accreditation in 2023; 14. Coordination, preparation, administration, signing/validation (circular), distribution, storage (documentation), and/or maintenance of Minutes of Board of Directors Meetings that have been held up to Quarter IV/2022 in accordance with applicable regulations; 15. Coordination & completion of the implementation of the reallocation of the Archive/Record Center Room; 16. Organizing FGD on PI Group Secretarial on April 21, 2022 & Kick Off Meeting on PI Group Secretarial Development on December 6, 2022; 17. Secretarial Clinic on 26 December 2022 for socialization of preparation for Archives Supervision/Pre-Accreditation; 18. Coordination with Comp. Culture & Learning in order to implement the Secretary & Secretarial Executive Training Program.
2	Terselenggaranya manajemen Kepatuhan berbasis teknologi informasi yang semakin efektif Implementation of more effective information technology-based compliance management	Mengembangkan Sistem Manajemen Kepatuhan SNI ISO 37301:2021 Develop a Compliance Management System SNI ISO 37301: 2021	1. Pelaksanaan *Benchmark* Aplikasi Kepatuhan *Online* (SIOKI) pada PKT dilaksanakan tanggal 28 Oktober 2022. 2. Proses pengadaan Jasa Konsultan Penerapan dan Persiapan Sertifikasi ISO 37301:2021 dan telah ditetapkan Konsultan Pemenang tanggal 9 Desember 2022. 3. Persiapan *Kick Off Meeting* dan Training Awareness Implementasi ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan. 4. Lingkup pengembangan meliputi *Training Awareness*, *Gap Analysis*, Tindak Lanjut, Pendampingan Tindak Lanjut Rekomendasi dan *Feedback Gap Analysis*, dan *Pre-Audit*.	1. The implementation of the Online Compliance Application Benchmark (SIOKI) at PKT was carried out on October 28, 2022. 2. Procurement process for Consultant Services for Implementation and Preparation of ISO 37301: 2021 Certification and the Winning Consultant has been determined on December 9, 2022. 3. Preparation of Kick Off Meeting and Training Awareness of ISO 37301:2021 Compliance Management System Implementation. 4. The scope of development includes Awareness Training, Gap Analysis, Follow-up, Follow-up Assistance for Recommendations and Feedback Gap Analysis, and Pre-Audit.

No	Sasaran Strategis Strategic Objectives	Program Kegiatan Program Activities	Realisasi	Realization
3	Terbangunnya budaya Kepatuhan perusahaan yang berkelanjutan Establishment of a sustainable corporate compliance culture	Menyelenggarakan GCG Assessment PT PI Grup dengan melibatkan Asesor Eksternal (*External Assessment*) Organizing GCG Assessment of PT PI Group by involving External Assessors (External Assessment)	1. Surat Dewan Komisaris No. S-058/Kom/PIHC/IX/2022 tanggal 21 September 2022 menyatakan: • Dewan Komisaris meminta Direksi melaksanakan proses pengadaan dan penunjukan jasa konsultan dengan mengusulkan kembali Konsultan Independen sebelumnya (PT Sinergi Daya Prima) untuk GCG *Assessment* PI Grup tahun 2022. • GCG Assessment PI Grup Tahun 2022 selesai paling lambat tanggal 31 Maret 2023. 2. Telah dilakukan proses pengadaan dan penunjukan PT Sinergi Daya Prima sebagai Konsultan Independen GCG *Assessment* melalui surat VP Pengadaan Jasa No. 24666/A/PL/F22/ET/2022 tanggal 15 Desember 2022. 3. *Kick Off Meeting* GCG *Assessment* PI Grup Tahun 2022 tanggal 23 Desember 2022 (Status Tindak Lanjut *Area of Improvement* ("AoI") GCG PI Grup hingga Triwulan IV/2022 pada Lampiran 1). 4. Pendistribusian dan penerimaa Kuesioner kepada seluruh Entitas tgl 23-12-2022 hingga 17-01-2023. 5. GCG *Assessment* dilaksanakan dalam 3 *batch*, yaitu: • *Batch*-1 dimulai tanggal 23 Desember 2022-31 Januari 2023 untuk PKT, PKG, dan PIM. • *Batch*-2 dimulai tanggal 23 Januari 2023-3 Maret 2023 untuk PSP, PKC, REKIND, dan PIP. • *Batch*-3 dimulai tanggal 20 Februari 2023-31 Maret 2023 untuk PILOG, ME, PIU, dan PI.	1. Board of Commissioners Letter No. S-058/Kom/PIHC/IX/2022 dated September 21, 2022 stated: • The Board of Commissioners requested the Board of Directors to carry out the procurement process and appointment of consultant services by re-proposing the previous Independent Consultant (PT Sinergi Daya Prima) for the GCG Assessment of PI Group in 2022. • GCG Assessment of PI Group in 2022 was completed no later than March 31, 2023. 2. The procurement process and appointment of PT Sinergi Daya Prima as Independent GCG Assessment Consultant has been carried out through VP Procurement Services letter No. 24666/A/PL/F22/ET/2022 dated December 15, 2022. 3. Kick Off Meeting GCG Assessment PI Group Year 2022 on December 23, 2022 (Follow-up Status of Area of Improvement ("AoI") GCG PI Group s.d. Quarter IV/2022 in Appendix 1). 4. Distribution and receipt of Questionnaires to all Entities from 23-12-2022 to 17-01-2023. 5. GCG Assessment was carried out in 3 batches, namely: • Batch-1 started on December 23, 2022 to January 31, 2023 for PKT, PKG, and PIM. • Batch-2 started on January 23, 2023 to March 03, 2023 for PSP, PKC, REKIND, and PIP. • Batch-3 started on February 20, 2023 to March 31, 2023 for PILOG, ME, PIU, and PI.
		Melaksanakan Evaluasi atas Implementasi *Fraud Control System* (FCS) PI Grup Evaluating the Implementation of PI Group's Fraud Control System (FCS)	1. Pengembangan FCS tahun 2022 di PI Grup meliputi: • Evaluasi FCS di PI. • Bimbingan Teknis FCS di PKG, PKC, PKT, PIM, dan PSP. • Diagnostic Assessment di ME, PILOG, dan PIU. 2. Pengembangan FCS di REKIND dan PIP akan dilaksanakan pada tahun 2023. 3. Rapat Pra *Exit Meeting* Evaluasi FCS PI tanggal 6 Desember 2022. 4. Pengiriman dokumen tambahan sesuai hasil Pra *Exit Meeting* (21-12-2022) 5. Reviu dokumen tambahan oleh Tim BPKP dan Finalisasi laporan Evaluasi FCS oleh BPKP 6. Telah dilaksanakan *Exit Meeting* FCS yaitu: PIM (5 Oktober 2022), ME (7 Oktober 2022), PILOG (17 Oktober 2022), PIU (19 Oktober 2022), PKT (27 Oktober 2022), PSP (14 November 2022), PKG (14 November 2022), dan PKC (17 November 2022).	1. FCS development in 2022 at PI Group includes: - FCS Evaluation at PI. - FCS Technical Guidance at PKG, PKC, PKT, PIM, and PSP. - Diagnostic Assessment at ME, PILOG, and PIU. 2. FCS development in REKIND and PIP will be implemented in 2023. 3. FCS PI Evaluation Pre Exit Meeting on December 6, 2022. 4. Delivery of additional documents in accordance with the results of the Pre Exit Meeting (21-12-2022) 5. Review of additional documents by BPKP Team and Finalization of FCS Evaluation report by BPKP 6. FCS Exit Meeting has been conducted viz: PIM (October 05, 2022), ME (October 07, 2022), PILOG (October 17, 2022), PIU (October 19, 2022), PKT (October 27, 2022), PSP (November 14, 2022), PKG (November 14, 2022), and PKC (November 17, 2022).

No	Sasaran Strategis Strategic Objectives	Program Kegiatan Program Activities	Realisasi	Realization
		Melaksanakan Audit Sistem Manajemen Internal (ASMI) dan Surveillance SNI ISO 37001:2016 SMAP Carry out Internal Management System Audit (ASMI) and Surveillance SNI ISO 37001: 2016 SMAP	1. Audit Sistem Manajemen Internal (ASMI) telah dilaksanakan pada tanggal 11 s.d.19 Mei 2022. 2. Resertifikasi SNI ISO 37001:2016 di PI dan Sertifikasi SNI ISO 37001:2016 di 3 Anak Perusahaan (ME, PILOG, dan PIP) masih dalam proses pengadaan jasa konsultan sertifikasi dan akan dilaksanakan di awal tahun 2023.	1. Internal Management System Audit (ASMI) has been conducted on May 11 to 19, 2022. 2. SNI ISO 37001:2016 Recertification in PI and SNI ISO 37001:2016 Certification in 3 Subsidiaries (ME, PILOG, and PIP) are still in the process of procuring certification consultant services and will be implemented in early 2023
4	Compliance terhadap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan transformasi visi dan bisnis model Perusahaan serta pengembangan dan sinergi produk samping Compliance with applicable laws and regulations in the implementation of the transformation of the Company's vision and business model as well as the development and synergy of by-products.	Melaporkan pengembangan penanganan kasus hukum perusahaan dalam Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan Report the development of the company's legal case handling in the Quarterly and Annual Management Report	1. Anak Perusahaan telah melaporkan Laporan Risiko Hukum setiap bulannya, 2. Sampai dengan Triwulan IV/2022 terdapat 81 (delapan puluh satu) permasalahan hukum strategis (rincian pada Lampiran 2).	1. Subsidiaries have reported Legal Risk Reports on a monthly basis, 2. As of Q4/2022 there were 81 (eighty-one) strategic legal issues (details in Appendix 2).

Fungsi Tata Kelola & Kepatuhan

Governance & Compliance Function

Sejak tahun 2020, pelaksanaan fungsi Tata Kelola dan Kepatuhan di Perusahaan berada di bawah Departemen Tata Kelola & Kepatuhan yang dipimpin oleh seorang *Vice President* (VP) dan berada di bawah Kompartemen Tata Kelola Korporat serta berada di bawah koordinasi Direktur SDM & Tata Kelola, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/062/2020 tanggal 7 September 2020 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/080/2019 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/006/2019.

Berdasarkan kebutuhan dan perkembangan organisasi untuk mendukung pelaksanaan transformasi bisnis Perusahaan, maka pada awal tahun 2022 terdapat perubahan Nomenklatur menjadi Departemen Governansi Korporat yang dipimpin oleh seorang VP dan berada di bawah Kompartemen Sekretaris Perusahaan serta berada di bawah koordinasi Wakil Direktur Utama.

ORGANISASI DEPARTEMEN GOVERNANSI KORPORAT

Vice President (VP) Governansi Korporat dijabat oleh Agus Purnomo berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/010/2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang Penunjukan Pejabat di Lingkungan PTPI.

Since 2020, the implementation of the Governance and Compliance function in the Company is under the Governance & Compliance Department led by a Vice President (VP) and under the Corporate Governance Compartment and under the coordination of the HR & Governance Director, in accordance with the Board of Directors Decree No. SK/DIR/062/2020 dated September 7, 2020 concerning the Refinement of the Board of Directors Decree No. SK/DIR/080/2019 concerning the Refinement of the Board of Directors Decree No. SK/DIR/006/2019.

Based on the needs and development of the organization to support the implementation of the Company's business transformation, at the beginning of 2022 there was a change in Nomenclature to the Corporate Governance Department led by a VP and under the Corporate Secretary Compartment and under the coordination of the Deputy President Director.

CORPORATE GOVERNANCE DEPARTMENT ORGANIZATION

Vice President (VP) Corporate Governance is held by Agus Purnomo based on the Decree of the Board of Directors No. SK/DIR/010/2019 dated February 13, 2019 concerning the Appointment of Officials within PTPI.

Agus Purnomo
VP Governansi Korporat

Agus Purnomo
VP Corporate Governance

Warga Negara | Citizen	Indonesia	Indonesian
Usia | Age	46 tahun	46 years old
Tempat, Tanggal, Lahir Place, Date of Birth	Magelang, 12 Agustus 1976	Magelang, August 12, 1976
Domisili | Domicile	Depok, Jawa Barat	Depok, West Java
Dasar Pengangkatan | Basis for Appointment	Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/010/2019	Board of Directors Decree No. SK/DIR/010/2019
Pendidikan | Education	• Diploma 3 Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1997); • Diploma 4 Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2004); • Magister Akuntansi Forensik, Universitas Diponegoro (2012).	• Diploma 3 Accounting, State College of Accountancy (1997); • Diploma 4 Accounting, State College of Accountancy (2004); • Master of Forensic Accounting, Diponegoro University (2012).

Sertifikat | Certification	• Chartered Accountant (CA) No. 11.D37503, Ikatan Akuntan Indonesia (7 Januari 2014-sekarang); • Akuntan No. Reg. D-37.503/No.RNA 17581, Kementerian Keuangan RI, (22 April 2014-sekarang); • Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP) No.ERMAP-1120532, • Enterprise Risk Management Academy (ERMA) (10 Desember 2015-10 Desember 2021); • Qualified Internal Auditor (QIA) No.5175/QIA/2018, Dewan Sertifikasi Qualified Internal Auditor (DS QIA), (2 Oktober 2018-31 Desember 2021); • Certified Governance Professional (CGP) No.Reg. TKP.628.000684 2019, Lembaga Sertifikasi Profesi – Mitra Kalyana Sejahtera (LSP MKS) (22 Juli 2019-22 Juli 2022).	• Chartered Accountant (CA) No.11.D37503, Indonesian Institute of Accountants (January 7, 2014-present); • Accountant No.Reg. D-37.503/No.RNA 17581, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, (April 22, 2014-present); • Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP) No.ERMAP-1120532, • Enterprise Risk Management Academy (ERMA) (December 10, 2015-December 10, 2021); • Qualified Internal Auditor (QIA) No.5175/QIA/2018, Certification Board of Qualified Internal Auditor (DS QIA), (October 2, 2018-December 31, 2021); • Certified Governance Professional (CGP) No.Reg. TKP.628.000684 2019, Professional Certification Agency - Mitra Kalyana Sejahtera (LSP MKS) (July 22, 2019-July 22, 2022).
Pengalaman Kerja **Work Experience**	• Auditor, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (1 Januari 1998-30 Juni 2014); • Staf Audit Keuangan, PTPI (1 Juli 2014-31 Januari 2019).	• Auditor, Financial and Development Supervisory Agency (January 1, 1998-June 30, 2014); • Financial Audit Staff, PTPI (July 1, 2014-January 31, 2019).

JUMLAH KARYAWAN

Hingga akhir tahun 2022, jumlah karyawan yang tergabung dalam Departemen Governansi Korporat sebanyak 5 (lima) orang.

NUMBER OF EMPLOYEES

Until the end of 2022, the number of employees who are members of the Corporate Governance Department are 5 (five) people.

Fungsi	Jumlah Total	Function
VP Governansi Korporat	1	VP Corporate Governance
Staf Governansi Korporat	4	Corporate Governance Staff
Jumlah	**5**	**Total**

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Departemen Governansi Korporat memiliki tugas pokok meliputi:

1. Merumuskan kebijakan dan program kerja bidang Tata Kelola dan Kepatuhan Perusahaan;
2. Melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan bidang tata kelola dan kepatuhan, yaitu:
   a. Implementasi peraturan dan kebijakan yang terkait *Good Corporate Governance* (GCG) di PI Grup;
   b. Peningkatan kompetensi asesor GCG di PI Grup;
   c. Pengukuran implementasi GCG di PI Grup;
   d. Perbaikan atas *Area of Improvement* (AoI) hasil asesmen GCG untuk mendorong peningkatan pelaksanaan GCG;
   e. Pengendalian gratifikasi di PI Grup;
   f. Peningkatan Kepatuhan LHKPN di PI Grup;
   g. Pengembangan *Whistleblowing System* (WBS) di PI Grup;
   h. Pengendalian *fraud* di PI Grup;
   i. Sosialisasi bidang tata kelola dan kepatuhan di Perusahaan guna meningkatkan pemahaman insan perusahaan.
3. Mengevaluasi kebijakan, program kerja, dan kegiatan bidang tata kelola dan kepatuhan di PI Grup.

MAIN DUTIES AND FUNCTIONS

The Governance and Compliance Department has the following main duties:

1. Formulate policies and work programs in the field of Corporate Governance and Compliance;
2. Implement and coordinate activities in the field of governance and compliance, namely:
   a. Implementation of regulations and policies related to Good Corporate Governance (GCG) at PI Group;
   b. Improved competency of GCG assessors in PI Group;
   c. Measurement of GCG implementation at PI Group;
   d. Improvement of the Area of Improvement (AoI) of the GCG assessment results to encourage the improvement of GCG implementation;
   e. Gratification Control at PI Group;
   f. Improved LHKPN Compliance at PI Group;
   g. Development of Whistleblowing System (WBS) in PI Group;
   h. Fraud control at PI Group;
   i. Socialization of governance and compliance in the Company to improve the understanding of company personnel.
3. Evaluate policies, work programs, and activities in the field of governance and compliance at PI Group.

PELAKSANAAN TUGAS TAHUN 2022

Realisasi kegiatan pada tahun 2022 diuraikan dalam tabel di bawah ini.

TASK IMPLEMENTATION IN 2022

The realization of activities in 2022 is outlined in the table below.

No.	Program	Realisasi Kegiatan	Activity Realization
1	Menyusun kebijakan *Governance-Risk Management Compliance* (GRC) 4.0 yang terintegrasi Develop an integrated Governance-Risk Management Compliance (GRC) 4.0 policy	Kebijakan *Governance-Risk Management Compliance* (GRC) 4.0 yang terintegrasi mencapai tahapan identifikasi literasi.	The integrated Governance-Risk Management Compliance (GRC) 4.0 policy reached the literacy identification stage.
2	Mengembangkan dan melakukan *review* pedoman dan prosedur penerapan Manajemen Kepatuhan Develop and review guidelines and procedures for the implementation of Compliance Management	Pemutakhiran Pedoman dan Prosedur: • Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat No. Dok. PI-SEK-PD-010 Rev. 2 tanggal 8 Juni 2022 • Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) No. Dok. PI-SEK-PD-011 Rev. 2 Tanggal 29 Maret 2022 • Prosedur Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) No. Dok. PI-SEK-PR-013 rev. 2 Tanggal 26 September 2022 Penyusunan Prosedur: • Prosedur Pemberian Penghargaan atas Pelaporan Pelanggaran Melalui WBS No. Dok. PI-SEK-PR-020 Rev. 0 tanggal 26 September 2022	Updating of Guidelines and Procedures: • Guidelines for Reporting Official Assets No. Doc. PI-SEK-PD-010 Rev. 2 dated June 8, 2022 • Whistle Blowing System Guidelines No. Doc. PI-SEK-PD-011 rev. 2 dated March 29, 2022 • Whistleblowing System Management Procedure No. Doc. PI-SEK-PR-013 rev. 2 Dated September 26, 2022 Preparation of Procedures: • Procedure for Awarding the Reporting of Violations through WBS No. Doc. PI-SEK-PR-020 rev. 0 dated September 26, 2022

No.	Program	Realisasi Kegiatan	Activity Realization
3.	Meningkatkan SDM Manajemen Kepatuhan Pupuk Indonesia Group yang berkompeten melalui pelaksanaan *training* dan sertifikasi Improving Pupuk Indonesia Group's competent Compliance Management human resources through the implementation of training and certification.	• Internalisasi Pelaporan LHKPN tahun 2021 Pupuk Indonesia Grup tanggal 21 Januari 2022 dengan Narasumber KPK RI Tema "Transparansi dan Akurasi Pelaporan LHKPN sebagai Upaya Pencegahan Korupsi"; • Webinar Proses Pembentukan dan Klasifikasi Perusahaan *Holding* pada tanggal 15 Februari 2022; • Pelatihan "Peluit Integritas Pembelajaran Interaktif untuk Pengelolaan *Whistleblowing System* Pengaduan Korupsi Tahun 2022, bersama KPK RI pada tanggal 4-8 April 2022; • Gratifikasi *Talk* (G-Talk) "Manajemen Risiko dan Identifikasi Titik Rawan Praktik Gratifikasi" pada tanggal 22 Juni 2022; • Resertifikasi ERMCP pada tanggal 19- 21 Juli 2022; • Bimbingan Teknis Dunia Usaha Berintegritas Kolaborasi PI dan KPK pada tanggal 2 Agustus 2022; • Webinar Tata Kelola Korporat di Indonesia: Teori, Prinsip, dan Praktik pada tanggal 9 Agustus 2022; • Webinar Digital Forensik terkait dengan Aktivitas *Fraud* pada tanggal 31 Agustus 2022; • Gratifikasi *Talk* (G-Talk) "Peran Media Sosial dalam Pencegahan Praktik Gratifikasi melalui Penguatan Partisipasi Publik" pada tanggal 22 September 2022; • *Workshop Corporate Governance Leadership Program and ASEAN CG Scorecard* pada tanggal 27-30 September 2022; • *Workshop Doktrin Fiduciary Duty* pada tanggal 29-30 September 2022; • Pelatihan Memahami dan Menerapkan ISO 37002 *Whistleblowing Management System* PI Grup pada tanggal 10-11 Oktober 2022; • *Workshop* Masyarakat Pembelajar Antikorupsi PI Group dan *Stakeholder* pada tanggal 15 Oktober 2022; • Pelatihan dan Sertifikasi *International* GRC *Professional* (GRCP) PI Group pada tanggal 17-19 Oktober 2022; • Internalisasi Pelaporan LHKPN Tahun 2022 PI Group "Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan LHKPN sebagai Upaya Pencegahan Korupsi" pada tanggal 28-30 Oktober 2022; • *Workshop Effective Fraud Mitigation* pada tanggal 28-29 November 2022; • GRC *Masterclass*: Peran Strategis CFO dan CRO sebagai Organ Pengelola Risiko pada tanggal 1 Desember 2022.	• Internalization of LHKPN Reporting in 2021 Pupuk Indonesia Group on January 21, 2022 with KPK RI as the resource person with the theme "Transparency and Accuracy of LHKPN Reporting as an Effort to Prevent Corruption"; • Webinar on the Process of Establishment and Classification of Holding Companies on February 15, 2022; • Training on "Integrity Whistle Interactive Learning for Whistleblowing System Management of Corruption Complaints in 2022, with KPK RI on April 4-8, 2022; • Gratification Talk (G-Talk) "Risk Management and Identification of Vulnerable Points of Gratification Practices" on June 22, 2022; • ERMCP Recertification on July 19-21, 2022; • Technical Guidance on Business World with Integrity in collaboration with PI and KPK on August 2, 2022; • Webinar on Corporate Governance in Indonesia: Theory, Principles, and Practices on August 9, 2022; • Digital Forensics Webinar related to Fraud Activities on August 31, 2022; • Gratuity Talk (G-Talk) "The Role of Social Media in Preventing Gratuity Practices through Strengthening Public Participation" on September 22, 2022; • Workshop on Corporate Governance Leadership Program and ASEAN CG Scorecard on September 27-30, 2022; • Workshop on Fiduciary Duty Doctrine on September 29-30, 2022; • PI Group Understanding and Implementation of ISO 37002 Whistleblowing Management System Workshop on October 10-11, 2022; • PI Group and Stakeholder Anti-Corruption Learning Community Workshop on October 15, 2022; • PI Group International GRC Professional (GRCP) Training and Certification on October 17-19, 2022; • Internalization of PI Group's 2022 LHKPN Reporting "Transparency and Accountability of LHKPN Reporting as an Effort to Prevent Corruption" on 28-30 October 2022; • Effective Fraud Mitigation Workshop on 28-29 November 2022; • GRC Masterclass: Strategic Role of CFO and CRO as Risk Management Organs on December 1, 2022.
4	Melakukan sosialisasi/*workshop* penerapan Manajemen Kepatuhan secara intensif Conduct intensive socialization/ workshops on the implementation of Compliance Management	• Pengendalian Gratifikasi; • Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran; • Pengelolaan Risiko *Fraud*; • Pameran HAKORDIA 2022; • Pengelolaan LHKPN.	• Gratification Control; • Management of Whistleblowing System; • Fraud Risk Management; • HAKORDIA 2022 Exhibition; • LHKPN Management.

No.	Program	Realisasi Kegiatan	Activity Realization
5	Melakukan klinik penerapan Manajemen Kepatuhan kepada unit kerja setiap triwulan Conducting Compliance Management implementation clinics to work units on a quarterly basis	• Klinikal tindak lanjut AoI GCG *Assessment* tahun 2021 telah dilakukan setiap triwulanan untuk Induk dan Anak Perusahaan; • Klinikal pelaporan kekayaan pejabat tahun Pelaporan 2021 telah dilakukan selama periode pelaporan LHKPN yaitu pada tanggal 1 Januari-31 Maret 2022; • Klinikal pengelolaan *fraud risk register* telah dilakukan setiap triwulanan bersama dengan seluruh PIC Unit Kerja	• Clinical follow-up of the 2021 AoI GCG Assessment has been carried out quarterly for the Parent and Subsidiaries; • Clinical reporting of official wealth for the 2021 Reporting year has been carried out during the LHKPN reporting period, namely on January 1-31 March 2022; • Clinical management of the fraud risk register has been carried out quarterly together with all Work Unit PICs.
6	Membangun aplikasi Sistem Manajemen Kepatuhan *e-Integrity Pact* dan WBS terintegrasi Build integrated e-Integrity Pact and WBS Compliance Management System application	Pengembangan Sistem *Whistleblowing Online multi company* telah selesai dilakukan dan proses penyiapan *Go Life* Sistem dan Integrasi dengan Sistem KPK RI.	Development of multi-company Online Whistleblowing System has been completed and the process of preparing Go Life System and Integration with KPK RI System.
7	Memutakhirkan aplikasi Sistem Manajemen Kepatuhan Updating the Compliance Management System application	Pemutakhiran Sistem Pakta Integritas *Online multi company* dalam proses pengembangan dengan tingkat penyelesaian 60%.	Updating the multi-company Online Integrity Pact System is in the development process with a 60% completion rate.
8	Mengembangkan Sistem Manajemen Kepatuhan SNI ISO 37301:2021 Developing SNI ISO 37301:2021 Compliance Management System	Penyelesaian proses pengadaan konsultan pendamping dalam implementasi Sistem Manajemen Kepatuhan SNI ISO 37301:2021.	Completion of the procurement process for a companion consultant in the implementation of the SNI ISO 37301: 2021 Compliance Management System.
9	Menyusun *Fraud Risk That Matters* (FRTM) berdasarkan proses bisnis Perusahaan Developing Fraud Risk That Matters (FRTM) based on the Company's business processes	Penilaian *Fraud Risk Register* unit kerja pada awal tahun 2022 telah selesai dilakukan. Penyusunan *Fraud Risk That Matters* (FRTM) telah selesai dan terdapat 9 (sembilan) risiko *fraud* dengan tingkat *High*.	The assessment of the Fraud Risk Register of the work unit in early 2022 has been completed. The preparation of Fraud Risk That Matters (FRTM) has been completed and there are 9 (nine) fraud risks with a High level.
10	Mengelola pelaporan benturan kepentingan: tindak lanjut, *monitoring*, dan evaluasi laporan benturan kepentingan Pupuk Indonesia Grup setiap bulan dan semester Managing conflict of interest reporting: follow-up, monitoring, and evaluation of Pupuk Indonesia Group's conflict of interest reports on a monthly and semester basis.	Pengelolaan Pelaporan Benturan Kepentingan yang meliputi: tindak lanjut, *monitoring*, dan evaluasi laporan benturan kepentingan Pupuk Indonesia Group telah dilakukan setiap bulan dan semester. Adapun sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 terdapat 7 (tujuh) aduan benturan kepentingan di seluruh entitas di PI Grup dan ditetapkan tidak memenuhi syarat.	Management of Conflict of Interest Reporting which includes: follow-up, monitoring, and evaluation of Pupuk Indonesia Group's conflict of interest reports has been carried out every month and semester. As of December 31, 2022, there were 7 (seven) complaints of conflict of interest in all entities in the PI Group and were determined to be ineligible.

No.	Program	Realisasi Kegiatan	Activity Realization
11	Mengelola pelaporan gratifikasi Managing gratuity reporting	• Pengelolaan Laporan Gratifikasi telah dilakukan selama tahun 2022 yang meliputi: tindak lanjut, *monitoring*, dan evaluasi laporan gratifikasi Pupuk Indonesia Grup setiap bulan dan semester serta berkoordinasi dengan KPK. • Laporan Gratifikasi yang telah diterima dan ditindaklanjuti oleh UPG PI Grup sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) laporan, terdiri dari: penolakan Gratifikasi sebanyak 7 (tujuh) laporan (5%); penerimaan Gratifikasi sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) laporan (95%), serta tidak terdapat Laporan Pemberian dan Laporan Permintaan Gratifikasi. • PI Grup telah melakukan pengisian Rencana Kerja Unit Pengendalian Gratifikasi tahun 2022 dan melakukan pengisian data realisasi Semester II-2022 melalui aplikasi Gratifikasi *OnLine* (GOL) https://gol.kpk.go.id. Hasil *monitoring* dan evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) Semester II-2022 PI Grup mendapatkan nilai total 95,14 dan menempati peringkat ke-11 untuk kategori Perusahaan BUMN.	• Gratification Report Management has been carried out during 2022 which includes: follow-up, monitoring, and evaluation of Pupuk Indonesia Group gratification reports every month and semester and coordinating with the KPK. • Gratification reports that have been received and followed up by UPG PI Group are 138 (one hundred and thirty-eight) reports, consisting of: 7 (seven) reports of Gratification rejection (5%); 131 (one hundred and thirty-one) reports of Gratification acceptance (95%), and there are no Gratification Provision Reports and Gratification Request Reports. • PI Group has filled in the Gratification Control Unit Work Plan for 2022 and filled in the realization data for Semester II-2022 through the Gratification OnLine (GOL) application https://gol.kpk.go.id. The results of monitoring and evaluation of the Gratification Control Program (PPG) Semester II-2022 PI Group received a total score of 95.14 and ranked 11th in the category of SOE Companies.
12	Mengelola pelaporan pelanggaran (WBS) Managing whistleblowing (WBS)	• Pengelolaan WBS telah dilakukan selama tahun 2022 yang meliputi: Tindak Lanjut, Monitoring, dan Evaluasi laporan aduan pelanggaran melalui WBS untuk Pupuk Indonesia Group setiap bulan dan semester serta berkoordinasi dengan KPK. • Aduan dugaan pelanggaran yang masuk melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) di PI Group sebanyak 51 (lima puluh satu) aduan, terdiri dari: 10 (sepuluh) aduan (19%) proses klarifikasi, 35 (tiga puluh lima) aduan (69%) tidak memenuhi syarat, dan 6 (enam) aduan (12%) telah diberikan *punishment* • Hasil *Monitoring* dan Evaluasi WBS TPK Terintegrasi Tahun 2022 oleh KPK dengan progress tindak lanjut 20 renaksi (86,96%) *Closed* dengan akurasi waktu 82,61%, dan 3 renaksi (13,04%) *In Progress*. Pengembangan *Single Platform* WBS *Online* PI Group telah selesai dan akan dilakukan proses integrasi dengan sistem WBS KPK pada tahun 2023.	• WBS management has been carried out during 2022 which includes: Follow-up, Monitoring, and Evaluation of reports of complaints of violations through WBS for Pupuk Indonesia Group every month and semester and in coordination with the KPK. • There were 51 (fifty-one) complaints of alleged violations that entered through the Violation Reporting System (WBS) in PI Group, consisting of: 10 (ten) complaints (19%) clarification process, 35 (thirty-five) complaints (69%) are ineligible, and 6 (six) complaints (12%) have been given punishment. • Results of Monitoring and Evaluation of Integrated WBS TPK in 2022 by KPK with follow-up progress 20 renactions (86.96%) Closed with 82.61% time accuracy, and 3 renactions (13.04%) In Progress. The development of PI Group's Single Platform WBS Online has been completed and will be integrated with KPK's WBS system in 2023.
13	Mengelola pelaporan kekayaan pejabat dengan melakukan sosialisasi, klinikal, *monitoring*, dan evaluasi kelengkapan pelaporan dan perbaikan serta berkoordinasi dengan KPK Manage official wealth reporting by conducting socialization, clinical, monitoring, and evaluating the completeness of reporting and improvement and coordinating with the KPK.	• Pengelolaan pelaporan kekayaan pejabat dengan melakukan sosialisasi, klinikal, *monitoring*, dan evaluasi kelengkapan pelaporan dan perbaikan serta berkoordinasi dengan KPK telah dilakukan selama tahun 2022. • Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 seluruh Wajib Lapor LHKPN sebanyak 804 pejabat di PI Grup, telah menyampaikan LHKPN secara tepat waktu dan seluruhnya diumumkan secara lengkap oleh KPK.	• Management of official wealth reporting by conducting socialization, clinical, monitoring, and evaluating the completeness of reporting and improvement as well as coordinating with the KPK has been carried out during 2022. • As of December 31, 2022, all LHKPN Reporting Obligees, totaling 804 officials in the PI Group, have submitted LHKPN in a timely manner and all are announced in full by the KPK.

No.	Program	Realisasi Kegiatan	Activity Realization
14	Melakukan pengukuran tingkat pemahaman pejabat struktural terhadap kepatuhan Measuring the level of understanding of structural officials on compliance	Pelaksanaan pengukuran tingkat pemahaman pejabat struktural terhadap kepatuhan tahun 2022, dalam proses penyusunan metode pengukuran.	The implementation of measuring the level of understanding of structural officials on compliance in 2022 is in the process of developing measurement methods.
15	Menerapkan/implementasi peraturan *reward* and *punishment* dalam kepatuhan tahun 2022 Implementation of reward and punishment rules in compliance by 2022	Perusahaan telah menetapkan prosedur pemberian penghargaan atas pelaporan pelanggaran melalui WBS No. Dok. PI-SEK-PR-020 Rev. 0 tanggal 26 September 2022	The Company has established a procedure for granting awards for reporting violations through WBS No. Doc. PI-SEK-PR-020 Rev. 0 dated September 26, 2022
16	Menerapkan KPI Kepatuhan tahun 2022 Implementing Compliance KPIs by 2022	Penerapan KPI Kepatuhan untuk tahun 2022 meliputi aspek berikut: • Internalisasi Budaya Kepatuhan • Skor CGP • Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) • Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) • Pencapaian Program Kerja Departemen Tata Kelola & Kepatuhan • Skor Asesmen GCG PI Group	The implementation of Compliance KPIs for 2022 includes the following aspects: • Internalization of Compliance Culture • CGP Score • Implementation of Gratification Control Program (PPG) • Implementation of Gratification Control Program (PPG) • Achievement of Work Program of Governance & Compliance Department • PI Group GCG Assessment Score
17	Memantau tindak lanjut atas rekomendasi hasil GCG *Assessment* Pupuk Indonesia Grup setiap bulan Monitor the follow-up of recommendations on the results of the GCG Assessment of Pupuk Indonesia Group every month	Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi atas tindak lanjut AoI GCG Pupuk Indonesia Group telah disampaikan dalam laporan Kinerja Bulanan. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, progres tindak lanjut AoI meliputi: • Progres tindak lanjut dari 30 (tiga puluh) AoI GCG *Assessment* tahun 2021 di Perseroan yaitu: 25 (dua puluh lima) AoI (83%) *Closed* dan 5 (lima) AoI (17%) *in Progress*. • Progres tindak lanjut dari 707 (tujuh ratus tujuh) AoI GCG *Assessment* tahun 2021 di Anak Perusahaan yaitu: 533 (lima ratus tiga puluh tiga) AoI (75%) *Closed*, 169 (seratus enam puluh sembilan) AoI (24%) *In Progress*, dan 5 (lima) AoI (1%) *Open*	The implementation of Monitoring and Evaluation of the follow-up of AoI GCG Pupuk Indonesia Group has been submitted in the Monthly Performance report. As of December 31, 2022, the AoI follow-up progress includes: • The follow-up progress of 30 (thirty) AoI GCG Assessment in 2021 in the Company, namely: 25 (twenty-five) AoIs (83%) Closed and 5 (five) AoIs (17%) in Progress. • Follow-up progress of 707 (seven hundred seven) AoI GCG Assessment in 2021 in Subsidiaries, namely: 533 (five hundred thirty three) AoIs (75%) Closed, 169 (one hundred sixty nine) AoIs (24%) In Progress, and 5 (five) AoIs (1%) Open.
18	Memantau tindak lanjut atas rekomendasi hasil FCS Pupuk Indonesia Grup setiap bulan dengan melakukan pemetaan, *monitoring*, dan evaluasi atas tindak lanjut AoI FCS Pupuk Indonesia Grup yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Bulan Monitor the follow-up on the recommendations of Pupuk Indonesia Group's FCS results every month by mapping, monitoring, and evaluating the follow-up of Pupuk Indonesia Group's AoI FCS submitted in the Monthly Performance Report	• Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil FCS Pupuk Indonesia Grup telah dilakukan setiap bulan dengan melakukan pemetaan, *monitoring*, dan evaluasi atas tindak lanjut AoI FCS Pupuk Indonesia Grup, dan disampaikan dalam laporan kinerja bulanan. • Progres tindak lanjut atas 158 (seratur lima puluh delapan) AoI FCS dari 7 (tujuh) entitas (PI, PKG, PKC, PKT, PIM, PSP, dan REKIND) yaitu: 80 (delapan puluh) AoI (51%) *Closed* dan 78 (tujuh puluh delapan) AoI (49%) *In Progress.*	• The implementation of follow-up monitoring on the recommendations of the Pupuk Indonesia Group FCS results has been carried out every month by mapping, monitoring and evaluating the follow-up of the Pupuk Indonesia Group FCS AoI, and is submitted in the monthly performance report. • Progress of follow-up on 158 (fifty-eight) FCS AoIs from 7 (seven) entities (PI, PKG, PKC, PKT, PIM, PSP, and REKIND), namely: 80 (eighty) AoIs (51%) Closed and 78 (seventy-eight) AoIs (49%) In Progress.
19	Memantau tindak lanjut atas rekomendasi hasil Audit Internal dan *Surveillance* SMAP setiap triwulan Monitor follow-up on recommendations from Internal Audit and SMAP Surveillance every quarter	• Melakukan *review* dan *monitoring* tindak lanjut temuan audit internal semester II-2022 dan *surveillance* tahun 2021 untuk seluruh unit kerja. • Verifikasi NCCAR untuk Audit SMAP semester II-2022 dan penyampaian tindak lanjut *surveillance* tahun 2021 untuk seluruh unit kerja.	• Review and monitor the follow-up of internal audit findings for semester II-2022 and surveillance in 2021 for all work units. • NCCAR verification for SMAP Audit semester II-2022 and submission of surveillance follow-up in 2021 for all work units.

No.	Program	Realisasi Kegiatan	Activity Realization
20	Menyusun laporan efektivitas penerapan Manajemen Kepatuhan setiap semester Prepare a report on the effectiveness of Compliance Management implementation every semester	• Penyusunan laporan efektivitas penerapan Manajemen Kepatuhan Pupuk Indonesia Grup untuk semester I-2022 telah selesai dilakukan pada tanggal 23 September 2022 dan semester II-2022 dalam proses penyusunan berdasarkan kinerja sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. • Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Tata Kelola & Kepatuhan Tahun 2022 telah dilakukan pada tanggal 2-4 November 2022.	• The preparation of the report on the effectiveness of the implementation of Compliance Management of Pupuk Indonesia Group for the first semester of 2022 has been completed on September 2022 23, and the second semester of 2022 is in the process of preparation based on performance until December 31, 2022. • The implementation of the Working Group (Pokja) on Governance & Compliance for 2022 was carried out on November 2-4, 2022.
21	Menyelenggarakan GCG *Assessment* Pupuk Indonesia Grup Conducting GCG Assessment of Pupuk Indonesia Group	• Pelaksanaan pengadaan konsultan eksternal independen untuk *assessment* Pupuk Indonesia Grup tahun kinerja 2022. • Pelaksanaan *Kick Off Meeting Assessment* Pupuk Indonesia Grup tahun kinerja 2022, pada tanggal 23 Desember 2023.	• Implementation of the procurement of an independent external consultant for the assessment of Pupuk Indonesia Group for the performance year 2022. • Implementation of the Kick Off Meeting for the Assessment of Pupuk Indonesia Group for the performance year 2022, on 23 December 2023.
22	Melaksanakan evaluasi atas implementasi *Fraud Control System* (FCS) Pupuk Indonesia Grup Carry out an evaluation of the implementation of the Fraud Control System (FCS) Pupuk Indonesia Group	Pengembangan *Fraud Control System* Pupuk Indonesia Group pada tahun 2022, meliputi: • Evaluasi Implementasi FCS di PT Pupuk Indonesia (Persero). • Bimbingan Teknis Tindak Lanjut Hasil *Diagnostic Assessment* FCS di PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. • *Diagnostic Assessment* FCS di PT Mega Eltra, PT Pupuk Indonesia Logistik, PT Pupuk Indonesia Utilitas.	Development of Fraud Control System Pupuk Indonesia Group in 2022, including: • Evaluation of FCS Implementation at PT Pupuk Indonesia (Persero). • Technical Guidance on Follow-up of FCS Diagnostic Assessment Results at PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, and PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. • FCS Diagnostic Assessment at PT Mega Eltra, PT Pupuk Indonesia Logistik, PT Pupuk Indonesia Utilitas.

Komunikasi Korporat
Corporate Communication

Kompartemen Komunikasi Korporat dipimpin oleh *Senior Vice Manager President* (SVP) yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama serta bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Pengangkatan SVP Komunikasi Korporat berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris. SVP Komunikasi Korporat dijabat oleh Wijaya Laksana selaku pelaksana tugas.

ORGANISASI KOMUNIKASI KORPORAT

Dalam struktur organisasi PT Pupuk Indonesia (Persero), Komunikasi Korporat berada satu tingkat di bawah Direksi yang membawahi VP Komunikasi Internal dan VP Komunikasi Eksternal. Sesuai Keputusan Direksi No. 082/KU/E10/SK/2021 tentang Struktur Organisasi PT Pupuk Indonesia (Persero), jumlah karyawan yang tergabung dalam unit Komunikasi Korporat sebanyak 19 orang.

The Corporate Communications compartment is led by a Senior Vice Manager President (SVP) who is appointed and dismissed by the President Director and is directly responsible to the President Director. The appointment of SVP Corporate Communications is based on the Company's internal mechanism with the approval of the Board of Commissioners. Wijaya Laksana acting as SVP Corporate Communications.

CORPORATE COMMUNICATION ORGANIZATION

In the organizational structure of PT Pupuk Indonesia (Persero), Corporate Communication is one level below the Board of Directors who oversees the VP of Internal Communication and VP of External Communication. In accordance with the Decree of the Board of Directors No. 082/KU/E10/SK/2021 concerning the Organizational Structure of PT Pupuk Indonesia (Persero), the number of employees who are members of the Corporate Communication unit is 19 people.

Struktur Organisasi Komunikasi Korporat

Corporate Communications Organizational Structure

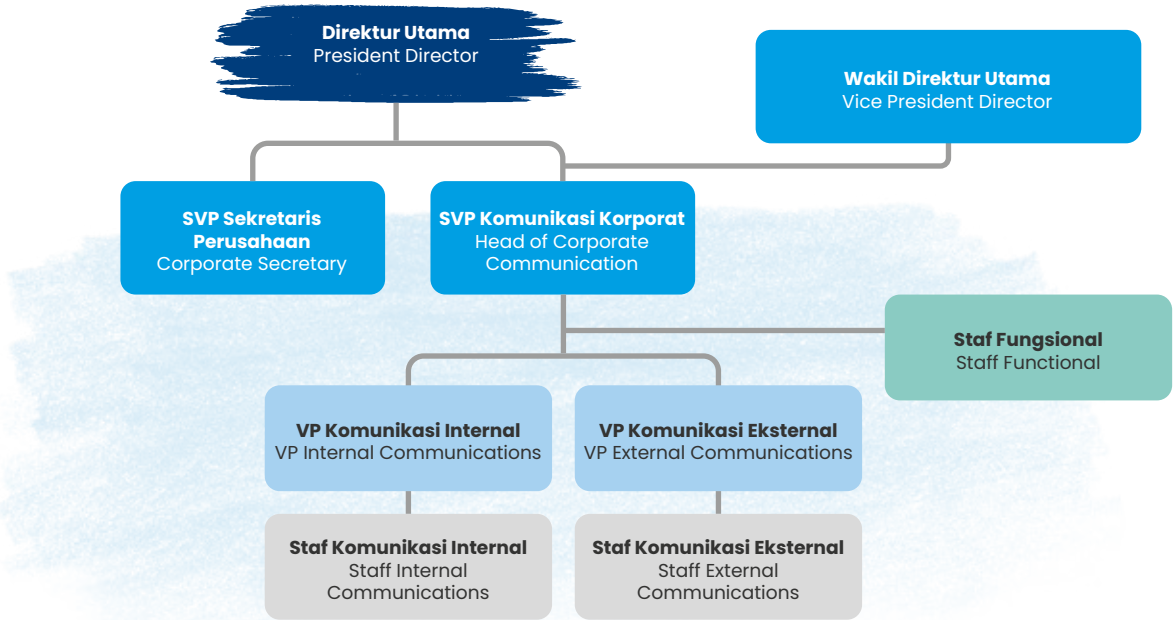

Fungsi	Jumlah Total	Function
SVP Komunikasi Korporat	1	SVP Corporate Communications
Komunikasi Internal	9	Internal Communication
Komunikasi Eksternal	7	External Communication
Fungsional	2	Functional
Jumlah	**19**	**Total**

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tujuan Jabatan (*Basic Purpose*)

Mengoordinasikan perencanaan dan pengendalian kegiatan utama di bidang komunikasi korporat, baik internal maupun eksternal Perusahaan. Selain itu, menyediakan informasi mengenai Perusahaan dan mengelola komunikasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) eksternal secara cepat dan *up to date* untuk meningkatkan reputasi Perusahaan sehingga mendukung visi, misi dan tujuan Perusahaan.

Tanggung Jawab Utama (*Principal Accountabilities*)

1. Mengoordinasikan rancangan dan kebijakan Rencana Jangka Panjang (RJP) yang merupakan rencana strategis PT Pupuk Indonesia (Persero) di Kompartemen Komunikasi Korporat agar sesuai dengan rencana strategis perusahaan.
2. Mengoordinasikan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan untuk Komunikasi Korporat sebagai acuan kegiatan dan sasaran kerja yang dapat dievaluasi dan dipertanggungjawabkan, untuk mendukung tercapainya target perusahaan yang ditetapkan pemegang saham.
3. Mengoordinir dan bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaan bagi unit di bawah unit kerja Komunikasi Korporat, yang meliputi kegiatan komunikasi Perusahaan meliputi internal dan eksternal di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero).
4. Mengkoordinasikan kebijakan dan kegiatan komunikasi korporat di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero), meliputi kegiatan kehumasan, hubungan media, promosi, pameran dan *sponsorship* dalam rangka menjaga reputasi Perusahaan yang positif.
5. Mengoordinasikan dan mengelola kegiatan hubungan dengan media massa dalam rangka menjalin hubungan baik dan mengelola isu-isu strategis Perusahaan dalam rangka menjaga reputasi perusahaan yang positif.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Basic Purpose

Coordinate the planning and control of key activities in the field of corporate communications, both internal and external to the Company. In addition, provide information about the Company and manage communication with external stakeholders in a fast and up to date manner to improve the Company's reputation so as to support the Company's vision, mission and objectives.

Principal Accountabilities

1. Coordinate the design and policy of the Long Term Plan (RJP) which is the strategic plan of PT Pupuk Indonesia (Persero) in the Corporate Communications Compartment to be in accordance with the company's strategic plan.
2. Coordinate the design of the annual Corporate Work Plan and Budget (RKAP) for Corporate Communications as a reference for activities and work targets that can be evaluated and accounted for, to support the achievement of company targets set by shareholders.
3. Coordinating and responsible for the tasks and work for units under the Corporate Communication work unit, which includes the Company's communication activities including internal and external within PT Pupuk Indonesia (Persero).
4. Coordinating corporate communication policies and activities within PT Pupuk Indonesia (Persero), including public relations activities, media relations, promotions, exhibitions and sponsorships in order to maintain a positive Company reputation.
5. Coordinate and manage media relations activities in order to establish good relations and manage the Company's strategic issues in order to maintain a positive corporate reputation.

6. Mengoordinasikan acara Perusahaan yang melibatkan Direksi dan *stakeholder* eksternal maupun internal.
7. Mengoordinasikan dan merencanakan pengelolaan media publikasi Perusahaan, baik internal maupun eksternal, antara lain *website* Perusahaan, portal publik, media sosial, media internal serta artefak promosi perusahaan lainnya.
8. Mengoordinasikan dan mengelola program promosi dan publikasi Perusahaan yang terkait dengan korporasi, meliputi iklan, kerja sama media, pameran, *sponsorship*, dalam rangka mempromosikan *brand* korporasi guna membentuk citra positif Perusahaan.
9. Mengoordinasikan kegiatan protokoler Direksi dalam kegiatan Perusahaan dengan *stakeholder* eksternal maupun internal, sehingga tercipta citra perusahaan yang baik.
10. Mengoordinasikan dan merencanakan kegiatan internal karyawan dalam rangka mengkomunikasikan kebijakan perusahaan dan meningkatkan korsa kebersamaan karyawan Pupuk Indonesia Grup.
11. Mengelola pendokumentasian kegiatan Perusahaan, baik dalam bentuk visual, audio, audio visual, baik analog maupun digital.
12. Mengoordinasikan dan merencanakan pengelolaan hubungan dengan *stakeholder*, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan mendukung pencapaian visi misi Perusahaan. Bertanggung jawab atas pengelolaan aktiva tetap, inventaris dan peralatan kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya sehingga tetap terjaga dengan baik.
13. Bertanggung jawab terhadap pembinaan dan peningkatan kompetensi dan kemampuan serta sikap kerja karyawan di Unit Kerjanya berdasarkan Peraturan Perusahaan dan *Job Description* agar diperoleh SDM berkualitas.
14. Turut serta secara aktif dalam pelaksanaan sistem manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Sistem Manajemen Risiko, Kepatuhan Anti Penyuapan, *Good Corporate Governance* (GCG), *Total Quality Management* (TQM), dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di area unit kerjanya untuk mencapai standar K3 dan standar mutu dalam rangka melakukan perbaikan berkelanjutan.

PELAKSANAAN TUGAS TAHUN 2022

Realisasi kegiatan pada tahun 2022 diuraikan dalam tabel di bawah ini.

6. Coordinate Company events involving the Board of Directors and external and internal stakeholders.
7. Coordinate and plan the management of the Company's publication media, both internal and external, including the Company's website, public portals, social media, internal media and other company promotional artifacts.
8. Coordinate and manage the Company's promotion and publication programs related to the corporation, including advertising, media cooperation, exhibitions, sponsorship, in order to promote the corporate brand to form a positive image of the Company.
9. Coordinate the protocol activities of the Board of Directors in the Company's activities with external and internal stakeholders, so as to create a good corporate image.
10. Coordinate and plan internal employee activities in order to communicate company policies and increase the cohesion of Pupuk Indonesia Group employees.
11. Manage the documentation of the Company's activities, both in the form of visual, audio, audio visual, both analog and digital.
12. Coordinate and plan the management of relationships with stakeholders, so as to create harmonious relationships and support the achievement of the Company's vision and mission. Responsible for the management of fixed assets, inventory and work equipment under his responsibility so that it is maintained properly.
13. Responsible for fostering and improving the competence, ability and work attitude of employees in the Work Unit based on Company Regulations and Job Description in order to obtain quality human resources.
14. Actively participate in the implementation of the Occupational Health and Safety (OHS) management system, Risk Management System, Anti-Bribery Compliance, GCG (Good Corporate Governance), TQM (Total Quality Management), and CSR (Corporate Social Responsibility) in the area of their work unit to achieve OHS standards and quality standards in order to make continuous improvements.

TASK IMPLEMENTATION YEAR 2022

The realization of activities in 2022 is outlined in the table below.

No	Sasaran Strategis Strategic Objectives	Program Kegiatan Activity Program	Realisasi Realization
1	Menjaga dan meningkatkan reputasi Perusahaan melalui pemberitaan dan tonal positif Perusahaan baik di media massa (cetak, elektronik, dan *online*) maupun media sosial Maintain and improve the Company's reputation through positive news and tonal of the Company both in mass media (print, electronic and online) and social media.	Peningkatan Kinerja Media Relation dan Media Sosial: - Melakukan *expose corporate action* perusahaan - Melakukan kegiatan agenda *setting* dengan perkembangan isu Improving Media Relations and Social Media Performance: - Exposing the company's corporate actions - Conduct agenda setting activities with issue development	– Menerbitkan 162 rilis dengan jumlah pemberitaan positif sebanyak 10.358 pemberitaan atau lebih dari 200% dari target RKAP Issued 162 releases with a total of 10,358 positive news reports or more than 200% of the RKAP target.
		- Melakukan Kegiatan *Media Engagement* secara rutin untuk meningkatkan pengetahuan media tentang perusahaan Conduct regular media engagement activities to increase media knowledge about the company	- Melakukan Kegiatan *Media Engagement* sebanyak 42 kali Conducted 42 media engagement activities
		- Melakukan kerja sama pemberitaan dengan media-media *top tier* Conduct news cooperation with top tier media outlets	- Kerja sama publikasi | Publication cooperation: 1. Antaranews.com Periode: Jan-Jun 2022 Jumlah: 90 berita 2. Republika Periode: Jan-Mar 2022 Jumlah: 90 berita 3. Kumparan.com Periode: Mar-Apr 2022 Jumlah: 18 berita 4. Detik.com Periode: Mar-Apr 2022 Jumlah: 20 berita 5. IDNTimes Periode: April 2022 Jumlah: 14 berita 6. GATRA Periode: Juni 2022 Jumlah: 4 berita 7. Republika.co.id Periode: Jun-Juli 2022 Jumlah: 24 berita 8. Republika.co.id Periode: Sep-Okt 2022 Jumlah Berita: 24 berita 9. Tribunnews.com Periode: Sept-Okt 2022 Jumlah: 10 berita 10. JPNN.com Periode: Okt-Nov 2022 Jumlah: 20 berita 11. Republika Periode: September Jumlah: 1 berita (Rubrik Bincang Bisnis) 12. CNBC Indonesia Periode: Sept–Nov 2022 Jumlah: 2 *talkshow* & 8 *feature*

No	Sasaran Strategis Strategic Objectives	Program Kegiatan Activity Program	Realisasi Realization
			- Publication cooperation: 1. Antaranews.com Period: Jan-Jun 2022 Total: 90 news 2. Republika Period: Jan-Mar 2022 Total: 90 news 3. Kumparan.com Period: Mar-Apr 2022 Total: 18 news 4. Detik.com Period: Mar-Apr 2022 Total: 20 news 5. IDNTimes Period: April 2022 Total: 14 news 6. GATRA Period: June 2022 Number: 4 news 7. Republika.co.id Period: June-July 2022 Total: 24 news 8. Republika.co.id Period: Sep-Oct 2022 Total News: 24 news 9. Tribunnews.com Period: Sept-Oct 2022 Number: 10 news 10. JPNN.com Period: Oct-Nov 2022 Total: 20 news 11. Republika Period: September Total: 1 news (Business Talk Rubric) 12. CNBC Indonesia Period: Sept-Nov 2022 Quantity: 2 talk shows & 8 features
		- Pemanfaatan karyawan sebagai sosial *media ranger* Perusahaan - Melakukan kolaborasi konten dengan KOL serta kolaborasi konten media sosial secara berkala sesuai perkembangan isu - Utilization of employees as the Company's social media ranger - Conduct content collaboration with KOL and social media content collaboration periodically according to the development of issues	- keaktifan Sosmed Rangers dalam mempublikasikan berita BUMN - Sosial media Pupuk Indonesia terus berkembang dengan penambahan *followers* dan *engagement* di seluruh platform sosial media. 2022 mendapatkan pertambahan *followers* 33.057 - *Campaign* dan kolaborasi KOL - Social Media Rangers' activeness in publicizing SOE news - Pupuk Indonesia's social media continues to grow with the addition of followers and engagement across all social media platforms. 2022 gained an additional 33,057 followers - Campaign and KOL collaboration

No	Sasaran Strategis Strategic Objectives	Program Kegiatan Activity Program	Realisasi Realization
		- Penyusun kanal komunikasi digital untuk pemberitaan PT PI Grup - Menyelenggarakan program internal PT PI Grup untuk *employee branding* - Compilation of digital communication channels for PT PI Group's news coverage - Organizing internal programs PT PI Group for employee branding	- Pemberitaan Pupuk Indonesia Group di portal dan subportal *website* www.pupuk-indonesia.com sebanyak 104 pemberitaan PTPI dan 194 pemberitaan Anak Perusahaan - Penyebaran sejumlah 72 Informasi melalui Whatsapp *Blasting* - Menyelenggarakan 91 program internal - Pupuk Indonesia Group's news on the portal and subportal website www.pupuk-indonesia.com as much as 104 PTPI news and 194 news of Subsidiaries - Dissemination of 72 Information through Whatsapp Blasting - Organized 91 internal programs
2	Meningkatkan hubungan baik dengan *stakeholder* Perusahaan Improve good relations with the Company's stakeholders	Melakukan koordinasi rutin dengan *stakeholder* dalam rangka membina hubungan baik dan mengetahui harapan *stakeholder* Conduct regular coordination with stakeholders in order to foster good relations and know stakeholder expectations.	- Melakukan koordinasi dengan *Stakeholder* (Kementerian dan Lembaga) sebanyak 100 koordinasi; - Pengiriman Poster atau Bunga Ucapan Selamat maupun Duka Cita untuk *Stakeholder* (Kementerian/Lembaga) sebanyak 188 kegiatan. - Coordinated with Stakeholders (Ministries and Institutions) as many as 100 coordinations; - Delivery of Congratulatory and Condolence Posters or Flowers for Stakeholders (Ministries/Institutions) as many as 188 activities.
3	Meningkatkan aktivitas *Corporate Branding* untuk meningkatkan *awareness* masyarakat dan *stakeholder* Increase Corporate Branding activities to increase public and stakeholder awareness.	Melakukan kegiatan promosi bersama, baik dalam bentuk *above the line* maupun *below the line* Conduct joint promotional activities, both in the form of above the line and below the line	Menjalankan sebanyak 221 sponsor dengan total biaya sebesar Rp25.419.779.100 Running 221 sponsorships with a total cost of Rp25,419,779,100

Audit Internal/Satuan Pengawasan Intern

Internal Audit/Internal Control Unit

Audit Internal merupakan organ pendukung Direksi dalam tata kelola Perusahaan berperan penting dalam sistem pengendalian internal Perusahaan. Secara garis besar, keberadaan Audit Internal bertujuan membantu manajemen merealisasikan objektif/sasarannya melalui pemeriksaan kecukupan dan pelaksanaan proses pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan.

Internal Audit is a supporting organ of the Board of Directors in corporate governance and plays an important role in the Company's internal control system. Broadly speaking, the existence of Internal Audit aims to help management realize its objectives/goals through examining the adequacy and implementation of internal control processes, risk management and corporate governance.

Fungsi Audit Internal di lingkup Perusahaan dijalankan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang membantu Direksi dalam melaksanakan audit internal Perusahaan guna menilai efektivitas sistem pengendalian internal, pengelolaan risiko dan proses tata kelola Perusahaan serta memberikan saran perbaikan. SPI merupakan unit kerja Perusahaan yang melaksanakan kegiatan assurance dan konsultansi (*consultative management*). SPI PT Pupuk Indonesia (Persero) dipimpin oleh SVP Satuan Pengawasan Intern.

The Internal Audit function within the Company is carried out by the Internal Audit Unit (SPI) which assists the Board of Directors in carrying out internal audits of the Company to assess the effectiveness of the internal control system, risk management and corporate governance processes and provide suggestions for improvement. SPI is a work unit of the Company that carries out assurance and consulting activities (consultative management). SPI PT Pupuk Indonesia (Persero) is led by the SVP of Internal Audit Unit.

Dalam proses pelaksanaan pengawasan, SPI memerankan sebuah aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultansi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi Perusahaan.

In the process of conducting supervision, SPI performs an independent, objective assurance and consultancy activity designed to add value and improve the Company's operations.

Pelaksanaan proses pengawasan dan audit harus mampu membantu Perusahaan mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko, kecukupan pengendalian dan pengelolaan Perusahaan yang baik.

The implementation of the supervision and audit process must be able to help the Company achieve its objectives by applying a systematic and disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management processes, the adequacy of controls and good corporate governance.

Keberadaan SPI menjadi wujud kepatuhan Perusahaan yang mengacu pada Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero), Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN, serta Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

The existence of SPI is a form of the Company's compliance with Law No. 19 of 2003 concerning SOEs, Government Regulation No. 12 of 1998 concerning Company Companies (Persero), Decree of the Minister of SOEs No. KEP-117/M-MBU/2002 concerning the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Practices in SOEs, as well as OJK Regulation No. 56/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for Preparing an Internal Audit Unit Charter.

KEBIJAKAN AUDIT INTERNAL PI GROUP

Untuk mewujudkan sistem pengendalian intern yang kuat di lingkungan PI Grup, Direksi menetapkan kebijakan pengawasan intern sesuai SK Direksi No. SK/DIR/043/2015 tanggal 21 September 2015 dengan pokok-pokok sebagai berikut:

1. Pelaksanaan untuk mewujudkan sistem pengendalian intern yang kuat oleh SPI;
2. Penguatan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui:
   a. Pembangunan dan penguatan fungsi pengendalian intern yang berkelanjutan (*sustainable*);
   b. Pelaksanaan audit keuangan, audit operasional, dan audit khusus yang fokus pada kegiatan yang memiliki risiko tinggi (*risk based audit*);
   c. Pemberian konsultansi untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas operasi, tata kelola, dan manajemen risiko;
   d. Peningkatan kapabilitas dan kapasitas sumber daya SPI.
3. Program pengawasan intern dibuat oleh SVP SPI dan ditetapkan oleh Direktur Utama;
4. SPI PTPI dapat melakukan audit kepada Entitas Anak atas penerapan kebijakan yang telah diterbitkan oleh Perusahaan dan kegiatan-kegiatan yang bernilai strategis;
5. SPI PTPI berkoordinasi dengan SPI Entitas Anak dalam menetapkan program dan kegiatan pengawasan;
6. SVP SPI menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan intern setiap Triwulan kepada Direktur Utama;
7. SPI Entitas Anak menyusun kebijakan pengawasan intern di masing-masing perusahaan dengan mengacu kepada Kebijakan pengawasan intern PTPI.

PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERN

SVP Satuan Pengawasan Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan Persetujuan Dewan Komisaris sesuai Peraturan BUMN: PER-01/MBU/2011.

PROFIL SVP SATUAN PENGAWASAN INTERN

Kepala SPI dijabat oleh Yulius Sudaryoko berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/061/2020 tanggal 2 September 2020.

PI GROUP INTERNAL AUDIT POLICY

To realize a strong internal control system within PI Group, the Board of Directors established an internal control policy in accordance with the Decree of the Board of Directors No. SK/DIR/043/2015 dated September 21, 2015 with the following points:

1. Implementation to realize a strong internal control system by SPI;
2. Strengthening the internal control system is implemented through:
   a. Development and strengthening of a sustainable internal control function;
   b. Implementation of financial audits, operational audits, and special audits that focus on high risk activities (risk based audit);
   c. Provision of consultancy to improve and enhance the effectiveness of operations, governance, and risk management;
   d. Increased capability and capacity of SPI resources.
3. The internal control program is prepared by SVP SPI and determined by the President Director;
4. SPI PTPI can conduct audits to Subsidiaries on the implementation of policies that have been issued by the Company and activities of strategic value;
5. SPI PTPI coordinates with SPI Subsidiaries in establishing supervision programs and activities;
6. SVP SPI submits a report on the implementation of internal control every quarter to the President Director;
7. SPI Subsidiaries develop internal control policies in each company with reference to PTPI's internal control policy.

APPOINTING AND DISMISSING THE HEAD OF INTERNAL AUDIT UNIT

SVP Internal Audit is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners in accordance with BUMN Regulation: PER- 01/MBU/2011.

SVP INTERNAL AUDIT PROFILE

The Head of SPI is Yulius Sudaryoko based on the Board of Directors Decree No. SK/DIR/061/2020 dated September 2, 2020.

Yulius Sudaryoko
SVP Satuan Pengawasan Intern

Yulius Sudaryoko
SVP Internal Audit

Warga Negara | Citizen	Indonesia	Indonesian
Usia | Age	54 tahun	54 years old
Tempat, Tanggal, Lahir Place, Date of Birth	Makassar, 1 Juli 1968	Makassar, July 1, 1968
Domisili | Domicile	Jakarta Barat, DKI Jakarta	West Jakarta, DKI Jakarta
Dasar Pengangkatan | Basis for Appointment	Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/061/2020 tanggal 2 September 2020	Board of Directors Decree No. SK/DIR/061/2020 dated September 2, 2020
Periode Jabatan Position Period	Menjabat terhitung sejak 1 September 2020	Served since September 1, 2020
Pendidikan | Education	• Magister Manajemen dari Universitas Bina Nusantara (2019) • Sarjana Manajemen dari Universitas Terbuka (2001) • Diploma Akuntansi dari Politeknik Universitas Diponegoro (1991)	• Master of Management from Bina Nusantara University (2019) • Bachelor of Management from the Open University (2001) • Diploma in Accounting from Diponegoro University Polytechnic (1991)
Sertifikasi | Certification	• Qualified Internal Auditor (QIA) • Certified Internal Auditor Executive (CIAE)	• Qualified Internal Auditor (QIA) • Certified Internal Auditor Executive (CIAE)
Pengalaman Kerja Work Experience	• Staf Utama Direktorat Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) (2020) • Staf Utama Direktorat Utama PT Pupuk Kaltim (2016–2020) • Manajer Administrasi & Keuangan Proyek Pengembangan Infrastruktur PT Pupuk Kaltim (2016) • Manajer Keuangan Project Kaltim 5 PT Pupuk Kaltim (2014–2015) • Kepala Bagian Departemen Anggaran PT Pupuk Kaltim (2008–2012) • Auditor PT Pupuk Kaltim (1992-2008)	• Main Staff of the Main Directorate of PT Pupuk Indonesia (Persero) (2020) • Principal Staff of the President Directorate of PT Pupuk Kaltim (2016-2020) • Administration & Finance Manager of PT Pupuk Kaltim Infrastructure Development Project (2016) • Finance Manager of Project Kaltim 5 PT Pupuk Kaltim (2014 -2015) • Head of Budget Department of PT Pupuk Kaltim (2008-2012) • Auditor of PT Pupuk Kaltim (1992-2008)

KUALIFIKASI
1. Mampu menjelaskan standar audit internal sesuai dengan best practice dan standar yang berlaku antara lain tugas, wewenang, dan kode etik.
2. Mampu menjelaskan definisi, jenis penugasan *assurance* dan tujuan serta mekanisme kegiatan *assurance* yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan *monitoring* tindak lanjut.
3. Mampu menjelaskan konsep *Risk Based Audit* dan *Three Lines Model*.
4. Mampu menjelaskan konsep *Governance, Risk* dan *Control* (GRC) sesuai dengan standar yang berlaku.

QUALIFICATION
1. Able to explain internal audit standards in accordance with best practices and applicable standards, including duties, authority and code of ethics.
2. Able to explain the definition, types of assurance assignments and the objectives and mechanisms of assurance activities, namely planning, implementation, reporting and follow-up monitoring.
3. Able to explain the concept of Risk Based Audit and Three Lines Model.
4. Able to explain the concepts of Governance, Risk and Control (GRC) in accordance with applicable standards.

STRUKTUR ORGANISASI
Sesuai Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. 082/KU/E10/SK/2021 tentang Struktur Organisasi PTPI, dijelaskan bahwa

ORGANIZATION STRUCTURE
In accordance with the Decree of the Board of Directors of the Company No. 082/KU/E10/SK/2021 concerning PTPI's

Senior Vice President SPI secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan berkoordinasi dengan Direktur Keuangan & Investasi. Dalam pelaksanaan pekerjaannya, SVP SPI dibantu oleh 2 (dua) Orang Vice President (VP) yaitu VP Pengawasan Operasional & Keuangan dan VP Perencanaan Pengawasan beserta 7 (tujuh) orang Auditor, 1 (satu) Sekretaris dan 5 (lima) admin dengan struktur organisasi per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Organizational Structure, it is explained that the Senior Vice President SPI is structurally responsible directly to the President Director and coordinates with the Director of Finance & Investment. In carrying out its work, SVP SPI is assisted by 2 (two) Vice Presidents (VP), namely VP of Operational & Financial Supervision and VP of Supervisory Planning along with 7 (seven) Auditors, 1 (one) Secretary and 5 (five) admins with an organizational structure as of December 31, 2022 as follows:

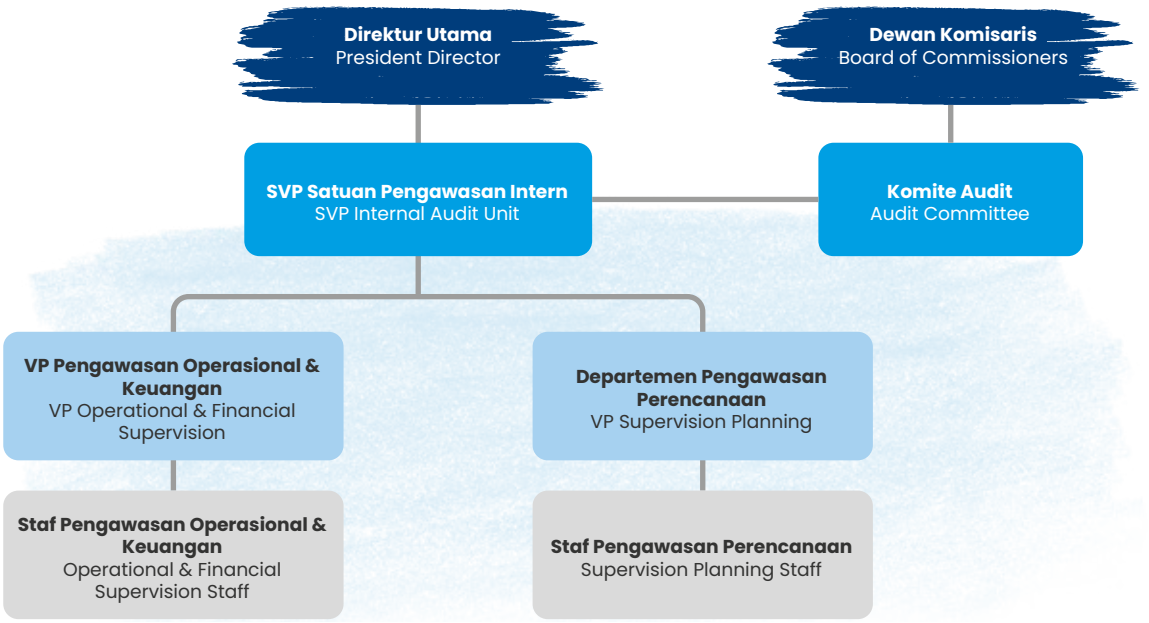

KEDUDUKAN SATUAN PENGAWASAN INTERN

Perusahaan mengembangkan Sistem Pengendalian Internal agar dapat berfungsi secara efektif dalam mengamankan investasi dan aset perusahaan serta menjaga pencapaian kinerja yang baik. Selain itu, pengendalian internal dibangun guna meningkatkan fungsi pengendalian yang terintegrasi (*integrated control system*), baik antara Perusahaan dan Entitas Anak guna memastikan bahwa kegiatan operasional telah dijalankan dengan baik dan dapat meningkatkan nilai tambah bagi Perusahaan melalui efektivitas pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

SPI Perusahaan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi, yang diperbarui dengan Surat Keputusan Direksi No. 082/KU/E10/SK/2021 tentang Struktur Organisasi PTPI. Keberadaan dan tugas SPI BUMN mengacu kepada Undang-Undang (UU) RI No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bab VI Bagian Pertama, Satuan Pengawasan Intern serta Peraturan Menteri (Permen) BUMN.

POSITION OF INTERNAL AUDIT UNIT

The Company develops an Internal Control System in order to function effectively in securing the Company's investments and assets and maintaining the achievement of good performance. In addition, internal control is built to improve the integrated control function, both between the Company and its Subsidiaries to ensure that operational activities have been carried out properly and can increase added value for the Company through the effective implementation of risk management and Good Corporate Governance principles.

The Company's SPI was formed based on the Decree of the Board of Directors, which was updated with the Decree of the Board of Directors No. 082/KU/E10/SK/2021 concerning PTPI's Organizational Structure. The existence and duties of SPI BUMN refer to Law (UU) of the Republic of Indonesia Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (BUMN) Chapter VI Part One, Internal Audit Unit and Ministerial Regulations (Permen) of BUMN.

Kedudukan Satuan Pengawasan Intern PTPI dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

1. Satuan Pengawasan Intern (SPI) dipimpin oleh Senior Vice President (SVP) yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
2. SVP SPI dalam organisasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
3. SVP SPI secara struktural bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan secara fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
4. Personil SPI bertanggung jawab secara langsung kepada SVP SPI.

Hubungan kerja SPI secara internal dan eksternal dijabarkan sebagai berikut:

1. Hubungan Internal
   a. SVP SPI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama;
   b. SVP SPI membawahi 2 (dua) Departemen Pengawasan, yaitu:
      i. Pengawasan Operasional & Keuangan;
      ii. Perencanaan Pengawasan.

   Tanggung jawab pelaksanaan masing-masing Departemen didelegasikan kepada Vice President (VP) terkait.

2. Hubungan Eksternal
   a. Hubungan dengan auditor eksternal;
   b. Hubungan dengan Komite Audit;
   c. Hubungan dengan pihak luar lainnya, antara lain dengan Satuan Pengawasan Intern Entitas Anak dalam bentuk koordinasi pelaksanaan audit bersama.

JUMLAH PEGAWAI SATUAN PENGAWASAN INTERN

Pada periode tahun 2022, personel SPI Perusahaan berjumlah 102 orang terdiri dari 9 (sembilan) orang di Perusahaan sebagai *holding* dan 93 orang di entitas anak, dengan rincian sebagai berikut:

The position of the Internal Audit Unit of PTPI and Subsidiaries is as follows:

1. The Internal Audit Unit (SPI) is led by a Senior Vice President (SVP) who is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.
2. SVP SPI in the organization is under and responsible to the President Director.
3. SVP SPI is structurally responsible to the President Director and functionally to the Board of Commissioners through the Audit Committee.
4. SPI personnel report directly to SVP SPI.

SPI's internal and external working relationships are described as follows:

1. Internal Relationship
   a. SVP SPI reports directly to the President Director;
   b. SVP SPI oversees 2 (two) Supervisory Departments, namely:
      i. Operational & Financial Monitoring;
      ii. Surveillance Planning.

   The implementation responsibility of each Department is delegated to the relevant Vice President (VP).

2. External Relations
   a. Relationship with external auditors;
   b. Relationship with the Audit Committee;
   c. Relationships with other external parties, among others with the Internal Audit Unit of Subsidiaries in the form of coordination of joint audit implementation.

NUMBER OF INTERNAL AUDIT UNIT EMPLOYEES

In the period of 2022, the Company's SPI personnel amounted to 102 people consisting of 9 (nine) people in the Company as the holding company and 93 people in subsidiaries, with details as follows:

No	Entitas Entity	Jumlah SDM Number of HR
Holding		
1	PT Pupuk Indonesia (Persero)	9
Entitas Anak | Subsidiary		
2	PT Petrokimia Gresik	14
3	PT Pupuk Kujang	14

No	Entitas Entity	Jumlah SDM Number of HR
4	PT Pupuk Kalimantan Timur	12
5	PT Pupuk Iskandar Muda	7
6	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	20
7	PT Rekayasa Industri	15
8	PT Pupuk Indonesia Niaga	4
9	PT Pupuk Indonesia Logistik	2
10	PT Pupuk Indonesia Utilitas	3
11	PT Pupuk Indonesia Pangan	2
	Jumlah SDM SPI PI Group	**102**

SERTIFIKASI PROFESI SATUAN PENGAWASAN INTERN

Untuk mendukung peran auditor agar lebih berkompeten dalam mengelola risiko yang ada di Perusahaan, maka Perusahaan memfasilitasi program pengembangan kompetensi bagi auditor yang diberikan secara sistematis dengan mengikutsertakan auditor internal dalam program sertifikasi. Adapun daftar sertifikasi kompetensi personil SPI di PI Group, sebagai berikut:

INTERNAL AUDIT PROFESSIONAL CERTIFICATION

To support the role of auditors to be more competent in managing risks in the Company, the Company facilitates competency development programs for auditors which are provided systematically by involving internal auditors in certification programs. The list of SPI personnel competency certifications in PI Group is as follows:

No	Sertifikasi Kompetensi Competency Certification	Jumlah Total
1	Qualified Internal Audit (QIA)	20
2	Professional Internal Auditor (PIA)	12
3	Chartered Accountant (CA)	8
4	Certified Fraud Examiner (CFE)	2
5	Certified Chief Governance Officer (CCGO)	2
6	Qualified Risk Management Professional (QRMP)	2
7	Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP)	2
8	Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP)	1
9	Certified Forensic Auditor (CFrA)	1
10	Certified Risk Management Professional (CRMP)	1

PEDOMAN KERJA: PIAGAM SATUAN PENGAWASAN INTERN

Pelaksanaan fungsi Audit Internal yang dijalankan oleh SPI, berpedoman pada standar pelaksanaan fungsi Audit Internal yang berlaku dan kode etik Audit Internal. Piagam SPI revisi terakhir disahkan pada tanggal 30 Desember 2021. Piagam tersebut disahkan oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama Perusahaan.

WORK GUIDELINES: INTERNAL AUDIT CHARTER

The implementation of the Internal Audit function carried out by SPI is guided by the applicable standards for the implementation of the Internal Audit function and the Internal Audit code of ethics. The last revision of SPI Charter was approved on December 30, 2021. The charter was authorized by the President Commissioner and President Director of the Company.

Piagam SPI memuat visi, misi, fungsi, struktur dan kedudukan Unit Satuan Pengawasan Intern, kualifikasi, ruang lingkup kerja operasional, wewenang, tugas dan tanggung jawab, standar profesional, persyaratan auditor internal, hubungan dengan auditor eksternal dan Komite Audit, kode etik, serta independensi dan objektivitas Auditor Intern, serta larangan perangkapan tugas oleh personil SPI. Piagam SPI menjadi dasar bagi auditor pada Satuan Pengawasan Intern Perusahaan dan menjadi acuan bagi Satuan Pengawasan Intern Anak Perusahaan. Diharapkan dengan dipatuhinya Piagam Audit Internal, maka akan mempermudah auditor dalam memahami mengenai tingkat pemeliharaan kepentingan dan komitmen dari semua pihak yang terkait dengan Perusahaan.

Selain Piagam SPI, auditor internal Perusahaan juga dilengkapi dengan seperangkat pedoman kerja, mekanisme kerja dan supervisi dalam organisasinya, antara lain diatur dalam:

KODE ETIK-PEDOMAN-PROSEDUR-KEBIJAKAN SPI

1. Kode Etik SPI PTPI;
2. Kebijakan Pengawasan Intern PTPI;
   a. Pedoman:
      i. Pedoman Umum Audit Internal;
      ii. Pedoman Audit Internal Berbasis Risiko;
      iii. Pedoman Audit Operasional;
      iv. Pedoman Sistem Pengendalian Intern;
      v. Pedoman Penyusunan Pelaporan Kegiatan SPI;
      vi. Pedoman Program Jaminan dan Peningkatan Kualitas (*Quality Assurance*) SPI;
      vii. Pedoman Pendampingan Audit Eksternal (*Counterpart*);
      viii. Pedoman Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi.
      ix. Pedoman Penunjukan Auditor Eksternal.

   b. Prosedur:
      i. Prosedur Audit Internal;
      ii. Prosedur Pemantauan Status Tindak Lanjut;
      iii. Prosedur Audit Khusus;
      iv. Prosedur Penyusunan PKPT;
      v. Prosedur Kearsipan SPI;
      vi. Prosedur Audit Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan;
      vii. Prosedur Evaluasi SPIP;
      viii. Prosedur Penilaian Mandiri (*Control Self-Assessment*);
      ix. Prosedur Pengadaan Bersama Jasa KAP.
   c. Buku Ketentuan Lanjutan
      i. Buku Ketentuan Lanjutan Audit Operasional;
      ii. Buku Ketentuan Audit Internal Berbasis Risiko;

The SPI Charter contains the vision, mission, function, structure and position of the Internal Audit Unit, qualifications, scope of operational work, authority, duties and responsibilities, professional standards, internal auditor requirements, relationships with external auditors and the Audit Committee, code of ethics, as well as the independence and objectivity of the Internal Auditor, and the prohibition of concurrent duties by SPI personnel. The SPI Charter is the basis for auditors in the Company's Internal Audit Unit and a reference for the Subsidiary Internal Audit Unit. It is expected that by complying with the Internal Audit Charter, it will make it easier for auditors to understand the level of maintenance of interests and commitments from all parties related to the Company.

In addition to the SPI Charter, the Company's internal auditors are also equipped with a set of work guidelines, work mechanisms and supervision within the organization, among others regulated in:

SPI CODE OF ETHICS-PROCEDURES-POLICIES

1. SPI PTPI Code of Ethics;
2. PTPI Internal Audit Policy;
   a. Guidelines:
      i. General Guidelines for Internal Audit;
      ii. Risk-based Internal Audit Guidelines;
      iii. Operational Audit Guidelines;
      iv. Internal Control System Guidelines;
      v. Guidelines for Preparing SPI Activity Reporting;
      vi. Guidelines for SPI's Quality Assurance Program;
      vii. Guidelines for External Audit Assistance (Counterpart);
      viii. Information Technology Governance Evaluation Guidelines.
      ix. Guidelines for the Appointment of External Auditors.
   b. Procedure:
      i. Internal Audit Procedures;
      ii. Follow-up Status Monitoring Procedure;
      iii. Special Audit Procedures;
      iv. PKPT Preparation Procedure;
      v. SPI Archives Procedure;
      vi. Internal Control Audit Procedures over Financial Statements;
      vii. SPIP Evaluation Procedure;
      viii. Control Self-Assessment Procedure;
      ix. Procedure for Joint Procurement of KAP Services.
   c. Advanced Terms Book
      i. Operational Audit Advanced Provision Book;
      ii. Risk-Based Internal Audit Rulebook;

iii. Buku Ketentuan Lanjutan Pendampingan Audit Eksternal (*Counterpart*);
iv. Buku Ketentuan Lanjutan Penyusunan Laporan Satuan Pengawasan Intern (SPI);
v. Buku Ketentuan Lanjutan Sistem Pengendalian Intern Perusahaan;
vi. Buku Ketentuan Lanjutan Tata Kelola TI.

d. Kebijakan Internal
i. Syarat Kompetensi per Penugasan;
ii. Mekanisme *Review* Berjenjang;
iii. Jabatan Fungsional;
iv. Jenjang Karir SPI;
v. Audit Berbasis Komputer;
vi. Fungsi Konsultansi;
vii. Komunikasi Komite Audit;
viii. Pelaporan Informasi Biaya.

VISI DAN MISI

Visi
Menjadi mitra terpercaya dan profesional dalam mendukung pencapaian kinerja unggul Perusahaan.

Misi
1. Memberikan nilai tambah bagi Perusahaan melalui pelaksanaan *assurance* dan konsultansi yang berbasis risiko, objektif, dan independen.
2. Meningkatkan harmonisasi dan sinergi fungsi internal audit antara Perusahaan dan Anak Perusahaan serta Eksternal Audit.
3. Meningkatkan kompetensi personil secara berkelanjutan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi.

PERSYARATAN KEAHLIAN DAN KECERMATAN PROFESIONAL
SPI merupakan unit kerja yang memiliki fungsi khusus, sehingga perlu adanya standar kompetensi tertentu yang harus dipenuhi, di antaranya seperti kompetensi dalam bidang audit, manajemen risiko, administrasi, akuntansi & keuangan dan manajemen Perusahaan.

Untuk menghasilkan personel SPI yang kompeten dan menunjang keberhasilan pelaksanaan fungsi pengawasan di lingkungan PI Grup, maka auditor SPI PTPI harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman teknis audit dan disiplin ilmu yang relevan dengan bidang tugasnya.

iii. Advanced Provision Book for External Audit Assistance (Counterpart);
iv. Book of Advanced Provisions for the Preparation of Internal Audit Reports (SPI);
v. Book of Advanced Provisions of the Company's Internal Control System;
vi. IT Governance Advanced Rulebook.

d. Internal Policy
i. Competency Requirements Per Assignment;
ii. Tiered Review Mechanism;
iii. Functional Position;
iv. SPI Career Path;
v. Computer-Based Auditing;
vi. Consultancy Function;
vii. Audit Committee Communication;
viii. Cost Information Reporting.

VISION AND MISSION

Vision
To be a trusted and professional partner in supporting the Company's superior performance.

Mission
1. Providing added value to the Company through the implementation of risk-based, objective and independent assurance and consultancy.
2. Improving the harmonization and synergy of internal audit functions between the Company and its Subsidiaries and External Audit.
3. Continuously improve personnel competencies and optimize the use of information technology.

PROFESSIONAL SKILL AND CARE REQUIREMENTS

SPI is a work unit that has a special function, so it is necessary to have certain competency standards that must be met, including competencies in auditing, risk management, administration, accounting & finance and Company management.

To produce competent SPI personnel and support the successful implementation of the supervisory function within the PI Group, PTPI SPI auditors must meet the following qualifications:
1. Have integrity and professional, independent, honest, and objective behavior in the performance of their duties.
2. Have knowledge and experience of audit techniques and disciplines relevant to his/her field of work.

3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tugas yang dijalankan.
4. Memiliki kecakapan berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
5. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, pengendalian internal dan manajemen risiko.
6. Menjaga kerahasiaan data/informasi perusahaan terkecuali apabila informasi tersebut harus diungkapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.
7. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesinya secara terus-menerus.
8. SVP SPI, VP, dan Ketua Tim Audit memiliki sertifikasi audit internal.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG

Uraian Tugas dan tanggung jawab SPI yang ditetapkan berdasarkan Piagam Internal Audit adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). PKPT disusun berdasarkan *Risk That Matter* (RTM) konsolidasi, *risk register*, hasil audit eksternal/internal, Arahan Direksi dan Dewan Komisaris c.q. Komite Audit, usulan unit kerja, serta pertimbangan lainnya yang diperlukan.
2. Melakukan kegiatan *assurance* yang meliputi audit kepatuhan, audit keuangan, dan audit operasional serta evaluasi atas keekonomisan, efektivitas dan efisiensi kegiatan di seluruh unit kerja Perusahaan serta Anak Perusahaan dan afiliasi yang bernilai strategis berdasarkan standar yang berlaku dengan praktik terbaik.
3. Melakukan kegiatan konsultansi (*advisory services*) kepada seluruh unit kerja Perusahaan baik diminta atau tidak diminta untuk memberikan nilai tambah bagi Perusahaan dan meningkatkan kinerja perusahaan tanpa menggantikan tanggung jawab manajemen. Oleh karenanya, jasa advis merupakan kegiatan fasilitasi bukan penjaminan, yang meliputi pemberian pendampingan, reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja, konseling dan pemberian nasihat.
4. Melakukan evaluasi dan memberikan opini atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern, Manajemen Risiko dan Tata Kelola Teknologi Informasi
5. Melakukan koordinasi dengan audit eksternal atau pengawasan fungsional lainnya seperti KAP, BPK-RI, BPKP, dan auditor/*assessor* eksternal lainnya, serta mengkoordinasikan penyediaan data & informasi perusahaan untuk kebutuhan tersebut.

3. Have knowledge of laws and regulations relevant to the duties performed.
4. Have the ability to interact and communicate both orally and in writing effectively.
5. Understand the principles of good corporate governance, internal control and risk management.
6. Maintain the confidentiality of company data/information except when such information must be disclosed based on applicable regulations.
7. Willing to continuously improve their professional knowledge, skills and abilities.
8. SVP SPI, VP, and Audit Team Leader have internal audit certification.

DUTIES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORIZATIONS

The description of SPI's duties and responsibilities established based on the Internal Audit Charter is as follows:

1. Prepare and implement the Annual Supervisory Work Program (PKPT). PKPT is prepared based on the consolidated Risk That Matter (RTM), risk register, external/internal audit results, Direction of the Board of Directors and Board of Commissioners c.q. Audit Committee, proposals from work units, and other necessary considerations. Audit Committee, work unit proposals, and other necessary considerations.
2. Conducting assurance activities that include compliance audits, financial audits, and operational audits as well as evaluating the economy, effectiveness and efficiency of activities in all work units of the Company as well as subsidiaries and affiliates with strategic value based on applicable standards with best practices.
3. Performing advisory services to all work units of the Company whether requested or not requested to provide added value to the Company and improve company performance without replacing management responsibilities. Therefore, advisory services are facilitation activities not guarantees, which include providing assistance, reviewing system development, self-assessment of control and performance, counseling and providing advice.
4. Evaluating and providing opinions on the implementation of the Internal Control System, Risk Management and Information Technology Governance.
5. Coordinate with external audit or other functional supervision such as KAP, BPK-RI, BPKP, and other external auditors/assessors, and coordinate the provision of company data & information for these needs.

6. Melakukan evaluasi pengembangan sumber daya dan standardisasi infrastruktur SPI di lingkungan PI Group.
7. Melakukan *monitoring* pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal dan audit eksternal serta keputusan dan arahan RUPS Perusahaan oleh Pemegang Saham (KBUMN).
8. Melaporkan hasil pengawasan kepada Direktur Utama dan Direksi yang relevan.
9. Melaporkan hasil pengawasan kepada Dewan Komisaris c.q. Komite Audit
10. Sebagai mitra kerja Komite Audit, auditor eksternal, asesor eksternal dan SPI Anak Perusahaan.
11. Melaksanakan penugasan *adhoc* sesuai permintaan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
12. Melaksanakan audit khusus berdasarkan pengembangan hasil audit dan permintaan Direksi.

Sedangkan wewenang SPI yang ditetapkan berdasarkan Piagam Internal Audit adalah sebagai berikut:

1. Memiliki akses tidak terbatas terhadap seluruh data, dokumen, informasi dan sumber daya dari Perusahaan serta Anak Perusahaan dan Perusahaan afiliasi untuk menjalankan tugas dan wewenangnya.
2. Menentukan ruang lingkup, metode, cara, teknik, strategi dan pendekatan audit sesuai dengan profesi dan standar audit intern.
3. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan seluruh proses bisnis dan unit kerja Perusahaan, Anak Perusahaan dan afiliasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
4. Memberikan pendapat, rekomendasi & saran-saran perbaikan kepada Direksi, SEVP, dan para pejabat Kompartemen, Departemen, dan Tim Adhoc Perusahaan serta Anak Perusahaan, baik diminta atau tidak diminta, dalam hal mengamankan harta dan kekayaan korporat.
5. Dapat meminta surat representasi kepada auditee atas keabsahan dan kelengkapan dokumen dan informasi pendukung yang dibutuhkan dalam hal pelaksanaan penugasan pengawasan.
6. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
7. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta Unit Kerja Perusahaan.
8. Dapat melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Dewan Komisaris, Komite Audit dan Unit Kerja di lingkungan Anak Perusahaan dan Perusahaan Afilisasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan terintegrasi yang dijalankan melalui koordinasi dengan masingmasing SPI Anak Perusahaan yang terkait.

6. Evaluate the development of resources and standardization of SPI infrastructure within PI Group.
7. Monitoring the implementation of follow-up on the results of internal and external audits as well as decisions and directives of the Company's GMS by Shareholders (KBUMN).
8. Report the results of supervision to the President Director and relevant Directors.
9. Reporting the results of supervision to the Board of Commissioners c.q. Audit Committee
10. As a working partner of the Audit Committee, external auditors, external assessors and SPI Subsidiaries.
11. Carry out adhoc assignments as requested by the Board of Directors and/or Board of Commissioners.
12. Conduct special audits based on the development of audit results and requests from the Board of Directors.

While the authority of SPI which is determined based on the Internal Audit Charter is as follows:

1. Have unrestricted access to all data, documents, information and resources of the Company as well as its subsidiaries and affiliated companies to carry out their duties and authorities.
2. Determine the scope, methods, means, techniques, strategies and audit approaches in accordance with the profession and internal audit standards.
3. Supervise the activities of all business processes and work units of the Company, Subsidiaries and affiliates in accordance with applicable rules and regulations.
4. Provide opinions, recommendations & suggestions for improvement to the Board of Directors, SEVPs, and officers of the Company's Compartments, Departments, and Adhoc Teams as well as Subsidiaries, whether requested or not, in terms of securing corporate assets and property.
5. May request a letter of representation to the auditee on the validity and completeness of the supporting documents and information required in terms of the implementation of the supervisory assignment.
6. Communicate directly with the Board of Directors, Board of Commissioners and/or Audit Committee.
7. Hold regular and incidental meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners and/or Audit Committee as well as the Company's Work Units.
8. Can coordinate and communicate with the Board of Commissioners, Audit Committee and Work Units within the Subsidiaries and Affiliated Companies in the context of implementing integrated supervision carried out in coordination with each SPI of the relevant Subsidiaries.

9. Dapat meminta bekerja sama dan melakukan koordinasi pengawasan dengan SPI Anak Perusahaan dan afiliasi.
10. Melakukan koordinasi dengan auditor/*assesor* eksternal.
11. Meminta atau mendapatkan bantuan dari pegawai internal perusahaan maupun dari pihak luar perusahaan, dalam rangka pelaksanaan pengawasan
12. Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara.
13. Dapat melakukan kegiatan digital forensik di Perusahaan serta Anak Perusahaan dan afiliasi sesuai dengan governance yang berlaku.

9. May request to cooperate and coordinate supervision with SPI subsidiaries and affiliates.
10. Coordinate with external auditors/assessors.
11. Requesting or obtaining assistance from internal company employees or from outside the company, in the context of carrying out supervision
12. Participate in strategic meetings without voting rights.
13. Can conduct digital forensic activities in the Company and its subsidiaries and affiliates in accordance with applicable governance.

INDEPENDENSI

Sebagai pemeriksaan internal, SPI dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki kebebasan bertindak (independen) secara objektif.

1. Tidak memihak kepada kepentingan para pihak dalam Perusahaan seperti manajemen dan Komisaris, baik langsung maupun tidak langsung;
2. Melakukan pemeriksaan sesuai dengan kaidah dan prinsip audit internal yang diterima dan berlaku secara umum;
3. Dalam pelaksanaan tugas audit membebaskan diri dari segala kepentingan pribadi maupun unit kerja yang diperiksa, dengan tetap menjunjung teguh kode etik yang telah ditetapkan.

INDEPENDENCE

As an internal audit, SPI in carrying out its duties and functions has the freedom to act (independent) objectively.

1. Not favoring the interests of parties within the Company such as management and Commissioners, either directly or indirectly;
2. Conduct examinations in accordance with generally accepted internal audit rules and principles;
3. In carrying out the audit task, free themselves from all personal interests and the work unit being examined, while upholding the established code of ethics.

RAPAT SATUAN PENGAWASAN INTERN

Kebijakan Rapat

1. SPI PT Pupuk Indonesia (Persero) secara bulanan melaksanakan rapat *monitoring* kinerja SPI dengan Komite Audit dengan pembahasan antara lain progres pelaksanaan audit, progres penyelesaian tindak lanjut dan isu-isu strategis.
2. Rapat bersama Direksi dilakukan secara insidentil, namun SPI rutin menyampaikan laporan *monitoring* tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal setiap bulan dan menyampaikan laporan kinerja konsolidasi SPI Pupuk Indonesia Grup setiap triwulan.

INTERNAL AUDIT UNIT MEETING

Meeting Policy

1. SPI PT Pupuk Indonesia (Persero) conducts monthly SPI performance monitoring meetings with the Audit Committee with discussions including progress on audit implementation, progress on completion of follow-up and strategic issues.
2. Meetings with the Board of Directors are conducted incidentally, but SPI routinely submits monitoring reports on follow-up of internal and external audit results every month and submits consolidated performance reports of SPI Pupuk Indonesia Group every quarter.

Frekuensi Rapat

Meeting Frequency

	Rapat dengan | Meeting with:		
	Direksi Board of Directors	**Dewan Komisaris** Board of Commissioners	**Komite Audit** Audit Committee
Frekuensi Rapat | Meeting Frequency	6	1	12

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN PENGAWASAN INTERN

Perusahaan mengikutsertakan Satuan Pengawasan Intern dalam kegiatan pengembangan kompetensi yang dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan dengan pendanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perusahaan. Daftar kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Satuan Pengawasan Intern di sepanjang tahun 2022 sebagai berikut:

COMPETENCY DEVELOPMENT OF INTERNAL AUDIT UNIT

The Company includes the Internal Audit Unit in competency development activities carried out through various training and education with funding fully the responsibility of the Company. The list of training and competency improvement activities participated in by the Internal Audit Unit throughout 2022 is as follows:

Kegiatan Activities	**Penyelenggara** Organizer	**Tanggal** Date	**Peserta (orang)** Participants (people)
Pelatihan *Transfer Pricing Comprehensive* Comprehensive Transfer Pricing Training	BDO	4–6 Januari 2022 January 4–6, 2022	1
Workshop business plan	Lembaga Management FEB UI	3–4 Desember 2022 December 3–4, 2022	3
Sharing session oleh Direktur SDM terkait *career wisdom* Sharing session by HR Director regarding career wisdom	Direktur SDM	10 Maret 2022 March 10, 2022	9
Pelatihan *Audit Management System* (AMS) Audit Management System (AMS) Training	Centria	27–28 Januari 2022 January 22–28, 2022	4
Bimbingan Teknis terkait Pengawasan Kearsipan Internal PI Grup Technical Guidance on PI Group Internal Archives Supervision	ANRI	15–16 Februari 2022 February 15–16, 2022	3
Pelatihan Penanganan Pengaduan Masyarakat tahun 2022 dengan judul "Peluit Integritas: pembelajaran interaktif untuk pengelolaan *whistleblowing system* pengaduan korupsi tahun 2022" Training on Handling Public Complaints in 2022 with the title "Whistle of Integrity: interactive learning for the management of corruption complaints whistleblowing system in 2022"	KPK	15 Februari 2022 February 15, 2022	2
Review Course Sertifikasi *Certified Internal Auditor* (CIA) Certified Internal Auditor (CIA) Certification Course Review	IIA	6–9 Juni 2022 June 6–9, 2022	2
Review Course Sertifikasi *Certified Information Systems Auditor* (CISA) Certified Information Systems Auditor (CISA) Certification Course Review	ISACA	13–17 Juni 2022 June 13–17, 2022	2
Pelatihan *Qualified Risk Management Analyst* (QRMA) Qualified Risk Management Analyst (QRMA) Training	LSP MKS	27–30 Juni 2022 June 27–30, 2022	2
Pelatihan *Interview* Berbasis STAR Batch 1 STAR-based Interview Training Batch 1	Budaya & Pembelajaran Culture & Learning	11 Juli 2022 July 11, 2022	1
Training Penilaian Kapabilitas SPI Korporasi (IACM) BUMN/D bersama BPKP SOE/D Corporate SPI Capability Assessment (IACM) Training with BPKP	BPKP	27–28 Oktober 2022 October 27–28, 2022	2
Review Course Sertifikasi QIA tingkat Dasar Review Course for Basic QIA Certification	YPIA	3–17 Oktober 2022 October 3–17, 2022	3

Kegiatan Activities	Penyelenggara Organizer	Tanggal Date	Peserta (orang) Participants (people)
Seminar Nasional Institute Internal Auditor (IIA) Institute Internal Auditor (IIA) National Seminar	IIA	12–13 Oktober 2022 October 12–13, 2022	1
Seminar Professional Internal Auditor Professional Internal Auditor Seminar	AAI	9–10 November 2022 November 9–10, 2022	1

PELAKSANAAN TUGAS SATUAN PENGAWASAN INTERN TAHUN 2022

Realisasi pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Internal Perusahaan pada tahun 2022 adalah realisasi Program Kerja Pengawasan Tahun 2022. Realisasi kinerja SPI Pupuk Indonesia sebagai Holding Company di tahun 2022 melebihi dari rencana pada PKPT 2022, dengan rincian sebagai berikut:

IMPLEMENTATION OF THE INTERNAL AUDIT TASK FORCE IN 2022

The realization of the task implementation of the Company's Internal Audit Unit in 2022 is the realization of the 2022 Supervisory Work Program. The realization of SPI Pupuk Indonesia's performance as a Holding Company in 2022 exceeded the plan in PKPT 2022, with the following details:

RINGKASAN REALISASI KINERJA
Summary of Performance Realization

Uraian	PKPT 2022	Realisasi 2022	%	Description
Assurance	17	21	124	Assurance
Konsultasi	6	18	300	Consultation
Pendampingan	15	34	227	Assistance

Realisasi kegiatan *assurance* selama tahun 2022, yaitu:

1. *Joint Audit* penyaluran pupuk bersubsidi untuk penyaluran Pupuk bersubsidi Tahun 2021 pada Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumut, Lampung, dan Sulsel dengan PT Petrokimia Gresik (PKG).
2. Audit atas pengelolaan uang muka di PI.
3. Audit atas kegiatan pemasaran komersil.
4. *Joint Audit* atas administrasi perpajakan di PT Pupuk Iskandar Muda (PIM).
5. *Joint Audit* SPI PT PI bersama dengan SPI PSP atas Penyaluran dan Distribusi Pupuk Bersubsidi pada rayon PSP di wilayah Magelang, DIY dan Solo Raya.
6. *Joint Audit* SPI PT PI bersama dengan SPI PSP atas Penyaluran dan Distribusi Pupuk Bersubsidi pada rayon PSP di wilayah Jawa Timur.
7. *Joint Audit* SPI PT PI bersama dengan SPI PSP atas Penyaluran dan Distribusi Pupuk Bersubsidi pada rayon PSP di wilayah Lampung.
8. *Joint Audit* SPI PI bersama dengan SPI PSP atas Penyaluran dan Distribusi Pupuk Bersubsidi pada rayon PSP di wilayah Bali.
9. *Joint Audit* Optimalisasi Pengeloaan Aset SPI PI bersama SPI PSP.
10. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Perusahaan (SPIP).

Realization of assurance activities during 2022, namely:

1. Joint Audit of subsidized fertilizer distribution for the distribution of subsidized fertilizer in 2021 in the Provinces of East Java, Central Java, North Sumatra, Lampung, and South Sulawesi with PT Petrokimia Gresik (PKG).
2. Audit of the management of advances at PI.
3. Audit of commercial marketing activities.
4. Joint Audit of tax administration at PT Pupuk Iskandar Muda (PIM).
5. Joint Audit of SPI PT PI together with SPI PSP on the Distribution and Distribution of Subsidized Fertilizers in PSP rayon in Magelang, DIY and Solo Raya areas.
6. Joint Audit of SPI PT PI together with SPI PSP on the Distribution and Distribution of Subsidized Fertilizers in PSP rayon in East Java.
7. Joint Audit of SPI PT PI together with SPI PSP on the Distribution and Distribution of Subsidized Fertilizers in PSP rayon in Lampung area.
8. Joint Audit of SPI PI together with SPI PSP on the Distribution and Distribution of Subsidized Fertilizers in PSP rayon in Bali.
9. Joint Audit of Asset Management Optimization of SPI PI with SPI PSP.
10. Evaluation of the Company's Internal Control System (SPIP).

11. Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko di PT Pupuk Indonesia (Persero).
12. Audit atas Pengadaan Barang & Jasa di PT Pupuk Indonesia (Persero) selama periode tahun 2021 hingga Triwulan III 2022.
13. Evaluasi Tata Kelola IT.
14. Evaluasi atas penyesuaian laporan kegiatan Agrosolution dan Makmur PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (pengganti PKPT terkait Evaluasi Penerapan Joint Cost Anper Pupuk oleh PI).
15. *Joint Audit* SPI PI bersama dengan SAI PKT atas Kesesuaian Laporan Kegiatan Agrosolution di wilayah PT Pupuk Kalimantan Timur (pengganti PKPT terkait Audit Pengelolaan Bahan Baku dan Persediaan di Pergudangan Cikampek).
16. Audit Pengelolaan Akun Perantara Utang PT Petrokimia Gresik (pengganti PKPT terkait Joint Audit dengan REKIND atas Pencatatan Akun Perantara).
17. Evaluasi atas Pengelolaan Akun Perantara Utang PT Pupuk Iskandar Muda (pengganti PKPT terkait Audit Pengelolaan SDM).
18. Audit atas Perhitungan HPP Subsidi Pupuk Tahun 2022. (*Joint Audit* dengan REKIND atas penerapan PSAK 72).
19. *Joint* evaluasi atas insiden kebakaran di Pabrik Kaltim-5.
20. Validasi Data Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di PT Pupuk Indonesia (Persero).
21. Evaluasi atas Validitas Data P3DN per 30 November 2022 di PT Pupuk Indonesia (Persero).

11. Evaluation of Risk Management Implementation at PT Pupuk Indonesia (Persero).
12. Audit of Goods & Services Procurement at PT Pupuk Indonesia (Persero) during the period 2021 to III Quarter 2022.
13. IT Governance Evaluation.
14. Evaluation of the adjustment of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang's Agrosolution and Makmur activity report (substitute for PKPT related to Evaluation of Joint Cost Implementation of Fertilizer by PI).
15. Joint Audit of SPI PI together with SAI PKT on the Conformity of Agrosolution Activity Report in the area of PT Pupuk Kalimantan Timur (substitute for PKPT related to the Audit of Raw Material and Inventory Management in Cikampek Warehousing).
16. Audit of Debt Intermediary Account Management of PT Petrokimia Gresik (replacement for PKPT related to Joint Audit with REKIND on Intermediary Account Recording).
17. Evaluation of the Debt Intermediary Account Management of PT Pupuk Iskandar Muda (replacement for PKPT related to HR Management Audit).
18. Audit of the Calculation of HPP for Fertilizer Subsidies in 2022. (Joint Audit with REKIND on the implementation of PSAK 72).
19. Joint evaluation of the fire incident at the Kaltim-5 Plant.
20. Data Validation for Increasing the Use of Domestic Products at PT Pupuk Indonesia (Persero).
21. Evaluation of the Validity of P3DN Data as of 30 November 2022 at PT Pupuk Indonesia (Persero).

RENCANA AUDIT 2023

Perusahaan telah memiliki rencana audit tahun 2023 yang tersusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) SPI PTPI Tahun 2023, yang diuraikan sebagai berikut:

AUDIT PLAN 2023

The company has an audit plan for 2023 which is compiled in the Annual Supervisory Work Program (PKPT) of SPI PTPI Year 2023, which is described as follows:

Uraian	Rencana 2023 2023 Plan	Description
Assurance	18	Assurance
Konsultasi	9	Consultation
Pendampingan	10	Assistance
Pengembangan & Penguatan Infrastruktur	13	Infrastructure Development & Strengthening

Objek audit dipilih dengan mempertimbangkan *Risk That Matter* (RTM) konsolidasi, *risk register*, hasil Audit Internal dan Eksternal, Arahan Dewan Komisaris dan/atau Direksi, usulan Unit Kerja, serta isu strategis lainnya, maka objek audit yang dipilih dalam program audit tahun 2023 sebagai berikut:

Audit objects are selected by considering the consolidated Risk That Matter (RTM), risk register, Internal and External Audit results, Board of Commissioners and/or Board of Directors directives, Work Unit proposals, and other strategic issues, the audit objects selected in the 2023 audit program are as follows:

1. Internal PT Pupuk Indonesia (Persero)
   a. Audit Pengadaan Barang dan Jasa
   b. Audit Pemasaran Komersil
   c. Audit Pengelolaan Piutang Usaha PI Grup
   d. Audit Kompartemen Umum
   e. Audit Pengelolaan SDM
   f. Audit Tujuan Tertentu di PIP
   g. Evaluasi Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Proyek Pengembangan
   h. Evaluasi P3DN
   i. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Perusahaan
   j. Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko
   k. Evaluasi Tata Kelola IT
   l. Audit Perhitungan HPP Subsidi Year End 2022
   m. Audit Perhitungan HPP Subsidi Juni 2023
   n. Audit Perhitungan HPP Subsidi Oktober 2023
2. *Joint Audit* dengan Anak Perusahaan
   a. *Joint Audit* Penyaluran dan Distribusi Pupuk Subsidi dengan SPI PKC
   b. *Joint Audit* atas Administrasi Perpajakan pada PKC
   c. *Joint Audit* Penyaluran dan Distribusi Pupuk Subsidi dengan SPI PSP
   d. *Joint Audit* Administrasi Keuangan PILOG

Objek Konsultansi yang diidentifikasi untuk dilaksanakan di 2023 sebagai berikut:
1. Konsultansi Manajemen Aset #1-Pusri
2. Konsultansi Manajemen Aset #2 – Pusri
3. Konsultansi Manajemen Aset #3 – PKC
4. Konsultansi Manajemen Aset #4 – PKT
5. Konsultansi PUSRI IIIB
6. Konsultansi Proyek *Soda Ash*
7. Konsultansi Proyek Pabrik Pupuk di Papua Barat
8. Konsultansi *Ad-Hoc* #1
9. Konsultansi *Ad-Hoc* #2

Selanjutnya untuk Kegiatan *Counterpart* yang akan dilaksanakan di tahun 2023 yaitu:
1. *Counterpart* Dewan Komisaris dan Komite Audit.
2. *Counterpart* KAP Tahun Buku 2022.
3. *Counterpart* KAP Tahun Buku 2023.
4. *Counterpart* BPK AKN VII: Pemeriksaan atas Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi serta Pendapatan, Biaya dan Investasi PT Pupuk Indonesia (Persero) Tahun Anggaran 2022.
5. *Counterpart* BPK AKN VII: Pemeriksaan atas Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi serta Pendapatan, Biaya dan Investasi PT Pupuk Indonesia (Persero) Tahun Anggaran 2023.

1. Internal PT Pupuk Indonesia (Persero)
   a. Goods and Services Procurement Audit
   b. Commercial Marketing Audit
   c. PI Group Accounts Receivable Management Audit
   d. General Compartment Audit
   e. HR Management Audit
   f. Specific Purpose Audit at PIP
   g. Evaluation of Barriers and Constraints to the Implementation of Development Projects
   h. P3DN Evaluation
   i. Evaluation of the Company's Internal Control System
   j. Evaluation of Risk Management Implementation
   k. IT Governance Evaluation
   l. Audit of Subsidized COGS Calculation Year End 2022
   m. Subsidized COGS Calculation Audit June 2023
   n. Audit of Subsidized COGS Calculation October 2023
2. Joint Audit with Subsidiaries
   a. Joint Audit of Subsidized Fertilizer Distribution with SPI PKC
   b. Joint Audit of Tax Administration at PKC
   c. Joint Audit of Subsidized Fertilizer Distribution with SPI PSP
   d. Joint Audit of PILOG's Financial Administration

The Consultancy Objects identified for implementation in 2023 are as follows:
1. Asset Management Consultancy #1 - Pusri
2. Asset Management Consultancy #2 - Pusri
3. Asset Management Consultancy #3 - PKC
4. Asset Management Consultancy #4 - PKT
5. PUSRI IIIB Consultancy
6. Soda Ash Project Consultancy
7. Consultancy for Fertilizer Plant Project in West Papua
8. Ad-Hoc Consultancy #1
9. Ad-Hoc Consultancy #2

Furthermore, the Counterpart Activities that will be implemented in 2023 are:
1. Board of Commissioners and Audit Committee Counterpart.
2. Counterpart KAP for Financial Year 2022.
3. Counterpart KAP for Financial Year 2023.
4. Counterpart of BPK AKN VII: Examination of the Calculation of Fertilizer Subsidies and Distribution of Subsidized Fertilizers and Revenues, Costs and Investments of PT Pupuk Indonesia (Persero) Fiscal Year 2022.
5. Counterpart of BPK AKN VII: Examination of the Calculation of Fertilizer Subsidies and Distribution of Subsidized Fertilizers and Revenues, Costs and Investments of PT Pupuk Indonesia (Persero) Fiscal Year 2023.

6. *Counterpart* BPK AKN IV: Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.07 (Belanja Subsidi Pupuk) TA 2022
7. *Counterpart* Itjen Kementan
8. *Counterpart* BPKP: Reviu HPP Pupuk Bersubsidi Tahun 2024 dan Prognosa HPP Pupuk Bersubsidi Tahun 2023
9. *Counterpart* BPKP: Reviu Peran PI dalam Program Kedaulatan Pangan
10. *Counterpart* BPKP Lainnya.

Selain melakukan fungsi *assurance*, konsultansi, *counterpart* dan *monitoring*, SPI juga melakukan kegiatan pengembangan dan penguatan infrastruktur pada tahun 2023 ini. Adapun pengembangan dan penguatan infrastruktur yang dikerjakan oleh SPI pada tahun 2023 ini merupakan infrastruktur untuk mendukung pencapaian visi misi Perusahaan pada umumnya, berikut rinciannya:

1. Penyelarasan Internal *Audit Charter* dengan PER-05/MBU/09/2022
2. *Assessment Internal Audit Capability Model* (IACM)
3. Pemutakhiran *Stock Opname Observation Checklist*
4. *Tax Compliance Checklist*
5. Standardisasi Pedoman *Joint Audit*
6. Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan Internal
7. Standardisasi Program Audit & *Checklist* Audit HPP
8. Implementasi Digital Forensik
9. *Data Analytics* Pemasaran
10. *Data Analytics Cash In*
11. *Data Analytics Cash Out*
12. *Data Analytics* Pengadaan
13. Standardisasi Prosedur Penghapusan Aset

6. Counterpart BPK AKN IV: Financial Management and Accountability of Budget Section 999.07 (Fertilizer Subsidy Expenditure) FY 2022
7. Counterpart Itjen Kementan
8. BPKP Counterpart: Review of 2024 Subsidized Fertilizer HPP and 2023 Subsidized Fertilizer HPP Prognosis
9. BPKP Counterpart: Review of PI's Role in Food Sovereignty Program
10. Other BPKP Counterparts.

In addition to performing assurance, consulting, counterpart and monitoring functions, SPI also carried out infrastructure development and strengthening activities in 2023. The development and strengthening of infrastructure carried out by SPI in 2023 is infrastructure to support the achievement of the Company's vision and mission in general, with the following details:

1. Internal Audit Charter alignment with PER-05/MBU/09/2022
2. Internal Audit Capability Model (IACM) Assessment
3. Updating Stock Opname Observation Checklist
4. Tax Compliance Checklist
5. Standardization of Joint Audit Guidelines
6. Development of Internal Monitoring Information System
7. Standardization of Audit Program & HPP Audit Checklist
8. Implementation of Digital Forensics
9. Marketing Data Analytics
10. Data Analytics Cash In
11. Data Analytics Cash Out
12. Data Analytics Procurement
13. Standardization of Asset Disposal Procedures.

Audit Eksternal/Akuntan Publik

External Audit/Public Accountant

Sebagai bagian dari sistem pengendalian internal, audit juga dilakukan oleh oleh Kantor Akuntan Publik yang memenuhi syarat perundang-undangan berlaku. Audit ini memiliki tujuan untuk menyatakan pendapat, dalam semua hal yang material, apakah laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Anggota Holding sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.

Dalam hal ini, Auditor Eksternal tidak diperkenankan memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan guna menjamin independensi dan kualitas hasil audit. Auditor

As part of the internal control system, audits are also conducted by a Public Accounting Firm that meets the requirements of applicable laws. This audit has the objective of expressing an opinion, in all material respects, on whether the consolidated financial statements of the Company and Holding Members comply with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK).

In this case, the External Auditor is not allowed to have a conflict of interest with the Company to ensure the independence and quality of the audit results. The External

Eksternal bertanggung jawab untuk menyampaikan opini atas kesesuaian Laporan Keuangan Perusahaan terhadap SAK di Indonesia.

KEPATUHAN TERHADAP STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA

Manajemen bertanggung jawab terhadap penyajian laporan keuangan Perusahaan dan patuh terhadap SAK yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan (BapepamLK) yang sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. VIII.G.7, Lampiran Surat Keputusan No. KEP-347/BL/2012, tanggal 25 Juni 2012 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

PROSEDUR AUDIT EKSTERNAL DAN STANDAR AUDIT

1. Audit atas laporan keuangan Perusahaan dilakukan sesuai dengan standar profesional Akuntan Publik yang mencakup seluruh prosedur audit yang dipandang perlu sesuai dengan keadaan;

2. Audit meliputi pengujian dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern, serta pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga akan meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh IAI;
3. Sebagai bagian dari proses audit, Kantor Akuntan Publik (KAP) juga melakukan tanya jawab kepada manajemen mengenai pernyataan manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan;
4. Audit mengandung risiko inheren bahwa jika terdapat kekeliruan dan ketidakberesan yang material. Jika terdapat hal tersebut, KAP akan menyampaikan kepada manajemen;
5. Manajemen menyetujui kertas kerja pemeriksaan KAP atas Perusahaan untuk di-*review* oleh badan atau otoritas terkait

Audit dilaksanakan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Jika terdapat bantuan keuangan Pemerintah RI, maka audit dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Auditor is responsible for expressing an opinion on the conformity of the Company's Financial Statements to SAK in Indonesia.

COMPLIANCE WITH INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

Management is responsible for the presentation of the Company's financial statements and complies with the SAK applicable in Indonesia established by the Indonesian Institute of Accountants (IAI) and the Decree of the Chairman of the Financial Institution Capital Market Supervisory Agency (BapepamLK) which is now the Financial Services Authority (OJK) No. VIII.G.7, Attachment to Decree No. KEP-347/BL/2012, dated June 25, 2012 concerning Guidelines for Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies.

EXTERNAL AUDIT PROCEDURES AND AUDITING STANDARDS

1. The audit of the Company's financial statements is conducted in accordance with the professional standards of Public Accountants which includes all audit procedures deemed necessary in accordance with the circumstances;
2. An audit includes testing and evaluating the internal control system, and examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit will also include an assessment of the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as an assessment of the overall presentation of the financial statements in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) issued by IAI;

3. As part of the audit process, the Public Accounting Firm (KAP) also conducts questions and answers to management regarding management's statements presented in the financial statements;
4. An audit carries an inherent risk that material errors and irregularities will be discovered. If so, the KAP will inform management;

5. Management approves the KAP audit working paper on the Company for review by the relevant body or authority.

The audit is conducted based on the Public Accountant Professional Standards issued by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI). If there is financial assistance from the Indonesian Government, the audit is carried out based on the State Financial Audit Standards (SPKN) issued by the Indonesian Supreme Audit Agency (BPK).

Pemegang Saham melalui RUPS memiliki kewenangan untuk menetapkan auditor eksternal yang akan melaksanakan audit atas laporan keuangan Perusahaan.

Dalam pelaksanaan audit, Perusahaan selalu berupaya menciptakan komunikasi yang efektif antara Kantor Akuntan Publik dan manajemen PTPI, Entitas Anak, dan beberapa Cucu Perusahaan melalui aktivitas koordinasi yang mencakup kegiatan Eksternal Auditor yang diharapkan dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal.

Koordinasi yang dilakukan antara lain melalui komunikasi seluruh unit kerja terkait dan melaksanakan pertemuan secara berkala, pendampingan ke unit kerja lainnya dalam Perusahaan dan SPI Entitas Anak, guna membicarakan hal-hal yang dianggap penting bagi Perusahaan dan KAP. Di samping itu, SPI PTPI juga bertanggung jawab membantu Komite Audit PTPI dalam melakukan evaluasi atas kinerja Kantor Akuntan Publik yang meliputi antara lain aspek pemahaman atas isu-isu yang dihadapi oleh Perusahaan.

MEKANISME PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan, Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), dan Laporan Lainnya Tahun Buku 2022 didasarkan pada Keputusan RUPS Kinerja Tahun 2021 PT Pupuk Indonesia (Persero) tanggal 29 Juni 2022 dengan berpedoman pada Ketentuan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Shareholders through the GMS have the authority to determine the external auditor who will carry out the audit of the Company's financial statements.

In conducting audits, the Company always strives to create effective communication between the Public Accounting Firm and the management of PTPI, Subsidiaries, and several Grandchildren of the Company through coordination activities that include External Auditor activities which are expected to achieve comprehensive and optimal audit results.

Coordination is carried out, among others, through communication with all related work units and conducting periodic meetings, mentoring to other work units within the Company and SPI Subsidiaries, to discuss matters deemed important to the Company and KAP. In addition, SPI PTPI is also responsible for assisting the PTPI Audit Committee in evaluating the performance of the Public Accounting Firm which includes, among others, aspects of understanding the issues faced by the Company.

MECHANISM OF APPOINTMENT OF PUBLIC ACCOUNTING FIRM

The appointment of Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan to carry out the Audit of the Company's Consolidated Financial Statements, Financial Statements on the Implementation of the Micro and Small Business Funding Program (UMK), and Other Reports for Fiscal Year 2022 is based on the Resolution of the 2021 Performance GMS of PT Pupuk Indonesia (Persero) dated June 29, 2022 by referring to OJK Provisions No: 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.

Adapun kronologis proses penetapan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagai auditor eksternal adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris melakukan evaluasi kinerja KAP Tahun Buku 2021 selanjutnya memberikan masukan dan usulan penetapan KAP kepada Pemegang Saham;
2. Berdasarkan hasil RUPS Tahunan tersebut, Dewan Komisaris PTPI meminta kepada Direksi PTPI untuk menyiapkan tim Pengadaan Bersama Jasa Akuntan Publik Tahun Buku 2022 yang akan membantu proses penunjukan KAP;
3. Penunjukan KAP di Entitas Anak Perusahaan ditetapkan dalam RUPS masing-masing Entitas;
4. Proses pengadaan KAP dilakukan secara bersama untuk seluruh Entitas PI Group;
5. Dewan Komisaris PTPI merumuskan dan menerbitkan Surat Keputusan Dewan Komisaris untuk kebutuhan pelaksanaan penunjukan KAP di lingkungan PI Grup. Surat Keputusan tersebut menetapkan Tim Penanggung jawab dan Tim Pelaksanaan penetapan KAP yang melibatkan perangkat Dewan Komisaris di PTPI dan Entitas Anak;
6. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Kontrak Pelaksanaan Audit ditandantangani sesuai prosedur yang ditetapkan di dalam prosedur penunjukan KAP yang diatur di dalam SK Bersama Dewan Komisaris dan Direksi.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Berdasarkan Surat Dewan Komisaris PTPI No. S-048/KOM/PIHC/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022, Perusahaan telah menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan Tahun Buku 2022. Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, Auditor Eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan.

The chronology of the process of determining the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan as the external auditor is as follows:

1. The Board of Commissioners evaluates the performance of KAP for the 2021 Financial Year and then provides input and proposals for determining KAP to the Shareholders;
2. Based on the results of the Annual GMS, the PTPI Board of Commissioners asked the PTPI Board of Directors to prepare a team for the Joint Procurement of Public Accountant Services for Financial Year 2022 which will assist the KAP appointment process;
3. The appointment of KAP in the Company's subsidiaries is determined in the GMS of each entity;
4. The KAP procurement process is conducted jointly for all PI Group Entities;
5. The Board of Commissioners of PTPI formulated and issued a Board of Commissioners Decree for the needs of the implementation of the appointment of KAP within the PI Group. The Decree stipulates the Team in charge and the Implementation Team for the determination of KAP which involves the Board of Commissioners in PTPI and its Subsidiaries;
6. The Work Start Order (SPMK) and Audit Implementation Contract are signed in accordance with the procedures stipulated in the KAP appointment procedure stipulated in the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors.

PUBLIC ACCOUNTING FIRM

Based on PTPI Board of Commissioners Letter No. S-048/KOM/PIHC/VIII/2022 dated August 9, 2022: S-048/KOM/PIHC/VIII/2022 dated August 9, 2022, the Company has appointed and determined the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan to audit the Company's Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2022. To ensure the independence and quality of the audit results, the appointed External Auditor must not have a conflict of interest with the Company.

AKUNTAN PUBLIK TAHUN 2022
Public Accountant in 2022

Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	
Akuntan | Accountant	Toto Harsono	
Tahun Audit Audit Year	Tahun Buku 2022	Fiscal Year 2022
Periode Penugasan Assignment Period	21 September 2022–28 Februari 2023 (Addendum) sampai dengan 14 April 2023	September 21, 2022–February 28, 2023 (Addendum) to April 14, 2023

Jasa | Service	1. Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PI, Anak Perusahaan dan Cucu Perusahaan (Pupuk Indonesia Grup) Tahun Buku 2022. 2. Audit Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan UMK untuk PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Tmur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, dan PT Rekayasa Industri Tahun Buku 2022.	1. Audit of Consolidated Financial Statements of PI, Subsidiaries and Grandchildren (Pupuk Indonesia Group) for Financial Year 2022. 2. Audit of Financial Statements for the Implementation of MSE Funding Program for PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Tmur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, and PT Rekayasa Industri for Financial Year 2022.
Jasa Lainnya Other Service	1. Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal. 2. Reviu atas Laporan Evaluasi Kinerja Perseroan. 3. Reviu atas Laporan Penilaian Tingkat Pencapaian KPI Perseroan. 4. Reviu atas Laporan Evaluasi Status Tindak Lanjut Arahan RUPS Perseroan serta arahan Dewan Komisaris	1. Audit of Compliance with Laws and Regulations and Internal Control. 2. Review of the Company's Performance Evaluation Report. 3. Review of the Company's KPI Achievement Level Assessment Report. 4. Review of the Evaluation Report on the Follow-up Status of the Company's GMS Direction and the direction of the Board of Commissioners
Biaya | Cost	Rp20.700.000.000 (exc. PPN)	Rp20,700,000,000 (exc. VAT)

AUDITOR EKSTERNAL PTPI 5 TAHUN TERAKHIR
PTPI External Auditor in the Last 5 Years

Tahun Buku Year Book	**Kantor Akuntan Publik** Public Accounting Firm	**Nama Akuntan** Accounting Name	**Opini** Opinion	**Lingkup Audit** Audit Scope	**Biaya (Rp)** Cost (Rp)
2022	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Toto Harsono	Wajar dalam semua hal yang material	Perusahaan, 10 Entitas Anak di bawah kepemilikan langsung dan 11 Entitas Anak di bawah kepemilikan tidak langsung, yaitu: • Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PTPI, Anak Perusahaan dan Cucu Perusahaan (PI Grup) Tahun Buku 2021. • Audit Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan UMK PTPI Tahun Buku 2021. • Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal. • Reviu atas Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan. • Reviu atas Laporan Penilaian Tingkat Pencapaian KPI Perusahaan. • Reviu atas Laporan Evaluasi Status Tindak Lanjut Arahan RUPS Perseroan serta arahan Dewan Komisaris. • *Management Letter*. • Reviu atas Penerapan Prosedur yang Disepakati dalam rangka Persiapan Penyusunan Informasi Keuangan Agregasi Kementerian BUMN.	20.700.000.000 (exc. PPN)

Tahun Buku Year Book	**Kantor Akuntan Publik** Public Accounting Firm	**Nama Akuntan** Accounting Name	**Opini** Opinion	**Lingkup Audit** Audit Scope	**Biaya (Rp)** Cost (Rp)
2022	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Toto Harsono	Reasonable in all material respects	The Company, 10 subsidiaries under direct ownership and 11 subsidiaries under indirect ownership, namely: • Audit of the Consolidated Financial Statements of PTPI, Subsidiaries and Grandchildren (PI Group) for the 2021 Financial Year. • Audit of the Financial Statements for the Implementation of the PTPI MSE Funding Program for the 2021 Fiscal Year. • Audit of Compliance with Laws and Regulations and Internal Control. • Review of the Company Performance Evaluation Report. • Review of the Company's KPI Achievement Level Assessment Report. • Review of the Evaluation Report on the Follow-up Status of the Company's GMS Direction and the direction of the Board of Commissioners. • Management Letter. • Review of the Implementation of Agreed Procedures in Preparation of Aggregated Financial Information of the Ministry of SOEs.	20,700,000,000 (exc. VAT)
2021	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan No. Izin: 241/KM.1/2015	Toto Harsono No. Izin: AP.1122	Wajar dalam semua hal yang material	Perusahaan, 10 Entitas Anak di bawah kepemilikan langsung dan 11 Entitas Anak di bawah kepemilikan tidak langsung, yaitu: • Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PTPI, Anak Perusahaan dan Cucu Perusahaan (PI Grup) Tahun Buku 2021. • Audit Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan UMK PTPI Tahun Buku 2021. • Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangundangan dan Pengendalian Internal. • Reviu atas Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan. • Reviu atas Laporan Penilaian Tingkat Pencapaian KPI Perusahaan. • Reviu atas Laporan Evaluasi Status Tindak Lanjut Arahan RUPS Perseroan serta arahan Dewan Komisaris. • *Management Letter*. • Reviu atas Penerapan Prosedur yang Disepakati dalam rangka Persiapan Penyusunan Informasi Keuangan Agregasi Kementerian BUMN.	20.900.000.000

Tahun Buku Year Book	**Kantor Akuntan Publik** Public Accounting Firm	**Nama Akuntan** Accounting Name	**Opini** Opinion	**Lingkup Audit** Audit Scope	**Biaya (Rp)** Cost (Rp)
2021	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan No. Permit: 241/ KM.1/2015	Toto Harsono Permit No. AP.1122	Reasonable in all material respects	The Company, 10 subsidiaries under direct ownership and 11 subsidiaries under indirect ownership, namely: • Audit of the Consolidated Financial Statements of PTPI, Subsidiaries and Grandchildren (PI Group) for the 2021 Financial Year. • Audit of the Financial Statements for the Implementation of the PTPI MSE Funding Program for the 2021 Fiscal Year. • Audit of Compliance with Laws and Regulations and Internal Control. • Review of the Company Performance Evaluation Report. • Review of the Company's KPI Achievement Level Assessment Report. • Review of the Evaluation Report on the Follow-up Status of the Company's GMS Direction and the direction of the Board of Commissioners. • Management Letter. • Review of the Implementation of Agreed Procedures in Preparation of Aggregated Financial Information of the Ministry of SOEs.	20,900,000,000
2020	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan No. Izin: 241/KM.1/2015	Toto Harsono No. Izin: AP.1122	Wajar dalam semua hal yang material	Perusahaan, 10 Entitas Anak di bawah kepemilikan langsung dan 11 Entitas Anak di bawah kepemilikan tidak langsung, yaitu: • Audit Laporan Keuangan; • Reviu Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan; • Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangundangan dan Pengendalian Internal; • Reviu Laporan Penilaian Tingkat Pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI); • Audit Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan; • Reviu atas Laporan Evaluasi Status Tindak Lanjut Arahan RUPS Perseroan serta arahan Dewan Komisaris; • *Management Letter*	19.500.000.000
2020	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan No. License: KEP-241/ KM.1/2015	Toto Harsono Permit No: AP.1122	Reasonable in all material respects	The Company, 10 subsidiaries under direct ownership and 11 subsidiaries under indirect ownership, namely: • Financial Statement Audit; • Review of Company Performance Evaluation Report; • Audit of Compliance with Laws and Regulations and Internal Control; • Review of KPI (Key Performance Indicator) Achievement Level Assessment Report; • Audit of Financial Statements of the Partnership and Community Development Program; • Review of the Evaluation Report on the Follow-up Status of the Company's GMS Direction and the direction of the Board of Commissioners; • Management Letter	19,500,000,000

Tahun Buku Year Book	**Kantor Akuntan Publik** Public Accounting Firm	**Nama Akuntan** Accounting Name	**Opini** Opinion	**Lingkup Audit** Audit Scope	**Biaya (Rp)** Cost (Rp)
2019	KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan No. Izin: KMK No. 477/ KM.1/2015	Rudi Hartono Purba No. Izin: AP.0501	Wajar dalam semua hal yang material	Perusahaan, 10 Entitas Anak di bawah kepemilikan langsung dan 11 Entitas Anak di bawah kepemilikan tidak langsung, yaitu: • Audit Laporan Keuangan; • Reviu Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan; • Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangundangan dan Pengendalian Internal; • Reviu Laporan Penilaian Tingkat Pencapaian KPI (*Key Performance Indicator*); • Audit Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan; • Reviu atas Laporan Evaluasi Status Tindak Lanjut Arahan RUPS Perseroan serta arahan Dewan Komisaris; • *Management Letter*	5.925.881.000
2019	KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan No. License: KMK No. 477/ KM.1/2015	Rudi Hartono Purba License No: AP.0501	Reasonable in all material respects	The Company, 10 subsidiaries under direct ownership and 11 subsidiaries under indirect ownership, namely: • Financial Statement Audit; • Review of Company Performance Evaluation Report; • Audit of Compliance with Laws and Regulations and Internal Control; • Review of KPI (Key Performance Indicator) Achievement Level Assessment Report; • Audit of Financial Statements of the Partnership and Community Development Program; • Review of the Evaluation Report on the Follow-up Status of the Company's GMS Direction and the direction of the Board of Commissioners; • Management Letter	5,925,881,000
2018	KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan No. Izin: KMK No. 477/ KM.1/2015	Rudi Hartono Purba No. Izin: AP.0501	Wajar dalam semua hal yang material	Perusahaan, 10 Entitas Anak di bawah kepemilikan langsung dan 11 Entitas Anak di bawah kepemilikan tidak langsung, yaitu: • Audit Laporan Keuangan; • Reviu Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan; • Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangundangan dan Pengendalian Internal; • Reviu Laporan Penilaian Tingkat Pencapaian KPI (*Key Performance Indicator*); • Audit Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan; • Reviu Laporan Evaluasi Status Tindak Lanjut Arahan dan Keputusan RUPS; • *Management Letter*	5.980.000.000

Tahun Buku Year Book	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Nama Akuntan Accounting Name	Opini Opinion	Lingkup Audit Audit Scope	Biaya (Rp) Cost (Rp)
2018	KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan No. License: KMK No. 477/ KM.1/2015	Rudi Hartono Purba License No: AP.0501	Reasonable in all material respects	The Company, 10 subsidiaries under direct ownership and 11 subsidiaries under indirect ownership, namely: • Financial Statement Audit; • Review of Company Performance Evaluation Report; • Audit of Compliance with Laws and Regulations and Internal Control; • Review of KPI (Key Performance Indicator) Achievement Level Assessment Report; • Audit of Financial Statements of the Partnership and Community Development Program; • Review of Evaluation Report on Follow-up Status of GMS Directives and Resolutions; • Management Letter	5,980,000,000

Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

Penerapan Sistem Pengendalian Internal merupakan upaya untuk mendukung manajemen meningkatkan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, menjamin tersedianya laporan keuangan dan laporan manajemen yang benar, lengkap, dan tepat waktu, serta memenuhi efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha Perusahaan.

Pengendalian internal dibangun untuk meningkatkan fungsi pengendalian yang terintegrasi (*integrated control system*), baik antara Perusahaan dan Entitas Anak. Tujuannya untuk memastikan bahwa kegiatan operasional telah dijalankan dengan baik dan dapat meningkatkan nilai tambah bagi Perusahaan melalui efektivitas pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

PEDOMAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN

Perusahaan telah memiliki pedoman umum Sistem Pengendalian Internal melalui Dokumen No. PI-SPIPR-007 tanggal 29 Desember 2017 tentang Prosedur Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Perusahaan (SPIP) yang telah disahkan bersama-sama oleh Direktur Utama, Direktur Keuangan, SVP Satuan Pengawasan

The implementation of the Internal Control System is an effort to support management to improve the Company's compliance with applicable laws and regulations. In addition, it ensures the availability of correct, complete and timely financial statements and management reports, as well as fulfilling the efficiency and effectiveness of the Company's business activities.

Internal control is built to improve the integrated control function (integrated control system), both between the Company and its Subsidiaries. The aim is to ensure that operational activities have been carried out properly and can increase added value for the Company through the effective implementation of risk management and Good Corporate Governance principles.

COMPANY INTERNAL CONTROL SYSTEM GUIDELINES

The Company has a general guideline for the Internal Control System through Document No. PI-SPIPR-007 dated December 29, 2017 concerning Procedures for Evaluating the Implementation of the Company's Internal Control System (SPIP) which has been jointly approved by the President Director, Finance Director, SVP of Internal Audit

Intern dan VP Pengawasan Keuangan. Pedoman ini memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan Sistem Pengendalian Internal di lingkup Perusahaan yang merupakan prosedur dengan tujuan untuk mengatur dan menjelaskan rangkaian aktivitas pelaksanaan evaluasi penerapan SPIP dan menilai tingkat kecukupan efektivitas penerapannya.

Evaluasi penerapan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan dilakukan untuk memberikan keyakinan kepada Direksi dalam pemberian asersi mengenai efektivitas pengendalian internal dan memberikan keyakinan kepada stakeholder lain bahwa penerapan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan telah cukup memadai dalam mencapai tujuan. Prosedur ini juga menjelaskan langkah-langkah dan tahapan dalam mengevaluasi penerapan SPIP oleh Satuan Pengawasan Intern Perusahaan yang melingkupi mulai dari kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PERUSAHAAN DAN KESESUAIAN TERHADAP FRAMEWORK INTERNASIONAL

Sistem Pengendalian Intern Perusahaan telah sesuai dengan *Internal Control Integrated Framework* yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO). Standar internasional itu dipublikasikan pada tahun 2013 dan berisi 5 (lima) komponen pengendalian internal, sebagai pengembangan dari COSO-*Internal Control Framework* yang dipublikasikan pada tahun 1992.

Adapun kelima komponen pengendalian internal tersebut adalah:

1. Lingkungan Pengendalian
   Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu perusahaan dan mempengaruhi kesadaran personal tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua komponen pengendalian internal yang membentuk disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian didefinisikan sebagai seperangkat standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan pengendalian internal di seluruh elemen perusahaan.

   Terdapat 5 (lima) prinsip yang harus ditegakkan atau dijalankan dalam Perusahaan untuk mendukung lingkungan pengendalian agar dapat terwujud dengan baik, yaitu:
   a. Direksi, manajemen, dan personil lainnya menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika;

and VP of Financial Supervision. This guideline provides a clear picture of the implementation of the Internal Control System within the Company which is a procedure with the aim of regulating and explaining the series of activities to evaluate the implementation of SPIP and assess the adequacy of the effectiveness of its implementation.

Evaluation of the implementation of the Company's Internal Control System is carried out to provide assurance to the Board of Directors in providing assertions regarding the effectiveness of internal control and providing assurance to other stakeholders that the implementation of the Company's Internal Control System is sufficient to achieve its objectives. This procedure also explains the steps and stages in evaluating the implementation of SPIP by the Company's Internal Audit Unit which covers preparation, implementation, and reporting activities.

THE COMPANY'S INTERNAL CONTROL SYSTEM AND CONFORMITY TO THE INTERNATIONAL FRAMEWORK

The Company's Internal Control System is in accordance with the Internal Control Integrated Framework developed by The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO). The international standard was published in 2013 and contains 5 (five) components of internal control, as a development of the COSO- Internal Control Framework published in 1992.

The five components of internal control are:

1. Control Environment
   The control environment creates a control atmosphere within an organization and affects personal awareness of control. The control environment is the foundation for all internal control components that form discipline and structure. The control environment is defined as a set of standards, processes and structures that provide the basis for implementing internal control throughout all elements of the company.

   There are 5 (five) principles that must be upheld or implemented in the Company to support the control environment to be realized properly, namely:

   a. Directors, management and other personnel demonstrate a commitment to integrity and ethical values;

b. Direksi menunjukkan independensi dari manajemen dan dalam mengawasi pengembangan dan kinerja pengendalian internal;
c. Manajemen dengan pengawasan Direksi menetapkan struktur, jalur pelaporan, wewenang-wewenang dan tanggung jawab dalam mengejar tujuan;
d. Perusahaan menunjukkan komitmen untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten sejalan dengan tujuan;
e. Perusahaan meyakinkan individu bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab pengendalian internal mereka dalam mencapai tujuan.

2. Penilaian Risiko
Penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan. Risiko adalah suatu kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Prinsip-prinsip yang mendukung penilaian risiko adalah sebagai berikut:
a. Perusahaan menetapkan tujuan dengan kejelasan yang cukup untuk memungkinkan identifikasi dan penilaian risiko yang berkaitan dengan tujuan;
b. Perusahaan mengidentifikasi risiko terhadap pencapaian tujuan di seluruh entitas dan analis risiko sebagai dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola;
c. Perusahaan mempertimbangkan potensi kecurangan dalam menilai risiko terhadap pencapaian tujuan;
d. Perusahaan mengidentifikasi dan menilai perubahan yang signifikan dapat mempengaruhi sistem pengendalian internal.

3. Aktivitas Pengendalian
Aktivitas pengendalian adalah tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan dilakukan. Aktivitas pengendalian meliputi kegiatan yang berbeda seperti: otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, analisis, prestasi kerja, menjaga keamanan harta perusahaan dan pemisahan fungsi. Prinsip-prinsip dalam perusahaan yang mendukung aktivitas pengendalian adalah sebagai berikut:
a. Perusahaan memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang berkontribusi terhadap mitigasi risiko pencapaian sasaran pada tahap yang dapat diterima;
b. Perusahaan memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian umum atas teknologi untuk mendukung tercapainya tujuan;

b. The Board of Directors demonstrates independence from management and in overseeing the development and performance of internal controls;
c. Management with the oversight of the Board of Directors establishes the structure, reporting lines, authorities and responsibilities in pursuit of objectives;
d. The company demonstrates a commitment to attracting, developing and retaining competent individuals in line with its objectives;
e. The company ensures individuals are accountable for their duties and internal control responsibilities in achieving objectives.

2. Risk Assessment
Risk assessment involves a dynamic and interactive process to identify and assess risks to the achievement of objectives. Risk is the likelihood that an event will occur and affect the achievement of a company's objectives. The principles that underpin risk assessment are as follows:

a. The company sets objectives with sufficient clarity to enable the identification and assessment of risks associated with the objectives;
b. The Company identifies risks to the achievement of its entity-wide objectives and analyzes risks as a basis for determining how risks should be managed;
c. The Company considers the potential for fraud in assessing the risk to the achievement of objectives;
d. The Company identifies and assesses changes that could significantly affect the internal control system.

3. Control Activities
Control activities are actions established through policies and procedures that help ensure that management directives to reduce risks to the achievement of objectives are carried out. Control activities include different activities such as: authorization, verification, reconciliation, analysis, job performance, keeping company property safe and separation of functions. The principles within the company that support control activities are as follows:

a. The Company selects and develops control activities that contribute to mitigating the risk of achieving objectives at an acceptable level;
b. The Company selects and develops general control activities over technology to support the achievement of its objectives;

c. Perusahaan mendistribusikan aktivitas pengendalian melalui kebijakan-kebijakan yang menetapkan apa yang diharapkan, dan prosedur-prosedur yang menempatkan kebijakan-kebijakan ke dalam tindakan.

4. Informasi dan Komunikasi Informasi yang diperlukan manajemen adalah informasi yang relevan dan berkualitas baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal dan informasi yang digunakan untuk mendukung fungsi komponen-komponen lain pengendalian internal Terdapat 3 (tiga) prinsip yang mendukung komponen informasi dan komunikasi dalam pengendalian internal, yaitu:
   a. Perusahaan memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi yang berkualitas dan yang relevan untuk mendukung fungsi pengendalian internal;
   b. Perusahaan secara internal mengkomunikasikan informasi, termasuk tujuan dan tanggung jawab untuk pengendalian internal dalam rangka mendukung fungsi pengendalian internal;
   c. Perusahaan berkomunikasi dengan pihak internal mengenai hal-hal yang mempengaruhi fungsi pengendalian internal.
5. Aktivitas Pemantauan
   Aktivitas pemantauan merupakan kegiatan evaluasi dengan beberapa bentuk, baik yang sifatnya berkelanjutan, terpisah maupun kombinasi keduanya, yang digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari kelima komponen pengendalian internal mempengaruhi fungsi-fungsi dalam setiap komponen, ada dan berfungsi.

Temuan-temuan dievaluasi terhadap kriteria yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan, lembaga-lembaga pembuat standar yang diakui atau Manajemen dan Direksi, dan kekurangan kekurangan yang ditemukan dikomunikasikan kepada Manajemen dan Direksi.

PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Terkait Kegiatan Keuangan dan Operasional

Evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern atas proses bisnis keuangan dan operasional dilakukan dalam setiap kegiatan audit. Rekomendasi dan saran perbaikan proses bisnis keuangan dan operasional tercantum dalam Laporan Hasil Audit (LHA) yang diterbitkna oleh Kompartemen SPI kepada Unit Kerja yang menjadi objek audit.

Selain itu, evaluasi atas Sistem Pengendalian Internal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit

c. Companies distribute control activities through policies that define what is expected, and procedures that put policies into action.

4. Information and Communication The information required by management is relevant and quality information from both internal and external sources and information used to support the functions of other components of internal control There are 3 (three) principles that support the information and communication component in internal control, namely:
   a. The company obtains or generates and uses quality and relevant information to support the internal control function;
   b. The Company internally communicates information, including objectives and responsibilities for internal control in order to support the internal control function;
   c. The Company communicates with internal parties on matters affecting the internal control function.
5. Monitoring Activities
   Monitoring activities are evaluation activities with several forms, either continuous, separate or a combination of both, which are used to ascertain whether each of the five components of internal control affects the functions within each component, are present and functioning.

Findings are evaluated against criteria established by policy makers, recognized standard-setting bodies or Management and the Board of Directors, and any deficiencies found are communicated to Management and the Board of Directors.

IMPLEMENTATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEM

Related Financial and Operational Activities

Evaluation of the Internal Control System over financial and operational business processes is carried out in every audit activity. Recommendations and suggestions for improving financial and operational business processes are listed in the Audit Results Report (LHA) issued by the SPI Compartment to the Work Unit that is the object of the audit.

In addition, the evaluation of the Internal Control System is carried out by the Public Accounting Firm (KAP) which audits

Laporan Keuangan Perusahaan. Rekomendasi dan saran perbaikan atas sistem pengendalian internal Perusahaan tercantum dalam Laporan PSA 62 dan *Management Letter* yang diterbitkan oleh KAP kepada manajemen Perusahaan.

Terkait Kepatuhan terhadap Perundang-undangan

Evaluasi atas Kepatuhan Perundang-undangan dilakukan oleh Departemen Tata Kelola dan Kepatuhan.

HASIL EVALUASI EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN

Evaluasi atas penerapan Sistem Pengendalian internal Perusahaan (SPIP) pada PT Pupuk Indonesia (Persero) yang mencakup 5 (lima) komponen sistem pengendalian internal perusahaan yaitu: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan telah dilaksanakan, dengan terbitnya Laporan Hasil Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan No. 22/SPI/LHE-41/PKPT-IP/XII/2022.

Evaluasi atas penerapan sistem pengendalian internal dilakukan dengan menggunakan scorecard yang mengacu kepada referensi dan ketentuan dari Sistem Pengendalian Internal yang dipublikasikan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO), yaitu COSO-*Internal Control Framework*.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, penerapan sistem pengendalian internal pada PT Pupuk Indonesia (Persero) mengalami peningkatan sebesar 0,72 dari tahun 2021 sebesar 91,22 menjadi 91,94 di tahun 2022 dengan predikat Sangat Baik. Hal tersebut artinya sistem pengendalian internal telah distandarisasi dan telah dievaluasi secara periodik.

the Company's Financial Statements. Recommendations and suggestions for improvement of the Company's internal control system are contained in the PSA 62 Report and Management Letter issued by KAP to the Company's management.

Related to Compliance with Legislation

Evaluation of Regulatory Compliance is conducted by the Governance and Compliance Department.

RESULTS OF EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF THE COMPANY'S INTERNAL CONTROL SYSTEM

Evaluation of the implementation of the Company's internal Control System (SPIP) at PT Pupuk Indonesia (Persero) which includes 5 (five) components of the company's internal control system, namely: Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, and Monitoring have been carried out, with the issuance of the Evaluation Report on the Implementation of the Company's Internal Control System No. 22/SPI/LHE-41/PKPT-IP/XII/2022.

Evaluation of the implementation of the internal control system is carried out using a scorecard that refers to the references and provisions of the Internal Control System published by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), namely the COSO-Internal Control Framework.

Based on the results of the evaluation that has been carried out, the implementation of the internal control system at PT Pupuk Indonesia (Persero) has increased by 0.72 from 2021 of 91.22 to 91.94 in 2022 with a Very Good predicate. This means that the internal control system has been standardized and has been evaluated periodically.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS ON THE ADEQUACY OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

Surat Pernyataan Manajemen

Tentang

Sistem Pengendalian Intern Perusahaan

(SPIP)

Atas nama Direksi, kami menyatakan bahwa :

1. Setiap kegiatan dan transaksi perusahaan telah dilaksanakan berdasarkan pada Sistem Pengendalian Intern Perusahaan (SPIP) yang memadai sesuai dengan hasil Evaluasi Penerapan SPIP yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT Pupuk Indonesia (Persero).
2. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan SPIP pada PT pupuk Indonesia (Persero) mencapai skor **91,94** atau berada pada tingkatan kecukupan **Sangat Baik**.
3. Direksi bertanggung jawab atas Sistem Pengendalian Intern Perusahaan secara keseluruhan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 12 Desember 2022

Atas nama dan mewakili Direksi

Bakir Pasaman

Direktur Utama

Manajemen Risiko
Risk Management

Pengelolaan fungsi manajemen risiko dilakukan oleh Kompartemen Manajemen Risiko yang dipimpin oleh Senior Vice President (SVP) Manajemen Risiko berada di bawah koordinasi Direktur SDM, Tata Kelola, dan Manajemen Risiko sesuai SK Direksi PTPI No. 082/KU/E10/SK/2021 tanggal 5 Agustus 2021 tentang Struktur Organisasi PT Pupuk Indonesia (Persero).

Sejalan dengan perkembangan usaha dan strategi bisnis Perusahaan dilakukan penyesuaian Struktur Organisasi, di mana Kompartemen Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada Direktur Keuangan & Manajemen Risiko sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 048/A/HK/P30/SK/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Sturuktur Organisasi PT Pupuk Indonesia (Persero).

The management of the risk management function is carried out by the Risk Management Compartment led by the Senio Vice President (SVP) of Risk Management under the coordination of the Director of HR, Governance and Risk Management in accordance with the Decree of the Board of Directors of PTPI No. 082/KU/E10/SK/2021 dated August 5, 2021 concerning the Organisational Structure of PT Pupuk Indonesia (Persero).

In line with the Company's business development and business strategy, adjustments were made to the Organisational Structure, where the Risk Management Compartment is directly responsible to the Director of Finance & Risk Management in accordance with the Decree of the Board of Directors No. 048/A/HK/P30/SK/2023 dated February 28, 2023 concerning the Organisational Structure of PT Pupuk Indonesia (Persero).

ORGANISASI KOMPARTEMEN MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT COMPARTMENT ORGANIZATION

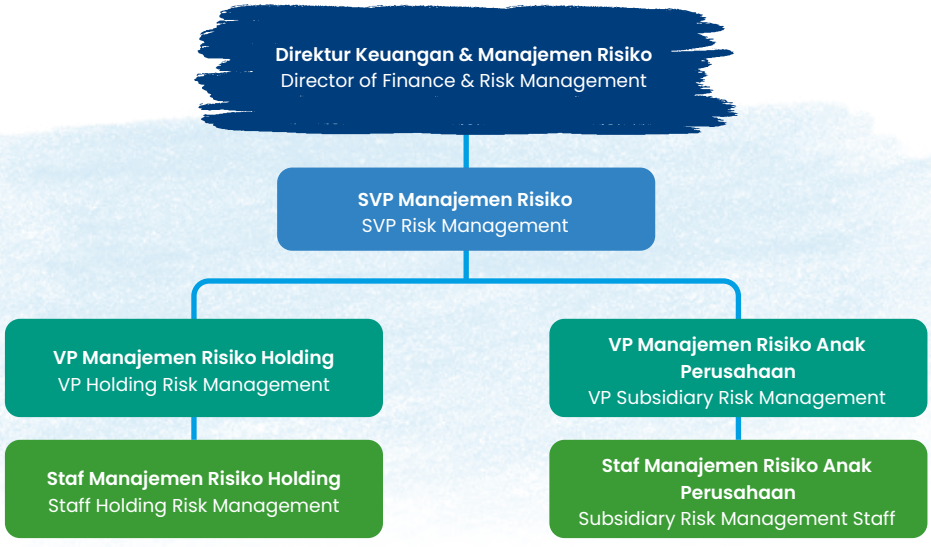

Ahmad Diponegoro
SVP Manajemen Risiko

Ahmad Diponegoro
SVP Risk Management

Warga Negara | Citizen	Indonesia	Indonesian
Usia | Age	47 tahun	47 years old
Tempat, Tanggal, Lahir Place, Date of Birth	Bandung, 25 Juni 1975	Bandung, June 25, 1975
Domisili | Domicile	Jakarta	Jakarta
Dasar Pengangkatan | Basis for Appointment	Surat Keputusan Direksi No. SK/ DIR/015/2021	SK/DIR/015/2021
Periode Jabatan Position Period	2020-sekarang	2020-present
Pendidikan | Education	• S-1 Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung (1998) • S-2 Informasi Manajemen Tilburg University (2006)	• Bachelor of Mechanical Engineering, Bandung Institute of Technology (1998) • Master's Degree in Management Information Tilburg University (2006)
Pengalaman Kerja Work Experience	• 3D Integrated Design (2001-2007) • ICT Operation Manager (2007-2020) • Corp Development Manager (2010-2012) • AVP Corporate Strategy (2012-2017) • VP Corporate Secretary PT Rekayasa Industri (2017-2019) • SVP Corporate Strategy & Investment PT Rekayasa Industri (2019-2020) • Kepala Pembelajaran dan Manajemen Pengetahuan PTPI (2020) • Senior Project Manager Implementasi Budaya Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) (2020) • SVP Tata Kelola Korporasi PT Pupuk Indonesia (Persero) (2020) • SVP Manajemen Risiko PT Pupuk Indonesia (Persero)(2020-sekarang)	• 3D Integrated Design (2001-2007) • ICT Operation Manager (2007-2020) • Corp Development Manager (2010-2012) • AVP Corporate Strategy (2012-2017) • VP Corporate Secretary PT Rekayasa Industri (2017-2019) • SVP Corporate Strategy & Investment PT Rekayasa Industri (2019-2020) • PTPI Head of Learning and Knowledge Management (2020) • Senior Project Manager Implementation of Corporate Culture PT Pupuk Indonesia (Persero) (2020) • SVP Corporate Governance of PT Pupuk Indonesia (Persero) (2020) • SVP Risk Management PT Pupuk Indonesia (Persero) (2020-present)

Hingga akhir Desember 2022, jumlah karyawan yang tergabung dalam Kompartemen Manajemen Risiko sebanyak 9 orang.

As of the end of December 2022, the number of employees who are members of the Risk Management Compartment is 9 people.

Fungsi	Jumlah Total	Function
SVP Manajemen Risiko	1	SVP Risk Management
VP Manajemen Risiko *Holding*	1	VP Risk Management Holding
VP Manajemen Risiko Anak Perusahaan	1	VP Subsidiary Risk Management
Staf Manajemen Risiko *Holding*	3	Holding Risk Management Staff
Staf Manajemen Risiko Anak Perusahaan	3	Subsidiary Risk Management Staff
Jumlah	**9**	**Total**

SERTIFIKASI PROFESI MANAJEMEN RISIKO

Untuk mendukung peran Fungsi Manajemen Risiko agar lebih kompeten dalam mengelola risiko yang ada di Perusahaan, maka Perusahaan memfasilitasi program pengembangan kompetensi bagi Fungsi Manajemen Risiko. Kegiatan pengembangan ini diberikan secara sistematis dan berjenjang.

Daftar sertifikasi profesi yang dimiliki karyawan Fungsi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut.

RISK MANAGEMENT PROFESSIONAL CERTIFICATION

To support the role of the Risk Management Function to be more competent in managing risks in the Company, the Company facilitates competency development programs for the Risk Management Function. These development activities are provided in a systematic and tiered manner.

The list of professional certifications held by Risk Management Function employees is as follows.

Jenis dan Level Sertifikasi	Jumlah Total	Certification Types and Levels
Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP)	1	Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP)
Qualified Risk Management Professional (QRMP)	1	Qualified Risk Management Professional (QRMP)
Qualified Risk Management Analyst (QRMA)	1	Qualified Risk Management Analyst (QRMA)
Total	**3**	**Total**

Selain fungsi Manajemen Risiko, Perusahaan juga memfasilitasi program sertifikasi untuk Unit Pengelola Risiko baik di Perusahaan maupun di Anak perusahaan. Adapun jumlah SDM tersertifikasi PI Group berjumlah 247 orang yang terdiri dari 40 (empat puluh) personel Unit Manajemen Risiko dan 207 (dua ratus tujuh) personil di luar Unit Manajemen Risiko, dengan rincian sebagai berikut:

In addition to the Risk Management function, the Company also facilitates certification programs for Risk Management Units both in the Company and in its subsidiaries. The number of PI Group certified human resources amounted to 247 people consisting of 40 (forty) Risk Management Unit personnel and 207 (two hundred and seven) personnel outside the Risk Management Unit, with the following details:

No	Jenis dan Level Sertifikasi Certification Types and Levels	Jumlah Total
1	Certified in Enterprise Risk Governance (CERG)	2
2	Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP)	14
3	Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP)	18
4	Qualified Risk Management Analyst (QRMA)	127
5	Qualified Risk Management Professional (QRMP)	75
6	Qualified Risk Management Officer (QRMO)	2
7	Qualified Chief Risk Officer (QCRO)	1
8	Qualified Risk Management Professional (CRMP)	7
9	Certified Governance Professional (CGP)	1
	Total	**247**

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Sepanjang tahun 2022, program pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh Fungsi Manajemen Risiko melalui program *inhouse* maupun publik di antaranya adalah sebagai berikut:

COMPETENCY DEVELOPMENT

Throughout 2022, competency development programs that have been attended by the Risk Management Function through inhouse and public programs include the following:

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI
Competency Development Program

Kegiatan Activities	**Penyelenggara** Oranizer	**Tanggal** Date	**Peserta (orang)** Participants (People)	**Jabatan** Position
Workshop dan Finalisasi RCSA Non RTM tahun 2023 Workshop and Finalization of RCSA Non RTM in 2023	Deddy Jacobus	22-23 Desember 2022 December 22–23, 2022	9	SVP Manajemen Risiko; VP Manajemen Risiko; Staff Manajemen Risiko SVP Risk Management; VP Risk Management; Risk Management Staff
Tabletop simulasi/*Drilling Test* Skenario Bencana BCM Distribusi Wilayah Jabar Jateng Tabletop simulation/Drilling Test BCM Disaster Scenario Distribution West Java Central Java Region	Tim Konsultan Centria Centria Consulting team	14 Desember 2022 December 14, 2022	9	SVP Manajemen Risiko; VP Manajemen Risiko; Staff Manajemen Risiko SVP Risk Management; VP Risk Management; Risk Management Staff
Risk Beyond 2022 ERMA International Conference on ERM	CRMS	8-9 Desember 2022 December 8–9, 2022	8	SVP Manajemen Risiko; VP Manajemen Risiko; Staff Manajemen Risiko SVP Risk Management; VP Risk Management; Risk Management Staff
Workshop Business Plan BOD-1	Tim SDM PTPI	3-4 November 2022 November 3–4, 2022	1	SVP Manajemen Risiko SVP Risk Management
Workshop Performance Coaching BOD- 2	Tim SDM PTPI	18 & 25 November 2022 November 18 & 25, 2022	3	SVP Manajemen Risiko SVP Risk Management
Workshop Performance Coaching BOD-1	Tim SDM PTPI	21 November 2022 November 21, 2022	1	SVP Manajemen Risiko SVP Risk Management
Pelatihan Finnon: *Understanding Financial Statement* Finnon Training: Understanding Financial Statement	Toto Prihadi	14-18 November 2022 November 14-18, 2022	9	SVP Manajemen Risiko; VP Manajemen Risiko; Staff Manajemen Risiko SVP Risk Management; VP Risk Management; Risk Management Staff
Sosialisasi Manajemen Risiko PI Pangan Socialization of PI Pangan Risk Management	Tim Manrisk PTPI	9 November 2022 November 9, 2022	9	SVP Manajemen Risiko; VP Manajemen Risiko; Staff Manajemen Risiko SVP Risk Management; VP Risk Management; Risk Management Staff
Pelatihan *Risk Based Budgeting* Risk Based Budgeting Training	CRMS	29-30 September 2022 September 20-30, 2022	1	SVP Manajemen Risiko; VP Manajemen Risiko; Staff Manajemen Risiko SVP Risk Management; VP Risk Management; Risk Management Staff
Pelatihan *Project Risk Management* Project Risk Management Training	CRMS	12-13 September 2022 November 12–13, 2022	1	Staf Manajemen Risiko Staff Risk Management
Workshop Strest Test Manajemen Risiko PI Group PI Group Risk Management Strest Test Workshop	Tim Manrisk PTPI	3-5 Agustus 2022 August 3-5, 2022	9	SVP Manajemen Risiko; VP Manajemen Risiko; Staff Manajemen Risiko SVP Risk Management; VP Risk Management; Risk Management Staff

Kegiatan Activities	**Penyelenggara** Oranizer	**Tanggal** Date	**Peserta (orang)** Participants (People)	**Jabatan** Position
Learning and Sharing Proses dan Hasil *Stress Test* Anak perusahaan 2022 Learning and Sharing Process and Stress Test Results Subsidiary 2022	PKG	20-22 Juni 2022 June 20-22, 2022	9	SVP Manajemen Risiko; VP Manajemen Risiko; Staff Manajemen Risiko SVP Risk Management; VP Risk Management; Risk Management Staff
Benchmark Pengelolaan Produk *Reject* dengan PT SIG Reject Product Management Benchmark with PT SIG	PT Semen Indonesia	16 Juni 2022 June 16, 2022	9	SVP Manajemen Risiko; VP Manajemen Risiko; Staff Manajemen Risiko SVP Risk Management; VP Risk Management; Risk Management Staff
Sharing Knowledge dan *Benchmarking Implementasi Systemic Risk* Knowledge Sharing and Benchmarking Systemic Risk Implementation	PKT	26 April 2022 April 26, 2022	9	SVP Manajemen Risiko; VP Manajemen Risiko; Staff Manajemen Risiko SVP Risk Management; VP Risk Management; Risk Management Staff
Pengenalan fitur (*Benchmark*) aplikasi PRISMA Pupuk Indonesia kepada RNI ID Food Introduction of features (Benchmark) PRISMA Pupuk Indonesia application to RNI ID Food	Tim Manrisk PTPI	11 Maret 2022 March 11, 2022	9	SVP Manajemen Risiko; VP Manajemen Risiko; Staff Manajemen Risiko SVP Risk Management; VP Risk Management; Risk Management Staff
Sosialisasi Aplikasi PRISMA untuk pengelolaan risiko Non RTM PIM Socialization of PRISMA Application for Non RTM PIM risk management	Tim Manrisk PTPI	31 Maret 2022 March 31, 2022	8	VP Manajemen Risiko; Staff Manajemen Risiko VP Risk Management; Risk Management Staff
Training "Memahami *Data Integrity* sebagai Fondasi Manajemen Risiko Terpadu" Training "Understanding Data Integrity as the Foundation of Integrated Risk Management"	Tim Manrisk PTPI	30 Maret 2022 March 30, 2022	9	SVP Manajemen Risiko; VP Manajemen Risiko; Staff Manajemen Risiko SVP Risk Management; VP Risk Management; Risk Management Staff
Benchmark Penerapan Manajemen Risiko dengan RNI Benchmark Risk Management Implementation with RNI	RNI	11 Maret 2022 March 11, 2022	9	SVP Manajemen Risiko; VP Manajemen Risiko; Staff Manajemen Risiko SVP Risk Management; VP Risk Management; Risk Management Staff
Sharing session SPSS	Lutfi Fachda	5 Maret 2022 March 5, 2022	8	SVP Manajemen Risiko; VP Manajemen Risiko; Staff Manajemen Risiko SVP Risk Management; VP Risk Management; Risk Management Staff
Workshop Penyusunan Risk Control Self Assessment (RCSA) RTM RKAP 2022 Anper	Lutfi Fachda	21-22 Februari 2022 February 21-22, 2022	8	VP Manajemen Risiko; Staff Manajemen Risiko VP Risk Management; Risk Management Staff
Benchmark implementasi *Early Warning System*/Sistem Deteksi Dini Risiko di perusahaan Benchmark implementation of Early Warning System/Risk Early Detection System in the company	PT PLN	15 Februari 2022 February 15, 2022	9	SVP Manajemen Risiko; VP Manajemen Risiko; Staff Manajemen Risiko SVP Risk Management; VP Risk Management; Risk Management Staff

Kegiatan Activities	Penyelenggara Oranizer	Tanggal Date	Peserta (orang) Participants (People)	Jabatan Position
Training Manajemen Risiko Kredit Pupuk Indonesia Group	Toto Prihadi	7-10 Februari 2022	9	SVP Manajemen Risiko; VP Manajemen Risiko; Staff Manajemen Risiko
Credit Risk Management Training Pupuk Indonesia Group		February 7-10, 2022		SVP Risk Management; VP Risk Management; Risk Management Staff

PELAKSANAAN TUGAS TAHUN 2022

Sepanjang tahun 2022, realisasi program kerja di Kompartemen Manajemen Risiko sebagai berikut:

1. Klinikal Pengelolaan Risiko
   Perseroan melaksanakan klinikal risiko secara berkala guna meningkatkan pemahaman *Risk Owner* dan *Risk Officer* dalam melakukan *Risk Control Self Assessment* (RCSA) serta memastikan implementasi manajemen risiko sesuai dengan Pedoman MRT
2. Sosialisasi dan *Workshop*
   Perseroan telah mengadakan beberapa sosialisai dan *workshop* sebagai berikut:
   a. Sosialisasi pemutakhiran aplikasi Pupuk Indonesia *Risk Management Application* (PRISMA) kepada *Risk Officer* dan *Risk Owner* Pupuk Indonesia dan Anak Perusahaan
   b. Sosialisasi & simulasi/*Drilling Test* Skenario Bencana *Business Continuity Management System* (BCMS) PT Pupuk Indonesia(Persero)
   c. Sosialisasi penyusunan *Risk Based Budgeting* 2022 ke Komp. Kinkor, Komp. Keuangan, Komp. Akuntansi, dan Komp. Strategi Korporat
   d. *Workshop* Pengisian *Risk Control Self-Assessment* (RCSA) Tahun 2022 untuk Internal PI dan PI Group
   e. *Sharing Session Risk Indicator, Risk Tolerance*, dan *Risk Appetite* untuk *Risk Owner* dan *Risk Officer* PI
   f. *Workshop Strest Test Manajemen* Risiko PI Group
   g. Pengenalan fitur (*Benchmark*) aplikasi PRISMA Pupuk Indonesia kepada RNI ID Food
3. Kajian Risiko Aksi Korporasi
   Untuk memberikan *assurance* kepada manajemen terhadap proses pengambilan keputusan atas Aksi Korporasi yang dilakukan, Perusahaan menyusun Prosedur Kajian Risiko Aksi Korporasi No. PT-TKK-PR-010 Rev.0 tanggal 8 September 2017. Adapun reviu Kajian Risiko Aksi Korporasi yang telah dilakukan oleh Kompartemen Manajemen Risiko hingga Triwulan IV/2022 adalah sebanyak 23 (dua puluh tiga) kajian risiko dengan detail sebagai berikut:

TASK IMPLEMENTATION YEAR 2022

Throughout 2022, the realization of the work program in the Risk Management Compartment is as follows:

1. Risk Management Clinical
   The Company conducts regular risk clinics to improve the understanding of Risk Owners and Risk Officers in conducting Risk Control Self Assessment (RCSA) and ensuring the implementation of risk management in accordance with the MRT Guidelines.
2. Socialization and Workshop
   The Company has conducted several socializations and workshops as follows:
   a. Socialization of the update of Pupuk Indonesia Risk Management Application (PRISMA) to Risk Officers and Risk Owners of Pupuk Indonesia and Subsidiaries.
   b. Socialization & simulation/Drilling Test Disaster Scenario Business Continuity Management System (BCMS) PT Pupuk Indonesia (Persero)
   c. Socialization of the preparation of Risk Based Budgeting 2022 to Komp. Kinkor, Komp. Finance, Comp. Accounting, and Comp. Corporate Strategy
   d. Workshop on Risk Control Self-Assessment (RCSA) 2022 for Internal PI and PI Group
   e. Sharing Session Risk Indicator, Risk Tolerance, and Risk Appetite for Risk Owner and Risk Officer PI
   f. PI Group Risk Management Strest Test Workshop
   g. Introduction of features (Benchmark) PRISMA Pupuk Indonesia application to RNI ID Food
3. Corporate Action Risk Assessment
   To provide assurance to management on the decision-making process of the Corporate Action, the Company has prepared the Corporate Action Risk Assessment Procedure No. Document PT-TKK-PR-010 Rev.0 dated September 8, 2017. The review of the Corporate Action Risk Assessment that has been carried out by the Risk Management Compartment up to Quarter IV/2022 is 23 (twenty-three) risk assessments with the following details:

No.	Judul Kajian Risiko	Title of Risk Assessment	Waktu Penyelesaian Completion Time
1	Pembangunan Pabrik Soda Ash oleh PT Pupuk Kalimantan diselesaikan pada Januari 2022	The construction of the Soda Ash Plant by PT Pupuk Kalimantan was completed in January 2022.	Januari 2022 January 2022
2	Penjaminan Agunan Deposito atas Pemberian *Bridging Facility* ke Rekind untuk Proyek JTB oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) diselesaikan pada Januari 2022	Guarantee of Deposit Collateral for the Provision of Bridging Facility to Rekind for JTB Project by PT Pupuk Indonesia (Persero) completed in January 2022	Januari 2022 January 2022
3	Pengajuan *Bridging Facility* dari Bank Mandiri untuk Penyelesaian Proyek JTB oleh PT Rekayasa Industri diselesaikan pada Januari 2022	Application for Bridging Facility from Bank Mandiri for Completion of JTB Project by PT Rekayasa Industri completed in January 2022	Januari 2022 January 2022
4	Penghapusbukuan Aktiva Tetap Milik PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Berupa Bangunan Perumahan Taman Kenten diselesaikan pada Februari 2022	Write-off of Fixed Assets Owned by PT Pupuk Sriwidjaja Palembang in the Form of Taman Kenten Housing Building completed in February 2022	Februari 2022 February 2022
5	*Sharedown* Proyek JO RDMP diselesaikan Februari 2022(Tindak Lanjut FGD Balikpapan)	JO RDMP Project Sharedown completed February 2022 (Balikpapan FGD Follow-up)	Februari 2022 February 2022
6	Proyek Pengembangan Pabrik *Dry Ice* PT Pupuk Kujang diselesaikan pada Februari 2022	PT Pupuk Kujang Dry Ice Plant Development Project completed in February 2022	Februari 2022 February 2022
7	Permohonan Perpanjangan Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) dari Bank Mandiri oleh PT Rekayasa Industri diselesaikan pada April 2022	Application for Special Transaction Loan (PTK) Extension from Bank Mandiri by PT Rekayasa Industri completed in April 2022	April 2022 April 2022
8	Pembangunan Pabrik Cikampek *Nitrogen & Ozygen Plant* (CNOP) oleh PT Pupuk Indonesia Utilitas diselesaikan pada April 2022	Construction of Cikampek Nitrogen & Ozygen Plant (CNOP) by PT Pupuk Indonesia Utilities completed in April 2022	April 2022 April 2022
9	Rencana Pembelian Saham PTPN XIII di PT KALIANUSA oleh PT Pupuk Kalimantan Timur diselesaikan pada April 2022	PTPN XIII Share Purchase Plan in PT KALIANUSA by PT Pupuk Kalimantan Timur completed in April 2022	April 2022 April 2022
10	Sewa Lahan PKT oleh PT Pertamina Gas diselesaikan pada April 2022	PKT Land Lease by PT Pertamina Gas settled in April 2022	April 2022 April 2022
11	Proyek Gudang Urea Ekspor Kapasitas 20.000 ton oleh PT Petrokimia Gresik diselesaikan pada April 2022	Export Urea Warehouse Project Cap. 20,000 tons by PT Petrokimia Gresik completed in April 2022	April 2022 April 2022
12	Penghapusan dan Pemindahtanganan UPP Belawan oleh PT PT Pupuk Sriwidjaja Palembang diselesaikan pada April 2022	Abolition and Transfer of UPP Belawan by PT Pupuk Sriwidjaja Palembang completed in April 2022	April 2022 April 2022
13	Proyek Pembangunan Gudang Curah Urea Kapasitas 12.000 Ton PT Pupuk Kujang diselesaikan pada Juni 2022	PT Pupuk Kujang 12,000 Ton Capacity Urea Bulk Warehouse Construction Project completed in June 2022	Juni 2022 June 2022
14	Penghapusan dan Pemindahtanganan GPP Nagreg oleh PT PT Pupuk Sriwidjaja Palembang diselesaikan pada Juli 2022	Abolition and Transfer of GPP Nagreg by PT Pupuk Sriwidjaja Palembang completed in July 2022	Juli 2022 July 2022
15	Proyek Pembangunan Pabrik Phonska V Kapasitas 600.000 MTPY oleh PT Petrokimia Gresik diselesaikan pada Juli 2022	Construction Project of Phonska V Kap.600.000 MTPY Plant by PT Petrokimia Gresik completed in July 2022	Juli 2022 July 2022
16	Kajian Risiko Reaktivasi Pabrik H202 PT PIM diselesaikan pada September 2022	PT PIM's H202 Plant Reactivation Risk Assessment completed by September 2022	September 2022 September 2022
17	Kajian Risiko Kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) Gedung Hemodialisa PT Petrokimia Gresik (PG) dengan PT Petro Graha Medika diselesaikan pada Oktober 2022	Risk Assessment of Build-to-Sell Cooperation (BGS) of Hemodialysis Building of PT Petrokimia Gresik (PG) with PT Petro Graha Medika completed in October 2022.	Oktober 2022 October 2022

No.	Judul Kajian Risiko	Title of Risk Assessment	Waktu Penyelesaian Completion Time
18	Kajian Risiko Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Tetap Tanah & Gedung KPJ Beserta Fasilitas Pendukung Oleh PT Pupuk Sriwidjadaja Palembang diselesaikan pada November 2022	Risk Assessment of Write-off and Transfer of Fixed Assets Land & Building KPJ Along with Supporting Facilities by PT Pupuk Sriwidjadaja Palembang completed in November 2022	November 2022 November 2022
19	Kajian Risiko Penyewaan 20 GPP di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta Milik PSP ke PG diselesaikan pada November 2022	Risk Assessment of Leasing 20 GPPs in East Java, Central Java, and Yogyakarta Owned by PSP to PG completed in November 2022	November 2022 November 2022
20	Kajian Risiko Sewa Lahan PT PKT oleh PT KDM diselesaikan pada November 2022	Risk Assessment of PT PKT Land Lease by PT KDM completed in November 2022	November 2022 November 2022
21	Kajian risiko Penarikan Kredit Investasi Proyek Pembangunan Pabrik Pusri IIIB dan Pengagunan Aktiva Tetap diselesaikan pada November 2022	Risk assessment of Pusri IIIB Plant Construction Project Investment Credit Drawdown and Fixed Assets Collateralization completed by November 2022.	November 2022 November 2022
22	Kajian Risiko Sewa Lahan PT PKC Oleh PIU diselesaikan pada Desember 2022	Risk Assessment of PT PKC Land Lease by PIU completed by December 2022	Desember 2022 December 2022
23	Kajian Risiko Penghapusan Akitva Tetap Gedung Sarana Penjualan dan Jembatan Timbang PT Pupuk Kujang diselesaikanpada Desember 2022	Risk Assessment for the Write-off of Fixed Assets of PT Pupuk Kujang's Sales Facilities Building and Weighbridge completed by December 2022	Desember 2022 December 2022

Sistem Manajemen Risiko
Risk Management System

Dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan untuk memastikan pencapaian nilai bagi Pemegang Saham dan pemenuhan komitmen pada karyawan serta seluruh pemangku kepentingan terkait lainnya, PTPI berkomitmen menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi (MRT). MRT diperlukan untuk memastikan pencapaian terhadap sasaran, termasuk sasaran RKAP.

Perusahaan telah menerapkan Sistem Manajemen Risiko berbasis ISO 31000:20011 sejak tahun 2013, hal ini ditunjukkan dengan pemberlakukan Pedoman Manajemen Risiko kepada seluruh anak perusahaan pada tanggal 1 januari 2013 berdasarkan Surat Edaran No. SE-03/III/2013. Kemudian sesuai kebutuhan perusahaan, Perusahaan melakukan revisi Pedoman pada tahun 2017 menjadi Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi No Dok: PI-TKK-PD-005 tanggal 8 September 2017 dan diedarkan ke seluruh anak perusahaan melalui Surat Edaran No. SE-004/1/2018. Pernyataan Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan yang tercantum dalam Pedoman tersebut menunjukkan bahwa Perusahaan:

In realizing good corporate governance and to ensure the achievement of value for Shareholders and fulfillment of commitments to employees and all other relevant stakeholders, PTPI is committed to implementing Integrated Risk Management (MRT). MRT is needed to ensure the achievement of goals, including RKAP goals.

The Company has implemented the Risk Management System based on ISO 31000:20011 since 2013, this is indicated by the implementation of the Risk Management Guidelines to all subsidiaries on January 1, 2013 based on Circular Letter No. SE-03/III/2013. Then according to the needs of the company, the Company revised the Guidelines in 2017 to become the Integrated Risk Management Guidelines No Doc: PI-TKK-PD-005 dated September 8, 2017 and circulated to all subsidiaries through Circular Letter No. SE-004/1/2018: SE-004/1/2018. The Corporate Risk Management Implementation Policy Statement contained in the Guideline indicates that the Company:

1. Berkomitmen untuk menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan untuk mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*good corporate governance*) pada seluruh aktivitas dan kepentingan usaha Pupuk Indonesia Group.
2. Menyusun Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang mengacu pada SNI ISO 31000 Manajemen Risiko-Prinsip dan Panduan.
3. Mewajibkan penanggung jawab risiko di setiap tingkatan organisasi melakukan proses identifikasi, analisis, dan evaluasi pengelolaan risiko serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Berkomitmen untuk mengembangkan kompetensi sumber daya manusia pengelola risiko, menyediakan anggaran pengelolaan risiko, serta menyediakan dukungan teknologi informasi untuk pengelolaan risiko secara memadai dan menjadikan budaya sadar risiko sebagai bagian dari budaya Perusahaan.
5. Melakukan evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Pupuk Indonesia Group secara berkala.

Implementasi Manajemen Risiko yang efektif dan efisien dilakukan secara berkelanjutan pada setiap fungsi dan hirarki dalam Perusahaan. Dalam setiap tahapan implementasi, Perusahaan mengidentifikasi dan menganalisis seluruh risiko yang dapat mengganggu pencapaian Sasaran Perusahaan. Setiap risiko yang teridentifikasi dikategorikan berdasarkan taksonomi risiko yang berlaku di Perusahaan dan dilaksanakan secara efektif dengan dukungan sistem informasi Manajemen Risiko.

Untuk setiap tahun anggaran, Perusahaan menetapkan Risiko Utama Konsolidasi berdasarkan pareto kontributor utama dalam hal *value, investment, cost*, dan *contingency*. Dalam upaya memastikan seluruh Risiko Utama tersebut dapat dikendalikan, Perusahaan melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat risiko secara periodik.

PROFIL RISIKO PERUSAHAAN TAHUN 2022

Sejak awal tahun 2022, Perusahaan telah mengidentifikasi 12 (dua belas) RTM Konsolidasi yang perlu dikelola dan dimonitor setiap bulan, sehingga dapat diyakini tingkat risiko berada pada tingkat yang wajar dan dapat diterima oleh Perusahaan.

Adapun hasil pengelolaan 12 (dua belas) RTM Konsolidasi sampai dengan akhir Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Committed to implementing Integrated Risk Management that is systematic, measurable, and sustainable to realize Good Corporate Governance in all activities and business interests of Pupuk Indonesia Group.
2. Develop Integrated Risk Management Implementation Guidelines that refer to SNI ISO 31000 Risk Management - Principles and Guidelines.
3. Require the person in charge of risk at every level of the organization to carry out the process of identification, analysis, and evaluation of risk management and become the basis for decision making in accordance with their duties and responsibilities.
4. Committed to developing the competence of risk management human resources, providing a risk management budget, as well as providing information technology support for adequate risk management and making a risk-aware culture part of the Company's culture.
5. Evaluate the Integrated Risk Management Implementation of Pupuk Indonesia Group periodically.

Effective and efficient implementation of Risk Management is carried out on an ongoing basis in every function and hierarchy within the Company. In each stage of implementation, the Company identifies and analyzes all risks that may interfere with the achievement of the Company's Goals. Each identified risk is categorized based on the risk taxonomy applicable in the Company and implemented effectively with the support of the Risk Management information system.

For each fiscal year, the Company determines the Consolidated Main Risks based on the pareto of the main contributors in terms of value, investment, cost, and contingency. In an effort to ensure that all Major Risks can be controlled, the Company conducts periodic monitoring and evaluation of risk levels.

COMPANY RISK PROFILE 2022

Since the beginning of 2022, the Company has identified 12 (twelve) Consolidated RTMs that need to be managed and monitored on a monthly basis, so that it can be believed that the level of risk is at a reasonable and acceptable level for the Company.

The results of the management of 12 (twelve) Consolidated RTMs until the end of 2022 are as follows:

No	Uraian Risiko | Risk Description	
1	**Nama Risiko:** Pelanggan Memilih Produk Kompetitor dibanding Produk PI Group (RTM-01) **Tingkat Risiko Awal Tahun 2022:** 20 (High) **Tingkat Risiko TW IV 2022:** 9 (Medium) Dampak Risiko: - *Brand awareness* turun - Konsumen diambil alih oleh pesaing - Motivasi tenaga pemasar turun - Peningkatan biaya pengelolaan stok Realisasi Perlakuan Risiko: 1. Melakukan kajian penjualan harga pasar jika harga pasar lebih rendah daripada COGS untuk memutuskan melakukan penjualan atau menahan stok di gudang. 2. Melakukan penghematan biaya bahan baku DAP dan KCl melalui kontrak jangka panjang. 3. Efisiensi konsumsi bahan baku produksi untuk menurunkan COGM sehingga produk lebih kompetitif. 4. Melaksanakan optimalisasi gudang pupuk. 5. Melakukan Implementasi *Single Branding* NPK & Urea. 6. Melakukan Implementasi *Key Account Management* (KAM) dan *technical sales team* bagi *large estate*. 7. Melaksanakan Implementasi MAKMUR. 8. Melakukan *partnership* dengan distributor dan *retailer* serta memberikan *benefit* model bagi distributor dan *retailer*. 9. Melakukan kajian penjualan akibat *oversupply* produk guna mencapai laba optimal untuk memutuskan melakukan penjualan atau menahan stok di gudang. 10. Meningkatkan kompetensi menjual Tenaga Pemasar dalam memasarkan produk dan pelayanan pelanggan. 11. Melaksanakan *alignment supply* dan *demand* melalui *Sales & Operation Planning* (S & OP) untuk kondisi *emergency*. 12. Merencanakan dan mengevaluasi penyediaan angkutan untuk penjualan produk komersil. 13. Meningkatkan *reliability* unit produksi untuk menjaga stabilitas ketersediaan stok produk. 14. Memastikan mekanisme dan kebijakan untuk pelaksanaan *trading*. 15. Melaksanakan rapat koordinasi S&OP. 16. Melaksanakan *rollout* aplikasi *Retail Management System* dengan kios yang sudah *full featured*.	**Risk Name:** Customers Choose Competitor Products Over PI Group Products (RTM-01) **Initial Risk Level 2022:** 20 (High) **Risk Level TW IV 2022:** 9 (Medium) Risk Impact: - Brand awareness is down - Consumer takeover by competitors - Marketers' motivation drops - Increased stock management costs Realization of Risk Treatment: 1. Conduct a market price sales review if the market price is lower than COGS to decide whether to sell or hold stock in the warehouse. 2. Save costs on DAP and KCl raw materials through long-term contracts 3. Efficient consumption of production raw materials to reduce COGM so that products are more competitive 4. Optimizing Fertilizer Warehouse 5. Implementation of Single Branding NPK & Urea. 6. Implement Key Account Management (KAM) and technical sales team for large estate. 7. Implementing MAKMUR 8. Partnering with distributors and retailers and providing benefit models for distributors and retailers. 9. Conduct a sales review due to product oversupply to achieve optimal profit to decide whether to sell or hold stock in the warehouse. 10. Improve sales competency of marketers in marketing products and customer service. 11. Implement supply and demand alignment through Sales & Operation Planning (S & OP) for emergency conditions. 12. Plan and evaluate the provision of transportation for commercial product sales 13. Improve the reliability of production units to maintain stable product stock availability. 14. Ensure mechanisms and policies for trading execution. 15. Conduct S&OP coordination meeting 16. Carry out rollout of Retail Management System application with fully featured kiosks
	Heat Map Risiko Pelanggan Memilih Produk Kompetitor Dibanding Produk PI Group:	Heat Map of Customer Risk of Choosing Competitor Products Over PI Group Products:

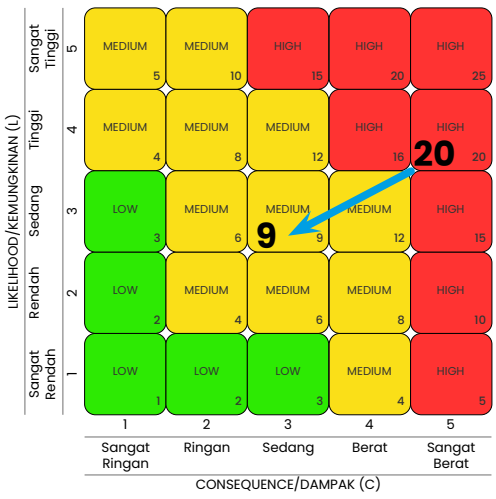

No	Uraian Risiko | Risk Description	
2	**Nama Risiko:** Penyerapan Produk PSO di Bawah Alokasi (RTM-02) **Tingkat Risiko Awal Tahun 2022:** 25 (High) **Tingkat Risiko TW IV 2022:** 16 (High) Dampak Risiko: - Petani mengalami kesulitan dalam proses penebusan pupuk subsidinya sementara pengecer mendapat tambahan dalam hal administrasi penyalurannya. - Tidak optimalnya penjualan pupuk SP-36 dan ZA sesuai alokasi yang tersedia serta terjadinya *deadstock* pupuk SP-36 dan ZA di beberapa wilayah. - Penyediaan stok tidak optimal sesuai ketentuan Permendag. - Tidak optimalnya kinerja penjualan pupuk organik subsidi (granul dan cair). Realisasi Perlakuan Risiko: 1. Melakukan sosialisasi dan pendampingan terkait penyaluran pupuk subsidi kepada pengecer dan petani. 2. Berkoordinasi dengan Kementerian dan *stakeholder* terkait mengupayakan perbaikan kebijakan penyaluran pupuk subsidi. 3. Monitoring kinerja penjualan PSO secara rutin untuk mengoptimalkan serapan PSO 4. Berkoordinasi dengan Kementan dan Dinas untuk mengupayakan perbaikan data e-RDKK menjadi lebih valid. 5. Monitoring kinerja pelayanan sistem atau aplikasi *Retail Management System* (RMS) untuk memastikan sistem penebusan dan pelaporan berjalan maksimal. 6. Monitoring stok pupuk dan kinerja produksi untuk memastikan ketersediaan stok pupuk. 7. Melakukan sosialisasi pemupukan berimbang. 8. Mengupayakan realokasi untuk mengoptimalkan serapan.	**Risk Name**: PSO Product Absorption Below Allocation (RTM- 02) **Initial Risk Level in 2022**: 25 (High) **Risk Level TW IV 2022**: 16 (high) Risk Impact: - Farmers have difficulty in redeeming their subsidized fertilizer while retailers have additional administrative costs. - Not optimal sales of SP-36 and ZA fertilizers according to available allocations and the occurrence of deadstock SP-36 and ZA fertilizers in several regions. - Stock provision is not optimal in accordance with the provisions of the Trade Regulation - Suboptimal sales performance of subsidized organic fertilizer (granule and liquid) Realization of Risk Treatment: 1. Conduct socialization and assistance related to the distribution of subsidized fertilizers to retailers and farmers. 2. Coordinate with the Ministry and relevant stakeholders to improve the subsidized fertilizer distribution policy. 3. Monitoring PSO sales performance regularly to optimize PSO absorption 4. Coordinate with MOA and Dinas to improve e-RDKK data to be more valid. 5. Monitoring the performance of the service system or Retail Management System (RMS) application to ensure the redemption and reporting system is running optimally. 6. Monitoring fertilizer stock and Production performance to ensure fertilizer stock availability 7. Conducting socialization of balanced fertilization 8. Seek reallocation to optimize absorption.
	Heat Map Risiko Tidak Optimalnya Pengembalian dari Investasi Penyertaan:	Heat Map of Risk of Non-optimal Returns from Participation Investments:

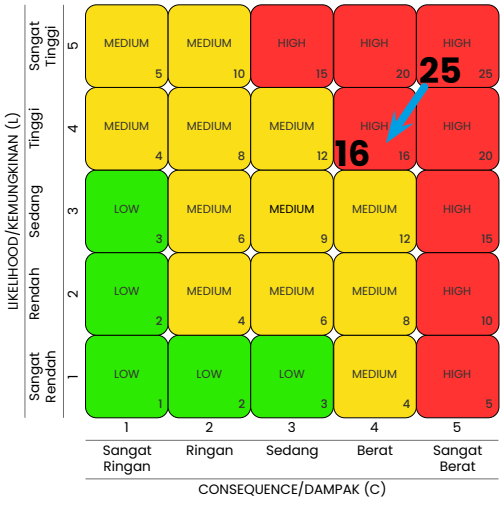

No	Uraian Risiko | Risk Description	
3	**Nama Risiko:** *Downtime* Pabrik Lebih dari Rencana (RTM- 03) **Tingkat Risiko Awal Tahun 2022:** 25 (High) **Tingkat Risiko TW IV 2022:** 25 (High) Dampak Risiko: - Potensi timbulnya pencemaran yang bisa menimbulkan masalah sosial dengan masyarakat sekitar. - Citra perusahaan turun dengan menurunnya tingkat *competitiveness* perusahaan untuk melaksanakan standar terbaik perusahaan dunia. - Potensi kehilangan laba dari ketidaktercapaian produksi urea dan ekses amoniak. - Potensi adanya biaya yang muncul akibat *inefficiency* konsumsi gas Urea. Realisasi Perlakuan Risiko: 1. Menerapkan *Digital Fertilizer* dan analisis data performance pabrik di beberapa pabrik Anak Perusahaan Pupuk. 2. Meningkatkan realibility melalui program maintenance excellence dan sistem manajemen produksi (SIMPRO). 3. Melaksanakan audit perencanaan dan post TA di 5 Anak Perusahaan Pupuk. 4. Menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) terkait boiler batu bara dan STG dan amoniak & urea. 5. Menyelanggarakan kegiatan *sharing troubleshooting* bidang *Rotating, Static & Instrument*. 6. Menyelenggarakan rapat monitoring kondisi peralatan kritis pabrik, investasi rutin 2022, dan tindak lanjut plant audit tahun 2021. 7. Perpanjangan/adendum kontrak gas yang berakhir di tahun 2021. 8. Menyiapkan suplai gas dari lapangan lainnya untuk supplier gas yang mundur jadwal on stream-nya (PIM, PSP, PKG).	**Risk Name:** Factory Downtime Over Plan (RTM-03) **Initial Risk Level in 2022:** 25 (High) **Risk Level TW IV 2022:** 25 (High) Risk Impact: - Potential for pollution that could cause social problems with the surrounding community. - The company's image declines as the company's competitiveness to perform to the world's best standards declines. - Potential profit loss from urea production nonachievement and ammonia excesses - Potential costs incurred due to inefficiency in Urea gas consumption. Realization of Risk Treatment: 1. Implemented Digital Fertilizer and analyzed factory performance data at several Pupuk Subsidiary factories. 2. Improving reliability through maintenance excellence program and production management system (SIMPRO) 3. Carried out planning and post TA audits in 5 Fertilizer Subsidiaries 4. Organizing Focus Group Discussions (FGDs) related to Coal and STG Boilers and Ammonia & Urea 5. Organizing sharing troubleshooting activities in the field of Rotating, Static & Instrument 6. Organized plant critical equipment condition monitoring meeting, routine investment 2022, and plant audit follow-up 2021 7. Extension/addendum of gas contracts that expire in 2021 8. Prepare gas supply from other fields for gas suppliers with delayed on stream schedule (PIM, PSP, PKG)

Heat Map Risiko *Downtime* Pabrik Amoniak dan Urea

Heat Map of Ammonia and Urea Plant Downtime Risk

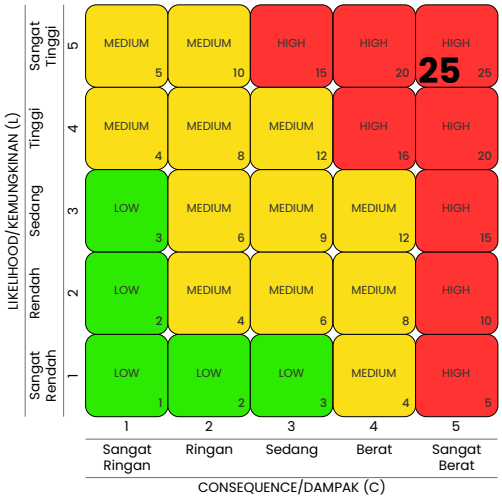

No	Uraian Risiko | Risk Description	
4	**Nama Risiko:** Keterlambatan Progres Pelaksanaan Proyek Pengembangan (RTM-04) **Tingkat Risiko Awal Tahun 2022:** 20 (High) **Tingkat Risiko TW IV 2022:** 25 (High) Dampak Risiko: - KPI Manajemen tidak tercapai - Reputasi Perusahaan tercoreng. Realisasi Perlakuan Risiko: 1. Memastikan kelayakan kajian serta skema proyek yang akan dijalankan. 2. Melakukan Rapat Koordinasi/Monitoring Progres Proyek Bulanan antara PI dengan Anper/Tim Proyek untuk memastikan progres proyek berjalan sesuai target. 3. Melakukan high level meeting antara Manajemen PI dengan Manajemen Anper bersama dengan Manajemen Kontraktor EPC untuk memastikan EPC kontraktor melaksanakan komitmennya. 4. Menyusun scope of work yang detail dan jelas pada kontrak.	Risk Name: Delay in Implementation Progress of Development Project (RTM-04) **Initial Risk Level 2022:** 20 (High) **Risk Level TW IV 2022:** 25 (High) Risk Impact: - Management KPI not achieved - Company reputation tarnished Realization of Risk Treatment: 1. Ensure the feasibility of the study and project scheme to be carried out 2. Conduct Monthly Project Progress Coordination/ Monitoring Meetings between PI and Anper/Project Team to ensure project progress is on target. 3. Conduct High level Meeting between PI Management and Anper Management along with EPC Contractor Management to ensure EPC contractors fulfill their commitments. 4. Develop a detailed and clear scope of work in the contract
	Heat Map Risiko Keterlambatan Progres Pelaksanaan Proyek Pengembangan:	Heat Map of Risk of Delay in Implementation Progress of Development Projects

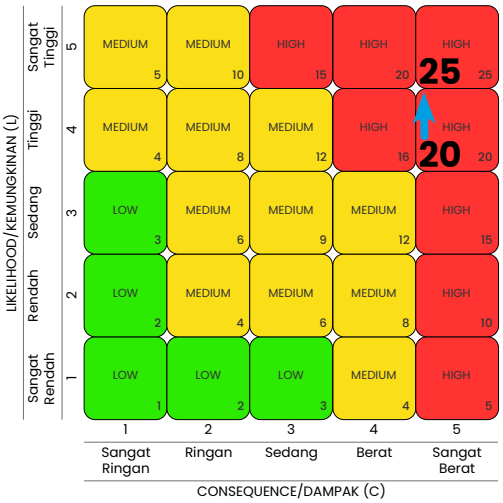

No	Uraian Risiko | Risk Description	
5	**Nama Risiko:** Progres Dari Realisasi Investasi Penyertaan di Bawah Target (RTM-05) **Tingkat Risiko Awal Tahun 2022:** 20 (High) **Tingkat Risiko TW IV 2022:** 25 (High) Dampak Risiko: Target investasi PI Group tidak tercapai. Realisasi Perlakuan Risiko: 1. Menyiapkan kajian penyertaan secara komprehensif dan menunjuk konsultan independen yang handal (Pengalihan Saham Rekind). 2. Monitoring proses negosiasi dan komunikasi secara intensif antara Anak Perusahaan dengan calon mitra untuk mendorong terealisasinya rencana investasi penyertaan(Setoran Modal PILOG) 3. Monitoring pelaksanaan perencanaan kinerja investasi Anak Perusahaan secara intensif a. Pengalihan Saham Rekind (Total Rp 442 miliar) • Akusisi RDM oleh PIU • Akusiisi Tracon oleh PKT dan PKC • Akuisi PIU-Puspetindo-RE • Akuisisi Saham PTPN-13 di Kalianusa oleh PKT • Akuisisi Saham PTPN 4-5 di PAN oleh PKT b. Pembahasan kinerja investasi pada Rapat Kinerja Anak Perusahaan setiap bulan sehingga menjadi perhatian top manajemen PI dan Anak Perusahaan c. Melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk mencegah keterlambatan proyek.	**Risk Name:** Progress of Participation Investment Realization Below Target (RTM-05) **Initial Risk Level 2022:** 20 (High) **Risk Level TW IV 2022:** 25 (High) Risk Impact: PI Group's investment target was not achieved. Realization of Risk Treatment: 1. Prepare a comprehensive inclusion study and appoint a reliable independent consultant (Rekind Share Transfer) 2. Monitoring the negotiation process and intensive communication between the Subsidiary and prospective partners to encourage the realization of the investment plan (PILOG Capital Deposit) 3. Monitoring the implementation of the Subsidiary's investment performance planning intensively a. Rekind Share Transfer (Total IDR 442 billion) • Acquisition of RDM by PIU • Tracon Acquisition by CCP and PKC • PIU-Puspetindo-RE Acquisition • Acquisition of PTPN-13 Shares in Kalianusa by PKT • Acquisition of PTPN 4-5 Shares in PAN by PKT b. Discussion of investment performance at the Subsidiary Performance Meeting every month so that it becomes the attention of the top management of PI and Subsidiaries c. Make necessary efforts to prevent project delays
	Heat Map Risiko Progres dari Realisasi Investasi Penyertaan di Bawah Target:	Heat Map of Risk Progression of Participation Investment Realization below Target:

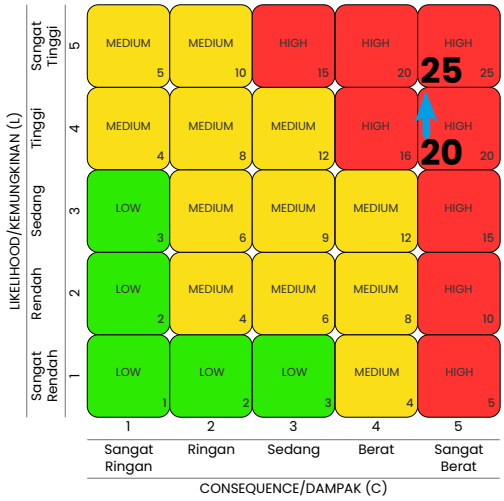

No	Uraian Risiko | Risk Description	
6	**Nama Risiko:** Kegiatan Usaha PT Rekayasa Industri Terganggu/Terhenti (*Going Concern*) (RTM-06) **Tingkat Risiko Awal Tahun 2022:** 25 (High) **Tingkat Risiko TW IV 2022:** 25 (High) Dampak Risiko: - Terkena LD Delay yang menyebabkan penalti dengan nilai yang cukup signifikan sehingga dapat menambah rugi bersih Rekind. - Rugi pada *Project* karena perhitungan proposal yang bias dari realisasi. - Operasional Rekind terganggu. - Rekind tidak memiliki potensi untuk mendapatkan *project* ke depan karena ekuitas negatif. - Rekind memiliki tingkat *leveraging* yang tinggi dengan perbankan. - Rekind dapat diturunkan menjadi Kolektibilitas 5 sehingga tidak mendapatkan fasilitas kembali oleh perbankan. - Penambahan beban dan denda perpajakan yang sangat material. Realisasi Perlakuan Risiko: 1. Meminta *strategic partner* dan subkon untuk penyelesaian *project* dengan pendanaan sendiri hingga *milestone project* tercapai . 2. Rekind akan menyelesaikan *project internal* PI Group, karena *negative equity* Rekind sehingga tidak dapat mempropose *project* ke depan. 3. Menjaga kinerja proyek supaya tepat waktu untuk menghindari kerugian yang akan meningkatkan ekuitas negatif. 4. Menjaga operasional *project* agar tidak terkena LD Delay. 5. Renegosiasi dengan pihak perbankan untuk perpanjangan dan/atau restrukturisasi pinjaman Rekind. 6. Memperpanjang jatuh tempo pinjaman, atau mengusulkan alternatif pendanaan lainnya. 7. Medivestasikan anak perusahaan Rekind yang memiliki nilai jual yang masih baik, seperti Rekind Daya Mamuju (RDM) dan Anper lainnya. 8. Monetisasi aset seperti menjual Menara Kadin dan aset non produktif lainnya. 9. Menyusun rencana restrukturisasi Rekind secara komprehensif bersama Konsultan.	**Risk Name:** Business Activities of PT Rekayasa Industri Disrupted / Stopped (Going Concern) (RTM- 06) **Initial Risk Level in 2022:** 25 (High) **Risk Level TW IV 2022:** 25 (High) Risk Impact: - Exposed to LD Delay which causes a penalty with a significant value so that it can increase Rekind's net loss - Loss on Project due to biased proposal calculation from realization - Rekind operations disrupted - Rekind has no potential to get future projects due to negative equity. - Rekind has a high degree of leveraging with banks - Rekind can be downgraded to Collectability 5 so that it does not get facilities again by banks - Very material addition of taxation charges and penalties Realization of Risk Treatment: 1. Soliciting strategic partners and subcontractors for self-funded project completion until project milestones are achieved. 2. Rekind will complete PI Group's internal projects, due to Rekind's negative equity so it cannot propose future projects. 3. Maintain on-time project performance to avoid losses that will increase negative equity 4. Maintain project operations to avoid LD Delay 5. Renegotiation with Banks for the extension and/or restructuring of Rekind's loans. 6. Extend the maturity of the loan, or propose other funding alternatives; 7. Invest in Rekind's subsidiaries that have good selling points, such as Rekind Daya Mamuju (RDM) and Anper. 8. Asset monetization such as selling Kadin Tower and other non-productive assets 9. Develop a comprehensive Rekind restructuring plan with the Consultant
	Heat Map Risiko Kegiatan Usaha PT Rekayasa Industri Terganggu/Terhenti (*Going Concern*):	Heat Map of the Risk of PT Rekayasa Industri's Business Activities being Disrupted/Stopped (Going Concern):

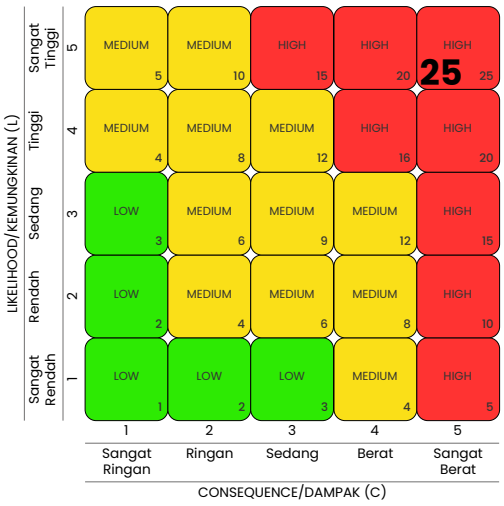

No	Uraian Risiko | Risk Description	
7	**Nama Risiko:** Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah (RTM-07) **Tingkat Risiko Awal Tahun 2022:** 25 (High) **Tingkat Risiko TW IV 2022:** 3 (High) Dampak Risiko: - Potensi rugi selisih kurs - Beban lain-lain dan beban keuangan meningkat Realisasi Perlakuan Risiko: 1. Mengimplementasi Pedoman *Hedging*: a. Meminta laporan Hedging Anak Perusahaan selama 1 tahun ke depan beserta proyeksi tahun 2022 di awal tahun 2022. b. Mengkompilasi dan menyesuaikan *hedging* Anak Perusahaan sehingga terkonsolidasi. 2. Meningkatkan koordinasi di PI Group untuk pelaksanaan *hedging*: a. Meminta laporan pendapatan dan pengeluaran valas anak perusahaan selama 1 tahun ke depan beserta proyeksi tahun 2022 di awal tahun 2022. b. Mengkompilasi dan menyesuaikan pendapatan dan penegeluaran valas anak perusahaan sehingga terkonsolidasi . 3. Mengadakan *training* dan *workshop* fasilitas *hedging*: PI Mengikuti *workshop valas*, baik dari Bank Indonesia maupun Instansi lainnya (hal ini bertujuan untuk mencari alternatif lain untuk Anak Perusahaan yang tidak bisa atau tidak mampu untuk melakukan *hedging*).	**Risk Name:** Fluctuation of Rupiah Exchange Rate (RTM-07) **Initial Risk Level in 2022:** 25 (High) **Risk Level TW IV 2022:** 3 (High) Risk Impact: - Potential foreign exchange loss - Other Expenses and Financial Expenses Increased Realization of Risk Treatment: 1. Implementing Hedging Guidelines: a. Request for the Subsidiary's Hedging report for the next 1 year along with projections for 2022 at the beginning of 2022. b. Compile and adjust hedging subsidiaries so that they are consolidated. 2. Improve coordination within PI Group for hedging implementation a. Request a report on the subsidiary's FX income and expenses for the next 1 year along with projections for 2022 at the beginning of 2022. b. Compile and adjust subsidiaries' FX income and expenses so that they are consolidated 3. Organized training and workshops on hedging facilities: PI Participate in Forex Workshops, both from Bank Indonesia and other agencies (this aims to find other alternatives for subsidiaries that cannot or are unable to hedge).
	Heat Map Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah:	Heat Map of Rupiah Exchange Rate Fluctuation Risk:

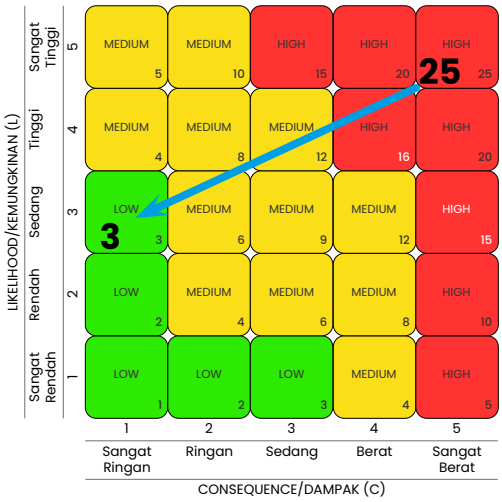

No	Uraian Risiko | Risk Description	
8	**Nama Risiko:** Menurunnya Kualitas Piutang Usaha (RTM-08) **Tingkat Risiko Awal Tahun 2022:** 16 (High) **Tingkat Risiko TW IV 2022:** 9 (High) Dampak Risiko: - Kinerja Direksi berdasarkan Kontrak Manajemen. - KPI korporat untuk perspektif keuangan dan pasar dinilai buruk. Realisasi Perlakuan Risiko: 1. Melakukan koordinasi dengan tim Manajemen Piutang anggota *holding*. Melakukan koordinasi dengan Anak Perusahaan atas *monitoring* piutang yang telah jatuh tempo, tindak lanjut yang telah dilakukan, dan estimasi pemulihan *impairment* piutang yang akan diperoleh. 2. Menetapkan pedoman pengendalian piutang dengan menerapkan beberapa strategi penjualan kredit. *Monitoring* harmonisasi prosedur pengelolaan piutang & standardisasi proses penagihan di Anak Perusahaan. Menerapkan mekanisme proses *profile customer* sebagai masukan dalam pengambilan keputusan pelaksanaan penjualan. 3. Menjalankan *cash management* yang ketat dan efektif. Pembuatan sistem AR Management Sistem telah selesai 100% dan telah dilakukan Go Live di awal bulan Desember 2022. Sistem ini diharapkan dapat membantu *monitoring progress* pembayaran piutang dan proses *rating customer* sebagai masukan dalam pengambilan keputusan. 4. Menjaga dan memonitor rasio-rasio likuiditas perusahaan secara berkala. Memerhatikan *cash conversion cycle* antara jangka waktu pembayaran vendor dengan penerimaan dari *customer*.	**Risk Name:** Declining Quality of Accounts Receivable (RTM- 08) **Initial Risk Level in 2022:** 16 (High) **Risk Level TW IV 2022:** 9 (High) Risk Impact: - Performance of Directors based on Management Contract - Corporate KPIs for financial and market perspectives rated as poor Realization of Risk Treatment: 1. Coordinate with Receivables Management team of holding members Coordinate with Subsidiaries on monitoring of overdue receivables, follow-up actions taken, and estimated impairment recovery of receivables to be obtained. 2. Establish receivables control guidelines by implementing several credit sales strategies. Monitoring harmonization of receivables management procedures & standardization of collection processes in subsidiaries. Implemented customer profile process mechanism as an input in sales execution decision making. 3. Maintain strict and effective cash management. The creation of the AR Management System has been completed 100% and Go Live has been carried out in early December 2022. This system is expected to help monitor the progress of receivable payments and the customer rating process as input in decision making. 4. Maintain and monitor the company's liquidity ratios on a regular basis. Pay attention to the cash conversion cycle between the vendor payment period and the receipt from the customer.
	Heat Map Risiko Menurunnya Kualitas Piutang Usaha:	Heat Map of Risk of Declining Accounts Receivable Quality:

No	Uraian Risiko | Risk Description	
9	**Nama Risiko:** Kondisi Likuiditas (Arus Kas) Perusahaan Memburuk (RTM-09) **Tingkat Risiko Awal Tahun 2022:** 15 (High) **Tingkat Risiko TW IV 2022:** 4 (High) Dampak Risiko: - Tingkat kesehatan perusahaan berpotensi tidak tercapai - Perusahaan mengalami kesulitan pemenuhan kewajiban dari aktivitas operasional karena menghasilkan Negatif *Cash Flow* - Peningkatan pinjaman dan beban keuangan. Realisasi Perlakuan Risiko: 1. Membuat perencanaan *cash flow* dengan cermat. a. Telah dilakukan perencanaan cashflow pada bulan Desember 2022. b. Mengkompilasi dan menyesuaikan cashflow anak perusahaan sehingga terkonsolidasi. 2. Mengendalikan pengeluaran operasional dan aktivitas investasi. Telah dilakukan *monitoring* terhadap pengeluaran operasional dan aktivitas investasi. 3. *Monitoring* kinerja anak perusahaan, melakukan mitigasi awal sehingga dapat meminimalkan ekuitas negatif anak perusahaan. a. Membuat dan memonitor statistik rasio keuangan anak perusahaan (likuiditas dan solvabilitas). b. Melakukan *monitoring* kinerja anak perusahaan melalui pemenuhan rasio keuangan secara bulanan. c. Mendapatkan *feedback* dari anak perisahaan terkait kondisi kinerja anak perusahaan. 4. *Monitoring* kebutuhan modal kerja perusahaan untuk memastikan: a. Menerima laporan pinjaman anak perusahaan. b. Mengkompilasi pinjaman anak perusahaan dan melakukan evaluasi. 5. Menyelaraskan rencana pendanaan investasi perusahaan ke depan dengan kesehatan perusahaan. Telah dilakukan koordinasi dengan Anak Perusahaan yang akan melakukan investasi, serta *review* perencanaan pendanaan dan kondisi keuangan Anak Perusahaan. 6. *Monitoring* tingkat suku bunga pinjaman dan mencari alternatif skema pendanaan dengan tingkat suku bunga *fix*. a. Menerima laporan tingkat suku bunga pinjaman. b. Berkoordinasi/negosiasi dengan perbankan. c. Koordinasi internal terkait alternatif pendanaan.	**Risk Name:** Company Liquidity (Cash Flow) Condition Deteriorates (RTM-09) **Initial Risk Level in 2022:** 15 (High) **Risk Level TW IV 2022:** 4 (High) Risk Impact: - Company health level potentially not achieved - The company has difficulty fulfilling obligations from operating activities because it generates Negative Cash Flow - Increase in borrowings and finance charges. Realization of Risk Treatment: 1. Make careful cash flow planning. a. Cashflow planning has been carried out in December 2022, b. Compile and adjust cash flows of subsidiaries so that they are consolidated 2. Controlling operating expenses and investment activities. Monitoring of operational expenditures and investment activities has been conducted. 3. Monitoring the performance of subsidiaries, conducting early mitigation so as to minimize the negative equity of subsidiaries. a. Generate and monitor subsidiary financial ratio statistics (liquidity and solvency) b. Monitoring the performance of subsidiaries through the fulfillment of financial ratios on a monthly basis. c. Obtain feedback from subsidiaries regarding the performance conditions of subsidiaries 4. Monitoring the company's working capital requirements to ensure a. Receive subsidiary loan report b. Compile subsidiary loans and conduct evaluations 5. Align the company's future investment funding plan with the company's Health. Coordination has been carried out with subsidiaries that will make investments, as well as a review of funding plans and financial conditions of subsidiaries 6. Monitoring loan interest rates and seeking alternative funding schemes with fixed interest rates. a. Receive loan interest rate report b. Coordinate/negotiate with banks c. Internal coordination regarding funding alternatives
	Heat Map Risiko Kondisi Likuiditas (Arus Kas) Perusahaan Memburuk:	Heat Map Risk of Company's Liquidity Condition (Cash Flow) Worsening:

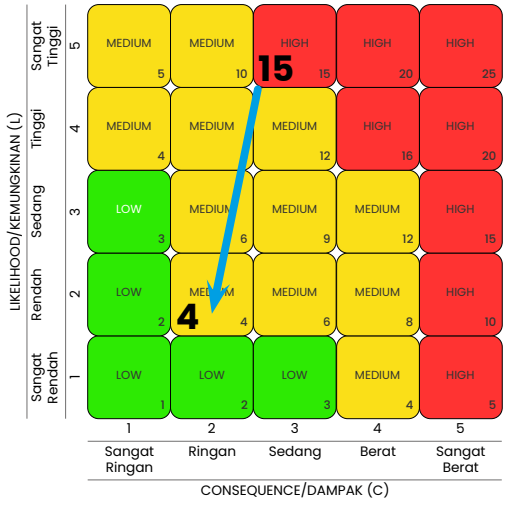

No	Uraian Risiko | Risk Description	
10	**Nama Risiko:** Potensi Kalah Banding Kasus PT Rekayasa Industri atas Kurang Bayar Pajak (RTM-10) **Tingkat Risiko Awal Tahun 2022:** 25 (High) **Tingkat Risiko TW IV 2022:** 2 (Low) Dampak Risiko: *Corporate Credit* Rating Rekind akan menurun sehingga mengakibatkan Rekind akan mengalami kesulitan untuk mencari pendanaan Jangka Pendek maupun Jangka Panjang. Realisasi Perlakuan Risiko: 1. Memastikan Rekind melakukan Pembuktian Dokumen Pembayaran dan Pembuktian Jurnal secara Formil dan Materiil. 2. Memastikan Rekind melakukan upaya litigasi maksimal hingga proses Peninjauan Kembali. 3. Memastikan bahwa Rekind melakukan penguatan sistem di *Document Control* dan *tax planning* korporasi secara berkelanjutan. 4. Memastikan Rekind mengalokasikan *manpower Tax Officer* di Proyek Rekind untuk meminimalisir *exposure* dampak pemeriksaan pajak. 5. Memastikan Rekind mengajukan memori Peninjauan Kembali untuk kasus sengketa PPh Final tahun 2015.	**Risk Name:** Potential Losing Appeal Case of PT Rekayasa Industri for Tax Underpayment (RTM-10) **Initial Risk Level in 2022:** 25 (High) **Risk Level TW IV 2022:** 2 (Low) Risk Impact: Rekind's Corporate Credit Rating will decrease, resulting in Rekind will experience difficulties in finding short-term and long-term funding. Realization of Risk Treatment: 1. Ensure Rekind conducts Proof of Payment Documents and Proof of Journal Formally and Materially. 2. Ensure Rekind conducts maximum litigation efforts until the Judicial Review process. 3. Ensure that Rekind strengthens the system in Document Control and corporate tax planning on an ongoing basis. 4. Ensure Rekind allocates Tax Officer manpower in Rekind Projects to minimize exposure to the impact of tax audits. 5. Ensure Rekind submits a memory of the Judicial Review for the 2015 Final Income Tax dispute case.
	Heat Map Risiko Potensi Kalah Banding Kasus PT Rekayasa Industri atas Kurang Bayar Pajak:	Heat Map of Potential Risk of Losing Appeal of PT Rekayasa Industri Case on Tax Underpayment:

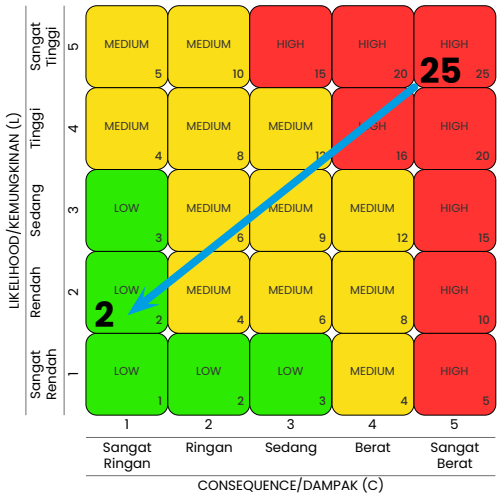

No	Uraian Risiko | Risk Description	
11	**Nama Risiko:** Terjadi Kecelakaan Kerja (Fatality) (RTM-11) **Tingkat Risiko Awal Tahun 2022:** 10 (High) **Tingkat Risiko TW IV 2022:** 2 (Low) Dampak Risiko: - Terjadinya kecelakaan yang menyebabkan kematian/ cedera pada pekerja. - Sanksi dari Pemerintah akibat tidak terpenuhinya peraturan pemerintah yang mengakibatkan kecelakaan dan cedera pada pekerja. - Terjadinya kejadian katastropis yang menyebabkan turunnya reputasi perusahaan - Biaya-biaya yang diakibatkan oleh kejadian kecelakaan. Realisasi Perlakuan Risiko: 1. *Monitoring* pelaksanaan *Life Saving Rules.* *Monitoring* pelaksanaan *life saving rules.* 2. Meningkatkan budaya keselamatan kerja a. *Monitoring* pelaksanaan PSM. b. *Monitoring* pelaporan data kinerja pengelolaan K3 secara berkala. c. Mengimbau Anak Perusahaan agar meningkatkan tindak lanjut kondisi dan tindakan tidak aman yang terjadi di area kerja.	**Risk Name:** Fatality (RTM-11) **Initial Risk Level in 2022**: 10 (High) **Risk Level TW IV 2022**: 2 (Low) Risk Impact: - The occurrence of accidents that cause death/injury to workers. - Sanctions from the Government due to non-fulfillment of government regulations resulting in accidents and injuries to workers - The occurrence of a catastrophic event that causes a decline in the company's reputation - Costs resulting from the occurrence of an accident. Realization of Risk Treatment: 1. Monitoring the implementation of Life Saving Rules Monitoring the implementation of life saving rules 2. Improving safety culture a. Monitoring the implementation of PSM. b. Monitoring of OHS management performance data reporting on a regular basis. c. Encourage subsidiaries to improve follow-up of unsafe conditions and actions that occur in the work area.
	Heat Map Risiko Terjadinya Kecelakaan Kerja (*Fatality*)	Heat Map of the Risk of Occupational Accidents (Fatality)

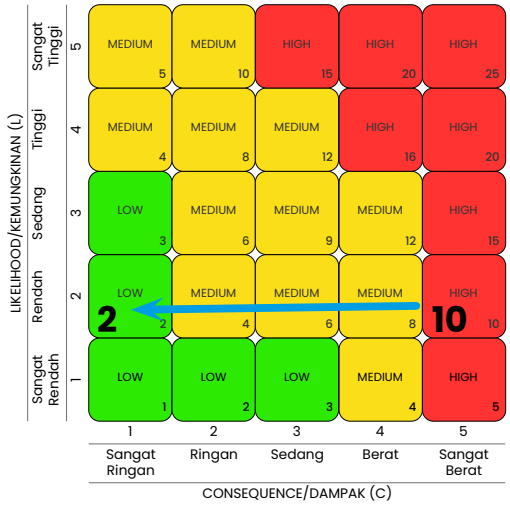

No	Uraian Risiko | Risk Description
12	**Nama Risiko:** Terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup (RTM-12) **Tingkat Risiko Awal Tahun 2022:** 10 (High) **Tingkat Risiko TW IV 2022:** 2 (Low) Dampak Risiko: - Sanksi Administratif sesuai PP 22/2021 pasal 508. - Reputasi perusahaan turun. - Tidak tercapai target PROPER. - Terdapat pencemaran lingkungan ke area masyarakat dengan korban masyarakat, kerusakan flora dan fauna. Realisasi Perlakuan Risiko: 1. Koordinasi dengan Unit Produksi PI/Anper dan LH Anper. Laporan Pemantauan Lingkungan sampai dengan bulan Desember 2022 telah disampaikan oleh Anak Perusahaan Pupuk dan PIU. 2. Pemantauan data kinerja pengelolaan lingkungan Implementasi ISO 3. Laporan Pemantauan pemenuhan baku mutu dan ketentuan teknis pengelolaan limbah telah disampaikan oleh Anper Pupuk dengan pemenuhan Baku Mutu sebesar 100%. 4. FGD/evaluasi bersama PI Group. a. Telah dilaksanakan penilaian Proper dengan hasil PG, PKC, PKT dan PSP mendapatkan Proper Emas dan PIM mendapatkan Proper Hijau. b. Evaluasi perizinan PIU bersama KLHK. Sesuai arahan dari Direktorat PPA, PPU, PLB3 dan PDLUK KLHK bahwa PIU membutuhkan Pertek pembuangan air limbah, pembuangan emisi tanpa Pertek, TPS LB3 membutuhkan Rintek, melakukan registrasi awal untuk Persetujuan Lingkungan paralel dengan pengurusan dokumen pendukung. c. Melaksanakan koordinasi penyesuaian *Passing Grade* dan Progres Persiapan Penilaian PROPER 2021-2022 Anper Pupuk dan PIU pada tanggal 3,7, dan 27 Juni 2022.	**Risk Name:** Occurrence of Environmental Pollution (RTM-12) **Initial Risk Level in 2022**: 10 (High) **Risk Level TW IV 2022:** 2 (Low) Risk Impact: - Administrative Sanctions in accordance with PP 22/2021 article 508 - Company reputation goes down - PROPER target not achieved - There is environmental pollution to community areas with community casualties, damage to flora and fauna Realization of Risk Treatment: 1. Coordination with PI/Anper Production Unit and LH Anper. The Environmental Monitoring Report until December 2022 has been submitted by the Fertilizer Subsidiary and PIU. 2. Monitoring of environmental management performance data ISO Implementation 3. Monitoring report on compliance with quality standards and technical provisions for waste management has been submitted by Anper Pupuk with 100% compliance with quality standards. 4. FGD/evaluation with PI Group a. Proper assessment has been carried out with the results of PG, PKC, PKT and PSP obtaining Gold Proper and PIM obtaining Green Proper. b. PIU license evaluation with KLHK. In accordance with the direction from the Directorate of PPA, PPU, PLB3 and PDLUK KLHK that PIU requires Pertek for wastewater disposal, emission disposal without Pertek, LB3 TPS requires Rintek, make initial registration for Environmental Approval in parallel with the management of supporting documents. c. Coordinate the adjustment of Passing Grade and Progress of PROPER 2021-2022 Assessment Preparation between Anper Pupuk and PIU on June 3, 7, and 27, 2022.
	Heat Map Risiko Terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup:	Heat Map of Risks of Environmental Pollution:

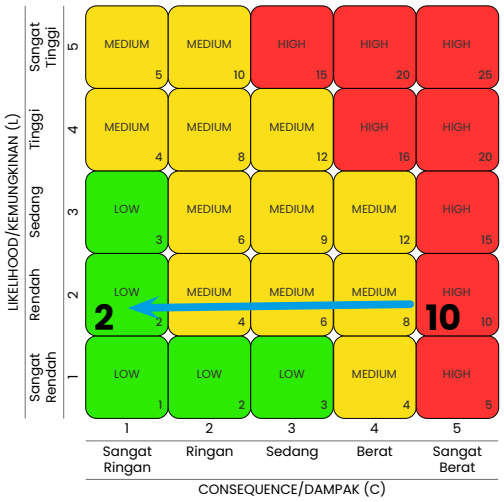

EVALUASI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2022

Untuk memastikan bahwa penerapan manajemen risiko telah efektif dijalankan dan mendukung pencapaian sasaran Perseroan, maka Perseroan melakukan Penilaian Tingkat Maturitas Penerapan Manajemen Risiko (PMPMR) setiap tahun. Pelaksanaan PMPMR ini merupakan evaluasi atas penerapan Manajemen Risiko dalam rangka memberikan perbaikan terhadap sistem manajemen risiko di PI Group, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mendapatkan gambaran penerapan Sistem Manajemen Risiko Terintegrasi (MRT) di Perusahaan saat ini;
2. Menetapkan tingkat maturitas (*maturity level*) penerapan manajemen risiko di lingkungan Pupuk Indonesia Group
3. Mengetahui kesenjangan (*gap*) antara penerapan manajemen risiko di lingkungan PI Group dengan SNI ISO 31000:2018 dan mendapatkan masukan (*feedback*) dalam rangka peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko.

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan PMPMR, mencakup pengumpulan data primer melalui penyebaran kuesioner dan wawancara, serta pengumpulan data sekunder melalui kajian dokumen.

Adapun tingkatan Indeks Maturitas yang berlaku di Perseroan dibagi menjadi 6 level dengan rincian:

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM IN 2022

To ensure that the implementation of risk management has been effectively implemented and supports the achievement of the Company's goals, the Company conducts a Risk Management Implementation Maturity Level Assessment (PMPMR) every year. The implementation of PMPMR is an evaluation of the implementation of Risk Management in order to provide improvements to the risk management system in PI Group, with the following objectives:

1. Get an overview of the current implementation of the Integrated Risk Management System in the Company;
2. Determining the maturity level of risk management implementation within Pupuk Indonesia Group.
3. Knowing the gap between the implementation of risk management in the PI Group environment and SNI ISO 31000: 2018 and getting feedback in order to improve the quality of risk management implementation.

The methodology used in the implementation of PMPMR includes primary data collection through questionnaires and interviews, and secondary data collection through document review.

The Maturity Index levels applicable in the Company are divided into 6 levels with details:

Kategori Maturitas Maturity Category	**Indeks Maturitas** Maturity Index
Basic-Non-Existent	1,00-1,59
Basic-Initial	1,60-2,09
Mature-Repeatable	2,10-2,59
Mature-Defined	2,60-3,09
Advance-Managed	3,10-3,59
Advance-Optimized	3,60-4,00

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAU KOMITE AUDIT ATAS KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

Pernyataan Manajemen atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko Perusahaan

Sebagai bentuk komitmen Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) dalam menerapkan Sistem Manajemen Risiko Terintegrasi (MRT) yang sistemasis, terstruktur, dan

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS OR AUDIT COMMITTEE ON THE ADEQUACY OF THE COMPANY'S RISK MANAGEMENT SYSTEM

Management Statement on the Adequacy of the Company's Risk Management System

As a form of commitment of the Board of Directors of PT Pupuk Indonesia (Persero) in implementing a systematic, structured and sustainable Integrated Risk

berkelanjutan guna menjamin pencapaian Sasaran Perusahan, PT Pupuk Indonesia (Persero) melakukan evaluasi atas penerapan Sistem MRT melalui pelaksanaan Penilaian Tingkat Maturitas Penerapan Manajemen Risiko (PMPMR) setiap tahun.

Hasil evaluasi tahunan yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa Penerapan Sistem MRT di Pupuk Indonesia (Persero) selama tahun 2022 telah memadai.

PENILAIAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

Pelaksanaan Penilaian Tingkat Maturitas Penerapan Manajemen Risiko PI Group dilakukan oleh Tim Asesor dari PT BDO Indonesia. Penilaian dilaksanakan mulai tanggal 27 Desember 2021 dan dilaksanakan selama 90 hari kalender.

Metode Penilaian Maturitas atas Penerapan Manajemen Risiko (PMPMR) dilakukan untuk periode 2022 melalui 2 (dua) pengujian yaitu metode evaluasi dokumen dan wawancara berdasarkan arsitektur pada ISO 31000:2018. Adapun 3 (tiga) elemen yang digunakan untuk melakukan evaluasi dokumen dan wawancara yaitu elemen Prinsip terdiri dari 9 (sembilan) indikator, elemen Kerangka Kerja (*Framework*) terdiri dari 7 (tujuh) indikator dan elemen Proses terdiri dari 7 (tujuh) indikator. Hasil Indeks Maturitas PMPMR 2022 PT Pupuk Indonesia (Persero) yaitu 3,36 dengan menggunakan skala 4 (empat) masuk dalam kategori *Mature-Defined*.

Penilaian atas penerapan sistem manajemen risiko perusahaan, dapat tercermin dari hasil penilaian KPI Kompartemen MR tahun 2022. Adapun beberapa indikator penilaian terkait Manajemen Risiko antara lain:

- Penurunan Tingkat Risiko Utama PI Group.
- Pemenuhan SLA untuk Kajian Risiko Aksi Korporasi.
- Pengembangan Infrastruktur *Business Continuity Management System* (BCMS).
- Peningkatan Pemahaman Manajemen Risiko PI Group.

Atas implementasi sistem manajemen risiko perusahaan sepanjang tahun 2022, diperoleh hasil seluruh indikator dalam KPI kompartemen tersebut di atas tercapai di atas >100% dari yang ditargetkan. Hal ini mengindikaskan bahwa Kinerja Fungsi Manajemen Risiko PT Pupuk Indonesia (Persero) tahun 2022 berjalan dengan baik.

Management System (MRT) to ensure the achievement of Company Goals, PT Pupuk Indonesia (Persero) evaluates the implementation of the MRT System through the implementation of the Risk Management Implementation Maturity Level Assessment (PMPMR) every year.

The results of the annual evaluation that has been carried out show that the Implementation of the MRT System at Pupuk Indonesia (Persero) during 2022 is adequate.

ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION OF THE COMPANY'S RISK MANAGEMENT SYSTEM

The PI Group Risk Management Implementation Maturity Level Assessment was carried out by an Assessor Team from PT BDO Indonesia. The assessment was carried out starting December 27, 2021 and was carried out for 90 calendar days.

The Maturity Assessment Method for the Implementation of Risk Management (PMPMR) is carried out for the 2022 period through 2 (two) tests, namely the document evaluation method and interviews based on the architecture in ISO 31000: 2018. There are 3 (three) elements used to evaluate documents and interviews, namely the Principle element consisting of 9 indicators, the Framework element consisting of 7 indicators and the Process element consisting of 7 indicators. The results of the PMPMR 2022 Maturity Index of PT Pupuk Indonesia (Persero) are 3.36 using a scale of 4 (four) in the Mature-Defined category.

Assessment of the implementation of the company's risk management system can be reflected in the results of the MR Compartment KPI assessment in 2022. Some of the assessment indicators related to Risk Management include:

- Decrease in PI Group's Key Risk Levels
- Completion of SLA for Corporate Action Risk Assessment,
- Business Continuity Management System (BCMS) Infrastructure Development
- Improved Understanding of PI Group Risk Management.

For the implementation of the company's risk management system throughout 2022, the results of all indicators in the KPI compartment above were achieved above> 100% of the target. This indicates that the performance of the Risk Management Function of PT Pupuk Indonesia (Persero) in 2022 is going well.

RENCANA SISTEM MANAJEMEN RISIKO KE DEPAN

Guna meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko di perusahaan, dalam kurun waktu tahun 2022-2024, Perusahaan akan melakukan beberapa rencana pengembangan sistem manajemen risiko sebagai berikut:

FUTURE RISK MANAGEMENT SYSTEM PLAN

In order to improve the effectiveness of risk management in the company, in the period 2022-2024, the Company will carry out several risk management system development plans as follows:

2022	1. Mengembangkan dan me-*review* Pedoman dan Prosedur penerapan manajemen risiko. 2. Meningkatkan SDM manajemen risiko Pupuk Indonesia Group yang kompeten melalui pelaksanaan *training*. 3. Melakukan sosialisasi/*workshop* penerapan manajemen risiko secara intensif. 4. Melakukan klinik risiko ke unit kerja setiap triwulan. 5. Menerapkan *Risk based Budgeting* (RBB). 6. Mengembangkan Sistem Deteksi Dini Risiko. 7. Mengembangkan *Business Continuity Management* (BCM). 8. Mengembangkan *Loss Event Management* (LEM). 9. Menyusun RTM berdasarkan sasaran RKAP, yang dilengkapi dengan Batas Toleransi Risiko (BTR) dan *Key Risk Indicator* (KRI). 10. Me-*review* kajian risiko aksi korporasi berbasis teknologi informasi. 11. Melakukan pengukuran tingkat pemahaman *Risk Owner* dan *Risk Officer* terhadap pengelolaan risiko. 12. Memantau tindak lanjut atas rekomendasi penilaian tingkat maturitas penerapan manajemen risiko Pupuk Indonesia Group setiap triwulan. 13. Menyelenggarakan penilaian tingkat maturitas manajemen risiko Pupuk Indonesia Group setiap tahun.	1. Develop and review guidelines and procedures for risk management implementation. 2. Improving Pupuk Indonesia Group's competent risk management human resources through training. 3. Conduct intensive socialization/workshops on risk management implementation 4. Conduct risk clinics to work units on a quarterly basis 5. Implement Risk based Budgeting (RBB) 6. Develop Risk Early Detection System 7. Developing Business Continuity Management (BCM) 8. Developing Loss Event Management (LEM) 9. Prepare RTM based on RKAP targets, equipped with Risk Tolerance Limits (BTR) and Key Risk Indicators (KRI). 10. Reviewing the risk assessment of information technology-based corporate actions 11. Measuring the level of understanding of Risk Owner and Risk Officer on risk management. 12. Monitor the follow-up of recommendations on the maturity level assessment of Pupuk Indonesia Group's risk management implementation on a quarterly basis. 13. Conducting an assessment of Pupuk Indonesia Group's risk management maturity level every year.
2023	1. Mengembangkan dan me-*review* Pedoman dan Prosedur penerapan manajemen risiko. 2. Meningkatkan SDM manajemen risiko Pupuk Indonesia Group yang kompeten melalui pelaksanaan *training*. 3. Melakukan sosialisasi/*workshop* penerapan manajemen risiko secara intensif. 4. Melakukan klinik risiko ke unit kerja setiap triwulan. 5. Menerapkan *Risk based Budgeting* (RBB). 6. Mengembangkan Sistem Deteksi Dini Risiko. 7. Menerapkan *Business Continuity Management* (BCM). 8. Mengembangkan *Loss Event Management* (LEM). 9. Menyusun RTM berdasarkan sasaran RKAP, yang dilengkapi dengan Batas Toleransi Risiko (BTR) dan *Key Risk Indicator* (KRI). 10. Me-*review* kajian risiko aksi korporasi berbasis teknologi informasi. 11. Melakukan pengukuran tingkat pemahaman *Risk Owner* dan *Risk Officer* terhadap pengelolaan risiko. 12. Memantau tindak lanjut atas rekomendasi penilaian tingkat maturitas penerapan manajemen risiko Pupuk Indonesia Group setiap triwulan. 13. Menyelenggarakan penilaian tingkat maturitas manajemen risiko Pupuk Indonesia Group setiap tahun.	1. Develop and review guidelines and procedures for risk management implementation. 2. Improving Pupuk Indonesia Group's competent risk management human resources through training. 3. Conduct intensive socialization/workshops on risk management implementation 4. Conduct risk clinics to work units on a quarterly basis 5. Implement Risk based Budgeting (RBB) 6. Develop Risk Early Detection System 7. Implementing Business Continuity Management (BCM) 8. Developing Loss Event Management (LEM) 9. Prepare RTM based on RKAP targets, equipped with Risk Tolerance Limits (BTR) and Key Risk Indicators (KRI). 10. Reviewing the risk assessment of information technology-based corporate actions 11. Measuring the level of understanding of Risk Owners and Risk Officers on risk management. 12. Monitor the follow-up on recommendations for the maturity level assessment of Pupuk Indonesia Group's risk management implementation on a quarterly basis. 13. Conducting an assessment of Pupuk Indonesia Group's risk management maturity level every year.

2024	1. Mengembangkan dan me-*review* Pedoman dan Prosedur penerapan manajemen risiko. 2. Meningkatkan SDM manajemen risiko Pupuk Indonesia Group yang kompeten melalui pelaksanaan *training.* 3. Melakukan sosialisasi/*workshop* penerapan manajemen risiko secara intensif. 4. Melakukan klinik risiko ke unit kerja setiap triwulan. 5. Menerapkan *Risk based Budgeting* (RBB). 6. Menerapkan Sistem Deteksi Dini Risiko. 7. Menerapkan *Business Continuity Management* (BCM). 8. Menerapkan *Loss Event Management* (LEM). 9. Menyusun RTM berdasarkan sasaran RKAP, yang dilengkapi dengan Batas Toleransi Risiko (BTR) dan *Key Risk Indicator* (KRI). 10. Me-*review* kajian risiko aksi korporasi berbasis teknologi informasi. 11. Melakukan pengukuran tingkat pemahaman *Risk Owner* dan *Risk Officer* terhadap pengelolaan risiko. 12. Memantau tindak lanjut atas rekomendasi penilaian tingkat maturitas penerapan manajemen risiko Pupuk Indonesia Group setiap triwulan. 13. Menyelenggarakan penilaian tingkat maturitas manajemen risiko Pupuk Indonesia Group setiap tahun.	1. Develop and review guidelines and procedures for risk management implementation. 2. Improving Pupuk Indonesia Group's competent risk management human resources through training. 3. Conduct intensive socialization/workshops on risk management implementation 4. Conduct risk clinics to work units on a quarterly basis 5. Implement Risk based Budgeting (RBB) 6. Implement Risk Early Detection System 7. Implementing Business Continuity Management (BCM) 8. Implementing Loss Event Management (LEM) 9. Prepare RTM based on RKAP targets, equipped with Risk Tolerance Limits (BTR) and Key Risk Indicators (KRI). 10. Reviewing the risk assessment of information technology-based corporate actions 11. Measuring the level of understanding of Risk Owner and Risk Officer on risk management. 12. Monitor the follow-up of recommendations for the maturity level assessment of Pupuk Indonesia Group's risk management implementation on a quarterly basis. 13. Conducting an assessment of Pupuk Indonesia Group's risk management maturity level every year.

Kebijakan Kompensasi Jangka Panjang: Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai dan/atau Manajemen Perseroan (MSOP/ESOP)

Long-Term Compensation Policy: Share Ownership Program by Employees and/or Management of the Company (MSOP/ESOP)

Hingga akhir tahun 2022, Perusahaan tidak pernah melaksanakan Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen, atau *Management Stock Option Program* (MSOP), dan Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan, atau *Employees Stock Option Program* (ESOP). Seluruh saham Perusahaan dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Until the end of 2022, the Company has never implemented the Management Stock Option Program (MSOP), and the Employees Stock Option Program (ESOP). All shares of the Company are owned by the Government of the Republic of Indonesia.

Perkara Penting
Legal Matters

Rincian permasalahan hukum yang dihadapi Perusahaan di tahun 2022 atau telah dinyatakan selesai di tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Details of legal issues faced by the Company in 2022 or have been declared completed in 2022 are as follows.

No.	Perusahaan Company	Para Pihak Parties in Litigation	Pokok dan Nilai Perkara Case Principal and Value	Status Perkara Case Status	Upaya Manajemen Management Efforts	Pengaruh/ Risiko terhadap Perusahaan Impact/Risk to the Company
1	PTPI	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2	PKG	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3	PKC	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
4	PKT	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
5	PIM	Sayed Jafar	Gugatan Wanprestasi terkait ingkar janji yang dilakukan Sdr Sayed Jafar	Proses persidangan tingkat I	Akan menjawab Guggatan hukum sesuai fakta dan ketentuan perundangan	Potensi Material Rp 418.000.000
6	PSP	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
7	Rekind	PT Bank Pembangunan Bengkulu	Gugatan kepada PT Bank Pembangunan Bengkulu pada Proyek Donggi	Proses persidangan tingkat I	Menunggu Putusan Majelis Hakim atas Guggatan dimaksud	Rp 1.640.620.480,-
		PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	Pengajuan Banding tingkat II oleh Penggungat terkait kepada PT Rekayasa Industri sebagai Tergugat dan PT Gatramas Internusa sebagai Turut Tergugat	Proses Persidangan Tingkat I, Majelis menyatakan bahwa penggugat dinyatakan tidak terbukti melakukan PMH dan Wanprestasi	Mengajukan memori Banding	Rp18.892.875.933,-
		PT Sahabat Mitra Jaya	Gugatan Wanprestasi terdapat dispute item atas purchase order tersebut. Adapun dengan pembayaran dari PT Rekayasa Industri kepada PT Sahabat Mitra Jaya serta halhal yang bersifat teknis yang belum disepakati bersama oleh kedua belah pihak	Proses persidangan tingkat I	Masih dalam Proses Mediasi	Nilai Gugatan Rp1.642.422.131,-
8	PI Niaga	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
9	PILog	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
10	PIU	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
11	PI Pangan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Sanksi Administrasi oleh Otoritas Terkait

Sepanjang tahun 2022, Perusahaan, Entitas Anak, Dewan Komisaris maupun Direksi tidak ada yang mendapatkan sanksi administrasi.

Administrative sanctions by relevant authorities

Throughout 2022, the Company, Subsidiaries, Board of Commissioners and Directors did not receive any administrative sanctions.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Access to Company Information and Data

Perusahaan senantiasa memberikan kemudahan akses informasi dan data Perusahaan. Penyebaran Informasi kepada seluruh pemangku kepentingan merupakan bagian penting dari implementasi prinsip transparansi Informasi.

The Company always provides easy access to the Company's information and data. Dissemination of information to all stakeholders is an important part of the implementation of the principle of information transparency.

Kebijakan ini mengacu pada Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan, "bahwa Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik", dan sebagai pelaksanaan prinsip GCG.

This policy refers to Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure which states, "that Public Information Disclosure is a means of optimizing public supervision of the administration of the State and other Public Bodies and everything that has an impact on the public interest", and as an implementation of GCG principles.

Perusahaan selalu memberikan informasi yang lengkap, bermanfaat, dan termutakhir terkait pemberian informasi kepada Pemegang Saham dan para Pemangku Kepentingan. Pengungkapan informasi tersebut dilakukan oleh pejabat atau unit kerja sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya yang dalam hal ini adalah Sekretaris Perusahaan.

The Company always provides complete, useful and up-to-date information related to the provision of information to Shareholders and Stakeholders. The disclosure of information is carried out by officials or work units in accordance with their duties, authorities and responsibilities, which in this case is the Corporate Secretary.

Informasi-informasi yang relevan terkait Perusahaan telah disampaikan melalui Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan kepada Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham. Penyampaian Laporan Manajemen Tahunan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris senantiasa tepat waktu, yaitu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Relevant information related to the Company has been submitted through Quarterly and Annual Management Reports to the Board of Commissioners prior to submission to Shareholders. The submission of the Annual Management Report to Shareholders and the Board of Commissioners has always been timely, i.e. in accordance with the stipulated provisions.

Dalam penerapan keterbukaan informasi untuk keperluan internal yang berkaitan dengan perencanaan Perusahaan yang dapat berpengaruh signifikan bagi karyawan berupa Laporan Tahunan, RKAP, RJPP, kebijakan dan prosedur Perusahaan serta informasi terbaru lainnya tentang Perusahaan melalui berbagai media komunikasi seperti Website, Siaran Pers, Portal, Media Cetak, Media Elektronik dan Surat Edaran. Berdasarkan media yang digunakan,

In the implementation of information disclosure for internal purposes related to the Company's planning that can significantly affect employees in the form of Annual Reports, RKAP, RJPP, Company policies and procedures and other latest information about the Company through various communication media such as Websites, Press Releases, Portals, Print Media, Electronic Media and Circular Letters. Based on the media used, information and data

informasi dan data mengenai Perusahaan dapat diperoleh melalui sejumlah saluran komunikasi.

WEBSITE KORPORAT

Website Korporat memiliki peran yang signifikan dalam tata kelola keterbukaan informasi. Pengungkapan dan ketersediaan informasi pada situs web Perusahaan akan memberikan manfaat kepada publik dan pemangku kepentingan yang menampilkan kegiatan operasional dan kinerja Perusahaan. Situs web ini dapat diakses melalui link www. pupuk-indonesia.com.

Melalui situs tersebut para *stakeholder* dapat menemukan banyak konten yang memuat berbagai informasi terkini Perusahaan seperti Profil PTPI, produk dan jasa, pemasaran, CSR & HSE, stok pupuk harian, Berita Terkini dan e-Proc, Tata Kelola Perusahaan termasuk *Annual Report* maupun *Sustainability Report*. Guna meningkatkan kualitas informasi dan berita terkini mengenai Perusahaan yang disampaikan kepada publik, Perusahaan senantiasa memutakhirkan konten secara berkala dan berkelanjutan.

MEDIA DIGITAL "SINTESA"

SINTESA merupakan tabloid digital yang terbit setiap bulan yang digunakan sebagai media komunikasi seluruh karyawan Perusahaan. SINTESA memuat berbagai artikel informatif terkait kegiatan PTPI dalam kurun waktu satu bulan yang bertujuan menyebarkan informasi kepada karyawan mengenai informasi terkait Perusahaan.

Sebagai media internal Perusahaan, SINTESA menjadi wadah dan sarana bagi jajaran manajemen untuk dapat menyosialisasikan program kerja, strategi bisnis yang dijalankan serta target yang harus tercapai oleh Perusahaan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Informasi yang tercantum dalam majalah dikemas dalam bahasa informatif sehingga mudah dipahami oleh seluruh karyawan. SINTESA dibagikan terbatas hanya kepada internal karyawan serta Entitas Anak.

FORUM KOMUNIKASI INTERNAL

Perusahaan menyediakan sarana komunikasi yang menjadi sarana diskusi bagi karyawan dengan manajemen yang secara berkala dilakukan oleh Direksi kepada seluruh karyawan, Direksi kepada jajaran manajemen, serta masing-masing unit kerja baik melalui *family gathering*, rapat kerja, *morning briefings*, dan kegiatan perusahaan lainnya.

MEDIA SOSIAL

Perusahaan mengoptimalkan jejaring sosial/*social media* sebagai sarana komunikasi dua arah antara perusahaan

about the Company can be obtained through a number of communication channels.

CORPORATE WEBSITE

Corporate Website has a significant role in the governance of information disclosure. Disclosure and availability of information on the Company's website will provide benefits to the public and stakeholders who display the Company's operational activities and performance. This website can be accessed through the link www.pupuk-indonesia.com.

Through the site, stakeholders can find a lot of content that contains a variety of the Company's latest information such as PTPI Profile, products and services, marketing, CSR & HSE, daily fertilizer stocks, Latest News and e-Proc, Corporate Governance including Annual Report and Sustainability Report. In order to improve the quality of information and latest news about the Company delivered to the public, the Company always updates the content regularly and continuously.

DIGITAL MEDIA "SINTESA"

SINTESA is a digital tabloid published monthly which is used as a communication medium for all Company employees. SINTESA contains various informative articles related to PTPI activities within one month which aims to disseminate information to employees regarding information related to the Company.

As the Company's internal media, SINTESA is a forum and means for management to be able to socialize work programs, business strategies implemented and targets that must be achieved by the Company in the short, medium and long term. The information contained in the magazine is packaged in informative language so that it is easily understood by all employees. SINTESA is distributed only to internal employees and subsidiaries.

INTERNAL COMMUNICATION FORUM

The Company provides a means of communication that becomes a means of discussion for employees with management which is regularly carried out by the Board of Directors to all employees, the Board of Directors to the management, and each work unit either through family gatherings, work meetings, morning briefings, and other company activities.

SOCIAL MEDIA

The company optimizes social networks/social media as a means of two-way communication between the company

dengan *Stakeholders* maupun dengan pelanggan dan masyarakat. Sarana komunikasi ini digunakan sebagai penyebaran informasi produk maupun sarana *customer care*. Sosial media perusahaan dapat diakses melalui:
Twitter : @Pupuk_Indonesia
Instagram : PT PupukIndonesia

and stakeholders as well as with customers and the community. This communication tool is used as a product information dissemination and customer care tool. The company's social media can be accessed through:
Twitter : @Pupuk_Indonesia
Instagram : PT PupukIndonesia

LAPORAN TAHUNAN

Perusahaan juga menyediakan sarana informasi melalui Laporan Tahunan yang disusun setiap tahunnya. Laporan Tahunan ini akan disampaikan kepada Pemegang Saham, regulator, organisasi massa, media massa, dan masyarakat.

ANNUAL REPORT

The Company also provides a means of information through the Annual Report which is prepared annually. This Annual Report will be submitted to Shareholders, regulators, mass organizations, mass media and the public.

Tema	Theme	Tahun Year
Mengoptimalkan Sinergi Menuju Kinerja yang Berkelanjutan	Optimizing Synergy Towards Sustainable Performance	2016
Sinergi dan Transformasi untuk Keberlanjutan Perusahaan	Synergy and Transformation for Corporate Sustainability	2017
Transformasi untuk Masa Depan	Transformation for the Future	2018
Transformasi Memperkuat Daya Saing untuk Kinerja Unggul	Transformation Strengthens Competitiveness for Superior Performance	2019
Agrosolusi untuk Indonesia	Agrosolutions for Indonesia	2020
Memperkuat Konsolidasi, Melewati Tantangan, Menyambut Peluang	Strengthening Consolidation, Overcoming Challenges, Welcoming Opportunities	2021
Transformasi Industri Lebih Hijau dan Bersih	Transformation Towards a Greener and Cleaner Industry	2022

LAPORAN KEBERLANJUTAN

Selain itu, PTPI juga menyediakan sarana informasi mengenai kegiatan perusahaan secara menyeluruh melalui Laporan Keberlanjutan yang diterbitkan bersamaan dengan Laporan Tahunan. Laporan Keberlanjutan akan disampaikan kepada Pemegang Saham, regulator, organisasi massa, media massa, dan masyarakat.

SUSTAINABILITY REPORT

In addition, PTPI also provides a means of information about the company's activities as a whole through the Sustainability Report which is published together with the Annual Report. The Sustainability Report will be submitted to Shareholders, regulators, mass organizations, mass media and the public.

Tema	Theme	Tahun
Memupuk Keberlanjutan Menuju Ketahanan Pangan untuk Kesejahteraan Bangsa	Fostering Sustainability Toward Food Security for the Nation's Prosperity	2016
Sinergi untuk Keberlanjutan	Synergy for Sustainability	2017
Transformasi untuk Keunggulan dan Keberlanjutan	Transformation for Excellence and Sustainability	2018
Bersinergi Demi Mensukseskan Kedaulatan Pangan Nasional	Synergizing for the Success of National Food Sovereignty	2019
Transformasi Demi Mensukseskan Kedaulatan Pangan Nasional	Transformation for the Success of National Food Sovereignty	2020
Mengembangkan Keberlanjutan Demi Ketahanan Pangan	Developing Sustainability for Food Security	2021
Transformasi Industri Lebih Hijau dan Bersih	Transformation Towards a Greener and Cleaner Industry	2022

MEDIA KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Perusahaan juga memiliki ragam media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan data dan informasi terkait aktivitas operasional, proses usaha dan capaian-capaian kinerja yang telah diraih Perusahaan yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

MEDIA TO SHAREHOLDERS AND STAKEHOLDERS

The Company also has a variety of communication media used to convey data and information related to operational activities, business processes and performance achievements that have been achieved by the Company which can be seen in the table below.

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Bentuk Media	Media Form
Regulator	Rapat Dengar Pendapat, Rapat Kerja Komisi, dan Rapat dengan Kementerian/Lembaga Negara, publikasi kepatuhan di media massa	Hearings, Commission Work Meetings, and Meetings with Ministries/State Agencies, publication of compliance in mass media
Pemegang Saham Shareholders	RUPS, RUPSLB, Rapat dengan Pimpinan Kementerian BUMN, Publikasi Kinerja dan Capaian di media massa	GMS, EGM, Meeting with the Head of the Ministry of SOEs, Publication of Performance and Achievements in mass media
Investor	*Website* Perusahaan, Akun Media Sosial Perusahaan, Publikasi Kinerja dan capaian di media massa	Company Website, Company Social Media Accounts, Publication of Performance and achievements in mass media
Lembaga Publik Public Institutions	Website Perusahaan dan Akun Media Sosial Perusahaan	Company Website and Social Media Accounts
Konsumen Consumer	*Website* Perusahaan, Akun Media Sosial Perusahaan, Kanal Media Sosial Entitas Anak	Company Website, Company Social Media Accounts, Subsidiary Social Media Channels
Karyawan Employees	Majalah SPIN, TV Media, *Video*, Poster/*E-Flyer*, *TBanner*, *Spanduk*, *Email* Perusahaan dan *Desktop Background*	SPIN Magazine, TV Media, Video, Poster/E-Flyer, TBanner, Banner, Company Email and Desktop Background
Perusahaan Sejenis Lainnya Other Similiar Companies	Akun media sosial Perusahaan	Company's social media accounts
Mitra Kerja dan Rekanan Partners and Associates	Akun media sosial Perusahaan	Company's social media accounts
Organisasi Profesi Professional Organization	Akun media sosial Perusahaan	Company's social media accounts
Masyarakat/Umum Society/General	Akun media sosial Perusahaan, publikasi kinerja dan capaian di media massa	Company's social media accounts, publication of performance and achievements in mass media

Pedoman Etika dan Perilaku

Ethical and Behavioral Guidelines

Kode Etik merupakan pedoman perilaku bagi jajaran Perusahaan dalam menjalankan tugas dan kegiatan sehari-hari serta dalam melakukan hubungan bisnis dengan para pelanggan, rekanan maupun rekan kerja. Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) adalah bagian penting dari upaya Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola, yang selama ini mendukung Perusahaan untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

The Code of Conduct is a guideline of behavior for the Company's staff in carrying out their daily duties and activities as well as in conducting business relationships with customers, partners and colleagues. The Code of Conduct is an important part of the Company's efforts to implement the principles of governance, which have supported the Company to achieve its Vision and Mission.

Perusahaan menyadari arti pentingnya implementasi GCG sebagai salah satu alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan tidak hanya bagi Pemilik Modal/ Pemegang Saham namun juga segenap Pemangku Kepentingan. Untuk itulah, Perusahaan berkomitmen untuk mengimplementasikan GCG secara konsisten yang salah satunya dilakukan melalui penyusunan Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*).

PENETAPAN PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU (*CODE OF CONDUCT*) PERUSAHAAN

Perusahaan telah menyusun Pedoman Etika dan Perilaku untuk menjadi acuan perilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Pegawai di Perusahaan sebagai bagian dari usaha untuk pencapaian Visi dan Misi Perusahaan. Pedoman Etika dan Perilaku pertama kali diterbitkan dan ditandatangani secara bersama oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama pada pada tanggal 5 November 2012.

Sesuai dengan perkembangan bisnis Perusahaan, Pedoman Etika dan Perilaku telah dimutakhirkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 016/KEP.KOM/XII/2021 dan 116.1/A/KU/E42/SK/2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) PT Pupuk Indonesia (Persero).

MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU

Maksud penerapan Pedoman Etika dan Perilaku bagi Setiap Insan Perusahaan sebagai berikut:

1. Setiap Insan Perusahaan memahami bahwa segala aktivitas Perusahaan berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
2. Setiap Insan Perusahaan agar berperilaku baik dalam melaksanakan segala aktivitas Perusahaan;
3. Setiap Insan Perusahaan menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan Perusahaan;
4. Setiap Insan Perusahaan meminimalisasi peluang terjadinya penyimpangan sebagai bagian dari pengelolaan risiko sekaligus membangun reputasi Perusahaan.

Tujuan penerapan Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) bagi Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman bertingkah laku tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan;
2. Menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan budaya perusahaan sehingga akan meningkatkan kinerja dan produktivitas Pegawai secara menyeluruh;

The Company realizes the importance of GCG implementation as one of the tools to increase value and long-term sustainable business growth not only for Capital Owners/Shareholders but also all Stakeholders. For this reason, the Company is committed to implementing GCG consistently, one of which is done through the preparation of the Code of Conduct.

ESTABLISHMENT OF THE COMPANY'S CODE OF CONDUCT

The Company has developed a Code of Ethics and Conduct to serve as a behavioral reference for the Board of Commissioners, Board of Directors and all employees in the Company as part of the effort to achieve the Company's Vision and Mission. The Code of Ethics and Conduct was first issued and signed jointly by the President Commissioner and President Director on November 5, 2012.

In accordance with the development of the Company's business, the Code of Conduct has been updated through the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 016/KEP.KOM/XII/2021 and 116.1/A/KU/E42/SK/2021 dated 16 December 2021 concerning the Code of Conduct of PT Pupuk Indonesia (Persero).

PURPOSE, OBJECTIVES, AND BENEFITS OF THE CODE OF ETHICS AND CONDUCT

The purpose of implementing the Code of Ethics and Behavior for Every Company Personnel is as follows:

1. Every Company personnel understands that all Company activities are based on the principles of good corporate governance;
2. Every employee of the Company should behave well in carrying out all activities of the Company;
3. Every employee of the Company creates a healthy and comfortable working atmosphere within the Company;
4. Every employee of the Company minimizes opportunities for deviation as part of risk management while building the Company's reputation.

The purpose of implementing the Code of Conduct for the Company is as follows:

1. To be a behavioral guideline on what should and should not be done;
2. Creating a work environment that upholds the values and culture of the company so as to improve the overall performance and productivity of employees;

3. Mendorong kegiatan operasional menjadi lebih efisien dan efektif mengingat hubungan dengan pegawai, mitra kerja, pelanggan, masyarakat, pemerintah dan stakeholders lainnya memiliki standar etika yang harus diperhatikan;
4. Meningkatkan nilai Perusahaan dengan memberikan kepastian dan perlindungan kepada para stakeholders dalam berhubungan dengan PTPI sehingga menghasilkan reputasi yang baik, yang pada akhirnya mewujudkan keberhasilan usaha dalam jangka panjang;
5. Meningkatkan kepercayaan Pemegang Saham bahwa PTPI dikelola secara hati-hati (*prudent*), efisien, transparan, akuntabel dan *fair* untuk mencapai tingkat profitabilitas yang diharapkan dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan; dan
6. Menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan *stakeholders*.

Penerapan Pedoman Etika dan Perilaku ini secara konsisten dan konsekuen oleh Insan Perusahaan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Perusahaan
   a. Mendorong kegiatan operasional Perusahaan agar lebih efisien dan efektif mengingat hubungan dengan pelanggan, masyarakat, pemerintah, dan *stakeholders* lainnya memiliki standar etika yang harus diperhatikan; dan
   b. Meningkatkan nilai Perusahaan dengan memberikan kepastian dan perlindungan kepada Stakeholders dalam berhubungan dengan Perusahaan sehingga menghasilkan reputasi yang baik, yang pada akhirnya mewujudkan keberhasilan usaha dalam jangka panjang.
2. Pemegang Saham
   Menambah keyakinan bahwa Perusahaan dikelola secara amanah, hati-hati (*prudent*), efisien, transparan, akuntabel dan *fair* untuk mencapai tingkat profitabilitas yang diharapkan oleh Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan.
3. Insan Perusahaan
   a. Memberikan pedoman kepada setiap Insan Perusahaan tentang tingkah laku yang diinginkan atau yang dilarang oleh Perusahaan; dan
   b. Menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan keterbukaan sehingga akan meningkatkan kinerja dan produktivitas setiap Insan Perusahaan secara menyeluruh.
4. Masyarakat dan pihak lain yang terkait
   Menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan Perusahaan, yang pada

3. Encourage operational activities to be more efficient and effective considering that relationships with employees, partners, customers, communities, governments and other stakeholders have ethical standards that must be considered;
4. Increase the value of the Company by providing certainty and protection to stakeholders in dealing with PTPI so as to generate a good reputation, which ultimately realizes long-term business success;
5. Increase Shareholders' confidence that PTPI is managed prudently, efficiently, transparently, accountably and fairly to achieve the expected level of profitability while taking into account the interests of the Company; and
6. Creating harmonious and mutually beneficial relationships with stakeholders.

The consistent and consequent implementation of this Code of Ethics and Conduct by the Company's personnel is expected to benefit:

1. Company 1.
   a. Encourage the Company's operational activities to be more efficient and effective considering that relationships with Customers, Communities, Governments and other Stakeholders have ethical standards that must be considered; and
   b. Increase the value of the Company by providing certainty and protection to Stakeholders in dealing with the Company so as to generate a good reputation, which ultimately realizes long-term business success.
2. Shareholders
   Increase confidence that the Company is managed in a trustworthy, prudent, efficient, transparent, accountable and fair manner to achieve the level of profitability expected by Shareholders while taking into account the interests of the Company.
3. Company People
   a. Provide guidance to each Company Personnel on behavior that is desired or prohibited by the Company; and
   b. Creating a work environment that upholds the values of honesty, ethics and openness so as to improve the overall performance and productivity of each Company Personnel.
4. Community and other related parties
   Creating a harmonious and mutually beneficial relationship with the Company, which in turn will create

akhirnya akan menciptakan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi masyarakat dan pihak lain yang terkait.

POKOK-POKOK ISI PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU (*CODE OF CONDUCT*)

Adapun muatan yang terkandung dalam Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan terdiri dari:

1. Pendahuluan (Latar Belakang, Maksud, Tujuan, dan Manfaat, Landasan Penyusunan, Visi-Misi, Tata Nilai Perusahaan, dan Daftar Istilah).
2. Etika Perusahaan dengan Pemangku Kepentingan (Karyawan, Pemerintah, Pemegang Saham, Pelanggan, Mitra Usaha, Pesaing, Kreditur/Investor, Penyedia Barang/Jasa, Masyarakat dan Lingkungan Sekitar, Media Massa, dan Entitas Anak sebagai Anggota Holding).
3. Komitmen, Etika Kerja dan Tata Perilaku Insan Perusahaan (Komitmen Insan Perusahaan, Etika Kerja Insan Perusahaan, Tata Perilaku Insan Perusahaan).
4. Penegakkan Pedoman Etika dan Perilaku (Komitmen Penegakkan Etika dan Perilaku, Sosialisasi dan Internalisasi, Pelanggaran).

PENGUNGKAPAN BAHWA KODE ETIK BERLAKU BAGI SELURUH LEVEL ORGANISASI

Pedoman Etika dan Perilaku merupakan tanggung jawab seluruh karyawan, Direksi, Dewan Komisaris dan Komite di bawah Dewan Komisaris untuk bertingkah laku sesuai dengan budaya Perusahaan sehingga terwujud perilaku yang profesional, bertanggung jawab, wajar, patut, dan dipercaya dalam melakukan hubungan bisnis dengan rekan sekerja maupun para mitra kerja.

Pelaksanaan kode etik ini merupakan upaya untuk:

1. Memberikan pemahaman kepada seluruh Insan Perusahaan bahwa Perusahaan beroperasi secara jujur dan terbuka, sehingga tercipta lingkungan kerja yang baik, dengan tingkat perputaran karyawan yang rendah dan peningkatan kesejahteraan;
2. Menjadi bagian dari komunitas tertentu, dimana menjaga hubungan baik merupakan hal mendasar bagi sukses jangka panjang Perusahaan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan peningkatan ekonomi; dan
3. Menjadi bagian dari industri pupuk nasional, di mana pelaksanaan dan komitmen terhadap Kode Etik dapat mendukung Perusahaan dalam berbagai perkara penting, serta menjadi bagian dari manajemen risiko yang baik, dan mampu membangun reputasi Perusahaan.

economic and social welfare for the community and other related parties.

CONTENTS OF THE CODE OF CONDUCT

The contents contained in the Company's Code of Conduct consist of:

1. Introduction (Background, Purpose, Objectives, and Benefits, Basis of Preparation, Vision-Mission, Corporate Values, and Glossary).
2. Company Ethics with Stakeholders (Employees, Government, Shareholders, Customers, Business Partners, Competitors, Creditors/Investors, Goods/Services Providers, Communities and the Environment, Mass Media, and Subsidiaries as Holding Members).
3. Commitment, Work Ethics and Company People Behavior (Commitment of Company People, Work Ethics of Company People, Company People Behavior).
4. Enforcement of the Code of Ethics and Conduct (Commitment to Enforcement of Ethics and Conduct, Socialization and Internalization, Violations).

DISCLOSURE THAT THE CODE OF ETHICS APPLIES TO ALL LEVELS OF THE ORGANIZATION

The Code of Ethics and Conduct is the responsibility of all employees, the Board of Directors, the Board of Commissioners and the Committee under the Board of Commissioners to behave in accordance with the Company's culture so as to realize professional, responsible, reasonable, proper and trustworthy behavior in conducting business relationships with colleagues and partners.

The implementation of this code of ethics is an effort to:

1. Providing an understanding to all Company personnel that the Company operates honestly and openly, so as to create a good working environment, with a low employee turnover rate and increased welfare;
2. Being part of a particular community, where maintaining good relations is fundamental to the Company's long-term success in achieving social welfare and economic improvement; and
3. Being part of the national fertilizer industry, where the implementation and commitment to the Code of Ethics can support the Company in various important matters, as well as being part of good risk management, and being able to build the Company's reputation.

UPAYA PENYEBARAN DAN SOSIALISASI PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU (*CODE OF CONDUCT*) SERTA PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS

Sebagai wujud komitmen terhadap penegakan prinsip GCG, Perusahaan senantiasa melakukan sosialisasi Pedoman Etika dan Perilaku, karena sosialisasi merupakan tahapan penting dalam terciptanya insan PTPI yang berperilaku sesuai dengan Budaya Perusahaan. Pedoman Etika dan Perilaku dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada Dewan Komisaris dan organ pendukungnya, Direksi serta seluruh karyawan.

Penandatanganan pernyataan Komitmen terhadap Pedoman Etika dan Perilaku sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut:

EFFORTS TO DISSEMINATE AND SOCIALIZE CODE OF CONDUCT AND INTEGRITY PACT SIGNING

As a form of commitment to upholding GCG principles, the Company always socializes the Code of Ethics and Conduct, because socialization is an important stage in the creation of PTPI people who behave in accordance with the Corporate Culture. The Code of Ethics and Conduct is communicated and socialized to the Board of Commissioners and its supporting organs, the Board of Directors and all employees.

The signing of a statement of Commitment to the Code of Ethics and Conduct until 2022 as follows:

Jumlah Karyawan 2022 Number of Employees 2022	**Jumlah Insan Perusahaan yang Telah Menandatangani Pernyataan Komitmen** Number of Company Personnel who have Signed the Commitment Statement	**Jumlah Insan Perusahaan yang Belum Menandatangani Pernyataan Komitmen** Number of Company Personnel who have not Signed the Commitment Statement
455	100%	0%

Pernyataan komitmen terhadap Pedoman Etika dan Perilaku dituangkan dalam bentuk penandatanganan Pakta Integritas. Adapun pakta integritas yang telah ditandatangani seluruh Dewan Komisaris, Direksi, Organ Pendukung Dewan Komisaris, dan Karyawan dapat dilihat dalam rincian tabel di bawah ini.

The statement of commitment to the Code of Ethics and Conduct is set forth in the form of signing an Integrity Pact. The integrity pact signed by the entire Board of Commissioners, Board of Directors, Supporting Organs of the Board of Commissioners, and Employees can be seen in the details of the table below.

No.	**Jabatan** Position	**Jumlah** Total	**Jumlah yang Sudah Tanda Tangan Pakta Integritas** Number who have signed the Integrity Pact	**Persentase** Percentage
1	Dewan Komisaris | Board of Commissioners	8	8	100%
2	Organ Pendukung Dewan Komisaris Supporting Organ of the Board of Commissioners	11	11	100%
3	Direksi | Board of Directors	8	8	100%
4	Karyawan | Employees	428	428	100%
	Jumlah	**455**	**455**	**100%**

KEBIJAKAN PENEGAKKAN DISIPLIN DAN PENANGANAN PELANGGARAN

Perusahaan senantiasa melakukan pemantauan secara berkala terhadap penegakan dan menyediakan fasilitas pengaduan terhadap pelanggaran etika Perusahaan melalui aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) Perusahaan.

DISCIPLINE ENFORCEMENT POLICY AND HANDLING VIOLATIONS

The Company always conducts regular monitoring of enforcement and provides a complaint facility for violations of the Company's ethics through the Company's Whistleblowing System (WBS) application.

Dalam Pedoman Etika dan Perilaku, apabila terdapat pelanggaran etika maka untuk memberikan efek jera kepada seluruh insan perusahaan, akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

In the Code of Ethics and Conduct, if there is a violation of ethics then to provide a deterrent effect to all company personnel, sanctions will be given in accordance with applicable provisions and regulations.

SANKSI PELANGGARAN PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU

Berdasarkan Peraturan Perusahaan No. 079/SK/DIR/2017 jenis sanksi diklasifikasikan dari sanksi yang teringan hingga yang terberat.

SANCTIONS FOR VIOLATIONS OF THE CODE OF ETHICS AND BEHAVIOR

Based on Company Regulation No. 079/SK/DIR/2017, the types of sanctions are classified from the lightest to the heaviest sanctions.

No	Pedoman Guidelines	Uraian	Description
1	Klasifikasi Sanksi: Sanction Classification:	Jenis Sanksi:	Types of Sanctions:
	Sanksi Ringan Light Sanctions	Teguran lisan dan tertulis	Oral and written reprimands
	Sanksi Sedang Medium Sanction	• Surat Peringatan Tertulis (*Warning Slip*) A berlaku 6 (enam) bulan • Surat Peringatan Tertulis (*Warning Slip*) B berlaku 6 (enam) bulan • Surat Peringatan Tertulis (*Warning Slip*) C berlaku 6 (enam) bulan	• Written Warning Slip (Warning Slip) A is valid for 6 (six) months, Letter • Written Warning (Warning Slip) B is valid for 6 (six) months, and a Letter of • Written Warning (Warning Slip) C valid 6 (six) months
	Sanksi Berat Severe Sanction	Surat Peringatan Tertulis (*Warning Slip*) C dan penurunan *Grade* atau jabatan minimal satu tingkat, dan Pemutusan Hubungan Kerja	Written Warning Slip C and downgrading of Grade or position at least one level, and Termination of Employment
	Ganti Kerugian Compensation	• Apabila terjadi kerugian material terhadap Perusahaan, akibat dari perbuatan pelanggaran tata tertib dan disiplin kerja, di samping sanksi hukuman seperti tersebut dalam butir a, b, c di atas, diberikan juga sanksi/hukuman ganti rugi senilai kerugian yang ditimbulkan. • Ganti rugi dapat dilakukan melalui pemotongan gaji, jasa operasi, bantuan cuti, dan hak-hak lainnya. Apabila Karyawan tidak bersedia mengganti maka akan diproses secara hukum.	• In the event of a material loss to the Company, as a result of an act of violations of work rules and discipline, in addition to punitive sanctions such as a, b, c d above, sanctions/penalties of compensation shall also be imposed worth the loss incurred; • Compensation can be made through salary deductions, operating services, assistance leave, and other rights. If the Employee is not willing to replace then will be prosecuted.

No	Pedoman Guidelines	Uraian	Description
2	Bentuk Sanksi Form of Sanction	• Perusahaan akan memberikan sanksi/ hukuman kepada Karyawan yang melakukan pelanggaran sesuai tingkat kesalahan/pelanggaran yang dilakukan karyawan; • Pemberian sanksi/hukuman tersebut dimaksudkan sebagai upaya pembinaan dan usaha korektif dari Perusahaan, agar karyawan dapat memperbaiki sikap dan perilakunya di kemudian hari; • Teguran Lisan bersifat internal unit kerja dan harus menjadi perhatian serius dari karyawan, bahwa Teguran Lisan tersebut sudah merupakan catatan dari atasan untuk menilai kondikte karyawan yang bersangkutan; • Teguran tertulis berlaku untuk seluruh lingkungan unit kerja di Perusahaan dan juga akan mempengaruhi kondikte dari Karyawan yang bersangkutan; • Selama masa proses penyelesaian kasus pelanggaran hingga berlakunya sanksi seperti tersebut di atas, Karyawan tidak berhak atas kenaikan pangkat baik *Promotion Increase* maupun *Merit Increase*. • Apabila ada atasan yang tidak mau melaksanakan dan/atau mengeluarkan sanksi/hukuman terhadap Karyawan yang patut menerimanya dalam kurun waktu tertentu, maka Pejabat/Atasan tersebut akan diberikan sanksi administratif atau warning slip oleh pejabat yang lebih tinggi lagi dan diketahui oleh Departemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM).	• The Company will impose sanctions/ punishments on Employees who commits an offense according to the level of guilt/ violation done by employees; • The provision of sanctions / punishments is intended as an effort coaching and corrective efforts from the Company, so that Employees can improve their attitudes and behavior in the future; • Oral Reprimands are internal to the work unit and must be taken seriously. from Employees, that the Oral Reprimand is already a record of the supervisor to assess the conduct of the Employee concerned; • Written reprimands apply to all work units in the Company. and will also affect the conduct of the Employee concerned; • During the process of resolving infringement cases until the entry into force sanctions as mentioned above, the Employee will not be entitled to promotion both Promotion Increase and Merit Increase; • If there are superiors who are unwilling to implement and/or issue sanctions/ punishments against employees who deserve it in a certain period of time, then the Official/Superior will be sanctioned administrative or warning slip by a higher official and known by the Human Resource Management Department (HRM)

JUMLAH PELANGGARAN ETIKA

Dalam rangka penegakan terhadap etika Perusahaan, PTPI senantiasa melakukan tindak disiplin dengan rincian sanksi yang dikenakan selama tahun 2022, 2021, dan 2020.

NUMBER OF ETHICS VIOLATIONS

In order to uphold the Company's ethics, PTPI continues to carry out disciplinary actions with details of sanctions imposed during 2022, 2021, and 2020.

Sanksi	2022	2021	2020	Sanction
Tindakan Disiplin	0	0	0	Disciplinary Action
Jumlah	**0**	**0**	**0**	**Total**

MANAGEMENT *REVIEW* TERHADAP PENERAPAN PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU

Perusahaan secara konsisten melakukan kajian terhadap penerapan Pedoman Etika dan Perilaku dalam rangka mengevaluasi kinerja Perusahaan. Pedoman Etika dan Perilaku yang berlaku sekarang ditetapkan pada tahun 2021 dan merupakan pemutakhiran dari Pedoman sebelumnya.

MANAGEMENT REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF THE CODE OF ETHICS AND CONDUCT

The Company consistently reviews the implementation of the Code of Ethics and Conduct in order to evaluate the Company's performance. The current Code of Ethics and Conduct was established in 2021 and is an update of the previous Code.

Pengendalian Gratifikasi
Gratification Control

Dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara konsisten dan berkelanjutan dalam setiap aktivitas bisnis Perusahaan, PTPI berkomitmen dan menerapkan aturan untuk setiap bentuk pemberian, permintaan dan penerimaan gratifikasi. Para Insan PTPI dilarang mencemarkan nama baik Perusahaan melalui tindakan penyelewengan atau tindakan yang merugikan citra Perusahaan. Pelanggaran dari aturan ini dapat berakibat pada diberikannya sanksi oleh Perusahaan mulai dari sanksi ringan sampai dengan sanksi berat.

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Perusahaan memiliki Pedoman Pengendalian Gratifikasi No. PI-SEK-PD-009 Rev. 2 tanggal 22 November 2021 dan Prosedur Pengelolaan Laporan Gratifikasi No. PI-SEK-PR-019 Rev. 2 tanggal 14 Agustus 2019. Pedoman tersebut merupakan acuan bagi Insan PTPI dalam penerapan pengendalian gratifikasi.

Pada tahun 2020, Perusahaan sedang melakukan proses pemutakhiran Pedoman dan Prosedur Pengendalian Gratifikasi mengacu pada Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019 tanggal 5 November 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

Pada tanggal 17 Desember 2020 Direksi dan Dewan Komisaris melakukan penandatanganan Pernyataan Komitmen Penerapan Pengendalian Gratifikasi PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Entitas Anak yang disaksikan oleh Direktur Gratifikasi KPK RI, sebagai wujud penguatan komitmen Perusahaan dalam mengendalikan gratifikasi.

KATEGORI GRATIFIKASI

Kategori gratifikasi yang diatur dalam Pedoman di atas mencakup penolakan terhadap gratifikasi, penerimaan gratifikasi, pemberian gratifikasi, dan permintaan gratifikasi.

PENOLAKAN GRATIFIKASI

Seluruh Insan Perusahaan yang karena jabatannya dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya, dan atau anggota keluarga inti (suami/istri, anak) "DILARANG" menerima secara langsung atau tidak langsung gratifikasi dari setiap pihak yang memiliki hubungan bisnis atau pesaing Perusahaan, yang berupa/dalam bentuk uang/setara uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, undangan makan, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-

In order to implement the principles of Good Corporate Governance consistently and continuously in every business activity of the Company, PTPI is committed and implements rules for every form of giving, requesting and receiving gratuities. PTPI personnel are prohibited from defaming the Company through misappropriation or actions that harm the Company's image. Violation of this rule may result in sanctions by the Company ranging from minor to severe sanctions.

GRATIFICATION CONTROL GUIDELINES

The company has Gratification Control Guidelines No. PI-SEK-PD-009 Rev. 2 dated November 22, 2021 and Gratification Report Management Procedure No. PI-SEK-PR-019 Rev. 2, dated August 14, 2019. The guidelines are a reference for PTPI personnel in implementing gratification control.

In 2020, the Company is in the process of updating the Gratification Control Guidelines and Procedures referring to KPK Regulation Number 2 of 2019 dated November 5, 2019 concerning Gratification Reporting.

On December 17, 2020, the Board of Directors and the Board of Commissioners signed a Statement of Commitment to Implement Gratification Control of PT Pupuk Indonesia (Persero) and its Subsidiaries witnessed by the Director of Gratification of KPK RI, as a form of strengthening the Company's commitment to controlling gratification.

GRATUITY CATEGORY

The categories of gratuities regulated in the above Guidelines include rejection of gratuities, acceptance of gratuities, giving gratuities, and requests for gratuities.

GRATUITY REJECTION

All Company personnel who because of their position and contrary to their duties and obligations, and or immediate family members (husband/wife, children) are "PROHIBITED" from receiving directly or indirectly gratuities from any party that has a business relationship or competitor of the Company, in the form of/in the form of money/money equivalent, goods, rebates (discounts), commissions, interest-free loans, invitations to meals, travel tickets, lodging facilities, tourist trips, free medical treatment,

cuma, *voucher*, *traveller cheque*, kompensasi, hadiah yang memiliki nilai finansial tinggi, hiburan dan hal lainnya yang memberikan keuntungan pribadi terhadap diri dan keluarganya, yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Terhadap tawaran/pemberian gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kebijakan ini, Insan Perusahaan wajib "MENOLAK" setiap tawaran/pemberian dimaksud dengan memberikan penjelasan tentang peraturan ini kepada pihak pemberi. Atas penolakan penerimaan gratifikasi yang telah dilakukan maka insan Perusahaan tersebut harus melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi sebagai alat pemantauan kepatuhan insan Perusahaan terhadap Pedoman Pengendalian Gratifikasi.

PENERIMAAN GRATIFIKASI

Penerimaan gratifikasi terbagi dalam 2 (dua) pendekatan yaitu gratifikasi yang wajib dilaporkan dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya atau tugasnya dalam tugas kedinasan atau di luar tugas kedinasan sehingga dapat dianggap suap, dan gratifikasi dalam kedinasan. Sebaliknya gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan adalah gratifikasi yang berlaku umum, tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, dipandang sebagai wujud ekspresi keramahtamahan atau penghormatan dalam hubungan sosial dalam batasan nilai yang wajar, serta pemberian yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan dan norma yang ada dalam masyarakat.

PEMBERIAN GRATIFIKASI

Pemberian gratifikasi yang "DILARANG" adalah pemberian yang dilakukan dengan tujuan suap atau gratifikasi yang dapat dianggap suap.

PERMINTAAN GRATIFIKASI

Dalam konteks permintaan gratifikasi, insan Perusahaan apabila diminta untuk memberikan gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pemberian, hendaknya melakukan "PENOLAKAN" setiap permintaan dimaksud dengan memberikan penjelasan tentang peraturan ini kepada pihak peminta secara sopan dan santun dan apabila diperlukan dapat menyampaikan ketentuan dalam Pedoman tersebut sebagai bagian dari sosialisasi aturan.

UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

Sebagai upaya pencegahan terjadinya gratifikasi, Perusahaan telah menetapkan Unit Pengendali Gratifikasi

vouchers, traveler cheques, compensation, gifts that have high financial value, entertainment and other things that provide personal benefits to themselves and their families, which are received domestically or abroad and which are carried out using electronic means or without electronic means.

Against the offer/provision of gratuities that are not in accordance with the provisions stipulated in this Policy, Company personnel must "REFUSE" any such offer/gift by providing an explanation of this regulation to the giver. For the rejection of the acceptance of gratuities that have been carried out, the Company's personnel must report to the Gratification Control Unit as a means of monitoring the compliance of Company personnel with the Gratification Control Guidelines.

GRATUITY ACCEPTANCE

The acceptance of gratuities is divided into 2 (two) approaches, namely gratuities that must be reported and gratuities that are not required to be reported. Gratuities that must be reported are gratuities related to their position or duties in official duties or outside official duties so that they can be considered bribes, and gratuities in the service. Conversely, gratuities that are not required to be reported are gratuities that are generally accepted, do not conflict with applicable legislation, are seen as a form of expression of hospitality or respect in social relations within the limits of reasonable value, as well as gifts that are within the realm of customs, habits and norms that exist in society.

GIVING GRATUITY

"PROHIBITED" gratuities are those made for the purpose of bribery or gratuities that can be considered bribes.

GRATUITY REQUEST

In the context of requests for gratuities, Company personnel if asked to provide gratuities that are not in accordance with the provisions of the gift, should "REFUSE" any such requests by providing an explanation of this regulation to the requesting party in a polite and courteous manner and if necessary can convey the provisions in the Guidelines as part of the socialization of the rules.

GRATIFICATION CONTROL UNIT

As an effort to prevent gratification, the Company has established a Gratification Control Unit (UPG) based on

(UPG) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/072/2017 tentang Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) PTPI tanggal tanggal 26 Desember 2017. Dalam Surat Keputusan tersebut, fungsi UPG melekat pada Departemen Tata Kelola dan Kepatuhan di bawah Kompartemen Tata Kelola Korporat dengan tugas pokok dan fungsi yaitu mereviu kebijakan, melakukan pemantauan, dan pengendalian gratifikasi, serta melakukan sosialisasi tentang gratifikasi di lingkungan Perusahaan.

Tugas dan wewenang Unit Pengendalian Gratifikasi antara lain:
1. Menerima pelaporan gratifikasi dari insan Perusahaan;
2. Melakukan pemrosesan pelaporan gratifikasi yang diterima;
3. Melakukan konfirmasi langsung atas laporan gratifikasi kepada penerima, pemberi, atau pihak ketiga lainnya yang terkait dengan kejadian penerimaan/pemberian gratifikasi;
4. Menentukan atau memberikan rekomendasi penanganan dan pemanfaatan gratifikasi;
5. Melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat kepada KPK atas nama Perusahaan;
6. Memantau tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi oleh Perusahaan maupun oleh penerima;
7. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Unit Kerja Satuan Pengawasan Internal apabila terjadi pelanggaran pedoman gratifikasi oleh insan Perusahaan;
8. Melaporkan hasil penanganan pelaporan gratifikasi kepada Direksi dan KPK.

IMPLEMENTASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Dalam rangka menjamin Pedoman Pengendalian Gratifikasi dapat diketahui oleh seluruh insan Perusahaan, maka:
1. Seluruh unit kerja berkewajiban mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa dan/atau pada kontrak pengadaan barang dan jasa serta pada surat-surat yang disampaikan kepada mitra/rekanan atau pihak ketiga lainnya;
2. Seluruh unit kerja yang memiliki hubungan kerja dengan pihak ketiga berkewajiban menyampaikan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak dalam mata rantai pemasok (Penyedia Barang/Jasa, Agen, Distributor, Konsultan, Auditor/*Assessor* dan Pelanggan serta Pemangku Kepentingan lainnya);
3. Unit Pengendali Gratifikasi berkewajiban untuk secara terus menerus memberikan informasi kepada seluruh pekerja maupun pihak eksternal terkait dengan adanya Kebijakan Pengendalian Gratifikasi;

the Decree of the Board of Directors No. SK/DIR/072/2017 concerning PTPI Gratification Control Unit (UPG) dated December 26, 2017. In the Decree, the UPG function is attached to the Governance and Compliance Department under the Corporate Governance Compartment with the main tasks and functions of reviewing policies, monitoring and controlling gratuities, and conducting socialization about gratuities within the Company.

The duties and authorities of the Gratification Control Unit include:
1. Receive gratification reports from Company personnel;
2. Processing the reporting of gratuities received;
3. Conduct direct confirmation of the gratification report to the recipient, giver, or other third parties related to the incident of receiving/giving gratification;
4. Determine or provide recommendations on the handling and utilization of gratuities;
5. Coordinating, consulting and correspondence to KPK on behalf of the Company;
6. Monitor the follow-up on the utilization of gratuities received by the Company and by the recipient;
7. Provide follow-up recommendations to the Internal Audit Unit if there is a violation of the gratification guidelines by Company personnel;
8. Report the results of handling gratification reporting to the Board of Directors and KPK.

IMPLEMENTATION OF GRATIFICATION CONTROL

In order to ensure that the Gratification Control Guidelines can be known by all Company personnel, then:
1. All work units are obliged to include provisions prohibiting the acceptance, provision of gratuities (gifts/facilities) in every announcement in the procurement process of goods/services and/or in the procurement contract for goods and services as well as in letters submitted to partners/partners or other third parties;
2. All work units that have working relationships with third parties are obliged to convey the Gratification Control Policy to all parties in the supply chain (Goods/Services Providers, Agents, Distributors, Consultants, Auditors/Assessors and Customers and other Stakeholders);
3. The Gratification Control Unit is obliged to continuously provide information to all employees and external parties regarding the existence of the Gratification Control Policy;

4. Unit Pengendali Gratifikasi berkewajiban memonitor pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi dan memberikan laporan secara berkala kepada Direksi;
5. Perusahaan secara periodik menyampaikan "Imbauan Larangan Penerimaan dan/atau Pemberian Gratifikasi" pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri serta menjelang Natal dan tahun baru.

PROSES PELAPORAN GRATIFIKASI

Insan Perusahaan dapat melaporkan penerimaan, pemberian, penolakan, dan permintaan gratifikasi melalui Unit Pengendali Gratifikasi Perusahaan dan/atau langsung melalui sistem aplikasi pelaporan gratifikasi *online* yang diakses melalui www.gol.kpk.go.id serta melalui media pelaporan dugaan pelanggaran yang disediakan perusahaan www.pihclean.pupuk-indonesia.com.

SANKSI ATAS PELANGGARAN

Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

JUMLAH LAPORAN GRATIFIKASI TAHUN 2022

Sebagai wujud komitmen dalam penerapan pengendalian gratifikasi, Perusahaan secara konsisten melakukan internalisasi budaya Anti Gratifikasi kepada seluruh Insan Perusahaan. Untuk itu, di tahun 2022 Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) menerima 133 laporan gratifikasi dengan rincian sebagai berikut:

4. The Gratification Control Unit is obliged to monitor the implementation of the Gratification Control Policy and provide regular reports to the Board of Directors;
5. The Company periodically submits an "Appeal for the Prohibition of Receiving and/or Giving Gratuities" during the Eid al-Fitr holiday as well as before Christmas and New Year.

GRATIFICATION REPORTING PROCESS

Company personnel can report the receipt, provision, rejection and request for gratuities through the Company's Gratification Control Unit and/or directly through the online gratification reporting application system accessed through www.gol.kpk.go.id and through the media for reporting alleged violations provided by the company www.pihclean.pupuk-indonesia.com.

SANCTIONS FOR VIOLATIONS

Violation of the provisions stipulated in the Gratification Control Guidelines will be subject to sanctions in accordance with the applicable provisions in the Company.

NUMBER OF GRATIFICATION REPORTS IN 2022

As a form of commitment in the implementation of gratification control, the Company consistently internalizes the Anti-Gratification culture to all Company personnel. For this reason, in 2022 the Gratification Management Unit (UPG) received 133 gratification reports with the following details:

Kategori Laporan Gratifikasi	Jumlah Laporan Number of Reports	Category of Gratification Report
Penolakan	7	Rejection
Penerimaan	126	Reception
Dikelola Perusahaan	67	Company Managed
Menjadi Milik Negara	10	Become State Owned
Dikembalikan ke Penerima	47	Returned to Recipient
Dalam Proses Analisis KPK	2	In KPK Analysis Process
Pemberian	0	Giving
Permintaan	0	Inquiry
Jumlah Laporan Gratifikasi	**133**	**Number of Gratification Reports**

Laporan gratifikasi PI Grup sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) laporan terdiri dari:

a. Laporan Penolakan Gratifikasi sebanyak 4 (empat) laporan, yaitu:
   - PT Petrokimia Gresik sebanyak 3 (tiga) laporan, yaitu: 3 (tiga) laporan penolakan barang.
   - PT Pupuk Kalimantan Timur sebanyak 4 (empat) laporan, yaitu: 3 (tiga) laporan penolakan barang, 1 (satu) laporan penolakan uang.

PI Group's 133 (one hundred and thirty-three) gratification reports consist of:

a. Gratification Rejection Report as many as 4 (four) reports, namely:
   - PT Petrokimia Gresik as many as 3 (three) reports, namely: 3 (three) reports of rejection of goods.
   - PT Pupuk Kalimantan Timur as many as 4 (four) reports, namely: 3 (three) reports of rejection of goods, 1 (one) report of rejection of money.

b. Laporan Penerimaan Gratifikasi sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) laporan, yaitu:
   - PT Pupuk Indonesia (Persero) sebanyak 6 (enam) laporan, yaitu: 1 (satu) laporan penerimaan uang, 5 (lima) laporan berupa barang.
   - PT Petrokimia Gresik sebanyak 23 (dua puluh tiga) laporan, yaitu: 11 (sebelas) laporan penerimaan barang, 12 (dua belas) penerimaan terkait kedinasan.
   - PT Pupuk Kujang sebanyak 4 (emapt) laporan, yaitu: 4 (empat) laporan penerimaan barang.
   - PT Pupuk Kalimantan Timur sebanyak 70 (tujuh puluh) laporan, yaitu: 59 (lima puluh sembilan) laporan penerimaan barang, 11 (sebelas) laporan penerimaan uang.
   - PT Pupuk Iskandar Muda sebanyak 12 (dua belas) laporan, yaitu: 12 (dua belas) laporan penerimaan barang.
   - PT Rekayasa Industri sebanyak 7 (tujuh) laporan, yaitu: 7 (tujuh) laporan penerimaan barang.
   - PT Pupuk Indonesia Niaga sebanyak 3 (tiga) laporan, yaitu: 3 (tiga) laporan penerimaan barang.
   - PT Pupuk Indonesia Pangan sebanyak 1 (satu) laporan, yaitu: 1 (satu) laporan penerimaan barang.

PENGELOLAAN PENGADUAN BENTURAN KEPENTINGAN

Untuk menghindari segala bentuk potensi benturan kepentingan yang dapat merugikan Perusahaan, PTPI menetapkan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan No. Dok. PI-TKK-PD-001 Rev.0 tanggal 8 September 2017. Pedoman tersebut telah dimutakhirkan pada tahun 2021 yaitu Pedoman Pengelolaan Benturan Kepentingan No. Dok. PI-SEK-PD-008 Rev. 1 tanggal 27 Desember 2021 yang telah disampaikan kepada Anak Perusahaan melalui Surat Edaran No. SE-03/KK/610/SE/2022 tanggal 26 Januari 2022.

Selama Tahun 2022 terdapat 7 (tujuh) aduan benturan kepentingan di PT Pupuk Indonesia (Persero), yaitu: 7 (tujuh) aduan benturan kepentingan disampaikan melalui media WBS, namun setelah dilakukan klarifikasi tidak dapat memenuhi syarat aduan, dan 0 (nol) aduan melalui Unit Kepatuhan yang telah ditindak lanjuti. Sedangkan pada Anak Perusahaan tidak terdapat aduan benturan kepentingan, baik yang disampaikan melalui WBS, Atasan Pelapor, maupun melalui Departemen/Unit Kepatuhan.

Guna menghindari benturan kepentingan, Pejabat Perusahaan wajib mempergunakan kewenangannya secara baik dan benar dengan mempertimbangkan kepentingan Perusahaan, kepentingan masyarakat, kepentingan Insan Perusahaan dan berbagai faktor lain.

b. Gratification Acceptance Report as many as 126 (one hundred twenty-six) reports, namely:
   - PT Pupuk Indonesia (Persero) as many as 6 (six) reports, namely: 1 (one) report of money receipt, 5 (five) reports in the form of goods.
   - PT Petrokimia Gresik as many as 23 (dua puluh tiga) reports, namely: 11 (eleven) reports of receipt of goods, 12 (twelve) official related receipts.
   - PT Pupuk Kujang as many as 4 (four) reports, namely: 4 (four) reports of receipt of goods.
   - PT Pupuk Kalimantan Timur as many as 70 (seventy) reports, namely: 59 (fifty nine) reports of receipt of goods, 11 (eleven) reports of receipt of money.
   - PT Pupuk Iskandar Muda as many as 12 (twelve) reports, namely: 12 (twelve) reports of goods received.
   - PT Rekayasa Industri as many as 7 (seven) reports, namely: 7 (seven) reports of receipt of goods.
   - PT Pupuk Indonesia Niaga as many as 3 (three) reports, namely: 3 (three) reports of goods received.
   - PT Pupuk Indonesia Pangan as many as 1 (one) report, namely: 1 (one) report of goods received.

CONFLICT OF INTEREST GRIEVANCE MANAGEMENT

To avoid all forms of potential conflicts of interest that could harm the Company, PTPI establishes the Guidelines for Handling Conflicts of Interest No. Doc. PI-TKK-PD-001 Rev.0 dated September 8, 2017. The guidelines have been updated in 2021, namely the Conflict of Interest Management Guidelines No. Dok. PI-SEK-PD-008 Rev. 1 dated December 27, 2021 which has been conveyed to Subsidiaries through Circular Letter No. SE-03/KK/610/SE/2022 dated January 26, 2022.

During 2022 there were 7 (seven) complaints of conflict of interest at PT Pupuk Indonesia (Persero), namely: 7 (seven) conflict of interest complaints submitted through the WBS media, but after clarification could not meet the complaint requirements, and 0 (zero) complaints through the Compliance Unit that have been followed up. Whereas in the Subsidiaries, there were no complaints of conflict of interest, either submitted through the WBS, the Reporting Supervisor, or through the Compliance Department/Unit.

In order to avoid conflicts of interest, Company Officials must use their authority properly and correctly by considering the interests of the Company, the interests of the community, the interests of Company personnel and various other factors.

Implementasi kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan membutuhkan keterlibatan seluruh Insan Perusahaan. Insan Perusahaan harus menyadari dan memahami masalah benturan kepentingan dan harus dapat mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya benturan kepentingan.

Untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan Insan Perusahaan, dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

a. Mempublikasikan Kebijakan dan Pedoman Benturan Kepentingan;
b. Secara berkala mengingatkan Insan Perusahaan adanya Kebijakan dan Pedoman Benturan Kepentingan;
c. Menjamin agar aturan dan prosedur mudah diperoleh dan diketahui;
d. Memberi pengarahan tentang bagaimana menangani benturan kepentingan;

Memberi bantuan konsultasi dan nasihat bagi mereka yang belum memahami Kebijakan dan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan, termasuk juga kepada pihak-pihak luar yang berkaitan atau berhubungan dengan Perusahaan.

Implementation of policies to prevent conflicts of interest requires the involvement of all Company personnel. Company personnel must realize and understand the issue of conflict of interest and must be able to anticipate and prevent conflicts of interest.

To encourage the participation and involvement of Company personnel, the following efforts are made:

a. Publicize the Conflict of Interest Policy and Guidelines;
b. Periodically reminding Company personnel of the existence of the Conflict of Interest Policy and Guidelines;
c. Ensure that rules and procedures are easily obtained and known;
d. Provide briefings on how to handle conflicts of interest;

Provide consulting assistance and advice for those who do not understand the Conflict of Interest Policy and Guidelines, including to external parties related or associated with the Company.

Kebijakan Anti *Fraud*/Antikorupsi

Anti-Fraud/Anti-Corruption Policy

Perusahaan memiliki komitmen tinggi menciptakan iklim usaha yang sehat, menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan. Perusahaan juga senantiasa memperhatikan kebijakan tentang anti korupsi seperti yang tertulis dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sejalan dengan hal di atas, Perusahaan telah menetapkan beberapa Kebijakan yang meliputi:

a. Kebijakan dan Komitmen Anti Penyuapan dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016, yang telah disosialisasikan kepada seluruh *Stakeholder* Perusahaan yang telah dimutakhirkan pada tanggal 18 Januari 2022.

The Company has a high commitment to creating a healthy business climate, avoiding actions, behaviors or actions that can lead to conflicts of interest, Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) and always prioritizing the interests of the Company above personal, family, group or group interests. The Company also always pays attention to policies on anti-corruption as written in Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption. In line with the above, the Company has established several policies which include:

a. Anti-Bribery Policy and Commitment in the context of implementing the SNI ISO 37001: 2016 Anti-Bribery Management System, which has been socialized to all Company Stakeholders which has been updated on January 18, 2022.

b. Komitmen Pengendalian Penerapan Pengendalian Gratifikasi yang telah dimutakhirkan pada tanggal 17 Desember 2020.

b. Commitment to Control the Implementation of Gratification Control which was updated on December 17, 2020.

PENGEMBANGAN PROGRAM ANTI *FRAUD*

Perusahaan berkomitmen dalam pengembangan program anti fraud melalui beberapa program strategis di antaranya:

1. *Fraud Control System*
   Pupuk Indonesia Group bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengembangkan *Fraud Control System* (FCS) secara bertahap dimulai pada tahun 2017, dengan tahapan sebagai berikut:
   a. Tahun 2017:
      Workhsop Fraud Control System Pupuk Indonesia Group "Menciptakan *Trusted Company* di Era Disruptif Melalui Penerapan *Fraud Control System*" bersama BPKP pada tanggal 5 Desember 2017.
   b. Tahun 2018:
      Diagnostic Assessment Tahap I untuk 4 (empat) entitas (PI, PKG, PKT, dan PSP).
   c. Tahun 2019:
      i. Bimbingan Teknis FCS di PI.
      ii. *Monitoring* pengembangan FCS dan tindak lanjut *Area of Improvement* FCS di 4 (empat) entitas (PI, PKG, PKT, dan PSP).

DEVELOPMENT OF ANTI-FRAUD PROGRAM

The Company is committed to the development of anti-fraud programs through several strategic programs including:

1. Fraud Control System
   Pupuk Indonesia Group in collaboration with the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) has developed a Fraud Control System (FCS) gradually starting in 2017, with the following stages:
   a. Year 2017:
      Workhsop Fraud Control System Pupuk Indonesia Group "Creating a Trusted Company in the Disruptive Era Through the Implementation of Fraud Control System" with BPKP on December 5, 2017.
   b. Year 2018:
      Diagnostic Assessment Phase I for 4 (four) entities (PI, PKG, PKT, and PSP).
   c. Year 2019:
      i. FCS Technical Guidance at PI.
      ii. Monitoring of FCS development and follow-up of FCS Area of Improvement in 4 (four) entities (PI, PKG, PKT, and PSP).

iii. *Diagnostic Assessment* Tahap II untuk 3 (tiga) entitas (PKC, PIM, dan REKIND).

d. Tahun 2020:
   i. Bimbingan Teknis FCS untuk 6 (enam) entitas (PKG, PKC, PKT, PIM, PSP, dan REKIND).
   ii. *Monitoring* pengembangan FCS dan tindak lanjut *Area of Improvement* FCS di 7 (tujuh) entitas (PI, PKG, PKC, PKT, PIM, PSP, dan REKIND).
   iii. *Diagnostic Assessment* Tahap III untuk 4 (empat) entitas (ME,PILOG, PIU, dan PIP).
   iv. Evaluasi Program FCS di PI.
e. Tahun 2021:
   i. Bimbingan Teknis FCS untuk 4 (empat) entitas (ME, PILOG, PIU, dan PIP).
   ii. *Monitoring* pengembangan FCS dan tindak lanjut *Area of Improvement* FCS di 11 (sebelas) entitas PI Group.
   iii. Evaluasi Program FCS di 6 (enam) entitas (PKG, PKC, PKT, PIM, PSP, dan REKIND).
f. Tahun 2022:
   i. *Monitoring* pengembangan FCS dan tindak lanjut *Area of Improvement* FCS di 11 (sebelas) entitas PI Group.
   ii. Evaluasi Program FCS di 4 (empat) entitas (ME, PILOG, PIU, dan PIP).

Dengan adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 sampai dengan 2021 menyebabkan adanya pembatasan ruang gerak dan aktivitas, serta mengakibatkan penundaaan pengembangan FCS di PI Group. Selama tahun 2022-2021, PI Group telah melakukan tindak lanjut atas pengembangan FCS sd tahun 2019. Oleh karena itu, Perseroan melakukan penyesuaian *roadmap* pengembangan FCS tahun 2022-2024 sebagai berikut:

a. Evaluasi FCS di PI.
b. Bimbingan Teknis FCS di 6 (enam) entitas (PKG, PKC, PKT, PIM, PSP, dan REKIND).
c. *Diagnostic Assessment* FCS di 4 (empat) entitas (ME, PILOG, PIU, dan PIP)

2. Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016

Perusahaan dan Anak Perusahaan telah mendapatkan Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016. Berikut sertifikasi yang diperoleh ketujuh Anak Perusahaan:

iii. Diagnostic Assessment Phase II for 3 (three) entities (PKC, PIM, and REKIND).

d. Year 2020:
   i. FCS Technical Guidance for 6 (six) entities (PKG, PKC, PKT, PIM, PSP, and REKIND).
   ii. Monitoring of FCS development and follow-up of FCS Area of Improvement in 7 (seven) entities (PI, PKG, PKC, PKT, PIM, PSP, and REKIND).
   iii. Diagnostic Assessment Phase III for 4 (four) entities (ME, PILOG, PIU, and PIP).
   iv. Evaluation of FCS Program in PI.
e. Year 2021:
   i. FCS Technical Guidance for 4 (four) entities (ME, PILOG, PIU, and PIP).
   ii. Monitoring of FCS development and follow-up of FCS Area of Improvement in 11 (eleven) PI Group entities.
   iii. FCS Program Evaluation in 6 (six) entities (PKG, PKC, PKT, PIM, PSP, and REKIND).
f. Year 2022:
   i. Monitoring of FCS development and follow-up of FCS Area of Improvement in 11 (eleven) PI Group entities.
   ii. FCS Program Evaluation in 4 (four) entities (ME, PILOG, PIU, and PIP).

With the COVID-19 pandemic in 2020 to 2021, there were restrictions on space and activities, and resulted in the postponement of FCS development in PI Group. During 2022-2021, PI Group has conducted follow-up on FCS development until 2019. Therefore, the Company adjusted the FCS development road map for 2022 to 2024 as follows:

a. Evaluation of FCS in PI.
b. FCS Technical Guidance in 6 (six) entities (PKG, PKC, PKT, PIM, PSP, and REKIND).
c. FCS Diagnostic Assessment in 4 (four) entities (ME, PILOG, PIU, and PIP).

2. Implementation of SNI ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP)

The Company and its Subsidiaries have obtained the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System Certificate. The following are the certifications obtained by the six Subsidiaries:

No.	Perusahaan Company	Lembaga Sertifikasi Certification Organization	Nomor Sertifikasi Certification Number	Tanggal Sertifikasi Date of Certification	Berlaku Sampai Valid Until
1	PT Pupuk Kalimantan Timur	British Standards Institutions (BSI)	No. IABMS 729332	16 Juni 2020 June 16, 2020	15 Juni 2023 June 15, 2023
2	PT Petrokimia Gresik	PT Amerika Sistem Registrasi Internasional	No. A37 201007-007	2 Juli 2020 July 2, 2020	30 Juni 2023 June 30, 2023
3	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	TUV Nord Indonesia	No. 03 13 G 20008	15 Juli 2020 July 15, 2020	22 Juli 2023 July 22, 2023
4	PT Pupuk Iskandar Muda	Sucofindo International Certification Service	No. SAB 00009	23 Juli 2020 July 23, 2020	22 Juli 2023 July 22, 2023
5	PT Rekayasa Industri	PT Mutuagung Lestari	No. ABMS-031	10 Agustus 2020 August 10, 2020	10 Agustus 2023 August 10, 2023
6	PT Pupuk Kujang	Sucofindo International Certification Service	No. SAB 00014	10 Agustus 2020 August 10, 2020	10 Agustus 2023 August 10, 2023
7	PT Pupuk Indonesia Utilitas	TUV Nord Indonesia	No. 03 13 A 22000014	7 Januari 2022 January 7, 2022	6 Januari 2025 January 6, 2025

Dalam rangka memastikan kesesuaian implementasi SMAP di PT Pupuk Indonesia (Persero), dan Anak Perusahaan maka pada tahun 2022 direncakan perluasan penerapan SMAP di Seluruh Anak Perusahaan. Adapun anak perusahaan tersebut meliputi: PIN, PILOG, PIP yang akan dilakukan sertifikasi pada tahun 2023

In order to ensure the suitability of SMAP implementation in PT Pupuk Indonesia (Persero), and its subsidiaries, in 2022 it is planned to expand the implementation of SMAP in all subsidiaries. The subsidiaries include: PIN, PILOG, PIP which will be certified in 2023.

Informasi Pemberian Dana untuk Kegiatan Politik

Information on Funding for Political Activities

Perusahaan memiliki kebijakan yang terkait dengan pemberian dana untuk kegiatan politik dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi No. PI-SEK-PD-009 Rev. 2 tanggal 22 November 2021, yang menyatakan bahwa Pemberian Gratifikasi dengan tujuan suap atau yang dianggap pemberian suap Insan Perusahaan DILARANG melakukan pemberian Gratifikasi dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam hubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya, dengan tujuan untuk antara lain namun tidak terbatas padaPerusahaan dilarang memberikan kontribusi, yang berasal dari dana Perusahaan, barang-barang dan fasilitas milik perusahaan, yang ditujukan untuk mendukung partai politik atau kandidat manapun, kecuali sebatas yang dibenarkan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The company has a policy related to the provision of funds for political activities in the Gratification Control Guidelines No. PI-SEK-PD-009 Rev. 2 dated November 22, 2021, which states that Giving Gratuities for the purpose of bribery or what is considered bribery Company personnel are prohibited from giving Gratuities in any form to civil servants or state administrators in relation to their positions and contrary to their duties and obligations, with the aim of, among others but not limited to The Company is prohibited from making contributions, originating from Company funds, goods and facilities owned by the company, which are intended to support any political party or candidate, except to the extent justified by applicable laws and regulations.

Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan independensi Perusahaan sebagai BUMN yang memiliki integritas dalam pengelolaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketentuan pelarangan pemberian dana juga berguna untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan serta mewujudkan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel sesuai peruntukan yang ditetapkan.

This aims to create the independence of the Company as a BUMN that has integrity in management in accordance with applicable regulations. The provisions prohibiting the provision of funds are also useful for avoiding conflicts of interest in decision making and realizing transparent and accountable budget management according to the stipulated allocation.

Etika Perusahaan dalam Berhubungan dengan Pejabat Publik

Corporate Ethhics in Dealing with Public Officials

Perusahaan memiliki kebijakan etika yang mengatur hubungan dengan pejabat publik melalui Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) Perusahaan. Kebijakan tersebut dibuat untuk mengembangkan dan memelihara hubungan baik dan komunikasi efektif dengan setiap jajaran pejabat publik yang memiliki wewenang berkaitan dengan operasional Perusahaan. Perusahaan memelihara hubungan dengan pejabat publik dalam batas toleransi yang diperbolehkan hukum, dan menghindari terjadinya penyelewengan.

The Company has an ethics policy that governs relationships with public officials through the Company's Code of Conduct. The policy is established to develop and maintain good relationships and effective communication with all levels of public officials who have authority related to the Company's operations. The Company maintains relationships with public officials within the limits of tolerance allowed by law, and avoids abuses.

Perusahaan juga melarang pembayaran secara langsung atau tidak langsung kepada pegawai atau pejabat publik di luar kapasitas resmi dan yang bertentangan dengan hukum dan praktik bisnis yang sehat dan etis. Larangan ini berlaku tidak hanya terhadap pembayaran dan pengeluaran yang dilakukan oleh Perusahaan, namun juga terhadap pembayaran dan pengeluaran yang dilakukan untuk dan atas nama Perusahaan oleh wakil Perusahaan.

The Company also prohibits direct or indirect payments to employees or public officials outside of their official capacity and that are contrary to the law and sound and ethical business practices. This prohibition applies not only to payments and expenses made by the Company, but also to payments and expenses made for and on behalf of the Company by Company representatives.

Jamuan terhadap pejabat publik dapat dilakukan oleh wakil Perusahaan sepanjang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, dengan cara yang pantas dan dalam situasi yang tidak memungkinkan terjadinya kompromi dan keberpihakan terhadap pejabat publik tersebut atau situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan terhadap integritas yang bersangkutan atau motif Perusahaan dalam melakukan tindakan tersebut.

Hospitality to public officials may be provided by Company representatives as long as it is within the corridors of applicable law, in an appropriate manner and in circumstances that do not allow for compromise and favoritism towards the public official or circumstances that may raise suspicion of the integrity of the person or the Company's motives for taking such action.

Pelaporan Kekayaan Pejabat

Official Wealth Reporting

PRINSIP DASAR PELAPORAN KEKAYAAN PEJABAT

Sebagai BUMN, Perusahaan juga terikat pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban melaporkan kekayaan oleh Pejabatnya. Tujuan dari pelaporan kekayaan pejabat adalah untuk mendorong Pejabat yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.

DASAR HUKUM PENERAPAN KEWAJIBAN PELAPORAN KEKAYAAN PEJABAT DI PERUSAHAAN

Dalam menerapkan kebijakan mewajibkan Pejabatnya untuk melaporkan kekayaannya, Perusahaan menimbang dasar hukum penerapan kewajiban tersebut, sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara *juncto* Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara, Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara *juncto* Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 2 Tahun 2020 tentang

BASIC PRINCIPLES OF OFFICIAL WEALTH REPORTING

As an SOE, the Company is also bound by laws and regulations governing the obligation to report wealth by its Officials. The purpose of reporting official wealth is to encourage Officials who comply with the general principles of state administration that are free from corrupt practices, collusion, and nepotism, as well as other despicable acts.

LEGAL BASIS FOR THE IMPLEMENTATION OF OFFICIAL WEALTH REPORTING OBLIGATIONS IN THE COMPANY

In implementing the policy of requiring its Officers to report their wealth, the Company considers the legal basis for the implementation of such obligations, as follows:

1. Law No. 28/1999 on Clean and Free State Administration from Corruption, Collusion and Nepotism;
2. Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption in conjunction with Law No. 20 of 2001 on the Amendment to Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption
3. Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission in conjunction with Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission;
4. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises juncto Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 concerning Amendments to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises;
5. Regulation of the Corruption Eradication Commission No. 07 of 2016 concerning Procedures, Registration, Announcement, and Examination of the State Organizer's Wealth Report juncto Regulation of the Corruption Eradication Commission No. 2 of 2020

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara, Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
6. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi No. 12 Tahun 2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
7. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-341/MBU/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021 tentang Pencabutan Instruksi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. INS-01/MBU/2009 tentang Penyelenggara Negara yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
8. Surat Edaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SE-12/MBU/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
9. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 016/KEP.KOM/XII/2021 dan No. 116.1/A/KU/E42/SK/2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) PT Pupuk Indonesia (Persero).
10. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 002/KEP.KOM/II/2022 dan No. 12.1/A/KU/A24/SK/2022 tanggal 16 Februari 2022 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) PT Pupuk Indonesia (Persero).
11. Pedoman Penyusunan dan Pengendalian Dokumen Sistem Manajemen, Dokumen No. PI-STK-PD-001.
12. Pedoman Manajemen Anti Penyuapan, Dokumen No. PI-SEK-PD-007.
13. Pedoman Tata Kelola Kelompok Usaha (*Code of Group Governance*), Dokumen No. PI-SEK-PD-012.

KEBIJAKAN YANG MEWAJIBKAN PELAPORAN KEKAYAAN PEJABAT PERUSAHAAN

Kebijakan tentang pelaporan kekayaan pejabat telah ditetapkan oleh Perusahaan pada tahun 2013 dengan pemutakhiran terkahir pada tahun 2022 yaitu Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat No. PI-SEK-PD-010 Rev. 2 tanggal 8 Juni 2022. Pedoman ini disampaikan ke Anak Perusahaan melalui Surat Edaran No. 10/A/KK/A24/SE/2022 tanggal 8 Juni 2022. Pemutakhiran tersebut mengacu pada Perubahan Lingkup Wajib Lapor dan Kewajiban Pemenuhan LHKPN sebagai Persyaratan Promosi Karyawan

Pejabat yang termasuk Wajib Lapor adalah seluruh pejabat di Perusahaan dan Entitas Anak meliputi:

concerning Amendments to Regulation of the Corruption Eradication Commission No. 07 of 2016 concerning Procedures, Registration, Announcement, and Examination of the State Organizer's Wealth Report;
6. Circular Letter of the Corruption Eradication Commission No. 12 of 2017 dated October 13, 2017 concerning Guidelines for the Management of State Organizers' Asset Reports within State-Owned Enterprises;
7. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-341/MBU/10/2021 dated October 5, 2021 concerning the Revocation of the Instruction of the Minister of State-Owned Enterprises No. INS-01/MBU/2009 concerning State Organizers who are Required to Submit State Organizer Asset Reports (LHKPN) within State-Owned Enterprises.
8. Circular Letter of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SE-12/MBU/10/2021 dated October 5, 2021 concerning the Obligation to Submit State Organizer Asset Reports (LHKPN) for Officials within State-Owned Enterprises;
9. Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 016/KEP.KOM/XII/2021 and No. 116.1/A/KU/E42/SK/2021 dated 16 December 2021 concerning the Code of Conduct of PT Pupuk Indonesia (Persero);
10. Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 002/KEP.KOM/II/2022 and No. 12.1/A/KU/A24/SK/2022 dated February 16, 2022 concerning the Code of Corporate Governance of PT Pupuk Indonesia (Persero).
11. Guidelines for the Preparation and Control of Management System Documents, Document Number PI-STK-PD-001;
12. Anti-bribery Management Guidelines, Document Number PI-SEK-PD-007;
13. Code of Group Governance, Document Number PI-SEK-PD-012.

POLICIES REQUIRING REPORTING OF COMPANY OFFICIALS' WEALTH

The policy on officer wealth reporting was established by the Company in 2013 with the latest update in 2022, namely the Guidelines for Reporting Officer Assets No. PI-SEK-PD-010 Rev. 2 dated June 8, 2022. This guideline was communicated to subsidiaries through Circular Letter No. 10/A/KK/A24/SE/2022 dated June 8, 2022. The update refers to the Changes in the Scope of Mandatory Reporters and the Obligation to Fulfill LHKPN as a Requirement for Employee Promotion.

Officials who are Mandatory Reporters are all officials in the Company and its Subsidiaries including:

Pejabat Official	Induk Perusahaan Parent Company	Anak Perusahaan Subsidiary Company	Perusahaan Terafiliasi Terkonsolidasi Consolidated Affiliated Company
Dewan Komisaris Board of Commissioners	Wajib Lapor Mandatory Reporting	Wajib Lapor Mandatory Reporting	Wajib Lapor Mandatory Reporting
Direksi Board of Directors	Wajib Lapor Mandatory Reporting	Wajib Lapor Mandatory Reporting	Wajib Lapor Mandatory Reporting
Grade I/Setara Grade I/Equivalent	Wajib Lapor Mandatory Reporting	Wajib Lapor Mandatory Reporting	-
Grade II/Setara Grade II/Equivalent	Wajib Lapor Mandatory Reporting	Wajib Lapor Mandatory Reporting	-
Grade III/Setara Grade III/Equivalent	Wajib Lapor Mandatory Reporting	Wajib Lapor Mandatory Reporting	-

Hal ini merupakan perluasan Wajib Lapor yang diamanahkan oleh Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan mengacu pada Surat Edaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SE-12/MBU/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

This is an expansion of Mandatory Reporting mandated by Law No. 28 of 1999 concerning State Administration that is Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism and refers to the Circular Letter of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SE-12/MBU/10/2021 dated October 5, 2021 concerning Obligation to Submit State Organizer Asset Reports (LHKPN) for Officials within State-Owned Enterprises.

Kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat merupakan persyaratan wajib untuk promosi karyawan di PT Pupuk Indonesia (Persero), Anak Perusahaan, dan Perusahaan Terafiliasi yang terkonsolidasi dengan PT Pupuk Indonesia (Persero), yang secara teknis diatur dalam Pedoman dan Prosedur tersendiri berkaitan dengan promosi.

Compliance with the submission of Official Asset Reports is a mandatory requirement for employee promotions at PT Pupuk Indonesia (Persero), Subsidiaries, and Affiliated Companies consolidated with PT Pupuk Indonesia (Persero), which are technically regulated in separate Guidelines and Procedures related to promotions.

PENGELOLAAN PELAPORAN KEKAYAAN PEJABAT PERUSAHAAN

Perusahaan telah menetapkan Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat (UPL). UPL adalah unit yang membidangi fungsi kepatuhan dan sumber daya manusia (SDM) dan/atau unit yang ditunjuk oleh Perusahaan dan Anak Perusahaan untuk menjadi mitra kerja KPK dalam mengelola Laporan Harta Kekayaan Pejabat dan melakukan koordinasi dengan KPK terkait perubahan regulasi pengelolaan e-LHKPN di Perusahaan dan Anak Perusahaan.

UPL memiliki fungsi sebagai Admin Induk Perusahaan dan Admin Anak Perusahaan yang terbagi atas:

1. Admin Induk Perusahaan dikelola oleh unit yang membidangi fungsi kepatuhan dan SDM dan/atau unit yang ditunjuk oleh Perusahaan dalam pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat di Perusahaan. Admin Induk Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

MANAGEMENT OF WEALTH REPORTING OF COMPANY OFFICIALS

The Company has established the Officials' Asset Report Management Unit (UPL). UPL is a unit in charge of compliance and human resources (HR) functions and/or a unit appointed by the Company and its Subsidiaries to become KPK's working partner in managing Officials' Asset Reports and coordinating with KPK regarding changes in e-LHKPN management regulations in the Company and its Subsidiaries.

UPL has a function as a Parent Company Admin and Subsidiary Admin which is divided into:

1. The Company Main Admin is managed by the unit in charge of the compliance and HR functions and/or the unit appointed by the Company in managing the Officials' Asset Reports in the Company. The Company Main Admin has the following duties and responsibilities:

a. Unit yang membidangi fungsi kepatuhan di Perusahaan.
   i. Berkoordinasi dengan KPK dalam hal pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib Lapor di PI Group dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta penggunaan aplikasi e-LHKPN.
   ii. Berkoordinasi dengan KPK dalam kegiatan sosialisasi pengisian Laporan Harta Kekayaan Pejabat di PI Group.
   iii. Mengingatkan Wajib Lapor di Perusahaan untuk mematuhi kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat.
   iv. Melakukan koordinasi dengan UPL di Anak Perusahaan untuk mendorong kepatuhan Wajib Lapor di Anak Perusahaan.
   v. Mengajukan permintaan akun (*username* dan *password*) untuk Admin Induk Perusahaan dan Admin Anak Perusahaan kepada KPK.
   vi. Melakukan *approval*, aktivasi, dan non aktivasi akun Wajib Lapor di PI Group, serta membuat akun Admin Anak Perusahaan.
   vii. Melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat kepatuhan Wajib Lapor, baik dalam pelaporan Harta Kekayaan maupun pengumuman Laporan Harta Kekayaan Pejabat di Perusahaan.
   viii. Menyampaikan rekomendasi pemberian sanksi kepada Direksi Perusahaan yang membawahi fungsi kepatuhan terhadap Wajib Lapor yang tidak patuh dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat beserta dokumen secara lengkap di Perusahaan.
b. Unit yang membidangi fungsi SDM di Perusahaan:
   i. Melakukan pemutakhiran data Wajib Lapor di Perusahaan sewaktu-waktu, setiap terjadi mutasi, rotasi, promosi, demosi, dan pensiun serta melakukan pemutakhiran berkala setiap bulan.
   ii. Melakukan koordinasi dengan UPL di Anak Perusahaan untuk pemutakhiran data Wajib Lapor di seluruh Anak Perusahaan.
   iii. Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib Lapor PI Group kepada KPK sesuai jadwal yang ditetapkan oleh KPK.

2. Admin Anak Perusahaan dikelola oleh unit yang membidangi fungsi kepatuhan dan SDM dan/atau unit yang ditunjuk oleh Anak Perusahaan dalam pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat di masing-masing Anak Perusahaan. Admin Anak Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. The unit in charge of the compliance function in the Company.
   i. Coordinate with KPK in monitoring and evaluating the compliance of Mandatory Reporters in PI Group in reporting and announcing their assets and the use of the e-LHKPN application.
   ii. Coordinate with KPK in socializing the filling of Officials' Asset Reports in PI Group.
   iii. Reminding Mandatory Reporters in the Company to comply with the obligation to submit Official Asset Reports.
   iv. Coordinate with UPL in Subsidiaries to encourage compliance of Mandatory Reporters in Subsidiaries.
   v. Submit account requests (username and password) for Parent Company Admin and Subsidiary Admin to KPK.
   vi. Performing approval, activation, and non-activation of Mandatory Reporting accounts in PI Group, as well as creating Subsidiary Admin accounts.
   vii. Monitoring and evaluating the level of compliance of Mandatory Reporters, both in the reporting of Assets and the announcement of Official Assets Reports in the Company.
   viii. Submitting recommendations for sanctions to the Board of Directors of the Company in charge of the compliance function for Mandatory Reporters who are not compliant in submitting the Official Wealth Report along with complete documents in the Company.
b. The unit in charge of the HR function in the Company:
   i. Updating Mandatory Reporting data in the Company at any time, every time there is a mutation, rotation, promotion, demotion, and retirement and conducting periodic updates every month.
   ii. Coordinate with UPL in Subsidiaries to update the data of Mandatory Reporters in all Subsidiaries.
   iii. Submit staffing data and data on changes in position of PI Group Mandatory Reporters to KPK according to the schedule set by KPK.

2. The Subsidiary Admin is managed by the unit in charge of the compliance and HR functions and/or the unit appointed by the Subsidiary in the management of the Official Wealth Report in each Subsidiary. The Subsidiary Admin has the following duties and responsibilities:

a. Unit yang membidangi fungsi kepatuhan di masing-masing Anak Perusahaan:
   i. Berkoordinasi dengan Admin Induk Perusahaan yang membidangi fungsi kepatuhan dalam hal pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib Lapor dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan penggunaan aplikasi e-LHKPN.
   ii. Mengajukan *approval*, aktivasi, dan non aktivasi akun Wajib Lapor serta Admin Anak Perusahaan di masing-masing Anak Perusahaan kepada Admin Induk Perusahaan yang membidangi fungsi kepatuhan.
   iii. Menyelenggarakan sosialisasi dan pendampingan pengisian Laporan Harta Kekayaan Pejabat di masing-masing Anak Perusahaan.
   iv. Mengingatkan Wajib Lapor di masing-masing Anak Perusahaan untuk mematuhi kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat.
   v. Melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat kepatuhan Wajib Lapor, baik dalam pelaporan Harta Kekayaan maupun pengumuman Laporan Harta Kekayaan Pejabat di masing-masing Anak Perusahaan.
   vi. Menyampaikan rekomendasi pemberian sanksi kepada Direksi Anak Perusahaan yang membawahi fungsi kepatuhan atau Direktur yang ditunjuk oleh Anak Perusahaan dalam pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat terhadap Wajib Lapor yang tidak patuh dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat beserta dokumen secara lengkap di masing-masing Anak Perusahaan.

b. Unit yang membidangi fungsi SDM di masing-masing Anak Perusahaan:
   i. Melakukan pemutakhiran data Wajib Lapor di masing-masing Anak Perusahaan posisi akhir tahun untuk pejabat aktif dan sesuai waktu pensiun untuk pejabat yang pensiun.
   ii. Menyampaikan pemutakhiran data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib Lapor di masing-masing Anak Perusahaan kepada Admin Induk Perusahaan bidang SDM untuk posisi akhir tahun paling lambat tanggal 1 Desember setiap tahunnya atau waktu lain yang ditetapkan oleh KPK.

a. The unit in charge of the compliance function in each Subsidiary:
   i. Coordinate with the Parent Company Admin in charge of the compliance function in terms of monitoring and evaluating the compliance of Mandatory Reporters in reporting and announcing their assets and the use of the e-LHKPN application.
   ii. Submitting approval, activation, and non-activation of Mandatory Reporting and Subsidiary Admin accounts in each Subsidiary to the Parent Company Admin in charge of the compliance function.
   iii. Organizing socialization and assistance in filling out the Officials' Wealth Report in each Subsidiary.
   iv. Reminding Mandatory Reporters in each Subsidiary to comply with the obligation to submit Official Wealth Reports.
   v. Monitoring and evaluating the level of compliance of Mandatory Reporters, both in the reporting of Assets and the announcement of Official Assets Reports in each Subsidiary.
   vi. Submitting recommendations for sanctions to the Directors of Subsidiaries in charge of the compliance function or Directors appointed by Subsidiaries in the management of Officials' Assets Reports for Reporting Obligees who do not comply in submitting Officials' Assets Reports along with complete documents in each Subsidiary.

b. The unit in charge of the HR function in each Subsidiary:
   i. Updating Mandatory Reporting data in each Subsidiary at the end of the year for active officials and at retirement time for retired officials.
   ii. Submit updates of personnel data and data on changes in the position of Mandatory Reporters in each Subsidiary to the Parent Company Admin in the field of HR for year-end positions no later than December 1 of each year or other times determined by the KPK.

SANKSI ATAS KELALAIAN PELAPORAN KEKAYAAN PEJABAT DI PERUSAHAAN

Dalam hal Wajib Lapor tidak melaporkan harta kekayaannya atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang diatur dalam Pedoman dan/atau Peraturan KPK, Direksi yang membawahi kepatuhan atau Direktur yang ditunjuk oleh Perusahaan dan Anak Perusahaan dalam pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat dapat memberikan sanksi administratif kepada Wajib Lapor berdasarkan rekomendasi dari KPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wajib Lapor yang memberikan keterangan tidak benar mengenai Harta Kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis Sanksi bagi Wajib Lapor yang tidak patuh dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat beserta dokumen secara lengkap diberikan sanksi sebagai berikut:

1. Teguran secara lisan;
2. Teguran secara tertulis;
3. Penundaan hak atas:
    a. Pembayaran jasa operasi/bantuan biaya cuti tahunan/sejenisnya bagi pejabat yang pertama kali menjabat, pejabat aktif, dan pejabat yang diangkat kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
    b. Pengangkatan definitif bagi pejabat yang mendapatkan promosi jabatan; atau
    c. Pembayaran pesangon atau sejenisnya bagi pejabat yang berakhir masa jabatan atau pensiun.

Sanksi penundaan hak pada huruf c dapat dicabut setelah kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat beserta dokumen secara lengkap telah dilaksanakan oleh Wajib Lapor sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman. Ketentuan terkait sanksi tersebut ditetapkan dalam Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat No. PI-SEK-PD-010 Rev. 2 tanggal 8 Juni 2023.

TRANSPARANSI PELAPORAN KEKAYAAN PEJABAT PERUSAHAAN TAHUN 2022

Pada periode tahun 2022, seluruh Wajib Lapor Perusahaan telah melaksanakan pelaporan kekayaannya dengan tingkat kepatuhan 100%. Berikut jumlah Wajib Lapor yang melaporkan kekayaannya per masing-masing jabatan.

SANCTIONS FOR FAILURE TO REPORT OFFICIAL WEALTH IN THE COMPANY

In the event that the Reporting Obligor does not report his/her assets or does not fulfill his/her obligations as stipulated in the KPK Guidelines and/or Regulations, the Board of Directors in charge of compliance or the Director appointed by the Company and its Subsidiaries in the management of Officials' Asset Reports may impose administrative sanctions on the Reporting Obligor based on recommendations from the KPK in accordance with applicable provisions. Mandatory Reporters who provide false information regarding their Assets may be subject to sanctions in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. Types of Sanctions for Mandatory Reporters who do not comply in submitting the Official's Asset Report along with complete documents are given the following sanctions:

1. Verbal reprimand;
2. Written reprimand;
3. Postponement of rights:
    a. Payment of operating services/annual leave expenses/etc. for first-time officials, active officials, and reappointed officials after the end of their term of office or retirement; or
    b. Definitive appointment for officials who get promoted; or
    c. Severance pay or similar for officials who end their term of office or retire.

The sanction of postponement of rights in letter c can be revoked after the obligation to submit the Official's Asset Report along with complete documents has been carried out by the Reporting Obligor in accordance with the provisions in the Guidelines. Provisions related to the sanctions are stipulated in the Official Asset Reporting Guidelines No. PI-SEK-PD-010 Rev. 2 dated June 8, 2023.

TRANSPARENCY OF WEALTH REPORTING OF COMPANY OFFICIALS IN 2022

In the 2022 period, all of the Company's Reporting Obligees have carried out their wealth reporting with a 100% compliance rate. The following is the number of Mandatory Reporters who report their wealth per each position.

PENYAMPAIAN LHKPN PEJABAT PERUSAHAAN TAHUN 2022
Submission of LHKPN for Company Officials in 2022

Pejabat Wajib LHKPN	Jumlah Wajib Lapor Number of Mandatory Reporters	Telah Melaporkan Has Reported		Officials Required to LHKPN
		Jumlah Total	%	
Dewan Komisaris	8	8	100	Board of Commissioners
Direksi	8	8	100	Directors
Pejabat *Grade* I	46	46	100	Grade I Official
Pejabat *Grade* II	93	93	100	Grade II Officials
Total	**155**	**155**	**100**	**Total**

STATUS PELAPORAN KEKAYAAN PEJABAT TAHUN 2022 DI ENTITAS ANAK
Reporting Status of 2022 Officials' Wealth in Subsidiaries

Perusahaan Company	Jumlah Wajib Lapor Number of Mandatory Reporters	Telah Melaporkan Has Reported	
		Jumlah Total	%
PT Petrokimia Gresik	122	122	100
PT Pupuk Kujang	77	77	100
PT Pupuk Kalimantan Timur	133	133	100
PT Pupuk Iskandar Muda	36	36	100
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	119	119	100
PT Rekayasa Industri	87	87	100
PT Pupuk Indonesia Niaga	32	32	100
PT Pupuk Indonesia Logistik	17	17	100
PT Pupuk Indonesia Utilitas	17	17	100
PT Pupuk Indonesia Pangan	9	9	100
Total	**649**	**649**	**100**

Pengadaan Barang dan Jasa
Procurement of Goods and Services

KEBIJAKAN DAN PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Perusahaan memiliki kebijakan pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan secara cepat dan transparan, dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik tanpa adanya benturan kepentingan dalam prosesnya. Kebijakan yang diterapkan dalam proses ini mengacu pada:

GOODS AND SERVICES PROCUREMENT POLICY AND GUIDELINES

The Company has a procurement policy that is organized in a fast and transparent manner, by applying the principles of good corporate governance without any conflict of interest in the process. The policy applied in this process refers to:

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4297).
2. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia No. 4756).
3. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaga Negara Indonesia Tahun 2005 No. 117. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4556).
4. Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang & Jasa Badan Usaha Milik Negara.
5. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governence*) Pada Badan Usaha Milik Negara *jo.* Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
6. Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang Tidak Dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Non APBN).
7. Peraturan Menteri Perindustrian RI No. tentang 16 Tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan TKDN.
8. Surat Edaran Menteri BUMN No. S-563/MBU/08/2020 tentang Penggunaan Pasar Digital Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ("PADI UMKM") pada Proses Pengadaan dan Pembelanjaan Barang dan/atau Jasa pada UMKM di Lingkungan BUMN Disertai Pelaporannya.
9. Anggaran Dasar Perusahaan dan Perubahannya.
10. Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan Perubahannya.
11. Perjanjian bersama antara Perusahaan dengan Anak Perusahaan No. 209/A/HK/A21/SP/2020, No. 1475/B/HK.01.01/13/SP/2020, No. 520/PK/SP/UK/XI/2020, No. 10610/SP-BTG/2020, Nomor 196/SP/DIR/PIM/LSM/2020, No. 265/SP/DIR/2020 tanggal 9 November 2020 tentang Implementasi Kewenangan PT Pupuk Indonesia (Persero) sehubungan dengan Penyelenggaraan Fungsi/Bidang Tertentu untuk Anak Perusahaan.

1. Law No. 19 Year 2003 on State-Owned Enterprises (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2003 No. 70, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia No. 4297);
2. Law No. 40 Year 2007 on Limited Liability Companies (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2007 No. 106, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia No. 4756);
3. Government Regulation No. 45 of 2005 on the Establishment, Management, Supervision and Dissolution of State-Owned Enterprises (Indonesian State Agency of 2005 No. 117. Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 4556);
4. Regulation of the Minister of SOEs No. PER-08/MBU/12/2019 concerning General Guidelines for the Implementation of Procurement of Goods & Services of State-Owned Enterprises.
5. Regulation of the Minister of SOEs No. PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises jo. Regulation of the Minister of SOEs No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.
6. Regulation of the Minister of Industry of the Republic of Indonesia No. 3 of 2014 concerning Guidelines for Increasing the Use of Domestic Products in Government Procurement of Goods and Services Not Financed from the State Budget and Regional Budget (Non APBN);
7. Regulation of the Minister of Industry of the Republic of Indonesia No. 16 of 2011 concerning Provisions and Procedures for Calculating TKDN
8. Circular Letter of the Minister of SOEs No. S-563/MBU/08/2020 Regarding the Use of Digital Market for Micro, Small and Medium Enterprises ("PADI UMKM") in the Procurement and Purchasing Process of Goods and/or Services to MSMEs within SOEs and its Reporting.
9. Articles of Association of the Company and its Amendments.
10. Articles of Association of Subsidiaries and Amendments.
11. Joint agreement between the Company and Subsidiaries No. 209/A/HK/A21/SP/2020, No. 1475/B/HK.01.01/13/SP/2020, No. 520/PK/SP/UK/XI/2020, No. 10610/SP-BTG/2020, No. 196/SP/DIR/PIM/LSM/2020, No. 265/SP/DIR/2020 dated November 9, 2020 concerning the Implementation of the Authority of PT Pupuk Indonesia (Persero) in connection with the Implementation of Certain Functions/Fields for Subsidiaries;

12. Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) No. SK/DIR/044/2021 tanggal 7 Januari 2021 tentang Struktur Organisasi PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Perubahannya.
13. Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) No. SK/DIR/048/2021 tanggal 12 April 2021 tentang tanggung jawab Penandatanganan dan Pemaraf Dokumen PT Pupuk Indonesia (Persero).
14. Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 079/A/KU/G13/SK/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Otorisasi Pengesahaan Dokumen Sistem Manajemen di PT Pupuk Indonesia (Persero).
15. Pedoman pengelolaan kepegawaian dalam program transformasi bisnis di Pupuk Indonesia Group Dokumen No. PI-SDM-PD-003.
16. Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Group PTPI No. PIADAPD-002 Revisi 4 tanggal 8 November 2021.
17. Pedoman Pengelolaan *Inventory Material* No. PIADAPD-001 Revisi 1 tanggal 10 Desember 2020.
18. Pedoman Manajemen Anti Penyuapan No. PI-SEK-PD-007.
19. Pedoman Pengelolaan Rekanan No. PI-ADA-PD-003 tanggal 10 Desember 2020.

Dalam pelaksanaannya, PTPI senantiasa menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan kemandirian dari pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses serta prosedur pengadaan barang dan jasa.

PROSEDUR DAN TATA CARA PENGADUAN

Pengelolaan pengadaan dilaksanakan untuk memastikan kecukupan sumber daya dari segi barang dan jasa serta pemenuhannya dilakukan secara wajar sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dalam menunjang kegiatan operasional agar berjalan lancar efektif dan efisien. Kebijakan pengadaan barang dan jasa yang ada di Perusahaan dilakukan dengan tujuan untuk untuk mengatur kegiatan pengadaan jasa yang diperlukan oleh Perusahaan dengan memperhatikan kriteria; spesifikasi, harga, aspek mutu, dan aspek K3HL untuk menjamin jasa yang diadakan sesuai dengan yang diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan serta melalui proses pengadaan yang efektif dan efisien.

Prosedur ini menjelaskan rangkaian aktivitas dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang diperlukan Perusahaan melalui Tender/Seleksi Umum, Tender/Seleksi Terbatas, Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung, Swakelola, *E-Catalogue, E-Purchasing*, Agen Pengadaan, dan PADI UMKM.

12. Decree of the Board of Directors of PT Pupuk Indonesia (Persero) No. SK/DIR/044/2021 dated January 7, 2021 concerning the Organizational Structure of PT Pupuk Indonesia (Persero) and its Amendments.
13. Decree of the Board of Directors of PT Pupuk Indonesia (Persero) No. SK/DIR/048/2021 dated April 12, 2021 concerning the responsibility for signing and initialing documents of PT Pupuk Indonesia (Persero).
14. Decree of the Board of Directors of PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 079/A/KU/G13/SK/2021 dated July 26, 2021 concerning Authorization to Approve Management System Documents at PT Pupuk Indonesia (Persero).
15. Personnel management guidelines in the business transformation program at Pupuk Indonesia Group Document No. PI-SDM-PD-003
16. General Guidelines for the Implementation of Procurement of Goods and Services in PTPI Group No. PIADAPD-002 Revision 4 dated November 8, 2021;
17. Material Inventory Management Guidelines No. PIADAPD-001 Revision 1 dated December 10, 2020.
18. Anti-bribery Management Guidelines No. PI-SEK-PD-007.
19. Associate Management Guidelines No. PI-ADA-PD-003 dated December 10, 2020

In its implementation, PTPI always upholds the principles of honesty and independence of the parties involved directly or indirectly in the process and procedures for the procurement of goods and services.

COMPLAINT PROCEDURE AND PROCEDURE

Procurement management is carried out to ensure the adequacy of resources in terms of goods and services and their fulfillment is carried out reasonably in accordance with the needs of the Company in supporting operational activities to run smoothly effectively and efficiently. The goods and services procurement policy in the Company is carried out with the aim of regulating the procurement of services required by the Company by taking into account the criteria; specifications, prices, quality aspects, and HSE aspects to ensure that the services procured are in accordance with what is needed and can be accounted for and through an effective and efficient procurement process.

This procedure describes a series of activities in carrying out procurement activities for goods and services required by the Company through Public Tender/Selection, Limited Tender/Selection, Direct Selection, Direct Appointment, Direct Procurement, Self-Management, E-Catalogue, E-Purchasing, Procurement Agent, and PADI UMKM.

Manajemen bertanggung jawab dan memiliki kewenangan penuh dalam prosedur dan tata cara pengadaan barang dan jasa. Proses tersebut dimulai dengan rencana pengadaan, proses pengadaan, penerimaan dan penyimpanan, serta pemakaian, penggunaan, dan manajemen aset oleh divisi terkait untuk mendapatkan persetujuan. Prosedur dan tata cara pengadaan meliputi:

1. Prosedur Pengadaan Barang (PI-ADA-PR-001) tanggal 4 Maret 2021;
2. Prosedur Pengadaan Jasa (PI-ADA-PR-002) Revisi 2 tanggal 31 Desember 2022;
3. Prosedur Pengadaan Bersama (PI-ADA-PR-003) tanggal 11 September 2019;
4. Prosedur Perencanaan Pengadaan (PI-ADA-PR-004) tanggal 04 Maret 2021;
5. Prosedur Pengadaan Jasa Distribusi dan Pemasaran (PI-ADA-PR-005) tanggal 25 April 2022;
6. Prosedur Pengadaan Bahan Baku dan Penolong (PI- ADA-PR-006) tanggal 21 Januari 2022;
7. Prosedur Pengelolaan Rekanan (PI-ADA-PR-008) tanggal 18 Oktober 2019.

RENCANA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022

Dalam memastikan pengelolaan pengadaan barang dan jasa berjalan dengan efektif, Perusahaan memiliki target dan perencanaan dalam wujud realisasi program pengadaan barang dan jasa yang disampaikan dalam tabel di bawah ini.

Management is responsible and has full authority in the procedures and procedures for the procurement of goods and services. The process starts with the procurement plan, procurement process, receiving and storage, as well as the use, utilization, and management of assets by the relevant divisions for approval. Procurement procedures and procedures include:

1. Goods Procurement Procedure (PI-ADA-PR-001) dated March 04, 2021;
2. Services Procurement Procedure (PI-ADA-PR-002) Revision 2 dated December 31, 2022;
3. Joint Procurement Procedure (PI-ADA- PR-003) dated September 11, 2019;
4. Procurement Planning Procedure (PI-ADA- PR-004) dated March 04, 2021;
5. Procedure for Procurement of Distribution and Marketing Services (PI-ADA- PR-005) dated April 25, 2022;
6. Procedure for Procurement of Raw and Supporting Materials (PI-ADA- PR-006) dated January 21, 2022;
7. Associate Management Procedure (PI-ADA- PR-008) dated October 18, 2019.

ACTIVITY PLAN AND IMPLEMENTATION IN 2022

In ensuring that the management of goods and services procurement runs effectively, the Company has targets and plans in the form of realization of goods and services procurement programs presented in the table below.

TARGET DAN REALISASI KEGIATAN
Activity Target and Realization

No.	Target/Rencana	Target/Plan
1	Implementasi *Enhancement* pada Aplikasi *Tools of Material & Service* (TOMS)	Enhancement Implementation on Tools of Material & Service (TOMS) Application
2	Implementasi *Enhancement* pada Aplikasi *E-Procurement*	Enhancement Implementation on E-Procurement Application
3	Implementasi Aplikasi *Dashboard* Bahan Baku (*Stock-view*) PI Group	Implementation of PI Group's Raw Material Dashboard Application (Stock-view)
4	Implementasi *Modul Warehouse Management* SAP	Implementation of SAP Warehouse Management Module

DAMPAK DAN CAPAIAN DI BIDANG PENGADAAN
Impact and Outcomes in Procurement

No	Dampak dari Pelaksanaan Kegiatan Impact of Activity Implementation	Capaian Kegiatan Activity Outcomes
1	Nilai pengadaan sentralisasi menjadi lebih tinggi. Higher value of centralized procurement.	Nilai Sentralisasi pengadaan: +Rp24,22 triliun. Value of Centralized procurement: +Rp24.22 trillion
2	Tingkat penghematan perolehan pengadaan menjadi lebih baik. Better procurement acquisition savings rate.	Nilai penghematan sentraliasi pengadaan: +Rp2,099 triliun. Value of procurement centralization savings: +Rp2.099 trillion
3	*Enhancement* aplikasi TOMS untuk penyeragaman proses *cataloguing material code* di seluruh anak perusahaan. Enhancement of TOMS application for material code cataloguing process uniformity across subsidiaries.	Implementasi *Enhancement* Program *Cataloguing* di seluruh anak perusahaan pupuk. Implementation of Enhancement Program Cataloguing in all fertilizer subsidiaries.
4	*Enhancement* aplikasi *E-Procurement* untuk menunjang proses sentralisasi pengadaan. Enhancement of E-Procurement application to support centralized procurement process.	Pembaruan meningkatkan optimaliasi proses sentralisasi pengadaan. Updates improve optimization of centralized procurement process
5	Implementasi Aplikasi *Stockview* sebagai *Dashboard monitoring stock* bahan baku PI grup. Implementation of Stockview Application as a Dashboard for monitoring PI group raw material stock.	Meningkatkan proses pengendalian stok bahan baku di seluruh anak perusahaan pupuk. Improved raw material stock control processes across all fertilizer subsidiaries
6	Implementasi *Warehouse Management System* untuk optimalisasi dan *monitoring* transaksi pergudangan. Implementation of Warehouse Management System for optimization and monitoring of warehousing transactions	Penyeragaman proses bisnis pergudangan semua anak perusahaan pupuk. Uniformity of warehousing business processes of all fertilizer subsidiaries

RANTAI PASOKAN

Dalam menjalankan usaha, PI Group bekerja sama dengan pemasok barang dan jasa mengingat Perusahaan tidak dapat mencukupi semua kebutuhan barang dan jasa secara mandiri. Berikut adalah rincian jumlah pemasok secara geografis dan nilai realisasi kontrak sepanjang tahun 2022.

SUPPLY CHAIN

In running the business, PI Group works with suppliers of goods and services considering that the Company cannot fulfill all the needs of goods and services independently. The following is a breakdown of the number of suppliers geographically and the value of contract realization throughout 2022.

JUMLAH PEMASOK DAN NILAI KONTRAK
Number of Suppliers and Contract Value

Kategori Pemasok	Jumlah Pemasok Number of Suppliers		Nilai Kontrak (Rp miliar) Contract Value (Rp billion)		Supplier Category
	2022	2021	2022	2021	
Pemasok Nasional	2.686	3.433	48.558	17.916	National Supplier
Pemasok Internasional	127	170	22.123	11.672	International Supplier
Jumlah	**2.813**	**3.603**	**70682**	**29.589**	**Total**

Whistleblowing System

Whistleblowing System

Sebagai upaya untuk mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Perusahaan mengimplementasikan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*whistleblowing system*) yang bertujuan tujuan agar Perusahaan dapat: (i) menerapkan budaya kerja yang konsisten dalam menegakkan tata nilai Perusahaan, (ii) mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan baik secara finansial maupun non-finansial dalam rangka menjaga serta melindungi aset serta reputasi Perusahaan, (iii) mendorong upaya pengawasan oleh semua pihak sehingga menciptakan budaya malu untuk melakukan pelanggaran, dan (iv) menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Perusahaan.

KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WBS)

Dalam mengimplementasikan Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS), Perusahaan mengacu pada landasan hukum, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN, yaitu pada Pasal 2 ayat (2) yang mengatur bahwa dalam rangka penerapan GCG, Direksi harus menyusun mekanisme terkait pelaporan atas dugaan penyimpangan di Perusahaan.
6. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG pada BUMN, yaitu pada Parameter 13 yang mengatur

As an effort to support the implementation of good corporate governance, the Company implements a Whistleblowing System with the aim that the Company can: (i) implement a consistent work culture in upholding the Company's values, (ii) encourage reporting of matters that cause losses to the Company both financially and non-financially in order to maintain and protect the Company's assets and reputation, (iii) encourage supervisory efforts by all parties so as to create a culture of shame for committing violations, and (iv) create a transparent and accountable environment within the Company.

WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) POLICY

In implementing the Whistleblowing System (WBS), the Company refers to the legal basis, as follows:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 28 of 1999 on the Implementation of a State that is Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism;
2. Law of the Republic of Indonesia No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission in conjunction with Law No. 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission
3. Law of the Republic of Indonesia No. 13/2006 on Witness and Victim Protection
4. Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 43 of 2018 concerning Procedures for Implementing Community Participation and Awarding in the Prevention and Eradication of Corruption;
5. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs, namely in Article 2 paragraph (2) which stipulates that in the context of implementing GCG, the Board of Directors must develop a mechanism related to reporting suspected irregularities in the Company;
6. Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of GCG Implementation in SOEs, namely in Parameter 13

bahwa Perusahaan harus memiliki kebijakan tentang sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perusahaan (*Whistleblowing System*).
7. Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 79 Tahun 2020 dan No. 018/A/PA.08.01/E42/SP/2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Penanganan Pengaduan terkait Tindak Pidana Korupsi dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (WBS Terintegrasi PI-KPK).
8. Pedoman Sistem Pelaporan dan Pelanggaran-SPP (*Whistleblowing System*), Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2008.
9. Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan TPK Terintegrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021 yang disampaikan melalui surat Pimpinan KPK No. B/4136/PM.00.00/30-35/07/2021 tanggal 23 Juli 2021.
10. Pedoman Sistem Manajemen Pengendalian *Fraud* (*Fraud Control System*), Dokumen No. PI-SEK-PD-014 dan perubahannya.
11. Pedoman Manajemen Anti Penyuapan, Dokumen No. PI-SEK-PD-007, dan perubahannya.
12. Pedoman Tata Kelola Kelompok Usaha (*Code of Group Governance*) Nomor Dokumen PI-SEK-PD-012 dan perubahannya.

which stipulates that the Company must have a policy on a reporting system for alleged irregularities in the Company (Whistleblowing System).
7. Cooperation Agreement between the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia and PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 79 of 2020 and No. 018/A/PA.08.01/E42/SP/2021 dated March 2, 2021 concerning Handling of Complaints related to Corruption in Efforts to Eradicate Corruption (PI-KPK Integrated WBS).
8. Whistleblowing System Guidelines, National Committee on Governance Policy, 2008;
9. Guidelines for the Integrated Corruption Complaint Handling System, Corruption Eradication Commission, 2021 conveyed through KPK Chairman's letter No. B/4136/PM.00.00/30-35/07/2021 dated July 23, 2021
10. Fraud Control Management System Guidelines, Document No. PI-SEK-PD-014 and its amendments
11. Anti-bribery Management Guidelines, Document No. PI-SEK-PD-007, and its amendments
12. Code of Group Governance Document No. PI-SEK-PD-012 and its amendments

Mengacu pada hal di atas, Perusahaan telah menetapkan mekanisme Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) yang diatur dalam Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) Dokumen No. PI-SEK-PD-011 Rev.2 tanggal 29 Maret 2022 dan Prosedur Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) Dokumen No. PI-SEK-PR-013 Rev.2 tanggal 26 September 2022.

Referring to the above, the Company has established a mechanism for managing the Whistleblowing System (WBS) as stipulated in the Whistleblowing System Guidelines (WBS) Document No. PI-SEK-PD-011 Rev.2 dated March 29, 2022 and the Whistleblowing System Management Procedure (WBS) Document No. PI-SEK-PR-013 Rev.2 dated September 26, 2022.

PRINSIP DASAR SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Guna mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pelaporan pelanggaran, maka Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) Perusahaan diterapkan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip berikut:

BASIC PRINCIPLES OF WHISTLEBLOWING SYSTEM

In order to accelerate and facilitate the follow-up process of reporting violations, the Company's Whistleblowing System (WBS) is implemented by upholding the following principles:

No.	Prinsip Principle	Penjelasan	*Explanation*
	Kepastian Hukum	Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal yang berlaku, serta mempertimbangkan aspek kepatutan dan kewajaran, dan dapat memberikan perlindungan bagi pihak terkait.	The implementation of the Whistleblowing System (WBS) prioritizes the basis of applicable laws and regulations and internal provisions, as well as considering aspects of propriety and fairness, and can provide protection for related parties.
	Akuntabel	Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran menjunjung tinggi kebenaran atas data dan informasi yang disampaikan dan pertanggungjawabannya	The implementation of the Whistleblowing System upholds the truth of the data and information submitted and its accountability.

No.	Prinsip Principle	Penjelasan	*Explanation*
	Transparan	Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran menjunjung tinggi transparansi informasi pada pihak berwenang apabila mengetahui terdapat penyimpangan dari pelaksanaan proses bisnis yang berlaku	The implementation of the Whistleblowing System upholds the transparency of information to the authorities if there is a deviation from the implementation of the applicable business processes.
	Kehati-hatian	Dalam pelaksanaan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran harus berpegang pada asas kehati-hatian, yakni dengan memperhitungkan dampak/risiko yang terkecil bagi Perusahaan dan/atau Pejabat/Personel terkait	The implementation of the Whistleblowing System Guidelines must adhere to the principle of prudence, namely by taking into account the smallest impact/risk for the Company and/or related Officials/Personnel.
	Non Diskriminatif	Setiap Insan Perusahaan memiliki hak yang sama untuk dapat melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh setiap Insan Perusahaan yang terjadi di lingkungan Perusahaan sesuai dengan bentuk tindakan pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran	Every employee of the Company has the same right to be able to report violations committed by every employee of the Company that occur within the Company in accordance with the form of violations that can be reported through the Whistleblowing System.
	Itikad Baik	Setiap pelaporan pelanggaran dilakukan atas dasar itikad baik dengan tujuan untuk kepentingan Perusahaan, bukan dilakukan atas dasar fitnah atau tanpa dasar/bukti	Any reporting of violations is done on the basis of good faith with the aim of the interests of the Company, not done on the basis of slander or without basis/evidence
	Kerahasiaan	Dalam melakukan proses tindak lanjut atas setiap pengaduan, Sistem Pelaporan Pelanggaran ini menjaga kerahasiaan serta asas praduga tidak bersalah	In conducting a follow-up process on each complaint, this Whistleblowing System maintains confidentiality and the principle of presumption of innocence.
	Koordinasi	Penanganan pengaduan harus dilakukan dengan kerja sama yang baik antara pejabat yang berwenang	Complaint handling should be carried out with good cooperation between authorized officials
	Objektivitas	Penanganan pengaduan pada Sistem Pelaporan Pelanggaran harus berdasar fakta atau bukti yang dapat dinilai	Handling complaints in the Whistleblowing System must be based on facts or evidence that can be assessed.
	Perlindungan	Perusahaan memberikan perlindungan terhadap Pelapor dan pihak-pihak yang terkait dalam pelaporan pelanggaran serta memastikan tidak terdapat intimidasi dan diskriminasi	The Company provides protection to the Whistleblower and parties involved in reporting violations and ensures that there is no intimidation and discrimination.
	Efektif	Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran dilakukan dengan terstandardisasi dan taat hukum mengacu pada ketentuan umum yang ada di dalam Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	The implementation of the Whistleblowing System is carried out in a standardized and law-abiding manner referring to the general provisions contained in the Whistleblowing System Guidelines and applicable laws and regulations.
12	Efisien	Aktivitas pelaporan pelanggaran dilakukan dengan tetap memperhatikan penggunaan berbagai sumber daya dan/atau perangkat perusahaan secara efisien dalam mendukung pelaksanaan	Whistleblowing activities are carried out while still paying attention to the efficient use of various company resources and/or devices in supporting the implementation of

RUANG LINGKUP DAN CAKUPAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Perusahaan memberikan batasan yang jelas untuk setiap pelaporan yang dapat diproses lebih lanjut oleh Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS). Batasan dan kategori aduan yang ditindaklanjuti oleh Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah tindakan yang dapat merugikan Perusahaan baik secara finansial dan/atau non finansial, meliputi:

SCOPE AND COVERAGE OF WHISTLEBLOWING SYSTEM

The Company provides clear limitations for each report that can be further processed by the Whistleblowing System (WBS). The limitations and categories of complaints that are followed up by the Whistleblowing System are actions that can harm the Company either financially and/or non-financially, including:

a. Penyimpangan Kode Etik/Perilaku dan Peraturan Perusahaan

Penyimpangan Kode Etik/Perilaku dan Peraturan Perusahaan merupakan perbuatan yang melanggar kode etik/kode perilaku dan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh Perusahaan. Contoh perbuatan tersebut adalah, namun tidak terbatas pada:

i. Bertindak di luar kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain yang dapat merugikan Perusahaan.
ii. Perbuatan yang melanggar sistem dan prosedur yang diatur dalam Pedoman/Prosedur Perusahaan dan menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.

b. Benturan Kepentingan

Situasi atau kondisi di mana Insan Perusahaan yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi/golongan atas setiap penggunaan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Contoh perbuatan di atas adalah namun tidak terbatas pada:

i. Pemberian keputusan penujukan pihak tertentu sebagai penyedia barang/jasa dengan tidak melalui prosedur yang seharusnya, dimana Insan Perusahaan tersebut memiliki kepentingan ekonomis pada pihak yang ditunjuk tersebut.
ii. Melakukan suatu tindakan/pemberian keputusan yang menguntungkan diri sendiri/orang lain dengan melanggar prosedur Perusahaan.

c. Kecurangan

Perbuatan tidak jujur atau tipu muslihat, meliputi penipuan, pemerasan, pemalsuan, penyembunyian atau penghancuran dokumen/laporan, pembuatan dan penggunaan dokumen palsu, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap Perusahaan atau pihak lain. Contoh perbuatan di atas adalah namun tidak terbatas pada membuat dan/atau menggunakan dan/atau memberikan dan/atau mengubah dan/atau menyalin dan/atau menggandakan data dan/atau keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya sehingga merugikan Perusahaan.

d. Korupsi

Perbuatan yang dilakukan secara curang atau melawan hukum oleh Insan Perusahaan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan dan/atau penyalahgunaan wewenang jabatan/kepercayaan yang diberikan kepada yang bersangkutan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, dan/atau orang lain, dan/atau korporasi yang dapat merugikan Perusahaan. Contoh perbuatan di atas adalah namun tidak terbatas pada melakukan markup pada proses

a. Deviations from the Code of Ethics/Behavior and Company Regulations

Deviations from the Code of Ethics/Code of Conduct and Company Regulations are actions that violate the code of ethics/code of conduct and other regulations set by the Company. Examples of such actions are, but not limited to:

i. Acting outside the authority with the aim of benefiting oneself or other parties that may harm the Company.
ii. Actions that violate the systems and procedures stipulated in the Company's Guidelines/Procedures and cause losses to the Company.

b. Conflict of Interest

Situations or conditions where Company personnel who obtain power and authority have or are suspected of having personal/group interests in every use of their power and authority, so that it can affect the quality and performance that should be. Examples of the above actions are but not limited to:

i. The decision to appoint a certain party as a goods/services provider without going through the proper procedures, where the Company Personnel has an economic interest in the appointed party.

ii. Performing an action/decision that benefits oneself/others by violating the Company's procedures.

c. Cheating

Dishonest or deceitful acts, including fraud, extortion, forgery, concealment or destruction of documents/reports, creation and use of false documents, committed by a person or group of people that cause potential or real losses to the Company or other parties. Examples of the above actions are but not limited to making and/or using and/or providing and/or changing and/or copying and/or duplicating data and/or information that is not in accordance with the actual conditions to the detriment of the Company.

d. Corruption

Actions carried out fraudulently or unlawfully by Company personnel that are contrary to the interests of the Company and/or abuse of the authority of the position/trust given to the person concerned with the aim of enriching themselves, and/or other people, and/or corporations that can harm the Company. Examples of the above actions are but not limited to markup in the process of procurement of goods and services, sales, purchases and others for the purpose

pengadaan barang dan jasa, penjulan, pembelian dan lainnya untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang menyebabkan kerugian Perusahaan.

e. Pencurian
Perbuatan mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Contoh perbuatan tersebut adalah namun tidak terbatas pada mencuri aset milik Perusahaan dan/atau orang lain/karyawan untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

f. Penggelapan
Tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta Perusahaan oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan Perusahaan, dengan tujuan untuk mengalih-milik, menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Contoh perbuatan tersebut adalah namun tidak terbatas pada: menyalahgunakan atau mengambil tanpa alasan uang, barang, data, dokumen atau barang berharga lainnya milik Perusahaan dan/atau orang lain yang dikuasakan kepadanya.

g. Suap
Perbuatan memberi uang sogok dan atau memberi hadiah, janji, yang diberikan atau diterima dalam bentuk apapun kepada seseorang yang berpengaruh atau berhubungan dengan jabatannya dengan tujuan ingin mendapatkan sesuatu untuk kepentingan pribadi ataupun korporasi. Contoh perbuatan tersebut adalah namun tidak terbatas pada: melakukan suap kepada pihak lain di mana perbuatan tersebut melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Pemerasan
Perbuatan Insan Perusahaan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang. Contoh perbuatan tersebut adalah namun tidak terbatas pada: melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi/golongan/pihak lain.

i. Penipuan
Perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

of benefiting themselves or others that cause losses to the Company.

e. Theft
The act of taking an item, which wholly or partially belongs to another person, with the intention of unlawfully possessing it. Examples of such actions are but not limited to stealing assets belonging to the Company and/or other people/employees for personal or other interests.

f. Embezzlement
The dishonest act of concealing the Company's goods/assets by one or more persons without the Company's knowledge, with the purpose of transferring ownership, control, or use for other purposes. Examples of such actions are but not limited to: misuse or take without reason money, goods, data, documents or other valuables belonging to the Company and/or other people authorized by him.

g. Bribery
The act of giving bribes and or giving gifts, promises, given or received in any form to someone who is influential or related to his position with the aim of obtaining something for personal or corporate interests. Examples of these actions are but not limited to: making bribes to other parties where such actions violate the provisions and regulations of the applicable laws and regulations.

h. Extortion
Acts of the Company's personnel with the intent to unlawfully benefit themselves or others, forcing a person by force or threat of force to give something that wholly or partially belongs to that person or another person, or to create debt or write off receivables. Examples of such acts are but not limited to: making unauthorized levies in any form in carrying out their duties for personal/group/other party interests.

i. Fraud
Actions with intent to unlawfully benefit oneself or another person, by using a false name or false dignity, by deceit, or by a series of lies, to induce another person to surrender something to him, or to give a debt or to cancel a debt.

j. Gratifikasi yang Ilegal
Perbuatan memberi dan/atau menerima dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Insan Perusahaan terkait dengan wewenang/jabatannya di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme Insan Perusahaan. Contoh perbuatan tersebut adalah namun tidak terbatas pada:
i. Menerima hadiah/imbalan dari penyedia jasa sebagai wujud ucapan terima kasih yang melanggar ketentuan dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi Perusahaan.
ii. Menerima janji/hadiah/imbalan dari pihak lain untuk mempengaruhi suatau keputusan yang dapat merugikan Perusahaan melanggar ketentuan dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi Perusahaan.

Sistem Pelaporan Pelanggaran hanya akan menindaklanjuti pengaduan atas perbuatan/tindakan sebagaimana pada huruf a sampai dengan j. Untuk pengaduan terkait dengan Keselamatan, Kesehatan, Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH), Sumber Daya Manusia, dan fasilitas Perusahaan dapat disampaikan kepada pihak terkait dengan menggunakan mekanisme pelaporan yang berlaku di Perusahaan.

PENGELOLA SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WBS)

Penanggung jawab Sistem Pelaporan Pelanggaran di Perusahaan adalah Direktur Utama yang dapat dibantu oleh Direktur yang membawahi fungsi Tata Kelola dan Kepatuhan, maupun Direktur yang membawahi fungsi lain yang ditunjuk oleh Direktur Utama.

Direktur Utama menetapkan unit yang membidangi fungsi Tata Kelola dan Kepatuhan di Perusahaan sebagai Tim Penanganan Aduan (TPA) yang bertugas mengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran.

TPA bertanggung jawab kepada Direktur yang membawahi fungsi Tata Kelola dan Kepatuhan, maupun Direktur yang membawahi fungsi lain yang ditunjuk oleh Direktur Utama. Tugas dan Tanggung Jawab TPA sekurang-kurangnya meliputi, hal berikut, namun tidak terbatas pada:
1. Melakukan klarifikasi atas aduan pelanggaran yang disampaikan pelapor.

j. Illegal Gratuities
The act of giving and/or receiving in a broad sense, which includes the provision of money, goods, rebates (discounts), commissions, interest-free loans, travel tickets, lodging facilities, tourist trips, free medical treatment, and other facilities, whether received domestically or abroad, and which are carried out using electronic means or without electronic means, which are carried out by Company Personnel related to their authority/position in the Company, so that they can cause conflicts of interest that affect the independence, objectivity and professionalism of Company Personnel. Examples of such actions are but not limited to:

i. Receiving gifts/remuneration from service providers as a form of gratitude in violation of the provisions in the Company's Gratification Control Guidelines.

ii. Receiving promises/gifts/reward from other parties to influence a decision that may harm the Company violates the provisions in the Company's Gratification Control Guidelines.

The Whistleblowing System will only follow up on complaints of acts/actions as in letters a to j. For complaints related to Safety, Health, Work and Environment (K3LH), Human Resources, and Company facilities can be submitted to the relevant parties by using the applicable reporting mechanism in the Company.

WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) MANAGER

The person in charge of the Whistleblowing System in the Company is the President Director who may be assisted by the Director in charge of the Governance and Compliance function, or the Director in charge of other functions appointed by the President Director.

The President Director appoints the unit in charge of the Governance and Compliance function in the Company as the Complaint Handling Team (TPA) in charge of managing the Whistleblowing System.

TPA is responsible to the Director in charge of the Governance and Compliance function, as well as the Director in charge of other functions appointed by the President Director. The Duties and Responsibilities of the TPA include, at least, the following, but are not limited to:
1. Clarify the violation complaint submitted by the reporter;

2. Mengkoordinasi pengungkapan tindak lanjut aduan pelanggaran dan perlindungan pelapor.
3. Melakukan reviu dan evaluasi perbaikan sistem WBS.
4. Tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut, namun tidak terbatas pada:
   a. Berhubungan dengan pihak terlapor untuk memperoleh penjelasan mengenai fakta yang diadukan ataupun klarifikasi atas pengaduan.
   b. Mendiskusikan kasus yang ditangani dengan pihak yang tidak terkait/berwenang.
   c. Berusaha untuk melakukan investigasi atau wawancara atas kasus yang dilaporkan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

WBS TINDAK PIDANA KORUPSI TERINTEGRASI PTPI DAN KPK RI

Perusahaan senantiasa berkomitmen dalam mencegah *fraud* yang salah satunya melalui pengembangan WBS. Sejalan dengan komitmen tersebut dan menindaklanjuti surat Sekretaris Kementerian BUMN No. S-489/S. MBU/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Kerjasama WBS di BUMN dengan KPK RI, maka Perusahaan telah melaksanakan kerja sama terkait dengan WBS Tindak Pidana Korupsi (TPK) Terintegrasi PI dan KPK RI pada tanggal 2 Maret 2021.

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:
1. Penyusunan dan/atau penguatan aturan internal PTPI terkait penanganan pengaduan tindak pidana korupsi;
2. Komitmen pengelolaan penanganan pengaduan terkait tindak pidana korupsi;
3. Penanganan pengaduan terkait tindak pidana korupsi melalui aplikasi;
4. Koordinasi dan kegiatan bersama penanganan pengaduan terkait tindak pidana korupsi; dan
5. Pertukaran data dan/atau informasi terkait tindak pidana korupsi.

Adapun rincian kegiatan yang telah dilakukan bersama dengan KPK RI pada tahun 2022 sebagai berikut:

2. Coordinate the disclosure of follow-up complaints and whistleblower protection;
3. Review and evaluate improvements to the WBS system;
4. Not allowed to do the following, but not limited to:
   a. Liaise with the reported party to obtain an explanation of the facts complained of or clarification of the complaint;
   b. Discussing the case with unrelated/authorized parties;
   c. Attempting to conduct investigations or interviews on reported cases without permission from the competent authorities.

INTEGRATED WBS OF CORRUPTION CRIME BETWEEN PTPI AND KPK RI

The Company is always committed to preventing fraud, one of which is through the development of WBS. In line with this commitment and following up on the letter from the Secretary of the Ministry of BUMN No. S-489/S. MBU/12/2020 dated December 22, 2020 regarding WBS Cooperation in SOEs with the Indonesian Corruption Eradication Commission (KPK RI), the Company has carried out cooperation related to the Integrated Corruption Crime (TPK) WBS between PI and KPK RI on March 2, 2021.

The scope of the Cooperation Agreement includes:
1. Preparation and/or strengthening of PTPI internal rules related to handling complaints of corruption crimes;
2. Commitment to managing the handling of complaints related to corruption crimes;
3. Handling complaints related to corruption crimes through the application;
4. Coordination and joint activities in handling complaints related to corruption crimes; and
5. Exchange of data and/or information related to corruption crimes.

The details of the activities that have been carried out together with KPK RI in 2022 are as follows:

No.	Kegiatan	Activities
1	Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi WBS TPK terintegrasi PI dan KPK pada tanggal 4 Maret 2022.	Implementation of Monitoring and Evaluation of WBS TPK integrated with PI and KPK on March 4, 2022
2	Telah dilakukan pengesahan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) Dokumen No. PI- SEK-PD-011 Rev 2. tanggal 29 Maret 2022 dan disampaikan kepada Anak Perusahaan melalui Surat Edaran No. 08/A/KK/A24/SE/2022 tanggal 22 April 2022.	The Whistleblowing System Guidelines have been ratified Document No. PI-SEK-PD-011 Rev 2. dated March 29, 2022 and submitted to Subsidiaries through Circular Letter No. 08/A/KK/A24/SE/2022 Dated April 22, 2022.

No.	Kegiatan	Activities
3	1. *Kick Off Meeting* Pengembangan WBS Multi Company tanggal 24 Mei 2022. 2. Penyusunan SRS dan Pengembangan Sistem Mei-Oktober 2022. Rapat Persiapan UAT tanggal 4 Oktober 2022. 1. *Time Line*: • UAT tanggal 13 Oktober 2022; • EUT Internal PI tanggal 20 Oktober 2022; • EUT Anper tanggal 24 Oktober 2022; Go Live tanggal 28 Oktober 2022	1. Kick Off Meeting of Multi Company WBS Development on May 24, 2022. 2. SRS Preparation and System Development May-October 2022. UAT Preparation Meeting on October 4, 2022. 1. Time Line: • UAT dated October 13, 2022; • EUT Internal PI dated October 20, 2022; • EUT Anper dated October 24, 2022; Go Live on October 28, 2022
4	1. Telah dilakukan koordinasi dengan KPK terkait dengan proses PKS dengan LPSK. 2. Akan dilakukan kajian internal terait dengan kebutuhan penyusunan PKS.	1. Coordination has been conducted with KPK regarding the PKS process with LPSK. 2. An internal study will be conducted regarding the need for the preparation of PKS.
5	Prosedur Pemberian Perlindungan kepada Pelapor dan Petugas dalam proses penyusunan draft dengan progres 70%.	Procedures for Providing Protection to Whistleblowers and Officers are in the process of being drafted with 70% progress.
6	Telah dilakukan pengesahan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) Dokumen No. PI-SEK-PD-011 Rev 2 tanggal 29 Maret 2022 dan disampaikan kepada Anak Perusahaan melalui Surat Edaran.	The Guidelines for Whistleblowing System (WBS) Document No. PI-SEK-PD-011 Rev 2. dated March 29, 2022 and delivered to Subsidiaries through Circular Letter.
7	Telah dilakukan pengesahan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) Dokumen No. PI-SEK-PD-011 Rev 2 tanggal 29 Maret 2022 dan disampaikan kepada Anak Perusahaan melalui Surat Edaran.	The Guidelines for Whistleblowing System (WBS) Document No. PI-SEK-PD-011 Rev 2. dated March 29, 2022 and delivered to Subsidiaries through Circular Letter.
8	Telah dilakukan pengesahan Prosedur Pemberian Penghargaan atas Pelaporan Pelanggaran melalui WBS Dokumen No. PI-SEK-PR-020 Rev. 0 tanggal 26 September 2022.	Procedure for Awarding Violation Reporting through WBS Document No. PI-SEK-PR-020 Rev. 0 Date September 26, 2022
9	1. Telah dilakukan Bimbingan Teknis Dunia Usaha Berintegraitas Kolaborasi PI dan KPK tanggal 2 Agustus 2022 yang salah satunya terdapat pembahasan terkait dengan penyampaian aduan dugaan pelanggaran secara efektif melalui WBS.	1. Conducted an Anti-Corruption Culture Internalization Webinar at PI Group with the theme "Optimizing WBS in Efforts to Prevent Corruption and Corporate Crime, to Realize Clean and Corruption-Free SOEs", on December 10, 2021. 2. Technical Guidance for Business World with Integrity Collaboration between PI and KPK was conducted on August 2, 2022, one of which included discussions related to the effective submission of complaints of alleged violations through the WBS.
10	Dilakukan sosialisasi budaya antikorupsi kepada *stakeholder* melalui: 1. *Website* Perusahaan. 2. Penyampaian Komitmen Anti Gratifikasi Akhir Tahun 2021 dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2022. 3. Internalisasi Budaya Antikorupsi pada *Vendor Gathering* tanggal 21 November 2022	Socialization of anti-corruption culture to stakeholders through: 1. Company Website 2. Submission of Anti-Gratification Commitment for End of Year 2021 and Eid Al-Fitr 2022 3. Internalization of Anti-Corruption Culture at Vendor Gathering on November 22, 2021, for Vendor Gathering in 2022 will be carried out in December 2022.
11	1. Dilakukan penyusunan Video Komitmen *Senior Leader* dan Karyawan terkait dengan Budaya Antikorupsi dan *Launching* WBS terintegrasi. 2. Akan dilaksanakan *Talkshow* pada saat perayaan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2022.	1. Conducted a Webinar on Internalization of Anticorruption Culture at Pupuk Indonesia Group on December 10, 2021. 2. Preparation of Senior Leader and Employee Commitment Videos related to Anti-Corruption Culture and Launching of integrated WBS. 3. A talk show will be held during the celebration of World Anti-Corruption Day 2022.
12	Mengikutsertakan 3 (tiga) perwakilan dari PT Pupuk Indonesia (Persero) dalam pelatihan Peluit Integritas yang diselenggarakan oleh KPK pada tanggal 4-8 April 2022 yang terdiri dari Personel Tata Kelola & Kepatuhan, SPI, dan Hukum.	Involving 3 (three) representatives from PT Pupuk Indonesia (Persero) in the Integrity Whistle training organized by the KPK on June 7-10, 2021 and April 4-8, 2022 consisting of Governance & Compliance, SPI, and Legal Personnel.

No.	Kegiatan	Activities
13	1. Dilakukan *Benchmark* terkait pengelolaan Tata Kelola Perusahaan yang baik, salah satunya terkait dengan WBS pada PT Pertamina (Persero) Tbk, pada tanggal 15 Februari 2022. 2. Dilakukan *Benchmark* terkait WBS pada PT Kimia Frama Group, pada tanggal 16 September 2022.	1. Benchmarking related to WBS management was carried out at PT PLN (Persero), on November 2, 2021. 2. Benchmarking related to good Corporate Governance management, one of which is related to WBS at PT Pertamina (Persero) Tbk, on February 15, 2022. 3. Benchmarking related to WBS was carried out at PT Kimia Frama Group, on September 16, 2022.
14	Telah dilakukan rapat penyediaan infrastruktur dan hal terkait lainnya sesuai *requirement* yang diberikan KPK	Meetings have been held to provide infrastructure and other related matters in accordance with the requirements given by the KPK.
15	Telah melakukan penyediaan infrastruktur dan hal terkait lainnya sesuai *requirement* yang diberikan KPK, dan aplikasi berhasil terkoneksi serta dapat digunakan untuk integrasi tindak lanjut aduan TPK.	Provided infrastructure and other related matters in accordance with the requirements provided by KPK, and the application was successfully connected and can be used for the integration of the follow-up of complaints of Corruption Eradication Commission.
16	Telah dilakukan uji coba keberhasilan integrasi Apikasi WBS PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan Aplikasi KPK, dan berhasil terkoneksi dan dapat digunakan untuk integrasi tindak lanjut aduan TPK.	A successful trial of the integration of the PT Pupuk Indonesia (Persero) WBS Application with the KPK Application has been carried out, and it is successfully connected and can be used for the integration of follow-up of TPK complaints.
17	Sampai dengan bulan September 2022, progres tindak lanjut dari 21 rencana aksi atas rekomendasi *Assessment* WBS TPK Terintegasi adalah: • *Closed* 14 rencana aksi (67%) • *In Progress* 7 rencana aksi (33%)	As of September 2022, the progress of the follow-up of 21 action plans on the recommendations of the Integrated TPK WBS Assessment are: • Closed 14 renactions (67%) • In Progress 7 renactions (33%)
18	Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi ke-2 Tahun 2022 pada tanggal 12 Oktober 2022.	Implementation of the second Monitoring and Evaluation Year 2022 on October 12, 2022

SOSIALISASI PENERAPAN WBS

Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai *Whistleblowing System* di seluruh tingkatan dalam organisasi, Perusahaan melaksanakan sosialisasi WBS secara berkelanjutan baik kepada pihak internal maupun eksternal Perusahaan. Sosialisasi WBS di internal Perusahaan disampaikan melalui media internal perusahaan seperti rapat unit kerja, Majalah Internal, *e-mail*, dan *desktop*/laptop karyawan, sedangkan sosialisasi WBS kepada pihak eksternal disampaikan melalui *website* Perusahaan, laporan tahunan, dan kegiatan-kegiatan Perusahaan yang melibatkan pihak eksternal Perusahaan. Adapun sosialisasi ke pihak internal dan eksternal yang dilakukan pada tahun 2022 antara lain:

a. Sosialisasi WBS melalui publikasi imbauan dan komitmen terkait larangan penerimaan dan permintaan gratifikasi oleh insan Pupuk Indonesia dalam momen perayaan hari keagamaan, ulang tahun perusahaan, maupun dalam aktivitas-aktivitas lainnya kepada *stakeholder* perusahaan yang di dalamnya terdapat imbauan pelaporan WBS jika terdapat Insan Perusahaan yang melanggar imbauan.
b. Imbauan tentang Pengendalian Gratifikasi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1443 H oleh Insan PI Group sesuai surat Direktur Utama PT Pupuk Indonesia

SOCIALIZATION OF WBS IMPLEMENTATION

In order to improve understanding of the Whistleblowing System at all levels in the organization, the Company conducts continuous socialization of WBS to both internal and external parties of the Company. WBS socialization within the Company is delivered through internal company media such as work unit meetings, Internal Magazine, e-mail, and employee desktops/laptops, while WBS socialization to external parties is delivered through the Company's website, annual reports, and Company activities involving external parties. The socialization to internal and external parties carried out in 2022 include:

a. Socialization of WBS through the publication of appeals and commitments related to the prohibition of receiving and requesting gratuities by Pupuk Indonesia personnel during religious celebrations, company birthdays and in other activities to company stakeholders in which there is an appeal for WBS reporting if there are Company personnel who violate the appeal, namely:
b. Appeal on Gratification Control in the framework of Eid al-Fitr 1443 H by PI Group personnel in accordance with the letter from the President Director of PT Pupuk

(Persero) kepada Seluruh Direksi dan Karyawan No. 09328/A/MR/A24/IT/2022 tanggal 26 April 2022.

c. Imbauan tentang Pengendalian Gratifikasi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1443 H oleh Insan PI Group sesuai surat Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) kepada Direktur Utama Anak Perusahaan No. 07454/A/MR/A24/ET/2022 tanggal 26 April 2022.

d. Imbauan tentang Pengendalian Gratifikasi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1443 H oleh Insan PI Group sesuai surat Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) kepada Komisaris Utama No. 07453/A/MR/A24/ET/2022 tanggal 26 April 2022.

e. Publikasi Komitmen dan Imbauan Pengendalian Gratifikasi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1443 H melalui media sosial dan saluran komunikasi Perusahaan sesuai surat SVP Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 09091/A/MR/A24/IT/2022 tanggal 22 April 2022.

f. Imbauan PT Pupuk Indonesia (Persero) tentang Pengendalian Gratifikasi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1443 H melalui media massa "Media Indonesia" pada tanggal 27 April 2022.

g. Sosialisasi WBS melalui *website* Perusahaan serta melalui *standing banner* di beberapa lokasi strategis Perusahaan.

h. Sosialisasi WBS melalui Bimbingan Teknis Dunia Usaha Berintegritas bersama KPK RI dan karyawan PI Group pada tanggal 2 Agustus 2023.

i. *Workshop* Masyarakat Pembelajar Antikorupsi PI Group dan *Stakeholder* tanggal 15 Oktober 2022.

j. Sosialisasi pengendalian gratifiaksi pada *Vendor Gathering* yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2022.

Indonesia (Persero) to all Directors and Employees No. 09328/A/MR/A24/IT/2022 dated 26 April 2022.

c. Appeal on Gratification Control in the framework of Eid al-Fitr 1443 H by PI Group personnel in accordance with the letter from the President Director of PT Pupuk Indonesia (Persero) to the President Directors of Subsidiaries No. 07454/A/MR/A24/ET/2022 dated April 26, 2022.

d. Appeal on Gratification Control in the framework of Eid al-Fitr 1443 H by PI Group personnel in accordance with the letter from the President Director of PT Pupuk Indonesia (Persero) to the President Commissioner No. 07453/A/MR/A24/ET/2022 dated 26 April 2022.

e. Publication of Commitments and Appeals for Gratification Control in the framework of Eid al-Fitr 1443 H through social media and Company communication channels in accordance with the letter of SVP Corporate Secretary of PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 09091/A/MR/A24/IT/2022 dated April 22, 2022.

f. Appeal of PT Pupuk Indonesia (Persero) regarding Gratification Control in the framework of Eid al-Fitr 1443 H through the mass media "Media Indonesia" on April 27, 2022.

g. Socialization of WBS through the Company's website and through standing banners in several strategic locations of the Company.

h. Socialization of WBS through Technical Guidance on Business World with Integrity with KPK RI and PI Group employees on August 2, 2023.

i. PI Group and Stakeholder Anti-Corruption Learning Community Workshop on October 15, 2022,

j. Socialization of gratuity control at the vendor gathering held on 21 November 21, 2022.

MEDIA PELAPORAN

Perusahaan menyediakan media pelaporan dugaan pelanggaran melalui *website, e-mail,* telepon, dan *desk* pengaduan yang dapat digunakan oleh pelapor, yaitu:

REPORTING MEDIA

The Company provides media for reporting alleged violations through the website, e-mail, telephone, and complaints desk that can be used by the reporter, namely:

Website http://pihclean.pupuk-indonesia.com
E-mail pihclean@pupuk-indonesia.com
Phone (021) 5365 4900 extension 6620
Desk Pengaduan | Complaint Desk
Tim WBS PIHC – Kantor Pusat
PT Pupuk Indonesia (Persero) Gedung Pusri Lantai 1
Jalan Taman Anggrek – Kemanggisan Jaya, Jakarta, 11480

MEKANISME PELAPORAN DAN PENANGANAN ADUAN

Setiap orang dapat melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) Perusahaan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pelapor menyampaikan aduan melalui media pelaporan yang disediakan Perusahaan.
2. Tim Pengelola Aduan (TPA) menerima pengaduan yang masuk melalui media pelaporan dan melakukan verifiaksi aduan sesuai dengan ketentuan. Apabila Pelapor tidak dapat memenuhi ketentuan persyaratan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak TPA2 memberikan tanggapan atas aduan, maka TPA2 dapat menetapkan bahwa aduan tidak memenuhi persyaratan dan dinyatakan *closed*.
3. Apabila aduan terverifikasi memenuhi persyaratan aduan maka TPA melakukan Tahap penelaahan/ analisis aduan melalui menggali informasi dari Pelapor, TPA2, dokumen aduan, pihak-pihak lainnya, serta dokumen yang dianggap perlu, dan dapat bekerja sama dengan pihak eksternal untuk dapat ditarik simpulan dan tindak lanjut.
4. TPA1 melakukan telaah/analisis aduan dalam jangka waktu maksimal 15 (lima belas) hari setelah menerima hasil verifikasi dari TPA2.
5. Kewenangan penanganan pelaporan, sebagai berikut:
   - Pemegang Saham
     Pemegang Saham memiliki kewenangan untuk menetapkan putusan aduan yang terkait dengan Dewan Komisaris/Organ Pendukung Dewan Komisaris Perusahaan, berdasarkan hasil verifikasi, telaah/analisis, Laporan Hasil Investigasi, dan rekomendasi putusan aduan yang disampaikan oleh Tim Investigasi.
   - Dewan Komisaris
     Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk menetapkan putusan aduan yang terkait dengan Direktur Utama Perusahaan, berdasarkan hasil verifikasi, telaah/analisis, Laporan Hasil Investigasi, dan rekomendasi tindak lanjut aduan yang disampaikan oleh Tim Investigasi.
   - Direktur Utama
     Direktur Utama memiliki kewenangan untuk menetapkan putusan aduan yang terkait dengan Direksi Perusahaan, Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Organ Pendukung Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Direksi Anak Perusahaan, dan Karyawan Perusahaan, berdasarkan hasil verifikasi, telaah/analisis, Laporan Hasil Investigasi, dan rekomendasi putusan aduan yang disampaikan oleh Tim Investigasi.

REPORTING AND COMPLAINT HANDLING MECHANISM

Everyone can report alleged violations that occur within the Company through the Company's Whistleblowing System (WBS) with the following mechanism:

1. The whistleblower submits a complaint through the reporting media provided by the Company;
2. The Complaint Management Team (TPA) receives complaints submitted through the reporting media and verifies the complaint in accordance with the provisions. If the Complainant cannot fulfill the requirements within 7 (seven) days since TPA2 provides a response to the complaint, TPA2 may determine that the complaint does not meet the requirements and is declared closed;
3. If the verified complaint meets the complaint requirements, the TPA conducts a complaint review/ analysis stage by gathering information from the Complainant, TPA2, complaint documents, other parties, and documents deemed necessary, and may cooperate with external parties to draw conclusions and follow-up.
4. TPA1 reviews/analyzes the complaint within a maximum period of 15 (fifteen) days after receiving the verification results from TPA2;
5. Reporting handling authority, as follows:
   - Shareholders
     Shareholders have the authority to determine the decision of complaints related to the Board of Commissioners/Supporting Organs of the Board of Commissioners of the Company, based on the results of verification, review/analysis, the Investigation Report, and recommendations for the decision of complaints submitted by the Investigation Team.
   - Board of Commissioners
     The Board of Commissioners has the authority to determine the decision of complaints related to the President Director of the Company, based on the results of verification, review/analysis, Investigation Report, and recommendations for follow-up of complaints submitted by the Investigation Team.
   - President Director
     The President Director has the authority to determine the decision of complaints related to the Company's Directors, the Board of Commissioners of Subsidiaries/Supporting Organizations of the Board of Commissioners of Subsidiaries/Subsidiaries' Directors, and Employees of the Company, based on the results of verification, review/analysis, Investigation Report, and complaint decision recommendations submitted by the Investigation Team.

- Pengaduan yang berkaitan dan/atau dilakukan oleh Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Organ Pendukung Dewan Komisaris Anak Perusahaan/ Direksi Anak Perusahaan yang diteruskan oleh TPA di masing-masing Anak Perusahaan kepada Direktur Utama Perusahaan dan ditembuskan kepada Direktur yang membidangi fungsi Tata Kelola dan Kepatuhan Perusahaan serta Pemegang Saham lainnya, akan diproses tindak lanjut oleh TPA Perusahaan dengan tahapan yang sama dengan tindak lanjut aduan yang diterima oleh TPA Perusahaan dari Pelapor WBS secara umum.

6. Tahap Investigasi
   Investigasi merupakan merupakan langkah lanjutan dari hasil penelaahan/analisis pengaduan, yang dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Direktur Utama/Dewan Komisaris.

   Tahapan kegiatan investigasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditermuat dalam Prosedur Audit Khusus, Dokumen No. PI-SPI-PR-003.
7. Tahap Pelaporan Kejadian *Fraud* kepada Aparat Penegak Hukum
   Apabila berdasarkan hasil keputusan Pihak yang Berwenang aduan ditetapkan untuk dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum, maka SVP yang membidangi Unit Tata Kelola dan Kepatuhan (Koordinator TPA) paling lambat 7 (tujuh) hari menyampaikan kepada Unit yang membidangi Hukum Korporasi untuk dapat diproses pelaporan kepada Aparat Penegak Hukum.

Pelaporan kepada Aparat Penegak Hukum dilaksanakan berdasarkan kententuan yang termuat dalam Prosedur Pelaporan Kejadian *Fraud* Kepada Penegak Hukum, Dokumen No. PI-SEK-PR-009 dan perubahannya.

PENANGANAN ADUAN DUGAAN PELANGGARAN TPK BERSAMA KPK

1. Apabila dari hasil telaah/analisis dan/atau investigasi aduan termasuk kategori TPK serta direkomenasikan untuk dilakukan penanganan bersama dengan KPK, maka aduan tersebut diusulkan kepada Direktur Utama untuk dikoordinasikan penanganannya dengan KPK.
2. Apabila Direktur Utama menyetujui untuk dilakukan penanganan bersama dengan KPK, maka proses perencanaan dan pelaksanaan penanganan bersama KPK dilakukan sesuai dengan ketentuan internal yang berlaku di masing-masing institusi (Perusahaan dan KPK) sebagaimana terrmuat dalam pada Perjanjian Kerja Sama (PKS).

- Complaints related to and/or made by the Board of Commissioners of Subsidiaries/Supporting Organizations of the Board of Commissioners of Subsidiaries/Subsidiary Directors forwarded by the TPA in each Subsidiary to the President Director of the Company and copied to the Director in charge of the Corporate Governance and Compliance function and other Shareholders, will be processed for follow-up by the Company's TPA with the same stages as the follow-up of complaints received by the Company's TPA from WBS Reporters in general.

6. Investigation Stage
   Investigation is a follow-up step to the results of the review/analysis of complaints, which is carried out based on recommendations from the President Director/Board of Commissioners.

   The stages of investigation activities are carried out based on the provisions contained in the Special Audit Procedure, Document No. PI-SPI-PR-003.
7. Reporting Stage of Fraud Incident to Law Enforcement Officials
   If based on the results of the decision of the Authorized Party the complaint is determined to be reported to the Law Enforcement Officer, then the SVP in charge of the Governance and Compliance Unit (TPA Coordinator) no later than 7 (seven) days submits it to the Unit in charge of Corporate Law to be processed for reporting to the Law Enforcement Officer.

Reporting to Law Enforcement Officials is carried out based on the provisions contained in the Procedure for Reporting Fraud Events to Law Enforcement Officials, Document No. PI-SEK-PR-009 and its amendments.

HANDLING COMPLAINTS OF ALLEGED CORRUPTION CRIME WITH KPK

1. If the results of the review/analysis and/or investigation of the complaint fall into the category of Corruption and are recommended for joint handling with the KPK, the complaint is proposed to the President Director to be coordinated with the KPK.
2. If the President Director approves joint handling with KPK, then the planning and implementation process of joint handling with KPK shall be carried out in accordance with the internal provisions applicable in each institution (Company and KPK) as contained in the Cooperation Agreement (PKS).

3. Penanganan bersama KPK atas pengaduan terkait dugaan TPK dikoordinasikan baik pada saat proses penanganan dilakukan dan/atau setelah kegiatan selesai.

Hasil penanganan bersama pengaduan dugaan TPK didiskusikan dalam Rapat Koordinasi untuk ditentukan tindak lanjutnya.

3. KPK's joint handling of complaints related to suspected TPK is coordinated either during the handling process and/or after the activity is completed.

The results of joint handling of complaints of suspected TPK are discussed in a Coordination Meeting to determine the follow-up.

BAGAN ALUR SISTEM PENGADUAN
Grievance System Flow Chart

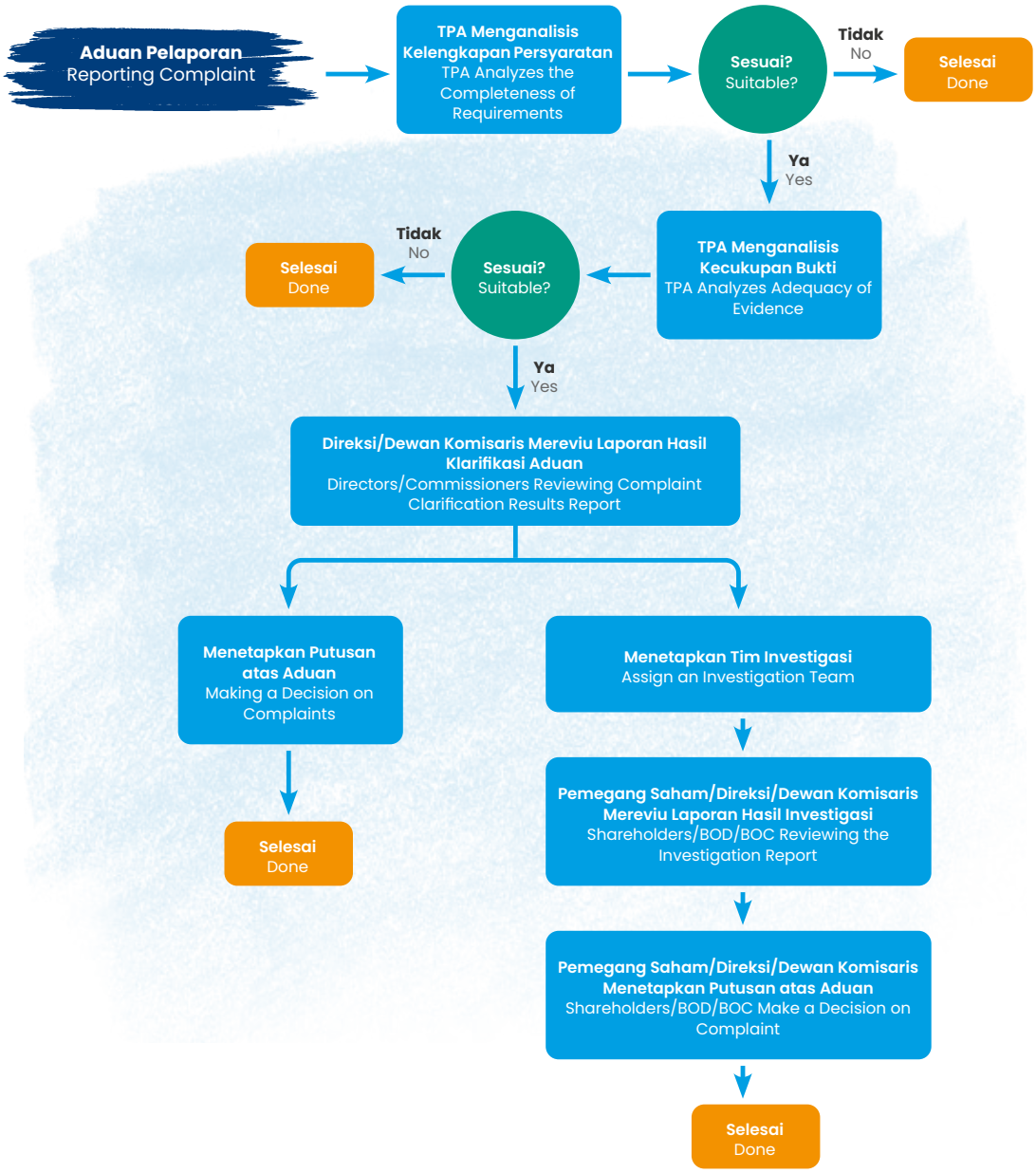

SANKSI BAGI TERLAPOR

Setiap terlapor yang dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran, diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PEMBERIAN PENGHARGAAN

1. Penghargaan diberikan kepada Pelapor yang telah beritikad baik dan berjasa menyampaikan pengaduan pelanggaran.
2. Penghargaan sebagaimana dimaksud diberikan dengan ketentuan:
   i. Telah terbukti terjadi pelanggaran;
   ii. Pengaduan telah selesai ditindaklanjuti oleh Tim Investigasi.
3. Penghargaan sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk:
   i. Piagam; dan/atau
   ii. Insentif sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

Penghargaan diberikan berdasarkan Keputusan Direksi dan atas persetujuan pelapor terkait pengungkapan identitasnya.

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR/ *WHISTLEBLOWER* DAN PETUGAS TERKAIT

Perusahaan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama Pelapor menjaga kerahasiaan identitas dan pelaporan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun.

Perlindungan ini juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan tersebut.

Dalam hal Pelapor atau petugas TPA dan/atau Tim Investigasi menerima ancaman terhadap pekerjaan fisik, hak remunerasi maupun fasilitas pekerjaan yang diterima dari Perusahaan, maka Pelapor menyampaikan permohonan perlindungan kepada Pemegang Saham dan/atau Komisaris Utama dan/atau Direktur Utama melalui Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran.

Dengan pertimbangan tertentu, Perusahaan juga dapat memberikan perlindungan kepada keluarga Pelapor, TPA, atau Tim Investigasi.

Pemberian perlindungan kepada Pelapor, Petugas TPA, atau Petugas Investigasi dapat ditolak atau dihentikan apabila terdapat bukti bahwa yang bersangkutan tidak melakukan kewajibannya dalam menjaga kerahasiaan identitas diri dan laporannya.

SANCTIONS FOR THE REPORTED PARTY

Every reported party who is found guilty of committing an offense is given sanctions in accordance with applicable regulations.

AWARDING

1. Awards are given to Whistleblowers who have made good faith and meritorious in submitting complaints of violations;
2. The award as referred to in letter a is given with the following provisions:
   i. A violation has been proven;
   ii. The Complaint has been followed up by the Investigation Team.
3. The award as referred to in number 6.2.11 letter a is given in the form of:
   i. Charter; and/or
   ii. Incentives in accordance with the provisions applicable in the Company.

The award is given based on the Decision of the Board of Directors and upon the Whistleblower's consent regarding the disclosure of his/her identity.

PROTECTION FOR WHISTLEBLOWERS AND RELATED OFFICERS

The Company guarantees the protection of the Whistleblower from all forms of threats, intimidation, or unpleasant actions from any party as long as the Whistleblower maintains the confidentiality of the identity and reporting of violations reported to any party.

This protection also applies to the parties carrying out the investigation as well as those who provide information related to the complaint.

In the event that the Whistleblower or TPA officer and/or Investigation Team receives threats to physical work, remuneration rights or work facilities received from the Company, the Whistleblower submits a request for protection to the Shareholders and/or President Commissioner and/or President Director through the Whistleblowing System Manager.

With certain considerations, the Company may also provide protection to the Whistleblower's family, the TPA, or the Investigation Team.

The provision of protection to the Whistleblower, TPA Officer, or Investigation Officer may be rejected or terminated if there is evidence that the person concerned has not carried out his/her obligations in maintaining the confidentiality of his/her identity and report.

a. Bentuk Perlindungan pada Pelapor dan Petugas Terkait
Bentuk-bentuk perlindungan kepada Pelapor dan petugas terkait antara lain namun tidak terbatas pada:

- Perlindungan kerahasiaan informasi yang diberikan.
- Perlindungan atas pengenaan sanksi administrasi/ kepegawaian Perusahaan.
- Perlindungan dari diskriminasi atau ancaman dari Terlapor dan pihak-pihak terkait penyimpangan yang dilaporkan.
- Perlindungan berupa bantuan hukum bagi Pelapor dalam kondisi Pelapor mendapat tuntutan hukum dari pihak yang dilaporkan.
- Bentuk perlindungan yang diberikan disesuaikan dengan bentuk ancaman/tindakan balasan yang diterima. Pemberian perlindungan dilakukan dengan tetap memperhatikan asas kerahasiaan dan ketentuan terkait yang berlaku di Perusahaan.

b. Pihak yang bertanggung jawab khusus melindungi Pelapor
- Perusahaan melindungi Pelapor baik dari ancaman internal maupun eksternal melalui unit yang membidangi fungsi Tata Kelola dan Kepatuhan serta Fungsi Hukum, serta fungsi lain di dalam Perusahaan yang memiliki kompetensi dalam menjamin perlindungan Pelapor.
- Perusahaan dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah yang memiliki kompetensi di bidang perlindungan saksi dalam upaya perlindungan bagi Pelapor sebagai saksi atas aduan yang disampaikan.

JUMLAH PELAPORAN PELANGGARAN TAHUN 2022

Hingga akhir tahun 2022, jumlah pengaduan yang masuk melalui sistem *Whistleblowing System* sebanyak 784 (tujuh ratus delapan puluh empat) aduan, terdiri dari:

1. Dari 784 (tujuh ratus delapan puluh empat) aduan yang masuk melalui media Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS), sebanyak 24 aduan (3%) merupakan dugaan pelanggaran dan 760 aduan (97%) bukan dugaan pelanggaran.
2. Dari 24 (dua puluh emapt) aduan (3%) merupakan dugaan pelanggaran terdiri dari:
   a. 1 (satu) aduan Pelanggaran Kode Etik tidak memenuhi syarat,
   b. 1 (satu) aduan Penipuan tidak memenuhi syarat,
   c. 6 (enam) aduan Kecurangan tidak memenuhi syarat,
   d. 2 (dua) aduan Korupsi tidak memenuhi syarat,
   e. 1 (satu) aduan Gratifikasi yang Dilarang tidak memenuhi syarat,

a. Forms of Protection for Whistleblowers and Related Officers
Forms of protection to the Whistleblower and related officers include but are not limited to:
- Protection of the confidentiality of the information provided.
- Protection against the imposition of Company administrative/personnel sanctions.
- Protection from discrimination or threats from the Reporting Party and parties related to the reported irregularities.
- Protection in the form of legal assistance for the Whistleblower in the condition that the Whistleblower receives legal claims from the reported party.
- The form of protection provided is adjusted to the form of threat/retaliation received. The provision of protection is carried out while taking into account the principle of confidentiality and related provisions applicable in the Company.

b. The party with special responsibility for protecting the Whistleblower
- The Company protects Whistleblowers from both internal and external threats through the unit in charge of the Governance and Compliance function and the Legal Function, as well as other functions within the Company that have the competence to ensure the protection of Whistleblowers.
- The Company may cooperate with government agencies that have competence in the field of witness protection in an effort to protect the Whistleblower as a witness to the complaint submitted.

NUMBER OF VIOLATION REPORTING IN 2022

Until the end of 2022, the number of complaints submitted through the Whistleblowing System was 784 (seven hundred eighty four) complaints, consisting of:

1. Of the 784 (seven hundred eighty four) complaints received through the Whistleblowing System (WBS) media, 24 complaints (3%) were alleged violations and 760 complaints (97%) were not alleged violations.
2. Of the 24 (twenty four) complaints (3%) were alleged violations consisting of:
   a. 1 (one) complaint of Code of Ethics violation is not eligible,
   b. 1 (one) fraud complaint is not eligible,
   c. 6 (six) fraud complaints are not eligible,
   d. 2 (two) corruption complaints are not eligible,
   e. 1 (one) prohibited Gratification complaint is not eligible,

f. 4 (empat) aduan Penggelapan tidak memenuhi syarat,
g. 1 (satu) aduan Pemerasan tidak memenuhi syarat,
h. 7 (tujuh) aduan Benturan Kepentingan tidak memenuhi syarat,
i. 1 (satu) aduan Suap di Anak Perusahaan dengan penetapan status *punishment* oleh Anak Perusahaan.

f. 4 (four) embezzlement complaints are not eligible,
g. 1 (satu) complaint of Extortion is not eligible,
h. 7 (tujuh) conflict of Interest complaints are not eligible,
i. 1 (one) complaint of Bribery in Subsidiary with determination of punishment status by Subsidiary.

Berikut laporan yang masuk melalui media WBS sepanjang tahun 2022 dan 2021.

The following reports were submitted through the WBS media throughout 2022 and 2021.

No	Status	Jumlah Aduan berdasarkan Media Sosial Total of Complaints based on Reporting Media								Jumlah Aduan Total Complaints			
		Website		E-mail		Telepon Telephone		Desk Pengaduan Complaint Desk		2022		2021	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	Total	%	Total	%
Jenis Aduan | Type of Complaint													
1	Aduan Dugaan Pelanggaran Complaint of Alleged Violations	22	30	2	9	0	0	0	0	24	3	39	5
2	Bukan Aduan Dugaan Pelanggaran Complaints of Non Alleged Violation	10	9	750	703	0	0	0	0	760	97	712	95
	Total	**32**	**39**	**752**	**712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**784**	**100**	**751**	**100**

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social responsibility

Ikhtisar Keberlanjutan

Sustainability Highlights

Ikhtisar Kinerja Ekonomi
Economic Performance Overview

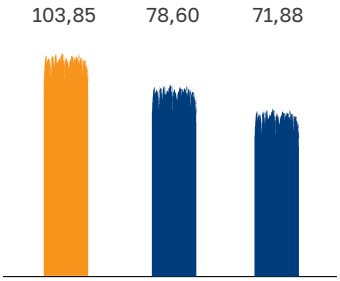

Pendapatan (Triliun Rupiah)
Income (Trillion Rupiah)

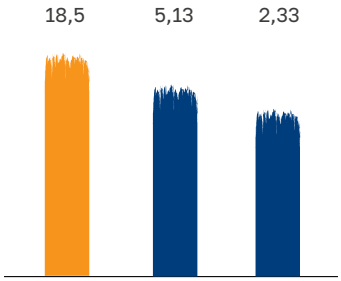

Laba Bersih (Triliun Rupiah)
Income (Trillion Rupiah)

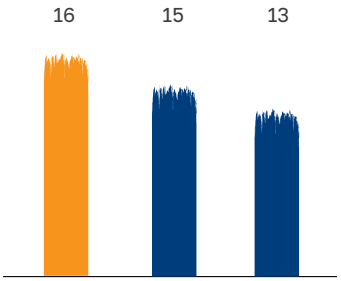

Produk Ramah Lingkungan (Jenis)
Eco-Friendly Products (Type)

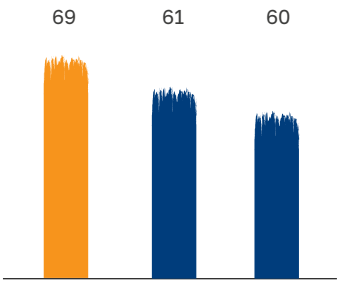

Persentase Nilai Pengadaan dari Pemasok Lokal (%)
Percentage of Procurement Value from Local Suppliers (%)

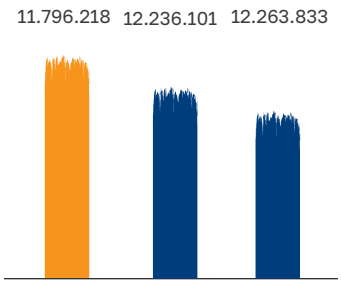

Total Produksi Pupuk (ton)
Total Production of Fertilizer (ton)

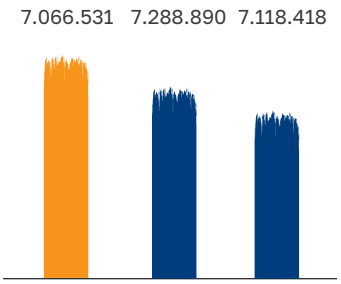

Total Produksi Non-Pupuk (ton)
Total Non-Fertilizer Production (ton)

PT Pupuk Indonesia (Persero) mengembangkan keterampilan petani dan mengupayakan peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat di sekitar operasional Perusahaan. Kami juga peduli pada kelestarian lingkungan, mengingat bumi yang sehat akan menghasilkan produk pangan yang baik dan berlimpah.
PT Pupuk Indonesia (Persero) invests in farmers' capability development and aims to improve the farmer welfare and the communities around the Company's operations. Additionally, we are committed to environmental sustainability, believing that a healthy earth creates healthful and abundant food.

Ikhtisar Kinerja Lingkungan Hidup
ENVIRONMENTAL PERFORMANCE OVERVIEW

Mangrove Planting (Mangrove Forest) — **170.567** pohon tree

Taman Keanekaragaman Hayati Pupuk Kujang (TKHPK) Pupuk Kujang Biodiversity Park (TKHPK) — **47,7** ha

Penanaman Terumbu Karang Coral Reef Planting — **8.356** m2

Penangkaran Rusa Sambar (*Rusa unicolor*) Sambar Deer Breeding (Rusa unicolor) — **2** ha

Keterangan	Satuan Unit	2022	2021	2020	Description
Total Energi	GJ	111.521.776	103.547.096	113.562.089	Total Energy
Intensitas Energi Urea	GJ/ton pupuk	29,35	28,98	28,36	Urea Energy Intensity
Total Emisi GRK	Ton CO_2eq	29.959.787	28.108.416	24.230.607	Total GHG Emissions
Intensitas Emisi Urea	Ton CO_2eq/ton Pupuk	0,52	0,72	0,57	Urea Emissions Intensity
Pengurangan Emisi	**Ton CO_2eq**	**1.163.250**	**1.042.711**	**1.622.168**	Reduction of Emissions
Pengurangan Limbah	Ton	504.744	699.526	- 189.720	Reduction of Waste
Pengurangan Efluen	Megaliter	1.277.772	23.726	200.936	Reduction of Effluent
Penggunaan Air	**Megaliter**	**74.136**	**70.138**	**73.172**	Water Usage
Investasi Lingkungan	Rp Miliar I Rp Billion	57,7	62,2	46,6	Investment in the Environment

Ikhtisar Kinerja Sosial
SOCIAL PERFORMANCE OVERVIEW

Jumlah Pekerja Tetap dan Kontrak (Orang)
Number of Permanent and Contract Employees (People)

2022	7.993
2021	8.365
2020	8.835

Total Jam Kerja Aman (Jam)
Total Safe Working Hours (Hour)

2022	58.471.948
2021	73.560.164
2020	57.173.988

Total Dana PUMK dan TJSL (Rp Miliar)
Total Funding for Micro and Small Enterprises and CSR (Rp billion)

PUMK	2022	100,924
	2021	103,098
	2020	87,248
TJSL	2022	162,375
	2021	94,640
	2020	38,270

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Atas dasar kepatuhan terhadap POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dan SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan, Perseroan juga menerbitkan sebuah Laporan Keberlanjutan. Laporan ini diterbitkan dalam buku yang terpisah dari Laporan Tahunan, namun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Tahunan.

Laporan Keberlanjutan Perseroan memuat informasi-informasi yang elaboratif dan komprehensif mengenai program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSL) Perseroan. Oleh sebab itu, Laporan Tahunan ini tidak lagi memuat informasi mengenai TJSL. Laporan Keberlanjutan Perseroan tersedia pada situs web Perseroan https://www.pupuk-indonesia.com/sustainability/report

Laporan TJSL ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, Perusahaan juga mempertimbangkan praktik terbaik di industri, baik nasional maupun internasional (Standar GRI).

Under FSA Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies and FSA Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 concerning the Form and Content of the Annual Report, the Company also published a Sustainability Report. The report is published in a separate book from the Annual Report but is inseparable from the Annual Report itself.

The Company's Sustainability Report elaborates the comprehensive information on the Company's Corporate Social Responsibility (CSR) programs. Therefore, this Annual Report no longer discloses any information about CSR. The Company's Sustainability Report is at Company's website https://www.pupuk-indonesia.com/sustainability/report

This CSR report also refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises. In addition, the Company also considers best practices in the industry, both nationally and internationally (GRI Standard).

Laporan Keuangan

Financial Reports

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

31 DESEMBER 2022 DAN 2021/
31 DECEMBER 2022 AND 2021

PUPUK INDONESIA
HOLDING COMPANY

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS AT 31 DECEMBER 2022 AND 2021 AND FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini: / *We, the undersigned:*

1.	Nama	: Nugroho Christijanto	:	*Name* 1.
	Alamat Kantor	: Gedung Pusri Jl. Taman Anggrek, Kemanggisan Jaya Jakarta 11480	:	*Office Address*
	Alamat Domisili	: Pesona Wahidin Regency Blok H 003/001 No.1, Kebomas, Jawa Timur	:	*Address of Domicile*
	Telepon	: +6221 536 54900	:	*Telephone*
	Jabatan	: Wakil Direktur Utama/ *Vice President Director*	:	*Title*
2.	Nama	: Wono Budi Tjahyono	:	*Name* 2.
	Alamat Kantor	: Gedung Pusri Jl. Taman Anggrek, Kemanggisan Jaya Jakarta 11480	:	*Office Address*
	Alamat Domisili	: Vila Bogor Indah CC. 10/29, Ciparigi, Kota Bogor	:	*Address of Domicile*
	Telepon	: +6221 536 54900	:	*Telephone*
	Jabatan	: Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko/ *Finance and Risk Management Director*	:	*Title*

Menyatakan bahwa: / *Declare that:*

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Pupuk Indonesia (Persero) dan entitas anak; / *We are responsible for the preparation and presentation of PT Pupuk Indonesia (Persero) and subsidiaries' consolidated financial statements;*
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Pupuk Indonesia (Persero) dan entitas anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; / *PT Pupuk Indonesia (Persero) and subsidiaries' consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Pupuk Indonesia (Persero) dan entitas anak telah dimuat secara lengkap dan benar; / *All information in the PT Pupuk Indonesia (Persero) and subsidiaries' consolidated financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;*
   b. Laporan keuangan konsolidasian PT Pupuk Indonesia (Persero) dan entitas anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; / *PT Pupuk Indonesia (Persero) and subsidiaries' consolidated financial statements do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material fact;*
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Pupuk Indonesia (Persero) dan entitas anak. / *We are responsible for PT Pupuk Indonesia (Persero) and subsidiaries' internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. / *Thus this statement is made truthfully.*

Atas nama dan mewakili Direksi. / *For and on behalf of the Board of Directors.*

Jakarta, 16 Maret/*March* 2023

a.n. Direktur Utama
On behalf of President Director

PUPUK INDONESIA
HOLDING COMPANY

Nugroho Christijanto
Wakil Direktur Utama/
Vice President Director

Wono Budi Tjahyono
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko/
Finance and Risk Management Director

pwc

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Pupuk Indonesia (Persero) dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Pupuk Indonesia (Persero) and its subsidiaries (the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2022, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at 31 December 2022, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia
T: +62 (21) 5099 2901 / 3119 2901, F: +62 (21) 5290 5555 / 5290 5050, www.pwc.com/id

Nomor Izin Usaha: KEP-241/KM.1/2015

pwc

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut.

1. **Provisi sehubungan dengan pengadaan gas bumi**

   Lihat Catatan 2p (Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan - provisi), Catatan 3l (Pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi signifikan - provisi sehubungan dengan pengadaan gas bumi), dan Catatan 35b (Pengadaan gas bumi PT Pupuk Kalimantan Timur ("PKT") dan provisi atas kurang bayar pengadaan gas bumi) atas laporan keuangan konsolidasian.

   Pada tanggal 31 Desember 2022, Grup mencatat provisi atas kurang bayar pengadaan gas bumi sebesar Rp1.798.475 juta di PKT dimana manajemen menentukan bahwa biaya tersebut mungkin terjadi dan dapat diestimasi dengan andal. PKT menghadapi risiko ketidakpastian terkait perubahan peraturan dan perselisihan kontraktual pengadaan.

   Kami mengidentifikasi ini sebagai hal audit utama karena signifikansi dari provisi tersebut dan tingkat pertimbangan yang diperlukan untuk menginterpretasikan peraturan.

   Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama

   Prosedur audit kami meliputi sebagai berikut:
   - Kami memperoleh pemahaman dan mengevaluasi pengendalian Grup yang relevan dalam mengidentifikasi dan memantau provisi;
   - Kami memahami apakah terdapat perubahan peraturan yang secara signifikan berdampak pada kurang bayar pengadaan gas bumi dan status amendemen kontrak serta dampaknya terhadap provisi tersebut;

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

The key audit matters identified in our audit are outlined as follows.

1. ***Provision with respect to the procurement of natural gas***

   Refer to Note 2p (Summary of significant accounting policies - provision), Note 3l (Significant accounting judgements, estimates and assumptions - provision with respect to the procurement of natural gas), and Note 35b (Procurement of PT Pupuk Kalimantan Timur ("PKT") natural gas and provision for underpayment of natural gas procurement) to the consolidated financial statements.

   As at 31 December 2022, the Group recorded a provision for underpayment of natural gas procurement of Rp1,798,475 million in PKT where management determined that the costs are probable and can be reliably estimated. PKT is exposed to uncertainty risks in respect of the regulatory changes and procurement contractual disputes.

   We identified this as a key audit matter due to the significance of the provision and the level of judgement required to interpret the regulation.

   How our audit addressed the Key Audit Matter

   Our audit procedures included the following:
   - *We understood and evaluated relevant controls of the Group over the identification and monitoring of the provision;*
   - *We understood whether there were any significant regulatory changes affecting the underpayment of natural gas procurement and the status of contract amendments and their impact on the provision;*

- Kami membaca risalah rapat dewan direksi untuk memastikan kelengkapan dan konsistensi informasi terkait provisi tersebut;
- Kami menelaah kajian analisa manajemen yang mempertimbangkan peraturan yang relevan dan korespondensi dengan regulator;
- Kami melakukan perhitungan ulang terkait estimasi manajemen untuk provisi atas kurang bayar pengadaan gas bumi;
- Kami membandingkan asumsi-asumsi yang digunakan dalam perhitungan provisi dengan dokumen pendukung;
- Kami membaca dan memahami nasihat hukum yang diberikan oleh penasihat hukum eksternal;
- Kami mengevaluasi kompetensi, kapabilitas dan objektivitas penasihat hukum eksternal; dan
- Kami menilai kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

2. **Kelangsungan usaha PT Rekayasa Industri ("Rekind")**

Lihat Catatan 38 (Kelangsungan usaha Rekind) atas laporan keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2022, entitas anak PT Pupuk Indonesia (Persero), Rekind memiliki modal kerja negatif dan defisiensi modal masing-masing sebesar Rp6.579.793 juta dan Rp6.865.926 juta. Rekind mencatat rugi tahun berjalan sebesar Rp1.314.761 juta dan memiliki arus kas bersih negatif dari aktivitas operasi sebesar Rp143.314 juta selama tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Rekind melanggar beberapa ketentuan rasio keuangan fasilitas perjanjian pinjaman dengan beberapa bank.

Kondisi-kondisi tersebut mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan signifikan atas kemampuan Rekind untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

- *We read the minutes of the board of directors' meetings to ensure the completeness and consistency of information regarding the provision;*
- *We assessed management's position paper which considered relevant regulations and correspondence with regulators;*
- *We performed recalculation on the management's estimation of the provision for underpayment of natural gas procurement;*
- *We compared the assumptions used in the provision calculation against the supporting documents;*
- *We read and understood the legal advice provided by the external legal counsel;*
- *We evaluated the competence, capabilities and objectivity of external legal counsel; and*
- *We assessed the adequacy of the disclosures in the consolidated financial statements in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards.*

2. ***Going concern of PT Rekayasa Industri ("Rekind")***

Refer to Note 38 (Going concern of Rekind) to the consolidated financial statements.

As at 31 December 2022, PT Pupuk Indonesia (Persero)'s subsidiary, Rekind has negative working capital and a capital deficiency of Rp6,579,793 million and Rp6,865,926 million, respectively. Rekind has recorded a loss for the year of Rp1,314,761 million and negative net cash flows from operating activities of Rp143,314 million for the year.

As at 31 December 2022, Rekind had breached certain borrowing facility financial ratio covenants with several banks.

These conditions indicate the existence of a material uncertainty that may cast significant doubt on the ability of Rekind to continue as a going concern.

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama

Prosedur audit kami meliputi sebagai berikut:

- Kami memahami pengendalian internal Rekind dan proses sehubungan dengan penyusunan proyeksi arus kas dan menilai risiko bawaan atas salah saji material dengan mempertimbangkan tingkat ketidakpastian estimasi dan pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan proyeksi arus kas untuk tujuan kelangsungan usaha;
- Kami memperoleh proyeksi arus kas Rekind, yang mencakup periode dua belas bulan dari tanggal laporan ini dan berdiskusi dengan manajemen Grup untuk memahami rencana operasional masa depan dan asumsi-asumsi lain yang digunakan dalam proyeksi arus kas;
- Kami membandingkan asumsi-asumsi yang digunakan dalam proyeksi arus kas dengan dokumen pendukung dan tren historis;
- Kami memahami ketersediaan fasilitas pembiayaan atau sumber pembiayaan lainnya dengan memeriksa perjanjian pinjaman; dan
- Kami menilai bukti yang diberikan oleh manajemen Rekind dengan bukti pendukung lainnya dalam mengevaluasi apakah PT Pupuk Indonesia (Persero) mampu secara finansial memberikan dukungan keuangan melalui Perjanjian Pelayanan Jasa *Notional Pooling* kepada Rekind dan kemampuan Rekind untuk memperoleh persetujuan *Change Order* untuk semua proyek yang berjalan.

How our audit addressed the Key Audit Matter

Our audit procedures included the following:

- *We understood Rekind's internal controls and processes in relation to the preparation of cash flow projections and assessed the inherent risk of material misstatement by considering the degree of estimation uncertainty and the judgement involved in preparing the cash flow projection for the purpose of the going concern assessment;*
- *We obtained Rekind's cash flow projections, which covered a period of twelve months from the date of this report and discussed with Group management to understand its future operational plans and other assumptions used in the cash flow projections;*
- *We compared the assumptions used in the cash flow projection against supporting documents and historical trends;*
- *We understood the availability of financing facilities or other resources of financing by checking to loan agreements; and*
- *We assessed evidence provided by Rekind management, as well as other corroborating evidence, in evaluating whether PT Pupuk Indonesia (Persero) is financially capable of providing financial support through a Notional Pooling Service Agreement to Rekind and Rekind's ability to obtain approvals on Change Order for its ongoing projects.*

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan konsolidasian dan laporan audit kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the consolidated financial statements and our auditors' report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material didalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

JAKARTA,
16 Maret/*March* 2023

Toto Harsono, S.E.
Izin Akuntan Publik/*License of Public Accountant* No. AP.1122

Lampiran 1/1 *Schedule*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2022	2021	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	4	33,460,620	17,453,305	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha:	5			*Trade receivables:*
- Pihak berelasi		544,004	851,990	*Related parties -*
- Pihak ketiga		2,149,518	2,472,676	*Third parties -*
Piutang subsidi dari Pemerintah Indonesia	6a	15,395,033	2,822,427	*Subsidy receivables from the Government of Indonesia*
Piutang subsidi yang belum ditagih	6b	686,625	981,471	*Unbilled subsidy receivables*
Piutang lainnya:				*Other receivables:*
- Pihak berelasi		436,571	557,033	*Related parties -*
- Pihak ketiga		46,206	64,364	*Third parties -*
Pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan	7	914,203	1,543,717	*Construction contract work in progress - due from customers*
Persediaan	8	20,567,169	13,910,126	*Inventories*
Uang muka dan beban dibayar di muka		758,068	1,001,193	*Advances and prepayments*
Pajak dibayar di muka:	9a			*Prepaid taxes:*
- Pajak penghasilan badan		138,735	321,546	*Corporate income tax -*
- Pajak lainnya		1,248,061	1,024,907	*Other taxes -*
Aset lancar lainnya		1,630,281	1,169,457	*Other current assets*
Jumlah aset lancar		77,975,094	44,174,212	*Total current assets*
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Piutang lainnya - tidak lancar		339,971	358,198	*Other receivables - non-current*
Piutang subsidi dari Pemerintah Indonesia - tidak lancar	6a	-	3,057,789	*Subsidy receivables from the Government of Indonesia - non-current*
Pajak dibayar di muka - jangka panjang:	9a			*Prepaid taxes - non-current:*
- Pajak penghasilan badan		313,557	469,280	*Corporate income tax -*
- Pajak lainnya		4,886	1,355,443	*Other taxes -*
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama		1,103,067	1,178,092	*Investment in associates and joint ventures*
Properti investasi		1,519,458	888,788	*Investment properties*
Aset tetap	10	74,658,647	74,118,213	*Fixed assets*
Aset pajak tangguhan	9d	174,908	112,797	*Deferred tax assets*
Aset imbalan pascakerja	17b	552,538	767,115	*Post-employment benefits assets*
Aset tidak lancar lainnya		2,078,381	1,983,245	*Other non-current assets*
Jumlah aset tidak lancar		80,745,413	84,288,960	*Total non-current assets*
JUMLAH ASET		**158,720,507**	**128,463,172**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

Lampiran 1/2 *Schedule*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2022	2021	
LIABILITAS				***LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Pinjaman bank jangka pendek	14	5,780,006	7,308,865	*Short-term bank loans*
Utang usaha:	11			*Trade payables:*
- Pihak berelasi		1,383,595	279,646	*Related parties -*
- Pihak ketiga		7,764,600	5,821,581	*Third parties -*
Utang subsidi kepada Pemerintah Indonesia	6a	-	95,627	*Subsidy payable to the Government of Indonesia*
Utang bruto kepada pelanggan untuk pekerjaan kontrak konstruksi	7	28,122	2,210	*Amounts due to customers for construction contract work*
Utang lainnya	12	1,600,290	1,642,704	*Other payables*
Utang salam		1,186,705	-	*Salam payables*
Utang pajak:	9b			*Taxes payables:*
- Pajak penghasilan badan		3,989,003	1,878,257	*Corporate income tax -*
- Pajak lainnya		689,407	650,797	*Other taxes -*
Liabilitas yang masih harus dibayar	13a	8,466,812	6,985,668	*Accrued liabilities*
Provisi	13b	3,672,074	2,033,414	*Provisions*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	17a	4,586,554	2,100,570	*Short-term employee benefit liabilities*
Bagian lancar dari pinjaman jangka panjang:				*Current maturities of non-current borrowings:*
- Pinjaman bank dan lainnya	15	2,392,385	2,360,195	*Bank and other loans -*
- Utang obligasi	16	1,146,854	1,773,765	*Bonds payable -*
- Liabilitas sewa	35d	63,590	74,740	*Lease liabilities -*
Jumlah liabilitas jangka pendek		42,749,997	33,008,039	*Total current liabilities*
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON-CURRENT LIABILITIES***
Pinjaman jangka panjang:				*Non-current borrowings:*
- Pinjaman bank dan lainnya	15	15,700,671	12,611,995	*Bank and other loans -*
- Utang obligasi	16	6,119,680	7,264,168	*Bonds payable -*
- Liabilitas sewa	35d	75,565	69,682	*Lease liabilities -*
Liabilitas imbalan pascakerja	17b	2,184,401	2,764,102	*Post-employment benefits liabilities*
Liabilitas pajak tangguhan	9d	708,330	738,299	*Deferred tax liabilities*
Liabilitas tidak lancar lainnya		21,563	66,911	*Other non-current liabilities*
Jumlah liabilitas jangka panjang		24,810,210	23,515,157	*Total non-current liabilities*
JUMLAH LIABILITAS		**67,560,207**	**56,523,196**	***TOTAL LIABILITIES***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

Lampiran 1/3 *Schedule*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2022	2021	
EKUITAS				***EQUITY***
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				***Equity attributable to owner of the parent entity***
Modal saham - modal dasar 100.000.000 lembar; ditempatkan dan disetor penuh 25.000.000 lembar dengan nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham	18	25,000,000	25,000,000	*Share capital - authorised 100,000,000 shares; issued and fully paid 25,000,000 shares at a par value of Rp1,000,000 (full amount) per share*
Saldo laba:				*Retained earnings:*
- Ditentukan penggunaannya		20,615,244	16,044,117	*Appropriated -*
- Belum ditentukan penggunaannya		15,205,418	2,064,733	*Unappropriated -*
Komponen ekuitas lainnya		30,286,202	28,805,426	*Other components of equity*
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		91,106,864	71,914,276	*Total equity attributable to owner of the parent entity*
Kepentingan non-pengendali		53,436	25,700	*Non-controlling interests*
JUMLAH EKUITAS		**91,160,300**	**71,939,976**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**158,720,507**	**128,463,172**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

Lampiran 2/1 ***Schedule***

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2022	2021	
PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA LAINNYA				***SALES AND OTHER REVENUES***
Penjualan produk	21	64,491,788	49,313,851	*Sales of products*
Penggantian biaya subsidi dari Pemerintah Indonesia	22	36,109,067	25,258,692	*Reimbursement of subsidy from the Government of Indonesia*
Pendapatan jasa	23	3,258,638	4,030,593	*Rendering of services*
Jumlah pendapatan dari kontrak dengan pelanggan		**103,859,493**	**78,603,136**	***Total revenue from contract with customers***
BEBAN POKOK PENDAPATAN	24	(70,288,172)	(63,469,789)	***COST OF REVENUES***
LABA BRUTO		**33,571,321**	**15,133,347**	***GROSS PROFIT***
Beban penjualan	25	(1,183,293)	(1,280,505)	*Selling expenses*
Beban umum dan administrasi	26	(5,956,428)	(4,023,124)	*General and administrative expenses*
Pendapatan lainnya - bersih	27	692,906	150,180	*Other income - net*
		(6,446,815)	(5,153,449)	
LABA OPERASI		**27,124,506**	**9,979,898**	***OPERATING PROFIT***
Pendapatan keuangan		271,478	226,343	*Finance income*
Biaya keuangan	28	(2,243,064)	(2,047,494)	*Finance costs*
Bagian atas (rugi)/laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama		(66,175)	296,018	*Share of net (loss)/profit of associates and joint ventures*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**25,086,745**	**8,454,765**	***PROFIT BEFORE INCOME TAX***
Beban pajak penghasilan	9c	(6,576,153)	(3,320,090)	*Income tax expenses*
LABA TAHUN BERJALAN		**18,510,592**	**5,134,675**	***PROFIT FOR THE YEAR***
PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME/(LOSS)***
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				***Item that will be reclassified to profit or loss***
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan entitas anak		65,447	9,078	*Difference in foreign currency arising from translation of the financial statements of subsidiaries*
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				***Items that will not be reclassified to profit or loss***
Keuntungan/(kerugian) pengukuran kembali program imbalan pasti	17b	155,944	(64,188)	*Remeasurement gain/(loss) on defined benefit plans*
Surplus revaluasi aset	10	1,291,909	-	*Assets revaluation surplus*
Lainnya		1,784	32,584	*Others*
(Beban)/manfaat pajak penghasilan terkait		(34,308)	69,118	*Related income tax (expense)/benefit*
		1,415,329	37,514	
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		**1,480,776**	**46,592**	***TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR AFTER TAX***
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**19,991,368**	**5,181,267**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

Lampiran 2/2 *Schedule*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2022	2021	
TOTAL LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***TOTAL PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk		18,461,812	5,321,127	*Owner of the parent entity*
Kepentingan non-pengendali		48,780	(186,452)	*Non-controlling interests*
		18,510,592	**5,134,675**	
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk		19,942,588	5,367,719	*Owner of the parent entity*
Kepentingan non-pengendali		48,780	(186,452)	*Non-controlling interests*
		19,991,368	**5,181,267**	
LABA PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK - DASAR DAN DILUSIAN (dalam Rupiah penuh)	**19**	**738,472**	**212,845**	***EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO OWNER OF THE PARENT ENTITY - BASIC AND DILUTED (in full Rupiah)***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

Lampiran 3 *Schedule*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Diatribusikan kepada pemilik entitas induk/*Attributable to owner of the parent entity*								Kepentingan non-pengendali/ *Non-controlling interest*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
			Saldo laba/ *Retained earnings*		Komponen ekuitas lainnya/ *Other components of equity*							
		Modal saham/ *Share capital*	Ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan/ *Difference in foreign currency due to translation of financial statements*	Surplus revaluasi aset/ *Assets revaluation surplus*	Pengukuran kembali program imbalan pasti/ *Remeasurement on defined benefit plans*	Lainnya/ *Others*	Jumlah/ *Total*			
Saldo pada 1 Januari 2021		25,000,000	14,294,888	(919,135)	153,698	30,868,425	(2,303,422)	40,133	67,134,587	228,230	67,362,817	***Balance as at 1 January 2021***
Pencadangan laba ditahan	20	-	1,749,229	(1,749,229)	-	-	-	-	-	-	-	*Appropriation of retained earnings*
Dividen kas	20	-	-	(588,030)	-	-	-	-	(588,030)	(16,078)	(604,108)	*Cash dividend*
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	-	5,321,127	9,078	-	4,930	32,584	5,367,719	(186,452)	5,181,267	*Total comprehensive income for the year*
Saldo pada 31 Desember 2021		25,000,000	16,044,117	2,064,733	162,776	30,868,425	(2,298,492)	72,717	71,914,276	25,700	71,939,976	***Balance as at 31 December 2021***
Pencadangan laba ditahan	20	-	4,571,127	(4,571,127)	-	-	-	-	-	-	-	*Appropriation of retained earnings*
Dividen kas	20	-	-	(750,000)	-	-	-	-	(750,000)	(21,044)	(771,044)	*Cash dividend*
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	-	18,461,812	65,447	1,291,909	121,636	1,784	19,942,588	48,780	19,991,368	*Total comprehensive income for the year*
Saldo pada 31 Desember 2022		25,000,000	20,615,244	15,205,418	228,223	32,160,334	(2,176,856)	74,501	91,106,864	53,436	91,160,300	***Balance as at 31 December 2022***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

Lampiran 4/1 ***Schedule***

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2022	Catatan/ *Notes*	2021	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan dari pelanggan	68,983,630		55,744,116	*Receipts from customers*
Penerimaan subsidi pupuk dari Pemerintah Indonesia	26,593,545	6a	24,463,583	*Receipts of fertiliser subsidy from the Government of Indonesia*
Penerimaan pendapatan keuangan	269,119		228,471	*Receipts from finance income*
Penerimaan restitusi pajak	363,318		512,368	*Receipts from tax restitutions*
Pembayaran kelebihan subsidi kepada Pemerintah Indonesia	(95,627)	6a	(126,633)	*Payment of excess subsidy from the Government of Indonesia*
Pembayaran kepada pemasok	(61,967,833)		(57,329,334)	*Payment to suppliers*
Pembayaran bunga biaya transaksi utang obligasi	(2,292,250)		(2,019,442)	*Payment of interest and bonds payable transaction cost*
Pembayaran kepada karyawan	(5,217,870)		(5,718,966)	*Payments to employees*
Pembayaran pajak penghasilan badan	(4,605,856)		(1,236,870)	*Payments of corporate income tax*
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	22,030,176		14,517,293	*Net cash flows generated from operating activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penerimaan dividen dari entitas asosiasi	6,860		8,397	*Receipts of dividend from associates*
Pembelian aset tetap	(4,439,792)		(2,999,502)	*Purchase of fixed assets*
Penambahan kepemilikan pada entitas asosiasi dan ventura bersama	(35,057)		(25,160)	*Additional ownership in associates and joint ventures*
Penerimaan atas penjualan aset tetap	84,764	10	8,564	*Receipts from sale of fixed assets*
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(4,383,225)		(3,007,701)	*Net cash flows used in investing activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan pinjaman bank jangka pendek	5,368,369	32b	14,684,012	*Proceeds from short-term bank loans*
Pembayaran pinjaman bank jangka pendek	(8,534,976)	14, 32b	(15,952,372)	*Repayments of short-term bank loans*
Penerimaan pinjaman jangka panjang	5,766,416	32b	2,680,676	*Proceeds from non-current borrowings*
Pembayaran pinjaman jangka panjang	(3,378,589)	15, 32b	(9,801,879)	*Repayments of non-current borrowings*
Penerimaan utang salam	2,659,119	32b	-	*Proceeds from salam payables*
Pembayaran utang salam	(1,472,414)	32b	-	*Repayments of salam payables*
Pembayaran dividen kepada entitas non-pengendali	(21,044)		(16,078)	*Payment of dividends to non-controlling interest*
Penerimaan dari penerbitan obligasi	-	32b	2,750,000	*Proceeds from bonds issuance*
Pembayaran utang obligasi	(1,774,000)	32b	-	*Repayments of bonds payable*
Pembayaran liabilitas sewa	(248,542)	32b, 35d	(213,532)	*Repayment of lease liabilities*
Pembayaran dividen kas	(750,000)	20	(588,030)	*Payment of cash dividends*
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(2,385,661)		(6,457,203)	*Net cash flows used in financing activities*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

Lampiran 4/2 *Schedule*

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2022	Catatan/ *Notes*	2021	
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**15,261,290**		**5,052,389**	***NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
Efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas	746,025		(4,602)	*Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents*
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	**17,453,305**	4	**12,405,518**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR***
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	**33,460,620**	4	**17,453,305**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR***

Tambahan informasi aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas disajikan pada Catatan 32a.

Additional information regarding non-cash activities is presented in Note 32a.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Pupuk Indonesia (Persero) ("Perusahaan"), dahulu PT Pupuk Sriwidjaja (Persero), merupakan Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") yang didirikan dengan akta notaris Eliza Pondaag No. 177 tanggal 24 Desember 1959 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 7 Juni 1960 dan Tambahan Berita Negara No. 186. Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Gedung Pusri, Jl. Taman Anggrek, Kemanggisan Jaya, Jakarta.

Nama PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) telah berubah menjadi PT Pupuk Indonesia (Persero) sesuai dengan akta notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, No. 3 tanggal 3 April 2012, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 5 April 2012 dengan Surat Keputusan No. AHU-17695.AH.01.02 tahun 2012.

Anggaran Dasar Perusahaan telah diubah beberapa kali, perubahan terakhir dimuat dalam akta notaris No. 01 tanggal 12 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H., notaris di Jakarta, berkedudukan di Jakarta Pusat yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Daftar Perseroan No. AHU-0175443.AH.01.11 tahun 2020 tanggal 18 Oktober 2020 sebagaimana Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-0071253.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 18 Oktober 2020.

Seluruh saham Perusahaan dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1. GENERAL

a. The Company's establishment

PT Pupuk Indonesia (Persero) (the "Company"), formerly PT Pupuk Sriwidjaja (Persero), is a State-Owned Enterprise which was established based on notarial deed No. 177 dated 24 December 1959, of Eliza Pondaag and published in the State Gazette No. 46, dated 7 June 1960 and State Gazette Suplement No. 186. The head office of the Company is located at Gedung Pusri, Jl. Taman Anggrek, Kemanggisan Jaya, Jakarta.

The name of PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) was changed to PT Pupuk Indonesia (Persero) based on notarial deed of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, No. 3 dated 3 April 2012, which was approved by the Minister of Law and Human Rights on 5 April 2012 by Decree No. AHU-17695.AH.01.02 year 2012.

The Company's Articles of Association has been amended several times, most recently by notarial deed No. 01 dated 12 October 2020, made by Lumassia, S.H., notary in Jakarta, domiciled in Central Jakarta which has been received by and recorded in the Legal Entity Administration System Register of Companies No. AHU-0175443.AH.01.11 year 2020 dated 18 October 2020 as stated in the Letter of Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Directorate General of General Legal Administration No. AHU-0071253.AH.01.02 year 2020 dated 18 October 2020.

The Company's share capital is wholly owned by the Government of the Republic of Indonesia.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, maksud, tujuan dan kegiatan usaha Perusahaan adalah sebagai berikut:
a) Menjalankan usaha di bidang perdagangan besar;
b) Menjalankan usaha di bidang aktivitas perusahaan *holding*;
c) Menjalankan usaha di bidang aktivitas kantor pusat;
d) Menjalankan usaha di bidang industri;
e) Menjalankan usaha di bidang jasa konsultasi manajemen;
f) Menjalankan usaha di bidang penelitian dan pengembangan;
g) Menjalankan usaha di bidang kawasan industri;
h) Menjalankan usaha di bidang reparasi;
i) Menjalankan usaha di bidang pergudangan dan penyimpanan;
j) Menjalankan usaha di bidang ekspedisi;
k) Menjalankan usaha di bidang konstruksi;
l) Menjalankan usaha di bidang pengadaan listrik; dan
m) Menjalankan usaha di bidang pertambangan batu bara, lignit, serta mineral.

b. Penyelesaian laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak (secara bersama-sama disebut "Grup") telah disusun dan disetujui oleh Direksi Perusahaan untuk diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2023.

c. Struktur Grup

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, struktur Grup adalah sebagai berikut:

***1. GENERAL** (continued)*

***a. The Company's establishment** (continued)*

In accordance with the Company's Articles of Association, the Company's goals, objectives and business activities are as follows:
a) Engage in wholesale trade sector;
b) Engage in holding company activities;
c) Engage in head office activities;
d) Engage in industry;
e) Engage in management consulting services;
f) Engage in research and development;
g) Engage in industrial estate sector;
h) Engage in repair sector;
i) Engage in warehousing and storage sector;
j) Engage in expedition sector;
k) Engage in construction sector;
l) Engage in electricity supply sector; and
m) Engage in coal, lignite and mineral mining sector.

b. Completion of the consolidated financial statements

The Company and its subsidiaries' (collectively referred to as the "Group") consolidated financial statements were prepared and authorised for issuance by the Company's Board of Directors on 16 March 2023.

c. Group structure

As at 31 December 2022 and 2021, the structure of the Group were as follows:

Entitas/ *Entity*	Kedudukan/ *Domicile*	Kegiatan usaha/ *Nature of business*	Mulai beroperasi komersial/ *Commencement of commercial operation*	Persentase kepemilikan efektif/ *Effective percentage of ownership*		Jumlah aset (sebelum eliminasi)/ *Total assets (before elimination)*	
				31 Desember/ *December* 2022	31 Desember/ *December* 2021	31 Desember/ *December* 2022	31 Desember/ *December* 2021
Dimiliki langsung oleh Perusahaan/*Held directly by the Company*							
PT Petrokimia Gresik ("PKG")	Gresik	Produsen pupuk/ *Fertiliser producers*	1971	99.99	99.99	54,586,025	43,182,763
PT Pupuk Kujang ("PKC")	Cikampek	Produsen pupuk/ *Fertiliser producers*	1975	99.99	99.99	9,461,078	9,166,614
PT Pupuk Kalimantan Timur ("PKT")	Bontang	Produsen pupuk/ *Fertiliser producers*	1985	99.99	99.99	43,438,236	33,615,304
PT Pupuk Iskandar Muda ("PIM")	Aceh	Produsen pupuk/ *Fertiliser producers*	1982	99.99	99.99	7,767,790	5,650,174

1. UMUM (lanjutan) / *1. GENERAL (continued)*

c. Struktur Grup (lanjutan) / *c. Group structure (continued)*

Entitas/ *Entity*	Kedudukan/ *Domicile*	Kegiatan usaha/ *Nature of business*	Mulai beroperasi komersial/ *Commencement of commercial operation*	Persentase kepemilikan efektif/ *Effective percentage of ownership*		Jumlah aset (sebelum eliminasi)/ *Total assets (before elimination)*	
				31 Desember/ *December* 2022	31 Desember/ *December* 2021	31 Desember/ *December* 2022	31 Desember/ *December* 2021
Dimiliki langsung oleh Perusahaan/*Held directly by the Company* (lanjutan/*continued*)							
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang ("PSP")	Palembang	Produsen pupuk/ *Fertiliser producers*	2011	99.99	99.99	25,702,954	23,922,756
PT Rekayasa Industri ("Rekind")	Jakarta	Konstruksi/ *Construction*	1981	95.03	95.03	5,565,363	7,785,388
PT Pupuk Indonesia Niaga ("PIN") (dahulu/ *formerly* PT Mega Eltra)	Jakarta	Konstruksi dan lain-lain/ *Construction and others*	1970	100.00	100.00	820,379	733,970
PT Pupuk Indonesia Logistik ("Pilog")	Jakarta	Logistik/ *Logistics*	2013	100.00	100.00	654,434	575,383
PT Pupuk Indonesia Utilitas ("PIU")	Jakarta	Pengelolaaan usaha industri, pembangunan, perdagangan dan jasa dibidang energi/ *Managing industry business, development, trading and services in energy sector*	2014	100.00	100.00	1,637,659	1,651,787
PT Pupuk Indonesia Pangan ("PIP")	Jakarta	Perdagangan/ *Trading*	2015	100.00	100.00	194,971	194,175
Dimiliki melalui PKG/*Held through PKG*							
PT Petrosida Gresik ("PSG")	Gresik	Produksi, distribusi, dan perdagangan bahan aktif pestisida serta bertindak sebagai distributor pupuk/ *Producing, distributing and trading the active ingredients of pesticides and also as a distributor of fertiliser*	1983	99.99	99.99	990,382	981,407
PT Petrokimia Kayaku ("PKY")	Gresik	Memproduksi, memformulasi dan memasarkan pestisida/*Producing, formulating and marketing pesticide*	1976	60.00	60.00	975,684	892,406
Dimiliki melalui PKC/*Held through PKC*							
PT Kawasan Industri Kujang Cikampek ("KIKC")	Cikampek	Pengelolaan kawasan industri/ *Managing industrial area*	1990	96.19	96.19	70,509	68,594
PT Sintas Kurama Perdana ("SKP")	Cikampek	Perdagangan, jasa dan pergudangan sektor industri kimia/ *Trading, services and warehousing related to chemical industry*	1988	99.00	99.00	52,337	55,466
Dimiliki melalui PKT/*Held through PKT*							
PT Kaltim Industrial Estate ("KIE")	Bontang	Pengelolaan kawasan industri/*Managing industrial area*	1991	99.99	99.99	1,116,187	1,069,340

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

c. Struktur Grup (lanjutan)

c. Group structure (continued)

Entitas/ *Entity*	Kedudukan/ *Domicile*	Kegiatan usaha/ *Nature of business*	Mulai beroperasi komersial/ *Commencement of commercial operation*	Persentase kepemilikan efektif/ *Effective percentage of ownership*		Jumlah aset (sebelum eliminasi)/ *Total assets (before elimination)*	
				31 Desember/ *December* 2022	31 Desember/ *December* 2021	31 Desember/ *December* 2022	31 Desember/ *December* 2021
Dimiliki melalui PKT/*Held through PKT* (lanjutan/*continued*)							
PT Kaltim Adhiguna Dermaga ("KAD")	Bontang	Penyedia jasa bongkar muat/*Providing loading and unloading services*	1990	50.99	50.99	50,660	37,521
PT Kaltim Jasa Sekuriti ("KJS")	Bontang	Jasa pengamanan/ *Security serviceS*	2002	70.00	70.00	27,330	24,173
Dimiliki melalui PIM/*Held through PIM*							
PT PIM Prima Medika	Lhokseumawe	Rumah Sakit/ *Hospital*	2017	96.00	96.00	29,600	27,510
Dimiliki melalui PSP/*Held through PSP*							
PT Pusri Agro Lestari ("PAL")	Jakarta	Memproduksi, memformulasi dan memasarkan pestisida dan produk agrokimia lainnya/*Producing, formulating and marketing pesticide and other agrochemical products*	2015	51.00	51.00	60,829	51,717
Dimiliki melalui Rekind/*Held through Rekind*							
PT Yasa Industri Nusantara ("YIN")	Jakarta	Perancangan dan perencanaan konstruksi, penyediaan dan pengawasan peralatan/ *Design and plan for construction, construction equipment and maintenance*	1999	99.67	99.67	140,500	143,886
PT Tracon Industri	Jakarta	Penyedia jasa konsultasi dan perdagangan/ *Consulting services and general trading*	2001	80.00	80.00	430,815	354,821
PT Tracon Industri Solusindo ("TIS")	Jakarta	Penilaian, Audit Energi, *Project Management Consultant* ("PMC"), desain rekayasa/ *Assessment, Audit Energy, PMC, Engineering Design*	2019	98.00	98.00	11,394	8,923
PT Rekayasa Engineering ("RE")	Jakarta	Penyedia jasa teknik dan *engineering/ technical and engineering services*	2001	80.00	80.00	150,961	178,503
PT Rekayasa Cakrawala Resources	Jakarta	Penyedia jasa rekrutmen, pelatihan, konsultasi dan pendidikan/ *Recruitment services, training, consulting and education*	2006	51.00	51.00	104,056	114,234
PT Recon Sarana Utama	Jakarta	Penyedia jasa *engineering,* pengadaan dan konstruksi/ *Technical engineering, procurement and construction*	2014	80.00	80.00	82,345	96,545
Rekind Malaysia Sdn. Bhd.	Malaysia	Penyedia jasa teknik perancangan dan pengadaan/*Technical engineering and procurement services*	2014	100.00	100.00	17,634	33,989

1. UMUM (lanjutan)

c. Struktur Grup (lanjutan)

***1. GENERAL** (continued)*

***c. Group structure** (continued)*

Entitas/ *Entity*	Kedudukan/ *Domicile*	Kegiatan usaha/ *Nature of business*	Mulai beroperasi komersial/ *Commencement of commercial operation*	Persentase kepemilikan efektif/ *Effective percentage of ownership* 31 Desember/ *December* 2022	Persentase kepemilikan efektif/ *Effective percentage of ownership* 31 Desember/ *December* 2021	Jumlah aset (sebelum eliminasi)/ *Total assets (before elimination)* 31 Desember/ *December* 2022	Jumlah aset (sebelum eliminasi)/ *Total assets (before elimination)* 31 Desember/ *December* 2021
Dimiliki melalui Rekind/*Held through Rekind* (lanjutan/*continued*)							
PT Rekind Daya Mamuju ("RDM")	Jakarta	Pembangunan pembangkit tenaga listrik, penjualan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik/ *Construction of power plants, sale of electrical power and distribution of electrical power*	2013	90.00	90.00	1,844,027	1,710,921
PT Puspetindo	Gresik	Industri logam dan permesinan umum/ *Metal industry and general machinery*	1991	91.38	91.38	126,232	131,284
Dimiliki melalui PIN/*Held through PIN*							
PT Sigma Utama ("SU")	Cibinong	Manufaktur cat/ *Paint manufacturing*	1982	99.91	99.91	125,841	102,079
Dimiliki melalui PIU/*Held through PIU*							
PT Kaltim Daya Mandiri ("KDM")	Bontang	Produsen listrik dan utilitas/*Electricity and utilities producers*	2002	95.00	95.00	551,929	511,286

d. Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit

Susunan Dewan Komisaris Perusahaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

d. Board of Commissioners, Board of Directors and Audit Committee

The composition of the Company's Board of Commissioners as at 31 December 2022 and 2021 were as follows:

31 Desember/*December* 2022

Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama dan Komisaris Independen	Darmin Nasution	*President Commissioner and Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Mustoha Iskandar	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Anhar Adel	*Independent Commissioner*
Komisaris	Febrio Nathan Kacaribu	*Commissioner*
Komisaris	Anwar Sanusi	*Commissioner*
Komisaris	Ari Dwipayana	*Commissioner*
Komisaris	Farhat Brachma	*Commissioner*
Komisaris	Suwandi	*Commissioner*

31 Desember/*December* 2021

Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama dan Komisaris Independen	Darmin Nasution	*President Commissioner and Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Mustoha Iskandar	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Anhar Adel	*Independent Commissioner*
Komisaris	Febrio Nathan Kacaribu	*Commissioner*
Komisaris	Anwar Sanusi	*Commissioner*
Komisaris	Ari Dwipayana	*Commissioner*
Komisaris	Bambang Widianto	*Commissioner*
Komisaris	Suwandi	*Commissioner*

1. UMUM (lanjutan)

d. Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit (lanjutan)

Susunan Direksi Perusahaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

***1. GENERAL** (continued)*

***d. Board of Commissioners, Board of Directors and Audit Committee** (continued)*

The composition of the Company's Board of Directors as at 31 December 2022 and 2021 were as follows:

31 Desember/*December* 2022 dan/*and* 2021

Direksi		***Board of Directors***
Direktur Utama	Achmad Bakir Pasaman	*President Director*
Wakil Direktur Utama	Nugroho Christijanto	*Vice President Director*
Direktur Produksi	Bob Indiarto	*Production Director*
Direktur Keuangan dan Investasi	Wono Budi Tjahyono	*Finance and Investment Director*
Direktur Transformasi Bisnis	Panji Winanteya Ruky	*Business Transformation Director*
Direktur Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola	Tina T. Kemala Intan	*Governance and Human Resource Director*
Direktur Pemasaran	Gusrizal	*Marketing Director*
Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha	Jamsaton Nababan	*Portfolio and Business Development Director*

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Audit Committee as at 31 December 2022 and 2021 were as follows:

31 Desember/*December* 2022 dan/*and* 2021

Komite Audit		***Audit Committee***
Ketua	Darmin Nasution	*Chairman*
Wakil Ketua	Mustoha Iskandar	*Vice Chairman*
Anggota	R.M. Wiratmoko	*Members*
Anggota	Christine Tjen	*Members*

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, jumlah karyawan tetap Grup masing-masing sebanyak 7.538 dan 7.853 karyawan (tidak diaudit).

As at 31 December 2022 and 2021, the Group had 7,538 and 7,853 employees (unaudited), respectively.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian ini telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") dan Peraturan-Peraturan serta Pedoman Penyajian dan Peraturan No. VIII.G.7 mengenai Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, including Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("IFAS") and the Regulations and Guidelines No. VIII.G.7 concerning Financial Statement Presentation and Disclosures issued by the Financial Services Authority ("OJK").

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep harga perolehan, yang dimodifikasi oleh revaluasi tanah (aset tetap), dan aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan pendapatan komprehensif lain, serta menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, dibulatkan dan dinyatakan dalam jutaan Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia memerlukan penggunaan estimasi akuntansi penting tertentu. Penyusunan laporan keuangan konsolidasian juga mengharuskan manajemen untuk menggunakan pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area-area yang memerlukan tingkat pertimbangan atau kompleksitas yang tinggi, atau area dimana asumsi dan estimasi yang berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian, diungkapkan di Catatan 3.

Kecuali dinyatakan pada di bawah ini, kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***a. Basis of preparation of the consolidated financial statements** (continued)*

The consolidated financial statements have been prepared under the historical cost convention, as modified by revaluation of land (fixed assets), and financial assets and liabilities at fair value through profit or loss and other comprehensive income, and using the accrual basis except for the consolidated statement of cash flows.

The consolidated statement of cash flow is prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

Figures in the consolidated financial statements are rounded to and expressed in millions of Rupiah ("Rp"), unless otherwise stated.

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements, are disclosed in Note 3.

Except as described below, the accounting policies applied are consistent with those of the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2021, which conform to Indonesian Financial Accounting Standards.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Perubahan pada PSAK dan ISAK

Penerapan dari standar, interpretasi, amandemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2022 yang tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi entitas dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya:

- Amandemen PSAK 22: Bisnis Kombinasi tentang referensi ke kerangka konseptual
- Amandemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya memenuhi kontrak
- Penyesuaian tahunan PSAK 69: Agrikultur
- Penyesuaian tahunan PSAK 71: Instrumen Keuangan
- Penyesuaian tahunan PSAK 73: Sewa

Standar dan interpretasi standar akuntansi baru tertentu telah dikeluarkan tetapi tidak wajib diterapkan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan belum diterapkan secara dini oleh Grup adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan - Klasifikasi Kewajiban Lancar atau Tidak Lancar
- Amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan - Pengungkapan Kebijakan Akuntansi
- Amandemen PSAK 16: Aset Tetap tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan
- Amandemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan - Definisi Estimasi Akuntansi
- Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan - Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal
- PSAK 74: Kontrak Asuransi
- Amandemen PSAK 74: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 - Informasi Komparatif
- Amandemen PSAK 73: Sewa tentang jual dan sewa balik
- Revisi PSAK 107: Akuntansi Ijarah

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***a. Basis of preparation of the consolidated financial statements** (continued)*

Changes to the SFAS and IFAS

The adoption of the following standards, interpretations, amendments and annual improvements which are effective from 1 January 2022 did not result in substantial changes to the entity's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior years:

- *Amendment of SFAS 22: Business Combination regarding reference to the conceptual framework*
- *Amendment of SFAS 57: Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets on Onerous Contracts - Cost of fulfilling contracts*
- *Annual improvements of SFAS 69: Agriculture*
- *Annual improvements of SFAS 71: Financial Instruments*
- *Annual improvements of PSAK 73: Leases*

Certain new standards, amendments and interpretations have been published that are not mandatory for the year ended 31 December 2022 and have not been early adopted by the Group are as set out below:

- *Amendment of SFAS 1: Presentation of Financial Statements - Classification of Liabilities as Current or Non-Current*
- *Amendment of SFAS 1: Presentation of Financial Statements - Disclosure of Accounting Policies*
- *Amendment of SFAS 16: Fixed Assets regarding proceeds before intended use*
- *Amendment of SFAS 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors - Definition of Accounting Estimates*
- *Amendment of SFAS 46: Income Taxes - Deferred Tax related to Assets and Liabilities Arising from Single Transaction*
- *SFAS 74: Insurance Contracts*
- *Amendment of SFAS 74: Insurance Contracts regarding Initial Application of SFAS 74 and SFAS 71 - Comparative Information*
- *Amendment of SFAS 73: Leases regarding sale and lease back*
- *Revision to SFAS 107: Ijarah Accounting*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Perubahan pada PSAK dan ISAK (lanjutan)

Amandemen dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2023, kecuali PSAK 74 dan amandemen PSAK 74 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, tetapi penerapan dini diperkenankan.

Pada tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Grup sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan amandemen terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

b. Prinsip-prinsip konsolidasi

(i) Entitas anak

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak. Entitas anak adalah seluruh entitas (termasuk entitas terstruktur) dimana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan entitas lain ketika Grup terekspos atas, atau memiliki hak untuk, pengembalian yang bervariasi dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengembalian tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut. Entitas anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal dimana pengendalian dialihkan kepada Grup. Entitas anak tidak dikonsolidasikan lagi sejak tanggal dimana Grup kehilangan pengendalian.

Transaksi, saldo, dan keuntungan antar entitas Grup yang belum direalisasi dieliminasi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi. Jika diperlukan, nilai yang dilaporkan oleh entitas anak telah diubah untuk menyesuaikan dengan kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh Grup.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***a. Basis of preparation of the consolidated financial statements** (continued)*

***Changes to the SFAS and IFAS** (continued)*

Amendments and annual improvements to the above accounting standards are effective from 1 January 2023, except for SFAS 74 and amendments of SFAS 74 which are effective from 1 January 2025, but early adoption is permitted.

As at the issuance date of these consolidated financial statements, the Group is evaluating the potential impact of these new standards and amendments on the Group's consolidated financial statements.

b. Principles of consolidation

(i) Subsidiaries

The consolidated financial statements include the financial statements of the Company and its subsidiaries. Subsidiaries are all entities (including structured entities) over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity. Subsidiaries are fully consolidated from the date on which control is transferred to the Group. They are deconsolidated from the date on which that control ceases.

Intercompany transactions, balances and unrealised gains on transactions between Group companies are eliminated. Unrealised losses are also eliminated. When necessary, amounts reported by subsidiaries have been adjusted to conform to the Group's accounting policies.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

(i) Entitas anak (lanjutan)

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk akuisisi suatu entitas anak adalah sebesar nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui terhadap pemilik pihak yang diakuisisi sebelumnya dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup. Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar aset atau liabilitas yang timbul dari kesepakatan imbalan kontinjensi. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas serta liabilitas kontinjensi yang diambil alih dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Grup mengakui kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan non-pengendali atas aset bersih pihak yang diakuisisi. Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Biaya yang terkait dengan akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

Jika kombinasi bisnis diperoleh secara bertahap, nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi diukur kembali ke nilai wajar tanggal akuisisi melalui laba rugi.

Imbalan kontinjensi yang masih harus dialihkan oleh Grup diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan selanjutnya atas nilai wajar imbalan kontinjensi yang diakui sebagai aset atau liabilitas dan dicatat sesuai dengan PSAK 71, dalam laba rugi. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

b. Principles of consolidation *(continued)*

(i) Subsidiaries *(continued)*

The Group applies the acquisition method to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Group. The consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement. Identifiable assets acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values at the acquisition date.

The Group recognises any non-controlling interest in the acquiree either at fair value or at the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's net assets. Non-controlling interest is reported as equity in the consolidated statement of financial position, separate from the owner of the parent's equity.

Acquisition-related costs are expensed as incurred.

If the business combination achieved in stages, at the acquisition date fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date through profit or loss.

Any contingent consideration to be transferred by the Group is recognised at fair value at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration that are deemed to be an asset or liability are recognised in accordance with SFAS 71, in profit or loss. Contingent consideration that is classified as equity is not remeasured, and its subsequent settlement is accounted for within equity.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

(i) Entitas anak (lanjutan)

Selisih lebih imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi atas kepentingan ekuitas sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi atas nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh dicatat sebagai *goodwill*. Jika jumlah imbalan yang dialihkan, kepentingan non-pengendali yang diakui, dan kepentingan yang sebelumnya dimiliki pengakuisisi lebih rendah dari nilai wajar aset bersih entitas anak yang diakuisisi dalam kasus pembelian dengan diskon, selisihnya diakui dalam laba rugi.

Transaksi kombinasi bisnis antara entitas sepengendali dicatat sesuai dengan PSAK 38 (Revisi 2012): Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali. Selisih harga perolehan yang dibayar dengan nilai tercatat aset bersih yang diperoleh disajikan sebagai tambahan modal disetor. Unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan konsolidasian Grup sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal tahun komparatif penyajian pelaporan keuangan.

Transaksi dengan kepentingan non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayarkan dan bagiannya atas jumlah tercatat aset neto yang diperoleh dicatat dalam ekuitas. Keuntungan atau kerugian atas pelepasan kepada kepentingan non-pengendali juga dicatat pada ekuitas.

Ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, Grup menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada nilai tercatatnya ketika pengendalian hilang. Jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain juga direklasifikasi ke laba rugi atau dialihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh PSAK lain.

Sisa investasi pada entitas anak terdahulu diakui sebesar nilai wajarnya. Setiap perbedaan antara nilai tercatat sisa investasi pada tanggal hilangnya pengendalian dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***b. Principles of consolidation** (continued)*

***(i) Subsidiaries** (continued)*

The excess of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interest in the acquiree and the acquisition-date fair value of any previously held interest in the acquiree over the fair value of the identifiable net assets acquired is recorded as goodwill. If the total of consideration transferred, non-controlling interest recognised and previously held interest measured is less than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired in the case of a bargain purchase, the difference is recognised directly in profit or loss.

A business combination transaction between entities under common control is accounted for in accordance with SFAS 38 (Revised 2012): Business Combination of Entities Under Common Control. The difference between transfer price paid and carrying value of net assets acquired is presented as additional paid-in capital. The financial statement items of the combined entities are consolidated to the Group's consolidated financial statements as if the combination had occurred from the beginning of the comparative financial reporting year presented.

Transactions with non-controlling interests that do not result in a loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying amount of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to non-controlling interests are also recorded in equity.

When the Group loses control of a subsidiary, the Group derecognises the assets (including any goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts as at the date on which control is lost. Amounts previously recognised in other comprehensive income are also reclassified to profit or loss, or transferred directly to retained earnings if required under other SFAS.

Any investment retained in the former subsidiary is recognised at its fair value. The difference between the carrying amount of the investment retained at the date when the control is lost and its fair value is recognised in profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

(ii) Entitas asosiasi

Entitas asosiasi adalah seluruh entitas dimana Grup memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendalian, biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas. Sesuai metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat pada biaya, dan nilai tercatat akan meningkat atau menurun untuk mengakui bagian investor atas laba rugi. Investasi Grup pada entitas asosiasi juga termasuk *goodwill* yang diidentifikasi ketika akuisisi.

Jika kepemilikan kepentingan pada entitas asosiasi berkurang, namun tetap memiliki pengaruh signifikan, hanya suatu bagian proporsional atas jumlah yang telah diakui sebelumnya pada penghasilan komprehensif lain yang direklasifikasikan ke laba rugi.

Bagian Grup atas laba atau rugi entitas asosiasi pasca akuisisi diakui dalam laba rugi dan bagian atas mutasi penghasilan komprehensif lain pasca akuisisi diakui di dalam penghasilan komprehensif lain dan diikuti dengan penyesuaian pada jumlah tercatat investasi. Dividen dari entitas asosiasi diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai pada investasi pada entitas asosiasi. Jika demikian, maka Grup menghitung besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada perusahaan asosiasi dan mengakui selisih tersebut pada "bagian atas (rugi)/laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama" di laba rugi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi disesuaikan jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan yang diterapkan oleh Grup.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***b. Principles of consolidation** (continued)*

(ii) Associates

Associates are all entities over which the Group has significant influence but not control, generally accompanying a shareholding of between 20% and 50% of the voting rights. Investments in associates are accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment is initially recognised at cost and the carrying amount is increased or decreased to recognise the investor's share of profit or loss. The Group's investment in associates includes goodwill identified on acquisition.

If the ownership interest in an associate is reduced but significant influence is retained, only a proportionate share of the amounts previously recognised in other comprehensive income is reclassified to profit or loss where appropriate.

The Group's share of post-acquisition profits or losses is recognised in profit or loss, and its share of post-acquisition movements in other comprehensive income is recognised in other comprehensive income with a corresponding adjustment to the carrying amount of the investment. Dividends from associates are recognised as reduction in the carrying amount of the investment.

The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. If this is the case, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the associate and its carrying value and recognises the difference to "share of net (loss)/profit of associates and joint ventures" in profit of loss. Unrealised lossess are eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred. Accounting policies of associates are changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

(ii) Entitas asosiasi (lanjutan)

Laba atau rugi yang dihasilkan dari transaksi hulu dan hilir antara Grup dengan entitas asosiasi diakui dalam laporan keuangan Grup hanya sebesar bagian investor lain dalam entitas asosiasi.

Keuntungan dan kerugian dilusi yang timbul pada investasi entitas asosiasi diakui dalam laba rugi.

(iii) Pengaturan bersama

Menurut PSAK 66, pengaturan bersama diklasifikasikan sebagai operasi bersama atau ventura bersama bergantung pada hak dan kewajiban kontraktual para investor. Pada tanggal pelaporan, Grup memiliki operasi bersama dan ventura bersama.

Operasi bersama

Operasi bersama adalah salah satu jenis pengaturan bersama dimana para pihak yang memiliki pengendalian bersama dalam sebuah pengaturan memiliki hak atas aset, kewajiban atas liabilitas, terkait dengan pengaturan tersebut.

Grup memiliki kepemilikan dalam operasi bersama dimana Grup termasuk salah satu pihak yang memiliki pengendalian bersama (operator bersama), atau pihak yang berpartisipasi tidak memiliki pengendalian bersama atas operasi bersama tersebut.

Sehubungan dengan kepentingannya dalam operasi bersama, Grup mengakui:
- Aset, mencakup bagiannya atas setiap aset yang dimiliki bersama;
- Liabilitas, mencakup bagiannya atas liabilitas yang terjadi bersama;
- Pendapatan dari penjualan bagiannya atas *output* yang dihasilkan dari operasi bersama; dan
- Beban, mencakup bagiannya atas setiap beban yang terjadi secara bersama-sama.

Ketika Grup melakukan transaksi dengan operasi bersama, dimana Grup merupakan salah satu operator bersama, maka Grup mengakui keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari transaksi tersebut hanya sebatas kepentingan para pihak lain dalam operasi bersama tersebut.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***b. Principles of consolidation** (continued)*

***(ii) Associates** (continued)*

Profits and losses resulting from upstream and downstream transactions between the Group and its associates are recognised in the Group's financial statements only for the portion of other investors' interest in the associates.

Diluted gains and losses arising in investments in associates are recognised in profit or loss.

(iii) Joint arrangements

Under SFAS 66, investments in joint arrangements are classified as either joint operations or joint ventures depending on the contractual rights and obligations of each investor. At the reporting date, the Group has joint operations and joint ventures.

Joint operations

A joint operation is a type of joint arrangement whereby the parties own joint control of the arrangement that have rights to the assets and obligations for the liabilities, relating to the arrangement.

The Group has interests in several joint operations whereby the Group is included as a party which has joint control of a joint operation (joint operator), or as a party that participates in, but does not have joint control of, a joint operation.

In relation to its interests in joint operations, the Group recognises its:
- *Assets, including its share of any assets held jointly;*
- *Liabilities, including its share of any liabilities incurred jointly;*
- *Revenue from the sale of its share of the output arising from the joint operation; and*
- *Expenses, including its share of any expenses incurred jointly.*

When the Group enters into a transaction with a joint operation in which it is a joint operator, the Group shall recognise gains and losses resulting from such transaction only for the portion of the other parties' interests in the joint operation.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

(iii) Pengaturan bersama (lanjutan)

Ventura bersama

Ventura bersama dicatat menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, kepentingan dalam ventura bersama diakui pada biaya perolehan dan disesuaikan selanjutnya untuk mengakui bagian Grup atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pasca perolehan. Ketika bagian Grup atas rugi dalam ventura bersama sama dengan atau melebihi kepentingannya dalam ventura bersama (dimana termasuk kepentingan jangka panjang, dalam substansinya membentuk bagian dari investasi bersih Grup dalam ventura bersama), Grup tidak mengakui kerugian selanjutnya, kecuali telah menjadi kewajiban atau telah melakukan pembayaran atas nama ventura bersama.

Keuntungan yang belum terealisasi atas transaksi antara Grup dan ventura bersama dieliminasi sebesar kepentingan Grup dalam ventura bersama. Kerugian yang belum terealisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti adanya penurunan nilai aset yang dialihkan. Kebijakan akuntansi ventura bersama telah diubah jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dari kebijakan yang diterapkan oleh Grup.

c. Penjabaran mata uang asing

(i) Mata uang fungsional dan penyajian

Akun-akun yang tercakup dalam laporan keuangan setiap entitas di dalam Grup diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas tersebut beroperasi ("mata uang fungsional"). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rp yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan penyajian Grup.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***b. Principles of consolidation** (continued)*

***(iii) Joint arrangements** (continued)*

Joint ventures

Joint ventures are accounted for using the equity method. Under the equity method, interests in joint ventures are initially recognised at cost and adjusted thereafter to recognise the Group's share of the post-acquisition profits or losses and movements in other comprehensive income. When the Group's share of losses in a joint venture equals or exceeds its interests in the joint venture (which includes any long-term interest that, in substance, forms part of the Group's net investment in the joint ventures), the Group does not recognise further losses, unless it has incurred obligations or made payments on behalf of the jount ventures.

Unrealised gains on transactions between the Group and its joint ventures are eliminated for the portion of the Group's interest in the joint ventures. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred. Accounting policies of the joint ventures are changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

c. Foreign currency translation

(i) Functional and presentation currency

Items included in the financial statements of each of the entities within the Group are measured using the currency of the primary economic environment in which the relevant entity operates (the "functional currency"). The consolidated financial statements are presented in Rp, which is the functional currency of the Company and presentation currency of the Group.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Penjabaran mata uang asing (lanjutan)

(i) Mata uang fungsional dan penyajian (lanjutan)

Untuk tujuan konsolidasi, entitas anak Grup yang memiliki mata uang fungsional berbeda, maka aset dan liabilitas entitas anak Grup tersebut ditranslasikan dengan kurs tengah Bank Indonesia pada akhir periode pelaporan. Sementara itu, pendapatan dan beban ditranslasikan dengan kurs rata-rata dari kurs tengah Bank Indonesia selama periode laporan laba rugi.

Selisih yang timbul dari penjabaran laporan keuangan entitas anak Grup tersebut ke dalam Rp disajikan dalam akun "Komponen ekuitas lainnya" pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

(ii) Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pada setiap tanggal pelaporan, setiap aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rp disesuaikan untuk mencerminkan kurs penutup. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs yang berlaku pada akhir tahun pelaporan diakui di dalam laba rugi.

Kurs yang digunakan pada tanggal pelaporan, berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia, adalah sebagai berikut (nilai penuh):

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***c. Foreign currency translation** (continued)*

***(i) Functional and presentation currency** (continued)*

For consolidation purposes, the Group's subsidiaries that have different functional currency, the Group's subsidiaries' assets and liabilities are translated using the Bank of Indonesia middle rate at the end of each reporting period. Revenue and expenses are translated using the average of the Bank of Indonesia middle rate during profit or loss period.

The difference arising from the translation of the Group's subsidiaries' financial statements into Rp is presented as "Other components of equity" account in the equity section of the consolidated statement of financial position.

(ii) Transactions and balances

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rate prevailing at the date of the transactions.

At each reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the prevailing exchange rates at such date. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in profit or loss.

As at the reporting dates, the exchange rates used, based on the middle rates published by Bank Indonesia, were as follows (full amount):

	2022	2021	
Euro ("EUR")	16,713	16,127	*Euro ("EUR")*
Dolar Amerika Serikat ("USD")	15,731	14,269	*United States Dollar ("USD")*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

Kas di bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya disajikan pada akun "aset lancar lainnya" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

e. Piutang

(i) Piutang usaha dan piutang lainnya

Piutang usaha merupakan jumlah yang terutang dari pelanggan atas penjualan barang dagangan atau jasa dalam kegiatan usaha normal. Piutang lainnya merupakan saldo piutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha normal. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang, piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang usaha dan piutang lainnya pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi cadangan atas penurunan nilai.

Piutang lainnya dari pihak berelasi merupakan saldo piutang yang terkait dengan pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi Grup.

Sesuai peraturan OJK, piutang lainnya dari pihak berelasi disajikan sebagai aset tidak lancar kecuali jika ada kondisi tertentu pada piutang lainnya dari pihak berelasi untuk disajikan sebagai aset lancar.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

d. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in banks and time deposits with original maturity of three months or less at the time of placement and which are not used as collateral or are not restricted.

Cash in banks and time deposits that are restricted are presented as "other current assets" in the consolidated statement of financial position.

e. Receivables

(i) Trade and other receivables

Trade receivables are amounts due from customers for goods sold or services performed in the ordinary course of business. Other receivables are receivables arising from transactions outside of the ordinary course of business. If collection of the trade receivables is expected in one year or less, they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.

Trade and other receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, if the impact of discounting is significant, less any reserve for impairment.

Other receivables from related parties are receivables balance reflecting loan given to the related parties of the Group.

In accordance with OJK regulation, other receivables from related parties are classified as non-current assets unless there are specific circumstances ruled these other receivables from related parties to be presented as current assets.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Piutang (lanjutan)

(i) Piutang usaha dan piutang lainnya (lanjutan)

Kolektabilitas piutang usaha dan piutang lainnya ditinjau secara berkala. Piutang yang diketahui tidak tertagih, dihapuskan dengan secara langsung mengurangi nilai tercatatnya. Akun penyisihan piutang digunakan untuk mencatat dampak kerugian kredit ekspektasian, menggunakan pertimbangan dalam mendefinisikan hal apa yang dianggap sebagai kenaikan risiko kredit yang signifikan dan dalam pembuatan asumsi dan estimasi, untuk menghubungkan informasi yang relevan tentang kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi. Arus kas terkait dengan piutang jangka pendek tidak didiskontokan apabila efek diskonto tidak material.

Jumlah kerugian penurunan nilai dibebankan pada laba rugi dan disajikan sebagai "Beban umum dan administrasi" pada laba rugi. Ketika piutang usaha dan piutang lainnya, yang rugi penurunan nilainya telah diakui, tidak dapat ditagih pada periode selanjutnya, maka piutang tersebut dihapusbukukan dengan mengurangi akun penyisihan. Jumlah yang selanjutnya dapat ditagih kembali atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan, diakui sebagai "Pendapatan lainnya - bersih" pada laba rugi.

(ii) Piutang subsidi dari Pemerintah Indonesia

Piutang subsidi merupakan saldo piutang subsidi dari Pemerintah Indonesia atas penyaluran pupuk urea, NPK, NPK kakao, SP 36, ZA dan pupuk organik yang bersubsidi.

Jumlah tersebut menjadi subjek audit tahunan dan persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ("BPK-RI").

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

e. Receivables *(continued)*

(i) Trade and other receivables *(continued)*

Collectibility of trade and other receivables is reviewed on an ongoing basis. Receivables which are known to be uncollectible are written-off by reducing the carrying amount directly. An allowance account is used to record impact from expected credit losses, using exercise judgement in defining what is considered to be a significant increase in credit risk and in making assumptions and estimates to incorporate relevant information about past events, current conditions and forecasts of economic conditions. Cash flow relating to short-term receivables is not discounted if the effect of discounting is immaterial.

The amount of the impairment loss is charged to profit or loss as "General and administrative expenses" in profit or loss. When a trade and other receivable for which an impairment allowance had been recognised becomes uncollectible in a subsequent period, it is written-off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written-off are recognised as "Other income - net" in profit or loss.

(ii) Subsidy receivables from the Government of Indonesia

Subsidy receivables represent the subsidy receivables balance from the Government of Indonesia for the distribution of subsidised urea, NPK, NPK cocoa, SP 36, ZA and organic fertiliser.

The amount is subject to annual audit and approval by the Audit Board of the Republic Indonesia ("BPK-RI").

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Piutang (lanjutan)

(iii) Piutang retensi

Piutang retensi adalah jumlah termin yang tidak dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut atau hingga ketidaksesuaian telah diperbaiki.

(iv) Pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - kepada pelanggan

Jumlah pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - kepada pelanggan adalah selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui dan dikurangi jumlah kerugian dan termin yang diakui, untuk semua pekerjaan dalam proses dimana biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui (dikurangi kerugian yang diakui) melebihi termin.

f. Persediaan

Persediaan dicatat pada nilai terendah antara harga perolehan atau nilai realisasi bersihnya. Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Harga perolehan barang jadi dan barang dalam proses terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja serta alokasi biaya *overhead* langsung maupun tidak langsung baik yang bersifat tetap maupun variabel. Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha biasa dikurangi beban penjualan.

Penurunan nilai atas persediaan dan suku cadang yang usang dan perputarannya lambat, jika ada, ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap umur persediaan dan kondisi persediaan akhir periode laporan. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi bersih, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah biaya persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

g. Beban dibayar di muka

Beban dibayar di muka diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama periode manfaat masing-masing biaya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

e. Receivables *(continued)*

(iii) Retention receivables

Retention receivables are amounts of progress billings that are not paid until the conditions specified in the contract for the payment of such amount have been satisfied or until defects have been rectified.

(iv) Construction contract work in progress - due from customers

Construction contract work in progress - due from customers is the net amount of costs incurred plus recognised profits and less the sum of recognised losses and progress billings, for all contracts in progress for which costs incurred plus recognised profits (less recognised losses) exceeds progress billings.

f. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost or net realisable value. Cost is determined by the weighted-average method. The cost of finished goods and work in process comprises materials, labour and an appropriate proportion of directly attributable fixed and variable overheads. Net realisable value is the estimate of the selling price in the ordinary course of business less applicable selling expense.

Impairment for obsolete and slow moving inventories and spare parts, if any, is determined based on a review of the inventories aging and physical condition of the inventories at the end of reporting period. Any reversal of decline in value of inventories due to an increase in net realisable value is recognised as a reduction in the amount of cost of inventories in the period in which the recovery occurs.

g. Prepayments

Prepayments are amortised on a straight-line basis over the estimated beneficial periods of the prepayments.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Properti investasi

Properti investasi merupakan tanah, bangunan, dan prasarana yang dimiliki untuk disewakan dalam jangka panjang atau untuk kenaikan harga atau keduanya, dan yang tidak ditempati oleh entitas di dalam Grup konsolidasian. Properti investasi juga termasuk properti yang sedang dikonstruksi atau pembangunan untuk penggunaan di masa yang akan datang sebagai properti investasi.

Properti investasi dalam bentuk tanah dinyatakan pada biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Properti investasi lainnya diakui sebesar biaya perolehan dan disusutkan sesuai dengan estimasi umur ekonomisnya. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis properti investasi yaitu 5 sampai dengan 40 tahun.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan standar kinerja, dikapitalisasi. Properti investasi yang tidak digunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari kelompok properti investasi berikut akumulasi penyusutan dan penurunan nilainya, jika ada. Keuntungan atau kerugian dari penjualan properti investasi tersebut dibukukan dalam laba rugi pada tahun penjualan terjadi.

Manajemen melakukan penilaian atas properti investasi secara berkala untuk memastikan ada tidaknya penurunan nilai permanen yang material.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

h. Investment properties

Investment properties represent land, buildings and infrastructure that are held for long-term rental yields or for capital appreciation or both and that are not occupied by the companies in the consolidated Group. Investment properties also includes properties that is being constructed or developed for future use as investment properties.

Investment properties in the form of land are presented at acquisition cost and not depreciated.

Other investment properties are recognised at cost and depreciated over the estimated economic life. Depreciation is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the investment properties which is 5 to 40 years.

The cost of repairs and maintenance is charged to profit or loss as incurred. Expenditures which extends the useful lives of the property or results in increasing future economic benefits such as an increase in capacity and improvement in the quality of output or standard of performance, is capitalised. When the property is unused or otherwise disposed of, the carrying value and accumulated impairment losses, if any, are removed from the investment property account. Gains or losses from the sale of investment properties are recorded in profit or loss in the year of sale.

Management performs valuation of investment properties regularly to check whether or not there is a material permanent impairment.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

i Aset tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Biaya-biaya setelah pengakuan awal aset diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya apabila kemungkinan besar Grup akan mendapatkan manfaat ekonomis masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan handal. Nilai tercatat komponen yang diganti tidak lagi diakui. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laba rugi dalam periode dimana biaya-biaya tersebut terjadi.

Tanah dinyatakan berdasarkan model revaluasi dan tidak disusutkan. Aset tetap yang tidak digunakan dinyatakan sebesar jumlah terendah antara jumlah tercatat atau jumlah terpulihkan.

Penilaian terhadap tanah tersebut dilakukan oleh penilai independen eksternal yang terdaftar di OJK. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala (3 tahun sekali) untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dikreditkan pada penghasilan komprehensif lainnya dan disajikan sebagai "Surplus revaluasi aset" di ekuitas. Penurunan yang menghapus nilai kenaikan yang sebelumnya dicatat atas aset yang sama dibebankan di penghasilan komprehensif lainnya dan didebitkan terhadap "Surplus revaluasi aset" di ekuitas; penurunan lainnya dibebankan pada laba rugi.

Keuntungan atau kerugian bersih dari pelepasan aset tetap ditentukan dengan membandingkan hasil bersih pelepasan dengan nilai tercatat dan diakui dalam "Pendapatan lainnya - bersih" di laba rugi.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

i. Fixed assets

Fixed assets are initially recognised at cost, which comprises its acquisition cost and any cost directly attributable to bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. All other repairs and maintenance costs are charged to profit or loss during the financial period in which they are incurred.

Land is stated at revaluation model and not depreciated. Unused fixed assets are stated at the lower of carrying value or recoverable amount.

Valuation of land is performed by external independent appraisers who are registered at OJK. Valuations are performed regularly (once every 3 years) to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount.

Increases in the carrying amount arising on the revaluation of land are credited to other comprehensive income and shown as "Assets revaluation surplus" in equity. Decreases that offset previous increases of the same asset are charged in other comprehensive income and debited against "Assets revaluation surplus" in equity; all other decreases are charged to profit or loss.

Net gains or losses on disposals are determined by comparing the proceeds with the carrying amount and are recognised within "Other income - net" in profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Aset tetap (lanjutan)

Penyusutan aset tetap lainnya dihitung dengan menggunakan metode garis lurus untuk mengalokasikan harga perolehan sampai dengan nilai sisanya selama masa manfaat yang diestimasi, sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

i. Fixed assets *(continued)*

Depreciation on other fixed assets is calculated using the straight-line method to allocate their cost to their residual values over their estimated useful lives, as follows:

	Tahun/*Years*	
Bangunan dan prasarana permanen	20	*Permanent buildings and infrastructure*
Bangunan dan prasarana tidak permanen	10	*Non-permanent buildings and infrastructure*
Pabrik dan peralatan	8 - 40	*Plants and equipment*
Mesin bengkel kerja	8	*Workshop machinery*
Kendaraan dan alat berat	4 - 8	*Vehicles and heavy equipment*
Perlengkapan kantor dan rumah	4	*Office and household equipment*
Kapal dan sarana	10 - 35	*Ships and facilities*
Aset penyangga	8 - 20	*Supporting assets*

Hak atas tanah diakui sebesar harga perolehan.

Land rights are recognised at cost.

Grup menganalisis fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat kejadian atau transaksi ekonomi yang mendasarinya. Jika hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada Grup, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, Grup menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK 73: Sewa. Jika hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Grup menerapkan PSAK 16: Aset tetap.

The Group analyses the facts and circumstances for each type of land rights in determining the accounting for each of these land rights so that it can accurately represent an underlying economic event or transaction. If the land rights do not transfer control of the underlying assets to the Group, but give the rights to use the underlying assets, the Group applies the accounting treatment of these transactions as leases under SFAS 73: Leases. If land rights are substantially similar to land purchases, the Group applies SFAS 16: Fixed assets.

Nilai sisa aset, masa manfaat dan metode penyusutan direviu dan jika perlu disesuaikan, pada setiap akhir periode pelaporan.

The assets' residual values, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each reporting period.

Jika aset yang direvaluasi dijual, jumlah yang dicatat di dalam ekuitas dipindahkan ke saldo laba.

When revalued assets are sold, the amounts included in equity are transferred to retained earnings.

Akumulasi biaya konstruksi bangunan, pabrik dan pemasangan mesin dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai. Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

The accumulated costs of the construction of buildings, plants and the installation of machinery are capitalised as construction in progress. These costs are reclassified to fixed assets when the construction or installation is complete. Depreciation is charged from the date the assets are ready for use in the manner intended by management.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Penurunan nilai aset nonkeuangan

Aset tetap, properti investasi, dan aset tidak lancar lainnya, kecuali *goodwill*, ditelaah untuk mengetahui apakah telah terjadi indikasi penurunan nilai bilamana terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tersebut tidak dapat diperoleh kembali. Kerugian akibat penurunan nilai diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut. Nilai yang dapat diperoleh kembali adalah nilai yang lebih tinggi di antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Dalam rangka mengukur penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah.

Goodwill sebagai bagian dari investasi di asosiasi diuji penurunan nilainya bersamaan dengan investasi di asosiasi sebagai satu unit penghasil kas.

Pembalikan rugi penurunan nilai, untuk aset selain *goodwill*, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang disajikan pada jumlah revaluasian sesuai dengan PSAK lain. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dibalik lagi.

k. Instrumen keuangan

Klasifikasi, pengakuan, dan pengukuran

Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam dua kategori sebagai berikut:
(i) Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi; dan
(ii) Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Klasifikasi ini tergantung pada model bisnis Grup dan persyaratan kontraktual ketika menentukan apakah arus kasnya semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Grup menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

j. Impairment of non-financial assets

Fixed assets, investment properties and other non-current assets, excluding goodwill, are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognised for the amount by which the carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount, which is the higher of an asset's fair value less cost of disposal and value in use. For the purpose of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows.

Goodwill as part of investment in associates is assessed for impairment together with investment in associate as one cash generating unit.

Reversal on impairment losses of assets other than goodwill would be recognised if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal in impairment losses will be immediately recognised in profit or loss, except for assets measured using the revaluation model as required by other SFAS. Impairment losses related to goodwill would not be reversed.

k. Financial instruments

Classifications, recognition and measurement

The Group classifies its financial assets into the following two categories:
(i) Financial assets at amortised cost; and
(ii) Financial assets at fair value though profit or loss ("FVTPL") or fair value through other comprehensive income ("FVOCI").

The classification depends on the Group's business model and the contractual terms of the cash flows when determining whether their cash flows are solely payment of principal and interest.

The Group determines the classification of its financial assets at initial recognition and can not change the classification already made at initial adoption.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Instrumen keuangan (lanjutan)

Klasifikasi, pengakuan, dan pengukuran (lanjutan)

Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang bukan termasuk dimiliki untuk diperdagangkan, tergantung apakah Grup telah melakukan pemilihan yang tidak dapat dibatalkan pada saat pengakuan awal untuk instrumen ekuitas yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Grup melakukan reklasifikasi instrumen utang jika dan hanya jika terdapat perubahan model bisnis atas aset keuangan tersebut.

Saat pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi, dalam hal aset keuangan diukur dengan nilai wajar tidak melalui laporan laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada akuisisi aset keuangan. Biaya transaksi atas aset keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dibebankan pada laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Grup memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan pada biaya perolehan yang diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Instrumen utang

Pengukuran selanjutnya atas instrumen utang bergantung kepada model bisnis Grup dalam mengelola aset dan karakteristik dari arus kas. Terdapat tiga kategori pengukuran dalam mengklasifikan instrumen utang:

(i) Biaya perolehan diamortisasi: Aset yang dimiliki untuk pengumpulan arus kas kontraktual, dimana arus kas tersebut merupakan pembayaran pokok dan bunga, diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Penghasilan bunga dari aset keuangan ini termasuk dalam penghasilan keuangan menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan diakui secara langsung dalam laporan laba rugi dan disajikan dalam keuntungan/(kerugian) lainnya. Penurunan nilai aset keuangan disajikan terpisah dalam laporan laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

k. Financial instruments *(continued)*

Classifications, recognition and measurement *(continued)*

For investments in equity instruments that are not held for trading, this will depend on whether the group has made an irrevocable election at the time of initial recognition to account for the equity investment at FVOCI.

The Group reclassifies debt investments when and only when its business model for managing those assets changes.

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus transaction costs, in the case of a financial asset not at FVTPL, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial assets. Transaction costs of financial assets carried at FVTPL are expensed in profit or loss.

As at 31 December 2022 and 2021, the Group had financial assets which were categorised as at amortised cost and fair value through other comprehensive income.

Debt instruments

Subsequent measurement of debt instruments depends on the Group's business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. There are three measurement categories into which the group classifies its debt instruments:

(i) Amortised cost: Assets that are held for collection of contractual cash flows, where those cash flows represent solely payments of principal and interest, are measured at amortised cost. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method. Any gain or loss arising on derecognition is recognised directly in profit or loss and presented in other gains/(losses). Impairment losses of financial assets are presented as separate line item in the statement of profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Instrumen keuangan (lanjutan)

Klasifikasi, pengakuan, dan pengukuran (lanjutan)

Instrumen utang (lanjutan)

(ii) Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain: Aset yang dimiliki untuk pengumpulan arus kas kontraktual dan untuk penjualan keuangan aset, dimana arus kas aset merupakan pembayaran pokok dan bunga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Mutasi dalam jumlah tercatat dilakukan melalui penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga dan keuntungan dan kerugian selisih kurs, yang diakui dalam laporan laba rugi. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laporan laba rugi pada pendapatan lainnya - bersih. Pendapatan bunga dari aset keuangan ini termasuk dalam penghasilan keuangan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian selisih kurs disajikan pada pendapatan/(beban) lainnya, dan penurunan nilai disajikan pada bagian terpisah dalam laporan laba rugi.

(iii) Nilai wajar melalui laba rugi: Aset yang tidak memenuhi kriteria untuk biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laporan laba rugi dan disajikan bersih dalam laporan laba rugi di dalam keuntungan/(kerugian) lainnya dalam periode keterjadiannya.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***k. Financial instruments** (continued)*

***Classifications, recognition and measurement** (continued)*

***Debt instruments** (continued)*

(ii) FVOCI: Assets that are held for collection of contractual cash flows and for selling the financial assets, where the assets' cash flows represent solely payments of principal and interest, are measured at FVOCI. Movements in the carrying amount are taken through Other Comprehencive Income ("OCI"), except for the recognition of impairment gains or losses, interest income and foreign exchange gains and losses, which are recognised in profit or loss. When the financial asset is derecognised, the cumulative gain or loss previously recognised in OCI is reclassified from equity to profit or loss and recognised in other income - net. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method. Foreign exchange gains and losses are presented in other income/(expenses), and impairment expenses are presented as separate line item in the statement of profit or loss.

(iii) FVTPL: Assets that do not meet the criteria for amortised cost or FVOCI are measured at FVTPL. A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at FVTPL and is not part of a hedging relationship is recognised in profit or loss and presented net in the statement of profit or loss within other gains/(losses) in the period in which it occurs.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Instrumen keuangan (lanjutan)

Klasifikasi, pengakuan, dan pengukuran (lanjutan)

Instrumen ekuitas

Grup selanjutnya mengukur semua investasi ekuitas pada nilai wajar dimana manajemen Grup telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar dari investasi ekuitas pada penghasilan komprehensif lain. Tidak ada reklasifikasi selanjutnya atas keuntungan dan kerugian dari nilai wajar ke laba rugi setelah penghentian pengakuan investasi. Dividen dari investasi tersebut terus diakui dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan lainnya ketika hak Grup untuk menerima pembayaran ditetapkan. Kerugian penurunan nilai (dan pembalikan kerugian penurunan nilai) pada investasi ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tidak dilaporkan secara terpisah dari perubahan nilai wajarnya.

Penghentian pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari investasi tersebut telah jatuh tempo atau telah ditransfer dan Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset.

Instrumen keuangan disalinghapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Hak saling hapus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Grup atau pihak lawan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

k. Financial instruments *(continued)*

Classifications, recognition and measurement *(continued)*

Equity instruments

The Group subsequently measures all equity investments at fair value where the Group's management has elected to present fair value gains and losses on equity investments in OCI, there is no subsequent reclassification of fair value gains and losses to profit or loss following the derecognition of the investment. Dividends from such investments continue to be recognised in profit or loss as other income when the Group's right to receive payments is established. Impairment losses (and reversal of impairment losses) on equity investments measured at FVOCI are not reported separately from changes in fair value.

Derecognition

Financial assets are derecognised when the rights to receive cash flows from the investments have expired or have been transferred and the Group has transferred substantially all risks and rewards of ownership.

Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and their net amounts are reported in the consolidated statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the assets and settle the liabilities simultaneously.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default in insolvency or bankruptcy of the Group or the counterparty.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

l. Penurunan nilai dari aset keuangan

Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian.

Dalam melakukan penilaian, Grup membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Grup menerapkan metode sederhana untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lainnya, dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

Grup menilai berdasarkan basis *forward-looking* untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian terhadap instrumen utang yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Metode penurunan nilai dilakukan dengan mempertimbangkan apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan.

m. Aset takberwujud

Piranti lunak komputer

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan kepada desain dan pengujian produk piranti lunak yang dapat diidentifikasi dan unik yang dikendalikan oleh Grup diakui sebagai aset takberwujud.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

l. Impairment of financial assets

The Group assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses.

To make that assessment, the Group compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and considers reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

The Group applied a simplified approach to measure such expected credit losses for cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables and contract assets without a significant financing component.

The Group assesses on a forward-looking basis the expected credit losses associated with its debt instruments carried at FVOCI. The impairment method applied depends on whether there has been a significant increase in credit risk.

m. Intangible assets

Computer software

Costs associated with the maintenance of computer software program are recognised as an expense when incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and unique software products controlled by the Group are recognised as intangible assets.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Aset takberwujud (lanjutan)

Piranti lunak komputer (lanjutan)

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dikapitalisasi sebagai bagian produk piranti lunak mencakup beban pekerja pengembang piranti lunak dan bagian overhead yang relevan.

Pengeluaran pengembangan yang lain yang tidak memenuhi kriteria ini diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang sebelumnya diakui sebagai beban tidak dapat diakui sebagai aset pada periode berikutnya.

Biaya pengembangan piranti lunak komputer diakui sebagai aset yang diamortisasi selama estimasi masa manfaat, yang tidak lebih dari tiga tahun.

n. Sewa

Grup sebagai penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Grup mempertimbangkan apakah:

(i) Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
(ii) Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Grup memiliki hak ini ketika Grup memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang penentuan bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
   - Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
   - Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

m. Intangible assets *(continued)*

Computer software *(continued)*

Directly attributable costs that are capitalised as part of the software product include the software development employee costs and an appropriate portion of relevant overheads.

Other development expenditures that does not meet these criteria is recognised as an expense as incurred. Development costs previously recognised as an expense are not recognised as an asset in a subsequent period.

Computer software development costs recognised as assets are amortised over their estimated useful lives, which does not exceed three years.

n. Leases

Group as a lessee

At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group considers whether:

(i) The Group has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and
(ii) The Group has the right to direct the use of the asset. The Group has this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing the determination of how and for what purpose the asset is used and:
   - *The Group has the right to operate the asset; or*
   - *The Group has designed the asset in a way that predetermines how and for what purpose it will be used.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Pada tanggal insepsi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen non-sewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:
(i) pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa;
(ii) pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
(iii) jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
(iv) harga eksekusi opsi beli jika Grup cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
(v) penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Grup cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***n. Leases** (continued)*

***Group as a lessee** (continued)*

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of the relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

The Group recognises a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using the incremental borrowing rate. Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

(i) fixed payments, including in-substance fixed payments less any lease incentive receivable;
(ii) variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;
(iii) amounts that are expected to be payable under a residual value guarantee;
(iv) the exercise price under a purchase option that the Group is reasonably certain to exercise; and
(v) penalties for early termination of a lease unless the Group is reasonably certain not to terminate early.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Setiap pembayaran sewa dialokasikan sebagai beban keuangan dan pengurangan liabilitas sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa. Utang sewa yang terkait, dikurangi dengan beban keuangan, dimasukkan ke dalam "liabilitas sewa". Elemen bunga dari beban keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat bunga periodik yang konstan untuk saldo liabilitas yang tersisa pada setiap periode.

Grup menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari "Aset tetap" dan liabilitas sewa di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Grup pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Sewa jangka pendek

Grup memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Grup mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Sewa aset bernilai rendah

Grup memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa aset bernilai rendah. Grup mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***n. Leases** (continued)*

***Group as a lessee** (continued)*

Each lease payment is allocated between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate on the outstanding lease liabilities. The corresponding lease liabilities, net of finance charges, are included in "lease liabilities". The interest element of the finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

The Group presents right-of-use assets as part of "Fixed assets" and lease liabilities in the consolidated statement of financial position.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Group by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Group will exercise a purchase option, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

Short-term leases

The Group has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less. The Group recognises the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Low-value assets leases

The Group has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for low-value assets. The Group recognises the lease payments associated with these leases as an expense.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Utang usaha dan utang lainnya

Utang usaha adalah kewajiban membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. Utang lainnya terdiri dari uang muka kontrak pelanggan, utang iuran, dan utang retensi. Utang usaha dan utang lainnya diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang. Jika tidak, utang tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha dan utang lainnya pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

p. Provisi

Provisi diakui apabila Grup mempunyai kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya dan kewajiban tersebut dapat diestimasi dengan andal. Provisi tidak diakui untuk kerugian operasi masa depan. Ketika terdapat beberapa kewajiban yang serupa, kemungkinan penyelesaian mengakibatkan arus kas keluar ditentukan dengan mempertimbangkan kelas kewajiban secara keseluruhan.

q. Utang bruto kepada pelanggan untuk pekerjaan kontrak

Utang bruto kepada pelanggan untuk pekerjaan kontrak adalah selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui dikurangi jumlah yang diakui dan termin, untuk semua kontrak dimana termin melebihi biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui (dikurangi kerugian yang diakui).

r. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

o. Trade and other payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Other payables consist of contractual cash advances, contribution payables and retention payables. Trade and other payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less. If not, they are presented as non-current liabilities.

Trade and other payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

p. Provision

Provisions are recognised when the Group has a present obligation (either legal or constructive) as a result of past events, it is more likely than not than an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and the obligation can be reliably estimated. Provision is not recognised for future operating losses. Where there are a number of similar obligations, the likelihood that an outflow will be required in settlement is determined by considering the class of obligations as a whole.

q. Amounts due to customers for contract work

Amounts due to customers for contract work is the net amount of costs incurred plus recognised profits, less the sum of recognised losses and progress billings, for all contracts in progress for which progress billings exceed costs incurred plus recognised profits (less recognised losses).

r. Borrowings

Borrowings are recognised initially at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortised cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in the profit or loss over the period of the borrowings using the effective interest method.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Pinjaman (lanjutan)

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya memperoleh pinjaman ditangguhkan sampai penarikan pinjaman terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya memperoleh pinjaman dikapitalisasi sebagai pembayaran di muka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

Pinjaman akan dihentikan pengakuannya dari laporan posisi keuangan ketika kewajiban yang tertulis pada kontrak dibatalkan, atau sudah tidak berlaku. Selisih antara nilai tercatat dari liabilitas keuangan yang sudah berakhir atau dialihkan ke pihak lain, dan imbalan yang dibayarkan, termasuk aset non kas yang dialihkan atau liabilitas yang ditanggung, diakui dalam laba rugi sebagai pendapatan lainnya atau biaya keuangan.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Grup memiliki hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran liabilitas selama paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

s. Biaya pinjaman

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti biaya diskonto pinjaman baik yang secara langsung atau tidak langsung digunakan untuk pendanaan konstruksi aset kualifikasian, dikapitalisasi hingga aset tersebut selesai dikonstruksi. Untuk biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung pada aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dari biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode berjalan, dikurangi penghasilan yang diperoleh dari investasi sementara atas dana hasil pinjaman tersebut. Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusikan secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi terhadap jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh aset kualifikasian. Tingkat kapitalisasi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang biaya pinjaman yang dibagi dengan jumlah pinjaman yang tersedia selama periode, selain pinjaman yang secara spesifik diambil untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifikasian.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***r. Borrowings** (continued)*

Fees paid on the establishment of loan facilities are recognised as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawdown. In this case, the fee is deferred until the drawdown occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawdown, the fee is capitalised as a prepayment for liquidity services and amortised over the period of the facility to which it relates.

Borrowings are removed from the statement of financial position when the obligation specified in the contract is discharged or expired. The difference between the carrying amount of a financial liability that has been extinguished or transferred to another party and the consideration paid, including any non-cash assets transferred or liabilities assumed, is recognised in profit or loss as other income or finance costs.

Borrowings are classified as current liabilities unless the Group has an unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date.

s. Borrowing cost

Interest and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalised up to the date when construction is complete. For borrowings that are directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined as the actual borrowing cost incurred during the period, less any income earned on the temporary investment of such borrowings. For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined by applying a capitalisation rate to the amount expended on the qualifying assets. The capitalisation rate is the weighted average of the total borrowing costs applicable to the total borrowings outstanding during the period, other than borrowings made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Biaya emisi penerbitan utang obligasi

Utang obligasi pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif.

Selisih antara hasil emisi (setelah dikurangi biaya transaksi) dan penyelesaian atau pelunasan pinjaman diakui selama jangka waktu pinjaman menggunakan metode suku bunga efektif.

u. Imbalan kerja

(i) Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan.

(ii) Imbalan pensiun, imbalan pascakerja lainnya, dan imbalan jangka panjang lainnya

Grup memberikan imbalan manfaat pasti sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama ("PKB"), yang jumlahnya lebih besar dibanding dengan imbalan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Karena peraturan ketenagakerjaan atau PKB menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya program pensiun berdasarkan peraturan ketenagakerjaan atau PKB adalah program pensiun imbalan pasti.

Program pensiun imbalan pasti ditentukan berdasarkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima seorang pekerja pada saat pensiun, biasanya tergantung beberapa faktor, misalnya usia, masa kerja dan kompensasi.

Liabilitas imbalan pensiun merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program. Liabilitas imbalan pasti dihitung sekali setahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah (dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang Rp sesuai dengan mata uang dimana imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo liabilitas imbalan pensiun yang bersangkutan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

t. Bonds payable issuance costs

Bonds payable are initially measured at fair value, net of transaction costs, and are subsequently measured at amortised cost, using the effective interest rate method, with interest expense recognised on an effective interest rate method.

Any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the settlement or redemption of borrowings is recognised over the term of the borrowings using the effective interest rate method.

u. Employee benefits

(i) Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are recognised and accrued to the employees.

(ii) Pension benefits, other post-employment benefits and other long-term benefits

The Group provides defined benefits in accordance with the Collective Labour Agreement ("CLA"), which are higher than those required under prevailing regulations related to manpower. Since manpower regulations and the CLA set the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the manpower regulations or the CLA represent defined benefit plans.

Defined benefit pension plan program defines an amount of pension benefit that an employee will receive on retirement, usually depending on factors such as age, years of service and compensation.

The pension benefit obligation is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of government bonds (considering currently there is no deep market for high quality corporate bonds) that are denominated in Rp, the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Imbalan kerja (lanjutan)

(ii) Imbalan pensiun, imbalan pascakerja lainnya, dan imbalan jangka panjang lainnya (lanjutan)

Grup memberikan imbalan pascakerja lainnya dan imbalan jangka panjang lainnya seperti uang penghargaan, santunan kematian, penghargaan pengabdian, dan uang pisah. Imbalan berupa uang penghargaan diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun. Santunan kematian diberikan bila pegawai dan anggota keluarga tertentu meninggal dunia. Nilai imbalan yang diberikan didasari pada peraturan Perusahaan atau PKB. Sedangkan imbalan berupa uang pisah, dibayarkan kepada karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela, setelah memenuhi minimal masa kerja tertentu. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metodologi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti.

Biaya bunga bersih dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto terhadap saldo bersih kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program. Biaya ini termasuk dalam beban imbalan kerja dalam laporan laba rugi.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas pada pos penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya, kecuali imbalan jangka panjang lainnya dimana keuntungan dan kerugian aktuarial diakui langsung sebagai beban pada laba rugi.

Biaya jasa lalu diakui secara langsung dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui dalam laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

(iii) Imbalan kesehatan pascakerja

Grup menyediakan imbalan kesehatan pascakerja untuk pensiunan. Hak atas imbalan ini pada umumnya diberikan apabila karyawan bekerja sampai usia pensiun dan memenuhi masa kerja minimum tertentu. Perkiraan biaya imbalan ini dicatat sebagai akrual sepanjang masa kerja karyawan, dengan menggunakan metode *projected unit credit.*

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

u. Employee benefits *(continued)*

(ii) Pension benefits, other post-employment benefits and other long-term benefits *(continued)*

The Group also provides other post-employment benefits and other long-term benefits such as long service reward, death allowance, jubilee rewards, and separation reward. The long service reward is paid when the employees reach their retirement age. Death allowance is paid when the employee or the qualified family members pass away. The value of benefits provided to the employee is based on the Company's regulation or the CLA. The separation reward benefit is paid to employees in the event of voluntary resignation, subject to a minimum number of years of service. These benefits have been accounted for using the same methodology as for the defined benefit pension plan.

The net interest cost is calculated by applying the discount rate to the net balance of the defined benefit obligation and the fair value of plan assets. This cost is included in employee benefit expense in the statement of profit or loss.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise, except for other long-term benefits where actuarial gains and losses are directly recognised as expenses in profit or loss.

Past service costs are recognised immediately in profit or loss. Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognised in profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

(iii) Post-retirement healthcare benefits

The Group provides post-retirement healthcare benefits to its retirees. The entitlement to these benefits is usually based on the employee remaining in service up to retirement age and the completion of a minimum service period. The expected costs of these benefits are accrued over the period of employment, using the projected unit credit method.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

v. Pengakuan pendapatan dan beban

Pengakuan pendapatan harus memenuhi lima langkah analisa sebagai berikut:
(i) Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
(ii) Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;
(iii) Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan yang akan dibayarkan selama periode kontrak;
(iv) Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin;
(v) Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi:
(i) Pada suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
(ii) Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan metode akrual.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

v. Revenue and expense recognition

Revenue recognition has to fulfil five steps of assessment as follows:
(i) Identify contract(s) with a customer;
(ii) Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct;

(iii) Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer which will be paid during the contract period;

(iv) Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct good or service promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand-alone selling prices are estimated based on expected cost plus margin;

(v) Recognise revenue when the performance obligation is satisfied by transferring a promised good or service to a customer (which is when the customer obtains control of that good or service).

A performance obligation may be satisfied:
(i) At a point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or

(ii) Over the time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over the time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognised as the performance obligation is satisfied.

Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

v. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Penjualan barang

Pendapatan dari penjualan barang (pupuk subsidi, pupuk nonsubsidi dan amonia) diakui jika seluruh kondisi berikut terpenuhi:

- Grup telah memindahkan kontrol kepemilikan barang;
- Grup tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual;
- jumlah pendapatan dapat diukur secara andal;
- kemungkinan besar manfaat ekonomik yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke Grup; dan
- biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi pejualan tersebut dapat diukur secara andal.

Terpenuhinya kondisi tersebut tergantung persyaratan penjualan dengan setiap pelanggan. Secara umum risiko dan manfaat dianggap telah berpindah ke pelanggan ketika terjadi transfer kepemilikan dan risiko.

Subsidi pupuk Pemerintah

Subsidi pupuk Pemerintah diakui sebagai pendapatan atas dasar akrual yang dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan, Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia.

Pendapatan jasa

Bila suatu transaksi pendapatan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian transaksi tersebut pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Hasil transaksi dapat diestimasi dengan andal pada saat terpenuhinya seluruh kondisi berikut:

- jumlah pendapatan dapat diukur secara andal;
- besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke Grup;
- tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal; dan
- biaya yang terjadi untuk transaksi dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***v. Revenue and expense recognition** (continued)*

Sales of goods

Revenue from the sale of goods (subsidised fertiliser, non-subsidised fertiliser, and ammonia) is recognised when all of the following conditions are fulfilled:

- *the Group has transferred control of the goods to the buyer;*
- *the Group retains neither continuing managerial involvement nor effective control over the goods sold;*
- *the amount of revenue can be measured reliably;*
- *it is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the Group; and*
- *the cost incurred or to be incurred with respect to the sales transaction can be measured reliably.*

The fulfilment of these conditions depends upon the terms of the sales with individual customers. Generally, the risks and rewards are considered to be transferred to the customer when the title and risk are transferred.

Government's fertilizer subsidy

The Government's fertiliser subsidy is recognised as revenue on an accrual basis which is calculated in accordance with the requirements stipulated in the Decree of Minister of Finance, Minister of Agriculture and Minister of Trade of the Republic of Indonesia.

Rendering of services

When the outcome of a transaction involving the rendering of services can be estimated reliably, the revenue that is associated with the transaction is recognised with reference to the stage of completion of the transaction as at the consolidated statement of financial position date.

The outcome of a transaction can be estimated reliably when all of the following conditions are met:

- *the amount of revenue can be measured reliably;*
- *it is probable that the economic benefits that are associated with the transaction will flow to the Group;*
- *the stage of completion of the transaction at the end of the reporting period can be measured reliably; and*
- *the costs incurred for the transaction and the costs to complete the transaction can be measured reliably.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

v. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan jasa (lanjutan)

Bila hasil transaksi pendapatan jasa tidak dapat diestimasi dengan andal, pendapatan yang diakui hanya sebesar beban yang telah diakui yang dapat diperoleh kembali.

Grup mengakui aset kontrak dan liabilitas kontrak sehubungan dengan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Aset kontrak terdiri dari pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan serta piutang retensi dan pendapatan yang belum ditagihkan yang disajikan sebagai bagian dari aset lancar lainnya di laporan posisi keuangan konsolidasian. Liabilitas kontrak terdiri dari utang bruto kepada pelanggan untuk pekerjaan kontrak konstruksi dan pendapatan diterima di muka yang disajikan sebagai bagian dari utang lainnya di laporan posisi keuangan konsolidasian.

w. Pajak penghasilan kini dan tangguhan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Beban pajak diakui dalam laba rugi, kecuali jika pajak itu berkaitan dengan kejadian atau transaksi yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya atau secara langsung dicatat ke ekuitas. Pada kasus ini, masing-masing beban pajak juga diakui pada penghasilan komprehensif lainnya atau secara langsung dicatat ke ekuitas.

Beban pajak penghasilan kini dihitung berdasarkan peraturan pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan di negara dimana Grup beroperasi dan menghasilkan penghasilan kena pajak.

Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil dalam Surat Pemberitahuan ("SPT") Tahunan terkait dengan situasi dimana diperlukan interpretasi atas peraturan pajak yang berlaku. Provisi dibentuk berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar pada otoritas pajak.

Grup dikenakan pajak final atas pendapatan dari *real estate* dan jasa konstruksi. Pajak final dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan.

Pajak penghasilan final disajikan diluar beban pajak penghasilan pada laba rugi.

Perbedaan nilai tercatat aset dan liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***v. Revenue and expense recognition** (continued)*

Rendering of services (continued)

When the outcome of a transaction involving the rendering of services cannot be estimated reliably, revenue is recognised only to the extent of the recognised expenses that are recoverable.

The Group has recognised contract assets and contract liabilities related to revenue from contract with customers. Contract assets consist of construction contract work in progress - due from customers and retention receivables and unbilled revenues which are presented as part of other current assets in the consolidated statements of financial position. Contract liabilities consist of amounts due to customers for construction contract work and unearned revenue which is presented as part of other payables in the consolidated statements of financial position.

w. Current and deferred income tax

The tax expense for the year comprises current and deferred tax. The tax expense is recognised in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax expense is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted as at the reporting date in the countries where the Group operates and generates taxable income.

Management periodically evaluates the positions taken in Annual Tax Returns ("SPT") in situations in which the applicable tax regulations are subject to interpretation. Where appropriate, it establishes a provision on the basis of the amounts expected to be paid to the tax authorities.

The Group is subject to final income tax on revenue from real estate and construction services. The final income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted at the reporting date.

Final income tax is presented outside income tax expenses in profit or loss.

The difference between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities related to the final income tax, and their respective final tax bases is not recognised as deferred tax assets or liabilities.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

w. Pajak penghasilan kini dan tangguhan (lanjutan)

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode *balance sheet liability* untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian. Namun, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika timbul dari pengakuan awal *goodwill*; atau pada saat pengakuan awal suatu aset atau liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi maupun laba rugi kena pajak. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan menggunakan tarif (atau peraturan) pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan dan diharapkan untuk diterapkan jika aset pajak tangguhan direalisasikan atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan tersedia untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari investasi pada entitas anak dan asosiasi, kecuali untuk liabilitas pajak tangguhan dimana waktu pembalikan perbedaan temporer dikendalikan oleh Grup dan kemungkinan besar perbedaan temporer tidak akan dibalik di masa depan yang dapat diperkirakan.

Liabilitas atas ketidakpastian eksposur perpajakan atas pajak badan diklasifikasikan sebagai utang pajak dan untuk pajak lainnya diklasifikasikan sebagai provisi.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara bersih.

Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan disajikan sebagai bagian dari "Beban pajak penghasilan" dalam laba rugi. Grup juga menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari "Beban pajak penghasilan".

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***w. Current and deferred income tax** (continued)*

Deferred income tax is recognised, using the balance sheet liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill; deferred income tax is not accounted for if it arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using tax rates (or laws) that have been enacted or substantially enacted as at the reporting date and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the temporary differences can be utilised.

Deferred tax liabilities are provided on temporary differences arising on investments in subsidiaries and associates, except for deferred income tax liabilities where the timing of the reversal of temporary difference is controlled by the Group and it is probable that the temporary difference will not be reversed in the foreseeable future.

Liabilities related to uncertain tax exposure of corporate income tax is classified as taxes payables and of other taxes are classified as provisions.

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there are legally-enforceable rights to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income tax assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on the same taxable entities and where there is an intention to settle the balances on a net basis.

The underpayment/overpayment of income tax is presented as part of "Income tax expenses" in profit or loss. The Group also presents interest/penalties, if any, as part of "Income tax expenses".

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

x. Aset keuangan dari perjanjian konsesi jasa

Piutang dari proyek konsesi merupakan jasa yang berhubungan dengan perjanjian konsesi jasa dimana pembayaran minimum yang dijamin telah disetujui tanpa dipengaruhi tingkat penggunaan listrik. Karena jangka waktu pembayaran yang panjang, piutang diukur sebesar nilai kini dari penerimaan kas yang dijamin di masa depan yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga tertentu. Akumulasi tahunan dari bunga atas piutang ini disajikan sebagai pendapatan keuangan dari perjanjian konsesi jasa menggunakan metode suku bunga efektif. Pembayaran akan dibagi menjadi porsi pengurang piutang dan bunga dari jumlah pokok yang belum dibayarkan dan porsi atas bagian konsesi jasa lainnya.

y. Pelaporan segmen

Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan operasi utama. Pengambil keputusan operasi utama, yang bertanggung jawab mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi, serta membuat keputusan strategis adalah Direksi.

z. Modal saham

Saham biasa diklasifikasikan sebagai ekuitas. Biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada penerbitan saham biasa atau opsi disajikan pada ekuitas sebagai pengurang penerimaan, setelah dikurangi pajak. Biaya emisi saham disajikan sebagai pengurang akun tambahan modal disetor.

aa. Laba bersih per saham dasar dan dilusian

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar dalam periode yang bersangkutan.

Laba bersih per saham dilusian dihitung dengan menyesuaikan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif yang dimiliki Perusahaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

x. Financial assets from service concession arrangement

Receivables due from service concession project represents service provided in connection with a service concession arrangement for which guaranteed minimum payments have been agreed irrespective of the extent of use of the electricity. Due to the length of the payment period, receivables are measured using the present value of future guaranteed cash receipts discounted using certain interest rate. The annual accumulation of interest on these receivables is presented as finance income from service concession arrangement using the effective interest method. Payments will be divided into a portion to be deducted from the receivables and interest on the unpaid amounts and a portion for the other service concessions.

y. Segment reporting

Operating segments are reported in a consistent manner with the internal reporting provided to the chief operating decision-maker. The chief operating decision-maker, who is responsible for allocating resources and assessing the performance of the operating segments and making strategic decisions is the Board of Directors.

z. Share capital

Ordinary shares are classified as equity. Incremental costs directly attributable to the issuing of new ordinary shares or options are shown in equity as a deduction, net of tax from the proceeds. Share issuance costs are presented as a deduction from the additional paid-in capital account.

aa. Basic and diluted earnings per share

The amount of basic earnings per share is computed by dividing earnings for the period attributable to owners of the parent by the weighted-average number of shares outstanding during the period.

Diluted earnings per share is calculated by adjusting the weighted average number of ordinary shares outstanding to assume conversion of all dilutive potential ordinary shares owned by the Company.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ab. Distribusi dividen

Distribusi dividen kepada pemegang saham Perusahaan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian Grup pada periode dimana dividen dideklarasikan dan telah disetujui oleh pemegang saham Perusahaan.

ac. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana yang didefinisikan dalam PSAK 7: Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi dan Peraturan OJK No. VIII.G.7.

Berdasarkan Peraturan OJK No. VIII.G.7, entitas berelasi dengan Pemerintah merupakan pihak berelasi dari Grup. Entitas berelasi dengan Pemerintah mencakup entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau yang dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah.

Rincian saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi disajikan dalam Catatan 29.

ad. Utang salam

Salam adalah akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) dengan pengiriman di kemudian hari oleh Grup (*muslam illaihi*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

Utang salam diakui pada saat Grup menerima uang muka penjualan salam sebesar jumlah yang diterima.

Uang muka salam yang diterima dapat berupa kas. Uang muka salam dalam bentuk kas diakui pada saat Grup menerima pembayaran dari bank dan diukur sebesar jumlah yang diterima.

Utang salam dihentikan pengakuannya pada saat penyerahan barang kepada pembeli mewakili bank. Setelah Grup menerima pembayaran dari pembeli, Grup akan mengalihkan pembayaran tersebut kepada Bank.

Akad salam merupakan transaksi dengan kewajiban penyerahan barang oleh Grup ke pembeli akhir sesuai ketentuan pembeli dalam perjanjian akad salam. Transaksi salam disajikan pada laporan arus kas konsolidasian pada aktivitas keuangan.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

ab. Dividend distributions

Dividend distribution to the Company's shareholders is recognised as a liability in the Group's consolidated financial statements in the period in which the dividends are declared and approved by the Company's shareholders.

ac. Transactions with related parties

The Group has transactions with related parties as defined under SFAS 7: Related Party Disclosures and OJK Regulation No. VIII.G.7.

Based on OJK Regulation No. VIII.G.7, Government-related entities are considered related parties of the Group. Government-related entities include entities which are controlled, jointly controlled or significantly influenced by the Government.

The details of significant balances and transactions entered into with related parties are presented in Note 29.

ad. Salam payable

Salam is a sale and purchase contract for ordered goods (muslam fiih) with delivery at a later date by the Group (muslam illaihi) and the payment is made by the buyer when the contract is agreed after certain conditions.

The salam payable is recognised when the Group receives advance sales of salam in the amount received.

Advance from salam can be in the form of cash. Salam payable in the form of cash is recognised when the Group receives payment from the bank and is measured at the amount receive.

The salam payable is derecognised when the goods are delivered to the buyer on behalf of bank. After the Group receives payment from the buyer, the Group will transfer the proceeds to the Bank.

Akad salam is a transaction with an obligation to deliver goods by the Group to the end customer according to the terms of buyer in the akad salam agreement. Salam transaction is presented in the consolidated statement of cash flows in the financing activities.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal pelaporan, serta jumlah pendapatan dan beban selama tahun pelaporan. Estimasi, asumsi, dan pertimbangan tersebut dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk harapan peristiwa di masa datang yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Grup telah mengidentifikasi hal-hal berikut dimana diperlukan pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan dan dimana hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut jika menggunakan asumsi dan kondisi yang berbeda dan dapat mempengaruhi secara material hasil keuangan atau posisi keuangan konsolidasian Grup yang dilaporkan dalam tahun mendatang.

a. Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana setiap entitas di dalam Grup beroperasi. Manajemen Grup mempertimbangkan mata uang yang paling mempengaruhi pendapatan dan beban dari barang dan jasa yang diberikan serta mempertimbangkan indikator lainnya dalam menentukan mata uang yang paling tepat menggambarkan pengaruh ekonomi dari transaksi, kejadian dan kondisi yang mendasari.

b. Provisi atas kerugian kredit ekspektasian piutang usaha dan piutang lainnya

Grup menghitung kerugian kredit ekspektasian kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya. Tingkat provisi adalah berdasarkan hari jatuh tempo atas kelompok segmen pelanggan yang mempunyai karakteristik risiko kredit yang serupa.

Grup menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi *forward-looking*. Sebagai contoh, jika prakiraan atas kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama periode/tahun depan, yang dapat menyebabkan meningkatnya jumlah gagal bayar, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar historis diperbaharui dan perubahan estimasi *forward-looking* dianalisis.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the consolidated financial statements in conformity with the Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and the disclosure of contingent assets and liabilities at the reporting date and the reported amounts of revenue and expenses during the reporting period. Estimates, assumptions, and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

The Group has identified the following matters under which significant judgements, estimates and assumptions are made and where actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions and may materially affect the consolidated financial results or financial position of the Group reported in future years.

a. Determination of functional currency

The functional currency is the currency of the primary economic environment in which each of the entities in the Group operates. The Group's management considered the currency that mainly influences the revenue and cost of goods sold and services rendered and other indicators in determining the currency that most faithfully represents the economic effects of the underlying transactions, events and conditions.

b. Provision for expected credit losses of trade receivables and other receivables

The Group calculates expected credit losses for cash and cash equivalents, trade receivables and other receivables. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar credit risk characteristics.

The Group adjusts the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions are expected to deteriorate over the next period/year, which can lead to an increased number of defaults, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analysed.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Provisi atas kerugian kredit ekspektasian piutang usaha dan piutang lainnya (lanjutan)

Penilaian atas korelasi antara tingkat gagal bayar historis yang diobservasi, prakiraan atas kondisi ekonomi dan kerugian kredit ekspektasian merupakan estimasi yang signifikan. Jumlah kerugian kredit ekspektasian paling dipengaruhi oleh perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Grup dan prakiraan kondisi ekonomi juga mungkin tidak menggambarkan gagal bayar aktual pelanggan di masa yang akan datang.

c. Ketidakpastian eksposur perpajakan

Pertimbangan dan asumsi diperlukan dalam menentukan besaran fasilitas pengurang pajak (*capital allowance*) dan pengurangan beban tertentu untuk tujuan fiskal selama proses estimasi atas perhitungan beban pajak penghasilan masing-masing perusahaan dalam Grup. Secara khusus, perhitungan beban pajak penghasilan Grup melibatkan penafsiran terhadap peraturan perpajakan dan peraturan lainnya. Banyaknya transaksi dan perhitungan yang dapat menyebabkan ketidakpastian di dalam penentuan kewajiban pajak selama bisnis normal.

Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen seperti yang diungkapkan di atas dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ("DJP"). Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan kewajiban pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Grup, dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam periode dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

d. Pajak penghasilan

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi fiskal, besaran *capital allowance* dan perbedaan temporer lainnya, diakui hanya apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Sama seperti "penurunan nilai aset nonkeuangan" asumsi atas laba kena pajak masa depan yang dapat dihasilkan sangat dipengaruhi oleh estimasi dan asumsi manajemen atas tingkat produksi yang diharapkan, volume penjualan, harga komoditas dan lain-lain; yang mana terpapar risiko dan ketidakpastian, sehingga terdapat kemungkinan perubahan keadaan akan mengubah proyeksi laba kena pajak di masa mendatang.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS *(continued)*

b. Provision for expected credit losses of trade receivables and other receivables *(continued)*

The assessment of the correlation between historical observed default rates and forecast economic conditions and expected credit losses is a significant estimate. The amount of expected credit losses is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Group's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customer's actual default in the future.

c. Uncertain tax exposures

Judgements and assumptions are required to determine the capital allowances and deductibility of certain expenses during the estimation of the provision for income tax expense for each company within the Group. In particular, the calculation of the Group's income tax expenses involves the interpretation of applicable tax laws and regulations. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.

All judgements and estimates taken by management as discussed above may be challenged by the Directorate General of Taxation ("DGT"). As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. The resolution of tax positions taken by the Group, can take several years to complete and in some cases, it is difficult to predict the ultimate outcome. Where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax provision in the period in which this determination is made.

d. Income taxes

Deferred tax assets, including those arising from tax losses carried forward, capital allowances and other temporary differences, are recognised only where it is considered probable that they will be recovered, which is dependent on the generation of sufficient future taxable profits. Similar to "impairment of non-financial assets", assumptions about the generation of future taxable profits is heavily affected by management's estimates and assumptions regarding expected production levels, sales volumes, commodity prices, etc; which are subject to risk and uncertainty, and hence there is a possibility that changes in circumstances will alter the projected future taxable profits.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Imbalan pascakerja

Nilai kini liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya/(penghasilan) pensiun bersih mencakup tingkat diskonto, kenaikan gaji di masa datang dan kenaikan biaya kesehatan. Adanya perubahan pada asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat liabilitas imbalan pascakerja.

Grup menentukan tingkat diskonto dan kenaikan gaji masa datang yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini atas estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas imbalan pascakerja. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas imbalan pascakerja yang terkait.

Asumsi kunci liabilitas imbalan pascakerja lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Informasi tambahan diungkapkan pada Catatan 17.

f. Estimasi masa manfaat aset tetap dan properti investasi

Grup mengestimasi masa manfaat aset tetap dan properti investasi berdasarkan ekspektasi utilisasi aset yang sesuai dengan rencana dan strategi usaha setelah mempertimbangkan perkembangan teknologi di masa depan dan perilaku pasar. Di samping itu, estimasi dari masa manfaat aset tetap dan properti investasi juga mempertimbangkan penelaahan Grup secara kolektif terhadap praktik industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang sejenis. Estimasi masa manfaat ditelaah paling sedikit setiap akhir tahun pelaporan dan diperbaharui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan keterbatasan hukum atau pembatasan lainnya atas penggunaan dari aset. Namun, ada kemungkinan, hasil operasi di masa depan dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS *(continued)*

e. Post-employment benefits

The present value of the post-employment benefits liabilities depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost/(income) for pensions include the discount rate, future salary increase and future medical costs. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of post-employment benefits liabilities.

The Group determines the appropriate discount rate and future salary increase at the end of each reporting period. The discount rate is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the post-employment benefits liabilities. In determining the appropriate discount rate, the Group considers the interest rates of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related post-employment benefits liabilities.

Other key assumptions for post-employment benefits liabilities are based on current market conditions. Additional information is disclosed in Note 17.

f. Estimating the useful lives of fixed assets and investment properties

The Group estimates the useful lives of its fixed assets and investment properties based on expected asset utilisation as supported by business plans and strategies that also consider expected future technological developments and market behaviour. In addition, the Group's collective assessment of industry practice, an internal technical evaluation and experience with similar assets are also considered when estimating the useful lives of fixed assets and investment proprties. The estimated useful lives are reviewed at least each financial year end and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limitations on the use of the assets. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates caused by changes in the factors mentioned above.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Estimasi masa manfaat aset tetap dan properti investasi (lanjutan)

Biaya perolehan aset tetap dan properti investasi disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaatnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis properti investasi dan aset tetap antara 4 sampai dengan 40 tahun. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa properti investasi dan aset tetap.

Nilai tercatat atas aset tetap pada tanggal-tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 10.

g. Pengakuan pendapatan dan beban kontrak konstruksi

Kebijakan pengakuan pendapatan konstruksi mensyaratkan penggunaan estimasi yang dapat berpengaruh terhadap jumlah pendapatan yang dilaporkan. Pendapatan yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui berdasarkan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada akhir periode pelaporan (metode persentase penyelesaian).

Untuk menentukan tahap penyelesaian kontrak konstruksi, Grup mengestimasi kemajuan proyek berdasarkan pengukuran langsung atas nilai barang atau jasa yang dialihkan kepada pelanggan sampai akhir periode pelaporan secara relatif terhadap sisa barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak. Dalam menentukan estimasi kemajuan proyek, diperlukan juga pertimbangan manajemen karena tidak terdapat cara pengukuran yang baku untuk menentukan kemajuan proyek. Estimasi dan pertimbangan yang diambil dapat mempengaruhi tingkat presisi nilai persentase penyelesaian. Walaupun manajemen berkeyakinan bahwa estimasi dan pertimbangan yang dibuat adalah wajar dan tepat, perbedaan persentase dapat mempengaruhi besaran pendapatan konstruksi yang dicatat pada suatu periode.

Grup mengestimasi jumlah imbalan yang bersifat variabel atas penyerahan jasa konstruksi yang dijanjikan ke pelanggan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam kontrak. Apabila terdapat kemungkinan Grup kehilangan hak atas sebagian imbalan yang akan dibayarkan atau berkewajiban untuk memberikan kompensasi kepada pelanggan karena satu dan lain hal, maka nilainya akan dibukukan sebagai provisi pada saat kondisi yang dapat menimbulkan hal tersebut teridentifikasi dan nilainya diestimasi berdasarkan informasi yang tersedia sampai dengan tanggal pelaporan.

***3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS** (continued)*

***f. Estimating the useful lives of fixed assets and investment properties** (continued)*

The costs of fixed assets and investment properties are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful life. Management estimates the useful life of these investment properties and fixed assets to be within 4 to 40 years. Changes in the expected level of usage and technological development could have an impact on the economic useful life and the residual values of these investment properties and fixed assets.

The net carrying amounts of the Group's fixed assets at reporting dates are disclosed in Note 10.

g. Revenue and expense recognition of construction contract

The revenue recognition policy for construction contract requires the use of estimates which may impact the reported amount of revenue. Revenue related to construction contracts is recognised based on the completion stage of contract activities at the end of reporting period (percentage of completion method).

To determine the completion stage of a construction contract, the Group estimates the progress of the project on the basis of direct measurements of the value of goods or services transferred to a customer as of the period end, relative to the remaining goods or services promised under the contract. In estimating the progress of project, management needs to include their judgements as there is no standardised measurement to calculate the progress of a project. These estimates and judgements may affect the level of precision of percentage of completion. While management believes that their estimates and judgements are reasonable and appropriate, differences in percentage of the actual completion stage may affect the amount of construction revenue recorded for a period.

The Group estimates the variable consideration amount from fulfilling promised construction services to the customer in line with the terms and conditions in the contract. If there is a possibility that the Group loss its entitlement of a portion of consideration that will be paid or liable to pay a compensation to the customer for one reason or another, the amount will be booked as a provision when the condition that indicates it arise and the amount is estimated based on the latest available information up to the reporting date.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Pengakuan pendapatan dan beban kontrak konstruksi (lanjutan)

Grup juga secara berkelanjutan mengestimasi jumlah biaya untuk menyelesaikan suatu kontrak konstruksi. Dalam mengestimasi jumlah biaya untuk menyelesaikan suatu kontrak, Grup perlu menggunakan pertimbangan dan pengetahuan Grup atas situasi terkini dari proyek karena tidak terdapat cara pengukuran yang baku untuk menentukan jumlah biaya untuk menyelesaikan suatu kontrak. Estimasi dan pertimbangan yang diambil dapat mempengaruhi tingkat presisi hasil perhitungan kontrak yang merugikan.

h. Pengakuan pendapatan dan piutang subsidi

Pemerintah Republik Indonesia memberikan subsidi pupuk melalui Grup berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan ("Permendag") No. 15/M-DAG/PER/4/2013. Subsidi pupuk diberikan untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian meliputi pupuk jenis urea, SP 36, ZA, NPK dan pupuk organik yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian.

Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian ("Permentan") No. 41 Tahun 2021 yang berlaku sejak tanggal 30 Desember 2021 untuk jenis pupuk bersubsidi yang terdiri atas Urea, SP-36, ZA dan NPK. Pada tanggal 8 Juli 2022, Menteri Pertanian menerbitkan Permentan No. 10 Tahun 2022 yang mengubah jenis pupuk bersubsidi menjadi Urea dan NPK.

Tata cara perhitungan, pencairan, dan pertanggungjawaban subsidi pupuk diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ("PMK") No. 68/PMK.02/2016. Besaran subsidi pupuk dihitung berdasarkan selisih antara harga pokok penjualan bersubsidi dengan harga eceran tertinggi.

Pendapatan subsidi dibukukan berdasarkan biaya pupuk subsidi yang telah diaudit oleh BPK-RI yang tertuang pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan estimasi kuantitas penyaluran pupuk yang tertuang pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan tersebut yang didasarkan pada kuantitas tersalur bulanan yang telah diverifikasi Kementerian Pertanian. Secara historis, aktual kuantitas penyaluran pupuk yang disetujui dan estimasi dari kuantitas penyaluran tidak berbeda signifikan.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS *(continued)*

g. Revenue and expense recognition of construction contract *(continued)*

The Group also continuously estimates the cost to complete a construction contract. In estimating the cost to complete a contract, the Group needs to include their judgements and knowledge of the latest project situation as there is no standardised measurement to calculate the cost to complete a contract. These estimates and judgements may affect the level of precision of the onerous contract calculation result.

h. Revenue and receivable recognition of subsidy

The Government of Indonesia provides a fertiliser subsidy through the Group based on Ministry of Trading ("Permendag") Regulation No. 15/M-DAG/PER/4/2013. Fertiliser subsidies are given for the needs of farmers group and/or farmers in the agricultural sector including fertiliser type urea, SP 36, ZA, NPK and organic fertilisers stipulated by the Ministry of Agriculture.

Procedures for Determining the Allocation and Highest Retail Price of Subsidised Fertilisers in the Agricultural Sector are regulated in the Regulation of the Minister of Agriculture ("Permentan") No. 41 of 2021 which took effect on 30 December 2021 for types of subsidised fertilisers consisting of Urea, SP-36, ZA and NPK. On 8 July 2022, the Minister of Agriculture issued Minister of Agriculture No. 10 of 2022 which changed the type of subsidised fertiliser to Urea and NPK.

The procedure for the calculation, settlement and accountability of subsidised fertiliser is stipulated by Ministry of Finance Regulation ("PMK") No. 68/PMK.02/2016. Fertiliser subsidy amount is calculated based on the difference between subsidised cost of goods sold and the highest retail price.

Revenue from the Government subsidy is recorded based on subsidised fertiliser costs audited by BPK-RI as stated in the Minutes of Audit Result and estimates of distributed quantity as stated in the Minutes of Audit Result which is based on monthly distributed quantity that has been verified by Ministry of Agriculture. Historically, the actual approved distributed quantity and estimates of distributed quantity are not significantly different.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Pengakuan pendapatan dan piutang subsidi (lanjutan)

Klasifikasi piutang subsidi antara porsi lancar dan tidak lancar ditentukan berdasarkan estimasi dan pertimbangan manajemen selama setahun ke depan berdasarkan ketersediaan sisa *budget* Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ("DIPA") dan pos anggaran lainnya tahun berikutnya yang dapat digunakan untuk penagihan piutang subsidi serta konfirmasi dari Kementerian Pertanian per tanggal neraca.

i. Sewa

Grup mempunyai beberapa perjanjian sewa dimana Grup bertindak sebagai penyewa untuk beberapa aset tertentu. Grup mengevaluasi apakah Grup memiliki hak untuk mengendalikan aset sewaan berdasarkan PSAK 73: Sewa, yang mensyaratkan Grup untuk membuat pertimbangan dan estimasi dari hak untuk mengendalikan aset sewaan.

Karena Grup tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir. Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Grup, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu saat sewa terjadi, dan mata uang dimana pembayaran sewa ditentukan.

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, opsi pembelian atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan). Penilaian tersebut ditinjau jika terjadi peristiwa signifikan atau perubahan signifikan dalam situasi yang memengaruhi penilaian ini dan berada dalam kendali Grup. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, tidak ada revisi persyaratan sewa untuk mencerminkan efek dari melaksanakan opsi perpanjangan dan opsi penghentian.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS *(continued)*

h. Revenue and receivable recognition of subsidy *(continued)*

The classification of current and non-current portion of subsidy receivables is determined based on management's estimation and judgement for a year using the availability of the remaining budget of Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ("DIPA") and other budget items for the following year that available for collection of subsidy receivables including confirmation from the Ministry of Agriculture as of balance sheet date.

i. Leases

The Group has various lease agreements where the Group acts as a lessee in respect of certain assets. The Group evaluates whether the Group has the right to control the use of leased asset based on SFAS 73: Lease, which requires the Group to make judgements and estimates of right to control the leased asset.

Since the Group could not readily determine the implicit rate, management uses the Group's incremental borrowing rate as a discount rate. There are a number of factors to consider in determining an incremental borrowing rate, many of which need judgement in order to be able to reliably quantify any necessary adjustments to arrive at the final discount rates. In determining an incremental borrowing rate, the Group considers the following main factors: the Group's corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered into, and the currency in which the lease payments are denominated.

In determining the lease term, the Group considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, purchase option or not exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated). The lease term is reviewed if a significant event or a significant change in circumstances occurs which affects this assessment and that is within the control of the Group. For the year ended 31 December 2022, there was no revision of lease terms to reflect the effect of exercising extension and termination options.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Cadangan penurunan nilai persediaan

Grup melakukan pencadangan penurunan nilai persediaan berdasarkan estimasi persediaan yang akan digunakan pada masa datang dan kondisi dari persediaan. Ketidakpastian terkait dengan faktor-faktor ini dapat menyebabkan nilai realisasi yang berbeda dengan nilai tercatat dari persediaan.

k. Nilai wajar aset tetap yang menggunakan model revaluasi

Tanah dinyatakan berdasarkan nilai wajar. Penentuan nilai wajar dilakukan oleh penilai publik independen.

Dalam proses penilaian, manajemen, dengan bantuan penilai publik independen, menentukan data dan asumsi, menelaah metode penilaian serta berdiskusi dengan penilai. Pendekatan dan metode yang digunakan dalam melakukan revaluasi tergantung pada kelas aset. Walaupun data dan asumsi Grup dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada data input atau asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap nilai aset yang menggunakan model revaluasi.

l. Provisi sehubungan dengan pengadaan gas bumi

Provisi diakui ketika: Grup memiliki kewajiban hukum atau konstruktif saat ini sebagai akibat peristiwa masa lalu; kemungkinan besar arus keluar sumber daya diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban; dan jumlahnya telah diestimasi secara andal. Penyisihan tidak diakui untuk kerugian operasi masa depan (lihat semua provisi di Catatan 13b).

Jika kemungkinan besar terdapat kewajiban kini pada tanggal posisi keuangan, entitas harus mengakui provisi (jika kriteria pengakuan terpenuhi). Jika kemungkinan besar tidak ada kewajiban kini pada tanggal neraca, maka entitas harus mengungkapkan kewajiban kontinjensi, kecuali kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi sangat kecil, sehingga pengungkapan tidak diperlukan.

Lihat Catatan 35b untuk pengungkapan provisi sehubungan dengan pengadaan gas bumi dimana terdapat pertimbangan manajemen yang diperlukan untuk menginterpretasikan peraturan.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS *(continued)*

j. Provision for impairment of inventories

The Group provides provision of impairment of inventories based on estimated future usage and the condition of the inventories. Uncertainty associated with these factors may result in the realisable amount being different from the reported carrying amount of the inventories.

k. Fair value of fixed assets that use revaluation model

Land is stated at fair value. The determination of the fair value was performed by an independent public appraiser.

Management, with the assistance of an independent public appraiser, determines the data inputs and assumptions, assesses the valuation methods and holds discussions with the appraisers as part of the valuation process. The approaches and methods that are used in the revaluation depend upon the group of assets. While it is believed that the Group's data and assumptions are reasonable and appropriate, significant changes in data inputs, or significant changes in assumptions, may materially affect the value of the assets that use the revaluation model.

l. Provision with respect to the procurement of natural gas

Provision is recognised when: the Group has a present legal or constructive obligation as a result of past events; it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation; and the amount has been reliably estimated. Provision is not recognised for future operating losses (refer to all provisions in Note 13b).

Where it is more likely than not that a present obligation exists at the financial position date, the entity should recognise a provision (if the recognition criteria are met). Where it is more likely that no present obligation exists at the balance sheet date, the entity should disclose a contingent liability, unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote, in which case no disclosure is required.

Refer to Note 35b for the disclosure of a provision with respect to the procurement of natural gas which involve management's judgement to interpret the regulation.

4. KAS DAN SETARA KAS / *4. CASH AND CASH EQUIVALENTS*

	2022	2021	
Kas			***Cash on hand***
Rp	6,461	6,000	*Rp*
USD	675	1,055	*USD*
Lainnya	28	42	*Others*
Jumlah	7,164	7,097	*Total*
Bank			***Cash in banks***
Rp			***Rp***
Pihak berelasi			***Related parties***
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("BTN")	3,875,332	31,874	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("BTN")*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	3,416,848	1,622,558	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")	2,044,454	1,273,565	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	1,710,337	1,139,915	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI")	15,209	-	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI")*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000)	-	7,917	*Others (each below Rp10,000)*
Pihak ketiga			***Third parties***
PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")	132,033	80,943	*PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")*
PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk ("Bank BJB")	91,479	272,766	*PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk ("Bank BJB")*
PT Bank DKI ("Bank DKI")	68,665	82,072	*PT Bank DKI ("Bank DKI")*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000)	11,511	35,119	*Others (each below Rp10,000)*
	11,365,868	4,546,729	
USD			***USD***
Pihak berelasi			***Related parties***
BRI	7,519,527	453,155	*BRI*
Bank Mandiri	1,682,712	1,742,981	*Bank Mandiri*
BNI	69,030	35,951	*BNI*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000)	30	13	*Others (each below Rp10,000)*
Pihak ketiga			***Third parties***
Bank BJB	777	15,550	*Bank BJB*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000)	20,474	22,848	*Others (each below Rp10,000)*
	9,292,550	2,270,498	

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) / *4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)*

	2022	2021	
Mata uang asing lainnya			***Other currencies***
Pihak berelasi			***Related party***
Bank Mandiri	63	86	*Bank Mandiri*
Pihak ketiga			***Third parties***
PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Maybank")	10,825	10,220	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Maybank")*
PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC")	-	383	*PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC")*
	10,888	10,689	
Jumlah	20,669,306	6,827,916	*Total*
Deposito berjangka			***Time deposits***
Rp			***Rp***
Pihak berelasi			***Related parties***
BRI	3,402,989	2,453,778	*BRI*
Bank Mandiri	2,769,637	1,159,756	*Bank Mandiri*
BNI	2,241,875	4,238,900	*BNI*
BSI	1,032,581	165,000	*BSI*
BTN	461,000	729,400	*BTN*
Pihak ketiga			***Third parties***
Bank BJB	606,605	423,100	*Bank BJB*
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung ("Bank Sumsel Babel")	100,224	93,980	*PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung ("Bank Sumsel Babel")*
PT Bank MNC ("MNC")	45,785	40,000	*PT Bank MNC ("MNC")*
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("BTPN")	37,000	-	*PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("BTPN")*
MUFG Bank, Ltd ("MUFG")	20,000	70,000	*MUFG Bank, Ltd ("MUFG")*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000)	15,000	17,400	*Others (each below Rp10,000)*
	10,732,696	9,391,314	
USD			***USD***
Pihak berelasi			***Related parties***
BNI	1,950,801	167,946	*BNI*
BRI	97,130	1,001,685	*BRI*
Bank Mandiri	3,225	7,135	*Bank Mandiri*
Pihak ketiga			***Third party***
Bank Sumsel Babel	298	50,212	*Bank Sumsel Babel*
	2,051,454	1,226,978	
Jumlah	12,784,150	10,618,292	*Total*
Jumlah kas dan setara kas	**33,460,620**	**17,453,305**	***Total cash and cash equivalents***

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) / *4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)*

Kisaran tingkat suku bunga kontraktual deposito berjangka per tahun sebagai berikut:

The range of contractual interest rates per annum on time deposits are as follows:

	2022	2021	
Rp	1.90% - 6.30%	1.85% - 5.50%	*Rp*
USD	0.05% - 3.00%	0.04% - 3.50%	*USD*

5. PIUTANG USAHA / *5. TRADE RECEIVABLES*

	2022	2021	
Pihak ketiga	2,747,304	3,107,309	*Third parties*
Cadangan penurunan nilai	(597,786)	(634,633)	*Allowance for impairment*
	2,149,518	**2,472,676**	
Pihak berelasi (Catatan 29)	659,332	915,737	*Related parties (Note 29)*
Cadangan penurunan nilai	(115,328)	(63,747)	*Allowance for impairment*
	544,004	**851,990**	
Jumlah - bersih	**2,693,522**	**3,324,666**	***Total - net***

Nilai tercatat piutang usaha Grup berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

The carrying amounts of the Group's trade receivables are denominated in the following currencies:

	2022	2021	
Rp	2,981,152	3,288,010	*Rp*
USD	423,113	735,036	*USD*
Lainnya	2,371	-	*Others*
	3,406,636	4,023,046	
Cadangan penurunan nilai	(713,114)	(698,380)	*Allowance for impairment*
Jumlah - bersih	**2,693,522**	**3,324,666**	***Total - net***

Rincian umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

The aging of these trade receivables is as follows:

	2022	2021	
Lancar	2,018,809	2,533,230	*Current*
Sudah jatuh tempo:			*Overdue:*
1-90 hari	560,561	500,675	*1-90 days*
91-120 hari	70,440	51,676	*91-120 days*
121-365 hari	66,616	186,495	*121-365 days*
>365 hari	690,210	750,970	*>365 days*
	3,406,636	4,023,046	
Cadangan penurunan nilai	(713,114)	(698,380)	*Allowance for impairment*
Jumlah - bersih	**2,693,522**	**3,324,666**	***Total - net***

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

***5. TRADE RECEIVABLES** (continued)*

The changes in the allowance for impairment losses were as follows:

	2022	2021	
Saldo awal	698,380	1,115,172	*Beginning balance*
Penambahan	83,143	30,028	*Additional*
Pembalikan	(51,999)	(85,427)	*Reversal*
Penghapusan	(16,410)	(361,393)	*Write-off*
Saldo akhir	713,114	698,380	*Ending balance*

Grup menerapkan cadangan kerugian ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa.

The Group applies the lifetime expected loss provision for all trade receivables. To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and the days past due.

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai piutang secara individual dilakukan untuk pelanggan yang telah mengalami kesulitan pembayaran sesuai dengan periode yang telah ditentukan dan pelanggan yang umumnya memiliki peringkat kredit.

Allowance for impairment losses for individual receivables are provided for customers that have difficulties in fulfilling their obligations according to the defined period and generally have credit ratings.

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai piutang secara kolektif dilakukan untuk pelanggan yang secara nilai tidak signifikan dan ada kemungkinan gagal bayar. Perhitungan ini mempertimbangkan tren pembayaran piutang yang dilakukan oleh konsumen, informasi yang relevan tentang kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi.

Allowance for impairment losses for collective receivables are provided for customers that have insignificant balances and with possibilities of payment default. This calculation considers trends of payment made by customers, relevant information about past events, current conditions and forecasts of economic conditions.

Karena jatuh temponya yang pendek, nilai wajar piutang usaha kurang lebih sama dengan jumlah tercatatnya.

Due to the short-term nature, the fair value of trade receivables approximates their carrying amount.

Berdasarkan hasil penelaahan atas piutang masing-masing dan kolektif pelanggan pada akhir tahun, manajemen Grup berkeyakinan bahwa nilai provisi atas penurunan nilai telah memadai untuk menutup potensi kerugian atas piutang usaha tidak tertagih.

Based on the review of the status of the individual and collective customers at the end of the year, the Group's management believes that the provision for the impairment of trade receivables is adequate to cover potential losses from uncollectible trade receivables.

Piutang usaha Grup digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank jangka pendek (Catatan 14).

Trade receivables of the Group are used as collateral on short-term bank loans (Note 14).

Lihat Catatan 29 untuk informasi mengenai pihak berelasi.

Refer to Note 29 for related parties information.

6. PIUTANG SUBSIDI / *SUBSIDY RECEIVABLES*

a. Piutang subsidi dari Pemerintah Indonesia / *Subsidy receivables from the Government of Indonesia*

Rincian saldo piutang subsidi dari Pemerintah Indonesia adalah sebagai berikut:

The balance of the subsidy receivables from the Government of Indonesia is as follow:

	2022	2021	
Tahun			***Year***
2020	430,237	430,237	*2020*
2021	11,071	6,038,001	*2021*
Estimasi piutang subsidi dari Pemerintah - 2022	16,641,553	-	*Estimated subsidy receivables from the Government - 2022*
	17,082,861	6,468,238	
Dikurangi:			*Less:*
Utang Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") keluaran atas subsidi yang belum dibayarkan	(1,687,828)	(588,022)	*Value Added Tax ("VAT") out out payable from unpaid subsidy receivables*
Jumlah	**15,395,033**	**5,880,216**	***Total***
Dikurangi:			*Less:*
Bagian lancar	**(15,395,033)**	**(2,822,427)**	***Current portion***
Bagian tidak lancar	**-**	**3,057,789**	***Non-current portion***

Estimasi piutang subsidi dari Pemerintah merupakan estimasi piutang subsidi atas penyaluran pupuk untuk tahun 2022 dan 2021. Lihat Catatan 2v dan 3h mengenai pengakuan pendapatan dan piutang subsidi.

Estimated subsidy receivables from Government represent estimated receivable from fertiliser distribution in 2022 and 2021. Refer to Notes 2v and 3h regarding subsidy revenue and receivable recognition.

Mutasi saldo piutang subsidi Grup adalah sebagai berikut:

The movements of the subsidy receivables of the Group are as follows:

	2022	2021	
Saldo awal	6,363,048	6,152,036	*Beginning balance*
Penyesuaian	(1,878)	(9,471)	*Adjustment*
Pembayaran kepada Pemerintah	95,627	126,633	*Payment to the Government*
PPN atas pembayaran	9,563	12,663	*VAT related to payments*
Subsidi Pemerintah (Catatan 22)	36,403,913	24,757,202	*Government subsidy (Note 22)*
PPN atas pendapatan	3,972,693	2,475,720	*VAT related to revenue*
Penerimaan dari Pemerintah	(26,593,545)	(24,463,583)	*Settlement from the Government*
PPN atas penerimaan	(2,917,311)	(2,468,339)	*VAT related to settlements*
PPh 22 atas penerimaan	(249,249)	(219,813)	*Income tax article 22 related to settlements*
Jumlah	17,082,861	6,363,048	*Total*
Dikurangi:			*Less:*
Utang PPN keluaran atas subsidi yang belum dibayarkan	(1,687,828)	(588,022)	*VAT out payable from unpaid subsidy receivables*
Ditambah:			*Add:*
Utang subsidi kepada Pemerintah	-	95,627	*Subsidy payable to the Government*
Utang PPN keluaran atas utang subsidi kepada Pemerintah	-	9,563	*VAT payable from unpaid subsidy payable to the Government*
Saldo akhir	**15,395,033**	**5,880,216**	***Ending balance***

6. PIUTANG SUBSIDI (lanjutan)

a. Piutang subsidi dari Pemerintah Indonesia (lanjutan)

Utang PPN keluaran atas subsidi yang belum dibayarkan merupakan utang PPN atas penjualan subsidi yang penyelesaiannya akan dilakukan melalui saling hapus dengan porsi PPN atas pelunasan piutang subsidi.

Utang subsidi merupakan kelebihan pembayaran dari Pemerintah dikarenakan perbedaan harga subsidi per ton antara Kementerian Pertanian dengan hasil audit BPK-RI. Utang subsidi pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar nil (2021: Rp95.627).

Pada tahun 2020, terdapat 128.057 ton pendapatan pupuk subsidi yang masih dalam proses penelusuran kelengkapan bukti oleh BPK-RI. Menindaklanjuti hal ini, Grup telah memberikan seluruh bukti dokumen tambahan yang diminta di tahun 2021 sebesar Rp394.707 dan berdasarkan hasil verifikasi lanjutan, terdapat penyesuaian pendapatan subsidi sebesar Rp413 berdasarkan notulen rapat tertanggal 3 Desember 2021. Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, manajemen masih menunggu laporan BPK-RI terkait hal ini. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada koreksi signifikan atas nilai pendapatan subsidi tersebut karena pengakuan pendapatan telah didukung dengan bukti yang valid.

Tidak ada kerugian penurunan nilai yang dicatat sehubungan dengan piutang subsidi di atas. Risiko kredit pada piutang subsidi pupuk dianggap dapat diabaikan, sebab pihak yang bertransaksi merupakan Pemerintah Indonesia dan Grup memperoleh penggantian bunga atas keterlambatan pelunasan piutang subsidi ini.

Piutang subsidi Grup digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank jangka pendek (Catatan 14).

***6. SUBSIDY RECEIVABLES** (continued)*

***a. Subsidy receivables from the Government of Indonesia** (continued)*

VAT out payable from unpaid subsidy receivables is VAT payable from subsidy sales, settlement of which will be performed by offsetting VAT portion from settlement of subsidy receivables.

Subsidy payable is an overpayment from the Government due to the difference in the subsidised fertiliser price per tons between the Ministry of Agriculture and BPK-RI audit result. Subsidy payable as at 31 December 2022 was nil (2021: Rp95,627).

In 2020, there were 128,057 tons of subsidised fertiliser revenue that are still in the process of review by BPK-RI. In response to this, the Group had provided all additional evidences in 2021 of Rp394,707 and based on the results of further verification, there was an adjustment in subsidy revenue of Rp413, based on the minutes of the meeting dated 3 December 2021. As of completion date of these consolidated financial statements, management is still waiting for the BPK-RI report in regards to this matter. Management believes that there will be no significant correction to the subsidy revenue because revenue recognition is supported by valid evidences.

No impairment loss has been recorded in relation to the subsidy receivables. The credit risk on subsidy receivables is considered negligible, since the counterparty is the Government of Indonesia and the Group is compensated with interest reimbursement as a result of late payment of subsidy's receivables.

Subsidy receivables of the Group are used as collateral on short-term bank loans (Note 14).

b. Piutang subsidi yang belum ditagih

Piutang subsidi yang belum ditagih adalah sebagai berikut:

b. Unbilled subsidy receivables

Unbilled subsidy receivables were as follows:

	2022	2021	
Piutang subsidi belum ditagih	762,154	1,079,618	*Unbilled subsidy receivables*
Dikurangi:			*Less:*
Utang PPN keluaran atas subsidi yang belum ditagih	(75,529)	(98,147)	*VAT out payable from unbilled subsidy receivables*
Jumlah	**686,625**	**981,471**	***Total***

Piutang subsidi yang belum ditagih merupakan pendapatan atas penjualan pupuk subsidi ke distributor namun belum tersalurkan ke petani.

Unbilled subsidy receivables arise from the sales of subsidised fertiliser to distributors which have not yet distributed to the farmers.

7. PEKERJAAN DALAM PENYELESAIAN KONTRAK KONSTRUKSI - DARI PELANGGAN DAN UTANG BRUTO KEPADA PELANGGAN UNTUK PEKERJAAN KONTRAK KONSTRUKSI

7. CONSTRUCTION CONTRACT WORK IN PROGRESS - DUE FROM CUSTOMERS AND AMOUNTS DUE TO CUSTOMERS FOR CONSTRUCTION CONTRACT WORK

Pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan adalah bagian dari kontrak aset yang diakui sehubungan dengan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan.

Construction contract work in progress - due from customers is recognised as part of contract assets related to revenue from contracts with customers.

Utang bruto kepada pelanggan untuk pekerjaan kontrak konstruksi adalah bagian dari liabilitas kontrak yang diakui sehubungan dengan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan.

Amounts due to customers for construction contract work is recognised as part of contract liabilities related to revenue from contracts with customers.

Rincian pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan adalah sebagai berikut:

Details of construction contract work in progress - due from customers are as follows:

	2022	2021	
Pihak berelasi (Catatan 29)	653,579	1,303,488	*Related parties (Note 29)*
Pihak ketiga	260,624	240,229	*Third parties*
Jumlah	**914,203**	**1,543,717**	***Total***

Berdasarkan hasil penelaahan atas masing-masing dan kolektif pelanggan pada akhir tahun, manajemen Grup berkeyakinan bahwa potensi kerugian atas jumlah tagihan bruto pelanggan tidak tertagih sangat minimum sehingga tidak terdapat provisi atas penurunan nilai jumlah tagihan bruto pelanggan yang dibukukan untuk saldo per 31 Desember 2022 dan 2021.

Based on the assessment of the individual and collective customers at the end of the year, the Group's management believes that there were minimal potential losses from uncollectible gross amount due from customers, hence there was no provision booked for the impairment of gross amount due from customers as at 31 December 2022 and 2021.

Rincian pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan berdasarkan mata uang asing adalah sebagai berikut:

The details of construction contract work in progress - due from customers based on currencies are as follows:

	2022	2021	
USD	535,875	1,018,186	*USD*
Rp	378,328	525,531	*Rp*
Jumlah	**914,203**	**1,543,717**	***Total***

Pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan dijaminkan oleh Grup sebagai jaminan atas pinjaman bank jangka pendek dan jangka panjang (Catatan 14 dan 15).

Construction contract work in progress - due from customers is used by the Group as collateral for short-term and long-term bank loans (Notes 14 and 15).

Rincian utang bruto kepada pelanggan untuk pekerjaan kontrak konstruksi atas pekerjaan dalam pelaksanaan adalah sebagai berikut:

Details of amounts due to customers from construction contract work are as follows:

	2022	2021	
Pihak berelasi (Catatan 29)	26,454	-	*Related parties (Note 29)*
Pihak ketiga	1,668	2,210	*Third parties*
Jumlah	**28,122**	**2,210**	***Total***

8. PERSEDIAAN / *8. INVENTORIES*

	2022	2021	
Barang jadi	9,788,166	7,619,063	*Finished goods*
Bahan baku	6,357,502	2,728,720	*Raw materials*
Suku cadang dan bahan pembantu	2,847,421	2,638,375	*Spare parts and supporting materials*
Persediaan dalam perjalanan	1,615,114	1,379,537	*Inventories in transit*
Persediaan barang dalam proses	1,095,532	530,739	*Work in process inventories*
	21,703,735	14,896,434	
Provisi penurunan nilai	(1,136,566)	(986,308)	*Provision for impairment*
Jumlah	**20,567,169**	**13,910,126**	***Total***

Mutasi provisi penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut:

Movement of provision for impairment of inventories is as follows:

	2022	2021	
Saldo awal	986,308	988,087	*Beginning balance*
Penambahan	156,086	9,120	*Addition*
Penghapusan	(5,828)	(10,899)	*Write-off*
Saldo akhir	**1,136,566**	**986,308**	***Ending balance***

Berdasarkan hasil penelaahan pada tanggal pelaporan, manajemen Grup berkeyakinan bahwa provisi tersebut cukup untuk menutupi kerugian dari persediaan usang atau penurunan nilai.

Based on a review at the reporting date, the Group's management believes that the above provision is adequate to cover any losses from obsolescence or impairment of inventories.

Pada tanggal 31 Desember 2022, persediaan barang jadi diasuransikan terhadap risiko kerugian, gempa bumi, kebakaran dan risiko lainnya (semua risiko) dengan nilai pertanggungan sebesar Rp9.870.013 dan USD21.930.000. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas persediaan yang dipertanggungkan.

As at 31 December 2022, finished goods are covered by insurance against the risk of losses, earthquake, fire and other risks (all risks) with total sum insured of Rp9,870,013 and USD21,930,000. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on inventories insured.

Persediaan dalam perjalanan merupakan bahan baku.

Inventories in transit represents raw materials.

Persediaan digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank jangka pendek (Catatan 14).

The inventories are used as collaterals for the short-term bank loans (Note 14).

9. PERPAJAKAN / *TAXATION*

a. Pajak dibayar di muka / *Prepaid taxes*

	2022	2021	
Pajak dibayar di muka - porsi lancar			***Prepaid taxes - current portion***
Pajak penghasilan badan ("PPh Badan")	137,868	320,691	*Corporate income tax*
Klaim pengembalian pajak	867	855	*Claim for tax refund*
	138,735	**321,546**	
Pajak lainnya:			***Other taxes:***
PPN	1,248,061	999,635	*VAT*
Lainnya	-	25,272	*Others*
	1,248,061	**1,024,907**	
Pajak dibayar di muka - porsi tidak lancar			***Prepaid taxes - non-current portion***
PPh Badan	13,357	106,916	*Corporate income tax*
Klaim pengembalian pajak	300,200	362,364	*Claim for tax refund*
	313,557	**469,280**	
Pajak lainnya:			***Other taxes:***
PPN	**4,886**	**1,355,443**	*VAT*

b. Utang pajak / *Taxes payable*

	2022	2021	
PPh badan:			***Corporate income tax:***
Pasal 25/29	**3,989,003**	**1,878,257**	*Article 25/29*
Pajak lainnya:			***Other taxes:***
Pasal 21	326,393	221,950	*Article 21*
PPN	304,398	298,545	*VAT*
Pasal 22	19,422	18,004	*Article 22*
Pasal 23	16,886	15,534	*Article 23*
Pasal 4(2)	14,896	72,445	*Article 4(2)*
Surat Ketetapan Pajak	2,132	22,382	*Tax Assessment Letter*
Lainnya	5,280	1,937	*Others*
	689,407	**650,797**	

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban pajak penghasilan

	2022	2021	
Perusahaan:			***The Company:***
Pajak kini	11,227	15,294	*Current tax*
Penyesuaian tahun sebelumnya	7,629	23,679	*Prior year adjustment*
	18,856	38,973	
Entitas anak:			***Subsidiaries:***
Pajak kini	6,540,185	2,716,860	*Current tax*
Pajak tangguhan	(126,388)	335,903	*Deferred tax*
Penyesuaian tahun sebelumnya	143,500	228,354	*Prior year adjustment*
	6,557,297	3,281,117	
Konsolidasian:			***Consolidated:***
Pajak kini	6,551,412	2,732,154	*Current tax*
Pajak tangguhan	(126,388)	335,903	*Deferred tax*
Penyesuaian tahun sebelumnya	151,129	252,033	*Prior year adjustment*
	6,576,153	**3,320,090**	

***9. TAXATION** (continued)*

c. Income tax expenses

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak Perusahaan dengan estimasi penghasilan kena pajak Perusahaan adalah sebagai berikut:

The reconciliation between profit before income tax of the Company and estimated taxable income of the Company is as follow:

	2022	2021	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	25,086,745	8,454,765	*Consolidated profit before income tax*
Laba sebelum pajak penghasilan entitas anak	(28,175,527)	(9,693,703)	*Profit before income tax of subsidiaries*
Disesuaikan dengan jurnal eliminasi konsolidasian	6,911,616	4,586,554	*Adjusted for consolidation elimination*
Laba sebelum pajak penghasilan - Perusahaan	3,822,834	3,347,616	*Profit before income tax - the Company*
Koreksi fiskal:			*Fiscal corrections:*
Penghasilan yang telah dikenakan PPh final	(7,643,233)	(4,264,936)	*Income subject to final income tax*
Beban pokok pendapatan yang telah dikenakan PPh final	967,683	743,831	*Cost of revenues subject to final income tax*
Provisi penurunan nilai piutang usaha dan piutang lainnya	1,044,316	-	*Provision for impairment of trade receivables and other receivables*
Provisi penurunan nilai investasi	405,268	-	*Provision for impairment of investment*
Bonus, insentif, dan tantiem	1,124,263	167,242	*Bonus, incentive and tantiem*
Beban yang tidak dapat dikurangkan menurut perpajakan	329,901	75,767	*Non-deductible expenses*
Laba kena pajak	51,032	69,520	*Taxable income*
Pajak kini	11,227	15,294	*Current tax*
Pembayaran pajak di muka - Perusahaan:			*Prepaid taxes - the Company:*
Pasal 23	(74,717)	(6,724)	*Article 23*
Pasal 25	(7,653)	-	*Article 25*
(Lebih)/kurang bayar pajak penghasilan badan - Perusahaan	(71,143)	8,570	*(Over)/underpayment of corporate income tax - the Company*

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Perusahaan merupakan *strategic investment holding* dengan penghasilan utama berupa dividen yang merupakan penghasilan bukan objek pajak. Dengan demikian, semua biaya yang terkait dengan dividen bukan sebagai biaya yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan.

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan konsolidasian Grup dengan jumlah teoritis beban pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian Grup sebagai berikut:

***9. TAXATION** (continued)*

***c. Income tax expenses** (continued)*

The Company is a strategic investment holding whose main income is from dividend which is not a tax object. As such, all expenses incurred relating to dividend income are not deductible for taxation purpose.

The reconciliation between the Group's consolidated income tax expense and the theoretical tax amount on the Group's consolidated profit before income tax is as follows:

	2022	2021	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	25,086,745	8,454,765	*Consolidated profit before income tax*
Pajak penghasilan dihitung dengan tarif pajak efektif	5,519,084	1,860,048	*Income tax calculated at effective tax rates*
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(2,355,861)	(1,512,533)	*Income subject to final income tax*
Beban pokok pendapatan yang telah dikenakan pajak final	2,423,314	2,420,323	*Cost of revenues subject to final income tax*
Beban yang tidak dapat dikurangkan menurut pajak	816,703	250,421	*Non-deductible expenses*
Beban pajak final	7,225	3,975	*Final tax expense*
Bagian atas rugi/(laba) bersih entitas asosiasi dan ventura bersama	14,559	(65,124)	*Share in net loss/(profit) of associates and joint ventures*
Penyesuaian beban pajak tahun sebelumnya	151,129	252,033	*Adjustment in respect of prior years*
Penyesuaian tarif pajak	-	110,947	*Adjustment tax rate*
Jumlah beban pajak penghasilan konsolidasian	**6,576,153**	**3,320,090**	***Consolidated income tax expenses***

9. PERPAJAKAN (lanjutan) / *9. TAXATION (continued)*

d. Aset dan liabilitas pajak tangguhan / *d. Deferred tax assets and liabilities*

	31 Desember/*December* 2022				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	(Dibebankan)/ dikreditkan ke laba rugi/ *(Charged)/ credited to profit or loss*	(Dibebankan)/ dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ *(Charged)/ credited to other comprehensive income*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Aset pajak tangguhan:					***Deferred tax assets:***
Provisi penurunan nilai piutang usaha dan piutang lainnya	80,310	(4,001)	-	76,309	*Provision for impairment of trade receivables and other receivables*
Liabilitas imbalan pascakerja	21,346	105,682	(13,114)	113,914	*Post-employment benefit liabilities*
Selisih nilai buku bersih aset tetap komersial dan fiskal	(3,546)	(162,143)	-	(165,689)	*Difference between commercial and fiscal net book value of fixed assets*
Provisi penurunan nilai persediaan	2,729	65,742	-	68,471	*Provision for impairment of inventories*
Bonus, insentif, dan tantiem	488	76,334	-	76,822	*Bonus, incentive and tantiem*
Lain-lain	11,470	(6,389)	-	5,081	*Others*
Aset pajak tangguhan	**112,797**	**75,225**	**(13,114)**	**174,908**	***Deferred tax assets***
Liabilitas pajak tangguhan:					***Deferred tax liabilities:***
Provisi penurunan nilai piutang usaha	92,552	(18,618)	-	73,934	*Provision for impairment of trade receivables*
Liabilitas imbalan pascakerja	455,072	(105,339)	(21,194)	328,539	*Post-employment benefits liabilities*
Selisih nilai buku bersih aset tetap komersial dan fiskal	(1,696,521)	65,104	-	(1,631,417)	*Difference between commercial and fiscal net book value of fixed assets*
Akumulasi rugi fiskal	29,257	(29,257)	-	-	*Accumulated fiscal loss*
Provisi penurunan nilai persediaan	211,058	(30,172)	-	180,886	*Provision for impairment of inventories*
Penurunan nilai investasi	17,618	(4,216)	-	13,402	*Impairment of investment*
Bonus, insentif, dan tantiem	242,616	60,002	-	302,618	*Bonus, incentive and tantiem*
Aset keuangan lainnya	(66,509)	2,643	-	(63,866)	*Other financial assets*
Lain-lain	(23,442)	111,016	-	87,574	*Others*
Liabilitas pajak tangguhan	**(738,299)**	**51,163**	**(21,194)**	**(708,330)**	***Deferred tax liabilities***
Jumlah - bersih	**(625,502)**			**(533,422)**	***Total - net***

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas pajak tangguhan (lanjutan)

***9. TAXATION** (continued)*

***d. Deferred tax assets and liabilities** (continued)*

	31 Desember/*December* 2021					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penyesuaian akibat perubahan tarif pajak/ *Adjustment due to changes of tax rates***	**(Dibebankan)/ dikreditkan ke laba rugi/ *(Charged)/ credited to profit or loss***	**(Dibebankan)/ dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ *(Charged)/ credited to other comprehensive income***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Aset pajak tangguhan:						***Deferred tax assets:***
Provisi penurunan nilai piutang usaha dan piutang lainnya	86,389	6,461	(12,540)	-	80,310	*Provision for impairment of trade receivables and other receivables*
Liabilitas imbalan pascakerja	21,826	1,381	(1,423)	(438)	21,346	*Post-employment benefit liabilities*
Selisih nilai buku bersih aset tetap komersial dan fiskal	(3,406)	(108)	(32)	-	(3,546)	*Difference between commercial and fiscal net book value of fixed assets*
Provisi penurunan nilai persediaan	2,671	-	58	-	2,729	*Provision for impairment of inventories*
Bonus, insentif, dan tantiem	199	93	196	-	488	*Bonus, incentive and tantiem*
Lain-lain	9,467	1,232	771	-	11,470	*Others*
Aset pajak tangguhan	**117,146**	**9,059**	**(12,970)**	**(438)**	**112,797**	***Deferred tax assets***
Liabilitas pajak tangguhan:						***Deferred tax liabilities:***
Provisi penurunan nilai piutang usaha	184,094	18,406	(109,948)	-	92,552	*Provision for impairment of trade receivables*
Liabilitas imbalan pascakerja	458,361	(10,395)	(62,450)	69,556	455,072	*Post-employment benefits liabilities*
Selisih nilai buku bersih aset tetap komersial dan fiskal	(1,541,324)	(151,033)	(4,164)	-	(1,696,521)	*Difference between commercial and fiscal net book value of fixed assets*
Akumulasi rugi fiskal	109,527	5,913	(86,183)	-	29,257	*Accumulated fiscal loss*
Provisi penurunan nilai persediaan	193,823	17,664	(429)	-	211,058	*Provision for impairment of inventories*
Penurunan nilai investasi	12,332	687	4,599	-	17,618	*Impairment of investment*
Bonus, insentif, dan tantiem	193,651	7,810	41,155	-	242,616	*Bonus, incentive and tantiem*
Aset keuangan lainnya	(52,376)	(5,580)	(8,553)	-	(66,509)	*Other financial assets*
Lain-lain	(33,951)	(3,478)	13,987	-	(23,442)	*Others*
Liabilitas pajak tangguhan	**(475,863)**	**(120,006)**	**(211,986)**	**69,556**	**(738,299)**	***Deferred tax liabilities***
Jumlah - bersih	**(358,717)**				**(625,502)**	***Total - net***

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, perusahaan-perusahaan di dalam Grup yang berdomisili di Indonesia menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. DJP dapat menetapkan atau mengubah pajak dalam batas waktu lima tahun saat terutangnya pajak.

f. Surat ketetapan pajak

Entitas/ *Entity*	Jenis pajak/ *Type of taxes*	Tahun pajak dan status pada 31 Desember 2022/ *Fiscal year and status as at 31 December 2022*	Nilai sengketa/ *Amount of disputes*	Nilai yang dibayarkan/ *Amount paid*	Pajak dibayar di muka/ *Prepaid tax*	Provisi pajak/ *Tax provision*
Rekind	Pajak dipotong dan pajak lainnya/ *Withholding and other taxes*	2014 (Peninjauan kembali/ *Judicial review*) 2016 (Peninjauan kembali/ *Judicial review*) 2017 (Peninjauan kembali/ *Judicial review*)	265,891	243,892	-	26,790
Rekind	PPh badan/*Corporate income tax*	2014 (Peninjauan kembali/ *Judicial review*) 2015 (Peninjauan kembali/ *Judicial review*) 2017 (Peninjauan kembali/ *Judicial review*)	177,072	167,537	-	13,736
PSP	PPN/*VAT*	2018 (Banding/*Appeal*)	51,026	3,947	51,026	-
PSP	PPh badan/*Corporate income tax*	2016 (Banding/*Appeal*) 2018 (Banding/*Appeal*) 2019 (Banding/*Appeal*)	129,922	290	129,922	-
PKG	PPh 21/*Article 21*	2017 (Banding/*Appeal)*	62,360	-	51,349	-
PKG	PPN/*VAT*	2019	296,253	296,253	-	-
PKC	PPh Badan/*Corporate income tax*	2017 (Keberatan/*Objection*)	35,731	-	35,731	-
PKT	PPh Badan/*Corporate income tax*	2016 (Menerima/*Accept*)	94,514	-	94,514	-
PKT	PPh Badan/*Corporate income tax*	2017-2020 (Menerima koreksi dari auditor pajak/ *Accept corrections from tax auditor)*	90,757	90,757	-	-

Grup berkeyakinan bahwa hasil audit pajak, keberatan, banding, gugatan, dan peninjauan kembali tidak akan memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

g. Perubahan tarif pajak

Berdasarkan UU No. 7/2021 ("UU HPP") tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pemerintah Indonesia mencabut penurunan tarif PPh badan sebelumnya dari 22% menjadi 20% pada tahun pajak 2022 yang sebelumnya diatur dalam UU No. 2/2020, sehingga kini tarif PPh badan akan tetap sebesar 22%.

UU HPP juga menetapkan kenaikan tarif PPN menjadi 11% yang berlaku sejak 1 April 2022 dan 12% sejak 1 Januari 2025 dan tarif PPh baru Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap sebesar 22% berlaku mulai Tahun Pajak 2022.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan 31 Desember 2022 dan 2021 telah dihitung dengan memperhitungkan tarif pajak yang diharapkan berlaku pada saat realisasi.

***9. TAXATION** (continued)*

e. Administration

Under the Taxation Laws of Indonesia, companies within the Group which are domiciled in Indonesia calculate and pay tax on the basis of self assessment. The DGT may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

f. Tax assessment letters

The Group believes that the tax audit, objection, appeal, lawsuit and judicial review results will not have a material impact on the Group's consolidated financial statements.

g. Tax rates changes

Based on Law No. 7/2021 (the "HPP Law") regarding the Harmonisation of Tax Regulations, the Government of Indonesia revoked the previous reduction in the corporate income tax rate from 22% to 20% in the 2022 tax year which was previously regulated in Law No. 2/2020, thus the corporate income tax rate will remain at 22%.

The HPP Law also stipulates an increase in the VAT rate to 11% effective from 1 April 2022 and to 12% effective from 1 January 2025 and the CIT rate for Corporate Taxpayers and Permanent Establishments remains at 22% effective from Fiscal Year 2022.

Deferred tax assets and liabilities as at 31 December 2022 and 2021 have been remeasured taking into account tax rates expected to be prevailing at the time they are realised.

10. ASET TETAP / *10. FIXED ASSETS*

	31 Desember/*December* 2022						
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Disposals***	**Reklasifikasi/ *Reclassifications***	**Revaluasi/ *Revaluation***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Biaya perolehan							***Acquisition cost***
Tanah	32,002,781	275,533	-	(662,179)	1,291,909	32,908,044	*Land*
Bangunan dan prasarana	7,613,158	63,341	(7,402)	210,923	-	7,880,020	*Buildings and infrastructure*
Pabrik dan peralatan	56,396,009	213,400	(408,822)	438,632	-	56,639,219	*Plants and infrastructure*
Mesin bengkel kerja	3,718,963	25,770	(161,191)	266,978	-	3,850,520	*Workshop machinery*
Kendaraan dan alat berat	510,791	23,892	(17,806)	4,764	-	521,641	*Vehicles and heavy equipment*
Perlengkapan kantor dan rumah	1,068,707	102,509	(1,793)	33,401	-	1,202,824	*Office and household equipment*
Kapal dan sarana	454,626	1,847	-	70,029	-	526,502	*Ships and facilities*
Aset penyangga	933,374	59,439	(1,322)	-	-	991,491	*Supporting assets*
	102,698,409	765,731	(598,336)	362,548	1,291,909	104,520,261	
Aset hak-guna							***Right-of-use assets***
Tanah	433,231	52,970	(25,511)	100,793	-	561,483	*Land*
Bangunan dan prasarana	252,201	118,102	(215,869)	-	-	154,434	*Buildings and infrastructure*
Kendaraan dan alat berat	254,450	61,958	(70,461)	-	-	245,947	*Vehicles and heavy equipment*
	939,882	233,030	(311,841)	100,793	-	961,864	
Aset dalam penyelesaian	2,183,112	3,604,584	(42,272)	(1,174,767)	-	4,570,657	*Construction in progress*
	105,821,403	4,603,345	(952,449)	(711,426)	1,291,909	110,052,782	
Akumulasi penyusutan							***Accumulated depreciation***
Bangunan dan prasarana	3,335,258	308,974	(2,583)	-	-	3,641,649	*Buildings and infrastructure*
Pabrik dan peralatan	24,649,628	3,440,524	(124,850)	(34,142)	-	27,931,160	*Plants and infrastructure*
Mesin bengkel kerja	1,454,516	170,394	(154,368)	(12,549)	-	1,457,993	*Workshop machinery*
Kendaraan dan alat berat	357,713	24,044	(17,715)	(2,072)	-	361,970	*Vehicles and heavy equipment*
Perlengkapan kantor dan rumah	828,369	97,442	(1,707)	-	-	924,104	*Office and household equipment*
Kapal dan sarana	322,453	50,760	-	-	-	373,213	*Ships and facilities*
Aset penyangga	396,864	42,372	(1,322)	-	-	437,914	*Supporting assets*
	31,344,801	4,134,510	(302,545)	(48,763)	-	35,128,003	
Aset hak-guna							***Right-of-use assets***
Tanah	36,043	27,049	(25,437)	-	-	37,655	*Land*
Bangunan dan prasarana	163,065	117,704	(211,398)	-	-	69,371	*Buildings and infrastructure*
Kendaraan dan alat berat	133,488	68,922	(69,097)	-	-	133,313	*Vehicles and heavy equipment*
	332,596	213,675	(305,932)	-	-	240,339	
Penurunan nilai	25,793	-	-	-	-	25,793	*Impairment*
	31,703,190	4,348,185	(608,477)	(48,763)	-	35,394,135	
Nilai buku bersih	**74,118,213**					**74,658,647**	***Net book value***

Pada tahun 2022, sejalan dengan perubahan fungsi dari aset tetap terkait, Grup melakukan reklasifikasi dari aset tetap ke properti investasi dengan harga perolehan sebesar Rp662.179, serta reklasifikasi dari aset tetap ke aset tidak lancar lainnya (aset dimiliki untuk dijual) dengan harga perolehan dan akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp49.247 dan Rp48.763.

In 2022, in line with changes of the function of its fixed assets, Group reclassified from fixed assets to investment properties with acquisition cost amounting to Rp662,179, and reclassified from fixed assets to other non-current assets (assets held for sale) with acquisition cost and accumulated depreciation amounting to Rp49,247 and Rp48,763, respectively.

10. ASET TETAP (lanjutan) / *10. FIXED ASSETS (continued)*

	31 Desember/*December* 2021						
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposals*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Revaluasi/ *Revaluation*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Biaya perolehan							***Acquisition cost***
Tanah	32,002,781	-	-	-	-	32,002,781	*Land*
Bangunan dan prasarana	7,528,644	10,049	(1,828)	76,293	-	7,613,158	*Buildings and infrastructure*
Pabrik dan peralatan	54,038,283	949,233	(333,802)	1,742,295	-	56,396,009	*Plants and infrastructure*
Mesin bengkel kerja	3,670,444	10,827	(4,410)	42,102	-	3,718,963	*Workshop machinery*
Kendaraan dan alat berat	507,960	10,042	(8,672)	1,461	-	510,791	*Vehicles and heavy equipment*
Perlengkapan kantor dan rumah	897,780	136,129	(898)	35,696	-	1,068,707	*Office and household equipment*
Kapal dan sarana	408,405	-	-	46,221	-	454,626	*Ships and facilities*
Aset penyangga	813,406	114,159	(534)	6,343	-	933,374	*Supporting assets*
	99,867,703	1,230,439	(350,144)	1,950,411	-	102,698,409	
Aset hak-guna							***Right-of-use assets***
Tanah	55,683	36,046	(9,941)	351,443	-	433,231	*Land*
Bangunan dan prasarana	191,305	106,549	(45,653)	-	-	252,201	*Buildings and infrastructure*
Kendaraan dan alat berat	244,313	54,364	(44,227)	-	-	254,450	*Vehicles and heavy equipment*
	491,301	196,959	(99,821)	351,443	-	939,882	
Aset dalam penyelesaian	2,652,580	1,840,132	-	(2,309,600)	-	2,183,112	*Construction in progress*
	103,011,584	3,267,530	(449,965)	(7,746)	-	105,821,403	
Akumulasi penyusutan							***Accumulated depreciation***
Bangunan dan prasarana	3,127,274	209,356	(1,372)	-	-	3,335,258	*Buildings and infrastructure*
Pabrik dan peralatan	21,512,957	3,470,473	(333,802)	-	-	24,649,628	*Plants and infrastructure*
Mesin bengkel kerja	1,281,363	177,563	(4,410)	-	-	1,454,516	*Workshop machinery*
Kendaraan dan alat berat	334,716	31,593	(8,596)	-	-	357,713	*Vehicles and heavy equipment*
Perlengkapan kantor dan rumah	718,743	110,524	(898)	-	-	828,369	*Office and household equipment*
Kapal dan sarana	305,776	16,677	-	-	-	322,453	*Ships and facilities*
Aset penyangga	349,246	48,152	(534)	-	-	396,864	*Supporting assets*
	27,630,075	4,064,338	(349,612)	-	-	31,344,801	
Aset hak-guna							***Right-of-use assets***
Tanah	14,721	30,974	(9,652)	-	-	36,043	*Land*
Bangunan dan prasarana	80,089	125,669	(42,693)	-	-	163,065	*Buildings and infrastructure*
Kendaraan dan alat berat	71,530	103,084	(41,126)	-	-	133,488	*Vehicles and heavy equipment*
	166,340	259,727	(93,471)	-	-	332,596	
Penurunan nilai	-	25,793	-	-	-	25,793	*Impairment*
	27,796,415	4,349,858	(443,083)	-	-	31,703,190	
Nilai buku bersih	**75,215,169**					**74,118,213**	***Net book value***

Beban penyusutan aset tetap untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expenses of fixed assets for the years ended 31 December 2022 and 2021 were allocated as follows:

	2022	2021	
Beban pokok pendapatan (Catatan 24)	4,169,064	4,112,455	*Cost of revenues (Note 24)*
Beban penjualan (Catatan 25)	59,042	110,086	*Selling expenses (Note 25)*
Beban umum dan administrasi (Catatan 26)	120,079	127,317	*General and administrative expenses (Note 26)*
Jumlah	4,348,185	4,349,858	*Total*

10. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2022, harga perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah sebesar Rp7.519.198 (2021: Rp8.185.302).

Pada tanggal 31 Desember 2022, aset tetap Grup telah diasuransikan terhadap risiko gempa bumi, kebakaran dan risiko lainnya (semua risiko) dengan nilai pertanggungan sebesar Rp17.510.617 dan USD3.632.754.764 (2021: Rp18.903.483 dan USD3.979.723.572). Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Beberapa aset tetap digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank jangka pendek dan jangka panjang (Catatan 14 dan 15).

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, manajemen Grup berpendapat bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai aset tetap.

Pada tanggal 31 Desember 2021, tidak terdapat kenaikan signifikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi kelompok aset yang direvaluasi dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset".

Pada tahun 2022, Grup melakukan revaluasi aset tetap tanah yang dilakukan oleh beberapa Kantor Jasa Penilaian Publik ("KJPP") dengan rincian sebagai berikut:

***10. FIXED ASSETS** (continued)*

As at 31 December 2022, the acquisition cost of fixed assets which have been fully depreciated and are still being used amounted to Rp7,519,198 (2021: Rp8,185,302).

As at 31 December 2022, fixed assets of the Group are insured against risks of earthquake, fire and other risks (all risks) with total sum insured amounting to Rp17,510,617 and USD3,632,754,764 (2021: Rp18,903,483 and USD3,979,723,572). Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

Certain fixed assets are pledged as collateral for short-term and long-term bank loans (Notes 14 and 15).

As at 31 December 2022 and 2021, the Group's management is on the opinion that there was no indication of impairment in the fixed assets' value.

As at 31 December 2021, there were no significant increases in the carrying amounts of the class of revalued assets has been recorded as the "Asset Revaluation Surplus".

In 2022, the Group performed revaluation of its land which were carried out by several Independent Public Appraisers ("KJPP") with details as follows:

Entitas/ *Entity*	Nama KJPP/ *KJPP name*	Nomor laporan/ *Report number*	Tanggal laporan/ *Report date*
PKG	Hari Utomo & Rekan	119/SKel/HU-TANGSEL/XII/2022	26 Desember/*December* 2022*)
PKC	Toto Suharto & Rekan	00021/2.0055-00/PI/04/0060/0/I/2023	20 Januari/*January* 2023
PKT	Dasa'at Yudistira dan Rekan	00025/2.0041-12/PI/04/0142/1/I/2023	20 Januari/*January* 2023
PIM	Yanuar, Rosye	S.Y&R-00/PIM/I/2023/0004	10 Januari/*January* 2023
PSP	Abdullah Fitriantoro & Rekan	1022/UM/00-KJPP/XII/2022	31 Desember/*December* 2022*)
Rekind	Karmanto dan Rekan	028/K-APPRAISAL/SRT/I/2023	24 Januari/*January* 2023
PIP	Rao, Yuhal & Rekan	00063/2.0094-00/PP/01/0133/1/XII/2022	21 Desember/*December* 2022*)

*) Grup meyakini bahwa tidak ada perubahan yang signifikan antara valuasi pada tanggal 31 Desember 2022 dengan valuasi berdasarkan laporan KJPP.

*) *The Group believes that there were no significant changes between valuation date on 31 December 2022 with the KJPP's valuation reports.*

10. ASET TETAP (lanjutan)

Adapun Standar Penilaian yang digunakan adalah Standar Penilaian Indonesia edisi VII - 2018, dengan menggunakan pendekatan pasar dan pendapatan untuk revaluasi tanah di tahun 2022.

Pendekatan pasar yang digunakan untuk mengukur nilai wajar tanah mempertimbangkan penjualan dari aset sejenis atau pengganti dan data pasar yang terkait, serta menghasilkan estimasi nilai melalui proses perbandingan. Pada dasarnya, properti yang dinilai (obyek penilaian) dibandingkan dengan properti yang sebanding, baik dari transaksi yang telah terjadi maupun properti yang masih dalam tahap penawaran penjualan dari suatu proses jual beli, yang disesuaikan untuk perbedaan pada sifat, lokasi dan kondisi dari tanah yang dinilai. Nilai revaluasi tanah yang menggunakan pendekatan pasar pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp28.357.709.

Pendekatan pendapatan digunakan untuk mengukur sebagian nilai wajar tanah yang belum dan sudah siap pakai, dimana data harga pasar yang wajar tidak tersedia cukup atau sulitnya mencari data pembanding tanah sejenis. Oleh karena itu, PKT dan PIM menggunakan metode penilaian dari pendekatan pendapatan bukan pendekatan pasar untuk beberapa tanah yang dimiliki oleh PIM dan PKT. Pendekatan pendapatan ini dilakukan dengan menggunakan metode diskonto arus kas dengan teknik pengembangan lahan, dimana nilai lahan tersebut menggunakan nilai pasar pembanding yang telah disesuaikan, kemudian dikurangi dengan estimasi biaya pengembangan dan persiapan lahan. Teknik penilaian yang telah direvisi menggunakan input-input yang signifikan yang tidak dapat di observasi. Oleh karena itu, nilai wajarnya direklasifikasi ke tingkat 3.

Rekonsiliasi atas saldo awal terhadap saldo akhir dari pengukuran nilai wajar dengan menggunakan informasi signifikan yang tidak dapat diobservasi (Tingkat 3) adalah sebagai berikut:

***10. FIXED ASSETS** (continued)*

The Assessment Standards used were the Indonesian Appraisal Standards VII Edition - 2018, using market and income approaches for the land revaluation in 2022.

The market approach used to measure the fair value of land considers the sales of similar assets or replacement assets and related market information, which provides value estimation by means of a comparison process. Generally, the properties being valued (the valuation objects) are properties that are compared to other similar properties that have either completed the transaction process or been offered for sale, adjusted for differences in the nature, location or condition of the specific land. The revaluation value of land using the market approach as of 31 December 2022 was amounting to Rp28,357,709.

The income approach used to measure a portion of the fair value of land not ready and ready to use, where the market price data is insufficient or it is difficult to find comparative data for similar land. Therefore, PKT and PIM used the valuation method instead of market approach for some lands owned by them. This income approach is carried out using the discounted cash flow method with land development techniques, in which the land value uses the adjusted market comparable value, then deducted by the estimated development and land preparation costs. The revised valuation technique uses significant unobservable inputs. Accordingly, the fair value was reclassified to level 3.

Reconciliation of the beginning balance to the ending balance of the fair value measurements using significant unobservable inputs (Level 3) is as follows:

	Tanah yang belum dan sudah siap pakai/*Land not ready and ready to use*	
Saldo 1 Januari 2022	-	*Balance as at 1 January 2022*
Transfer ke tingkat 3	4,287,864	*Transfers to level 3*
Keuntungan yang diakui pada laporan pendapatan komprehensif	262,471	*Gain recognised in other comprehensive income*
Saldo akhir	4,550,335	*Ending balance*

10. ASET TETAP (lanjutan)

Input penilaian signifikan yang tidak dapat diobservasi dan digunakan adalah sebagai berikut:
- Harga per m^2 yang berkisar antara Rp602.634 (nilai penuh) sampai dengan Rp2.970.000 (nilai penuh);
- Estimasi biaya pengembangan dan persiapan lahan per m^2 yang berkisar antara Rp362.505 (nilai penuh) sampai dengan Rp947.675 (nilai penuh); dan
- Tingkat diskonto yang digunakan adalah 10,41% - 10,65%.

Peningkatan/(penurunan) signifikan dalam estimasi harga per m^2, estimasi biaya pengembangan dan persiapan lahan per m^2, dan tingkat diskonto secara tersendiri dapat menghasilkan nilai wajar yang secara signifikan lebih tinggi/(rendah).

Pada tanggal 31 Desember 2022, nilai tercatat tanah apabila menggunakan model biaya adalah sebesar Rp747.710.

Tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai wajar dan nilai tercatat aset tetap selain tanah.

Pada tanggal 23 Juli 2022, terjadi *over-firing* di dinding primary reformer di Pabrik Kaltim 5 Amoniak yang menyebabkan *primary reformer* perlu diperbaiki dan rangkaian produksi amoniak mengalami deformasi. Atas *over-firing* tersebut, Grup mencatat beban penghapusan aset tetap senilai Rp282.063 dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebagai bagian dari estimasi nilai tercatat dari *primary reformer* yang rusak. Pabrik tersebut telah beroperasi pada 21 Desember 2022. Kemudian, pada tanggal 27 Januari 2023, Perusahaan telah menerima persetujuan dari perusahaan asuransi atas pembayaran klaim pertama sebesar Rp59.225. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, proses klaim asuransi masih berlangsung.

Pada tanggal 31 Desember 2022, nilai aset dalam penyelesaian adalah sebesar Rp4.570.657 (2021: Rp2.183.112). Sebagian besar aset dalam penyelesaian diperkirakan akan selesai pada tahun 2023 dengan persentase penyelesaian saat ini antara 1% - 99%.

Grup telah mengkapitalisasi biaya pinjaman masing-masing sebesar Rp48.969 dan Rp40.494 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021. Biaya pinjaman dikapitalisasi pada tingkatan bunga antara 4,87% - 8,47%.

Hak atas tanah diperoleh berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan ("HGB") yang dapat diperbaharui dengan masa yang akan berakhir antara tahun 2029 sampai dengan tahun 2045. Mengacu pada praktik di masa lalu, Grup memiliki keyakinan dapat memperpanjang HGB tersebut.

***10. FIXED ASSETS** (continued)*

Significant unobservable inputs used are as follows:

- *Price per m^2 ranging from Rp602,634 (full amount) up to Rp2,970,000 (full amount);*
- *Estimated costs of development and land preparation per m^2 ranging from Rp362,505 (full amount) up to Rp947,675 (full amount); and*
- *Discount rate used is 10.41% - 10.65%.*

Significant increases/(decreases) on the estimated price per m^2, estimated cost of development and land preparation per m^2 and discount rate would result in a significantly higher/(lower) fair value.

As at 31 December 2022, the carrying value of land using the cost model amounted to Rp747,710.

There is no significant difference between the fair value and carrying amount of fixed assets other than land.

On 23 July 2022, there was an over-firing on the wall of the primary reformer at the Kaltim 5 Ammonia Factory, which caused the primary reformer needs to be repaired and the ammonia production circuit was temporarily halted. Due to the over-firing, the Group recorded a loss from disposal of fixed assets of Rp282,063 in profit or loss for the year ended 31 December 2022 as part of the estimated carrying amount of the damaged primary reformer. The plant has been operated on 21 December 2022. Subsequently, on 27 January 2023, the Company has received approval from the insurance company for the first claim payment amounting to Rp59,225. Up to the issuance date of these consolidated financial statements, the insurance claim process is still ongoing.

As at 31 December 2022, construction in progress is amounting to Rp4,570,657 (2021: Rp2,183,112). Most of the construction in progress are estimated to be completed in 2023 with current percentage of completion between 1% - 99%.

The Group has capitalised borrowing cost amounting to Rp48,969 and Rp40,494 for the years ended 31 December 2022 and 2021, respectively. Borrowing costs were capitalised at the rate of 4.87% - 8.47%.

Land rights are held under renewable Building Right Titles ("HGB") which will expire between 2029 up to 2045. Based on historical practices, the Group believes that it can renew these HGB.

10. ASET TETAP (lanjutan) / *FIXED ASSETS (continued)*

(Kerugian)/keuntungan atas pelepasan aset tetap untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

(Loss)/gain on disposal of fixed assets for the years ended 31 December 2022 and 2021 were as follows:

	2022	2021	
Nilai jual	84,764	8,564	*Selling price*
Nilai buku	(343,972)	(6,882)	*Book value*
(Kerugian)/keuntungan bersih	(259,208)	1,682	*Net (loss)/gain*

11. UTANG USAHA / *TRADE PAYABLES*

	2022	2021	
Pihak berelasi (Catatan 29)	1,383,595	279,646	*Related parties (Note 29)*
Pihak ketiga	7,764,600	5,821,581	*Third parties*
Jumlah	**9,148,195**	**6,101,227**	***Total***

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

The details of trade payables based on currencies are as follows:

	2022	2021	
USD	6,226,474	1,652,965	*USD*
Rp	2,910,057	4,403,968	*Rp*
EUR	7,772	28,281	*EUR*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000)	3,892	16,013	*Others (each below Rp10,000)*
Jumlah	**9,148,195**	**6,101,227**	***Total***

Saldo utang usaha pihak ketiga merupakan utang atas pembelian bahan baku, bahan penolong, suku cadang, dan jasa.

Trade payables to third parties are payable for the procurement of raw materials, supporting materials, spare parts and services.

12. UTANG LAINNYA / *OTHER PAYABLES*

	2022	2021	
Pihak berelasi (Catatan 29)	37,255	80,390	***Related parties (Note 29)***
Pihak ketiga:			***Third parties:***
Pendapatan diterima di muka	535,184	208,368	*Unearned revenue*
Liabilitas kontrak	512,848	845,166	*Contract liabilities*
Utang iuran	270,340	267,848	*Contribution payables*
Utang retensi	131,745	169,203	*Retention payables*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000)	112,918	71,729	*Others (each below Rp10,000)*
	1,563,035	1,562,314	
Jumlah	**1,600,290**	**1,642,704**	***Total***

13. LIABILITAS YANG MASIH HARUS DIBAYAR DAN PROVISI / *ACCRUED LIABILITIES AND PROVISIONS*

a. Liabilitas yang masih harus dibayar / *Accrued liabilities*

	2022	2021	
Bahan baku non-gas	2,935,365	1,770,839	*Non-gas raw materials*
Biaya bahan bakar dan gas alam	2,620,716	1,879,143	*Fuel and gas costs*
Biaya proyek	1,151,556	1,691,879	*Project costs*
Biaya distribusi	561,934	550,521	*Distribution costs*
Pembelian aset tetap	259,944	315,370	*Purchase of fixed assets*
Bunga pinjaman	180,808	191,270	*Interest expenses*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp50.000)	756,489	586,646	*Others (each below Rp50,000)*
Jumlah	**8,466,812**	**6,985,668**	***Total***

b. Provisi / *Provisions*

	2022	2021	
Provisi atas kurang bayar pengadaan gas bumi	1,798,475	-	*Provision for underpayment of natural gas procurement*
Provisi *liquidated damage*	1,400,826	1,239,655	*Provision for liquidated damage*
Provisi kontrak merugikan	431,820	286,221	*Provision for onerous contract*
Provisi sengketa pajak	40,953	507,538	*Provision for tax dispute*
Jumlah	**3,672,074**	**2,033,414**	***Total***

Perubahan provisi adalah sebagai berikut: / *The movement in the provisions are as follows:*

	2022				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Dibebankan pada laporan laba rugi/ *Charged to profit or loss***	**Realisasi selama tahun berjalan/ *Realisation during the year***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Kurang bayar pengadaan gas bumi	-	1,798,475	-	1,798,475	*Underpayment of natural gas procurement*
Liquidated damage	1,239,655	161,171	-	1,400,826	*Liquidated damage*
Kontrak yang merugikan	286,221	305,824	(160,225)	431,820	*Onerous contract*
Sengketa pajak	507,538	-	(466,585)	40,953	*Tax dispute*
Jumlah	**2,033,414**	**2,265,470**	**(626,810)**	**3,672,074**	***Total***

	2021				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Dibebankan pada laporan laba rugi/ *Charged to profit or loss***	**Realisasi selama tahun berjalan/ *Realisation during the year***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Liquidated damage	-	1,239,655	-	1,239,655	*Liquidated damage*
Sengketa pajak	575,516	-	(67,978)	507,538	*Tax dispute*
Kontrak yang merugikan	105,887	180,334	-	286,221	*Onerous contract*
Jumlah	**681,403**	**1,419,989**	**(67,978)**	**2,033,414**	***Total***

13. LIABILITAS YANG MASIH HARUS DIBAYAR DAN PROVISI (lanjutan)

b. Provisi (lanjutan)

Kurang bayar pengadaan gas bumi

Grup mengakui adanya kurang bayar pengadaan gas bumi pada tanggal 31 Desember 2022 seperti yang dijelaskan pada Catatan 35b. Jumlah provisi yang diperkirakan terjadi adalah sebesar Rp1.798.475 (2021: nihil). Provisi dibukukan sebagai bagian dari "Beban pokok pendapatan".

Liquidated damage

Grup memiliki kewajiban kontraktual untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Apabila terdapat indikasi bahwa proyek tidak dapat diselesaikan tepat waktu, maka Grup akan mencatatkan provisi atas potensi keterlambatan *liquidated damage* yang dapat dikenakan oleh pemilik proyek. Provisi diakui sebesar nilai dari perkiraan hari keterlambatan penyelesaian proyek dikalikan dengan tarif spesifik yang berlaku berdasarkan kontrak proyek. Jumlah provisi yang diperkirakan terjadi adalah sebesar Rp1.400.826 (2021: Rp1.239.655). Provisi dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Provisi tersebut dapat berubah apabila Grup mendapatkan perpanjangan waktu dari pemilik proyek dan/atau terjadi perubahan estimasi waktu penyelesaian.

Sengketa pajak

Jumlah ini merupakan provisi untuk kasus pajak yang sedang dalam proses banding ataupun peninjauan kembali. Manajemen Grup berkeyakinan bahwa hasil kasus pajak yang berpotensi kalah tidak akan melebihi jumlah yang telah diprovisikan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Kontrak yang merugikan

Grup memiliki beberapa kontrak dengan indikasi rugi pada akhir proyek. Sebagian besar kerugian yang diestimasi merupakan nilai pekerjaan tambahan (*change order*) yang belum disetujui oleh pemilik proyek. Nilai provisi diakui sebesar total biaya yang dibutuhkan hingga kontrak selesai dikurangi dengan nilai kontrak yang sudah disetujui. Jumlah provisi yang diperkirakan terjadi adalah sebesar Rp431.820 (2021: Rp286.221). Provisi dibukukan sebagai bagian dari "Beban pokok pendapatan".

Provisi tersebut dapat berubah apabila Grup mendapatkan persetujuan pekerjaan tambahan dari pemilik proyek dan/atau terjadi perubahan estimasi total biaya yang dibutuhkan hingga penyelesaian kontrak.

13. ACCRUED LIABILITIES AND PROVISIONS *(continued)*

b. Provisions *(continued)*

Underpayment of natural gas procurement

The Group recognised underpayment of natural gas procurement as of 31 December 2022 as described in Note 35b. The total provision expected to be occurred was Rp1,798,475 (2021: nil). Provision was booked as part of "Cost of revenues".

Liquidated damage

The Group has contractual liabilities to complete their projects within the scheduled period. The Group has recorded provisions for potential delay liquidated damages that might be charged by the project owners as there were indications that the projects cannot be completed within the scheduled period. The provision is recognised for the amount estimated from delay on project schedule days multiplied by the applicable charge rate stated in the contract. The total provision expected to be occurred was Rp1,400,826 (2021: Rp1,239,655). Provision was recorded as revenue deduction.

The provision stated above may change due to extension of time received by the Group from project owner and/or changes in estimated time of completion.

Tax disputes

The amounts represent a provision for those tax disputes which are in process for appeal or judicial review. Group's management believes that potential outcome of tax dispute loss will not exceed the amount of provision provided as at 31 December 2022 and 2021.

Onerous contract

The Group has several contracts which might be onerous by the end of projects. Most of the estimated loss represent the amount of additional work (change order) which has not been approved by the project owners. Provision was recognised for the amount estimated from total cost required to complete the project deducted by the approved contract value. The total provision expected to be occurred was Rp431,820 (2021: Rp286,221). Provision was booked as part of "Cost of revenues".

The provision stated above may change due to approval of additional work from project owners and/or changes in estimated total cost required until completion of the contract.

14. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK / *14. SHORT-TERM BANK LOANS*

	2022	2021	
Rp			***Rp***
Pihak berelasi			***Related parties***
Bank Mandiri	1,655,638	659,704	*Bank Mandiri*
BNI	353,619	466	*BNI*
BRI	163,601	1,424,690	*BRI*
BTN	14,000	14,676	*BTN*
	2,186,858	2,099,536	
Pihak ketiga			***Third parties***
BTPN	691,720	400,000	*BTPN*
PT Bank DBS Indonesia ("DBS")	105,422	200,000	*PT Bank DBS Indonesia ("DBS")*
PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC")	67,123	149,208	*PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC")*
HSBC	64,099	11,796	*HSBC*
PT Bank CIMB Niaga Tbk ("CIMB Niaga")	60,937	57,698	*PT Bank CIMB Niaga Tbk ("CIMB Niaga")*
Bank BJB	44,173	-	*Bank BJB*
PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Panin")	20,319	646,199	*PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Panin")*
PT Bank ICBC Indonesia ("Bank ICBC")	19,826	21,168	*PT Bank ICBC Indonesia ("Bank ICBC")*
Bank DKI	18,129	414,500	*Bank DKI*
BCA	12,950	416,881	*BCA*
MUFG	-	297,186	*MUFG*
UOB	-	133,732	*UOB*
PT Bank CTBC Indonesia ("Bank CTBC")	-	49,500	*PT Bank CTBC Indonesia ("Bank CTBC")*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10.000)	54	-	*Others (each below Rp10,000)*
	1,104,752	2,797,868	
Jumlah pinjaman jangka pendek saldo Rp	3,291,610	4,897,404	*Total short-term loan in Rp amount*
USD			***USD***
Pihak berelasi			***Related party***
Bank Mandiri	2,433,593	2,159,864	*Bank Mandiri*
Pihak ketiga			***Third parties***
CIMB	41,330	-	*CIMB*
Panin	6,434	12,786	*Panin*
MUFG	-	229,731	*MUFG*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10.000)	7,039	9,080	*Others (each below Rp10,000)*
	54,803	251,597	
Jumlah pinjaman jangka pendek saldo USD	2,488,396	2,411,461	*Total short-term loan in USD amount*
Jumlah	**5,780,006**	**7,308,865**	***Total***

14. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

14. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)

Informasi lain mengenai fasilitas pinjaman bank jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Other information relating to short-term bank loans facilities as at 31 December 2022 is as follows:

Kreditur/*Creditors**	Jadwal pembayaran/ *Repayment schedule*	Tingkat suku bunga per tahun/ *Interest rates per annum*
Bank Mandiri	Maks. 360 hari setelah tanggal penarikan/*Max. 360 days after withdrawal date*	USD: 3.00% - 5.60% IDR: 7.00% - 10.50%
BRI	Maks. 180 hari setelah tanggal penarikan/*Max. 180 days after withdrawal date*	IDR: JIBOR 3 bulan/*months* + 4,5% dengan minimal/ *with minimum* 8.25% p.a
BNI	Maks. 360 hari setelah tanggal penarikan/*Max. 360 days after withdrawal date*	IDR: 10.70%, 11.50%
HSBC	120 hari setelah tanggal penarikan/*120 days after withdrawal date*	USD: 8.30% IDR: 12.00%
Panin	90 - 240 hari setelah tanggal penarikan/*90 - 240 days after withdrawal date*	IDR: Ditentukan setiap penarikan/ *Determined on each withdrawal* USD: 5.50%
DBS	Maks. 360 hari setelah tanggal penarikan/*Max. 360 days after withdrawal date*	IDR: Ditentukan setiap penarikan/ *Determined on each withdrawal*
BTPN	90 - 360 hari setelah tanggal penarikan/*90 - 360 days after withdrawal date*	USD: JIBOR 3 bulan/*months* + 1.60% IDR: JIBOR 3 bulan/*months* + 1.50%
UOB	Maks. 360 hari setelah tanggal penarikan/*Max. 360 days after withdrawal date*	IDR: Biaya dana perbankan/*Cost of fund* +3.25% USD: JIBOR + 4.25%
OCBC	Maks. 360 hari setelah tanggal penarikan/*Max. 360 days after withdrawal date*	IDR: 10.45%
Bank DKI	90 - 360 hari setelah tanggal penarikan/*90 - 360 days after withdrawal date*	IDR: 5.45% - 8.50%
ICBC	180 - 360 hari setelah tanggal penarikan/*180 - 360 days after withdrawal date*	IDR: 9.50%
Bank CTBC	Maks. 360 hari setelah tanggal penarikan/*Max. 360 days after withdrawal date*	IDR: 7.75%
BCA	Maks. 360 hari setelah tanggal penarikan/*Max. 360 days after withdrawal date*	IDR: 12%
CIMB Niaga	Maks. 360 hari setelah tanggal penarikan/*Max. 360 days after withdrawal date*	IDR: 6.75% - 10.45%
BTN	Maks. 360 hari setelah tanggal penarikan/*Max. 360 days after withdrawal date*	IDR: 9.90%
Bank BJB	30 - 300 hari setelah tanggal penarikan/*30 - 300 days after withdrawal date*	IDR: 3.30%

*) Lihat Catatan 15 untuk rincian perjanjian pinjaman bank/*See Note 15 for the detail of bank loans agreements.*

Jaminan pinjaman bank jangka pendek berupa piutang usaha (Catatan 5), piutang subsidi (Catatan 6), pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan untuk pekerjaan kontrak konstruksi (Catatan 7), persediaan (Catatan 8), dan aset tetap (Catatan 10).

The short-term bank loans collateral are trade receivables (Note 5), subsidy receivables (Note 6), construction contract work in progress - due from customers for construction contract work (Note 7), inventories (Note 8) and fixed assets (Note 10).

Dana yang diperoleh dari pinjaman bank jangka pendek digunakan untuk modal kerja dan pendanaan kegiatan umum. Grup mengawasi berbagai rasio yang diharuskan oleh pemberi pinjaman sehingga Grup tidak melanggar perjanjian untuk setiap fasilitas pinjaman yang diperoleh.

The funds received from short-term bank loans are used for working capital and general corporate funding. The Group monitors various ratios as required by the lenders so that the Group does not breach covenants on any borrowing facilities.

14. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2022, pinjaman dari Bank Mandiri dan BRI tidak memenuhi beberapa batasan yang diwajibkan dalam perjanjian pinjaman (lihat Catatan 15).

Sepanjang tahun 2022, Grup telah melakukan pembayaran pinjaman jangka pendek sejumlah Rp8.534.976 (2021: Rp15.952.372).

14. SHORT-TERM BANK LOANS *(continued)*

As at 31 December 2022, the Group has not complied with the financial covenants related to loans from Bank Mandiri and BRI (see Note 15).

In 2022, the Group has paid short-term bank loans amounting to Rp8,534,976 (2021: Rp15,952,372).

15. PINJAMAN BANK DAN PINJAMAN LAINNYA JANGKA PANJANG

15. LONG-TERM BANK LOANS AND OTHER LOANS

	2022	2021	
Pinjaman bank	16,378,930	13,594,795	*Bank loans*
Pinjaman sindikasi	1,680,161	1,346,138	*Syndicated loans*
Pinjaman dari pihak selain bank	33,965	31,257	*Non-bank loans*
	18,093,056	**14,972,190**	
Dikurangi:			*Less:*
Bagian jangka pendek	**(2,392,385)**	**(2,360,195)**	***Current portion***
Bagian jangka panjang	**15,700,671**	**12,611,995**	***Non-current portion***

Pinjaman bank / *Bank loans*

	2022	2021	
Rp			***Rp***
Pihak berelasi			***Related parties***
Bank Mandiri	7,203,373	5,442,340	*Bank Mandiri*
BNI	2,541,438	2,348,187	*BNI*
BRI	725,267	151,764	*BRI*
BSI	29,688	29,688	*BSI*
	10,499,766	7,971,979	
Pihak ketiga			***Third parties***
BCA	2,199,522	2,520,802	*BCA*
Bank DKI	1,300,000	899,854	*Bank DKI*
BTPN	1,202,000	826,000	*BTPN*
MUFG	75,250	105,350	*MUFG*
PT Bank Oke Indonesia Tbk ("Bank Oke")	45,798	-	*PT Bank Oke Indonesia Tbk ("Bank Oke")*
Bank Muamalat	42,802	42,801	*Bank Muamalat*
Bank BJB	-	37,584	*Bank BJB*
Bank Sumsel Babel	-	20,546	*Bank Sumsel Babel*
	4,865,372	4,452,937	
Jumlah pinjaman bank saldo Rp	15,365,138	12,424,916	*Total bank loan in Rp amount*
USD			***USD***
Pihak berelasi			***Related party***
Bank Mandiri	489,794	586,965	*Bank Mandiri*
Pihak ketiga			***Third party***
BTPN	523,998	582,914	*BTPN*
Jumlah pinjaman bank saldo USD	1,013,792	1,169,879	*Total bank loan in USD amount*
Jumlah pinjaman bank	16,378,930	13,594,795	*Total bank loan*
Dikurangi:			*Less:*
Bagian jangka pendek	(2,297,126)	(2,344,601)	*Short-term portion*
Bagian jangka panjang	14,081,804	11,250,194	*Long-term portion*

15. PINJAMAN BANK DAN PINJAMAN LAINNYA JANGKA PANJANG (lanjutan)

Informasi yang signifikan terkait dengan pinjaman bank pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

15. LONG-TERM BANK LOANS AND OTHER LOANS (continued)

Significant information related to bank loans as at 31 December 2022 is as follows:

Kreditur/ *Creditors*	Jenis fasilitas/ *Facilities type*	Fasilitas/ *Facilities*	Periode jatuh tempo/ *Maturity period*	Tingkat suku bunga per tahun/ *Annual interest rates*	Jaminan/ *Collateral*
BRI	- Kredit modal kerja/*Working capital loan*[2)]	Rp10,600,000	31 Maret/*March* 2024	JIBOR 3 bulan/*months* + 4.5% p.a	*Negative pledge*
	- Kredit investasi/*Investment loan*	Rp1,512,128	23 Maret/*March* 2023	8.00% p.a untuk tahun pertama, JIBOR 3 bulan + 2,40% p.a min. LPS + 1,8% p.a untuk tahun seterusnya/*8.00% for the first year, JIBOR 3 months + 2.40% p.a min. LPS + 1.8% p.a for the following years*	Pabrik Pusri II-B, Bangunan *Steam Turbine Generator ("STG")*, Kapal *Self Propelled Urea Barge* ("SPUB")/ *Pusri II-B Plant, STG building, SPUB ship*
	- *Forex line*	USD168,000,000	31 Maret/*March* 2024	*Reviewable*	*Negative pledge*
Bank Mandiri	- Kredit modal kerja/*Working capital loan*[2, 3)]	USD72,000,000	30 April/*April* 2023	Tingkat referensi + margin, LIBOR 3 bulan + 2.00% p.a/ *Reference rate + margin LIBOR 3 months + 2.00% p.a*	Tagihan atas pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan/*Invoices for construction contract work in progress - due to customers*
	- Kredit investasi/*Investment loan*	Rp1,000,000	23 Maret/*March* 2023	JIBOR 3 bulan/*months* + 2,40% p.a min. LPS + 1,8% p.a	Pabrik Pusri II-B, bangunan STG, kapal SPUB/*Pusri II-B plant, STG building, SPUB ship*
		Rp420,000	6 Oktober/ *October* 2029	JIBOR 3 bulan/*months* + 4.75% p.a	Tanah, bangunan, mesin, peralatan pabrik NPK dan fidusia hasil klaim bank garansi/*Land, building, machinery, NPK plant equipment, and fiduciary claim from bank guarantee*
	- Kredit berjangka/*Term loan*[2)]	Rp3,000,000	28 Desember/ *December* 2026	JIBOR 3 bulan/*months* + 2.25% p.a	*Negative pledge*
		Rp3,000,000	17 Desember/ *December* 2026	JIBOR 3 bulan/*months* + 2.25 p.a	*Negative pledge*
		Rp3,000,000	21 Desember/ *December* 2027	JIBOR 3 bulan/*months* + 2.25 p.a	*Negative pledge*
	- *Non-cash loan*	USD602,000,000	19 Desember/ *December* 2023	0.25% - 0.50% p.a	*Negative pledge*
Deutsche Bank	- Kredit modal kerja/*Working capital loan*[2)]	USD125,000,000	31 Oktober/ *October* 2023	JIBOR 3 bln + 2% p.a	*Negative pledge*
BSI	- Kredit investasi/*Investment loan*	Rp359,000	6 Oktober/ *October* 2029	JIBOR 3 bulan/*months* + 4.75% p.a	Tanah, bangunan, mesin, peralatan pabrik NPK dan fidusia hasil klaim bank garansi/*Land, building, machinery, NPK plant equipment, and fiduciary claim from bank guarantee*
Bank Muamalat	- *Line facility*	Rp130,000	28 Februari/ *February* 2022[1)]	7.00% p.a	Tidak ada jaminan/*No collateral*
BNI	- Kredit modal kerja/*Working capital loan*[2)]	Rp7,961,063	20 September 2024	JIBOR 3 bulan/*months* + 1,8% p.a	*Negative pledge*
	- Kredit investasi/*Investment loan*	Rp1,200,451	23 Maret/ *March* 2023	JIBOR 3 bulan/*months* + 2.40% p.a min. LPS + 1.80% p.a	Pabrik Pusri II-B, bangunan STG, kapal SPUB/*Pusri II-B plant, STG building, SPUB ship*
		Rp420,000	6 Oktober/ *October* 2029	JIBOR 3 bulan/*months* + 4.75% p.a	Tanah, bangunan, mesin, peralatan pabrik NPK dan fidusia hasil klaim bank garansi/*Land, building, machinery, NPK plant equipment, and fiduciary claim from bank guarantee*
	- *Treasury line*[2)]	USD14,350,000	20 September 2023	*Reviewable*	*Negative pledge*
BTPN	- Kredit modal kerja/*Working capital loan*[2)]	Rp5,500,000	31 Oktober/ *October* 2023	JIBOR + 1,50% -1.60% p.a	*Negative pledge*
		Rp100,000	22 Mei/*May* 2023	4,65% p.a atau rate yang disepakati	Tanpa jaminan/*Clean basis*
	- Kredit investasi/*Investment loan*	USD63,500,000	30 Agustus/ *August* 2024	1.60% p.a + LIBOR	Pabrik Gresik *Gas Cogeneration Plant* ("GGCP")/*Gresik Gas Cogeneration Plant ("GGCP")*
	- Kredit berjangka/*Term loan*[2)]	Rp1,000,000	30 November 2026	JIBOR 3 bulan/months +2.25% p.a	*Negative pledge*
	- *Treasury line*[2)]	Rp900,000	31 Oktober/ *October* 2023	JIBOR	*Negative pledge*
MUFG	- Kredit investasi/*Investment loan*	Rp176,000	8 Mei/*May* 2025	JIBOR 3 bulan/*months* + 2.30% p.a	Mesin dan sarana pendukung pabrik CO2/ *Machinery and CO2 plant supporting facilities*
Panin	- Kredit modal kerja/*Working capital loan*[2)]	Rp2,000,000	30 Juli/*July* 2024	Suku bunga saat penarikan/*Interest rate at withdrawal date*	Tanpa jaminan/*Clean basis*

[1)] Masih terdapat saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2022, namun perjanjian kredit tidak diperpanjang/*There is still an outstanding loan balance as at 31 December 2022, but the credit agreement was not extended.*
[2)] Dicatat sebagai pinjaman jangka pendek/*Recorded as a short-term loan.*
[3)] Terdapat fasilitas konversi dari *Letter of* Credit/Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("LC/SKBDN") ke kredit modal kerja/*There are conversion facility from Letter of Credit/Domestic Letter of Credit ("SKBDN") to working capital loan.*

15. PINJAMAN BANK DAN PINJAMAN LAINNYA JANGKA PANJANG (lanjutan) / *15. LONG-TERM BANK LOANS AND OTHER LOANS (continued)*

Kreditur/ *Creditors*	Jenis fasilitas/ *Facilities type*	Fasilitas/ *Facilities*	Periode jatuh tempo/ *Maturity period*	Tingkat suku bunga per tahun/ *Annual interest rates*	Jaminan/ *Collateral*
BCA	- Kredit modal kerja/*Working capital loan*[2)]	Rp7,100,000	28 November 2024	Suku bunga saat penarikan/*Interest rate at withdrawal date*	*Negative pledge*
	- Kredit investasi/*Investment credit*	Rp2,400,451	23 Maret/*March* 2023	JIBOR 3 bulan/*months* + 2,40% p.a min. LPS + 1.80% p.a	Pabrik Pusri II-B, bangunan STG, kapal SPUB/*Pusri II-B plant, STG building, SPUB ship*
Bank BJB	- Kredit investasi/*Investment loan*	Rp400,000	23 Maret/*March* 2023	JIBOR 3 bulan/*months* + 2,40% p.a min LPS 1.80% p.a	Pabrik Pusri II-B, Bangunan STG, kapal SPUB/*Pusri II-B plant STG building, SPUB ship*
Bank Sumsel Babel	- Kredit investasi/*Investment loan*	Rp200,000	23 Maret/*March* 2023	JIBOR 3 bulan/*months* + 2,40% p.a min LPS 1.80% p.a	Pabrik Pusri II-B, Bangunan STG, kapal SPUB/*Pusri II-B plant*
Bank DKI	- Kredit modal kerja/*Working capital loan*[2)]	Rp900,000	21 Desember/ *December* 2024	Suku bunga saat penarikan/*interest rate at withdrawal date*	*Negative pledge*
	- *Cash loan*	Rp400,000	24 Mei/*May* 2024	8.50% p.a	Piutang usaha/*Trade receivables*
Bank Oke	- *Cash loan*	Rp50,000	21 Juni/*June* 2027	7.00% p.a	Tanah dan bangunan/*Land and buildings*
	- Kredit modal kerja/*Working capital loan*[2)]	Rp50,000	21 Juni/*June* 2027	7.50% p.a	Tanah/*Land*

[2)] Dicatat sebagai pinjaman jangka pendek/*Recorded as a short-term loan*.

Pinjaman sindikasi / *Syndicated loans*

	31 Desember/*December* 2022			
	Jumlah mata uang asing (nilai penuh)/ *Amount of foreign currency (full amount)*	Ekuivalen Rp/*Rp equivalent*		
		Jumlah/ *Total*	Jangka pendek/ *Current*	Jangka panjang/ *Non-current*
Pihak berelasi/*Related parties*				
Bank Mandiri (USD)	USD28,873,686	454,212	(38,678)	415,534
Bank Mandiri (Rp)	-	263,321	-	263,321
BNI (Rp)	-	263,321	-	263,321
BSI (Rp)	-	245,095	-	245,095
		1,225,949	(38,678)	1,187,271
Pihak ketiga/*Third party*				
ICBC (USD)	USD28,873,686	454,212	(38,678)	415,534
Jumlah/*Total*		1,680,161	(77,356)	1,602,805

	31 Desember/*December* 2021			
	Jumlah mata uang asing (nilai penuh)/ *Amount of foreign currency (full amount)*	Ekuivalen Rp/*Rp equivalent*		
		Jumlah/ *Total*	Jangka pendek/ *Current*	Jangka panjang/ *Non-current*
Pihak berelasi/*Related parties*				
Bank Mandiri (USD)	USD28,629,858	408,519	-	408,519
Bank Mandiri (Rp)	-	179,230	-	179,230
BNI (Rp)	-	174,935	-	174,935
BSI (Rp)	-	174,935	-	174,935
		937,619	-	937,619
Pihak ketiga/*Third party*				
ICBC (USD)	USD28,629,858	408,519	-	408,519
Jumlah/*Total*		1,346,138	-	1,346,138

15. PINJAMAN BANK DAN PINJAMAN LAINNYA JANGKA PANJANG (lanjutan)

Informasi lain mengenai pinjaman sindikasi pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

15. LONG-TERM BANK LOANS AND OTHER LOANS *(continued)*

Other information related to syndicated loans as at 31 December 2022 are as follows:

Kreditur/ *Creditors*	Jumlah fasilitas/ *Total facilities*	Jadwal pembayaran/ *Repayment schedule*	Tingkat suku bunga/ *Interest rates*
Bank Mandiri, BNI, BSI, dan/*and* ICBC			
Pinjaman jangka panjang/ *Long-term loan*	USD74,700,000	30 Desember/*December* 2025	LIBOR (3 bulan/*months*) + 3.25%
Interest During Construction ("IDC")	Rp122,000	6 Oktober/*October* 2029	JIBOR (3 bulan/*months*) + 4.75%
Pinjaman jangka pendek/ *Short-term loan*[**)]	Rp54,000 USD3,300,000	26 Januari/*January* 2024 30 Desember/*December* 2025	9.50% LIBOR (3 bulan/*months*) + 3.25%
Kredit investasi/ *Investment credit*	Rp718,000	6 Oktober/*October* 2029	JIBOR (3 bulan/*months*) + 4.75%
Musyarakah Mutanaqishah	Rp359,000	6 Oktober/*October* 2029	*Hishshah (ownerhip share)*

**) Dicatat sebagai pinjaman jangka pendek/*Recorded as short-term loan.*

Jaminan pinjaman sindikasi berupa tanah yang menjadi lokasi proyek pembangunan, mesin dan peralatan yang dibiayai dari fasilitas kredit (Catatan 10).

The syndicated loan collateral is land of plant area, machinery and tools which are funded from the credit facilities (Note 10).

Sesuai dengan perjanjian pinjaman sindikasi, Grup diwajibkan memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu seperti batasan rasio keuangan antara lain rasio lancar, *debt to equity ratio*, dan *debt service coverage ratio*. Grup juga diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan mengenai Anggaran Dasar, kegiatan usaha, dividen, aksi korporasi, kegiatan pembiayaan dan lainnya. Grup telah memenuhi batasan rasio keuangan dan non-keuangan tersebut.

As specified by the syndicated loan agreements, the Group is required to comply with certain covenants, such as financial ratio covenants which are current ratio, debt to equity ratio, and debt service coverage ratio. The Group is also required to comply with certain terms and conditions in relation to its Articles of Association, the nature of business, dividends, corporate actions, financing activities and other matters. The Group complied with the financial and non-financial ratio covenants.

Pinjaman dari pihak selain bank / *Non-bank loans*

	2022	2021	
Pihak berelasi			***Related parties***
Pemerintah RI (RDI-373)	34,049	34,049	*Government of RI (RDI-373)*
Pemerintah RI (RDI-014)	12,309	12,309	*Government of RI (RDI-014)*
Pemerintah RI (Bappenas)	6,187	6,187	*Government of RI (Bappenas)*
Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pusri ("YKKP")	2,072	-	*Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pusri ("YKKP")*
	54,617	52,545	
Dikurangi: Selisih nilai wajar yang belum diamortisasi	(20,652)	(21,288)	*Less: Unamortised difference of fair value*
	33,965	31,257	
Dikurangi: Bagian jangka pendek	(17,903)	(15,594)	*Less: Current portion*
Bagian jangka panjang	16,062	15,663	*Non-current portion*

15. PINJAMAN BANK DAN PINJAMAN LAINNYA JANGKA PANJANG (lanjutan)

Informasi lain mengenai pinjaman dari pihak selain bank pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

15. LONG-TERM BANK LOANS AND OTHER LOANS *(continued)*

Other information related to non-bank loans as at 31 December 2022 is as follows:

Kreditur/ ***Creditors***	**Jumlah fasilitas/** ***Total facilities***	**Jadwal pembayaran/** ***Repayment schedule***	**Tingkat suku bunga/** ***Interest rates***
Pemerintah/ *Government*			
RDI - 373	20 tahun/*years*	Tahunan, setiap tanggal 30 Oktober 2019 - 30 Oktober 2038/*Annually, every 30 October 2019 - 30 October 2038*	0%
RDI - 014	20 tahun/*years*	Tahunan, setiap tanggal 30 Oktober 2019 - 30 Oktober 2038/*Annually, every 30 October 2019 - 30 October 2038*	0%

Pada bulan Maret 2019, berdasarkan Surat Skema Penyelesaian Piutang Negara yang berasal dari pinjaman RDI-373 dan RDI-014, penyelesaian pinjaman dilakukan melalui skema penjadwalan kembali pembayaran selama 20 tahun dengan metode pro rata dimulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2038.

In March 2019, based on the Receivables Settlement Scheme Letter from the RDI-373 and RDI-014 loan, the loan settlement was carried out through a repayment rescheduling scheme for 20 years using the pro rata method starting from 2019 up to 2038.

Informasi lainnya

Pada tahun 2022, Grup telah melakukan pembayaran pinjaman bank dan pinjaman lainnya jangka panjang sebesar Rp3.378.589 (2021: Rp9.801.879).

Other information

In 2022, the Group has paid long-term bank loans and other loans amounting to Rp3,378,589 (2021: Rp9,801,879).

Sesuai dengan perjanjian pinjaman bank, Grup diwajibkan memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu seperti batasan rasio keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2022, Grup telah memenuhi beberapa batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian pinjaman bank, kecuali Rekind sebagaimana dijelaskan sebagai berikut (pinjaman jangka panjang dan pendek):

As specified by the bank loan agreements, the Group is required to comply with certain covenants, such as financial ratio covenants. As at 31 December 2022, the Group had complied with the covenants in the bank loan agreements, except for Rekind as explained below (long-term and short-term loans):

Nama entitas/ ***Entity name***	**Rasio keuangan/** ***Financial ratio***	**Kreditur/** ***Creditor***	**Jenis fasilitas/** ***Facility type***	**Saldo pinjaman/** ***Loan balance***	**Tanggal penerimaan surat pengampunan/*Date of waiver letter received***
Rekind	*Debt to equity ratio, trade receivable coverage, outstanding facility coverage*	Bank Mandiri	Pendanaan jangka pendek/*Short-term funding*	3,863,291	*Breach on debt to equity ratio and trade receivable coverage obtained on 18 October* 2022/ Pelanggaran atas *debt to equity ratio* dan *trade receivable coverage* diterima pada 18 Oktober 2022; *Breach on outstanding facility coverage has not been obtained*/Pelanggaran atas *outstanding facility coverage* belum diperoleh
Rekind	*Current ratio, debt to equity ratio*	BRI	Pendanaan jangka pendek/*Short-term funding*	57,691	Diterima pada/*Obtained on* 10 Januari/*January* 2023

Terdapat perubahan penyajian atas saldo pinjaman Rekind yang mereklasifikasi dari liabilitas jangka panjang (untuk pinjaman bank yang tidak memenuhi persyaratan pinjaman) menjadi liabilitas jangka pendek karena pelanggaran atas rasio keuangan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

There were changes of presentation of Rekind's borrowings which reclassify long-term liabilities (for those breach of covenants) to short-term liabilities due to breach of financial ratios as at 31 December 2022 and 2021.

16. UTANG OBLIGASI / *16. BONDS PAYABLE*

	2022	2021	
Obligasi Berkelanjutan II PTPI Tahap II Tahun 2021	2,750,000	2,750,000	*Shelf Registration Bonds II Phase II PTPI Year 2021*
Obligasi Berkelanjutan II PTPI Tahap I Tahun 2020	2,436,510	2,436,510	*Shelf Registration Bonds II Phase I PTPI Year 2020*
Obligasi Berkelanjutan I PTPI Tahap I Tahun 2017	2,085,000	2,085,000	*Shelf Registration Bonds I Phase I PTPI Year 2017*
Obligasi Berkelanjutan I PTPI Tahap II Tahun 2017	-	1,774,000	*Shelf Registration Bonds I Phase II PTPI Year 2017*
	7,271,510	9,045,510	
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(4,976)	(7,577)	*Unamortised transaction costs*
Jumlah utang obligasi	**7,266,534**	**9,037,933**	***Total bonds payable***
Dikurangi:			*Less:*
Bagian jangka pendek	**(1,146,854)**	**(1,773,765)**	***Current portion***
Bagian jangka panjang	**6,119,680**	**7,264,168**	***Non-current portion***

Rincian utang obligasi adalah sebagai berikut: / *The details of bonds payable are as follows:*

No.	Obligasi dan nilai nominal/ *Bonds and nominal amount*	Bunga per tahun/ *Interest per annum*	Jatuh tempo/ *Maturity*
a.	Obligasi Berkelanjutan I PTPI Tahap I Tahun 2017/ *Shelf Registration Bonds I PTPI Phase I Year 2017*	8.60%	12 Juli/*July* 2024
b.	Obligasi Berkelanjutan II PTPI Tahap I Tahun 2020/ *Shelf Registration Bonds II PTPI Phase I Year 2020*	7.00%	3 September 2023
		7.70%	3 September 2025
		8.30%	3 September 2027
c.	Obligasi Berkelanjutan II PTPI Tahap II Tahun 2021/ *Shelf Registration Bonds II PTPI Phase II Year 2021*	5.60%	10 Maret/*March* 2024
		6.20%	10 Maret/*March* 2026
		7.20%	10 Maret/*March* 2028

Dana yang diperoleh digunakan antara lain untuk modal kerja, pendanaan umum, pembiayaan kembali pinjaman dan pembiayaan lainnya.

Funds received were used for working capital, general funding, loan refinancing and other financing.

Perusahaan diwajibkan memenuhi kewajiban tertentu, antara lain batasan rasio keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2022, Perusahaan telah memenuhi batasan rasio keuangan tersebut.

The Company is required to comply with certain covenants, such as financial ratio covenants. As at 31 December 2022, the Company complied with the respective financial covenants.

Obligasi tersebut pada tangal 31 Desember 2022 mendapatkan peringkat "AAA(idn)" dari Fitch. Peringkat tersebut menunjukkan penilaian lembaga pemeringkat atas kemungkinan pembayaran tepat waktu atas jumlah pokok dan bunga.

These bonds are rated "AAA(idn)" by Fitch as at 31 December 2022. The rating reflects the rating agency's assessment of the likelihood of timely payment of the principal and interest.

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Hak pemegang obligasi adalah *pari passu* tanpa hak khusus dengan hak-hak kreditur lain.

The bonds are not guaranteed with a specific collateral, but are guaranteed with all of the Company's assets, both movable and immovable property, both existing and the future ones. The bondholders' rights are pari passu without preference to the other creditors.

Pada bulan November 2022, Perusahaan melakukan pelunasan atas Obligasi Berkelanjutan I PTPI Tahap II Tahun 2017 sebesar Rp1.774.000.

In November 2022, the Company fully repaid Shelf Registration Bonds I Phase II PTPI Year 2017 amounting to Rp1,774,000.

17. IMBALAN KERJA / *17. EMPLOYEE BENEFITS*

a. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek / *a. Short-term employee benefit liabilities*

	2022	2021	
Gaji, insentif, dan bonus	4,251,024	1,784,432	*Salaries, incentives and bonuses*
Manfaat pensiun	335,530	316,138	*Pension benefits*
Jumlah	**4,586,554**	**2,100,570**	***Total***

b. Liabilitas imbalan pascakerja / *b. Post-employment benefits liabilities*

Liabilitas imbalan pascakerja dihitung oleh aktuaris independen. Tabel berikut menyajikan ikhtisar liabilitas imbalan pascakerja dan biaya yang dibebankan sebagaimana tercatat pada laporan keuangan konsolidasian:

The provision for post-employment benefits liabilities are calculated by independent actuaries. The table below presents a summary of the post-employment employee benefits liabilities and expenses reported in the consolidated financial statements:

	2022	2021	
Liabilitas di posisi keuangan untuk:			*Liabilities on financial position for:*
Imbalan pascakerja ("IPK")	2,298,918	2,873,430	*Post-employment benefits ("PEB")*
Imbalan jangka panjang lainnya ("IJPL")	221,013	206,810	*Other long-term benefits ("OLTEB")*
	2,519,931	**3,080,240**	
Dikurangi:			*Less:*
Bagian jangka pendek (Catatan 17a)	**(335,530)**	**(316,138)**	***Current portion (Note 17a)***
Bagian jangka panjang	**2,184,401**	**2,764,102**	***Non-current portion***

	2022	2021	
Dibebankan pada laba rugi:			*Charged to profit or loss:*
IPK	271,992	340,733	*PEB*
IJPL	94,520	119,746	*OLTEB*
Jumlah	366,512	460,479	*Total*
(Dikreditkan)/dibebankan pada penghasilan komprehensif lain:			*(Credited)/charged to other comprehensive income:*
IPK	(155,944)	64,188	*PEB*
Jumlah	**(155,944)**	**64,188**	***Total***

17. IMBALAN KERJA (lanjutan)

b. Liabilitas imbalan pascakerja jangka panjang (lanjutan)

Rincian estimasi liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan lainnya untuk masing-masing program yang diselenggarakan Grup pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

17. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

b. Long-term post-employment benefits liabilities (continued)

The details of estimated post-employment benefits liabilities and other long-term benefits for each of the programs operated by the Group as at 31 December 2022 and 2021 were as follows:

	31 Desember/*December* 2022						
	IPK/*PEB*		IJPL/*OLTEB*				
	Nilai kini kewajiban/ *Present value of obligations*	Nilai wajar aset program/ *Fair value of plan assets*	Nilai kini kewajiban/ *Present value of obligations*	Nilai wajar aset program/ *Fair value of plan assets*	Dampak batas atas aset/ *Impact on assets ceillings*	Jumlah/ *Total*	
Pada 1 Januari 2022	5,034,985	(2,931,541)	206,810	-	2,871	2,313,125	*As at 1 January 2022*
Biaya jasa kini	193,367	2,048	96,610	-	-	292,025	*Current service cost*
Biaya bunga bersih	324,265	-	6,900	-	32,985	364,150	*Net interest cost*
Biaya jasa lalu	(77,778)	-	(1,189)	-	-	(78,967)	*Past service costs*
Pendapatan bunga	-	(209,511)	-	-	-	(209,511)	*Interest income*
Keuntungan aktuaria bersih yang akui	-	6,616	(7,801)	-	-	(1,185)	*Net actuarial gain*
Jumlah yang diakui dalam laba rugi	439,854	(200,847)	94,520	-	32,985	366,512	*Balance recognised in profit or loss*
Pengukuran kembali:							*Remeasurements:*
Imbal hasil aset program non-bunga - bersih	35	65,595	-	-	-	65,630	*Return on plan assets excluding interest income - net*
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografik	144,852	-	(1,741)	-	-	143,111	*Actuarial loss from change in demographic assumptions*
Keuntungan aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(520,641)	-	-	-	-	(520,641)	*Actuarial gain from change in financial assumptions*
Kerugian aktuaria dari penyesuaian pengalaman	155,343	613	-	-	-	155,956	*Actuarial loss from experience adjustment*
Jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	**(220,411)**	**66,208**	**(1,741)**	-	-	**(155,944)**	***Balance recognised in other comprehensive income***
Pembayaran dari program:							*Payments from plans:*
Pembayaran iuran	5,029	(201,119)	(11,635)	-	-	(207,725)	*Contribution payments*
Imbalan yang dibayar	(561,021)	279,387	(66,941)	-	-	(348,575)	*Benefit payments*
Liabilitas imbalan pascakerja pada 31 Desember 2022	4,698,436	(2,987,912)	221,013	-	35,856	1,967,393	*Post-employment benefits liabilities as at 31 December 2022*
Dampak batas atas aset	-	35,856	-	-	(35,856)	-	*Impact on assets ceilling*
Aset program yang tidak memenuhi kriteria perspektif akuntansi	-	**552,538**	-	-	-	**552,538**	***Unqualified plan asset from an accounting perspective***

17. IMBALAN KERJA (lanjutan) / *17. EMPLOYEE BENEFITS (continued)*

b. Liabilitas imbalan pascakerja jangka panjang (lanjutan) / *b. Long-term post-employment benefits liabilities (continued)*

	31 Desember/*December* 2021						
	IPK/*PEB*		IJPL/*OLTEB*				
	Nilai kini kewajiban/ *Present value of obligations*	Nilai wajar aset program/ *Fair value of plan assets*	Nilai kini kewajiban/ *Present value of obligations*	Nilai wajar aset program/ *Fair value of plan assets*	Dampak batas atas aset/ *Impact on assets ceillings*	Jumlah/ *Total*	
Pada 1 Januari 2021	5,411,194	(3,088,898)	186,524	-	6,709	2,515,529	*As at 1 January 2021*
Biaya jasa kini	221,516	-	120,358	-	-	341,874	*Current service cost*
Biaya bunga bersih	342,246	-	6,612	-	(3,838)	345,020	*Net interest cost*
Biaya jasa lalu	(26,511)	-	1,153	-	-	(25,358)	*Past service costs*
Pendapatan bunga	169	(192,849)	3	-	-	(192,677)	*Interest income*
Keuntungan aktuaria bersih yang akui	-	-	(8,380)	-	-	(8,380)	*Net actuarial gain*
Jumlah yang diakui dalam laba rugi	537,420	(192,849)	119,746	-	(3,838)	460,479	*Balance recognised in profit or loss*
Pengukuran kembali:							*Remeasurements:*
Imbal hasil aset program non-bunga - bersih	133	27,964	-	-	-	28,097	*Return on plan assets excluding interest income - net*
Keuntungan aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografik	(10)	-	-	-	-	(10)	*Actuarial gain from change in demographic assumptions*
Keuntungan aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(34,364)	-	-	-	-	(34,364)	*Actuarial gain from change in financial assumptions*
Kerugian aktuaria dari penyesuaian pengalaman	70,465	-	-	-	-	70,465	*Actuarial loss from experience adjustment*
Jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	36,224	27,964	-	-	-	64,188	*Balance recognised in other comprehensive income*
Pembayaran dari program:							*Payments from plans:*
Pembayaran iuran	7,339	(51,195)	(160)	-	-	(44,016)	*Contribution payments*
Imbalan yang dibayar	(957,192)	373,437	(99,300)	-	-	(683,055)	*Benefit payments*
Liabilitas imbalan pascakerja pada 31 Desember 2021	5,034,985	(2,931,541)	206,810	-	2,871	2,313,125	*Post-employment benefits liabilities as at 31 December 2021*
Dampak batas atas aset	-	2,871	-	-	(2,871)	-	*Impact on assets ceilling*
Aset program yang tidak memenuhi kriteria perspektif akuntansi	-	767,115	-	-	-	767,115	*Unqualified plan asset from an accounting perspective*

17. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, nilai tunai aset program manfaat pasti pascakerja yang terbentuk pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang secara akuntansi tidak dapat disajikan secara bersih terhadap liabilitas adalah masing-masing sebesar Rp552.538 dan Rp767.115 disajikan sebagai "aset imbalan pascakerja" dan sebagai "piutang lainnya - pihak berelasi" sebesar Rp157.459 pada tanggal 31 Desember 2022 pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Nilai aset program pada Dana Pensiun sebesar Rp2.399.518 (2021: Rp2.161.555) memenuhi kriteria aset program secara akuntansi.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, aset program ditempatkan dalam bentuk investasi deposito berjangka dan surat berharga yang tidak memiliki harga pasar yang dikutip dan nilai wajarnya mendekati nilai tercatatnya.

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja karyawan Grup adalah sebagai berikut:

***17. EMPLOYEE BENEFITS** (continued)*

As at 31 December 2022 and 2021, the total investment values of plan assets in PT Asuransi Jiwasraya (Persero) which cannot be accounted for net of the liabilities amounting to Rp552,538 and Rp767,115, respectively are presented as "post-employment benefits assets" and presented as "other receivables - related parties" amounting to Rp157,459 as of 31 December 2022 in the consolidated statements of financial position. Plan assets in Dana Pensiun amounting to Rp2,399,518 (2021: Rp2,161,555) meet the criteria of plan assets in accordance with accounting perspectives.

As at 31 December 2022 and 2021, the plan assets were mostly placed in the form of investments in time deposits and bonds, which did not have quoted market prices and their fair values approximate their carrying value.

The principal assumptions used in determining the Group's employee benefit liabilities are as follows:

	2022	2021	
Tingkat diskonto per tahun	4.90% - 7.38%	3.65% - 7.60%	*Discount rate per annum*
Tingkat kenaikan gaji	2.50% - 9.30%	3.00% - 9.30%	*Salary growth rate*
Tingkat mortalitas	TM IV 2019	TM IV 2019	*Mortality rate*
Usia pensiun normal (dalam tahun)	56	56	*Normal retirement age (in years)*

Melalui program pensiun manfaat pasti, Grup terekspos beberapa risiko seperti kenaikan gaji, volatilitas aset dan perubahan imbal hasil obligasi, sebagai berikut:

Though its defined benefits pension plans, the Group is exposed to a number of risks such as salary growth, assets volatility and changes in bonds yields, as follows:

Volatilitas aset

Asumsi yang berhubungan dengan tingkat pengembalian aset yang diharapkan ditentukan berdasarkan data historis dan ekspektasi manajemen terhadap pengembangan investasi dimasa yang akan datang. Jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program.

Assets volatility

Assumptions regarding the expected return on plan assets are based on the historical data and management's expectation of the future investment development. If the yield of plan assets is lower, it will generate a deficit program.

Perubahan imbal hasil obligasi

Liabilitas program dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada tingkat imbal hasil obligasi Pemerintah, jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program.

Penurunan imbal hasil obligasi Pemerintah akan meningkatkan liabilitas program, walaupun hal ini akan saling hapus secara sebagian dengan kenaikan dari nilai obligasi program yang dimiliki.

Changes in bond yields

The plan liabilities are calculated using a discount rate set with reference to Government bond yields. If plan assets underperform this yield, this will create a deficit program.

A decrease in Government bond yields will increase plan liabilities, although this will be partially offset by an increase in the value of the plan's bond holdings.

17. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Perubahan imbal hasil obligasi (lanjutan)

Grup memastikan bahwa posisi investasi telah diatur dalam kerangka *asset-liability matching* ("ALM") yang telah dibentuk untuk mencapai hasil jangka panjang yang sejalan dengan liabilitas pada program pensiun imbalan pasti. Dalam kerangka ALM, tujuan Grup adalah untuk menyesuaikan aset-aset dan liabilitas pensiun dengan berinvestasi pada portofolio yang terdiversifikasi dengan baik dalam menghasilkan tingkat pengembalian yang optimal, dengan mempertimbangkan tingkat risikonya.

Investasi pada program telah terdiversifikasi dengan baik, sehingga kinerja buruk satu investasi tidak akan memberikan dampak material bagi seluruh kelompok aset.

Risiko gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama tertimbang pada 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

17. EMPLOYEE BENEFITS *(continued)*

Changes in bond yields (continued)

The Group ensures that the investment positions are managed within an asset-liability matching ("ALM") framework that is developed to achieve long-term returns that are in line with the obligation in defined benefit pension plans. Within this ALM framework, the Group's objective is to match assets and the pension obligations by investing in a well-diversified portfolio that generates sufficient risk-adjusted returns.

Investment across the plans is well diversified, such that the failure of any single investment would not have a material impact on the overall level of assets.

Salary risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in the weighted actuarial principal assumptions as of 31 December 2022 is as follows:

	Dampak atas Kewajiban Imbalan Pasti/ *Impact on Defined Benefit Obligations*			
	Perubahan asumsi/ *Change in assumptions*	**Kenaikan asumsi/ *Increase in assumptions***	**Penurunan asumsi/ *Decrease in assumptions***	
Tingkat diskonto	1%	Penurunan sebesar/ *Decrease by* 6.66%	Kenaikan sebesar/ *Increase by* 6.79%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	1%	Kenaikan sebesar/ *Increase by* 3.25%	Penurunan sebesar/ *Decrease by* 3.52%	*Salary growth rate*

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam praktiknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti kesehatan atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti kesehatan dengan menggunakan metode proyeksi unit kredit di akhir periode) telah diterapkan seperti dalam penghitungan kewajiban pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

The sensitivity analysis is based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the defined medical benefit obligation to significant actuarial assumptions, the same method (present value of the defined medical benefit obligation calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the pension liability recognised within the consolidated statements of financial position.

17. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Risiko gaji (lanjutan)

Rata-rata durasi untuk masing-masing kewajiban imbalan pasti adalah 1,24 - 19,00 tahun.

Manajemen berkeyakinan bahwa perkiraan liabilitas dan imbalan kerja karyawan yang diberikan dari keseluruhan program pensiun Grup, yang didasarkan pada estimasi perhitungan aktuaris, telah melebihi kewajiban minimal yang ditentukan oleh UU Cipta Kerja.

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

17. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Salary risk (continued)

The weighted average duration of each defined benefit obligation is 1.24 - 19.00 years.

Management believes that the estimated liabilities of employee benefits from all of the Group's pension programs, based on the estimated calculation provided by the actuaries, exceeds the minimum liability stated by the Job Creation Law.

Expected maturity analysis of undiscounted post-employment benefit and other long-term benefits is as follow:

	Kurang dari 1 tahun/ *Less than a year*	1 sampai 5 tahun/ *Between 1-5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *Over 5 years*	Jumlah/ *Total*	
IPK	474,011	1,414,607	8,323,857	10,212,475	*PEB*
IJPL	140,565	473,846	4,725,760	5,340,171	*OLTEB*
Jumlah	614,576	1,888,453	13,049,617	15,552,646	*Total*

Pada bulan April 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") menerbitkan siaran pers tentang Pengatribusian Imbalan pada Periode Jasa (PSAK 24 "Imbalan Kerja"). Grup telah mengkaji dampak siaran pers ini terhadap kewajiban imbalan pasca kerja Grup pada tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021, dan saldo awal dari periode komparatif yang paling awal per 1 Januari 2021. Berdasarkan hasil perhitungan aktuaris, tidak ada dampak signifikan dari penerapan siaran pers ini terhadap laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021 dan 1 Januari 2021, oleh karena itu, Grup tidak menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian.

In April 2022, the Financial Accounting Standards Board of Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") issued a press release regarding Attributing Benefit to Periods of Service (SFAS 24 "Employee Benefits"). The Group has assessed the impact of this press release to the Group's post-employment benefit obligations for the years ended 31 December 2022 and 2021 and beginning balance of the earliest comparative period as at 1 January 2021. Based on the actuaries's calculation result, the impact of adoption of this press release was not significant to the Group's consolidated financial statements as at 31 December 2021 and 1 January 2021, therefore, the Group did not restate the consolidated financial statements.

18. MODAL SAHAM

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, komposisi pemegang saham adalah sebagai berikut:

18. SHARE CAPITAL

As at 31 December 2022 and 2021, the composition of the shareholder were as follows:

	31 Desember/*December* 2022 dan/*and* 2021			
	Jumlah saham/ *Number of shares*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership (%)*	Jumlah/ *Amount*	
Pemerintah Indonesia	**25,000,000**	**100**	**25,000,000**	***The Government of Indonesia***

19. LABA BERSIH PER SAHAM / *19. EARNINGS PER SHARE*

Laba bersih per saham dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada periode bersangkutan.

Earnings per share is calculated by dividing profit for the year attributable to owner of the parent by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.

	2022	2021	
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	18,461,812	5,321,127	*Profit for the year attributable to owner of the parent entity*
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar (lembar saham)	25,000,000	25,000,000	*Weighted average number of ordinary shares outstanding (shares)*
Laba bersih per saham - dasar dan dilusian (nilai penuh)	**738,472**	**212,845**	***Earnings per shares - basic and diluted (full amount)***

Grup tidak mempunyai efek berpotensi dilusi saham, sehingga laba bersih per saham dasar sama dengan laba bersih per saham dilusian.

The Group did not have potential dilutive ordinary shares, thus basic earnings per share is the same as the diluted earnings per share.

20. PENCADANGAN SALDO LABA DAN PEMBAGIAN LABA / *20. APPROPRIATIONS OF RETAINED EARNINGS AND DISTRIBUTIONS OF INCOME*

Mengacu kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, perusahaan diwajibkan untuk menyisihkan cadangan wajib dari keuntungan paling sedikit sebesar 20% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh.

Under Indonesian Limited Company Law, the company is required to set up a statutory reserve from profits amounting to at least 20% of issued and fully paid share capital.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Kinerja Tahun Buku 2021 tanggal 29 Juni 2022 dan RUPS Kinerja Tahun Buku 2020 tanggal 30 Juni 2021, Perusahaan mencadangkan saldo laba sebesar masing-masing Rp4.571.127 dan Rp1.749.229 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021.

Based on the General Meeting of Shareholders ("GMS") for the Financial Year 2021 dated 29 June 2022 and GMS for the Financial Year 2020 dated 30 June 2021, the Company had appropriated retained earnings of Rp4,571,127 and Rp1,749,229 for the years ended 31 December 2022 and 2021, respectively.

Sebagaimana telah diputuskan dalam RUPS Tahunan mengenai pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian tahun 2021 berdasarkan Akta Notaris No. 7 oleh notaris Lumassia S.H. tanggal 29 Juni 2022, pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp750.000.

As resolved during the Annual GMS concerning the legalisation of the Consolidated Financial Statements for the year 2021 based on Notarial Deed No. 7 by notary Lumassia S.H. dated on 29 June 2022, the shareholders approved cash dividend of Rp750,000.

Sebagaimana telah diputuskan dalam RUPS Tahunan mengenai pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian tahun 2020 berdasarkan Akta Notaris No. 2 oleh notaris Lumassia S.H. tanggal 26 Agustus 2021, pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp588.030.

As resolved during the Annual GMS concerning the legalisation of the Consolidated Financial Statements for the year 2020 based on Notarial Deed No. 2 by notary Lumassia S.H. dated on 26 August 2021, the shareholders approved cash dividend of Rp588,030.

21. PENJUALAN PRODUK / *SALES OF PRODUCTS*

Pendapatan penjualan produk untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

The revenues from sales of products for the years ended 31 December 2022 and 2021 were as follows:

	2022	2021	
Pihak berelasi (Catatan 29)			***Related parties (Note 29)***
Penjualan pupuk:			*Fertiliser sales:*
- Subsidi	1,003,017	1,134,831	*Subsidy -*
- Non-subsidi	505,524	486,568	*Non-subsidy -*
Penjualan non-pupuk	1,242,655	377,045	*Non-fertiliser sales*
	2,751,196	1,998,444	
Pihak ketiga			***Third parties***
Penjualan pupuk:			*Fertiliser sales:*
- Subsidi	12,349,320	12,558,459	*Subsidy -*
- Non-subsidi	33,161,816	24,392,214	*Non-subsidy -*
Penjualan non-pupuk	15,908,552	10,119,987	*Non-fertiliser sales*
Penjualan produk lainnya	320,904	244,747	*Sales of other products*
	61,740,592	47,315,407	
Jumlah	**64,491,788**	**49,313,851**	***Total***

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021, tidak terdapat penjualan produk kepada pelanggan dengan jumlah melebihi 10% dari jumlah penjualan produk.

For the years ended 31 December 2022 and 2021, there were no customers which sales of product exceeded 10% of total sales of products.

Pendapatan dari penjualan produk diakui pada suatu titik waktu.

The revenues from sales of products are recognised at a point in time.

22. PENGGANTIAN BIAYA SUBSIDI DARI PEMERINTAH INDONESIA / *REIMBURSEMENT OF SUBSIDY FROM THE GOVERNMENT OF INDONESIA*

Penggantian biaya subsidi dari Pemerintah Indonesia untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

The reimbursement of subsidy from the Government of Indonesia for the years ended 31 December 2022 and 2021 were as follows:

	2022	2021	
Subsidi pupuk:			***Subsidy of fertilisers:***
NPK	22,319,851	11,000,486	*NPK*
Urea	11,861,398	10,193,563	*Urea*
SP-36	1,067,121	1,416,033	*SP-36*
ZA	807,713	1,583,586	*ZA*
Organik	261,975	509,883	*Organic*
NPK kakao	85,855	53,651	*NPK cocoa*
	36,403,913	24,757,202	
Penyesuaian piutang subsidi dari Pemerintah, yang belum ditagih - bersih setelah penyesuaian tahun sebelumnya	(294,846)	501,490	*Adjusment of unbilled subsidy receivables from the Government - net of prior year adjusment*
Jumlah	**36,109,067**	**25,258,692**	***Total***

22. PENGGANTIAN BIAYA SUBSIDI DARI PEMERINTAH INDONESIA (lanjutan)

Penggantian biaya subsidi dari Pemerintah untuk tahun 2022 dan 2021 dibukukan berdasarkan harga pupuk subsidi yang telah diaudit oleh BPK-RI yang tertuang pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan tertanggal 27 Februari 2023 untuk PKT, PKC, PIM, dan PSP dan 9 Maret 2023 untuk PKG untuk tahun 2022 dan 8 Maret 2022 untuk PKT dan 24 Maret 2022 untuk PIM, PKG, PKC, dan PSP untuk tahun 2021. Per tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan, volume penyaluran subsidi masih dalam proses pemeriksaan oleh BPK-RI. Secara historis, aktual kuantitas penyaluran pupuk yang disetujui dan estimasi dari kuantitas penyaluran tidak berbeda signifikan.

22. REIMBURSEMENT OF SUBSIDY FROM THE GOVERNMENT OF INDONESIA (continued)

Reimbursement of subsidy from Government for the year 2022 and 2021 were recorded based on subsidised fertiliser price audited by BPK-RI as stated on Minutes of Audit Result dated 27 February 2023 for PKT, PKC, PIM and PSP and 9 March 2023 for PKG for the year 2022 and 8 March 2022 for PKT and 24 March 2022 for PIM, PKG, PKC and PSP for the year 2021. As the issuance date of these consolidated financial statements, the subsidy distributed volume are still being audited by BPK-RI. Historically, the actual approved distributed quantity and estimates of distributed quantity are not significantly different.

23. PENDAPATAN JASA / *23. RENDERING OF SERVICES*

	2022	2021	
Pihak berelasi (Catatan 29)	2,073,564	2,700,542	*Related parties (Note 29)*
Pihak ketiga	1,185,074	1,330,051	*Third parties*
Jumlah	**3,258,638**	**4,030,593**	***Total***

Pendapatan jasa untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

The rendering of services for the years ended 31 December 2022 and 2021 were as follows:

	2022	2021	
Pendapatan konstruksi	1,380,921	2,423,648	*Construction revenues*
Jasa konstruksi pabrik dan rantai pasokan	818,817	566,723	*Plant services and supply chain*
Jasa operasi dan pemeliharaan	318,639	245,014	*Operation and maintenance services*
Pendapatan dari transaksi tenaga listrik	196,946	119,715	*Revenue from electronic power transactions*
Pendapatan keuangan dari perjanjian konsesi jasa	122,709	132,913	*Finance income from service concession arrangement*
Lainnya	420,606	542,580	*Others*
Jumlah	**3,258,638**	**4,030,593**	***Total***

Terdapat pendapatan konstruksi dari PT Pertamina (Persero) dan entitas anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.004.588 (30,83%) dan Rp1.459.774 (36,22%) dari jumlah pendapatan jasa.

There were construction revenue from PT Pertamina (Persero) and its subsidiaries for the years ended 31 December 2022 and 2021 amounting to Rp1,004,588 (30.83%) and Rp1,459,774 (36.22%), respectively, from total rendering of services.

Terdapat pendapatan dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp890.242 (27,32%) dan Rp549.115 (13,62%) dari jumlah pendapatan jasa.

There were revenue from PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) for the years ended 31 December 2022 and 2021 amounting to Rp890,242 (27.32%) and Rp549,115 (13.62%), respectively, from total rendering of services.

Manajemen memperkirakan bahwa harga transaksi yang dialokasikan untuk kontrak yang belum diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp2.758.397 (2021: Rp2.592.908) akan diakui sebagai pendapatan selama rentang waktu antara 1-3 tahun ke depan.

Management expects that the transaction price allocated to the unsatisfied contracts as of 31 December 2022 amounting to Rp2,758,397 (2021: Rp2,592,908) will be recognised as revenue within the next 1-3 years.

Pendapatan Grup yang diakui pada tahun ini, yang berasal dari saldo kontrak liabilitas tahun lalu sebesar Rp161.810 (2021: Rp118.052).

Revenue of the Group recognised in the current year related to carried-forward contract liabilities amounting to Rp161,810 (2021: Rp118,052).

24. BEBAN POKOK PENDAPATAN / *COST OF REVENUES*

Beban pokok pendapatan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

The cost of revenues for the years ended 31 December 2022 and 2021 were as follows:

	2022	2021	
Bahan baku yang digunakan	54,264,268	42,883,940	*Raw material used*
Beban penyusutan (Catatan 10)	4,169,064	4,112,455	*Depreciation expenses (Note 10)*
Biaya tenaga kerja langsung	3,420,247	3,267,898	*Direct labour*
Perbaikan dan pemeliharaan	988,661	980,305	*Repairs and maintenance*
Biaya *overhead* lainnya	3,103,487	3,416,216	*Other overhead costs*
Jumlah biaya produksi	65,945,727	54,660,814	*Total production costs*
Persediaan barang jadi dan barang dalam proses:			*Finished goods and work in progress inventories:*
Awal tahun	8,149,802	7,845,646	*Beginning of the year*
Akhir tahun	(10,883,698)	(8,149,802)	*End of the year*
	63,211,831	54,356,658	
Beban non-manufaktur:			*Non-manufacturing cost:*
Jasa konstruksi	1,853,252	6,086,695	*Construction services*
Perdagangan	3,331,145	1,794,178	*Trading*
Listrik, *steam*, dan utilitas	819,910	510,584	*Electricity, steam and utilities*
Properti dan jasa kawasan industri	134,850	131,729	*Properties and services industrial estate*
Lainnya	937,184	589,945	*Others*
Jumlah beban non-manufaktur	7,076,341	9,113,131	*Total cost of non-manufacturing*
Jumlah	**70,288,172**	**63,469,789**	***Total***

Pemasok yang memiliki transaksi pembelian lebih dari 10% dari jumlah beban pokok pendapatan usaha konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah PT Pertamina (Persero) dan entitas anaknya dengan nilai sebesar Rp20.533.906 (29,21%) (2021: Rp17.640.902 (27,79%)).

Suppliers with purchase transactions that represent more than 10% of the total consolidated cost of revenues for the years ended 31 December 2022 are PT Pertamina (Persero) and its subsidiaries amounting to Rp20,533,906 (29.21%) (2021: Rp17,640,902 (27.79%)).

Lihat Catatan 29 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 29 for details of related parties balances and transactions.

25. BEBAN PENJUALAN / *SELLING EXPENSES*

	2022	2021	
Gaji, upah, dan kesejahteraan	592,173	559,551	*Salaries, wages, and welfare*
Beban promosi dan pemasaran	146,126	117,512	*Promotion and marketing expenses*
Biaya jasa	120,026	160,294	*Service charges*
Beban sewa	69,394	140,982	*Rent expenses*
Beban penyusutan (Catatan 10)	59,042	110,086	*Depreciation expenses (Note 10)*
Beban perlengkapan dan operasional kantor	42,415	35,107	*Supply and office operating expenses*
Beban perjalanan dinas	34,241	23,664	*Travel expenses*
Beban asuransi	18,614	10,990	*Insurance expenses*
Beban penelitian	15,692	16,062	*Research expenses*
Beban pemeliharaan	7,230	18,673	*Maintenance expenses*
Beban unit pelayanan dan utilitas	4,645	11,690	*Service unit and utility expenses*
Beban lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000)	73,695	75,894	*Other expenses (each below Rp10,000)*
Jumlah	**1,183,293**	**1,280,505**	***Total***

26. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *26. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

	2022	2021	
Gaji, upah, dan kesejahteraan	3,482,254	2,047,088	*Salaries, wages, and welfare*
Beban jasa	627,672	521,498	*Service charges*
Beban pajak	307,060	312,576	*Tax expenses*
Beban unit pelayanan dan utilitas	253,865	215,461	*Service unit and utility expenses*
Beban promosi dan pemasaran	160,970	109,896	*Promotion and marketing expenses*
Beban bina wilayah	144,273	141,113	*Regional development expenses*
Beban sewa	143,748	109,145	*Rent expenses*
Beban penyusutan (Catatan 10)	120,079	127,317	*Depreciation expenses (Note 10)*
Beban pelatihan	115,064	52,906	*Training expenses*
Biaya perjalanan dinas	103,553	47,604	*Travel expenses*
Beban perlengkapan dan operasional kantor	101,473	101,061	*Supply and office operating expenses*
Beban pemeliharaan	95,171	129,485	*Maintenance expenses*
Beban penelitian	45,407	43,462	*Research expenses*
Penambahan/(pembalikan) cadangan kerugian penurunan nilai piutang - bersih	39,529	(55,399)	*Additional/(reversal) of allowance for impairment losses of receivables - net*
Beban lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000)	216,310	119,911	*Other expenses (each below Rp10,000)*
Jumlah	**5,956,428**	**4,023,124**	***Total***

27. PENDAPATAN LAINNYA - BERSIH / *27. OTHER INCOME - NET*

	2022	2021	
Keuntungan/(kerugian) selisih kurs - bersih	589,652	(19,055)	*Foreign exchange gain/(loss) - net*
Denda dan klaim	98,383	70,625	*Penalty and claim*
Pendapatan lainnya - bersih	4,871	98,610	*Other income - net*
Jumlah	**692,906**	**150,180**	***Total***

28. BIAYA KEUANGAN / *28. FINANCE COSTS*

Biaya keuangan Grup untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 merupakan beban bunga dan beban keuangan lainnya dengan rincian sebagai berikut:

The Group's finance costs for the years ended 31 December 2022 and 2021 representing interest expenses and other financial expenses were as follows:

	2022	2021	
Pinjaman bank jangka pendek	744,257	769,174	*Short-term bank loans*
Utang obligasi	667,995	648,074	*Bonds payable*
Pinjaman jangka panjang	412,744	523,759	*Long-term loans*
Biaya bank dan pinjaman	64,518	76,685	*Bank and loan cost*
Kerugian selisih kurs atas pinjaman	353,550	29,802	*Foreign exchange loss on borrowing*
Jumlah	**2,243,064**	**2,047,494**	***Total***

29. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat hubungan dengan pihak berelasi

Dalam kegiatan usaha normal, Grup melakukan transaksi usaha dan bukan usaha dengan pihak berelasi, yang terafiliasi dengan Grup melalui kepemilikan langsung dan tak langsung, dan/atau di bawah kendali pihak yang sama. Harga jual atau beli antara pihak berelasi ditentukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak yang tidak berelasi.

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

29. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES

Nature of relationships with related parties

In the normal course of business, the Group entered into trade and other transactions with related parties, which are affiliated with the Group through equity ownership, either direct or indirect, and/or under common control. Sales or purchase price among related parties is made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those for transactions between unrelated parties.

The details of the nature of relationships and types of significant transactions with related parties are as follows:

Pihak berelasi/*Related parties*	Sifat hubungan dengan pihak berelasi/*Relationship with the related parties*	Transaksi/*Transaction*
Pemerintah Indonesia/*The Government of Indonesia*	Pemegang saham utama/*Ultimate parent*	Dividen, piutang dan penggantian biaya subsidi/*Dividend, receivables and reimbursement of subsidy*
Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, BSI	Entitas di bawah kendali Pemerintah/*Entities controlled by the Government*	Penempatan giro, penempatan deposito berjangka yang tidak dibatasi penggunaannya, penempatan kas yang dibatasi penggunaannya, fasilitas *Non Cash loan*, fasilitas *Bill Purchasing Line*, fasilitas Kredit Modal Kerja, fasilitas *Supply Chain Financing*, fasilitas *Treasury Line/ Placement of current accounts, placement of unrestricted time deposits, placement of restricted cash, Non Cash Loan facility, Bill Purchasing Line facility, Working Capital Loans facility, Supply Chain Financing Facility, Treasury Line facility*
PT Adhi Karya (Persero), PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Bhanda Ghara Reksa (Persero), PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Fokus Jasa Mitra, PT Graha Sarana Gresik, PT Iglas (Persero), PT Industri Gula Glenmore, PT Krakatau Engineering, PT Perkebunan Nusantara (Persero) dan entitas anak/*and subsidiaries*, PT Perta Arun Gas, PT Pertagas Niaga, PT Pertamina (Persero) dan entitas anak/*and subsidiaries*, PT Pertani (Persero), PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT Petro Graha Medika, PT Sang Hyang Seri, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan entitas anak/*and subsidiaries*, PT Trans Pacific Petrochemical Indotama, Yayasan Petrokimia Gresik, Perum Bulog, Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur, Dana Pensiun Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") BNI, DPLK BRI, Tabungan Hari Tua ("YTHT") PIM, BRI Life, PT Pembangunan Perumahan, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Boma Bisma Indra (Persero), PT Pertamina Hulu Sanga Sanga, PT Pertamina Shipping International, PT Kaltim Medika Utama	Entitas di bawah kendali Pemerintah/*Entities controlled by the Government*	Penjualan pupuk subsidi, penjualan pupuk non-subsidi, pendapatan jasa EPC, pendapatan jasa non-EPC, pendapatan jasa, penjualan produk non-pupuk, pembelian bahan baku, sewa, jasa pemeliharaan mekanik, pemakaian listrik, jasa pengangkutan gas dan pengelola aset program manfaat pasti/*Subsidy fertiliser sales, non-subsidy fertiliser sales, revenue from EPC, revenue from non-EPC, rendering of services, non-fertiliser sales, purchase of raw material, rental, mechanic maintenance, electricities, gas transportation services and defined benefit plan asset manager*

29. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

29. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)

Sifat hubungan dengan pihak berelasi (lanjutan)

Nature of relationships with related parties *(continued)*

Pihak-pihak yang berelasi/ *Related parties*	Sifat hubungan dengan pihak berelasi/*Relationship with the related parties*	Transaksi/ *Transaction*
PT Aneka Jasa Grhadika, PT Petrocentral, PT Gresik Cipta Sejahtera, PT Petrokopindo Cipta Selaras, PT Multi Nitrotama Kimia ("MNK")	Entitas asosiasi/*Associates*	Penjualan pupuk non-subsidi, penjualan non-pupuk, sewa dan pembelian non-bahan baku/*Non-subsidy fertiliser sales, non-fertiliser sales, rental and purchase of non-raw materials*
PT Kaltim Jordan Abadi, PT Petro Jordan Abadi ("PJA")	Ventura bersama/*Joint ventures*	Penjualan non-pupuk, piutang usaha dan utang usaha/*Non-fertiliser sales, trade receivables and trade payables*
RDMP Balikpapan JO	Ventura Bersama/*Joint Venture*	Pendapatan, piutang usaha, pendapatan yang masih harus diterima, pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan/*Revenues, trade receivables, unearned revenue, construction contract work in progress - due from customers*
Personil manajemen kunci/ *Key management personnel*	Personil manajemen kunci (terdiri dari anggota direksi dan komisaris dan seluruh pihak yang melapor secara langsung kepada direksi)/*Key management personnel (consisting of members of the board of directors and commissioners and those who directly report to the board of directors)*	Kompensasi dan remunerasi/ *Compensation and remuneration*

Transaksi-transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Significant transactions with related parties are as follows:

Piutang usaha:

Trade receivables:

	2022	2021	
PT Gresik Cipta Sejahtera	77,734	103,761	*PT Gresik Cipta Sejahtera*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	63,848	53,991	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
RDMP Balikpapan JO	60,525	64,076	*RDMP Balikpapan JO*
PT Kalimantan Agro Nusantara	55,244	-	*PT Kalimantan Agro Nusantara*
PT Pertamina (Persero) dan entitas anak	42,994	155,529	*PT Pertamina (Persero) and subsidiaries*
PT Industri Gula Glenmore	39,567	54,166	*PT Industri Gula Glenmore*
PJA	31,729	44,931	*PJA*
MNK	9,513	55,545	*MNK*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp30.000)	278,178	383,738	*Others (each below Rp30,000)*
	659,332	915,737	
Cadangan penurunan nilai	(115,328)	(63,747)	*Allowance for impairment*
Jumlah	544,004	851,990	*Total*
Persentase terhadap jumlah aset	0.34%	0.66%	*As a percentage to total assets*

29. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

29. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES *(continued)*

Pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan:

Construction contract work in progress - due from customers:

	2022	2021	
PT Pertamina (Persero) dan entitas anak	327,439	830,912	*PT Pertamina (Persero) and subsidiaries*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	312,300	336,615	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
RDMP Balikpapan JO	9,983	49,935	*RDMP Balikpapan JO*
PT Trans Pacific Petrochemical Indotama	-	33,743	*PT Trans Pacific Petrochemical Indotama*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000)	3,857	52,283	*Others (each below Rp10,000)*
Jumlah	653,579	1,303,488	*Total*
Persentase terhadap jumlah aset	0.41%	1.01%	*As a percentage to total assets*

Utang usaha:

Trade payables:

	2022	2021	
PJA	787,592	4,627	*PJA*
PT Pertamina (Persero) dan entitas anak	408,152	39,452	*PT Pertamina (Persero) and subsidiaries*
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	22,122	3,351	*PT Bukit Asam (Persero) Tbk*
PT Pembangunan Perumahan (Persero)	21,462	23,238	*PT Pembangunan Perumahan (Persero)*
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan entitas anak	21,034	49,693	*PT Semen Indonesia (Persero) Tbk and subsidiaries*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp20.000)	123,233	159,285	*Others (each below Rp20,000)*
Jumlah	1,383,595	279,646	*Total*
Persentase terhadap jumlah liabilitas	2.05%	0.49%	*As a percentage to total liabilities*

Utang bruto kepada pelanggan untuk pekerjaan kontrak konstruksi:

Amounts due to customers from construction contract work:

	2022	2021	
PT Pertamina (Persero) dan entitas anak	25,018	-	*PT Pertamina (Persero) and subsidiaries*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000)	1,436	-	*Others (each below Rp10,000)*
Jumlah	26,454	-	*Total*
Persentase terhadap jumlah liabilitas	0.04%	0.00%	*As a percentage to total liabilities*

29. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

29. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES *(continued)*

Utang lainnya:

Other payables:

	2022	2021	
BRI	-	40,646	*BRI*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	-	15,959	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000)	37,255	23,785	*Others (each below Rp10,000)*
Jumlah	37,255	80,390	*Total*
Persentase terhadap jumlah liabilitas	0.06%	0.14%	*As a percentage to total liabilities*

Pendapatan:

Revenues:

	2022	2021	
Penjualan produk (Catatan 21)	2,751,196	1,998,444	*Sales of products (Note 21)*
Penggantian biaya subsidi dari Pemerintah Indonesia (Catatan 22)	36,109,067	25,258,692	*Reimbursement of subsidy from the Government of Indonesia (Note 22)*
Pendapatan jasa (Catatan 23)	2,073,564	2,700,542	*Rendering of services (Note 23)*
Jumlah	40,933,827	29,957,678	*Total*

	2022	2021	
Pemerintah Indonesia (Catatan 22)	36,109,067	25,258,692	*Government of Indonesia (Note 22)*
PT Pertamina (Persero) dan entitas anak	1,004,588	1,459,774	*PT Pertamina (Persero) and subsidiaries*
PT Gresik Cipta Sejahtera	577,929	514,759	*PT Gresik Cipta Sejahtera*
MNK	507,642	307,061	*MNK*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	890,242	549,115	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	371,487	428,765	*PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)*
PT Sang Hyang Seri	335,128	-	*PT Sang Hyang Seri*
PJA	268,194	-	*PJA*
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	137,252	96,599	*PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)*
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan entitas anak	80,561	-	*PT Semen Indonesia (Persero) Tbk and subsidiaries*
PT Petrocentral	67,910	78,319	*PT Petrocentral*
PT Perkebunan Nusantara (Persero) dan entitas anak	40,721	213,031	*PT Perkebunan Nusantara (Persero) and subsidiaries*
PT Pertani (Persero)	2,300	402,118	*PT Pertani (Persero)*
PT Trans Pacific Petrochemical Indotama	1,250	216,949	*PT Trans Pacific Petrochemical Indotama*
PT Kaltim Jordan Abadi		52,694	*PT Kaltim Jordan Abadi*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp70.000)	539,556	379,802	*Others (each below Rp70,000)*
Jumlah	40,933,827	29,957,678	*Total*
Persentase terhadap jumlah pendapatan	39.41%	38.11%	*As a percentage to total revenue*

29. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

29. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES *(continued)*

Pembelian:

Purchases:

	2022	2021	
PT Pertamina (Persero) dan entitas anak	20,533,906	17,640,902	*PT Pertamina (Persero) and subsidiaries*
PJA	4,182,001	2,166,267	*PJA*
PT Bukit Asam Tbk	535,113	570,848	*PT Bukit Asam Tbk*
PT Petrokopindo Cipta Selaras	392,886	355,482	*PT Petrokopindo Cipta Selaras*
PT Fokus Jasa Mitra	386,819	374,770	*PT Fokus Jasa Mitra*
PT Graha Sarana Gresik	246,545	173,115	*PT Graha Sarana Gresik*
PT Aneka Jasa Grhadika	234,896	183,021	*PT Aneka Jasa Grhadika*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	215,296	192,711	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)	190,476	250,397	*PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)*
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	141,772	8,181	*PT Wijaya Karya (Persero) Tbk*
PT Gresik Cipta Sejahtera	127,764	155,523	*PT Gresik Cipta Sejahtera*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp70.000)	479,917	268,120	*Others (each below Rp70,000)*
Jumlah	27,667,391	22,339,337	*Total*
Persentase terhadap jumlah beban pokok pendapatan	39.36%	35.20%	*As a percentage to total cost of revenues*

Kompensasi manajemen kunci:

Key management compensation:

Remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Remuneration for the Board of Commissioners and Directors of the Company for the years ended 31 December 2022 and 2021 are as follows:

	2022	2021	
Direksi			***Board of Directors***
Gaji dan tunjangan rumah	27,924	23,965	*Salary and home allowance*
Tunjangan hari raya	2,327	1,463	*Holiday allowance*
Tantiem yang masih harus dibayar*	303,661	74,155	*Accrued tantiem**
	333,912	99,583	
Imbalan pascakerja	7,781	8,325	*Post-employment benefit*
	341,693	107,908	
Dewan Komisaris			***Board of Commissioners***
Gaji dan tunjangan rumah	14,238	13,245	*Salary and home allowance*
Tunjangan hari raya	1,187	789	*Holiday allowance*
Tantiem yang masih harus dibayar*	151,288	36,945	*Accrued tantiem**
	166,713	50,979	
Imbalan pascakerja	3,658	4,269	*Post-employment benefit*
	170,371	55,248	
Jumlah	512,064	163,156	*Total*

*) Tantiem menggunakan nilai akrual tahun berjalan

*) *Tantiem using current year accrued amount*

30. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN / *30. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES*

	31 Desember/*December* 2022			
	Jumlah/ *Total*	**Diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/ *At amortised cost***	**Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/*At fair value through other comprehensive income***	
Aset keuangan				***Financial assets***
Kas dan setara kas	33,460,620	33,460,620	-	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha	2,693,522	2,693,522	-	*Trade receivables*
Piutang subsidi dari Pemerintah Indonesia	15,395,033	15,395,033	-	*Subsidy receivables from the Government of Indonesia*
Piutang subsidi yang belum ditagih	686,625	686,625	-	*Unbilled subsidy receivables*
Piutang lainnya	822,748	822,748	-	*Other receivables*
Pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan	914,203	914,203	-	*Construction contract work in progress - due from customers*
Aset lancar lainnya	1,630,281	1,630,281	-	*Other current assets*
Aset tidak lancar lainnya	1,885,968	1,821,509	64,459	*Other non-current assets*
Jumlah	57,489,000	57,424,541	64,459	*Total*
Liabilitas keuangan				***Financial liabilities***
Utang usaha	9,148,195	9,148,195	-	*Trade payables*
Utang lainnya	1,600,290	1,600,290	-	*Other payables*
Utang salam	1,186,705	1,186,705	-	*Salam payable*
Liabilitas yang masih harus dibayar	8,466,812	8,466,812	-	*Accrued liabilities*
Utang bruto kepada pelanggan untuk pekerjaan kontrak konstruksi	28,122	28,122	-	*Amounts due to customer for construction contract work*
Pinjaman bank jangka pendek	5,780,006	5,780,006	-	*Short-term bank loans*
Bagian lancar pinjaman jangka panjang	3,602,829	3,602,829	-	*Current maturities of non-current borrowings*
Pinjaman jangka panjang	21,895,916	21,895,916	-	*Non-current borrowings*
Liabilitas tidak lancar lainnya	21,563	21,563	-	*Other non-current liabilities*
Jumlah	51,730,438	51,730,438	-	*Total*

30. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan) / *30. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)*

	31 Desember/*December* 2021			
	Jumlah/ *Total*	**Diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/ *At amortised cost***	**Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/*At fair value through other comprehensive income***	
Aset keuangan				***Financial assets***
Kas dan setara kas	17,453,305	17,453,305	-	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha	3,324,666	3,324,666	-	*Trade receivables*
Piutang subsidi dari Pemerintah Indonesia	5,880,216	5,880,216	-	*Subsidy receivables from the Government of Indonesia*
Piutang subsidi yang belum ditagih	981,471	981,471	-	*Unbilled subsidy receivables*
Piutang lainnya	979,595	979,595	-	*Other receivables*
Pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan	1,543,717	1,543,717	-	*Construction contract work in progress - due from customers*
Aset lancar lainnya	1,169,457	1,169,457	-	*Other current assets*
Aset tidak lancar lainnya	1,775,502	1,732,678	42,824	*Other non-current assets*
Jumlah	33,107,929	33,065,105	42,824	*Total*
Liabilitas keuangan				***Financial liabilities***
Utang usaha	6,101,227	6,101,227	-	*Trade payables*
Utang lainnya	1,642,704	1,642,704	-	*Other payables*
Liabilitas yang masih harus dibayar	6,985,668	6,985,668	-	*Accrued liabilities*
Utang subsidi kepada Pemerintah Indonesia	95,627	95,627	-	*Subsidy payable to the Government of Indonesia*
Utang bruto kepada pelanggan untuk pekerjaan kontrak konstruksi	2,210	2,210	-	*Amounts due to customer for construction contract work*
Pinjaman bank jangka pendek	7,308,865	7,308,865	-	*Short-term bank loans*
Bagian lancar pinjaman jangka panjang	4,208,700	4,208,700	-	*Current maturities of non-current borrowings*
Pinjaman jangka panjang	19,945,845	19,945,845	-	*Non-current borrowings*
Liabilitas tidak lancar lainnya	66,911	66,911	-	*Other non-current liabilities*
Jumlah	46,357,757	46,357,757	-	*Total*

31. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Berbagai aktivitas yang dilakukan membuat Grup terekspos berbagai risiko keuangan diantaranya: risiko pasar (termasuk dampak risiko nilai tukar mata uang asing, dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit, dan risiko likuiditas. Tujuan dari manajemen risiko keuangan Grup adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengukur, mengawasi, dan mengelola risiko keuangan dalam upaya melindungi kesinambungan bisnis dalam jangka panjang dan meminimalkan potensi kerugian yang timbul dari ketidakpastian atau perubahan tak terduga dalam kondisi pasar dan kinerja keuangan konsolidasian Grup.

Grup menggunakan berbagai metode untuk mengukur risiko keuangan yang dihadapinya. Metode ini meliputi analisis sensitivitas untuk risiko tingkat suku bunga, nilai tukar dan risiko harga lainnya dan analisis umur piutang untuk risiko kredit.

Faktor risiko keuangan

a. Risiko pasar

(i) Risiko suku bunga

Risiko suku bunga Grup terutama timbul dari pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang. Risiko suku bunga dari kas di bank dan deposito tidak signifikan dan semua instrumen keuangan lainnya tidak dikenakan bunga. Grup memiliki pinjaman dengan tingkat suku bunga tetap dan tingkat suku bunga mengambang. Pinjaman dengan tingkat suku bunga mengambang terekspos terhadap risiko suku bunga arus kas. Pinjaman dengan tingkat suku bunga tetap mengekspos Grup terhadap risiko suku bunga nilai wajar. Grup mengelola risiko dengan menyeimbangkan porsi pinjaman dengan bunga tetap dan bunga mengambang.

Manajemen telah memulai diskusi dengan pemberi pinjaman untuk membahas lebih lanjut mengenai transisi penggantian LIBOR dan JIBOR serta untuk menganalisa risiko pada perubahan tingkat bunga. Pada 31 Desember 2022, acuan tingkat bunga alternatif belum ditentukan.

Tabel berikut berisi rincian semua liabilitas keuangan yang dimiliki Grup pada tanggal 31 Desember 2022 yang mengacu pada LIBOR dan JIBOR dan belum bertransisi ke acuan suku bunga alternatif:

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The Group's activities are exposed to a variety of financial risks as follows: market risk (including foreign currency exchange rates risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. The objectives of the Group's risk management are to identify, measure, monitor and manage basic risks in order to safeguard the Group's long-term business continuity and to minimise potential losses arising from uncertainties or unexpected changes in market conditions and the Group's consolidated financial performance.

The Group uses various methods to measure financial risk to which it is exposed. These methods include sensitivity analysis in the case of interest rate, foreign exchange and other price risks and aging analysis for credit risk.

Financial risk factor

a. Market risk

(i) Interest rate risk

The Group's interest rate risk arises from short-term borrowings and long-term borrowings. The interest rate risk from cash in bank and deposits is not significant and all other financial instruments are non-interest bearing. The Group has borrowings with fixed and floating interest rates. Borrowings with floating interest rates are exposed to cashflow interest rate risk. Borrowings with fixed rates exposes the Group to fair value interest risk. The Group manages the risk by maintaining an appropriate mix of fixed and floating rate borrowings.

Management has started discussions with the lenders to find out more about the transition to LIBOR and JIBOR replacement as well as to analyse the risk of changes in interest rates. As at 31 December 2022, the alternative benchmark has not yet been determined.

The following table contains details of all of the financial liabilities of the Group as at 31 December 2022 which have reference to LIBOR and JIBOR and have not yet transitioned to an alternative interest rate benchmark:

	2022	
Pinjaman bank	12,528,973	*Bank loans*

31. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

a. Risiko pasar (lanjutan)

(i) Risiko suku bunga (lanjutan)

Berbagai skenario disimulasikan dengan mempertimbangkan pembiayaan kembali, pembaruan posisi yang ada, pembiayaan alternatif dan lindung nilai jika diperlukan. Berdasarkan skenario ini, Grup menghitung dampaknya terhadap laba rugi pada perubahan suku bunga yang ditentukan.

Pada tanggal 31 Desember 2022, jika tingkat suku bunga atas pinjaman jangka pendek dan panjang 100 basis poin lebih tinggi/lebih rendah, dengan asumsi semua variabel lain konstan, laba rugi untuk tahun berjalan akan menjadi lebih rendah/lebih tinggi sebesar Rp125.702 (31 Desember 2021: Rp84.919).

(ii) Risiko nilai tukar mata uang asing

Grup menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing yang terutama timbul dari aset dan liabilitas moneter yang diakui dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang fungsional entitas yang bersangkutan. Sebagian dari risiko ini dikelola menggunakan lindung nilai natural yang berasal dari aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing yang sama.

Pada tanggal 31 Desember 2022 jika Rp melemah/menguat sebesar 10% terhadap USD dengan semua variabel konstan, laba sebelum pajak tahun berjalan akan menjadi lebih rendah atau lebih tinggi sebesar Rp100.138 (31 Desember 2021: lebih rendah atau lebih tinggi sebesar Rp422.861), terutama yang timbul sebagai akibat keuntungan/kerugian selisih kurs atas penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

Pada tanggal 31 Desember 2022, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing yang dimiliki Grup didenominasikan dalam mata uang USD dan EUR. Deviasi pergerakan kurs untuk mata uang tersebut adalah masing-masing sebesar 4,72% dan 5,02%.

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES *(continued)*

Financial risk factor *(continued)*

a. Market risk *(continued)*

(i) Interest rate risk (continued)

Various scenarios are simulated taking into consideration refinancing, renewal of existing positions, alternative financing and hedging if necessary. Based on these scenarios, the Group calculates the impact on profit or loss at a defined interest rate.

As at 31 December 2022, if interest rates on short-term and long-term borrowings had been 100 basis points higher/lower with all other variables held constant, profit or loss for the year would have been Rp125,702 (31 December 2021: Rp84,919), lower/higher.

(ii) Foreign currency exchange risk

The Group is facing foreign exchange risk arising from various currency exposures. Foreign exchange risk primarily arises from recognised monetary assets and liabilities that are denominated in a currency that is not the entity's functional currency. These exposures are managed partially by using natural hedges that arise from monetary assets and liabilities in the same foreign currency.

As at 31 December 2022, if the Rp had weakened/strengthened by 10% against the USD with all other variables held constant, the pre-tax profit for the year would have been Rp100,138 lower or higher (31 December 2021: Rp422,861 lower or higher), respectively, mainly as a result of foreign exchange gains/losses on the translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currency.

As at 31 December 2022, monetary assets and liabilities held by the Group are denominated in USD and EUR. The deviation for such currencies is 4.72% and 5.02%, respectively.

31. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

a. Risiko pasar (lanjutan)

(ii) Risiko nilai tukar mata uang asing (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2022, jika nilai tukar Rp terhadap mata uang asing meningkat sebesar deviasi yang telah disebutkan diatas dengan semua variabel konstan, laba sebelum pajak tahun berjalan akan menjadi lebih rendah sebesar Rp47.265 terutama sebagai akibat kerugian/keuntungan translasi kas dan setara kas, piutang usaha, pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan, utang usaha, liabilitas yang masih harus dibayar, pinjaman bank jangka pendek, dan pinjaman bank jangka panjang dalam mata uang asing.

(iii) Risiko harga

Harga komoditas seperti pupuk dan amonia tidak stabil seiring dengan perubahan permintaan dan penawaran pelanggan. Walaupun basis pelanggan Grup terdiversifikasi dan tidak tergantung pada satu pasar atau negara saja, pendapatan Grup tetap dapat mengalami dampak negatif dari menurunnya harga komoditas.

b. Risiko kredit

Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah maksimum eksposur dari risiko kredit adalah Rp57.481.836 (31 Desember 2021: Rp33.100.832). Risiko kredit terutama berasal dari penempatan dana pada bank, piutang usaha, piutang subsidi, aset lancar dan tidak lancar lainnya, piutang lainnya dan pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan.

Semua kas di bank dan aset keuangan tidak lancar lainnya yang merupakan saldo bank yang dibatasi penggunaannya ditempatkan di bank yang memiliki kualitas kredit yang baik. Oleh karena itu Grup berkeyakinan bahwa risiko kredit atas aset keuangan tersebut minimal.

Risiko kredit pada piutang subsidi pupuk dan piutang subsidi dari Pemerintah yang belum tertagih dianggap dapat diabaikan, sebab pihak yang bersangkutan merupakan Pemerintah Indonesia.

Terkait piutang retensi dan pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan.

***31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES** (continued)*

***Financial risk factor** (continued)*

***a. Market risk** (continued)*

(ii) Foreign exchange risk (continued)

As at 31 December 2022, if the exchange rates of the Rp against foreign currencies appreciated by the deviation aforementioned with all other variables held constant, profit before tax for the year would have been Rp47,265 lower, mainly as a result of foreign exchange losses/gains on the translation of cash and cash equivalents, trade receivables, construction contract work in progress - due from customers, trade payables, accrued liabilities, short-term bank loans and long-term bank loans denominated in foreign currencies.

(iii) Price risk

Commodity prices such as fertiliser and ammonia are unstable due to changes in supply and demand from customers. Although the Group has diverse customers and does not depend on a specific market or country, the Group revenue could be negatively affected by the decrease in commodity prices.

b. Credit risk

As at 31 December 2022, the total maximum exposure from credit risk was Rp57,481,836 (31 December 2021: Rp33,100,832). Credit risk arises from cash in banks, trade receivables, subsidy receivables, other current and non-current assets, other receivables and construction contract work in progress - due from customers.

All the cash in banks and other non-current financial assets in the form of restricted deposits are placed in banks with good credit rating. Therefore, the Group believes the credit risk of such financial assets is minimal.

The credit risk on subsidy receivables and unbilled subsidy receivables from the Government are considered negligible, since the counterparty is the Government of Indonesia.

Related to retention receivables and construction contract work in progress - due from customers.

31. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

Selain itu, Grup juga memastikan bahwa penjualan hanya dilakukan kepada pelanggan dengan sejarah kredit yang baik. Grup memiliki penilaian atas pelanggan dalam hal kemampuan membayar piutang saat jatuh tempo. Penilaian setiap pelanggan didasarkan pada kemampuan keuangan pelanggan serta pengalaman sebelumnya.

Atas dasar itu, penyisihan kerugian pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 ditetapkan sebagai berikut untuk piutang usaha dan piutang lainnya:

***31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES** (continued)*

***Financial risk factor** (continued)*

***b. Credit risk** (continued)*

In addition, the Group also ensures that sales are only made to customers with a good credit history. The Group has an assessment of customers in terms of ability to pay receivables when due. Each customer's valuation is based on the customer's financial ability and previous experience.

On that basis, the loss allowances as at 31 December 2022 and 2021 were determined as follows for trade receivables and other receivables:

	31 Desember/*December* 2022						
	Lancar/ *Current*	**Sudah jatuh tempo 1-90 hari/ *Overdue 1-90 days***	**Sudah jatuh tempo 91-120 hari/ *Overdue 91-120 days***	**Sudah jatuh tempo 121-365 hari/ *Overdue 121-365 days***	**Sudah jatuh tempo >365 hari/ *Overdue >365 days***	**Jumlah/ *Total***	
Tingkat kerugian yang diharapkan	0.20%	0.83%	3.30%	18.55%	62.57%	20.21%	*Expected loss rate*
Piutang usaha	2,018,809	560,561	70,440	66,616	690,210	3,406,636	*Trade receivables*
Piutang lainnya	118,023	40,979	3,915	10,401	511,308	684,626	*Other receivables*
Pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan	914,203	-	-	-	-	914,203	*Construction contract work in progress - due from customer*
Piutang lainnya - tidak lancar	-	-	-	-	546,964	546,964	*Other receivables - non-current*
Penyisihan kerugian	(6,243)	(4,981)	(2,453)	(14,284)	(1,093,995)	(1,121,956)	*Provision*

	31 Desember/*December* 2021						
	Lancar/ *Current*	**Sudah jatuh tempo 1-90 hari/ *Overdue 1-90 days***	**Sudah jatuh tempo 91-120 hari/ *Overdue 91-120 days***	**Sudah jatuh tempo 121-365 hari/ *Overdue 121-365 days***	**Sudah jatuh tempo >365 hari/ *Overdue >365 days***	**Jumlah/ *Total***	
Tingkat kerugian yang diharapkan	0.14%	1.95%	19.44%	13.32%	70.71%	15.83%	*Expected loss rate*
Piutang usaha	2,533,230	500,675	51,676	186,495	750,970	4,023,046	*Trade receivables*
Piutang lainnya	85,550	405,757	1,753	176,438	171,115	840,613	*Other receivables*
Pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan	1,543,717	-	-	-	-	1,543,717	*Construction contract work in progress - due from customer*
Piutang lainnya - tidak lancar	-	-	-	-	535,848	535,848	*Other receivables - non-current*
Penyisihan kerugian	(5,657)	(17,633)	(10,385)	(48,331)	(1,013,240)	(1,095,246)	*Provision*

Grup menerapkan cadangan kerugian ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa.

Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit bersama dan hari lewat jatuh tempo. Tingkat kerugian ekspektasian didasarkan pada profil pembayaran pelanggan selama 36 bulan sebelum 1 Januari 2022 atau 31 Desember 2022 serta kerugian kredit historis yang dialami, bila ada. Tingkat kerugian historis kemudian disesuaikan untuk mencerminkan informasi terkini dan informasi *forward-looking* mengenai faktor-faktor makroekonomi yang mempengaruhi kemampuan pelanggan untuk melunasi piutang.

The Group applies the lifetime expected loss provision for all trade receivables. To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and the days past due.

To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on shared credit risk characteristics and the days past due. The expected loss rates are based on the profile of payments from customers over a period of 36 months before 1 January 2022 or 31 December 2022 and historic credit losses, if any. The historical loss rates are then adjusted to reflect current and forward-looking information on macroeconomic factors affecting the ability of the customers to settle the receivables.

31. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 Grup telah mencadangkan nilai piutang usaha dan piutang lainnya yang telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai.

Seluruh saldo piutang usaha dan piutang lainnya di atas yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai sebagian besar berasal dari pelanggan pihak ketiga dan pihak berelasi yang sudah ada lebih dari 12 bulan yang tersebar merata atas jumlah pelanggan yang besar. Grup juga melakukan evaluasi kredit berkelanjutan atas kondisi keuangan piutang secara berkala.

Manajemen yakin akan kemampuannya untuk terus mengendalikan dan mempertahankan eksposur yang minimal terhadap risiko kredit mengingat Grup memiliki kebijakan yang jelas dalam pemilihan pelanggan, perjanjian yang mengikat secara hukum untuk penjualan pupuk, non-pupuk, dan jasa lainnya yang telah dilakukan.

Kebijakan umum Grup untuk penjualan pupuk, non-pupuk, dan jasa lainnya untuk pelanggan yang sudah ada dan pelanggan baru adalah sebagai berikut:

(i) memilih pelanggan dengan kondisi keuangan yang kuat dan reputasi yang baik;
(ii) menerima pelanggan baru dan penjualan pupuk, non-pupuk, dan jasa lainnya yang disetujui oleh pihak yang berwenang sesuai dengan kebijakan delegasi kewenangan Grup; dan
(iii) meminta pembayaran di muka untuk penjualan pupuk dan non-pupuk untuk pelanggan lama dan baru.

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko yang muncul dalam situasi dimana posisi arus kas Grup mengindikasikan bahwa arus kas masuk dari pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk memenuhi arus kas keluar untuk pengeluaran jangka pendek. Untuk mengelola risiko likuiditas dan memastikan ketersediaan kas, Grup memonitor dan menjaga tingkat kas dan setara kas yang diperkirakan cukup untuk mendanai kegiatan operasional Grup dan mengurangi pengaruh fluktuasi arus kas. Manajemen Grup juga secara rutin memonitor perkiraan arus kas dan arus kas aktual, termasuk profil jatuh tempo pinjaman, dan secara terus-menerus menilai kondisi pasar keuangan untuk kesempatan memperoleh dana. Selain itu, Grup juga memiliki fasilitas *stand-by loan* yang dapat ditarik sesuai dengan permintaan untuk mendanai kegiatan operasi pada saat diperlukan.

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES *(continued)*

Financial risk factor *(continued)*

b. Credit risk *(continued)*

As at 31 December 2022 and 2021, the Group had provided the provision for the balance of trade receivables and other receivables which were past due and impaired.

The entire balance from trade receivables and other receivables is mostly derived from third party and related party customers which have existed for more than 12 months and are spread over a large number of customers. The Group also performs ongoing credit evaluation on the financial condition of its receivables.

Management is confident in its ability to continue to control and maintain minimal exposure to credit risk, since the Group has clear policies on the selection of customers, legally binding agreements in place for sale of fertiliser and non-fertiliser and other services rendered.

The Group's general policies for sale of fertiliser and non-fertiliser and other services rendered to new and existing customers are as follows:

(i) selecting customers with strong financial conditions and good reputations;
(ii) acceptance of new customers and sale of fertiliser and non-fertiliser and other services rendered being approved by the authorised personnel according to the Group's delegation of authority policy; and
(iii) requesting advance payments for sales of fertiliser and non-fertiliser for recurring and new customers.

c. Liquidity risk

Liquidity risk is defined as a risk that arises in situations where the Group's cash inflow from short-term revenue is not enough to cover the cash outflow of short-term expenditure. To manage its liquidity risk and ensuring cash availability, the Group monitors its level of cash and cash equivalents, and maintains these at a level deemed adequate to finance the Group's operational activities and to mitigate the effect of fluctuations in cash flow. The Group's management also regularly monitors projected and actual cash flow, including loan maturity profiles and continuously assesses the financial markets for opportunities to raise funds. In addition, the Group has a stand-by loan facility which can be withdrawn upon request to fund its operations when needed.

31. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

Tabel di bawah ini menganalisis liabilitas keuangan Grup pada tanggal pelaporan berdasarkan kelompok jatuh temponya dari sisa periode hingga tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel ini adalah nilai arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto termasuk estimasi pembayaran bunga:

***31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES** (continued)*

***c. Liquidity risk** (continued)*

The table below analyses the Group's financial liabilities at the reporting date into relevant maturity grouping based on the remaining period to the contractual maturity date. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows including estimated interest payments:

	2022				
	Kurang dari satu tahun/ *Less than one year*	**1-5 tahun/ *years***	**Di atas 5 tahun/ *Over 5 years***	**Jumlah/ *Total***	
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Utang usaha	9,148,195	-	-	9,148,195	*Trade payables*
Utang lainnya	1,600,290	-	-	1,600,290	*Other payables*
Utang salam	1,186,705	-	-	1,186,705	*Salam payables*
Liabilitas yang masih harus dibayar	8,466,812	-	-	8,466,812	*Accrued liabilities*
Pinjaman bank jangka pendek	6,020,322	-	-	6,020,322	*Short-term bank loans*
Pinjaman bank dan pinjaman lainnya jangka panjang	2,668,514	16,830,621	960,256	20,459,391	*Long-term bank loans and other loans*
Utang obligasi	1,677,718	6,156,748	814,400	8,648,866	*Bonds payable*
Liabilitas sewa	164,608	105,575	-	270,183	*Lease liabilities*
Jumlah	30,933,164	23,092,944	1,774,656	55,800,764	*Total*

	2021				
	Kurang dari satu tahun/ *Less than one year*	**1-5 tahun/ *years***	**Di atas 5 tahun/ *Over 5 years***	**Jumlah/ *Total***	
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Utang usaha	6,101,227	-	-	6,101,227	*Trade payables*
Utang lainnya	1,642,704	-	-	1,642,704	*Other payables*
Utang subsidi kepada Pemerintah Indonesia	95,627	-	-	95,627	*Subsidy payable to the Government of Indonesia*
Liabilitas yang masih harus dibayar	6,985,668	-	-	6,985,668	*Accrued liabilities*
Pinjaman bank jangka pendek	8,182,296	-	-	8,182,296	*Short-term bank loans*
Pinjaman bank dan pinjaman lainnya jangka panjang	4,252,196	15,410,837	660,950	20,323,983	*Long-term bank loans and other loans*
Utang obligasi	2,261,279	7,817,914	814,400	10,893,593	*Bonds payable*
Liabilitas sewa	233,323	29,266	-	262,589	*Lease liabilities*
Jumlah	29,754,320	23,258,017	1,475,350	54,487,687	*Total*

31. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

d. Estimasi nilai wajar

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari liabilitas keuangan yang tidak disajikan Grup pada nilai wajarnya:

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES *(continued)*

d. Fair value estimation

The table below describes the carrying amounts and fair value of financial liabilities that are not presented by the Group at fair value:

	2022		
	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	**Nilai wajar/ *Fair value***	
Utang obligasi	7,266,534	7,376,369	*Bonds payable*
Pinjaman bank jangka panjang dengan tingkat suku bunga tetap	3,600,000	4,412,204	*Long-term bank loans with fixed interest rate*

	2021		
	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	**Nilai wajar/ *Fair value***	
Utang obligasi	9,037,933	9,437,775	*Bonds payable*
Pinjaman bank jangka panjang dengan tingkat suku bunga tetap	1,850,000	2,129,760	*Long-term bank loans with fixed interest rate*

Nilai wajar dari obligasi diestimasi menggunakan harga pasar yang dikutip pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan diklasifikasikan sebagai tingkat 1 dalam hierarki nilai wajar.

The fair value of bonds payable are estimated using the quoted market price as at 31 December 2022 and 2021 and is within level 1 of the fair value hierarchy.

Nilai wajar dari pinjaman bank jangka panjang dengan tingkat suku bunga tetap diestimasi menggunakan *input* tingkat 2 dalam hierarki nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

The fair value of long-term bank loan with fixed interest rate is estimated using the inputs within level 2 of the fair value hierarchy as at 31 December 2022 and 2021.

31. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

e. Manajemen risiko permodalan

Dalam mengelola permodalannya, Grup senantiasa mempertahankan kelangsungan usaha serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Grup secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal, serta mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang.

Grup juga berusaha mempertahankan keseimbangan antara tingkat pinjaman dan posisi ekuitas untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal. Tidak ada perubahan pada pendekatan Grup dalam mengelola permodalannya selama tahun berjalan.

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

e. Capital risk management

In managing the capital, the Group safeguards its ability to continue as a going concern and to maximise benefits to the shareholders and other stakeholders.

The Group actively and regularly reviews and manages its capital to ensure the optimal capital structure and return to the shareholders, taking into consideration the efficiency of capital use based on operating cash flows and capital expenditure and also consideration of future capital needs.

The Group also seeks to maintain a balance between its level of borrowings and equity position in order to ensure the optimal capital structure and return. There were no changes in the Group's approach regarding capital management during the year.

32. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK LAPORAN ARUS KAS

a. Aktivitas investasi nonkas yang signifikan

Informasi pendukung laporan arus kas konsolidasian sehubungan dengan aktivitas non kas adalah sebagai berikut:

32. SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR CASH FLOWS

a. Significant non-cash investing activities

Supplementary information to the consolidated statements of cash flow relating to non-cash activities is as follows:

	2022	2021	
Aktivitas investasi			***Investing activities***
Perolehan aset tetap melalui utang lainnya dan beban akrual	259,944	315,370	*Acquisition of fixed assets through other payables and accrued expenses*
Perolehan aset tetap melalui uang muka	236,247	152,090	*Acquisition of fixed assets through advances*
Perolehan aset hak-guna melalui liabilitas sewa	233,030	154,252	*Acquisition of right-of-use assets through lease liabilities*
Perolehan aset tetap melalui kapitalisasi biaya pinjaman	48,969	40,494	*Acquisition of fixed assets through capitalisation of borrowing cost*
Perolehan aset tetap melalui reklasifikasi persediaan	21,137	63,439	*Acquisition of fixed assets through reclassification of inventories*
Penambahan investasi pada ventura bersama melalui konversi pinjaman	-	10,400	*Addition of investment in joint venture through loan conversion*
Aktivitas pendanaan			***Financing activities***
Konversi dari utang usaha menjadi pinjaman bank	1,913,107	326,750	*Conversion from trade payables to bank loans*

32. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)

b. Rekonsiliasi utang bersih

Transaksi di bawah ini menunjukkan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021, sebagai berikut:

***32. SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR CASH FLOWS** (continued)*

b. Net debt reconciliation

Table below presents a reconciliation of liabilities arising from financing activities for the years ended 31 December 2022 and 2021, as follows:

	Liabilitas sewa/ *Lease liabilities*	**Pinjaman/ *Borrowings***	**Jumlah/ *Total***	
Saldo pada 1 Januari 2021	173,717	36,684,447	36,858,164	*Balance as at 1 January 2021*
Arus kas masuk	-	20,114,688	20,114,688	*Cash in flows*
Arus kas keluar	(213,532)	(25,754,251)	(25,967,783)	*Cash out flows*
Akuisisi - liabilitas sewa	154,252	-	154,252	*Acquisition - lease liabilities*
Konversi dari utang usaha	-	326,750	326,750	*Conversion from trade payables*
Transaksi non kas lainnya	29,985	(52,646)	(22,661)	*Other non-cash transactions*
Saldo pada 31 Desember 2021	144,422	31,318,988	31,463,410	*Balance as at 31 December 2021*
Arus kas masuk	-	13,793,904	13,793,904	*Cash in flows*
Arus kas keluar	(248,542)	(15,159,979)	(15,408,521)	*Cash out flows*
Akuisisi - liabilitas sewa	233,030	-	233,030	*Acquisition - lease liabilities*
Konversi dari utang usaha	-	1,913,107	1,913,107	*Conversion from trade payables*
Transaksi non kas lainnya	10,245	460,281	470,526	*Other non-cash transactions*
Saldo pada 31 Desember 2022	139,155	32,326,301	32,465,456	*Balance as at 31 December 2022*

33. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Aset dan liabilitas moneter Grup dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

33. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

The Group's monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are as follows:

		2022		2021		
		Mata uang/ *Currency* (000)	Setara Rp/ *Rp equivalent*	Mata uang/ *Currency* (000)	Setara Rp/ *Rp equivalent*	
Aset keuangan						***Financial assets***
Kas dan setara kas	USD	721,167	11,344,679	245,184	3,498,531	*Cash and cash equivalents*
	Lainnya/*Others*		10,916		10,731	
Piutang usaha	USD	26,897	423,113	51,513	735,036	*Trade receivables*
	Lainnya/*Others*		2,371		-	
Pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan	USD	34,065	535,875	71,357	1,018,186	*Construction contract work in progress - from customers*
Jumlah aset			12,316,954		5,262,484	*Total assets*
Liabilitas keuangan						***Financial liabilities***
Utang usaha	USD	395,809	6,226,474	115,843	1,652,965	*Trade payables*
	EUR	465	7,772	1,754	28,281	
	Lainnya/*Others*		3,892		16,013	
Liabilitas yang masih harus dibayar	USD	186,459	2,933,191	235,870	3,365,629	*Accrued liabilities*
	EUR	885	14,794	3,122	50,348	
	Lainnya/*Others*		4,034		7	
Pinjaman bank jangka pendek	USD	158,184	2,488,396	169,000	2,411,461	*Short-term bank loans*
Pinjaman bank jangka panjang	USD	122,193	1,922,216	139,247	1,986,917	*Long-term bank loans*
Jumlah liabilitas			13,600,769		9,511,621	*Total liabilities*
Liabilitas moneter - bersih			(1,283,815)		(4,249,137)	*Monetary liabilities - net*

Aset dan liabilitas moneter di atas dijabarkan menggunakan kurs penutupan Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Apabila aset dan liabilitas dalam mata uang selain Rp pada tanggal 31 Desember 2022 dijabarkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian, liabilitas moneter bersih akan naik sekitar Rp23.282.

Monetary assets and liabilities mentioned above are translated using the Bank Indonesia closing rate as at 31 December 2022 and 2021.

If assets and liabilities in currencies other than Rp as at 31 December 2022 are translated using the exchange rate as at the issuance date of the consolidated financial statements, the total net monetary liabilities will increase by approximately Rp23,282.

34. INFORMASI SEGMEN USAHA

Untuk kepentingan pelaporan manajemen, Grup digolongkan menjadi unit usaha berdasarkan produk dan jasa dan memiliki tiga segmen operasi yang dilaporkan sebagai berikut:

a. Pupuk dan amoniak

   Segmen pupuk dan amoniak melakukan kegiatan produksi, perdagangan, dan jasa di bidang perpupukan.

b. Jasa konstruksi

   Segmen jasa konstruksi melakukan kegiatan usaha dalam *engineering*, *procurement,* dan *construction* ("EPC").

34. SEGMENT INFORMATION

For management reporting purposes, the Group is organised into business units based on their products and services and has three reportable operating segments as follows:

a. Fertiliser and ammonia

   The fertilizer and ammonia segment involves in production, trading and services in fertiliser.

b. Construction services

   The construction services segment involves in engineering, procurement and construction ("EPC").

34. INFORMASI SEGMEN USAHA (lanjutan)

Untuk kepentingan pelaporan manajemen, Grup digolongkan menjadi unit usaha berdasarkan produk dan jasa dan memiliki tiga segmen operasi yang dilaporkan sebagai berikut: (lanjutan)

c. Lainnya

Segmen lainnya melakukan kegiatan usaha dalam bidang angkutan, ekspedisi, pergudangan, dan kegiatan terkait lainnya.

Manajemen memantau hasil operasi dari unit usahanya secara terpisah guna keperluan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan laba segmen dan diukur secara konsisten dengan laba atau rugi operasi pada laporan keuangan konsolidasian.

***34. SEGMENT INFORMATION** (continued)*

For management reporting purposes, the Group is organised into business units based on their products and services and has three reportable operating segments as follows: (continued)

c. Other

The other segment involves in transportation business activities, expedition, storage and other related activties.

Management monitors the operating results of its business units separately for the purpose of decision-making about resource allocation and performance assessment. Segment performance is evaluated based on segment income and is measured consistently with operating profit or loss in the consolidated financial statements.

	31 Desember/*December* 2022					
	Sebelum eliminasi/*Before elimination*					
	Pupuk dan amoniak/ *Fertiliser and ammonia*	Jasa konstruksi/ *Construction sevices*	Lainnya/ *Other*	Eliminasi/ *Elimination*	Jumlah/ *Total*	
PENDAPATAN						***REVENUES***
Pendapatan eksternal	101,934,797	2,372,505	3,122,929	(3,570,738)	103,859,493	*External revenues*
Pendapatan antar segmen	1,508,122	377,265	9,436,270	(11,321,657)	-	*Inter-segment revenues*
Pendapatan bersih	103,442,919	2,749,770	12,559,199	(14,892,395)	103,859,493	*Net revenues*
LABA USAHA						***OPERATING INCOME***
Beban pokok pendapatan	(67,731,757)	(3,228,441)	(4,427,686)	5,099,712	(70,288,172)	*Cost of revenues*
Beban penjualan	(2,204,364)	(2,206)	(19,311)	1,042,588	(1,183,293)	*Selling expenses*
Beban umum dan administrasi	(2,978,813)	(380,656)	(2,270,454)	(326,505)	(5,956,428)	*General and administrative expenses*
Pendapatan lainnya - bersih	248,005	225,004	60,593	159,304	692,906	*Other income - net*
Pendapatan keuangan	192,774	7,711	710,871	(639,878)	271,478	*Finance income*
Beban keuangan	(1,626,689)	(515,595)	(783,220)	682,440	(2,243,064)	*Finance costs*
Bagian atas rugi bersih entitas asosiasi dan ventura bersama	178,121	(230,430)	-	(13,866)	(66,175)	*Share of net loss of associates and joint ventures*
Laba sebelum pajak	29,520,196	(1,374,843)	5,829,992	(8,888,600)	25,086,745	*Profit before income tax*
Beban pajak penghasilan	(6,456,129)	(54,416)	(65,608)	-	(6,576,153)	*Income tax expenses*
Laba tahun berjalan	23,064,067	(1,429,259)	5,764,384	(8,888,600)	18,510,592	*Profit for the year*
LAPORAN POSISI KEUANGAN						***STATEMENT OF FINANCIAL POSITION***
Aset segmen	140,725,243	5,862,695	48,420,656	(36,288,087)	158,720,507	*Segment assets*
Liabilitas segmen	53,906,755	12,844,342	10,708,506	(9,899,396)	67,560,207	*Segment liabilities*
Pengeluaran modal	4,150,366	16,835	1,089,874	(653,730)	4,603,345	*Capital expenditures*

34. INFORMASI SEGMEN USAHA (lanjutan) / *34. SEGMENT INFORMATION (continued)*

	31 Desember/*December* 2021					
	Sebelum eliminasi/*Before elimination*					
	Pupuk dan amoniak/ *Fertiliser and ammonia*	Jasa konstruksi/ *Construction sevices*	Lainnya/ *Other*	Eliminasi/ *Elimination*	Jumlah/ *Total*	
PENDAPATAN						***REVENUES***
Pendapatan eksternal	75,815,808	3,296,040	1,970,750	(2,479,462)	78,603,136	*External revenues*
Pendapatan antar segmen	1,278,643	14,699	5,363,168	(6,656,510)	-	*Inter-segment revenues*
Pendapatan bersih	77,094,451	3,310,739	7,333,918	(9,135,972)	78,603,136	*Net revenues*
LABA USAHA						***OPERATING INCOME***
Beban pokok pendapatan	(58,241,456)	(6,659,990)	(2,687,499)	4,119,156	(63,469,789)	*Cost of revenues*
Beban penjualan	(2,046,532)	(3,165)	(10,860)	780,052	(1,280,505)	*Selling expenses*
Beban umum dan administrasi	(2,486,927)	(455,803)	(1,155,169)	74,775	(4,023,124)	*General and administrative expenses*
Pendapatan lainnya - bersih	97,079	54,050	35,064	(36,013)	150,180	*Other income - net*
Pendapatan keuangan	117,650	3,376	719,202	(613,885)	226,343	*Finance income*
Beban keuangan	(1,733,295)	(174,040)	(698,190)	558,031	(2,047,494)	*Finance costs*
Bagian atas laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama	83,447	225,078	-	(12,507)	296,018	*Share of net profit of associates and joint ventures*
Laba sebelum pajak	12,884,417	(3,699,755)	3,536,466	(4,266,363)	8,454,765	*Profit before income tax*
Beban pajak penghasilan	(3,222,486)	(12,373)	(85,231)	-	(3,320,090)	*Income tax expenses*
Laba tahun berjalan	9,661,931	(3,712,128)	3,451,235	(4,266,363)	5,134,675	*Profit for the year*
LAPORAN POSISI KEUANGAN						***STATEMENT OF FINANCIAL POSITION***
Aset segmen	115,537,608	7,785,388	45,302,140	(40,161,964)	128,463,172	*Segment assets*
Liabilitas segmen	45,413,830	13,415,576	11,549,016	(13,855,226)	56,523,196	*Segment liabilities*
Pengeluaran modal	3,206,631	13,609	327,571	(280,281)	3,267,530	*Capital expenditures*

35. PERJANJIAN SIGNIFIKAN DAN PERIKATAN / *35. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS*

a. Pengadaan gas bumi / *a. Supply of natural gas*

Grup menandatangani perjanjian pengadaan gas bumi untuk produksi pupuk dengan pihak berelasi dan pihak ketiga dengan kapasitas volume gas sebesar 39 MMSCFD hingga 3.275 MMSCFD. Perjanjian pengadaan gas bumi tersebut berlaku efektif dalam kurun waktu hingga 31 Oktober 2030.

The Group signed supply of natural gas agreements for fertiliser production with related parties and third parties with gas volume capacity of 39 MMSCFD up to 3,275 MMSCFD. These natural gas supply agreements are valid up to 31 October 2030.

Pada tanggal 30 Juli 2021, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri ESDM No. 134.K/HK.02/MEM.M/2021 ("KEP134") tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri yang menetapkan mengenai pengguna dan harga gas bumi tertentu untuk beberapa pengguna, termasuk didalamnya Grup.

On 30 July 2021, the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia issued a decree No. 134.K/HK.02/MEM.M/2021 ("KEP134") regarding Users and Prices of Certain Natural Gas in the Industrial Sector which stipulates certain users and prices of natural gas for several users, including the Group.

35. PERJANJIAN SIGNIFIKAN DAN PERIKATAN (lanjutan)

a. Pengadaan gas bumi (lanjutan)

Harga dan volume gas bumi tertentu yang telah ditetapkan untuk Grup melalui perjanjian sebagai berikut:

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS *(continued)*

a. Supply of natural gas *(continued)*

The prices and volumes of certain natural gas that have been set for the Group through agreements as follows:

Entitas/ ***Entity***	**Pemasok/** ***Supplier***	**Periode kontrak/** ***Contract period***	***Volume***
PSP	PT Pertamina EP	20 Mei/May 2022 - 31 Desember/*December* 2023	120 BBTUD
		30 Juli/*July* 2021 - 31 Desember/*December* 2023	100 BBTUD
	PT Tropik Energi Pandan	1 September 2022 - 31 Desember/*December* 2027	10 BBTUD
		30 Juli/*July* 2021 - 31 Desember/*December* 2027	8 BBTUD, 9 BBTUD (2022 - 2024), 10 BBTUD (2025 - 2027)
	ConocoPhilips (Grissik) Ltd	20 Juli/*July* 2021 - 31 Desember/*December* 2023	73 BBTUD
		30 Juli/*July* 2021 - 31 Desember/*December* 2027	73 BBTUD
	PT Medco E&P Indonesia	1 Agustus/*August* 2021 - 27 November 2033	73 BBTUD
	PT Medco E&P Indonesia dan/*and* PT Medco E&P Lematang	30 Desember/*December* 2022 - 27 November 2033	7 BBTUD (2023, 2025, 2027) 9 BBTUD (2024), 5 BBTUD (2026), 17.63 BBTUD (2028), 14 BBTUD (2029), 13.36 BBTUD (2030 - 2031), 12.05 BBTUD (2032), 9.09 BBTUD (2033)
	PT Bukit AsamTbk	1 Januari/*January* 2023 - 31 Desember/*December* 2025	1,500,000 ton utuk 3 tahun dengan deviasi 10%/*tons for 3 years with 10% deviation*
PKG	Kangean Energy Indonesia Ltd	1 Januari/*January* 2022 - 31 Desember/*December 2026*	1.69 MMSCFD
	Husky CNOOC Madura Limited	11 November 2022 - 11 November 2032	85 MMSCFD
	Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore	1 Februari/*February* 2018 - 31 Desember/*December* 2023	32.43 MMSCFD
	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	18 November 2022 - 31 Desember/*December* 2024	15 MMSCFD
PIM	PT Pertagas Niaga	30 Juli/*July* 2020 - 31 Desember/*December* 2033	54 BBTUD
PKC	Pertamina Hulu Energi North West Java Offshore	15 Maret/*March* 2021 - 31 Desember/*December* 2030	37 BBTUD
	PT Pertamina EP	30 Juli/*July* 2021 - 30 Juli/*July* 2024	39 BBTUD
	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	21 Desember/*December* 2021 - 31 Desember/*December* 2024	23 BBTUD

35. PERJANJIAN SIGNIFIKAN DAN PERIKATAN (lanjutan)

b. Pengadaan gas bumi PKT dan provisi atas kurang bayar pengadaan gas bumi

PKT melakukan Perjanjian Jual Beli Gas ("PJBG") untuk pembelian gas bumi yang digunakan untuk operasi pabrik pupuk dengan rincian sebagai berikut:

Periode berlaku/ *Validity period*	Pabrik/ *Plant*	Volume	Pemasok/ *Supplier*
1 Juli/*July* 2003 - 31 Desember/*December* 2022	Kaltim-4	51 BBTUD	PT Pertamina (Persero)
1 Januari/*January* 2012 - 31 Desember/*December* 2021	Kaltim-1 atau/*or* 5*)	88 BBTUD	Pearl Oil (Sebuku) Ltd
1 Januari/*January* 2020 31 Desember/*December* 2021	Kaltim-2, Kaltim-3 dan/*and* Kaltim-1A	200.53 BBTUD	PT Pertamina (Persero)

*) Untuk tahun 2022, penyaluran gas bumi untuk Kaltim-5 ditagih oleh Pertamina/*For 2022, the distribution of natural gas for Kaltim-5 was billed by Pertamina*

Perpanjangan PJBG untuk pabrik Kaltim-2, 3 dan 1A telah ditandatangani per 2 Desember 2020 dan berlaku untuk periode 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2021.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, perpanjangan PJBG untuk pabrik Kaltim 1 atau 5, 2, 3 dan 1A masih dalam proses.

Pada tanggal 13 April 2020, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("ESDM") No. 89K/10/MEM/2020 tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri dimana harga gas Pabrik Kaltim-5 mengalami penurunan menjadi sebesar USD5,9/MMBTU.

Pada tanggal 30 Juli 2021, Menteri ESDM menerbitkan Keputusan Menteri ESDM No. 134.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri dimana harga gas Pabrik Kaltim 2, 3, 1A, dan 4 mengalami penurunan menjadi sebesar USD5,88/MMBTU ("KEP134"). KEP134 ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2021, yang secara umum menetapkan tarif harga gas bumi lebih rendah dari tarif harga gas bumi menurut PJBG antara pemasok gas dan PKT, maka terdapat perbedaan pendapat antara PKT dan pemasok gas bumi terkait tarif harga gas bumi.

***35. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS** (continued)*

b. Procurement of PKT's natural gas and provision for underpayment of natural gas procurement

PKT entered into Gas Sales Purchase Agreement ("GSPA") for the purchase of natural gas to be used in the operation of its fertiliser plants, with details as follows:

The extension of the GSPA for Kaltim-2, 3 and 1A were signed on 2 December 2020 and were effective for the period from 1 January 2020 until 31 December 2021.

Up to the issuance date of these consolidated financial statements, the extension of the GSPA for Kaltim 1 or 5, 2, 3 and 1A are still in process.

On 13 April 2020, the Ministry of Energy and Mineral Resources ("MOEMR") issued decree No. 89K/10/MEM/2020 regarding the Use and the Price of Natural Gas in the Industry Sector in which the price for Kaltim-5 decreased to USD5.9/MMBTU.

On 30 July 2021, the MOEMR issued a decree No. 134.K/HK.02/MEM.M/2021 regarding the Useand the Price of Natural Gas in the Industry Sector in which the price for Kaltim 2, 3, 1A and 4 decreased to USD5.88/MMBTU ("KEP134"). KEP134 is effective from 30 July 2021. As a result of the enactment of the MOEMR decree dated 30 July 2021, which generally set natural gas price rates lower than the natural gas price rates according to the GSPA between gas suppliers and PKT, there are differences of opinion between PKT and natural gas suppliers regarding natural gas price rates.

35. PERJANJIAN SIGNIFIKAN DAN PERIKATAN (lanjutan)

b. Pengadaan gas bumi PKT dan provisi atas kurang bayar pengadaan gas bumi (lanjutan)

Untuk pengadaan gas bumi sejak 30 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, PT Pertamina (Persero) sebelumnya menagihkan gas bumi menggunakan tarif harga gas bumi berdasarkan PJBG yang belum disesuaikan dengan KEP134. Akan tetapi, PKT hanya membayar penyaluran gas bumi tersebut kepada pemasok menggunakan nilai tarif harga gas bumi berdasarkan KEP134. Selama masa transisi KEP134 untuk mencapai kesepakatan *Letter of Agreement* ("LOA") antara PKT dan PT Pertamina (Persero), PKT membayar tagihan di bulan Agustus 2021 tersebut sesuai dengan tagihan PT Pertamina (Persero). Atas selisih harga pembelian gas tersebut, PKT mencatat kelebihan pembayaran sebesar Rp280.939 sebagai "uang muka kepada pemasok" di bulan Agustus 2021. Atas uang muka tersebut, PKT telah menguranginya dengan sebagian tagihan dari PT Pertamina (Persero) pada tahun 2022. Di tahun 2022, PKT menerima surat pemberitahuan dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("SKK Migas") yang menyampaikan surat dari Menteri ESDM perihal penyesuaian harga gas bumi untuk pabrik Kaltim 5. Berdasarkan surat tersebut, harga gas bumi yang disalurkan ke pabrik Kaltim 5 untuk periode Juli hingga Desember 2021 telah naik dari sebelumnya USD5,9/MMBTU menjadi USD6,3/MMBTU. Oleh karena itu, provisi atas kurang bayar pembelian gas bumi pabrik Kaltim-5 sebesar Rp69.516 telah dibukukan di tahun 2021 dan telah dibayarkan pada tahun 2022.

Di tahun 2022, PKT membukukan tambahan provisi atas kurang bayar pengadaan gas bumi untuk tahun 2021 sebesar Rp357.774. Pembukuan provisi ini disebabkan PKT menerima surat pemberitahuan dari SKK Migas, yang menyampaikan surat dari Kementerian ESDM dimana tarif gas bumi untuk sebagian wilayah kerja ("WK") gas yang menyalurkan gas bumi ke pabrik Kaltim 2, 3, 1A dan 4 diberlakukan kembali menggunakan tarif harga PJBG, bukan tarik KEP134.

Untuk pengadaan harga gas bumi tahun 2022, pemasok gas menagih pengadaan gas bumi sesuai dengan KEP134 yang disebabkan PJBG pabrik Kaltim 2, 3, 1A dan 5 yang telah berakhir pada 31 Desember 2021 dan belum diperpanjang oleh kedua pihak.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS *(continued)*

b. Procurement of PKT's natural gas and provision for underpayment of natural gas procurement *(continued)*

For the procurement of natural gas from 30 July 2021 to 31 December 2021, PT Pertamina (Persero) previously billed natural gas using natural gas price rates based on GSPA which had not been adjusted to KEP134. However, PKT only paid for the natural gas to suppliers using natural gas price rates based on KEP134. During the KEP134 transition period to reach a Letter of Agreement ("LOA") between PKT and PT Pertamina (Persero), PKT paid the bill of August 2021 in accordance with the invoice from PT Pertamina (Persero). For the difference in the gas purchase price, PKT recorded an overpayment of Rp280,939 as an "advance to supplier" in August 2021. PKT has settled its advance by partially offsetting the advance with the invoice from PT Pertamina (Persero) in 2022. In 2022, PKT received a notification letter from Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities ("SKK Migas"), which conveyed a letter from the MOEMR regarding adjustments to natural gas prices for Kaltim-5. Based on the letter, the price of natural gas supplied to Kaltim 5 for period July to December 2021 has increased from the previous rate of USD5.9/MMBTU to USD6.3/MMBTU. Therefore, the provision of underpayment for the purchase of natural gas from Kaltim 5 amounting to Rp69,516 had been recorded in 2021 and had been paid in 2022.

In 2022, PKT recorded an additional provision for underpayment of natural gas for 2021 of Rp357,774. This provision is recognised due to PKT receiving a notification letter from the SKK Migas, which conveyed a letter from the MOEMR in which the natural gas rates for some gas working areas ("WK") that distributed natural gas to Kaltim 2, 3, 1A and 4 were re-enforced to use the price rates in accordance with the GSPA instead of KEP134.

For the procurement of natural gas in 2022, gas suppliers billed the natural gas procurement in accordance with KEP134 given the GSPA for Kaltim 2, 3, 1A and 5 had been ended on 31 December 2021 and has not been extended by both parties.

35. PERJANJIAN SIGNIFIKAN DAN PERIKATAN (lanjutan)

b. Pengadaan gas bumi PKT dan provisi atas kurang bayar pengadaan gas bumi (lanjutan)

Pada tanggal 24 Februari 2023, PKT menerima surat pemberitahuan dari SKK Migas mengenai harga gas bumi PKT untuk tahun 2022 dan seterusnya dimana SKK Migas bersama produsen gas Kalimatan Timur dan PT Pertamina (Persero) sedang melakukan evaluasi guna mendapatkan harga gas bumi baru untuk menggantikan tarif berdasarkan KEP134 dikarenakan tidak mencukupinya penerimaan bagian negara di WK tertentu untuk melaksanakan skema *Kept-Whole* bagian kontraktor untuk tahun 2022 ke depan. Namun, karena PKT belum menerima pemberitahuan lebih lanjut dari SKK Migas maupun Kementerian ESDM terkait dengan harga gas bumi atas pengadaan gas bumi Kaltim 2, 3, 1A, 4 dan 5 tahun 2022, PKT melakukan estimasi, termasuk menggunakan beberapa asumsi, atas provisi kurang bayar tarif gas bumi untuk penyaluran gas bumi tahun 2022. Berdasarkan estimasi, PKT membukukan provisi atas kurang bayar pengadaan gas bumi tahun 2022 sebesar Rp1.440.701 di tahun 2022. PKT menggunakan beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Formula untuk penentuan harga gas bumi mengikuti formula gas bumi PJBG tahun 2021 untuk WK-WK yang diminta penyesuaian harga oleh regulator; dan
2. Penentuan WK-WK yang terdampak penyesuaian harga gas bumi mengikuti tahun WK gas 2021 (dimana ada kemungkinan perbedaan WK-WK yang terdampak ketika surat penetapan penyesuaian harga gas bumi diterima dari Pemerintah dikemudian hari).

Estimasi kurang bayar pengadaan gas bumi pabrik Kaltim 2, 3, 1A, 4 dan 5 yang telah dibukukan PKT pada tanggal 31 Desember 2022 dapat berbeda ketika PKT mendapatkan keputusan dari SKK Migas atau Kementerian ESDM atas penyesuaian harga gas bumi untuk tahun 2022.

c. Perjanjian kontrak konstruksi

Grup memiliki beberapa kontrak konstruksi dengan pihak berelasi dan pihak ketiga berupa EPC yang terdiri dari pembangunan pipa transmisi, pembangkit listrik, dan kilang minyak dengan rentang waktu penyelesaian proyek dari 1 tahun hingga 3 tahun dengan kisaran harga kontrak antara Rp55.000 sampai dengan Rp15.152.232.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS *(continued)*

b. Procurement of PKT's natural gas and provision for underpayment of natural gas procurement *(continued)*

On 24 February 2023, PKT received a notification letter from the SKK Migas regarding the natural gas price of PKT for year 2022 onwards in which SKK Migas together with the gas producers in East Kalimantan and PT Pertamina (Persero) are evaluating the new natural gas price to replace the rates based on the KEP134 due to insufficient state revenues in certain WK to implement the Kept-Whole scheme of contractors' share for 2022 onwards. However, since PKT has not yet received any further notification from SKK Migas or the MOEMR regarding the natural gas price for Kaltim 2, 3, 1A, 4 and 5 gas procurement in 2022, PKT has estimated, using several assumptions, the provision for underpayment of natural gas rates for natural gas distribution in 2022. Based on the estimation, PKT recorded a provision for the underpayment for natural gas procurement in 2022 amounting to Rp1,440,701 in 2022. PKT uses the following assumptions:

1. *Natural gas prices formula follow natural gas prices formula based on the 2021 GSPA for WK that are requested to be adjusted by regulators; and*
2. *Determination of WK that are affected by the natural gas price adjustment following the 2021 gas WK (where there may be differences in the WK that are affected when the letter of determination of the natural gas price adjustment is received from Government at a later date).*

Estimation of underpayment for purchase natural gas for Kaltim 2, 3, 1A, 4 and 5 that is recorded as at 31 December 2022 may differ when PKT obtains the decision from SKK Migas or the Ministry of ESDM for the adjustment of natural gas prices for 2022.

c. Construction contract agreements

The Group has several construction contracts with related parties and third parties, namely EPC consisting of construction of transmission pipelines, power plants and refineries with contract period between 1 up to 3 years and contract price ranging between Rp55,000 to Rp15,152,232.

35. PERJANJIAN SIGNIFIKAN DAN PERIKATAN (lanjutan)

d. Sewa

Transaksi sewa sebagai penyewa

Grup menandatangani beberapa perjanjian sewa yang sebagian besar berkaitan dengan sewa tanah, bangunan dan prasarana, pabrik dan peralatan, kendaraan dan alat berat dan kapal. Perjanjian sewa biasanya memiliki periode tetap dari 1 sampai dengan 15 tahun, tetapi dapat memiliki opsi perpanjangan seperti yang dijelaskan pada Catatan 3. Ketentuan sewa dinegosiasikan secara individu dan mengandung syarat dan ketentuan yang berbeda. Perjanjian sewa tidak memberikan persyaratan apapun, tetapi aset yang disewakan tidak dapat digunakan sebagai jaminan atas pinjaman.

Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 menyajikan saldo-saldo berikut berkaitan dengan sewa:

	2022	2021	
Aset hak-guna:			*Right-of-use assets:*
Tanah	561,483	433,231	*Land*
Bangunan dan prasarana	154,434	252,201	*Buildings and infrastructure*
Kendaraan dan alat berat	245,947	254,450	*Vehicles and heavy equipments*
	961,864	939,882	
Liabilitas sewa:			*Lease liabilities:*
Lancar	63,590	74,740	*Current*
Tidak lancar	75,565	69,682	*Non-current*
	139,155	144,422	

Penambahan aset hak-guna selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp233.030 (2021: Rp196.959).

Laporan laba rugi konsolidasian menyajikan saldo berikut berkaitan dengan sewa:

	2022	2021	
Penyusutan aset hak-guna:			*Depreciation of right-of-use assets:*
Tanah	27,049	30,974	*Land*
Bangunan dan prasarana	117,704	125,669	*Buildings and infrastructure*
Kendaraan dan alat berat	68,922	103,084	*Vehicles and heavy equipments*
	213,675	259,727	
Beban bunga	17,921	12,181	*Interest expense*
Beban berkaitan dengan sewa aset bernilai rendah	14,215	14,573	*Expense related to low-value assets*
Beban berkaitan dengan sewa jangka pendek	177,162	94,572	*Expense related to short-term leases*
	209,298	121,326	

***35. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS** (continued)*

d. Lease

Lease transactions as a lessee

The Group entered into some lease agreements which are mainly related to rent of land, building and infrastructure, plants and equipment, vehicles and heavy equipment and ships. Rental agreements are typically made for fixed periods of 1 to 15 years but may have extension options as described in Note 3. Lease terms are negotiated on an individual basis and contain a wide range of different terms and conditions. The lease agreements do not impose any convenants, but leased assets may not be used as collateral for borrowing purposes.

The consolidated statements of financial position as at 31 December 2022 and 2021 shows the following amounts related to leases:

Additions to the right-of-use assets during the year ended 31 December 2022 amounted to Rp233,030 (2021: Rp196,959).

The consolidated statements of profit or loss shows the following amounts related to leases:

35. PERJANJIAN SIGNIFIKAN DAN PERIKATAN (lanjutan)

d. Sewa (lanjutan)

Transaksi sewa sebagai penyewa (lanjutan)

Jumlah pengeluaran kas untuk sewa selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp248.542 (2021: Rp213.532).

Jumlah komitmen sewa untuk sewa jangka pendek yang dicatat sebagai beban dengan dasar garis lurus pada tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp213.899 (2021: Rp222.645).

***35. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS** (continued)*

***d. Lease** (continued)*

***Lease transactions as a lessee** (continued)*

The total cash outflow for leases for the year ended 31 December 2022 was Rp248,542 (2021: Rp213,532).

Total lease commitments from short-term leases accounted and recognised as expenses on a straight-line basis as at 31 December 2022 was Rp213,899 (2021: Rp222,645).

36. KONTINJENSI

Grup memiliki liabilitas kontinjensi sehubungan dengan tuntutan hukum yang timbul dari usaha normal. Grup tidak mengharapkan liabilitas material akan timbul dari liabilitas kontinjensi.

36. CONTINGENCIES

The Group has contingent liabilities in respect of legal claims arising in the ordinary course of business. It is not anticipated that any material liabilities will arise from the contingent liabilities.

37. UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Pada 5 Oktober 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ("DPR") menyetujui Undang-undang Cipta Kerja ("UU Cipta Kerja") - yang biasa dikenal dengan "Undang-Undang Omnibus", yang kemudian ditandatangani Presiden pada 2 November 2020. Undang-Undang Omnibus mengamandemen lebih dari 75 undang-undang, dan mengharuskan pemerintah pusat untuk menerbitkan lebih dari 30 peraturan pemerintah dan peraturan pelaksana lainnya yang harus dikeluarkan dalam waktu tiga bulan setelah diundangkan Undang-Undang Omnibus. Undang-Undang Omnibus berfokus pada peningkatan kemudahan berusaha di Indonesia (diantaranya, menyederhanakan proses perizinan, menyederhanakan proses pengadaan tanah, memformalkan zona ekonomi, memberikan lebih banyak insentif untuk zona perdagangan bebas, dan mengubah undang-undang ketenagakerjaan).

Pada bulan Februari 2021, Pemerintah secara resmi menerbitkan berbagai peraturan pelaksana atas Undang-Undang Omnibus.

Pada November 2021, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Putusan ini mewajibkan Pemerintah untuk memperbaiki sejumlah aspek formal mengenai penerbitan UU Cipta Kerja dalam jangka waktu dua tahun sejak putusan dibacakan. Kegagalan untuk memperbaiki UU Cipta Kerja akan menyebabkan UU Cipta Kerja inkonstitusional secara permanen dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pada tanggal 30 Desember 2022, Pemerintah mengundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 ("PerppuCK") tentang Cipta Kerja.

37. JOB CREATION LAW

On October 5, 2020, the Indonesian House of Representatives ("DPR") approved the job creation law - commonly known as the "Omnibus Law", which was later signed by the President on 2 November 2020. The Omnibus Law amended more than 75 current laws and will require the central government to issue more than 30 government regulations and other implementing regulations which must be issued within three months of its enactment. The Omnibus Law focuses on increasing the ease of doing business in Indonesia (e.g., simplifying licensing processes, simplifying land acquisition processes, formalising economic zones, providing more incentives for free trade zones, and amending the labor law).

In February 2021, the Government officially enacted various implementing regulations of the Omnibus Law.

In November 2021, the Constitutional Court declared that the Omnibus Law is conditionally unconstitutional. The Decision requires the Government to fix certain formal aspects regarding the issuance of the Omnibus Law within two years since the decision was read. Failure to fix the Omnibus Law will cause the Omnibus Law to be permanently deemed unconstitutional and lose all of its legal binding power.

On 30 December 2022, the Government enacted a Government Regulation in lieu of Law No. 2 of 2022 ("PerppuCK") regarding Job Creation.

37. UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (lanjutan)

Ketetapan ini untuk melaksanakan amanat revisi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta untuk mengantisipasi berbagai tantangan ekonomi dan geopolitik yang ditimbulkan oleh dinamika global saat ini. Penyesuaian dalam PerppuCK sebagian besar terkait dengan penggunaan istilah dan pengaturan ulang kalimat serta beberapa perubahan yang cukup substansial, seperti:

1. Penghapusan pasal acuan dari ketentuan pengenaan sanksi administratif terkait kewajiban pengelolaan limbah B3;
2. Perubahan definisi "persetujuan bangunan"; dan
3. Perubahan substansial terkait ketentuan jasa tenaga kerja *outsourcing* dan upah minimum.

***37. JOB CREATION LAW** (continued)*

This Decree is to carry out the mandate of the revision of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation and to anticipate various economic and geopolitical challenges posed by the current global dynamics. Adjustments in the PerppuCK are mostly related to the use of terms and rearrangement of sentences as well as some quite substantial changes, such as:

1. *The removal of references articles from provisions for imposing administrative sanctions related to the obligation to manage B3 waste;*
2. *Changes to the definition of "building approval"; and*
3. *Substantial changes regarding outsourcing and minimum wage provisions.*

38. KELANGSUNGAN USAHA REKIND

Pada tanggal 31 Desember 2022, Rekind memiliki modal kerja negatif dan defisiensi modal masing-masing sebesar Rp6.579.793 dan Rp6.865.926, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, Rekind mencatat rugi tahun berjalan sebesar Rp1.314.761 dan arus kas bersih negatif dari aktivitas operasi sebesar Rp143.314. Rekind juga melanggar beberapa ketentuan perjanjian pinjaman dengan beberapa bank, terkait dengan batasan rasio keuangan yang dipersyaratkan.

Kondisi-kondisi tersebut mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan signifikan atas kemampuan Rekind untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

Rekind telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi kondisi bisnis dan keuangannya sebagai berikut:

- Membuat rencana untuk menjual sebagian besar investasi pada entitas anak;
- Memaksimumkan usaha untuk memperoleh persetujuan perpanjangan waktu kontrak dari pemilik proyek sehingga kewajiban Rekind untuk membayar *delay liquidated damage* dihapuskan;
- Memaksimumkan usaha untuk memperoleh persetujuan *Change Order* ("CO") untuk semua proyek yang berjalan, terutama untuk proyek Jambaran Tiung Biru ("JTB");
- Memaksimumkan usaha penagihan dan pelunasan tagihan penyediaan tenaga ahli Rekind kepada RDMP Balikpapan JO dalam satu tahun ke depan;
- Mengajukan restitusi atas kelebihan bayar pajak pertambahan nilai untuk tahun pajak 2021-2022 dalam satu tahun ke depan;
- Secara aktif mencari peluang proyek baru dan mengatur strategi untuk mendapatkan peluang menang lebih besar seperti membentuk operasi bersama atau konsorsium serta mengambil peran sebagai subkontraktor;
- Menerapkan efisiensi biaya dengan meminimalisir pengeluaran yang tidak diperlukan (penghematan listrik, mengurangi perjalanan kerja, mengurangi jumlah karyawan kontrak, tunjangan karyawan, dan lain-lain).

38. GOING CONCERN OF REKIND

As at 31 December 2022, Rekind has negative working capital and capital deficiency of Rp6,579,793 and Rp6,865,926, respectively, and for the year then ended, Rekind recorded loss for the year of Rp1,314,761 and negative net cash flows from operating activities of Rp143,314. Rekind has also breached certain borrowings covenants with several banks, related to the requirement to maintain minimum financial ratio covenants.

These conditions indicate the existence of a material uncertainty that may cast significant doubt about the ability of Rekind to continue as a going concern.

Rekind has taken various actions to protect the business and financial conditions as follows:

- *Planning to divest most of its investment in subsidiaries;*
- *Maximising the effort to obtain approvals on extension of time from the project owners in order to waive Rekind's liability to pay delay liquidated damage;*
- *Maximising the effort to obtain approval on Change Order ("CO") for all ongoing projects, particularly for Jambaran Tiung Biru ("JTB") project;*
- *Maximising the effort to obtain cash settlement for Rekind's manpower supply billing to RDMP Balikpapan JO within the next one year;*
- *Claiming for refund of the value added tax overpayment for 2021-2022 fiscal years within the next one year;*
- *Proactively looking for new potential projects and establishing a strategy to heighten the chance of winning the projects by implementing joint operation or consortium arrangement as well as taking subcontractor role;*
- *Implementing cost efficiency plan by minimising unnecessary expenditure (i.e. electricity, business trip, contract employees, employee bonus, etc.).*

38. KELANGSUNGAN USAHA REKIND (lanjutan)

Berkaitan dengan kondisi tersebut, keberhasilan upaya Rekind untuk melindungi kondisi keuangannya sangat bergantung pada keberhasilan untuk memperoleh persetujuan CO JTB dan dukungan dari Perusahaan, sebagai entitas induk Rekind. Berdasarkan data historis, tingkat keberhasilan Rekind dalam memperoleh persetujuan CO JTB adalah sebesar 70%, dimana terdapat pengajuan CO sebesar USD78 juta (nilai penuh) yang masih dalam diskusi dengan pemilik proyek per 31 Desember 2022.

Rekind mendapat dukungan oleh Perusahaan dalam penyusunan rencana restrukturisasi bisnis dan keuangan Rekind yang sedang berlangsung. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, rencana restrukturisasi bisnis dan keuangan Rekind sedang dalam tahap finalisasi.

Perusahaan memiliki Perjanjian Pelayanan Jasa *Notional Pooling* ("PPJNP") dengan entitas anaknya dan Bank Mandiri sebagai bank yang ditunjuk menjadi pemberi jasa *cash pooling*. Rekind merupakan salah satu peserta dalam PPJNP, dan Perusahaan, dengan persetujuan yang telah diberikan oleh Bank Mandiri, memberikan batas penarikan dana yang memadai untuk dapat digunakan oleh Rekind apabila dibutuhkan untuk mendukung keberlangsungan usaha Rekind untuk periode sampai dengan 12 bulan sejak tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, dengan mengindahkan praktik tata kelola perusahaan yang baik yang berlaku untuk Rekind.

Secara keseluruhan, manajemen Rekind berkeyakinan bahwa rencana yang dijelaskan di atas akan dapat meningkatkan pendapatan dan memperbaiki profitabilitas dan juga likuiditas.

38. GOING CONCERN OF REKIND *(continued)*

Pertaining to these conditions, the success of Rekind's initiatives to protect the financial conditions are heavily reliant on the success of obtaining JTB CO approval and the support of the Company, as the parent entity of Rekind. Based on historical data, Rekind's success rate in obtaining the approval of JTB CO was 70%, where there was USD78 million (full amount) outstanding CO proposal which was still on discussion with the project owner as at 31 December 2022.

Rekind is supported by the Company in the preparation of Rekind's business and financial restructuring plan. As at the issuance date of these consolidated financial statements, the business and financial restructuring plan of Rekind is at finalisation stage.

The Company has Notional Pooling Service Agreement ("NPSA") with its subsidiaries and Bank Mandiri as the bank appointed as cash pooling service provider. Rekind is a participant of NPSA, and the Company, with the approval given by Bank Mandiri, provides sufficient drawdown limit which can be used by Rekind as necessary to support Rekind's going concern for the period of 12 months after the issuance date of the consolidated financial statements, by complying with the good corporate governance policies which are applicable for Rekind.

In overall, Rekind's management believes that the plan described above will be able to increase revenue and improve profitability as well as liquidity.

39. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Pada tanggal 11 Januari 2023, Grup melakukan pembayaran atas pinjaman bank jangka panjang kepada Bank Oke sebesar Rp45.798.

Pada tanggal 8 Februari 2023, PKT mengadakan pokok-pokok PJBG dengan No. 020.23/23/LTRHOA/GOKPL/LGL dan 11225/SP-BTG/2023 dengan Genting Oil Kasuri Pte. Ltd., untuk pembelian gas bumi di WK Kasuri dengan jangka waktu 17 tahun berturut-turut sejak gas bumi pertama dikirimkan.

39. SUBSEQUENT EVENTS

On 11 January 2023, the Group repaid long-term bank loan from Bank Oke amounting to Rp45,798.

On 8 February 2023, PKT entered into head of GSPA No. 020.23/23/LTR-HOA/GOKPL/LGL and 11225/SPBTG/2023 with Genting Oil Kasuri Pte. Ltd., to purchase natural gas in WK Kasuri with a period of 17 consecutive years since the first natural gas was delivered.